

PERUBAHAN RENJA

TAHUN 2024

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TAKALAR

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024.

Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar tahun 2023 memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada rencana strategis (RENSTRA) tahun 2023 – 2026 dan bersifat indikatif. Selanjutnya Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024 menjadi landasan atau pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Tahun Anggaran 2024.

Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dan ikut berpartisipasi hingga tersusunnya Perubahan Renja ini. Perlu disadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Renja Perubahan ini, oleh karena itu masukan serta saran sangat kami harapkan.

Akhirnya semoga Perubahan Rencana Kerja ini dapat dilaksanakan dengan baik dan menjadi acuan dalam pelaksanaan sejumlah program dan kegiatan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar agar kegiatan dapat berjalan lancar, tertib dan mencapai sasaran yang ditetapkan.

Takalar, Agustus 2024

Kepala Dinas,

H. ABDUL WAHAB, S.Sos., MSi

NIP.19671231198803107[illegible]

DAFTAR TABEL

TABEL II.1 Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 11

TABEL II.2 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang ada dalam APBD 2024..... 14

TABEL II.3 Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Pada APBD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Takalar Tahun 2024 Hingga Triwulan II..... 15

TABEL II.4 Rekapitulasi Capaian Anggaran Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan 18

TABEL II.5 Rekapitulasi Capaian Kinerja Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan 21

TABEL II.6 Capaian Indikator Kinerja Utama 2023, Asumsi Capaian Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2024, dan Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar Tahun 2025..... 24

TABEL II.7 Asumsi Capaian Tahun 2024 dan Target Tahun 2025 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar..... 27

TABEL II.8 Penetapan Target Indikator TPB/SDGs Kabupaten Takalar Tahun 2024..... 29

TABEL III.1 Tujuan, Sasaran Serta Target Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar Tahun 2024..... 38

TABEL III.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar..... 47

TABEL III.3 Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu Pada Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Tahun 2024..... 60

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR TABEL 2

DAFTAR ISI 3

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 4
1.2 Landasan Hukum 6
1.3 Maksud dan Tujuan 8
1.4 Sistematika Penulisan 9

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sampai dengan Triwulan II 10
2.1.1 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024 yang terakomodir di APBD 2024 11
2.1.2 Evaluasi program kinerja kegiatan dan sub kegiatan dalam pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024 13
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 19
2.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) 20
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) 23
2.2.3 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) 25
2.2.4 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) 25
2.3 Hambatan, upaya pencapaian dan rekomendasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Tahun 2024
2.3.1 Hambatan dalam pelaksanaan kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tahun 2024 sampai dengan triwulan II 28
2.3.2 Upaya dalam pencapaian pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tahun 2024 sampai dengan triwulan II 28
2.3.3 Rekomendasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024 sampai dengan triwulan selanjutnya 29

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

3.1 Tujuan dan Sasaran 30
3.2 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 44

BAB IV PENUTUP 4

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan bersasaran, maka diperlukan perencanaan pembangunan nasional.

Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka melakukan perubahan yang mengandung makna adanya kemajuan dan/atau perbaikan, pertumbuhan mencapai kondisi yang lebih baik dibanding keadaan sebelumnya. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi, dan politik sampai pada perkembangan adanya penyelarasan dengan konservasi lingkungan. Nilai dalam pembangunan adalah optimalisasi sumberdaya dengan tetap menjaga kesinambungan serta kualitas lingkungan yang baik. Perencanaan Pembangunan Daerah secara umum merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Lebih lanjut lagi, pembangunan yang dilakukan di daerah, diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang di hadapi dan mengembangkan potensi yang dimiliki guna meningkatkan daya saing daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta harus mendukung pelaksanaan pembangunan di tingkat nasional untuk mencapai cita-cita bersama sebagai suatu bangsa

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka setiap PD diharuskan untuk Menyusun Rencana Kerja PD (Renja PD) sebagai acuan perencanaan kegiatan PD untuk kurung waktu satu tahun. Penyusunan Renja PD ini mengacu pada Rancangan Awal RKPD, Renstra PD, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 360 ayat (1) dan ayat (3) mengamanahkan bahwa Perangkat Daerah menyusun rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada :

a. Rancangan Perubahan RKPD; dan
b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 perlu dilakukan penyesuaian target indikator kinerja Tahun 2024 melalui perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar Tahun 2024. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 dalam Pasal 361 ayat (1), Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360 ayat (3), terdiri atas:

a Perumusan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
b Penyajian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan Kabupaten Takalar Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun I (Pertama) pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar Kabupaten Takalar Tahun 2023 – 2026.

Dokumen ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar tahun 2024 dalam penyusunannya selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan memperhatikan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar Tahun 2024 selanjutnya menjadi landasan penyusunan Perubahan RKA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2024. Dalam menyempurnakan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil , maka

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l9 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara 2018 Nomor 184);
8. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 119);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah (Berita Negara 2019 Nomor 1789;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah, dan RencanaKerjaPemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2008 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor 223 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 223);
16. Peraturan Bupati Takalar Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 42);
17. Peraturan Bupati Takalar Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Kalender Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah Tahun 2024;

18. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar Nomor 559 Tahun 2023 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenTakalar Tahun Anggaran 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Maksud

Adapun Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

- Dihasilkannya dokumen perencanaan pembangunan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 yang karena adanya beberapa perubahan dari rencana kerja sebelumnya, sehingga dapat memberikan gambaran hubungan sinergitas antara kebijakan di tingkat nasional dengan kebijakan pemerintah daerah akibat terjadinya refocusing anggaran.
- Dirumuskannya pedoman perencanaan pembangunan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi para penyelenggara di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

b. Tujuan

Adapun Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar tidak lain adalah:

- Mengevaluasi kinerja pembangunan urusan kependudukan dan pencatatan sipil sampai triwulan 2 dan dapat mencarikan solusi atas permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan tahun berjalan.
- Mengarahkan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kedalam suatu strategi program/kegiatan.
- Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan seluruh program/kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar.

- Menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan RKA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Berisi mengenai Latar Belakang Penyusunan Renja, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan yang dipergunakan.

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sampai Triwulan II Tahun 2024

Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan Triwulan II, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Hambatan serta Upaya Pencapaian dan Rekomendasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024

BAB III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisikan rumusan tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024.

BAB IV. Penutup

Bab ini berisikan uraian penutup, yang menjelaskan poin-poin yang menjadi harapan berkenaan dengan pelaksanaa Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar Tahun 2024.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sampai dengan Triwulan II

Pada dasarnya penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar sampai dengan triwulan II. Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Evaluasi atas perencanaan bertujuan untuk mengetahui apa yang harus dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar. Secara garis besar, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024 sampai pada Triwulan II telah dicapai dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari tingkat pencapaian target yang rata-rata mencapai untuk penyerapan dana dan rata-rata mencapai untuk kinerja *output* dan *outcome* kegiatan.

Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*)dan dampak (*impact*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana,sumber daya manusia,laporan, buku dan indikator lainnya.

Rumusan Evaluasi dapat di lihat dari program dan kegiatan yang sesuai target, di bawah target, melebihi target serta faktor yang menjadi penghambat dan faktor pendukung tercapainya 100% Program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar.

Kegiatan evaluasi Renja SKPD dan pencapaian realisasi kinerja sampai dengan triwulan II ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Berikut tabel evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan Triwulan II Tahun 2024:

Tabel 2.1.1
Capaian Realisasi Kinerja Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar Sampai Pada Triwulan II Tahun 2024

Renja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar

Periode Pelaksanaan: Tahun 2024

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD:

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 20223		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun (5)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
												I		II		III		IV												
					K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6			7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17	18
			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																										
		2	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR																										
		2 12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				16.493.435.700		4.357.562.309				624.120.456								2.001.834.755	70,67%	42,25%						
		2 12 01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota**	**93%**	**Persen**	**16.319.435.700**	**21%**	**3.327.591.218**		**4.737.975.128**	**21%**	**602.315.156**	**21%**	**1.143.200.757**	**0%**		**0%**		**59,32%**	**1.661.788.467**	**59,32%**	**43,11%**	**57,60%**	**14.926.226.946**	**57,60%**	**81,23%**	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	
Persentase Capaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan		2 12 01 2,01	**Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase capaian laporan dalam Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	100%	Persen	62.000.000	25,00%	16.264.600	**100%**	**3.854.541.128**	17%	6.971.000	50%	3.318.000	0%		0%		40%	10.289.000	40%	31%	35,00%	26.553.600	35,00%	42,83%		
		2 12 01 2,01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah DokumenPerencanaan Perangkat Daerah	8	Dokumen	20.000.000	2	6.324.800	100%	33.230.000	-	1.971.000-	1	3.318.000					1	5.289.000	50%	53%	3	11.613.800	38%	58%		
		2 12 01 2,01 02	Koordinasi dan Penyususnan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA	4	Dokumen	20.000.000	1	4.939.800	2	10.000.000		-	1	-					-	-	0%	0%	1	4.939.800	25%	25%		
		2 12 01 2,01 03	Koordinasi dan Penyususnan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA	4	Dokumen	12.000.000	1	2.500.000	1	13.230.000	-	-	-	-					-	-	0%	0%	1	2.500.000	25%	21%		
		2 12 01 2,01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	10.000.000	1	2.500.000	1	5.000.000	1	5.000.000							1	5.000.000	100%	100%	2	7.500.000	50%	75%		
				Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																		**37,50%**	**38,22%**						
				Predikat Kinerja Kegiatan																		SR	SR						
		2 12 01 2,02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	100%	Persen	15.225.570.900	19,31%	2.698.528.132	100%	3.257.915.440	12,01%	517.126.700	24,49%	842.967.454	0%		0%		36,50%	1.360.094.154	36,50%	41,75%	28,41%	4.058.622.286	28,41%	26,66%		
Persentase Capaian Pelaporan Kinerja danKeuangan		2 12 01 2,02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1680	Orang	14.173.970.900	324	1.879.713.384	420	2.247.572.881	100	517.126.700	96	535.049.855					196	1.052.176.555	47%	47%	520	2.931.889.939	31%	21%		
				Jumlah Orang yang Menerima TPP	1680	Orang		324	688.314.748	420	1.000.342.559	-	-	110	307.917.599					110	307.917.599	26%	31%	434	996.232.347	26%	#DIV/0!		
		2 12 01 2,02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8	Dokumen	1.041.600.000	2	128.000.000	0	-	-	-	-	-					-	-	0%	0%	2	128.000.000	25%	12%		
		2 12 01 2,02 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Laporan	10.000.000	1	2.500.000	1	10.000.000	1	-	-	-					1	-	100%	0%	2	2.500.000	50%	25%		
				Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																		**43,21%**	**19,40%**						
				Predikat Kinerja Kegiatan																		SR	SR						
		2 12 1 02.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersedia	100%	Persen	10.000.000	2,78%	2.500.000	100%	7.400.000	22%	-	0%		0%		0%		50%		100%	0%	50%	2.500.000	50%	25%		
		2 12 1 2,03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4	Dokumen	2.000.000	1	2.500.000	1	2.400.000	1	-									100%	0%	2	2.500.000	50%	125%		
		2 12 1 2,03 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Da	Jumlah laporan barang milik daerah yang di	32	Laporan	8.000.000	-	-	8	5.000.000	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	38%	0%	3	-	9%	0%		
				Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																		**68,75%**	**0,00%**						
				Predikat Kinerja Kegiatan																		S	SR						
Persentase Capaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan		2 12 01 2,05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase capaian kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	100%	Persen	16.000.000	0,00%	-	100%	100%	7.500.000	0%	-	0%	-		0%		0%		0%	0%	0%	-	0%	0%		
		2 12 1 2,05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	48	Orang	16.000.000	-	-	48	2	7.500.000	0	-	0	-		-		-	-	0%	0%	-	-	0%	0%		
				Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																		**0,00%**	**0,00%**						
				Predikat Kinerja Kegiatan																		SR	SR						
Persentase Capaian Pelaporan Kinerja danKeuangan		2 12 01 2,06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	95%	Persen	118.000.000	12,98%	353.557.900	100%	170.046.000	5,13%	12.157.300	68,97%	120.421.600	0%		0%		76%	132.578.900	76%	77,97%	29,17%	#VALUE!	30,70%	#VALUE!		
		2 12 1 2,06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	40	Paket	4.000.000	-	-	10	2.000.000	-	-	10	1.988.300					10	1.988.300	100%	99%	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!		

| | | |

		2	12	02			**Program Pendaftaran Penduduk**	**Persentase Perekaman KTP el, Persentase penduduk yang sudah mempunyai KTP elektronik, Persentase Kepala Keluarga yang memiliki KK, Persentase Anak usia 0-17 tahun kurang 1(satu) hari**	**92%**	**Persen**	**84.000.000**	**25,00%**	**705.706.462**	**100%**	**726.434.000**	**15,74%**	**9.765.300**	**70,83%**	**279.907.770**	**0%**	-	**0%**	-	**83,33%**	**289.673.070**	**83,33%**	**39,88%**	46%	**995.379.532**	**50%**	**1185%**		
	Cakupan Perekaman KTP-EL, Penerbitan KTP-EL, KK, dan Penerbitan KIA	2	12	02	2,01		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Persentase pemenuhan pelayanan pendaftaran penduduk yang sesuai standar**	**100%**	Persen	22.000.000	25,00%	676.256.400	100%	659.834.000	25,00%	5.947.300	41,67%	258.839.000	0%	-	0%	-	67%	264.786.300	67%	40%	42%	941.042.700	42%	4277%		
		2	12	02	2,01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atras Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	36	Dokumen	10.000.000	9	641.986.400	9	639.834.000	2	4.047.300	4	252.809.000	-	-	-	-	6	256.856.300	67%	40%	15	898.842.700	42%	8988%		
		2	12	02	2,01	04	Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12	Laporan	12.000.000	3	34.270.000	3	20.000.000	1	1.900.000	1	6.030.000	-	-	-	-	2	7.930.000	67%	40%	5	42.200.000	42%	352%		
								Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																		**66,67%**	**39,90%**						
								Predikat Kinerja Kegiatan																		**S**	**SR**						
		2	12	2	02.02		**Penataan Pendaftaran Penduduk**	**Persentase pemenuhan penataan pendaftaran penduduk**	100%	Persen	50.000.000	0,00%	-	100%	41.600.000	22,22%	-	0,00%	-	0%	-	0%	-	22%	-	22%	0%	#VALUE!	-	#VALUE!	0%		
		2	12	2	2,02	2	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP -El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang tersedia	36	Dokumen	50.000.000	-	-	9	41.600.000	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	22%	0%	#VALUE!	-	#VALUE!	0%		
								Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																		**0,00%**	**0,00%**						
								Predikat Kinerja Kegiatan																		**SR**	**SR**						
		2	12	02	2,03		**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Persentase penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang tertib administrasi**	100%	Persen	12.000.000	25,00%	29.450.062	100%	25.000.000	0,00%	3.818.000	100,00%	21.068.770	0%	-	0%	-	100%	24.886.770	100%	100%	50%	54.336.832	50%	453%		
		2	12	2	2,03	1	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	4	Laporan	12.000.000	1	29.450.062	1	25.000.000	-	3.818.000	1	21.068.770	-	-	-	-	1	24.886.770	100%	100%	2	54.336.832	50%	453%		
								Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																		**100,00%**	**99,55%**						
								Predikat Kinerja Kegiatan																		**ST**	**ST**						
								Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)																		**62,96%**	**46,48%**						
								Predikat Kinerja Program																		**R**	**SR**						

Faktor pendorong pencapaian kinerja: Adanya kesadaran dan kerjasama dari segenap unsur pegawai pada Disdukcapil dalam pelaksanaan pelayanan publik

Faktor penghambat: : Anggaran yang tersedia belum dapat memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan pada TW 1

Faktor penghambat : Sarana dan prasana yang minim dalam pelaksanaan pelayanan keliling

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):

Faktor pendorong pencapaian kinerja: Adanya kesadaran dan kerjasama dari segenap unsur pegawai pada Disdukcapil dalam pelaksanaan pelayanan publik

		2	12	03			**Program Pencatatan Sipil**	**Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0 -18 tahun, Persentase kepemilikan akta kematian pada semua individu yang kematiannya dilaporkan, Persentase kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan, Persentase kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan**	**99%**	**Persen**	**42.000.000**	**19%**	**67.322.554**	**100%**	**30.000.000**	**12,50%**	**4.500.000**	**66,67%**	**11.393.718**	**0%**	**62.109.000**	**0%**	-	**83,33%**	**15.893.718**	**83,33%**	**52,98%**	**38%**	**#VALUE!**	**39%**	**#VALUE!**		

| | | |

		2	12	4	2,03		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan**	**Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang berkualitas**	100%	Persen	20.000.000	17%	25.133.575	100%	90.000.000	4%	-	46%	10.620.000	0%	-	0%	-	50%	10.620.000	50%	51%	70%	174.120.000	70%	77%		
		2	12	4	2,03	01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	8	Laporan	12.000.000	2	25.133.575	2	10.000.000	5	-	55	10.620.000	-	-	-	-	60	10.620.000	50%	51%	420	174.120.000	70%	77%		
		2	12	4	2,03	05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4	Laporan	8.000.000	-	-	1	80.000.000																	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																										**50,00%**	**62,70%**								
Predikat Kinerja Kegiatan																										**SR**	**R**								
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)																										**65,00%**	**67,52%**								
Predikat Kinerja Program																										**R**	**S**								
Faktor pendorong pencapaian kinerja:																																			
Faktor penghambat:																																			
Faktor penghambat:																																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):																																			
		2	12	5			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama**	**100%**	**Persen**	**8.000.000**	**25%**	**107.380.000**	**100%**	**12.000.000**	**67%**	**2.480.000**	**0%**	**8.880.000**	**0%**	-	**0%**	-	**67%**	**11.360.000**	**67%**	**95%**	**42%**	**118.740.000**	**42%**	**1484%**		
		2	12	5	2,01		**Penyusunan Profil Kependudukan**	**Persentase capaian Penyusunan Buku Profil kependudukan**	100%	Persen	8.000.000	25%	107.380.000	100%	12.000.000	67%	2.480.000	0%	8.880.000	0%	-	0%	-	67%	11.360.000	67%	95%	42%	118.740.000	42%	1484%		
		2	12	5	2,01	1	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	12	Dokumen	8.000.000	3	107.380.000	3	12.000.000	2	2.480.000	-	8.880.000	-	-	-	-	2	11.360.000	67%	95%	5	118.740.000	42%	1484%		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																										**66,67%**	**94,67%**								
Predikat Kinerja Kegiatan																										**S**	**ST**								
Total Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)																										**66,23%**	**57,97%**								
Predikat Kinerja Program																										**S**	**R**								

Takalar, Agustus 2024

Kepala Dinas

H.Abdul Wahab, S.Sos., M. Si

NIP. 19671231 1988031076

2.1.1 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024 yang terakomodir di APBD 2024

Informasi tentang Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar Tahun 2024 yang terakomodir di APBD Tahun 2024 memberikan gambaran seberapa banyak jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar pada Tahun 2024. Adapun jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan dimaksud dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel II.2

Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang ada dalam APBD 2024

APBD 2024							
No	**Perangkat Daerah**	**Jumlah Program**	**Jumlah Kegiatan**	**Jumlah Sub Kegiatan**	**Indikator**		
					Jumlah Program	**Jumlah Kegiatan**	**Jumlah Sub Kegiatan**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	15	31	5	15	31

Sumber: Renja Pokok 2024 dan SIPD 2024

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah program sebanyak 5, jumlah kegiatan 15, dan jumlah sub kegiatan 31, Sedangkan untuk jumlah indikator program sebanyak 5, jumlah indikator kegiatan sebanyak 15, dan jumlah indikator sub kegiatan sebanyak 31.

2.1.2 Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja APBD Triwulan II Tahun 2024

Informasi tentang realisasi anggaran kegiatan memberikan gambaran seberapa besar anggaran yang telah terserap pada Triwulan II untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam APBD 2024. Gambaran sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.3

Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Pada APBD
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Takalar Tahun 2024
Hingga Triwulan II

No	Program	Pagu APBD	Realisasi S/D Triwulan II	Persentase	
		(Rp)	(Rp)	Fisik	Keu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota	3.854.541.128	1.661.788.467	59,32	43,11
2	Pendaftaran Penduduk	726.434.000	289.673.070	83,33	39,88
3	Pencatatan Sipil	30.000.000	15.893.718	83,33	52,98
4	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	115.000.000	23.119.500	60,71	20,10
5	Profil Kependudukan	12.000.000	11.360.000	67	95
	Total	**4.737.975.128**	**2.001.834.755**	**70,67%**	**42,25%**

Sumber : Laporan Realisasi Renja Disdukcapil Tahun 2024 Triwulan II

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa total jumlah anggaran yang terealisasi dalam APBD untuk pelaksanaan kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Semester I Tahun 2024 sebesar Rp. 2.001.834.755,- anggaran tersebut dilaksanakan dalam 5 Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar. Realisasi serapan anggaran dari pelaksanaan kegiatan hingga triwulan II adalah sebesar 42,25 % dengan capaian realisasi fisik sebesar 70,67 %. Kondisi ini menunjukkan capaian realisasi fisik sudah cukup baik karena telah melampaui target 50 persen yang diharapkan pada triwulan II. Semua program dari 5 program yang ada dapat dikategorikan memiliki kinerja baik atau kategori Tinggi dari sisi realisasi fisik dan 1 program dengan penyerapan anggaran dengan kategori Sangat Tinggi sebab persentase diperoleh telah mencapai nilai 95 persen. Adapun Program yang dapat dikategorikan berkinerja baik dengan tingkat capaian realisasi anggaran yang sangat tinggi adalah:

1. Program Profil Kependudukan;

Sebagian besar penyerapan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hingga triwulan II dalam kategori sedang yaitu >20 - <43persen dengan jumlah sebanyak 4 (Tiga) Program atau 80 persen dari jumlah keseluruhan Program, selebihnya sebanyak 1(Satu) Program atau 20 persen dari jumlah keseluruhan Program dengan realisasi anggaran yang tergolong Tinggi dengan serapan anggaran lebih dari >50 persen hingga triwulan II.

2.1.2.1 Evaluasi Capaian Pendanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024

Informasi tentang capaian pendanaan memberikan gambaran capaian berdasarkan realisasi anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimulai dari program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terdapat pada Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Capaian kinerja pendanaan tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori **Rendah** untuk realisasi 0 – 20%, Kategori **Sedang** Untuk realisasi anggaran lebih besar dari >20 – 43 persen dan kategori **Tinggi** untuk realisasi anggaran diatas 43 persen. Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 43 persen didasarkan atas tingkat capaian yang diharapkan untuk triwulan II adalah 43 persen, sehingga jika terdapat realisasi dengan capaian realisasi pendanaan lebih dari 43 persen dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi.

Evaluasi Hasil capaian pendanaan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II Sebagai berikut:

1. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Program

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pendanaan pada level program anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menggunakan kategori tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa jumlah program yang dilaksanakan anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 5 program dengan rincian capaian yang masuk pada kategori rendah tidak ada atau 0% (realisasinya 0-20 persen). Untuk capaian kinerja kategori sedang sebanyak 2 program atau 40 persen (realisasi >20-43 persen), dan untuk capaian kinerja kategori tinggi sebanyak 3 program atau 60 persen (realisasi diatas 43 persen).

2. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Kegiatan

Untuk evaluasi pelaksanaan Capaian kinerja pendanaan pada level kegiatan pada masing-masing perangkat daerah dapat dijelaskan bahwa terdapat 15 kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2024. Dari keseluruhan kegiatan tersebut terdapat 2 kegiatan atau 13,33 persen yang realisasi pendanaannya hingga triwuan II masih dalam kategori rendah yaitu 0 – 20 persen, sedang yang berada dalam kategori sedang sebanyak 4 kegiatan atau 26,67 persen, dan kategori tinggi dengan capaian realisasi diatas 43 persen sebanyak 9 kegiatan atau 60 persen.

3. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Sub Kegiatan

Adapun evaluasi capaian kinerja pendanaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada level sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 31 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2024 terdapat 9 sub kegiatan atau 29,04 persen yang capaian kinerja pendanaanya masih rendah, sedangkan yang masuk dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan sedang terdapat 6 sub kegiatan atau 19,35 persen, dan 16 sub kegiatan dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan tinggi atau 51,61 persen sebab telah dapat mencapai realisasi pendanaan lebih dari 43 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan II.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas capaian kinerja pendanaan berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL II.4
REKAPITULASI CAPAIAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No. Urut	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat capaian pendanaan			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat capaian pendanaan			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan berdasarkan tingkat capaian pendanaan		
		0-20%	>20-43%	>43%		0-20%	>20-43%	>43%		0-20%	>20-43%	>43%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1.	5	0	4	1	15	2	4	9	31	9	6	16

Sumber : Laporan Realisasi Renja Disdukcapil Tahun 2024 Triwulan II

Keterangan:

0-20	Rendah
>20-43	Sedang
>43	Tinggi

2.1.2.2 Evaluasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024

Informasi tentang capaian kinerja memberikan gambaran capaian kinerja realisasi target kinerja pada masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Capaian kinerja tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori **Rendah** dengan realisasi 0 – 20 persen, Kategori **Sedang** untuk realisasi kinerja lebih besar dari 20 – 43 persen dan kategori **Tinggi** dengan realisasi kinerja diatas 43 persen. Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 43 persen didasarkan atas tingkat capaian yang diharapkan untuk triwulan II adalah 43 persen, sehingga jika terdapat capaian realisasi kinerja lebih dari 45 persen dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi.

Kegiatan evaluasi Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta pencapaian realisasi kinerja sampai dengan triwulan II ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

1. Evaluasi Capaian Kinerja Outcome pada Level Program

Untuk evaluasi pelaksanaan kinerja outcome pada level program dapat digambarkan sebagai berikut: untuk pencapaian target kinerja program pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dijelaskan bahwa dari 5 Program yang dilaksanakan sampai dengan triwulan kedua tidak terdapat capaian kinerja atau 0% program yang masuk pada kategori rendah atau dibawah 20 persen, begitupun pencapaian kinerja dengan kategori sedang (diatas 20-43 persen) tidak ada program atau 0% program yang msuk kategori sedang, semua program atau 100% yang capaian kinerja masuk dalam kategori tinggi yang pencapaiannya lebih dari 43 persen pada triwulan II Tahun 2024.

2. Evaluasi Capaian Kinerja *Outcome* pada Level Kegiatan

Sebagai gambaran pencapaian target kinerja kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 15 kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan kedua terdapat 0 kegiatan (0 persen) yang capaian kinerjanya kategori masih rendah atau dibawah 20 persen, sedangkan yang capaian kinerja kategori sedang terdapat 3 kegiatan (20 persen), selebihnya terdapat 12 kegiatan (80 persen)

yang capaian kinerja masuk dalam kategori pencapaian lebih dari 43 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan II Tahun 2024.

3. Evaluasi Capaian Kinerja *Outcome* pada Level Sub Kegiatan

Sebagai gambaran pencapaian target kinerja sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 31 sub kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan kedua dapat dijelaskan bahwa yang capaian kinerja masih rendah atau dibawah 20 persen terdapat 5 sub kegiatan (16,13 persen), sedangkan yang capaian kinerja sedang sebanyak 3 kegiatan (9,68 persen), selebihnya yang capaian kinerja masuk dalam kategori tinggi sebanyak 23 sub kegiatan (74,19 persen), yaitu pencapaian lebih dari 43 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan II Tahun 2024.

Evaluasi Hasil capaian kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL II.5
REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No. Urut	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat capaian kinerja outcome			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat capaian kinerja outcome			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan berdasarkan tingkat capaian kinerja outcome		
		0-20%	>20-43%	>43%		0-20%	>20-43%	>43%		0-20%	>20-43%	>43%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1.	5	0	0	5	13	0	3	12	24	5	3	23

Sumber : Laporan Realisasi Renja Disdukcapil Tahun 2024 Triwulan II

Keterangan:

0-20	Rendah
>20-43	Sedang
>43	Tinggi

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Analisis kinerja pelayanan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja OPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai target indikator sasaran dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan. Untuk menganalisis kinerja pelayanan atau tingkat capaian kinerja sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar tahun 2024 sampai dengan Triwulan II dan pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah.Proses ini dimaksud untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan sasaran. Pencapaian setiap indikator kinerja dilakukan dengan metedologi perbandingan capaian kinerja dengan target kinerja tahun 2024 sampai dengan triwulan II sebagai tolak ukur dari keberhasilan suatu kegiatan.

Dalam Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip, yakni 1) Sederhana, 2) Partisipatif, 3). Akuntabel, 4) Berkelanjutan, 5) Transparansi dan 6) Keadilan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan instansi yang berhubungan langsung dengan masyarakat yang bertugas memberikan pelayanan dalam pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil seperti pelayanan pendaftaran penduduk, diantaranya untuk pengurusan KTP-EL, KK, KIA, Pindah Datang Penduduk, serta pelayanan pencatatan sipil yang diantaranya berupa pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengesahan anak dan pengakuan anak, dan lainnya.

Agar sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar dapat tercapai , maka diperlukan poin-poin yang menjadi indikator kinerja sebagai tolak ukur penilaian dalam menentukan keberhasilan dari suatu kegiatan. Ada beberapa indikator kinerja yang dapat diukur untuk melihat capaian pelayanan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, seperti Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci, dan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB/SDGs).

2.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh Kepala Dinas. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran Organisasi. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program. Penetapan Target indikator kinerja utama selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini.

Indikator kinerja dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait target capaian keberhasilan dalam mewujudkan arah kebijakan RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang digariskan pada tahun yang penetapannya dijadikan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Penetapan IKU daerah merupakan ukuran tingkat keberhasilan pencapaian indikator sasaran RENSTRA yang digariskan pada Tahun 2024. Penetapan IKU juga merupakan upaya pencapaian prioritas pembangunan Kabupaten Takalar. Lebih lanjut Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini :

Tabel II.6
Capaian Indikator Kinerja Utama 2023, Asumsi Capaian Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2024, dan Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023		Asumsi Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2024
			Target	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	Persen	90	92	92	93
2	Persentase penduduk yang berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP	Persen	98	98	98	98
3	Persentase Anak Usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir	Persen	97	48	97	98
4	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	50	27	50	55
5	Persentase Penerbitan Akta Perkawinan	Persen	100	0	100	100

6	Persentase Penerbitan Akta Perceraian	Persen	100	0	100	100
7	Cakupan penerbitan Akta Kematian	Persen	85	100	100	100
8	Persentase Penyajian Data Base Kependudukan yang akurat	Persen	100	100	100	100
9	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian Kerjasama	Persen	50	50	50	55
9	Nilai SAKIP Disdukcapil	Nilai	B	BB	BB	BB

Sumber: Data Agregat Kependudukan

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Indikator Kinerja Kunci disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintah kabupaten. Penetapan target indikator kinerja kunci selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel II.7

Asumsi Capaian Tahun 2024 dan Target Tahun 2025 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar

No.	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Realisasi Capaian Tahun 2023	Asumsi Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025
1	Persentase penduduk yang berumur 17 tahun ke atas yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).	Persen	98	98	98
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA	Persen	27	50	55
3	Persentase Anak Usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir	Persen	43	98	98
4	Persentase OPD yang telah 25% memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian Kerjasama	Persen	50	50	55
5	Persentase Penerbitan Akta Perkawinan	Persen	N/A	100	100
6	Persentase Penerbitan Akta Perceraian	Persen	N/A	100	100
7	Persentase Penerbitan Akte Kematian	Persen	100	100	100
8	Persentase Penyajian Data Kependudukan	Buah	3	3	3
9	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/Belum	Sudah	Sudah	Sudah

Sumber: Data Agregat Kependudukan

2.2.3 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar bukan pengampuh indikator SPM.

2.2.4 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan /Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistainable Development Goals (TPB/SDGs) kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global. TPB/SDGs bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan. Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penetapan target tahun 2024 indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistainable Development Goals (TPB/SDGs) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disajikan pada tabel berikut:

Tabel II.8

Penetapan Target Indikator TPB/SDGs Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar Tahun 2024

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target 2024	OPD Penang. Jawab
	Tujuan 1 : Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun					
	1.4. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.					
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	47	97	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Tujuan 16 : Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan					
	16.9.Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.					
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	N/A	N/A	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk	Dinas Kependudukan dan	%	N/A	N/A	Dinas

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target 2024	OPD Penang. Jawab
	penduduk 40% berpendapatan bawah.	Pencatatan Sipil				Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	47	97	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Tujuan 17 : Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan					
	17.19.Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.					
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.3 Hambatan, Upaya Pencapaian dan Rekomendasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024

2.3.1 Hambatan Dalam Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan Triwulan II

Hambatan dan kendala dalam pelaksanakan kegiatan triwulan kedua dipengaruhi oleh:

1. Adanya peraturan pemerintah pusat yang menyebabkan harus dilakukan penyesuaian anggaran.
2. Terdapatnya beberapa kegiatan yang proses pengadaan barang dan jasanya belum dilaksanakan, baik dikarenakan masih dalam tahapan proses lelang ataupun belum masuk pada tahapan kegiatannya.
3. Terdapatnya beberapa belanja barang yang harga dan spesifikasinya tidak lagi sesuai dengan harga saat ini.
4. Perlunya Dukungan keterampilan tambahan bagi sumberdaya aparatur pengelola kegiatan untuk melakukan pengukuran atau estimasi perencanaan program terhadap alokasi anggaran yang dialokasikan baik yang dipengaruhi oleh fluktuasi aktifitas kedewanan maupun kalkulasi evaluasi pada program dan kegiatan.

2.3.2 Upaya Dalam Pencapaian Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan Triwulan II

Merujuk dari faktor penghambat Pelaksanaan rencana kerja Dinas Kependududkan dan Pencatatan Sipil sampai dengan triwulan ke II tentunya mengalami berbagai kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Berikut dapat disampaikan beberapa upaya yang dilakukan dalam pencapaian keberhasilan kinerja :

1. Adanya komitmen pimpinan dan Koordinasi yang baik untuk melaksanakan kegiatan secara maksimal;
2. Adanya koordinasi/konsultasi yang sinergi antar struktur jabatan internal dan eksternal serta adanya komunikasi yang terjalin antar pemimpin dan yang dipimpin dalam organisasi;
3. Tersedianya Sarana dan prasarana pendukung yang memadai;
4. Penyerapan program dan kegiatan masing-masing bidang dan kesekretariatan berjalan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan;
5. Adanya pedoman/dokumen Standar Pelayanan/SOP dan regulasi yang sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan;

6. Kualitas SDM yang mampu, terampil dan memadai serta memiliki komitmen dan motivasi untuk melakukan tugas dan fungsi secara maksimal dalam rangka memberikan pelayanan prima.

2.3.3. Rekomendasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024 sampai dengan Triwulan Selanjutnya

Berdasarkan uraian di atas terkait faktor penghambat pencapaian kinerja, serta upaya dalam pencapaian pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyampaikan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Meningkatkan komunikasi dan integrasi program dalam lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta pengendalian dan evaluasi internal yang dilakukan secara terus menerus;
2. Perlunya Peran aktif seluruh KPA dan PPTK didalam mengawal pelaksanaan Program dan Kegiatan yang berjalan;
3. Peran aktif Kepala Dinas selaku PA didalam mengawasi, mengontrol dan membuat kebijakan serta keputusan;
4. Peran aktif Sub Bagian Perencanaan Program didalam berkoordinasi termasuk memberikan informasi, sosialisasi maupun kebijakan-kebijakan lainnya;
5. Perlunya tenaga SDM yang berkompeten didalam perencanaan;
6. Peningkatan kualitas SDM aparatur serta jumlah staf yang berkompeten;
7. Peningkatan sarana dan prasarana operasional sesuai dengan kebutuhan;
8. Menyediakan informasi kependudukan dalam rangka perencanaan pembangunan dan kepentingan publik;
9. Perlunya melakukan penyusunan Renstra Disdukcapil yang baik, diawali dengan orientasi dan melibatkan seluruh pejabat/staf;
10. Perlunya melakukan evaluasi dan monitoring secara terus menerus dan berkelanjutan yang diiringi dengan pengelolaan data yang baik;
11. Adanya Kesesuaian Renstra dan RPJMD dalam pelaksanaan kegiatan;
12. Dalam penyusunan dokumen perencanaan tahap berikutnya memiliki data dan informasi yang akurat, sehingga perencanaan dan penganggaran dapat dilakukan dengan baik, efektif, dan efisien.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 mengacu pada RPD yang di dalamnya memuat Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 .

Adapun Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai tahun 2024 sebagai penjabaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2023-2026 dan disesuaikan dengan tupoksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan menyesuaikan dengan kebijakan pembangunan nasional 2023-2026, dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel III.1

Tujuan, Sasaran Serta Target Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar Tahun 2024

NO	Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Asumsi Capaian Tahun 2024
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
1.	Tujuan 1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil		Indeks kepuasan Masyarakat atas layanan kependudukan dan pencatata sipil	Nilai	84,70	83,35
		Sasaran 1.1 Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase tertib Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (KTP EL+ KK + KIA+AKTA LAHIR + AKTA KEMATIAN+ AKTA NIKAH+AKTA CERAI)	Persen	84,5	85
		Sasaran 1.2 Meningkatnya kualitas pengelolaan Informasi administrasi kependudukan dan pencatatan sip	Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian Kerjasama	Persen	50	50

NO	Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Asumsi Capaian Tahun 2024
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			Persentase Penyajian Database Kependudukan yang akurat	Persen	100	100
2.	Tujuan 2 Meningkatkan Tata Kelola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai	N/A	N/A
		Sasaran 2.1 Meningkatnya Tata kelola Kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai SAKIP Disdukcapil	Nilai/Predikat	70,44 / BB	71,05 / BB

3.2 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar disusun guna menjadi acuan dalam pelaksanaan sejumlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setelah adanya perubahan dalam rencana kerja, yang diharapkan target capaian kinerja masing-masing bidang tercapai sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Tahun 2023-2026 disusun suatu Rencana Kinerja Tahunan (*Yearly Performance Plan*). Rencana Kerja merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indicator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategik maupun tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar Tahun 2024 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Perubahan Rencana Kinerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan yang baru untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar adalah dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar.

Di dalam Perubahan Renja Tahun 2024 ini terdapat rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, dimana di dalammya terdapat 5 Program, 15 Kegiatan serta 31 Sub Kegiatan, dimana untuk penyebaran kegiatannya adalah untuk kegiatan rutin berlokasi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar , sedangkan yang sifatnya mempunyai sasaran kelompok masyarakat berlokasi pada Kecamatan ataupun Desa/Kelurahan, dan kegiatan yang sifatnya koordinasi selain berlokasi pada Daerah setempat yakni pada Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar serta ada juga yang berlokasi di luar daerah.

Jumlah dana yang program ,kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan Renja Dinas Kependudkan dan Pencatatan Sipil yang dimaksud bersumber dari Dana Alakosi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp. 4.654.233.524.

Rumusan perubahan rencana program dan kegiatan tahun 2024 beserta pendanaan yang diharapkan dapat terlaksananya tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL III.2
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAKALARTAHUN 2024

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target Kinerja 2024			Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																	
	2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
	2	**12**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**4.737.982.148**	**4.737.982.148**	**4.654.233.524**							**4.707.742.036,00**	
	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	93%	89,50%	93%	93%	93%	3.854.548.148	3.854.548.148	3.770.799.524		DAU/Pajak Daerah				93%	3.747.742.036,00	
	2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian laporan dalam Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase pemenuhan perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	33.230.000	33.230.000	33.230.000	Takalar	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Disdukcapil	100 %	40.000.000,00	

	2	1 2	0 1	2.0 1	000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Takalar	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Disdukcapil	3 Dokumen	10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1 2	0 1	2.0 1	000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	13.230.000	13.230.000	13.230.000	Takalar	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Disdukcapil	1 Dokumen	15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1 2	0 1	2.0 1	000 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Takalar	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Disdukcapil	1 Dokumen	5.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1 2	0 1	2.0 1	000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Takalar	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Disdukcapil	1 Laporan	10.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1 2	0 1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	81,47%	100%	100%	100%	3.257.915.440	3.257.915.440	3.174.166.816	Takalar	DAU/Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Disdukcapil	100%	2.813.933.900,00	

	2	1 2	0 1	2.0 2	000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	144 Orang/bula n	86%	35 Orang/bula n	35 Orang/bula n	35 Orang/bulan	3.247.915.44 0	3.247.915.44 0	3.164.166.81 6	Takalar	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Disdukcapil	35 Orang/bula n	2.803.933.900,0 0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1 2	0 1	2.0 2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Takalar	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Disdukcapil	1 Laporan	10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1 2	0 1	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase capaian kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah	100%	100%	100%	100%	100%	7.400.000	7.400.000	7.400.000	Takalar	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Disdukcapil	100%	15.000.000,00	
	2	1 2	0 1	2.0 3	000 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.400.000	2.400.000	2.400.000	Takalar	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Disdukcapil	1 Dokumen	5.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	2	1 2	0 1	2.0 3	000 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	32 Laporan	100%	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Takalar	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Disdukcapil	8 Laporan	10.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1 2	0 1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase capaian kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase pemenuhan kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	95%	0%	95%	95%	95%	7.500.000	7.500.000	7.500.000	Takalar	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Disdukcapil	95%	7.500.000	
	2	1 2	0 1	2.0 5	000 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	0%	2 Orang	2 Orang	2 Orang	7.500.000	7.500.000	7.500.000	Takalar	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Disdukcapil	2 Orang	7.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1 2	0 1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	95 Persen	100%	95 Persen	95 Persen	95 Persen	170.046.000	170.046.000	170.046.000	Takalar	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Disdukcapil	95%	491.859.068,00	

	2	1 2	0 1	2.0 6	000 1	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	40 Paket	100%	10 Paket	10 Paket	10 Paket	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Takalar	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Disdukcapil	10 Paket	4.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1 2	0 1	2.0 6	000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	100%	7 Paket	7 Paket	7 Paket	32.331.300	32.331.300	32.331.300	Takalar	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Disdukcapil	10 Paket	50.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1 2	0 1	2.0 6	000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	80 Paket	100%	20 Paket	20 Paket	20 Paket	100.012.700	100.012.700	100.012.700	Takalar	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Disdukcapil	20 Paket	50.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1 2	0 1	2.0 6	000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Takalar	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Disdukcapil	1 Dokumen	5.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	2	1 2	0 1	2.0 6	000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	33.202.000	33.202.000	33.202.000	Takalar	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Disdukcapil	1 Laporan	50.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1 2	0 1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	331.859.688	331.859.688	331.859.688	Takalar	DAU/Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Disdukcapil	85 Persen	332.859.068,00	
	2	1 2	0 1	2.0 8	000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	91.459.688	91.459.688	91.459.688	Takalar	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Disdukcapil	12 Laporan	91.459.068,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1 2	0 1	2.0 8	000 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4.000.000	4.000.000	4.000.000	Takalar	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Disdukcapil	1 Laporan	5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1 2	0 1	2.0 8	000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	236.400.000	236.400.000	236.400.000	Takalar	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Disdukcapil	1 Laporan	236.400.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	2	1 2	0 1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	95%	100%	95%	95%	95%	46.590.000	46.590.000	46.590.000	Takalar	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Disdukcapil	95 %	46.590.000,00	
	2	1 2	0 1	2.0 9	000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	100%	4 Unit	4 Unit	4 Unit	46.590.000	46.590.000	46.590.000	Takalar	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Disdukcapil	4 Unit	46.590.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	2	1 2	02		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Perekaman KTP-el, Persentase Anak Usia 01-7 Tahun Kurang 1 (satu) hari yang Memiliki KIA, Persentase Kepala Keluarga yang memiliki KK, Persentase penduduk yang sudah mempunyai KTP Elektronik,	90%	100%	87%	87%	87%	726434000	726434000	726434000		Pajak Daerah					710.000.000,00	
	2	1 2	0 2	2.0 1		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase pemenuhan pelayanan pendaftaran penduduk yang sesuai standar pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	659.834.000	659.834.000	659.834.000	Takalar	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat	100%	630.000.000,00	

	2	1 2	0 2	2.0 1	000 2	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	9 Dokumen	100%	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	659.834.000	659.834.000	659.834.000	Takalar	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat	9 Dokumen	600.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1 2	0 2	2.0 1	000 4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Takalar	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat	3 Laporan	30.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1 2	0 2	2.0 2		Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase pemenuhan penataan pendaftaran penduduk	100%	100%	100%	100%	100%	41.600.000	41.600.000	41.600.000	Takalar	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat	100%	50.000.000	
	2	1 2	0 2	2.0 2	000 2	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	4 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	41.600.000	41.600.000	41.600.000	Takalar	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat	1 Dokumen	50.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	2	1 2	0 2	2.0 3		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang tertib administrasi kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Takalar	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat	100%	30.000.000	
	2	1 2	0 2	2.0 3	000 1	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	4 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Takalar	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat dan Disdukcapil	1 Laporan	30.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	3	2	1 2	03		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-18 tahun Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan Persentase kepemilikan akta kematian pada semua individu yang kematiaannya dilaporkan Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	100%	83,33%	99%	99%	99%	30.000.000	30.000.000	30.000.000		Pajak Daerah				99%	75.000.000,00	

	2	1 2	0 3	2.0 1		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase pemenuhan pelayanan pencatatan sipil yang sesuai dengan standar pelayanan	95%	100%	95%	95%	95%	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Takalar	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat	99%	50.000.000,00	
	2	1 2	0 3	2.0 1	000 1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	13 Dokumen	100%	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Takalar	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat	13 Dokumen	25.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1 2	0 3	2.0 1	000 2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	12 Layanan	100%	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Takalar	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat	3 Layanan	25.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1 2	0 3	2.0 2		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase penyelenggara an pendaftaran penduduk yang tertib administrasi pencatatan sipil	100%	67%	100%	100%	100%	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Takalar/Luar Daerah	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat	100%	25.000.000,00	

	2	1 2	0 3	2.0 2	000 2	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	4 Laporan	67%	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Takalar	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat dan Disdukcapil	1 Laporan	25.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	4	2	1 2	04		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun Persentase Pemanfaatan data kependudukan	100%	100%	99%	99%	99%	115.000.000	115.000.000	115.000.000		Pajak Daerah				99%	125.000.000,00	
	2	1 2	0 4	2.0 1		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan yang tersedia	100%	100%	100%	100%	100%	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Takalar	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat	99%	50.000.000,00	

	2	1 2	0 4	2.0 1	000 1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	8 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Takalar	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat	2 Dokumen	25.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1 2	0 4	2.0 1	000 2	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	20 Dokumen	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Takalar	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat	5 Dokumen	25.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1 2	0 4	2.0 3		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduka n yang berkualitas Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang berkualitas	100%	100%	100%	100%	100%	90.000.000	90.000.000	90.000.000	Takalar	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat	100%	75.000.000,00	
	2	1 2	0 4	2.0 3	000 1	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Takalar	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat	1 Laporan	25.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	2	1 2	0 4	2.0 3	000 5	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	80.000.000	80.000.000	80.000.000	Takalar	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat dan Disdukcapil	1 Laporan	50.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1 2	0 5			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase OPD yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama	100%	100%	100%	100%	100%	12.000.000	12.000.000	12.000.000		Pajak Daerah				100%	50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1 2	0 5	2.0 1		Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase capaian Penyusunan Buku Profil kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Takalar	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat	100%	50.000.000,00	
	2	1 2	0 5	2.0 1	000 1	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Takalar	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat	3 Dokumen	50.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

TABEL III.3
RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) TAHUN 2024

KABUPATEN : TAKALAR
PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target			Pagu			Keterangan
						Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	93%	93%	93%	3.854.548.148	3.854.548.148	3.770.799.524	
	2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian laporan dalam Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian laporan dalam Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	33.230.000	33.230.000	33.230.000	
	2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	

	2	12	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	13.230.000	13.230.000	13.230.000	
	2	12	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
	2	12	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
	2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%	100%	3.257.915.440	3.257.915.440	3.174.166.816	
	2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	3.247.915.440	3.247.915.440	3.164.166.816	
	2	12	01	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	

	2	12	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah	Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah	100%	100%	100%	7.400.000	7.400.000	7.400.000	
	2	12	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.400.000	2.400.000	2.400.000	
	2	12	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
	2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	Persentase pemenuhan kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	95%	95%	95%	7.500.000	7.500.000	7.500.000	
	2	12	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	2 Orang	2 Orang	7.500.000	7.500.000	7.500.000	
	2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	95 Persen	95 Persen	95 Persen	170.046.000	170.046.000	170.046.000	
	2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	10 Paket	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
	2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	7 Paket	32.331.300	32.331.300	32.331.300	

	2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	20 Paket	100.012.700	100.012.700	100.012.700	
	2	12	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
	2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	33.202.000	33.202.000	33.202.000	
	2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	331.859.688	331.859.688	331.859.688	
	2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	91.459.688	91.459.688	91.459.688	
	2	12	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4.000.000	4.000.000	4.000.000	
	2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	236.400.000	236.400.000	236.400.000	
	2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	95%	95%	95%	46.590.000	46.590.000	46.590.000	

	2	12	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4 Unit	4 Unit	46.590.000	46.590.000	46.590.000	
	2	2	12	02		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Perekaman KTP-el, Persentase Anak Usia 01-7 Tahun Kurang 1 (satu) hari yang Memiliki KIA, Persentase Kepala Keluarga yang memiliki KK, Persentase penduduk yang sudah mempunyai KTP Elektronik,	Persentase Perekaman KTP-el, Persentase Anak Usia 01-7 Tahun Kurang 1 (satu) hari yang Memiliki KIA, Persentase Kepala Keluarga yang memiliki KK, Persentase penduduk yang sudah mempunyai KTP Elektronik,	87%	87%	87%	726.434.000	726.434.000	726.434.000	
	2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase pemenuhan pelayanan pendaftaran penduduk yang sesuai standar pelayanan	Persentase pemenuhan pelayanan pendaftaran penduduk yang sesuai standar pelayanan	100%	100%	100%	659.834.000	659.834.000	659.834.000	
	2	12	02	2.01	0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	659.834.000	659.834.000	659.834.000	
	2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	
	2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase pemenuhan penataan pendaftaran penduduk	Persentase pemenuhan penataan pendaftaran penduduk	100%	100%	100%	41.600.000	41.600.000	41.600.000	

	2	12	02	2.02	0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	41.600.000	41.600.000	41.600.000	
	2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang tertib administrasi kependudukan	Persentase penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang tertib administrasi kependudukan	100%	100%	100%	25.000.000	25.000.000	25.000.000	
	2	12	02	2.03	0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000	25.000.000	25.000.000	

	3	2	12	03		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-18 tahun Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan Persentase kepemilikan akta kematian pada semua individu yang kematiaannya dilaporkan Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-18 tahun Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan Persentase kepemilikan akta kematian pada semua individu yang kematiaannya dilaporkan Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	99%	99%	99%	30.000.000	30.000.000	30.000.000	
	2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase pemenuhan pelayanan pencatatan sipil yang sesuai dengan standar pelayanan	Persentase pemenuhan pelayanan pencatatan sipil yang sesuai dengan standar pelayanan	95%	95%	95%	20.000.000	20.000.000	20.000.000	
	2	12	03	2.01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
	2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	15.000.000	15.000.000	15.000.000	
	2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase penyelenggara an pendaftaran penduduk yang tertib administrasi pencatatan sipil	Persentase penyelenggara an pendaftaran penduduk yang tertib administrasi pencatatan sipil	100%	100%	100%	10.000.000	10.000.000	10000000	

	2	12	03	2.02	0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
	4	2	12	04		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun Persentase Pemanfaatan data kependudukan	Persentase Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun Persentase Pemanfaatan data kependudukan	99%	99%	99%	115.000.000	115.000.000	115.000.000	
	2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan yang tersedia	Persentase data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan yang tersedia	100%	100%	100%	25.000.000	25.000.000	25.000.000	
	2	12	04	2.01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
	2	12	04	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	15.000.000	15.000.000	15.000.000	

	2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang berkualitas	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduka n yang berkualitas	100%	100%	100%	90.000.000	90.000.000	90.000.000	
	2	12	04	2.03	0001	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
	2	12	04	2.03	0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	80.000.000	80.000.000	80.000.000	
	2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase OPD yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama	Persentase OPD yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama	100%	100%	100%	12.000.000	12.000.000	12.000.000	
	2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase capaian Penyusunan Buku Profil kependudukan	Persentase capaian Penyusunan Buku Profil kependudukan	100%	100%	100%	12.000.000	12.000.000	12.000.000	
	2	12	05	2.01	0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	12.000.000	12.000.000	12.000.000	
												J U M L A H	**4.737.982.148**	**4.737.982.148**	**4.654.233.524**	

BAB IV
P E N U T U P

Dokumen Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar Tahun 2024 ini menjadi instrumen utama bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar dalam meningkatkan kinerja pembangunan melalui pembenahan administrasi kependudukan, peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan kepada Masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar tahun 2024 akan ditentukan oleh koordinasi dan sinergitas antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Bappelitbangda dan Badan Pengelola Keuangan Daerah, serta adanya pengendalian dan evaluasi yang cermat dan akurat. Oleh sebab itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar harus melakukan langkah-langkah penyempurnaan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sehingga bermanfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kemajuan daerah, terkhusus bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dokumen ini sekaligus menjadi acuan dalam mensinergikan program dan kegiatan antara program prioritas Pemeritah Daerah dengan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan dengan cakupan kewenangan, maka Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar Tahun 2024 mempunyai fungsi pokok;

1. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan seluruh program/kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar;
2. Menciptakan kepastian arah kebijakan dan program kegitan prioritas yang merupakan komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan pemangku kepentingan; dan
3. Menjadi acuan dalam menyusun Perubahan RKA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan pemangku kepentingan

Dalam pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar telah berpedoman pada kaidah - kaidah yang sudah ada yaitu RPJP dan RPJM Nasional serta RPJP dan RPJM Propinsi, visi dan misi kepala daerah Kabupaten Takalar, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dokumen Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar Tahun 2024 ini diharapkan akan menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil sehingga seluruh program dan kegiatan akan dapat dicapai secara terukur, terarah, efektif dan efisien sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Takalar, Juli 2024

Kepala Dinas,



H. ABDUL WAHAB, S.Sos.,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP.196712311988031076

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKATDAN DESA

KABUPATEN TAKALAR

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **I**

DAFTAR TABEL ..... **III**

DAFTAR GAMBAR ..... **IV**

BAB I PENDAHULUAN **I-2**

1.1 LATAR BELAKANG I-2
1.2 LANDASAN HUKUM I-8
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN I-11
1.3.1 Maksud *I-11*
1.3.2 Tujuan *I-11*
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN I-12

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA PERUBAHAN DINAS/DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2021 ..... II-1

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PERUBAHAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA II-1
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA II-33
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA II-48

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA III-1

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL III-1
3.1.1 Telaahan Kebijakan Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan *III-2*
3.2 TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA III-3
1.1.1 Tujuan *III-3*
1.1.2 Sasaran *III-3*

BAB IV RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA IV-1

4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2024 ..... V-1

BAB V PENUTUP V-1

1.2 CATATAN PENTING V-1
1.3 KAIDAH PELAKSANAAN V-1
1.4 RENCANA TINDAK LANJUT V-1

DAFTAR TABEL

Tabel II-1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa s/d Tahun 2021 Kabupaten Takalar I-2
Tabel II-2 Rekapitulasi Capaian Kinerja Program/Kegiatan dan sub Kegiatan II-32
Tabel II-3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa II-34
Tabel II-4 II-39
Tabel II-5 Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas.....II-42
Tabel II-6 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023..... II-50
Tabel II-7 USULAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN (MUSREMBANG) TAHUN 2022 ... II-95
Tabel II-8 USULAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN (POKIR) TAHUN 2022..... II-96
Tabel III-1 Kebijakan Nasional (Prioritas Nasional) Dalam RKP Tahun 2023 ..... III-2
Tabel III-2 Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2023..... III-4
Tabel IV-1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Takalar IV-1
Tabel IV-2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Takalar Berdasarkan Tujuan dan Sasaran IV-33

DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1 Keterkaitan Rencana Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat danDesa Tahun 2023 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya I-4

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rencana Perubahan Perubahan OPD) merupakan acuan perencanaan kegiatan OPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD. Adapun penyusunan Rencana Perubahan OPD merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Rencana Perubahan Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2024 tidak terlepas dari Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar 2023-2026. Terdapat beberapa kegiatan prioritas yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar antaranya adalah percepatan pencapaian target indikator RPD Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026. Serta peningkatan perencanaan pembangunan dalam mencapai peningkatan daya saing daerah.

Rencana Perubahan Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar ini diharapkan dapat benar-benar menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2025 mendatang.

Takalar, Juli 2024

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TAKALAR KAB.TAKALAR

Drs. ANDI RIJAL MUSTAMIN, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 197407131992111001

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Rencana Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah dokumen perencanaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.

Dalam penyusunan Rencana Perubahan Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2024 memperhatikan :

1. Penyelarasan target indikator utama (IKU) dan target indikator kunci (IKK) serta target indikator lainnya dalam Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023-2026;
2. Kesesuian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026;
3. Kesesuaian prioritas pembangunan daerah dan program prioritas Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah Tahun 2024;
4. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026;
5. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja Rencana Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023;
6. Rencana Kerja Perubahan Kementerian Sosial Tahun 2024;
7. Rencana Kerja Perubahan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2024
8. Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024;
9. Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024;

10. Isu-isu strategis yang berkembang;
11. Kebijakan Nasional;
12. Regulasi yang berlaku.

Gambar I-1

Keterkaitan Rencana Perubahan Rencana Kerja Perubahan Perubahan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 dengan DokumenPerencanaan Lainnya

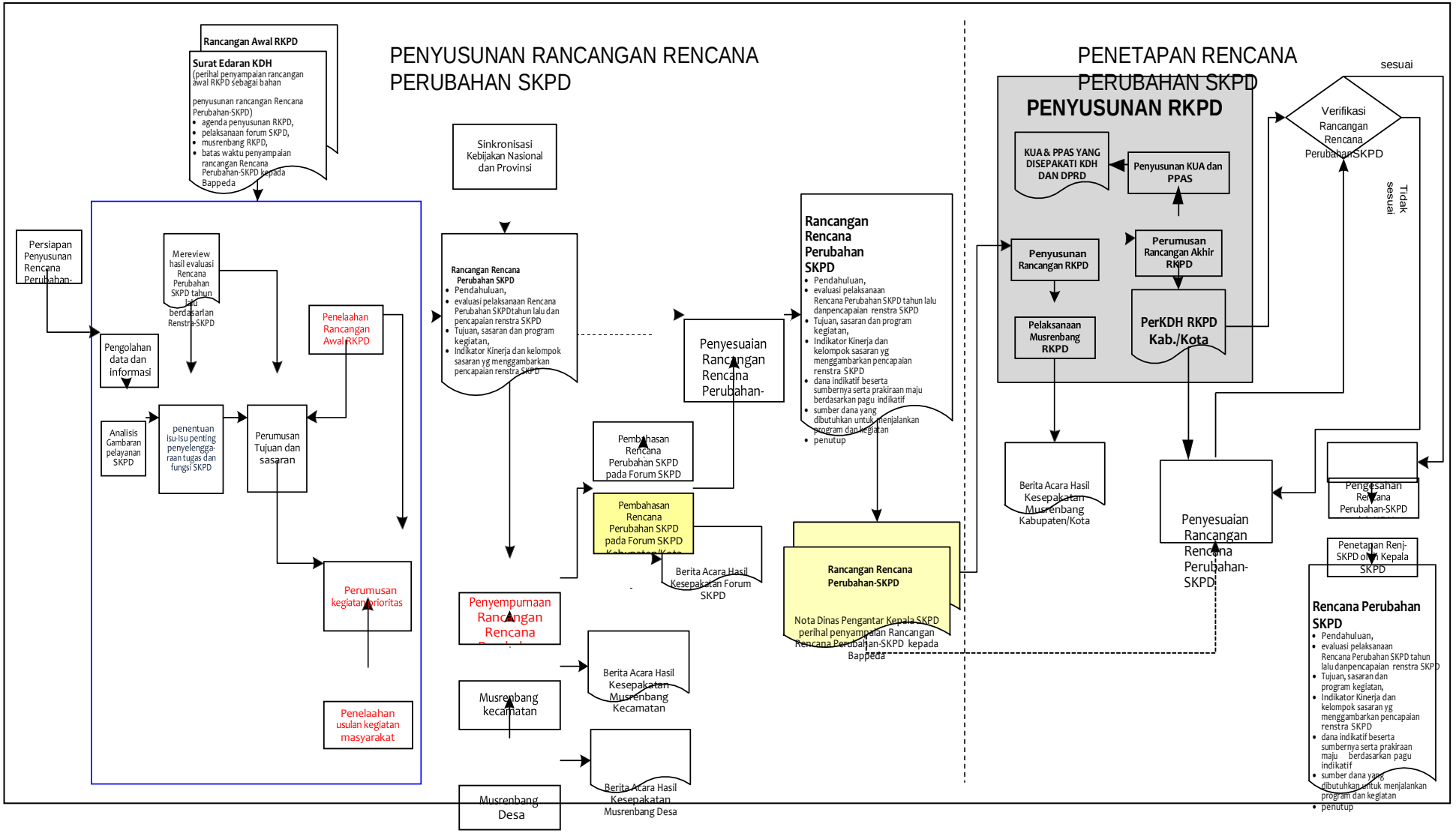

Rencana Kerja Perubahan Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2024 merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah dan nasional, yang dalam perencanaannya telah dilakukan bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Selain itu Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar yang disusun ini juga telah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar. Kedudukan Rencana Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2024 dalam Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 merupakan regulasi turunan yang harus mengacu pada Renstra.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2024 dilaksanakan melalui tahapan dan tata cara sebagai berikut :

1. Melakukan persiapan penyusunan pada Bulan Januari yang meliputi penetapan Tim Penyusun dan pengumpulan data teknis;
2. Menyusun Rencana Kerja Perubahan Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2024 pada Bulan Januari dengan memperhatikan Rancangan RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2024;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Takalar melakukan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial, PemberdayaanMasyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2026;
4. Melakukan penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2024 dengan memperhatikan Surat Rekomendasi Hasil Verifikasi;
5. Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2024 yang telah disempurnakan diajukan oleh Kepala Bappelitbangda Kabupaten Takalar Kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan;
6. Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2024 yang telah disempurnakan menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2024;

7. Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2024 yang telah disempurnakan sesuai hasil verifikasi, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar yang selanjutnya disingkat Rencana Perubahan Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar adalah dokumen perencanaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar untuk periode 1 (satu) tahun.

Untuk mewujudkan keterkaitan program pembangunan daerah Kabupaten, Provinsi, maupun Pusat, maka Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar disusun dengan mengacu dan berpedoman pada RPD Tahun 2023–2026 yang telah ditetapkan lebih dahulu. Disamping itu, penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2024 juga memperhatikan sumber daya dan potensi daerah yang dimiliki, faktor- faktor keberhasilan, evaluasi Rencana Perubahan tahun yang lalu serta isu-isu strategis yang berkembang. Mengingat Rencana Kerja Perubahan Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar sangat penting bagi pencapaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar secara khusus dan pemerintah daerah secara umum, maka proses penyusunannya dilakukan secara sistematis, akurat dan terpadu dengan melibatkan seoptimal mungkin peran para pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan forum Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Rancangan Rencana Kerja Perubahan Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar. Proses penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif, holistik dan berkesinambungan

yang disusun berdasarkan beberapa pendekatan berikut :

1. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut.
2. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
3. Pendekatan Politis, pendekatan ini mengkaji administrasi negara yang menekankan fungsi-fungsi politik dalam bernegara.
4. Pendekatan top-down, pendekatan ini dilaksanakan dengan mempedomani RPD dan Renstra PD sebagai arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah.
5. Pendekatan bottom-up, pendekatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan tahapan yang telah dilakukan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2024 tersebut serta merujuk pada ketentuan tentang perencanaan pembangunan daerah, secara jelas menunjukkan bahwa Rencana Perubahan memiliki nilai-nilai strategis, yaitu :

1. Rencana Kerja Perubahan Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2024 merupakan pedoman penyelenggaraan tugas dan fungsi selama 1 (satu) tahun;
2. Rencana Kerja Perubahan Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2024 merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar. Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2024 merupakan alat atau instrumen pengendalian dalam pelaksanaan pengendalian rencana pembangunan tahunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar;
3. Rencana Kerja Perubahan Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2024 merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja tahunan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar;
4. Rencana Kerja Perubahan Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2024 merupakan pedoman penilaian keberhasilan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi

PenyelenggaraanPemerintahan Daerah.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar melakukan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2024;

5. Melakukan penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2024 dengan memperhatikan Surat Rekomendasi Hasil Verifikasi;
6. Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2024 yang telah disempurnakan diajukan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan;
7. Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2024 yang telah disempurnakan menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2024;
8. Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2024 yang telah disempurnakan sesuai hasil verifikasi, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Rencana Kerja Perubahan Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2024 merupakan pedoman penilaian keberhasilan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentangLaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136).
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567).
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Strategi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2015-2019 (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 299)

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Sosial Republik IndonesiaNomor 9 tahun 2018 tentang Standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang sosial di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 515).
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1396).
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419).
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 81).
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 30 Tahun

2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 15).

24. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2005 Nomor 7).
25. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.
26. Peraturan Bupati Takalar Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar.
27. Peraturan Bupati Takalar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 3).
28. Peraturan Bupati Takalar No. 225 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Takalar tahun 2023-2026;
29. Peraturan Bupati Takalar No. …… Tahun 2022 tentang RKPD Kab. Takalar tahun 2022.
30. Keputusan Bupati Takalar Nomor 608 Tahun 2021 Tentang kelompok Tugas Sub Subtansi dan Nomenklatur Sub Koordinator untuk Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
31. Keputusan Bupati Takalar Nomor 821.2/453/BKPSDM/XII/2021 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui Penyetaraan dari Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakatdan Desa adalah sebagai berikut:

a. Untuk menjabarkan program dan kegiatan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kedalam program/kegiatan tahunan
b. Menyiapkan acuan bagi RAPBD
c. Menyiapkan kerangka evaluasi kinerja program/kegiatan tahunan bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

1.3.2 Tujuan

Adapun Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial,Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Rencana Perubahan Perubahan PD) adalah agar terbangun

konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 terdiri atas 5 (lima) bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2024 agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami.

BAB II Hasil Evaluasi Rencana Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022. Pada Bab ini berisi empat hal pokok yaitu Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2023, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2023, serta Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024.

BAB III Tujuan Dan Sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar. Pada bab ini berisi dua hal pokok yaitu Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar.

BAB IV Rencana Kerja Perubahan Dan Pendanaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2024. Pada bab ini berisikan penjelasan mengenai Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan dan uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan serta penyajian Tabel rencana program dan kegiatan beserta pagu indikatif Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 dan prakiraan maju Tahun 2025.

BAB V Penutup. Pada bab ini berisikan uraian penutup berupa Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; Kaidah-kaidah pelaksanaan; serta Rencana tindak lanjut Rencana Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024..

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA PERUBAHAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAANMASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TAKALAR TAHUN2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun berjalan Tahun 2024, mengacu pada APBD tahun berjalan yang telah disahkan pada waktu penyusunan Rencana Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Perubahan tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun lalu, dan realisasi Renstra yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan realisasi APBD Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Perubahan dan pencapaian renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai dengan tahun berjalan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II-1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial,Pemberdayaan Masyarakat dan Desa s/d Tahun 2023 Kabupaten Takalar

KODE					URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH AKHIR PERIODE TAHUN 2023-2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROG DAN KELUARAN KEGIATAN sampai dengan Tahun 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENCANA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2022	
									TARGET RENCANA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASI RENCANA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI %		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TW I TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	(8=7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					SEKRETARIAT									
1	06	01			Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	100 %	51 %	86 %	84 %	98%	72 %	74 %	56,70
1	06	01	2,01		Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	100 %	59 %	100 %	100 %	100%	100 %	84 %	83,93

							Kinerja Perangkat Daerah										
1	06	01	2,01	01	Sub. : - Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra	1	dokumen	2	dokumen	-	dokumen	-	dokumen	0%	1	dokumen	2	dokumen	200,00
							Jumlah Dokumen Rencana Perubahan	10	dokumen	6	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100%	2	dokumen	8	dokumen	80,00
							Jumlah Kegiatan Forum SKPD	5	kegiatan	3	dokumen	1	dokumen	-	dokumen	0	-	dokumen	-	dokumen	-
1	06	01	2,01	02	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen	5	dokumen	3	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100%	1	dokumen	4	dokumen	80,00
1	06	01	2,01	04	-	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	5	dokumen	3	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100%	1	dokumen	-	dokumen	-
1	06	01	2,01	05	-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan SKPD	5	dokumen	3	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100	1	dokumen	4	dokumen	80,00
1	06	01	2,01	06	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKJ	5	dokumen	3	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100	1	dokumen	5	dokumen	100,00

1	06	01	2,01	07	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen monev	20	dokumen	12	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	100	4	dokumen	16	dokumen	80,00
1	06	01	2,02		Kegiatan :	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persantase penyusunan laporan Keuangan Perangkat Daerah	100	%	60	%	100	%	88	%	88%	100	%	79	%	78,64
1	06	01	2,02	01	Sub. : - Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	3.710	orang	120	orang	60	orang	60	orang	100	60	orang	2.964	orang	80,00
							Jumlah ASN yang mendapatkan TPP	3.180	orang	1.908	orang	636	orang	600	orang	600	94	%	2.508	orang	79,00
							Jumlah ASN yang mendapatkan obyektifitas lain	1.680	orang	1.008	orang	336	orang	252	orang	75	180	orang	1.260	orang	75,00
1	06	01	2,02	02	-	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah ASN yang melaksanakan tugas	3.180	orang	1.908	orang	636	orang	609	orang	95,75	720	orang	2.517	orang	79,00
1	06	01	2,02	03	-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan keungan dalam pelaksanaan penatugsahaan dan pengujian/v	10	laporan	6	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100	2	dokumen	9	dokumen	90,00

							erifikasi Keuangan SKPD											
1	06	01	2,02	04	-	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	jumlah Laporan	60	laporan	36	dokumen	-	dokumen	-	dokumen	0	12	dokumen	39	dokumen	65,00
1	06	01	2,02	05	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	3	laporan	1	dokumen	1	dokumen	100	dokumen	0	1	dokumen	4	dokumen	80,00
1	06	01	2,02	06	-	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah LAporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	5	laporan	3	dokumen	-	dokumen	-	dokumen	0	1	dokumen	4	dokumen	80,00
1	06	01	2,02	07	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keunganan	30	laporan	18	kali	6	kali	6	kali	100	6	kali	26	kali	86,67
1	06	01	2,02	08	-	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Realisasi Anggaran	20	laporan	12	dokumen	-	dokumen	-	dokumen	0	4	dokumen	12	dokumen	60,00
1	06	01	2,03		Kegiatan :	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyusunan Laporan Barang	100	%	60	%	100	%	100	%	100	100	%	90	%	90

1	06	01	2,03	01	Sub. : - Kegiatan	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Barang	10	%	6	%	2	%	2	%	100%	2	%	9	%	90,00
1	06	01	2,03	05	-	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang	10	laporan	6	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100	2	dokumen	9	dokumen	90,00
1	06	01	2,05		Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian	100	%	54	%	100	%	100	%	100%	-	%	-	%	-
1	06	01	2,05	02	Sub. : - Kegiatan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	300	Pasang	159	ASN	53	ASN	53	ASN	100	-	ASN	-	ASN	-
1	06	01	2,05	05	-	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monitoring dan Evaluasi	20	kali	12	kali	4	kali	4	kali	100	-	kali	-	kali	-
1	06	01	2,05	09	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan ASN yang dilaksanakan	2	Kegiatan	2	kali	1	kali	1	kali	100	-	kali	-	kali	-
1	06	01	2,06		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	60	%	100	%	100	%	100%	100	%	83	%	83,32

1	06	01	2,06	06	Sub. : - Kegiatan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	50	jenis	30	expl	10	expl	9	expl	90%	12 expl	42	expl	84,00
1	06	01	2,06	09	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi dan Perjalanan Dinas	1.491	kegiatan	894	kali	298	kali	298	kali	100	299 kali	1.242	kali	83,30
1	06	01	2,08		Kegiatan :	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	60	%	100	%	100	%	100%	100 %	85	%	85,00
1	06	01	2,08	02	Sub. : - Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan yang dibayarkan untuk penyediaan jasa komunikasi	60	bln	36	bln	12	bln	12	bln	100	12 bln	51	bln	85,00
							Jumlah bulan yang dibayarkan untuk penyediaan jasa Sumber Daya Air	60	Rekening	36	Rekening	12	Rekening	12	Rekening	100	12 Rekening	51	Rekening	85,00
							Jumlah bulan yang dibayarkan untuk	61	Rekening	37	Rekening	13	Rekening	13	Rekening	100	13 Rekening	52	Rekening	85,25

							penyediaan Listrik									
1	06	01	2,08	03	-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	100 unit	60 unit	20 unit	20 unit	100	20 unit	85 unit	85,00
1	06	01	2,08	04	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan umum kantor	360 orang	216 orang	72 orang	72 orang	100	72 orang	306 orang	85,00
1	06	01	2,09		Kegiatan :	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	60 %	100 %	100 %	100%	100 %	99 %	84,61
1	06	01	2,09	01	Sub. : - Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	80 Unit	48 Unit	16 Unit	16 Unit	100	11 Unit	69 Unit	86,25
1	06	01	2,09	02	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara ,Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	10 Unit	6 Unit	16 Unit	16 Unit	100	7 Unit	22 Unit	220,00

							atau Lapangan									
1	06	01	2,09	09	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	10 unit	6 unit	1 unit	1 unit	100	2 unit	8 unit	80,00
01	06				BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN											
01	06	02			Program : PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase Potensi Sosial yang diberdayakan	100 %	60 %	- %	- %	0	100 %	19 %	18,86
01	06	05	2		Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten Takalar		Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang dilatih	100 %	60 %	- %	- %	0%	100 %	19 %	18,86
01	06	05	2,01	01	Sub. Kegiatan : -	Peningkatan kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang dilatih	100 Orang	60 Orang	0 Orang	0 Orang	0	0 Orang	0 Orang	0

01	06	05	2,01	2		-	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang dilatih	50	Orang	30	Orang	0	Orang	0	Orang	0	10	Orang	33	Orang	66
01	06	05	2,01	5		-	Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	JumlahSumber Daya Manusia yang dilatih dalam Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	25	Orang	15	Orang	0	Orang	0	Orang	0	0	Orang	0	Orang	0
01	06	05			Program	:	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase data DTKS Kab. Takalar	100	%	20	%	100	%	100	%	100	100	%	72	%	72
01	06	05	2.02		Kegiatan	:	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten /kota	Persentase Data Fakir Miskin dan terpenuhinya kebutuhan dasar bagi fakir miskin	100	%	120	%	100	%	100	%	100%	100	%	169.869	%	80,00
01	06	05	2.02	01	Sub. Kegiatan	: -	Pendataan Fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Jumlah KK Fakir miskin yang didata	210.615	KK	126.369	KK	43.500	KK	43.500	KK	100	42.190	KK	169.869	KK	80,65

01	06	05	2.02	02		- Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	jumlah data Fakir Miskin yang dikelolah	210.615	KK	123.369	KK	43.500	KK	43.500	KK	100	42.190	KK	180.416	KK	85,66
01	06	05	2.02	03		- Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	jumlah masyarakat miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	140.904	KK	422.712	KK	31.321	KK	31.321	KK	100	500	KK	464.580	KK	330,00
01	06	05	2.02	04		- Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Fakir miskin yang diberikan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	1.550	KUBE	102	KUBE	350	KUBE	350	KUBE	100	-	KUBE	-	KUBE	-
01	06	07			Program :	PROGRAM PENGELOLAAN TMP	Persentase TMP yang terpelihara	100	%	100	%	100	%	100	%	100	100	%	22	%	85%
01	06	07	2.01		Kegiatan :	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makan Nasional yang dipelihara	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	22	%	85,00
01	06	07	2.01	02		- Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang	240	TMP	144	TMP	48	TMP	48	TMP	100	48	TMP	22	TMP	85,00

						dipelihara								
01	06	07	2.01	03	- Pengamanan TMP Nasional Kabupaten/kota	jumlah penjaga Taman Makam Pahlawan	Orang 48	Orang -	Orang -	Orang -	0	Orang 48	Orang 22	85,00
						Jumlah Peringatan Hari-hari besar	kali 5	kali -	kali -	kali -	0	kali 5	kali 24	20,00
01	06				BIDANG PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL									
01	06	03			Program : PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Data data warga negara migran korban tindak kekerasan	% 100	% 60	% -	% -	0	% -	% -	0
01	06	03	2,01		Kegiatan : Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi diDaerah Kabupaten /Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah data warga negara migran korban tindak kekerasan	% 100	% 60	% -	% -	0%	% -	% -	-

01	06	03	2,01	01	Sub. Kegiatan : - Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang difasilitasi pemulangannya di Desa/Kel Asal	25	Orang	15	Orang	0	Orang	0	Orang	0	0	Orang	0	Orang	0
01	06	04			Program : PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan, Pengemis diluar panti	100	%	63	%	100	%	100	%	99,13	33	%	13	%	12,81
01	06	04	2.01		Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti sosial	Persentase Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Lanjut Usia Terlantar,	100	%	59	%	100	%	100	%	99%	100	%	25	%	24,63

						Gelandangan, Pengemis diluar panti									
01	06	04	2.01	2	- Penyediaan Sandang	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang disediakan Sandang	300 orang	300 Jiwa	1.000 Jiwa	1.000 Jiwa	100	300 Jiwa	75 Jiwa	25,00
01	06	04	2.01	3	- Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang menerima Alat Bantu	100 Orang	- Orang	- Orang	- Jiwa	0	100 Jiwa	25 Jiwa	25,00
01	06	04	2.01	05	- Pemberian Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang diberi bimbingan	1.000 Orang	1.500 Orang	1.000 Orang	1.000 Orang	100	1.000 Orang	250 Orang	25,00
						Jumlah PPKS yang diberikan rekomendasi Kartu Indonesia	2.000 Orang					2.000 Orang	500 Orang	25,00

						Sehat (KIS)									
						Jumlah PPKS yang diberikan rekomendasi subsidi listrik	50 Orang					50 Orang	12 Orang	24,00	
01	06	04	2.01	09	- Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah PPKS yang diberi Pelayanan dan pengaduan	50 orang	- KK	- KK	- KK	0	50 KK	- KK	-	
01	06	04	2.01	11	- Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang diberi pelayanan dan pengaduan	50 Orang	- Orang	- Orang	- Orang	0	50 Orang	- Orang	-	
01	06	04	2.01	13	- Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah PPKS yang diberikan layanan rujukan	50 Orang	- Orang	- Orang	- Orang	0	50 Orang	- Orang	-	

01	06	04	2		Kegiatan :	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosil (PMKS) yang direhabilitasi	100 %	67 %	100 %	100 %	100%	- %	- %	-
01	06	04	2,02	01	Sub. Kegiatan :	- Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah PMKS yang diberikan Layanan Data dan Pengaduan	140.904 KK	93.963 KK	31 KK	31 KK	99,99	- KK	- KK	-
01	06	05	2.01		Kegiatan :	Pemeliharaan Anak - Anak Terlantar	Persentase anak terlantar yang dipelihara	100 %	60 %	- %	- %	0%	- %	- %	-
01	06	05	2.01	01	Sub. Kegiatan :	- Penjangkauan Anak -Anak Terlantar	Jumlah Pengaduan dan Layanan Data yang diberikan	100 Orang	60 Orang	- Orang	- Orang	0	- Orang	- Orang	-
01	06	05	2.01	02		- Rujukan anak - anak terlantar	Jumlah anak terlantar yang dirujuk	50 Orang	30 Orang	- Orang	- Orang	0	- Orang	- Orang	-
01	06	05	2.01	03		- Pemantauan terhadap pelaksanaan pemantauan anak terlantar	Jumlah anak terlantar yang terpantau	50 Orang	31 Orang	- Orang	- Orang	0	- Orang	1 Orang	2,00
							Jumlah anak terlantar yang diasesmen	50 Orang	30 Orang	- Orang	- Orang		- Orang	- Orang	-

						Jumlah anak terlantar yang diberikan bimbingan	Orang 200	Orang 120	Orang -	Orang -	0	Orang -	Orang -	-
						Jumlah anak yang didampingi	Orang 50	Orang 30	Orang -	Orang -		Orang 5	Orang 35	70,00
01	06	06			Program : PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencanayang tertangani	% 100	% 40	% 100	% 100	100	% 100	% 56	56,24
01	06	06	2.01		Kegiatan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase korban bencana Alam dan Sosial yang tertangani	% 100	% 60	% 100	% 100	100%	% 100	% 112	112,48
01	06	06	2.01	01	Sub. Kegiatan : - Penyediaan Makanan	Jumlah Korban Bencana yang memperoleh bantuan makanan	Orang 5.000	Orang 3.000	Orang 2.500	Orang 2.500	100	Orang 1.000	Orang 5.624	112,48
01	06	06	2.02		Kegiatan : Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Kesiapsiagaan bencana teratasi	% 100	% 20	% 100	% 100	100%	% 100	% -	-

01	06	06	2.02	01	- Koordinasi dan pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah desa yang sudah melakukan koordinasi, sosialisasi dalam pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	180	Lokasi	35	Lokasi	12	Lokasi	12	Lokasi	100	- Lokasi	- Lokasi	-
01	06	06	2.02	02	- Koordinasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Terlaksanaya sosialisasi bagi TAGANA	100	kecamatan	10	kecamatan	10	kecamatan	10	kecamatan	100	100 kecamatan	- kecamatan	-
						Jumlah Peserta TAGANA yang dilatih	100	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	0	100 Orang	- Orang	-
						Jumlah pengadaan seragam TAGANA	25	Pasang	-	Pasang	-	Pasang	-	Pasang	0	25 Pasang	- Pasang	-
						Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibina	100	Orang	-	Orang	15	Orang	14	Orang	93	100 Orang	- Orang	-
02	13				BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT												-	
02	13	05			Program : PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Badan Usaha	100	%	60	%	100	%	100	%	100	100 %	61 %	61,19

						Milik Desa (BUMDES) yang terdapat disemua desa dan kelurahan di kabupaten Takalar								
02	13	05	2.01		Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dibidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kab/ Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang ada diKabupaten Takalar	% 100	% 60	% 100	% 100	100%	% 100	% 61	61,19

					Sub. : Kegiatan	- Peningkatan Penataan pemberdayaan dan pemberdayaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang telah ditata	4.560	desa	2.736	desa	912	desa	912	desa	100	1.044	desa	3.876	Lembaga	85,00
						- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina	4.560	Lembaga	2.736	Lembaga	912	Lembaga	912	Lembaga	100	1.044	Lembaga	3.876	Lembaga	85,00
							Jumlah Desa yang dibina dalam peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan	100	desa	100	desa	3	desa	3	desa	100	-	desa	-	desa	-

02	13	05	2.01	04	- Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang telah disediakan sarana dan prasarana	5 desa/kel	- desa/kel	- desa/kel	- desa/kel	0	- desa/kel	- desa/kel	-
						Jumlah Bimtek dalam peningkatan kapasitas LPM	4.560 kali	2.736 kali	912 kali	912 kali	100	1.044 kali	3.876 kali	85,00
02	13	05	2.01	05	- Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	Jumlah Desa yng telah memiliki Badan Usaha Masyarakat Desa (BUMDES)	87 desa	76 desa	- desa	- desa	0	- desa	- desa	-

						Jumlah BUMDES yang dibina	30 desa	- desa	- desa	- desa	0	- desa	- desa	-
						Jumlah Kelompok masyarakat yang dibina	4.560 klp	2.736 klp	912 klp	912 klp	100	1.044 klp	3.876 klp	85,00
02	13	05	2	06	- Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Tegnologi Tepat Guna (TTG)	Jumlah Desa yang menerapkan Tegnologi Tepat Guna (TTG)	87 100	- desa	- desa	- desa	0	- desa	- desa	-
02	13	05	2	07	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royang Masyarakat (BBGRM)	Jumlah Desa yang telah menggalang partisifasi masyarakat dalam bentuk gotong royang	87 0	100 desa/kel	- desa/kel	- desa/kel	0	87 desa/kel	- desa/kel	-
							3 87		-	-	0	-	-	-
02	13	05	2	08	Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman, Ketertiban dan perlindungan masyarakat desa	Jumlah desa yang menyelenggarakan ketentaraman, ketertibana dan	40 3996	87 desa	- desa	- desa	0	- desa	- desa	-

						perlindungan masyarakat desa									
02	13	05	2	09	- Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan	Jumlah PKK Aktif	PKK 6.660	PKK 3.996	PKK 1.332	PKK 1.332	100	PKK -	PKK -	-
02	13				BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
02	13	02			Program : PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Penataan Desa	% 100	% 100	% 100	% 100	100	% -	% -	0
02	13	02	2.01		Kegiatan : Penyelanggaraan Penataan Desa	Persentase Desa yang terfasilitasi dalam Penataan Desa	% 100	% 100	% 100	% 100	100%	% -	% -	-
02	13	02	2.01	01	Sub. Kegiatan : - Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah desa yang terbentuk sebagai Desa Persiapan dan Desa Defenitif	Desa 264	Desa 264	Desa 132	Desa 132	100	Desa -	Desa -	-
02	13	02	2.01	02	- Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah desa yang tersusun Peta Administrasi	desa 1.044	desa -	desa -	desa -	0	desa 1.04	desa -	-

						Pemerintahan Desa						4			
02	13	02	2.01	03	- Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah desa yang terdaftar dalam penataan krwenangan desa	desa 1	desa -	desa -	desa -	0	desa 1	desa -	-
02	13	02	2.01	04	- Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah desa persiapan yang diberi Kode Desa yang telah ditetapkan melalui Pembentukan Desa	desa 11	desa -	desa -	desa -	0	desa 11	desa -	-
						Jumlah kecamatan dan desa yang mengikuti bimtek sebagai desa persiapan	desa 11	desa -	desa -	desa -	0	desa 11	desa -	-
02	13	02	2.01	06	- Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah desa yang tersediah Sarana dan Prasarana Pelayanan pada Desa	desa 87	desa 87	desa -	desa 87	#DIV/0!	desa 87	desa -	-

02	13	03			Program :	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase terselenggaranya Kerjasama Antar Desa	100 %	- %	- %	- %	0	- %	- %	0
02	13	03	2.01		Kegiatan :	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Persentase Desa yang terfasilitasi dalan Kerjasama antar Desa	100 %	- %	- %	- %	0%	- %	- %	-
02	13	03	2.01	01	Sub. Kegiatan :	- Fasilitasi Kerja sama Antar Desa dalam Kabupaten/ Kota	Jumlah desa yang melakukan Kerja sama Antar Desa dan Tersusunnya Produk Hukum Daerah tentang Kerjasama Antar Desa	87 desa	- desa	- desa	- desa	0	- desa	- desa	-
02	13	03	2.01	02		- Fasilitasi Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/ Kota	Jumlah Desa yang melakukan Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga dan Tersusunnya Produk Hukum Daerah tentang	87 desa	- desa	- desa	- desa	0	- desa	- desa	-

						Kerjasama Antar Desa									
02	13	04			Program : PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah desa yg mengelola Administrasi Pemerintahan Desa	100 desa	58 desa	100 desa	91 desa	91,31	100 desa	50 desa	49,56
02	13	04	2.01		Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa	100 %	58 %	100 %	91 %	91%	100 %	50 %	50,00
02	13	04	2.01	01	Sub. Kegiatan : - Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang melaksanakan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	4.560 desa	2.736 desa	912 desa	912 desa	100	1.044 desa	3.648 desa	80,00
02	13	04	2.01	02	- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penyusunan dan penetapan Produk Hukum Desa	1.044 desa	- desa	- desa	- desa	0	1.044 desa	- desa	-

02	13	04	2.01	03	-	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penyusunan dan Penetapan RPJMDes dan RKPDes	1.044 desa	- desa	- desa	- desa	0	1.044 desa	228 desa	-
02	13	04	2.01	04	-	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dala pengelolaan dan penatausahaan Keuangan dan Asset Desa	4.560 desa	2.736 desa	912 desa	912 desa	100	1.044 desa	- desa	-
02	13	04	2.01	05	-	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah desa yang mengikuti pelatihan peningkatan aparatur Desa	380 desa	228 desa	76 desa	76 desa	100	- desa	532 desa	140,00
02	13	04	2.01	06	-	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah desa yang menyelenggarakan Musdes dan Musrembang Des	87 desa	- desa	- desa	- desa	0	87 desa	- desa	-

02	13	04	2.01	07	-	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah desa yang dievaluasi dan pengawasan peraturan desa	4.560 desa	2.736 desa	912 desa	912 desa	100	- desa	3.648 desa	80,00
02	13	04	2.01	08	-	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah desa yang mengelolah BUM Desa dan Kerja Sama Antar Desa	4.560 desa	2.736 desa	912 desa	684 desa	75	1.044 desa	- desa	-
02	13	04	2.01	09	-	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah desa yang menyelenggarakan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa/ Kepala Desa Antar Waktu	4.560 desa	2.736 desa	612 desa	612 desa	100	4 desa	3.576 desa	78,42
02	13	04	2.01	10	-	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	87 desa	- desa	- desa	- desa	0	- desa	- desa	-

02	13	04	2.01	11	-	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah desa yang menyusun Data profil desa	1.044 desa	- desa	- desa	- desa	0	1.044 desa	- desa	-
02	13	04	2.01	12	-	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	87 desa	- desa	- desa	- desa	0	- desa	- desa	-
02	13	04	2.01	13	-	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1.044 desa	- desa	- desa	- desa	0	1.044 desa	- desa	-
02	13	04	2.01	14	-	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah desa yang dibina dalam peningkatan Kapasitas BPD	4.560 desa	2.736 desa	912 desa	684 desa	75	1.044 desa	3.420 desa	75,00
02	13	04	2.01	15	-	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa	20 desa	- desa	- desa	- desa	0	20 desa	- desa	-
02	13	04	2.01	16	-	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi Pembinaan	87 desa	- desa	- desa	- desa	0	- desa	- desa	-

						Laporan Kepala Desa								
02	13	04	2.01	17	- Pelaksanaan Penugasan Urusan/ Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa	Jumlah desa dang terDaftar dalam Kewenangan Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan oleh Desa	desa 87	desa -	desa -	desa -	0	desa -	desa -	-

Adapun penjelasan dari tabel di atas adalah:

A. Realisasi Program yang tidak Memenuhi Target Kinerja:
   Ada 2 program yang tidak memenuhi target kinerja yaitu:
   1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota. Indikator program ini adalah Persentase cakupan penunjang urusan pemerintahan dengan capaian kinerja 98%, hal ini disebabkan karena ada 1 kegiatan yang belum bisa terealisasi 100 % yaitu:
      a. Administrasi keuangan dengan capaian 88%
      b. Administrasi Umum perangkat daerah capaiannya 99,68%
   2. Program administrasi pemerintahan desa dengan capaian kinerja 91,31%, hal ini disebabkan karena ada 1 kegiatan yang belum terealisasi 100% yaitu:
      a. Kegiatan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi capaiannya 91%

B. Realisasi Program / kegiatan yang memenuhi target kinerja dengan capaian 100%
   1. Program Rehabilitasi Sosial
   2. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
   3. Program Penanganan Bencana
   4. Program Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan lembaga adat dan masyarakat hokum adat
   5. Program Penataan Desa

C. Faktor-Faktor penyebab tidak tercapaianya, terpenuhinya target kinerja
   1. Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota, hal ini disebabkan karena:
      a. Pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN hanya tercapai 82,08%% kerena pada indikator Gaji dan tunjangan, TPP dan obyektifitas lainnya indicator kinerjanya tidak mencapai target dikarenakan jumlah pegawai ASN di Dinas Sosial dan PMD mengalami pengurangan karena adanya pegawai yang berpindah tempat kerja serta pada pembayaran obyektifitas lainnya hanya pada triwulan III dan IV.
      b. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan tidak terealisasi ditriwulan I dengan capaian 90% dikarenakan anggarannya belum terealisasi.
   2. Program Administrasi Pemerintahan desa capaiannya 91,31% dikarenakan sub kegiatan pembinaan dan pemberdayaan BUMDES dan lembaga kerjasama antar desa pada triwulan I tidak terlaksana

dikarenakan belum adanya laporan Bumdes dari desa yang diterima sehingga belum difasilitasi.

Adapun rekapitulasi capaian kinerja Program/kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada tabel 1. Tabel rekapitulasi capaian kinerja program/kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel II-2
Rekapitulasi Capaian Kinerja Program/Kegiatan dan sub Kegiatan

NO	Uraian	Keterangan Kinerja (K)							Rata-rata Capaian Output (%) dan Predikat Kinerja			
		Jumlah Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Non APBD	Jumlah Indikator	Capaian 0%	Capaian < 100%	Capaian 100%	Capaian >100%	K	Rp	K	Rp
1.	Program	8		8	-	3	5	-	92,63%	87,22%	ST	T
2.	Kegiatan	16		16	-	3	13	-	98,48%	99,52%	ST	T
3.	Sub Kegiatan	51		56	-	5	46	-	94,55%	80,81%	ST	T

Sumber : Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Perubahan Triwulan IV Tahun 2023

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa skala penilaian rata-rata kinerja dan predikat kinerja hasil evaluasi Rencana Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dikatakan tinggi. Dari 8 program kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kab. Takalar ada 5 program yang memiliki capaian kinerja 100%, dari 16 kegiatan ada 13 kegiatan yang memiliki capaian kinerja 100% dan dari 51 sub kegiatan ada 46 sub kegiatan yang memiliki capaian kinerja 100%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Adapun kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar dalam periode 5 tahun yang lalu, tergambar pada tabel II-3 dan II-4

Tabel II-3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Takalar

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target IKU	Target IKK	Target SPM	Target Renstra Perangkat				Realisasi		Proyeksi	
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi											
	Aspek Layanan Umum Bidang Sosial											
1	Persentase(%) PMKS Skala Kabupaten/Kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar				75%	100%	0	0	76%	0	0	0
2	Persentase (%) PMKS skala kabupaten/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melaui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya				5%	5%	0	0	0%	0	0	0
3	Persentase (%) Panti Sosial skala Kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial				7%	5%	0	0	0%	0	0	0

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target IKU	Target IKK	Target SPM	Target Renstra Perangkat				Realisasi		Proyeksi	
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan selama masa tanggap darurat				80%	100%	0	0	7,24%	0	0	0
5	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap				85%	100%	0	0	0%	0	0	0
6	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik				76 Desa	76 Desa	0	0	76 Desa	0	0	0
7	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)				100 LPM	100 LPM	0	0	10 Klp	0	0	0
8	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK				100 PKK	100 PKK	0	0	10 Klp	0	0	0
9	Persentase LSM aktif				N/A	N/A	0	0	N/A	0	0	0
10	Persentase LPM Berprestasi				N/A	N/A	0	0	N/A	0	0	0

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target IKU	Target IKK	Target SPM	Target Renstra Perangkat				Realisasi		Proyeksi	
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	Persentase PKK aktif				111 PKK	111 PKK	0	0	111 PKK	0	0	0
12	Persentase Posyandu aktif				555 Posyandu	555 Posyandu	0	0	110 Posyandu	0	0	0
13	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat				N/A	N/A	0	0	N/A	0	0	0
14	Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat				N/A	N/A	0	0	N/A	0	0	0
15	Nilai SAKIP OPD				B	A	0	0	B	0	0	0
16	% Temuan BPK dan APIP ditindak lajuti				0	0	0	0	0	0	0	0
17	% Serapan anggaran OPD				100%	100%	0	0	100%	0	0	0
18	% Sarana dan Prasarana OPD kondisi baik				100%	100%	0	0	100%	0	0	0
19	% Pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran				100%	100%	0	0	100%	0	0	0

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target IKU	Target IKK	Target SPM	Target Renstra Perangkat				Realisasi		Proyeksi	
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti sosial				1204 Orang	1250 Orang	0	0	256 Orang	0	0	0
21	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti sosial				N/A	N/A	0	0	N/A	0	0	0
22	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti sosial				4026 Orang	4500 Orang	0	0	2614 Orang	0	0	0
23	Rehabilitasi sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti sosial				N/A	N/A	0	0	N/A	0	0	0
24	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota				2726 KK	2800 KK	0	0	181 KK	0	0	0
25	Jumlah Desa Tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang pertahun berdasarkan indeks desa membangun pertahun				4	1	0	0	1	0	0	0

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target IKU	Target IKK	Target SPM	Target Renstra Perangkat				Realisasi		Proyeksi	
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	Jumlah Desa Tertinggal perawal tahun (n)				N/A	N/A	0	0	2	0	0	0
27	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal				N/A	N/A	0	0	50,00%	0	0	0
28	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria Desa mandiri per-tahun				N/A	N/A	0	0	0	0	0	0
29	Jumlah desa berkembang (perawal tahun n)				N/A	N/A	0	0	74	0	0	0
30	Persentase peningkatan status desa mandiri				N/A	N/A	0	0	0	0	0	0

Tabel II-4
Pencapaian TPB/SDGs Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Takalar Tahun 2017-2022

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awa Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Realisasi		Proyeksi	
		Tahun 2021	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024
Tujuan 1 : Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun										
1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anank dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan disemua dimensi, sesuai dengan definisi sosial										
1	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	8,44%	8,40%	8,31%	8,22%	8,16%	8,25%	0	0	0
1.3 Menerapkan secara nasional, sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan subtansional bagi kelompo miskin dan rentan										
2	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	40%	45%	50%	55%	60%	40,21%	0	0	0

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awa Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Realisasi		Proyeksi	
		Tahun 2021	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024
3	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Prog ram Keluarga Harapan	18500 KK	18550 KK	19848 KK	21237 KK	22274 KK	29,021	0	0	0
1.5 pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi sosial lingkungan dan bencana										
4	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN	N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	0	0	0
5	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	181 jiwa	250 jiwa	285 jiwa	290 jiwa	300 jiwa	251	0	0	0
6	Pendampingan psikososial korban bencana sosial	N/A	25%	30%	35%	40%	251	0	0	0
7	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi	N/A	25%	30%	35%	40%	N/A	0	0	0
1.A menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumberdaya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang umtuk melaksanakan program dan kebijakan yang mengakhiri kemiskina disemua dimensi										
8	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan	N/A	25%	30%	35%	40%	N/A	0	0	0

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awa Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Realisasi		Proyeksi	
		Tahun 2021	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024
Tujuan 10 : Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarngara										
10.1 pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada dibawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional										
10	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	8,44%	7,09%	6,90%	6,69%	6,60%	8,25%	0	0	0
11	Jumlah Desa Tertinggal	2	0	0	0	0	2	0	0	0
12	Jumlah Desa Mandiri	0	1	1	1	1	N/A	0	0	0
13	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas	N/A	9,16%	9,13%	9,10%	9,07%	N/A	0	0	0

Tabel II-5
Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interprestasi Belum Tercapai (<) sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Targetnya adalah 75% sedangkan capaian sampai pada tahun ini adalah 75,54% berarti telah sesuai (=) dengan target yang ingin dicapai		Dengan semakin banyaknya masyarakat miskin yang terdata dan masuk dalam indikator PMKS yang dijangkau oleh dinas Sosial
2	Persentase Panti Sosial yang menerima program Pemberdayaan Sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	Belum tercapai	Dikarenakan tidak adanya panti sosial yang diberikan program KUBE karena DinsosPMD Kab. Takalarsampai saat ini hanya memfasilitasi bantuan KUBE dari propinsi untuk kelompok masyarakat saja	

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interprestasi Belum Tercapai (<) sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
3	Persentase Panti Sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan social	Belum tercapai	Dikarenakan tidak adanya panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial di Kab. Takalar	
4	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan masyarakat	Belum tercapai	Wahana Kesejahteraan Sosial berbasis Masyarakat (WKBSM) bukan merupakan wewenang dantanggungjawab Dinas Sosial tingkat Kabupaten/kota	
5	Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Belum tercapai	Pada dasarnya Dinas Sosial dan PMD senantiasa memberikan bantuan sosial baik berupa permakanan 3 X sehari, bantuan matras, selimut dan bantuan lainnya kepada korban	

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interprestasi Belum Tercapai (<) sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
			bencana berdasarkan laporan yang masuk	
6	Persentase Korban Bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Belum tercapai	Dikarenakan tidak adanya sarana dan prasarana tanggap darurat yang dimiliki oleh Dinas Sosial dan PMD Kab. Takalar	
	BIDANG URUSAN/INDIKATOR			
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
1	Jumlah desa yang memiliki BUMDes	Target 100% dan capaian realisasinya adalah 100%		Semua desamemiliki BUMDES. Telah ditandai dengan adanya SK pengurus BUMDES dan adanya laporan keuangan yang terintegrasi dengan SIA BUMDES / SERAGAM sistem administrasi

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interprestasi Belum Tercapai (<) sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
				infirmasi akuntansi oleh BPKP.
2	Jumlah desa yang menerapkan Tegnologi Tepat Guna (TTG)	Target 100% dan capaian realisasinya adalah 100%		Semua desa (76 desa) telah menerapkan Tegnologi Tepat Guna (TTG) ditandai dengan adanya SK Posyantek di 76 desa dan 76 desa menerapkan TTG yang sederhana, contohnya semua memakai hand tractor penggiling padi.
3	Jumlah Desa yang menerapkan Musrembang Desa	Target 100% dan capaian realisasinya adalah 100%		Semua desa (76 desa) telah menerapkan Musrembang Desa

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat permasalahan dan faktor-faktor yang menjadi penentu keberhasilan dari tiap-tiap bidang urusan dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah.

Pengukuran Kinerja adalah proses sistemastis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran Kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

1. Pengukuran tingkat capaian kinerja periode 2018-2022dilakukan dengan cara membandingkan antara pencapaian indicator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan periode 2018-2022.Persentase rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial menunjukkan peningkatan dari tahun ketahun. Hal ini disebabkan karena semakin banyaknya penyandang disabilitas yang masuk dalam kategori penerima PKH. Demikian halnya dengan lanjut usia terlantar di luar panti walaupun di tahun 2020 mengalami penurunan persentase namun dalam hal jumlah yang dijangkau semakin banyak di tiap tahunnya.
2. Anak terlantar dan tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis tidak pernah dilaukan penjangkauan dikarenakan tidak adanya orang yang dikategorikan dalam kelas anak terlantar dan tidak adanya pengemis maupun gelandangan di Kab. Takalar.
3. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar
   - Terget Renstra Tahun 2018 adalahTarget 15% sedangkan realisasi capaian sampai akhir Tahun 2018 adalah 26,80% berarti telah melampaui target.
   - Terget Renstra Tahun 2019 adalahTarget 35% sedangkan realisasi capaian sampai akhir Tahun 2019adalah64,93% berarti telah melampaui target.
   - Terget Renstra Tahun 2020 adalahTarget 50% sedangkan realisasi capaian sampai akhir Tahun 2020adalah63,7% berarti telah melampaui target.
   - Terget Renstra Tahun 2021 adalahTarget75% sedangkan realisasi capaian sampai akhir Tahun 2021 adalah76% berarti telah melampaui target dari tahun ke tahun terjadi kenaikan disebabkan

karena banyaknya program pemerintah yang dikeluarkan sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan, seperti PKH(Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dan BST (Bantuan Sosial Tunai).

4. Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya dari Tahun 2018 sampai Tahun 2022 tidak pernah tercapai dikarenakan panti sosial tidak masuk dalam kategori Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Adapun
5. Demikian halnya dengan persentase panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan/kesehatan sosial dari tahun 2018 sampai tahun 2022 tidak adanya panti yang menywdiakan sarana dan prasarana tersebut diatas.
6. Seperti halnya persentase Wahana Kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBSM) dari target yang disediakan tidak pernah terealisasi dikarenakan program ini merupakan bagian dari program pemerintah propinsi dan bukan kewenangan daerah Kabupaten/kota.
7. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat persentasenya fluktuatif karena bencana tidak dapat diramalkan terjadinya dan semua korban bencana baik alam maupun sosial yang terdata dan dilaporkan ke Dinas Sosial dan PMD Kab. Takalar telah diberikan bantuan baik berupa pangan maupun sandang.
8. Untuk korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap hanya tercapai diTahun 2018 sebesar 4% dikarenakan tahun berikutnya Dinas Sosial dan PMD tidak memiliki lagi sarana dan prasarana tanggap darurat yang lengkap untuk dipakai memgevakuasi korban bencana disebabkan kurangnya dana untuk pengadaan peralatan seperti pelampung dan buffer stock tersebut.
9. Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial adalah 100% karena semua yang terdata dalam DTKS telah diberikan bantuan melalui berbagai program bantuan baik dari APBD maupun APBN.

Dan untuk indicator kinerja pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), adalahRehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial, Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial, Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti capaiannya tiap tahun mengalami peningkatan walaupun tidak sepenuhnya mencapai target

sedangkan Rehabiltasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial tidak terealisasi karena tidak adanya orang yang termasuk dalam kategori gelandangan dan tuna sosial yang dapat diberikan bantuan.

Untuk urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa indikator sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa baik dan persentase PKK aktif terealisasi 100%. Sedangkan kelompok binaan LPM dan PKK dari tahun 2018 sampai tahun 2022 mencapai 10%. Demikian halnya dengan persentase posyandu aktif pada tahun 2018 mengalami kenaikan sedangkan ditahun 2019 dan 2020 tetap diangka 18,7%dan mengalami peningkatan di tahun 2021 yakni 19,8%

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan dan kajian hasil evaluasi pelaksanaan pelayanan, serta kajian terhadap pencapaian kinerja renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka dapat dirumuskan isu – isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut:

1. Kurangnya peran PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dikarenakan belum diberikan pelatihan memadai.
2. Sarana dan prasarana yang disediakan bagi petugas pendata yang masih kurang
3. Fasilitas umum untuk penyandang disabiltas belum maksimal.
4. Kompetensi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa dalam menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa sesuai Indeks Desa Membangun belum optimal
5. Pemerintah Desa mengangarkan kegiatan dan pembangunan desa tidak didasarkan pada permasalahan dan kebutuhan desa serta data.
6. Kurang berkembangnya lembaga ekonomi yang ada dimasyarakat dan rendahnya kemampuan mengelola lembaga ekonomi perdesaan.
7. Sumber Daya Manusia aparatur baik dari sisi kualitas maupun kuantitas masih perlu ditingkatkan dan kurang merata
8. Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kinerja pada OPD belum maksimal terpenuhi oleh karena itu perlu ditingkatkan
9. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah:

Tantangan:

1. Masih lemahnya kualitas sumber daya manusia pada bidang sosial;
2. Kurangnya tenaga pendamping Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes;
3. Kurangnya pembangunanan fasilitas umum dan fasilitas sosial di pedesaan;
4. Sistem data dan informasi belum memadai;
5. Mekanisme kerja kurang efektif;
6. Koordinasi lintas sector relative lemah.
7. Tuntutan kualitas dan pelayanan informasi sosial semakin tinggi;
8. Banyaknya masyarakat yang tidak mengerti program pemberdayaan;

Peluang:

1. Desentralisasi kewenangan bidang sosial dan Pemdes ;
2. Potensi sumber daya alam, sosial cukup memadai.

Tabel II-7

USULAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN (POKIR) TAHUN 2024

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**				
2.1	Pemberdayaan Leembaga Kemasyarakatan yang bergerakdi bidang pemberdayaan Desa dan Lembaga adat tingkat daerah kabupatn/kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum adat yang Masyarakatnya pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kab/kota	Daerah Pemilihan 1 dan III, Kab, Takalar Seluruh Kecamatan, Keluraha n/ Desa	Jumlah desa yang lembaga yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatanpemberdayaan	2 kegiatan	POKIR
1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna) Lembaga adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dinas Sosial Pemberdayaan	Daerah Pemilihan 1 dan III, Kab, Takalar Seluruh Kecamatan, Keluraha n/ Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat yang ditingkatkan kapasitasnya	2 kegiatan	POKIR

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1. Kebijakan Nasional Dalam RPJMN/RKP

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja Perubahan Pemeintah (RKP) Tahun 2024, sebagai berikut :

- **Tema Pembangunan**

Tema pembangunan nasional yang tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah **"Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".**

- **Prioritas Nasional**

Prioritas Nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan Rancangan RKP Tahun 2023 adalah :

- PN 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
- PN 2 : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
- PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
- PN 4 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
- PN 5 : Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- PN 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
- PN 7 : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Dari 7 (tujuh) Prioritas Nasional tersebut di atas, maka terdapat 2 (dua) Prioritas yang di dukung oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan Tugas dan Fungsinya.

Tabel III-1
Kebijakan Nasional (Prioritas Nasional)
Dalam RKP Tahun 2024

NO	KEBIJAKAN NASIONAL (PRIORITAS NASIONAL)	PERMASALAHAN PELAYANAN
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Kurang optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi Pemerlu Pemenuhan Kebutuhan Sosial (PPKS)
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Minimnya ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi di desa yang mengakibatkan masih adanya desa tertinggal dan berkembang serta belum adanya desa yang berstatus swasembada atau mandiri

Sumber : RPJMN Tahun 2020-2024; diolah

3.1.1 Telaahan Kebijakan Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan

Memperhatikan arah kebijakan nasional dan provinsi Tahun 2024, Rencana Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2024 tidak mendukung secara langsung prioritas nasional maupun provinsi, namun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar adalah perangkat pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan Pemerintahan bidang sosial dan pemerintahan desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Startegis Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 dan Peraturan Menteri desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi Nomor 17 Tahun 2020 tentang rencana strategis dengan kebijakan yang menjadi prioritas adalah Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, serta memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Selain itu selalu berpodaman pada Renstra Dinas Sosial dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Propinsi Sulawesi Selatan yang mendukung prioritas Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan dan Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Perlindungan Sosial.

3.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Mendasari hasil evaluasi kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2017 – 2022, tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2017 – 2022 mengalami perubahan setelah disesuikan dengan dinamika isu – isu nasional dan lokal yang tertuang di dalam tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2023 – 2026. Olehnya itu Rencana Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2024 didasarkan pada perumusan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026. Adapun perubahan rumusan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

3.2.1 Tujuan

Rumusan tujuan Rencana Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2024 adalah:

1. Meningkatkan kesejahteraan Sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
2. Meningkatkan Status desa;
3. Meningkatkan tata kelola pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

3.2.2 Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya penanganan PMKS dan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat miskin;
2. Meningkatnya penanganan bencana alam dan sosial;
3. Meningkatnya ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi di desa
4. Meningkatnya tata kelola kinerja pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Tabel III-2

Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2021	Target Kinerja Pada Tahun Ke-				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tujuan 1: Meningkatkan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase Peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis diluar panti	30,94%	58%	60%	70%	80%	80%
	Sasaran 1.1 : Meningkatnya penangann PMKS	Persentase Kepatuhan terhadap pelaksanaan Standar pelayanan di bidang sosial (indikator SPM)	30.94%	58%	60%	70%	80%	80%
		Persentase pelayanan pencapaian pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai,	76%	78%	80%	85%	90%	90%

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2021	Target Kinerja Pada Tahun Ke-				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	2026
		Bantuan KUBE						
	Sasaran 1.2 : Meningkatnya penanganan bencana alam dan bencana sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	6.64%	7,80%	8.15%	9.30%	10.56%	10.56%
2	Tujuan 2: Meningkatkan Status Desa	Indeks Desa Membangun	>0,599 dan <0,707	>0,707 dan <0,815	>0,707 dan <0,815	>0,707 dan <0,815	>0,815	>0,815
	Sasaran 2.1: Meningkatnya Ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi di Desa	Jumlah Desa Mandiri	0	1	1	1	1	1
		Jumlah Desa Maju	6	7	8	9	10	10
		Jumlah Desa	68	68	67	66	65	65

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2021	Target Kinerja Pada Tahun Ke-				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	2026
		Berkembang						
		Jumlah Desa Tertinggal	2	0	0	0	0	0
3	Tujuan 3: Meningkatkan tata kelola pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Indeks Reformasi BirokrasiDinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	N/A	CC	B	B	BB	BB
	Sasaran 3.1 : Meningkatnya tata kelola kinerja pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Nilai SAKIP pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	N/A	B	B	B	BB	BB

BAB IV
RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN BADANPENGELOLAANKEUANGAN DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2024

Program dan kegiatan merupakan program prioritas pada Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2024 yang mengacu kepada Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023-2026. Pemilihan kegiatan dan program tersebut berdasarkan strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2024.

Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakaan secara sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencaapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Indikator kinerja program (*outcome*/hasil) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Indikator kinerja kegiatan (hasil antara / *intermediate outcome*) adalah sebuah hasil akumulasi dari output sub kegiatan yang dapat diidentifikasi dan diukur dalam waktu dekat, dan merupakan indikator hasil jangka panjang (outcome) dari program. Sedangkan sub kegiatan (*output* / keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu sub kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu sub kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) pada untuk

setiap indikator kinerja merupakan data capaian awal tahun perencanaan dan menjadi titik tolak perumusan target kinerja pada periode perencanaan.

Adapun Rencana Program Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu sebanyak 9 (sembilan) program yang dijabarkan melalui 17 (Tujuh Belas) kegiatan dan 52 (Lima Puluh Dua) sub kegiatan, dengan pagu pada tahun 2023 sebesar **Rp. 4.191.647.020** ***(Empat Milyar seratus Sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu dua puluh rupiah)***. Adapun uraian program, kegiatan dan sub kegiatannya adalah sebagai berikut:

1. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

   Kegiatan dan sub kegiatannya yaitu:

   a. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten Takalar
      - Peningkatan kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
      - Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
      - Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
2. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
   a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti social
      - Penyediaan Permakanan
      - Penyediaan Sandang
      - Penyediaan alat bantu
      - Pemberian akses kelayanan pendidikan dan kesehatan dasar
      - Pemberian layanan data dan pengaduan
   b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial
      - Pemberian Layanan kedaruratan
      - Penyediaan perbekalan kesehatan di luar panti
      - Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA
      - Pemberian layanan rujukan
3. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
   a. Pemeliharaan Anak - Anak Terlantar
      - Rujukan anak -anak terlantar
   b. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota
      - Pendataan Fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota
      - Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota
      - Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga

- Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

4. PROGRAM PENANGANAN BENCANA
   a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial
      - Penyediaan Makanan
   b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
      - Koordinasi, Sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
5. PROGRAM PENGELOLAAN TMP
   a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
      - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
      - PengamananTaman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
6. PROGRAM PENATAAN DESA
   a. Penyelanggaraan Penataan Desa
      - Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa
7. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA
   a. Fasilitasi Kerja sama antar Desa
      - Fasilitasi Kerja sama Antar Desa dalam Kabupaten/ Kota
      - Fasilitasi Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/ Kota
      - Fasilitasi pembangunan kawasan pedesaan
8. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
   a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa
      - Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
      - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
      - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
      - Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
9. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
   a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dibidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kab/ Kota
      - Fasilitasi Peningkatan Penataan pemberdayaan dan pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
      - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu,

LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa
- Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Tegnologi Tepat Guna (TTG)

10. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
    a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
        - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
        - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
        - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
        - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
        - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
        - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
        - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
        - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
    c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
        - Koordinasi dan penilaian barang milik darah SKPD
        - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
    d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
        - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
        - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
    e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah
        - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
    f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
        - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
        - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
    g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
        - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
        - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
        - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Tabel IV-1
RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET, TARGET DAN PAGU PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PERUBAHAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA PERUBAHAN OPD) TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target 2024			Pagu Indikatif (Rp)			Keterangan
										Rencana Perubahan 2024	APBD	Rencana Perubahan Perubahan 2024	Rencana Perubahan 2024	APBD 2024	Rencana Perubahan Perubahan 2024	
1	2					Semula	Menjadi	Semula	Menjadi							
						3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9q						**Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**							**4.191.647.020,00**	**5.434.278.122,00**	**5.318.323.306,00**	
	1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**660.000.000,00**	**345.000.000,00**	**345.000.000,00**	
	1	06				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**660.000.000,00**	**345.000.000,00**	**345.000.000,00**	
1	1	06	02			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase Peningkatan Kapasitas bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)**	**Persentase Peningkatan Kapasitas bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)**				**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	
	1	06	02	2.03		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Potensi sumber kesejahteraan sosial yang dilatih**	**Jumlah Potensi sumber kesejahteraan sosial yang dilatih**				**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	

	1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	100 Orang	100 Orang	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
	1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	10 Orang	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
	1	06	02	2.03	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	3.00 Sertifikat	3.00 Sertifikat	3.00 Sertifikat	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
2	1	06	04			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan, Pengemis diluar**	**Persentase Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan, Pengemis diluar**				**440.000.000,00**	**204.802.400,00**	**204.802.400,00**		

								panti	**panti**								
	1	0 6	0 4	2. 01		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Persentase Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan, Pengemis diluar panti**	**Persentase Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan, Pengemis diluar panti**				**320.000.000,00**	**102.000.000,00**	**102.000.000,00**		
	1	0 6	0 4	2. 01	000 1	Penyediaan Permakanan	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Orang	1000 Orang	1000 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00		
	1	0 6	0 4	2. 01	000 2	Penyediaan Sandang	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	200 Orang	200 Orang	80.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		

	1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	5 Orang	5 Orang	20.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
	1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	2000.00 Orang	500 Orang	500 Orang	20.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00		
	1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	17000 Orang	17000 Orang	17000 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00		
	1	06	04	2.02		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) yang direhabilitasi**	**Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) yang direhabilitasi**				**120.000.000,00**	**102.802.400,00**	**102.802.400,00**		
	1	06	04	2.02	0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan	20 Orang	20 Orang	20 Orang	10.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		

								Kewenangan Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota								
	1	06	04	2.02	0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	100 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00		
	1	06	04	2.02	0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	500.00 Orang	500.00 Orang	500.00 Orang	90.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00		
	1	06	04	2.02	0013	Pemberian Layanan Rujukan	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	40 Orang	40 Orang	10.000.000,00	1.802.400,00	1.802.400,00		
3	1	06	05			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase data DTKS Kab. Takalar**	**Persentase data DTKS Kab. Takalar**				**64.000.000,00**	**9.197.600,00**	**9.197.600,00**		
	1	06	05	2.01		**Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**	**Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**	**Persentase anak terlantar yang dipelihara**	**Persentase anak terlantar yang dipelihara**				**10.000.000,00**	**4.197.600,00**	**4.197.600,00**		

	1	06	05	2.01	0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	20 Orang	10.000.000,00	4.197.600,00	4.197.600,00		
	1	06	05	2.02		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Data Fakir Miskin dan terpenuhinya kebutuhan dasar bagi fakir miskin**	**Persentase Data Fakir Miskin dan terpenuhinya kebutuhan dasar bagi fakir miskin**				**54.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**		
	1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	68700 Orang	5000 Orang	5000 Orang	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
	1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	41260 Keluarga	4126 Keluarga	4126 Keluarga	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
	1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Keluarga	30 Keluarga	30 Keluarga	21.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
	1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	10 Orang	30.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		

4	1	06	06			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase korban bencanayang tertangani**	**Persentase korban bencanayang tertangani**				**150.000.000,00**	**101.000.000,00**	**101.000.000,00**		
	1	06	06	2.01		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Persentase korban bencana Alam dan Sosial yang tertangani**	**Persentase korban bencana Alam dan Sosial yang tertangani**				**130.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**		
	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	3000 Orang	3000 Orang	3000 Orang	130.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00		
	1	06	06	2.02		**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Persentase Kesiapsiagaan bencana teratasi**	**Persentase Kesiapsiagaan bencana teratasi**				**20.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**		
	1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	50 Orang	20.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		

5	1	06	07			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Persentase TMP yang terpelihara**	**Persentase TMP yang terpelihara**				**3.000.000,00**	**27.000.000,00**	**27.000.000,00**	
	1	06	07	2.01		**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**Persentase Taman Makan Nasional yang dipelihara**	**Persentase Taman Makan Nasional yang dipelihara**				**3.000.000,00**	**27.000.000,00**	**27.000.000,00**	
	1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	4 Makam	4 Makam	4 Makam	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
	1	06	07	2.01	0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	1.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	
	2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.531.647.020,00**	**5.089.278.122,00**	**4.973.323.306,00**	
	2	13				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**3.531.647.020,00**	**5.089.278.122,00**	**4.973.323.306,00**	
6	2	13	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota**	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota**				**3.411.647.020,00**	**4.311.078.122,00**	**4.225.123.306,00**	

	2	1 3	0 1	2. 01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**		
	2	1 3	0 1	2. 01	000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
	2	1 3	0 1	2. 01	000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
	2	1 3	0 1	2. 01	000 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
	2	1 3	0 1	2. 01	000 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		

	2	1 3	0 1	2. 01	000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
	2	1 3	0 1	2. 02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persantase penyusunan laporan Keuangan Perangkat Daerah**	**Persantase penyusunan laporan Keuangan Perangkat Daerah**				**3.213.657.500,00**	**4.010.580.922,00**	**3.924.630.506,00**		
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47.00 Orang/bulan	47.00 Orang/bulan	47.00 Orang/bulan	3.201.657.500,00	4.000.580.922,00	3.914.630.506,00		
	2	1 3	0 1	2. 02	000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
	2	1 3	0 1	2. 02	000 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
	2	1 3	0 1	2. 02	000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		

								SKPD	SKPD								
	2	1 3	0 1	2. 02	000 6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
	2	1 3	0 1	2. 02	000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.00 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
	2	1 3	0 1	2. 02	000 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00		
	2	1 3	0 1	2. 03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan Laporan Barang**	**Persentase penyusunan Laporan Barang**	-	-	-	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**		

	2	1 3	0 1	2. 03	000 3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
	2	1 3	0 1	2. 03	000 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
	2	1 3	0 1	2. 06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**15.000.000,00**	**14.993.900,00**	**90.293.900,00**		
	2	1 3	0 1	2. 06	000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	7 Paket	5.000.000,00	4.993.900,00	4.993.900,00		
	2	1 3	0 1	2. 06	000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	85.300.000,00		
	2	1 3	0 1	2. 07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah**				**1.000.000,00**	**100.000.000,00**	**0,00**		

	2	1 3	0 1	2. 07	001 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	0 Unit	1.000.000,00	100.000.000,00	0,00		
	2	1 3	0 1	2. 08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**151.989.520,00**	**165.497.200,00**	**165.497.200,00**		
	2	1 3	0 1	2. 08	000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	147.989.520,00	105.097.200,00	105.097.200,00		
	2	1 3	0 1	2. 08	000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4.000.000,00	60.400.000,00	60.400.000,00		
	2	1 3	0 1	2. 09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah**				**22.000.000,00**	**12.006.100,00**	**36.701.700,00**		

	2	1 3	0 1	2. 09	000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit	12 Unit	17.000.000,00	10.010.600,00	34.706.200,00		
	2	1 3	0 1	2. 09	000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	4.000.000,00	1.995.500,00	1.995.500,00		
	2	1 3	0 1	2. 09	001 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	4 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00		
7	2	1 3	0 2			**PROGRAM PENATAAN DESA**	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Persentase Penataan Desa**	**Persentase Penataan Desa**				**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**		
	2	1 3	0 2	2. 01		**Penyelenggaraan Penataan Desa**	**Penyelenggaraan Penataan Desa**	**Persentase Desa yang terfasilitasi dalam Penataan Desa**	**Persentase Desa yang terfasilitasi dalam Penataan Desa**				**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**		

	2	1 3	0 2	2. 01	000 1	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
8	2	1 3	0 4			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa**				**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**		
	2	1 3	0 4	2. 01		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa**				**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**		
	2	1 3	0 4	2. 01	000 1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	87 Dokumen	87 Dokumen	87 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		
	2	1 3	0 4	2. 01	000 4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	87 Dokumen	87 Dokumen	87 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
	2	1 3	0 4	2. 01	000 5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	87 Orang	87 Orang	87 Orang	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
	2	1 3	0 4	2. 01	001 3	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	87 Dokumen	87 Dokumen	87 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		

9	2	1 3	0 5			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan, Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang terdapat disemua desa dan kelurahan di kabupaten Takalar**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan, Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang terdapat disemua desa dan kelurahan di kabupaten Takalar**				**110.000.000,00**	**768.200.000,00**	**738.200.000,00**		
	2	1 3	0 5	2. 01		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang ada diKabupaten Takalar**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang ada diKabupaten Takalar**				**110.000.000,00**	**768.200.000,00**	**738.200.000,00**		

	2	1 3	0 5	2. 01	000 2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	1.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		
	2	1 3	0 5	2. 01	000 3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga	6 Lembaga	6 Lembaga	3.000.000,00	558.200.000,00	558.200.000,00		

	2	1 3	0 5	2. 01	000 5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	86 Dokumen	86 Dokumen	86 Dokumen	103.000.000,00	200.000.000,00	170.000.000,00		
	2	1 3	0 5	2. 01	000 6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	86 Laporan	86 Laporan	86 Laporan	3.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		
	J U M L A H												**4.191.647.020,00**	**5.434.278.122,00**	**5.318.323.306,00**		

Tabel IV-2
RENCANA KERJA PERUBAHAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
(RENJA PERUBAHAN OPD)
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB.TAKALAR
TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA PERUBAHAN OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024			Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Rencana Perubahan 2024	APBD	Rencana Perubahan Perubahan 2024	Rencana Perubahan 2024	APBD 2024	Rencana Perubahan Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa							4.191.647.020,00	5.434.278.122,00	5.318.323.306,00							4.923.566.804,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							660.000.000,00	345.000.000,00	345.000.000,00							280.000.000,00	
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							660.000.000,00	345.000.000,00	345.000.000,00							280.000.000,00	
1	1	06	02			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**							3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00							70.000.000,00	
	1	06	02	2.03		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**							3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00			-	-	-		70.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	600 Orang	-	150 Orang	100 Orang	100 Orang	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota																	

							Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	40 orang	-	10 Orang	10 Orang	10 Orang	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			30.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1	06	02	2.03	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)																	
							Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Sertifikat	-	3.00 Sertifikat	3.00 Sertifikat	3.00 Sertifikat	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	1	06	04			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**							**440.000.000,00**	**204.802.400,00**	**204.802.400,00**							55.000.000,00	
	1	06	04	2.01		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**							**320.000.000,00**	**102.000.000,00**	**102.000.000,00**			-	-	-		30.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Orang	-	1000 Orang	1000 Orang	1000 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang																	
							Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	600 Orang	-	200 Orang	200 Orang	200 Orang	80.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu																	

							Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	-	5 Orang	5 Orang	5 Orang	20.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	11.650 Orang	2409 Orang	2000.00 Orang	500 Orang	500 Orang	20.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	11.150 Orang	0	17000 Orang	17000 Orang	17000 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1	06	04	2.02		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**							**120.000.000,00**	**102.802.400,00**	**102.802.400,00**			-	-	-		25.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1	06	04	2.02	0002	Pemberian Layanan Kedaruratan																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	-	20 Orang	20 Orang	20 Orang	10.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1	06	04	2.02	0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	400 Orang	41 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

	1	06	04	2.02	0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA																
							Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	2000 Orang	45 Orang	500.00 Orang	500.00 Orang	500.00 Orang	90.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan	-	-			10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1	06	04	2.02	0013	Pemberian Layanan Rujukan																
							Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	160 Orang	20 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	10.000.000,00	1.802.400,00	1.802.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3	1	06	05			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**							**64.000.000,00**	**9.197.600,00**	**9.197.600,00**							97.500.000,00	
	1	06	05	2.01		**Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**							**10.000.000,00**	**4.197.600,00**	**4.197.600,00**			-	-	-		7.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1	06	05	2.01	0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar																
							Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	-	20 Orang	20 Orang	20 Orang	10.000.000,00	4.197.600,00	4.197.600,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			7.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1	06	05	2.02		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	-	-		-	-	-	**54.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**			-	-	-		90.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																
							Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	275.820 Orang	-	68700 Orang	5000 Orang	5000 Orang	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua	Pajak Daerah	-	-			15.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

																Kel/Desa							
	1	0 6	0 5	2.0 2	000 2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	162.811 Orang	-	41260 Keluarga	4126 Keluarga	4126 Keluarga	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			25.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1	0 6	0 5	2.0 2	000 3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																	
							Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	162.811 Orang	48.988 Orang	30 Keluarga	30 Keluarga	30 Keluarga	21.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			25.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1	0 6	0 5	2.0 2	000 4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat																	
							Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	-	10 Orang	10 Orang	10 Orang	30.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			25.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4	1	0 6	0 6			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**							**150.000.000,00**	**101.000.000,00**	**101.000.000,00**							17.500.000,00	
	1	0 6	0 6	2.0 1		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**							**130.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**			-	-	-		12.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1	0 6	0 6	2.0 1	000 1	Penyediaan Makanan																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	12.000 Orang	293 Orang	3000 Orang	3000 Orang	3000 Orang	130.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaanny a Bidang	-	-			12.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

																	Kesehatan						
	1	0 6	0 6	2.0 2		**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**							**20.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**			-	-	-		5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1	0 6	0 6	2.0 2	000 2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana																	
							Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	600 Orang	100 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	20.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
5	1	0 6	0 7			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**							**3.000.000,00**	**27.000.000,00**	**27.000.000,00**							40.000.000,00	
	1	0 6	0 7	2.0 1		**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**							**3.000.000,00**	**27.000.000,00**	**27.000.000,00**			-	-	-		40.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1	0 6	0 7	2.0 1	000 2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	16 Makam	4 Makam	4 Makam	4 Makam	4 Makam	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	1	0 6	0 7	2.0 1	000 3	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																	

							Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	14 Makam	4 Makam	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	1.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Pendapatan Bagi Hasil	-	-			30.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.531.647.020,00**	**5.089.278.122,00**	**4.973.323.306,00**							4.643.566.804,00	
	2	13				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**3.531.647.020,00**	**5.089.278.122,00**	**4.973.323.306,00**							4.643.566.804,00	
6	2	13	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**3.411.647.020,00**	**4.311.078.122,00**	**4.225.123.306,00**							4.518.566.804,00	
	2	13	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**			-	-	-		32.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	2 Dokumen	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			12.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	

							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	-	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**3.213.657.500,00**	**4.010.580.922,00**	**3.924.630.506,00**			-	-	-		3.978.284.404,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	188 Orang	518 Orang	47.00 Orang/bulan	47.00 Orang/bulan	47.00 Orang/bulan	3.201.657.500,00	4.000.580.922,00	3.914.630.506,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil	-	-			3.953.284.400,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																	

							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	8 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 Dokumen	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8 Dokumen	4 Laporan	1.00 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	-	-			4,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**			-	-	-		10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																	

							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	8 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**15.000.000,00**	**14.993.900,00**	**90.293.900,00**			-	-	-		225.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34 Paket	7 Paket	7 Paket	7 Paket	7 Paket	5.000.000,00	4.993.900,00	4.993.900,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1196 Laporan	50 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	85.300.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			220.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**1.000.000,00**	**100.000.000,00**	**0,00**			-	-	-		7.600.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	-	1 Unit	1 Unit	0 Unit	1.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	-			7.600.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

	2	1 3	0 1	2.0 8		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**151.989.520,00**	**165.497.200,00**	**165.497.200,00**			-	-	-		175.682.400,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	1 3	0 1	2.0 8	000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	147.989.520,00	105.097.200,00	105.097.200,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			142.982.400,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	1 3	0 1	2.0 8	000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16 Laporan	6 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4.000.000,00	60.400.000,00	60.400.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			32.700.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	1 3	0 1	2.0 9		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**22.000.000,00**	**12.006.100,00**	**36.701.700,00**			-	-	-		90.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	1 3	0 1	2.0 9	000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	64 Unit	1 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	17.000.000,00	10.010.600,00	34.706.200,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			40.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	1 3	0 1	2.0 9	000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	4.000.000,00	1.995.500,00	1.995.500,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			25.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	1 3	0 1	2.0 9	001 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	

							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 Unit	-	4 Unit	4 Unit	4 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	-	-			25.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
7	2	13	02			**PROGRAM PENATAAN DESA**							**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**							5.000.000,00	
	2	13	02	2.01		**Penyelenggaraan Penataan Desa**							**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**			-	-	-		5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	02	2.01	0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa																	
							Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	10 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
8	2	13	04			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**							**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**							35.000.000,00	
	2	13	04	2.01		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**							**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**			-	-	-		35.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa																	
							Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	348 Dokumen	86 Dokumen	87 Dokumen	87 Dokumen	87 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa																	
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	348 Dokumen	86 Dokumen	87 Dokumen	87 Dokumen	87 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa																	

							Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	348 Orang	258 Orang	87 Orang	87 Orang	87 Orang	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa																		
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	348 Dokumen	86 Dokumen	87 Dokumen	87 Dokumen	87 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
9	2	13	05			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**							**110.000.000,00**	**768.200.000,00**	**738.200.000,00**							85.000.000,00	
	2	13	05	2.01		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**							**110.000.000,00**	**768.200.000,00**	**738.200.000,00**			-	-	-		85.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																	

							Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	28 Dokumen	-	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	1.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	24 Dokumen	6 Lembaga	6 Lembaga	6 Lembaga	6 Lembaga	3.000.000,00	558.200.000,00	558.200.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-			25.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa																	
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	344 Dokumen	55 Dokumen	86 Dokumen	86 Dokumen	86 Dokumen	103.000.000,00	200.000.000,00	170.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah	-	-			25.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																	
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	344 Laporan	86 Laporan	86 Laporan	86 Laporan	86 Laporan	3.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			25.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
											JUMLAH		**4.191.647.020,00**	**5.434.278.122,00**	**5.318.323.306,00**							**4.923.566.804,00**	

BAB V
PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Apabila dalam pelaksanaan Rencana Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2024, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada Perubahan Rencana Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar Tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPD dalam mendukung Tujuan dan Sasaran Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk:
   a. Melaksanakan Rencana Perubahan Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugasdan kewenangannya;
   b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Rencana Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Perubahan Tahun 2024.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Perubahan Tahun 2024, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKA) denganberpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Belana Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja Perubahan Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah mengacu kepada Renja Provinsi dan Renja Kementerian untuk menjaga konsistensi Program dan Kegiatan yang menjadi prioritas nasional dan provinsi.

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja perangkat daerah adalah penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Kepala Organisasi Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun berikutnya. Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya.

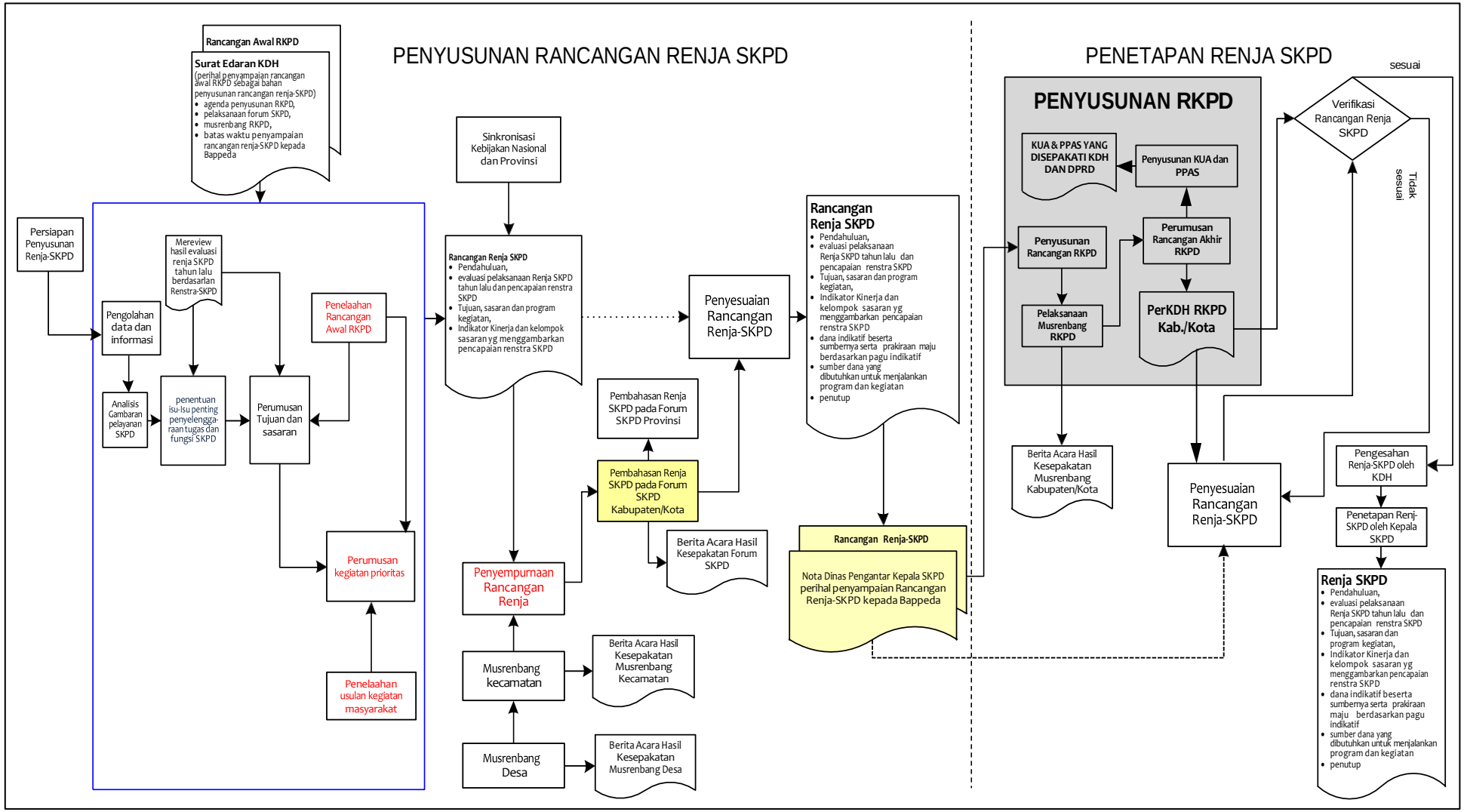
PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD
PENETAPAN RENJA SKPD
Rancangan Awal RKPD
Surat Edaran KDH
(perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan renja-SKPD)
agenda penyusunan RKPD,
pelaksanaan forum SKPD,
musrenbang RKPD,
batas waktu penyampaian rancangan renja-SKPD kepada Bappeda
Persiapan Penyusunan Renja-SKPD
Mereview hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu berdasarlan Renstra-SKPD
Pengolahan data dan informasi
Analisis Gambaran pelayanan SKPD
penentuan isu-isu penting penyelengga-raan tugas dan fungsi SKPD
Perumusan Tujuan dan sasaran
Penelaahan Rancangan Awal RKPD
Perumusan kegiatan prioritas
Penelaahan usulan kegiatan masyarakat
Sinkronisasi Kebijakan Nasional dan Provinsi
Rancangan Renja SKPD
Pendahuluan,
evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD
Tujuan, sasaran dan program kegiatan,
Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD
Penyempurnaan Rancangan Renja
Musrenbang kecamatan
Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kecamatan
Musrenbang Desa
Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Desa
Pembahasan Renja SKPD pada Forum SKPD Provinsi
Pembahasan Renja SKPD pada Forum SKPD Kabupaten/Kota
Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD
Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD
Rancangan Renja SKPD
Pendahuluan,
evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD
Tujuan, sasaran dan program kegiatan,
Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD
dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif
sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan
penutup
Rancangan Renja-SKPD
Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renja-SKPD kepada Bappeda
PENYUSUNAN RKPD
KUA & PPAS YANG DISEPAKATI KDH DAN DPRD
Penyusunan KUA dan PPAS
Penyusunan Rancangan RKPD
Perumusan Rancangan Akhir RKPD
Pelaksanaan Musrenbang RKPD
PerKDH RKPD Kab./Kota
Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kabupaten/Kota
Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD
Verifikasi Rancangan Renja SKPD
sesuai
Tidak sesuai
Pengesahan Renja-SKPD oleh KDH
Penetapan Renj-SKPD oleh Kepala SKPD
Renja SKPD
Pendahuluan,
evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD
Tujuan, sasaran dan program kegiatan,
Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD
dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif
sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan
penutup

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang sesuai dengan Undang – undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan perundangan lainnya yang mengatur Standar Operasional Tata Kerja (SOTK), kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam perencanaan dan penganggaran di perangkat daerah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan,Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005- 2025;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023- 2026;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor Tahun 2024 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 Nomor).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjabarkan program dan kegiatan Renstra kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ke dalam program/kegiatan tahunan;
2. Menyiapkan acuan bagi RAPBD;
3. Menyiapkan kerangka evaluasi kinerja program/kegiatan tahunan bagi kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Tujuan penyusunan Renja Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah agar terbangun konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024, meliputi:

BAB I Pendahuluan, menjelaskan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024. **BAB II Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan II Tahun 2024**, memuat tentang evaluasi pelaksanaan rencana kerja sampai dengan Triwulan II (Tahun 2024) sesuai dengan renstra dan tupoksi OPD, analisis kinerja pelayanan OPD, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas fungsi OPD, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III Rencana Kerja Dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, memuat tentang Rencana Program Kegiatan Perubahan Renja dan pendanaan OPD khusus untuk Tahun 2024.
BAB IV Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Sampai dengan Triwulan II

Evaluasi kinerja dimaksudkan untuk memberikan nilai atas suatu capaian kegiatan. Evaluasi kinerja setidaknya menunjukkan penilaian atas keberhasilan/kegagalan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategis.

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan lebih lanjut pengukuran kinerja, oleh karena itu evaluasi kinerja didasarkan pada ukuran ukuran dan indikator serta hasil pengukuran kinerja.

Evaluasi kinerja bertujuan agar dapat diketahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala pelaksanaan program/kegiatan dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan selanjutnya.

Adapun Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sampai dengan Triwulan II dapat dilihat pada Laporan Evaluasi Hasil Renja Triwulan II Periode Pelaksanaan 2024.

TABEL II-I

FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA KABUPATEN TAKALAR
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024

No	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun **2023-2026** (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu **(2023)**		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun **2024**) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Per Bulan						Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Kinerja Per Bulan						Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun **2024**)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun **2024**) yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun **2024** (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun **2024**)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun (5)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
																Januari		Februari		Maret		I		April		Mei		Juni		II		III		IV											
									K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3					4	5	6			7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		20		24		25		26 = 25/8 x 100%		27 = 7 + 25		28 = 27/6 x 100%		29	30
		5					**BAPPELITBANGDA**				**33.525.997.208**		**4.667.074.892**		**7.235.269.948**								**825.177.109**								**1.594.101.339**		-		-			**##########**	**31,69%**	**33,44%**		**7.086.353.340**				
		5	**01**				**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN**				**32.005.997.208**		**4.201.757.192**		**6.210.151.048**								**794.863.309**								**1.560.437.639**		-		-			**##########**	**42,25%**	**37,93%**		**6.557.058.140**				
		5	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota**	**100%**	**Persen**	**18.270.310.544**	**20,84%**	**2.953.323.531**	**100%**	**4.480.262.548**	**1,91%**	**167.733.388**	**3,77%**	**191.974.678**	**5,23%**	**343.455.643**	**10,91%**	**703.163.709**								**1.173.518.794**	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**21,14%**	**##########**	**21,14%**	**41,89%**	**23,08%**	**4.830.006.034**	**23,08%**	**26,44%**	**BAPPELITBANGDA**	
		5	01	01	2.01		**Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kegiatan perencanaan, pengangaran dan evaluasi kinerja perangk**	100,000%	Persen	118.000.000	23,08%	27.893.500	100,000%	64.881.300	12,50%	-	12,50%	1.980.400	12,50%	-	37,50%	1.980.400	0,000%	-	12,50%	2.760.400	0,000%	6.600.000	12,50%	9.360.400	0,000%	-	0,000%	-	50,0000%	11.340.800	50,000%	17,48%	30,777%	39.234.300	30,777%	33,255%	SEKRETARIAT	

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

2.1.1 Rekapitulasi Jumlah Laporan, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2024 yang Terakomodir di APBD 2024

Informasi tentang Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD 2024 yang terakomodir di APBD Tahun 2024 memberikan gambaran seberapa banyak jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Takalar pada Tahun 2024. Adapun jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan dimaksud dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel II-2

Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang ada dalam APBD 2024

APBD 2024							
No. Urut	Perangkat Daerah	Jmlh Prog.	Jmlh Keg	Jmlh Sub Keg.	Indikator		
					Jmlh Prog.	Jmlh Keg	Jmlh Sub Keg.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4	18	61	4	18	65
TOTAL		**4**	**18**	**61**	**4**	**18**	**65**

Sumber : Monev Renja 2024 Triwulan II

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah program sebanyak 4, jumlah kegiatan 18, dan jumlah sub kegiatan 61, Sedangkan jumlah indikator program sebanyak 4, jumlah indikator kegiatan sebanyak 18, dan jumlah indikator sub kegiatan sebanyak 65.

2.1.2 Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja APBD Triwulan II Tahun 2024

Informasi tentang realisasi anggaran kegiatan memberikan gambaran seberapa besar anggaran yang telah terserap pada Triwulan II untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam APBD 2024. Gambaran sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-3
Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Pada APBD Kabupaten Takalar Tahun 2024
Hingga Triwulan II

No. Urut	Perangkat Daerah	Pagu APBD	Realisasi S/D Triwulan II	Persentase	
		(Rp)	(Rp)	Fisik	Keu
1	*2*	*3*	*6*	*7*	*8*
1	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	7.235.269.948	2.419.278.448	31,69%	33,44%
TOTAL		**7.235.269.948**	**2.419.278.448**	**31,69%**	**33,44%**

Sumber : Laporan Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Triwulan II

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa total jumlah anggaran yang terealisasi dalam APBD untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 sebesar Rp. 2.419.278.448,-. Realisasi serapan anggaran dari pelaksanaan kegiatan hingga triwulan II adalah sebesar 33,44% dengan capaian realisasi fisik sebesar 31,69%.

2.1.2.1 Evaluasi Capaian Pendanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dalam Pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2024

Informasi tentang capaian pendanaan memberikan gambaran capaian berdasarkan realisasi anggaran pada masing-masing perangkat daerah dimulai dari program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terdapat pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah . Capaian kinerja pendanaan tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori **Rendah** untuk perangkat daerah dengan realisasi 0 – 20%, Kategori **Sedang** Untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran lebih besar dari >20 – 43% dan kategori **Tinggi** untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran diatas 43%. Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 43% didasarkan atas tingkat capaian yang diharapkan untuk triwulan II adalah 43%, sehingga jika terdapat capaian realisasi pendanaan lebih dari 43% dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi.

1. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Program

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pendanaan pada level program untuk Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan menggunakan kategori tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa jumlah program yang dilaksanakan Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebanyak 3 program dengan rincian capaian yang masuk pada kategori rendah ada sebanyak 2 program (realisasinya 0-20%). Untuk capaian kinerja kategori sedang sebanyak 2 program (realisasi >20-43%), dan untuk capaian kinerja kategori tinggi sebanyak 0 program (realisasi diatas 43 %).

2. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Kegiatan

Untuk evaluasi pelaksanaan Capaian kinerja pendanaan pada level kegiatan pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dapat dijelaskan bahwa terdapat 9 kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada Tahun 2024. Dari keseluruhan kegiatan tersebut terdapat 10 kegiatan yang realisasi pendanaannya hingga triwuan II masih dalam kategori rendah yaitu 0 – 20 persen, sedang yang berada dalam kategori sedang sebanyak 5 kegiatan, dan kategori tinggi dengan capaian realisasi diatas 43 persen sebanyak 3 kegiatan.

3. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level sub Kegiatan

Adapun evaluasi capaian kinerja pendanaan pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah pada level sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 24 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2024 terdapat 32 sub kegiatan yang capaian kinerja pendanaanya masih rendah, sedangkan yang masuk dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan sedang terdapat 13 sub kegiatan, dan 16 sub kegiatan dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan tinggi sebab telah dapat mencapai realisasi pendanaan lebih dari 43 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan II.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas capaian kinerja pendanaan berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-4
Rekapitulasi Capaian Kinerja Pendanaan berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Takalar Triwulan II Tahun 2024

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Kegiatan	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan		
			0 - 20%	>20 – 43%	> 43%		0 - 20%	>20 – 43%	> 43%		0 - 20%	>20 – 43%	> 43%
			(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4	2	2	0	18	10	5	3	61	32	13	16
TOTAL		**4**	**2**	**2**	**0**	**18**	**10**	**5**	**3**	**61**	**32**	**13**	**6**

Sumber : Laporan Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Triwulan II

2.1.2.2 Evaluasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dalam Pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2024

Informasi tentang capaian kinerja memberikan gambaran capaian kinerja realisasi target kinerja pada masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Capaian kinerja tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori **Rendah** untuk perangkat daerah dengan realisasi 0 – 20 persen, Kategori **Sedang** untuk perangkat daerah dengan realisasi kinerja lebih besar dari 20 – 43 persen dan kategori **Tinggi** untuk perangkat daerah dengan realisasi kinerja diatas 43 persen. Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 43 persen didasarkan atas tingkat capaian yang diharapkan untuk triwulan II adalah 43 persen, sehingga jika terdapat capaian realisasi kinerja lebih dari 45 persen dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi.

1. Evaluasi Capaian Kinerja Outcome pada Level Program

Untuk evaluasi pelaksanaan kinerja outcome pada level program dapat digambarkan sebagai berikut: untuk pencapaian target kinerja program pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

dapat dijelaskan bahwa dari 4 Program yang dilaksanakan sampai dengan triwulan kedua capaian kinerja program yang masih masuk pada kategori rendah atau dibawah 20 persen terdapat 2 program, untuk pencapaian kinerja dengan kategori sedang (diatas 20-43 persen) terdapat 1 program, selebihnya sebanyak 1 program yang capaian kinerja masuk dalam kategori tinggi yang pencapaiannya lebih dari 43 persen pada triwulan II Tahun 2024.

2. Evaluasi Capaian Kinerja Output Pada Level Kegiatan

Sebagai gambaran pencapaian target kinerja kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 9 kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan kedua terdapat 8 kegiatan yang capaian kinerjanya kategori masih rendah atau dibawah 20 persen, sedangkan yang capaian kinerja kategori sedang terdapat 4 kegiatan, selebihnya terdapat 5 kegiatan yang capaian kinerja masuk dalam kategori pencapaian lebih dari 43 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan II Tahun 2024.

3. Evaluasi Capaian Kinerja Output Pada Level sub Kegiatan

Sebagai gambaran pencapaian target kinerja sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 61 sub kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan kedua dapat dijelaskan bahwa yang capaian kinerja masih rendah atau dibawah 20 persen terdapat 23 sub kegiatan, sedangkan yang capaian kinerja sedang sebanyak 15 kegiatan, selebihnya yang capaian kinerja masuk dalam kategori tinggi sebanyak 23 sub kegiatan, yaitu pencapaian lebih dari 43 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan II Tahun 2024.

Adapun gambaran pencapaian target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan dapat digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel II-5
Rekapitulasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD
Kabupaten Takalar Triwulan II
Tahun 2024

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Kinerja			Jumlah Kegiatan	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Kinerja			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Kinerja		
			0 - 20 %	>20 – 43 %	> 43 %		0 - 20 %	>20 – 43 %	> 43 %		0 - 20 %	>20 – 43 %	> 43 %
			(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4	2	1	1	18	8	4	5	61	23	14	23
TOTAL		**4**	**2**	**1**	**1**	**18**	**8**	**4**	**5**	**61**	**23**	**14**	**23**

Sumber : Laporan Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Triwulan II

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Analisis kinerja pelayanan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja OPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai target indikator sasaran dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan. Untuk menganalisis kinerja pelayanan atau tingkat capaian kinerja sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Takalar.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Takalar tahun 2024 sampai dengan Triwulan II dan pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah.Proses ini dimaksud untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan sasaran. Pencapaian setiap indikator kinerja dilakukan dengan metedologi perbandingan capaian kinerja dengan target kinerja tahun 2024 sampai dengan triwulan II

sebagai tolak ukur dari keberhasilan suatu kegiatan.

Agar sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Takalar dapat tercapai, maka diperlukan poin-poin yang menjadi indikator kinerja sebagai tolak ukur penilaian dalam menentukan keberhasilan dari suatu kegiatan. Ada beberapa indikator kinerja yang dapat diukur untuk melihat capaian pelayanan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Takalar, seperti Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci, dan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB/SDGs).

2.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan hasil evaluasi kinerja Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang mengacu pada RPD Kabupaten dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukan target yang harus dicapai berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.

Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel II-6

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Takalar

No	INDIKATOR KINERJA	IKU	IKK	SPM	TPB	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian	Proyeksi	
						2023	2024	2025	2026	2024	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		13	14
1	Nilai Capaian Perencanaan Kinerja Dalam Nilai SAKIP Daerah	✓				22.4	22.9	23.4	23.9		24.1	24.3
2	Persentase kesesuaian Nomenklatur Program RPJMD dengan Nomenklatur Program RKPD	✓				100%	100%	100%	100%		100%	100%
3	Persentase Kesesuaian Nomenklatur Program RKPD dengan Nomenklatur Program KUA/PPAS	✓				100%	98%	100%	100%		100%	100%
4	Predikat inovasi daerah	✓				Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif		Inovatif	Inovatif
5	Persentase Produk Kelitbangan yang dijadikan dasar dalam perumusan Kebijakan dan Formulasi Program	✓				20%	20%	20%	20%		50%	50%
6	Nilai SAKIP pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	✓				B	BB	BB	A	BB	A	A

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

2.2.3 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Capaian SPM Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Takalar tidak ada.

2.2.4 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

Capaian Sustainable Development Goals (SDGs) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Takalar tidak ada.

2.3 Hambatan, Upaya Pencapaian, dan Rekomendasi Pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2024

2.3.1 Hambatan Dalam Pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2024 sampai dengan Triwulan ke II

Hambatan dan kendala dalam pelaksanakan kegiatan triwulan kedua dipengaruhi oleh:

1. Adanya peraturan pemerintah pusat yang menyebabkan harus dilakukan penyesuaian anggaran.
2. Belum meratanya kemampuan, pemahaman, pemanfaatan, pengelolaan dan penerapan teknologi informasi dan manajemen yang berbasis kinerja.
3. Keterbatasan proses pencairan anggaran yang harus disesuaikan antara sumber dana dan anggaran kas.
4. Terdapatnya beberapa kegiatan yang proses pengadaan barang dan jasanya belum dilaksanakan, baik dikarenakan masih dalam tahapan proses lelang ataupun belum masuk pada tahapan kegiatannya.
5. Beberapa komponen kegiatan pada sistem aplikasi perencanaan terkait kodefikasi program/kegiatan dan penganggaran mengalami perubahan sehingga kegiatan belum dapat dilaksanakan ini berdampak pada kode rekening belanja.

2.3.2 Upaya Dalam Pencapaian Pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2024 sampai dengan Triwulan ke II

Merujuk dari faktor penghambat Pelaksanaan rencana kerja pemerintah

daerah sampai dengan triwulan ke II tentunya mengalami berbagai kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Secara normatif dapat disampaikan beberapa upaya yang dilakukan dalam pencapaian keberhasilan kinerja disampaikan sebagai berikut:

1. Komitmen pimpinan dan Koordinasi OPD yang baik untuk melaksanakan kegiatan secara maksimal;
2. Adanya koordinasi/konsultasi yang sinergi antar struktur jabatan internal dan eksternal serta adanya komunikasi yang terjalin antar pemimpin dan yang dipimpin dalam organisasi;
3. Tersedianya Sarana dan prasarana pendukung yang memadai;
4. Penyerapan program dan kegiatan masing-masing bidang dan kesekretariatan berjalan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan;
5. Adanya pedoman/dokumen Standar Pelayanan/SOP dan regulasi yang sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan;
6. Kualitas SDM yang mampu, terampil dan memadai serta memiliki komitmen dan motivasi untuk melakukan tugas dan fungsi secara maksimal dalam rangka memberikan pelayanan prima;

2.3.3 Rekomendasi Pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2024 Triwulan selanjutnya

Berdasarkan uraian atas faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian kinerja, SKPD menyampaikan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Meningkatkan komunikasi dan integrasi program di lingkungan Bappelitbangda serta pengendalian dan evaluasi dilakukan terus menerus.
2. Peran aktif seluruh KPA dan PPTK didalam mengawal pelaksanaan Program dan Kegiatan yang berjalan.
3. Peran aktif Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dalam berkoordinasi termasuk memberikan informasi, sosialisasi maupun kebijakan- kebijakan lainnya;
4. Peningkatan kualitas SDM aparatur serta jumlah staf yang berkompeten;
5. Peningkatan sarana dan prasarana operasional sesuai dengan kebutuhan;
6. Perlunya melakukan penyusunan Renstra SKPD yang baik, diawali dengan orientasi dan melibatkan seluruh pejabat/staf;
7. Meningkatkan komunikasi dan integrasi Program dan Kegiatan antar

instansi, baik pada tataran perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan;

8. Perlunya melakukan evaluasi dan monitoring secara terus menerus dan berkelanjutan yang diiringi dengan pengelolaan data yang baik;
9. Pelaksanaan kegiatan sesuai Renstra dan RPD.
10. Dalam penyusunan dokumen perencanaan tahap berikutnya memiliki data dan informasi yang akurat, sehingga perencanaan dan penganggaran dapat dilakukan dengan baik, efektif, dan efisien.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran

Sebagaimana Tema Pembangunan Kabupaten Takalar tahun 2024 adalah "Optimalisasi Pengembangan Sumber Daya Alam untuk Pemulihan Ekonomi Menuju Takalar Yang Unggul,Sejahtera dan Bermartabat" dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Takalar Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas kehidupan keagamaan dan kualitas ketertiban,ketentraman dan perlindungan masyarakat.
2. Penegakan kedisplinan dan meningkatkan kinerja aparatur serta penata kelolaan pemerintahan daerah dan desa.

Sedangkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Takalar tahun 2024 sebagaimana ditetapkan dalam RPD Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 dan termuat dalam RKPD Kabupaten Takalar tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel III-1

Tujuan dan Sasaran RKPD Kabupaten Takalar 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2024
1	*2*	*3*	*4*
Meningkatkan martabat tatanan sosial kemasyarakata n	Meningkatnya kualitas kehidupan keagamaan	Adanya regulasi terkait peningkatan kualitas kehidupan beragama	1
	Meningkatnya kualitas ketertban ,ketentraman dan perlindungan masyarakat	% Penanganan angka kriminalitas	96
		% Gangguan ketertiban dan ketentraman yang	98

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2024
1	*2*	*3*	*4*
		tertangani	
		Cakupan bencana/kebakar an yang tertangani	
		Tingkat waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	98
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik yang berkualitas	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih akuntable dan demokratis	Jumlah temuan BPK	20
		Nilai LAKIP/SAKIP	A
		Opini BPK atas laporan keuangan	WTP
	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan public	%Indeks kepuasan masyarakat	80
		% Capaian SPM Pelayan dasar (pendidikan,keseh atan,PUPR,Perum ahan dan kawasan permukiman	85

Dengan memperhatikan tema dan prioritas serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta tujuan dan sasaran Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2023-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel III-2

Tujuan dan Sasaran Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target tahun 2024
Meningkatkan kualitas perencanaan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja daerah	Nilai Capaian Perencanaan Kinerja Dalam Nilai SAKIP Daerah	22.9
	Meningkatnya keselarasan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase kesesuaian Nomenklatur Program RPJMD dengan Nomenklatur Program RKPD	100%
		Persentase Kesesuaian Nomenklatur Program RKPD dengan Nomenklatur Program KUA/PPAS	100%
Meningkatkan kualitas inovasi daerah	Meningkatnya partisipasi Perangkat Daerah dalam pengembangan inovasi	Predikat inovasi daerah	Inovatif
	Meningkatnya kualitas kelitbangan daerah	Persentase Produk Kelitbangan yang dijadikan dasar dalam perumusan Kebijakan dan Formulasi Program	20%
Meningkatkan tatakelola Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Meningkatnya tatakelola kinerja pada Badan Perencaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Nilai SAKIP pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	BB

Sumber : Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2023-2026

3.2 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2024

Berdasarkan Kebijakan yang telah ditetapkan pada Tahun 2020 dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, disusun 4 (empat) Program dan 18 (delapan belas) Kegiatan dan 61 (enam puluh satu) Sub Kegiatan Tahun 2024 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Takalar sebagai berikut :

TABEL III-3
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2024

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024			Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Renja 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
2					3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	**1**	**2**			**Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**Rata-rata nilai sub komponen perencanaan strategis pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**Rp530.000.000**	**Rp1.250.500.000**	**Rp1.250.500.000**	**Kab. Takalar**	**Pajak Rokok**				**100%**	**Rp530.000.000**	**Bappelitbangda**
						Capaian kinerja perangkat daerah	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**									**100%**		
5	1	2	2,01		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Persentase Kesesuaian Program / kegiatan / Sub Kegiatan RKPD dengan kegiatan APBD**	**100%**	**21%**	**100%**	**100%**	**100%**	**Rp300.000.000**	**Rp766.900.000**	**Rp766.900.000**	**Kab. Takalar**	**Pajak Rokok**				**100%**	**Rp300.000.000**	**Bappelitbangda**
5	1	2	2,01	3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	4 Dokumen BA	-	2 dokumen BA	2 dokumen BA	1 dokumen BA	Rp45.000.000	Rp35.000.000	Rp35.000.000	Kab. Takalar	Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD	1 dokumen BA	Rp45.000.000	Bappelitbangda
5	1	2	2,01	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	4 Dokumen BA	1 dokumen BA	1 dokumen BA	1 dokumen BA	1 dokumen BA	Rp55.000.000	Rp35.000.000	Rp35.000.000	Kab. Takalar	Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD	1 dokumen BA	Rp55.000.000	Bappelitbangda

5	1	2	2,01	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	6 dokumen BA (4 BA Musrenbang RKPD; 1 BA Musrenbang RPJPD; 1 BA Musrenbang RPJMD)	1 dokumen BA	2 dokumen (BA Musrenbang RKPD dan BA Musrenbang RPJPD)	2 dokumen (BA Musrenbang RKPD dan BA Musrenbang RPJPD)	2 dokumen (BA Musrenbang RKPD dan BA Musrenbang RPJPD)	Rp100.000.000	Rp80.000.000	Rp80.000.000	Kab. Takalar	Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD, Kelompok Masyarakat	2 dokumen (BA Musrenbang RKPD dan BA Musrenbang RPJMD)	Rp100.000.000	Bappelitbangda
5	1	2	2,01	6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	3.400 Usulan	-	1.000 Usulan	1.000 Usulan	1.000 Usulan	Rp50.000.000	Rp35.000.000	Rp35.000.000	Kab. Takalar	Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD	700 Usulan	Rp50.000.000	Bappelitbangda
5	1	2	2,01	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	10 Dokumen (4 RKPD; 4 Perubahan RKPD; 1 RPJPD; 1 RPJMD)	2 dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	Rp50.000.000	Rp581.900.000	Rp581.900.000	Kab. Takalar	Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD	3 Dokumen (1 RPJMD; 1 RKPD Pokok; 1 Perubahan RKPD)	Rp50.000.000	Bappelitbangda
5	**1**	**2**	**2**		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase ketersediaan dan akses data/informasi perencanaan pembangunan daerah**	**100%**	**25%**	**100%**	**100%**	**100%**	**Rp70.000.000**	**Rp103.000.000**	**Rp103.000.000**	**Kab. Takalar**	**Pajak Rokok**	**-**			**100%**	**Rp70.000.000**	**Bappelitbangda**
5	1	2	2,02	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	20 dokumen analisis data dan informasi	5 dokumen	5 dokumen analisis data dan informasi	5 dokumen analisis data dan informasi	5 dokumen analisis data dan informasi	Rp30.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Kab. Takalar	Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD	5 dokumen analisis data dan informasi	Rp30.000.000	Bappelitbangda
5	1	2	2,02	2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	140 orang	-	38 Orang	38 Orang	38 Orang	Rp40.000.000	Rp53.000.000	Rp53.000.000	Kab. Takalar	Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD	35 Orang	Rp40.000.000	Bappelitbangda

5	**1**	**2**	**2**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah tepat waktu dan sesuai standar**	**100%**	**25%**	**100%**	**100%**	**100%**	**Rp110.000.000**	**Rp255.600.000**	**Rp255.600.000**	**Kab. Takalar**	**Pajak Rokok**	**-**			**83%**	**Rp110.000.000**	**Bappelitbangda**
5	1	2	2,03	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	16 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	Rp70.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Kab. Takalar	Pajak Rokok		6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD	4 laporan	Rp70.000.000	Bappelitbangda
5	1	2	2,03	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	16 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	Rp40.000.000	Rp155.600.000	Rp155.600.000	Kab. Takalar	Pajak Rokok		6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD	4 laporan	Rp40.000.000	Bappelitbangda
5	1	2	2,04		**Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	**Persentase penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Pembangunan Daerah**	**100%**	**25%**	**100%**	**100%**	**100%**	**Rp50.000.000**	Rp125.000.000	Rp125.000.000	Kab. Takalar	Pajak Rokok	-			**100%**	**Rp50.000.000**	Bappelitbangda
5	1	2	2,04	1	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	4800data	1200 data	1200 data	1200 data	1200 data	Rp50.000.000	Rp125.000.000	Rp125.000.000	Kab. Takalar	Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD	300 data	Rp50.000.000	Bappelitbangda
5	**1**	**3**			**Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Rata-rata nilai sub komponen perencanaan kinerja tahunan pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia**	**100%**	**15,40%**	**100%**	**100%**	**100%**	**Rp525.000.000**	**Rp479.388.500**	**Rp479.388.500**	**Kab. Takalar**	**Pajak Rokok**				**100%**	**Rp525.000.000**	**Bappelitbangda**

						Rata-rata nilai sub komponen perencanaan kinerja tahunan pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam																
						Rata-rata nilai sub komponen perencanaan kinerja tahunan pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan												
5	**1**	**3**	**2**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Persentase dokumen perencanaan bidang Pembangunan Manusia yang dihasilkan**	**100%**	**20,36%**	**100%**	**100%**	**100%**	**Rp175.000.000**	**Rp164.614.800**	**Rp164.614.800**	**Kab. Takalar**	**Pajak Rokok**	**-**			**100%**	**Rp175.000.000**	**Bappelitbangda**
5	1	3	2,01	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	76 dokumen	-	19 dokumen	19 dokumen	19 dokumen	Rp25.000.000	Rp4.614.800	Rp4.614.800	Kab. Takalar	Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD	19 dokumen	Rp25.000.000	Bappelitbangda
5	1	3	2,01	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	76 laporan	19 laporan	19 laporan	19 laporan	19 laporan	Rp25.000.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Kab. Takalar	Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD	19 laporan	Rp25.000.000	Bappelitbangda
5	1	3	2,01	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	76 laporan	19 laporan	19 laporan	19 laporan	19 laporan	Rp25.000.000	Rp20.000.000	Rp20.000.000	Kab. Takalar	Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD	19 laporan	Rp25.000.000	Bappelitbangda

5	1	3	2,01	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	32 dokumen	-	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	Rp25.000.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Kab. Takalar	Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD	8 dokumen	Rp25.000.000	Bappelitbangda
5	1	3	2,01	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	32 perangkat daerah		8 perangkat daerah	8 perangkat daerah	8 perangkat daerah	Rp25.000.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Kab. Takalar	Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD	8 perangkat daerah	Rp25.000.000	Bappelitbangda
5	1	3	2,01	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	32 perangkat daerah	-	8 perangkat daerah	8 perangkat daerah	8 perangkat daerah	Rp25.000.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Kab. Takalar	Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD	8 perangkat daerah	Rp25.000.000	Bappelitbangda
5	1	3	2,01	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	32 laporan	19 laporan	8 laporan	8 laporan	8 laporan	Rp25.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Kab. Takalar	Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD	8 laporan	Rp25.000.000	Bappelitbangda
5	**1**	**3**	**2**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Persentase perencanaan bidang perekonomian dan SDA yang terkordinasi dengan baik**	**100%**	**14,29%**	**100%**	**100%**	**100%**	**Rp175.000.000**	**Rp144.773.600**	**Rp144.773.600**	**Kab. Takalar**	**Pajak Rokok**				**100%**	**Rp175.000.000**	**Bappelitbangda**
5	1	3	2,02	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	20 dokumen	-	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	Rp25.000.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Kab. Takalar	Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD	5 dokumen	Rp25.000.000	Bappelitbangda
5	1	3	2,02	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	20 perangkat daerah	-	5 perangkat daerah	5 perangkat daerah	5 perangkat daerah	Rp25.000.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Kab. Takalar	Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD	5 perangkat daerah	Rp25.000.000	Bappelitbangda

5	1	3	2,02	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	20 perangkat daerah	-	5 perangkat daerah	5 perangkat daerah	5 perangkat daerah	Rp25.000.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Kab. Takalar	Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD	5 perangkat daerah	Rp25.000.000	Bappelitbangda
5	1	3	2,02	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	20 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	Rp25.000.000	Rp86.797.300	Rp86.797.300	Kab. Takalar	Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD	5 laporan	Rp25.000.000	Bappelitbangda
5	1	3	2,02	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	12 dokumen	-	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	Rp25.000.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Kab. Takalar	Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD	3 dokumen	Rp25.000.000	Bappelitbangda
5	1	3	2,02	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	12 perangkat daerah	-	3 perangkat daerah	3 perangkat daerah	3 perangkat daerah	Rp25.000.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Kab. Takalar	Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD	3 perangkat daerah	Rp25.000.000	Bappelitbangda
5	1	3	2,02	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	12 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	Rp25.000.000	Rp7.976.300	Rp7.976.300	Kab. Takalar	Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD	3 laporan	Rp25.000.000	Bappelitbangda
5	**1**	**3**	**2**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Persentase perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan yang terkordinasi dengan baik**	**100%**	**11,54**	**100%**	**100%**	**100%**	**Rp175.000.000**	**Rp170.000.100**	**Rp170.000.100**	**Kab. Takalar**	**Pajak Rokok**				**100%**	**Rp175.000.000**	**Bappelitbangda**
5	1	3	2,03	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 dokumen	-	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	Rp25.000.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Kab. Takalar	Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD	3 dokumen	Rp25.000.000	Bappelitbangda

5	1	3	2,03	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	4 perangkat daerah	-	4 perangkat daerah	4 perangkat daerah	4 perangkat daerah	Rp25.000.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Kab. Takalar	Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD	4 perangkat daerah	Rp25.000.000	Bappelitbangda
5	1	3	2,03	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	4 perangkat daerah	-	4 perangkat daerah	4 perangkat daerah	4 perangkat daerah	Rp25.000.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Kab. Takalar	Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD	4 perangkat daerah	Rp25.000.000	Bappelitbangda
5	1	3	2,03	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	Rp25.000.000	Rp70.000.000	Rp70.000.000	Kab. Takalar	Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD	3 laporan	Rp25.000.000	Bappelitbangda
5	1	3	2,03	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 dokumen	-	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	Rp25.000.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Kab. Takalar	Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD	3 dokumen	Rp25.000.000	Bappelitbangda
5	1	3	2,03	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	4 perangkat daerah	-	4 perangkat daerah	4 perangkat daerah	4 perangkat daerah	Rp25.000.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Kab. Takalar	Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD	4 perangkat daerah	Rp25.000.000	Bappelitbangda
5	1	3	2,03	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	Rp25.000.000	Rp50.000.100	Rp50.000.100	Kab. Takalar	Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD	3 laporan	Rp25.000.000	Bappelitbangda
5	**5**	**2**			**Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**Persentase hasil kelitbangan yang terpilih sebagai bahan perencanaan pembangunan**	**100%**	**37,50%**	**100%**	**100%**	**100%**	**Rp255.000.000**	**Rp1.025.118.900**	**Rp1.025.118.900**	**Kab. Takalar**					**100%**	**Rp255.000.000**	**Bappelitbangda**

5	**5**	**2**	**2**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Persentase peningkatan dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan**	**100%**	**50%**	**100%**	**100%**	**100%**	**Rp75.000.000**	**Rp50.000.000**	**Rp50.000.000**	**Kab. Takalar**					**20%**	**Rp75.000.000**	**Bappelitbangda**
5	5	2	2,01	14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	4 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Rp75.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Kab. Takalar	Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD	1 dokumen	Rp75.000.000	Bappelitbangda
5	**5**	**2**	**2**		**Penelitian dan pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Persentase peningkatan penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan**	**100%**	**0%**	**100%**	**100%**	**100%**	**Rp75.000.000**	**Rp495.119.600**	**Rp495.119.600**	**Kab. Takalar**					**20%**	**Rp75.000.000**	**Bappelitbangda**
5	5	2	2,02	1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	4 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Rp37.500.000	Rp345.119.600	Rp345.119.600	Kab. Takalar	DAU SG Bidang Pendidikan	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD	1 dokumen	Rp37.500.000	Bappelitbangda
5	5	2	2,02	10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	4 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Rp37.500.000	Rp150.000.000	Rp150.000.000	Kab. Takalar	DAU SG Bidang Pendidikan	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD, Kelompok Masyarakat	1 dokumen	Rp37.500.000	Bappelitbangda
5	**5**	**2**	**2**		**Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan**	**Persentase peningkatan penelitian pengembangan ekonomi dan pembangunan**	**100%**	**25%**	**100%**	**100%**	**100%**	**Rp25.000.000**	**Rp70.000.000**	**Rp70.000.000**	**Kab. Takalar**					**20%**	**Rp25.000.000**	**Bappelitbangda**
5	5	2	2,03	7	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Rp25.000.000	Rp70.000.000	Rp70.000.000	Kab. Takalar	DAU SG Bidang Pendidikan	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD	1 dokumen	Rp25.000.000	Bappelitbangda
5	**5**	**2**	**2**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Persentase peningkatan inovasi dan kelitbangan**	**100%**	**37,50%**	**100%**	**100%**	**100%**	**Rp80.000.000**	**Rp409.999.300**	**Rp409.999.300**	**Kab. Takalar**					**100%**	**Rp80.000.000**	**Bappelitbangda**

5	5	2	2,04	1	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen hasil Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Rp40.000.000	Rp393.999.500	Rp393.999.500	Kab. Takalar	DAU SG Bidang Pendidikan	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD	1 dokumen	Rp40.000.000	Bappelitbangda
5	5	2	2,04	5	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah laporan pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	4 laporan	2 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	Rp40.000.000	Rp15.999.800	Rp15.999.800	Kab. Takalar	Pajak Rokok	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	OPD	1 laporan	Rp40.000.000	Bappelitbangda
5	**1**	**1**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**Rp4.228.568.886**	**Rp4.480.262.548**	**Rp4.382.885.572**	**Kab. Takalar**	**Retribusi Daerah**				**100%**	**Rp4.228.568.886**	**Bappelitbangda**
5	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**Rp34.000.000**	**Rp64.881.300**	**Rp64.881.300**	**Kab. Takalar**	**Retribusi Daerah**				**100%**	**Rp34.000.000**	**Bappelitbangda**
5	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	Rp5.000.000	Rp13.128.900	Rp13.128.900	Kab. Takalar	Retribusi Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN	2 dokumen	Rp5.000.000	Bappelitbangda
5	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Rp5.000.000	Rp15.386.000	Rp15.386.000	Kab. Takalar	Retribusi Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN	1 dokumen	Rp5.000.000	Bappelitbangda
5	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Rp5.000.000	Rp5.120.800	Rp5.120.800	Kab. Takalar	Retribusi Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN	1 dokumen	Rp5.000.000	Bappelitbangda
5	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	8 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Rp5.000.000	Rp8.350.000	Rp8.350.000	Kab. Takalar	Retribusi Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN	1 dokumen	Rp5.000.000	Bappelitbangda

5	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	8 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Rp4.500.000	Rp8.350.000	Rp8.350.000	Kab. Takalar	Retribusi Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN	1 dokumen	Rp4.500.000	Bappelitbangda
5	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Rp5.000.000	Rp7.095.900	Rp7.095.900	Kab. Takalar	Retribusi Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN	1 dokumen	Rp5.000.000	Bappelitbangda
5	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 laporan	-	4 laporan	4 laporan	4 laporan	Rp4.500.000	Rp7.449.700	Rp7.449.700	Kab. Takalar	Retribusi Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN	4 laporan	Rp4.500.000	Bappelitbangda
5	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi perangkat daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**Rp3.847.468.886**	**Rp3.762.771.548**	**Rp3.665.394.572**	**Kab. Takalar**	**Retribusi Daerah**				**100%**	**Rp3.847.468.886**	**Bappelitbangda**
5	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	160 orang	32 orang	40 orang	40 orang	40 orang	Rp3.814.468.886	Rp3.735.771.848	Rp3.638.394.872	Kab. Takalar	DAU	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN	40 orang	Rp3.814.468.886	Bappelitbangda
5	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4600 dokumen	1204 dokumen	1150 dokumen	1150 dokumen	1150 dokumen	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Kab. Takalar	Retribusi Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN	1200 dokumen	Rp10.000.000	Bappelitbangda
5	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	Rp18.000.000	Rp9.999.900	Rp9.999.900	Kab. Takalar	Retribusi Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN	1 laporan	Rp18.000.000	Bappelitbangda

5	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	Rp5.000.000	Rp6.999.800	Rp6.999.800	Kab. Takalar	Retribusi Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN	1 laporan	Rp5.000.000	Bappelitbangda
5	**1**	**1**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**Rp19.500.000**	**Rp24.131.900**	**Rp24.131.900**	**Kab. Takalar**	**Retribusi Daerah**				**100%**	**Rp19.500.000**	**Bappelitbangda**
5	1	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	8 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	Rp5.000.000	Rp7.011.100	Rp7.011.100	Kab. Takalar	Retribusi Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN	2 dokumen	Rp5.000.000	Bappelitbangda
5	1	1	2.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	16 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	Rp4.500.000	Rp7.859.500	Rp7.859.500	Kab. Takalar	Retribusi Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN	4 dokumen	Rp4.500.000	Bappelitbangda
5	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	120 laporan	30 laporan	30 laporan	30 laporan	30 laporan	Rp10.000.000	Rp9.261.300	Rp9.261.300	Kab. Takalar	Retribusi Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN	30 laporan	Rp10.000.000	Bappelitbangda
5	**1**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**Rp55.600.000**	**Rp52.997.400**	**Rp52.997.400**	**Kab. Takalar**	**Retribusi Daerah**				**100%**	**Rp55.600.000**	**Bappelitbangda**
5	1	1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	17 unit	4 unit	1 unit	1 unit	1 unit	Rp4.500.000	Rp19.050.000	Rp19.050.000	Kab. Takalar	Retribusi Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN	1 unit	Rp4.500.000	Bappelitbangda
5	1	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	48 dokumen	-	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	Rp1.100.000	Rp24.227.400	Rp24.227.400	Kab. Takalar	Retribusi Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN	3 dokumen	Rp1.100.000	Bappelitbangda

5	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	160 orang	-	3 orang	3 orang	3 orang	Rp50.000.000	Rp9.720.000	Rp9.720.000	Kab. Takalar	Retribusi Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN	3 orang	Rp50.000.000	Bappelitbangda
5	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**Rp108.000.000**	**Rp176.834.000**	**Rp176.834.000**	**Kab. Takalar**	**Retribusi Daerah**				**100%**	**Rp108.000.000**	**Bappelitbangda**
5	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	200 dokumen	39 dokumen	100 dokumen	100 dokumen	100 dokumen	Rp8.000.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Kab. Takalar	Retribusi Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Media	100 dokumen	Rp8.000.000	Bappelitbangda
5	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1000 laporan	222 laporan	250 laporan	250 laporan	250 laporan	Rp100.000.000	Rp166.834.000	Rp166.834.000	Kab. Takalar	Retribusi Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN	250 laporan	Rp100.000.000	Bappelitbangda
5	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**Rp1.000.000**	**Rp161.696.000**	**Rp161.696.000**	**Kab. Takalar**	**Retribusi Daerah**				**100%**	**Rp1.000.000**	**Bappelitbangda**
5	1	1	2.07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	40 unit	-	3 unit	3 unit	3 unit	Rp1.000.000	Rp161.696.000	Rp161.696.000	Kab. Takalar	Retribusi Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN	3 unit	Rp1.000.000	Bappelitbangda
5	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**Rp123.000.000**	**Rp148.490.400**	**Rp148.490.400**	**Kab. Takalar**	**Retribusi Daerah**				**100%**	**Rp123.000.000**	**Bappelitbangda**
5	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144 laporan	34 laporan	36 laporan	36 laporan	36 laporan	Rp100.000.000	Rp106.490.400	Rp106.490.400	Kab. Takalar	DAU	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN	36 laporan	Rp100.000.000	Bappelitbangda

5	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	Rp23.000.000	Rp42.000.000	Rp42.000.000	Kab. Takalar	Pajak Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Non ASN	12 laporan	Rp23.000.000	Bappelitbangda
5	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**Rp40.000.000**	**Rp88.460.000**	**Rp88.460.000**	**Kab. Takalar**	**Retribusi Daerah**				**100%**	**Rp40.000.000**	**Bappelitbangda**
5	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	28 kendaraan	2 kendaraan	7 kendaraan	7 kendaraan	7 kendaraan	Rp20.000.000	Rp45.180.000	Rp45.180.000	Kab. Takalar	Retribusi Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN	7 kendaraan	Rp20.000.000	Bappelitbangda
5	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 sarana	-	1 sarana	1 sarana	1 sarana	Rp20.000.000	Rp43.280.000	Rp43.280.000	Kab. Takalar	Retribusi Daerah	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN	1 sarana	Rp20.000.000	Bappelitbangda
												Rp5.538.568.886	**Rp7.235.269.948**	**Rp7.137.892.972**							

Kepala Bappelitbangda,

Drs. ACHMAD RIVAI., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 196810121989081001

RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) TAHUN 2024

KABUPATEN : TAKALAR

PERANGKAT DAERAH : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target			Pagu			Keterangan
					Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	
2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5															
5	1				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN										
5	**1**	**2**			**Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**Rata-rata nilai sub komponen perencanaan strategis pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah**	**Rata-rata nilai sub komponen perencanaan strategis pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**Rp530.000.000**	**Rp1.250.500.000**	**Rp1.250.500.000**	
							Capaian kinerja perangkat daerah	**Capaian kinerja perangkat daerah**	**100%**	**100%**	**100%**				
5	1	2	2		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Persentase Kesesuaian Program / kegiatan / Sub Kegiatan RKPD dengan kegiatan APBD**	**Persentase Kesesuaian Program / kegiatan / Sub Kegiatan RKPD dengan kegiatan APBD**	**100%**	**100%**	**100%**	**Rp300.000.000**	**Rp766.900.000**	**Rp766.900.000**	
5	1	2	2	3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 dokumen BA	2 dokumen BA	1 dokumen BA	Rp45.000.000	Rp35.000.000	Rp35.000.000	
5	1	2	2	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 dokumen BA	1 dokumen BA	1 dokumen BA	Rp55.000.000	Rp35.000.000	Rp35.000.000	

5	1	2	2	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 dokumen (BA Musrenbang RKPD dan BA Musrenbang RPJPD)	2 dokumen (BA Musrenbang RKPD dan BA Musrenbang RPJPD)	2 dokumen (BA Musrenbang RKPD dan BA Musrenbang RPJPD)	Rp100.000.000	Rp80.000.000	Rp80.000.000	
5	1	2	2	6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1.000 Usulan	1.000 Usulan	1.000 Usulan	Rp50.000.000	Rp35.000.000	Rp35.000.000	
5	1	2	2	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	Rp50.000.000	Rp581.900.000	Rp581.900.000	
5	**1**	**2**	**2**		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase ketersediaan dan akses data/informasi perencanaan pembangunan daerah**	**Persentase ketersediaan dan akses data/informasi perencanaan pembangunan daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**Rp70.000.000**	**Rp103.000.000**	**Rp103.000.000**	
5	1	2	2	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	5 dokumen analisis data dan informasi	5 dokumen analisis data dan informasi	5 dokumen analisis data dan informasi	Rp30.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	
5	1	2	2	2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	38 Orang	38 Orang	38 Orang	Rp40.000.000	Rp53.000.000	Rp53.000.000	
5	**1**	**2**	**2**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah tepat waktu dan sesuai standar**	**Persentase pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah tepat waktu dan sesuai standar**	**100%**	**100%**	**100%**	**Rp110.000.000**	**Rp255.600.000**	**Rp255.600.000**	
5	1	2	2	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	Rp70.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	

5	1	2	2	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 laporan	4 laporan	4 laporan	Rp40.000.000	Rp155.600.000	Rp155.600.000	
5	1	2	2		**Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	**Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	**Persentase penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Pembangunan Daerah**	**Persentase penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Pembangunan Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**Rp50.000.000**	Rp125.000.000	Rp125.000.000	
5	1	2	2	1	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1200 data	1200 data	1200 data	Rp50.000.000	Rp125.000.000	Rp125.000.000	
5	**1**	**3**			**Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Rata-rata nilai sub komponen perencanaan kinerja tahunan pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia**	**Rata-rata nilai sub komponen perencanaan kinerja tahunan pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia**	**100%**	**100%**	**100%**	**Rp525.000.000**	**Rp479.388.500**	**Rp479.388.500**	
							Rata-rata nilai sub komponen perencanaan kinerja tahunan pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam	**Rata-rata nilai sub komponen perencanaan kinerja tahunan pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam**						
							Rata-rata nilai sub komponen perencanaan kinerja tahunan pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan	**Rata-rata nilai sub komponen perencanaan kinerja tahunan pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan**						

5	**1**	**3**	**2**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Persentase dokumen perencanaan bidang Pembangunan Manusia yang dihasilkan**	**Persentase dokumen perencanaan bidang Pembangunan Manusia yang dihasilkan**	**100%**	**100%**	**100%**	**Rp175.000.000**	**Rp164.614.800**	**Rp164.614.800**	
5	1	3	2	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	19 dokumen	19 dokumen	19 dokumen	Rp25.000.000	Rp4.614.800	Rp4.614.800	
5	1	3	2	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	19 laporan	19 laporan	19 laporan	Rp25.000.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	
5	1	3	2	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	19 laporan	19 laporan	19 laporan	Rp25.000.000	Rp20.000.000	Rp20.000.000	
5	1	3	2	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	Rp25.000.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	
5	1	3	2	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	8 perangkat daerah	8 perangkat daerah	8 perangkat daerah	Rp25.000.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	
5	1	3	2	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	8 perangkat daerah	8 perangkat daerah	8 perangkat daerah	Rp25.000.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	

5	1	3	2	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	8 laporan	8 laporan	8 laporan	Rp25.000.000	Rp100.000.000	Rp100.000.000	
5	**1**	**3**	**2**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Persentase perencanaan bidang perekonomian dan SDA yang terkordinasi dengan baik**	**Persentase perencanaan bidang perekonomian dan SDA yang terkordinasi dengan baik**	**100%**	**100%**	**100%**	**Rp175.000.000**	**Rp144.773.600**	**Rp144.773.600**	
5	1	3	2	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	Rp25.000.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	
5	1	3	2	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	5 perangkat daerah	5 perangkat daerah	5 perangkat daerah	Rp25.000.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	
5	1	3	2	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	5 perangkat daerah	5 perangkat daerah	5 perangkat daerah	Rp25.000.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	
5	1	3	2	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	5 laporan	5 laporan	5 laporan	Rp25.000.000	Rp86.797.300	Rp86.797.300	
5	1	3	2	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	Rp25.000.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	

5	1	3	2	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	3 perangkat daerah	3 perangkat daerah	3 perangkat daerah	Rp25.000.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	
5	1	3	2	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	3 laporan	3 laporan	3 laporan	Rp25.000.000	Rp7.976.300	Rp7.976.300	
5	**1**	**3**	**2**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Persentase perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan yang terkordinasi dengan baik**	**Persentase perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan yang terkordinasi dengan baik**	**100%**	**100%**	**100%**	**Rp175.000.000**	**Rp170.000.100**	**Rp170.000.100**	
5	1	3	2	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	Rp25.000.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	
5	1	3	2	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	4 perangkat daerah	4 perangkat daerah	4 perangkat daerah	Rp25.000.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	
5	1	3	2	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	4 perangkat daerah	4 perangkat daerah	4 perangkat daerah	Rp25.000.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	
5	1	3	2	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	3 laporan	3 laporan	3 laporan	Rp25.000.000	Rp70.000.000	Rp70.000.000	

5	1	3	2	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	Rp25.000.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	
5	1	3	2	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	4 perangkat daerah	4 perangkat daerah	4 perangkat daerah	Rp25.000.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	
5	1	3	2	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	Rp25.000.000	Rp50.000.100	Rp50.000.100	
5	2				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										
5	**5**	**2**			**Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**Persentase hasil kelitbangan yang terpilih sebagai bahan perencanaan pembangunan**	**Persentase hasil kelitbangan yang terpilih sebagai bahan perencanaan pembangunan**	**100%**	**100%**	**100%**	**Rp255.000.000**	**Rp1.025.118.900**	**Rp1.025.118.900**	
5	**5**	**2**	**2**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Persentase peningkatan dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan**	**Persentase peningkatan dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan**	**100%**	**100%**	**100%**	**Rp75.000.000**	**Rp50.000.000**	**Rp50.000.000**	
5	5	2	2	14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Rp75.000.000	Rp50.000.000	Rp50.000.000	
5	**5**	**2**	**2**		**Penelitian dan pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Penelitian dan pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Persentase peningkatan penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan**	**Persentase peningkatan penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan**	**100%**	**100%**	**100%**	**Rp75.000.000**	**Rp495.119.600**	**Rp495.119.600**	

5	5	2	2	1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek aspek Sosial	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Rp37.500.000	Rp345.119.600	Rp345.119.600	
5	5	2	2	10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Rp37.500.000	Rp150.000.000	Rp150.000.000	
5	**5**	**2**	**2**		**Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan**	**Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan**	**Persentase peningkatan penelitian pengembangan ekonomi dan pembangunan**	**Persentase peningkatan penelitian pengembangan ekonomi dan pembangunan**	**100%**	**100%**	**100%**	**Rp25.000.000**	**Rp70.000.000**	**Rp70.000.000**	
5	5	2	2	7	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Rp25.000.000	Rp70.000.000	Rp70.000.000	
5	**5**	**2**	**2**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Persentase peningkatan inovasi dan kelitbangan**	**Persentase peningkatan inovasi dan kelitbangan**	**100%**	**100%**	**100%**	**Rp80.000.000**	**Rp409.999.300**	**Rp409.999.300**	
5	5	2	2	1	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen hasil Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen hasil Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Rp40.000.000	Rp393.999.500	Rp393.999.500	
5	5	2	2	5	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah laporan pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah laporan pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 laporan	1 laporan	1 laporan	Rp40.000.000	Rp15.999.800	Rp15.999.800	
5	**1**	**1**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota**	**100%**	**100%**	**100%**	**Rp4.228.568.886**	**Rp4.480.262.548**	**Rp4.382.885.572**	
5	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Persentase pemenuhan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**Rp34.000.000**	**Rp64.881.300**	**Rp64.881.300**	
5	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	Rp5.000.000	Rp13.128.900	Rp13.128.900	
5	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Rp5.000.000	Rp15.386.000	Rp15.386.000	

							RKA-SKPD	RKA-SKPD							
5	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Rp5.000.000	Rp5.120.800	Rp5.120.800	
5	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Rp5.000.000	Rp8.350.000	Rp8.350.000	
5	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Rp4.500.000	Rp8.350.000	Rp8.350.000	
5	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Rp5.000.000	Rp7.095.900	Rp7.095.900	
5	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	4 laporan	4 laporan	Rp4.500.000	Rp7.449.700	Rp7.449.700	
5	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi perangkat daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi perangkat daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**Rp3.847.468.886**	**Rp3.762.771.548**	**Rp3.665.394.572**	
5	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 orang	40 orang	40 orang	Rp3.814.468.886	Rp3.735.771.848	Rp3.638.394.872	
5	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1150 dokumen	1150 dokumen	1150 dokumen	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	

5	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	Rp18.000.000	Rp9.999.900	Rp9.999.900	
5	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	Rp5.000.000	Rp6.999.800	Rp6.999.800	
5	**1**	**1**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**Rp19.500.000**	**Rp24.131.900**	**Rp24.131.900**	
5	1	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	Rp5.000.000	Rp7.011.100	Rp7.011.100	
5	1	1	2.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	Rp4.500.000	Rp7.859.500	Rp7.859.500	
5	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	30 laporan	30 laporan	30 laporan	Rp10.000.000	Rp9.261.300	Rp9.261.300	
5	**1**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	**100%**	**100%**	**100%**	**Rp55.600.000**	**Rp52.997.400**	**Rp52.997.400**	
5	1	1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 unit	1 unit	1 unit	Rp4.500.000	Rp19.050.000	Rp19.050.000	
5	1	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	Rp1.100.000	Rp24.227.400	Rp24.227.400	

5	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 orang	3 orang	3 orang	Rp50.000.000	Rp9.720.000	Rp9.720.000	
5	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**Rp108.000.000**	**Rp176.834.000**	**Rp176.834.000**	
5	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100 dokumen	100 dokumen	100 dokumen	Rp8.000.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	
5	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 laporan	250 laporan	250 laporan	Rp100.000.000	Rp166.834.000	Rp166.834.000	
5	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**Rp1.000.000**	**Rp161.696.000**	**Rp161.696.000**	
5	1	1	2.07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	3 unit	3 unit	3 unit	Rp1.000.000	Rp161.696.000	Rp161.696.000	
5	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	**100%**	**100%**	**100%**	**Rp123.000.000**	**Rp148.490.400**	**Rp148.490.400**	
5	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	36 laporan	36 laporan	Rp100.000.000	Rp106.490.400	Rp106.490.400	
5	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	Rp23.000.000	Rp42.000.000	Rp42.000.000	
5	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**Persentase Pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**Rp40.000.000**	**Rp88.460.000**	**Rp88.460.000**	

5	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 kendaraan	7 kendaraan	7 kendaraan	Rp20.000.000	Rp45.180.000	Rp45.180.000	
5	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 sarana	1 sarana	1 sarana	Rp20.000.000	Rp43.280.000	Rp43.280.000	
J U M L A H												**Rp5.538.568.886**	**Rp7.235.269.948**	**Rp7.137.892.972**	

Takalar, Juli 2024

Mengetahui,
Kepala Bappelitbangda Kabupaten Takalar

Kepala Bappelitbangda,

(Drs. Achmad Rivai, M.Si)
NIP. 1968101219890081001

(Drs. Achmad Rivai, M.Si)
NIP. 196810121989081001

BAB IV

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Takalar tahun 2024 akan ditentukan oleh koordinasi dan sinergitas antara Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan Daerah dengan Bappelitbangda dan Badan Pengelola Keuangan Daerah, serta adanya pengendalian dan evaluasi yang cermat dan akurat. Oleh sebab itu, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Takalar harus melakukan langkah-langkah penyempurnaan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sehingga bermanfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kemajuan daerah, terkhusus bagi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan Daerah.

Dokumen ini sekaligus menjadi acuan dalam mensinergikan program dan kegiatan antara program prioritas Pemeritah Daerah dengan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan Daerah.

Berdasarkan dengan cakupan kewenangan, maka Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 mempunyai fungsi pokok;

1. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan seluruh program/kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Takalar;
2. Menciptakan kepastian arah kebijakan dan program kegitan prioritas yang merupakan komitmen Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan Daerah dengan pemangku kepentingan; dan
3. Dengan ditetapkannya Renja Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 sebagai bahan Penyusunan APBD-P Kabupaten Takalar Tahun 2024 sehingga nantinya bisa ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024;
4. Dengan ditetapkannya Renja Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 ini,

maka semua pihak yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah harus menjadikan Renja Perubahan ini sebagai acuan dan arahan operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Takalar;

5. Renja Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Tahun 2024;
6. Diharapkan dengan tersusunnya Renja Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi baik di sekretariat dan bidang – bidang agar konsisten dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

Takalar, Juli 2024

Kepala Bappelitbangda,

Drs. ACHMAD RIVAI., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 196810121989081001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI I

DAFTAR TABEL II

DAFTAR GAMBAR IV

KATA PENGANTAR V

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1 Latar Belakang
1.2 landasan HUkum
1.3 Maksud dan Tujuab
1.3.1 Maksud
1.3.2 Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2021 II-1

2.1 Evalusi Pelaksanaan Renja Perangkat daearah tahun Lalu dan Capaian Rebnstra Perangkat daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat daearah
2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Penting Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4 Reviuw terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKIII-1

3.1 *Telaahan Kebijakan Nasional dan Provinsi Sulawesi SelatanIII-1*
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat daerah 2

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK IV-1

4.1 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB V PENUTUP V-1

5.1 Catatan Ketersediaan Anggaran
5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan
5,3. Rencana Tindak Lanjut 1

DAFTAR TABEL

Tabel II-1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pencapaian Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak s/d Tahun 2021 Kabupaten Takalar II-2
Tabel II-2 Rekapitulasi Capaian Kinerja Program/Kegiatan dan sub KegiatanII-35
Tabel II-3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar II-38
Tabel II-4 Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program PrioritasII-52
Tabel II-5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 II-66
Tabel II-6 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Takalar II-139
Tabel III-1 Tujuan dan Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar Tahun 2023 III-3
Tabel IV-1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten TakalarIV-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1 Keterkaitan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya I-4

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan acuan perencanaan kegiatan OPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD. Adapun penyusunan Renja Peubahan OPD merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Renja Peubahan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar Tahun 2024 tidak terlepas dari Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar 2023-2026. Terdapat beberapa kegiatan prioritas yang dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar antaranya adalah percepatan pencapaian target indikator RPD Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026. Serta peningkatan perencanaan pembangunan dalam mencapai peningkatan daya saing daerah.

Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar ini diharapkan dapat benar-benar dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar Tahun 2024 mendatang.

Takalar, 2024

KEPALA DPPKBPPPA KAB.TAKALAR

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat Renja Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak dokumen perencanaan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak untuk periode 1 (satu) tahun.

Dalam penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar Tahun 2024 memperhatikan :

1. Penyelarasan target indikator utama (IKU) dan target indikator kunci (IKK) serta target indikator lainnya dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023-2026;
2. Kesesuian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026;
3. Kesesuaian prioritas pembangunan daerah dan program prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
4. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026;
5. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023;
6. Rencana Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Tahun 2023;
7. Rencana Kerja Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2023;
8. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023;
9. Isu-isu strategis yang berkembang;
10. Kebijakan Nasional;
11. Regulasi yang berlaku.

Gambar I-1

Keterkaitan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

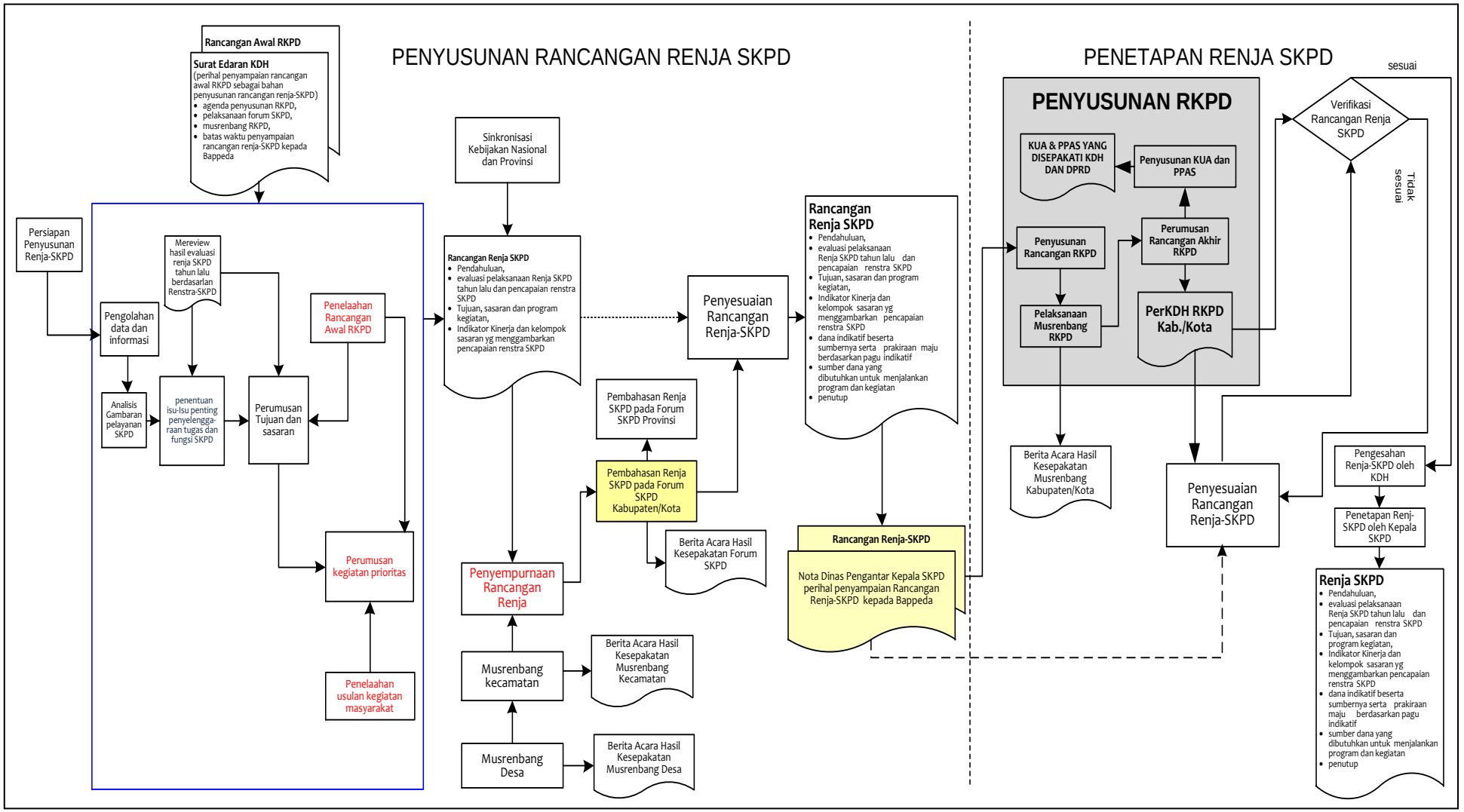

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah dan nasional, yang dalam perencanaannya telah dilakukan bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Selain itu Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang disusun ini juga telah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar Tahun 2025 dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 merupakan regulasi turunan yang harus mengacu pada Renstra.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar Tahun 2024 dilaksanakan melalui tahapan dan tata cara sebagai berikut :

1. Melakukan persiapan penyusunan pada Bulan Januari yang meliputi penetapan Tim Penyusun dan pengumpulan data teknis;
2. Menyusun Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 pada Bulan Januari dengan memperhatikan Rancangan RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2023;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Takalar melakukan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar Tahun 2026;
4. Melakukan penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar Tahun 2024 dengan memperhatikan Surat Rekomendasi Hasil Verifikasi;
5. Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Takalar Tahun 2025 yang telah disempurnakan diajukan oleh Kepala Bappelitbangda Kabupaten Takalar Kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan;
6. Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Takalar Tahun 2024 yang telah disempurnakan menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2024;
7. Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar Tahun 2024 yang telah disempurnakan sesuai hasil verifikasi, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah dokumen perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk periode 1 (satu) tahun.

Untuk mewujudkan keterkaitan program pembangunan daerah Kabupaten, Provinsi, maupun Pusat, maka Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar disusun dengan mengacu dan berpedoman pada RPD Tahun 2023–2026 yang telah ditetapkan lebih dahulu. Disamping itu, penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar Tahun 2024 juga memperhatikan sumber daya dan potensi daerah yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi Renja tahun yang lalu serta isu-isu strategis yang berkembang. Mengingat Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat penting bagi pencapaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara khusus dan pemerintah daerah secara umum, maka proses penyusunannya dilakukan secara sistematis, akurat dan terpadu dengan melibatkan seoptimal mungkin peran para pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan forum Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rancangan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar. Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif, holistik dan berkesinambungan yang disusun berdasarkan beberapa pendekatan berikut :

1. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut.
2. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
3. Pendekatan Politis, pendekatan ini mengkaji administrasi negara yang menekankan fungsi-fungsi politik dalam bernegara.
4. Pendekatan top-down, pendekatan ini dilaksanakan dengan mempedomani RPD dan Renstra PD sebagai arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah.
5. Pendekatan bottom-up, pendekatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan tahapan yang telah dilakukan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar Tahun 2024 tersebut serta merujuk pada ketentuan tentang perencanaan pembangunan daerah, secara jelas menunjukkan bahwa renja memiliki nilai-nilai strategis, yaitu :

1. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar Tahun 2024 merupakan pedoman penyelenggaraan tugas dan fungsi selama 1 (satu) tahun;
2. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar Tahun 2024 merupakan

pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024;

3. Rencana Kerja Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar Tahun 2024 merupakan alat atau instrumen pengendalian dalam pelaksanaan pengendalian rencana pembangunan tahunan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Rencana Kerja (Renja Perubahan) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar Tahun 2024 merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja tahunan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar Tahun 2025 merupakan pedoman penilaian keberhasilan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar melakukan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar Tahun 2026;
6. Melakukan penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar Tahun 2024 dengan memperhatikan Surat Rekomendasi Hasil Verifikasi;
7. Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar Tahun 2024 yang telah disempurnakan diajukan oleh Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Takalar Kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan;
8. Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar Tahun 2025 yang telah disempurnakan menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2024;
9. Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar Tahun 2024 yang telah disempurnakan sesuai hasil verifikasi, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar Tahun 2024 merupakan pedoman penilaian keberhasilan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

I.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang –undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Keluarga Berencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5080);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l9 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2019 Nomor 112);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 9271);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1721);
19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 471);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
23. Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020 – 2024;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
26. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2005–2025;
28. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2016 Nomor 7);

30. Peraturan Bupati Takalar Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
31. Peraturan Bupati Takalar Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 3);
32. Peraturan Bupati Takalar Nomor 223 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 223);
33. Peraturan Bupati Takalar Nomor …. Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor …);

I.3 Maksud dan Tujuan

I.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja Perubahan) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

a. Untuk menjabarkan program dan kegiatan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kedalam program/kegiatan tahunan
b. Menyiapkan acuan bagi RAPBD
c. Menyiapkan kerangka evaluasi kinerja program/kegiatan tahunan bagi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

I.3.2 Tujuan

Adapun Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja Perubahan)Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Renja PD) adalah agar terbangun konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 terdiri atas 5 (lima) bab sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan. Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar Tahun 2024 agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami.

BAB II Hasil Evaluasi Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024. Pada Bab ini berisi empat hal pokok yaitu Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar Tahun 2024, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar Tahun 2021, serta Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023.

BAB III Tujuan Dan Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar. Pada bab ini berisi dua hal pokok yaitu Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Tujuan dan Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar.

BAB IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar Tahun 2025. Pada bab ini berisikan penjelasan mengenai Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan dan uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan serta penyajian Tabel rencana program dan kegiatan beserta pagu indikatif Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 dan prakiraan maju Tahun 2026.

BAB V Penutup. Pada bab ini berisikan uraian penutup berupa Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; Kaidah-kaidah pelaksanaan; serta Rencana tindak lanjut Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024..

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar Tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun berjalan Tahun 2024, mengacu pada APBD tahun berjalan yang telah disahkan pada waktu penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun lalu, dan realisasi Renstra yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan realisasi APBD Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja dan pencapaian renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan tahun berjalan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pencapaian Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak s/d Tahun 2024 Kabupaten Takalar

Program/ giatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun **2023-2026** (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu **(2023)**		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun **2024**) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Per Bulan		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Kinerja Per Bulan			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								
								Januari	Februari	Maret	I	April	Mei	Juni	II								
		K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
4	5	6		7		8		9		10	11		12	13	14	15	16						
DPPKBPPPA				**31.131.803.340**		**4.396.192.371**		**##########**		**158.464.100**		**158.464.100**		**175.374.005**		**492.302.205**						**1.686.936.781**	

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				**24.989.944.940**		**3.557.520.149**		**##########**		**158.464.100**		**158.464.100**		**175.374.005**		**492.302.205**										**1.297.043.280**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KABUPATEN/KOTA	**Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota**	**100%**	**Persen**	**24.573.944.940**	**20,26%**	**3.552.940.149**	**100%**	**##########**	**1%**	**158.464.100**	**1%**	**158.464.100**	**3%**	**175.374.005**	**5%**	**492.302.205**							**42%**	**1.293.943.280**
Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	100%	Persen	55.000.000	25,00%	6.000.000	100%	25.001.100	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-							40,00%	2.698.300
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah yang disusun	8	Dokumen	20.000.000	2	6.000.000	2	12.480.900	-	-	-	-	-	-	-	-	1	#####		0,00%	-	-	1	1.570.800

Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang disusun	2	Dokumen	20.000.000	2	-	2	9.999.800	-	-	-	-	-	-	-	-	1	#####	-	-	-	-	1	1.127.500
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP yang disusun	1	Dokumen	15.000.000	1	-	1	2.520.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah**	100%	Persen	24.020.008.940	22,08%	3.432.597.468	100%	4.194.136.552	3,94%	158.464.100	3,94%	158.464.100	3,94%	158.464.100	11,82%	475.392.300						39,72%		1.216.794.795
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji	2016	Orang	19.455.222.700	504	2.574.286.913	468	2.907.175.512	37	158.464.100	37	158.464.100	37	158.464.100	111	475.392.300	74	#####	37	#####	74	#####	185	792.320.500

	Jumlah ASN yang menerima TPP	1728	Orang	4524786240	324	849.801.955	468	1.271.579.040	0	-	-	-	-	-	-	-	-	111	#####	37	#####	37	#####	185	4111.851.995
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (Neraca)	4	Laporan	20.000.000	1	3.577.600	1	6.810.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	#####	-	-	-	-	1	4.050.300
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Dokumen Penyusunan Laporan	16	Dokumen	20.000.000	2	4.931.000	2	8.572.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	#####	-	-	-	-	2	8.572.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100%	Persen	328.936.000	25,00%	60.043.700	100%	288.714.700	0,00%	-	0,00%	-	8,33%	16.909.905	8,33%	16.909.905							33,33%	72.680.185

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening jasa Komunikasi , smber daya air dan istrik yang di bayarkan	48	Rekening	318.936.000	12	60.043.700	12	150.024.700	-	-	-	-	-	16.654.105	-	16.654.105	3	#####	1	#####	2	#####	6	34.780.785
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan kantor dan perlengkapan kantor yang di sediakan	12	Laporan	5.000.000	12		12	8.530.000	-	-	-	-	3	255.800	3	255.800	-	-	-	-	1	#####	1	600.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	Laporan	5.000.000	12		12	130.160.000	-	-	0,0%	-	0	-	-	-	2	#####	2	#####	1	#####	5	37.299.400
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	100%	Persen	170.000.000	8,95%	54.298.981	100%	26.448.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-							56%	1.770.000

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsulasi	380	Kali	170.000.000	34	54.298.981	12	26.448.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	#####	-	-	-	-	7	1.770.000
PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	**Persentase indikator yang terpenuhi pada tingkat perangkat daerah**	**100%**	**Persen**	**10.000.000**	**0,00%**	**-**	**100%**	**9.999.900**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0,00%**	**-**							**0,000%**	**3.100.000**
Pelembagaan pengarustamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten /kota	**jumlah pelembagaan pengarustamaan gender (PUG**	100%	Persen	10.000.000	0,00%	-	100%	9.999.900	0,00%	-	0,000%	-	0,000%	-	0,00%	-							0%	3.100.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi perumusan PUG	1	Dokumen	10.000.000			1	9.999.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#####	-	3.100.000

PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan kekerasan terhadap perempuan lingkup Kabupaten yang dapat dicegah	**100%**	**Persen**	**406.000.000**	**8%**	**4.580.000**	**100%**	**406.000.000**	**0%**	-	**0%**	-	**0%**	-	**0%**	-								**0%**	-
Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan Lingkup Daerah Kabupaten Kota	**Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan Lingkup Daerah Kabupaten Kota**	100%	Persen	70.000.000	25,00%	4.580.000	100%	70.000.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-								0%	-
Koordinasi dan singronisasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten /kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan singronisasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten /kota	4	Dokumen	20.000.000	1	4.580.000	1	70.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Bagi Perempuan Korban		100%	Persen	212.000.000	0,00%	-	100%	212.000.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-								0%	-

kekerasan yang Memerlukan Koordinasi kewenangan Kab/Kota								000																
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten /Kota yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi	10	Kegiatan	5.000.000			1	212.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah kab/Kota		100%	Persen	124.000.000	0,00%	-	100%	124.000.000	0,00%	-	0,000%	-	0,000%	-	0,00%	-							0%	-
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan kab/Kota	Jumlah kegiatan peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan kab/Kota	1	Kegiatan	5.000.000			1	124.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URUSAN PEMERINTAHAN				**########**		**838.672.222**		**###**		**-**		**-**		**-**		**-**								**38**

BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								######																**9.893.501**
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	**Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga**	**100%**	**Persen**	**40.000.000**	**45%**	**148.409.222**	**100%**	**138.012.600**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**							**15%**	**8.034.701**
Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten /kota	**Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil parameter dan proyeksi penduduk untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan**	100%	Persen	40.000.000	45%	148.409.222	100%	138.012.600	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-							15%	8.034.701
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah data dan informasi keluarga yang tersedia	40	Laporan	20.000.000	10	88.880.000	10	55.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	#####	2	#####	-	-	3	8.034.701

Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan Kb	Jumlah dokumen pengolahan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	4	Dokumen	20.000.000	10	59.529.222	10	82.812.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	**Ratio Akseptor KB**	**100%**	**Persen**	**5.711.858.400**	**0,93%**	**690.263.000**	**100%**	**##########**		**-**		**-**		**-**	**0,00%**	**-**								**12,81%**	**355.398.800**
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	**Cakupan Penyediaan Data Mikro disetiap desa**	100%	Persen	552.507.600	25%	64.200.000	100%	1.078.292.600	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-								17%	192.583.800
Pengendalian Program KKBPK	Jumlah koordinasi terkait pengendalian program KKBPKB	40	Laporan	120.000.000	10	64.200.000	10	80.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	jumlah laporan Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12	Laporan	264.500.000			12	495.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	#####	1	#####	3	#####	4	192.583.800
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Dokumen Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1	Laporan	46.000.000			1	135.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	Jumlah Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta media luar ruang	1	Laporan	50.640.000			1	100.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Komunikasi Informasi dan edukasi KIE program Bangga Kencana sesuai kearifan budaya lokal	Jumlah Kegiatan Komunikasi Informasi dan edukasi KIE program Bangga Kencana sesuai kearifan budaya lokal	1	Dokumen	5.000.000			1	66.902.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Advokasi Program Bangga Kencana Oleh Pokja Advokasi Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Kegiatan Advokasi Program Bangga Kencana Oleh Pokja Advokasi Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	2	Dokumen	66.367.600			1	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	**Jumlah Pendayagunaan PKB atau PLKB yang didayagunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan embangunan daerah bidang pengendalian penduduk**	100	Persen	1.120.000.000	31%	200.000.000	100%	360.000.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0%	-							0%	-
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kade masyarakat institusi yang aktif disetiap Desa	2472	Orang	1.120.000.000	768	200.000.000	768	360.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota	**Jumlah Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan**	100%	Persen	2.769.350.800	14,94%	417.063.000	100%	501.336.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-							34%	43.615.000
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Fasyankes penditribusian alat obat kontrasepsi	101	Faskes	21.800.000	27	29.700.000	27	26.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2880	Akseptor	523550800	418	**369.063.000**	418	453.136.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152	#####	152	43.615.000

Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Pembinaan Pelayanan keluarga berencana dan kesehatan Reproduksi di fasilitasi Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	4	Laporan	222400000	1	18.300.000	1	22.1000.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaen/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	**jumlah Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49**	100%	Persen	1.270.000.000	25,00%	9.000.000	100%	2.116.739.7000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-								0%	119.2000.0000		
Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen pembangunan Lintas Sektor dikampung KB	4	Dokumen	20.000.000	1	9.000.000	1	42.4944.7000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kamping Keluarga Berencana	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (HASHAT) di Kamping Keluarga Berencana	10	Kecamatan	700.000.000			10	1.471.225.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	######	2	119.200.000
Pelaksanaan Dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di kampung Keluarga Berencana	Jumlah Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana	18	Kampung	550.000.000			10	603.020.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	**Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga**	**100%**	**Persen**	**390.000.000**	**0,00%**	**-**	**100%**	########		**-**		**-**		**-**	**0,00%**	**-**							**0,00%**	**26.460.000**
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	persentase pelaksanaan pembangunan melalui bina keluarga remaja ber KB	100%	Persen	390.000.000	0,00%	-	100%	300.000.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0%	-							0%	-

Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahter aan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberday aan Ekonomi Keluarga/U PPKS)	42	Unit	390.000.000			1	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		100%	Persen	-	0,00%	-	100%	1.461.600.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-								0%	26.460.000		

| | | |

7	8		9	10		11		12		13	14 = 13/8 x 100%	15 = 7 + 13	16 = 15/6 x 100%	17										18			
		#REF!		#REF!		#REF!		#REF!			#REF!			#REF!		#REF!			#REF!	#DIV/0!	#REF!		#VALUE!					
		35.266.346.140		6.464.179.563		#REF!		676.757.422			-			4.853.200		2.140.000		683.750.622				#VALUE!					
	Persen	25.352.464.940	######	4.169.233.963	#DIV/0!	1.412.585.060	#DIV/0!	614.132.882	#DIV/0!		-	#DIV/0!		4.853.200	#DIV/0!	2.140.000	#DIV/0!	621.126.082	#DIV/0!	43,97%	######	#VALUE!	#DIV/0!	#VALUE!	DPPKBPPPA		
	Persen	20.000.000	91,18%	14.397.000	100%	6.000.000	100,00%	1.736.000	0,00%		-	0,00%		-	0%	-	100,00%	1.736.000	100,00%	28,93%	94,12%	#VALUE!	#DIV/0!	#VALUE!	SEKRETARIAT		
8	Dokumen	20.000.000	2	14.397.000	2	6.000.000	2	1.736.000									2	1.736.000	100%	29%	4	16.133.000	50%	81%			
60	Orang/Hari		60	-	-	-											-	-	0%	0%	60	#VALUE!	100%	0%			
#REF!	#REF!																										
#REF	#REF!																										

!																							
	Persen	24.595.528.940	37,03%	3.997.482.063	100%	1.285.080.560	12,54%	599.524.800	0,00%	-	0%	-	0%	-	13%	599.524.800	13%	47%	40%	#VALUE!	#DIV/0!	#VALUE!	SEKRETARIAT	
1728	Orang	19.455.222.700	532	2.909.047.422	432	3.959.051.800 1.131.196.560	108	596.304.000							108	596.304.000	25%	0%	640	3.505.351.422	37%	18%		
1728	Orang	4524786240	532	952.004.641	432	1.131.196.560									-	-	0%	0%	532	952.004.641	31%	84%		
	Orang	575.520.000	210	120.000.000		143.880.000									-	-	0%	0%	210	120.000.000	0%	21%		
4	Laporan	20.000.000	1	16.430.000	1	5.073.000	1	3.220.800							1	3.220.800	100%	63%	2	19.650.800	50%	98%		
16	Dokumen	20.000.000	12	-	4	4.931.000									-	-	0%	0%	12	#VALUE!	75%	0%		
31,25%	15,87%																						
SR	SR																						
	Persen	318.936.000	75,00%	55.189.600	100%	91.000.000	25,00%	10.157.282	0,00%	-	0%	-	0%	-	25%	10.157.282	25%	11%	81%	65.346.882	#DIV/0!	20%	SEKRETARIAT	
48	Rekening	318.936.000	36	55.189.600	12	91.000.000	3	10.157.282							3	10.157.282	25%	11%	39	65.346.882	81%	20%		
25,000%	11,16%																						

SR	SR																								
	Persen	20.000.000	75%	13.000.300	100%	2.002.000	100%	1.044.800	0%	-	0%	-	0%	-	100%	1.044.800	100%	52%	100%	14.045.100	#DIV/0!	70%	SEKRETARIAT	
4	laporan	20.000.000	3	13.000.300	1	2.002.000	1	1.044.800							1	1.044.800	100%	52%	4	14.045.100	100%	70%		
######	52,19%																								
ST	R																								
	Persen	20.000.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	4.853.200	100,00%	2.140.000	100,00%	6.993.200	0%	0%	12,50%	6.993.200	0%	35%	SEKRETARIAT	
4	Dokumen	**20.000.000**							-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%		

		0																						
4	Dokumen								-	-	-	4.853.200	1	2.140.000	1	6.993.200	0%	0%	1	6.993.200	25%	0%		
0,000%	**0,00%**																							
SR	**SR**																							
	Persen	190.000.000	39,32%	89.165.000	100%	10.120.000	30,77%	1.670.000	0%	-	0%	-	0%	-	31%	1.670.000	31%	17%	40%	90.835.000	#DIV/0!	48%	SEKRETARIAT	
4	paket	20.000.000																						
380	Kali	170.000.000	151	89.165.000	13	10.120.000	4	1.670.000							4	1.670.000	31%	17%	155	90.835.000	41%	53%		

		0																					
30,77%	**16,50%**																						
SR	**SR**																						
100%	Persen	38.000.000	0,00%	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	-	-	0%	0%	SEKRETARIAT	
8	unit	20.000.000						-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	-	0%	0%		
25	paket	18.000.000						-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	-	0%	0%		
0,00%	**0,00%**																						
SR	**SR**																						

| | | |

		000																					
0,00%	0,00%																						
SR	SR																						
#REF!	#REF!																						
#REF!	#REF!																						
	Persen	140.000.000	1%	23.940.000	100%	423.000.000	3%	11.888.140	0%	-	0%	-	0%	-	3%	11.888.140	3%	3%	1%	#VALUE!	#DIV/0!	#VALUE!	DPPKBPPPA	
	Persen	60.000.000	0%	-	100%	210.000.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%	0%	#VALUE!	#DIV/0!	#VALUE!		

4	Dokumen	40.000.000	-	-	3	10.000.000	-	-			-	-			-	-	0%	0%	-	#VALUE!	0%	0%		
200	Orang	20.000.000	-	-	100	200.000.000	-	-	-	-	-	-			-	-	0%	0%	-	#VALUE!	0%	0%		
0,000%	**0,00%**																												
SR	**SR**																												
100%	Persen	80.000.000	1%	23.940.000	100%	213.000.000	7%	11.888.140	0%	-	0%	-	0%	-	7%	11.888.140	7%	6%	1%	#VALUE!	1%	#VALUE!		
40	Kecamatan	20.000.000	-	-	10	64.200.000		1.500.000							-	1.500.000	0%	2%	-	#VALUE!	0%	0%		
40	laporan	20.	-	-	10	88.800.000									-	-	0%	0%	-	#VAL	0%	0%		

		0 0 0 . 0 0 0																	U E !				
4	Dokumen	2 0 . 0 0 0 . 0 0 0	-	-	10	60.000.000	2	10.388.140							2	10.388.140	20%	1 7 %	-	# V A L U E !	0 %	0 %		
4	dokumen	2 0 . 0 0 0 . 0 0 0	1	23.940.000	-	-									-	-	0%	0 %	1	2 3 . 9 4 0 . 0 0 0	2 5 %	1 2 0 %		
1 0 0 %	**Persen**	**7 . 9 5 2 . 2 8 1 . 2 0 0**	**40, 53 %**	**2.271.005.600**	**100%**	**1.626.563.000**	**5,07%**	**50.736.400**	**0,00%**	**-**	**0,00 %**	**-**	**0 , 0 0 %**	**-**	**5 , 0 7 %**	**50.736.400**	**5,07%**	**3 , 1 2 %**	**4 3 , 1 7 %**	**# V A L U E !**	**4 3 %**	**# V A L U E !**	**D P P K B P P P A**	

100%	Persen	1.599.530.400	24%	660.515.000	100%	921.500.000	20%	46.136.400	0%	-	0%	-	0%	-	20%	46.136.400	19,70%	5,01%	28,36%	706.651.400	28%	44%		
140	mitra	265.470.400	35	4.375.000	35	80.000.000	10	7.950.000							10	7.950.000	29%	10%	45	12.325.000	32%	5%		
4	dokumen	80.000.000	1	25.000.000	-	-									-	-	0%	0%	1	25.000.000	25%	31%		
4	laporan	2025600000	1	70.640.000	1	150.000.000									-	-	0%	0%	1	70.640.000	25%	51%		

40	laporan	138.000.000	6	156.000.000	10	130.000.000									-	-	0%	0%	6	156.000.000	15%	0%		
40	balai	793.500.000	10	364.500.000	10	481.500.000	3	38.186.400							3	38.186.400	30%	8%	13	402.686.400	33%	51%		
40	Laporan	120.000.000	10	40.000.000	10	80.000.000									-	-	0%	0%	10	40.000.000	25%	33%		
9,76%	2,98%																								
SR	SR																								

	Persen	1.120.000.000	31%	480.000.000	100%	200.000.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%	31%	480.000.000	#DIV/0!	43%		
40	PLKB/PKB	40.000.000	-	-	-	-																		
2472	Orang	1.120.000.000	768	480.000.000	768	200.000.000									-	-	0%	0%	768	480.000.000	31%	43%		
0,000%	0,00%																							
SR	SR																							

100%	Persen	3.012.750.800	43,34%	819.990.600	100%	217.063.000	1%	4.600.000	0%	-	0%	-	0%	-	1%	4.600.000	1%	2%	46%	#VALUE!	46%	#VALUE!			
101	Faskes	21.800.000	21	49.917.000	27	29.700.000	2	2.300.000							2	2.300.000	7%	8%	23	52.217.000	23%	240%			
2880	Akseptor	523508000	1.360	**655.200.000**	503	169.063.000									-	-	0%	0%	1.360	655.200.000	270%	388%			
4	laporan	22240000000	1	114.873.600	1	18.300.000	1	2.300.000							1	2.300.000	0%	0%	2	117.173.600	200%	640%			

200	orang/peserta	223.4000.0000	-	-																				
4	laporan	20.0000.0000	-	-												-	-	0%	0%	-	#VALUE!	0%	0%		
1,85%	**1,94%**																							
SR	**SR**																							
100%	Persen	2.2220.0000.0000	23,68%	310.500.000	100%	288.000.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%	24%	#VALUE!	24%	#VALUE!		
4	dokumen	20.0000.0000	-	-	1	9.000.000										-	-	0%	0%	-	#VALUE!	0%	0%		

| | | |

		000																						
168	unit	1560000000037569640000			20	360.000.000									-	-	0%	0%	-	-	0%	0%		
2784	Kader				10	1.461.600.000									-	-	0%	0%	-	-	0%	0%		
		#REF!		#REF!		#REF!		#REF!		#REF!		#REF!		#REF!		#REF!			#REF!					
#REF!	**Persen**	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	DPPKBPPPA	
100%	Persen	53.000.0	0,69%	77.599.846	100%	19.472.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,000%	-	0,000%	-	0%	0%	25%	92.571.8	25%	175%		

		00																		46						
4	Dokumen	33.000.000	1	77.599.846	1	4.500.000										-	-	0%	0%	1	77.599.846	25%	17244%			
140	OPD	20.000.000	-	-	35	14.972.000										-	-	0%	0%	35	14.972.000	25%	75%			
#REF!	**Persen**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**0%**	**#REF!**	**0,00%**	**#REF!**	**0,00%**	**#REF!**	**0,00%**	**#REF!**	**0,00%**	**#REF!**	**0,00%**	**#REF!**	**#REF!**	**0%**	**0%**	**#REF!**	**#VALUE!**	**#REF!**	**#VALUE!**	**DPPKBPPPA**		
100%	Persen	4.580.000	0,00%	-	100%	#REF!	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-	0%	0%	0%	#VALUE!	0%	#VALUE!			

4	Dokumen	20.000.000	-	-	1	4.580.000										-	-	0%	0%	-	#VALUE!	0%	0%								
	Persen	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**0%**	**#REF!**	**0,00%**	**#REF!**	**0,00%**	**#REF!**	**0,00%**	**#REF!**	**0,000%**	**#REF!**	**0,000%**	**#REF!**	**0%**	**0%**	**#REF!**	**#VALUE!**	**#REF!**	**#VALUE!**	**DPPKBPPPA**								
	Persen	20.000.000	0,00%	-	100%	159.999.800	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,000%	-	0,000%	-	0%	0%	0%	#VALUE!	#DIV/0!	#VALUE!										
4	Dokumen	20.000.000	-	-	1	159.999.800										-	-	0%	0%	-	#VALUE!	0%	0%								
100%	**Persen**	**20.000**	**0,00%**	**-**	**100%**	**10.422.100**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,000%**	**-**	**0,000%**	**-**	**0,00%**	**0,000%**	**0,000%**	**#VALUE**	**0,000%**	**#VALUE**	**DPPKBBPP**								

		0.000																		**!**		**!**	**PPA**	
100%	Persen	20.000.000	0,00%	-	100%	10.422.100	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	#VALUE!	0,00%	#VALUE!		
40	Kecamatan	20.000.000	-	-	10	10.422.100									-	-	0%	0%	-	#VALUE!	0%	0%		
#REF!	**#REF!**																							

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun **2017-2022** (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)/ **(2018,2019,2020 dan 2021)**	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun **2022**) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Da	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun (5)	Unit Perangkat Daerah P	Keterangan

				dan Triwulan	nerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievalu	rja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahu	erah s/dtahun **2022** (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun **2022**)		enangung Jawab	

| | | |

5				6						7				8		9		10	11	12	13	14 = 13 / 8 x 100%	15 = 7 + 13	16 = 15 / 6 x 100%	17	18
100%	**Persen**	**13.348.022.340**	**77,86%**	**11.932.683.921**	**100%**	**6.425.930.920**	**34,55%**	**1.212.901.315**	**13%**	**1.331.473.463**	**13%**	**964.994.199**	**17%**	**-**	**61,03%**	**3.509.368.977**	**61,03%**	**54,61%**	**90,92%**	**15.356.984.898**	**90,92%**	**115,05%**	**DPPKBPPPA**			
100%	Persen	269.000.000	85,12%	214.648.439	100%	186.622.855	86,67%	25.962.710	0,00%	14.636.110			0%	-	100,00%	73.267.880	100,00%	39,26%	97,52%	287.916.319	97,52%	107,03%	SEKRETARIAT			
5	Dokumen	29.000.000	4	35.779.855	2	15.100.000	1	7.509.000		1.350.000			-	-	2	14.1	100%	93%	6	49.8	120%	172%				

																05.000				84.855				
60	Peserta	100.000.000	60	32.000.000	-		-	-	-	-				-	-	-	-	0%	0%	60	32.000.000	100%	32%		
5	Dokumen	50.000.000	4	59.999.925	1	10.000.110	1	3.870.110		5.490.110				-	-	1	100.000.110	100%	100%	5	700.000.035	100%	140%		
5	Dokumen	25.000.000	4	19.999.844	1	10.100.000	1	-	-	-				-	-	1	1.651.000	100%	16%	5	21.650.844	100%	87%		
5	Dokumen	25.000.000	-	-	1	10.020.000	1	4.986.000		3.835.000				-	-	1	9.877.000	100%	99%	1	9.877.000	20%	40%		

5	Dokumen		4	23.278.960	1	6.240.570	-	-	-	-			-	-	1	5.040.570	100%	81%	5	28.319.530	100%	0%		
36	Dokumen	40.000.000	27	43.589.855	9	135.162.175	9	9.597.600		3.961.000			-	-	9	32.594.200	100%	24%	36	76.184.055	100%	190%		
100,00%	**68,87%**																								
ST	**S**																								
100%	Persen	11.217.362.690	51,49%	10.107.913.902	100%	5.475.950.700	12,59%	1.173.731.505	26,82%	1.226.923.647			0%	-	60%	3.197.032.267	60%	58%	67%	13.219.878.169	67%	118%	SEKRETARIAT	

260	Orang	7.737.175.704	1.073	7.701.421.039	532	4.207.950.700	160	1.159.695.505	120	773.566.501			-	-	394	2.486.133.169	74%	59%	1.467	10.187.554.208	55%	132%		
1368	Orang	2.909.615.136	807	1.923.571.593	532	1.128.000.000	-	-	160	391.193.146			-	-	274	616.599.098	52%	55%	1.081	2.540.170.691	79%	87%		
900	Orang	334.800.000	636	288.300.000	210	120.000.000	-	-	60	56.200.000			-	-	90	74.300.000	43%	62%	726	362.600.000	81%	108%		
5	Dokumen	18.850.000	3	18.850.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	0%	0%	3	18.8	60%	100%		

52	Orang	85.918.000	52	85.068.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-		0%		52	50.000	100%	0%		
5	Laporan	30.766.500	4	25.053.060	5	20.000.000	1	14.036.000	3	5.964.000			-	-	4	200.000.000	80%	100%	8	45.053.060	160%	146%		
5	Laporan	40.785.000	3	24.431.800	-		-	-	-	-			-	-	-	-	0%	0%	3	24.431.800	60%	60%		
20	Dokumen	59.452.350	4	41.218.410			-	-	-	-			-	-	-	-	0%	0%	4	41.218.410	20%	69%		
62,11%	**68,92%**																							
R	**S**																							

100%	Persen	21.198.500	100%	26.330.090	0%	-	0%	-	0%	5.812.100			0%	-	0%	5.812.100	0%	0%	125%	32.142.190	125%	152%	SEKRETARIAT		
12	Laporan	21.198.500	12	26.330.090	-	-	-	-	3	5.812.100			-	-	3	5.812.100	0%	0%	15	32.142.190	125%	152%			
0,00%	**0,00%**																								
SR	**SR**																								
100,00%	Persen	175.553.000	74,55%	148.155.000	100,00%	15.000.000	100,00%	5.812.100	0,00%	-			100,00%	-	100,00%	10.665.300	100%	71%	80,00%	158.820.300	80%	90%	SEKRETARIAT		
51	Orang	**155.553.000**	41	148.155.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	0%	0%	41	148.155.5	80%	95%			

																					0 0 0				
4	laporan	20.000.000	-	-	4	15.000.000	1	5.812.100	-	-			2	-	3	10.665.300	75%	71%	3	10.665.300	75%	53%		
75,00%	**71,10%**																								
S	**S**																								
100%	Persen	483.421.000	84,52%	487.708.815	100%	518.904.615	8,06%	7.395.000	19%	27.755.000			0%	-	55%	115.644.484	55%	22%	121%	603.353.299	121%	125%	SEKRETARIAT	
60	Paket	100.451.000	48	105.057.200	12	382.651.615	-		-	-			-	-	-	-	0%	0%	48	105.057.200	80%	105%		

48	Eksemplar	3.000.000	-	-	48	3.000.000	2	300.000	6	900.000			-	-	12	3.000.000	25%	100%	12	3.000.000	25%	100%			
215	Kali	379.970.000	225	382.651.615	151	133.253.000	15	7.095.000	35	26.855.000			-	-	105	112.644.484	70%	85%	330	495.296.099	153%	130%			
31,51%	**61,51%**																								
SR	**R**																								
100%	Persen	424.441.150	66,67%	303.771.840	100%	24.824.750	0,00%	-	0,00%	-			0%	-	0%	-	0%	0%	67%	303.771.840	67%	72%	SEKRETARIAT		
2	Unit	20.154.750	0	0	2	20.154.750	-	-	-	-			-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%			
10	Unit	404.286.400	8	303.771.840	7	4.670.000	-	-	-	-			-	-	-	-	0%	0%	8	303	80%	75%			

																						.771.840				
0,000%	0,00%																								
SR	SR																								
100%	Persen	507.930.000	75,68%	391.325.556	100%	204.628.000	0,00%	-	34,09%	56.346.606			0%	-	51%	106.946.946	51%	52%	86%	498.272.502	86%	98%	SEKRETARIAT		
60	Rekening	276.930.000	48	206.525.556	12	82.828.000	-	-	6	16.033.606			-	-	9	42.203.946	75%	51%	95%	248.729.502	57	90%			
1260	Orang	231.000.000	951	184.800.000	252	121.800.000	-	-	84	40.313.000			-	-	126	64.743.000	50%	53%	85%	249.543.000	1.077	108%			

																								0					
62,50%	**52,05%**																												
R	**R**																												
100%	Persen	249.116.000	84,88%	252.830.279	0%	-	0%	-	0%	-			0%	-	0%	-	0%	0%	85%	252.830.279	85%	101%	SEKRETARIAT						
400	Unit	200.816.000	340	215.610.279	-	-	-		-	-			-	-	-	-	0%	0%	340	215.610.279	85%	107%							
10	Unit	48.300.000	8	37.220.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	0%	0%	8	37.220.000	80%	77%							
0,00	**0,00%**																												

%																							
SR	SR																						
55,19%	53,74%																						
R	R																						
100%	Persen	442.633.985	7%	82.548.300	100%	440.423.985	0%	17.233.750	21%	109.272.603			0%	-	22%	181.897.016	22%	41%	92%	264.445.316	92%	60%	DPPKBPPPA	
100%	Persen	202.218.669	15%	82.548.300	100%	200.008.669	0%	-	0%	-			0%	-	0%	-	0%	0%	15%	82.548.300	15%	41%		
48	orang/peserta	100.008.669	-	-	48	100.008.669	-	-					-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%		
20	Kecamatan	102.210.000	10	82.548.300	10	100.000.000	-	-	-	-			-	-	-	-	0%	0%	10	82.548.300	50%	81%		

																					8.300				
0,00%	0,00%																								
SR	SR																								
100%	Persen	240.415.316	0%	-	100%	240.415.316	0%	17.233.750	42%	109.272.603			0%	-	44%	181.897.016	44%	76%	170%	181.897.016	170%	76%			
49	Orang	99.995.316	-	-	49	99.995.316	-		49	67.620.000			-	-	49	67.620.000	100%	68%	49	67.620.000	100%	68%			
1	paket	7.220.000	-	-	1	7.220.000	-		-	-			-	-	1	7.220.000	100%	100%	1	7.220.000	100%	100%			

1	Dokumen	103.200.000	-	-	182	103.200.000	-	17.233.750	50	34.452.603			-	-	50	92.657.016	27%	90%	50	92.657.016	5000%	90%		
12	Kali	30.000.000	-	-	12	30.000.000	-	-	4	7.200.000			-	-	7	14.400.000	58%	48%	7	14.400.000	58%	48%		
71,45%	76,35%																							
S	T																							
35,73%	38,18%																							
SR	SR																							
100%	**Persen**	**16.761.232.000**	**83,13%**	**10.718.308.590**	**100%**	**2.479.199.000**	**4,17%**	**63.964.600**	**5,36%**	**155.111.000**			**0,00%**	**-**	**38,55%**	**1.067.49**	**38,55%**	**43,06%**	**90,31%**	**11.785.8**	**90%**	**70%**	**DPPKBPPPA**	

																9.200				**07.790**				
100%	Persen	5.232.117.000	69%	3.417.771.549	100%	660.515.000	0%	15.409.600	10%	117.357.000			0%	-	41%	377.940.200	41,38%	57,22%	77,78%	3.795.711.749	78%	73%		
25	mitra	4.375.000	-	-	25	4.375.000	-	-	-	-			-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%		
10	Kali	25.000.000	-	-	10	25.000.000	-	-	-	-			-	-	10	25.000.000	100%	100%	10	25.000.000	100%	100%		
45	Unit	812.150.000	41	649.752.100	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	0%	0%	41	649.752.100	91%	80%		

2	Paket	70.640.000	-	-	2	70.640.000	-	-	-	-			-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%		
6	kali	156.000.000	-	-	6	156.000.000	-	-	-	-			-	-	4	78.000.000	67%	50%	4	78.000.000	67%	50%		
180	Kecamatan	4.013.712.000	144	2.647.945.099	10	364.500.000	-	15.409.600	6	117.357.000			-		8	265.040.200	80%	73%	152	2.912.985.299	84%	73%		
20	Kali	150.240.000	15	120.074.350	5	40.000.000	-	-	-	-			-	-	2	9.900.000	40%	25%	17	129.974.350	85%	87%		
47,78%	**41,24%**																							
SR	**SR**																							

100%	Persen	2.400.000.000	80%	1.920.000.000	100%	480.000.000	0%	-	0%	-	50%	240.000.000	0%	-	50%	240.000.000	50%	50%	92%	2.160.000.000	92%	90%		
3085	Orang	2.400.000.000	2.468	1.920.000.000	768	480.000.000	-	-	-	-	384	240.000.000	-	-	384	240.000.000	50%	50%	92%	2.160.000.000	92%	90%		
50,00%	**50,00%**																							
SR	**SR**																							
100%	Persen	5.885.035.000	80,11%	3.350.928.166	100%	1.028.184.000	0%	-	11%	37.754.000	2%	248.545.000	0%	-	13%	286.299.000	13%	28%	86%	3.637.227.166	86%	62%		

420	Faskes	249.585.000	107	199.016.000	21	9.450.000	-	-	10	3.150.000	6	3.150.000	-	-	16	6.300.000	76%	67%	123	205.3160.000	29%	82%		
100	Orang	500.000.000	45	330.000.000	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	0%	0%	45	3300.000.000	45%	66%		
1810	Orang	453.510.000	1.810	717.245.500	648	208.393.000	-	-	60	31.854.000	-	62.645.000	-	-	60	94.499.000	9%	45%	1.870	811.744.500	103%	179%		
250	Unit	4.246.940.000	170	1.894.666.666	7	800.741.000	-	-	-	-	6	180.000.000	-	-	6	1800.000.000	86%	22%	176	2.074.666.666	70%	49%		

250	Unit	435.000.000	135	210.000.000	10	9.600.000		-	6	2.750.000	-	2.750.000	-	-	6	5.500.000	60%	57%	141	215.500.000	56%	50%		
46,23%	**38,36%**																							
SR	**SR**																							
100%	Persen	3.244.080.000	102,96%	2.029.608.875	100%	310.500.000	17%	48.555.000	0%	-	33%	114.705.000	0%	-	50%	163.260.000	50%	53%	105%	2.192.868.875	105%	68%		
315	Orang	150.000.000	345	84.718.875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	345	84.718.875	110%	56%		

90	kampung	3.094.080.000	72	1.944.890.000	18	310.500.000	3	48.555.000	-	-	6	114.705.000	-	-	9	163.260.000	50%	53%	81	2.108.150.000	90%	68%		
50,00%	**52,58%**																							
SR	**R**																							
48,00%	**44,06%**																							
SR	**SR**																							
100%	**Persen**	**5.478.809.680**	**97,52%**	**2.948.616.350**	**100%**	**2.132.900.000**	**0,00%**	**0,00%**	**3,33%**	**9625000000,00%**	**3,33%**	**69437200000,00%**	**0,00%**	**0**	**6,67%**	**790.622.000**	**6,67%**	**37,07%**	**97,92%**	**3.739.238.350**	**98%**	**68%**	**DPPKBPPPA**	

100%	Persen	5.478.809.680	97,52%	2.948.616.350	100%	2.132.900.000	0,00%	-	3%	96.250.000	3%	694.372.000	0%	-	6,67%	790.622.000	7%	37%	97,92%	3.739.238.350	98%	68%		
60	Orang	375.000.000	40	75.000.000	60	30.000.000	-	-	-	3.720.000	-	-	-	-	-	3.720.000	0%	12%	40	78.720.000	67%	21%		
50	Kelompok	260.000.000	30	156.000.000	50	653.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	30	156.000.000	60%	60%		
60	Orang	90.410.730	60	83.235.430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	60	83.235.430	100%	92%		

10	Kecamatan	1.449.400.000	-		10	1.449.400.000	-	-	4	92.530.000	4	694.372.000	-	-	8	786.902.000	80%	54%	8	786.902.000	80%	54%		
1840	Kelompok	3.303.998.950	1.840	2.634.380.920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	1.840	2.634.380.920	100%	80%		
26,67%	22,23%																							
SR	SR																							
26,67%	22,23%																							
SR	SR																							

100%	**Persen**	**630.005.815**	**78,57%**	**429.226.235**	**100%**	**29.999.966**	**20,00%**	**5.991.966**	**50,00%**	**8.411.966**	**30,00%**	**12.706.966**	**0,00%**	**-**	**100,00%**	**27.110.898**	**100%**	**90%**	**86%**	**456.337.133**	**86%**	**72%**	**DPPKBPPPA**	
100%	Persen	330.005.815	57,14%	140.057.000	100%	29.999.966	20,00%	5.991.966	50,00%	8.411.966	30,00%	12.706.966	0,00%	-	100,00%	27.110.898	100%	90%	71%	167.167.898	71%	51%		
30	Kali	189.999.815	-	-	10	29.999.966	2	5.991.966	5	8.411.966	3	12.706.966	-	-	10	27.110.898	100%	90%	10	27.110.898	33%	14%		
40	Kecamatan	140.006.000	40	140.057.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	40	140.057.000	100%	100%		
10	**90,37%**																							

0,00%																							
ST	T																						
100%	Persen	300.000.000	100%	289.169.235	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%	100%	289.169.235	100%	96%	
156	Orang	300.000.000	156	289.169.235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	156	289.169.235	100%	96%	
0,00%	0,00%																						
SR	SR																						
100,00%	90,37%																						
ST	T																						

100%	**Persen**	**1.356.160.060**	**39,38%**	**1.030.475.220**	**100%**	**25.020.000**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**-**	**0%**	**0%**	**39%**	**1.030.475.220**	**39%**	**76%**	**DPPKBPPPA**	
100%	Persen	1.214.316.560	78,75%	1.030.475.220	0%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-	0%	0%	79%	1.030.475.220	79%	85%		
40	Kali	319.856.560	33	247.704.420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	33	247.704.420	83%	77%		
40	Kali	894.460.000	30	782.770.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	30	782.770.800	75%	88%		

																									0 0						
0,000%	0,00%																														
SR	SR																														
100%	Persen	141.843.500	0%	-	100%	25.020.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	0%	0%	-	0%	0%									
10	Kecamatan	116.823.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%									
5	Kali	25.020.000	-	-	5	25.020.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%									
0,000%	0,00%																														
SR	SR																														
0,000%	0,00%																														
SR	SR																														

100%	**Persen**	**183.699.405**	**30,97%**	**33.699.460**	**100%**	**149.999.955**	**48%**	**26.634.000**	**0%**	**-**	**0%**	**73.300.000**	**0%**	**-**	**48%**	**99.934.000**	**48%**	**67%**	**63%**	**133.633.460**	**63%**	**73%**	**DPPKBPPPA**	
100%	Persen	183.699.405	30,97%	33.699.460	100%	149.999.955	48%	26.634.000	0%	-	0%	73.300.000	0%	-	48%	99.934.000	48%	67%	63%	133.633.460	63%	73%		
20	Kecamatan	38.382.885	8	18.906.660	10	19.476.225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	8	18.906.660	40%	49%		
40	Kali	14.792.800	40	14.792.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	40	14.792.800	100%	100%		

45	0rng	30.339.720	-	-	45	30.339.730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%		
50	orang	100.184.000			50	100.184.000	50	26.634.000		-	-	73.300.000	-	-	50	99.934.000	100%	100%	50	99.934.000	100%	100%		
SR	SR																							
100%	**Persen**	**1.056.041.400**	**76%**	**1.143.501.540**	**0%**	-	**0%**	-	**0%**	-	**0%**	-	**0%**	-	**0%**	-	**0%**	**0%**	76%	**1.143.501.540**	**76%**	**108%**		

100%	Persen	445.947.000	77%	533.407.140	0%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-	0%	0%	77%	533.407.140	77%	120%		
30	Kecamatan	105.080.000	20	233.044.790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	20	233.044.790	67%	222%		
40	Kecamatan	340.867.000	34	300.362.350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	34	300.362.350	85%	88%		
0,00%	**0,00%**																								
SR	**SR**																								
100%	Persen	610.094.400	75,00%	610.094.400	0%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-	0%	0%	75%	610.094.400	75%	100%		

																			4.400				
40	Kali	305.047.200	30	305.047.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	30	305.047.200	75%	100%		
40	Kali	305.047.200	30	305.047.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	30	305.047.200	75%	100%		

SR	SR
SR	SR

2.1.1 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2024 yang terakomodir di APBD 2024

Dinas **penegendalian** Penduduk ,Keluarga Berencana ,Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan anak untuk Monev Triwulan 1 dan II Tahun 2024

Dinas **penegendalian** Penduduk ,Keluarga Berencana ,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak untuk Monev Triwulan I dan II Dinas penegendalian Penduduk ,Keluarga Berencana ,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak mempunyai 2 urusan yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan pemerintahan bidang Penegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana penunjang pemerintahan untuk urusan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari 2 Program 2 kegiatan 4 sub kegiatan dan untuk urusan pengendalian penduduk keluarga berencana terdiri dari 3 program 7 kegiatan dan 18 sub kegiatan , dan untuk total keselurahan total pagu anggaran 10.906.281.152

Tabel II.2
Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
yang ada dalam APBD 2024

APBD 2024							
No	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Indikator		
					Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan
1	DPPKBPPA	6	15	32	6	15	32

Sumber: Renja Pokok 2024 dan SIPD 2024

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah program sebanyak 6 jumlah kegiatan 15, dan jumlah sub kegiatan 32, Sedangkan untuk jumlah indikator program sebanyak 2, jumlah indikator kegiatan sebanyak 15, dan jumlah indikator sub kegiatan sebanyak 31.

2.1.2 Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja APBD Triwulan II
Tahun 2024

,dengan uraian program kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dengan indicator Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Kab/Kota dengan kegiatan Perencanaan , penganggaran evaluasi perangkat

daerah dengan capaian kinerja 42 % persen pagu sebesar 25,001.000 dan Pencapaian target kinerja kegiatan didukung 3 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, alokasi anggaran sebesar **Rp. 12,480.000 (Dua Belas juta Empat ratus delapan puluh ribu rupiah rupiah)**. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen dan dengan target capaian sebanyak 2 dokumen Realisasi kinerja dan anggaran yang dicapai sampai dengan triwulan II tahun 2024 mencapai 13 %
2. Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Alokasi Anggarannya Rp.9.999.800 Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sub kegiatan ini aalah jumlah dokumen dan target capaian 1 dokumen realisasi Kinerja dan anggaran yang di capai samapai dengan triwulan II semester pertama tahun 2024 mencapai 11 %
3. Koordinasi dan penyusunan lapaoran Capaian Kinerja IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD Alokasi Anggarannya Rp. 2. 250.400, Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen dan dengan target capaian sebanyak 2 dokumen Realisasi kinerja dan anggaran yang dicapai sampai dengan triwulan II tahun 2024 mencapai 0 %

1.2 Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Indikator kinerjanya adalah Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah dengan capaian realisasi kinerja 39 % dan realisasi anggaran dukung total pagu sebesar **Rp.4.090.248.360,- (Empat meliyyar sembilan puluh juta dua ratus empat puluh delapan ratus tiga ratus enam puluh rupiah)** Pencapaian target kinerja kegiatan didukung 4 sub kegiatan dengan rincian sean masing – masing target 37 (Tiga puluh tujuh) orang per bulan. Realisasi kinerja dan anggaran yang dicapai sampai dengan triwulan II tahun 2023 untuk indikator ASN yang menerima Gaji ASN Rp. 2.959.051.800 dan t TPP sebesar 37 orang perbulan dan untuk realisasi Gaji ASN 57 % dan realisasi untuk TPP sebesar 25 %.

4. Koordinasi dan Penyusunan Keuangan akhir Tahun , alokasi anggaran sebesar **Rp.** 5.073.000 **(Lima juta tujuh puluh tiga ribu rupiah).** Indikator yang digunakan adalah Jumlah Dokumen Penyusunan Keuangan Ankhir tahun dengan target 1 (dokumen) dokumen. Realisasi kinerja anggaran yang dicapai sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebesar 63 %

1.3 **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** dan indiokator yang dipake adalah Jumlah Rekening jasa Komunikasi , smber daya air dan istrik

yang di bayarkan yang dibayarkan dengan target 12 Rekening /Bulan dengan capaian anggaran kinerja sampai triwulan II 50 %

1.4 **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan** pagu anggrannya. NiHIL dengan didukung satu sub Kegiatan dengan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan indikatornya adalah Jumlah laporan BMD yang dibuat dengan target 4 laporan dan relaisasi anggaran kinerja sampai triwulan II 100 %

1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah indicator kinerjnya adalah Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah denga didukung pagu anggaran sebesar Rp. 15.037.200 capaian kinerja 37 % dengan dengan didukung 2 sub Kegiatan yaitu:

a. Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan dengan capian relaisasi anggaran kinerja 37 %
b. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan capian relaisasi anggaran kinerja 43%

1.5 **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** dengan didukung satu sub Kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan didukung pagu Anggaran **Rp 91.000.000** indikatornya adalah Penjaga Malam Tenaga Honor Petugas Kebersihan dan Sopir dengan target 252 dan relaisasi anggaran kinerja sampai triwulan II 2023 yaitu 35 %

1.6 **Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** dengan di dudukung satu sub kegiatan yaitu:

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan didukung pagu Anggaran sebesarRp. 18.382.500 indikatornya umlah Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan dan targetnya 4 unit kendaraan dan realisasi anggaran kinerja sampai triwulan II 2023 yaitu 25 %

2. *Program Pengendalian Penduduk*

1.2. Program Pengendalian Penduduk dengan indicator Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga dengan capaian kinerja 40 % persen pagu sebesar 391.849.500 dan Pencapaian target kinerja 2 kegiatan didukung 5 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1.2 .Pemanduan dan singronisasi kebijakan Pemerintah daerah propensi dengan pemerintah daerah kabupaten /kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk dengan didukung pagu Anggaran Rp. 178.849.500 dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan (GDPK) Tingkat Kabupaten/KotaPelaksanaan Serasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga dengan didukung indikator Jumlah Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dengan target capian satu dokumen dan capain relaisasi kinerja sampai triwulan kedua tahun 2023 0 %

2. Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK dengan didukung indikator Jumlah peserta rapat Pengendalian Program KKBPK dengan target capaian 100 orang dengan capaian realisasi kinerja triwulan kedua tahun 2023 yaitu 2 %

1.3 **Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten /**kota dengan indikator Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil parameter dan proyeksi penduduk untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan didukung pagu Anggaran Rp. 213.000.000,-dengan 3 sub kegiatan yaitu :

a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga dengan indikator Jumlah peserta pengolahan data kependudukan dan targetnya 10 Kecamatan dengan capaian kinerja 27 %

b. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga dengan indikator Jumlah data dan informasi keluarga yang tersedia dan targetnya 10 Laporan dengan capaian kinerja 0 %

c. Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelaynan Kb dengan indikator Jumlah dokumen pengolahan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB dan target 1 laporan dengan capaian kinerja 46 %

3, Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) indicator Ratio Akseptor KB dengan capaian kinerja 37 % dengan total pagu sebesar 2.057.627.800,- dan Pencapaian target kinerja kegiatan didukung 4 kegiatan dan 15 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut

1.3. kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal dengan didukung pagu Anggaran Rp.1.078.292.000 dan indikator Cakupan Penyediaan Data Mikro disetiap desa dengan di dukung 6 sub kegiatan yaitu:

a. Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholderdan mitra kerja dengan indikator sub kegiatan Jumlah Stakeholder dan mitra Kerja dan target 35

opd dengan didukung pagu anggaran 200.000.000 capaian kinerja sampai triwulan kedua 37%

b. Komunikasi Informasi dan edukasi KIE program KKBPKsesuai kearifan budaya lokal dengan indikator sub kegiatan Komunikasi Informasi dan edukasi KIE program KKBPKsesuai kearifan budaya lokal dan targe 1 dokumen dengan didukung Pagu Anggaran Rp. 66.902.600 capaian kinerja sampai triwulan kedua 0 %

c. Promosi dan KIE Program KKBPK melalui media massacetak dan elektronikserta media luar ruang dengan indikator sub. Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK melalui media massacetak dan elektronikserta media luar ruang dan target 1 dokumen dengan didukung pagu Anggaran 100.400.000 capaian kinerja sampai triwulan kedua 0 %

d. Pelaksanaan Mekanisme operasional program KKBPKmelalui rapat koordinasi Kecamatan (TAKORCAM),Rapat Koordinasi DEsa (RAKORDES)dan Mini Lokakarya (MINILOK) dengan indikator Sub Kegaiatan Pelaksanaan Mekanisme operasional program KKBPKmelalui rapat koordinasi Kecamatan (TAKORCAM),Rapat Koordinasi DEsa (RAKORDES)dan Mini Lokakarya (MINILOK) dengan didukung pagu Anggaran Rp.135,000,000 capaian relaisasi sampai triwulan kedua 0 %

e. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK dengan indikator Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK dengan didukung pagu Anggaran Rp. 495.990.000 capaian realisasi sampai triwulan kedua yaitu 0 %

f. Pengendalian Program KKBPK dengan indikator sub kegiatan umlah koordinasi terkait pengendalian program KKBPKB dengan didukung pagu anggaran Rp. 80.000.000 capaian kinerja sampai triwulan II yaitu :0%

1.4. .kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB dengan indikator kegiatan Jumlah Pendayagunaan PKB atau PLKB yang didayagunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah bidang pengendalian penduduk dengan pagu Anggaran 360.000.000 dengan realisasi capian kinerja sampai triwulan kedua yaitu 49 % dan didukung 2 sub. Kegiatan yaitu :

a. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dengan indikator sub kegiatan umlah Kade masyarakat institusi yang aktif disetiap Desa dan target 768 peserta dengan didukung pagu Anggaran 360.000.000 capaian realisasi kinerja sampai triwulan II 50 %

1.5. kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/

Kota di dukung 3 sub kegiatan dengan total anggran Rp 501.336.000 dengan capaian realisan sampai triwulan II 11 % dengan **sub kegiatan sebagai berikut:**

a. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya dengan indikator sub kegiatan Jumlah Fasyankes penditribusian alat obat kontrasepsi dan targetnya 27 Faskes dan didukung pagu Anggaran 26.100.000 dengan capaian realisan sampai triwulan II yaitu 0 %

b. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dengan indikator sub kegiatan Jumlah Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan targetnya 503 Akseptor dengan dukungan pagu anggaran Rp. 453.136.000 dengan capaian realisan sampai triwulan II 33 %

c. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya dengan indikator sub kegiatan umlah Pembinaan Pelayanan keluarga berencana dan kesehatan Reproduksi di fasilitasi Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya targetnya 1 laporan dengan dukungan pagu anggaran Rp. 22,100.000 capaian realisan sampai triwulan II 0 %

1.6. Kegiatan :Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaen/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB dengan indikator kegiatan jumlah Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 dan targetnya 20 % dengan pagu anggarannya Rp. 2.116,739.700, dan didukung 3 sub kegiatan yaitu:

a. Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB dengan indikator sub kegiatan Jumlah Dokumen pembangunan Lintas Sektor dikampung KB dan targetnya 1 dokumen dan pagu Anggarannya 42.494.700 capaian realisan sampai triwulan II yaitu 0 %

b.Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB dengan indikator sub kegiatan Jumlah Kampung KB yang di bina (18 kampung) dengan target 18 kampung KB dan pagu anggarannya Rp. 603.020.000 capaian realisan sampai triwulan II yaitu 31 capaian realisan sampai triwulan II yaitu 0 %

c.Fasilitasi Pengelolaan Dapur atasi Stunting DASHAT di ampung Keluarga Berkualiats alokasi Anggarannya Rp. 1.471.225.000

indiktornya umlah Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (HASHAT) di Kamping Keluarga Berencana realisasi capaian kinerja sampai dengan triwulan II 20 %

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Dengan indikator Program Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga di dukung satu Kegiatan dan dua sub kegiatan targetnya 100 % dengan pagu Anggarannya. 1.821.600.000 dengan capian kinerja sampai triwulan kedua 77 %

1.4. Kegiatan :Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan indikator kegiatan persentase pelaksanaan pembangunan melalui bina keluarga remaja ber KB targetnya 100 % dan didukung pagu anggarannya Rp. 1.821.600.000 dengan Sub Kegiatannya:

a. Pengadaan Sarana Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, PIK-R, BKL dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) dengan indikator sub kegiatannya Jumlah Kelompok yang difasilitasi sarana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dan targetnya 20 unit dan didukung pagu anggaran Rp. 360.000,000 dengan capaian relaisasi kinerja sampai triwulan II yaitu 95 %

b. penyediaan biaya operasional bagi pengelola dan pelaksana kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga BKB, BKR, BKLPIK -R. dan PPPKS emberdayaan ekonomi keluarga UPPKS dengan indikator sub kegiatan Jumlah Kader Pengelola pelaksanaan kader kethanan dan kesejahteraan keluarga BKB) ,BKL PIK R pembedayaan ekonomi keluarga dan didukung pagu Anggaran RP. 1.461.600.000 dengan capaian kinerja sampai triwulan II 40 %

5. **Program Pengarustamaan Gender Pemberdayaan Perempun** dengan indikator program Persentase indikator yang terpenuhi indikator pada tingkat perangkat daerah dan Target 100 % dengan pagu Anggarannya 14.972.000 dengan di dukung satu Kegiatan dan satu Sub Kegiatan yaitu :

.1.5. Pelembangaan pengarustamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota dengan indikator jumlah pelembagaan pengarustamaan gender (PUG) targetnya 100 % dengan pagu Anggaran 14.972.000 dan Capain Kinerja sampai triwulan II 0 % dengan Sub Kegiatan yaitu:

a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG dengan Indikator Sub Kegiatan jumlah kecamatan yang mengikuti advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG targetnya 35 OPD dan capaian relaisasi sampai dengan triwulan II 0 %

6. **Program Perlindungan Perempuan dengan indikator Program akupan kekerasan** terhadap perempuan lingkup Kabupaten yang dapat dicegah dan targetnya 100 % di dukung pagu anggaran Rp. 4.580.000 dengan di dukung satu kegiatan dan satu sub kegiatan yaitu

1.6. Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan Lingkup Daerah Kabupaten Kota dengan indikator kegiatan Jumlah laporan Kebijakan Program dan Kegiatan Pengcegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota dan targetnya 100 % dan capaian realisasi sampai triwulan II yaitu 0 % dan Sub Kegiatanya :

a. Koordinasi dan singronisasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten /kota dan indikator sub kegiatan yaitu Jumlah Dokumen koordinasi dan singronisasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah/kabupaten/kota dan targetnya 1 dokumen pagu anggarannya4.580.000 dan realisasi capian kinerja sampai triwulan II yaitu 0 %

7. Program pengelolaan sistem data gender dan Anak indikator program Persentase data inadikator pengarustamaan gender yang tersedia dan targenya 100 % dan pagu Anggarannya 159.999.800 dengan didukung satu kegiatan dan sub Kegiatan dan relaisasi capian kinerja sampai triwulan II yaitu :)%

1.7. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan indikator kegiatan persentase data komponen indeks pembangunan gender (PUG) yang tersedia dan targeaat 100 % dengan didkukung pagu Anggaran 159.999.800 dengan relaisasi capian ki nerja sampai triwulan II yaitu 0 %

Tabel II-3

Rekapitulasi Capaian Kinerja Program/Kegiatan dan sub Kegiatan Tahun 2024

NO	URAIAN	Keterangan Kinerja (K)							Rata-rata Capaian Output (%) dan Predikat Kinerja			
		Jumlah Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Non APBD	Jumlah Indikator	Capaian 0%	Capaian < 100%	Capaian 100%	Capaian >100%	K	Rp	K	Rp
1	Program	6	-	18	15,86 %	20 %-	20 %-	20 %-	20 %- %	10.906. 281.152	20%	10.906.281.15 2
2	Kegiatan	15	-	15	20 %	20 %-	20 %-	20 %-	20 %-	10.906. 281.152	20%	10.906.281.15 2
3	Sub Kegiatan	31	-	31	20%	20 %-	20 %-	20 %-	20 %-	10.906. 281.152	32%	10.906.281.15 2

SKALA PENILAIAN RATA-RATA KINERJA DAN PREDIKAT KINERJA HASIL EVALUASI RENJA TW II MENGGUNAKAN KRITERIA SEBAGAI BERIKUT :

1. 91% ≤ 100% Sangat Tinggi
2. 76% ≤ 90% Tinggi
3. 66% ≤ 75% Sedang
4. 51% ≤ 65% Rendah
5. 50 % Sangat Rendah

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa skala penilaian rata-rata kinerja dan predikat kinerja hasil evaluasi Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dikatakan tinggi. Dari 5 program kegiatan Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa skala penilaian rata-rata kinerja dan predikat kinerja hasil evaluasi Renja Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa skala penilaian rata-rata kinerja dan predikat kinerja hasil evaluasi Renja Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa skala penilaian rata-rata kinerja dan predikat kinerja hasil evaluasi Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dikatakan tinggi. Dari 5 program Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kab. Takalar hanya 1 program yang memiliki capaian kinerja 20%, dari 6 program terdiri 21 kegiatan dan 41 Sub Kegiatan ada 15 kegiatan yang memiliki capaian kinerja 100% dan dari 41 sub kegiatan ada 38 sub kegiatan yang memiliki capaian kinerja 20%.

22 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Adapun kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar dalam periode 5 tahun yang lalu, tergambar pada tabel II-3 dan II-4

Tabel II-5

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target			Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian		Proyeksi	
		IKU	IKK	SDGs	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
-1	*-2*	*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*	*-10*	*-11*	*-12*	*-13*
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	✔			1.04	1.04	1.04	1.04	0.99	0.94	1.07	1.04
2	Total Fertility Rate (TFR)	✔			2.32	2.22	2.12	2.02	2.42	2.32	2	1.92
3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	✔			35	43	57	57	33	42	57	57
4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	✔			3.3	3.8	4.3	4.8	2.8	2.8	2.8	2.8
5	Ratio Akseptor KB	✔			68.22	68.32	68.42	68.52	69.15	67.22	68.8	71.69

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target			Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian		Proyeksi	
		IKU	IKK	SDGs	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
-1	*-2*	*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*	*-10*	*-11*	*-12*	*-13*
											1	
6	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	✔			16.28	16.26	16.24	16.22	16.28	16.26	23.11	24.13
7	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	✔			15.4	15.4	16.4	16.9	14.29	14.1	15.31	16
8	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	✔			54.07	55.07	56.07	57.07	80.89	74.08	75.22	72.67
9	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	✔			82.42	82.44	82.46	82.48	79.7	71.8	81.9	87.4

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target			Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian		Proyeksi	
		IKU	IKK	SDGs	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
-1	*-2*	*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*	*-10*	*-11*	*-12*	*-13*
10	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	✔			28.72	29.22	29.72	30.22	28.22	19.76	15.09	38
11	Presentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	✔			36	36	38	40	36	36	38	40
12	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	✔			26	26	30	30	26	26	30	30
13	Partisipasi angkatan kerja perempuan	✔			70.17 %	70.17 %	70.17 %	70.17 %	70.12%	70.12%	70%	70.17 %
14	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	✔			100	100	100	100	100	100	100	100

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target			Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian		Proyeksi	
		IKU	IKK	SDGs	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
-1	*-2*	*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*	*-10*	*-11*	*-12*	*-13*
15	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	✔			100	100	100	100	100	100	100	100
16	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan		✔		8	8	9	9	8	8	8	9
17	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)		✔		15.89	15.79	15.69	15.59	15.79	17.27	16.33	14.47

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target			Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian		Proyeksi	
		IKU	IKK	SDGs	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
-1	*-2*	*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*	*-10*	*-11*	*-12*	*-13*
18	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi		✔		16.8	16.9	17	17.1	19.21	20.61	20.11	13.7
19	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB		✔		71.46	71.96	72.46	72.96	81.39	79.98	82.21	73.04
20	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB		✔		34.44	35.44	36.44	37.44	71.62	70.54	79.47	72.48
21	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan		✔		0.5	1	1	1	0	0	0	0
22	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa		✔		6.33	7.33	8.33	9.33	3.44	3	3.1	3.33

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target			Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian		Proyeksi	
		IKU	IKK	SDGs	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
-1	*-2*	*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*	*-10*	*-11*	*-12*	*-13*
23	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk		✔		100	100	100	100	100	100	100	100
24	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan		✔		100	100	100	100	100	100	100	100
25	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat		✔		68.39	68.64	68.89	69.14	36.42	50.14	21.96	68.89

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target			Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian		Proyeksi	
		IKU	IKK	SDGs	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
-1	*-2*	*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*	*-10*	*-11*	*-12*	*-13*
26	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan		✔		100	100	100	100	100	100	100	100
27	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)		✔		0	0	0	0	0	0	0	0
28	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga		✔		42.9	43.4	43.9	44.4	90.27	96.61	96.48	100

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target			Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian		Proyeksi	
		IKU	IKK	SDGs	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
-1	*-2*	*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*	*-10*	*-11*	*-12*	*-13*
29	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak		✔		100	100	100	100	100	100	100	100
30	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan		✔		100	100	100	100	100	100	100	100
31	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD		✔		1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target			Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian		Proyeksi	
		IKU	IKK	SDGs	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
-1	*-2*	*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*	*-10*	*-11*	*-12*	*-13*
32	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk			✔	2	3	3	4	0	0	0	0
33	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan			✔					0	0	0	383
34	Rata-rata jumlah anak per keluarga			✔	1.45	1.4	1.35	1.3	1:22	1.18	1.5	1.15

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target			Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian		Proyeksi	
		IKU	IKK	SDGs	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
-1	*-2*	*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*	*-10*	*-11*	*-12*	*-13*
35	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49			✔	68.32	68.52	68.72	68.92	67.96	66.21	67.82	68.12
36	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun			✔	16.56	16.06	15.56	15.06	1.75	1.53	1.6	2.1
37	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa			✔	100	100	100	100	100	100	100	100
38	Rata-rata usia kawin pertama wanita			✔	21.47	21.42	21.37	21.32	21.52	20	21.52	21.37
39	Persentase Pembiayaan			✔					0.9	0.5	0.64	0.62

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target			Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian		Proyeksi	
		IKU	IKK	SDGs	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
-1	*-2*	*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*	*-10*	*-11*	*-12*	*-13*
	Program Kependudukan, KeluargaBencana dan PembangunanKeluarga melalui APBD dan APBDes											
40	Partisipasi perempuan di lembaga swasta			✔								
41	Rasio KDRT				0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
42	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur			✔								
43	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit			✔	100	100	100	100	100	100	100	100

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target			Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian		Proyeksi	
		IKU	IKK	SDGs	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
-1	*-2*	*-3*	*-4*	*-5*	*-6*	*-7*	*-8*	*-9*	*-10*	*-11*	*-12*	*-13*
44	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum			✔	100	100	100	100	100	100	100	100

Tabel II-6
Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas

NO	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
1	2	3	4	5
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Sesuai (=)		Dukungan Pemerintah Pusat ke pemerintah daerah terhadap program pendanaan mengenai Edukasi dan penyediaan alat kontrasepsi serta Faskes, sejalan dengan sosialisasi yang di lakukan
2	Total Fertility Rate (TFR)	Melampaui (>)		Berhasilnya Penyampaian Edukasi oleh penyuluh KB dilapangan mengenai penggunaan Alat Kontrasepsi
3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	Sesuai (=)		Dukangan Stakeholder tentang pembinaan Kampung KB di sepuluh kecamatan
4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Belum Tercapai (<)	Masih kurangnya Perangkat daerah yang berpartisipasi dalam pemenfaatan Induk Pengendalian penduduk	

NO	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
1	2	3	4	5
5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Belum Tercapai (<)	Belum ada Regulasi yang di tetapkan	
6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Sesuai (=)		Merupakan data dasar dalam penentuan perencanaan dan pelaksanaan program
7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Belum Tercapai (<)	Belum adanya kerja sama yang dilakukan	
8	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Melampaui (>)		Masih adanya kalangan masyarakat yang belum memahami pentingnya ikut ber KB)
9	Ratio Akseptor KB	Melampaui (>)		Tersedianya berbagai macam alat kontrasepsi untuk di salurkan ke masyarakat melalui penyuluh KB
10	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49	Belum Tercapai (<)	Tingginya kekhawatiran dampak / efek samping pemakaian alat kontrasepsi bagi perempuan usia 15-49	
11	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	Belum Tercapai (<)	Masih kurangnya penggunaan alat kontrasepsi	

NO	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
1	2	3	4	5
12	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	Melampaui (>)		Tingginya angka penggunaan kontrasepsi
13	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Belum Tercapai (<)	Belum terdistribusinya Alat kontrasepsi secata optimal	
14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Belum Tercapai (<)	Masih tingginya kekhawatiran pengguna kontrasepso akan efek samping alat kontrasepsi dalan jangka panjang	
15	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Belum Tercapai (<)	Masih kurangnya sosialisasi dan pemahaman yang di berikan untuk ber KB	
16	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Belum Tercapai (<)	Masih kurangnya sosialisasi dan pemahaman yang di berikan untuk ber KB	
17	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Belum Tercapai (<)	Masih kurangnya sosialisasi dan pemahaman yang di berikan untuk ber KB	
18	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Belum Tercapai (<)	Masih kurangnya sosialisasi dan pemahaman yang di berikan untuk ber KB	

NO	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
1	2	3	4	5
19	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Belum Tercapai (<)	Masih kurangnya sosialisasi dan pemahaman yang di berikan untuk ber KB	
20	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	Belum Tercapai (<)	Masih kurangnya sosialisasi dan pemahaman yang di berikan untuk ber KB	
21	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	Sesuai (=)		jumlah penyuluh yang telah memadai di 10 kecamatan
22	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	Melampaui (>)		Sosialisasi Penyuluh Kecamatan yang sukses dalam penyampaian edukasi ber KB
23	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Sesuai (=)		Sosialisasi Penyuluh Kecamatan yang sukses dalam penyampaian edukasi ber KB
24	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Sesuai (=)		Optimalnya dalam pendistribusian alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat
25	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	Sesuai (=)		Optimalnya Faskes dan jejaringnya

NO	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
1	2	3	4	5
26	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	Sesuai (=)		Optimalisasi penyediaan data mikro dari PL KB
27	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	Sesuai (=)		Adanya penyuluhan terkait IMS
28	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Melampaui (>)		Rutinnya pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga terhadap kelompok kegiatan oleh penyuluh
29	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Melampaui (>)		Rutinnya dilakukan pembinaan melaksanakan pengasuha dan tumbuk kembang anak
30	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Belum Tercapai (<)	Kurangnya edukasi dan sosialisasi tentang bahaya pernikahan dibawah umur	
31	Persentase pembiayaan Program Kependudukan, KeluargaBencana dan PembangunanKeluarga melalui APBD dan APBDes	Melampaui (>)		Efektifnya advokasi dan pendampingan kepada TAPD dan Pemerintah Desa untuk membiayai Program Kependudukan, KeluargaBencana dan PembangunanKeluarga melalui APBD dan APBDes
Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak				
32	Presentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Sesuai (=)		Tidak dibatasinya partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintah

NO	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
1	2	3	4	5
33	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Sesuai (=)		Adanya Regulasi mengenai keterwakilan perempuan di keanggotaan DPRD
34	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Belum Tercapai (<)	Kurangnya regulasi kepastian kedudukan perempuan di Lembaga Swasta	
35	Rasio KDRT	Sesuai (=)		Terlayaninya laporan serta penyelesaian yang cepat
36	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	Belum Tercapai (<)	Belum tersedianya data	
37	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Sesuai (=)		Tingginya partisipasi perempuan di lingkungan kerja
38	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Sesuai (=)		Terlayaninya laporan dan kasus kekerasan anak oleh petugas terlatih
39	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	Sesuai (=)		Optimalnya pelayanan korban kekerasan perempuan dan anak
40	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan	Sesuai (=)		Optimalisasinya kerja sama mengenai pelayanan terpadu untuk rehabilitasi sosial terlatih

NO	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
1	2	3	4	5
	terpadu			
41	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Sesuai (=)		Optimalisasi pendampingan dari bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
42	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Sesuai (=)		Optimalisasi pendampingan dari bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
43	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Sesuai (=)		Optimalisasi pendampingan dari bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
44	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	Sesuai (=)		Optimalnya Sosialisasi dan Pemahaman terkait APM Perempuan/laki-laki di SD

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat permasalahan dan faktor-faktor yang menjadi penentu keberhasilan dari tiap-tiap bidang urusan dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah.

Pada tabel II-4 di lihat bahwa pada kelompok Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar terdiri atas 15 (Lima Belas) Indikator dengan capaian kinerja :

1. Mencapai target sebanyak 7 (Tujuh) indikator yaitu Indikator Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB, Presentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR, Partisipasi angkatan kerja perempuan, Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu, Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB, serta pendampingan dan konseling korban kasus kekerasan anak Tercapainya 7 (Tujuh) Indikator sesuai target disebabkan karena peran aktif Dinas PPKBPPPA beserta Stakeholder melalui Kampung KB Dan Untuk.
2. Melempaui target 4 (Empat) Indikator melapaui target yaitu Total Fertility Rate (TFR), Ratio Akseptor KB, Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri, dan Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak. 4 (Empat) Indikator melampaui target tidak terlepas dari optimalisasi Penyampaian Edukasi oleh penyuluh KB dilapangan mengenai penggunaan Alat Kontrasepsi dan Rutinnya dilakukan pembinaan melaksanakan pengasuha dan tumbuk kembang anak.
3. Untuk Indikator yang belum tercapai sebanyak 4 (Empat) Indikator yaitu Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk, Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19), Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB. Masih kurangnya pendistribusian alat kontrasepsi dan pemahaman masyarakat akan pentingnya alat kontrasepsi untuk mencegah penyakit menular, dan kurangnya sosialisasi tentang edukasi keluarga berencana.

Untuk Indikator Kinerja Kunci (IKK) di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar terdiri dari 16 (Enam Belas) Indikator dengan capaian kinerja :

1. Mencapai target sebanyak 10 (Sepuluh) Indikator yaitu Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk, Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan,Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat,Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan, Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS), Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga, Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan

putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Capaian Indikator ini dapat tercapai karena Optimalnya dalam pendistribusian alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat serta aktifnya kegiatan Sosialisasi Penyuluh Kecamatan yang sukses dalam penyampaian edukasi ber KB.

2. Untuk Indikator yang belum tercapai sebanyak 6 (Enam) Indikator yaitu Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need), Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi,Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB,Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB,Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan, Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa. Indikator tersebut belum tercapai karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman yang di berikan untuk ber KB.

Untuk Indikator Sustainable Development Goals (SDG's) di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar terdiri dari 13 (Tiga Belas) Indikator dengan capaian kinerja :

1. Mencapai target sebanyak 4 (Empat) indikator yaitu Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa, Rasio KDRT, Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit, Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum. Indikator ini dapat tercapai karena Optimalisasi penyediaan data mikro dari PL KB dan Efektifnya advokasi dan pendampingan kepada TAPD dan Pemerintah Desa untuk membiayai Program Kependudukan, KeluargaBencana dan PembangunanKeluarga melalui APBD dan APBDes serta Optimalnya pelayanan korban kekerasan perempuan dan anak.
2. Melempaui target 3 (Tiga) Indikator melapaui target yaitu Rata-rata jumlah anak per keluarga, Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun, Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, KeluargaBencana dan PembangunanKeluarga melalui APBD dan APBDes. 3 (Tiga) Indikator melampaui target karena Efektifnya advokasi dan pendampingan kepada TAPD dan Pemerintah Desa untuk membiayai Program Kependudukan, KeluargaBencana dan PembangunanKeluarga melalui APBD dan APBDes dan Optimalisasi pendampingan dari bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3. Untuk Indikator yang belum tercapai sebanyak 6 (Enam) Indikator yaitu Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk, Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan, Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, informal yang melakukan pendidikan kependudukan, Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49, Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun. Indikator ini belum tercapai di sebabkan belumnya adanya regulasi yang di tatapkan dan Kurangnya edukasi dan sosialisasi tentang bahaya pernikahan dibawah umur.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar yang berkaitan dengan Pengendalian Penduduk Keluarga berencana dan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Angka Kelahiran yang masih tinggi;
2. Pemahaman Penggunaan alat Kontrasepsi masih rendah;
3. Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Rangkaian permasalahan tersebut nantinya akan menjadi sebuah kerangka dasar dalam penentuan perencanaan kebijakan ke depan yang disempurnakan oleh evaluasi pembangunan periode sebelumnya. Penjelasan lebih lanjut atas permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar dijabarkan dengan Angka Kelahiran yang masih tinggi

Hal yang menjadi sebab pertumbuhan penduduk adalah penambahan maupun pengurangan jumlah dari penduduk yang dapat dipengaruhi dari beberapa faktor, seperti kelahiran, kematian, dan migrasi. Bagaimanapun, laju pada pertumbuhan penduduk di Indonesia sebenarnya berkecepatan lambat pada beberapa dekade terakhir. Salah satu yang menjadi penyebab penurunan laju dari pertumbuhan penduduk merupakan sebuah kebijakan pemerintah bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk melalui Program Keluarga Berencana yang telah dijalankan sejak 1980-an

Secara arti definitif sendiri, pertumbuhan penduduk merupakan sebuah penambahan maupun pengurangan pada jumlah penduduk. Faktor dari penyebabnya dari jumlah kelahiran (natalitas), kematian (mortalitas), bahkan serta perpindahan (migrasi) antara satu daerah ke daerah lain.

Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga antara lain ; kurangnya komunikasi antara suami dan istri, tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, kesalahan istri, ketidakmampuan suami secara ekonomi, adanya perselingkuhan yang dilakukan suami, pengaruh minuman keras dan akibat adanya kawin paksa dari pihak keluarga. Kemudian dalam menanggulangi kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga upaya yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar adalah melakukan kerja sama dengan Psikiater atau Psikolog, memberikan pendidikan gender:

Tantangan:

a. Rendahnya kesadaran bagi pria mengikuti program KB;
b. Tingginya perkawinan umur usia muda (masih dibawah 20 tahun)
c. Kurangnya pengetahuan tentang model operasioanl BKB-Posyandu PAUD bagi OPD terkait dan pengurus/pengelola.
d. Kurangnya koordinasi antara tim penanganan korban kekerasan.
e. Kurangnya peran anggota Focal Point sebagai motivator, inovator dan dinamisator program pembangunan berperspektif gender.
f. Tuntutan penerapan PPRG dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan.
g. Lemahnya kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.

h. Belum terkoordinasinya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di semua OPD.
i. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
j. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
k. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
l. Tingginya kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
m. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar Tahun 202, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel II-5
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kabupaten Takalar

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Kab. Takalar				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Kab. Takalar				
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Kab. Takalar	**Laju Pertumbuhan Penduduk**	**Angka**	**155,000,000**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	Kab. Takalar	**Laju Pertumbuhan Penduduk**	**Angka**	**155,000,000**	
	Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	Kab. Takalar	**TFR (Angka Kelahiran Total)**		**75,000,000**	**Pengendalian Pertumbuhan Penduduk**	Kab. Takalar	**TFR (Angka Kelahiran Total)**		**75,000,000**	
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1	10,000,000	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1	10,000,000	
	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Data belum tersedia	5,000,000	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Data belum tersedia	5,000,000	
	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Kab. Takalar	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Data belum tersedia	5,000,000	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Kab. Takalar	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Data belum tersedia	5,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	1	5,000,000	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	1	5,000,000	
	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal	1	5,000,000	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal	1	5,000,000	
	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Jumlah dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Data belum tersedia	5,000,000	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Jumlah dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Data belum tersedia	5,000,000	
	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Jumlah Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Data belum tersedia	5,000,000	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Jumlah Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Data belum tersedia	5,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Kab. Takalar	jumlah Laporan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Data belum tersedia	5,000,000	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Kab. Takalar	jumlah Laporan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Data belum tersedia	5,000,000	
	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal	Kab. Takalar	Jumlah Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal	1	5,000,000	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal	Kab. Takalar	Jumlah Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal	1	5,000,000	
	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Kab. Takalar	Jumlah Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Data belum tersedia	5,000,000	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Kab. Takalar	Jumlah Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Data belum tersedia	5,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Kab. Takalar	Jumlah advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	18 Organisasi	5,000,000	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Kab. Takalar	Jumlah advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	18 Organisasi	5,000,000	
	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Kab. Takalar	Jumlah Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	52	5,000,000	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Kab. Takalar	Jumlah Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	52	5,000,000	
	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Kab. Takalar	Jumlah Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	52	5,000,000	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Kab. Takalar	Jumlah Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	52	5,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Kab. Takalar	Jumlah laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1	5,000,000	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Kab. Takalar	Jumlah laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1	5,000,000	
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	**Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil parameter)dan proyeksi pendudukuntuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan**		**80,000,000**	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Takalar	**Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil parameter)dan proyeksi pendudukuntuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan**		**80,000,000**	
	Perumusan Parameter Kependudukan	Kab. Takalar	Jumlah laporan Dirumuskannya Parameter Kependudukan	1	5,000,000	Perumusan Parameter Kependudukan	Kab. Takalar	Jumlah laporan Dirumuskannya Parameter Kependudukan	1	5,000,000	
	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Terlaksananya Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	1	5,000,000	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Terlaksananya Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	1	5,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Kab. Takalar	Jumlah dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1	5,000,000	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Kab. Takalar	Jumlah dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1	5,000,000	
	Pemetaan Kependudukan	Kab. Takalar	Jumlah dokumen Pemetaan Kependudukan	1	5,000,000	Pemetaan Kependudukan	Kab. Takalar	Jumlah dokumen Pemetaan Kependudukan	1	5,000,000	
	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Kab. Takalar	Jumlah dokumen Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	1	5,000,000	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Kab. Takalar	Jumlah dokumen Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	1	5,000,000	
	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Kab. Takalar	Jumlah dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	1	10,000,000	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Kab. Takalar	Jumlah dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	1	10,000,000	
	Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (*Early Warning System* /Peringatan Dini)	Kab. Takalar	Jumlah dokumaen Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (*Early Warning System* /Peringatan Dini)	1	5,000,000	Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (*Early Warning System* /Peringatan Dini)	Kab. Takalar	Jumlah dokumaen Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (*Early Warning System* /Peringatan Dini)	1	5,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Kab. Takalar	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain	18	10,000,000	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Kab. Takalar	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain	18	10,000,000	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Kab. Takalar	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	10	5,000,000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Kab. Takalar	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	10	5,000,000	
	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Kab. Takalar	Jumlah Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	10	5,000,000	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Kab. Takalar	Jumlah Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	10	5,000,000	
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kab. Takalar	Jumlah Data dan Informasi Keluarga	10	5,000,000	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kab. Takalar	Jumlah Data dan Informasi Keluarga	10	5,000,000	
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kab. Takalar	Jumlah Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	10	5,000,000	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kab. Takalar	Jumlah Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	10	5,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Takalar	Jumlah Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1	5,000,000	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Takalar	Jumlah Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1	5,000,000	
	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Kab. Takalar	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1	5,000,000	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Kab. Takalar	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1	5,000,000	
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Kab. Takalar	**Persentase Capaian KB Aktif**	**persen**	**3,017,273,000**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	Kab. Takalar	**Persentase Capaian KB Aktif**	**persen**	**3,017,273,000**	
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Takalar	**Persentase Angka Pemakaian Kontrasepsi**	**angka**	**516,507,600**	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	Kab. Takalar	**Persentase Angka Pemakaian Kontrasepsi**	**angka**	**516,507,600**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Advokasi Program KKBPK kepada *Stakeholders* dan Mitra Kerja	Kab. Takalar	Jumlah Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada *Stakeholders* dan Mitra Kerja	2	66,367,600	Advokasi Program KKBPK kepada *Stakeholders* dan Mitra Kerja	Kab. Takalar	Jumlah Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada *Stakeholders* dan Mitra Kerja	2	66,367,600	
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Takalar	Jumlah dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2	5,000,000	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Takalar	Jumlah dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2	5,000,000	
	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Kab. Takalar	Jumlah Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	10	50,000,000	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Kab. Takalar	Jumlah Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	10	50,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kab. Takalar	Jumlah Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1	50,640,000	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kab. Takalar	Jumlah Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1	50,640,000	
	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	Kab. Takalar	Jumlah Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	1	50,000,000	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	Kab. Takalar	Jumlah Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	1	50,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1	Laporan	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1	Laporan	
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Kab. Takalar	jumlah laporan Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12	264,500,000	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Kab. Takalar	jumlah laporan Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12	264,500,000	
	Pengendalian Program KKBPK	Kab. Takalar	Jumlah laporan Pengendalian Program KKBPK	1	30,000,000	Pengendalian Program KKBPK	Kab. Takalar	Jumlah laporan Pengendalian Program KKBPK	1	30,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kab. Takalar	**Cakupan PKB dan PLKB yang didayagunkan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk**		**430,000,000**	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	Kab. Takalar	**Cakupan PKB dan PLKB yang didayagunkan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk**		**430,000,000**	
	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Kab. Takalar	Jumlah Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	10	10,000,000	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Kab. Takalar	Jumlah Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	10	10,000,000	
	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Kab. Takalar	Jumalah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	15	130,000,000	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Kab. Takalar	Jumalah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	15	130,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kab. Takalar	Jumlah Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	62,44	10,000,000	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kab. Takalar	Jumlah Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	62,44	10,000,000	
	1	Kab. Takalar	Jumlah Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	618	280,000,000	1	Kab. Takalar	Jumlah Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	618	280,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	**Cakupan ketersediaan dan jejaringnya seluruh Tingkat wilayah yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan KBKR dengan standarisasi pelayanan**		**1,505,765,400**	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Takalar	**Cakupan ketersediaan dan jejaringnya seluruh Tingkat wilayah yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan KBKR dengan standarisasi pelayanan**		**1,505,765,400**	
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Takalar	Jumlah Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1	54,500,000	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Takalar	Jumlah Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1	54,500,000	
	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Takalar	Jumlah peserta Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	52	5,000,000	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Takalar	Jumlah peserta Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	52	5,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kab. Takalar	Jumlah Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	720	153,382,700	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kab. Takalar	Jumlah Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	720	153,382,700	
	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Kab. Takalar	Jumlah laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	1	50,000,000	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Kab. Takalar	Jumlah laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	1	50,000,000	
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Takalar	Jumlah dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1	5,000,000	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Takalar	Jumlah dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1	5,000,000	
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Takalar	Jumlah Sarana Penunjang Pelayanan KB	10	652,882,700	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Takalar	Jumlah Sarana Penunjang Pelayanan KB	10	652,882,700	
	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Kab. Takalar	Jumlah Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	50	5,000,000	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Kab. Takalar	Jumlah Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	50	5,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Takalar	Jumlah pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1	556,000,000	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Takalar	Jumlah pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1	556,000,000	
	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Kab. Takalar	Jumlah Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	50	4,000,000	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Kab. Takalar	Jumlah Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	50	4,000,000	
	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Kab. Takalar	Jumlah Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	50	5,000,000	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Kab. Takalar	Jumlah Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	50	5,000,000	
	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kab. Takalar	Jumlah Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1	5,000,000	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kab. Takalar	Jumlah Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1	5,000,000	
	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Kab. Takalar	Jumlah Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	50	5,000,000	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Kab. Takalar	Jumlah Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	50	5,000,000	
	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Kab. Takalar	Jumlah Peningkatan Kesertaan KB Pria	50	5,000,000	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Kab. Takalar	Jumlah Peningkatan Kesertaan KB Pria	50	5,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kab. Takalar	**Persentase perangkat daerah Dinas dan Badan yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB**	**persen4**	**565,000,000**	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	Kab. Takalar	**Persentase perangkat daerah Dinas dan Badan yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB**	**persen4**	**565,000,000**	
	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kab. Takalar	Jumlah Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	4	5,000,000	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kab. Takalar	Jumlah Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	4	5,000,000	
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1	5,000,000	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1	5,000,000	
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kab. Takalar	Jumlah Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	10	550,000,000	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kab. Takalar	Jumlah Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	10	550,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Kab. Takalar	Jumlah Pembinaan Terpadu Kampung KB	18	5,000,000	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Kab. Takalar	Jumlah Pembinaan Terpadu Kampung KB	18	5,000,000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Kab. Takalar	**Persentase Kelompok Tribina**	**persen**	**1,409,241,000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	Kab. Takalar	**Persentase Kelompok Tribina**	**persen**	**1,409,241,000**	
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Takalar	**Indeks Bangga Kencana**	**qngka**	**1,389,241,000**	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	Kab. Takalar	**Indeks Bangga Kencana**	**qngka**	**1,389,241,000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Kab. Takalar	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	15	5,000,000	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Kab. Takalar	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	15	5,000,000	
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Takalar	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	42	390,000,000	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Takalar	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	42	390,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Takalar	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1	5,000,000	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Takalar	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1	5,000,000	
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Takalar	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	52	5,000,000	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Takalar	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	52	5,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Takalar	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	696	939,241,000	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Takalar	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	696	939,241,000	
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Takalar	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	10	5,000,000	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Takalar	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	10	5,000,000	
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Takalar	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1	5,000,000	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Takalar	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1	5,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Kab. Takalar	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1	5,000,000	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Kab. Takalar	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1	5,000,000	
	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1	5,000,000	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1	5,000,000	
	Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1	5,000,000	Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1	5,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Advokasi dan Promosi IPK	Kab. Takalar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	40	5,000,000	Advokasi dan Promosi IPK	Kab. Takalar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	40	5,000,000	
	Sosialisasi IPK	Kab. Takalar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	40	5,000,000	Sosialisasi IPK	Kab. Takalar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	40	5,000,000	
	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	Kab. Takalar	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1	5,000,000	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	Kab. Takalar	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1	5,000,000	
	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kab. Takalar	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	40	5,000,000	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kab. Takalar	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	40	5,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Takalar	**Cakupan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**qangka**	**20,000,000**	**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	Kab. Takalar	**Cakupan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**qangka**	**20,000,000**	
	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Takalar	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1	5,000,000	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Takalar	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1	5,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Takalar	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1	5,000,000	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Takalar	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1	5,000,000	
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Takalar	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1	5,000,000	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Takalar	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1	5,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Kab. Takalar	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	1	5,000,000	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Kab. Takalar	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	1	5,000,000	
	Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Takalar				Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Takalar				
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Kab. Takalar	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	persen	37,000,000	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Kab. Takalar	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	persen	37,000,000	
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		14,000,000	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		14,000,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi PerumusanKebijakan Pelaksanaan PUG	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Koordinasi dan SinkronisasiPerumusanKebijakan Pelaksanaan Pengarustamaam Gender (PUG) Kewenagan kabupaten KOta	1%	3,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi PerumusanKebijakan Pelaksanaan PUG	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Koordinasi dan SinkronisasiPerumusanKebijakan Pelaksanaan Pengarustamaam Gender (PUG) Kewenagan kabupaten KOta	1%	3,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan singronisasi pelaksanaan PUG kewenagan Kabupaten /Kota	Kab. Takalar	Jumlah dokumen oordinasi dan singronisasi pelaksanaan pengarustamaan gaender (PUG) Kewenagan Kabupaten Kota	1%	3,000,000	Koordinasi dan singronisasi pelaksanaan PUG kewenagan Kabupaten /Kota	Kab. Takalar	Jumlah dokumen oordinasi dan singronisasi pelaksanaan pengarustamaan gaender (PUG) Kewenagan Kabupaten Kota	1%	3,000,000	
	Advokasi Kebijakan dan peandampingan Pelaskanaan PuG termasuk PPRG	Kab. Takalar	Jumlah Advokasi Kebijakan dan peandampingan Pelaskanaan PuG termasuk PPRG	35	5,000,000	Advokasi Kebijakan dan peandampingan Pelaskanaan PuG termasuk PPRG	Kab. Takalar	Jumlah Advokasi Kebijakan dan peandampingan Pelaskanaan PuG termasuk PPRG	35	5,000,000	
	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kab. Takalar	Jumlah Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender PPRG	3	3,000,000	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kab. Takalar	Jumlah Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender PPRG	3	3,000,000	
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum . Sosial dan ekonomi pada Organisasi kemasyarakatan Kewenagan Kabupaten Kota	Kab. Takalar	**Cakupan pamberdayaan perempuan Bidang Politik , Hukum , Sosial , dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenganan kabupaten untuk dilaksanakan**	**35**	**10,000,000**	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum . Sosial dan ekonomi pada Organisasi kemasyarakatan Kewenagan Kabupaten Kota**	Kab. Takalar	**Cakupan pamberdayaan perempuan Bidang Politik , Hukum , Sosial , dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenganan kabupaten untuk dilaksanakan**	**35**	**10,000,000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sosialisasi Peningkatan partisipasi perempuan di bidang Politik, Hukum Sosial dan ekonomi	Kab. Takalar	Jumlah Peserta Sosialisasi Peningkatan partisipasi perempuan di bidang Politik, Hukum Sosial dan ekonomi Kabupataen/Kota	30	5,000,000	Sosialisasi Peningkatan partisipasi perempuan di bidang Politik, Hukum Sosial dan ekonomi	Kab. Takalar	Jumlah Peserta Sosialisasi Peningkatan partisipasi perempuan di bidang Politik, Hukum Sosial dan ekonomi Kabupataen/Kota	30	5,000,000	
	Advokasi Kebijakan dan peandampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan politik ,Hukum, Sosial dan ekonomi	Kab. Takalar	Dokumen advokasi kebijakan dan peandampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan politik ,Hukum, Sosial dan ekonomi kabupaten/kota	1	5,000,000	Advokasi Kebijakan dan peandampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan politik ,Hukum, Sosial dan ekonomi	Kab. Takalar	Dokumen advokasi kebijakan dan peandampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan politik ,Hukum, Sosial dan ekonomi kabupaten/kota	1	5,000,000	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia layanan pemberdayaan Perempuan Kewenagan Kabupten/Kota	Kab. Takalar	**Cakupan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemebredayaan perempuan kewenangan kabupaten yang dilaksanakan**		**13,000,000**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia layanan pemberdayaan Perempuan Kewenagan Kabupten/Kota**	Kab. Takalar	**Cakupan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemebredayaan perempuan kewenangan kabupaten yang dilaksanakan**		**13,000,000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenagan Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Dokumen Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenagan Kabupaten/Kota	1	3,000,000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenagan Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Dokumen Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenagan Kabupaten/Kota	1	3,000,000	
	Peningkatan kapasitas sumber daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Jumlah sumber daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	19	5,000,000	Peningkatan kapasitas sumber daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Jumlah sumber daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	19	5,000,000	
	Pengembangan Komunikasi Informasi dan edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenagan Kabupaten /Kota	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen komunikasi informasi dan Edukasin(KIE) Pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten yang dikembangkan	1	5,000,000	Pengembangan Komunikasi Informasi dan edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenagan Kabupaten /Kota	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen komunikasi informasi dan Edukasin(KIE) Pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten yang dikembangkan	1	5,000,000	
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Kab. Takalar	**Persentase Kelompok perempuan berdaya**	**persen**	**27,000,000**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	Kab. Takalar	**Persentase Kelompok perempuan berdaya**	**persen**	**27,000,000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan kesejahteraan gender KG	Kab. Takalar	**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**	**persen**	**11,000,000**	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan kesejahteraan gender KG**	Kab. Takalar	**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**	**persen**	**11,000,000**	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk mewujudkan KG dan perlindungan Anak Kewengan Kabupaten /kota	Kab. Takalar	Cakupan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenagan Kabupaten/Kota	1	3,000,000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk mewujudkan KG dan perlindungan Anak Kewengan Kabupaten /kota	Kab. Takalar	Cakupan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenagan Kabupaten/Kota	1	3,000,000	
	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG Perlindungan Anak bagi Kewenagan Kabupaten /Kota tersedianyan komunikasi informasi	Kab. Takalar	Cakupan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) kesetaraan gender (PUG) anak bagi keluarga Kabupaten /Kota	2	3,000,000	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG Perlindungan Anak bagi Kewenagan Kabupaten /Kota tersedianyan komunikasi informasi	Kab. Takalar	Cakupan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) kesetaraan gender (PUG) anak bagi keluarga Kabupaten /Kota	2	3,000,000	
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga Kabupaten /Kota	Kab. Takalar	Jumlah laporan Kegiatan masyarakat untuk keluarga kewenagan kabupaten kota	4	5,000,000	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga Kabupaten /Kota	Kab. Takalar	Jumlah laporan Kegiatan masyarakat untuk keluarga kewenagan kabupaten kota	4	5,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia layanan pemberdayaan Perempuan Kewenagan Kabupten/Kota	Kab. Takalar	**Jumlah penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak**		**11,000,000**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia layanan pemberdayaan Perempuan Kewenagan Kabupten/Kota**	Kab. Takalar	**Jumlah penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak**		**11,000,000**	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kulaitas keluarga tingkat daerah Kabupaten kota	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenagan Kabupaten/Kota	1	5,000,000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kulaitas keluarga tingkat daerah Kabupaten kota	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenagan Kabupaten/Kota	1	5,000,000	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga penyedia laynan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah kabupaten/kotas	Kab. Takalar	Cakupan Sumber Daya Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga kewenagan kabupaten kota	2	3,000,000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga penyedia laynan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah kabupaten/kotas	Kab. Takalar	Cakupan Sumber Daya Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga kewenagan kabupaten kota	2	3,000,000	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yingkat darah kabuapten kota	Kab. Takalar	Cakupan Jejaring Antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualiats keluarga kewenagan kabupaten / kota	2	3,000,000	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yingkat darah kabuapten kota	Kab. Takalar	Cakupan Jejaring Antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualiats keluarga kewenagan kabupaten / kota	2	3,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	**Jumlah penyedia layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam kabupaten yang dilaksanakan**		**5,000,000**	**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Takalar	**Jumlah penyedia layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam kabupaten yang dilaksanakan**		**5,000,000**	
	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Tersedianya Layanan komprehensif bagi Keluarga dalam MewujudkanKesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	10	5,000,000	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Tersedianya Layanan komprehensif bagi Keluarga dalam MewujudkanKesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	10	5,000,000	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Kab. Takalar	**persentase Pengelolaan sistem Data Gender dan anak**	**Persen**	**25,000,000**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	Kab. Takalar	**persentase Pengelolaan sistem Data Gender dan anak**	**Persen**	**25,000,000**	
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**		**25,000,000**	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Takalar	**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**		**25,000,000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Data Gender dan Anak di kewenangan kabupaten /kota	Kab. Takalar	Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	1	5,000,000	Penyediaan Data Gender dan Anak di kewenangan kabupaten /kota	Kab. Takalar	Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	1	5,000,000	
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Cakupan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1	5,000,000	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Cakupan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1	5,000,000	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Cakupan Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	**2**	5,000,000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Cakupan Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	**2**	5,000,000	
	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Cakupan kebutuhan spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1	5,000,000	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Cakupan kebutuhan spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1	5,000,000	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Cakupan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	5,000,000	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Cakupan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	5,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kab. Takalar	**Persentase Penyelesaian Kasus terhadap Perempuan**	**Persen**	**40,000,000**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	Kab. Takalar	**Persentase Penyelesaian Kasus terhadap Perempuan**	**Persen**	**40,000,000**	
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**	**Ineks**	**10,000,000**	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Takalar	**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**	**Ineks**	**10,000,000**	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	5,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	5,000,000	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	10	5,000,000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	10	5,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	**Jumlah layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban keakerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten yang disediakan**	**10**	**10,000,000**	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	Kab. Takalar	**Jumlah layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban keakerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten yang disediakan**	**10**	**10,000,000**	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Jumlah Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	10	5,000,000	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Jumlah Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	10	5,000,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi	10	5,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi	10	5,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	**Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat kabupaten yang mendapat penguatan dan pengembvangan**	**19**	**20,000,000**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Takalar	**Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat kabupaten yang mendapat penguatan dan pengembvangan**	**19**	**20,000,000**	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	19	5,000,000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	19	5,000,000	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	19	5,000,000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	19	5,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Jumlah kebutuhan spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1	5,000,000	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Jumlah kebutuhan spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1	5,000,000	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Cakupan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2	5,000,000	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Cakupan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2	5,000,000	
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kab. Takalar	**Persentase Jumlah Forum Anak Yang telah dibentuk**		**101,000,000**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	Kab. Takalar	**Persentase Jumlah Forum Anak Yang telah dibentuk**		**101,000,000**	
	Pelembagaan PHA pada Lembaga PePelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota merintah,	Kab. Takalar	**Predikat Kabupaten Layak anak**	**Madya**	**10,000,000**	**Pelembagaan PHA pada Lembaga PePelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota merintah,**	Kab. Takalar	**Predikat Kabupaten Layak anak**	**Madya**	**10,000,000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Jumlah Peningkatan KualitasTerlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kotaup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	**10**	5,000,000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Jumlah Peningkatan KualitasTerlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kotaup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	**10**	5,000,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	**10**	5,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	**10**	5,000,000	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	**Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kulaitas hidup anak keweangan kabuapten yang mendapat penguatan dan pengembangan**	**lembaga**	**30,000,000**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	Kab. Takalar	**Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kulaitas hidup anak keweangan kabuapten yang mendapat penguatan dan pengembangan**	**lembaga**	**30,000,000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Jumlah Layanan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	18,906,660	5,000,000	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Jumlah Layanan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	18,906,660	5,000,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	10	5,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	10	5,000,000	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	**2**	10,000,000	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	**2**	10,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Jumlah Dokuemne penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	**1**	10,000,000	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Jumlah Dokuemne penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	**1**	10,000,000	
	Kabupaten Layak Anak	Kab. Takalar	**Predikat Kabupaten Layak anak**	**Madya**	**10,000,000**	**Kabupaten Layak Anak**	Kab. Takalar	**Predikat Kabupaten Layak anak**	**Madya**	**10,000,000**	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	19	5,000,000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	19	5,000,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1	5,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1	5,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	**Jumlah layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat kabupaten yang disediakan**	**20**	**25,000,000**	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Takalar	**Jumlah layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat kabupaten yang disediakan**	**20**	**25,000,000**	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Jumlah Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10	5,000,000	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Jumlah Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10	5,000,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Cakupan Pendampingan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi	2	5,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Cakupan Pendampingan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi	2	5,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Jumlah dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	**1**	5,000,000	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Jumlah dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	**1**	5,000,000	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	**1**	5,000,000	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	**1**	5,000,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Jumlah layanan Pendampingan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi	**2**	5,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Jumlah layanan Pendampingan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi	**2**	5,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	**Jumlah lembaga penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat kabupaten yang mendapat penguatan dan pengembangan**	**9**	**26,000,000**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Takalar	**Jumlah lembaga penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat kabupaten yang mendapat penguatan dan pengembangan**	**9**	**26,000,000**	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	**4**	2,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	**4**	2,000,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	**10**	2,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	**10**	2,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	**1 dok**	2,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	**1 dok**	2,000,000	
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Jumlah Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	**10**	5,000,000	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Jumlah Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	**10**	5,000,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Junkah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Dokumen**	5,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Junkah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Dokumen**	5,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	**4**	5,000,000	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	**4**	5,000,000	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Jumlah dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	**4**	5,000,000	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Jumlah dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	**4**	5,000,000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Takalar		**B**	**5,197,839,300**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kab. Takalar		**B**	**5,197,839,300**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Takalar		**53**	**4,879,839,300**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kab. Takalar		**53**	**4,879,839,300**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35,779,855	5,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35,779,855	5,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	59,999,925	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	59,999,925	5,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4,999,844	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4,999,844	5,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	**1**	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	**1**	5,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4	5,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Takalar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	32	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Takalar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	32	5,000,000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Takalar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**4**	5,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Takalar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**4**	5,000,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Takalar	Jumlah laporan Dokumen administrasi keuangan	perseb		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Takalar	Jumlah laporan Dokumen administrasi keuangan	perseb		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Takalar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40	4,809,839,300	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Takalar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40	4,809,839,300	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	**1**	5,000,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	**1**	5,000,000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	**1**	5,000,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	**1**	5,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	**1**	5,000,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	**1**	5,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Takalar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Takalar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	5,000,000	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	**1**	5,000,000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	**1**	5,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Takalar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Takalar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3	5,000,000	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	**1**	5,000,000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	**1**	5,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Takalar	**Jumlah BMD yang dibuat**		**75,000,000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Kab. Takalar	**Jumlah BMD yang dibuat**		**75,000,000**	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Takalar	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	5,000,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Takalar	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	5,000,000	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	**1**	5,000,000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	**1**	5,000,000	
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Takalar	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	**1**	5,000,000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Takalar	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	**1**	5,000,000	
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Takalar	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	**2**	5,000,000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Takalar	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	**2**	5,000,000	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Takalar	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	**1**	5,000,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Takalar	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	**1**	5,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Takalar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	**1**	5,000,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Takalar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	**1**	5,000,000	
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	**1**	5,000,000	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	**1**	5,000,000	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Takalar	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	**1**	5,000,000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Takalar	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	**1**	5,000,000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Takalar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	**42**	5,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Takalar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	**42**	5,000,000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	**1**	5,000,000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	**1**	5,000,000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	**1**	5,000,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	**1**	5,000,000	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	**1**	5,000,000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	**1**	5,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Kab. Takalar	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan			Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Kab. Takalar	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan			
	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Kab. Takalar	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas			Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Kab. Takalar	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas			
	Pemindahan Tugas ASN	Kab. Takalar	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan			Pemindahan Tugas ASN	Kab. Takalar	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan			
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Takalar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	**5**	5,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Takalar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	**5**	5,000,000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Takalar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	**35**	5,000,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Takalar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	**35**	5,000,000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Takalar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	**35**	5,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Takalar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	**35**	5,000,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Takalar	**Persentase Pengelolaan Umum perangkay daerah**		**243,000,000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab. Takalar	**Persentase Pengelolaan Umum perangkay daerah**		**243,000,000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Takalar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	**1**	5,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Takalar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	**1**	5,000,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Takalar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	5,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Takalar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	5,000,000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Takalar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	**1**	5,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Takalar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	**1**	5,000,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Takalar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	**1**	5,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Takalar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	**1**	5,000,000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Takalar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	**1**	5,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Takalar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	**1**	5,000,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	**1**	5,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	**1**	5,000,000	
	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Takalar	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	**1**	5,000,000	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Takalar	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	**1**	5,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Takalar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	**1**	5,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Takalar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	**1**	5,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Takalar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95	35,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Takalar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95	35,000,000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	**1**	5,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	**1**	5,000,000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	**1**	5,000,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	**1**	5,000,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Takalar	Jumlah pengadaan barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah daerah	4	13,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Takalar	Jumlah pengadaan barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah daerah	4	13,000,000	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Takalar	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	**5**	3,000,000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Takalar	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	**5**	3,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Takalar	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	**2**	3,000,000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Takalar	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	**2**	3,000,000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Takalar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	5,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Takalar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	5,000,000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Takalar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	**5**	3,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Takalar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	**5**	3,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Takalar	Persentase pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daearah			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Takalar	Persentase pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daearah			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Takalar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**2**	3,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Takalar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**2**	3,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Takalar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	80,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Takalar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	80,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Takalar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	3,000,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Takalar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	3,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Takalar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	**12**	3,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Takalar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	**12**	3,000,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Takalar	Persentase pelaksanaan pemeliharaan BMD penunjang urusan daerah		25,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Takalar	Persentase pelaksanaan pemeliharaan BMD penunjang urusan daerah		25,000,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Takalar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	**1**	3,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Takalar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	**1**	3,000,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Takalar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30	3,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Takalar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30	3,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kab. Takalar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kab. Takalar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Kab. Takalar	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	**2**	3,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Kab. Takalar	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	**2**	3,000,000	
	Pemeliharaan Mebel	Kab. Takalar	Jumlah Mebel yang Dipelihara	**4**	3,000,000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Takalar	Jumlah Mebel yang Dipelihara	**4**	3,000,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Takalar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	**4**	3,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Takalar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	**4**	3,000,000	
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung Kantor lainnya	Kab. Takalar	Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor lainnya	**2**	2,000,000	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung Kantor lainnya	Kab. Takalar	Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor lainnya	**2**	2,000,000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (*bottom up planning*) berdasarkan asas demokrasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, assosiasi-assosiasi maupun perguruan tinggi berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Kabupaten dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program / kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024.

Berdasarkan uraian di atas, tidak ada usulan pemangku kepentingan yang ditujukan kepada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk Rencana Kerja Tahun 2024.

Tabel II-6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Takalar

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Takalar	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan terhadap Anak Kewenangan Kabuaten / Kota	1 Kegiatan	Pokok-Pokok Pikiran

III.
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Daerah

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja Pemeintah (RKP) Tahun 2024, sebagai berikut :

- **Tema Pembangunan**

Tema pembangunan nasional yang tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah **"Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".**

- **Prioritas Nasional**

Prioritas Nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan Rancangan RKP Tahun 2024 adalah :

- PN 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
- PN 2 : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
- PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
- PN 4 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
- PN 5 : Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- PN 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
- PN 7 : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Untuk Prioritas Nasional yang selaras dengan arah kebijakan di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada PN 3 yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.

3.1.1 Telaahan Kebijakan Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan

Memperhatikan arah kebijakan nasional dan provinsi Tahun 2024, Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar Tahun 2023 mendukung secara langsung priorits nasional maupun provinsi, namun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu Perumusan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,Pelaksanaan administrasi dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka dukungan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pencapaian arah kebijakan nasional dan provinsi Tahun 2023 adalah melakukan sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi perencanaan pembangunan pusat dan daerah

yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Takalar Tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 yang memuat rancangan kerangka ekonomi, rencana kerja dan pendanaan, baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempu dengan mendorong partisipasi masyarakat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Mendasari hasil evaluasi kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017 – 2022, tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2017 – 2022 mengalami perubahan setelah disesuikan dengan dinamika isu – isu nasional dan lokal yang tertuang di dalam tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar Tahun 2023 – 2026. Olehnya itu Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar Tahun 2023 didasarkan pada perumusan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026. Adapun perubahan rumusan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

3.2.1. Tujuan

3.2.2 Sasaran

Rumusan tujuan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar Tahun 2024 adalahMengendalikan Pertumbuhan Penduduk Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Meningkatkan Tata Kelola Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

3.2.2 Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1.Menurunnya Tingkat Kelahiran Anak
2.Meningkatnya Kesertaan Keluarga Berencana
3.Meningkatnya Kualitas Keluarga
4.Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Dalam Kehidupa Bermasyarakat
5.Terwujudnya Kabupaten Layak Anak
6.Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Tabel III-1

Tujuan dan Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2021	Target Kinerja Pada Tahun ke-				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tujuan : Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1.07	1.03	1.02	1.01	1.00	1.00
	Sasaran 1 : Menurunnya Tingkat Kelahiran Anak	Total Fertility Rate (TFR)	2.11	2.08	2.06	2.04	2.02	2.02
	Sasaran 2 : Meningkatnya Kesertaan Keluarga Berencana	Persentase Angka Pemakaian Kontrasepsi / CPR	71.07	73.01	75.02	77.06	78.08	78.08
	Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Keluarga	Indeks Bangga Kencana	58.20	62.44	64.55	66.67	68.72	68.72
2	Tujuan : Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	87.56	87.84	87.89	87.93	87.95	87.95
	Sasaran 1 : Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Dalam Kehidupan Bermasyarakat	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70.66	70.69	70.74	70.78	70.85	70.85

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2021	Target Kinerja Pada Tahun ke-				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sasaran 2 : Terwujudnya Kabupaten Layak Anak	Predikat Kabupaten Layak Anak	Pratama	Madya	Madya	Nindya	Utama	Utama
3	Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola Pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	B	B	B	B	BB	BB
	Sasaran 1: Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Nilai SAKIP Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	CC	BB	BB	BB	BB	BB

TABEL III. 2

RANCANGAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. TAKALAR TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBE DANA
						Renja 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	Renja 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			10	11
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							**11.532.681.052,00**	**11.532.681.052,00**			
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**11.532.681.052,00**	**11.532.681.052,00**			
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**4.950.299.952,00**	**4.950.299.952,00**			
1,	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**4.950.299.952,00**	**4.950.299.952,00**			
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	100%				25.001.100,00	25.001.100,00	25.001.100,00		
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											

			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	100%	2.00 Dokumen	50%	2.00 Dokumen	12.480.900,00	12.480.900,00	12.480.900,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPA ASLI DAE (PAD), PA DAERAH
	2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	0	1.00 Dokumen	50%	1.00 Dokumen	9.999.800,00	9.999.800,00	9.999.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPA ASLI DAE (PAD), PA DAERAH
	2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 dokumen	0	4 Laporan	0	4 Laporan	2.520.400,00	2.520.400,00	2.520.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPA ASLI DAE (PAD), PA DAERAH
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100%	80%		63%		4.194.136.552,00	4.194.136.552,00	4.106.072.168		
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2026 orang	100%	532 Orang/bulan	40%	532 Orang/bulan	4.178.754.552,00	4.194.136.552,00	4.106.072.168	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAI PAD YAN SAH, DAN TRANSFE UMUM-DA BAGI HAS DANA TRANSFE UMUM-DA ALOKASI UMUM, PAJAK DAERAH, PENDAPA BAGI HAS PAJAK
	2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	100%	1 Laporan	100%	1 Laporan	6.810.000,00	6.810.000,00	6.810.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERA
	2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	4 laporan	100%	1 Laporan	100%		8.572.000,00	8.572.000,00	8.572.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERA
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang	100%	100%				34.198.000,00	34.198.000,00	34.198.000,00		

			dilaksanakan										
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180 laporan	90%	90 Laporan	56%	90 Laporan	34.198.000,00	34.198.000,00	34.198.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAI DAERA
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	100%	100%	100%	42%	100%	280.964.500,00	280.964.500,00	280.964.500,00		
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	100%	12 Laporan	50%	12 Laporan	148.685.700,00	148.685.700,00	148.685.700,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE UMUM-DA ALOKASI UMUM
	2.08.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48 Laporan	100%	12 Laporan	33%	12 Laporan	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAI DAERA
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	100%	3 Laporan	42%	3 Laporan	125.578.800,00	125.578.800,00	125.578.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAI DAERA
2,	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	Persentase indikator PUG yang terpenuhi pada tingkat perangkat daerah	95%	100%		31%		**9.999.900,00**	**9.999.900,00**	**9.999.900,00**		
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	umlah pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan Kabupaten yang dilaksanakan	4 Lembaga	100%	1 Lembaga	31%	1 Lembaga	9.999.900,00	9.999.900,00	9.999.900,00		

	2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG											
			Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	100%	1 Dokumen	31%	1 Dokumen	9.999.900,00	9.999.900,00	9.999.900,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPA ASLI DAE (PAD), PA DAERAH
3,	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	***Cakupan kekerasan terhadap perempuan lingkup Kabupaten yang dapat dicegah***	**90%**	90%	**-**	**0**		**163.603.900,00**	**163.603.900,00**	**163.603.900,00**		
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*umlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan Lingkup Daerah Kabupaten Kota*	95 % 70.85 indeks	90%	95 % 70.85 indeks	**0**	95 % 70.85 indeks	37.250.000,00	37.250.000,00	37.250.000,00		
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota											
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Dokumen	90%	4 Dokumen	**0**	4 Dokumen	37.250.000,00	37.250.000,00	37.250.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS N FISIK
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	*Cakupan kekerasan terhadap perempuan lingkup kabupaten yang dapat dicegah*	50 layanan	90%	50 layanan	**0**	50 layanan	108.100.000,00	108.100.000,00	108.100.000,00		

	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota											
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Layanan	90%	50 Layanan	**0**	50 Layanan	108.100.000,00	108.100.000,00	108.100.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS N FISIK
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	76 lembaga	-	19 Lembaga	**0**	19 Lembaga	18.253.900,00	18.253.900,00	18.253.900,00		
	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota											
			Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	200 Orang	-	50 Orang	**0**	50 Orang	18.253.900,00	18.253.900,00	18.253.900,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS N FISIK

4,	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	**100%**		-	**0**	-	**242.396.000,00**	**242.396.000,00**	**242.396.000,00**		
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu*	Utama Predi kat		-	**0**	-	64.250.000,00	64.250.000,00	64.250.000,00		
	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA											
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	250 Orang		250 Orang	**0**		64.250.000,00	64.250.000,00	64.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA TRANSFE KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS N FISIK
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat kabupaten yang disediakan*	80 0rang	100%	80 0rang	**0**	80 0rang	127.380.000,00	127.380.000,00	127.380.000,00		
	2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK											

			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	98 orang	-	49 Orang	**0**	49 Orang	127.380.000,00	127.380.000,00	127.380.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA TRANSFE KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS N FISIK
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah lembaga penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat kabupaten yang mendapat penguatan dan pengembangan*	36 lembaga	-	19 Lembaga	**0**	19 Lembaga	50.766.000,00	50.766.000,00	50.766.000,00		
	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/											
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	60 orang	-	30 Orang	**0**	30 Orang	50.766.000,00	50.766.000,00	50.766.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA TRANSFE KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS N FISIK
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**6.582.381.100,00**	**6.582.381.100,00**	**6.582.381.100,00**		
1,	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	***Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga***	**100%**	100%	-	15%	-	**94.800.000,00**	**94.800.000,00**	**94.800.000,00**		

	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil parameter)dan proyeksi pendudukuntuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan*	100 %	100 %	-	30%	-	94.800.000,00	94.800.000,00	94.800.000,00		
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga											
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	4 Laporan	100%	1 Laporan	0		60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS N FISIK
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB											
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	4 Dokumen	100%	1 Dokumen	0	1 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS N FISIK
2,	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	Rasio Akseptor KB	100%					**4.057.086.200,00**	**4.057.086.200,00**	**4.057.086.200,00**		
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan Penyediaan Data Mikro disetiap desa	140 Mitra	100%	35 Mitra	37 %		1.120.730.200,00	1.120.730.200,00	1.120.730.200,00		

	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK											
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	20 Laporan	100%	5 Laporan	37 %	5 Laporan	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS N FISIK
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana											
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	4 Laporan	100%	1 Laporan	0	1 Laporan	545.442.000,00	545.442.000,00	545.442.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS N FISIK
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)											
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	36 laporan	100%	9 Laporan	0	9 Laporan	135.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS N FISIK

	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang											
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	4 Dokumen	100%	1 Dokumen	0	1 Dokumen	135.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS N FISIK
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal											
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	4 Dokumen	100%	1 Dokumen	0	1 Dokumen	135.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS N FISIK
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja											
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		100%	0 Organisasi	0		200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS N FISIK

	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	*#NAME?*	1 Angka	100%	-	0		360.000.000,00	360.000.000,00	360.000.000,00		
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)											
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	200 Orang	100%	100 Orang	0	100 Orang	360.000.000,00	360.000.000,00	360.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS N FISIK
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	100%	100%	27 Faskes	0		501.336.000,00	501.336.000,00	501.336.000,00		
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya											

			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	4 Laporan	100%	1 Laporan	0		26.100.000,00	26.100.000,00	26.100.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS N FISIK
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)											
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2880 Akseptor	100%	720 Akseptor	0		453.136.000,00	453.136.000,00	453.136.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS N FISIK
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya											
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	40 Laporan	100%	10 Laporan	0		22.100.000,00	22.100.000,00	22.100.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS N FISIK
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	*jumlah Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49*	100%	100%	-	0		2.075.020.000,00	2.075.020.000,00	2.075.020.000,00		
	2.14.03.2.04.0002	0											

			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	4 Dokumen	100%	1 Dokumen	0		0,00			Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUS DAERAH
	2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas											
			Jumlah DASHAT di Kampung KB	49 Unit	100%	49 Unit	0		1.470.000.000,00	1.470.000.000,00	1.470.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS N FISIK
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas											
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	18 Kampung	100%	38 Kampung	0		605.020.000,00	605.020.000,00	605.020.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS N FISIK
3,	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	**100%**	100%	-	0		**2.430.494.900,00**	**2.430.494.900,00**	**2.430.494.900,00**		

	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	persentase pelaksanaan pembangunan melalui bina keluarga remaja ber KB	127 Angka	100%	127 Angka	0		300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00		
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)											
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	40 Unit	100%	10 Unit	0		300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS N FISIK
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)											
			Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	2784 orang	100%	696 orang	0		0,00			Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS N FISIK

	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase perangkat daerah Dinas dan Badan yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB	100%	100%	-	0		2.130.494.900,00	2.130.494.900,00	2.130.494.900,00		
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)											
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1 Laporan	100%	1 laporan	0		696.000.000,00			Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS N FISIK
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)											
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	2 Laporan	100%	2 laporan	0		1.434.494.900,00	1.434.494.900,00	1.434.494.900,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE UMUM-DA ALOKASI UMUM, D TRANSFE KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS N FISIK
	J U M L A H								**11.532.681.052,00**	**11.532.681.052,00**	###########		

TABEL III.3

RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) TAHUN 2024

NO	KODE	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	Renja 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		5							**11.532.681.052,00**	**11.532.681.052,00**		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**11.532.681.052,00**	**11.532.681.052,00**		
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**4.950.299.952,00**	**4.950.299.952,00**		
1,	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.950.299.952,00**	**4.950.299.952,00**		
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				25.001.100,00	25.001.100,00	25.001.100,00	

	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2.00 Dokumen	50%	2.00 Dokumen	12.480.900,00	12.480.900,00	12.480.900,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	1.00 Dokumen	50%	1.00 Dokumen	9.999.800,00	9.999.800,00	9.999.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	4 Laporan	0	4 Laporan	2.520.400,00	2.520.400,00	2.520.400,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.08.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan**	**Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan**		63%		4.194.136.552,00	4.194.136.552,00	4.106.072.168	
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	532 Orang/bulan	40%	532 Orang/bulan	4.178.754.552,00	4.194.136.552,00	4.106.072.168	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	100%	1 Laporan	6.810.000,00	6.810.000,00	6.810.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi*	1 Laporan	100%		8.572.000,00	8.572.000,00	8.572.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

				Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	*Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD*							
	2.08.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan**	**Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan**				34.198.000,00	34.198.000,00	34.198.000,00	
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	90 Laporan	56%	90 Laporan	34.198.000,00	34.198.000,00	34.198.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	100%	42%	100%	280.964.500,00	280.964.500,00	280.964.500,00	
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	50%	12 Laporan	148.685.700,00	148.685.700,00	148.685.700,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.08.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	33%	12 Laporan	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	42%	3 Laporan	125.578.800,00	125.578.800,00	125.578.800,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2,	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	Persentase indikator PUG yang terpenuhi pada tingkat perangkat daerah	Persentase indikator PUG yang terpenuhi pada tingkat perangkat daerah		31%		**9.999.900,00**	**9.999.900,00**	**9.999.900,00**	

	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	umlah pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan Kabupaten yang dilaksanakan	umlah pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan Kabupaten yang dilaksanakan	1 Lembaga	31%	1 Lembaga	9.999.900,00	9.999.900,00	9.999.900,00	
	2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	*Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota*	1 Dokumen	31%	1 Dokumen	9.999.900,00	9.999.900,00	9.999.900,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3,	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	***Cakupan kekerasan terhadap perempuan lingkup Kabupaten yang dapat dicegah***	***Cakupan kekerasan terhadap perempuan lingkup Kabupaten yang dapat dicegah***	-	**0**		**163.603.900,00**	**163.603.900,00**	**163.603.900,00**	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	umlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan Lingkup Daerah Kabupaten Kota	umlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan Lingkup Daerah Kabupaten Kota	95 % 70.85 indeks	**0**	95 % 70.85 indeks	37.250.000,00	37.250.000,00	37.250.000,00	
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota*	4 Dokumen	**0**	4 Dokumen	37.250.000,00	37.250.000,00	37.250.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	*Cakupan kekerasan terhadap perempuan lingkup kabupaten yang dapat dicegah*	*Cakupan kekerasan terhadap perempuan lingkup kabupaten yang dapat dicegah*	50 layanan	**0**	50 layanan	108.100.000,00	108.100.000,00	108.100.000,00	
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota*	50 Layanan	**0**	50 Layanan	108.100.000,00	108.100.000,00	108.100.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		19 Lembaga	**0**	19 Lembaga	18.253.900,00	18.253.900,00	18.253.900,00	
	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas*	*Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas*	50 Orang	**0**	50 Orang	18.253.900,00	18.253.900,00	18.253.900,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
4,	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	-	**0**	-	**242.396.000,00**	**242.396.000,00**	**242.396.000,00**	

	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	-	**0**	-	64.250.000,00	64.250.000,00	64.250.000,00	
	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	250 Orang	**0**		64.250.000,00	64.250.000,00	64.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat kabupaten yang disediakan	Jumlah layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat kabupaten yang disediakan	80 0rang	**0**	80 0rang	127.380.000,00	127.380.000,00	127.380.000,00	
	2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	49 Orang	**0**	49 Orang	127.380.000,00	127.380.000,00	127.380.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat kabupaten yang mendapat penguatan dan pengembangan	Jumlah lembaga penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat kabupaten yang mendapat penguatan dan pengembangan	19 Lembaga	**0**	19 Lembaga	50.766.000,00	50.766.000,00	50.766.000,00	
	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan	30 Orang	**0**	30 Orang	50.766.000,00	50.766.000,00	50.766.000,00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang

				Penanganan AMPK	Penanganan AMPK							
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**6.582.381.100,00**	**6.582.381.100,00**	**6.582.381.100,00**	
1,	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga**	**Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga**	-	15%	-	**94.800.000,00**	**94.800.000,00**	**94.800.000,00**	
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil parameter)dan proyeksi pendudukuntuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil parameter)dan proyeksi pendudukuntuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	-	30%	-	94.800.000,00	94.800.000,00	94.800.000,00	
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	0		60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	*Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB*	*Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB*	1 Dokumen	0	1 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

2,	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	Rasio Akseptor KB	Rasio Akseptor KB				**4.057.086.200,00**	**4.057.086.200,00**	**4.057.086.200,00**	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan Penyediaan Data Mikro disetiap desa	Cakupan Penyediaan Data Mikro disetiap desa	35 Mitra	37 %		1.120.730.200,00	1.120.730.200,00	1.120.730.200,00	
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	5 Laporan	37 %	5 Laporan	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	0	1 Laporan	545.442.000,00	545.442.000,00	545.442.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	9 Laporan	0	9 Laporan	135.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	0	1 Dokumen	135.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	1 Dokumen	0	1 Dokumen	135.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	0 Organisasi	0		200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			-	0		360.000.000,00	360.000.000,00	360.000.000,00	
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	*Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)*	*Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)*	100 Orang	0	100 Orang	360.000.000,00	360.000.000,00	360.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	Jumlah Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	27 Faskes	0		501.336.000,00	501.336.000,00	501.336.000,00	
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	0		26.100.000,00	26.100.000,00	26.100.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	720 Akseptor	0		453.136.000,00	453.136.000,00	453.136.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya*	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya*	10 Laporan	0		22.100.000,00	22.100.000,00	22.100.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	*jumlah Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49*	*jumlah Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49*	-	0		2.075.020.000,00	2.075.020.000,00	2.075.020.000,00	
	2.14.03.2.04.0002			*Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB*	*Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB*	1 Dokumen	0		0,00			Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	Jumlah DASHAT di Kampung KB	49 Unit	0		1.470.000.000,00	1.470.000.000,00	1.470.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	38 Kampung	0		605.020.000,00	605.020.000,00	605.020.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3,	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	-	0		**2.430.494.900,00**	**2.430.494.900,00**	**2.430.494.900,00**	

	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	persentase pelaksanaan pembangunan melalui bina keluarga remaja ber KB	persentase pelaksanaan pembangunan melalui bina keluarga remaja ber KB	127 Angka	0		300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	*Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia*	*Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia*	10 Unit	0		300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	*Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan*	*Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan*	696 orang	0		0,00			Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase perangkat daerah Dinas dan Badan yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB	Persentase perangkat daerah Dinas dan Badan yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB	-	0		2.130.494.900,00	2.130.494.900,00	2.130.494.900,00	

	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	*Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)*		1 laporan	0		696.000.000,00			Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	*Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan*		2 laporan	0		1.434.494.900,00	1.434.494.900,00	1.434.494.900,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	J U M L A H								**11.532.681.052,00**	**11.532.681.052,00**	11.444.614.668	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

4..1.Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Tahun 2024

Program dan kegiatan merupakan program prioritas pada Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar Tahun 2024 yang mengacu kepada Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023-2026. Pemilihan kegiatan dan program tersebut berdasarkan strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar Tahun 2024.

Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakaan secara sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencaapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Indikator kinerja program (*outcome*/hasil) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Indikator kinerja kegiatan (hasil antara / *intermediate outcome*) adalah sebuah hasil akumulasi dari output sub kegiatan yang dapat diidentifikasi dan diukur dalam waktu dekat, dan merupakan indikator hasil jangka panjang (outcome) dari program. Sedangkan sub kegiatan (*output* / keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu sub kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu sub kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) pada untuk setiap indikator kinerja merupakan data capaian awal tahun perencanaan dan menjadi titik tolak perumusan target kinerja pada periode perencanaan.

BAB V
PENUTUP

Dokumen Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar Tahun 2024 ini menjadi instrumen utama bagi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar dalam meningkatkan kinerja .

5.1 Catatan Penting

Apabila dalam pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2023, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada Perubahan Renja dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar Tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPD dalam mendukung Tujuan dan Sasaran Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk:

a. Melaksanakan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

- Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024.

5.3Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2024, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Belana Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024.

Mengetahui
Kepala Dinas PPKBPPPA

dr. H. ASRIADI , Ali , S.pN
NIP.198507162011011009

PERUBAHAN
RENCANA KERJA

TAHUN
2024



DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TAKALAR

Daftar Isi

Daftar Isi i

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 6

1.3 Maksud dan Tujuan 8

1.3.1 Maksud 8

1.3.2 Tujuan 9

1.4 Sistematika Penulisan 9

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2023 10

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan 10

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 23

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 34

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 35

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 77

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 82

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**Error! Bookmark not defined.**

3.2 Review Rencana Kerja 2024 82

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ..**Error! Bookmark not defined.**

BAB V PENUTUP 202

5.1 Catatan Penting 202

5.2 Kaidah Pelaksanaan 202

5.3 Rencana Tindak Lanjut 202

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amandemen UUD tahun 1945 pasal 28 huruf H memandang kesehatan sebagai suatu bagian dari hak asasi manusia dan sekaligus merupakan kewajiban semua pihak (individu, masyarakat, dan negara) untuk menciptakan suatu kondisi di mana setiap warga negara dalam keadaan selalu sehat sehingga mereka dapat berproduksi baik secara ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu, setiap manusia mempunyai hak asasi untuk hidup sehat dan memperoleh akses pelayanankesehatan yang bermutu. Dalam rangka pemenuhan hak – hak tersebut, Pemerintah Republik Indonesia mempunyai kewajiban melakukan upaya-upaya pembangunan kesehatan.

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya. Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan program pembangunan kesehatan yang berkesinambungan, perlu dilakukan perencanaan dan penganggaran yang terpadu dan terarah.

Dalam rangka merencanakan secara sistemati supaya-upaya pembangunan kesehatan yang akan dijalankan pada tahun anggaran 2024, disusunlah Perubahan Rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Kesehatan tahun 2024. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode satu tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar Tahun 2024 memperhatikan :

1. Penyelarasan target indikator utama (IKU) dan target indikator kunci (IKK) serta target indikator lainnya dalam Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2023-2026;
2. Kesesuaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026;
3. Kesesuaian prioritas pembangunan daerah dan program prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
4. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar Tahun 2017-2022;
5. Hasil evaluasi capaian indicator kinerja Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar Tahun 2022 sampai dengan Triwulan I Tahun 2022;
6. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024;
7. Isu-isu strategis yang berkembang;
8. Kebijakan Nasional;
9. Regulasi yang berlaku.

Gambar 0-1
Keterkaitan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2024 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

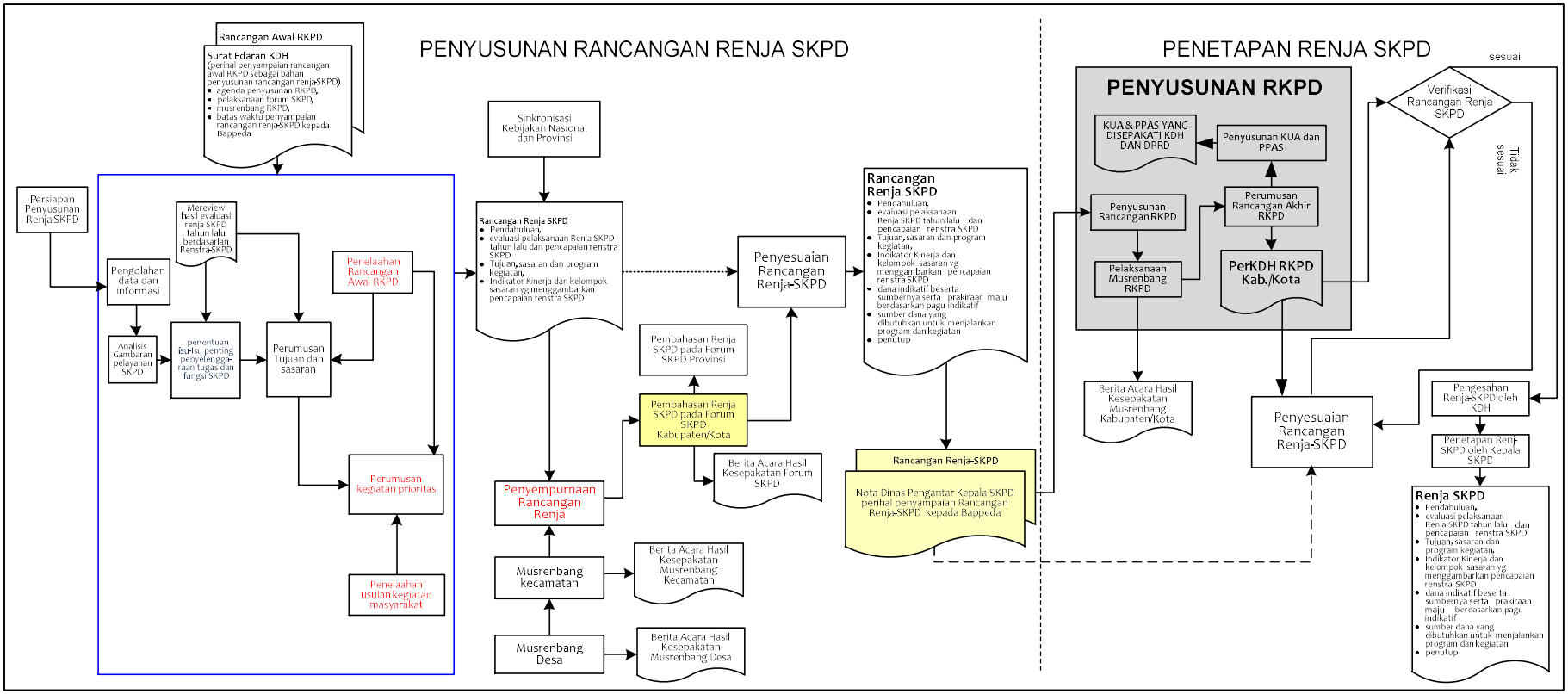

Sumber :

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar Tahun 2024 merupakan satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan daerah dan nasional, yang dalam perencanaannya telah dilakukan bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Selain itu Rencana Kerja Dinas Kesehatan yang disusun ini juga telah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki perangkat daerah. Kedudukan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar Tahun 2024 dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 merupakan regulasi turunan yang harus mengacu pada Renstra.

SesuaiPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar Tahun 2024 dilaksanakan melaluit ahapan dan tata cara sebagai berikut :

1. Melakukan persiapan penyusunan pada Bulan Januari yang meliputi penetapan Tim Penyusun dan pengumpulan data teknis;
2. Menyusun Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar Tahun 2024 pada Bulan Januari dengan memperhatikan Rancangan RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2023;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Takalar melakukan verifikasi terhadap Rancangan Akhir RencanaKerja Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar Tahun 2024;
4. Melakukan penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar Tahun 2024 dengan memperhatikan Surat Rekomendasi Hasil Verifikasi;
5. Rancangan Akhir RencanaKerja Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar Tahun 2024 yang telah disempurnakan diajukan oleh Kepala Bappelitbangda Kabupaten Takalar Kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan;
6. Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar Tahun 2024 yang telah disempurnakan menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2024;
7. Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar Tahun 2024 yang telah disempurnakan sesuai hasil verifikasi, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Untuk mewujudkan keterkaitan program pembangunan daerah Kabupaten, Provinsi, maupun Pusat, maka Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar disusun dengan mengacu dan berpedoman pada RPD Tahun 2023–2026 yang telah ditetapkan lebih dahulu. Disamping itu, penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar

Tahun 2024 juga memperhatikan sumber daya dan potensi daerah yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi Renja tahun yang lalu serta isu-isu strategis yang berkembang. Mengingat Rencana Kerja Dinas Kesehatan sangat penting bagi pencapaian kinerja Dinas Kesehatan secara khusus dan pemerintah daerah secara umum, maka proses penyusunannya dilakukan secara sistematis, akurat dan terpadu dengan melibatkan seoptimal mungkin peran para pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan forum Perangkat Daerah Rancangan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar. Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar dilakukan secaratr ansparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif, holistik dan berkesinambungan yang disusun berdasarkan beberapa pendekatan berikut :

1. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut.
2. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
3. Pendekatan Politis, pendekatan ini mengkaji administrasi negara yang menekankan fungsi-fungsi politik dalam bernegara.
4. Pendekatan top-down, pendekatan ini dilaksanakan dengan mempedomani RPD dan Renstra PD sebagai arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah.
5. Pendekatan bottom-up, pendekatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan tahapan yang telah dilakukan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar Tahun 2024 tersebut serta merujuk pada ketentuan tentang perencanaan pembangunan daerah, secara jelas menunjukkan bahwa renja memiliki nilai-nilai strategis, yaitu :

1. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar Tahun 2024 merupakan pedoman penyelenggaraan tugas dan fungsi selama1 (satu) tahun;
2. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar Tahun 2024 merupakan pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Kesehatan Tahun 2024;

3. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar Tahun 2024 merupakan alat atau instrumen pengendalian dalam pelaksanaan pengendalian rencana pembangunan tahunan Dinas Kesehatan;
4. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar Tahun 2024 merupakan instrument untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja tahunan Kepala Dinas Kesehatan;

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar Tahun 2024 merupakan pedoman penilaian keberhasilan Dinas Kesehatan sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor18Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentangLaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang melandasi penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan KabupatenTakalarTahun 2024 adalah :

1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 H Ayat (1) tentang hak untuk hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta hak mendapatkan pelayanan kesehatan;
2. Undang-undangNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-undangNomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan PemerintahNomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi PelaksanaanRencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
12. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13

Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentangRencanaStrategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 914);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 574/Menkes/IV/2000 tentang Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 004 Tahun 2003 tentang Indonesia Sehat 2010 dan Pedoman Penetapan Indikator Provinsi Sehat dan Kab/Kota Sehat;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2016 Nomor 7);
24. Peraturan Bupati Takalar Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2021 Nomor 33);
25. Peraturan Bupati Takalar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 03);
26. Peraturan Bupati Takalar Nomor 223 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 223).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2024 adalah memberikan arah sekaligus sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan program kerja Dinas Kesehatan dan terselenggaranya

pembangunan yang efektif dan efisien sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang (tahun 2025) melalui pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesehatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Renstra secara berkesinambungan

1.3.2 Tujuan

a. Mendiskripsikan tentang program-program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar;
b. Menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan untuk mendukung pencapaian target tujuan, sasaran program dan indicator kinerja kegiatan;
c. Sebagai acuan dalam penyusunan RAPBD

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan RencanaKerja Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar terdiri atas 5 (lima) Bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
1.1 LatarBelakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 SistematikaPenulisan
BAB II EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
2.3 Isu-isuPenting PenyelenggaraanTugas dan Fungsi Dinas Kesehatan
2.4 Review Terhadap Rancanganawal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Kesehatan
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; Kaidah-kaidah pelaksanaan; serta Rencana tindak lanjut Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar Tahun 2025.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar Tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun berjalan Tahun 2024, mengacu pada APBD tahun berjalan yang telah disahkan pada waktu penyusunan Renja Dinas Kesehatan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Kesehatan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan tahun lalu, dan realisasi Renstra yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan realisasi APBD Dinas Kesehatan. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja dan pencapaian renstra Dinas Kesehatan sampai dengan tahun berjalan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel . II.1

Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Sampai dengan Tahun 2023

Perangkat Daerah : Dinas Kesehaatan Kabupaten Takalar

Kode					Urusan/BidangUrusanPemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RenstraPerangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranKegiatan s/d dengantahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2022			Target program, kegiatan, dan sub kegiatan (RenjaPerangkat Daerah Tahun 2023)	PerkiraanRealisasiCapaian Target RenstraPerangkat Daerah s/d tahun 2023	
									Target RenjaPerangkat Daerah tahun 2022	Realisasi RenjaPerangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		RealisasiCapaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat CapaianRealisasi Target Renstra (%)
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 (7/6)*	*9*	*10 (5+7+9)*	*11(10/4)*
1					**URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
1	02				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**									
1	02	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA**	**PersentasePelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota**	100	57.65	100	100	100	100	257.65	257.65
1	02	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah**	**Persentase Pelaksanaan /Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD**	100	100	100	85.71	85.71	100	285.71	285.71
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja/Perubahan Renja (Dokumen)	8	10	2	2	100	2	14	175
1	02	01	2.01	02	Koordinasi & Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Frekuensi Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Kali)	4	8	2	2	100	2	12	300
1	02	01	2.01	03	Koordinasi & Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD (Eksemplar)	12	10	4	2	50	3	15	125
1	02	01	2.01	04	Koordinasi & Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4	1	2	2	100	1	4	100
1	02	01	2.01	05	Koordinasi & penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	12	4	4	2	50	3	9	75
1	02	01	2.01	06	Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD(Eksemplar)	4	4	1	1	100	1	6	150
1	02	01	2.01	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Frekuensi PelaksanaanE valuasi kinerja perangkat daerah (Kali)	8	8	1	1	100	2	11	137.5

1	02	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	100	100	100	100	100	100	300	300
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan ASN (14 Bln)	10512	4872	660	660	100	667	6199	58.97
1	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasikeuangan SKPD	Jumlah Dokumen Anggaran yang tatausahaan dan diverifikasikeuangan SKPD (Dokumen)	4	4	1	1	100	1	6	150
1	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun (Eksemplar/Dokumen)	4	4	1	1	100	1	6	150
1	02	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun (Eksemplar/Dokumen)	4	2	2	2	100	1	5	125
1	02	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	100	100	100	100	100	100	300	300
1	02	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan BMD pada SKPD (Dokumen)	4	4	1	1	100	1	6	150
1	02	01	2.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	100	100	100	100	100	100	300	300
1	02	01	2.04	05	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlahlaporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	4	1	1	1	100	1	3	75
1	02	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	100	80.00	100	98.03	98.03	100	100	100
1	02	01	2.05	03	Pendataan dan PengolahanAdministrasiKepegawaian	Jumlah DokumenP endataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4	1	1	1	100	1	3	75
1	02	01	2.06		**Administras iUmum Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan AdministrasI Umum Perangkat Daerah**	100	43.46	100	97.17	97.17	100	240.63	240.63
1	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan RT	Jumlah Peralatan RT yang diadakan (Unit)	4	1	1	1	100	1	3	75
1	02	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia (Expl)	4	1	1	1	100	1	3	75
1	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu Terlayani (Org)	4	1	1	1	100	1	3	75
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi (kali)	4	1	1	1	100	1	3	75
1	0	0	2.07		**Pengadaan BMD**	**Persentase Pelaksanaan Pengadaan BMD**	100	80	100	100	100	100	280	280

	2	1			**Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								
1	0 2	0 1	2.07	09	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang terbangun (Unit)	8	5	25	1	4	2	8	100
1	0 2	0 1	2.08		**Penyediaan Jasa PenunjangUrusanPemerintahan Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100	22.21	100	100	100	100	222.21	222.21
1	0 2	0 1	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik, air dan internet yang dibayarkan (Rekening)	80	19	13	13	100	20	52	65
1	0 2	0 1	2.09		**Pemeliharaan BMD PenunjangUrusanPemerintah Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	100	73.86	100	100	100	100	273.86	273.86
1	0 2	0 1	2.09	01	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak perorangan kendaraan dinas dan kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara (unit)	60	10	29	29	100	15	54	90
1	0 2	0 1	2.09	09	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara (unit)	8	10	20	20	100	2	32	400
1	0 2	0 1	2.09	11	Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor ata ubangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunanlainnya yang terpelihara (unit)	80	50	20	20	100	20	90	112.5
1	0 2	0 2			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Pelaksanaan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	100	37.26	100	83.7	83.7	100	220.96	220.96
1	0 2	0 2	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota**	100	60.53	100	100	100	100	260.53	260.53
1	0 2	0 2	2.01	01	Pembangunan RS beserta Sarana &Prasarana Pendukungnya	Jumlah bangunan RS yang dibangun (Unit/paket)	1	1	1	1	100	1	3	300
1	0 2	0 2	2.01	13	Pengadaan prasarana & pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah ketersediaan prasarana pendukung fasyankes (unit)	50	20	4	4	100	50	74	148

1	02	01	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadakan (unit/paket)	4	35	15	15	100	1	51	1275
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah alat kalibrasi kesehatan yang terpelihara (unit/paket)	4	6	6	6	100	1	13	325
1	02	02	2.01	16	Pengadaanobat, vaksin	Jumlah obat, vaksin yang diadakan (paket)	4	50	45	45	100	1	96	2400
1	02	02	2.01	17	Pengadaan BMHP	Jumlah BMHP yang diadakan (paket)	4	25	5	5	100	1	31	775
1	02	02	2.02		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Kewenangan Daerah Kab/Kota**	**Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Kewenangan Daerah Kab/Kota**	100	6.2	100	96.65	96.65	100	202.85	202.85
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibuhamil terlayani (orang)	25016	6512	6428	5832	90.7	6254	18598	74.3
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan ibubersalin	Jumlah ibubersalin yang terlayani (orang)	24116	5834	6136	5864	95.6	6029	17727	73.5
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bayibarulahir	Jumlah bayibaru lahir terlayani (orang)	22728	5778	5844	5676	97.1	5682	17136	75.4
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan balita	Jumlah balita yang terlayani (orang)	126700	25463	32228	30892	95.9	31675	88030	69.5
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan usia pendidika ndasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang terlayani (orang)	188700	42114	38163	35349	92.6	47175	124638	66.1
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan usiaproduktif	Jumlah usia produktif yang ter layani (orang)	756924	98462	195573	140627	71.9	189231	428320	56.6
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan usialanjut	Jumlah usia lanjut yang terlayani (orang)	95032	14255	26704	19205	71.9	23758	57218	60.2
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang terlayani (orang)	253722	14576	66965	30011	44.8	63443	108030	42.6
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan DM	Jumlah Penderita DM yang terlayani (orang)	20268	4318	5341	5046	94.5	5067	14431	71.20090784
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	Jumlah PenemuanKasus Baru dan Penderita ODGJ yang terlayani (orang)	2768	473	642	551	85.8	692	1716	61.99421965

					Berat									
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB	Jumlah Penemuan Terduga TB dan Penderita TB yang terlayani (orang)	20844	2212	5152	3988	77.4	5211	11411	54.74477068
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan RisikoTerinfeksi HIV	Jumlah penemuan kasus orang terduga Orang dengan RisikoTerinfeksi HIV dan Penderita HIV terlayani (orang)	28844	5964	6995	5896	84.3	7221	19081	66.15240605
1	02	02	2.02	15	PengelolaanPelayanan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanPelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4	5	1	1	100	1	7	175
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan PelayananKesker&Kesorga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	8	9	17	17	100	2	28	350
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4	80	20	20	100	1	101	2525
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan PelayananPromosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanPelayanan Promosi Kesehatan	4	39	11	11	100	1	51	1275
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional	JumlahDokumen Hasil PengelolaanPelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan TradisionalLainnya	4	27	18	18	100	1	46	1150
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4	1	33	33	100	1	35	875
1	02	02	2.02	22	PengelolaanPelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah ODGJ dan Pengguna NAPZA yang mendapatkan layanan (orang)	200	1470	642	428	66.7	50	1948	974
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	4	250	120	120	100.0	1	371	9275
1	02	02	2.02	24	Pengelolaan Upaya PenguranganRisikoKrisis Kesehatan &PascaKrisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan RisikoKrisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	4	1	2	2	100.0	1	4	100
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan PM dan PTM	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan PenyakitMenular dan Tidak Menular	4	1	1	1	100.0	1	3	75
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	JumlahDokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	72	18	18	18	100.0	18	54	75
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota sehat	JumlahDokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	4	1	1	1	100.0	1	3	75
1	02	02	2.02	30	Operasional PelayananFaskesLainnya	Jumlah DokumenOperasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2	1	2	2	100.0	2	5	250
1	02	02	2.02	33	Operasional PelayananPuskesmas	Jumlah Dokumen Operasional PelayananPuskesmas	68	17	17	17	100.0	17	51	75
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini &ResponWabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	4	1	1	1	100.0	1	3	75
1	0	0	2.03		**Penyelenggaraan**	**Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi**	100	82.22	100	39.29	39.3	100	221.51	221.51

	2	2			**SistemInformasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**Kesehatan secaraTerintegrasi**									
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data &Informasi Kesehatan	JumlahDokumenhasilpengelolaan data dan informasiKesehatan	8	2	1	1	100.0	2	5	62.5	
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan SistemInformasi Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil pengelolaa nsistem informasi Kesehatan	4	1	1	1	100.0	1	3	75	
1	02	02	2.04		**PenerbitanIzin RS Kelas C, D dan FasilitasPelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota**	**Persentase PenerbitanIzin RS Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota**	100	0.09	100	98.84	98.8	100	198.93	198.93	
1	02	02	2.04	03	Peningkata nMutu PelayananFaskes	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan PengukuranIndikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	17	17	17	17	100.0	17	51	300	
1	02	02	2.04	04	Penyiapan Perumusan &P elaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil PenyiapanPerumusan dan PelaksanaanPelayanan Kesehatan Rujukan	4	1	1	1	100.0	1	3	75	
1	02	03			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**PersentasePelaksanaan Program PeningkatanKapasitas SDMK**	100	26.72	100	94.13	94.1	100	220.85	220.85	
1	02	03	2.01		**PemberianIzin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kab/Kota**	**PersentaseIzinPraktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kab/Kota yang diterbitkan**	100	80	100	100	100.0	100	280	280	
1	02	03	2.01	02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan sertaTindakLanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	JumlahDokumen Hasil Pembinaandan Pengawasan Tenaga Kesehatan sertaTindakLanjutPerizinanPraktik Tenaga Kesehatan	850	35	7	7	100.0	350	392	46.1	
1	02	03	2.02		**Perencanaan Kebutuhan & Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kab/Kota**	**PersentasePelaksanaanPerencanaanKebutuhan&PendayagunaanSumberdayaManusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kab/Kota**	100	0.09	100	82.4	82.4	100	182.49	182.49	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan SDMK sesuai standar	JumlahSumber Daya Manusia Kesehatan yang MemenuhiStandar di FasilitasPelayanan Kesehatan (Fasyankes)	850	35	500	412	82.4	200	647	76.1	
1	02	03	2.03		**PengembanganMutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**PengembanganMutu dan PeningkatanKompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota**	100	0.08	100	100	100	100	200.08	200.08	

					Tingkat Daerah Kab/Kota									
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu &PeningkatanKompetensi Teknis SDMK Tingkat Daerah Kab/Kota	JumlahPegawai yang mengikutiKegiatanPelatihan/Pengembangan SDMK (orang)	200	1750	370	370	100.0	50	2170	1085
1	02	04			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase Pelaksanaan Program SediaanFarmasi, Alat Kesehatan, dan MakananMinuman**	100	66.37	100	47.1	47.1	100	213.47	213.47
1	02	04	2.01		**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Persentase Pelaksanaan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	100	54.18	100	0	0	100	154.18	154.18
1	02	04	2.01	02	Penyediaan & Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan IzinApotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha MikroObatTradisional (UMOT)	Jumlah Data Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang tersedia (Dokumen)	40	10	10	10	100.0	10	30	75
1	02	04	2.02		**Pemberian Sertifikat Produksi untuk sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan RT Kelas 1 tertentu Perusahaan RT**	**Persentase Pelaksanaan Pemberian Sertifikat Produksi untuk sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan RT Kelas 1 tertentu Perusahaan RT**	100	72	100	0	0	100	172	172
1	02	04	2.02	01	Pengendalian & Pengawasan sertaTindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi untuk saranaProduksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan RT Kelas 1 tertentu Perusahaan RT	JumlahDokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan RumahTanggaKelas 1 Tertentu Perusahaan RumahTangga	4	1	1	1	100.0	1	3	75
1	02	04	2.04		**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi**	**Persentase Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengolahan**	100	79	100	88.42	88.42	100	267.42	267.42

					Tempat Pengolahan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	**Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**									
1	02	04	2.04	01	Pengendalian & Pengawasan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	JumlahDokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	4	1	1	1	100.0	1	3	75
1	02	04	2.06		**Pemeriksaan dan TindakLanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri RT**	**Persentase Pelaksanaan Pemeriksaan dan TindakLanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri RT**	100	60	100	100	100	100	260	260
1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada ProdukMakanan-Minuman IRT yang beredar dan Pengawasan sertaTindak Lanjut Pengawasan	JumlahProduk dan Sarana ProduksiMakanan-MinumanIndustriRumahTanggaBeredar yang DilakukanPemeriksaan*Post Market* dalam rangkaTindakLanjutPengawasan	4	1	1	1	100.0	1	3	75
1	02	05			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kesehatan**	100	0.14	100	100	100	100	200.14	200.14
1	02	05	2.01		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan Linsek Tingkat Daerah Kab/Kota**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan Linsek Tingkat Daerah Kab/Kota**	100	0	100	100	100	100	200	200
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promkes, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4	1	1	1	100.0	1	3	75

Berdasarkan Tabel II.1 di atas, terdapat Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang kinerjanya tidak mencapai target dan ada yang sudah mencapai target. Berikut kami uraikan gambaran hasil kinerja Dinas Kesehatan Kab. Takalar pada TahunAnggaran 2022tersebut :

1.4.1.1.1.1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

Secara umum, pencapaian kinerja pada program inicukup Tinggi. Terdapat Sembilan (Sembilan) kegiatan, 23 Sub Kegiatan dengan tingkat capaian kinerja 97.61% sedikit menurun dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh karena adanya pengurangan anggaran sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

1.4.1.1.1.1.2 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Capaian kinerja pada program ini mencapai 73,86 %. Ada 4 (empat) kegiatan dan 37 Sub Kegiatan pada program ini., rata-rata capaian kinerjanya adalah73,86 %. Jauh menuru ndari capaian tahun sebelumnya.

1.4.1.1.1.1.3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Capaian kinerja pada program ini cukup tinggi. Pada program ini terdapat 3 (tiga) Kegiatan, 3 (tiga) Sub Kegiatan ,dengan capaian kinerja sebesar 94,13 %. Juga sediki tmenurun dari tahun sebelumnya.

1.4.1.1.1.1.4 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Pencapaian kinerja pada program dalam kategori Rendah. Terdapat 4 (empat) kegiatan, 4 (empat) kegiatan Sub Kegiatan pada program ini, dengan pencapaian kinerjanya sebesar 47,1 %. Rendahnya capaian ini disebabkan oleh karena ada beberapa sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.

1.4.1.1.1.1.5 Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan

Pada program ini terdapat satu kegiatan, satu sub kegiatan. Capaian kinerja pada program ini yaitu sebesar 100 %.

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

    1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
        - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten
        - Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
        - Pengembangan Puskesmas
        - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
        - Pengadaan Obat, Vaksin

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Administrasi Keuangan
      - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
   b. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
   c. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      - Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
   a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kabupaten
      - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
      - Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan

   b. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
      - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
      - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus

c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

   Tidak ada program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran sesuai dengan yang direncanakan.

d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan

   Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan adalah :

   1. Penurunan AKI di Takalar walaupun masih tinggi disebabkan meningkatnya jumlah kehamilan risiko tinggi, masih rendahnya deteksi dini masyarakat serta kurang mampunya kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan rujukan kehamilan risiko tinggi. Sedangkan Kematian bayi terbanyak terjadi di kabupaten Takalar. Penyebab kejadian kematian bayi antara lain asfiksia (sesak nafas saat lahir), bayi lahir dengan berat badan rendah (BBLR), infeksi neonatus, pneumonia, diare dan gizi buruk. Rasio SDM Kesehatan yang masih lebih kecil dibanding Jumlah penduduk yang dilayani menyebabkan ibu

hamil, bayi dan balita tidak mendapat pelayanan yang sesuai standar. Masih ada kendala akses yang sulit dijangkau, baik akses ke sarana kesehatan maupun akses ke lokasi lapangan.

2. Menurunnya capaian program kesehatan ibu dalam menekan terjadinya kasus kematian ibu menjadi salah satu penyebab disebabkan karena adanya pandemic covid 19. Masyarakat memiliki ketakutan untuk memeriksakan diri ke sarana pelayanan kesehatan.
3. Rendahnya capaian UCI ini karena. Dengan adanya pandemi, target cakupan imunisasi dasar lengkap semakin berat. Orang tua khawatir bahwa anak mereka akan tertular COVID-19 jika pergi ke tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan. Ada juga mispersepsi bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah kota besar beberapa pekan lalu dan kampanye #dirumahaja seakan menjadi larangan orang tua untuk membawa anak imunisasi.
4. Masih Tingginya Stunting dan Gizi Buruk disebabkan oleh Kondisi social ekonomi, dan budaya masyarakat (tingkat pendidikan rendah, tingkat income rendah, serta faktor budaya dan kebiasaan penduduk lokal yang mempengaruhi perilaku)
5. Masih adanya SDM termasuk kader Kesehatan yang kurang kompeten atau kurang professional
6. Keterbatasan sarana dan prasarana Kesehatan
7. Kerja sama lintas sector dan lintas prgram kurang
8. Advokasi, Sosialisasi yang tidak rutin

Upaya Perencanaan yang akan dilakukan dari permasalahan adalah :

a) Pengajuan penambahan tenaga kesehatan baik berupa tenaga kontrak daerah, PNS, PTT, maupun dokter interhensif.
b) Pengadaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan.
c) Mengadakan koordinasi lintas program dan lintas sektor.
d) Mengadakan pelatihan dan workshop yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi SDM kesehatan.

e) Melakukan aksi dan advokasi dalam kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan status derajat kesehatan masyarakat

f) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar, implikasi yang timbul adalah adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan apabila target telah tercapai dan peningkatan kasus/masalah kesehatan di masyarakat apabila target belum tercapai. Namun tidak semua indikator yang belum tercapai secara langsung berdampak pada peningkatan kasus/masalah kesehatan di masyarakat.

Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

1. Komitmen bersama mulai dari Kepala Dinas, pemegang program sampai dengan staf.
2. Kerjasama yang baik antara lintas program dan lintas sektor.
3. Pembinaan secara kontinyu kepada pemegang program yang ada di Puskesmas.
4. Pembinaan terhadap kader-kader kesehatan yang ada di wilayah.
5. Pertemuan monitoring evaluasi program rutin terhadap kemajuan, hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan program di lapangan.
6. Berusaha membuat terobosan/inovasi terhadap pelaksanaan program.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menganalisis tingkat keberhasilan dan kegagalan dapat dilihat sejauh mana strategi pencapaian sasaran berupa kebijakan yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program-program yang menjadi tolak ukur pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dan IKU (Indikator Kerja Utama) Dinas Kesehatan hingga tahun berjalan 2023.

Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar mempunyai tugas pokok “Melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan, koordinasi, pembinaan, pengendaliaan dan pemberian bimbingan teknis dalam penyelenggaraan bidang Kesehatan.” Ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang merupakan Dinas tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar berdasarkan Peraturan Bupati Takalar Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas;
    a. Subbagian Perencanaan;
    b. Subbagian Keuangan;
    c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas
    a. Rumah Sakit Type D Pratama
    b. RSKIA Zainab
    c. Puskesmas Mangarabombang
    d. Puskesmas Pattoppakang
    e. Puskesmas Mappakasunggu
    f. Puskesmas Sanrobone
    g. Puskesmas Polongbangkeng Selatan
    h. Puskesmas Bulukunyi
    i. Puskesmas Pattallassang
    j. Puskesmas Polongbangkeng Utara
    k. Puskesmas Ko'mara
    l. Puskesmas Towata
    m. Puskesmas Bontomarannu
    n. Puskesmas Bontokassi
    o. Puskesmas Galesong
    p. Puskesmas Galesong Utara
    q. Puskesmas Aeng Towa
    r. Puskesmas Kepulauan Tanakeke
    s. Puskesmas Bontomangape

Berikut disajikan Tabel 2.2 tentang Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar. Capaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan berdasarkan indikator kinerja utama, indikator kinerja kunci yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan serta ketentuan peraturan perundang – undangan. Adapun tabel analisis kinerja pelayanan Dinas Kesehatan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar

NO	Indikator	IKK	SPM	Target RenstraPerangkat Daerah				RealisasiCapaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022 (n-2)	2023 (n-1)	2024 (n)	2025 (n+1)	2022 (n-2)	2023 (n-1)	2024 (n)	2025 (n+1)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	V										
2	Jumlah RS rujukan Kabupaten /kota yang memenuhi sarana ,prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	V		4	4	5	5	2	2	5	5	Ada kegiatan pembangunan RS Tahun 2022 dan selesai pada tahun 2023
3	Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	V		50	75	100	100	50	50	100	100	Ada 2 RS yang dipersiapkan untuk Akreditasi pada tahun 2023
4	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	V		4	2	1	2	2	2	4	5	Reakreditasi
5	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kehamilan	V		100	100	100	100	90,73	20.86	100	100	Adanya bumil yang memeriksakan kehamilannya pada BPM dan tidak melaporkan ke Fasyankes di wilayah kerjanya

NO	Indikator	IKK	SPM	Target RenstraPerangkat Daerah				RealisasiCapaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022 (n-2)	2023 (n-1)	2024 (n)	2025 (n+1)	2022 (n-2)	2023 (n-1)	2024 (n)	2025 (n+1)	
6	Jumlah dukungan logistic kesehatan untuk pelayanan kehamilan	V		6428	6428	6578	6733	5832	1341	6578	6733	
7	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kehamilan	V		394	394	394	394	394	394	394	394	
8	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	V		100	100	100	100	95,57	21.61	100	100	Adanya Bulin Yang melakukan persalinan di luar wilayah kerja Kab. Takalar dan tidak terlaporkan
9	Jumlah dukungan logistic kesehatan untuk pelayanan persalinan	V		6136	6286	6436	6586	5864	1326	6436	6586	
10	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan	V		394	394	394	394	394	394	394	394	
11	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi barulahir	V		100	100	100	100	97.13	100	100	100	
12	Jumlah dukungan logistic kesehatan untuk pelayanan kesehatan bayi baru lahir	V		5844	5844	5994	6144	5676	5844	5994	6144	

NO	Indikator	IKK	SPM	Target RenstraPerangkat Daerah				RealisasiCapaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022 (n-2)	2023 (n-1)	2024 (n)	2025 (n+1)	2022 (n-2)	2023 (n-1)	2024 (n)	2025 (n+1)	
13	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatanbayibarulahir	V		394	394	394	394	394	394	394	394	
14	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	V		100	100	100	100	95.85	16.82	100	100	
15	Jumlah dukungan logistic kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita	V		32228	32228	34484	36553	30892	5422	32228	34484	
16	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita	V		58	58	58	58	58	58	58	58	
17	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	V		100	100	100	100	92,63	27.46	100	100	
18	Jumlah dukungan logistic kesehatan untuk pelayanan usia pendidikan dasar	V		38163	42439	46682	51350	35349	11652	46682	51350	
19	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan usia pendidikan dasar	V		117	117	117	117	117	117	117	117	

NO	Indikator	IKK	SPM	Target RenstraPerangkat Daerah				RealisasiCapaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022 (n-2)	2023 (n-1)	2024 (n)	2025 (n+1)	2022 (n-2)	2023 (n-1)	2024 (n)	2025 (n+1)	
20	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	V		100	100	100	100	71,91	19.44	100	100	
21	Jumlah dukungan logistic kesehatan untuk pelayanan usia 15-59 tahun	V		195573	196171	215788	237366	140627	38135	215788	237366	Jumlah Sasaran yang sangat besar dengan jml SDMK dan dukungan logistik yang tidakmemadai
22	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan usia 15-59 tahun	V		158	158	158	158	158	158	158	158	
23	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	V		100	100	100	100	71,92	20.32	100	100	
24	Jumlah dukungan logistic kesehatan untuk pelayanan 60 tahun keatas	V		26704	35762	39338	43271	19205	7267	39338	43271	
25	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan usia 60 tahun keatas	V		84	84	84	84	84	84	84	84	

NO	Indikator	IKK	SPM	Target RenstraPerangkat Daerah				RealisasiCapaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022 (n-2)	2023 (n-1)	2024 (n)	2025 (n+1)	2022 (n-2)	2023 (n-1)	2024 (n)	2025 (n+1)	
26	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	V		100	100	100	100	44.82	12.58	100	100	
27	Jumlah dukungan logistic kesehatan untuk pelayanan penderita hipertensi	V		66965	67449	68798	70174	30011	8485	68798	70174	
28	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan penderita hipertensi	V		146	146	146	146	146	146	146	146	
29	Persentase penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	V		100	100	100	100	94.48	31.58	100	100	
30	Jumlahdukungan logistic kesehatanuntukpelayananpenderita diabetes mellitus	V		5341	5387	5401	5456	5046	1701	5401	5456	
31	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan penderita diabetes mellitus	V		154	154	154	154	154	154	154	154	

NO	Indikator	IKK	SPM	Target RenstraPerangkat Daerah				RealisasiCapaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022 (n-2)	2023 (n-1)	2024 (n)	2025 (n+1)	2022 (n-2)	2023 (n-1)	2024 (n)	2025 (n+1)	
32	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	V		100	100	100	100	94.48	62.77	100	100	
33	Jumlah dukungan logistic kesehatan untuk pelayanan penderita ODGJ	V		642	736	809	890	551	462	809	890	
34	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan penderita ODGJ	V		35	35	35	35	35	35	35	35	
35	Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	V		100	100	100	100	77.41	10.56	100	100	
36	Jumlah dukungan logistic kesehatan untuk pelayanan orang terduga TBC	V		5152	11410	11501	11921	3988	1205	11501	11921	
37	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan orang terduga TBC	V		84	84	84	84	84	84	84	84	

NO	Indikator	IKK	SPM	Target RenstraPerangkat Daerah				RealisasiCapaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022 (n-2)	2023 (n-1)	2024 (n)	2025 (n+1)	2022 (n-2)	2023 (n-1)	2024 (n)	2025 (n+1)	
38	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	V		100	100	100	100	84.29	23.41	100	100	
39	Jumlah dukungan logistic kesehatan untuk pelayanan orang dengan resiko terinfeksi HIV	V		6995	7826	8623	9235	5896	1832	8623	9235	
40	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan orang dengan resiko terinfeksi HIV	V		90	90	90	90	90	90	90	90	
41	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		V	100	100	100	100	90.73	20.86	100	100	
42	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		V	100	100	100	100	95.57	21.61	100	100	
43	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		V	100	100	100	100	97.13	22.14	100	100	
44	Pelayanan Kesehatan Balita		V	100	100	100	100	95.85	16.82	100	100	
45	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar		V	100	100	100	100	92.63	27.46	100	100	

NO	Indikator	IKK	SPM	Target RenstraPerangkat Daerah				RealisasiCapaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022 (n-2)	2023 (n-1)	2024 (n)	2025 (n+1)	2022 (n-2)	2023 (n-1)	2024 (n)	2025 (n+1)	
46	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif		V	100	100	100	100	71.91	19.44	100	100	
47	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		V	100	100	100	100	71.92	20.32	100	100	
48	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		V	100	100	100	100	44.82	12.58	100	100	
49	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		V	100	100	100	100	94.48	31.58	100	100	
50	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat		V	100	100	100	100	85.83	62.77	100	100	
51	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		V	100	100	100	100	77.41	10.56	100	100	
52	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan ResikoTerinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus* = HIV)		V	100	100	100	100	84,29	23.41	100	100	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan review dari gambaran pelayanan SKPD, sasaran menengah pada Renstra K/L, sasaran jangka menengah dari renstra SKPD Kabupaten, implikasi RTRW bagipelayanan SKPD, implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD, maka isu strategis pelayanan SKPD Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

a. Angka kematian bayi dan angka kematian ibu belum dapat ditekan secara maksimal
b. Masih tingginya angka penyakit menular dan masih adanya penyakit yang telahdi nyatakan eliminasi.
c. Masih adanya masalah-masalah gizi terutama stunting dan gizi buruk pada balita dan ibu hamil KEK.
d. Sebaran tenaga kesehatan yang tidak merata baik kualitas maupun kuantitas.
e. Belum maksimalnya pemanfaatan data dan informasi kesehatan dalam proses perencanaan kegiatan.

Disamping isu strategis tersebut, Dinas Kesehatan memandang perlu untuk menambahkan isu penting lainnya yaitu dukungan manajemen dalam peningkatan pelayanan kesehatan, yang termasuk didalamnya adalah good governance, desentralisasi bidang kesehatan, struktur organisasi yang efektif dan efisien. Penjabaran isu strategis pembangunan kesehatan tersebut diatas meliputi :

1. Pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, usia , usia profduktif, usia lanjut belum dilakukan secara optimal.
2. Belum terlaksananya perbaikan gizi masyarakat secara menyeluruh
3. Belum optimalnya upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan yang ditunjukkan dengan masih adanya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular
4. Akses pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan yang masih perlu ditingkatkan kualitasnya
5. Belum optimalnya ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat essensial, penggunaan obat yang tidak rasional dan penyelenggaraan pelayanan kefarmasian yang berkualitas, termasuk pengawasan obat dan makanan.
6. Belum terpenuhinya ketersediaan, persebaran dan mutu sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas.

7. Belum terpadunya upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta program-program kesehatan lainnya.
8. Belum dilakukannya pemanfaatan secara optimal unsur manajemen, penelitian, pengembangan dan system informasi di bidang kesehatan.
9. Pelaksanaan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional yang masih belum sempurna, belum efisien dan efektifnya pembiayaan kesehatan.
10. Beberapa kegiatan yang sumber pendanaannya dari DAK Fisik Regular, pada Tahun Anggaran 2024 sudah sangat dikurangi oleh Kementerian Kesehatan, seperti Pengadaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai sehingga pendanaannya harus dialihkan ke DAU/APBD Kabupaten Takalar.
11. Dibutuhkan biaya operasional untuk pengelolaan Rumah Sakit Galesong dengan selesainya tahapan pembangunan rumah sakit tersebut.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Program kegiatan yang ada dalam Rancangan Awal Renja Dinas Kesehatan disusun berdasarkan hasil capaian kinerja berdasarkan Indikator yang ada pada Renstra Dinas Kesehatan. Proses penyusunan Rancangan Awal dilaksanakan pada bulan Februari 2023 dengan pagu indikatif senilai Rp. 169,650,800,000,- kemudian dilakukan penginputan pada SIPD. Hasil penginputan di sistem kemudian direview oleh Bappeda dimana penekanannya adalah bagaimana Program Prioritas Daerah dan Program Prioritas SPM termuat dalam Renja Dinas Kesehatan. Berdasarkan hasil review Bappeda bahwa semua indikator SPM sudah termuat dalam Renja Dinas Kesehatan.

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka berikut disajikan informasi yang memuat tentang perbandingan rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan pada Dinas Kesehatan :

Tabel II.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Kab. Takalar	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota	100%	56,960,800,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Kab. Takalar	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota	100%	56,960,800,000	
I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Takalar	Persentase Pelaksanaan/Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evalausi Kinerja PD Tepat Waktu	100%	380,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Takalar	Persentase Pelaksanaan/Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evalausi Kinerja PD Tepat Waktu	100%	380,000,000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	50,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	50,000,000	
2	Koordinasi dan PenyusunanDokumen RKA-SKPD	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	37,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	37,000,000	
3	Koordinasi dan PenyusunanDokumenPerubahan RKA-SKPD	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahDokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD	3 dokumen		Koordinasi dan PenyusunanDokumenPerubahan RKA-SKPD	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahDokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunanDokumenPerubahan RKA-SKPD	3 dokumen		

4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahDokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	25,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahDokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunanDokumen DPA-SKPD	1 dokumen	25,000,000	
5	Koordinasi dan penyusunanPerubahan DPA-SKPD	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahDokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan DokumenPerubahan DPA-SKPD	1 dokumen	38,000,000	Koordinasi dan penyusunanPerubahan DPA-SKPD	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahDokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunanDokumenPerubahan DPA-SKPD	1 dokumen	38,000,000	
6	Koordinasi dan PenyusunanLaporanCapaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahLaporanCapaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Laporan Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	30,000,000	Koordinasi dan PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahLaporanCapaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunanLaporan Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	30,000,000	
7	Evaluasikinerjaperangkatdaerah	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahLaporanEvaluasikinerjaperangkatdaerah	4 dokumen	200,000,000	Evaluasikinerjaperangkatdaerah	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahLaporanEvaluasikinerjaperangkatdaerah	4 dokumen	200,000,000	
I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Takalar	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Sesuai Standar	100%	54,109,800,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Takalar	Persentase Pengelolaan Administrasi KeuanganSesuai Standar	100%	54,109,800,000	
1	PenyediaanGaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Orang yang MenerimaGaji dan Tunjangan ASN	700 orang	54,000,000,000	PenyediaanGaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Orang yang MenerimaGaji dan Tunjangan ASN	700 orang	54,000,000,000	
2	PenyediaanAdministrasiPelaksanaanTugas ASN	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahDokumen Hasil PenyediaanAdministrasiPelaksanaanTugas ASN	1 dokumen	86,800,000	PenyediaanAdministrasiPelaksanaanTugas ASN	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahDokumen Hasil PenyediaanAdministrasiPelaksanaanTugas ASN	1 dokumen	86,800,000	

3	PelaksanaanPenatausahaan dan Pengujian/VerifikasiKeuangan SKPD	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahDokumenPenatausahaan dan Pengujian/VerifikasiKeuangan SKPD	1 dokumen		PelaksanaanPenatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahDokumenPenatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen		
4	Koordinasi dan PelaksanaanAkuntansi SKPD	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahDokumenKoordinasi dan PelaksanaanAkuntansi SKPD	1 dokumen	-	Koordinasi dan PelaksanaanAkuntansi SKPD	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahDokumenKoordinasi dan PelaksanaanAkuntansi SKPD	1 dokumen	-	
5	Koordinasi dan PenyusunanLaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahLaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	11,000,000	Koordinasi dan PenyusunanLaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahLaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunanLaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	11,000,000	
6	Pengelolaan dan PenyiapanBahan TanggapanPemeriksaan	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahDokumenBahanTanggapanPemeriksaan dan TindakLanjutPemeriksaan	1 dokumen		Pengelolaan dan PenyiapanBahanTanggapanPemeriksaan	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahDokumenBahanTanggapanPemeriksaan dan TindakLanjutPemeriksaan	1 dokumen		
7	Koordinasi dan PenyusunanLaporanKeuanganBulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahLaporanKeuanganBulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan LaporanKoordinasiPenyusunanLaporanKeuanganBulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	12,000,000	Koordinasi dan PenyusunanLaporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahLaporanKeuanganBulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan LaporanKoordinasiPenyusunanLaporanKeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	12,000,000	
8	PenyusunanPelaporan dan Analisis Prognosis RealisasiAnggaran	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahDokumenPelaporan dan Analisis Prognosis RealisasiAnggaran	1 dokumen		PenyusunanPelaporan dan Analisis Prognosis RealisasiAnggaran	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahDokumenPelaporan dan Analisis Prognosis RealisasiAnggaran	1 dokumen		

I.3	AdministrasiBarang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Takalar	PersentasePengelolaan AdministrasiBarang Milik Daerah sesuaiStandar	100%	205,000,000	AdministrasiBarang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Takalar	PersentasePengelolaanAdministrasiBarang Milik Daerah sesuaiStandar	100%	205,000,000	
1	PenyusunanPerencanaanKebutuhanBarang Milik Daerah SKPD	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahRencanaKebutuhanBarang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	50,000,000	PenyusunanPerencanaanKebutuhanBarang Milik Daerah SKPD	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahRencanaKebutuhanBarang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	50,000,000	
2	PengamananBarang Milik Daerah SKPD	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahDokumenPengamananBarang Milik Daerah SKPD	1 dokumen		PengamananBarang Milik Daerah SKPD	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahDokumenPengamananBarang Milik Daerah SKPD	1 dokumen		
3	Koordinasi dan PenilaianBarang Milik Daerah SKPD	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahLaporan Hasil PenilaianBarang Milik Daerah dan Hasil KoordinasiPenilaianBarang Milik Daerah SKPD	1 Laporan		Koordinasi dan PenilaianBarang Milik Daerah SKPD	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahLaporan Hasil PenilaianBarang Milik Daerah dan Hasil KoordinasiPenilaianBarang Milik Daerah SKPD	1 Laporan		
4	Pembinaan, Pengawasan, dan PengendalianBarang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahLaporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan PengendalianBarang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		Pembinaan, Pengawasan, dan PengendalianBarang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahLaporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan PengendalianBarang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		
5	Rekonsiliasi dan PenyusunanLaporanBarang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahLaporanRekonsiliasi dan PenyusunanLaporanBarang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	150,000,000	Rekonsiliasi dan PenyusunanLaporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahLaporanRekonsiliasi dan PenyusunanLaporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	150,000,000	

6	PenatausahaanBarang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahLaporanPenatausahaanBarang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5,000,000	PenatausahaanBarang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahLaporanPenatausahaanBarang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5,000,000	
7	PemanfaatanBarang Milik Daerah SKPD	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahDokumen Hasil PemanfaatanBarang Milik Daerah SKPD	1 dokumen		PemanfaatanBarang Milik Daerah SKPD	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahDokumen Hasil PemanfaatanBarang Milik Daerah SKPD	1 dokumen		
I.4	AdministrasiPendapatan Daerah KewenanganPerangkat Daerah	Kab. Takalar	PersentasePeningkatan Pendapatan Daerah KewenanganPerangkat Daerah	100%	-	AdministrasiPendapatan Daerah KewenanganPerangkat Daerah	Kab. Takalar	PersentasePeningkatanPendapatan Daerah KewenanganPerangkat Daerah	100%	-	
1	PerencanaanPengelolaanRetribusi Daerah	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahDokumenRencanaPengelolaanRetribusi Daerah	1 dokumen		PerencanaanPengelolaanRetribusi Daerah	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahDokumenRencanaPengelolaanRetribusi Daerah	1 dokumen		
2	Analisa dan PengembanganRetribusi Daerah, sertaPenyusunan KebijakanRetribusi Daerah	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahDokumen Hasil AnalisissertaPengembanganRetribusi Daerah dan KebijakanRetribusi Daerah	1 dokumen		Analisa dan PengembanganRetribusi Daerah, sertaPenyusunanKebijakanRetribusi Daerah	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahDokumen Hasil AnalisissertaPengembanganRetribusi Daerah dan KebijakanRetribusi Daerah	1 dokumen		
3	PelaporanPengelolaanRetribusi Daerah	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahLaporanPengelolaanRetribusi Daerah	1 dokumen		PelaporanPengelolaanRetribusi Daerah	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahLaporanPengelolaanRetribusi Daerah	1 dokumen		
4	PelaporanPengelolaanRetribusi Daerah	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahLaporanPengelolaanRetribusi Daerah	1 dokumen		PelaporanPengelolaanRetribusi Daerah	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahLaporanPengelolaanRetribusi Daerah	1 dokumen		

I.5	AdministrasiKepegawaianPerangkat Daerah	Kab. Takalar	PersentasePengelolaan AdministrasiPerangkat Daerah SesuaiStandar	100%	350,000,000	AdministrasiKepegawaianPerangkat Daerah	Kab. Takalar	PersentasePengelolaanAdministrasiPerangkat Daerah SesuaiStandar	100%	350,000,000	
1	Peningkatan Sarana dan PrasaranaDisiplin Pegawai	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan PrasaranaDisiplinPegawa	0		Peningkatan Sarana dan PrasaranaDisiplinPegawai	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan PrasaranaDisiplinPegawa	0		
2	PengadaanPakaian Dinas besertaAtributKelengkapannya	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahPaketPakaian Dinas besertaAtributKelengkapan	0		PengadaanPakaian Dinas besertaAtributKelengkapannya	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahPaketPakaian Dinas besertaAtributKelengkapan	0		
3	Pendataan dan PengolahanAdministrasiKepegawaian	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahDokumenPendataan dan PengolahanAdministrasiKepegawaian	1 dokumen	350,000,000	Pendataan dan PengolahanAdministrasiKepegawaian	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahDokumenPendataan dan PengolahanAdministrasiKepegawaian	1 dokumen	350,000,000	
4	Koordinasi dan PelaksanaanSistemInformasiKepegawaian	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahDokumen Hasil Koordinasi dan PelaksanaaanSistemInformasiKepegawaian	1 dokumen		Koordinasi dan PelaksanaanSistemInformasiKepegawaian	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahDokumen Hasil Koordinasi dan PelaksanaaanSistemInformasiKepegawaian	1 dokumen		
5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahDokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahDokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen		

6	Pendidikan dan PelatihanPegawai BerdasarkanTugas dan Fungsi	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahPegawaiBerdasarkanTugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			Pendidikan dan PelatihanPegawaiBerdasarkanTugas dan Fungsi	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahPegawaiBerdasarkanTugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			
7	SosialisasiPeraturanPerundang-Undangan	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Orang yang MengikutiSosialisasiPeraturanPerundang-Undangan			SosialisasiPeraturanPerundang-Undangan	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Orang yang MengikutiSosialisasiPeraturanPerundang-Undangan			
8	Bimbingan Teknis ImplementasiPeraturanPerundang-Undangan	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Orang yang MengikutiBimbingan Teknis ImplementasiPeraturan Perundang-Undangan			Bimbingan Teknis ImplementasiPeraturanPerundang-Undangan	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Orang yang MengikutiBimbingan Teknis ImplementasiPeraturanPerundang-Undangan			
I.6	AdministrasiUmumPerangkat Daerah	Kab. Takalar	PersentasePemenuhanPenyediaanUrusanUmum Perangkat Daerah	100%	491,000,000	AdministrasiUmumPerangkat Daerah	Kab. Takalar	PersentasePemenuhanPenyediaanUrusanUmumPerangkat Daerah	100%	491,000,000	
1	PenyediaanKomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahPaketKomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yang Disediakan		40,000,000	PenyediaanKomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahPaketKomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yang Disediakan		40,000,000	
2	PenyediaanPeralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahPaketPeralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		50,000,000	PenyediaanPeralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahPaketPeralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		50,000,000	

3	PenyediaanPeralatanRumahTangga	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahPaketPeralatanRumahTangga yang Disediakan		21,000,000	PenyediaanPeralatan RumahTangga	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahPaketPeralatanRumahTangga yang Disediakan		21,000,000	
4	PenyediaanBahanLogistik Kantor	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	TersedianyaBahanLogistik Kantor		50,000,000	PenyediaanBahanLogistik Kantor	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	TersedianyaBahanLogistik Kantor		50,000,000	
5	PenyediaanBarangCetakan dan Penggandaan	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahPaketBarangCetakan dan Penggandaan yang Disediakan			PenyediaanBarangCetakan dan Penggandaan	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahPaketBarangCetakan dan Penggandaan yang Disediakan			
6	PenyediaanBahanBacaan dan PeraturanPerundang-undangan	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahDokumenBahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yang Disediakan		30,000,000	PenyediaanBahanBacaan dan PeraturanPerundang-undangan	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahDokumenBahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yang Disediakan		30,000,000	
7	PenyediaanBahan/Material	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahPaketBahan/Material yang Disediakan			PenyediaanBahan/Material	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahPaketBahan/Material yang Disediakan			
8	FasilitasiKunjunganTamu	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahLaporanFasilitasiKunjunganTamu		50,000,000	FasilitasiKunjunganTamu	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahLaporanFasilitasiKunjunganTamu		50,000,000	
9	PenyelenggaraanRapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahLaporanPenyelenggaraanRapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD		250,000,000	PenyelenggaraanRapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahLaporanPenyelenggaraanRapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD		250,000,000	

10	PenatausahaanArsipDinamis pada SKPD	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahDokumenPenatausahaanArsipDinamis pada SKPD			PenatausahaanArsip Dinamis pada SKPD	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahDokumenPenatausahaanArsipDinamis pada SKPD			
11	DukunganPelaksanaanSistemPemerintahanBerbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahDokumenDukunganPelaksanaanSistemPemerintahanBerbasisElektronik pada SKPD			DukunganPelaksanaanSistemPemerintahanBerbasisElektronik pada SKPD	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahDokumenDukunganPelaksanaanSistemPemerintahanBerbasisElektronik pada SKPD			
I.7	PengadaanBarang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah	Kab. Takalar	PersentasePemenuhanBarang Milik Daerah PenunjangUrusanPemerintahan Daerah	100%	300,000,000	PengadaanBarang Milik Daerah PenunjangUrusanPemerintah Daerah	Kab. Takalar	PersentasePemenuhanBarang Milik Daerah PenunjangUrusanPemerintahan Daerah	100%	300,000,000	
1	PengadaanKendaraanPerorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit KendaraanPerorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			PengadaanKendaraanPerorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit KendaraanPerorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			
2	PengadaanKendaraan Dinas OperasionalatauLapangan	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Unit Kendaraan Dinas OperasionalatauLapangan yang Disediakan	20 unit		PengadaanKendaraan Dinas OperasionalatauLapangan	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Unit Kendaraan Dinas OperasionalatauLapangan yang Disediakan	20 unit		
3	PengadaanMebel	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahPaketMebel yang Disediakan	30 buah		PengadaanMebel	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahPaketMebel yang Disediakan	30 buah		

4	PengadaanPeralatan dan MesinLainnya	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Unit Peralatan dan MesinLainnya yang Disediakan	1 unit		PengadaanPeralatan dan MesinLainnya	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Unit Peralatan dan MesinLainnya yang Disediakan	1 unit		
5	PengadaanAsetTetapLainnya	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Unit AsetTetapLainnya yang Disediakan	1 unit		PengadaanAsetTetap Lainnya	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Unit AsetTetapLainnya yang Disediakan	1 unit		
6	PengadaanAset Tak Berwujud	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 unit		PengadaanAset Tak Berwujud	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 unit		
7	Pengadaan Gedung Kantor atauBangunanLainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atauBangunanLainnya yang Disediakan			Pengadaan Gedung Kantor atauBangunanLainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atauBangunanLainnya yang Disediakan			
8	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atauBangunanLainnya	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atauBangunanLainnya yang Disediakan	20 unit	150,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atauBangunanLainnya	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atauBangunanLainnya yang Disediakan	20 unit	150,000,000	
9	Pengadaan Sarana dan PrasaranaPendukung Gedung Kantor atauBangunanLainnya	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Unit Sarana dan PrasaranaPendukung Gedung Kantor atauBangunanLainnya yang Disediakan	20 unit	150,000,000	Pengadaan Sarana dan PrasaranaPendukung Gedung Kantor atauBangunanLainnya	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Unit Sarana dan PrasaranaPendukung Gedung Kantor atauBangunanLainnya yang Disediakan	20 unit	150,000,000	

I.8	Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah	Kab. Takalar	PersentasePemenuhanPenyediaan Jasa PenunjangUrusanPemerintah Daerah	100%	755,000,000	Penyediaan Jasa PenunjangUrusanPemerintahan Daerah	Kab. Takalar	PersentasePemenuhanPenyediaan Jasa PenunjangUrusanPemerintah Daerah	100%	755,000,000	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahLaporanPenyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahLaporanPenyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5,000,000	
2	JumlahLaporanPenyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahLaporanPenyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	20 Laporan	750,000,000	JumlahLaporanPenyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahLaporanPenyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	20 Laporan	750,000,000	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		JumlahLaporanPenyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		JumlahLaporanPenyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
4	Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahLaporanPenyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahLaporanPenyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		
I.9	PemeliharaanBarang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah	Kab. Takalar	PersentasePemenuhanBarang Milik Daerah PenunjangUrusanPemerintahan Daerah yang Terpelihara	100%	370,000,000	PemeliharaanBarang Milik Daerah PenunjangUrusanPemerintahan Daerah	Kab. Takalar	PersentasePemenuhanBarang Milik Daerah PenunjangUrusanPemerintahan Daerah yang Terpelihara	100%	370,000,000	

1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, dan PajakKendaraanPerorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan	Kab. Takalar	JumlahKendaraanPerorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkanPajaknya		50,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, dan PajakKendaraanPerorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan	Kab. Takalar	JumlahKendaraanPerorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkanPajaknya		50,000,000	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak dan PerizinanKendaraan Dinas OperasionalatauLapangan	Kab. Takalar	JumlahKendaraan Dinas OperasionalatauLapangan yang Dipelihara dan dibayarkanPajak dan Perizinannya		20,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak dan PerizinanKendaraan Dinas OperasionalatauLapangan	Kab. Takalar	JumlahKendaraan Dinas OperasionalatauLapangan yang Dipelihara dan dibayarkanPajak dan Perizinannya		20,000,000	
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan Perizinan Alat AngkutanDarat Tak Bermotor	Kab. Takalar	Jumlah Alat AngkutanDarat Tak Bermotor yang Dipelihara dan DibayarkanPerizinannya			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan Perizinan Alat AngkutanDarat Tak Bermotor	Kab. Takalar	Jumlah Alat AngkutanDarat Tak Bermotor yang Dipelihara dan DibayarkanPerizinannya			
4	PemeliharaanMebel	Kab. Takalar	JumlahMebel yang Dipelihara			PemeliharaanMebel	Kab. Takalar	JumlahMebel yang Dipelihara			
5	PemeliharaanPeralatan dan MesinLainnya	Kab. Takalar	JumlahPeralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara			PemeliharaanPeralatan dan MesinLainnya	Kab. Takalar	JumlahPeralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara			
6	PemeliharaanAsetTetapLainnya	Kab. Takalar	JumlahAsetTetapLainnya yang Dipelihara			PemeliharaanAsetTetapLainnya	Kab. Takalar	JumlahAsetTetapLainnya yang Dipelihara			

7	PemeliharaanAset Tak Berwujud	Kab. Takalar	JumlahAset Tak Berwujud yang Dipelihara			PemeliharaanAset Tak Berwujud	Kab. Takalar	JumlahAset Tak Berwujud yang Dipelihara			
8	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan BangunanLainnya	Kab. Takalar	Jumlah Gedung Kantor dan BangunanLainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		150,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan BangunanLainnya	Kab. Takalar	Jumlah Gedung Kantor dan BangunanLainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		150,000,000	
9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atauBangunanLainnya	Kab. Takalar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atauBangunanLainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atauBangunanLainnya	Kab. Takalar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atauBangunanLainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan PrasaranaPendukung Gedung Kantor atauBangunanLainnya	Kab. Takalar	Jumlah Sarana dan PrasaranaPendukung Gedung Kantor atauBangunanLainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		150,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan PrasaranaPendukung Gedung Kantor atauBangunanLainnya	Kab. Takalar	Jumlah Sarana dan PrasaranaPendukung Gedung Kantor atauBangunanLainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		150,000,000	
11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah		Luas Tanah yang DilakukanPemeliharaan/Rehabilitasi			Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah		Luas Tanah yang DilakukanPemeliharaan/Rehabilitasi			
I.10	PeningkatanPelayanan BLUD	Kab. Takalar	PersentasePeningkatan Pelayanan BLUD Fasyankes	100%	-	PeningkatanPelayanan BLUD	Kab. Takalar	PersentasePeningkatanPelayanan BLUD Fasyankes	100%	-	

1	Pelayanan dan PenunjangPelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang MenyediakanPelayanan dan PenunjangPelayanan			Pelayanan dan PenunjangPelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang MenyediakanPelayanan dan PenunjangPelayanan			
II	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kab. Takalar	PersentasePelaksanaan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100%	108,970,000,000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kab. Takalar	PersentasePelaksanaanPemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100%	108,970,000,000	
II.1	PenyediaanFasilitasPelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan	Kab. Takalar	PersentaseFasilitasPelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan yang tersedia	100%	33,450,000,000	PenyediaanFasilitasPelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan	Kab. Takalar	PersentaseFasilitasPelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan yang tersedia	100%	33,450,000,000	
1	Pembangunan RumahSakitbeserta Sarana dan Prasaranapendukungnya		JumlahRumahsakitbaru yang yangmemenuhirasiotempattidurterhadapjumlahpenduduk minimal 1:1000 (unit)			Pembangunan RumahSakitbeserta Sarana dan Prasaranapendukungnya		JumlahRumahsakitbaru yang yangmemenuhirasiotempattidurterhadapjumlahpenduduk minimal 1:1000 (unit)			
2	Pembangunan Puskesmas		Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun			Pembangunan Puskesmas		Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun			

3	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya		JumlahFasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun			Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya		JumlahFasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun			
4	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Kab. Takalar	JumlahRumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	2 Unit	1,000,000,000	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Kab. Takalar	JumlahRumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	2 Unit	1,000,000,000	
5	PengembanganRumahSakit	Kab. Takalar	JumlahRumahSakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar SetiapStandarJenisPelayananRumahSakitberdasarkanKelasRumahSakit yang MemenuhiRasioTempatTidurTerhadapJumlahPenduduk Minimal 1:1000	2 Unit	1,000,000,000	PengembanganRumahSakit	Kab. Takalar	JumlahRumahSakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar SetiapStandarJenisPelayananRumahSakitberdasarkanKelasRumahSakit yang MemenuhiRasioTempatTidurTerhadapJumlahPenduduk Minimal 1:1000	2 Unit	1,000,000,000	
6	PengembanganPuskesmas	PuskesmasBontomarannu, Bontomangape	JumlahPuskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar SesuaiStandar	2 Unit	1,000,000,000	PengembanganPuskesmas	Puskesmas Bontomarannu, Bontomangape	JumlahPuskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar SesuaiStandar	2 Unit	1,000,000,000	
7	PengembanganFasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Takalar	JumlahFasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar SesuaiStandar	2 Unit	1,000,000,000	PengembanganFasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Takalar	JumlahFasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar SesuaiStandar	2 Unit	1,000,000,000	

8	Rehabilitasi dan PemeliharaanRumahSakit	DesaAeng Batu-batu, Kel. Palleko, DesaBontolebang	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh RumahSakit	3 Unit	500,000,000	Rehabilitasi dan PemeliharaanRumah Sakit	DesaAeng Batu-batu, Kel. Palleko, DesaBontolebang	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh RumahSakit	3 Unit	500,000,000	
9	Rehabilitasi dan PemeliharaanPuskesmas	PuskesmasBontokassi, Bontomarannu, Tanakeke, Ko'mara, Towata	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah DilakukanRehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	5 unit	1,250,000,000	Rehabilitasi dan PemeliharaanPuskesmas	Puskesmas Bontokassi, Bontomarannu, Tanakeke, Ko'mara, Towata	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah DilakukanRehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	5 unit	1,250,000,000	
10	Rehabilitasi dan PemeliharaanFasilitas Kesehatan Lainnya	Fasyankes Se-Kab. Takalar	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah DilakukanRehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	30 Unit	1,000,000,000	Rehabilitasi dan PemeliharaanFasilitas Kesehatan Lainnya	Fasyankes Se- Kab. Takalar	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah DilakukanRehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	30 Unit	1,000,000,000	
11	Rehabilitasi dan PemeliharaanRumah Dinas Tenaga Kesehatan	PuskesmasKo'mara, Aeng Towa, Polsel, Bulukunyi	Jumlah Sarana dan PrasaranaRumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah DilakukanRehabilitasi dan Pemeliharaan	4 Unit	500,000,000	Rehabilitasi dan PemeliharaanRumah Dinas Tenaga Kesehatan	Puskesmas Ko'mara, Aeng Towa, Polsel, Bulukunyi	Jumlah Sarana dan PrasaranaRumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah DilakukanRehabilitasi dan Pemeliharaan	4 Unit	500,000,000	
12	Pengadaan Sarana FasilitasPelayanan Kesehatan	Puskesmas se-Kab. Takalar	JumlahsaranaFasilitasPelayanan Kesehatan yang Disediakan	17 Unit	1,000,000,000	Pengadaan Sarana FasilitasPelayanan Kesehatan	Puskesmas se-Kab. Takalar	JumlahsaranaFasilitasPelayanan Kesehatan yang Disediakan	17 Unit	1,000,000,000	

13	PengadaanPrasarana dan PendukungFasilitasPelayanan Kesehatan	Puskesmas se-Kab. Takalar	JumlahPrasaranaFasilitasPelayanan Kesehatan yang Disediakan	17 Unit	2,000,000,000	PengadaanPrasarana dan PendukungFasilitasPelayanan Kesehatan	Puskesmas se-Kab. Takalar	JumlahPrasaranaFasilitasPelayanan Kesehatan yang Disediakan	17 Unit	2,000,000,000	
14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat PenunjangMedik FasilitasPelayanan Kesehatan	Puskesmas se-Kab. Takalar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat PenunjangMedikFasilitasPelayanan Kesehatan yang Disediakan	17 Unit	10,000,000,000	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat PenunjangMedikFasilitasPelayanan Kesehatan	Puskesmas se-Kab. Takalar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat PenunjangMedikFasilitasPelayanan Kesehatan yang Disediakan	17 Unit	10,000,000,000	
15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahPenyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit PemeliharaanFasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	1 paket	-	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahPenyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit PemeliharaanFasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	1 paket	-	
16	PengadaanObat, Vaksin	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahObat dan Vaksin yang Disediakan	5 Paket	5,000,000,000	PengadaanObat, Vaksin	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahObat dan Vaksin yang Disediakan	5 Paket	5,000,000,000	
17	PengadaanBahan HabisPakai	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahBahanHabisPakai yang Disediakan	5 Paket	5,000,000,000	PengadaanBahanHabisPakai	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahBahanHabisPakai yang Disediakan	5 Paket	5,000,000,000	
18	Pemeliharaan Sarana FasilitasPelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Sarana FasilitasPelayanan Kesehatan Yang DilakukanPemeliharaan	10 Unit	2,000,000,000	Pemeliharaan Sarana FasilitasPelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Sarana FasilitasPelayanan Kesehatan Yang DilakukanPemeliharaan	10 Unit	2,000,000,000	

19	PemeliharaanPrasarana dan PendukungFasilitasPelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahPrasaranaFasilitasPelayanan Kesehatan yang DilakukanPemeliharaan	10 Unit	500,000,000	PemeliharaanPrasarana dan PendukungFasilitasPelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahPrasaranaFasilitasPelayanan Kesehatan yang DilakukanPemeliharaan	10 Unit	500,000,000	
20	PemeliharaanRutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat PenunjangMedikFasilitasPelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat PenunjangMedikFasilitasLayanan Kesehatan yang TerpeliharaSesuaiStandar	17 Unit	450,000,000	PemeliharaanRutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat PenunjangMedikFasilitasPelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat PenunjangMedikFasilitasLayanan Kesehatan yang TerpeliharaSesuaiStandar	17 Unit	450,000,000	
21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BahanMedisHabisPakai (BMHP), Makanan dan MinumankePuskesmassertaFasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahDistribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BahanMedisHabisPakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang DidistribusikankePuskesmassertaFasilitas Kesehatan Lainnya	5 Paket	100,000,000	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BahanMedisHabisPakai (BMHP), Makanan dan MinumankePuskesmassertaFasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahDistribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BahanMedisHabisPakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang DidistribusikankePuskesmassertaFasilitas Kesehatan Lainnya	5 Paket	100,000,000	
22	PengelolaanPelayanan Kesehatan Dasar melaluiPendekatanKeluarga	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahKeluarga yang SudahDikunjungi dan DiintervensiMasalahKesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	101.216 KK	150,000,000	PengelolaanPelayanan Kesehatan Dasar melaluiPendekatanKeluarga	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahKeluarga yang SudahDikunjungi dan DiintervensiMasalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	101.216 KK	150,000,000	

II.2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	PersentaseLayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang tersedia	100%	74,690,000,000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	PersentaseLayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang tersedia	100%	74,690,000,000	
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		750,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Ibu Hamil yang MendapatkanPelayanan Kesehatan SesuaiStandar		750,000,000	
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Ibu Bersalin yang MendapatkanPelayanan Kesehatan SesuaiStandar		500,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Ibu Bersalin yang MendapatkanPelayanan Kesehatan SesuaiStandar		500,000,000	
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang MendapatkanPelayanan Kesehatan SesuaiStandar		350,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		350,000,000	

4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		500,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		500,000,000	
5	PengelolaanPelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		300,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		300,000,000	
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada UsiaProduktif	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		500,000,000	PengelolaanPelayanan Kesehatan pada UsiaProduktif	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahPendudukUsia Produktif yang MendapatkanPelayanan Kesehatan SesuaiStandar		500,000,000	
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada UsiaLanjut	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		700,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar		700,000,000	
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan PenderitaHipertensi	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		500,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		500,000,000	

9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar		400,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		400,000,000	
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		150,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		150,000,000	
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		500,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		500,000,000	
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		500,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Orang TerdugaMenderita HIV yang MendapatkanPelayanan SesuaiStandar		500,000,000	
13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian LuarBiasa (KLB)	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		100,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagiPenduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		100,000,000	

14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan /atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar		50,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk TerdampakKrisis Kesehatan AkibatBencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar		50,000,000	
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		800,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		800,000,000	
16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		1,000,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah raga	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		1,000,000,000	
17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		100,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		100,000,000	
18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		500,000,000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		500,000,000	
19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		150,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		150,000,000	

20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		100,000,000	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		100,000,000	
21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		500,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		500,000,000	
22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		500,000,000	PengelolaanPelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahPenyalahguna NAPZA yang MendapatkanPelayanan Kesehatan		500,000,000	
23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus		1,200,000,000	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus		1,200,000,000	
24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan PascaKrisis Kesehatan	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan			Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan PascaKrisis Kesehatan			
25	Pelayanan Kesehatan PenyakitMenular dan TidakMenular	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		1,200,000,000	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		1,200,000,000	
26	PengelolaanJaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		40,000,000,000	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		40,000,000,000	

27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah		50,000,000	Deteksi Dini Penyalah gunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah		50,000,000	
28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB keLaboratorium Rujukan /Nasional	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		15,000,000	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan /Nasional	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		15,000,000	
29	Penyelenggaran Kabupaten /Kota Sehat	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		500,000,000	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		500,000,000	
30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas		1,000,000,000	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauhantar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas		1,000,000,000	

31	PengelolaanPenelitian Kesehatan	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Penelitian Kesehatan	1 dokumen	250,000,000	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Penelitian Kesehatan	1 dokumen	250,000,000	
32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	DesaAeng Batu-batu, Kel. Palleko, DesaBontolebang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	3 Unit	1,000,000,000	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	DesaAeng Batu-batu, Kel. Palleko, DesaBontolebang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	3 Unit	1,000,000,000	
33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas se-Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	17 Unit	18,000,000,000	Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas se-Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	17 Unit	18,000,000,000	
34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kel. Kalabbirang dan Kel. Pattallassang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Unit	1,000,000,000	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kel. Kalabbirang dan Kel. Pattallassang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Unit	1,000,000,000	

35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten /Kota	Puskesmas Aeng Towa, Galut,Galesong, Bontomarannu, Bontokassi, Sanrobone, Mapsu, Pattallassang, Marbo, Pattoppakang, Polsel, Bulukunyi, Polut, Ko'mara dan Towata	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	15 PKM	500,000,000	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Puskesmas Aeng Towa, Galut, Galesong, Bontomarannu, Bontokassi, Sanrobone, Mapsu, Pattallassang, Marbo, Pattoppakang, Polsel, Bulukunyi, Polut, Ko'mara dan Towata	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	15 PKM	500,000,000	
36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (KejadianIkutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Puskesmas se-Kab. Takalar	JumlahLaporan Hasil Investigasi Awal KejadianTidakDiharapkan (KejadianIkutanPascaImunisasi dan PemberianObatMassal)	1 dokumen	10,000,000	Investigasi Awal KejadianTidakDiharapkan (KejadianIkutanPascaImunisasi dan PemberianObatMassal)	Puskesmas se-Kab. Takalar	JumlahLaporan Hasil Investigasi Awal KejadianTidakDiharapkan (KejadianIkutanPascaImunisasi dan PemberianObatMassal)	1 dokumen	10,000,000	
37	PelaksanaanKewaspadaan Dini dan ResponWabah	Puskesmas se-Kab. Takalar	JumlahDokumen Hasil PelaksanaanKewaspadaan Dini dan ResponWabah	1 dokumen	15,000,000	PelaksanaanKewaspadaan Dini dan ResponWabah	Puskesmas se-Kab. Takalar	JumlahDokumen Hasil PelaksanaanKewaspadaan Dini dan ResponWabah	1 dokumen	15,000,000	

38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kel. Pattallassang	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	500,000,000	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kel. Pattallassang	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	500,000,000	
II.3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Puskesmas se-Kab. Takalar	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	100%	480,000,000	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Puskesmas se-Kab. Takalar	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	100%	480,000,000	
1	Pengelolaan Data dan informasi kesehatan	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan data dan informasi kesehatan	1 dokumen	30,000,000	Pengelolaan Data dan informasikesehatan	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan data dan informasi kesehatan	1 dokumen	30,000,000	
2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 dokumen	450,000,000	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 dokumen	450,000,000	
3	Pengadaan Alat/PerangkatSistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	17 Puskesmas& 3 RS	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang disediakan	20 Unit		Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	17 Puskesmas & 3 RS	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang disediakan	20 Unit		

II.4	Penerbitan Izin Rumah SakitKelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Kab. Takalar	Persentase izin praktek tenaga kesehatan di wilayah kabupaten /kota	100%	350,000,000	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Persentase izin praktek tenaga kesehatan di wilayah kabupaten/kota	100%	350,000,000	
1	Pengendalian dan Pengawasanserta TindakLanjutPengawasanPerizinanRumahSakitKelas C, D dan FasilitasPelayanan Kesehatan Lainnya	DesaAeng Batu-batu, Kel. Palleko, DesaBontolebang	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan FasilitasPelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan DitindaklanjutiPerizinannya	3 Unit	100,000,000	Pengendalian dan Pengawasanserta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	DesaAeng Batu-batu, Kel. Palleko, DesaBontolebang	JumlahRumahSakitKelas C, D dan FasilitasPelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan DitindaklanjutiPerizinannya	3 Unit	100,000,000	
2	Peningkatan Tata Kelola RumahSakit dan FasilitasPelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kel. Palleko, DesaBontolebang	JumlahRumahSakit dan FasilitasPelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang MelakukanPeningkatan Tata Kelola SesuaiStandar	2 Unit		Peningkatan Tata Kelola RumahSakit dan FasilitasPelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kel. Palleko, DesaBontolebang	JumlahRumahSakit dan FasilitasPelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang MelakukanPeningkatan Tata Kelola SesuaiStandar	2 Unit		
3	PeningkatanMutuPelayananFasilitas Kesehatan	Fasyankes Se-Kab. Takalar	JumlahFasilitas Kesehatan yang dilakukanPengukuranIndikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	20 Unit		PeningkatanMutuPelayananFasilitas Kesehatan	Fasyankes Se- Kab. Takalar	JumlahFasilitas Kesehatan yang dilakukanPengukuranIndikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	20 Unit		

4	PenyiapanPerumusan dan PelaksanaanPelayanan Kesehatan Rujukan	DesaAeng Batu-batu, Kel. Palleko, DesaBontolebang	JumlahDokumen Hasil PenyiapanPerumusan dan PelaksanaanPelayanan Kesehatan Rujukan	3 Unit	250,000,000	PenyiapanPerumusan dan PelaksanaanPelayanan Kesehatan Rujukan	DesaAeng Batu-batu, Kel. Palleko, DesaBontolebang	JumlahDokumen Hasil PenyiapanPerumusan dan PelaksanaanPelayanan Kesehatan Rujukan	3 Unit	250,000,000	
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Kab. Takalar	PersentasePuskesmasdenganjenistenagakesehatansesuaistandar	100%	1,150,000,000	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Kab. Takalar	PersentasePuskesmasdenganjenistenagakesehatansesuaistandar	100%	1,150,000,000	
III.1	Pemberian IzinPraktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten /Kota	Kab. Takalar	Persentase izin praktek tenaga kesehatan di wilayah kabupaten/kota	100%	100,000,000	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Persentase izin praktek tenaga kesehatan di wilayah kabupaten/kota	100%	100,000,000	
1	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		50,000,000	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		50,000,000	
2	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan sertaTindakLanjutPerizinanPraktik Tenaga Kesehatan	Kab. Takalar	JumlahDokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan sertaTindakLanjutPerizinanPraktik Tenaga Kesehatan		50,000,000	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		50,000,000	

III.2	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Persentase pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan Sumber daya manusia kesehatan	100%	50,000,000	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Persentase pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan Sumber daya manusia kesehatan	100%	50,000,000	
1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen		Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen		
2	Pemenuhan KebutuhanSumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Takalar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1 Dokumen		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Takalar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1 Dokumen		
3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 dokumen	50,000,000	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 dokumen	50,000,000	

III.3	PengembanganMutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	100%	1,000,000,000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	100%	1,000,000,000	
1	PengembanganMutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	…. orang	1,000,000,000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	…. orang	1,000,000,000	
IV	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Kab. Takalar	Persentase tingkat pemenuhan obat-obatan, alat kesehatan serta Makanan dan Minuman	100%	220,000,000	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Kab. Takalar	Persentase tingkat pemenuhan obat-obatan, alat kesehatan serta Makanan dan Minuman	100%	220,000,000	

IV.1	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab. Takalar	Persentase pelaksanaan pemberian izin apotek, took obat, took alat kesehatan dan optkal, usaha mikro obat tradisional	100%	100,000,000	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab. Takalar	Persentase pelaksanaan pemberian izin apotek, took obat, took alat kesehatan dan optkal, usaha mikro obat tradisional	100%	100,000,000	
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah okumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 dokumen	50,000,000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha MikroObat Tradisional (UMOT)	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, TokoObat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 dokumen	50,000,000	

2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan TindakLanjutPengawasanIzinApotek, TokoObat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha MikroObatTradisional (UMOT)	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahApotek, TokoObat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha MikroObatTradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan DiawasidalamrangkaPenerbitan dan TindakLanjutPenerbitan IzinApotek, TokoObat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha MikroObatTradisional (UMOT)	68 Unit	50,000,000	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan TindakLanjutPengawasanIzinApotek, TokoObat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha MikroObatTradisional (UMOT)	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahApotek, TokoObat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha MikroObatTradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasidalamrangka Penerbitan dan TindakLanjutPenerbitanIzinApotek, TokoObat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha MikroObatTradisional (UMOT)	68 Unit	50,000,000	
3	FasilitasiPemenuhanKomitmenIzinApotek, TokoObat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha MikroObatTradisional (UMOT)	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha MikroObat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin	68 Unit		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, TokoObat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha MikroObatTradisional (UMOT)	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin	68 Unit		

IV.2	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan RumahTanggaKelas 1 Tertentu Perusahaan RumahTangga	Kab. Takalar	Persentase pelaksanaan pemberian sertifika tproduksi untuk sarana produksi alat kesehatan kelas I tertentu dan perbekalan kesehatan, RT Kelas I tertentu perusahaan RT	100%	-	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan RumahTangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan RumahTangga	Kab. Takalar	Persentase pelaksanaan pemberian sertifikat produksi untuk sarana produksi alat kesehatan kelas I tertentu dan perbekalan kesehatan, RT Kelas I tertentu perusahaan RT	100%	-	
1	Pengendalian dan PengawasansertaTindakLanjutPengawasanSertifikatProduksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan RumahTangga	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahDokumenPengendalian dan PengawasansertaTindakLanjutPengawasanSertifikatProduksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan RumahTangga			Pengendalian dan PengawasansertaTindakLanjutPengawasanSertifikatProduksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan RumahTangga	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahDokumenPengendalian dan PengawasansertaTindakLanjutPengawasanSertifikatProduksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan RumahTangga			

2	Pengendalian dan PengawasansertaTindakLanjutPengawasanPerbekalan Kesehatan RumahTanggaKelas 1 Tertentu Perusahaan RumahTangga	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahDokumen Hasil Pengendalian dan PengawasansertaTindakLanjutPengawasanPerbekalan Kesehatan RumahTanggaKelas 1 Tertentu Perusahaan RumahTangga			Pengendalian dan PengawasansertaTindakLanjutPengawasanPerbekalan Kesehatan RumahTanggaKelas 1 Tertentu Perusahaan RumahTangga	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahDokumen Hasil Pengendalian dan PengawasansertaTindakLanjutPengawasanPerbekalan Kesehatan RumahTanggaKelas 1 Tertentu Perusahaan RumahTangga			
IV.3	PenerbitanSertifikatProduksiPanganIndustriRumahTangga dan Nomor P-IRT sebagaiIzinProduksi, untukProdukMakananMinumanTertentu yang DapatDiproduksi oleh IndustriRumahTangga	Kab. Takalar	Persentasepelaksanaan pemberiansertifikatproduksiuntuksaranaproduksialatkesehatankelas I tertentu dan perbekalankesehatan, RT Kelas I tertentuperusahaan RT	100%	50,000,000	PenerbitanSertifikatProduksiPanganIndustriRumahTangga dan Nomor P-IRT sebagaiIzinProduksi, untukProdukMakananMinumanTertentu yang DapatDiproduksi oleh IndustriRumahTangga	Kab. Takalar	Persentasepelaksanaanpemberiansertifikatproduksiuntuksaranaproduksialatkesehatankelas I tertentu dan perbekalankesehatan, RT Kelas I tertentuperusahaan RT	100%	50,000,000	

1	Pengendalian dan PengawasansertaTindakLanjutPengawasanSertifikatProduksiPanganIndustriRumahTangga dan Nomor P-IRT sebagaiIzinProduksi, untukProdukMakananMinumanTertentu yang DapatDiproduksi oleh IndustriRumahTangga		JumlahDokumen Hasil Pengendalian dan PengawasansertaTindakLanjutPengawasanSertifikatProduksiPanganIndustriRumahTangga dan Nomor P-IRT sebagaiIzinProduksi, untukProdukMakananMinumanTertentu yang DapatDiproduksi oleh IndustriRumahTangga	1 dokumen	50,000,000	Pengendalian dan PengawasansertaTindakLanjutPengawasanSertifikatProduksiPanganIndustriRumahTangga dan Nomor P-IRT sebagaiIzinProduksi, untukProdukMakananMinumanTertentu yang DapatDiproduksi oleh IndustriRumahTangga		JumlahDokumen Hasil Pengendalian dan PengawasansertaTindakLanjutPengawasanSertifikatProduksiPanganIndustriRumahTangga dan Nomor P-IRT sebagaiIzinProduksi, untukProdukMakananMinumanTertentu yang DapatDiproduksi oleh IndustriRumahTangga	1 dokumen	50,000,000	
IV.4	PenerbitanSertifikatLaikHigieneSanitasiTempatPengelolaanMakanan (TPM) antara lain Jasa Boga, RumahMakan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Kab. Takalar	Persentasepelaksanaan penerbitansertifikatlaikhigienesanitasiTempatPengolahanMakanan (TPM) antara lain jasaboga, rumahmakan/restoran dan depot air minum (DAM)	100%	20,000,000	PenerbitanSertifikatLaikHigieneSanitasiTempatPengelolaanMakanan (TPM) antara lain Jasa Boga, RumahMakan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Kab. Takalar	PersentasepelaksanaanpenerbitansertifikatlaikhigienesanitasiTempatPengolahanMakanan (TPM) antara lain jasaboga, rumahmakan/restoran dan depot air minum (DAM)	100%	20,000,000	

1	Pengendalian dan PengawasansertaTindakLanjutPengawasanPenerbitanSertifikatLaikHigieneSanitasiTempatPengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, RumahMakan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahDokumen Hasil Pengendalian dan PengawasansertaTindakLanjutPengawasanPenerbitanSertifikatLaikHigieneSanitasiTempatPengelolaanMakanan (TPM) antara lain Jasa Boga, RumahMakan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		20,000,000	Pengendalian dan PengawasansertaTindakLanjutPengawasanPenerbitanSertifikatLaikHigieneSanitasiTempatPengelolaanMakanan (TPM) antara lain Jasa Boga, RumahMakan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahDokumen Hasil Pengendalian dan PengawasansertaTindakLanjutPengawasanPenerbitanSertifikatLaikHigieneSanitasiTempatPengelolaanMakanan (TPM) antara lain Jasa Boga, RumahMakan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		20,000,000	
IV.5	PenerbitanStiker Pembinaan pada MakananJajanan dan Sentra MakananJajanan	Kab. Takalar	Persentasepenerbitanstikerpembinaan pada makananjajanan dan sentramakananjajanan	100%	-	PenerbitanStikerPembinaan pada MakananJajanan dan Sentra MakananJajanan	Kab. Takalar	Persentasepenerbitanstikerpembinaan pada makananjajanan dan sentramakananjajanan	100%	-	

1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan			
IV.6	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Kab. Takalar	Persentase pelaksanaan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman RT	100%	50,000,000	Pemeriksaan dan TindakL anjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri RumahTangga	Kab. Takalar	Persentase pelaksanaan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman RT	100%	50,000,000	
1	Pemeriksaan Post Market pada ProdukMakanan-MinumanIndustri RumahTangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahProduk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan			Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri RumahTangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	JumlahProduk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan			

2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri RumahTangga	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Data PerizinanIndustriRumahTangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan		50,000,000	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri RumahTangga	Dinas Kesehatan Kab. Takalar	Jumlah Data Perizinan Industri RumahTangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan		50,000,000	
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kab. Takalar	Jumlahsambunganruma h yang terlayanimelaluiKegiatanPadatKarya/SPAM Berbasis Masyarakat	100%	2,350,000,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kab. Takalar	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	100%	2,350,000,000	
V.1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah	100%	500,000,000	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	PersentasePeningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah	100%	500,000,000	
1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan, dan Pemberdayaan Masyarakat	Kab. Takalar	Jumlah Do kumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 dokumen	500,000,000	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan, dan Pemberdayaan Masyarakat	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi , Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 dokumen	500,000,000	

V.2	Pelaksanaan Sehat dalam rangkaPromotifpreventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Persentase Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100%	1,250,000,000	Pelaksanaan Sehat dalamrangka Promotif preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	Persentase Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100%	1,250,000,000	
1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 dokumen	750,000,000	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Promosi Kesehatan dan Gerakan HidupBersih dan Sehat	1 dokumen	750,000,000	
2	Penumbuhan KesadaranKeluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan PerilakuH idup Bersih dan Sehat	Kab. Takalar	JumlahKeluarga yang mengikutiPenumbuhan KesadaranKeluargadalamPeningkatanDerajat Kesehatan Keluarga dan LingkungandenganMenerapkanPerilakuHidupBersih dan Sehat		500,000,000	PenumbuhanKesadaranKeluargadalamPeningkatanDerajat Kesehatan Keluarga dan LingkungandenganMenerapkanPerilakuHidupBersih dan Sehat	Kab. Takalar	JumlahKeluarga yang mengikutiPenumbuhanKesadaranKeluargadalamPeningkatanDerajat Kesehatan Keluarga dan LingkungandenganMenerapkanPerilakuHidupBersih dan Sehat		500,000,000	
V.3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	PersentasePengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	100%	600,000,000	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	PersentasePengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	100%	600,000,000	

1	Bimbingan Teknis dan SupervisiPengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 dokumen	600,000,000	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Takalar	Jumlah Dokumen ' Hasil Bimbing an Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 dokumen	600,000,000	
JUMLAH					169,650,800,000					169,650,800,000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan system perencanaan bawah atas (*bottom up planning*) berdasarkan asas demokrasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, assosiasi-assosiasi maupun perguruan tinggi berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Kabupaten dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan keseuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2024.

Tabel berikut ini merupakan tabel yang berisi usulan program dan kegiatan yang merupakan hasil musrenbang dari berbagai tingkatan dan dari pokok pikiran. Usulan-usulan tersebut merupakan hasil musrenbang dari tingkat desa/kelurahan, selanjutnya diusulkan dan direkap pada musrenbang tingkat kecamatan dan dilanjutkan di musrenbang tingkat kabupaten dan usulan kegiatan pemangku kepentingan /pemangku amanah masyarakat. Setelah diterima dan disetujui oleh OPD tujuan (Dinas Kesehatan), maka usulan akan ditetapkan sesuai prosedur di Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar, selanjutnya usulan tersebut akan menjadi skala prioritas dalam penentuan kegiatan dan pagu indikatif kegiatan tahun anggaran 2024. Berikut disajikanTabel Hasil Rekapan Musrenbang dan Pokok Pikiran :

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Dinas Kesehatan Kesehatan Kabupaten Takalar

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan fasilitas pelayanan Kesehatan lainnya	Dusun Soreang Kec. Galut, Dusun Cakura, Bontokadatto, Rajayya Kec. Polsel, Desa Parangmata Kec. Galesong, Desa Lassang Kec. Polut, Desa Balang Datu Kec. Tanakeke	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah DilakukanRehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Pustu)	8 Unit	Disetujui
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	PenyediaanLayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PengelolaanPelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Desa Bontolanra Kec. Galut, Su'rulangi Kec. Polsel	JumlahDokumen Hasil PengelolaanPelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (PMT Balita)	175 orang	Disesuaikan
3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	PenyediaanFasilitasPelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	PengadaanPrasarana dan PendukungFasilitas Pelayanan Kesehatan	Desa Sampulungan dan Desa Bontolanra Kec. Galut, Desa Paddinging Kec. Sanrobone	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Ambulance)	3 Unit	Tidak disepakati, hal ini disebabkan karena usulannya adalah pengadaan Ambulance Desa dimana Ambulance sudah tersedia di setiap Puskesmas dan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
							adanya PSC kecamatan yang menyediakan layanan selama 24 jam.
4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	PenyediaanFasilitasPelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dusun Suli, Pa'lalakang, Tuma'biring, MinasaTe'ne, Parambambe, Paku, Ma'minasa, Batetanaya, Masino Kec. Galesong, Dusun Bontolanra dan Dusun Kunjung Mae Kec. Galut, Patte'ne, Lantang 2 Kec. Polsel, Bontosunggu, Massalongko dan Pa'bulaengan, Maccini Baji dan BalangTanayyaKec. Polut(Posyandu), DesaMinasa Baji dan Maccini Baji Kec. Tanakeke (Pustu)	JumlahFasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Posyandu dan Pustu)	20 Unit	Tidak disepakati, usulannya adalah pembangunan Posyandu dimana Posyandu merupakan UKBM yang pembangunannya merupakan pembiayaan bersumber dari dana desa, sedangkan untuk pembangunan Pustu lokasi pembangunannya tidak memiliki alas hak (sertifikat)

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
5	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	PenyediaanFasilitasPelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang MedikFasilitasPelayanan Kesehatan	DesaLantangKec. Polsel, DesaLassangKec. Polut, dusunpa'batanngandusunbontobaddodus.soreangca'didus.cambacambaKec. Mapsu	Jumlah Alat Kesehatan/Alat PenunjangMedik FasilitasPelayanan Kesehatan yang Disediakan (Posbindu Kit)	6 Paket	Disetujui
6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	PenyediaanFasilitasPelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaanfasilitaspelayanankesehatanlainnya	Dusun La'nyaraKec. Polsel, BalangTanayya, SauleyaKec. Polut, Dusun CambaloeKec. Tanakeke	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah DilakukanRehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Poskesdes)	4 Unit	Tidak disepakati 1.Dinas Kesehatan dalam pengusulan penyediaan alkes disesuaikandengan menu yang ada di aplikasi karena anggaran yang sangat terbatas 2.Rehabilitasi Poskesdes merupakan sarana pelayanan kesehatan berbasis masyarakat yang pembiayaannya berasal dari dana desa.

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
7	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	PenyediaanLayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	PengelolaanPelayanan Kesehatan Lingkungan	Su'rulangiKec. Polsel, Panrannuangku, BalangTanayya, TimbusengKec. Polut (SPAL), TonasaKec. Sanrobone (JAGA)	JumlahDokumen Hasil PengelolaanPelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	Tidak disepakati: usulannya berupa pembangunan SPAL yang Merupakan wewenang OPD Lain.
8	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	PenyediaanLayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan PenyakitMenular dan TidakMenular	DesaBontokaddopepeKec. Galut (Fogging)	JumlahDokumen Hasil Pelayanan Kesehatan PenyakitMenular dan TidakMenular	1 Dokumen (350 rumah)	Disetujui

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berpedoman pada Tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar Tahun 2023 – 2026 maka tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

3.1.1 Tujuan

1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
2. Meningkatkan Tata Kelola pada Dinas Kesehatan

3.1.2 Sasaran

1. Meningkatnya Sarana, Prasarana dan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)
2. Meningkatnya Pelayanan kesehatan yang berbasis SPM dan Non SPM
3. Meningkatnya unit tatanan yang menerapkan PHBS
4. Meningkatnya Tata Kelola Dinas Kesehatan.

Berikut adalah penjabaran rumusan pernyataan tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026.

Sebagaimana Tema Pembangunan Kabupaten Takalar Tahun 2023 adalah "Optimalisasi Pengembangan Sumber Daya Alam untuk Pemulihan Ekonomi Menuju Takalar yang Unggul, Sejahtera, dan Bermartabat" dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Takalar Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan mutu tenaga kesehatan dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan
2. Peningkatan mutu tenaga kesehatan dan sarana dan prasarana kesehatan serta keberpihakan kepada masyarakat kurang mampu
3. Pengembangan kompetensi teknis dan kewirausahaan tenaga kerja, pencari kerja, dan wirausahawan
4. Optimalisasi pengembangan sektor unggulan pertanian, tanaman pangan, peternakan, dan perikanan serta perdagangan dan jasa berbasis jaringan dengan Sistem Pertanian Terpadu
5. Penajaman target penerima manfaat dalam gerakan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan secara terpadu
6. Pengembangan sector pariwisata guna menunjang iklim investasi yang sehat dan berkualitas
7. Pengintegrasian perencanaan pembangunan infrastruktur kabupaten ke tingkat desa berkelanjutan

8. Peningkatan kualitas kehidupan keagamaan dan kualitas ketertiban, ketentraman dan perlindungan masyarakat
9. Penegakan kedisiplinan dan meningkatkan kinerja aparatur serta penatakelolaan pemerintahan daerah dan desa.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar serta tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026, maka rumusan dan sasaran Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar Tahun 2024, adalah :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tahun 2024
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan penyelenggaraan Manajemen yang Good Governance	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	95
		Opini Badan Pemeriksa Keuangan	95
		Opini Badan Pemeriksa Keuangan	95
		Opini Badan Pemeriksa Keuangan	95
		Komptensi Tenaga Kesehatan	90
		Opini Badan Pemeriksa Keuangan	95
		Opini Badan Pemeriksa Keuangan	95
		Cakupan Ketersediaan Informasi Kesehatan	100
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat	Persentase ketersediaan obat dan Perbekalan Kesehatan	95
		Cakupan Kalibrasi alat kesehatan	100
		Cakupan pengawasan Apotik dan Toko Obat	100
		Prosentase tatanan yang diberikan penyuluhan NAPZA	100
		Cakupan IRT di bina dan diawasi	100
		Angka usia harapan hidup	71
		Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100
		Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tahun 2024
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100
		Cakupan kesehatan pasien miskin	100
		Rasio dokter per satuan penduduk	59
		Rasio tenaga medis per satuan penduduk	326
		Cakupan rawat jalan	100
		Ketersediaan Sarana dan Prasarana Public Safety Centre (PSC)	100
		Puskesmas Terakreditasi	100
		Prosentase Pelayanan Kesehatan yang sudah memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur) Puskesmas	100
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100
		Cakupan kesehatan pasien miskin	100
		Rasio dokter per satuan penduduk	59
		Rasio tenaga medis per satuan penduduk	326
		Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100
		Cakupan Lansia yang mendapatkan pelayanan	100
		Cakupan Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan santun lanjut usia	100
		Cakupan Puskesmas melaksanakan home care lanjut usia	100
		Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	12:00
		Cakupan puskesmas	100
		Cakupan pembantu puskesmas	100
		Jumlah Puskesmas rawat inap dengan PONED	17
		Persentase kecukupan alat kesehatan di Puskesmas	100
		Persentase kecukupan alat kesehatan di Puskesmas Pembantu	100

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tahun 2024
		Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	1:00
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien masyarakat Miskin	100
		Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	100
		Persentase Pos UKK di bina	100
		Persentase Pos UKK Memenuhi Syarat	50
		Persentase Jumlah Kader Pos UKK dibina	100
		Persentase Peserta sakit terlayani	100
		Persentase Kecelakaan Kerja	0
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan / membentuk kelompok kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat	100
		Persentase Jemaah Haji yang diperiksa kebugaran jasmani	100
		Cakupan Pembinaan dan Pemeriksaan Kesehatan Haji	100
		Prosentase Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan tradisional	100
		Prosentase Puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan yang telah dilatih upaya kesehatan tradisional	100
		Persentase Desa yang memiliki Taman Toga	75
		Persentase Kelompok yang memanfaatkan Tanaman Obat Keluarga	100
		Persentase Penyehat Tradisional yang dibina	100
		Persentase Pembuat Ramuan Tradisonal yang dibina	100
		Persentase Penyehat Tradisional yang memilki keterampilan	50
		Persentase Pelayanan Kesehatan Gigi	100

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tahun 2024
		Anak Sekolah	
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan Perkesmas	100
	Optimalisasi pelayanan kesehatan Ibu, Bayi, Balita, Anak dan Remaja	Persentase balita gizi buruk	?5
		Prevalensi balita gizi kurang	?5
		Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100
		Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)	10
		Rumah Tangga Mengonsumsi Garam Beriodium	90
		Pelayanan kesehatan Ibu Hamil	100
		Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	100
		Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100
		Pelayanan kesehatan balita	100
		Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	2,80
		Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	0,00
		Angka kelangsungan hidup bayi	98
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	3,50
		Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	0,00
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	89
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	96
		Cakupan kunjungan bayi	95
		Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	100
		Cakupan pelayanan nifas	100
		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	100
		Cakupan pelayanan anak balita	100

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tahun 2024
		Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	79
		Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	100
		Jumlah Remaja Putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	30
	Meningkatnya Upaya pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100
		Cakupan WUS Mendapat Imunisasi	80
		Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	88
		Cakupan Imunisasi DPTHbHib	90
		Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi Measles dan Rubella	95
		Cakupan Imunisasi Lanjutan (MR)	65,54
		Cakupan Imunisasi Lanjutan (DPTHbHib)	56,65
		BIAS	95
		Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	⍰ 2
		Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam	100
		Cakupan balita pneumonia yang ditangani	100
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita Thypoid	100
		Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	100
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	100
		Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	293
		Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	<5%
		Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	100
		Proporsi kasus Tuberkulosis yang	90

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tahun 2024
		diobati dan sembuh dalam program DOTS	
		Angka Penemuan Kasus Baru Kusta (CDR = Case Detection Rate) per 100.000	<5
		Angka Kesembuhan Kusta (RFT = Release From Treatment)	90
		Angka Cacat Kusta tingkat 2 (Grade 2 Disability Rate)	<5
		RFT Rate PB Kusta	90
		Angka Prevalensi Kusta per 100.000	<1
		Proporsi Kusta Cacat Tingkat 2	5%
		Proporsi kasus kusta anak (0-14 tahun)	<5
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan deteksi Dini Hepatitis B pada kelompok risiko	100
		Persentase Pemeriksaan HBsAg Positif pada Ibu Hamil	15
		Persentase Penanganan HBsAg Positif pada Ibu Hami	100
		Jumlah Penderita Kecacingan ditangani	100
		Penderita diare yang ditangani	100
		Prevalensi kasus HIV pada penduduk usia 15 - 49 tahun	<0.5
		Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	<1
		Persentase Rumah Sakit Pemrintah yang melaksanakan pelayanan rujukan bagi ODHA	100
		Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (Human Immunodeficiency Virus)	100
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100
		Incidance Rate DBD per 100.000 penduduk	<49
		Angka kejadian Malaria	0,001

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tahun 2024
		Tingkat kematian akibat malaria	0
		Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	15%
		Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	100
		Kasus Gigitan Rabies yang ditangani	100
		Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100
		Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	100
		Cakupan Pemeriksaan IVA usia 30 – 50 Tahun	5
		Cakupan Pemeriksaan Obesitas	50
	Peningkatan kualitas lingkungan	Persentase Institusi yang dibina dengan syarat kesling	60
		Persentase Institusi memenuhi syarat Kesehatan Lingkungan	100
		Cakupan Kelompok Pemakai Air	60
		Persentase Tempat Pengolahan Makanan yang diperiksa	100
		Persentase Tempat Pengolahan Makanan yang memenuhi syarat	50
		Persentase Sanitasi Tempat Pengelolaan Pestisida yang diperiksa	100
		Persentase Sanitasi Tempat Pengelolaan Pestisida yang memenuhi syarat	50
		Persentase TS/Limbah diperiksa	100
		Persentase TS/Limbah memenuhi syarat	50
		Persentase SAB diperiksa	100
		Persentase SAB memenuhi syarat	50
		Persentase Desa STBM	100
		Persentase Desa Stop BABS	100
		Pengelolaan limbah medis sesuai standard	100
	Pemberdayaan	Cakupan Desa Siaga Aktif	90

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tahun 2024
	Masyarakat	Rasio posyandu per satuan balita	46,44
		Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	100
		Proporsi Jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	70
		Cakupan Rumah Tangga ber-PHBS	85
		Pengembangan media promosi dan publikasi program	100
		Cakupan Posyandu Aktif (Purnama dan Mandiri)	60
		Cakupan sekolah yang melaksanakan promosi kesehatan/UKS	100
		Persentase desa yang memanfaatkan Dana Desa min.10% untuk UKBM	90

3.2 Review Program dan Kegiatan

Pada tahun 2024, sasaran yang menjadi fokus dan strategi yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar adalah Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dalam Mendukung Kualitas Hidup Yang Layak dengan Strategi :

1. Mengoptimalkan kewenangan untuk pengembangan pelayanan kesehatan.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
3. Meningkatkan dan memasyarakatkan perilaku hidup bersih dan sehat.
4. Mengoptimalkan fungsi sarana dan prasarana kesehatan yang ada dan penerapan standar operasional prosedur untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
5. Memanfaatkan kemajuan teknologi telekomunikasi dan sistem informasi kesehatan untuk mendeteksi penularan penyakit akibat mobilisasi penduduk yang tinggi.

6. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan air bersih di masyarakat
7. Mengoptimalkan upaya kesehatan dan pembinaan serta pengkoordinasian kegiatan pelayanan kesehatan

Sedangkan Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar adalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan sesuai dengan standar yang berlaku
2. Pemenuhan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan/tenaga kesehatan
3. Peningkatan kualitas upaya kesehatan, baik upaya kesehatan perorangan (UKP) maupun upaya kesehatan masyarakat (UKM)
4. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan.
5. Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan dalam masyarakat.

Dalam menyusun Program dan kegiatan, dinas kesehatan kab. Takalar mempertimbangkan beberapa hal seperti : Pencapaian SDGS, Pencapaian SPM kab/kota bidang kesehatan serta pencapaian NSPK bidang kesehatan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran dinas kesehatan kab takalar, pada rencana kerja tahu 2024 terdapat :

Dinas Kesehatan terdiri dari 5 Program, 26 Kegiatan dan 160 Sub Kegiatan pendukung dengan total kebutuhan PAGU sebesar **Rp. 208,564,574,682**,-. Program dan kegiatan ini tersebar ke berbagai wilayah kerja puskesmas yang ada di Kabupaten Takalar serta menyasar beberap kelompok Masyarakat, mulai dari Balita, anak usia sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, wanita usia subur dan hingga kelompok lansia.

Adapun sumber dana yang mendukung program dan kegiatan tersebut, yaitu :

a. Dana Alokasi Umum (DAU Murni)
b. Dana Alokasi Umum Spesifik Grant (DAU SG)
c. Dana Alokasi Khusus (Fisik dan Non Fisik)
d. Dana Bagi Hasil (Cukai Rokok)
e. JKN Kapitasi dan JKN Non Kapitasi
f. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rumusan perubahan rencana program dan kegiatan tahun 2024 beserta pendanaan yang diharapkan dapat terlaksananya tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL III.2

RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) TAHUN 2024

KABUPATEN : TAKALAR

PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		TARGET 2024			PAGU			KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA PERUBAHAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		DINAS KESEHATAN							160,013,551,563	138,602,951,333	138,165,099,745	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						160,013,551,563	138,602,951,333	138,165,099,745	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						160,013,551,563	138,602,951,333	138,165,099,745	
I	36893	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	-	51,705,904,309	69,763,318,867	69,325,467,279	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-		180,883,600	180,883,600		

	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						12,500,000	26,355,700	26,355,700	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	12,500,000	26,355,700	26,355,700	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						15,000,000	41,235,900	41,235,900	
				Jumlah DokumenRKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah DokumenRKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	2.00Dokumen	2.00Dokumen	2.00Dokumen	15,000,000	41,235,900	41,235,900	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						22,500,000	-	-	
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	22,500,000	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						12,500,000	15,036,500	15,036,500	

				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	12,500,000	15,036,500	15,036,500	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						22,500,000	23,399,800	23,399,800	
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	22,500,000	23,399,800	23,399,800	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						5,500,000	6,961,100	6,961,100	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	5,500,000	6,961,100	6,961,100	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						350,000,000	67,894,600	67,894,600	

				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	3.00Laporan	3.00Laporan	3.00Laporan	350,000,000	67,894,600	67,894,600	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**48,129,193,940**	**57,801,388,167**	**57,363,536,579**	**437,851,588**
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						47,990,193,940	57,706,388,167	57,268,536,579	437,851,588
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	670 Orang/ bulan	670 Orang/ bulan	670 Orang/ bulan	47,990,193,940	57,706,388,167	57,268,536,579	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						24,000,000	81,190,700	81,190,700	
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	24,000,000	81,190,700	81,190,700	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						25,000,000	-	-	
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	25,000,000	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						50,000,000	8,319,600	8,319,600	
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	8,319,600	8,319,600	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						15,000,000	-	-	
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						12,500,000	5,489,700	5,489,700	
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan a n/Semesteran SKPD*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	12,500,000	5,489,700	5,489,700	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						12,500,000	-	-	

				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	12,500,000	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**174,000,000**	**99,999,800**	**99,999,800**	
	1.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						44,000,000	-	-	
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	44,000,000	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						10,000,000	-	-	
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						25,000,000	-	-	

				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	25,000,000	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD						25,000,000	-	-	
				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	25,000,000	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						25,000,000	99,999,800	99,999,800	
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	25,000,000	99,999,800	99,999,800	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						25,000,000	-	-	
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	25,000,000	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						20,000,000	-	-	

				Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.01.2.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**67,500,000**	**5,000,000**	**5,000,000**	
	1.02.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah						22,500,000	-	-	
				Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	*Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	22,500,000	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.01.2.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah						-	-	-	
				Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah*	0.00 Dokumen	0.00 Dokumen	0.00 Dokumen	-	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.01.2.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Pengolahan Data Retribusi Daerah						22,500,000	-	-	
				Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	22,500,000	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						22,500,000	5,000,000	5,000,000	

				Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	*Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	22,500,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**187,008,029**	**201,999,800**	**201,999,800**	
	1.02.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai						-	-	-	
				Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	*Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai*	75 Unit	75 Unit	75 Unit	-	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						12,000,000	-	-	
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	1 Paket	1 Paket	1 Paket	12,000,000	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						50,400,000	201,999,800	201,999,800	
				Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50,400,000	201,999,800	201,999,800	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						-	-	-	

				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian*	0.00 Dokumen	0.00 Dokumen	0.00 Dokumen	-	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						49,608,029	-	-	
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	49,608,029	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						50,000,000	-	-	
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	1 Orang	1 Orang	1 Orang	50,000,000	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						-	-	-	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	0.00 Orang	0.00 Orang	0.00 Orang	-	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						25,000,000	-	-	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	5 Orang	5 Orang	5 Orang	25,000,000	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**525,000,000**	**515,833,900**	**515,833,900**	
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						50,000,000	-	-	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	1 Paket	50,000,000	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						50,000,000	49,999,900	49,999,900	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	1 Paket	50,000,000	49,999,900	49,999,900	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						50,000,000	115,841,400	115,841,400	
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	1 Paket	50,000,000	115,841,400	115,841,400	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						25,000,000	49,992,800	49,992,800	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	1 Paket	25,000,000	49,992,800	49,992,800	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						25,000,000	-	-	

				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	1 Paket	25,000,000	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						25,000,000	25,000,000	25,000,000	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material						25,000,000	-	-	
				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	1 Paket	25,000,000	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu						25,000,000	24,999,900	24,999,900	
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	25,000,000	24,999,900	24,999,900	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						250,000,000	249,999,900	249,999,900	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	250,000,000	249,999,900	249,999,900	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						-	-	-	

				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*	0.00 Dokumen	0.00 Dokumen	0.00 Dokumen	-	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						-	-	-	
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	0.00 Dokumen	0.00 Dokumen	0.00 Dokumen	-	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9,856,000,000**	**9,856,000,000**	
	1.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						-	-	-	
				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan*	0.00 Unit	0.00 Unit	0.00 Unit	-	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						-	3,471,000,000	3,471,000,000	

				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	0.00 Unit	0.00 Unit	0.00 Unit	-	3,471,000,000	3,471,000,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel						-	-	-	
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	0.00 Unit	0.00 Unit	0.00 Unit	-	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						-	6,205,000,000	6,205,000,000	
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	0.00 Unit	0.00 Unit	0.00 Unit	-	6,205,000,000	6,205,000,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Pengadaan Aset Tetap Lainnya						-	-	-	
				Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	*Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan*	0.00 Unit	0.00 Unit	0.00 Unit	-	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Pengadaan Aset Tak Berwujud						-	-	-	
				Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	*Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan*	0.00 Unit	0.00 Unit	0.00 Unit	-	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						-	-	-	

				Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	0.00 Unit	0.00 Unit	0.00 Unit	-	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						-	180,000,000	180,000,000	
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	0.00 Unit	0.00 Unit	0.00 Unit	-	180,000,000	180,000,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						-	-	-	
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**791,543,660**	**750,573,600**	**750,573,600**	

	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						7,500,000	7,500,000	7,500,000	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	7,500,000	7,500,000	7,500,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						734,043,660	654,223,800	654,223,800	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	734,043,660	654,223,800	654,223,800	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						25,000,000	88,849,800	88,849,800	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	25,000,000	88,849,800	88,849,800	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						25,000,000	-	-	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	25,000,000	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**		**-**	**1,391,158,680**	**351,640,000**	**351,640,000**	
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya						125,000,000	-	-	

		atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	20 Unit	20 Unit	20 Unit	125,000,000	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						100,000,000	101,240,000	101,240,000	
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	50 Unit	50 Unit	50 Unit	100,000,000	101,240,000	101,240,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor						50,000,000	-	-	
				Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	*Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya*	1 Unit	1 Unit	1 Unit	50,000,000	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel						-	-	-	
				Jumlah Mebel yang Dipelihara	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*	0.00 Unit	0.00 Unit	0.00 Unit	-	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						-	-	-	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	15 Unit	15 Unit	6 Unit	-	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						-	-	-	
				Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	*Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara*	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud						-	-	-	
				Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	*Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara*	2 Unit	2 Unit	2 Unit	-	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						116,158,680	200,000,000	200,000,000	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	5 Unit	5 Unit	5 Unit	116,158,680	200,000,000	200,000,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						500,000,000	-	-	

				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	5 Unit	5 Unit	5 Unit	500,000,000	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						500,000,000	50,400,000	50,400,000	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	15 Unit	15 Unit	15 Unit	500,000,000	50,400,000	50,400,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.01.2.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah						-	-	-	
				Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	*Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi*	0.00 Ha	0.00 Ha	0.00 Ha	-	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

II	**37258**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**105,022,647,254**	**66,948,076,066**	**66,948,076,066**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	7,375,000,000	20,179,110,301	20,179,110,301	
	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya						-	-	-	
				Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	*Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000*	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	Pembangunan Puskesmas						-	-	-	
				Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	*Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun*	4 Unit	4 Unit	4 Unit	-	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya						-	2,364,632,580	2,364,632,580	

				Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	*Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun*	0.00 Unit	0.00 Unit	1 Unit	-	2,364,632,580	2,364,632,580	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan						-	1,090,000,000	1,090,000,000	
				Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	*Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun*	0.00 Unit	0.00 Unit	2 Unit	-	1,090,000,000	1,090,000,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Pengembangan Puskesmas						-	-	-	
				Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	*Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar*	0.00 Unit	0.00 Unit	0.00 Unit	-	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya						500,000,000	-	-	
				Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	*Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar*	1 Unit	1 Unit	1 Unit	500,000,000	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit						-	-	-	
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit*	0.00 Unit	0.00 Unit	0.00 Unit	-	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas						500,000,000	5,215,112,100	5,215,112,100	
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas*	1 Unit	1 Unit	4 Unit	500,000,000	5,215,112,100	5,215,112,100	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya						250,000,000	114,067,560	114,067,560	
				Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya*	2 Unit	2 Unit	2 Unit	250,000,000	114,067,560	114,067,560	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan						500,000,000			

				Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan*	2 Unit	2 Unit	2 Unit	500,000,000	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						-	3,677,627,560	3,677,627,560	
				Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan*	1 Unit	1 Unit	48 Unit	-	3,677,627,560	3,677,627,560	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi						100,000,000	-	-	
				Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	*Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center*	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100,000,000	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						150,000,000	106,305,100	106,305,100	

				Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar*	1 Unit	1 Unit	1 Unit	150,000,000	106,305,100	106,305,100	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Pengembangan Rumah Sakit						-	-	-	
				Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	*Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit*	0.00 Unit	0.00 Unit	0.00 Unit	-	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						5,250,000,000	7,457,131,201	7,457,131,201	

				Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	*Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan*	1 Paket	1 Paket	1 Paket	5,250,000,000	7,457,131,201	7,457,131,201	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga						100,000,000	-	-	
				Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	*Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas*	3825 Keluarga	3825 Keluarga	3825 Keluarga	100,000,000	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.01.0025	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)						-	-	-	

				Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan	*Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan*	0.00 Layanan	0.00 Layanan	0.00 Layanan	-	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan						25,000,000	154,234,200	154,234,200	
				Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	*Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan*	20 Paket	20 Paket	20 Paket	25,000,000	154,234,200	154,234,200	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**		**-**	**97,272,647,254**	**46,378,578,865**	**46,378,578,865**	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						1,259,854,240	191,213,700	191,213,700	

				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	6254 Orang	6254 Orang	6254 Orang	1,259,854,240	191,213,700	191,213,700	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						1,009,854,240	133,400,000	133,400,000	
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	6029 Orang	6029 Orang	6029 Orang	1,009,854,240	133,400,000	133,400,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						859,854,239	518,947,342	518,947,342	
				Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	5682 Orang	5682 Orang	5682 Orang	859,854,239	518,947,342	518,947,342	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						809,854,239	164,904,800	164,904,800	

				Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	31675 Orang	31675 Orang	31675 Orang	809,854,239	164,904,800	164,904,800	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						809,854,239	50,000,000	50,000,000	
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	47175 Orang	47175 Orang	47175 Orang	809,854,239	50,000,000	50,000,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						809,854,239	31,889,700	31,889,700	
				Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	189231 Orang	189231 Orang	189231 Orang	809,854,239	31,889,700	31,889,700	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada						689,363,367	97,810,000	97,810,000	

			Usia Lanjut									
				Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	23758 Orang	23758 Orang	23758 Orang	689,363,367	97,810,000	97,810,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						709,854,239	31,099,700	31,099,700	
				Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	63443Orang	63443Orang	63443Orang	709,854,239	31,099,700	31,099,700	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						709,854,239	553,146,600	553,146,600	
				Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	5067 Orang	5067 Orang	5067 Orang	709,854,239	553,146,600	553,146,600	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						659,854,239	125,000,000	125,000,000	

				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	692 Orang	692 Orang	692 Orang	659,854,239	125,000,000	125,000,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						559,854,239	810,840,000	810,840,000	
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	5211 Orang	5211 Orang	5211 Orang	559,854,239	810,840,000	810,840,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						1,009,854,239	-	-	
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	0 Orang	0 Orang	0 Orang	1,009,854,239	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						75,000,000	75,000,000	75,000,000	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	75,000,000	75,000,000	75,000,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana						75,000,000	75,000,000	75,000,000	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	75,000,000	75,000,000	75,000,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						1,500,000,000	1,060,090,000	1,060,090,000	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,500,000,000	1,060,090,000	1,060,090,000	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						150,000,000	50,000,000	50,000,000	

				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	2 Dokumen		2 Dokumen	150,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						550,000,000	1,366,569,770	1,366,569,770	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	550,000,000	1,366,569,770	1,366,569,770	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						200,000,000	242,124,800	242,124,800	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	242,124,800	242,124,800	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional,						300,000,000	-	-	

			Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya									
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	300,000,000	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						325,000,000	13,925,000	13,925,000	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	325,000,000	13,925,000	13,925,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)						200,000,000	-	-	
				Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	692 Orang	692 Orang	692 Orang	200,000,000	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA						200,000,000	68,200,000	68,200,000	

				Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	*Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	50 Orang	50 Orang	50 Orang	200,000,000	68,200,000	68,200,000	-
	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan						250,000,000	-	-	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	250,000,000	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						250,000,000	660,146,900	660,146,900	
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	250,000,000	660,146,900	660,146,900	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						61,988,723,284	31,272,931,200	31,272,931,200	

				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	61,988,723,284	31,272,931,200	31,272,931,200	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah						200,000,000	-	-	
				Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	*Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah*	50 Orang	50 Orang	50 Orang	200,000,000	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional						200,000,000	21,600,000	21,600,000	
				Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	*Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan*	1 Paket	1 Paket	1 Paket	200,000,000	21,600,000	21,600,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat						250,000,000	78,089,800	78,089,800	

				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	250,000,000	78,089,800	78,089,800	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan						-	-	-	
				Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	*Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas*	0.00 Unit	0.00 Unit	0.00 Unit	-	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Operasional Pelayanan Rumah Sakit						964,999,998	7,343,187,163	7,343,187,163	
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit*	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	964,999,998	7,343,187,163	7,343,187,163	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas						17,165,172,000	123,015,000	123,015,000	

				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	17 Dokumen	17 Dokumen	1 Dokumen	17,165,172,000	123,015,000	123,015,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						1,000,000,000	217,500,000	217,500,000	
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya*	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1,000,000,000	217,500,000	217,500,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota						750,000,000	311,791,000	311,791,000	
				Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	*Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota*	15 Unit	15 Unit	15 Unit	750,000,000	311,791,000	311,791,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						150,000,000	15,099,300	15,099,300	
				Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	150,000,000	15,099,300	15,099,300	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah						150,000,000	150,000,000	150,000,000	
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	150,000,000	150,000,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)						100,000,000	350,000,000	350,000,000	
				Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	*Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)*	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100,000,000	350,000,000	350,000,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						150,000,000	-	-	
				Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	100 Orang	100 Orang	100 Orang	150,000,000	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						150,000,000	139,119,800	139,119,800	

				Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	200 Orang	200 Orang	200 Orang	150,000,000	139,119,800	139,119,800	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						55,991,974	36,937,290	36,937,290	
				Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria*	1 Orang	1 Orang	1 Orang	55,991,974	36,937,290	36,937,290	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok						25,000,000	-	-	
				Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	*Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok*	1 Tatanan	1 Tatanan	1 Tatanan	25,000,000	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**-**	**-**	**-**		**-**	**150,000,000**	**207,960,300**	**207,960,300**	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						150,000,000			
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan*	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	207,960,300	207,960,300	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**225,000,000**	**182,426,600**	**182,426,600**	

	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya						25,000,000	24,999,900	24,999,900	
				Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	*Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya*	1 Unit	1 Unit	1 Unit	25,000,000	24,999,900	24,999,900	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						100,000,000	100,000,000	100,000,000	
				Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	*Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar*	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan						-	36,146,900	36,146,900	
				Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	*Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan*	0.00 Unit	0.00 Unit	1 Unit	-	36,146,900	36,146,900	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan						100,000,000	21,279,800	21,279,800	

			Kesehatan Rujukan									
				Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	*Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	21,279,800	21,279,800	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
III	**37623**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**425,000,000**	**1,723,687,300**	**1,723,687,300**	
	1.02.03.2.01	**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**175,000,000**	**25,000,000**	**25,000,000**	
	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan						125,000,000	12,500,000	12,500,000	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	125,000,000	12,500,000	12,500,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan						50,000,000	12,500,000	12,500,000	
				Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	12,500,000	12,500,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	250,000,000	487,463,100	487,463,100	
	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan						150,000,000	47,845,900	47,845,900	
				Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	47,845,900	47,845,900	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						50,000,000	9,309,100	9,309,100	
				Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)*	850 Orang	850 Orang	850 Orang	50,000,000	9,309,100	9,309,100	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan						50,000,000	430,308,100	430,308,100	

				Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan*	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	50,000,000	430,308,100	430,308,100	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	1,211,224,200	1,211,224,200	
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						-	1,211,224,200	1,211,224,200	
				Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya*	0.00 Orang	0.00 Orang	0.00 Orang	-	1,211,224,200	1,211,224,200	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
4	**37988**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,650,000,000**	**85,000,000**	**85,000,000**	

	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	-	-	-	-	1,500,000,000	50,000,000	50,000,000	
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						350,000,000	15,000,000	15,000,000	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)*	3 Dokumen		3 Dokumen	350,000,000	15,000,000	15,000,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	-	-	-		-	300,000,000	-	-	
	1.02.04.2.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu						300,000,000	-	-	

			Perusahaan Rumah Tangga									
				Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	*Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga*	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	300,000,000	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-	-	-	-	-	250,000,000	10,000,000	10,000,000	
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga						250,000,000	10,000,000	10,000,000	

				Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	250,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-	-	-	-	-	150,000,000	20,000,000	20,000,000	
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)						150,000,000	20,000,000	20,000,000	

				Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	-	-	-	-	-	150,000,000	5,000,000	5,000,000	
	1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan						150,000,000	5,000,000	5,000,000	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-	-	-	-	-	300,000,000	-	-	
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan						300,000,000	-	-	
				Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	*Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan*	2 Unit	2 Unit	2 Unit	300,000,000	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
5	**38354**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**210,000,000**	**82,869,100**	**82,869,100**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	150,000,000	14,999,900	14,999,900	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						150,000,000	14,999,900	14,999,900	

				Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	150,000,000	14,999,900	14,999,900	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.05.2.01.0002	Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik daerah dalam pengamanan kualitas air minum dan sanitasi aman	Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik daerah dalam pengamanan kualitas air minum dan sanitasi aman						-	-	-	
				Jumlah rumah tangga/masyarakat komunal Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik dalam kualitas air minum dan sanitasi aman	*Jumlah rumah tangga/masyarakat komunal Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik dalam kualitas air minum dan sanitasi aman*	0.00 Unit	0.00 Unit	0.00 Unit	-	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	35,000,000	-	-	
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat						22,500,000	-	-	
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	22,500,000	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	1.02.05.2.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat						12,500,000	-	-	
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat*	150 Keluarga	150 Keluarga	150 Keluarga	12,500,000	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	25,000,000	67,869,200	67,869,200	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						25,000,000	67,869,200	67,869,200	

				Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	67,869,200	67,869,200	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
JUMLAH									**160,013,551,563**	**138,602,951,333**	**138,165,099,745**	

TABEL III.3
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							RENJA 2024	APBD 2024	RENJA PERUBAHAN 2024	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA PERUBAHAN 2024			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KESEHATAN								**160,013,551,563**	**138,602,951,333**	**138,165,099,745**							**211,681,212,417**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								**160,013,551,563**	**138,602,951,333**	**138,165,099,745**							**211,681,212,417**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**160,013,551,563**	**138,602,951,333**	**138,165,099,745**							**211,681,212,417**	
I	**36893**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**-**				**-**	**-**	**-**	**51,705,904,309**	**69,763,318,867**	**69,325,467,279**							**97,319,239,607**	
	1.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**-**				**-**	**-**	**-**	**440,500,000**	**180,883,600**	**180,883,600**			**-**	**-**	**-**		**22,918,000,000**	**DINAS KESEHATAN**
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								12,500,000	26,355,700	26,355,700								

			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	12,500,000	26,355,700	26,355,700	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			12,500,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								15,000,000	41,235,900	41,235,900								
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	15,000,000	41,235,900	41,235,900	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			15,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								22,500,000	-	-								
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	22,500,000	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			22,500,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								12,500,000	15,036,500	15,036,500								

			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	12,500,000	15,036,500	15,036,500	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			12,500,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								22,500,000	23,399,800	23,399,800								
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen PerubahanDPA-SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	22,500,000	23,399,800	23,399,800	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	--			22,500,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								5,500,000	6,961,100	6,961,100								
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja				3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	5,500,000	6,961,100	6,961,100	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5,500,000	DINAS KESEHATAN

			dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								350,000,000	67,894,600	67,894,600							
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.00 Laporan	3.00 Laporan	3.00 Laporan	350,000,000	67,894,600	67,894,600	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			350,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**-**				**-**	**-**	**-**	**48,129,193,940**	**57,801,388,167**	**57,363,536,579**	**437,851,588**		**-**	- -	**-**		**49,289,304,012**	**DINAS KESEHATAN**
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								47,990,193,940	57,706,388,167	57,268,536,579	437,851,588							
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				670 Orang/ bulan	670 Orang/ bulan	670 Orang/ bulan	47,990,193,940	57,706,388,167	57,268,536,579	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL PEND	-	- -			49,150,304,012	DINAS KESEHATAN

													APATAN BAGI HASIL PAJAK							
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								24,000,000	81,190,700	81,190,700								
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	24,000,000	81,190,700	81,190,700	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	- -			24,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD								25,000,000	-	-								
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	25,000,000	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	- -			25,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								50,000,000	8,319,600	8,319,600								
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	8,319,600	8,319,600	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	- -			50,000,000	DINAS KESEHATAN

			Tahun SKPD																
	1.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan								15,000,000	-	-								
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	- -			15,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								12,500,000	5,489,700	5,489,700								
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	12,500,000	5,489,700	5,489,700	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	--			12,500,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								12,500,000	-	-								

			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	12,500,000	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	- -			12,500,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**-**				**-**	**-**	**-**	**174,000,000**	**99,999,800**	**99,999,800**			**-**	- -	**-**		**174,000,000**	**DINAS KESEHATAN**
	1.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD								44,000,000	-	-								
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	44,000,000	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			44,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD								10,000,000	-	-								
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD								25,000,000	-	-								

			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	25,000,000	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	- -			25,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD								25,000,000	-	-								
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	25,000,000	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	- -			25,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD								25,000,000	99,999,800	99,999,800								
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	25,000,000	99,999,800	99,999,800	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	- -			25,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								25,000,000	-	-								

			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	25,000,000	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	- -			25,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD								20,000,000	-	-								
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	- -			20,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**-**				**-**	**-**	**-**	**67,500,000**	**5,000,000**	**5,000,000**			**-**	**- -**	**-**		**77,500,000**	**DINAS KESEHATAN**
	1.02.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah								22,500,000	-	-								
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	22,500,000	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	- -			22,500,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah								-	-	-								
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				0.00 Dokumen	0.00 Dokumen	0.00 Dokumen	-	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	- -			10,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah								22,500,000	-	-								

			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	22,500,000	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	- -			22,500,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah								22,500,000	5,000,000	5,000,000								
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	22,500,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	- -			22,500,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**-**				**-**	**-**	**-**	**187,008,029**	**201,999,800**	**201,999,800**			**-**	**- -**	**-**		**477,008,029**	**DINAS KESEHATAN**
	1.02.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai								-	-	-								
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				75 Unit	75 Unit	75 Unit	-	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	- -			150,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								12,000,000	-	-								
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	1 Paket	12,000,000	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	- -			12,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								50,400,000	201,999,800	201,999,800								

			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50,400,000	201,999,800	201,999,800	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	- -			50,400,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian								-	-	-								
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				0.00 Dokumen	0.00 Dokumen	0.00 Dokumen	-	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	- -			100,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai								49,608,029	-	-								
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	49,608,029	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	- -			49,608,029	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								50,000,000	-	-								
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	1 Orang	1 Orang	50,000,000	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	- -			50,000,000	DINAS KESEHATAN

	1.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								-	-	-								
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0.00 Orang	0.00 Orang	0.00 Orang	-	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	- -			20,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								25,000,000	-	-								
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	5 Orang	5 Orang	25,000,000	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	- -			45,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**-**				**-**	**-**	**-**	**525,000,000**	**515,833,900**	**515,833,900**			**-**	**-** -	**-**		**575,000,000**	**DINAS KESEHATAN**
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								50,000,000	-	-								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1 Paket	50,000,000	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	- -			50,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								50,000,000	49,999,900	49,999,900								

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1 Paket	50,000,000	49,999,900	49,999,900	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	- -			50,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								50,000,000	115,841,400	115,841,400								
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1 Paket	50,000,000	115,841,400	115,841,400	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								25,000,000	49,992,800	49,992,800								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1 Paket	25,000,000	49,992,800	49,992,800	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	- -			25,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								25,000,000	-	-								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1 Paket	25,000,000	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	- -			25,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								25,000,000	25,000,000	25,000,000								
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perunda				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	- -			25,000,000	DINAS KESEHATAN

			ng-Undangan yang Disediakan																
	1.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material								25,000,000	-	-							
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1 Paket	25,000,000	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	- -			25,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								25,000,000	24,999,900	24,999,900							
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	25,000,000	24,999,900	24,999,900	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	- -			25,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								250,000,000	249,999,900	249,999,900							
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	250,000,000	249,999,900	249,999,900	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	- -			250,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								-	-	-							
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0.00 Dokumen	0.00 Dokumen	0.00 Dokumen	-	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	- -			15,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								-	-	-							

			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0.00Dokumen	0.00Dokumen	0.00Dokumen	-	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	--			35,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**				**-**	**-**	**-**	**-**	**9,856,000,000**	**9,856,000,000**			**-**	**--**	**-**		**21,405,725,226**	**DINAS KESEHATAN**
	1.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								-	-	-								
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0.00 Unit	0.00 Unit	0.00 Unit	-	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	--			2,500,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								-	3,471,000,000	3,471,000,000								
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0.00 Unit	0.00 Unit	0.00 Unit	-	3,471,000,000	3,471,000,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	--			150,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								-	-	-								

			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0.00 Unit	0.00 Unit	0.00 Unit	-	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	- -			20,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								-	6,205,000,000	6,205,000,000								
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0.00 Unit	0.00 Unit	0.00 Unit	-	6,205,000,000	6,205,000,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	- -			50,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya								-	-	-								
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				0.00 Unit	0.00 Unit	0.00 Unit	-	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	- -			100,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud								-	-	-								
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				0.00 Unit	0.00 Unit	0.00 Unit	-	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	- -			50,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								-	-	-								
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0.00 Unit	0.00 Unit	0.00 Unit	-	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	- -			14,000,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								-	180,000,000	180,000,000								

			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0.00 Unit	0.00 Unit	0.00 Unit	-	180,000,000	180,000,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	- -			100,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								-	-	-								
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	--			4,435,725,226	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**				**-**	**-**	**-**	**791,543,660**	**750,573,600**	**750,573,600**			**-**	- -	**-**		**791,543,660**	**DINAS KESEHATAN**
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								7,500,000	7,500,000	7,500,000								

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	7,500,000	7,500,000	7,500,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	- -			7,500,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								734,043,660	654,223,800	654,223,800								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	734,043,660	654,223,800	654,223,800	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			734,043,660	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								25,000,000	88,849,800	88,849,800								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	25,000,000	88,849,800	88,849,800	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	- -			25,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								25,000,000	-	-								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	25,000,000	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	- -			25,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**				**-**		**-**	**1,391,158,680**	**351,640,000**	**351,640,000**			**-**	**- -**	**-**		**1,611,158,680**	**DINAS KESEHATAN**

	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								125,000,000	-	-								
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				20 Unit	20 Unit	20 Unit	125,000,000	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	- -			125,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								100,000,000	101,240,000	101,240,000								
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				50 Unit	50 Unit	50 Unit	100,000,000	101,240,000	101,240,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	- -			100,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor								50,000,000	-	-								
			Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihar				1 Unit	1 Unit	1 Unit	50,000,000	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50,000,000	DINAS KESEHATAN

			a dan Dibayarkan Perizinannya																
	1.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel								-	-	-							
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				0.00 Unit	0.00 Unit	0.00 Unit	-	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								-	-	-							
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	6 Unit	-	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	- -			30,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya								-	-	-							
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud								-	-	-							
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	2 Unit	-	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								116,158,680	200,000,000	200,000,000							

			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	5 Unit	116,158,680	200,000,000	200,000,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	- -			116,158,680	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								500,000,000	-	-								
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	5 Unit	500,000,000	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	- -			500,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								500,000,000	50,400,000	50,400,000								

			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	15 Unit	15 Unit	500,000,000	50,400,000	50,400,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	- -			500,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0012	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Tanah								-	-	-								
			Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi				0.00 Ha	0.00 Ha	0.00 Ha	-	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100,000,000	DINAS KESEHATAN
II	**37258**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**-**	**105,022,647,254**	**66,948,076,066**	**66,948,076,066**							**111,979,472,810**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	-	7,375,000,000	20,179,110,301	20,179,110,301			-	- -	-		15,921,679,795	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya								-	-	-								

			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			-	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas								-	-	-								
			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				4 Unit	4 Unit	4 Unit	-	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	- -			4,979,595,420	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya								-	2,364,632,580	2,364,632,580								
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				0.00 Unit	0.00 Unit	1 Unit	-	2,364,632,580	2,364,632,580	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	1. Pembangunan Manusia1. Pembangunan Manusia			-	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan								-	1,090,000,000	1,090,000,000								

			Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				0.00 Unit	0.00 Unit	2 Unit	-	1,090,000,000	1,090,000,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	- -			-	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas								-	-	-								
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				0.00 Unit	0.00 Unit	0.00 Unit	-	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			-	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya								500,000,000	-	-								
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	1 Unit	1 Unit	500,000,000	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			500,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit								-	-	-								
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilit				0.00 Unit	0.00 Unit	0.00 Unit	-	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			-	DINAS KESEHATAN

			asi dan Pemelih araan Oleh Rumah Sakit																
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas								500,000,000	5,215,112,100	5,215,112,100								
			Jumlah Sarana, Prasaran a dan Alat Kesehat an yang Telah Dilakuka n Rehabilit asi dan Pemelih araan Oleh Puskesm as				1 Unit	1 Unit	4 Unit	500,000,000	5,215,112,100	5,215,112,100	Kab. Takalar, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRAN SFER UMUM -DANA BAGI HASIL DANA TRAN SFER UMUM -DANA ALOK ASI UMUM DANA TRAN SFER KHUS US-DANA ALOK ASI KHUS US FISIK	-	- -			500,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya								250,000,000	114,067,560	114,067,560								
			Jumlah Sarana , Prasaran a dan Alat Kesehat an yang Telah Dilakuka n Rehabilit asi dan Pemelih araan oleh Fasilitas Kesehat an Lainnya				2 Unit	2 Unit	2 Unit	250,000,000	114,067,560	114,067,560	Kab. Takalar, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRAN SFER UMUM -DANA ALOK ASI UMUM	-	- -			250,000,000	DINAS KESEHATAN

	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan								500,000,000									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan				2 Unit	2 Unit	2 Unit	500,000,000	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			500,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan								-	3,677,627,560	3,677,627,560							
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	48 Unit	-	3,677,627,560	3,677,627,560	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	--			3,567,084,375	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi								100,000,000	-	-							
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional				1 Unit	1 Unit	1 Unit	100,000,000	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI	-	- -			100,000,000	DINAS KESEHATAN

			/Regional Maintainance Center										KHUSUS FISIK						
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan							150,000,000	106,305,100	106,305,100								
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				1 Unit	1 Unit	1 Unit	150,000,000	106,305,100	106,305,100	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			150,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit							-	-	-								
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio				0.00 Unit	0.00 Unit	0.00 Unit	-	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			-	DINAS KESEHATAN

			tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit																	
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan							5,250,000,000	7,457,131,201	7,457,131,201									
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	1 Paket	1 Paket	5,250,000,000	7,457,131,201	7,457,131,201	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			5,250,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga							100,000,000	-	-									

			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				3825 Keluarga	3825 Keluarga	3825 Keluarga	100,000,000	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			100,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0025	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)								-	-	-								
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan				0.00 Layanan	0.00 Layanan	0.00 Layanan	-	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	- -			-	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke								25,000,000	154,234,200	154,234,200								

		Fasilitas Kesehatan																	
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				20 Paket	20 Paket	20 Paket	25,000,000	154,234,200	154,234,200	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	--			25,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**-**				**-**		**-**	**97,272,647,254**	**46,378,578,865**	**46,378,578,865**			**-**	**-**	**-**		**94,932,793,015**	**DINAS KESEHATAN**
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								1,259,854,240	191,213,700	191,213,700								
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6254 Orang	6254 Orang	6254 Orang	1,259,854,240	191,213,700	191,213,700	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			1,259,854,240	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								1,009,854,240	133,400,000	133,400,000								

			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6029 Orang	6029 Orang	6029 Orang	1,009,854,240	133,400,000	133,400,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			1,009,854,240	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir								859,854,239	518,947,342	518,947,342								
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5682 Orang	5682 Orang	5682 Orang	859,854,239	518,947,342	518,947,342	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			859,854,239	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita								809,854,239	164,904,800	164,904,800								
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				31675 Orang	31675 Orang	31675 Orang	809,854,239	164,904,800	164,904,800	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			809,854,239	DINAS KESEHATAN

	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								809,854,239	50,000,000	50,000,000								
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				47175 Orang	47175 Orang	47175 Orang	809,854,239	50,000,000	50,000,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			809,854,239	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif								809,854,239	31,889,700	31,889,700								
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				189231Orang	189231Orang	189231Orang	809,854,239	31,889,700	31,889,700	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	--			809,854,239	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								689,363,367	97,810,000	97,810,000								

			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				23758 Orang	23758 Orang	23758 Orang	689,363,367	97,810,000	97,810,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			689,363,367	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi								709,854,239	31,099,700	31,099,700								
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				63443 Orang	63443 Orang	63443 Orang	709,854,239	31,099,700	31,099,700	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			709,854,239	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus								709,854,239	553,146,600	553,146,600								
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5067 Orang	5067 Orang	5067 Orang	709,854,239	553,146,600	553,146,600	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	- -			709,854,239	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								659,854,239	125,000,000	125,000,000								

			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				692 Orang	692 Orang	692 Orang	659,854,239	125,000,000	125,000,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			659,854,239	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								559,854,239	810,840,000	810,840,000								
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				5211 Orang	5211 Orang	5211 Orang	559,854,239	810,840,000	810,840,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			559,854,239	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV								1,009,854,239	-	-								
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	0 Orang	1,009,854,239	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			-	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)								75,000,000	75,000,000	75,000,000								

			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	75,000,000	75,000,000	75,000,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			75,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana								75,000,000	75,000,000	75,000,000								
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	75,000,000	75,000,000	75,000,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	--			75,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								1,500,000,000	1,060,090,000	1,060,090,000								

			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,500,000,000	1,060,090,000	1,060,090,000	Kab. Takalar, Pattallassang, Pattallassang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM RETRIBUSI DAERAH DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			270,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								150,000,000	50,000,000	50,000,000									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2 Dokumen		2 Dokumen	150,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								550,000,000	1,366,569,770	1,366,569,770									

			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	550,000,000	1,366,569,770	1,366,569,770	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM RETRIBUSI DAERAH DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	5. Pelestarian Lingkungan Hidup 5. Pelestarian Lingkungan Hidup			550,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan								200,000,000	242,124,800	242,124,800							
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	242,124,800	242,124,800	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			200,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya								300,000,000	-	-							

			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	300,000,000	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			300,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								325,000,000	13,925,000	13,925,000									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	325,000,000	13,925,000	13,925,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKK B-BOK	-	--			325,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								200,000,000	-	-									
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				692 Orang	692 Orang	692 Orang	200,000,000	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA								200,000,000	68,200,000	68,200,000									

			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				50 Orang	50 Orang	50 Orang	200,000,000	68,200,000	68,200,000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKK B-BOK	-	- -			200,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan								250,000,000	-	-								
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	250,000,000	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			250,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								250,000,000	660,146,900	660,146,900								
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	250,000,000	660,146,900	660,146,900	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKK B-BOK	-	- -			250,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat								61,988,723,284	31,272,931,200	31,272,931,200								

			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	61,988,723,284	31,272,931,200	31,272,931,200	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			61,888,723,284	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah								200,000,000	-	-								
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah				50 Orang	50 Orang	50 Orang	200,000,000	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional								200,000,000	21,600,000	21,600,000								

			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/ Nasional yang Didistribusikan				1 Paket	1 Paket	1 Paket	200,000,000	21,600,000	21,600,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			200,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat								250,000,000	78,089,800	78,089,800								
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	250,000,000	78,089,800	78,089,800	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			250,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan								-	-	-								
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas				0.00 Unit	0.00 Unit	0.00 Unit	-	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			-	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit								964,999,998	7,343,187,163	7,343,187,163								

			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	964,999,998	7,343,187,163	7,343,187,163	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	1. Pembangunan Manusia 1. Pembangunan Manusia			964,999,998	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								17,165,172,000	123,015,000	123,015,000								
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				17 Dokumen	17 Dokumen	1 Dokumen	17,165,172,000	123,015,000	123,015,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			17,165,172,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya								1,000,000,000	217,500,000	217,500,000								
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1,000,000,000	217,500,000	217,500,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			1,000,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota								750,000,000	311,791,000	311,791,000								

			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				15 Unit	15 Unit	15 Unit	750,000,000	311,791,000	311,791,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	- -			750,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)								150,000,000	15,099,300	15,099,300								
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	150,000,000	15,099,300	15,099,300	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			150,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah								150,000,000	150,000,000	150,000,000								
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	150,000,000	150,000,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)								100,000,000	350,000,000	350,000,000								

			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedian, Terkelolan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	1 Unit	1 Unit	100,000,000	350,000,000	350,000,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM RETRIBUSI DAERAH	-	- -			100,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis								150,000,000	-	-									
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 Orang	100 Orang	100 Orang	150,000,000	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			150,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)								150,000,000	139,119,800	139,119,800									
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				200 Orang	200 Orang	200 Orang	150,000,000	139,119,800	139,119,800	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria								55,991,974	36,937,290	36,937,290									

			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				1 Orang	1 Orang	1 Orang	55,991,974	36,937,290	36,937,290	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			55,991,974	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok								25,000,000	-	-								
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				1 Tatanan	1 Tatanan	1 Tatanan	25,000,000	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**-**				**-**		**-**	**150,000,000**	**207,960,300**	**207,960,300**			**-**	- -	**-**		**150,000,000**	**DINAS KESEHATAN**
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan								150,000,000										
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	207,960,300	207,960,300	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM RETRIBUSI DAERAH	-	- -			150,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**-**				**-**	**-**	**-**	**225,000,000**	**182,426,600**	**182,426,600**			**-**	- -	**-**		**975,000,000**	**DINAS KESEHATAN**
	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas								25,000,000	24,999,900	24,999,900								

		Pelayanan Kesehatan Lainnya																	
			Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				1 Unit	1 Unit	1 Unit	25,000,000	24,999,900	24,999,900	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	- -			25,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								100,000,000	100,000,000	100,000,000								
			Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				2 Unit	2 Unit	2 Unit	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan								-	36,146,900	36,146,900								

			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Penguku ran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayan an kesehata n				0.00 Unit	0.00 Unit	1 Unit	-	36,146,900	36,146,900	Kab. Takalar, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRAN SFER UMUM -DANA ALOK ASI UMUM	-	- -			750,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04. 0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan								100,000,000	21,279,800	21,279,800								
			Jumlah Dokume n Hasil Penyiap an Perumus an dan Pelaksan aan Pelayan an Kesehat an Rujukan				1 Dokume n	1 Dokume n	1 Dokume n	100,000,000	21,279,800	21,279,800	Kab. Takalar, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRAN SFER UMUM -DANA ALOK ASI UMUM	-	- -			100,000,000	DINAS KESEHATAN
III	**37623**	**PROGRAM PENINGKATA N KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**-**	**425,000,000**	**1,723,687,300**	**1,723,687,300**							**775,000,000**	
	1.02.03.2.01	**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Ko ta**	**-**				**-**	**-**	**-**	**175,000,000**	**25,000,000**	**25,000,000**			**-**	**- -**	**-**		**175,000,000**	**DINAS KESEHATAN**
	1.02.03.2.01. 0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan								125,000,000	12,500,000	12,500,000								
			Jumlah Dokume n Hasil Pengend alian Perizina n Praktik Tenaga Kesehat an				1 Dokume n	1 Dokume n	1 Dokume n	125,000,000	12,500,000	12,500,000	Kab. Takalar, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRAN SFER UMUM -DANA ALOK ASI UMUM	-	--			125,000,000	DINAS KESEHATAN

	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan								50,000,000	12,500,000	12,500,000									
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	12,500,000	12,500,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-				-	-	-	250,000,000	487,463,100	487,463,100			-	- -	-		250,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan								150,000,000	47,845,900	47,845,900									
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	47,845,900	47,845,900	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar								50,000,000	9,309,100	9,309,100									

			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				850 Orang	850 Orang	850 Orang	50,000,000	9,309,100	9,309,100	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan								50,000,000	430,308,100	430,308,100								
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	50,000,000	430,308,100	430,308,100	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			50,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	-	-	1,211,224,200	1,211,224,200			-	- -	-		350,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah								-	1,211,224,200	1,211,224,200								

		Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				0.00 Orang	0.00 Orang	0.00 Orang	-	1,211,224,200	1,211,224,200	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			350,000,000	DINAS KESEHATAN
4	**37988**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**-**				**-**	**-**	**-**	**2,650,000,000**	**85,000,000**	**85,000,000**							**1,350,000,000**	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-				-	-	-	1,500,000,000	50,000,000	50,000,000			-	- -	-		350,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)								350,000,000	15,000,000	15,000,000								

			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				3 Dokumen		3 Dokumen	350,000,000	15,000,000	15,000,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			350,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	-				-		-	300,000,000	-	-			-	--	-		300,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga								300,000,000	-	-								

			Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	300,000,000	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			300,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-				-	-	-	250,000,000	10,000,000	10,000,000			-	- -	-		250,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga								250,000,000	10,000,000	10,000,000								

			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	250,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			250,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-				-	-	-	150,000,000	20,000,000	20,000,000			-	- -	-		150,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot								150,000,000	20,000,000	20,000,000								

		Air Minum (DAM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	-				-	-	-	150,000,000	5,000,000	5,000,000			-	- -	-		150,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan								150,000,000	5,000,000	5,000,000								

			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-				-	-	-	300,000,000	-	-			-	- -	-		150,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan								300,000,000	-	-								
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				2 Unit	2 Unit	2 Unit	300,000,000	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	--			150,000,000	DINAS KESEHATAN

5	**38354**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**-**	**210,000,000**	**82,869,100**	**82,869,100**							**257,500,000**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	-	150,000,000	14,999,900	14,999,900			-	- -	-		200,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat								150,000,000	14,999,900	14,999,900								
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	150,000,000	14,999,900	14,999,900	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0002	Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik daerah dalam pengamanan kualitas air minum dan sanitasi aman								-	-	-								
			Jumlah rumah tangga/ masyarakat komunal Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik dalam kualitas air minum dan				0.00 Unit	0.00 Unit	0.00 Unit	-	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50,000,000	DINAS KESEHATAN

			sanitasi aman																
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	-	35,000,000	-	-			-	-	-		35,000,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat								22,500,000	-	-								
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	22,500,000	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			22,500,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat								12,500,000	-	-								

			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat				150 Keluarga	150 Keluarga	150 Keluarga	12,500,000	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			12,500,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	-	25,000,000	67,869,200	67,869,200			-	- -	-		22,500,000	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								25,000,000	67,869,200	67,869,200								

			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	67,869,200	67,869,200	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM RETRIBUSI DAERAH DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	--			22,500,000	DINAS KESEHATAN
JUMLAH										**160,013,551,563**	**138,602,951,333**	**138,165,099,745**	**437,851,588**							

BAB IV
PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Apabila dalam pelaksanaan Penyusunan Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2024 terdapat ketidak sesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2024, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada Perubahan Renja dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar Tahun 2024 selanjutnya menjadi Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar Tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPD dalam mendukung Tujuan dan Sasaran Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan, ditetapkankaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk :
   a. Melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2024.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Untuk mencapai target sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar yang telah ditetapkan pada tahun 2024 maka perlu didukung dengan program dan kegiatan . Supaya Program dan Kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun maka perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Lintas Program dan Liantas Sektor terkait dalam rangka sinergitas.

Takalar, Juli 2024
Kepala Dinas Kesehatan,

dr. Hj. Nilal Fauziah, M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 197608212003122009

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja OPD) Tahun 2024 merupakan acuan perencanaan kegiatan OPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPD. Adapun penyusunan Perubahan Renja OPD merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Perubahan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 tidak terlepas dari Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar 2023-2026. Terdapat beberapa kegiatan prioritas yang dilaksanakan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar antaranya adalah percepatan pencapaian target indikator RPD Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026, serta peningkatan perencanaan pembangunan dalam mencapai peningkatan daya saing daerah.

Perubahan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 ini diharapkan dapat benar-benar dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024.

Takalar, 1 Agustus 2024

KEPALA BKAD KAB.TAKALAR

Drs.RAHMANSYAH LANTARA, M.SI
Pembina Utama Muda, (IV/c)
NIP. 19701106 199003 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **I**

DAFTAR ISI ..... **II**

DAFTAR TABEL ..... **III**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2 LANDASAN HUKUM 2

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 4

1.4 PENULISAN 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2024 ..... **1**

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2024. 1

2.1.1 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah 2024 yang terakomodir di APBD Tahun 2024 1

2.1.2 Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja APBD Triwulan II Tahun 2024 1

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 5

2.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) 32

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) 38

2.2.3 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM). 41

2.2.4 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) 41

2.3 HAMBATAN, UPAYA PENCAPAIAN, DAN REKOMENDASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2024 45

2.3.1 Hambatan Dalam Pelaksanaan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 sampai dengan Triwulan ke II 45

2.3.2 Upaya Dalam Pencapaian Pelaksanaan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 sampai dengan Triwulan ke II 46

2.3.3 Rekomendasi Pelaksanaan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 Triwulan selanjutnya 46

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH III-47

3.1 TUJUAN DAN SASARAN III-1

3.2 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2024. ..... I49

BAB IV PENUTUP **93**

DAFTAR TABEL

Tabel II-I Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang ada dalam Renja BKAD Tahun 2024..... 1
Tabel II-2 Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Hingga Triwulan II 2
Tabel II-3Rekapitulasi Capaian Kinerja Pendanaan berdasarkan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Badab Pengelolaan Keuangan Daerah Triwulan II Tahun 2024 4
Tabel II-4 Rekapitulasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan5
Tabel II-5 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Pencapaian Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024.....II-6
Tabel II-6 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Takalar Triwulan II Tahun 2024.....II-33
Tabel II-7 Capaian IKK Badan Keuangan dan Aset Daerah Triwulan II Tahun 2024.....II-39
Tabel II-8 Capaian SDGs Badan Keuangan dan Aset Daerah Triwulan II Tahun 2024..... II-43
Tabel III-I Tujuan dan Sasaran RKPD Kabupaten Takalar 2024 .....III-2
Tabel III-2 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah.....III-2
Tabel III-3Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar.....III-26

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap OPD dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja OPD (Perubahan Renja OPD) sebagai acuan perencanaan kegiatan OPD untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Perubahan Renja OPD ini mengacu pada Rancangan Awal RKPD, renstra OPD, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta berdasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 360 ayat (1) dan ayat (3) mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada:

a. Rancangan Perubahan RKPD; dan
b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 perlu dilakukan penyesuaian target indikator kinerja Tahun 2024 melalui perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024. Sesuai amanah Permendagri 86 Tahun 2017 dalam Pasal 361 ayat (1), Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360 ayat (3), terdiri atas:

a. Perumusan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
b. Penyajian rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun ke pertama (kesatu) pelaksanaan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026. Dokumen ini

disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun 2024. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar tahun 2024 dalam penyusunannya selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah, Rencana Kerja Pemerintah, serta Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan memperhatikan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 selanjutnya menjadi landasan penyusunan Perubahan RKA Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2024. Dalam menyempurnakan Perubahan Rencana Kerja tersebut, maka Badan Pengelolaan Keuangan Daerah berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Takalar Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Renja Pemerintah Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2024, kondisi Triwulan I dan II ini dilandasi dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendali dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5899 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Takalar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 27);
16. Peraturan Bupati Takalar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Takalar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 4);
18. Peraturan Bupati Takalar Nomor Tahun 2024 tentang Perubahan RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 Nomor).

1.3 Maksud dan Tujuan

- **Maksud**

  Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) adalah sebagai berikut:

  a. Untuk menjabarkan program dan kegiatan Renstra OPD ke dalam program/kegiatan tahunan
  b. Menyiapkan acuan bagi Rancangan Perubahan APBD
  c. Menyiapkan kerangka evaluasi perubahan kinerja program/ kegiatan tahunan bagi OPD.

- **Tujuan**

Adapun Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) adalah agar terbangun konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan OPD

1.4 Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pendahuluan, Berisi latar belakang penyusunan, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan perubahan dokumen Renja (Rencana Kerja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar.

BAB II: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2024

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam IKU, IKK, SPM dan SDGs, hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dampak dan upaya dalam pencapaian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai triwulan II.

BAB III: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini berisikan penjelasan mengenai tujuan dan sasaran, review terhadap rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024, serta rencana program dan kegiatan perubahan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024

BAB IV: PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai Triwulan II Tahun 2024.

2.1.1 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah 2024 yang terakomodir di APBD Tahun 2024

Informasi tentang Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD 2024 yang terakomodir di APBD Tahun 2024 memberikan gambaran seberapa banyak jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar pada Tahun 2024. Adapun jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan dimaksud dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel II-1
Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang ada dalam Renja BKAD Tahun 2024

APBD 2024							
No. Urut	**Perangkat Daerah**	**Jmlh Prog.**	**Jmlh Keg**	**Jmlh Sub Keg.**	**indikator**		
					Jmlh Prog.	**Jmlh Keg**	**Jmlh Sub Keg.**
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***
1	BKAD	3	13	87	3	13	87

Sumber : Laporan Realisasi Bappelitbangda Tahun 2024 Triwulan II

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah program sebanyak 3, jumlah kegiatan 13, dan jumlah sub kegiatan 87, sedangkan jumlah indikator program sebanyak 3, jumlah indikator kegiatan sebanyak 13, dan jumlah indikator sub kegiatan sebanyak 87.

2.1.2 Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja APBD Triwulan II Tahun 2024

Informasi tentang realisasi anggaran kegiatan memberikan gambaran seberapa besar anggaran yang telah terserap pada Triwulan II untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam APBD 2024. Gambaran sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-2
Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Pada
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024
hingga Triwulan II

No. Urut	Program	Pagu APBD	Realisasi s/d Triwulan II	Persentase	
				Fisik	Keu.
1	2	3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	24.993.344.835	6.269.413.877	37,70	25,14
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	177.009.746.609	91.169.564.145	31,43	51,51
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.217.365.800	599.476.302	12,50	49,24
	Jumlah	**203.160.456.644**	**98.038.454.324**	**27,21**	**48,26**

Sumber : Laporan Realisasi Renja Trw. II BKAD Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa total jumlah anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 sebesar Rp203.160.456.644,00. Realisasi serapan anggaran dari pelaksanaan kegiatan hingga triwulan II adalah sebesar Rp98.038.454.324,00 atau 48,26 persen dengan capaian realisasi fisik sebesar 27,21 persen. Kondisi ini menunjukkan capaian fisik masih kurang 22,79 persen dari target 50 persen yang diharapkan pada triwulan II.

Penyerapan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah hingga triwulan II masih dalam kategori **Tinggi** yaitu >43 persen .

2.1.2.1 Evaluasi Capaian Pendanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dalam Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 2024

Informasi tentang capaian pendanaan memberikan gambaran capaian berdasarkan realisasi anggaran pada masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terdapat pada Badan Keuagan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar. Capaian kinerja pendanaan tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori **Rendah** untuk Program, Kegiatan dan Sub

Kegiatan dengan realisasi 0 – 20%, kategori **Sedang** untuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan realisasi >20 – 43%, kategori **Tinggi** untuk Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan dengan realisasi anggaran di atas 43%,.

1. Evaluasi Capaian Pendanaan pada Level Program

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pendanaan pada level program untuk Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan menggunakan kategori tersebut di atas, maka dapat dijelaskan bahwa jumlah program yang dilaksanakan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebanyak 1 program dengan rincian capaian yang masuk pada kategori sedang (realisasinya >20 - 43 persen), sedangkan capaian realisasi 2 program tinggi yaitu di atas 43 persen.

2. Evaluasi Capaian Pendanaan pada Level Kegiatan

Untuk evaluasi pelaksanaan Capaian kinerja pendanaan pada level kegiatan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dapat dijelaskan bahwa terdapat 13 kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2024. Dari keseluruhan kegiatan tersebut terdapat 1 kegiatan atau 7,69 persen yang realisasi pendanaannya hingga triwuan II masih dalam kategori rendah yaitu 0 – 20 persen, sedang yang berada dalam kategori sedang sebanyak 3 kegiatan atau 23,06 persen, dan kategori tinggi dengan capaian realisasi di atas 43 persen sebanyak 9 kegiatan atau 69,23 persen.

3. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level sub Kegiatan

Adapun evaluasi capaian kinerja pendanaan pada masing-masing perangkat daerah pada level sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 87 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2024 terdapat 16 sub kegiatan atau 18,39 persen yang capaian kinerja pendanaanya masih rendah, sedangkan yang masuk dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan sedang terdapat 16 sub kegiatan atau 18,39 persen dan 55 sub kegiatan atau 63,21 persen dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan tinggi sebab telah dapat mencapai realisasi pendanaan lebih dari 43 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan II.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas capaian kinerja pendanaan berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-3
Rekapitulasi Capaian Kinerja Pendanaan berdasarkan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Triwulan II Tahun 2024

Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan		
		0 - 20%	>20 – 43%	> 43%		0 - 20%	>20 – 43%	> 43%		0 - 20%	>20 – 43%	> 43%
		(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(ST)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
BKAD	3	0	1	2	13	1	3	9	87	16	16	55

2.1.2.2 Evaluasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dalam Pelaksanaan Renja 2024

Informasi tentang capaian kinerja memberikan gambaran capaian kinerja realisasi target kinerja pada masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Capaian kinerja tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori **Rendah** untuk program, kegiatan dan sub kegiatan dengan realisasi 0 – 20 persen, Kategori **Sedang** untuk program, kegiatan dan sub kegiatan dengan realisasi kinerja lebih besar dari 20 – 43 persen dan kategori **Tinggi** untuk program, kegiatan dan sub kegiatan dengan realisasi kinerja diatas 43 persen. Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 43 persen didasarkan atas tingkat capaian yang diharapkan untuk triwulan II adalah 43 persen, sehingga jika terdapat program, kegiatan dan sub kegiatan dengan capaian realisasi kinerja lebih dari 66,67 persen dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi.

1. Evaluasi Capaian Kinerja Outcome pada Level Program

Untuk evaluasi pelaksanaan kinerja outcome pada level program dapat digambarkan sebagai berikut: untuk pencapaian target kinerja program pada tiap-tiap perangkat daerah dapat dijelaskan bahwa dari 3 Program yang dilaksanakan sampai dengan triwulan kedua capaian kinerja program yang masih masuk pada kategori rendah atau dibawah 20 persen terdapat 1 program, untuk pencapaian kinerja dengan kategori sedang (di atas 20-43 persen) terdapat 1 program, selebihnya sebanyak 1 program yang capaian kinerja masuk dalam kategori tinggi yang pencapaiannya lebih dari 43 persen pada triwulan II Tahun 2024.

2. Evaluasi Capaian Kinerja Output Pada Level Kegiatan

Sebagai gambaran pencapaian target kinerja kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 13 kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan kedua

terdapat 2 kegiatan (15,38 persen) yang capaian kinerjanya kategori masih rendah atau dibawah 20 persen, sedangkan yang capaian kinerja kategori sedang terdapat 7 kegiatan (53,84 persen), selebihnya terdapat 4 kegiatan (30,77 persen) yang capaian kinerja masuk dalam kategori pencapaian lebih dari 43 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan II Tahun 2024.

3. Evaluasi Capaian Kinerja Output pada Level sub Kegiatan

Sebagai gambaran pencapaian target kinerja sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 87 sub kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan kedua dapat dijelaskan bahwa yang capaian kinerja masih rendah atau di bawah 20 persen terdapat 36 sub kegiatan (41,37 persen), sedangkan yang capaian kinerja sedang sebanyak 11 sub kegiatan (12,64 persen), selebihnya yang capaian kinerja masuk dalam kategori tinggi sebanyak 40 sub kegiatan atau 45,98 persen, yaitu pencapaian lebih dari 43 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan II Tahun 2024.

Adapun gambaran pencapaian target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan dapat digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel II-4
Rekapitulasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Renja BKAD Kabupaten Takalar Triwulan II
Tahun 2024

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Kinerja			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Kinerja			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Kinerja		
			0 - 20 %	>20 – 43%	> 43 %		0 - 20 %	>20 – 43%	> 43 %		0 - 20 %	>20 – 43%	> 43 %
			(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)		(R)	(S)	(T)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	BKAD	3	1	1	1	13	2	7	4	87	36	11	40

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah sampai Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel II-5:

Tabel II-5
Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Pencapaian Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024
Kabupaten Takalar

No	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun **2023-2026** (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu **(2023)**		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun **2024**) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun **2024**)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun **2024**) yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun **2024** (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun **2024**)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun (5)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																I		II		III		IV										
									K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3					4	5	6			7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
		5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																										
		5	**02**				**KEUANGAN**				**867,059,212,952**		**171,048,463,582**		**203,160,456,644**		**3,908,548,666**		**94,129,905,658**		**-**		**-**		**98,038,454,324**	**27.21 %**	**48.26 %**		**269,226,572,006**			
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	5	02	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH**	**Persentase cakupan penunjang urusan**	**100 %**	**Persen**	**130,389,398,578**	**23.76 %**	**15,224,046,658**	**100 %**	**24,933,344,835**	**16.86 %**	**2,480,466,333**	**22.62 %**	**3,788,947,544**	**0.00**	**-**	**0.000 %**	**-**	**37.70 %**	**6,269,413,877**	**37.70 %**	**25.14 %**	**32.89 %**	**21,633,114,635**	**32.89 %**	**16.59 %**	

	dan keuangan BPKAD						**AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**pemerintahan**												**%**														
		5	02	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase cakupan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	100 %	Persen	1,236,000,000	23.81 %	300,382,500	100 %	304,120,000	20.00 %	61,963,600	13.33 %	64,567,100	0.00 %	-	0.00 %	-	33.33 %	126,530,700	33.33 %	41.61 %	31.75 %	426,913,200	31.75 %	34.54 %	
		5	02	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	Dokumen	198,000,000	2	46,921,500	2	46,450,000	1	25,552,600	-	6,874,800	-	-	-	-	1	32,427,400	50 %	70 %	3	79,348,900	33 %	40 %	Kasubag Perencanaan
		5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8	Dokumen	153,000,000	2	35,595,200	2	37,000,000	-	-	-	31,191,000	-	-	-	-	-	31,191,000	0 %	84 %	2	66,786,200	25 %	44 %	Kasubag Perencanaan
		5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6	Dokumen	153,000,000	1	40,691,800	1	37,000,000	-	-	-	9,921,300	-	-	-	-	-	9,921,300	0 %	27 %	1	50,613,100	17 %	33 %	Kasubag Perencanaan
		5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	8	Dokumen	153,000,000	2	38,539,800	2	37,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 %	0%	2	38,539,800	25 %	25 %	Kasubag Perencanaan

		5	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	8	Dokumen	153,000,000	2	37,017,800	2	37,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 %	0%	2	37,017,800	25 %	24 %	Kasubag Perencanaan
		5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8	Laporan	173,000,000	2	42,362,000	2	42,120,000	2	32,420,000	-	-	-	-	-	-	-	2	32,420,000	100 %	77 %	4	74,782,000	50 %	43 %	Kasubag Perencanaan
		5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	Laporan	253,000,000	4	59,254,400	4	67,550,000	-	3,991,000	2	16,580,000	-	-	-	-	2	20,571,000	50 %	30 %	6	79,825,400	38 %	32 %	Kasubag Perencanaan
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																											**28.57 %**	**41.19%**				
Predikat Kinerja Kegiatan																											**SR**	**SR**				
		5	02	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase cakupan administrasi keuangan PD**	100 %	Persen	107,064,700,554	23.76 %	12,764,552,177	100 %	22,059,175,055	22.48 %	1,972,614,554	24.42 %	2,726,251,235	0.00 %	-	0.00 %	-	46.90 %	4,698,865,789	46.90 %	21.30 %	35.50 %	17,463,417,966	35.50 %	16.31 %	
		5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN BPKD yang menerima gaji dan Tunjangan	5600	Orang/Bulan	104,998,646,706	714	12,256,550,217	714	19,873,617,535	204	1,875,638,754	204	2,030,411,610	-	-	-	-	408	3,906,050,364	57 %	20 %	1122	16,162,600,581	20 %	15 %	Kasubag Keuangan

						Jumlah ASN BPKD yang menerima TPP		Orang /Bulan		51		700	1,772,229,120	-	-	250	612,567,025	-	-	-	-	250	612,567,025	36%	35%	301	612,567,025	20%	15%	Kasubag Keuangan
5	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	Dokumen	249,441,000	12	175,370,400	12	59,360,300	2	7,492,600	3	20,785,200	-	-	-	-	5	28,277,800	42%	48%	17	203,648,200	35%	82%	Kasubag Keuangan
5	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	46000	Dokumen	576,284,520	11,496	109,276,800	11,500	109,221,200	2,700	20,553,800	2,700	31,029,100	-	-	-	-	5,400	51,582,900	47%	47%	16896	160,859,700	37%	28%	Kasubag Keuangan
5	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	48	Dokumen	266,688,616	12	51,745,600	12	51,672,200	2	6,435,200	3	12,803,100	-	-	-	-	5	19,238,300	42%	37%	17	70,983,900	35%	27%	Kasubag Keuangan
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir TahunSKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Laporan	270,146,056	1	49,847,400	1	52,536,400	1	51,987,400	-	-	-	-	-	-	1	51,987,400	100%	99%	2	101,834,800	50%	38%	Kasubag Keuangan
5	02	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	24	Dokumen	240,000,000	6	52,280,200	6	50,000,100	1	6,234,000	2	10,055,600	-	-	-	-	3	16,289,600	50%	33%	9	68,569,800	38%	29%	Kasubag Keuangan

		5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	8	Laporan	280,000,000	2	44,336,960	2	55,000,100	1	4,272,800	-	8,599,600	-	-	-	-	1	12,872,400	50 %	23 %	3	57,209,360	38 %	20 %	Kasubag Keuangan
		5	02	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	4	Laporan	183,493,656	1	25,144,600	1	35,538,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 %	0%	1	25,144,600	25 %	14 %	Kasubag Keuangan
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																										**47.02 %**	**37.92%**					
Predikat Kinerja Kegiatan																										**SR**	**SR**					
		5	02	01	2.03		**Administrasi barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**persentase cakupan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	100 %	Persen	1,079,500,000	25.00 %	178,495,900	100 %	225,380,100	27.27 %	64,758,900	9.09%	64,620,850	0.00 %	-	0.00 %	-	36.36 %	129,379,750	36.36 %	57.41 %	34.09 %	447,529,750	34.09 %	41.46 %	
		5	02	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	8	Dokumen	105,500,000	2	22,174,800	2	30,000,000	-	-	1	29,814,200	-	-	-	-	1	29,814,200	50 %	99 %	3	75,264,200	38 %	71 %	Kasubag umum dan kepegawaian
		5	02	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4	Dokumen	158,000,000	1	28,209,150	1	30,081,700	-	7,387,450	-	7,456,500	-	-	-	-	-	14,843,950	0 %	49 %	1	60,293,950	25 %	38 %	Kasubag umum dan kepegawaia

																													n
		5	02	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	4	Laporan	110,000,000	1	19,985,200	1	29,000,000	1	7,212,650	-	7,212,650	-	-	-	-	1	14,425,300	100 %	50 %	2	59,875,300	50 %	54 %	Kasubag umum dan kepegawaian
		5	02	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Laporan	126,000,000	1	20,174,600	1	23,664,000	-	5,889,300	-	5,889,300	-	-	-	-	-	11,778,600	0 %	50 %	1	57,228,600	25 %	45 %	Kasubag umum dan kepegawaian
		5	02	01	2.03	05	Rekonsiliasi Penyusunan laporan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	16	Laporan	312,000,000	4	44,637,950	4	46,640,000	2	21,618,700	-	-	-	-	-	-	2	21,618,700	50 %	46 %	6	67,068,700	38 %	21 %	Kasubag umum dan kepegawaian
		5	02	01	2.03	06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Laporan	134,000,000	1	25,312,200	1	27,500,000	-	13,105,600	-	4,666,400	-	-	-	-	-	17,772,000	0 %	65 %	1	63,222,000	25 %	47 %	Kasubag umum dan kepegawaian
		5	02	01	2.03	07	Pemanfaatan barang milik daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	4	Dokumen	134,000,000	1	18,002,000	1	38,494,400	-	9,545,200	-	9,581,800	-	-	-	-	-	19,127,000	0 %	50 %	1	64,577,000	25 %	48 %	Kasubag umum dan kepegawaian
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																									**28.57**	**58.42%**				

																										%					
Predikat Kinerja Kegiatan																										SR	R				
		5	02	01	2.05		**Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah**	**persentase cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	100 %	Persen	1,124,900,000	25.00 %	214,594,100	100 %	181,258,700	23.08 %	30,962,300	23.08 %	69,624,800	0.00 %	-	0.00 %	-	46.15 %	100,587,100	46.15 %	55.49 %	36.54 %	315,181,200	36.54 %	28.02 %	
		5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	400	Pasang	369,000,000	-	-	50	43,350,000	-	-	50	34,935,000	-	-	-	-	50	34,935,000	100 %	81 %	50	34,935,000	13 %	9 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		5	02	01	2.05	03	Pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	Dokumen	162,000,000	1	61,879,200	1	35,992,800	-	7,279,700	-	9,653,400	-	-	-	-	-	16,933,100	0 %	47 %	1	78,812,300	25 %	49 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		5	02	01	2.05	05	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	48	Dokumen	593,900,000	12	152,714,900	12	101,915,900	3	23,682,600	3	25,036,400	-	-	-	-	6	48,719,000	50 %	48 %	18	201,433,900	38 %	34 %	Kasubag Keuangan
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																										**50.00 %**	**58.48%**				
Predikat Kinerja Kegiatan																										SR	R				
		5	02	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**persentasi cakupan administrasi umum perangkat daerah**	100 %	Persen	9,024,566,400	19.51 %	1,118,649,355	100 %	1,204,752,900	8.54 %	230,035,360	13.41 %	711,332,465	0.00 %	-	0.00 %	-	21.95 %	941,367,825	21.95 %	78.14 %	30.49 %	2,060,017,180	30.49 %	22.83 %	

5	02	01	2.06	01	Penyediaan komponen isntalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24	Paket	84,000,000	-	-	6	15,627,400	-	2,978,600	-	-	-	-	-	-	-	2,978,600	0%	19%	-	2,978,600	0%	4%	Kasubag Umum dan Kepegawaian
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	227,000,000	-	-	3	523,140,100	-	-	3	520,770,000	-	-	-	-	3	520,770,000	100%	100%	3	520,770,000	25%	229%	Kasubag Umum dan Kepegawaian
5	02	01	2.06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	Paket	286,400,000	1	30,655,700	1	16,333,400	-	4,048,400	-	3,993,200	-	-	-	-	-	8,041,600	0%	49%	1	38,697,300	25%	14%	Kasubag Umum dan Kepegawaian
5	02	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8	Paket	3,466,000,000	2	225,240,650	2	30,340,500	-	6,122,100	1	7,500,000	-	-	-	-	1	13,622,100	50%	45%	3	238,862,750	38%	7%	Kasubag umum dan kepegawaian
5	02	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	8	Paket	307,168,000	2	8,611,900	2	12,364,000	-	2,000,000	1	3,000,000	-	-	-	-	1	5,000,000	50%	40%	3	13,611,900	38%	4%	Kasubag Umum dan Kepegawaian
5	02	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8	Paket	596,320,000	2	113,710,000	2	125,000,000	1	5,846,000	-	3,950,000	-	-	-	-	1	9,796,000	50%	8%	3	123,506,000	38%	21%	Kasubag Umum dan Kepegawaian

		5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48	Paket	142,440,000	12	10,800,000	12	21,600,000	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	0 %	5%	12	11,800,000	25 %	8 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	Laporan	3,688,238,400	12	687,238,305	42	421,352,000	3	200,982,560	3	161,744,365	-	-	-	-	6	362,726,925	14 %	86 %	18	1,049,965,230	38 %	28 %	
		5	02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	Dokumen	227,000,000	1	42,392,800	12	38,995,500	3	7,057,700	3	10,374,900	-	-	-	-	6	17,432,600	50 %	45 %	7	59,825,400	17 5 %	26 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																										**31.43 %**	0.39643554 5						
Predikat Kinerja Kegiatan																										**SR**	**SR**						
		5	02	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**persentase cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	100 %	Persen	6,662,528,624	25.00 %	617,554,126	100 %	640,686,080	16.67 %	107,972,106	25.00 %	105,064,862	0.00 %	-	0.00 %	-	41.67 %	213,036,968	41.67 %	33.25 %	35.42 %	830,591,094	35.42 %	12.47 %	
		5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	48	Laporan	2,016,568,624	12	214,129,726	12	289,280,000	3	32,939,606	3	29,464,862	-	-	-	-	6	62,404,468	50 %	22 %	18	276,534,194	38 %	14 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		5	02	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	48	Laporan	4,645,960,000	12	403,424,400	12	351,406,080	1	75,032,500	3	75,600,000	-	-	-	-	4	150,632,500	33 %	43 %	16	554,056,900	33 %	12 %	Kasubag Umum dan Kepeg

																															awaian
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																								**41.67%**	**32.22%**						
Predikat Kinerja Kegiatan																								**SR**	**SR**						
		5	02	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**persentase cakupan pemiharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	100 %	Persen	4,197,203,000	24.26 %	29,818,500	100 %	317,972,000	0.00 %	12,159,513	50.00 %	47,486,232	0.00 %	-	0.00 %	-	37.50 %	59,645,745	37.50 %	18.76 %	26.47 %	89,464,245	26.47 %	2.13 %	
		5	02	01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	112	Unit	720,203,000	28	15,841,000	4	282,792,000	-	5,694,513	2	30,041,232	-	-	-	-	2	35,735,745	50 %	13 %	30	51,576,745	27 %	7 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4	Unit	2,920,000,000	-	-	1	10,450,000	-	4,000,000	1	5,200,000	-	-	-	-	-	9,200,000	0 %	88 %	-	9,200,000	0 %	0 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		5	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20	Unit	557,000,000	5	13,977,500	3	24,730,000	-	2,465,000	1	12,245,000	-	-	-	-	1	14,710,000	33 %	59 %	6	28,687,500	30 %	5 %	Kasubag Umum dan Kepegawaian

Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																														**27.78%**	**53.39%**	
Predikat Kinerja Kegiatan																														**SR**	**R**	
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)																														**36.43%**	**45.89%**	
Predikat Kinerja Program																														**SR**	**SR**	
Faktor pendorong pencapaian kinerja: Ketersediaan dukungan anggaran dan sumber daya aparatur membuat pelaksanaan sub kegiatan bisa terealisasi dan sesuai target dengan waktu yang telah ditetapkan																																
Faktor penghambat: : Terbatasnya anggaran kas per sub kegiatan																																
Faktor penghambat:																																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*): Perlunya peningkatan nilai anggaran kas per sub kegiatan, sehingga pelaksanaannya dapat optimal																																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*): Sumber Dana per Sub Kegiatan harus akurat, sehingga pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan ketersediaan dananya																																
		5	02	02			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase pengunaan anggaran tepat sasaran**	**100 %**	**Persen**	**727,325,605,500**	**25.14 %**	**154,401,502,973**	**100 %**	**177,009,746,009**	**12.22 %**	**1,180,315,373**	**19.22 %**	**89,989,248,772**	**0.00 %**	-	**0.00 %**	-	**31.43 %**	**91,169,564,145**	**31.43 %**	**51.51 %**	**33.05 %**	**245,571,067,118**	**33.05 %**	**33.76 %**	
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemda	5	02	02	2.01		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Persentase cakupan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah**	100 %	Persen	11,100,000,000	25.00 %	1,716,198,350	100 %	1,308,920,960	1.83 %	286,897,370	0.61%	337,615,860	0.00 %	-	0.00 %	-	2.44 %	624,513,230	2.44 %	47.71 %	25.66 %	2,340,711,580	25.66 %	21.09 %	
		5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	8	Dokumen	625,000,000	2	92,590,740	2	96,960,000	-	10,870,000	-	81,175,800	-	-	-	-	-	92,045,800	0 %	95 %	2	184,636,540	25 %	30 %	Kasubid Penyusunan APBD
		5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang	8	Dokumen	625,000,000	2	97,491,400	2	85,000,000	-	-	-	51,837,300	-	-	-	-	-	51,837,300	0 %	61 %	2	149,328,700	25 %	24 %	Kasubid Penyusunan APBD

					PPAS	Disusun																								
5	02	02	2.01	03	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	140	Dokumen	875,000,000	35	240,225,400	38	131,340,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	35	240,225,400	25%	27%	Kasubid Penyusunan APBD
5	02	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	140	Dokumen	875,000,000	35	99,219,400	38	141,580,000	-	7,497,800	-	77,370,400	-	-	-	-	-	84,868,200	0%	60%	35	184,087,600	25%	21%	Kasubid Penyusunan APBD
5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	140	Dokumen	875,000,000	35	138,816,200	38	81,360,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	35	138,816,200	25%	16%	Kasubid Penyusunan APBD
5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	140	Dokumen	875,000,000	35	126,534,300	38	103,237,600	-	-	-	12,590,000	-	-	-	-	-	12,590,000	0%	12%	35	139,124,300	25%	16%	Kasubid Penyusunan APBD
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	8	Dokumen	875,000,000	2	349,997,512	2	102,440,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	2	349,997,512	25%	40%	Kasubid Penyusunan APBD
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	8	Dokumen	875,000,000	2	168,147,400	2	150,000,000	1	63,582,200	-	8,244,000	-	-	-	-	1	71,826,200	50%	48%	3	239,973,600	38%	27%	Kasubid Penyusunan APBD

					APBD																								
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	4	Dokumen	1,500,000,000	1	49,578,300	1	70,040,000	1	67,338,800	-	2,250,000	-	-	-	-	1	69,588,800	100 %	99 %	2	119,167,100	50 %	8 %	Kasubid Penyusunan APBD
5	02	02	2.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	4	Dokumen	500,000,000	1	99,531,400	1	96,640,000	-	-	1	94,065,360	-	-	-	-	1	94,065,360	100 %	97 %	2	193,596,760	50 %	39 %	Kasubid otorisasi DPA-SKPD & Pembiayaan
5	02	02	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	4	Dokumen	500,000,000	1	154,754,252	1	80,323,360	1	80,189,500	-	-	-	-	-	-	1	80,189,500	100 %	100 %	2	234,943,752	50 %	47 %	Kasubid otorisasi DPA-SKPD & Pembiayaan
5	02	02	2.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	4	Dokumen	500,000,000	1	99,312,046	1	70,000,000	-	57,419,070	-	10,083,000	-	-	-	-	-	67,502,070	0 %	96 %	1	166,814,116	25 %	33 %	Kasubid otorisasi DPA-SKPD & Pembiayaan

		5	02	02	2.01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	200	Orang	1,600,000,000	-	-	50	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 %	0%	0	-	0 %	0 %	Kasubid otorisasi DPA-SKPD & Pembiayaan
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																												**29.17 %**	**55.74%**				
Predikat Kinerja Kegiatan																												**SR**	**R**				
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemda	**5**	**02**	**02**	**2.02**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Persentase cakupan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah**	**100 %**	**Persen**	**6,037,476,900**	**25.00 %**	**1,845,300,562**	**100 %**	**1,571,453,200**	**20.34 %**	**438,270,592**	**25.66 %**	**618,086,774**	**0.00 %**	**-**	**0.00 %**	**-**	**46.00 %**	**1,056,357,366**	**46.00 %**	**67.22 %**	**36.50 %**	**2,901,657,928**	**36.50 %**	**48.06 %**	
		5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	48	Dokumen	730,029,300	12	230,248,000	12	199,701,400	2	61,647,500	4	77,531,000	-	-	-	-	6	139,178,500	50 %	70 %	18	369,426,500	38 %	51 %	Subid Perbendaharaan
		5	02	02	2.02	02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	8	Laporan	139,230,000	2	84,973,170	2	52,108,400	-	13,017,500	1	25,793,410	-	-	-	-	1	38,810,910	50 %	74 %	3	123,784,080	38 %	89 %	Subid Perbendaharaan
		5	02	02	2.02	03	Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	3360	Dokumen	788,970,000	840	171,168,300	840	109,676,000	-	18,879,900	279	45,823,800	-	-	-	-	279	64,703,700	33 %	59 %	1119	235,872,000	33 %	30 %	Subid Perbendaharaan
		5	02	02	2.0	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan	20000	Dokumen	371,280,000	5,000	44,576,996	5,000	73,407,6	1,200	18,960,500	1,200	20,365,000	-	-	-	-	2,400	39,325,500	48 %	54 %	7400	83,902,496	37 %	23 %	Subid Perbendaha

					2			Pembiayaan Daerah							00																					raan
		5	0 2	0 2	2 . 0 2	0 5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	104	Dokumen	464,100,000	26	140,423,200	26	155,072,000	6	52,728,900	6	66,829,864	-	-	-	-	12	119,558,764	46 %	77 %	38	259,981,964	37 %	56 %	Subid Perbendaharaan
		5	0 2	0 2	2 . 0 2	0 6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	48	Dokumen	225,552,600	12	25,891,700	12	30,000,000	2	10,245,200	4	10,556,100	-	-	-	-	6	20,801,300	50 %	69 %	18	46,693,000	38 %	21 %	Subid Perbendaharaan

		5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dannPenyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	192	Laporan	788,970,000	48	337,032,900	48	204,470,600	8	60,890,200	12	56,436,800	-	-	-	-	20	117,327,000	42 %	57 %	68	454,359,900	35 %	58 %	Subid Perbendaharaan
		5	02	02	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan	4	Dokumen	185,640,000	1	89,159,500	1	41,640,200	-	6,485,800	-	23,401,500	-	-	-	-	-	29,887,300	0 %	72 %	1	119,046,800	25 %	64 %	Subid Perbendaharaan

							Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas																									
		5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	736	Dokumen	696,150,000	184	239,725,996	184	133,036,000	30	34,675,300	34	51,634,600	-	-	-	-	64	86,309,900	35%	65%	248	326,035,896	34%	47%	Subid. Akuntansi dan Penyusunan lap. Keuangan
		5	02	02	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	4	Dokumen	394,485,000	1	46,294,200	1	32,765,800	-	9,725,000	-	-	-	-	-	-	-	9,725,000	0%	30%	1	56,019,200	25%	14%	Subid. Akuntansi dan Penyusunan lap. Keuangan
		5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kot	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan	280	Orang	1,253,070,000	70	435,806,600	70	539,575,200	12	151,014,792	50	239,714,700	-	-	-	-	62	390,729,492	89%	72%	132	826,536,092	47%	66%	Subid Perbendaharaan

							a	Pemerintah Kabupaten/Kota																									
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																													**40.22%**	**63.57%**			
Predikat Kinerja Kegiatan																													**SR**	**R**			
		5	**02**	**02**	**2.03**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**persentase cakupan koordinasi dan pelaporan keuangan daerah**	**100%**	**Persen**	**4,918,388,000**	**24.90%**	**1,137,982,876**	**100%**	**1,417,827,700**	**15.84%**	**275,196,411**	**21.74%**	**414,873,557**	**0.00%**	**-**	**0.00%**	**-**	**37.58%**	**690,069,968**	**37.58%**	**48.67%**	**34.29%**	**1,828,052,844**	**34.29%**	**37.17%**	
		5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntasi penerimaan dan Pengeluaran Kas daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	96	Laporan	162,435,000	24	96,393,590	24	76,014,800	4	30,394,000	6	30,966,700	-	-	-	-	10	61,360,700	42%	81%	34	157,754,290	35%	97%	Subid. Akuntansi dan Penyusunan lap. Keuangan
		5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan,Belanja, pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1084	Dokumen	1,206,660,000	270	248,666,475	271	251,004,800	40	67,268,400	60	100,781,000	-	-	-	-	100	168,049,400	37%	67%	370	416,715,875	34%	35%	Subid. Akuntansi dan Penyusunan lap. Keuangan
		5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan laporan Pertanggungjawaban	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan,	76	Laporan	928,200,000	19	114,906,210	19	172,970,000	4	33,429,400	3	17,522,800	-	-	-	-	7	50,952,200	37%	29%	26	165,858,410	34%	18%	Subid. Akuntansi dan Penyu

							pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Triwulanan dan Semesteran																									sunan lap. Keuangan
		5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	9	Dokumen	663,663,000	2	239,727,500	2	218,835,900	-	15,465,500	1	123,560,800	-	-	-	-	1	139,026,300	50%	64%	3	378,753,800	33%	57%	Subid. Akuntansi dan Penyusunan lap. Keuangan
		5	02	02	2.03	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	8	Dokumen	696,150,000	2	169,466,000	2	187,237,900	1	57,583,511	-	68,483,700	-	-	-	-	1	126,067,211	50%	67%	3	295,533,211	38%	42%	Subid. Akuntansi dan Penyusunan lap. Keuangan
		5	02	02	2.03	08	Penyusunan Analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan	8	Dokumen	371,280,000	2	162,376,685	2	190,861,000	1	47,374,400	-	23,939,200	-	-	-	-	1	71,313,600	50%	37%	3	233,690,285	38%	63%	Subid. Akuntansi dan Penyusunan lap.

								APBD																							Keuangan
		5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	8	Perkada	890,000,000	2	106,446,416	2	320,903,300	1	23,681,200	-	49,619,357	-	-	-	-	1	73,300,557	50 %	23 %	3	179,746,973	38 %	20 %	Subid. Akuntansi dan Penyusunan lap. Keuangan
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																									**45.06 %**	**52.60%**					
Predikat Kinerja Kegiatan																									**SR**	**R**					
		5	**02**	**02**	**2.04**		**Penunjang Urusan Kewenangan pengelolaan Keuangan Daerah**	**Persentase cakupan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah**	**100 %**	**Persen**	**701,814,510,600**	**25.81 %**	**148,809,807,589**	**100 %**	**171,901,544,149**	**0.00 %**	**-**	**25.00 %**	**88,378,200,581**	**0.00 %**	**-**	**0.00 %**	**-**	**25.00 %**	**88,378,200,581**	**25.00 %**	**51.41 %**	**32.26 %**	**237,188,008,170**	32.26 %	33.80 %	
		5	02	02	2.04	04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	4	Laporan	134,009,375,000	1	15,124,657,489	1	15,340,710,149	-	-	-	7,388,082,679	-	-	-	-	-	7,388,082,679	0 %	48 %	1	22,512,740,168	25 %	17 %	Subid. Akuntansi dan Penyusunan lap. Keuangan
		5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan	16	Laporan	533,218,358,000	4	128,256,381,100	4	139,216,574,000	-	-	2	80,990,117,902	-	-	-	-	2	80,990,117,902	50 %	58 %	6	209,246,499,002	38 %	39 %	

							Keuangan	Keuangan																									
		5	0 2	0 2	2 . 0 4	0 9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	4	Lapor an	16,000,0 00,000	1	3,265,0 00,000	1	4,40 0,00 0,00 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 %	0%	1	3,265, 000,00 0	25 %	20 %	Subid. Akunt ansi dan Penyu sunan lap. Keua ngan
		5	0 2	0 2	2 . 0 4	1 0	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kot a	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kot a	7	Lapor an	18,586,7 77,600	2	2,163,7 69,000	2	12,9 44,2 60,0 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 %	0%	2	2,163, 769,00 0	29 %	12 %	Subid. Akunt ansi dan Penyu sunan lap. Keua ngan
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																											**12 .5 0 %**	**26.5 8%**				
Predikat Kinerja Kegiatan																											**SR**	**SR**				
		5	**0 2**	**0 2**	**2 . 0 5**		**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi pemerintah Daerah Lingkup Keuangan daerah**	**Persentase data yang telah diolah dan diimplementas ikan melalui sistem informasi Keuangan daerah (SIPD)**	**100 %**	**Perse n**	**3,455,2 30,000**	**25. 00 %**	**892,21 3,596**	**100 %**	**810, 000, 000**	**23 .0 8 %**	**179,9 51,00 0**	**23. 08 %**	**240,4 72,00 0**	**0 . 0 0 %**	**-**	**0. 0 0 %**	**-**	**46 .1 5 %**	**420,4 23,00 0**	**46 .1 5 %**	**51. 90 %**	**36. 54 %**	**1,312, 636,5 96**	36. 54 %	37. 99 %	
		5	0 2	0 2	2 . 0 5	0 1	Inventarisasi dan Analisis data bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang	4	Doku men	139,230, 000	1	95,962, 700	1	10,0 00,0 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 %	0%	1	95,962 ,700	25 %	69 %	Subid. Akunt ansi dan Penyu

								Keuangan Daerah																								sunan lap. Keuangan
		5	02	02	2.05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	48	Dokumen	3,316,000,000	12	796,250,896	12	800,000,000	3	179,951,000	3	240,472,000	-	-	-	-	6	420,423,000	50 %	53 %	18	1,216,673,896	38 %	37 %	Subid Perbendaharaan
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																										**25.00 %**	**26.28%**				
Predikat Kinerja Kegiatan																										**SR**	**SR**				
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)																										**30.39 %**	**44.95%**				
Predikat Kinerja Program																										**SR**	**SR**				
Faktor pendorong pencapaian kinerja: Ketersediaan dukungan anggaran dan sumber daya aparatur membuat pelaksanaan sub kegiatan bisa terealisasi dan sesuai target dengan waktu yang telah ditetapkan																															
Faktor penghambat: : Terbatasnya anggaran kas per sub kegiatan																															
Faktor penghambat:																															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*): Perlunya peningkatan nilai anggaran kas per sub kegiatan, sehingga pelaksanaannya dapat optimal																															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*): Sumber Dana per Sub Kegiatan harus akurat, sehingga pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan ketersediaan dananya																															

	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah	**5**	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Peraturan Perundang - Undangan**	**100 %**	**Persen**	**9,344,208,874**	**27.77 %**	**1,422,913,951**	**100 %**	**1,217,365,800**	**9.72 %**	**247,766,960**	**2.78%**	**351,709,342**	**0.00 %**	**-**	**0.00 %**	**-**	**12.50 %**	**599,476,302**	**12.50 %**	**49.24 %**	**30.06 %**	**2,022,390,253**	**30.06 %**	**21.64 %**	
		5	02	03	2.01		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase cakupan pengelolaan barang milik daerah**	100.00 %	Persen	9,344,208,874	27.77 %	1,422,913,951	100 %	1,217,365,800	9.72 %	247,766,960	2.78%	351,709,342	0.00 %	-	0.00 %	-	12.50 %	599,476,302	12.50 %	49.24 %	30.06 %	2,022,390,253	30.06 %	21.64 %	
		5	02	03	2.01	01	Penysunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang disusun	8	Dokumen	1,908,992,230	2	233,691,600	2	211,695,000	-	2,767,000	1	53,273,400	-	-	-	-	1	56,040,400	50 %	26 %	3	289,732,000	38 %	15 %	subid. Perencanaan Kebutuhan dan Penatausahaan Aset
		5	02	03	2.01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	4	Dokumen	340,273,540	1	18,488,200	1	19,333,600	1	6,758,300	-	12,575,300	-	-	-	-	1	19,333,600	100 %	100 %	2	37,821,800	50 %	11 %	subid. Perencanaan Kebutuhan dan Penatausahaan Aset
		5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	8	Dokumen	432,551,110	2	25,368,600	2	25,378,800	-	11,725,800	2	13,653,000	-	-	-	-	2	25,378,800	100 %	100 %	4	50,747,400	50 %	12 %	Subid Perencanaan Kebutuhan dan Penatausah

																													aan Aset
5	02	03	2.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan barang Milik daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	4	Dokumen	432,551,110	1	36,796,800	1	37,052,800	-	8,237,500	-	9,644,900	-	-	-	-	-	17,882,400	0%	48%	1	54,679,200	25%	13%	Subid Perencanaan Kebutuhan dan Penatausahaan Aset
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatusahaan Barang Milik Daerah	53	Laporan	2,316,661,501	35	96,403,000	35	111,436,800	-	26,543,900	-	27,407,250	-	-	-	-	-	53,951,150	0%	48%	35	150,354,150	66%	6%	Subid Perencanaan Kebutuhan dan Penatausahaan Aset
5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	140	Laporan	786,566,407	35	77,715,200	38	78,225,200	-	21,570,460	-	34,619,100	-	-	-	-	-	56,189,560	0%	72%	35	133,904,760	25%	17%	Subid Perencanaan Kebutuhan dan Penatausahaan Aset
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	140	Laporan	622,873,598	35	144,406,200	5	152,022,400	1	7,877,800	-	56,949,900	-	-	-	-	1	64,827,700	20%	43%	36	209,233,900	26%	34%	Subid Pemanfaatan dan Penghapusan

		5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	140	Laporan	675,931,531	35	282,391,673	10	194,896,400	2	47,669,600	-	45,294,887	-	-	-	-	2	92,964,487	20 %	48 %	37	375,356,160	26 %	56 %	Subid Pemanfaatan dan Penghapusan
		5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan Barang milik daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	140	Dokumen	512,467,984	35	74,485,514	10	57,438,500	-	7,177,700	-	17,492,005	-	-	-	-	-	24,669,705	0 %	43 %	35	99,155,219	25 %	19 %	Subid Pemanfaatan dan Penghapusan
		5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	140	Laporan	491,432,988	35	123,636,620	38	83,782,200	10	54,441,800	-	5,952,900	-	-	-	-	10	60,394,700	26 %	72 %	45	184,031,320	32 %	37 %	Subid Perencanaan Kebutuhan dan Penatausahaan Aset
		5	02	03	2.01	12	Penyusunan laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	8	Laporan	823,906,875	2	309,530,544	2	246,104,100	-	52,997,100	1	74,846,700	-	-	-	-	1	127,843,800	50 %	52 %	3	437,374,344	38 %	53 %	Subid Pemanfaatan dan Penghapusan
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																											**33.30 %**	**59.30%**				
Predikat Kinerja Kegiatan																											**SR**	**R**				

Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**33.30%**	**59.30%**	
Predikat Kinerja Program	**SR**	**R**	
Faktor pendorong pencapaian kinerja: Ketersediaan dukungan anggaran dan sumber daya aparatur membuat pelaksanaan sub kegiatan bisa terealisasi dan sesuai target dengan waktu yang telah ditetapkan			
Faktor penghambat: :			
Faktor penghambat: Terbatasnya anggaran kas per sub kegiatan			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*): Perlunya peningkatan nilai anggaran kas per sub kegiatan, sehingga pelaksanaannya dapat optimal			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*): Sumber Dana per Sub Kegiatan harus akurat, sehingga pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan ketersediaan dananya			
Total Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**33.37%**	**50.05%**	
Predikat Kinerja Program	**SR**	**SR**	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Adapun kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar.

Tabel II-6
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Takalar Triwulan II
Tahun 2024

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN
		2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
1	Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	B (75,050)	B (76,050)	B (78,050)	B (78,050)	C (45,9583)	B (70,138)	B (76,050)	B (78,050)	
2	Persentase kesesuaian nomelaktur program KUA-PPAS dan APBD	99%	99%	100%	100%	100%	100%	99%	99%	
3	Persentase kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD	98%	99%	99%	99%	99.56%	98.79%	98%	99%	
4	Persentase belanja pendidikan	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	
5	Persentase belanja kesehatan	12%	12%	12%	13%	12%	12%	12%	12%	
6	Persentase belanja infrastruktur dari dana transfer umum	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
7	Persentase anggaran belanja standar pelayanan minimal	6%	7%	8%	9%	6%	7%	6%	7%	
8	Persentase pelaporan tepat waktu	96%	96%	100%	100%	96%	96%	96%	96%	

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN
		2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
9	Persentase pelaporan dapat diakses	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10	Persentase capaian pelaksanaan belanja daerah	80%	85%	90%	95%	80%	85%	80%	85%	
11	Rasio kemandirian keuangan	12%	13%	14%	15%	12%	13%	12%	13%	
12	Rasio Fleksibiltas Keuangan	114%	114%	115%	115%	114%	114%	114%	114%	
13	Rasio Solvabilitas Operasional	82.00	82.00	82.50	82.50	82.00	82.00	82.00	82.00	
14	Rasio Solvabilitas Jangka Pendek	250.00	250.50	250.50	260.00	250.00	250.50	250.00	250.50	
15	Rasio Solvabilitas Jangka Panjang	630.50	630.50	632.50	632.50	630.50	630.50	630.50	630.50	
16	Rasio Solvabilitas Layanan	503.250.725.05	503.250.725.05	504.250.725.05	504.250.725.05	503.250.725.05	503.250.725.05	503.250.725.05	503.250.725.05	
17	Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemda	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN
		2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
18	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD	94%	97%	100%	100%	94%	97%	94%	97%	
19	Persentase data aset yang akurat	92%	93%	94%	95%	92%	93%	92%	93%	
20	Indeks reformasi birokrasi BKAD	B (71 - 72)	BB (73 - 75)	BB (76 - 78)	BB (79 - 80)	CC (54,92)	CC (52,33)	BB (73 - 75)	BB (76 - 78)	

Berdasarkan tabel II-6 dapat dilihat bahwa:

Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Indek Pengelolaan Keuangan Daerah pada Tahun 2023 adalah B dengan indeks total 70,138 atau sangat perlu perbaikan dari 6 (enam) dimensi penilaian. Namun hal ini berarti bahwa telah ada peningkatan dibandingkan Tahun 2022 yang lalu dengan kategorinya predikat C (45,9583).

Persentase kesesuaian nomelaktur program KUA-PPAS dan APBD. Realisasi Persentase kesesuaian nomelaktur program KUA-PPAS dan APBD sampai triwulan II Tahun 2024 adalah sebesar 99% dari yang ditargetkan sebesar 99%. Hal ini didukung oleh pemakaian Aplikasi yang terintegrasi dari perencanaan sampai dengan penganggaran.

Persentase kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD. Realisasi Persentase kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD sampai triwulan II Tahun 2024 adalah sebesar 98% dari yang ditargetkan sebesar 99%. Hal ini didukung oleh pemakaian Aplikasi yang terintegrasi dari perencanaan sampai dengan penganggaran.

Persentase belanja pendidikan. Realisasi Persentase belanja pendidikan sampai triwulan II Tahun 2024 adalah sebesar 22,00% dari yang ditargetkan sebesar 22%. Hal ini didukung oleh kebijakan Pemerintah Pusat untuk konsisten mengalokasikan anggaran bidang pendidikan minimal 20% dari total APBD.

Persentase belanja kesehatan. Realisasi Persentase belanja kesehatan sampai triwulan II Tahun 2023 adalah sebesar 12,00% dari yang ditargetkan sebesar 12%. Hal ini didukung oleh kebijakan Pemerintah Pusat untuk konsisten mengalokasikan anggaran bidang kesehatan minimal 10% dari total APBD.

Persentase belanja infrastruktur dari dana transfer umum. Realisasi Persentase belanja infrastruktur dari dana transfer umum sampai triwulan II Tahun 2024 adalah sebesar 25% dari yang ditargetkan sebesar 25%. Hal ini didukung oleh kebijakan Pemerintah Pusat untuk konsisten mengalokasikan anggaran bidang infrastruktur dari dana transfer umum minimal 25% dari total dana transfer.

Persentase anggaran belanja standar pelayanan minimal. Realisasi Persentase anggaran belanja standar pelayanan minimal sampai triwulan II Tahun 2023 adalah sebesar 6% dari yang ditargetkan sebesar 7%. Hal ini didukung oleh kebijakan Pemerintah Pusat untuk konsisten mengalokasikan anggaran belanja standar pelayanan minimal 5% dari total APBD.

Persentase pelaporan tepat waktu. Realisasi Persentase pelaporan tepat waktu sampai triwulan II Tahun 2024, adalah 96% dari target 96% hal ini disebabkan masih ada beberapa organisasi perangkat daerah yang terlambat memasukkan laporan.

Persentase pelaporan dapat diakses. Realisasi Persentase pelaporan tepat waktu sampai triwulan II Tahun 2024, adalah 100% dari target 100% hal ini didukung oleh tersedianya dokumen atau laporan yang dapat diakses atau tersedia di laman website Pemda.

Persentase capaian pelaksanaan belanja daerah. Realisasi Persentase Persentase capaian pelaksanaan belanja daerah sampai triwulan II Tahun 2024 baru sekitar 48,26 % karena untuk mengukur capaian pelaksanaan belanja daerah dapat dihitung pada akhir tahun anggaran.

Rasio kemandirian keuangan. Kemandirian keuangan adalah suatu kondisi pemerintah daerah yang tidak rentan terhadap sumber pendanaan di luar kendalinya atau pengaruhnya, baik dari sumber-sumber dalam negeri maupun luar negeri. Realisasi rasio kemandirian keuangan sampai triwulan II Tahun 2024, belum ada data (N/A) karena rasio kemandirian keuangan dapat diukur berdasarkan realisasi PAD pada akhir tahun anggaran.

Rasio Fleksibiltas Keuangan. Fleksibilitas keuangan adalah suatu kondisi pemerintah daerah dapat meningkatkan sumber daya keuangan untuk menghadapi peningkatan komitmen, baik melalui peningkatan pendapatan atau peningkatan kapasitas utang *(debt capacity)*. Realisasi Rasio Fleksibiltas Keuangan sampai triwulan II Tahun 2024, belum ada data (N/A) karena pelaporan keuangan diselesaikan pada akhir tahun anggaran, sedangkan Tahun 2023 realisasinya mencapai 114%.

Rasio Solvabilitas Operasional. Solvabilitas operasional adalah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan untuk menutupi beban operasional pemerintah selama periode anggaran. Realisasi Rasio Solvabilitas Operasional sampai triwulan II Tahun 2024 adalah 82,00 yang sesuai dengan target yaitu 82,00.

Rasio solvabilitas jangka pendek. Solvabilitas jangka pendek merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang jatuh tempo dalam waktu kurang atau sama dengan 12 bulan. Realisasi Rasio Solvabilitas jangka pendek sampai triwulan II Tahun 2024, adalah 250,00 sedangkan target sampai akhir tahun anggaran adalah 250,00.

Rasio solvabilitas jangka panjang. Solvabilitas jangka panjang merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban

jangka panjang. Realisasi Rasio solvabilitas jangka panjang sampai triwulan II Tahun 2024 adalah sebesar 630,50 dari yang ditargetkan sebesar 630,50. Hal ini telah sesuai dengan target yang telah ditentukan sampai pada akhir tahun anggaran.

Rasio solvabilitas layanan. Solvabilitas layanan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayanan publik yang dibutuhkan dan dinginkan oleh masyarakat. Realisasi rasio solvabilitas layanan sampai triwulan II Tahun 2024 adalah sebesar 503.250.725,05 dari yang ditargetkan sebesar 503.250.725,05. Dengan demikian realisasinya telah sesuai dengan target yang telah direncanakan.

Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemda. Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemda sampai triwulan II Tahun 2024 belum ada karena penilaian dari BPK setelah Laporan Keuangan Pemda telah diaudit pada pertengahan tahun depan, sedangkan opini BPK Tahun 2023 adalah WTP sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD. Realisasi Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD sampai triwulan II Tahun 2024 belum ada laporannya karena penyampaian laporan BMD dilakukan pada akhir tahun anggaran.

Persentase data aset yang akurat. Realisasi Persentase data aset yang akurat sampai triwulan II Tahun 2024 belum ada laporannya karena penyampaian laporan BMD dilakukan pada akhir tahun anggaran.

Indeks reformasi birokrasi BKAD. Realisasi Indeks reformasi birokrasi BKAD sampai triwulan II Tahun 2024 belum ada laporannya karena penilaian indeks reformasi perangkat daerah tidak dilakukan Inspektorat Daerah, sedangkan untuk Indeks Reformasi Birokrasi Pemkab Takalar adalah B pada tahun 2023 yang masih sangat perlu perbaikan.

Nilai SAKIP BKAD. Nilai SAKIP BKAD sampai triwulan II Tahun 2024 belum ada laporannya karena penilaian dilakukan setelah berakhirnya tahun anggaran. Untuk Tahun 2023 nilai SAKIP BKAD adalah BB yang meningkat dari tahun sebelumnya yakni B, ini telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Capaian Indikator Kinerja Kunci Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar dapat dilihat pada Tabel II-4.

Tabel II-7
Capaian IKK Badan Keuangan dan Aset Daerah Triwulan II
Tahun 2024

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	FORMULASI			AGREGAT	REALISASI	SATUAN
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	(Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi) - 1 Total Belanja APBD	x	100%		N/A	Persentase
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	(Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi) - 1 Total PAD dalam APBD	x	100%		N/A	Persentase
3	Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Jumlah belanja di luar guru dan tenaga kesehatan Jumlah APBD	x	100%		N/A	Persentase
4	Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah Belanja Urusan Pemerintahan dikurangi transfer expenditures Jumlah Belanja APBD	x	100%		N/A	Persentase
5	Manajemen Aset						
	a. Apakah ada daftar aset tetap?	(Ya/Tidak)				Ya	
	b. Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap?	(Ya/Tidak)				Tidak	
	c. Apakah ada proses	(Ya/Tidak)				Ya	

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	FORMULASI			AGREGAT	REALISASI	SATUAN
	inventarisasi aset tahunan?						
	d. Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran?	(Ya/Tidak)				Ya	
6	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai realisasi SiLPA	x	100%		N/A	Persentase
		Total belanja anggaran tahun sebelumnya					

Berdasarkan Tabel II-7 dapat dilihat bahwa:

1. Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan. Realisasi sampai triwulan II Tahun Anggaran 2024 belum ada laporannya karena perhitungannya dilakukan akhir tahun anggaran, sedangkan realisasi Tahun 2023 adalah 0,24.
2. Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures). Realisasi sampai triwulan II Tahun Anggaran 2024 belum ada laporannya karena perhitungannya dilakukan akhir tahun anggaran, sedangkan realisasi Tahun 2023 adalah 0,3.
3. Opini laporan keuangan. Realisasi sampai triwulan II Tahun Anggaran 2024 belum ada laporannya penilaiannya dilakukan akhir tahun anggaran oleh Tim Audit BPK, sedangkan realisasi Tahun 2023 adalah WTP.
4. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD. Realisasi sampai triwulan II Tahun Anggaran 2024 belum ada laporannya. Perhitungannya dilakukan akhir tahun anggaran, sedangkan realisasi Tahun 2023 adalah 0,03. Deviasi belanja menggambarkan nilai realisasi belanja terhadap target yang telah ditetapkan.
5. Manajemen Aset. Realisasi manajemen aset sampai triwulan II Tahun Anggaran 2024 belum ada laporan penilaiannya dilakukan akhir tahun anggaran oleh Tim Audit BPK, sedangkan realisasi Tahun 2023 adalah 100%, karena semua indikator penilaian manajemen aset telah terpenuhi.
6. Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya. Realisasi manajemen aset sampai triwulan II Tahun Anggaran 2024 belum ada laporan penilaiannya dilakukan akhir tahun anggaran oleh Tim Audit BPK, sedangkan realisasi Tahun 2023 adalah 0,04. Nilai SiLPA harus ditekan dengan mengoptimalkan capaian realisasi belanja daerah, sehingga tidak terjadi pengendapan dana pada Kas Daerah.

2.2.3 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Untuk capaian SPM Badan Keuangan dan Aset Daerah tidak memiliki Standar Pelayanan Minimal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bahwa Badan Keuangan dan Aset Daerah bukan termasuk pengampu SPM.

2.2.4 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang

merupakan komitmen agar pelaksanaan dan pencapaian SDGs dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pihak. Capaian SDGs Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Takalar dapat dilihat pada tabel II-5.

Tabel II-8
Capaian SDGs Badan Keuangan dan Aset Daerah Triwulan II
Tahun 2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIA TAHUN				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	CATATAN ANALISIS
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	
INDIKATOR TPB/SDGs										
1	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah	%	65.25 %	65.25 %	65.25%	65.25%	85.25 %	85.25 %	85.25%	
2	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui	%	96.00 %	96.00 %	97.00%	97.00%	97%	97%	97%	

3	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	%	100.00%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100%	100%	100%	

Berdasarkan tabel II-8 dapat dilihat bahwa:

1. **Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.** Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah tahun 2024 ditargetkan sebesar 85,25 %, sedangkan Tahun 2023 realisasinya sebesar 85,25%.
2. **Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.** Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui tahun 2024 ditargetkan sebesar 96%, sedangkan Tahun 2023 realisasinya sebesar 96%. Pengeluaran utama pemerintah mencakup pengeluaran rutin perangkat daerah yang sifatnya wajib, mengikat, pencapaian belanja standar pelayanan minimal, pembayaran kewajiban pemerintah daerah.
3. **Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).** Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah realisasinya adalah 100% dan diharapkan pada masa-masa yang akan datang untuk konsisten dengan pencapaian ini, berupaya untuk mengurangi temuan atas penyajian laporan keuangan daerah. Hambatan, Upaya Pencapaian, dan Rekomendasi Pelaksanaan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024.

2.2.5 Hambatan Dalam Pelaksanaan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 sampai dengan Triwulan ke II

Hambatan dan kendala dalam pelaksanakan kegiatan triwulan kedua dipengaruhi oleh:

1. Adanya peraturan pemerintah pusat yang menyebabkan harus dilakukan penyesuaian anggaran dan rendahnya realiasasi penerimaan pendapatan daerah terutama dari sektor pendapatan asli daerah.
2. Terbatasnya jumlah personil sumber daya manusia yang benar-benar memiliki kemampuan teknis di bidangnya diantaranya kemampuan akuntansi dan teknologi informasi.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

2.2.6 Upaya Dalam Pencapaian Pelaksanaan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 sampai dengan Triwulan ke-II

Merujuk dari faktor penghambat Pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah sampai dengan triwulan ke II tentunya mengalami berbagai kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Adapun beberapa upaya yang dilakukan dalam pencapaian keberhasilan kinerja disampaikan sebagai berikut:

1. Komitmen pimpinan dan koordinasi yang baik untuk melaksanakan kegiatan secara maksimal;
2. Kualitas SDM yang mampu, terampil dan memadai serta memiliki komitmen dan motivasi untuk melakukan tugas dan fungsi secara maksimal dalam rangka memberikan pelayanan prima;
3. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menunaikan kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah, demi untuk meningkatkan capaian realisasi penerimaan pendapatan daerah.

2.2.7 Rekomendasi Pelaksanaan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 Triwulan selanjutnya

1. Meningkatkan komunikasi dan integrasi program di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah serta pengendalian dan evaluasi dilakukan terus menerus.
2. Peran aktif Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di dalam mengawal pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang berjalan.
3. Peran aktif Kepala Badan selaku PA di dalam mengawasi, mengontrol dan membuat kebijakan serta keputusan;
4. Peningkatan kualitas SDM aparatur serta jumlah staf yang berkompeten;
5. Peningkatan sarana dan prasarana operasional sesuai dengan kebutuhan;
6. Perlunya melakukan evaluasi dan monitoring secara terus menerus dan berkelanjutan yang diiringi dengan pengelolaan data yang baik;
7. Pelaksanaan kegiatan sesuai Renstra.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran

Mendasari hasil evaluasi kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2017- 2022, tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2017- 2022 mengalami perubahan setelah disesuikan dengan dinamika isu – isu Nasional dan lokal yang tertuang di dalam tujuan dan sasaran Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026. Olehnya itu Perubahan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 didasarkan pada perumusan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026. Adapun perubahan rumusan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

3.1.1 Tujuan

Rumusan tujuan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2023 -2026 adalah:

1. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah
2. Meningkatnya tata kelola BKAD

3.1.2 Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kesesuaian antara dokumen perencanaan dan penganggaran
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan pengalokasian anggaran belanja dalam APBD
3. Meningkatnya Pengelolaan keuangan daerah yang Transparan
4. Meningkatnya rasio penyerapan anggaran
5. Meningkatnya kondisi keuangan daerah
6. Meningkatnya Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemda
7. Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah
8. Meningkatnya tata kelola kinerja pada BKAD

Tabel III- 1
Tujuan dan Sasaran RKPD Kabupaten Takalar 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2024
T.7 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan public yang berkualitas	S7.1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, akuntabel dan demokratis.	Indek Reformasi Birokrasi	20
		Nilai LAKIP/SAKIP	A
		Opini BPK atas laporan keuangan	WTP

Dengan memperhatikan tema dan prioritas serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar serta tujuan dan sasaran Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Takalar Tahun 2017-2023, maka rumusan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel III- 2
Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja
Badan Keuangan dan Aset Daerah

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024
1	2	3
Tujuan 1 **Meningkatkan kinerja Pengelolaan keuangan daerah**	Nilai Indek Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	B
Sasaran 1.1 **Meningkatnya kesesuaian antara dokumen perencanaan dan penganggaran**	Persentase kesesuaian nomelaktur program KUA-PPAS dan APBD	99%
	Persentase kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD	99%
Sasaran 1.2 **Meningkatnya kualitas pengelolaan pengalokasian**	Persentase belanja pendidikan	22%
	Persentase belanja kesehatan	12%
	Persentase belanja infrastruktur dari dana transfer umum	25%

anggaran belanja dalam APBD	Persentase anggaran belanja standar pelayanan minimal	7%
Sasaran 1.3 **Meningkatnya Pengelolaan keuangan daerah yang Transparan**	Persentase Pelaporan tepat waktu	96%
	Persentase laporan dapat diakses	100%
Sasaran 1.4 **Meningkatnya rasio penyerapan anggaran**	Persentase capaian pelaksanaan belanja daerah	85%
Sasaran 1.5 **Meningkatnya kondisi keuangan daerah**	Rasio kemandirian keuangan	13%
	Rasio Fleksibiltas Keuangan	114%
	Rasio Solvabilitas Operasional	82
	Rasio Solvabilitas jangka pendek	250,50
	Rasio Solvabilitas jangka panjang	630.50
	Rasio Solvabilitas layanan	503.250.725.05
Sasaran 1.6 **Meningkatnya Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemda**	Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemda	WTP
Sasaran 1.7 **Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah**	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD	97%
	Persentase data aset yang akurat	93%
Sasaran 2.1 **Meningkatnya tata kelola kinerja pada BKAD**	Indeks reformasi birokrasi BKAD	BB
	Nilai SAKIP BKAD	BB

3.2 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Tahun 2024 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar terdiri atas 3 Program, 13 kegiatan dan 87 sub kegiatan dengan jumlah dana pagu indikatif adalah sebesar **Rp192.388.227.524,00** ***(Seratus Sembilan Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu***

Lima Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) dengan sumber dana berasal dari APBD-P. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel III-4 berikut:

Tabel III- 3
Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Renja Pokok 2024			Perubahan Renja		Bertambah/ (Berkurang)
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana	Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikator	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.02.01.2	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan penunjang urusan pemerintahan**		**100 %**	**22,876,413,508**	**100 %**	**23,161,115,715**	**284,702,434**
5.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase cakupan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**		**100 %**	**304,120,000**	**100 %**	**304,120,000**	**227.00**
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Takalar	2 Dok	46,450,000	2 Dok	46,450,000	0.00
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Takalar	2 Dok	37,000,000	2 Dok	37,000,000	0.00
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Takalar	2 Dok	37,000,000	2 Dok	37,000,000	0.00
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Takalar	2 Dok	37,000,000	2 Dok	37,000,000	0.00
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Takalar	2 Dok	37,000,000	2 Dok	37,000,000	0.00

5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Takalar	2	Lap	42,120,000	2	Lap	42,120,000	0.00
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Takalar	4	Lap	67,550,000	4	Lap	67,550,000	0.00
5.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase cakupan administrasi keuangan PD**	Kab. Takalar			**20,286,945,708**			**20,286,945,935**	**227.00**
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dn Tunjangan ASN	Kab. Takalar	100	org/bln	19,873,617,308	100	org/bln	19,873,617,535	227.00
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Takalar	12	Dok	59,360,300	12	Dok	59,360,300	0.00
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaandan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Takalar	10,000	Dok	109,221,200	10,000	Dok	109,221,200	0.00
5.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Takalar	12	Dok	51,672,200	12	Dok	51,672,200	0.00
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir TahunSKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Takalar	1	Lap	52,536,400	1	Lap	52,536,400	0.00
5.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Takalar	6	Dok	50,000,100	6	Dok	50,000,100	0.00
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Takalar	2	Lap	55,000,100	2	Lap	55,000,100	0.00

5.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Takalar	1	Lap	35,538,100	1	Lap	35,538,100	0.00
5.02.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase cakupan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	Kab. Takalar	100	%	**225,380,100**	100	%	**225,380,100**	**0.00**
5.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Takalar	2	Dok	30,000,000	2	Dok	30,000,000	0.00
5.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Takalar	1	Dok	30,081,700	1	Dok	30,081,700	0.00
5.02.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKP	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Takalar	1	Lap	29,000,000	1	Lap	29,000,000	0.00
5.02.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Takalar	1	Lap	23,664,000	1	Lap	23,664,000	0.00
5.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKP	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Takalar	4	Lap	46,640,000	4	Lap	46,640,000	0.00
5.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Takalar	1	Lap	27,500,000	1	Lap	27,500,000	0.00
5.02.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKP	Kab. Takalar	1	Dok	38,494,400	1	Dok	38,494,400	0.00
5.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	Kab. Takalar	100	%	**181,258,700**	100	%	**181,258,700**	**0.00**
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Takalar	100	psg	43,350,000	100	psg	43,350,000	0.00
5.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Takalar	12	dok	35,992,800	12	dok	35,992,800	0.00

5.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Takalar	12	dok	101,915,900	12	dok	101,915,900	0.00
5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentasi cakupan administrasi umum perangkat daerah**		100	%	**1,238,057,000**	100	%	**1,204,752,900**	**(33,304,100.00)**
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Takalar	6	pkt	15,627,400	6	pkt	15,627,400	-
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Takalar	3	pkt	168,681,000	3	pkt	523,140,100	354,459,100.00
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Takalar	1	pkt	16,333,400	1	pkt	16,333,400	-
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Takalar	2	pkt	418,103,700	2	pkt	30,340,500	(387,763,200.00)
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Takalar	2	pkt	12,364,000	2	pkt	12,364,000	0.00
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Takalar	2	pkt	125,000,000	2	pkt	125,000,000	0.00
5.02.01.2.06.07	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Takalar	12	pkt	21,600,000	12	pkt	21,600,000	0.00
5.02.01.2.06.08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Takalar	12	lap	421,352,000	12	lap	421,352,000	0.00
5.02.01.2.06.09	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Takalar	1	dok	38,995,500	1	dok	38,995,500	0.00
5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	Kab. Takalar	100	%	**603,680,000**	100	%	**640,686,080**	**37,006,080.00**
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	Kab. Takalar	12	laporan	289,280,000	12	laporan	289,280,000	0.00

		Disediakan							
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Kab. Takalar	12	laporan	314,400,000	12	laporan	351,406,080	37,006,080.00
5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	Kab. Takalar	100	%	**36,972,000**	100	%	**317,972,000**	**281,000,000.00**
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Takalar	28	unit	19,822,000	28	unit	282,792,000	262,970,000.00
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Takalar	1	unit	10,450,000	1	unit	10,450,000	0.00
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Takalar	5	unit	6,700,000	5	unit	24,730,000	18,030,000.00
5.02.02.2	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase pengunaan anggaran tepat sasaran**				**176,876,189,409**			**168,009,746,009**	**(8,866,443,400.00)**
5.02.02.2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Persentase cakupan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah**		100	%	**1,408,323,360**	100	%	**1,308,920,960**	**(99,402,400.00)**
5.02.02.2.01.01	Koordinasi Dan Penyusunan KUA Dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Kab. Takalar	2	Dok	90,000,000	2	Dok	96,960,000	6,960,000.00
5.02.02.2.01.02	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan KUA Dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Kab. Takalar	2	Dok	90,000,000	2	Dok	85,000,000	(5,000,000.00)
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Kab. Takalar	38	Dok	139,980,000	38	Dok	131,340,000	(8,640,000.00)
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Kab. Takalar	38	Dok	139,980,000	38	Dok	141,580,000	1,600,000.00
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	Kab. Takalar	38	Dok	90,000,000	38	Dok	81,360,000	(8,640,000.00)
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Kab. Takalar	38	Dok	90,000,000	38	Dok	103,237,600	13,237,600.00

	SKPD								
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Takalar	2	Dok	110,000,000	2	Dok	102,440,000	(7,560,000.00)
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubaha APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Takalar	2	Dok	150,000,000	2	Dok	150,000,000	0.00
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab. Takalar	1	Dok	70,040,000	1	Dok	70,040,000	0.00
5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Kab. Takalar	1	Dok	88,000,000	1	Dok	96,640,000	8,640,000.00
5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kab. Takalar	1	Dok	80,323,360	1	Dok	80,323,360	0.00
5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Kab. Takalar	1	Dok	70,000,000	1	Dok	70,000,000	0.00
5.02.02.2.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	50	Org	200,000,000	50	Org	100,000,000	(100,000,000.00)
5.02.02.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Persentase cakupan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah**	Kab. Takalar	100	%	**1,338,094,200**	100	%	**1,571,453,200**	**233,359,000.00**
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Takalar	12	Dok	199,701,400	12	Dok	199,701,400	0.00
5.02.02.2.02.02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Takalar	2	Lap	52,108,400	2	Lap	52,108,400	0.00
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab. Takalar	840	Dok	109,676,000	840	Dok	109,676,000	0.00

5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Kab. Takalar	5,000	Dok	73,407,600	5,000	Dok	73,407,600	0.00
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab. Takalar	26	Dok	115,202,000	26	Dok	155,072,000	39,870,000.00
5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Kab. Takalar	12	Dok	30,000,000	12	Dok	30,000,000	0.00
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dannPenyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kab. Takalar	48	Lap	212,473,600	48	Lap	204,470,600	(8,003,000.00)
5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Kab. Takalar	1	Dok	41,640,200	1	Dok	41,640,200	0.00

5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kab. Takalar	184	Dok	133,036,000	184	Dok	133,036,000	0.00
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kab. Takalar	1	Dok	32,765,800	1	Dok	32,765,800	0.00
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	70	Org	338,083,200	70	Org	539,575,200	201,492,000.00
5.02.02.2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**persentase cakupan koordinasi dan pelaporan keuangan daerah**	**Kab. Takalar**			**1,418,227,700**			**1,417,827,700**	**(400,000.00)**
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kab. Takalar	24	Lap	76,014,800	24	Lap	76,014,800	0.00
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Kab. Takalar	300	Dok	251,004,800	300	Dok	251,004,800	0.00
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kab. Takalar	19	Lap	172,970,000	19	Lap	172,970,000	0.00

5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab. Takalar	2	Dok	218,835,900	2	Dok	218,835,900	0.00
5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kab. Takalar	2	Dok	430,505,900	2	Dok	187,237,900	(243,268,000.00)
5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kab. Takalar	2	Dok	190,861,000	2	Dok	190,861,000	0.00
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kab. Takalar	2	Perbup	78,035,300	2	Perbup	320,903,300	242,868,000.00
5.02.02.2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Persentase cakupan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah**	**Kab. Takalar**	100	%	**171,901,544,149**	100	%	**162,901,544,149**	**(9,000,000,000.00)**
5.02.02.2.04.02	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Kab. Takalar	1	Lap	15,340,710,149	1	Lap	15,340,710,149	0.00
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Takalar	4	Lap	139,216,574,000	4	Lap	139,216,574,000	0.00
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Takalar	1	Lap	4,400,000,000	1	Lap	4,400,000,000	0.00
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil	Kab. Takalar	2	Lap	12,944,260,000	2	Lap	3,944,260,000	(9,000,000,000.00)

		Kabupaten/Kota						
5.02.02.2.05	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**Persentase data yang telah diolah dan diimplementasikan melalui sistem informasi Keuangan daerah (SIPD)**	**Kab. Takalar**		**810,000,000**		**810,000,000**	**0.00**
5.02.02.2.05.01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Kab. Takalar	1 Dok	10,000,000	1 Dok	10,000,000	0.00
5.02.02.2.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kab. Takalar	12 Dok	800,000,000	12 Dok	800,000,000	0.00
5.02.03.2	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Peraturan Perundang - Undangan**	**Kab. Takalar**		**1,217,365,800**		**1,217,365,800**	**0.00**
5.02.03.2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase cakupan pengelulaan barang milik daerah**	**Kab. Takalar**		**1,217,365,800**		**1,217,365,800**	**0.00**
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang disusun	Kab. Takalar	2 Dok	211,695,000	2 Dok	211,695,000	0.00
5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Takalar	1 Dok	19,333,600	1 Dok	19,333,600	0.00
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Takalar	2 Dok	25,378,800	2 Dok	25,378,800	0.00
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Takalar	1 Dok	37,052,800	1 Dok	37,052,800	0.00
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatusahaan Barang Milik Daerah	Kab. Takalar	38 Lap	111,436,800	38 Lap	111,436,800	0.00
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Kab. Takalar	38 Lap	78,225,200	38 Lap	78,225,200	0.00
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Takalar	38 Lap	152,022,400	38 Lap	152,022,400	0.00

5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Kab. Takalar	38	Lap	194,896,400	38	Lap	194,896,400	0.00
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. Takalar	38	Dok	57,438,500	38	Dok	57,438,500	0.00
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Takalar	38	Lap	83,782,200	38	Lap	83,782,200	0.00
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	Kab. Takalar	2	Lap	246,104,100	2	Lap	246,104,100	0.00
	JUMLAH TOTAL					**200,969,968,717**			**192,388,227,524**	**(8,581,740,966.00)**

TC 33
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2024

No.	Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra BKAD	Realisasi capaian RENJA 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penaggung Jawab
										Target Kinerja 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						BIDANG KEUANGAN		**25 %**	**25 %**	**25 %**	**25 %**	**215,873,306,965**	**200,969,968,717**	**192,235,275,260**						**26 %**	**192,837,663,269**	
	5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase pengunaan anggaran tepat sasaran**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**181,601,323,900**	**176,876,189,409**	**168,009,746,009**						**100 %**	**166,247,174,315**	
	5	**02**	**02**	**2.01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Persentase cakupan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah**	**100 %**	100 %	100 %	100 %	**2,680,000,000**	**1,408,323,360**	**1,308,920,960**						**100 %**	**1,318,914,400**	
	5	02	02	2.01	01	Koordinasi Dan Penyusunan KUA Dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	8 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	150,000,000	90,000,000	96,960,000	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				2 Dok	90,000,000.00	BKAD
	5	02	02	2.01	02	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan KUA Dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	8 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	150,000,000	90,000,000	85,000,000	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				2 Dok	90,000,000.00	BKAD
	5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dok 152	38 Dok	38 Dok	38 Dok	210,000,000	139,980,000	131,340,000	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				35 Dok	140,980,000.00	BKAD
	5	02	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dok 152	38 Dok	38 Dok	38 Dok	210,000,000	139,980,000	141,580,000	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				35 Dok	124,571,040.00	BKAD

	5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	152	Dok	38	Dok	38	Dok	38	Dok	210,000,000	90,000,000	81,360,000	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				35	Dok	90,000,000.00	BKAD
	5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	152	Dok	38	Dok	38	Dok	38	Dok	210,000,000	90,000,000	103,237,600	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				35	Dok	90,000,000.00	BKAD
	5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	8	Dok	2	Dok	2	Dok	2	Dok	210,000,000	110,000,000	102,440,000	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				2	Dok	110,000,000.00	BKAD
	5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubaha APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	8	Dok	2	Dok	2	Dok	2	Dok	210,000,000	150,000,000	150,000,000	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				2	Dok	150,000,000.00	BKAD
	5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	4	Dok	1	Dok	1	Dok	1	Dok	360,000,000	70,040,000	70,040,000	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				1	Dok	70,040,000.00	BKAD
	5	02	02	2.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	4	Dok	1	Dok	1	Dok	1	Dok	120,000,000	88,000,000	96,640,000	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				1	Dok	88,000,000.00	BKAD
	5	02	02	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	4	Dok	1	Dok	1	Dok	1	Dok	120,000,000	80,323,360	80,323,360	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				1	Dok	80,323,360.00	BKAD
	5	02	02	2.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	4	Dok	1	Dok	1	Dok	1	Dok	120,000,000	70,000,000	70,000,000	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				1	Dok	70,000,000.00	BKAD
	5	02	02	2.01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	200	Org			50	Org	50	Org	400,000,000	200,000,000	100,000,000	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				50	Org	125,000,000.00	BKAD

	5	**02**	**02**	**2.03**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**persentase cakupan koordinasi dan pelaporan keuangan daerah**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**1,174,800,000**	**1,418,227,700**	**1,417,827,700**	**Kab. Takalar**					**100**	**%**	**1,243,229,620**	
	5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	96	Lap	24	Lap	24	Lap	38,500,000	76,014,800	76,014,800	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				24	Lap	76,014,720.00	BKAD
	5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1,200	Dok	300	Dok	300	Dok	286,000,000	251,004,800	251,004,800	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				300	Dok	201,005,100.00	BKAD
	5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	76	Lap	19	Lap	19	Lap	220,000,000	172,970,000	172,970,000	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				19	Lap	122,970,700.00	BKAD
	5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	8	Dok	2	Dok	2	Dok	157,300,000	218,835,900	218,835,900	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				2	Dok	168,838,800.00	BKAD

	5	02	02	2.03	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	8	Dok	2	Dok	2	Dok	2	Dok	165,000,000	430,505,900	187,237,900	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				2	Dok	430,504,000.00	BKAD
	5	02	02	2.03	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	8	Dok	2	Dok	2	Dok	2	Dok	88,000,000	190,861,000	190,861,000	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				2	Dok	165,861,000.00	BKAD
	5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	8	Perbup	2	Perbup	2	Perbup	2	Perbup	220,000,000	78,035,300	320,903,300	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				-	Perbup	78,035,300.00	BKAD
	5	02	02	2.02		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Persentase cakupan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**1,430,990,000**	**1,338,094,200**	**1,571,453,200**	Kab. Takalar					**100**	**%**	**1,733,094,200**	
	5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	48	Dok	12	Dok	12	Dok	12	Dok	173,030,000	199,701,400	199,701,400	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				12	Dok	199,701,400.00	BKAD
	5	02	02	2.02	02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	8	Lap	2	Lap	2	Lap	2	Lap	33,000,000	52,108,400	52,108,400	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				2	Lap	52,108,400.00	BKAD
	5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	3,360	Dok	840	Dok	840	Dok	840	Dok	187,000,000	109,676,000	109,676,000	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				840	Dok	109,676,000.00	BKAD
	5	02	02	2.02	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	20,000	Dok	5,000	Dok	5,000	Dok	5,000	Dok	88,000,000	73,407,600	73,407,600	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				5,000	Dok	73,407,600.00	BKAD

	5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	104	Dok	26	Dok	26	Dok	26	Dok	110,000,000	115,202,000	155,072,000	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				26	Dok	115,202,000.00	BKAD
	5	02	02	2.02	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	48	Dok	12	Dok	12	Dok	12	Dok	53,460,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				12	Dok	30,000,000.00	BKAD
	5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dannPenyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	192	Lap	48	Lap	48	Lap	48	Lap	187,000,000	212,473,600	204,470,600	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				48	Lap	212,473,600.00	BKAD

	5	02	02	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	4 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	44,000,000	41,640,200	41,640,200	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				1 Dok	41,640,200.00	BKAD
	5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dok 736	184 Dok	Dok 184	184 Dok	165,000,000	133,036,000	133,036,000	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				184 Dok	133,036,000.00	BKAD
	5	02	02	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	4 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	93,500,000	32,765,800	32,765,800	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				1 Dok	32,765,800.00	BKAD
	5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Org 280	70 Org	70 Org	70 Org	297,000,000	338,083,200	539,575,200	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				70 Org	733,083,200.00	BKAD
	5	**02**	**02**	**2.04**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Persentase cakupan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah**	**% 100**	**100 %**	**% 100**	**100 %**	**175,482,533,900**	**171,901,544,149**	**162,901,544,149**	**Kab. Takalar**					**100 %**	**161,141,936,095**	

	5	02	02	2.04	02	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	4	Lap	1	Lap	1	Lap	1	Lap	33,531,250,000	15,340,710,149	15,340,710,149	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				1	Lap	13,977,668,185	BKAD
	5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	16	Lap	4	Lap	4	Lap	4	Lap	133,304,589,500	139,216,574,000	139,216,574,000	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				4	Lap	139,253,523,000	BKAD
	5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	4	Lap	1	Lap	1	Lap	1	Lap	4,000,000,000	4,400,000,000	4,400,000,000	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				1	Lap	4,800,000,000	BKAD
	5	02	02	2.04	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	8	Lap	2	Lap	2	Lap	2	Lap	4,646,694,400	12,944,260,000	3,944,260,000	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				2	Lap	3,110,744,910	BKAD
	5	**02**	**02**	**2.05**		**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**Persentase data yang telah diolah dan diimplementasikan melalui sistem informasi Keuangan daerah (SIPD)**									**833,000,000**	**810,000,000**	**810,000,000**	**Kab. Takalar**					**100**	**%**	**810,000,000**	
	5	02	02	2.05	01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	4	Dok	1	Dok	1	Dok	1	Dok	33,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				1	Dok	10,000,000	BKAD
	5	02	02	2.05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	48	Dok	12	Dok	12	Dok	12	Dok	800,000,000	800,000,000	800,000,000	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				12	Dok	800,000,000	BKAD
	5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Peraturan Perundang - Undangan**									**1,948,198,309**	**1,217,365,800**	**1,217,365,800**	**Kab. Takalar**							**1,232,332,980**	

	5	**02**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase cakupan pengelulaan barang milik daerah**					**1,948,198,309**	**1,217,365,800**	**1,217,365,800**	**Kab. Takalar**					**100 %**	**1,232,332,980**	
	5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang disusun	8 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	439,650,750	211,695,000	211,695,000	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				2 Dok	216,107,300.00	BKAD
	5	02	03	2.01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	4 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	78,366,750	19,333,600	19,333,600	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				1 Dok	19,330,800.00	BKAD
	5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	8 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	99,618,750	25,378,800	25,378,800	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				2 Dok	25,378,580.00	BKAD
	5	02	03	2.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	4 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	99,618,750	37,052,800	37,052,800	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				1 Dok	37,052,400.00	BKAD
	5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatusahaan Barang Milik Daerah	152 Lap	38 Lap	38 Lap	38 Lap	328,897,976	111,436,800	111,436,800	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				6 Lap	109,650,000.00	BKAD
	5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	152 Lap	38 Lap	38 Lap	38 Lap	181,970,250	78,225,200	78,225,200	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				35 Lap	61,799,000.00	BKAD
	5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	152 Lap	38 Lap	38 Lap	38 Lap	143,451,000	152,022,400	152,022,400	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				35 Lap	169,044,100.00	BKAD
	5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	152 Lap	38 Lap	38 Lap	38 Lap	155,670,515	194,896,400	194,896,400	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				35 Lap	159,895,300.00	BKAD

	5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	152	Dok	38	Dok	38	Dok	38	Dok	118,024,018	57,438,500	57,438,500	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				35	Dok	57,382,200.00	BKAD
	5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	152	Lap	38	Lap	38	Lap	38	Lap	113,179,550	83,782,200	83,782,200	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				35	Lap	83,782,100.00	BKAD
	5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	8	Lap	2	Lap	2	Lap	2	Lap	189,750,000	246,104,100	246,104,100	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				2	Lap	292,911,200.00	BKAD
	5	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan penunjang urusan pemerintahan**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**32,323,784,756**	**22,876,413,508**	**23,008,163,451**	**Kab. Takalar**					**100**	**%**	**25,358,155,974**	
	5	**01**	**02**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase cakupan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**294,000,000**	**304,120,000**	**304,120,000**	**Kab. Takalar**					**100**	**%**	**354,150,000**	
	5	01	02	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	Dok	2	Dok	2	Dok	2	Dok	42,000,000	46,450,000	46,450,000	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				2	Dok	58,570,000.00	BKAD
	5	01	02	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8	Dok	2	Dok	2	Dok	2	Dok	37,000,000	37,000,000	37,000,000	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				2	Dok	37,000,000.00	BKAD
	5	01	02	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8	Dok	2	Dok	2	Dok	2	Dok	37,000,000	37,000,000	37,000,000	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				2	Dok	37,000,000.00	BKAD

	5	01	02	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	8	Dok	2	Dok	2	Dok	2	Dok	37,000,000	37,000,000	37,000,000	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				2	Dok	37,000,000.00	BKAD
	5	01	02	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	8	Dok	2	Dok	2	Dok	2	Dok	37,000,000	37,000,000	37,000,000	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				2	Dok	37,000,000.00	BKAD
	5	01	02	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8	Lap	2	Lap	2	Lap	2	Lap	42,000,000	42,120,000	42,120,000	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				2	Lap	40,000,000.00	BKAD
	5	01	02	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	Lap	4	Lap	4	Lap	4	Lap	62,000,000	67,550,000	67,550,000	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				4	Lap	107,580,000.00	BKAD
	5	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase cakupan administrasi keuangan PD**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**26,804,328,548**	**20,286,945,708**	**20,133,993,671**	Kab. Takalar					**100**	**%**	**21,924,387,034**	
	5	01	02	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dn Tunjangan ASN	400	org/bln	100	org/bln	100	org/bln	100	org/bln	26,314,438,500.00	19,873,617,308	19,720,665,271	Kab. Takalar	DAU/DBH Pajak Rokok				100	org/bln	21,511,056,734	BKAD
	5	01	02	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	Dok	12	Dok	12	Dok	12	Dok	57,360,250	59,360,300	59,360,300	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				12	Dok	59,361,700.00	BKAD

	5	01	02	02	03	Pelaksanaan Penatausahaandan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	40,000	Dok	10,000	Dok	10,000	Dok	10,000	Dok	148,321,130	109,221,200	109,221,200	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				11,000	Dok	109,217,900.00	BKAD
	5	01	02	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	48	Dok	12	Dok	12	Dok	12	Dok	61,672,154	51,672,200	51,672,200	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				12	Dok	51,672,010.00	BKAD
	5	01	02	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir TahunSKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Lap	1	Lap	1	Lap	1	Lap	62,536,514	52,536,400	52,536,400	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				1	Lap	52,536,380.00	BKAD
	5	01	02	02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	24	Dok	6	Dok	6	Dok	6	Dok	55,000,000	50,000,100	50,000,100	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				6	Dok	50,004,050.00	BKAD
	5	01	02	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	8	Lap	2	Lap	2	Lap	2	Lap	65,000,000	55,000,100	55,000,100	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				2	Lap	55,000,300.00	BKAD
	5	01	02	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4	Lap	1	Lap	1	Lap	1	Lap	40,000,000	35,538,100	35,538,100	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				1	Lap	35,537,960.00	BKAD
	5	**01**	**02**	**03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase cakupan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**259,000,000**	**225,380,100**	**225,380,100**	Kab. Takalar					**100**	**%**	**228,522,900**	
	5	01	02	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	8	Dok	2	Dok	2	Dok	2	Dok	25,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				2	Dok	30,000,000.00	BKAD

	5	01	02	03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4	Dok	1	Dok	1	Dok	1	Dok	38,000,000	30,081,700	30,081,700	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				1	Dok	30,081,700.00	BKAD
	5	01	02	03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKP	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	4	Lap	1	Lap	1	Lap	1	Lap	26,000,000	29,000,000	29,000,000	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				1	Lap	29,000,000.00	BKAD
	5	01	02	03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Lap	1	Lap	1	Lap	1	Lap	30,000,000	23,664,000	23,664,000	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				1	Lap	23,664,000.00	BKAD
	5	01	02	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKP	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	16	Lap	4	Lap	4	Lap	4	Lap	74,000,000	46,640,000	46,640,000	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				4	Lap	49,782,800.00	BKAD
	5	01	02	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Lap	1	Lap	1	Lap	1	Lap	33,000,000	27,500,000	27,500,000	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				1	Lap	27,500,000.00	BKAD
	5	01	02	03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKP	4	Dok	1	Dok	1	Dok	1	Dok	33,000,000	38,494,400	38,494,400	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				1	Dok	38,494,400.00	BKAD
	5	01	02	05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**258,000,000**	**181,258,700**	**181,258,700**						**100**	**%**	**172,908,700**	
	5	01	02	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	4	pkt	1	pkt	1	pkt	1	pkt	85,000,000	43,350,000	43,350,000	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				1	pkt	35,000,000.00	BKAD
	5	01	02	05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	48	dok	12	dok	12	dok	12	dok	38,000,000	35,992,800	35,992,800	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				12	dok	35,992,800.00	BKAD

	5	01	02	05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	48	dok	12	dok	12	dok	12	dok	135,000,000	101,915,900	101,915,900	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				12	dok	101,915,900.00	BKAD
	5	**01**	**02**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentasi cakupan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**2,030,000,000**	**1,238,057,000**	**1,204,752,900**						100	%	**1,151,815,300**	
	5	01	02	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24	pkt	6	pkt	6	pkt	6	pkt	20,000,000	15,627,400	15,627,400	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				6	pkt	15,627,400.00	BKAD
	5	01	02	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	pkt	3	pkt	3	pkt	3	pkt	52,000,000	168,681,000	523,140,100	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				3	pkt	361,295,000.00	BKAD
	5	01	02	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	pkt	1	pkt	1	pkt	1	pkt	66,000,000	16,333,400	16,333,400	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				1	pkt	16,333,400.00	BKAD
	5	01	02	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8	pkt	2	pkt	2	pkt	2	pkt	772,000,000	418,103,700	30,340,500	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				2	pkt	141,664,000.00	BKAD
	5	01	02	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8	pkt	2	pkt	2	pkt	2	pkt	70,000,000	12,364,000	12,364,000	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				2	pkt	12,000,000.00	BKAD
	5	01	02	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8	pkt	2	pkt	2	pkt	2	pkt	135,000,000	125,000,000	125,000,000	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				2	pkt	123,000,000.00	BKAD
	5	01	02	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48	pkt	12	pkt	12	pkt	12	pkt	33,000,000	21,600,000	21,600,000	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				12	pkt	21,600,000.00	BKAD
	5	01	02	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	lap	12	lap	12	lap	12	lap	830,000,000	421,352,000	421,352,000	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				12	lap	421,300,000.00	BKAD

	5	01	02	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 dok	1 dok	1 dok	1 dok	52,000,000	38,995,500	38,995,500	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				1 dok	38,995,500.00	BKAD
	5	01	02	07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase cakupan pengadaan barang milik daerah urusan pemerintah daerah**	**% 100**	**100 %**	**% 100**	**100 %**	**-**	**-**	**-**	Kab. Takalar					100 %	**195,605,000**	
	5	01	02	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas	12 unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	-	0	0	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				3 Unit	195,605,000.00	BKAD
	5	01	02	08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**% 100**	**100 %**	**% 100**	**100 %**	**1,808,456,208**	**603,680,000**	**640,686,080**	Kab. Takalar					100 %	**935,767,040**	
	5	01	02	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	458,456,208	289,280,000	289,280,000	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				12 laporan	296,264,000.00	BKAD
	5	01	02	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	48 Lap	12 Lap	12 Lap	12 lap	1,350,000,000	314,400,000	351,406,080	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				12 laporan	639,503,040.00	BKAD
	5	01	02	09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**% 100**	**100 %**	**% 100**	**100 %**	**870,000,000**	**36,972,000**	**317,972,000**	Kab. Takalar					100 %	**395,000,000**	
	5	01	02	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	112 unit	28 unit	28 unit	28 unit	210,000,000	19,822,000	282,792,000	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				28 unit	124,670,000.00	BKAD
	5	01	02	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 unit	5 unit	5 unit	5 unit	-	0	0	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				5 unit	58,820,000.00	BKAD

	5	01	02	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	1 unit	1 unit	1 unit	550,000,000	10,450,000	10,450,000	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				1 unit	154,660,000.00	BKAD
	5	01	02	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 unit	5 unit	5 unit	5 unit	110,000,000	6,700,000	24,730,000	Kab. Takalar	DBH Pajak Rokok				5 unit	56,850,000.00	BKAD
						JUMLAH TOTAL						**215,873,306,965**	**200,969,968,717**	**192,235,275,260**							**192,837,663,269**	

RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) TAHUN 2024

KABUPATEN : TAKALAR
PERANGKAT DAERAH : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program /Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Kinerja 2024			Pagu Indikatif (Rp)			Keterangan
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		BIDANG KEUANGAN				25 %	25 %	25 %	215,873,306,965	200,969,968,717	192,235,275,260	
	5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase pengunaan anggaran tepat sasaran	Persentase pengunaan anggaran tepat sasaran	100%	100%	100%	181,601,323,900	176,876,189,409	168,009,746,009	
	5 02 02 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase cakupan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Persentase cakupan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	100 %	100 %	100 %	2,680,000,000	1,408,323,360	1,308,920,960	
	5 02 02 2.01 01	Koordinasi Dan Penyusunan KUA Dan PPAS	Koordinasi Dan Penyusunan KUA Dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dok	2 Dok	2 Dok	150,000,000	90,000,000	96,960,000	
	5 02 02 2.01 02	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan KUA Dan Perubahan PPAS	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan KUA Dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dok	2 Dok	2 Dok	150,000,000	90,000,000	85,000,000	
	5 02 02 2.0 03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	38 Dok	38 Dok	38 Dok	210,000,000	139,980,000	131,340,000	

				1			SKPD										
	5	02	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	38	Dok	38	Dok	38	Dok	210,000,000	139,980,000	141,580,000	
	5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	38	Dok	38	Dok	38	Dok	210,000,000	90,000,000	81,360,000	
	5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	38	Dok	38	Dok	38	Dok	210,000,000	90,000,000	103,237,600	
	5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	Dok	2	Dok	2	Dok	210,000,000	110,000,000	102,440,000	
	5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubaha APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubaha APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2	Dok	2	Dok	2	Dok	210,000,000	150,000,000	150,000,000	
	5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1	Dok	1	Dok	1	Dok	360,000,000	70,040,000	70,040,000	
	5	02	02	2.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1	Dok	1	Dok	1	Dok	120,000,000	88,000,000	96,640,000	

	5	02	02	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1	Dok	1	Dok	1	Dok	120,000,000	80,323,360	80,323,360	
	5	02	02	2.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1	Dok	1	Dok	1	Dok	120,000,000	70,000,000	70,000,000	
	5	02	02	2.01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50	Org	50	Org	50	Org	400,000,000	200,000,000	100,000,000	
	5	**02**	**02**	**2.03**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**persentase cakupan koordinasi dan pelaporan keuangan daerah**	**persentase cakupan koordinasi dan pelaporan keuangan daerah**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**1,174,800,000**	**1,418,227,700**	**1,417,827,700**	
	5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	24	Lap	24	Lap	24	Lap	38,500,000	76,014,800	76,014,800	
	5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	300	Dok	300	Dok	300	Dok	286,000,000	251,004,800	251,004,800	
	5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan,	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	19	Lap	19	Lap	19	Lap	220,000,000	172,970,000	172,970,000	

							Triwulanan dan Semesteran											
	5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2	Dok	2	Dok	2	Dok	157,300,000	218,835,900	218,835,900	
	5	02	02	2.03	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2	Dok	2	Dok	2	Dok	165,000,000	430,505,900	187,237,900	
	5	02	02	2.03	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2	Dok	2	Dok	2	Dok	88,000,000	190,861,000	190,861,000	
	5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	2	Perbup	2	Perbup	2	Perbup	220,000,000	78,035,300	320,903,300	
	5	**02**	**02**	**2.02**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Persentase cakupan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan**	**Persentase cakupan koordinasi dan pengelolaan**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**1,430,990,000**	**1,338,094,200**	**1,571,453,200**	

								daerah	**perbendaharaan daerah**								
	5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12	Dok	12	Dok	12	Dok	173,030,000	199,701,400	199,701,400	
	5	02	02	2.02	02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2	Lap	2	Lap	2	Lap	33,000,000	52,108,400	52,108,400	
	5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	840	Dok	840	Dok	840	Dok	187,000,000	109,676,000	109,676,000	
	5	02	02	2.02	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	5,000	Dok	5,000	Dok	5,000	Dok	88,000,000	73,407,600	73,407,600	
	5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	26	Dok	26	Dok	26	Dok	110,000,000	115,202,000	155,072,000	
	5	02	02	2.02	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan	12	Dok	12	Dok	12	Dok	53,460,000	30,000,000	30,000,000	

									Bank								
	5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dannPenyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dannPenyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	48 Lap	48 Lap	48 Lap	187,000,000	212,473,600	204,470,600	
	5	02	02	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	44,000,000	41,640,200	41,640,200	

						Optimalisasi Kas	Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas									
	5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	184	Dok	184	Dok	184	Dok	165,000,000	133,036,000	133,036,000	
	5	02	02	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1	Dok	1	Dok	1	Dok	93,500,000	32,765,800	32,765,800	
	5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	70	Org	70	Org	70	Org	297,000,000	338,083,200	539,575,200	
	5	**02**	**02**	**2.04**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Persentase cakupan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah**	**Persentase cakupan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**175,482,533,900**	**171,901,544,149**	**162,901,544,149**	
	5	02	02	2.04	02	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan	Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan	Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan	1	Lap	1	Lap	1	Lap	33,531,250,000	15,340,710,149	15,340,710,149	

						Pinjaman Pemerintah Daerah	Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah									
	5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	4	Lap	4	Lap	4	Lap	133,304,589,500	139,216,574,000	139,216,574,000	
	5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1	Lap	1	Lap	1	Lap	4,000,000,000	4,400,000,000	4,400,000,000	
	5	02	02	2.04	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	2	Lap	2	Lap	2	Lap	4,646,694,400	12,944,260,000	3,944,260,000	
	5	**02**	**02**	**2.05**		**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**Persentase data yang telah diolah dan diimplementasikan melalui sistem informasi Keuangan daerah (SIPD)**	**Persentase data yang telah diolah dan diimplementasikan melalui sistem informasi Keuangan daerah (SIPD)**							**833,000,000**	**810,000,000**	**810,000,000**	
	5	02	02	2.05	01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	1	Dok	1	Dok	1	Dok	33,000,000	10,000,000	10,000,000	
	5	02	02	2.05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	12	Dok	12	Dok	12	Dok	800,000,000	800,000,000	800,000,000	
	5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Peraturan Perundang - Undangan**	**Persentase Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Peraturan Perundang -**							**1,948,198,309**	**1,217,365,800**	**1,217,365,800**	

									Undangan								
	5	**02**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase cakupan pengelulaan barang milik daerah**	**Persentase cakupan pengelulaan barang milik daerah**						**1,948,198,309**	**1,217,365,800**	**1,217,365,800**	
	5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang disusun	Jumlah Standar Harga yang disusun	2	Dok	2	Dok	2	Dok	439,650,750	211,695,000	211,695,000	
	5	02	03	2.01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1	Dok	1	Dok	1	Dok	78,366,750	19,333,600	19,333,600	
	5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2	Dok	2	Dok	2	Dok	99,618,750	25,378,800	25,378,800	
	5	02	03	2.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	Dok	1	Dok	1	Dok	99,618,750	37,052,800	37,052,800	
	5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatusahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatusahaan Barang Milik Daerah	38	Lap	38	Lap	38	Lap	328,897,976	111,436,800	111,436,800	
	5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	38	Lap	38	Lap	38	Lap	181,970,250	78,225,200	78,225,200	
	5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	38	Lap	38	Lap	38	Lap	143,451,000	152,022,400	152,022,400	
	5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi	38	Lap	38	Lap	38	Lap	155,670,515	194,896,400	194,896,400	

								Milik Daerah	Penilaian Barang Milik Daerah									
	5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	38	Dok	38	Dok	38	Dok	118,024,018	57,438,500	57,438,500	
	5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	38	Lap	38	Lap	38	Lap	113,179,550	83,782,200	83,782,200	
	5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	2	Lap	2	Lap	2	Lap	189,750,000	246,104,100	246,104,100	
	5	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan penunjang urusan pemerintahan**	**Persentase cakupan penunjang urusan pemerintahan**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**32,323,784,756**	**22,876,413,508**	**23,008,163,451**	
	5	**01**	**02**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase cakupan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Persentase cakupan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**294,000,000**	**304,120,000**	**304,120,000**	
	5	01	02	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dok	2	Dok	2	Dok	42,000,000	46,450,000	46,450,000	
	5	01	02	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-	2	Dok	2	Dok	2	Dok	37,000,000	37,000,000	37,000,000	

									SKPD								
	5	01	02	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	Dok	2	Dok	2	Dok	37,000,000	37,000,000	37,000,000	
	5	01	02	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	Dok	2	Dok	2	Dok	37,000,000	37,000,000	37,000,000	
	5	01	02	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	Dok	2	Dok	2	Dok	37,000,000	37,000,000	37,000,000	
	5	01	02	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Lap	2	Lap	2	Lap	42,000,000	42,120,000	42,120,000	
	5	01	02	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Lap	4	Lap	4	Lap	62,000,000	67,550,000	67,550,000	
	5	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase cakupan administrasi keuangan PD**	**Persentase cakupan administrasi keuangan PD**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**26,804,328,548**	**20,286,945,708**	**20,133,993,671**	

	5	01	02	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dn Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dn Tunjangan ASN	100	org/ bln	100	org /bln	100	org/bl n	26,314,438,500.0 0	19,873,617,308	19,720,665,271	
	5	01	02	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dok	12	Dok	12	Dok	57,360,250	59,360,300	59,360,300	
	5	01	02	02	03	Pelaksanaan Penatausahaandan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaandan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	10,000	Dok	10,000	Dok	10,000	Dok	148,321,130	109,221,200	109,221,200	
	5	01	02	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	Dok	12	Dok	12	Dok	61,672,154	51,672,200	51,672,200	
	5	01	02	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir TahunSKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir TahunSKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Lap	1	Lap	1	Lap	62,536,514	52,536,400	52,536,400	
	5	01	02	02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	6	Dok	6	Dok	6	Dok	55,000,000	50,000,100	50,000,100	
	5	01	02	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	2	Lap	2	Lap	2	Lap	65,000,000	55,000,100	55,000,100	
	5	01	02	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Lap	1	Lap	1	Lap	40,000,000	35,538,100	35,538,100	

	5	01	02	03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase cakupan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	**Persentase cakupan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**259,000,000**	**225,380,100**	**225,380,100**	
	5	01	02	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	Dok	2	Dok	2	Dok	25,000,000	30,000,000	30,000,000	
	5	01	02	03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dok	1	Dok	1	Dok	38,000,000	30,081,700	30,081,700	
	5	01	02	03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKP	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKP	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	Lap	1	Lap	1	Lap	26,000,000	29,000,000	29,000,000	
	5	01	02	03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Lap	1	Lap	1	Lap	30,000,000	23,664,000	23,664,000	
	5	01	02	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKP	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKP	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Lap	4	Lap	4	Lap	74,000,000	46,640,000	46,640,000	
	5	01	02	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Lap	1	Lap	1	Lap	33,000,000	27,500,000	27,500,000	
	5	01	02	03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKP	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKP	1	Dok	1	Dok	1	Dok	33,000,000	38,494,400	38,494,400	
	5	01	02	05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Persentase cakupan administrasi kepegawaian**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**258,000,000**	**181,258,700**	**181,258,700**	

									perangkat daerah								
	5	0 1	0 2	0 5	0 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1	pkt	1	pkt	1	pkt	85,000,000	43,350,000	43,350,000	
	5	0 1	0 2	0 5	0 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	dok	12	dok	12	dok	38,000,000	35,992,800	35,992,800	
	5	0 1	0 2	0 5	0 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	dok	12	dok	12	dok	135,000,000	101,915,900	101,915,900	
	5	0 1	0 2	0 6		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentasi cakupan administrasi umum perangkat daerah**	**Persentasi cakupan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**2,030,000,000**	**1,238,057,000**	**1,204,752,900**	
	5	0 1	0 2	0 6	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	pkt	6	pkt	6	pkt	20,000,000	15,627,400	15,627,400	
	5	0 1	0 2	0 6	0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	pkt	3	pkt	3	pkt	52,000,000	168,681,000	523,140,100	
	5	0 1	0 2	0 6	0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	pkt	1	pkt	1	pkt	66,000,000	16,333,400	16,333,400	
	5	0 1	0 2	0 6	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	pkt	2	pkt	2	pkt	772,000,000	418,103,700	30,340,500	
	5	0 1	0 2	0 6	0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	pkt	2	pkt	2	pkt	70,000,000	12,364,000	12,364,000	

	5	01	02	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	pkt	2	pkt	2	pkt	135,000,000	125,000,000	125,000,000	
	5	01	02	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	pkt	12	pkt	12	pkt	33,000,000	21,600,000	21,600,000	
	5	01	02	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	lap	12	lap	12	lap	830,000,000	421,352,000	421,352,000	
	5	01	02	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	dok	1	dok	1	dok	52,000,000	38,995,500	38,995,500	
	5	**01**	**02**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase cakupan pengadaan barang milik daerah urusan pemerintah daerah**	**Persentase cakupan pengadaan barang milik daerah urusan pemerintah daerah**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**-**	**-**	**-**	
	5	01	02	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas	Jumlah Unit Kendaraan Dinas	3	Unit	3	Unit	3	Unit	-	0	0	
	5	**01**	**02**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Persentase cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**1,808,456,208**	**603,680,000**	**640,686,080**	
	5	01	02	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Lap	12	Lap	12	Lap	458,456,208	289,280,000	289,280,000	
	5	01	02	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12	Lap	12	Lap	12	lap	1,350,000,000	314,400,000	351,406,080	

	5	**01**	**02**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Persentase cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**870,000,000**	**36,972,000**	**317,972,000**	
	5	01	02	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	28	unit	28	unit	28	unit	210,000,000	19,822,000	282,792,000	
	5	01	02	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	unit	5	unit	5	unit	-	0	0	
	5	01	02	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	1	unit	1	unit	550,000,000	10,450,000	10,450,000	
	5	01	02	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	unit	5	unit	5	unit	110,000,000	6,700,000	24,730,000	
						JUMLAH TOTAL										**215,873,306,965**	**200,969,968,717**	**192,235,275,260**	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja OPD) Tahun 2024 merupakan acuan perencanaan kegiatan OPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPD. Adapun penyusunan Perubahan Renja OPD merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Perubahan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 tidak terlepas dari Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar 2023-2026. Terdapat beberapa kegiatan prioritas yang dilaksanakan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar antaranya adalah percepatan pencapaian target indikator RPD Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026, serta peningkatan perencanaan pembangunan dalam mencapai peningkatan daya saing daerah.

Perubahan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 ini diharapkan dapat benar-benar dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024.

Takalar, 1 Agustus 2024

KEPALA BKAD,

Drs. RAHMANSYAH LANTARA, M.Si.
Pembina Utama Muda, (IV/c)
NIP. 19701106 199003 1 002

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja Perubahan Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah mengacu kepada Renja Provinsi dan Renja Kementerian untuk menjaga konsistensi Program dan Kegiatan yang menjadi prioritas nasional dan provinsi.

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja perangkat daerah adalah penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Kepala Organisasi Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun berikutnya. Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya.

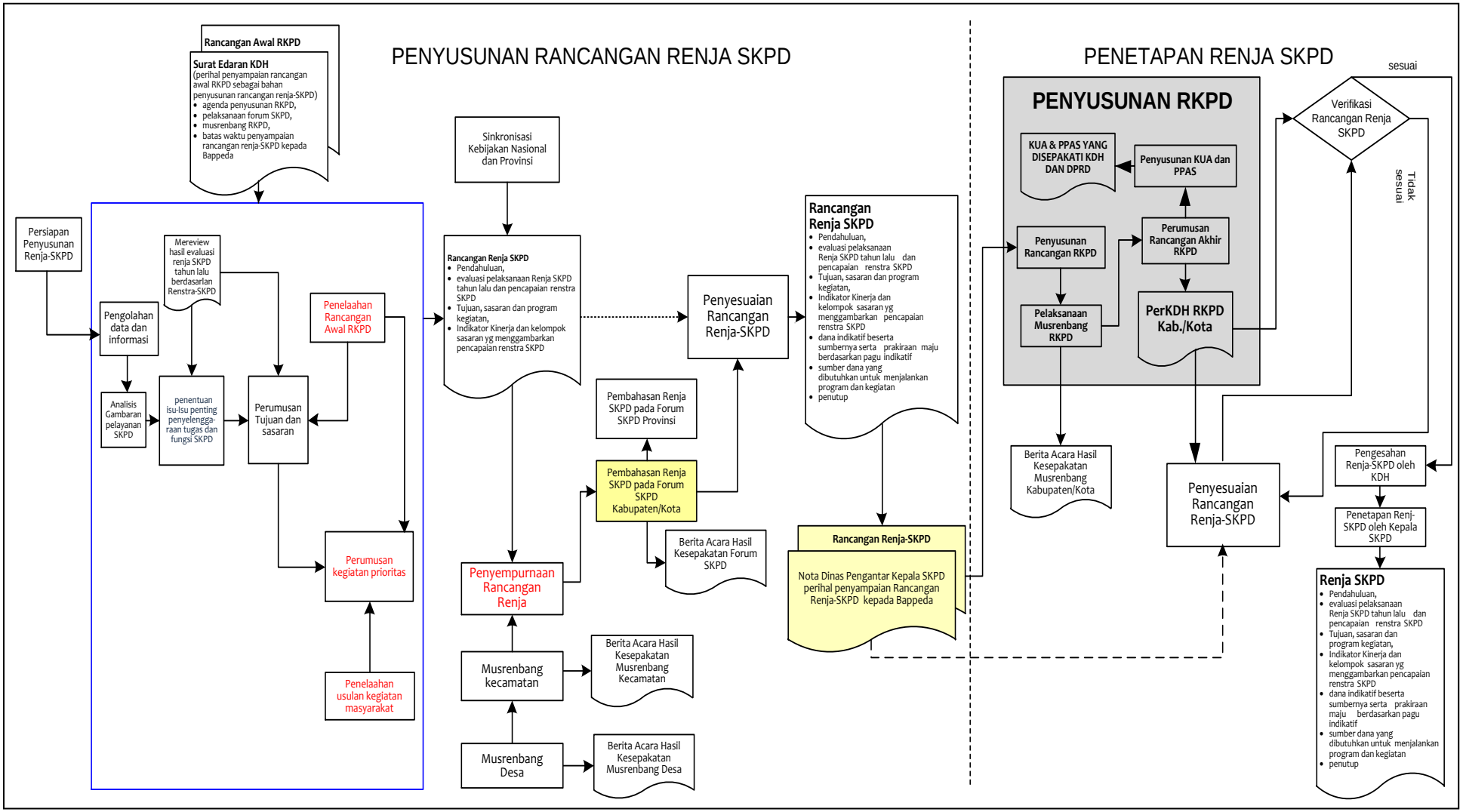
PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD
PENETAPAN RENJA SKPD
Rancangan Awal RKPD
Surat Edaran KDH
(perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan renja-SKPD)
agenda penyusunan RKPD,
pelaksanaan forum SKPD,
musrenbang RKPD,
batas waktu penyampaian rancangan renja-SKPD kepada Bappeda
Persiapan Penyusunan Renja-SKPD
Mereview hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu berdasarlan Renstra-SKPD
Pengolahan data dan informasi
Analisis Gambaran pelayanan SKPD
penentuan isu-Isu penting penyelengga-raan tugas dan fungsi SKPD
Perumusan Tujuan dan sasaran
Penelaahan Rancangan Awal RKPD
Perumusan kegiatan prioritas
Penelaahan usulan kegiatan masyarakat
Sinkronisasi Kebijakan Nasional dan Provinsi
Rancangan Renja SKPD
Pendahuluan,
evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD
Tujuan, sasaran dan program kegiatan,
Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD
Penyempurnaan Rancangan Renja
Musrenbang kecamatan
Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kecamatan
Musrenbang Desa
Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Desa
Pembahasan Renja SKPD pada Forum SKPD Provinsi
Pembahasan Renja SKPD pada Forum SKPD Kabupaten/Kota
Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD
Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD
Rancangan Renja SKPD
Pendahuluan,
evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD
Tujuan, sasaran dan program kegiatan,
Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD
dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif
sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan
penutup
Rancangan Renja-SKPD
Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renja-SKPD kepada Bappeda
PENYUSUNAN RKPD
KUA & PPAS YANG DISEPAKATI KDH DAN DPRD
Penyusunan KUA dan PPAS
Penyusunan Rancangan RKPD
Perumusan Rancangan Akhir RKPD
Pelaksanaan Musrenbang RKPD
PerKDH RKPD Kab./Kota
Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kabupaten/Kota
Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD
Verifikasi Rancangan Renja SKPD
sesuai
Tidak sesuai
Pengesahan Renja-SKPD oleh KDH
Penetapan Renj-SKPD oleh Kepala SKPD
Renja SKPD
Pendahuluan,
evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD
Tujuan, sasaran dan program kegiatan,
Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD
dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif
sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan
penutup

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang sesuai dengan Undang – undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan perundangan lainnya yang mengatur Standar Operasional Tata Kerja (SOTK), kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang diacu dalam perencanaan dan penganggaran di Badan/Dinas/Kecamatan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan,Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005- 2025;

8. Peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023- 2026;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 Nomor)

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar adalah sebagai berikut

1. Untuk menjabarkan program dan kegiatan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar ke dalam program/kegiatan tahunan;
2. Menyiapkan acuan bagi RAPBD;
3. Menyiapkan kerangka evaluasi kinerja program/kegiatan tahunan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar.

Tujuan penyusunan Renja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar adalah agar terbangun konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematik Renja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar Tahun 2024, meliputi :

BAB I Pendahuluan, menjelaskan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar Tahun 2024.

BAB II Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan II Tahun 2024, memuat tentang evaluasi pelaksanaan rencana kerja sampai dengan Triwulan II (Tahun 2024) sesuai dengan renstra dan tupoksi OPD, analisis kinerja pelayanan OPD, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas fungsi

OPD, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III Rencana Kerja Dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar, memuat tentang Rencana Program Kegiatan Perubahan Renja dan pendanaan OPD khusus untuk Tahun 2024.

BAB IV Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Sampai dengan Triwulan II

Evaluasi kinerja dimaksudkan untuk memberikan nilai atas suatu capaian kegiatan. Evaluasi kinerja setidaknya menunjukkan penilaian atas keberhasilan/kegagalan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategis.

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan lebih lanjut pengukuran kinerja, oleh karena itu evaluasi kinerja didasarkan pada ukuran ukuran dan indikator serta hasil pengukuran kinerja.

Evaluasi kinerja bertujuan agar dapat diketahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala pelaksanaan program/kegiatan dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan selanjutnya.

Adapun Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar sampai dengan Triwulan II dapat dilihat pada Laporan Evaluasi Hasil Renja Triwulan II Periode Pelaksanaan 2024.

TABEL II-I

FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA
KABUPATEN TAKALAR
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024

No	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun **2023-2026** (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu **(2023)**		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun **2024**) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Per Bulan						Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Kinerja Per Bulan						Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun **2024**)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun **2024**) yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun **2024** (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun **2024**)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun (5)	
									K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	Januari		Februari		Maret		I		April		Mei		Juni		II											
																K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3					4	5	6			7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		25		26 = 25/8 x 100%		27 = 7 + 25		28 = 27/6 x 100%	
		2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																																			
		2	**16**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI**				**23.180.782.543**		**10.058.816.696**		**6.542.136.842**		**137.512.593**		**288.527.241**		**712.916.729**		**1.138.956.563**		**691.654.979**		**503.776.549**		**650.437.243**		**1.845.868.771**		**2.984.825.334**	50,70%	45,62%		**13.043.642.030**		
		2	16	1			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**Persen**	**19.240.782.543**	**20,93%**	**2.802.644.906**	**100%**	**3.595.579.124**	**0%**	**137.512.593**	**0%**	**130.127.241**	**3%**	**289.186.529**	**4%**	**556.826.363**	**28%**	**336.926.779**	**7%**	**211.542.349**	**3%**	**344.067.343**	**38%**	**892.536.471**	**42%**	**1.449.362.834**	**42,07%**	**40,31%**	**27%**	**4.252.007.740**	**26,97%**	**22,10%**
	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	2	16	1	2.01		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Diskominfo**	10 0%	Persen	120.000.000	14,29%	10.525.600	10 0%	27.620.000	0,0 0%	-	0,0 0%	-	0,0 0%	840.79	0,0 0%	840.79	50,00%	1.168.500	0,0 0%	598.8	10,00%	5.561.700	60,0 0%	7.329.000	60,0 0%	8.169.790	60,0 0%	29,58%	35,71%	18.695.390	35,71%	15,58%
		2	16	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	Dokumen	20.000.000	2	4.950.000	2	4.000.000	-	-	-	-	-	595.49	-	595.49	1	369	-	261	-	513.8	1	1.143.800	1	1,739,290	50%	43%	3	6.689.290	38%	33%
		2	16	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	Dokumen	20.000.000	1	2.500.000	1	4.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	62	-	165.8	-	743	1	970.8	1	970,800	100%	24%	2	3.470.800	50%	17%
		2	16	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	Dokumen	20.000.000	-	-	1	7.620.000	-	-	-	-	-	64.475	-	64.475	1	465	-	-	-	1.544.475	1	2.009.475	1	2,073,950	100%	27%	1	2.073.950	25%	10%

		2	16	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4	Dokumen	20.000.000	-	-	1	4.000.000	-	-	-	-	-	170.925	-	170.925	1	86.5	-	86	-	2.140.425	1	2.312.925	1	2,483,850	100%	62%	1	2.483.850	25%	12%
		2	16	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4	Dokumen	20.000.000	-	-	1	4.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	-	-	-	86	-	86,000	0%	2%	-	86	0%	0%
		2	16	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4	Dokumen	20.000.000	1	3.075.600	4	4.000.000	-	-	-	-	-	9.9	-	9.9	1	186	-	-	1	620	2	806	2	815,900	50%	20%	3	3.891.500	75%	19%
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																																	**66,67%**	**29,94%**					
Predikat Kinerja Kegiatan																																	**S**	**SR**					
	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	2	16	1	2.02		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase terlaksananya administrasi keuangan**	100%	Persen	18.701.301.519	25%	2.587.499.825	100%	3.400.740.295	4%	137.512.593	4%	130.127.241	7%	275.303.274	15%	542.943.108	15%	328.926.714	7%	196.410.791	11%	334.668.743	34%	860.006.248	49%	1.402.949.356	49%	41%	37,07%	3.990.449.181	37%	21%
		2	16	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	1624	Orang	15.123.106.479	406	1.934.897.497	406	2.239.499.095	29	137.512.593	28	130.127.241	56	274.767.106	113	542.406.940	28	156.920.618	28	138.586.854	56	276.204.517	112	571.711.989	225	1,114,118,929	55%	50%	631	3.049.016.426	39%	20%
								Jumlah ASN yang menerima TPP	1392	Orang	3.518.195.040	348	650.359.928	348	1.149.241.200	-	-	-	-	-	-	-	-	84	170.703.596	28	57.450.437	28	58.232.726	140	286.386.759	140	286,386,759	40%	25%	488	936.746.687	35%	27%
		2	16	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	Dokumen	20.000.000	-	-	1	4.000.000	-	-	-	-	-	332.168	-	332.168	1	723.5	-	231.5	-	231.5	1	1.186.500	1	1,518,668	100%	38%	1	1.518.668	25%	8%
		2	16	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	4	Laporan	20.000.000	1	2.242.400	1	4.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	100%	0%	2	2.242.400	50%	11%
		2	16	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	Laporan	20.000.000	-	-	1	4.000.000	-	-	-	-	-	204	-	204	0,35	579	-	142	-	-	0	721	0	925,000	35%	23%	0	925	9%	5%
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																																	**66,13%**	**27,15%**					

| | | |

| | | |

																																			3%	20 %	
Predikat Kinerja Kegiatan																																		SR	SR	
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)																																		47,09%	18,50 %	
Predikat Kinerja Program																																		SR	SR	
Faktor pendorong pencapaian kinerja:																																				
Faktor penghambat: Tidak tercapainya target Kinerja dikarenakan masih ada Sub Kegiatan yang lambat proses penyerapan Anggaran pada awal tahun 2024 dikarenakan lambatnya Proses Rekon Aset oleh Bendahara Barang																																				
Faktor penghambat: Masih ada sub Kegiatan yang tidak bisa terealisasi Anggarannya, dikarenakan Sub Kegiatan belum bisa terlaksana berdasarkan waktu pelaksanaan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan																																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):																																				

		2	**16**	**2**			**Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**	**Persentase tingkat kepuasan Masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik pemerintah daerah**	**100 %**	**Persen**	**480.000.000**	**25 %**	**2.461.680.422**	**100 %**	**1.843.839.140**	**0 %**	**-**	**0 %**	**-**	**9 %**	**337.346.200**	**9%**	**337.346.200**	**20 %**	**266.855.800**	**20 %**	**206.669.200**	**20 %**	**210.249.400**	**60 %**	**683.774.400**	**68,84 %**	**1.021.120.600**	**68,84%**	**55,38 %**	**27,33 %**	**3.482.801.022**	**27,33 %**	**725,58%**
	Terselenggaranya Kehumasan, Komunikasi dan Informasi Publik dalam rangka keterbukaan informasi publik	2	16	2	2.01		**Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/kota**	**Persentase tata kelola informasi dan komunikasi publik**	100%	Persen	480.000.000	25 %	2.461.680.422	100%	1.843.839.140	0%	-	0%	-	9%	337.346.200	9%	337.346.200	20 %	266.855.800	20 %	206.669.200	20 %	210.249.400	60 %	683.774.400	69 %	1.021.120.600	68,84%	55,38%	27,33%	3.482.801.022	27,33%	725,58%
		2	16	2	2.01	4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	8	Dokumen	120.000.000	2	59.980.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	2	59.980.000	25 %	50%
		2	16	2	2.01	5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Media Komunikasi Publik	8	Dokumen	80.000.000	2	303.908.922	2	321.339.140	-	-	-	-	-	2.166.200	-	2.166.200	1	74.829.200	-	13.289.500	-	19.523.300	1	107.642.000	1	109.808.200	50%	34 %	3	413.717.122	38 %	517 %
		2	16	2	2.01	6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Informasi Publik	4	Dokumen	80.000.000	1	99.400.000	1	12.500.000	-	-	-	-	-	1.830.000	-	1.830.000	-	990.6	1	2.029.700	-	726.1	1	3.746.400	1	5.576.400	100 %	45 %	2	104.976.400	50 %	131 %
		2	16	2	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah sumber daya kapasitas sumber daya komunikasi publik	120	Orang	160.000.000	30	99.760.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	30	99.760.000	25 %	62%
		2	16	2	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan Komunitas dalam mendiseminasikan informasi program atau kebijakan	8	Dokumen	40.000.000	2	1.898.631.500	2	1.510.000.000	-	-	-	-	0,44	333.350.000	0	333.350.000	-	191.036.000	-	191.350.000	1	190.000.000	1	572.386.000	1	905.736.000	72%	60 %	3	2.804.367.500	43 %	7011 %
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																																		44,42%	27,75 %	
Predikat Kinerja Kegiatan																																		SR	SR	
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)																																		44,42%	27,75 %	

Predikat Kinerja Program																																	SR	SR		
Faktor pendorong pencapaian kinerja:																																			
Faktor penghambat: Tidak tercapainya target Kinerja dikarenakan masih ada Sub Kegiatan yang lambat proses penyerapan Anggaran pada awal tahun 2024 dikarenakan lambatnya Proses Rekon Aset oleh Bendahara Barang																																			
Faktor penghambat: Tidak tercapainya Realisasi Anggaran pada Program ini karena Anggaran Sub Kegiatan terlaksana akan di realisasikan berdasarkan Anggaran Kas Sub Kegiatan yang telah ditetapkan.																																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):																																			

		2	**16**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi**	**100 %**	**Persen**	**2.680.000.000**	**18,75 %**	**4.093.632.298**	**100 %**	**1.077.718.578**	**0 %**	**-**	**3 %**	**158.400.000**	**2 %**	**84.281.400**	**5%**	**242.681.400**	**22 %**	**83.708.600**	**22 %**	**82.832.400**	**2%**	**93.585.200**	**44,92 %**	**260.126.200**	**49,78 %**	**502.807.600**	**49,78%**	**46,65 %**	**27,45 %**	**4.596.439.898**	**27,45 %**	**171,51%**
	Meningkatnya dukungan sistem elektronik dalam pelayanan publik	2	16	3	2.02		**Pengelolaan E Goverment di lingkup Pemerintah DaerahKabupaten /Kota**	**Persentase tata kelola e-government**	100%	Persen	2.680.000.000	18,75%	4.093.632.298	100%	1.077.718.578	0%	-	3%	158.400.000	2%	84.281.400	5%	242.681.400	22 %	83.708.600	22 %	82.832.400	2%	93.585.200	45 %	260.126.200	50 %	502.807.600	49,78%	46,65%	27,45%	4.596.439.898	27,45%	171,51%
		2	16	3	2.02	1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4	Dokumen	40.000.000	1	320.410.870	1	5.000.000	-	-	-	-	-	1.680.800	-	1.680.800	-	360	-	984	-	1.015.200	-	2.359.200	-	4.040.000	0%	81 %	1	324.450.870	25 %	811 %
		2	16	3	2.02	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi	4	Dokumen	100.000.000	-	-	1	4.000.000	-	-	-	-	-	475.2	-	475.2	1	1.800.000	-	-	-	-	1	1.800.000	1	2.275.200	100 %	57 %	1	2.275.200	25 %	2%
		2	16	3	2.02	7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan	4	Unit	460.000.000	1	502.858.400	1	83.000.000	-	-	-	-	-	1.403.600	-	1.403.600	-	-	-	356.4	-	10.300.000	-	10.656.400	-	12.060.000	0%	15 %	1	514.918.400	25 %	112 %
		2	16	3	2.02	9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan masterplan smart city	4	Dokumen	2.080.000.000	1	3.270.363.028	1	982.718.578	-	-	0,16	158.400.000	0,08	80.721.800	0	239.121.800	0,08	81.000.000	0,08	79.813.000	0,08	81.770.000	0	242.583.000	0	481.704.800	49%	49 %	1	3.752.067.828	37 %	180 %
		2	16	3	2.02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistem SPBE	4	Dokumen	40.000.000	-	-	1	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	548.6	1	1.679.000	-	500	1	2.727.600	1	2.727.600	100 %	91 %	1	2.727.600	25 %	7%
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																																	**37,23%**	**50,31 %**		
Predikat Kinerja Kegiatan																																	SR	SR		
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)																																	**37,23%**	**50,31 %**		
Predikat Kinerja Program																																	SR	SR		
Faktor pendorong pencapaian kinerja:																																			
Faktor penghambat: Tidak tercapainya target Kinerja dikarenakan masih ada Sub Kegiatan yang lambat proses penyerapan Anggaran pada awal tahun 2024 dikarenakan lambatnya Proses Rekon Aset oleh Bendahara Barang																																			
Faktor penghambat: Tidak tercapainya Realisasi Anggaran pada Program ini karena Anggaran Sub Kegiatan terlaksana akan di realisasikan berdasarkan Anggaran Kas Sub Kegiatan yang telah ditetapkan.																																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):																																			

		2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																																				
		2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK										-		-		2.102.600		2.102.600		2.054.900		1.878.500		1.429.200		5.362.600		7.465.200				560.764.370					
		2	20	2			Program Penyelenggaraan Statistik sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data Statistik dalam menyusun Perencanaan Pembangunan daerah	100%	Persen	600.000.000	25,00%	553.299.170	100%	15.000.000	0%	-	0%	-	10%	2.102.600	9,62%	2.102.600	21%	2.054.900	12%	1.878.500	2%	1.429.200	42,31%	5.362.600	51,92%	7.465.200	51,92%	49,77%	37,98%	560.764.370	37,98%	93,46%			
	Tersusunnya data Pembangunan dan statistik terintegrasi	2	20	2	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral diLingkup Daerah Kabupaten / Kota	Persentase terselenggaranya statistik sektoral	100%	Persen	600.000.000	25,00%	553.299.170	100%	15.000.000	0%	-	0%	-	10%	2.102.600	9,62%	2.102.600	21%	2.054.900	12%	1.878.500	2%	1.429.200	42,31%	5.362.600	51,92%	7.465.200	51,92%	49,77%	37,98%	560.764.370	37,98%	93,46%			
		2	20	2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengelahan,Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	4	Dokumen	80.000.000	1	184.032.700	1	5.000.000	-	-	-	-	-	1.110.600	-	1.110.600	-	-	1	913.6	-	358.3	1	1.271.900	1	2.382.500	100%	48%	2	186.415.200	50%	233%			
		2	20	2	2.01	2	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM pemerintah daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	200	Orang	200.000.000	50	319.948.000	50	5.000.000	-	-	-	-	5	530.6	5	530.6	10	1.033.200	5	488.2	5	541.2	20	2.062.600	25	2.593.200	50%	52%	75	322.541.200	38%	161%			
		2	20	2	2.01	3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah metadata statistik sektoral	4	Dokumen	320.000.000	1	49.318.470	1	5.000.000	-	-	-	-	-	461.4	-	461.4	1	1.021.700	-	476.7	-	529.7	1	2.028.100	1	2.489.500	100%	50%	2	51.807.970	50%	16%			
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																																			83,33%	49,77%				
Predikat Kinerja Kegiatan																																			T	SR				
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)																																			83,33%	49,77%				
Predikat Kinerja Program																																			T	SR				

Faktor pendorong pencapaian kinerja:

Faktor penghambat: Tidak tercapainya target Kinerja dikarenakan masih ada Sub Kegiatan yang lambat proses penyerapan Anggaran pada awal tahun 2024 dikarenakan lambatnya Proses Rekon Aset oleh Bendahara Barang

Faktor penghambat: Tidak tercapainya Realisasi Anggaran pada Program ini karena Anggaran Sub Kegiatan terlaksana akan di realisasikan berdasarkan Anggaran Kas Sub Kegiatan yang telah ditetapkan.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):

		2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																																				
		2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																																				
		2	21	2			Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase Tingkat keamanan Informasi Pemerintah	100%	Persen	180.000.000	28%	147.559.900	100%	10.000.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	20%	2.108.900	9%	854.1	11%	1.106.100	41%	4.069.100	40,91%	4.069.100	40,91%	40,69%	39,74%	151.629.000	39,74%	84,24%			

	Meningkatnya Pengelolaan Persandian dalam rangka perlindungan data perangkat daerah	2	21	2	2.01		**Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota**	**Persentase pengamanan informasi pemerintah**	100%	Persen	180.000.000	28,21%	147.559.900	100%	10.000.000	0%	-	0%	-	0%	-	0,00%	-	20%	2.108.900	9%	854.1	11%	1.106.100	40,91%	4.069.100	40,91%	4.069.100	40,91%	40,69%	39,74%	151.629.000	39,74%	84,24%
		2	21	2	2.01	3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik	4	Laporan	20.000.000	1	47.559.900	1	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	955.6	-	-	0,25	923.9	1	1.879.500	1	1.879.500	50%	38%	2	49.439.400	38%	247%
		2	21	2	2.01	4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	35	Perangkat Daerah	160.000.000	10	100.000.000	10	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.153.300	1	854.1	1	182.2	4	2.189.600	4	2.189.600	40%	44%	14	102.189.600	40%	64%
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																																		**45,00%**	**40,69%**				
Predikat Kinerja Kegiatan																																		**SR**	**SR**				
Faktor pendorong pencapaian kinerja:																																							
Faktor penghambat: Tidak tercapainya target Kinerja dikarenakan masih ada Sub Kegiatan yang lambat proses penyerapan Anggaran pada awal tahun 2024 dikarenakan lambatnya Proses Rekon Aset oleh Bendahara Barang																																							
Faktor penghambat: Masih ada sub Kegiatan yang tidak bisa terealisasi Anggarannya, dikarenakan Sub Kegiatan belum bisa terlaksana berdasarkan waktu pelaksanaan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan																																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):																																							
Total Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)																																		**51,41%**	**37,40%**				
Predikat Kinerja Program																																		**R**	**SR**				

Takalar, 2024

Kepala Dinas,

SYAINAL MANNAN, S.S.T.P., M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19770505 199711 1 001

2.1.1 Rekapitulasi Jumlah Laporan, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian 2024 yang Terakomodir di APBD 2024

Informasi tentang Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD 2024 yang terakomodir di APBD Tahun 2024 memberikan gambaran seberapa banyak jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar pada Tahun 2024. Adapun jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan dimaksud dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel II-2

Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang ada dalam APBD 2024

APBD 2024							
No. Urut	Perangkat Daerah	Jmlh Prog.	Jmlh Keg	Jmlh Sub Keg.	Indikator		
					Jmlh Prog.	Jmlh Keg	Jmlh Sub Keg.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	5	12	37	5	12	38
TOTAL		**5**	**12**	**37**	**5**	**12**	**38**

Sumber : RKPD Pokok 2024, dan SIPD 2024

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah program sebanyak 5, jumlah kegiatan 12, dan jumlah sub kegiatan 2437 Sedangkan jumlah indikator program sebanyak 5, jumlah indikator kegiatan sebanyak 12, dan jumlah indikator sub kegiatan sebanyak 38.

2.1.2 Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja APBD Triwulan II Tahun 2024

Informasi tentang realisasi anggaran kegiatan memberikan gambaran seberapa besar anggaran yang telah terserap pada Triwulan II untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan

dalam APBD 2024. Gambaran sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-3
Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Pada APBD
Kabupaten Takalar Tahun 2024
Hingga Triwulan II

No. Urut	Perangkat Daerah	Pagu APBD	Realisasi S/D Triwulan II	Persentase	
		(Rp)	(Rp)	Fisik	Keu
1	*2*	*3*	*6*	*7*	*8*
1	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	6.542.136.842	2.984.825.334	53,56%	45,80%
TOTAL		**6.542.136.842**	**2.984.825.334**	**53,56%**	**45,80%**

Sumber : Laporan Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Triwulan II, diolah Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik dan Persandian

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa total jumlah anggaran yang terealisasi dalam APBD untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar Tahun 2024 sebesar Rp. 2.984.825.334,-. Realisasi serapan anggaran dari pelaksanaan kegiatan hingga triwulan II adalah sebesar 53,56 persen dengan capaian realisasi fisik sebesar 45,80 persen.

2.1.2.1 Evaluasi Capaian Pendanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dalam Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian 2024

Informasi tentang capaian pendanaan memberikan gambaran capaian berdasarkan realisasi anggaran pada masing-masing perangkat daerah dimulai dari program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terdapat pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Capaian kinerja pendanaan tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori **Rendah** untuk perangkat daerah dengan realisasi 0 – 20%, Kategori **Sedang** Untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran lebih besar dari >20 – 43 persen dan kategori **Tinggi** untuk perangkat daerah dengan

realisasi anggaran diatas 43 persen. Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 43 persen didasarkan atas tingkat capaian yang diharapkan untuk triwulan II adalah 43 persen, sehingga jika terdapat capaian realisasi pendanaan lebih dari 43 persen dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi.

1. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Program

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pendanaan pada level program untuk Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dengan menggunakan kategori tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa jumlah program yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sebanyak 5 program dengan rincian capaian yang masuk pada kategori rendah ada sebanyak 1 program (realisasinya 0-20 persen). Untuk capaian kinerja kategori sedang sebanyak 1 program (realisasi >20-43 persen), dan untuk capaian kinerja kategori tinggi sebanyak 3 program (realisasi diatas 43 persen).

2. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Kegiatan

Untuk evaluasi pelaksanaan Capaian kinerja pendanaan pada level kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dapat dijelaskan bahwa terdapat 12 kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada Tahun 2024. Dari keseluruhan kegiatan tersebut terdapat 4 kegiatan yang realisasi pendanaannya hingga triwuan II masih dalam kategori rendah yaitu 0 – 20 persen, sedang yang berada dalam kategori sedang sebanyak 5 kegiatan, dan kategori tinggi dengan capaian realisasi diatas 43 persen sebanyak 3 kegiatan.

3. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level sub Kegiatan

Adapun evaluasi capaian kinerja pendanaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian pada level sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 37 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2024 terdapat 14 sub kegiatan yang capaian kinerja pendanaanya masih rendah, sedangkan yang masuk dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan

sedang terdapat 13 sub kegiatan, dan 10 sub kegiatan dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan tinggi sebab telah dapat mencapai realisasi pendanaan lebih dari 43 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan II.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas capaian kinerja pendanaan berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-4
Rekapitulasi Capaian Kinerja Pendanaan berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Takalar Triwulan II Tahun 2024

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Kegiatan	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan		
			0 - 20%	>20 – 43%	> 43%		0 - 20%	>20 – 43%	> 43%		0 - 20%	>20 – 43%	> 43%
			(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	5	1	1	3	12	4	5	3	37	14	13	10
TOTAL		**5**	**1**	**1**	**3**	**12**	**4**	**5**	**3**	**37**	**14**	**13**	**10**

Sumber : Laporan Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Triwulan II, diolah Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

2.1.2.2 Evaluasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dalam Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian 2024

Informasi tentang capaian kinerja memberikan gambaran capaian kinerja realisasi target kinerja pada masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Capaian kinerja tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori **Rendah** untuk perangkat

daerah dengan realisasi 0 – 20 persen, Kategori **Sedang** untuk perangkat daerah dengan realisasi kinerja lebih besar dari 20 – 43 persen dan kategori **Tinggi** untuk perangkat daerah dengan realisasi kinerja diatas 43 persen. Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 43 persen didasarkan atas tingkat capaian yang diharapkan untuk triwulan II adalah 43 persen, sehingga jika terdapat capaian realisasi kinerja lebih dari 45 persen dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi.

1. Evaluasi Capaian Kinerja Outcome pada Level Program

Untuk evaluasi pelaksanaan kinerja outcome pada level program dapat digambarkan sebagai berikut: untuk pencapaian target kinerja program pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dapat dijelaskan bahwa dari 5 Program yang dilaksanakan sampai dengan triwulan kedua capaian kinerja program yang masih masuk pada kategori rendah atau dibawah 20 persen terdapat 0 program, untuk pencapaian kinerja dengan kategori sedang (diatas 20-43 persen) terdapat 1 program, selebihnya sebanyak 4 program yang capaian kinerja masuk dalam kategori tinggi yang pencapaiannya lebih dari 43 persen pada triwulan II Tahun 2024.

2. Evaluasi Capaian Kinerja Output Pada Level Kegiatan

Sebagai gambaran pencapaian target kinerja kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 12 kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan kedua terdapat 1 kegiatan yang capaian kinerjanya kategori masih rendah atau dibawah 20 persen, sedangkan yang capaian kinerja kategori sedang terdapat 5 kegiatan, selebihnya terdapat 6 kegiatan yang capaian kinerja masuk dalam kategori pencapaian lebih dari 43 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan II Tahun 2024.

3. Evaluasi Capaian Kinerja Output Pada Level sub Kegiatan

Sebagai gambaran pencapaian target kinerja sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 37 sub kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan kedua dapat dijelaskan bahwa yang capaian kinerja masih

rendah atau dibawah 20 persen terdapat 7 sub kegiatan, sedangkan yang capaian kinerja sedang sebanyak 8 kegiatan, selebihnya yang capaian kinerja masuk dalam kategori tinggi sebanyak 22 sub kegiatan, yaitu pencapaian lebih dari 43 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan II Tahun 2024.

Adapun gambaran pencapaian target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan dapat digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel II-5
Rekapitulasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
RKPD Kabupaten Takalar Triwulan II
Tahun 2024

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Kinerja			Jumlah Kegiatan	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Kinerja			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Kinerja		
			0 - 20 %	>20 – 43 %	> 43 %		0 - 20 %	>20 – 43 %	> 43 %		0 - 20 %	>20 – 43 %	> 43 %
			(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	5	0	1	4	12	1	5	6	37	7	8	22
TOTAL		**5**	**0**	**1**	**4**	**12**	**1**	**5**	**6**	**37**	**7**	**8**	**22**

Sumber : Laporan Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Triwulan II, diolah Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Takalar tahun 2024 dapat dievaluasi dan dianalisa kemajuan kinerjanya berdasarkan dari laporan evaluasi kinerja RENJA Triwulan II tahun 2024, dengan hasil tersebut bisa disimpulkan faktor-faktor apa saja yang mendukung ataupun

yang menghambat proses pencapaian kinerja itu sebagai bahan pertimbangan dalam merancang perencanaan dinas di triwulan berikutnya.

2.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan hasil evaluasi kinerja Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang mengacu pada RPJMD Kabupaten dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukan target yang harus dicapai berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4, Dinas Komunikasi dan Informatika perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Takalar. Indikator Kinerja Utama merupakan acuan kinerja yang digunakan Dinas Komunikasi dan Informatika

untuk menetapkan Rencana Kerja, menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis.

2.2.3 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Seperti yang telah kami jelaskan pada BAB II bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar sampai saat ini belum ada Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM). Oleh karena itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Takalar tidak bisa memberikan informasi sejauh mana capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) tersebut.

2.2.4 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs (Sustainable Development Goals) merupakan program pembangunan jangka Panjang dari tahun 2016 – 2030 dengan tujuan yang lebih konprehensif yaitu menyoroti isu kependudukan dan masalah lingkungan. Dengan lamanya jangka waktu pelaksanaan sampai 2030, maka kegiatan monitoring dan evaluasi menjadi hal yang sangat penting. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan setiap tahun. Hal ini tidak lain agar program/kegiatan yang dilaksanakan dapat dipastikan telah sesuai dengan rencana, selain itu agar target kegiatan SDGs yang telah ditetapkan oleh pemerintah dapat berjalan sesuai dengan jalurnya. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Takalar melakukan pemutkhiran data setiap sekali dalam setahun di akhir tahun. Berikut capaian data teknis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Takalar tahun 2024.

Tabel II-6

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

Kabupaten Takalar

No	Indikator	IKU	IKK	SPM	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	
					2021 (n-2)	2022 (n-1)	2023 (n)	2024 (n+1)	2022 (n-2)	2023 (n-1)	2024 (n+1)	2025 (n+2)
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12		13	14
1	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	√			100%	100%	100%	100%	0%		50%	50%
2	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	√			100%	100%	100%	100%	69%	100%	85%	85%
3	Cakupan Pegembangan dan Pemberdayaan KIM tingkat kecamatan	√			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Rata-rata Kunjungan Web Site Pemda setiap Bulan	√			750	800	800	800		100%	1200	
5	Rasio berita positif dan negatif di media tentang Pemerintah Kab Takalar (sentimen index)	√			+55%; -45%	+60%; -40%	+70%; -30%	+80%; -20%			+70%; -30%	
6	Cakupan Pelanggaran Pengelola Informasi yang ditertibkan		√		100%	100%	100%	100%			30%	

No	Indikator	IKU	IKK	SPM	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	
					2021 (n-2)	2022 (n-1)	2023 (n)	2024 (n+1)	2022 (n-2)	2023 (n-1)	2024 (n+1)	2025 (n+2)
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12		13	14
7	Tingkat keamanan informasi pemerintah		√		100%	100%	100%	100%	100%	2,63%	40%	40%
8	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		√		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah		√		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan		√		100%	100%	100%	100%			100%	
11	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah		√		100%	100%	100%	100%			55%	
12	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam			√	N/A	N/A	85%	90%	235.649		85%	85%
13	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband			√	N/A	N/A	75%	80%			80%	
14	Proporsi individu yang menggunakan internet			√	N/A	N/A	62%	67%	121.038		85%	85%

No	Indikator	IKU	IKK	SPM	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	
					2021 (n-2)	2022 (n-1)	2023 (n)	2024 (n+1)	2022 (n-2)	2023 (n-1)	2024 (n+1)	2025 (n+2)
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12		13	14
15	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan			√	N/A	N/A	1	2			2	
16	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan			√	N/A	N/A	20%	25%			15%	

Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Takalar ; 2024; diolah

2.3 Hambatan, Upaya Pencapaian, dan Rekomendasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2024

2.3.1 Hambatan Dalam Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian 2024 sampai dengan Triwulan ke II

Hambatan dan kendala dalam pelaksanakan kegiatan triwulan kedua dipengaruhi oleh:

1. Adanya peraturan pemerintah pusat yang menyebabkan harus dilakukan penyesuaian anggaran.
2. Belum meratanya kemampuan, pemahaman, pemanfaatan, pengelolaan dan penerapan teknologi informasi dan manajemen yang berbasis kinerja.
3. Masih terkendalanya pelaksanaan kegiatan yang ditimbulkan oleh penggabungan program dan kegiatan yang mengalami peleburan.
4. Terdapatnya beberapa kegiatan yang proses pengadaan barang dan jasanya belum dilaksanakan, baik dikarenakan masih dalam tahapan proses lelang ataupun belum masuk pada tahapan kegiatannya.
5. Perlunya Dukungan keterampilan tambahan bagi sumberdaya aparatur pengelola kegiatan untuk melakukan pengukuran atau estimasi perencanaan program terhadap alokasi anggaran yang dialokasikan baik yang dipengaruhi oleh fluktuasi aktifitas kedewanan maupun kalkulasi evaluasi pada program dan kegiatan.
6. Beberapa komponen kegiatan pada sistem aplikasi perencanaan terkait kodefikasi program/kegiatan dan penganggaran mengalami perubahan sehingga kegiatan belum dapat dilaksanakan ini berdampak pada kode rekening belanja.

2.3.2 Upaya Dalam Pencapaian Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian 2024 sampai dengan Triwulan ke II

Merujuk dari faktor penghambat Pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah sampai dengan triwulan ke II tentunya mengalami berbagai kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Secara normatif dapat disampaikan beberapa upaya yang dilakukan dalam pencapaian keberhasilan kinerja disampaikan sebagai berikut:

1. Komitmen pimpinan dan Koordinasi OPD yang baik untuk melaksanakan kegiatan secara maksimal;
2. Adanya koordinasi/konsultasi yang sinergi antar struktur jabatan internal dan eksternal serta adanya komunikasi yang terjalin antar pemimpin dan yang dipimpin dalam organisasi;
3. Tersedianya Sarana dan prasarana pendukung yang memadai;
4. Penyerapan program dan kegiatan masing-masing bidang dan kesekretariatan berjalan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan;
5. Adanya pedoman/dokumen Standar Pelayanan/SOP dan regulasi yang sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan;
6. Kualitas SDM yang mampu, terampil dan memadai serta memiliki komitmen dan motivasi untuk melakukan tugas dan fungsi secara maksimal dalam rangka memberikan pelayanan prima;
7. Adanya komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.3.3 Rekomendasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian 2024 Triwulan selanjutnya

Berdasarkan uraian atas faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian kinerja, SKPD menyampaikan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Meningkatkan komunikasi dan integrasi program di lingkungan Bappelitbangda serta pengendalian dan evaluasi dilakukan terus menerus.
2. Peran aktif seluruh KPA dan PPTK didalam mengawal pelaksanaan Program dan Kegiatan yang berjalan.
3. Peran aktif Kepala Kecamatan selaku PA didalam mengawasi, mengontrol dan membuat kebijakan serta keputusan;
4. Peran aktif Sub Bagian Perencanaan Program didalam berkoordinasi termasuk memberikan informasi, sosialisasi maupun kebijakan-kebijakan lainnya;
5. Perlunya tenaga SDM yang berkompeten didalam perencanaan;
6. Peningkatan kualitas SDM aparatur serta jumlah staf yang berkompeten;
7. Peningkatan sarana dan prasarana operasional sesuai dengan kebutuhan;
8. Perlunya melakukan penyusunan Renstra SKPD yang baik, diawali dengan orientasi dan melibatkan seluruh pejabat/staf;
9. Meningkatkan komunikasi dan integrasi Program dan Kegiatan antar instansi, baik pada tataran perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan;
10. Perlunya melakukan evaluasi dan monitoring secara terus menerus dan berkelanjutan yang diiringi dengan pengelolaan data yang baik;
11. Pelaksanaan kegiatan sesuai Renstra dan RPJMD.
12. Dalam penyusunan dokumen perencanaan tahap berikutnya memiliki data dan informasi yang akurat, sehingga perencanaan dan penganggaran dapat dilakukan dengan baik, efektif, dan efisien.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Sebagaimana Tema Pembangunan Kabupaten Takalar tahun 2024 adalah "Optimalisasi Pengembangan Sumber Daya Alam untuk Pemulihan Ekonomi Menuju Takalar Yang Unggul,Sejahtera dan Bermartabat" dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Takalar Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas kehidupan keagamaan dan kualitas ketertiban,ketentraman dan perlindungan masyarakat.
2. Penegakan kedisplinan dan meningkatkan kinerja aparatur serta penata kelolaan pemerintahan daerah dan desa.

Sedangkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Takalar tahun 2024 sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 dan termuat dalam RKPD Kabupaten Takalar tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel III-1

Tujuan dan Sasaran RKPD Kabupaten Takalar 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2024
1	*2*	*3*	*4*
Meningkatkan martabat tatanan sosial kemasyarakatan	Meningkatnya kualitas kehidupan keagamaan	Adanya regulasi terkait peningkatan kualitas kehidupan beragama	1
	Meningkatnya kualitas ketertban ,ketentraman dan perlindungan masyarakat	% Penanganan angka kriminalitas	96
		% Gangguan ketertiban dan ketentraman yang tertangani	98

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2024
1	*2*	*3*	*4*
		Cakupan bencana/kebakaran yang tertangani	
		Tingkat waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	98
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik yang berkualitas	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih akuntable dan demokratis	Jumlah temuan BPK	20
		Nilai LAKIP/SAKIP	A
		Opini BPK atas laporan keuangan	WTP
	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan public	%Indeks kepuasan masyarakat	80
		% Capaian SPM Pelayan dasar (pendidikan,kesehatan,PUPR,Perumahan dan kawasan permukiman	85

Dengan memperhatikan tema dan prioritas serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian serta tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2023-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian adalah sebagai berikut :

Tabel III-2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2021	Target Kinerja Tahunan			
				2023	2024	2025	2026
1	Tujuan 1: Meningkatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Belum Dinilai	Belum Dinilai	Belum Dinilai	Belum Dinilai	Belum Dinilai
	Sasaran 1.1 : Meningkatnya dukungan sistem elektronik dalam pelayanan publik	persentase penerapan e-government yang terintegrasi	0%	50%	80%	100%	100%
	Sasaran 1.2 : Terselenggaranya Kehumasan, Komunikasi dan Informasi Publik dalam rangka keterbukaan informasi publik	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Kecamatan	10	30	50	80	100
		Rasio berita positif dan negatif di media tentang Pemerintah Kab Takalar	60:40:00	70:30:00	80:20:00	80:20:00	80:20:00
2	Tujuan 2: Meningkatkan Pelayanan Statistik Sektoral di Lingkup Kabupaten Takalar	Presentase penyediaan data statistik sektoral	80%	100%	100%	100%	100%

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2021	Target Kinerja Tahunan			
				2023	2024	2025	2026
	Sasaran 2.3: Tersusunnya data Pembangunan dan statistik terintegrasi	Ketersediaan Metadata statistik sektoral	Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tujuan 3 : Peningkatan Pengelolaan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase tingkat pengamanan informasi	20%	35%	50%	75%	100%
	Sasaran 3.4: Meningkatnya Pengelolaan Persandian dalam rangka perlindungan data perangkat daerah	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi sebagai jaring keamanan dalam komunikasi dan Perlindungan Data Perangkat Daerah	1 OPD dari 35 OPD (2,86%)	28.57%	57.14%	85.71%	100%
4	Tujuan 4: Meningkatkan tata Kelola pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	N/A	CC	B	B	BB
	Sasaran 4.5: Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	N/A	B	B	B	BB

Sumber : Renstra Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2023-2026; diolah

3.2 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2024

Berdasarkan Kebijakan yang telah ditetapkan pada Tahun 2020 dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, disusun 5 (lima) Program dan 12 (dua belas) Kegiatan dan 37 (tiga puluh tujuh) Sub Kegiatan Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota**
   Dengan kegiatan-Kegiatan :
   a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. **Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik**
   Dengan kegiatan-kegiatan :
   a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/kota

3. **Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**

   Dengan kegiatan-kegiatan :

   a. Pengelolaan E Goverment di lingkup Pemerintah DaerahKabupaten /Kota

4. **Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**

   Dengan kegiatan-kegiatan :

   a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral diLingkup Daerah Kabupaten / Kota

5. **Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**

   Dengan kegiatan-kegiatan :

   a. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota

TABEL III-3
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target Kinerja 2024			Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	02					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
	02	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI							4,628,199,956	6,517,136,842	6,412,388,242							3,063,126,129	
	02	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA						3,898,199,956	3,595,579,124	3,490,830,524	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang						3,063,126,129	Sekretariat Diskominfo
	02	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat daerah						30,000,000	27,620,000	27,620,000	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang						25,000,000	Sekretariat Diskominfo
	02	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	5,000,000	4,000,000	4,000,000	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai	2 Dokumen	4,000,000	Sekretariat Diskominfo

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target Kinerja 2024			Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	02	16	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	4,000,000	4,000,000	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai	1 Dokumen	4,000,000	Sekretariat Diskominfo
	02	16	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	7,620,000	7,620,000	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai	1 Dokumen	4,000,000	Sekretariat Diskominfo
	02	16	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	4,000,000	4,000,000	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai	1 Dokumen	4,000,000	Sekretariat Diskominfo

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target Kinerja 2024			Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	02	16	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	4,000,000	4,000,000	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai	1 Dokumen	3,000,000	Sekretariat Diskominfo
	02	16	02	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	5,000,000	4,000,000	4,000,000	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai	1 Laporan	6,000,000	Sekretariat Diskominfo
	02	**16**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik**						**3,723,329,700**	**3,400,740,295**	**3,295,991,695**	**Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang**						**2,881,597,300**	**Sekretariat Diskominfo**
	02	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang menerima gaji	1.624 Orang	406 Orang	36 Orang	406 Orang	406 Orang	2,239,499,095	2,239,499,095	2,239,499,095	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai	36 Orang	2,295,476,700	Sekretariat Diskominfo
							Jumlah pegawai yang menerima tambahan penghasilan	1.392 Orang	348 Orang	36 Orang	348 Orang	319 Orang	1,468,830,605	1,149,241,200	1,044,492,600	Kab. Takalar, Pattallassang,	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan	Pegawai	36 Orang	574,620,600	Sekretariat Diskominfo

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target Kinerja 2024			Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							berdasarkan beban kerja									Kalabbirang	ALOKASI UMUM		Pelayanan Publik				
	02	16	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Laporan	0	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	4,000,000	4,000,000	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai	1 Laporan	3,500,000	Sekretariat Diskominfo
	02	16	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	4,000,000	4,000,000	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai	1 Laporan	4,000,000	Sekretariat Diskominfo
	02	16	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	0	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	4,000,000	4,000,000	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai	4 Laporan	4,000,000	Sekretariat Diskominfo
	02	**16**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi barang milik daerah yang baik**						**10,000,000**	**6,000,000**	**6,000,000**	**Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang**						**6,000,000**	**Sekretariat Diskominfo**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target Kinerja 2024			Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	02	16	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai	1 Dokumen	3,000,000	Sekretariat Diskominfo
	02	16	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	0	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai	1 Laporan	3,000,000	Sekretariat Diskominfo
	02	**16**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase peningkatan kapasitas pegawai**						**15,000,000**	**14,000,000**	**14,000,000**	**Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang**						**1,500,000**	**Sekretariat Diskominfo**
	02	16	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta beserta atribut kelengkapannya	144 Paket	0	36 Paket	36 Paket	36 Paket	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai	2 Orang	500,000	Sekretariat Diskominfo

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target Kinerja 2024			Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	02	16	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	8 Orang	0	2 Orang	2 Orang	2 Orang	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai	35 Orang	1,000,000	Sekretariat Diskominfo
	02	16	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	140 Orang	0	35 Orang	35 Orang	35 Orang	5,000,000	4,000,000	4,000,000	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai	0	-	Sekretariat Diskominfo
	02	**16**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentasi Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**45,000,000**	**37,000,000**	**37,000,000**	**Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang**						**37,428,829**	**Sekretariat Diskominfo**
	02	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	0	3 Paket	3 Paket	3 Paket	5,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan	Pegawai	3 Paket	697,500	Sekretariat Diskominfo

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target Kinerja 2024			Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																			Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	02	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor	12 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	5,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai	3 Paket	3,000,000	Sekretariat Diskominfo
	02	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen bahan cetakan dan penggandaan	12 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	5,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai	3 Paket	3,131,329	Sekretariat Diskominfo
	02	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	30,000,000	28,000,000	28,000,000	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan	Pegawai	50 Laporan	30,600,000	Sekretariat Diskominfo

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target Kinerja 2024			Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																			Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	02	16	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan barang milik daerah**						**5,000,000**	**2,000,000**	**2,000,000**	**Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang**						**1,000,000**	**Sekretariat Diskominfo**
	02	16	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	40 Unit	0	10 Unit	10 Unit	10 Unit	5,000,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai	10 Unit	1,000,000	Sekretariat Diskominfo
	02	16	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang di sediakan**						**59,870,256**	**81,838,829**	**81,838,829**	**Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang**						**84,600,000**	**Sekretariat Diskominfo**
	02	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	47,870,256	47,238,829	47,238,829	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	RETRIBUSI DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintaha	Pegawai	3 Laporan	50,000,000	Sekretariat Diskominfo

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target Kinerja 2024			Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																			n dan Pelayanan Publik				
	02	16	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	4 Laporan	0	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai	1 Laporan	1,000,000	Sekretariat Diskominfo
	02	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	10,000,000	33,600,000	33,600,000	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	RETRIBUSI DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai	1 Laporan	33,600,000	Sekretariat Diskominfo
	02	**16**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah Penunjang urusan Pemerintahan daerah**						**10,000,000**	**26,380,000**	**26,380,000**	**Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang**						**26,000,000**	**Sekretariat Diskominfo**
	02	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	24 Unit	5 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	10,000,000	26,380,000	26,380,000	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbiran	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan	Pegawai	6 Unit	26,000,000	Sekretariat Diskominfo

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target Kinerja 2024			Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya									g			pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	02	**16**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**PERSENTASE TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP AKSES DAN KUALITAS KONTEN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH**						**50,000,000**	**1,843,839,140**	**1,843,839,140**	**Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang**						**-**	**Bidang Humas, Informasi dan Komunikasi Publik**
	02	**16**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/kota**	**Persentase tata kelola informasi dan komunikasi publik**						**50,000,000**	**1,843,839,140**	**1,843,839,140**	**Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang**						**-**	**Bidang Humas, Informasi dan Komunikasi Publik**
	02	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Media Komunikasi Publik	8 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	20,000,000	321,339,140	321,339,140	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai	0	-	Bidang Humas, Informasi dan Komunikasi Publik

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target Kinerja 2024			Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	02	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Informasi Publik	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	12,500,000	12,500,000	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai	0	-	Bidang Humas, Informasi dan Komunikasi Publik
	02	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan Komunitas dalam mendiseminasikan informasi program atau kebijakan	8 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	10,000,000	1,510,000,000	1,510,000,000	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai	0	-	Bidang Humas, Informasi dan Komunikasi Publik
	02	**16**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**PERSENTASE LAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI**						**680,000,000**	**1,077,718,578**	**1,077,718,578**	**Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang**						**-**	**Bidang Informatika**
	02	**16**	**03**	**2.02**		**Pengelolaan E Goverment di lingkup Pemerintah DaerahKabupaten /Kota**	**Persentase tata kelola e-government**						**680,000,000**	**1,077,718,578**	**1,077,718,578**	**Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang**						**-**	**Bidang Informatika**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target Kinerja 2024			Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	02	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai	0	-	Bidang Informatika
	02	16	03	2.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi	4 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	4,000,000	4,000,000	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai	0	-	Bidang Informatika
	02	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan	4 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	115,000,000	83,000,000	83,000,000	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai	0	-	Bidang Informatika

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target Kinerja 2024			Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	02	16	03	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan masterplan smart city	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	520,000,000	982,718,578	982,718,578	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai	0	-	Bidang Informatika
	02	16	03	2.02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistem SPBE	4 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai	0	-	Bidang Informatika
	02	**20**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**150,000,000**	**15,000,000**	**15,000,000**							**-**	
	02	**20**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**PERSENTASE ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) YANG MENGGUNAKAN DATA STATISTIK DALAM MENYUSUN**						**150,000,000**	**15,000,000**	**15,000,000**	**Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang**						**-**	**Bidang Statistik dan Persandian**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target Kinerja 2024			Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																
	02	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral diLingkup Daerah Kabupaten / Kota	Persentase terselenggaranya statistik sektoral						150,000,000	15,000,000	15,000,000	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang						-	Bidang Statistik dan Persandian
	02	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengelahan,Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai	0	-	Bidang Statistik dan Persandian
	02	20	02	2.01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM pemerintah daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	200 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai	0	-	Bidang Statistik dan Persandian
	02	20	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah metadata statistik sektoral	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	80,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbiran	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan	Pegawai	0	-	Bidang Statistik dan Persandian

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target Kinerja 2024			Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																g			pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	02	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							45,000,000	10,000,000	10,000,000							10,000,000	
	02	21	02			PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	PERSENTASE TINGKAT KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH						45,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang						10,000,000	Bidang Statistik dan Persandian
	02	21	02	2.01		Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase pengamanan informasi pemerintah						45,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang						10,000,000	Bidang Statistik dan Persandian
	02	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai	1 Laporan	5,000,000	Bidang Statistik dan Persandian

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target Kinerja 2024			Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	02	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	35 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	40,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pegawai	10 Perangkat Daerah	5,000,000	Bidang Statistik dan Persandian
	JUMLAH												4,823,199,956	6,542,136,842	6,437,388,242							3,073,126,129	

Takalar, 2024

Kepala Dinas,

SYAINAL MANNAN, S.S.T.P., M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19770505 199711 1 001

TABEL III-4
RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) TAHUN 2024

KABUPATEN : TAKALAR
PERANGKAT DAERAH : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target			Pagu			Keterangan
						Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	02					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	02	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI							4,628,199,956	6,517,136,842	6,412,388,242	
	02	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA	PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA				3,898,199,956	3,595,579,124	3,490,830,524	
	02	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat daerah	Cakupan perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat daerah				30,000,000	27,620,000	27,620,000	
	02	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	5,000,000	4,000,000	4,000,000	
	02	16	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	4,000,000	4,000,000	
	02	16	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	7,620,000	7,620,000	
	02	16	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	4,000,000	4,000,000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target			Pagu			Keterangan
						Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	02	16	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	4,000,000	4,000,000	
	02	16	02	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	5,000,000	4,000,000	4,000,000	
	02	**16**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik**	**Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik**				**3,723,329,700**	**3,400,740,295**	**3,295,991,695**	
	02	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang menerima gaji	Jumlah pegawai yang menerima gaji	36 Orang	406 Orang	406 Orang	2,239,499,095	2,239,499,095	2,239,499,095	
								Jumlah pegawai yang menerima tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	Jumlah pegawai yang menerima tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	36 Orang	348 Orang	319 Orang	1,468,830,605	1,149,241,200	1,044,492,600	
								Jumlah pegawai yang menerima tambahan penghasilan berdasarkan obyektif lainnya	Jumlah pegawai yang menerima tambahan penghasilan berdasarkan obyektif lainnya	0 Orang	0 Orang	0 Orang	-	-	-	
	02	16	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	4,000,000	4,000,000	
	02	16	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	4,000,000	4,000,000	
	02	16	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	4,000,000	4,000,000	
	02	**16**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi barang milik daerah yang baik**	**Persentase administrasi barang milik daerah yang baik**				**10,000,000**	**6,000,000**	**6,000,000**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target			Pagu			Keterangan
						Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	02	16	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	3,000,000	3,000,000	
	02	16	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	3,000,000	3,000,000	
	02	**16**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase peningkatan kapasitas pegawai**	**Persentase peningkatan kapasitas pegawai**				**15,000,000**	**14,000,000**	**14,000,000**	
	02	16	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta beserta atribut kelengkapannya	36 Paket	36 Paket	36 Paket	5,000,000	5,000,000	5,000,000	
	02	16	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	2 Orang	2 Orang	2 Orang	5,000,000	5,000,000	5,000,000	
	02	16	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	35 Orang	35 Orang	35 Orang	5,000,000	4,000,000	4,000,000	
	02	**16**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentasi Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentasi Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**45,000,000**	**37,000,000**	**37,000,000**	
	02	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	5,000,000	3,000,000	3,000,000	
	02	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor	3 Paket	3 Paket	3 Paket	5,000,000	3,000,000	3,000,000	
	02	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen bahan cetakan dan penggandaan	Jumlah dokumen bahan cetakan dan penggandaan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	5,000,000	3,000,000	3,000,000	
	02	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	30,000,000	28,000,000	28,000,000	
	02	**16**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan barang milik daerah**	**Persentase pemenuhan barang milik daerah**				**5,000,000**	**2,000,000**	**2,000,000**	
	02	16	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	10 Unit	10 Unit	10 Unit	5,000,000	2,000,000	2,000,000	
	02	**16**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang di sediakan**	**Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang di sediakan**				**59,870,256**	**81,838,829**	**81,838,829**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target			Pagu			Keterangan
						Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	02	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	47,870,256	47,238,829	47,238,829	
	02	16	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
	02	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	10,000,000	33,600,000	33,600,000	
	02	**16**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah Penunjang urusan Pemerintahan daerah**	**Persentase barang milik daerah Penunjang urusan Pemerintahan daerah**				**10,000,000**	**26,380,000**	**26,380,000**	
	02	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit	6 Unit	10,000,000	26,380,000	26,380,000	
	02	**16**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**PERSENTASE TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP AKSES DAN KUALITAS KONTEN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH**	**PERSENTASE TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP AKSES DAN KUALITAS KONTEN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH**				**50,000,000**	**1,843,839,140**	**1,843,839,140**	
	02	**16**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/kota**	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/kota**	**Persentase tata kelola informasi dan komunikasi publik**	**Persentase tata kelola informasi dan komunikasi publik**				**50,000,000**	**1,843,839,140**	**1,843,839,140**	
	02	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	20,000,000	321,339,140	321,339,140	
	02	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Informasi Publik	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	12,500,000	12,500,000	
	02	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan Komunitas dalam mendiseminasikan informasi program atau kebijakan	Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan Komunitas dalam mendiseminasikan informasi program atau kebijakan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	10,000,000	1,510,000,000	1,510,000,000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target			Pagu			Keterangan
						Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	02	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	PERSENTASE LAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI	PERSENTASE LAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI				680,000,000	1,077,718,578	1,077,718,578	
	02	16	03	2.02		Pengelolaan E Goverment di lingkup Pemerintah DaerahKabupaten /Kota	Pengelolaan E Goverment di lingkup Pemerintah DaerahKabupaten /Kota	Persentase tata kelola e-government	Persentase tata kelola e-government				680,000,000	1,077,718,578	1,077,718,578	
	02	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	5,000,000	5,000,000	
	02	16	03	2.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi	0	1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	4,000,000	4,000,000	
	02	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan	Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	115,000,000	83,000,000	83,000,000	
	02	16	03	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan masterplan smart city	Jumlah dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan masterplan smart city	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	520,000,000	982,718,578	982,718,578	
	02	16	03	2.02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistem SPBE	0	1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	3,000,000	3,000,000	
	02	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							150,000,000	15,000,000	15,000,000	
	02	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	PERSENTASE ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) YANG MENGGUNAKAN DATA STATISTIK DALAM MENYUSUN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) YANG MENGGUNAKAN DATA STATISTIK DALAM MENYUSUN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				150,000,000	15,000,000	15,000,000	
	02	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral diLingkup Daerah Kabupaten / Kota	Penyelenggaraan Statistik Sektoral diLingkup Daerah Kabupaten / Kota	Persentase terselenggaranya statistik sektoral	Persentase terselenggaranya statistik sektoral				150,000,000	15,000,000	15,000,000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target			Pagu			Keterangan
						Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	02	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengelahan,Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengelahan,Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	5,000,000	5,000,000	
	02	20	02	2.01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM pemerintah daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	Jumlah SDM pemerintah daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50,000,000	5,000,000	5,000,000	
	02	20	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah metadata statistik sektoral	Jumlah metadata statistik sektoral	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	80,000,000	5,000,000	5,000,000	
	02	**21**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							**45,000,000**	**10,000,000**	**10,000,000**	
	02	**21**	**02**			**PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**PERSENTASE ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) YANG MENGGUNAKAN DATA STATISTIK DALAM MENYUSUN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**PERSENTASE ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) YANG MENGGUNAKAN DATA STATISTIK DALAM MENYUSUN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**				**45,000,000**	**10,000,000**	**10,000,000**	
	02	**21**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota**	**Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota**	**Persentase pengamanan informasi pemerintah**	**Persentase pengamanan informasi pemerintah**				**45,000,000**	**10,000,000**	**10,000,000**	
	02	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik	Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	
	02	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	40,000,000	5,000,000	5,000,000	
												J U M L A H	**4,823,199,956**	**6,542,136,842**	**6,437,388,242**	

Takalar, 2024

Mengetahui,
Kepala Bappelitbangda Kabupaten Takalar

Kepala Dinas,

(Drs. Achmad Rivai, M.Si)
NIP. 196810121989081001

(SYAINAL MANNAN, S.S.T.P., M.Si)
NIP. 19770505 199711 1 001

BAB IV
PENUTUP

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Renja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar Tahun 2024 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renja Perubahan dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Dengan ditetapkannya Renja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar Tahun 2024 ini selanjutnya akan dijadikan bahan untuk menyusun RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2024 yang pembahasannya dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten;
2. Dengan ditetapkannya Renja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar Tahun 2024 ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar Tahun 2024 sebagai bahan Penyusunan APBD Kabupaten Takalar Tahun 2024 sehingga nantinya bisa ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar Tahun 2024;
3. Dengan ditetapkannya Renja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar Tahun 2024 ini, maka semua pihak dan kelompok pemerhati (stake holders) yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah harus menjadikan Renja Perubahan ini sebagai acuan dan arahan operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar;
4. Renja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar Tahun 2024 ini akan dijadikan dasar

pengukuran dan evaluasi kinerja (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar Tahun 2024 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Tahun 2024;

5. Diharapkan dengan tersusunnya Renja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Takalar Tahun 2024 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi baik di sekretariat dan bidang – bidang agar konsisten dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

Takalar, 2024

Kepala Dinas,

SYAINAL MANNAN, S.S.T.P., M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19770505 199711 1 001

RENCANA KERJA PERUBAHAN 2024



BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jend. Sudirman No. 25 Kabupaten Takalar Telp./Fax (0418) 21137.

KATA PENGANTAR

Sebagaimanan diamanatkan dalam UU No. 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa OPD menyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) OPD. Renja Kerja Perubahan OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 6 (Enam) bulan yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) OPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 disusun sebagai arahan pelaksanaan tupoksi seluruh jajaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar yang berisi program dan kegiatan sesuai tupoksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 dan berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja. Semoga Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 ini bermanfaat dalam rangka meningkatkan kinerja dan sebagai bahan perencanaan pembangunan terutama dibidang Keuangan terkhusus Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Takalar pada masa sekarang dan yang akan datang.

Semoga Renja-P ini dapat dijadikan pedoman bagi seluruh pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar selama Tahun 2024 dalam memenuhi target dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan tersebut agar mampu memberikan kontribusi positif bagi kinerja pemerintah Kabupaten Takalar.

Takalar, Juli 2024
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR

RUSDI, S.Sos, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19731220 200003 1 009

DAFTAR ISI

BADAN PENDAPATAN DAERAH 1

Jalan Jend. Sudirman No. 25 Kabupaten Takalar Telp./Fax (0418) 21137. 1

BAB I 4

PENDAHULUAN 4

1.1 Latar Belakang 4

1.2 Landasan Hukum 5

1.3 Maksud dan Tujuan 6

1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II 8

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 8

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar Sampai dengan Triwulan II tahun 2024 2

2.1.1 Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Badan Pendapatan Daerah Hingga Triwulan II Tahun 2024 **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 1. Evaluasi Capaian Realisasi Kinerja pada Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar Semester II Tahun 2024 1

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar 2024 6

2.3 Hambatan, Upaya Pencapaian Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 11

2.3.1 Hambatan Dalam Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah 2024 Sampai Dengan Triwulan II 11

2.3.2 Upaya Dalam Pencapaian Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah 2024 Sampai Dengan Triwulan II 12

2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ...**Error! Bookmark not defined.**

2.5 Penelaan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat ..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB III 15

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENDAPATAN DAERAH 15

KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2024 15

3.1 Reviu Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 15

3.2 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 ..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV 39

PENUTUP 39

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2024. Perubahan ini berpedoman pada pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Takalar Tahun 2023.

Renja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik itu program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternative atau baru, indicator kinerja dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD serta menunjukkan prakiraan maju.

sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan, renja Badan pendapatan Daerah dengan tahapan sebagai berikut :

1. Penyiapan penyusunan Renja Perubahan SKPD, meliputi pembentukan tim penyusun renja Perubahan SKPD, Orientasi Renja Perubahan SKPD, Penyunan egenda kerja, serta penyiapan data dan informasi;
2. penyusunan rancangan Renja Perubahan SKPD, mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD;
3. pelaksanaan Forum SKPD, merupakan pembahasan rancangan Renja Perubahan SKPD antara pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan;
4. penetapan Renja Perubahan SKPD.

Selain itu, Renja Perubahan juga disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) pada tahun 2024 yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Pergeseran pagu kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
2. Kerangka pendanaan yang tidak sesuai dengan asumsi awal sebagaimana yang termuat dalam RKPD Tahun 2024;

3. Target penerimaan daerah yang berasal dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan kondisi yang tidak ideal sehingga asumsi-asumsi pendapatan yang termuat dalam RKPD Tahun 2024 diperkirakan tidak mencapai kondisi optimal;

Gambar 1. Bagan Alur Perencanaan dan Penganggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar

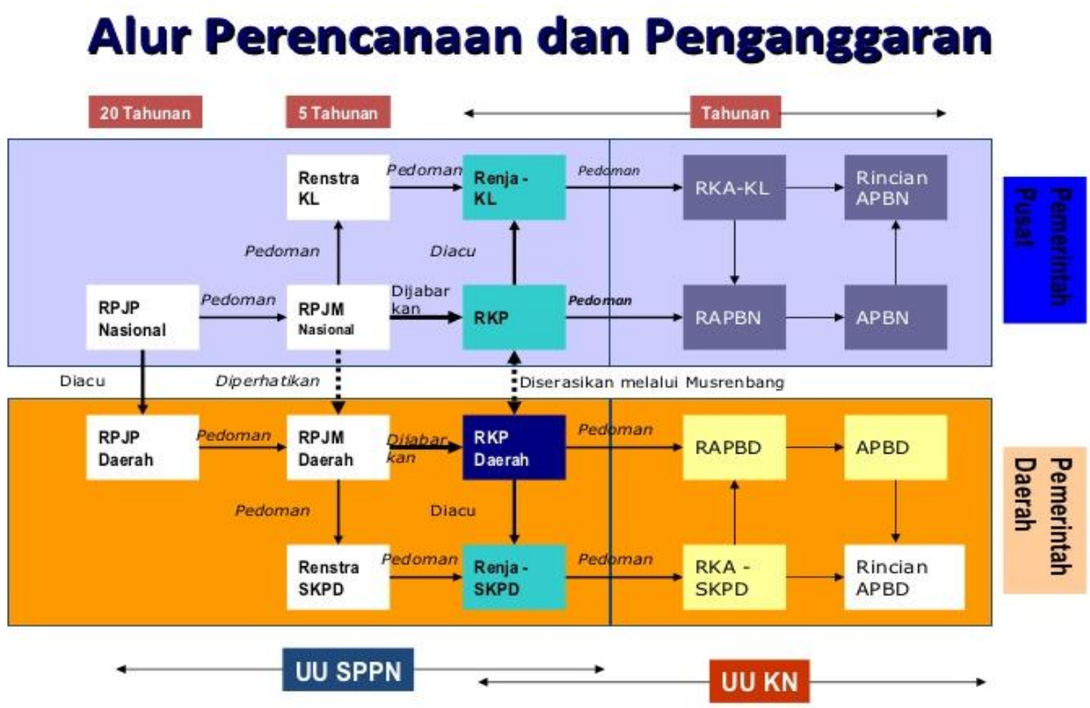

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) , kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD. Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Derah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Derah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Derah, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
9. Peraturan Bupati Takalar Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 37).

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolah ukur penilaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupten Takalar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 yaitu sebagai berikut :

a) Sebagai perwujudan pertanggungjawaban tertulis dan gambaran mengenai perencanaan pelaksanaan kegiatan, program dan kebijaksanaan dalam mencapai sasaran dan tujuan tahun 2024;
b) Sebagai alat untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan selama 1 (satu) tahun; dan
c) Sebagai bahan acuan dalam rangka penyusunan/perencanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah pada tahun-tahun sebelumnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikut dapat dipahami dengan baik. Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan**.**

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024, bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD hingga triwulan II tahun berjalan (Tahun 2024) sesuai Renstra dan Tupoksi OPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan 2024, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2024, memuat tentang Rencana Program Kegiatan Perubahan Renja dan Pendanaan OPD khusus untuk Tahun 2024.

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Evaluasi ini bertujuan untuk mengevaluasi capaian hasil, efisiensi, dan efektivitas dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi ini diharapkan dapat mengidentifikasi potensi perbaikan dan strategi yang lebih tepat untuk meningkatkan kinerja di sisa periode Renja. Selain itu, evaluasi juga akan memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih baik dan berbasis data dalam mengalokasikan sumber daya yang ada agar dapat lebih tepat sasaran dan efisien. Dengan begitu, diharapkan target dan sasaran yang telah ditetapkan pada Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar dapat tercapai dengan lebih baik, serta memberikan dampak positif bagi pelayanan publik dan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Evaluasi Kinerja dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar berdasarkan hasil perhitungan indikator kinerja utama atau indikator kinerja sasaran. Pada tahun 2022 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar membentuk badan, dengan nomenklatur Badan Pendapatan Daerah.

Program dan Kegiatan diampu oleh 4 (empat) bidang, dan 1 (satu) sekretariat. Kegiatan-kegiatan dalam tahun 2024 terdiri dari 2 program, 9 kegiatan dan 46 Sub Kegiatan. Bapenda Kabupaten Takalar melaksanakan 2 program yang terdiri dari satu (1) program penunjang dan satu (1) program utama. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari delapan (8) kegiatan dan terbagi dalam 31 sub kegiatan. Program Utama Bapenda Kabupaten Takalar adalah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah yang terdiri dari satu (1) kegiatan dan terdiri dari 15 sub kegiatan. Rata-rata capaian kinerja Bapenda Kabupaten Takalar hingga triwulan II Tahun 2024 untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah sebesar 66,18% sedangkan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah pada 59,75%. Realisasi Pajak Daerah hingga triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp. 11.616.981.343,60,- sedangkan Retribusi Daerah pada Tahun 2024 tidak lagib dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar atau 14,84%

PROGRAM UTAMA

1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Program ini didukung oleh satu kegiatana dan terdiri dari 15 sub kegiatan, dengan total anggaran sebesar **Rp. 3.224.551.800**,-. Capaian kinerja sampai sampai Triwulan II untuk indicator **Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)** sebesar 16,35% dari target 13%. Capaian kinerja untuk indicator **Deviasi realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD** sebesar 13,68 % dari target 20%. Realisasi Anggaran sampai triwulan II Tahun 2024 sebesar **Rp. 1.002.796.620,- atau 31,10%** dari jumlah total anggaran. Rata-rata capaian kinerja Program Pengelolaan pendapatan Daerah sampai pada triwulan II Tahun 2024 adalah sebesar **59,75%** dengan **kategori Rendah.**

Beberapa factor penghambat program ini adalah :

1. Adanya komitmen seluruh pegawai dengan jumlah petugas yang memadai;
2. telah disusunnya regulasi peraturan tentang pengelolaan PAD;
3. adanya inovasi digitalisasi transaksi Pajak Daerah;
4. Pengoptimalan pendapatan dan pendaftaran Wajib Pajak;
5. Pelaksanaan sosialisasi Kepatuhan Pajak Daerah;
6. Adanya Pendampingan Tim SATGAS;
7. Adanya penambahan sarana dan prasarana pengelolaan pendapatan daerah.

Beberapa faktor penghambat program ini adalah :

1. Perubahan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan PAD, sehingga perlu adanya pembentukan peraturan turunan dari undang-undang tersebut agar sesuai dengan kondisi factual;
2. tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih rendah, sehingga pelaporan pajak usahanya belum tepat waktu dan tepat jumlah;
3. Belum akuratnya data potensi PAD yang dipergunakan sebagai dasar penentuan target penerimaan;
4. Belum terintegrasinya data dan informasi internal dan antar SKPD pengelolaan pendapatan daerah;

Beberapa tindak lanjut yang akan dilakukan untuk mengatasi hambatan yang ada adalah :

1. Terus melakukan reviu terkait regulasi yang ada;
2. Mengoptimalkan koordinasi dengan stakeholder (internal dan eksternal) terkait, termasuk untuk mempercepat pelaksanaan proses tender;
3. Melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap Wajib Pajak;
4. Melakukan monitoring dan Evaluasi rutin terkait realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2024;

5. Melakukan optimalisasi pengelolaan kekayaan Daerah mengenai potensi PAD kabupaten Takalar.

Program Pengelolaan pendapatan Daerah terdiri dari 1 kegiatan, yaitu Kegiatan pengelolaan pendapatan Daerah, dengan uraian sub kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan Pengelolaan Pajak daerah dengan pagu sebesar Rp. 101.593.100,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 61.603.640,- atau 60,64%;
2. Analisa dan pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah dengan pagu sebesar Rp. 184.406.800,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 105.244.960,- atau 57,07%;
3. Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan Pajak daerah, dengan pagu sebesar Rp. 108.599.800,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 54.841.000,- atau 50,50%;
4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah, dengan pagu sebesar Rp. 700.000.000,- , sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.852.200,- atau 1,55%;
5. Pendataan dan pendaftaran Objek Pajak Daerah, dengan pagu sebesar Rp. 300.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 46.637.700,- atau 15,55%;
6. Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah, dengan pagu sebesar Rp. 35.000.000,- dengan realiassi anggaran sebesar Rp. 30.204.000,- atau 86,30%;
7. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dengan pagu sebesar Rp. 86.750.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 37.142.300,- atau 42,82%;
8. Penetapan Wajib Pajak Daerah, dengan pagu sebesar Rp. 370.655.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 210.352.800,- atau 56,75%;
9. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah, dengan pagu sebesar Rp. 30.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.764.700,- atau 22,55%;
10. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah, dengan pagu sebesar Rp. 70.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 47.342.600,- atau 67,63%;
11. Penagihan Pajak Daerah, dengan pagu sebesar Rp. 810.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 271.591.380,- atau 33,53%;

12. Penyeleesaian Keberatan Pajak Daerah, dengan pagu sebesar Rp. 30.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.636.700,- atau 28,79%;
13. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah, dengan pagu sebesar Rp. 40.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 20.070.600,- atau 50,18%;
14. Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan pagu sebesar Rp. 265.796.200,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 33.491.700,- atau 12,60%;
15. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, dengan pagu sebesar Rp. 91.750.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 58.020.340,- atau 63,24%.

2. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pagu anggaran pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 189.121.600,- dengan realisasi anggaran sampai triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp. 98.089.800,- atau 57,84%. Capaian kinerja hingga triwulan II sebesar 66,67% kategori Sedang (S). Rendahnya realisasi anggaran dan capaian kinerja pada kegiatan ini dikarenakan beberata tahap kegiatan yang masih dalam tahap pelaksanaan ada juha yang dijadwalkan pada semester II.

Adapun sub kegiatan yang termasuk dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
4) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD;
5) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD;
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pagu anggaran pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 7.902.425.788,- dengan target kinerja persentase gaji, tunjangan ASN, insentif ASN dan Insentif KDH/WKDH dengan realisasi anggaran hingga sampai triwulan II Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 2.173.994.956,- atau

27,51%. Capaian kinerja hingga sampai pada triwulan II Tahun 2024 sebanyak 50,50% dengan kategori Sangat Rendah (SR).

Adapun sub kegiatan yang termasuk dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
2) Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN;
3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD;
6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD.

1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

Pagu anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 21.138.300,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 13.861.900,- atau 65,58%. Sedang capaian kinerja hingga triwulan II Tahun 2024 sebanyak 87,50% dengan kategori **Tinggi (T)**.

Adapun sub kegiatan pada kegiatan ini, sebagai berikut :

1) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD;
2) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD;
3) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;
4) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

1.4 Kegiatan Administarsi Kepegawaian Perangkat Daerah

pagu anggaran pada kegiatan ini sebeesar Rp. 67.145.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 57.088.000,- atau 85,02%. Sedangkan capaian kinerja hingga sampai pada triwulan II Tahun 2024 sebanyak 88,89% dengan kategori **Tinggi (T)**.

Adapun sub kegiatan pada sub kegiatan ini, sebagai berikut :

1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi kepegawaian:
3) Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai.

1.5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pagu anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 510.396.700,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 247.809.240,- atau 48,55%. Sedangkan

capaian kinerja hingga sampai pada triwulan II Tahun 2024 sebanyak 81,84% dengan kategori **Tinggi (T)**.

Adapun sub kegiatan pada sub kegiatan ini, sebagai berikut :

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
5) Fasilitasi Kunjungan Tamu;
6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

1.6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pagu anggaran pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 79.958.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 79.450.000,- atau 99,36%. pada kegiatan ini berupa pengadaan mebel.

Adapun sub kegiatan pada kegiatan ini, adalah sebagai berikut:

1) Pengadaan Mebel.

1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pagu anggaran pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 427.151.911,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 156.014.510,- atau 36,52%. pada kegiatan ini berupa tagihan listrik, wifi dan jasa tenaga administrasi.

Adapun sub kegiatan pada kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik;
2) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

1.8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pagu Kegiatan ini sebesar Rp. 122.296.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.638.840,- atau 9,52%, rendahnya realisasi pada kegiatana ini disebabkan karena pembayaran BBM belum terealisasi hingga sampai triwulan II Tahun 2024.

Adapun sub kegiatan pada kegiatan ini, adalah sebagai berikut :

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan;

Tabel 1. Evaluasi Hasil Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar Semester II Tahun 2024

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3					4	5	6	8		12		16		25	
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**										
5	**02**				**KEUANGAN**			**100.00%**	**284,384,839**	**100.00%**	**251,701,240**	**37.93%**	**1,024,831,763**	**55.62%**	**1,276,533,003**
5	02	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA**	**Persen**	**100%**	**3,284,384,839**	**17.72%**	**251,701,240**	**37.93%**	**1,024,831,763**	**55.62%**	**1,276,533,003**
5	02	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persen	100%	189,121,600	100%	-	14.29%	35,815,200	71.43%	35,815,200
5	02	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Renja beserta Perubahannya	Dokumen	2	51,074,500	1	-	-	21,938,500	1	21,938,500
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	30,320,000	-	-	1	1,240,000	1	1,240,000
5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	23,073,700	1	-	1	3,063,800	2	3,063,800
5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	Dokumen	1	6,000,000	1	-	-	-	1	-
5	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	Dokumen	2	5,000,000	-	-	-	-	-	-
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (SAKIP dan LPPD)	Laporan	14	52,503,200	12	-	2	4,452,000	14	4,452,000
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja (Triwulan dan Semesteran)	Laporan	6	21,150,200	1	-	-	5,120,900	1	5,120,900

5	02	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan PD**	Persen	100%	7,902,425,788	100%	806,569,879	23.73%	1,367,425,077	32.14%	2,173,994,956
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan Tunjangan	Orang/Bulan	576	3,178,134,797	129	779,106,479	164	871,202,194	293	1,650,308,673
						Jumlah ASN yang Menerima TPP	Orang/Bulan	492	1,690,352,639	-	-	205	452,511,283	205	452,511,283
						Jumlah KDH/WKDH yang Menerima Insentif	Orang/Bulan	4	495,666,875	-	-	-	-	-	-
						Jumlah ASN yang menerima Instentif	Orang/Bulan	540	2,447,076,677	-	-	-	-	-	-
5	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	6,000,000	1	2,580,000	5	3,420,000	6	6,000,000
5	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	23,394,600	2	3,820,400	4	13,305,200	6	17,125,600
5	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	10,000,000	4	4,517,600	2	5,482,400	6	10,000,000
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	20,000,200	1	9,934,200	-	9,920,000	1	19,854,200
5	02	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Laporan	12	6,000,000	-	-	12	5,964,000	12	5,964,000
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Laporan	16	25,800,000	4	6,611,200	6	5,620,000	10	12,231,200
5	02	01	2.03		**Administrasi barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persen	100%	21,138,300	100%	11,068,900	68.75%	13,861,900	100.00%	24,930,800
5	02	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	1	5,000,000	1	3,474,500	-	3,680,000	1	7,154,500
5	02	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian BMD pada SKPD	Laporan	2	8,567,200	1	2,035,500	1	3,901,200	2	5,936,700
5	02	01	2.03	05	Rekonsiliasi Penyusunan laporan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada SKPD	Dokumen	1	5,883,300	1	4,593,300	-	4,593,300	1	9,186,600

5	02	01	2.03	06	penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan BMD pada SKPD	Laporan	12	1,687,800	2	965,600	10	1,687,400	12	2,653,000
5	02	01	2.05		**Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persen	100%	67,145,000	100.00%	10,827,500	74.32%	46,260,500	94.59%	57,088,000
5	02	01	2.05	02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah ASN yang diberi fasilitas pakaian dinas beserta kelengkapannya	Pasang	50	20,955,000	-	-	50	20,900,000	50	20,900,000
5	02	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Hasil Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	10,000,000	10	8,575,000	1	450,000	11	9,025,000
5	02	01	2.05	05	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	36,190,000	5	2,252,500	4	24,910,500	9	27,163,000
5	02	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentasi Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persen	100%	510,396,700	100.00%	24,882,680	50.66%	222,926,560	71.05%	247,809,240
5	02	01	2.06	01	Penyediaan komponen isntalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Paket	1	2,654,400	1	2,654,400	-	-	1	2,654,400
5	02	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	5	293,858,000	-	-	3	143,310,000	3	143,310,000
5	02	01	2.06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	3,320,800	1	1,017,400	-	1,021,600	1	2,039,000
5	02	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	35	5,000,000	-	-	37	3,700,000	37	3,700,000
5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Frekuensi Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kali	60	18,000,000	15	4,470,000	5	810,000	20	5,280,000
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	50	187,563,500	14	16,740,880	32	74,084,960	46	90,825,840
5	02	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik daerah penunjang Urusan pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Pelaksaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat daerah**	Persen	100%	79,958,000	0.00%	-	100.00%	79,450,000	100.00%	79,450,000
5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	Unit	4	79,958,000	-	-	4	79,450,000	4	79,450,000
5	02	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentasi Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah**	Persen	100%	427,151,911	10.31%	69,241,121	24.34%	86,773,389	34.65%	156,014,510

5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Laporan	36	109,151,911	6	14,641,121	6	13,273,389	12	27,914,510
5	02	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	420	318,000,000	41	54,600,000	105	73,500,000	146	128,100,000
5	02	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persen	100%	122,296,000	0.00%	-	20.00%	7,001,840	20.00%	7,001,840
5	02	01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya'	Unit	15	122,296,000	-	-	3	7,001,840	3	7,001,840
5	02	04			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**PERSENTASE TINGKAT PENERIMAAN PAJAK DAERAH (TARGET/REALISASI)**	**Persen**	**100%**	**3,224,551,800**	**100%**	**596,666,020**	**7.54%**	**1,088,126,700**	**50.42%**	**1,684,792,720**
5	02	04	2.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Persen	100%	3,224,551,800	100%	596,666,020	7.54%	1,088,126,700	50.42%	1,684,792,720
5	02	04	2.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	8	101,593,100	1	21,208,280	3	532,103,280	4	553,311,560
5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	8	184,406,800	4	33,735,460	3	71,508,880	7	105,244,340
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	12	108,599,800	3	32,770,000	3	42,516,400	6	75,286,400
5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Paket Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak	Paket	5	700,000,000	1	4,868,700	-	5,983,500	1	10,852,200
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	1,500	300,000,000	340	34,159,100	30	12,478,600	370	46,637,700
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Dokumen	12	35,000,000	4	16,432,800	3	9,878,600	7	26,311,400

5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOPnya	Objek Pajak	2,000	86,750,000	700	24,844,300	1,070	36,004,300	1,770	60,848,600
5	02	04	2.01	08	Penetapan wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	60,000	370,655,900	26,600	167,474,000	2,500	42,878,800	29,100	210,352,800
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Laporan	3,000	30,000,000	1,000	3,778,600	1,000	2,986,100	2,000	6,764,700
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data dan Pelaporan Pajak Daerah yang Telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	530	70,000,000	180	16,119,000	280	27,188,300	460	43,307,300
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	600	810,000,000	190	200,567,380	202	230,670,400	392	431,237,780
5	02	04	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	12	30,000,000	1	834,300	5	6,966,000	6	7,800,300
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Laporan	12	40,000,000	6	12,884,200	3	7,186,400	9	20,070,600
5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pengelolaan Retribusi dan Pajak Daerah	Laporan	12	265,796,200	5	16,521,100	3	16,970,600	8	33,491,700
5	02	04	2.01	15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	12	91,750,000	4	10,468,800	3	42,806,540	7	53,275,340

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar

RUSDI, S.Sos, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19731220 200003 1 009

2.1.1 Rekapitulasi Jumlah Laporan, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 yang terakomodir di APBD 2024

Informasi tentang Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD 2024 yang terakomodir di APBD Tahun 2024 memberikan gambaran seberapa banyak jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indicator kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar pada Tahun 2024. Adapun jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indicator kegiatan dimaksud dapat menggambarkan pada table sebagai berikut :

Tabel 2. Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang ada Dalam APBD 2024

APBD 2024							
No Urut	**Perangkat Daerah**	**Jmlh Prog.**	**Jmlh Keg.**	**Jlmh Sub Keg.**	**Indikator**		
					Jmlh Prog.	**Jmlh Keg.**	**Jmlh Sub Keg.**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	Bapenda	2	9	46	2	9	49
Total		**2**	**9**	**46**	**2**	**9**	**49**

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah program sebanyak 2, jumlah kegiatan 9 dan jumlah sub kegiatan 46, sedangkan jumlah indikator kegiatan sebanyak 9 dan jumlah indicator sub kegiatan sebanyak 49.

2.1.2 Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja APBD Triwulan II Tahun 2024

Informasi tentang realisasi anggaran kegiatan memberikan gambaran seberapa besar anggaran yang telah terserap pada Triwulan II untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam APBD 2024. Gambaran sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 3. Realisasi Anggaran pelaksanaan Kegiatan pada APBD Kabupaten Takalar Tahun 2024 Hingga Triwulan II

No. Urut	Perangkat Daerah	Pagu APBD	Realisasi s/d Triwulan II	Persentase	
		(Rp)	(Rp)	Fisik	Keu
1	2	3	4	5	6
1	Bapenda	12.544.185.099	4.105.015.670	39%	32,72%
Total		**12.544.185.099**	**4.105.015.670**		

Berdasarkan table diatas menunjukkan bahwa total jumlah anggarn yang teralisasi dalam APBD untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Takalar Tahun 2024 sebesar Rp. 12.544.185.099,- (Dua Belas Milyard Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Sembilan Rupiah)., realisasi serapan anggaran dari pelaksanaan kegiatan hingga triwulan II adalah sebesar 32,72% dengan capaian fisik sebesar 39%.

2.1.2.1 Evaluasi Capaian Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dalam Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024

Informasi capaian pendanaan memberikan gambaran capaian berdasarkan realisasi anggaran pada masing-masing perangkat daerah dimulai dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat pada Kantor Badan Pendapatan Daerah. Capaian kinerja pendanaan tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori **Rendah** untuk perangkat daerah dengan realisasi 0 – 20%, kategori **Sedang** untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran lebih besar dari >20 – 43 % dan kategori **Tinggi** untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran diatas 43%. Penetapan batas tertinggi yan diharapkan sebesar 43% didasarkan atas tingkat capaian yang diharapkan untuk triwulan II adalah 43%, sehingga jika terdapat capaian realisasi pendanaan lebih dari 43% dianggap melampaui target dan berada pada kategori **Tinggi.**

1) Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Program

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pendanaan pada level program untuk Badan Pendapatan Daerah dengan menggunakan kategori diatas, maka dapat dijelaskan bahwa jumlah program yang dilaksanakan sebanyak 2 program dengan rincian capaian yang masuk pada kategori rendah ada sebanyak 0 program (realisasi 0 - 20%). Untuk capaian

pendanaan yang masuk pada kategori sedang sebanyak 2 program (realisasi >20 – 43%) dan untuk capaian pendanaan kategori tinggi sebanyak 0 program (realisasi >43%).

2) Evaluasi Capaian Pendanaan pada Level Kegiatan

Untuk evaluasi pelaksanaan capaian pendanaan pada level kegiatan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah dapat dijelaskan bahwa terdapat 9 kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada Tahun 2024. Dari keseluruhan kegiatan tersebut terdapat 1 kegiatan yang realisasi pendanaannya hingga triwulan II masih dalam kategori rendah (realisasi 0 – 20 %), yang berada dalam kategori sedang sebanyak 4 kegiatan (realisasi >20 – 43%), dan kategori tinggi dengan capaian realisasi >43% sebanyak 4 kegiatan.

3) Evaluasi Capaian Pendanaan pada Level Sub Kegiatan

Adapun evaluasi capaian pendanaan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah pada level sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 46 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2024, terdapat 5 sub kegiatan yang berada pada kategori rendah (realisasi 0 – 20 %), yang berada pada kategori sedang sebanyak 9 sub kegiatan (>20 – 43%) dan yang berada pada kategori tinggi sebanyak 32 sub kegiatan (realisasi >43%).

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas capaian kinerja pendanaan berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4. Rekapitulasi Capain Kinerja pendanaan berdasarkan Program,. Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Takalar Triwulan II Tahun 2024

No. Urut	Perangkat Daerah	Jmlh Prog	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jmlh Keg.	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jmlh sub Keg.	Jumlah Sub Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan		
			0-20%	>20-43%	>43%		0-20%	>20-43%	>43%		0-20%	>20-43%	>43%
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
1	Bapenda	2	0	2	0	9	1	4	4	46	5	9	32
Jumlah		**2**	**0**	**2**	**0**	**9**	**1**	**4**	**4**	**46**	**5**	**9**	**32**

Sumber : Laporan realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Triwulan II, diolah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar

2.1.2.2 Evaluasi Capaian kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dalam Pelaksanaan Renca Badan Pendapatan Daerah 2024

Informasi tentang capaian kinerja memberikan gambaran capaian kinerja realisasi target kinerja pada masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar. Capaian kinerja tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok yaitu kategori Rendah untuk perangkat daerah dengan realisasi 0 – 20 persen, Kategori Sedang untuk perangkat daerah dengan realisasi kinerja lebih besar dari 20 – 43 persen dan kategori Tinggi untuk perangkat daerah dengan realisasi kinerja diatas 43 persen. Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 43 persen didasarkan atas tingkat capaian yang diharapkan untuk triwulan II adalah 43 persen, sehingga jika terdapat capaian realisasi kinerja lebih dari 45 persen dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi.

1. Evaluasi Capaian Kinerja Outcome pada Level program

Untuk evaluasi pelaksanaan kinerja outcome pada level program dapat digambarkan sebagai berikut: untuk pencapaian target kinerja program pada Kantor Badan Pendapatan Daerah dapat dijelaskan bahwa dari 2 Program yang dilaksanakan sampai dengan triwulan II Tahun 2024, capaian kinerja program yang masih masuk pada kategori rendah (0 – 20%) terdapat 0 program, untuk pencapaian kinerja dengan kategori sedang (> 20-43 persen) terdapat 0 program, selebihnya sebanyak 2 program yang capaian kinerja masuk dalam kategori tinggi yang pencapaiannya > 43 persen pada triwulan II Tahun 2024.

2. Evaluasi Capaian Kinerja Outcome pada Level Kegiatan

Sebagai gambaran pencapaian target kinerja kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 9 kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan II terdapat 1 kegiatan yang capaian kinerjanya kategori masih rendah (0 - 20 %), sedangkan yang capaian kinerja kategori sedang terdapat 0 kegiatan, selebihnya terdapat 8 kegiatan yang capaian kinerja masuk dalam kategori pencapaian > 43 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan II Tahun 2024.

3. Evaluasi Capaian Kinerja Outcome pada Sub Kegiatan

Sebagai gambaran pencapaian target kinerja sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 46 sub kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan II dapat dijelaskan bahwa yang capaian kinerja masih rendah (0- 20 %) terdapat 5 sub kegiatan, sedangkan yang capaian kinerja sedang sebanyak 6 sub kegiatan, selebihnya yang capaian kinerja masuk dalam kategori tinggi sebanyak 35 sub kegiatan, yaitu pencapaian > 43 % yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan II Tahun 2024.

Adapun gambaran pencapaian target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 5. Rekapitulasi Capain Kinerja berdasarkan Program,. Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Takalar Triwulan II Tahun 2024

No. Urut	Perangkat Daerah	Jmlh Prog	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jmlh Keg.	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jmlh sub Keg.	Jumlah Sub Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan		
			0-20%	>20-43%	>43%		0-20%	>20-43%	>43%		0-20%	>20-43%	>43%
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
1	Bapenda	2	0	0	2	9	1	0	8	46	5	6	35
Jumlah		**2**	**0**	**0**	**2**	**9**	**1**	**0**	**8**	**46**	**5**	**6**	**35**

Sumber : Laporan realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Triwulan II, diolah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar 2024

Badan pendapatan Daerah Kabupaten Takalar merupakan OPD yang menangani urusan pilihan bidang keuangan. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor 37 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah kabupaten.

Dalam pelaksanaan tupoksinya, Badan Pendapatan Daerah tidak memiliki aturan mengenai SPM. Namun tolok ukur kinerjanya berdasarkan indikator kinerja yaitu pengelolaan pajak daerah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar memiliki indikator kinerja sebagai berikut : kontribusi PAD terhadap total APBD; Persentase peningkatan PAD; dan persentase Wajib Pajak dan Retribusi yang memenuhi kewajibannya tepat waktu dan tepat jumlah. Pencapaian kinerja pelayanan OPD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Pencapaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar Sampai Triwulan II Tahun Anggaran 2024

NO	INDIKATOR	IKK	INDIKATOR TAMBAHAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	
				TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2023	TAHUN 2024 HINGGA TRIWULAN II	TAHUN 2025	TAHUN 2026
1	Rasio Efesiensi PAD		√	10%	20%	30%	40%	12%	14,68%	30%	40%
2	Kontribusi PAD Terhadap Total APBD		√	12%	13%	14%	15%	12%	16,7%	14%	15%
3	Persentase Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang Memenuhi Kewajibannya Tepat Waktu dan Tepat Jumlah		√	20%	60%	70%	80%	60%	20%	70%	80%
4	Persentase Peningkatan PAD		√	10%	20%	25%	30%	20%	10%	25%	30%
5	Indeks Reformasi Birokrasi Bapenda			BB	BB	BB	BB	68,5	68,7	BB	BB
6	Nilai SAKIP Bapenda		√	BB	BB	BB	BB	B	B	BB	BB
7	Rasio PAD	√		12%	13%	14%	15%	12%	14,68%	14%	15%
8	Deviasi Realisasi PAD	√		67%	75%	80%	90%	74,02%	14,84%	80%	90%

Berdasarkan table diatas dapat dijelaskan berdasarkan hasil pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024, sebagai berikut :

2) Rasio Efesiensi PAD

Persentase pencapaian kinerja sampai triwulan II Tahun 2024 sebesar 14,68%.

Hal ini disebabkan karena tingginya target PAD dan pada sampai triwulan II Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah tentang aturan Pajak belum terbit sehingga masih banyak wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang tidak taat pajak. Secara nilai yang diperoleh sebesar Rp. 14.203.575.170,00 dengan 9 (Sembilan) mata pajak, 2 (dua) mata retribusi dan lain-lain PAD yang sah.

2. Kontribusi PAD Terhadap Total APBD

   Pencapaian kontribusi PAD sampai pada triwulan II Tahun 2024 sebesar 16,7%.

   Pencapaian PAD terhadap total APBD belum terlihat dikarenakan pencapaian baru sebesar 16,7%, hal ini dikarenakan masih sangat diperlukan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak. Pembentukan Bapenda Kabupaten Takalar diharapkan mampu memberi kontribusi PAD terhadap total APBD, sehingga daerah dianggap mampu berdiri sendiri dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

3. Persentase Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang Memenuhi Kewajibannya Tepat Waktu dan Tepat Jumlah

   Pencapaian persentase wajib pajak dan wajib retribusi yang memenuhi kewajibannya tepat waktu dan tepat jumlah sampai triwulan II tahun 2024 masih sementara 20%. Hal ini disebabkan karena terbentuknya tim SATGAS yang melibatkan badan hukum serta kebijakan Peraturan Daerah serta kebijakan Peraturan Bupati tentang perpajakan sehingga membuat Wajib Pajak dan Wajib Retribusi memenuhi kewajibannya tepat waktu dan tepat jumlah selain itu pula adanya kemudahan dalam proses transaksi pemerintah daerah yakni dengan melakukan kegiatan Payment online yakni petugas pajak daerah mendatangi kantor-kantor kelurahan setempat sehingga para Wajib Pajak dan Wajib Retribusi bisa menghemat waktu dan tenaga, dan Bapenda pun melibatkan e-commerce (Qris, Grab, Shopee.) dan Kantor Pos.

4. Persentase Peningkatan PAD

   Persentase peningkatan PAD sampai triwulan II Tahun 2024 masih sementara 10%.

   Hal ini menunjukkan bahwa persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah belum mencapai target di triwulan ke II, hal tersebut disebabkan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Selain itu belum optimalnya sumber-sumber pendapatan daerah, sehingga perlu dilaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah serta pendataan kembali obyek pajak dan retribusi setiap tahunnya, selain itu perlu untuk lebih giat lagi melaksanakan penagihan, sosialisasi dan penyuluhan kepada

para wajib pajak agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal membayar pajak.

5. Nilai SAKIP Bapenda

   Pencapaian indikator kinerja sampai triwulan II tahun 2024 yakni mendapat nilai B dari nilai BB yang ditargetkan. Tahun 2024 Bapenda belum mencapai sesuai yang ditargetkan dikarenakan Bapenda baru terbentuk beberapa bulan sehingga masih ada kekurangan jumlah dokumen yang seharusnya menjadi pendukung dalam penilaian SAKIP kabupaten.

6. Rasio PAD

   Persentase Rasio PAD Tahun Anggaran 2024 yang dicapai adalah sebesar 14,68% dari 12% yang ditargetkan. Rasio PAD dimaksud mengukur tax rasio atau kemampuan daerah dalam mengumpulkan pajak dari potensi pajak daerah. Jumlah PAD adalah jumlah realisasi seluruh Pendapatan asli daerah (PAD), retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Rasio PAD masih jauh dari target dikarenakan tingginya target nilai pajak restoran, dan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sedangkan kemampuan Bapenda Kabupaten Takalar dalam pengelolaan pajak restoran masih sangat rendah, masyarakat dan wajib pajak pelaku UMKM kuliner dan restoran masih sangat rendah kesadaran dan kepatuhannya, masih sangat dibutuhkan sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat dan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah.

7. Deviasi Realisasi PAD

   Persentase deviasi realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 yang dicapai adalah sebesar 14,84% dari 75% yang ditargetkan. Deviasi realisasi PAD dimaksudkan nilai absolut dari total PAD dalam realisasi dibagi total PAD dalam APBD dikurangi satu kali 100. Pengelolaan PAD di kabupaten Takalar terdiri dari 13 OPD. Deviasi menunjukkan semakin tinggi penerimaan PAD, maka tingkat kemandiriannya akan semakin besar sehingga ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya menjadi menurun.

Tabel 3. Perhitungan Peningkatan Realisasi Pajak Daerah hingga sampe Triwulan II Tahun 2024

No	Jenis Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	Pajak Daerah	79.123.000.000	11.477.881.367	14,51
2	Retribusi Daerah	48.319.600.000	1.019.538.043	2,11
3	Pendapatan Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.000.000.000	4.288.523.150	69,37
4	Lain-lain PAD yang Sah	123.300.000.000	75.427.737.260,86	38,83

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar berupaya memaksimalkan tercapainya target Perubahan renja Tahun 2024 dengan optimalisasi capaian realisasi target. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar berharap bahwa pendapatan yang akan diraih mampu melampaui target yang telah direncanakan.

Sebagai tambahan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar berupaya melakukan penyempurnaan-penyempurnaan pada segi pelayanan, sperti :

1) Mengoptimalkan pelayanan dengan melakukan pemeliharaan/perbaikan sarana dan prasarana yang menunjang proses pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah;
2) Updating data Objek Pajak Bumi dan Bangunan;
3) Pengembangan aplikasi pajak terintegrasi dan diginatilasi (PARENTA) sebagai platform digital pengelolaan pajak untuk efektifitas dan optimalisasi penerimaan pajak;
4) Menjalin kerjasama dengan pihak retail dalam pembayaran pajak seperti Indomaret, Alfamidi dan Alfamart;
5) Perluasan kanal pembayaran pajak digital baik melalui: QRIS, *fintech, e-commerce* maupun *virtual account*;
6) Koneksi *Host to Host* sistem Badan Pendapatan Daerah dengan DPM-PTSP;
7) Memberikan sosialisasi kepada Wajib Pajak secara berkesinambungan;

8) Peningkatan upaya penertiban dan penindakan guna memberikan teguran dan peringatan terhadap Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajiban pajaknya;
9) Optimalisasi penagihan pajak dan piutang pajak dan retribusi kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.
10) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perpajakan dengan memberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi.

2.3 Hambatan, Upaya Pencapaian Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024

2.3.1 Hambatan Dalam Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah 2024 Sampai Dengan Triwulan II

Sebagaimana termaktub dalam sistematika Renja Perangkat Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa perlu dilakukannya evaluasi pelaksanaan dan capaian Renja tahun lalu. Evaluasi terhadap Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2023 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan. Penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
b. Tujuan yang dikehendaki;
c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana.

Dari hasil evaluasi Program/Kegiatan Pada Tahun 2024, ada beberapa program dan kegiatan yang direncanakan namun tidak mencapai target sehingga melakukan perubahan anggaran baik pergeseran antar sub kegiatan maupun perubahan antar pagu kegiatan serta adanya penambahan anggaran pada beberapa sub kegiatan, antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan yakni : kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah; kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; kegiatan Admnistrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah; kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan kegiatan yakni : kegiatan pengelolaan pajak daerah.

Adapun faktor penyebab hambatan pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar yakni sebagai berikut :

a) Kurangnya pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah;
b) Kepatuhan, ketaatan dan kejujuran wajib pajak yang masih rendah;
c) Terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah;
d) Belum optimalnya dalam penataan dan penempatan pegawai yang tidak sesuai kebutuhan dan kompetensi yang ada;
e) Rendahnya realisasi anggaran;
f) Adanya keterlambatan pencairan anggaran.

2.3.2 Upaya Dalam Pencapaian Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah 2024 Sampai Dengan Triwulan II

Pelaksanaan Renja tersebut terintegrasi dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar disusun sebagai alat kendali dan tolak ukur bagi manajemen dalam penyelenggaraan pembangunan 5 (lima) tahun dan tahunan.

Kegiatan- kegiatan tersebut tidak dapat terlaksana diakibatkan terbatasnya alokasi anggaran dan masalah administrasi, namun kegiatan – kegiatan tersebut akan kembali dilaksanakan pada penganggaran perubahan yakni triwulan III dan IV tahun anggran 2024. Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Takalar, pada dasarnya kegiatan Badan

Pendapatan Daerah adalah sebagai “Tombak Pendapatan Asli Daerah”. Setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi OPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Upaya dalam pencapaian pelaksanaan Renja Perubahan Badan Pendapatan Daerah yakni :

1. Mengoptimalkan kekayaan alam sumberdaya Kabupaten Takalar;
2. Mencari sumber-sumber pendapatan baru;
3. Mengoptimalkan pendaftaran dan penetapan wajib pajak;
4. Mengoptimalkan pemutakhiran data wajib pajak dan wajib retribusi;
5. Melakukan koordinasi dan konsultasi ke daerah lain yang kondisi geografisnya hampir sama untuk mencari peluang baru;
6. Mengoptimalkan pemanfaatan Informasi Teknologi (IT) dalam mekanisme pengelolaan pendapatan daerah dan pelayanan kepada masyarakat;

2.3.3 Rekomendasi Pelaksanaan renja Badan Pendapatan daerah Kabupaten Takalar Tahun Triwulan II Tahun 2024

Berdasarkan uraian atas faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian kinerja, SKPD menyampaikan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Meningkatkan komunikasi dan integrasi program di lingkungan Bappelitbangda serta pengendalian dan evaluasi dilakukan terus menerus;
2. Peran aktif seluruh KPA dan PPTK didalam mengawal pelaksanaan Program dan Kegiatan yang berjalan;
3. Peran aktif Kepala Kecamatan selaku PA didalam mengawasi, mengontrol dan membuat kebijakan serta keputusan;
4. Peran aktif Sub Bagian Perencanaan Program didalam berkoordinasi termasuk memberikan informasi, sosialisasi maupun kebijakan-kebijakan lainnya;
5. Perlunya tenaga SDM yang berkompeten didalam perencanaan;
6. Peningkatan kualitas SDM aparatur serta jumlah staf yang berkompeten;

7. Peningkatan sarana dan prasarana operasional sesuai dengan kebutuhan;
8. Perlunya melakukan penyusunan Renstra SKPD yang baik, diawali dengan orientasi dan melibatkan seluruh pejabat/staf;
9. Meningkatkan komunikasi dan integrasi Program dan Kegiatan antar instansi, baik pada tataran perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan;
10. Perlunya melakukan evaluasi dan monitoring secara terus menerus dan berkelanjutan yang diiringi dengan pengelolaan data yang baik;
11. Pelaksanaan kegiatan sesuai Renstra dan RPJMD.
12. Dalam penyusunan dokumen perencanaan tahap berikutnya memiliki data dan informasi yang akurat, sehingga perencanaan dan penganggaran dapat dilakukan dengan baik, efektif, dan efisien.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2024

3.1 Tujuan dan Sasaran

Sebagaimana Tema Pembangunan Kabupaten Takalar Tahun 2024 adalah ”Optimalisasi Pengembangan Sumber Daya Alam untuk Pemulihan Ekonomi Menuju Takalar yang Unggul, Sejahtera dan Bermartabat” dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Takalar Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Penegakan kedisiplinan dan meningkatkan kinerja aparatur serta penata kelolaan pemerintahan daerah dan desa.

Sedangkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 dan termuat dalam RKPD Kabupaten Takalar tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran RKPD Kabupaten Takalar 2025

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target tahun 2024 Triwulan II
T1 : Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio Efesiensi PAD	14,68%
S1 : Meningkatnya Efektifitas Perolehan Pajak dan retribusi	Kontribusi PAD terhadap Total APBD	16,7%
	Persentase Peningkatan PAD	10%
	Persentase Wajib Pajak dan Retribusi yang Memenuhi Kewajibannya Tepat waktu dan Tepat jumlah	20%
T2 : Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi BAPENDA	68,8

S2 : Meningkatnya tata kelola kinerja pada Bapenda	Nilai SAKIP BAPENDA	B

3.2 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Badan pendapatan Daerah Tahun 2024

Berdasarkan Kebijakan yang telah ditetapkan pada Tahun 2020 dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, disusun 2 (dua) Program dan 9 (Sembilan) Kegiatan dan 46 (Empat Puluh Enam) Sub Kegiatan Tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan :

1) Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah;
2) Administrasi Keuangan Perangkat daerah;
3) Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat daerah;
4) Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah;
5) Administrasi umum Perangkat daerah;
6) Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah;
7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

II. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Kegiatan :

1) Pengelolaan Pendapatan Daerah.

TABEL 3.2.
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target Kinerja 2024			Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						BADAN PENDAPATAN DAERAH																	
	5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
	5	**2**				**KEUANGAN**																	
	5	**2**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/ KOTA**	**40,440,942,719**	**7,459,835,958**	**100%**	**100%**	**100%**	**9,317,606,299**	**9,621,473,299**	**9,161,208,643**						**100 %**	**9,045,247,984**	
	5	**2**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja**	**Persentase pemenuhan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1,388,631,200**	**257,697,500**	**100%**	**100%**	**100%**	**189,121,600**	**168,497,900**	**189,121,600**	**Kab. Takalar**	**Pajak Daerah**				**100 %**	**100,000,000**	**Bapenda**
	5	2	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	194,910,700	34,245,000	2 Dok	2 Dok	2 Dok	51,074,500	35,320,000	51,074,500	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manuasia yang berkualitas dan Berdaya Saing	01. Peningkatan TataKelola Penyelenggaraan Pemerintah yang akuntabel dan Invotif 06. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Pendapatan Daerah	2 Dok	20,364,300	Bapenda

	5	2	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	180,574,300	29,625,600	1 Dok	1 Dok	1 Dok	30,320,000	30,320,000	30,320,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manuasia yang berkualitas dan Berdaya Saing	01. Peningkatan TataKelola Penyelenggaraan Pemerintah yang akuntabel dan Invotif 06. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Pendapatan Daerah	1 Dok	17,041,500	Bapenda
	5	2	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	159,050,100	28,258,300	2 Dok	2 Dok	2 Dok	23,073,700	18,204,500	23,073,700	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manuasia yang berkualitas dan Berdaya Saing	01. Peningkatan TataKelola Penyelenggaraan Pemerintah yang akuntabel dan Invotif 06. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Pendapatan Daerah	2 Dok	12,914,200	Bapenda
	5	2	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	154,843,300	18,276,300	1 Dok	1 Dok	1 Dok	6,000,000	6,000,000	6,000,000	Kab. Takalar	Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manuasia yang berkualitas dan Berdaya Saing	01. Peningkatan TataKelola Penyelenggaraan Pemerintah yang akuntabel dan Invotif 06. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Pendapatan Daerah	1 Dok	9,978,900	Bapenda
	5	2	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	181,164,400	34,303,800	2 Dok	2 Dok	2 Dok	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Takalar	Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manuasia yang berkualitas dan Berdaya Saing	01. Peningkatan TataKelola Penyelenggaraan Pemerintah yang akuntabel dan Invotif 06. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Pendapatan Daerah	2 Dok	5,565,600	Bapenda
	5	2	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD (SAKIP dan LPPD)	267,920,800	62,825,400	14 lap	14 lap	14 lap	52,503,200	52,503,200	52,503,200	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manuasia yang berkualitas dan Berdaya Saing	01. Peningkatan TataKelola Penyelenggaraan Pemerintah yang akuntabel dan Invotif 06. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Pendapatan Daerah	14 lap	20,741,600	Bapenda

	5	2	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	250,167,600	50,163,100	6 lap	6 lap	6 lap	21,150,200	21,150,200	21,150,200	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manuasia yang berkualitas dan Berdaya Saing	01. Peningkatan TataKelola Penyelenggaraan Pemerintah yang akuntabel dan Invotif 06. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Pendapatan Daerah	6 Lap	13,393,900	Bapenda
	5	**2**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**32,119,117,048**	**5,686,368,107**	**100%**	**100%**	**100%**	**7,902,398,788**	**8,091,031,188**	**7,746,001,132**	**Kab. Takalar**	**Pajak Daerah**				**100 %**	**6,963,964,692**	Bapenda
	5	2	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31,494,292,448	5,488,307,407	2094 Org/Bln	2094 Org/Bln	2094 Org/Bln	7,811,203,988	8,011,230,988	7,654,806,332	Kab. Takalar	DAU	Meningkatkan Sumber Daya Manuasia yang berkualitas dan Berdaya Saing	01. Peningkatan TataKelola Penyelenggaraan Pemerintah yang akuntabel dan Invotif 06. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Pendapatan Daerah	1912 Orang/Bln	6,863,964,692	Bapenda
	5	2	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60,910,400	21,146,000	12 Dok	12 Dok	12 Dok	6,000,000	6,000,000	6,000,000	Kab. Takalar	Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manuasia yang berkualitas dan Berdaya Saing	01. Peningkatan TataKelola Penyelenggaraan Pemerintah yang akuntabel dan Invotif 06. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Pendapatan Daerah	12 Dok	12,833,400	Bapenda
	5	2	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	88,841,200	15,764,200	12 Dok	12 Dok	12 Dok	23,394,600	12,000,000	23,394,600	Kab. Takalar	Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manuasia yang berkualitas dan Berdaya Saing	01. Peningkatan TataKelola Penyelenggaraan Pemerintah yang akuntabel dan Invotif 06. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Pendapatan Daerah	12 Dok	15,034,300	Bapenda

	5	2	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	125,318,400	43,578,600	12 Dok	12 Dok	12 Dok	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manuasia yang berkualitas dan Berdaya Saing	01. Peningkatan TataKelola Penyelenggaraan Pemerintah yang akuntabel dan Invotif 06. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Pendapatan Daerah	12 Dok	16,979,200	Bapenda
	5	2	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	135,756,600	54,709,200	1 lap	1 lap	2 lap	20,000,200	20,000,200	20,000,200	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manuasia yang berkualitas dan Berdaya Saing	01. Peningkatan TataKelola Penyelenggaraan Pemerintah yang akuntabel dan Invotif 06. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Pendapatan Daerah	2 Lap	23,984,900	Bapenda
	5	2	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	95,008,000	27,974,100	12 Dok	12 Dok	12 Dok	6,000,000	6,000,000	6,000,000	Kab. Takalar	Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manuasia yang berkualitas dan Berdaya Saing	01. Peningkatan TataKelola Penyelenggaraan Pemerintah yang akuntabel dan Invotif 06. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Pendapatan Daerah	12 Dok	14,631,700	Bapenda
	5	2	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	118,990,000	34,888,600	16 lap	16 lap	16 lap	25,800,000	25,800,000	25,800,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manuasia yang berkualitas dan Berdaya Saing	01. Peningkatan TataKelola Penyelenggaraan Pemerintah yang akuntabel dan Invotif 06. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Pendapatan Daerah	16 Lap	16,536,500	Bapenda

	5	**2**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**303,182,000**	**58,709,250**	**100%**	**100%**	**100%**	**21,138,300**	**21,138,300**	**21,138,300**	**Kab. Takalar**	**Pajak Daerah**				**100 %**	**30,553,600**	**Bapenda**
	5	2	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian BMD dan Hasil Koordinasi Penilaian BMD SKPD	85,511,200	13,826,200	1 Lap	1 Lap	1 Lap	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Takalar	Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manuasia yang berkualitas dan Berdaya Saing	01. Peningkatan TataKelola Penyelenggaraan Pemerintah yang akuntabel dan Invotif 06. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Pendapatan Daerah	2 Lap	5,054,700	Bapenda
	5	2	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian BMD pada SKPD	94,332,000	21,440,450	2 lap	2 lap	2 lap	8,567,200	8,567,200	8,567,200	Kab. Takalar	Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manuasia yang berkualitas dan Berdaya Saing	01. Peningkatan TataKelola Penyelenggaraan Pemerintah yang akuntabel dan Invotif 06. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Pendapatan Daerah	1 Lap	7,498,000	Bapenda
	5	2	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKP	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada SKPD	78,429,200	19,329,400	1 lap	1 lap	1 lap	5,883,300	5,883,300	5,883,300	Kab. Takalar	Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manuasia yang berkualitas dan Berdaya Saing	01. Peningkatan TataKelola Penyelenggaraan Pemerintah yang akuntabel dan Invotif 06. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Pendapatan Daerah	4 Lap	12,000,800	Bapenda

	5	2	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan BMD pada SKPD	44,909,600	4,113,200	12 Dok	12 Dok	12 Dok	1,687,800	1,687,800	1,687,800	Kab. Takalar	Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manuasia yang berkualitas dan Berdaya Saing	01. Peningkatan TataKelola Penyelenggaraan Pemerintah yang akuntabel dan Invotif 06. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Pendapatan Daerah	1 Lap	6,000,100	Bapenda
	5	**2**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**400,048,000**	**69,213,050**	**100%**	**100%**	**100%**	**67,145,000**	**67,145,000**	**67,145,000**	**Kab. Takalar**	**Pajak Daerah**				**100 %**	**82,474,000**	**Bapenda**
	5	2	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian dinas beserta Atribut	153,100,000	38,000,000	50 pasang	50 pasang	51 pasang	20,955,000	20,955,000	20,955,000	Kab. Takalar	Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manuasia yang berkualitas dan Berdaya Saing	01. Peningkatan TataKelola Penyelenggaraan Pemerintah yang akuntabel dan Invotif 06. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Pendapatan Daerah	50 Paket	22,500,000	Bapenda
	5	2	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	85,000,000	-	12 Dok	12 Dok	12 Dok	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manuasia yang berkualitas dan Berdaya Saing	01. Peningkatan TataKelola Penyelenggaraan Pemerintah yang akuntabel dan Invotif 06. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Pendapatan Daerah	12 Dok	29,987,000	Bapenda
	5	2	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	161,948,000	31,213,050	12 Dok	12 Dok	12 Dok	36,190,000	36,190,000	36,190,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manuasia yang berkualitas dan Berdaya Saing	01. Peningkatan TataKelola Penyelenggaraan Pemerintah yang akuntabel dan Invotif 06. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Pendapatan Daerah	12 Dok	29,987,000	Bapenda

	5	**2**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentasi Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat**	**2,523,660,679**	**741,192,412**	**100%**	**100%**	**100%**	**508,396,700**	**510,396,700**	**508,396,700**	**Kab. Takalar**	**Pajak Daerah**				**100 %**	**466,001,570**	**Bapenda**
	5	2	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	62,338,000	38,800,000	1 Paket	1 Paket	1 Paket	2,654,400	2,654,400	2,654,400	Kab. Takalar	Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manuasia yang berkualitas dan Berdaya Saing	01. Peningkatan TataKelola Penyelenggaraan Pemerintah yang akuntabel dan Invotif 06. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Pendapatan Daerah	1 Paket	5,054,700	Bapenda
	5	2	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	999,713,599	475,970,856	5 Paket	5 Paket	5 Paket	293,858,000	293,858,000	293,858,000	Kab. Takalar	Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manuasia yang berkualitas dan Berdaya Saing	01. Peningkatan TataKelola Penyelenggaraan Pemerintah yang akuntabel dan Invotif 06. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Pendapatan Daerah	5 Paket	84,020,000	Bapenda
	5	2	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	38,409,080	5,825,270	1 Paket	1 Paket	1 Paket	3,320,800	3,320,800	3,320,800	Kab. Takalar	Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manuasia yang berkualitas dan Berdaya Saing	01. Peningkatan TataKelola Penyelenggaraan Pemerintah yang akuntabel dan Invotif 06. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Pendapatan Daerah	1 Paket	5,852,270	Bapenda
	5	2	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	162,200,000	31,900,000	35 Dok	35 Dok	36 Dok	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Takalar	Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manuasia yang berkualitas dan Berdaya Saing	01. Peningkatan TataKelola Penyelenggaraan Pemerintah yang akuntabel dan Invotif 06. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Pendapatan Daerah	50 Paket	321,087,600	Bapenda

	5	2	01	2.06	07	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	136,000,000	18,000,000	60 Lap	60 Lap	60 Lap	16,000,000	18,000,000	16,000,000	Kab. Takalar	Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manuasia yang berkualitas dan Berdaya Saing	01. Peningkatan TataKelola Penyelenggaraan Pemerintah yang akuntabel dan Invotif 06. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Pendapatan Daerah	100 Dok	29,992,000	Bapenda
	5	2	01	2.06	08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,125,000,000	170,696,286	50 Lap	50 Lap	50 Lap	187,563,500	187,563,500	187,563,500	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manuasia yang berkualitas dan Berdaya Saing	01. Peningkatan TataKelola Penyelenggaraan Pemerintah yang akuntabel dan Invotif 06. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Pendapatan Daerah	60 Lap	19,995,000	Bapenda
	5	**2**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Pengadaan BMD Penunjang**	**632,424,800**	**130,125,000**	**100%**	**100%**	**100%**	**79,958,000**	**79,958,000**	**79,958,000**	**Kab. Takalar**	**Pajak Daerah**				**100 %**	**5,100,000**	**Bapenda**
	5	2	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	632,424,800	130,125,000	4 Paket	4 Paket	4 Paket	79,958,000	79,958,000	79,958,000	Kab. Takalar	Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manuasia yang berkualitas dan Berdaya Saing	01. Peningkatan TataKelola Penyelenggaraan Pemerintah yang akuntabel dan Invotif 06. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Pendapatan Daerah	5 Unit	5,100,000	Bapenda
	5	**2**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2,519,968,992**	**440,970,639**	**100%**	**100%**	**100%**	**427,151,911**	**438,546,211**	**427,151,911**	**Kab. Takalar**	**Pajak Daerah**				**100 %**	**947,078,522**	**Bapenda**

	5	2	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	503,968,992	42,570,639	36 lap	36 lap	36 lap	109,151,911	120,546,211	109,151,911	Kab. Takalar	DAU	Meningkatkan Sumber Daya Manuasia yang berkualitas dan Berdaya Saing	01. Peningkatan TataKelola Penyelenggaraan Pemerintah yang akuntabel dan Invotif 06. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Pendapatan Daerah	36 Lap	109,151,522	Bapenda
	5	2	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2,016,000,000	398,400,000	420 Lap	420 Lap	420 Lap	318,000,000	318,000,000	318,000,000	Kab. Takalar	Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manuasia yang berkualitas dan Berdaya Saing	01. Peningkatan TataKelola Penyelenggaraan Pemerintah yang akuntabel dan Invotif 06. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Pendapatan Daerah	24 Lap	837,927,000	Bapenda
	5	**2**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**553,910,000**	**75,560,000**	**100%**	**100%**	**100%**	**122,296,000**	**244,760,000**	**122,296,000**	**Kab. Takalar**	**Pajak Daerah**				**100 %**	**450,075,600**	**Bapenda**
	5	2	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	467,510,000	75,560,000	15 Unit	15 Unit	15 Unit	122,296,000	122,380,000	122,296,000	Kab. Takalar	Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manuasia yang berkualitas dan Berdaya Saing	01. Peningkatan TataKelola Penyelenggaraan Pemerintah yang akuntabel dan Invotif 06. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Pendapatan Daerah	15 Unit	399,999,600	Bapenda

	5	2	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	86,400,000	-	0	0	13 Unit	-	122,380,000	-	Kab. Takalar	Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manuasia yang berkualitas dan Berdaya Saing	01. Peningkatan TataKelola Penyelenggaraan Pemerintah yang akuntabel dan Invotif 06. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Pendapatan Daerah	38 Unit	50,076,000	Bapenda
	5	**2**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**PERSENTASE PEMENUHAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH**	**18,004,721,270**	**3,666,239,847**	**98%**	**98%**	**98%**	**3,224,551,800**	**3,024,551,800**	**3,074,551,800**	**Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Pajak Daerah**				**98%**	**2,528,200,500**	**Bapenda**
	5	**2**	**04**	**2.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Pengelolaan Pendapatan**	**18,004,721,270**	**3,666,239,847**	**98%**	**98%**	**98%**	**3,224,551,800**	**3,024,551,800**	**3,074,551,800**	**Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Pajak Daerah**				**98%**	**2,528,200,500**	**Bapenda**
	5	2	04	2.01		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	732,918,300	291,315,557	8 Dok	8 Dok	8 Dok	101,593,100	101,593,100	101,593,100	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manuasia yang berkualitas dan Berdaya Saing	01. Peningkatan TataKelola Penyelenggaraan Pemerintah yang akuntabel dan Invotif 06. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Pendapatan Daerah	8 Dok	90,000,000	Bapenda
	5	2	04	2.01		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1,538,733,670	363,666,985	8 lap	8 lap	8 lap	184,406,800	184,406,800	184,406,800	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manuasia yang berkualitas dan Berdaya Saing	01. Peningkatan TataKelola Penyelenggaraan Pemerintah yang akuntabel dan Invotif 06. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Pendapatan Daerah	8 Dok	48,283,500	Bapenda

	5	2	04	2.01		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	605,794,100	86,513,000	12 lap	12 lap	12 lap	108,599,800	108,599,800	108,599,800	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manuasia yang berkualitas dan Berdaya Saing	01. Peningkatan TataKelola Penyelenggaraan Pemerintah yang akuntabel dan Invotif 06. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Pendapatan Daerah	12 Lap	80,000,000	Bapenda
	5	2	04	2.01		Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	5,509,990,000	1,160,616,600	5 Paket	5 Paket	5 Paket	700,000,000	700,000,000	700,000,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manuasia yang berkualitas dan Berdaya Saing	01. Peningkatan TataKelola Penyelenggaraan Pemerintah yang akuntabel dan Invotif 06. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Pendapatan Daerah	50 Unit	650,000,000	Bapenda
	5	2	04	2.01		Pendataan dan Pedaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1,275,038,000	244,038,100	1500 lap	1500 lap	1500 lap	300,000,000	300,000,000	150,000,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manuasia yang berkualitas dan Berdaya Saing	01. Peningkatan TataKelola Penyelenggaraan Pemerintah yang akuntabel dan Invotif 06. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Pendapatan Daerah	6000 Lap	80,000,000	Bapenda
	5	2	04	2.01		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Palaporan Basis Data Pajak Daerah	675,581,600	139,040,817	12 Lap	12 Lap	12 Lap	35,000,000	35,000,000	35,000,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manuasia yang berkualitas dan Berdaya Saing	01. Peningkatan TataKelola Penyelenggaraan Pemerintah yang akuntabel dan Invotif 06. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Pendapatan Daerah	12 Lap	80,000,000	Bapenda

	5	2	04	2.01		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOPnya	572,052,900	148,872,054	2000 Wajib Pajak	2000 Wajib Pajak	2000 Wajib Pajak	86,750,000	86,750,000	86,750,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manuasia yang berkualitas dan Berdaya Saing	01. Peningkatan TataKelola Penyelenggaraan Pemerintah yang akuntabel dan Invotif 06. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Pendapatan Daerah	2000 Objek Pajak	75,000,000	Bapenda
	5	2	04	2.01		Penetapan wajib pajak daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Wajib Pajak Daerah	1,270,694,900	274,172,000	60000 Dok Ketetapan	60000 Dok Ketetapan	60000 Dok Ketetapan	370,655,900	370,655,900	370,655,900	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manuasia yang berkualitas dan Berdaya Saing	01. Peningkatan TataKelola Penyelenggaraan Pemerintah yang akuntabel dan Invotif 06. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Pendapatan Daerah	6000 Dok	210,000,000	Bapenda
	5	2	04	2.01		Pelayanan dan konsultasi pajak daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum ditindaklanjuti	356,709,200	48,046,860	3000 lap	3000 lap	3000 lap	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manuasia yang berkualitas dan Berdaya Saing	01. Peningkatan TataKelola Penyelenggaraan Pemerintah yang akuntabel dan Invotif 06. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Pendapatan Daerah	3000 Layanan	35,000,000	Bapenda
	5	2	04	2.01		Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	711,864,100	163,305,930	530 Dok	530 Dok	530 Dok	70,000,000	70,000,000	70,000,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manuasia yang berkualitas dan Berdaya Saing	01. Peningkatan TataKelola Penyelenggaraan Pemerintah yang akuntabel dan Invotif 06. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Pendapatan Daerah	500 Dok	85,000,000	Bapenda

	5	2	04	2.01		Penagihan pajak daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	3,084,299,200	499,740,014	600 Dok	600 Dok	600 Dok	810,000,000	810,000,000	810,000,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manuasia yang berkualitas dan Berdaya Saing	01. Peningkatan TataKelola Penyelenggaraan Pemerintah yang akuntabel dan Invotif 06. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Pendapatan Daerah	170000 Dok	769,917,000	Bapenda
	5	2	04	2.01		Penyelesaian keberatan pajak daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	349,399,500	37,050,000	12 Dok	12 Dok	12 Dok	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manuasia yang berkualitas dan Berdaya Saing	01. Peningkatan TataKelola Penyelenggaraan Pemerintah yang akuntabel dan Invotif 06. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Pendapatan Daerah	12 Dok	35,000,000	Bapenda
	5	2	04	2.01		Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan	271,091,200	20,319,500	12 lap	12 lap	12 lap	40,000,000	40,000,000	40,000,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manuasia yang berkualitas dan Berdaya Saing	01. Peningkatan TataKelola Penyelenggaraan Pemerintah yang akuntabel dan Invotif 06. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Pendapatan Daerah	12 Dok	45,000,000	Bapenda
	5	2	04	2.01		Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	497,255,300	104,281,510	12 lap	12 lap	12 lap	265,796,200	65,796,200	265,796,200	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manuasia yang berkualitas dan Berdaya Saing	01. Peningkatan TataKelola Penyelenggaraan Pemerintah yang akuntabel dan Invotif 06. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Pendapatan Daerah	12 Lap	145,000,000	Bapenda

	5	2	04	2.01		Elektronifikasi transaksi Pemerintah daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi	553,299,300	85,260,920	12 lap	12 lap	12 lap	91,750,000	91,750,000	91,750,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manuasia yang berkualitas dan Berdaya Saing	01. Peningkatan TataKelola Penyelenggaraan Pemerintah yang akuntabel dan Invotif 06. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Badan Pendapatan Daerah	12 Lap	100,000,000	Bapenda
												JUMLAH	**12,542,158,099**	**12,646,025,099**	**12,235,760,443**						**11,573,448,484**	

Takalar, 2024
Kepala Badan pendapatan Daerah
Kabupaten Takalar

RUSDI, S.Sos, M.Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. :19731220 200003 1 009

TABEL 3.3.
RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) TAHUN 2024
KABUPATEN : TAKALAR
PERANGKAT DAERAH: BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target			Pagu			Keterangan
						Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						BADAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH									
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5	2				KEUANGAN	KEUANGAN									
1	5	2	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	100%	100%	100%	**9,317,606,299**	**9,519,633,299**	**9,161,208,643**	Bapenda
1	5	2	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Persentase pemenuhan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	**189,121,600**	**168,497,900**	**189,121,600**	Bapenda
	5	2	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	2 Dok	2 Dok	51,074,500	35,320,000	51,074,500	
	5	2	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	30,320,000	30,320,000	30,320,000	
	5	2	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	2 Dok	2 Dok	2 Dok	23,073,700	18,204,500	23,073,700	

	5	2	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	6,000,000	6,000,000	6,000,000	
	5	2	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	2 Dok	2 Dok	2 Dok	5,000,000	5,000,000	5,000,000	
	5	2	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD (SAKIP dan LPPD)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD (SAKIP dan LPPD)	14 lap	14 lap	14 lap	52,503,200	52,503,200	52,503,200	
	5	2	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 lap	6 lap	6 lap	21,150,200	21,150,200	21,150,200	
2	5	2	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	**7,902,398,788**	**8,091,031,188**	**7,746,001,132**	Bapenda
	5	2	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2094 Org/Bln	2094 Org/Bln	2094 Org/Bln	7,811,203,988	8,011,230,988	7,654,806,332	
	5	2	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dok	12 Dok	12 Dok	6,000,000	6,000,000	6,000,000	
	5	2	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dok	12 Dok	12 Dok	23,394,600	12,000,000	23,394,600	
	5	2	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dok	12 Dok	12 Dok	10,000,000	10,000,000	10,000,000	
	5	2	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 lap	1 lap	1 lap	20,000,200	20,000,200	20,000,200	

	5	2	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 Dok	12 Dok	12 Dok	6,000,000	6,000,000	6,000,000	
	5	2	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	16 lap	16 lap	16 lap	25,800,000	25,800,000	25,800,000	
3	5	2	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%	**21,138,300**	**21,138,300**	**21,138,300**	Bapenda
	5	2	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian BMD dan Hasil Koordinasi Penilaian BMD SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian BMD dan Hasil Koordinasi Penilaian BMD SKPD	1 Lap	1 Lap	1 Lap	5,000,000	5,000,000	5,000,000	
	5	2	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian BMD pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian BMD pada SKPD	2 lap	2 lap	2 lap	8,567,200	8,567,200	8,567,200	
	5	2	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKP	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKP	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada SKPD	1 lap	1 lap	1 lap	5,883,300	5,883,300	5,883,300	
	5	2	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan BMD pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan BMD pada SKPD	12 Dok	12 Dok	12 Dok	1,687,800	1,687,800	1,687,800	
4	5	2	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	**67,145,000**	**67,145,000**	**67,145,000**	Bapenda
	5	2	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian dinas beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian dinas beserta Atribut	50 pasang	50 pasang	50 pasang	20,955,000	20,955,000	20,955,000	

	5	2	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dok	12 Dok	12 Dok	10,000,000	10,000,000	10,000,000	
	5	2	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dok	12 Dok	12 Dok	36,190,000	36,190,000	36,190,000	
5	5	2	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentasi Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat	Persentasi Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat	100%	100%	100%	**508,396,700**	**510,396,700**	**508,396,700**	Bapenda
	5	2	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	2,654,400	2,654,400	2,654,400	
	5	2	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	293,858,000	293,858,000	293,858,000	
	5	2	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	3,320,800	3,320,800	3,320,800	
	5	2	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	35 Dok	35 Dok	35 Dok	5,000,000	5,000,000	5,000,000	
	5	2	01	2.06	07	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	60 Lap	60 Lap	60 Lap	16,000,000	18,000,000	16,000,000	
	5	2	01	2.06	08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Lap	50 Lap	50 Lap	187,563,500	187,563,500	187,563,500	

6	5	2	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan BMD Penunjang	Persentase Pemenuhan Pengadaan BMD Penunjang	100%	100%	100%	**79,958,000**	**79,958,000**	**79,958,000**	Bapenda
	5	2	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	79,958,000	79,958,000	79,958,000	
7	5	2	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	**427,151,911**	**438,546,211**	**427,151,911**	Bapenda
	5	2	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 lap	36 lap	36 lap	109,151,911	120,546,211	109,151,911	
	5	2	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	420 Lap	420 Lap	420 Lap	318,000,000	318,000,000	318,000,000	
8	5	2	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	**122,296,000**	**142,920,000**	**122,296,000**	Bapenda
	5	2	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	15 Unit	15 Unit	122,296,000	122,380,000	122,296,000	
	5	2	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	0	13 Unit	-	20,540,000	-	

2	5	2	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	PERSENTASE PEMENUHAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH	PERSENTASE PEMENUHAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH	98%	98%	98%	**3,224,551,800**	**3,024,551,800**	**3,074,551,800**	Bapenda
1	5	2	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Pendapatan	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Pendapatan	98%	98%	98%	**3,224,551,800**	**3,024,551,800**	**3,074,551,800**	Bapenda
	5	2	04	2.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	8 Dok	8 Dok	8 Dok	101,593,100	101,593,100	101,593,100	
	5	2	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	8 lap	8 lap	8 lap	184,406,800	184,406,800	184,406,800	
	5	2	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 lap	12 lap	12 lap	108,599,800	108,599,800	108,599,800	
	5	2	04	2.01	04	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	5 Paket	5 Paket	5 Paket	700,000,000	700,000,000	700,000,000	
	5	2	04	2.01	05	Pendataan dan Pedaftaran Objek Pajak Daerah	Pendataan dan Pedaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1500 lap	1500 lap	1500 lap	300,000,000	300,000,000	150,000,000	
	5	2	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Palaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Palaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Lap	12 Lap	12 Lap	35,000,000	35,000,000	35,000,000	

	5	2	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOPnya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOPnya	2000 Wajib Pajak	2000 Wajib Pajak	2000 Wajib Pajak	86,750,000	86,750,000	86,750,000	
	5	2	04	2.01	08	Penetapan wajib pajak daerah	Penetapan wajib pajak daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Wajib Pajak Daerah	60000 Dok Ketetapan	60000 Dok Ketetapan	60000 Dok Ketetapan	370,655,900	370,655,900	370,655,900	
	5	2	04	2.01	09	Pelayanan dan konsultasi pajak daerah	Pelayanan dan konsultasi pajak daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum ditindaklanjuti	3000 lap	3000 lap	3000 lap	30,000,000	30,000,000	30,000,000	
	5	2	04	2.01	10	Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	530 Dok	530 Dok	530 Dok	70,000,000	70,000,000	70,000,000	
	5	2	04	2.01	11	Penagihan pajak daerah	Penagihan pajak daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	600 Dok	600 Dok	600 Dok	810,000,000	810,000,000	810,000,000	
	5	2	04	2.01	12	Penyelesaian keberatan pajak daerah	Penyelesaian keberatan pajak daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	12 Dok	12 Dok	12 Dok	30,000,000	30,000,000	30,000,000	
	5	2	04	2.01	13	Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan	12 lap	12 lap	12 lap	40,000,000	40,000,000	40,000,000	

	5	2	04	2.01	14	Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah	Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 lap	12 lap	12 lap	265,796,200	65,796,200	265,796,200	
	5	2	04	2.01	15	Elektronifikasi transaksi Pemerintah daerah	Elektronifikasi transaksi Pemerintah daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi	12 lap	12 lap	12 lap	91,750,000	91,750,000	91,750,000	
	J U M L A H												**12,542,158,099**	**12,544,185,099**	**12,235,760,443**	

Takalar, 2024
Kepala Badan pendapatan Daerah
Kabupaten Takalar

RUSDI, S.Sos, M.Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. :19731220 200003 1 009

BAB IV
PENUTUP

Dokumen Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 ini menjadi instrumen utama bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar dalam meningkatkan kinerja pembangunan dan menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan sebagai dasar penyusunan Rencana kegiatan dan Anggaran Perubahan Tahun 2024 yang dapat dimanfaatkan oleh yang berkepentingan serta dapat menjadi pedoman sebagai alat kendali mulai perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan sampai dengan evaluasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar tahun 2024 akan ditentukan oleh koordinasi dan sinergitas antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar dengan Bappelitbangda Kabupaten Takalar dan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Takalar, serta adanya pengendalian dan evaluasi yang cermat dan akurat. Oleh sebab itu, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar harus melakukan langkah-langkah penyempurnaan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sehingga bermanfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kemajuan daerah, terkhusus bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar.

Dokumen ini sekaligus menjadi acuan dalam mensinergikan program dan kegiatan antara program prioritas Pemeritah Daerah dengan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar.

Berdasarkan dengan cakupan kewenangan, maka Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 mempunyai fungsi pokok;

1. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan seluruh program/kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar;
2. Menciptakan kepastian arah kebijakan dan program kegitan prioritas yang merupakan komitmen Badan pendapatan Daerah Kabupaten Takalar dengan pemangku kepentingan; dan

3. Menjadi acuan dalam menyusun Perubahan RKA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar dengan pemangku kepentingan Kebijakan umum anggaran dan Perubahan Prioritas plafon anggaran sementara.

Dalam pelaksanaan Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar telah berpedoman pada kaidah - kaidah yang sudah ada yaitu RPJP dan RPJM Nasional serta RPJP dan RPJM Propinsi, visi dan misi kepala daerah Kabupaten Takalar, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, DPA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar.

Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2023 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud pada tahun 2024 yang akan datang.

Dokumen Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2023 ini diharapkan akan menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program dan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar sehingga seluruh program dan kegiatan akan dapat dicapai secara terukur, terarah, efektif dan efisien sehingga dapat mendukung pencapaian Visi Kabupaten Takalar yaitu Terwujudnya Kabupaten Takalar yang Unggul, Sejahtera dan Bermartabat**.**

Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Takalar adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan visi Pemerintah Kabupaten Takalar.

Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi setiap langkah kita. Aamiin.

Takalar, 2024
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TAKALAR

RUSDI, S.Sos, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19731220 200003 1 009

PERUBAHAN RENJA

TAHUN 2024

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN TAKALAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatakn kehadirat Allah SWT karena dengan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar Tahun 2024 dapat diselesaiakn.

Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar tahun 2023 memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada rencana strategis (RENSTRA) tahun 2023 – 2026 dan bersifat indikatif. Selanjutnya Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2024 menjadi landasan atau pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Tahun Anggaran 2024.

Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dan ikut berpartisipasi hingga tersusunnya Perubahan Renja ini. Perlu disadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Renja Perubahan ini, oleh karena itu masukan serta saran sangat kami harapkan.

Akhirnya semoga Perubahan Rencana Kerja ini dapat dilaksanakan dengan baik dan menjadi acuan dalam pelaksanaan sejumlah program dan kegiatan bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar agar kegiatan dapat berjalan lancar, tertib dan mencapai sasaran yang ditetapkan.

Takalar, Agustus 2024

Kepala Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Kab. Takalar,



Muhsin, S.Sos
Pembina Tk.I/(IV/b)
NIP. 196908091993031006

DAFTAR TABEL

TABEL II.1 Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 11

TABEL II.2 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang ada dalam APBD 2024..... 14

TABEL II.3 Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Pada APBD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Takalar Tahun 2024 Hingga Triwulan II..... 15

TABEL II.4 Rekapitulasi Capaian Anggaran Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan 18

TABEL II.5 Rekapitulasi Capaian Kinerja Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan 21

TABEL II.6 Capaian Indikator Kinerja Utama 2023, Asumsi Capaian Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2024, dan Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar Tahun 2025..... 24

TABEL II.7 Asumsi Capaian Tahun 2024 dan Target Tahun 2025 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar..... 27

TABEL II.8 Penetapan Target Indikator TPB/SDGs Kabupaten Takalar Tahun 2024..... 29

TABEL III.1 Tujuan, Sasaran Serta Target Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Kabupaten Takalar Tahun 2024..... 38

TABEL III.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar..... 47

TABEL III.3 Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu Pada Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Tahun 2024..... 60

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR TABEL 2

DAFTAR ISI 3

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 4
1.2 Landasan Hukum 6
1.3 Maksud dan Tujuan 8
1.4 Sistematika Penulisan 9

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAN
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Sampai dengan Triwulan II..... 10
2.1.1 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2024 yang terakomodir di APBD 2024..... 11
2.1.2 Evaluasi program kinerja kegiatan dan sub kegiatan dalam pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2024..... 13
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan 19
2.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)..... 20
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)..... 23
2.2.3 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)..... 25
2.2.4 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)..... 25
2.3 Hambatan, upaya pencapaian dan rekomendasi pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Tahun 2024
2.3.1 Hambatan dalam pelaksanaan kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Dan tahun 2024 sampai dengan triwulan II
..... 28
2.3.2 Upaya dalam pencapaian pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2024 sampai dengan triwulan II..... 28
2.3.3 Rekomendasi pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2024 sampai dengan triwulan selanjutnya..... 29

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

3.1 Tujuan dan Sasaran..... 30
3.2 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024..... 44

BAB IV PENUTUP..... 4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan bersasaran, maka diperlukan perencanaan pembangunan nasional.

Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka melakukan perubahan yang mengandung makna adanya kemajuan dan/atau perbaikan, pertumbuhan mencapai kondisi yang lebih baik dibanding keadaan sebelumnya. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi, dan politik sampai pada perkembangan adanya penyelarasan dengan konservasi lingkungan. Nilai dalam pembangunan adalah optimalisasi sumberdaya dengan tetap menjaga kesinambungan serta kualitas lingkungan yang baik. Perencanaan Pembangunan Daerah secara umum merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Lebih lanjut lagi, pembangunan yang dilakukan di daerah, diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang di hadapi dan mengembangkan potensi yang dimiliki guna meningkatkan daya saing daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta harus mendukung pelaksanaan pembangunan di tingkat nasional untuk mencapai cita-cita bersama sebagai suatu bangsa

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka setiap PD diharuskan untuk Menyusun Rencana Kerja PD (Renja PD) sebagai acuan perencanaan kegiatan PD untuk kurung waktu satu tahun. Penyusunan Renja PD ini mengacu pada Rancangan Awal RKPD, Renstra PD, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 360 ayat (1) dan ayat (3) mengamanahkan bahwa Perangkat Daerah menyusun rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada :

a. Rancangan Perubahan RKPD; dan
b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 perlu dilakukan penyesuaian target indikator kinerja Tahun 2024 melalui perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar Tahun 2024. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 dalam Pasal 361 ayat (1), Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360 ayat (3), terdiri atas:

a Perumusan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
b Penyajian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun I (Pertama) pelaksanaan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar Kabupaten Takalar Tahun 2023 – 2026.

Dokumen ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar tahun 2024 dalam penyusunannya selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan memperhatikan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar Tahun 2024 selanjutnya menjadi landasan penyusunan Perubahan RKA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2024. Dalam menyempurnakan
Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan , maka

Dinas Perpustakan dan Kearsopan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l9 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan (Lembaran Negara 2018 Nomor 184);
8. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 119);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan di Daerah (Berita Negara 2019 Nomor 1789;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah, dan RencanaKerjaPemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2008 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor 223 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 223);
16. Peraturan Bupati Takalar Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar (Berita Daerah Tahun 2023
    Nomor 42);
17. Peraturan Bupati Takalar Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Kalender Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah Tahun 2024;

18. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar Nomor 559 Tahun 2023 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan KabupatenTakalar Tahun Anggaran 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Maksud

Adapun Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah :

- Dihasilkannya dokumen perencanaan pembangunan Urusan Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024 yang karena adanya beberapa perubahan dari rencana kerja sebelumnya, sehingga dapat memberikan gambaran hubungan sinergitas antara kebijakan di tingkat nasional dengan kebijakan pemerintah daerah akibat terjadinya refocusing anggaran.
- Dirumuskannya pedoman perencanaan pembangunan urusan Perpustakaan dan Kearsipan bagi para penyelenggara di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

b. Tujuan

Adapun Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar tidak lain adalah:

- Mengevaluasi kinerja pembangunan urusan kependudukan dan sampai triwulan 2 dan dapat mencarikan solusi atas permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan tahun berjalan.
- Mengarahkan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kedalam suatu strategi program/kegiatan.
- Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan seluruh program/kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar.

- Menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan RKA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan .

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Berisi mengenai Latar Belakang Penyusunan Renja, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan yang dipergunakan.

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Sampai Triwulan II Tahun 2024

Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sampai dengan Triwulan II, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan , Hambatan serta Upaya Pencapaian dan Rekomendasi Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024

BAB III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisikan rumusan tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan , Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024.

BAB IV. Penutup

Bab ini berisikan uraian penutup, yang menjelaskan poin-poin yang menjadi harapan berkenaan dengan pelaksanaa Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar Tahun 2024.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Pencatatan

Sipil Sampai dengan Triwulan II

Pada dasarnya penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar sampai dengan triwulan II. Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Evaluasi atas perencanaan bertujuan untuk mengetahui apa yang harus dicapai oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar. Secara garis besar, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2024 sampai pada Triwulan II telah dicapai dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari tingkat pencapaian target yang rata-rata mencapai untuk penyerapan dana dan rata-rata mencapai untuk kinerja *output* dan *outcome* kegiatan.

Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*)dan dampak (*impact*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana,sumber daya manusia,laporan, buku dan indikator lainnya.

Rumusan Evaluasi dapat di lihat dari program dan kegiatan yang sesuai target, di bawah target, melebihi target serta faktor yang menjadi penghambat dan faktor pendukung tercapainya 100% Program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar.

Kegiatan evaluasi Renja SKPD dan pencapaian realisasi kinerja sampai dengan triwulan II ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Berikut tabel evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024:

Tabel 2.1.1
Capaian Realisasi Kinerja Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Takalar Sampai Pada Triwulan II Tahun 2024

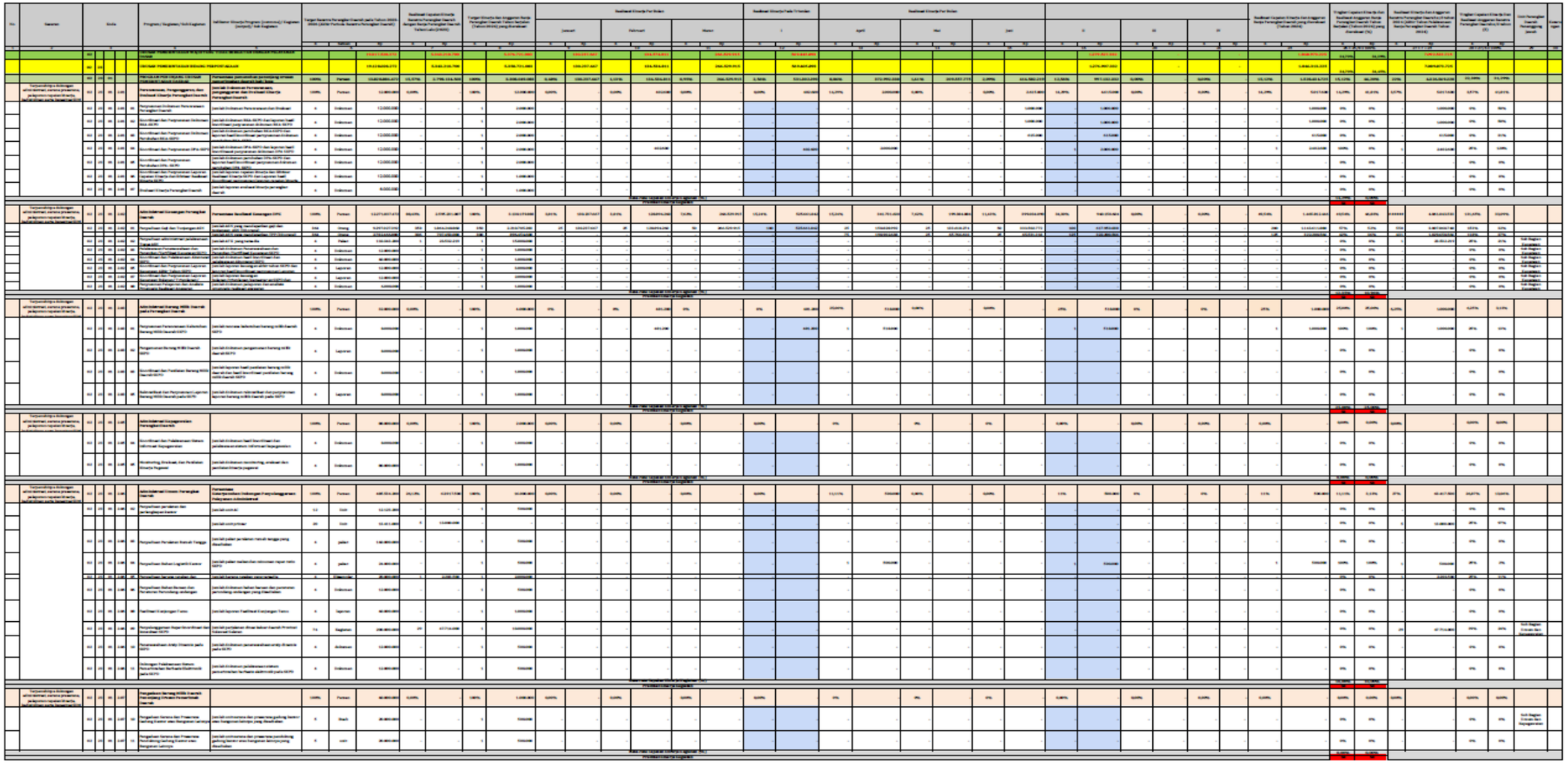

Kepala Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Kab. Takalar,

Muhsin, S.Sos
Pembina Tk.I/(IV/b)
NIP. 196908091993031006

2.1.1 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2024 yang terakomodir di APBD 2024

Informasi tentang Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar Tahun 2024 yang terakomodir di APBD Tahun 2024 memberikan gambaran seberapa banyak jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar pada Tahun 2024. Adapun jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan dimaksud dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel II.2

Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang ada dalam APBD 2024

APBD 2024							
No	**Perangkat Daerah**	**Jumlah Program**	**Jumlah Kegiatan**	**Jumlah Sub Kegiatan**	**Indikator**		
					Jumlah Program	**Jumlah Kegiatan**	**Jumlah Sub Kegiatan**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Pencatatan	6	21	74	6	21	74

Sumber: Renja Pokok 2024 dan SIPD 2024

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah program sebanyak 6, jumlah kegiatan 21, dan jumlah sub kegiatan 74, Sedangkan untuk jumlah indikator program sebanyak 6, jumlah indikator kegiatan sebanyak 21, dan jumlah indikator sub kegiatan sebanyak 74.

2.1.2 Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja APBD Triwulan II Tahun 2024

Informasi tentang realisasi anggaran kegiatan memberikan gambaran seberapa besar anggaran yang telah terserap pada Triwulan II untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam APBD 2024. Gambaran sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.3

Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Pada APBD
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Takalar Tahun 2024
Hingga Triwulan II

No	Program	Pagu APBD	Realisasi S/D Triwulan II	Persentase	
		(Rp)	(Rp)	Keu	Fisik
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota	3.308.049.083	1.605.992.761	48,55	53,57
2	Pembinaan Perpustakaan	1.975.672.000	314.454.500	15,92	64,34
3	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	75.000.000	44.984.000	59,98	82,00
4	Pengelolaan Arsip	5.500.000	1.000.000	18,18	58,33
5	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	10.500.000	1.660.000	15,81	60,80
6	Perizinan dan Penggunaan Arsip	2.000.000	0	0,00	50,00
	Total	**5.376.721.083**	**1.968.091.261**	**36,60%**	**61,51%**

Sumber : Laporan Realisasi Renja DPK Tahun 2024 Triwulan II

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa total jumlah anggaran yang terealisasi dalam APBD untuk pelaksanaan kegiatan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Semester I Tahun 2024 sebesar Rp. 1.968.091.261,- anggaran tersebut dilaksanakan dalam 6 Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar. Realisasi serapan anggaran dari pelaksanaan kegiatan hingga triwulan II adalah sebesar 36,60 % dengan capaian realisasi fisik sebesar 61,51 %. Kondisi ini menunjukkan capaian realisasi fisik sudah cukup baik karena telah melampaui target 50 persen yang diharapkan pada triwulan II. Semua program dari 6 program yang ada dapat dikategorikan memiliki kinerja baik atau kategori Tinggi dari sisi realisasi fisik dan 1 program dengan kategori Sangat Tinggi sebab persentase diperoleh telah mencapai nilai 82 persen.

Sebagian besar penyerapan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan hingga triwulan II dalam kategori rendah yaitu 0 - 2 0 persen dengan jumlah sebanyak 4 (empat) Program atau 66,67 persen dari jumlah keseluruhan Program, selebihnya sebanyak 2 (dua) Program atau 33,33 persen dari jumlah keseluruhan Program dengan realisasi anggaran yang tergolong Tinggi dengan serapan anggaran lebih dari >45 persen hingga triwulan II.

2.1.2.1 Evaluasi Capaian Pendanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024

Informasi tentang capaian pendanaan memberikan gambaran capaian berdasarkan realisasi anggaran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan dimulai dari program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terdapat pada Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan . Capaian kinerja pendanaan tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori **Rendah** untuk realisasi 0 – 20%, Kategori **Sedang** Untuk realisasi anggaran lebih besar dari >20 – 45 persen dan kategori **Tinggi** untuk realisasi anggaran diatas 45 persen. Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 45 persen didasarkan atas tingkat capaian yang diharapkan untuk triwulan II adalah 45 persen, sehingga jika terdapat realisasi dengan capaian realisasi pendanaan lebih dari 45 persen dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi.

Evaluasi Hasil capaian pendanaan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II Sebagai berikut:

1. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Program

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pendanaan pada level program anggaran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan menggunakan kategori tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa jumlah program yang dilaksanakan anggaran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebanyak 4 program dengan rincian capaian yang masuk pada kategori rendah tidak ada atau 0% (realisasinya 0-20 persen). Untuk capaian kinerja kategori tinggi sebanyak 2 program atau 33,33 persen (realisasi diatas 45 persen).

2. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Kegiatan

Untuk evaluasi pelaksanaan Capaian kinerja pendanaan pada level kegiatan pada masing-masing perangkat daerah dapat dijelaskan bahwa terdapat 21 kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2024. Dari keseluruhan kegiatan tersebut terdapat 11 kegiatan atau 52,38 persen yang realisasi pendanaannya hingga triwuan II masih dalam kategori rendah yaitu 0 – 20 persen, sedang yang berada dalam kategori sedang sebanyak 4 kegiatan atau 26,67 persen, dan kategori tinggi dengan capaian realisasi diatas 43 persen sebanyak 9 kegiatan atau 60 persen.

3. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Sub Kegiatan

Adapun evaluasi capaian kinerja pendanaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada level sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 31 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2024 terdapat 9 sub kegiatan atau 29,04 persen yang capaian kinerja pendanaanya masih rendah, sedangkan yang masuk dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan sedang terdapat 6 sub kegiatan atau 19,35 persen, dan 16 sub kegiatan dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan tinggi atau 51,61 persen sebab telah dapat mencapai realisasi pendanaan lebih dari 43 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan II.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas capaian kinerja pendanaan berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL II.4
REKAPITULASI CAPAIAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No. Urut	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat capaian pendanaan			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat capaian pendanaan			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan berdasarkan tingkat capaian pendanaan		
		0-20%	>20-45%	>45%		0-20%	>20-45%	>45%		0-20%	>20-45%	>45%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1.	6	4	0	2	21	11	5	5	74	34	20	20

4

Sumber : Laporan Realisasi Renja DPK Tahun 2024 Triwulan II

Keterangan:

0-20	Rendah
>20-43	Sedang
>43	Tinggi

2.1.2.2 Evaluasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2024

Informasi tentang capaian kinerja memberikan gambaran capaian kinerja realisasi target kinerja pada masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan . Capaian kinerja tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori **Rendah** dengan realisasi 0 – 20 persen, Kategori **Sedang** untuk realisasi kinerja lebih besar dari 20 – 43 persen dan kategori **Tinggi** dengan realisasi kinerja diatas 43 persen. Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 43 persen didasarkan atas tingkat capaian yang diharapkan untuk triwulan II adalah 43 persen, sehingga jika terdapat capaian realisasi kinerja lebih dari 45 persen dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi.

Kegiatan evaluasi Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta pencapaian realisasi kinerja sampai dengan triwulan II ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

1. Evaluasi Capaian Kinerja Outcome pada Level Program

Untuk evaluasi pelaksanaan kinerja outcome pada level program dapat digambarkan sebagai berikut: untuk pencapaian target kinerja program pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dijelaskan bahwa dari 5 Program yang dilaksanakan sampai dengan triwulan kedua tidak terdapat capaian kinerja atau 0% program yang masuk pada kategori rendah atau dibawah 20 persen, begitupun pencapaian kinerja dengan kategori sedang (diatas 20-43 persen) tidak ada program atau 0% program yang msuk kategori sedang, semua program atau 100% yang capaian kinerja masuk dalam kategori tinggi yang pencapaiannya lebih dari 43 persen pada triwulan II Tahun 2024.

2. Evaluasi Capaian Kinerja *Outcome* pada Level Kegiatan

Sebagai gambaran pencapaian target kinerja kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 15 kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan kedua terdapat 0 kegiatan (0 persen) yang capaian kinerjanya kategori masih rendah atau dibawah 20 persen, sedangkan yang capaian kinerja kategori sedang terdapat 3 kegiatan (20 persen), selebihnya terdapat 12 kegiatan (80 persen)

yang capaian kinerja masuk dalam kategori pencapaian lebih dari 43 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan II Tahun 2024.

3. Evaluasi Capaian Kinerja *Outcome* pada Level Sub Kegiatan

Sebagai gambaran pencapaian target kinerja sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 31 sub kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan kedua dapat dijelaskan bahwa yang capaian kinerja masih rendah atau dibawah 20 persen terdapat 5 sub kegiatan (16,13 persen), sedangkan yang capaian kinerja sedang sebanyak 3 kegiatan (9,68 persen), selebihnya yang capaian kinerja masuk dalam kategori tinggi sebanyak 23 sub kegiatan (74,19 persen), yaitu pencapaian lebih dari 43 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan II Tahun 2024.

Evaluasi Hasil capaian kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Dinas Kependudukan Kabupaten Takalar Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL II.5
REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No. Urut	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat capaian kinerja outcome			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat capaian kinerja outcome			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan berdasarkan tingkat capaian kinerja outcome		
		0-20%	>20-43%	>43%		0-20%	>20-43%	>43%		0-20%	>20-43%	>43%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1.	5	0	0	5	13	0	3	12	24	5	3	23

Sumber : Laporan Realisasi Renja Disdukcapil Tahun 2024 Triwulan II

Keterangan:

0-20	Rendah
>20-43	Sedang
>43	Tinggi

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Analisis kinerja pelayanan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja OPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai target indikator sasaran dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan. Untuk menganalisis kinerja pelayanan atau tingkat capaian kinerja sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar tahun 2024 sampai dengan Triwulan II dan pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah.Proses ini dimaksud untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan sasaran. Pencapaian setiap indikator kinerja dilakukan dengan metedologi perbandingan capaian kinerja dengan target kinerja tahun 2024 sampai dengan triwulan II sebagai tolak ukur dari keberhasilan suatu kegiatan.

Dalam Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip, yakni 1) Sederhana, 2) Partisipatif, 3). Akuntabel, 4) Berkelanjutan, 5) Transparansi dan 6) Keadilan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan instansi yang berhubungan langsung dengan masyarakat yang bertugas memberikan pelayanan dalam pengurusan dokumen Perpustakaan dan Kearsipan seperti pelayanan pendaftaran penduduk, diantaranya untuk pengurusan KTP- EL, KK, KIA, Pindah Datang Penduduk, serta pelayanan yang diantaranya berupa pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengesahan anak dan pengakuan anak, dan lainnya.

Agar sasaran strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar dapat tercapai , maka diperlukan poin-poin yang menjadi indikator kinerja sebagai tolak ukur penilaian dalam menentukan keberhasilan dari suatu kegiatan. Ada beberapa indikator kinerja yang dapat diukur untuk melihat capaian pelayanan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar, seperti Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci, dan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB/SDGs).

2.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan oleh Kepala Dinas. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran Organisasi. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program. Penetapan Target indikator kinerja utama selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini.

Indikator kinerja dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait target capaian keberhasilan dalam mewujudkan arah kebijakan RENSTRA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang digariskan pada tahun yang penetapannya dijadikan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Penetapan IKU daerah merupakan ukuran tingkat keberhasilan pencapaian indikator sasaran RENSTRA yang digariskan pada Tahun 2024. Penetapan IKU juga merupakan upaya pencapaian prioritas pembangunan Kabupaten Takalar. Lebih lanjut Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini :

Tabel II.6
Capaian Indikator Kinerja Utama 2023, Asumsi Capaian Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2024, dan Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023		Asumsi Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2024
			Target	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	Persen	90	92	92	93
2	Persentase penduduk yang berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP	Persen	98	98	98	98
3	Persentase Anak Usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir	Persen	97	48	97	98
4	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	50	27	50	55
5	Persentase Penerbitan Akta Perkawinan	Persen	100	0	100	100

6	Persentase Penerbitan Akta Perceraian	Persen	100	0	100	100
7	Cakupan penerbitan Akta Kematian	Persen	85	100	100	100
8	Persentase Penyajian Data Base Kependudukan yang akurat	Persen	100	100	100	100
9	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian Kerjasama	Persen	50	50	50	55
9	Nilai SAKIP Disdukcapil	Nilai	B	BB	BB	BB

Sumber: Data Agregat Kependudukan

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Indikator Kinerja Kunci disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintah kabupaten. Penetapan target indikator kinerja kunci selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel II.7

Asumsi Capaian Tahun 2024 dan Target Tahun 2025 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar

No.	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Realisasi Capaian Tahun 2023	Asumsi Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025
1	Persentase penduduk yang berumur 17 tahun ke atas yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).	Persen	98	98	98
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA	Persen	27	50	55
3	Persentase Anak Usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir	Persen	43	98	98
4	Persentase OPD yang telah 25% memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian Kerjasama	Persen	50	50	55
5	Persentase Penerbitan Akta Perkawinan	Persen	N/A	100	100
6	Persentase Penerbitan Akta Perceraian	Persen	N/A	100	100
7	Persentase Penerbitan Akte Kematian	Persen	100	100	100
8	Persentase Penyajian Data Kependudukan	Buah	3	3	3
9	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/Belum	Sudah	Sudah	Sudah

Sumber: Data Agregat Kependudukan

2.2.3 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dinas Kependudukan dan Kabupaten Takalar bukan pengampuh indikator SPM.

2.2.4 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan /Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistainable Development Goals (TPB/SDGs) kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global. TPB/SDGs bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan. Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penetapan target tahun 2024 indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistainable Development Goals (TPB/SDGs) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan disajikan pada tabel berikut:

Tabel II.8

Penetapan Target Indikator TPB/SDGs Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar Tahun 2024

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target 2024	OPD Penang. Jawab
	Tujuan 1 : Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun					
	1.4. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.					
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan	%	47	97	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Tujuan 16 : Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan					
	16.9.Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.					
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga , menurut umur.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan	%	N/A	N/A	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan	%	N/A	N/A	Dinas

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target 2024	OPD Penang. Jawab
	penduduk 40% berpendapatan bawah.					Kependudukan dan
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan	%	47	97	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Tujuan 17 : Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan					
	17.19.Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.					
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan	%	100	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

2.3 Hambatan, Upaya Pencapaian dan Rekomendasi Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024

2.3.1 Hambatan Dalam Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan sampai dengan Triwulan II

Hambatan dan kendala dalam pelaksanakan kegiatan triwulan kedua dipengaruhi oleh:

1. Adanya peraturan pemerintah pusat yang menyebabkan harus dilakukan penyesuaian anggaran.
2. Terdapatnya beberapa kegiatan yang proses pengadaan barang dan jasanya belum dilaksanakan, baik dikarenakan masih dalam tahapan proses lelang ataupun belum masuk pada tahapan kegiatannya.
3. Terdapatnya beberapa belanja barang yang harga dan spesifikasinya tidak lagi sesuai dengan harga saat ini.
4. Perlunya Dukungan keterampilan tambahan bagi sumberdaya aparatur pengelola kegiatan untuk melakukan pengukuran atau estimasi perencanaan program terhadap alokasi anggaran yang dialokasikan baik yang dipengaruhi oleh fluktuasi aktifitas kedewanan maupun kalkulasi evaluasi pada program dan kegiatan.

2.3.2 Upaya Dalam Pencapaian Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sampai dengan Triwulan II

Merujuk dari faktor penghambat Pelaksanaan rencana kerja Dinas Kependududkan dan sampai dengan triwulan ke II tentunya mengalami berbagai kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Berikut dapat disampaikan beberapa upaya yang dilakukan dalam pencapaian keberhasilan kinerja :

1. Adanya komitmen pimpinan dan Koordinasi yang baik untuk melaksanakan kegiatan secara maksimal;
2. Adanya koordinasi/konsultasi yang sinergi antar struktur jabatan internal dan eksternal serta adanya komunikasi yang terjalin antar pemimpin dan yang dipimpin dalam organisasi;
3. Tersedianya Sarana dan prasarana pendukung yang memadai;
4. Penyerapan program dan kegiatan masing-masing bidang dan kesekretariatan berjalan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan;
5. Adanya pedoman/dokumen Standar Pelayanan/SOP dan regulasi yang sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan;

6. Kualitas SDM yang mampu, terampil dan memadai serta memiliki komitmen dan motivasi untuk melakukan tugas dan fungsi secara maksimal dalam rangka memberikan pelayanan prima.

2.3.3. Rekomendasi pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2024 sampai dengan Triwulan Selanjutnya

Berdasarkan uraian di atas terkait faktor penghambat pencapaian kinerja, serta upaya dalam pencapaian pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan , maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyampaikan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Meningkatkan komunikasi dan integrasi program dalam lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta pengendalian dan evaluasi internal yang dilakukan secara terus menerus;
2. Perlunya Peran aktif seluruh KPA dan PPTK didalam mengawal pelaksanaan Program dan Kegiatan yang berjalan;
3. Peran aktif Kepala Dinas selaku PA didalam mengawasi, mengontrol dan membuat kebijakan serta keputusan;
4. Peran aktif Sub Bagian Perencanaan Program didalam berkoordinasi termasuk memberikan informasi, sosialisasi maupun kebijakan-kebijakan lainnya;
5. Perlunya tenaga SDM yang berkompeten didalam perencanaan;
6. Peningkatan kualitas SDM aparatur serta jumlah staf yang berkompeten;
7. Peningkatan sarana dan prasarana operasional sesuai dengan kebutuhan;
8. Menyediakan informasi kependudukan dalam rangka perencanaan pembangunan dan kepentingan publik;
9. Perlunya melakukan penyusunan Renstra Disdukcapil yang baik, diawali dengan orientasi dan melibatkan seluruh pejabat/staf;
10. Perlunya melakukan evaluasi dan monitoring secara terus menerus dan berkelanjutan yang diiringi dengan pengelolaan data yang baik;
11. Adanya Kesesuaian Renstra dan RPJMD dalam pelaksanaan kegiatan;
12. Dalam penyusunan dokumen perencanaan tahap berikutnya memiliki data dan informasi yang akurat, sehingga perencanaan dan penganggaran dapat dilakukan dengan baik, efektif, dan efisien.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 mengacu pada RPD yang di dalamnya memuat Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 .

Adapun Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai tahun 2024 sebagai penjabaran Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2023-2026 dan disesuaikan dengan tupoksi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan menyesuaikan dengan kebijakan pembangunan nasional 2023-2026, dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel III.1
Tujuan, Sasaran Serta Target Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar Tahun 2024

NO	Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Asumsi Capaian Tahun 2024
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
1.	Tujuan 1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi Perpustakaan dan Kearsipan		Indeks kepuasan Masyarakat atas layanan kependudukan dan pencatata sipil	Nilai	84,70	83,35
		Sasaran 1.1 Meningkatnya tertib administrasi Perpustakaan dan Kearsipan	Persentase tertib Administrasi Perpustakaan dan Kearsipan (KTP EL+ KK + KIA+AKTA LAHIR + AKTA KEMATIAN+ AKTA NIKAH+AKTA CERAI)	Persen	84,5	85
		Sasaran 1.2 Meningkatnya kualitas pengelolaan Informasi administrasi kependudukan dan pencatatan sip	Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian Kerjasama	Persen	50	50

NO	Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Asumsi Capaian Tahun 2024
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
			Persentase Penyajian Database Kependudukan yang akurat	Persen	100	100
2.	Tujuan 2 Meningkatkan Tata Kelola Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Nilai	N/A	N/A
		Sasaran 2.1 Meningkatnya Tata kelola Kinerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Nilai SAKIP Disdukcapil	Nilai/Predikat	70,44 / BB	71,05 / BB

3.2 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar disusun guna menjadi acuan dalam pelaksanaan sejumlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setelah adanya perubahan dalam rencana kerja, yang diharapkan target capaian kinerja masing-masing bidang tercapai sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Tahun 2023-2026 disusun suatu Rencana Kinerja Tahunan (*Yearly Performance Plan*). Rencana Kerja merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indicator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategik maupun tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar Tahun 2024 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Perubahan Rencana Kinerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan yang baru untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar adalah dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar.

Di dalam Perubahan Renja Tahun 2024 ini terdapat rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar, dimana di dalammya terdapat 5 Program, 15 Kegiatan serta 31 Sub Kegiatan, dimana untuk penyebaran kegiatannya adalah untuk kegiatan rutin berlokasi di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar
, sedangkan yang sifatnya mempunyai sasaran kelompok masyarakat berlokasi pada Kecamatan ataupun Desa/Kelurahan, dan kegiatan yang sifatnya koordinasi selain berlokasi pada Daerah setempat yakni pada Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar serta ada juga yang berlokasi di luar daerah.

Jumlah dana yang program ,kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan Renja Dinas Kependudkan dan yang dimaksud bersumber dari Dana Alakosi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai
Rp. 4.654.233.524.

Rumusan perubahan rencana program dan kegiatan tahun 2024 beserta pendanaan yang diharapkan dapat terlaksananya tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL III.2
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TAKALARTAHUN 2024

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Prakiraan Maju Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target Kinerja 2024			Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024			Sumber Dana Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																	
	2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
	2	**12**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**4.737.982.148**	**4.737.982.148**	**4.654.233.524**							**4.707.742.036,00**	
	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota														93%	3.747.742.036,00	
	2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	93%	89,50%	93%	93%	93%	3.854.548.148	3.854.548.148	3.770.799.524		DAU/Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Disdukcapil			
							Persentase capaian laporan dalam Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	33.230.000	33.230.000	33.230.000	Takalar	Pajak Daerah				100 %	40.000.000,00	
							Persentase pemenuhan perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah																

	2	1 2	0 1	2.0 1	000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Takalar	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Disdukcapil	3 Dokumen	10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN
	2	1 2	0 1	2.0 1	000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	13.230.000	13.230.000	13.230.000	Takalar	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Disdukcapil	1 Dokumen	15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN
	2	1 2	0 1	2.0 1	000 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Takalar	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Disdukcapil	1 Dokumen	5.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN
	2	1 2	0 1	2.0 1	000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Takalar	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Disdukcapil	1 Laporan	10.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN
	2	1 2	0 1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	81,47%	100%	100%	100%	3.257.915.440	3.257.915.440	3.174.166.816	Takalar	DAU/Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Disdukcapil	100%	2.813.933.900,00	

	2	1 2	0 1	2.0 2	000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	144 Orang/bulan	86%	35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	3.247.915.440	3.247.915.440	3.164.166.816	Takalar	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Disdukcapil	35 Orang/bulan	2.803.933.900,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN
	2	1 2	0 1	2.0 2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Takalar	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Disdukcapil	1 Laporan	10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN
	2	1 2	0 1	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase capaian kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah	100%	100%	100%	100%	100%	7.400.000	7.400.000	7.400.000	Takalar	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Disdukcapil	100%	15.000.000,00	
	2	1 2	0 1	2.0 3	000 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.400.000	2.400.000	2.400.000	Takalar	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Disdukcapil	1 Dokumen	5.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN

	2	1 2	0 1	2.0 3	000 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	32 Laporan	100%	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Takalar	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Disdukcapil	8 Laporan	10.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN
	2	1 2	0 1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase capaian kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase pemenuhan kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	95%	0%	95%	95%	95%	7.500.000	7.500.000	7.500.000	Takalar	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Disdukcapil	95%	7.500.000	
	2	1 2	0 1	2.0 5	000 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	0%	2 Orang	2 Orang	2 Orang	7.500.000	7.500.000	7.500.000	Takalar	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Disdukcapil	2 Orang	7.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN
	2	1 2	0 1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	95 Persen	100%	95 Persen	95 Persen	95 Persen	170.046.000	170.046.000	170.046.000	Takalar	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Disdukcapil	95%	491.859.068,00	

	2	1 2	0 1	2.0 6	000 1	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	40 Paket	100%	10 Paket	10 Paket	10 Paket	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Takalar	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggara an pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Disdukcapil	10 Paket	4.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKA N DAN
	2	1 2	0 1	2.0 6	000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	100%	7 Paket	7 Paket	7 Paket	32.331.300	32.331.300	32.331.300	Takalar	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggara an pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Disdukcapil	10 Paket	50.000.000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN
	2	1 2	0 1	2.0 6	000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	80 Paket	100%	20 Paket	20 Paket	20 Paket	100.012.700	100.012.700	100.012.700	Takalar	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggara an pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Disdukcapil	20 Paket	50.000.000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN
	2	1 2	0 1	2.0 6	000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Takalar	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggara an pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Disdukcapil	1 Dokumen	5.000.000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN

	2	1 2	0 1	2.0 6	000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	33.202.000	33.202.000	33.202.000	Takalar	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Disdukcapil	1 Laporan	50.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN
	2	1 2	0 1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	331.859.688	331.859.688	331.859.688	Takalar	DAU/Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Disdukcapil	85 Persen	332.859.068,00	
	2	1 2	0 1	2.0 8	000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	91.459.688	91.459.688	91.459.688	Takalar	Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Disdukcapil	12 Laporan	91.459.068,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN
	2	1 2	0 1	2.0 8	000 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4.000.000	4.000.000	4.000.000	Takalar	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Disdukcapil	1 Laporan	5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN
	2	1 2	0 1	2.0 8	000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	236.400.000	236.400.000	236.400.000	Takalar	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Disdukcapil	1 Laporan	236.400.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN

	2	1 2	0 1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	95%	100%	95%	95%	95%	46.590.000	46.590.000	46.590.000	Takalar	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Disdukcapil	95 %	46.590.000,00	
	2	1 2	0 1	2.0 9	000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	100%	4 Unit	4 Unit	4 Unit	46.590.000	46.590.000	46.590.000	Takalar	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Disdukcapil	4 Unit	46.590.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN
	2	2	1 2	02		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Perekaman KTP-el, Persentase Anak Usia 01-7 Tahun Kurang 1 (satu) hari yang Memiliki KIA, Persentase Kepala Keluarga yang memiliki KK, Persentase penduduk yang sudah mempunyai KTP Elektronik,	90%	100%	87%	87%	87%	726434000	726434000	726434000		Pajak Daerah					710.000.000,00	
	2	1 2	0 2	2.0 1		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase pemenuhan pelayanan pendaftaran penduduk yang sesuai standar pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	659.834.000	659.834.000	659.834.000	Takalar	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat	100%	630.000.000,00	

	2	1 2	0 2	2.0 1	000 2	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	9 Dokumen	100%	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	659.834.000	659.834.000	659.834.000	Takalar	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat	9 Dokumen	600.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN
	2	1 2	0 2	2.0 1	000 4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Takalar	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat	3 Laporan	30.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN
	2	1 2	0 2	2.0 2		Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase pemenuhan penataan pendaftaran penduduk	100%	100%	100%	100%	100%	41.600.000	41.600.000	41.600.000	Takalar	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat	100%	50.000.000	
	2	1 2	0 2	2.0 2	000 2	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	4 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	41.600.000	41.600.000	41.600.000	Takalar	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat	1 Dokumen	50.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN

	2	1 2	0 2	2.0 3		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang tertib administrasi kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Takalar	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat	100%	30.000.000	
	2	1 2	0 2	2.0 3	000 1	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	4 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Takalar	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat dan Disdukcapil	1 Laporan	30.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN
	3	2	1 2	03		PROGRAM	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-18 tahun Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan Persentase kepemilikan akta kematian pada semua individu yang kematiaannya dilaporkan Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	100%	83,33%	99%	99%	99%	30.000.000	30.000.000	30.000.000		Pajak Daerah				99%	75.000.000,00	

	2	1 2	0 3	2.0 1		Pelayanan	Persentase pemenuhan pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan	95%	100%	95%	95%	95%	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Takalar	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat	99%	50.000.000,00	
	2	1 2	0 3	2.0 1	000 1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	13 Dokumen	100%	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Takalar	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat	13 Dokumen	25.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN
	2	1 2	0 3	2.0 1	000 2	Peningkatan dalam Pelayanan	Jumlah Layanan yang Ditingkatkan	12 Layanan	100%	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Takalar	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat	3 Layanan	25.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN
	2	1 2	0 3	2.0 2		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase penyelenggara an pendaftaran penduduk yang tertib administrasi	100%	67%	100%	100%	100%	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Takalar/Luar Daerah	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat	100%	25.000.000,00	

	2	1 2	0 3	2.0 2	000 2	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten/Kota	4 Laporan	67%	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Takalar	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat dan Disdukcapil	1 Laporan	25.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN
	4	2	1 2	04		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun Persentase Pemanfaatan data kependudukan	100%	100%	99%	99%	99%	115.000.000	115.000.000	115.000.000		Pajak Daerah				99%	125.000.000,00	
	2	1 2	0 4	2.0 1		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan yang tersedia	100%	100%	100%	100%	100%	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Takalar	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat	99%	50.000.000,00	

	2	1 2	0 4	2.0 1	000 1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	8 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Takalar	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat	2 Dokumen	25.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN
	2	1 2	0 4	2.0 1	000 2	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	20 Dokumen	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Takalar	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat	5 Dokumen	25.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN
	2	1 2	0 4	2.0 3		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduka n yang berkualitas Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang berkualitas	100%	100%	100%	100%	100%	90.000.000	90.000.000	90.000.000	Takalar	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat	100%	75.000.000,00	
	2	1 2	0 4	2.0 3	000 1	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Takalar	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat	1 Laporan	25.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN

	2	1 2	0 4	2.0 3	000 5	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	80.000.000	80.000.000	80.000.000	Takalar	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat dan Disdukcapil	1 Laporan	50.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN
	2	1 2	0 5			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase OPD yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama	100%	100%	100%	100%	100%	12.000.000	12.000.000	12.000.000		Pajak Daerah				100%	50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN
	2	1 2	0 5	2.0 1		Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase capaian Penyusunan Buku Profil kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Takalar	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat	100%	50.000.000,00	
	2	1 2	0 5	2.0 1	000 1	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Takalar	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat	3 Dokumen	50.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN

TABEL III.3
RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) TAHUN 2024

KABUPATEN : TAKALAR
PERANGKAT DAERAH : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target			Pagu			Keterangan
						Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN										
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN										
	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	93%	93%	93%	3.854.548.148	3.854.548.148	3.770.799.524	
	2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian laporan dalam Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian laporan dalam Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	33.230.000	33.230.000	33.230.000	
	2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	

	2	12	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	13.230.000	13.230.000	13.230.000	
	2	12	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
	2	12	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
	2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%	100%	3.257.915.440	3.257.915.440	3.174.166.816	
	2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	3.247.915.440	3.247.915.440	3.164.166.816	
	2	12	01	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	

	2	12	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah	Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah	100%	100%	100%	7.400.000	7.400.000	7.400.000	
	2	12	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.400.000	2.400.000	2.400.000	
	2	12	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
	2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	Persentase pemenuhan kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	95%	95%	95%	7.500.000	7.500.000	7.500.000	
	2	12	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	2 Orang	2 Orang	7.500.000	7.500.000	7.500.000	
	2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	95 Persen	95 Persen	95 Persen	170.046.000	170.046.000	170.046.000	
	2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	10 Paket	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
	2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	7 Paket	32.331.300	32.331.300	32.331.300	

	2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	20 Paket	100.012.700	100.012.700	100.012.700	
	2	12	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
	2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	33.202.000	33.202.000	33.202.000	
	2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	331.859.688	331.859.688	331.859.688	
	2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	91.459.688	91.459.688	91.459.688	
	2	12	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4.000.000	4.000.000	4.000.000	
	2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	236.400.000	236.400.000	236.400.000	
	2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	95%	95%	95%	46.590.000	46.590.000	46.590.000	

	2	12	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4 Unit	4 Unit	46.590.000	46.590.000	46.590.000	
	2	2	12	02		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Perekaman KTP-el, Persentase Anak Usia 01-7 Tahun Kurang 1 (satu) hari yang Memiliki KIA, Persentase Kepala Keluarga yang memiliki KK, Persentase penduduk yang sudah mempunyai KTP Elektronik,	Persentase Perekaman KTP-el, Persentase Anak Usia 01-7 Tahun Kurang 1 (satu) hari yang Memiliki KIA, Persentase Kepala Keluarga yang memiliki KK, Persentase penduduk yang sudah mempunyai KTP Elektronik,	87%	87%	87%	726.434.000	726.434.000	726.434.000	
	2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase pemenuhan pelayanan pendaftaran penduduk yang sesuai standar pelayanan	Persentase pemenuhan pelayanan pendaftaran penduduk yang sesuai standar pelayanan	100%	100%	100%	659.834.000	659.834.000	659.834.000	
	2	12	02	2.01	0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	659.834.000	659.834.000	659.834.000	
	2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	
	2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase pemenuhan penataan pendaftaran penduduk	Persentase pemenuhan penataan pendaftaran penduduk	100%	100%	100%	41.600.000	41.600.000	41.600.000	

	2	12	02	2.02	0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	41.600.000	41.600.000	41.600.000	
	2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang tertib administrasi kependudukan	Persentase penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang tertib administrasi kependudukan	100%	100%	100%	25.000.000	25.000.000	25.000.000	
	2	12	02	2.03	0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000	25.000.000	25.000.000	

	3	2	12	03		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	PROGRAM	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-18 tahun Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan Persentase kepemilikan akta kematian pada semua individu yang kematiaannya dilaporkan Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-18 tahun Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan Persentase kepemilikan akta kematian pada semua individu yang kematiaannya dilaporkan Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	99%	99%	99%	30.000.000	30.000.000	30.000.000	
	2	12	03	2.01		Pelayanan	Pelayanan	Persentase pemenuhan pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan	Persentase pemenuhan pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan	95%	95%	95%	20.000.000	20.000.000	20.000.000	
	2	12	03	2.01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
	2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan	Peningkatan dalam Pelayanan	Jumlah Layanan yang Ditingkatkan	Jumlah Layanan yang Ditingkatkan	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	15.000.000	15.000.000	15.000.000	
	2	12	03	2.02		Penyelenggaraan	Penyelenggaraan	Persentase penyelenggara an pendaftaran penduduk yang tertib administrasi	Persentase penyelenggara an pendaftaran penduduk yang tertib administrasi	100%	100%	100%	10.000.000	10.000.000	10000000	

	2	12	03	2.02	0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten/Kota	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
	4	2	12	04		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun Persentase Pemanfaatan data kependudukan	Persentase Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun Persentase Pemanfaatan data kependudukan	99%	99%	99%	115.000.000	115.000.000	115.000.000	
	2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan yang tersedia	Persentase data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan yang tersedia	100%	100%	100%	25.000.000	25.000.000	25.000.000	
	2	12	04	2.01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
	2	12	04	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	15.000.000	15.000.000	15.000.000	

	2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang berkualitas	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduka n yang berkualitas	100%	100%	100%	90.000.000	90.000.000	90.000.000	
	2	12	04	2.03	0001	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
	2	12	04	2.03	0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	80.000.000	80.000.000	80.000.000	
	2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase OPD yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama	Persentase OPD yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama	100%	100%	100%	12.000.000	12.000.000	12.000.000	
	2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase capaian Penyusunan Buku Profil kependudukan	Persentase capaian Penyusunan Buku Profil kependudukan	100%	100%	100%	12.000.000	12.000.000	12.000.000	
	2	12	05	2.01	0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	12.000.000	12.000.000	12.000.000	
												J U M L A H	**4.737.982.148**	**4.737.982.148**	**4.654.233.524**	

BAB IV
P E N U T U P

Dokumen Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar Tahun 2024 ini menjadi instrumen utama bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar dalam meningkatkan kinerja pembangunan melalui pembenahan administrasi kependudukan, peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan kepada Masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar tahun 2024 akan ditentukan oleh koordinasi dan sinergitas antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Bappelitbangda dan Badan Pengelola Keuangan Daerah, serta adanya pengendalian dan evaluasi yang cermat dan akurat. Oleh sebab itu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar harus melakukan langkah-langkah penyempurnaan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sehingga bermanfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kemajuan daerah, terkhusus bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan .

Dokumen ini sekaligus menjadi acuan dalam mensinergikan program dan kegiatan antara program prioritas Pemeritah Daerah dengan program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan .

Berdasarkan dengan cakupan kewenangan, maka Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar Tahun 2024 mempunyai fungsi pokok;

1. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan seluruh program/kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan

   Kabupaten Takalar;
2. Menciptakan kepastian arah kebijakan dan program kegitan prioritas yang merupakan komitmen Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan pemangku kepentingan; dan
3. Menjadi acuan dalam menyusun Perubahan RKA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan

   dengan pemangku kepentingan

Dalam pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar telah berpedoman pada kaidah - kaidah yang sudah ada yaitu RPJP dan RPJM Nasional serta RPJP dan RPJM Propinsi, visi dan misi kepala daerah Kabupaten Takalar, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja,
DPA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan .

Dokumen Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar Tahun 2024 ini diharapkan akan menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program dan kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sehingga seluruh program dan kegiatan akan dapat dicapai secara terukur, terarah, efektif dan efisien sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Takalar, Juli 2024

Kepala Dinas,



H. ABDUL WAHAB, S.Sos.,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP.196712311988031076

RENCANA KERJA

(Renja)

PERUBAHAN

2024

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura,
Perkebunan dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Takalar

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan tahun 2024.

Perubahan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar tahun 2023 memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada rencana strategis (RENSTRA) tahun 2023 – 2026 dan bersifat indikatif. Selanjutnya Perubahan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan tahun 2024 menjadi landasan atau pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Tahun Anggaran 2024.

Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dan ikut berpartisipasi hingga tersusunnya Perubahan Renja ini. Perlu disadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Renja Perubahan ini, oleh karena itu masukan serta saran sangat kami harapkan.

Akhirnya semoga Perubahan Rencana Kerja ini dapat dilaksanakan dengan baik dan menjadi acuan dalam pelaksanaan sejumlah program dan kegiatan bagi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar agar kegiatan dapat berjalan lancar, tertib dan mencapai sasaran yangditetapkan.

Takalar, Juli 2024

Kepala Dinas,

Drs. H. PARAWANGSA, M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19691216 199112 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR TABEL 2

DAFTAR ISI 3

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 5
1.2 Landasan Hukum 6
1.3 Maksud dan Tujuan 9
1.4 Sistematika Penulisan 10

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan sampai dengan Triwulan II 11
2.1.1 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan 2024 yang terakomodir di APBD 2024 16
2.1.2 Evaluasi Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan APBD Tahun 2024 16
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan 24
2.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) 25
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) 28
2.2.3 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) 30
2.3 Hambatan, upaya pencapaian dan rekomendasi pelaksanaan Renja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Tahun 2024 33
2.3.1 Hambatan dalam pelaksanaan Rerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan tahun 2024 sampai dengan triwulan II 33
2.3.2 Upaya dalam pencapaian pelaksanaan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan tahun 2024 sampai dengan triwulan II 33
2.3.3 Rekomendasi pelaksanaan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan tahun 2024 sampai dengan triwulan selanjutnya 34

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN

3.1 Tujuan dan Sasaran 36
3.2 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Tahun 2024 39

BAB IV PENUTUP 84

DAFTAR TABEL

TABEL II.1 Capaian realisasi kinerja Renja DinasTanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 12

TABEL II.2 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang ada dalam APBD 2024 16

TABEL II.3 Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Pada APBD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kab. Takalar Tahun 2024 Hingga Triwulan II… 17

TABEL II.4 Rekapitulasi Capaian Anggaran Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan 20

TABEL II.5 Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Utama 2023, Asumsi Capaian Target Infikator Kinerja Utama Tahun 2024, dan Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Tangan Tahun 2025 26

TABEL II.6 Asumsi Capaian Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2024, dan Target Tahun 2025, Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar 29

TABEL II.7 Penetapan Target Indikator TPB/SDGs Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar Tahun 2024 31

TABEL III.1 Tujuan, Sasaran Serta Target Kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar Tahun 2024 37

TABEL III.2 Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar Tahun 2024 47

TABEL III.3 Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu Pada Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Tahun 2024 75

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan bersasaran, maka diperlukan perencanaan pembangunan nasional.

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka setiap PD diharuskan untuk Menyusun Rencana Kerja PD (Renja PD) sebagai acuan perencanaan kegiatan PD untuk kurung waktu satu tahun. Penyusunan Renja PD ini mengacu pada Rancangan Awal RKPD, Renstra PD, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyaratSesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 360 ayat (1) dan ayat (3) mengamanahkan bahwa Perangkat Daerah menyusun rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada :

a. Rancangan Perubahan RKPD; dan
b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 perlu dilakukan penyesuaian target indikator kinerja Tahun 2024 melalui perubahan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar Tahun 2024. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 dalam Pasal 361 ayat (1), Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360 ayat (3), terdiri atas:

a Perumusan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
b Penyajian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun I (Pertama) pelaksanaan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar Kabupaten Takalar Tahun 2023 – 2026.

Dokumen ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar tahun 2024 dalam penyusunannya selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan memperhatikan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar Tahun 2024 selanjutnya menjadi landasan penyusunan Perubahan RKA Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2024. Dalam menyempurnakan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan , maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Pangan Kabupaten Takalar Tahun 2024 mengacu pada beberapa landasan hukum yang terkait dan masih berlaku. Beberapa landasan hukum tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l9 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
15. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 259/Kpts/Rc.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2008 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 06 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar Tahun 2012- 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2019 Nomor 2);
20. Peraturan Bupati Takalar Nomor 45 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2021 Nomor 45);
21. Peraturan Bupati Takalar Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 3);
22. Renstra Dinas Tanaman Panga, Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Maksud

Adapun Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan adalah :

- Dihasilkannya dokumen perencanaan pembangunan Urusan Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Tahun 2024 yang karena adanya beberapa perubahan dari rencana kerja sebelumnya, sehingga dapat memberikan gambaran hubungan sinergitas antara kebijakan di tingkat nasional dengan kebijakan pemerintah daerah akibat terjadinya refocusing anggaran.
- Dirumuskannya pedoman perencanaan pembangunan urusan Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan bagi para penyelenggara di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

b. Tujuan

Adapun Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar tidak lain adalah:

- Mengevaluasi kinerja pembangunan urusan Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan sampai triwulan 2 dan dapat mencarikan solusi atas permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan tahun berjalan.
- Mengarahkan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan kedalam suatu strategi program/kegiatan.
- Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan seluruh program/kegiatan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar.
- Menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan RKA Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Berisi mengenai Latar Belakang Penyusunan Renja, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan yang dipergunakan.

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Sampai Triwulan II Tahun 2024

Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan sampai dengan Triwulan II, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan, Hambatan serta Upaya Pencapaian dan Rekomendasi Pelaksanaan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Tahun 2024

BAB III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisikan rumusan tujuan dan sasaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan, Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Tahun 2024.

BAB IV. Penutup

Bab ini berisikan uraian penutup, yang menjelaskan poin-poin yang menjadi harapan berkenaan dengan pelaksanaa Perubahan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar Tahun 2024.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Sampai dengan Triwulan II

Pada dasarnya penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar enyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar sampai dengan triwulan II. Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Evaluasi atas perencanaan bertujuan untuk mengetahui apa yang harus dicapai oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar. Secara garis besar, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan tahun 2024 sampai pada Triwulan II pencapaiannya belum maksimal, hal tersebut dapat dilihat dari tingkat pencapaian target yang rata-rata mencapai untuk penyerapan dana dan rata-rata mencapai untuk kinerja *output* dan *outcome* kegiatan.

Rumusan Evaluasi dapat di lihat dari program dan kegiatan yang sesuai target, di bawah target, melebihi target serta faktor yang menjadi penghambat dan faktor pendukung tercapainya 100% Program dan kegiatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar.

Kegiatan evaluasi Renja SKPD dan pencapaian realisasi kinerja sampai dengan triwulan II ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Berikut tabel evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024:

Tabel II.1.
Capaian Realisasi Kinerja Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan PanganKabupaten Takalar Sampai Pada Triwulan II Tahun 2024

No	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Per Bulan						Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Kinerja Per Bulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun (5)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
																Januari		Februari		Maret				April		Mei		Juni		II		III		IV													
									K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	2	3					4	5	6			7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		20		24		25		26 = 25/6 x 100%		27 = 7 + 25		28 = 27/6 x 100%		29	30
		03					UNSUR PEMERINTAHAN PILIHAN				55.110.635.641		22.404.984.820		28.422.792.646		498.224.915		545.207.539		517.330.625		1.570.490.588								4.018.501.374		-		-		5.596.991.962	5,97%	19,69%		28.001.976.782				
		03	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				2.112.640.000		379.729.600		157.539.500		-		10.907.000		620.000		11.527.000								6.393.300		-		-		17.920.300				397.649.900						
1		2	9	3			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH konsumsi	100,00%	Persen	2.112.640.000	12,96%	379.729.600	100,00%	157.539.500		-		10.907.000		620.000	10,00%	11.527.000							0,00%	6.393.300	0,00%	-	0,00%	-	6,67%	17.920.300	6,67%	11,38%	14,58%	397.649.900	14,58%	18,82%	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
		2	9	3	2,01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	100%	Persen	389.600.000	25,00%	4.729.600	100%	80.039.100	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	620.000	0,00%	620.000							0,00%	4.282.400	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	4.902.400	0,00%	6,13%	12,50%	9.632.000	12,50%	2,47%		
		2	09	03	2,01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya (Laporan)	48	Laporan	229.600.000	12	4.729.600	1	75.040.500	-	-	-	-	-	620.000	-	620.000	-	3.138.500	-	-	-	-	-	3.138.500	-	-	-	-	-	3.758.500	0,00%	5,01%	12	8.488.100	25%	4%		
		2	09	03	2,01	15	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Laporan pemantauan stok dan harga pangan	48	Laporan	160.000.000			12	4.998.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.143.900	-	-	-	-	-	1.143.900	-	-	-	-	-	1.143.900	**0,00%**	**5,01%**	-	1.143.900	0%	1%		
														Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																								**0,00%**	**5,01%**						
														Predikat Kinerja																								SR	SR						
		2	9	4	2,02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase telaksanaanya kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	100%	Persen	643.040.000	0,00%	-	100%	52.500.400		-		-		-	0,00%	-						2.110.900	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	2.110.900	0,00%	4,02%	0,00%	2.110.900	0,00%	0,33%		
		2	9	4	2,02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten (ton)	13,39%	ton	643.040.000	-	-	0,13	52.500.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	870.900	-	-	-	1.240.000	-	2.110.900	-	-	-	-	-	2.110.900	0,00%	4,02%	-	2.110.900	0%	0%		
														Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																								**0,00%**	**4,02%**						
														Predikat Kinerja																								SR	SR						
		2	9	3	2,04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase capaian target konsumsi pangan daerah	100%	Persen	1.080.000.000	13,89%	375.000.000	100%	25.000.000	-	-	-	10.907.000	-	-	20,00%	10.907.000							0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	20,00%	10.907.000	20,00%	43,63%	16,67%	385.907.000	16,67%	35,73%		
		2	09	03	2,04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah kelompok yang ikut dalam pendampingan (kelompok)	36	Kelompok	1.080.000.000	5	375.000.000	5	25.000.000	-	-	1	10.907.000	-	-	1	10.907.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10.907.000	20,00%	43,63%	6	385.907.000	17%	36%		Stunting : Rp. 11.593.000
														Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																								**20,00%**	**43,63%**						
														Predikat Kinerja																								SR	SR						
														Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)																								**6,67%**	**17,55%**						
														Predikat Kinerja																								SR	SR						
Faktor pendorong pencapaian kinerja: Ketersediaan anggaran untuk persiapan pelaksanaan kegiatan																																													
Faktor penghambat: - kegiatan sementara berproses																																													
Faktor penghambat:																																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):																																													
		03					UNSUR PEMERINTAHAN PILIHAN																																								
		03	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				52.997.995.641		22.025.255.220		28.265.253.146		498.224.915		534.300.539		516.510.625		1.566.963.588								4.012.108.074		-		-		5.579.071.662				27.604.326.882						
		3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhnan urusan penunjang perangkat daerah(%)		Persen	22.417.695.641		10.492.235.320	0%	12.358.278.246		498.224.915		511.793.252		513.961.525	14,03%	1.523.979.692							7,44%	3.791.419.283	0,00%	-	0,00%	-	21,48%	5.315.398.975	0,00%	43,01%	0,00%	15.807.634.295	0,00%	70,51%	DINAS PERTANIAN	
		3	27	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase DokumenPerencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu		Persen	643.600.000	25,00%	128.638.800	100,00%	71.615.400	0,00%	-	12,50%	1.114.000	0,00%	-	12,50%	1.114.000							0,00%	3.384.100	0,00%	-	0,00%	-	12,50%	4.498.100	12,50%	6,28%	27,08%	133.136.900	0,00%	20,69%	SEKRETARIAT	
Terpenuhinya dukungan administrasi, sarana prasarana, pelaporan capaian kinerja, kedisiplinan serta kapasitas SDM Perkantoran bidang Pertanian		3	27	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra, Dokumen Renja Pokok, Dokumen Renja Perubahan (Dok)	12	Dokumen	376.800.000	3	18.590.200	2	3.400.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.550.000	-	-	-	2.550.100	-	-	-	-	-	2.550.100	0,00%	75,00%	3	21.140.300	25%	6%		
		3	27	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA Pokok (Dok)	4	Dokumen	48.000.000	1	13.400.100	1	3.006.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1	13.400.100	25%	28%		
		3	27	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen RKA Perubahan (Dok)	4	Dokumen	32.000.000	1	6.357.200	1	1.499.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1	6.357.200	25%	20%		
		3	27	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA Pokok (Dok)	4	Dokumen	42.800.000	1	4.049.500	1	1.511.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1	4.049.500	25%	9%		
		3	27	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen DPA Perubahan (Dok)	4	Dokumen	38.000.000	1	5.188.200	1	2.129.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1	5.188.200	25%	14%		
		3	27	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan LAKIP (Laporan)	4	Laporan	46.000.000	1	3.992.800	1	2.634.000	-	-	1	1.114.000	-	-	1	1.114.000	-	-	-	834.000	-	-	-	834.000	-	-	-	-	1	1.948.000	100,00%	73,96%	2	5.940.800	50%	13%		
		3	27	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja perangkat daerah (Laporan)	16	Laporan	60.000.000	4	77.060.800	1	57.434.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	4	77.060.800	25%	128%		
														Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																								**14,29%**	**21,28%**						
														Predikat Kinerja																								SR	SR						
		3	27	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Keuangan yang disusun tepat waktu	100%	Persen	16.545.506.873,00	23,73%	10.107.268.848	100,00%	11.958.002.015		498.224.915		487.351.631		499.962.325	18,99%	1.485.538.871							28,32%	3.725.356.155	0,00%	-	0,00%	-	47,31%	5.210.895.026	47,31%	43,58%	33,36%	15.318.163.874	33,36%	92,58%	SEKRETARIAT	
Terpenuhinya dukungan administrasi, sarana prasarana, pelaporan capaian kinerja, kedisiplinan serta kapasitas SDM Perkantoran bidang Pertanian		3	27	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan ASN yang menerima gaji (106 orang)	5.936	Orang	10.499.036.598,00	1.484	7.460.309.091	1.526	8.815.531.935	109	498.224.915	109	482.173.231	109	499.264.125	327	1.479.662.271	218	1.084.085.970	109	506.731.490	218	1.003.147.112	545	2.593.964.572	-	-	-	-	872	4.073.626.843	57,14%	46,21%	2.356	11.533.935.934	40%	110%		
								Jumlah Bulan ASN yang menerima Tambahan Penghasilan (106 orang)	5.088	Orang	5.350.450.275,00	1.272	2.532.457.841	1.308	3.130.076.280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	327	681.716.617	-	-	218	445.945.066	545	1.127.661.683	-	-	-	-	545,00	1.127.661.683	41,67%	36,03%	1.817	3.660.119.524	36%	68%		
								Jumlah Bulan ASN yang menerima tunjangan objektivitas lainnya (12 org)	576	Orang	412.020.000	60	70.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	60	70.450.000	10%	17%		
		3	27	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	7200	Dokumen	160.000.000	1.645	18.057.084	1.000	2.408.400	-	-	400	1.243.000	-	-	400	1.243.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,00	1.243.000	40,00%	51,61%	2.045	19.300.084	28%	12%		
		3	27	01	2,02	04	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dok)	96	Dokumen	32.000.000	24	12.846.700	12	1.887.900	-	-	2	383.600	1	323.200	3	706.800	1	417.600	-	-	-	-	1	417.600	-	-	-	-	4,00	1.124.400	33,33%	59,56%	28	13.971.100	29%	44%		

| | | |

| | | |

2.1.1 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan 2024 yang terakomodir di APBD 2024

Informasi tentang Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar Tahun 2024 yang terakomodir di APBD Tahun 2024 memberikan gambaran seberapa banyak jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar pada Tahun 2024. Adapun jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan dimaksud dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel II.2

Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang ada dalam APBD 2024

APBD 2024							
No	**Perangkat Daerah**	**Jumlah Program**	**Jumlah Kegiatan**	**Jumlah Sub Kegiatan**	**Indikator**		
					Jumlah Program	**Jumlah Kegiatan**	**Jumlah Sub Kegiatan**
1	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	6	15	43	6	15	49

Sumber: Renja Pokok 2024 dan SIPD 2024

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah program sebanyak 6, jumlah kegiatan 15, dan jumlah sub kegiatan 43, Sedangkan untuk jumlah indikator program sebanyak 5, jumlah indikator kegiatan sebanyak 15, dan jumlah indikator sub kegiatan sebanyak 49.

2.1.2 Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja APBD Triwulan II Tahun 2024

Informasi tentang realisasi anggaran kegiatan memberikan gambaran seberapa besar anggaran yang telah terserap pada Triwulan II untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam APBD 2024. Gambaran sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.3

Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Pada APBD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kab. Takalar Tahun 2024Hingga Triwulan II

No	Program	Pagu APBD	Realisasi S/D Triwulan II	Persentase	
		(Rp)	(Rp)	Fisik	Keu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota	12.358.278.246	5.315.398.975	21,48	43,01
2	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	157.539.500	17.920.300	6,67	11,38
3	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.024.404.700	18.640.987	12,50	1,82
4	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	14.357.660.800	124.364.900	16,67	0,87
5	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	5.000.000	2.720.000	0	54,40
6	Program Penyuluhan Pertanian	519.909.400	117.946.800	0	22,69
	Total	**28.265.253.146**	**5.579.071.662**	**9,55%**	**22,36%**

Sumber : Laporan Realisasi Renja DTPHPKP Tahun 2024 Triwulan II

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa total jumlah anggaran yang terealisasi dalam APBD untuk pelaksanaan kegiatan di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Semester I Tahun 2024 sebesar Rp. 5.579.071.662,- anggaran tersebut dilaksanakan dalam 6 Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar. Realisasi serapan anggaran dari pelaksanaan kegiatan hingga triwulan II adalah sebesar 22,36 % dengan capaian realisasi kinerja sebesar 9,55 %. Kondisi ini

menunjukkan capaian realisasi kinerja masih belum maksimal karena belum mencapapai target 50 persen yang diharapkan pada triwulan II. Dari 6 program, realisasi capaiannya kimerjanya masih masuk dalam kategori sangat rendah, tertapi terdapat 1 program yang realisasi keuangannya sudah masuk kategori rendah yaitu diatas 50%.

2.1.2.1 Evaluasi Capaian kinerja dan realisasi keuangan pada Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Pelaksanaan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Tahun 2024

Informasi tentang capaian pendanaan memberikan gambaran capaian berdasarkan realisasi anggaran pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan dimulai dari program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terdapat pada Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan. Capaian kinerja pendanaan tersebut dikategorikan dalam 5 kelompok, yaitu kategori **Sangat Rendah** untuk realisasi ≤50%, Kategori **Rendah** untuk realisasi capaian 51% ≤ 65%, Ketegori **Sedang** Untuk realisasi capaian 66% ≤ 75%, Kategori **Tinggi** untuk realisasi capaian 76% ≤ 90% dan kategori **Sangat Tinggi** untuk realisasi capaian 91% ≤ 100%.

Evaluasi Hasil capaian pendanaan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II Sebagai berikut:

1. Evaluasi Capaian kinerja dan realisasi keuangan Pada Level Program

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja dan realisasi keuangan pada level program anggaran pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan dengan menggunakan kategori tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa jumlah program yang dilaksanakan anggaran pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan sebanyak 6 program dengan rincian capaian kinerja dan realisasi keuangan yang masuk pada kategori sangat rendah adalah keseluruhan program. Hal ini terjadi karena sebagian besar kegiatan dan pendanaan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, perkebunan dan ketahanan pangan merupakan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sampai pada triwulan II belum tersalur.

2. Evaluasi Capaian kinerja dan relaisasi keuangan Pada Level Kegiatan

Untuk evaluasi pelaksanaan Capaian kinerja dan relaisasi keuangan pada level kegiatan pada masing-masing perangkat daerah dapat dijelaskan bahwa terdapat 15 kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2024. Dari keseluruhan kegiatan tersebut terdapat 15 kegiatan dengan realisasi capaian kinerja sangat Rendah. Terdapat 12 program dengan realisasi capaian keuangan sangat rendah dan 3 program dengan realisasi keuangan masuk kategori Rendah. Belum masuknya dana yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) menyebabkan capaian realisasi keuangan dan fisik masih sangat rendah.

3. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Sub Kegiatan

Adapun evaluasi capaian kinerja pendanaan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan pada level sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 43 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2024 masih ada 37 sub kegiatan dengan capaian kinerja Sangat Rendah dan 6 sub kegiatan dengan capaian kinerja Sangat Tinggi. Sedangkan untuk capaian realisasi keuangan terdapat 28 sub kegiatan dengan kategori Sangat Rendah, 8 Sub Kegiatan dengan kategori Rendah, 3 Sub Kegiatan dengan kategori Sedang dan 4 Sub Kegiatan dengan kategori Sangat Tinggi.

Capaian pendanaan pada kategori sangat tinggi merupakan kegiatan rutin tahunan seperti penyusunan laporan keuangan, tanggapan hasil pemeriksaan, rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang serta pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan(LP2B). Sedangkan capaian kinerja dan keuangan yang masih rendah terdapat pada sub kegiatan yang bersumber dari dana DAK yang belum salur sampai triwulan II mengakibatkan kegiatan fisik belum terlaksana.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas capaian kinerja pendanaan berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL II.4
REKAPITULASI CAPAIAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN

No. Urut	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat capaian pendanaan					Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat capaian pendanaan					Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan berdasarkan tingkat capaian pendanaan				
		≤ 50% (SR)	51% ≤ 65 % (R)	66% ≤ 75% (S)	76% ≤ 90% (T)	91% ≤ 100% (ST)		≤ 50% (SR)	51% ≤ 65 % (R)	66% ≤ 75% (S)	76% ≤ 90% (T)	91% ≤ 100% (ST)		≤ 50% (SR)	51% ≤ 65 % (R)	66% ≤ 75% (S)	76% ≤ 90% (T)	91% ≤ 100% (ST)
1.	6	6	0	0	0	0	15	12	3	0	0	0	43	28	8	3	0	4

Sumber : Laporan Realisasi Renja DTPHPKP Tahun 2024 Triwulan II

Keterangan :

1. 91% ≤ 100% Sangat Tinggi
2. 76% ≤ 90% Tinggi
3. 66% ≤ 75% Sedang
4. 51% ≤ 65% Rendah
5. ≤ 50% Sangat Rendah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan

Analisis kinerja pelayanan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja OPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai target indikator sasaran dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan. Untuk menganalisis kinerja pelayanan atau tingkat capaian kinerja sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar tahun 2024 sampai dengan Triwulan II dan pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah.Proses ini dimaksud untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan sasaran. Pencapaian setiap indikator kinerja dilakukan dengan metedologi perbandingan capaian kinerja dengan target kinerja tahun 2024 sampai dengan triwulan II sebagai tolak ukur dari keberhasilan suatu kegiatan.

Dalam Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip, yakni 1) Sederhana, 2) Partisipatif, 3). Akuntabel, 4) Berkelanjutan, 5) Transparansi dan 6) Keadilan. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan merupakan instansi yang berhubungan langsung dengan masyarakat yang bertugas memberikan pelayanan dalam memfasilitasi masyarakat khususnya petani agar memperoleh informasi penggunaan teknologi tepat guna demi peningkatan produksi dan produktifitas pertanaman.

Agar sasaran strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar dapat tercapai , maka diperlukan poin-poin yang menjadi indikator kinerja sebagai tolak ukur penilaian dalam menentukan keberhasilan dari suatu kegiatan. Ada beberapa indikator kinerja yang dapat diukur untuk melihat capaian pelayanan kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar, seperti Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

2.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan oleh Kepala Dinas. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran Organisasi. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program. Penetapan Target indikator kinerja utama selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini.

Indikator kinerja dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait target capaian keberhasilan dalam mewujudkan arah kebijakan RENSTRA Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan yang digariskan pada tahun yang penetapannya dijadikan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Penetapan IKU daerah merupakan ukuran tingkat keberhasilan pencapaian indikator sasaran RENSTRA yang digariskan pada Tahun 2024. Penetapan IKU juga merupakan upaya pencapaian prioritas pembangunan Kabupaten Takalar. Lebih lanjut Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel II.5 berikut ini :

Tabel II.5
Capaian Indikator Kinerja Utama 2023, Asumsi Capaian Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2024, dan Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023		Asumsi Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025
			Target	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Produktivitas tanaman pangan utama padi (ton/Ha)	ton/Ha	5	5,18	5,27	5,4
2	Produktivitas tanaman pangan utama Jagung (ton/Ha)	ton/Ha	6,8	6,83	7,3	7,5
3	Produktivitas tanaman hortikultura utama cabe rawit (ton/Ha)	ton/Ha	7,5	11,92	12	8,3
4	Produktivitas Tanaman perkebunan utama tebu (ton/Ha)	ton/Ha	4,2	2,45	3,5	4,8
5	Ketersediaan pangan utama beras (ton)	ton	90.000	91.173	115.000	110.000
6	Jumlah temuan bahan berbahaya pada pangan segar (temuan)	temuan	0	0	0	0
7	Nilai SAKIP	Nilai	B	BB	BB	BB

Sumber : Laporan Kinerja Tahun 2023

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Indikator Kinerja Kunci disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintah kabupaten. Penetapan target indikator kinerja kunci selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel II.6

Asumsi Capaian Tahun 2024 dan Target Tahun 2025 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar

No.	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Realisasi Capaian Tahun 2023	Asumsi Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan) (%)	Persen	0,5	0,65	0,7
2	Produktivitas pertanian per hektar per tahun (Ton/Ha)	Ton/Ha	5	5,3	6

Sumber : Dokumen Renstra DTPHPKP Tahun 2023-2026

2.2.3 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan /Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistainable Development Goals (TPB/SDGs) kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global. TPB/SDGs bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan. Terdapat 2 tujuan yang menjadi ruang lingklup target indikator TPB/SDGs Dinas Tanaman Pangan, Hortukultura, Perkebunan dan ketahanan Kabupaten Takalar yaitu:

1. Tujuan 2, menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan dan
2. Tujuan 15, melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati Penetapan target indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) untuk Dinas Tanaman Pangan, Hortukultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel II.7

Penetapan Target Indikator TPB/SDGs Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar Tahun 2024

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target 2024	OPD Penang. Jawab
	Tujuan 2 : *Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan*					
	2.1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun					
2.2.1	*Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).*	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Persen	9,71	6,53	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
2.2.2	*Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.*		Persen	**3,78**	**3,78**	
2.2.3	*Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum dibawah 1400 kkal/kapita/hari*		Persen	**13,33**	**7,70**	

	Tujuan 15 : Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola Hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati					
	15.3. Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.					
15.3.1	*Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.*	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan			N/A	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan

2.3 Hambatan, Upaya Pencapaian dan Rekomendasi Pelaksanaan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Tahun 2024

2.3.1 Hambatan Dalam Pelaksanaan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan sampai dengan Triwulan II

Kendala/permasalahan dalam capaian kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan yaitu :

1. Integrasi antar sektor mendukung peningkatan produksi pertanian, perkebunan;
2. Penyesuaian jumlah prasarana pertanian dengan jumlah lahan produktif;
3. Produksi dan produktivitas hewan ternak;
4. Promosi atas hasil produksi pertanian belum optimal
5. Kurangnya SDM tenaga pengamat otganisme pengganggu tanaman dan medik veteriner;
6. Antisipasi dampak perubahan iklim dalam uapaya peningkatan produksi pertanian;
7. Kekurangan SDM penyuluh;
8. Dokumen RT-RW perlu diselesaikan;
9. Pemahaman mengenai ekonomi kreatif berbasis produk unggulan;
10. Ketersediaan anggaran daerah untuk pertanian.

2.3.2 Upaya Dalam Pencapaian Pelaksanaan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan sampai dengan Triwulan II

Merujuk dari faktor penghambat Pelaksanaan rencana kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan sampai dengan triwulan ke II tentunya mengalami berbagai kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Berikut dapat disampaikan beberapa upaya yang dilakukan dalam pencapaian keberhasilan kinerja :

1. Adanya komitmen pimpinan dan Koordinasi yang baik untuk melaksanakan kegiatan secara maksimal;
2. Adanya koordinasi/konsultasi yang sinergi antar struktur jabatan internal dan eksternal serta adanya komunikasi yang terjalin antar pemimpin dan yang dipimpin dalam organisasi;
3. Tersedianya Sarana dan prasarana pendukung yang memadai;
4. Penyerapan program dan kegiatan masing-masing bidang dan kesekretariatan berjalan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan;

5. Adanya pedoman/dokumen Standar Pelayanan/SOP dan regulasi yang sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan;
6. Kualitas SDM yang mampu, terampil dan memadai serta memiliki komitmen dan motivasi untuk melakukan tugas dan fungsi secara maksimal dalam rangka memberikan pelayanan prima.

2.3.3. Rekomendasi pelaksanaan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan tahun 2024 sampai dengan Triwulan Selanjutnya

Berdasarkan uraian di atas terkait faktor penghambat pencapaian kinerja, serta upaya dalam pencapaian pelaksanaan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan, maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan menyampaikan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Meningkatkan komunikasi dan integrasi program dalam lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan serta pengendalian dan evaluasi internal yang dilakukan secara terus menerus;
2. Perlunya Peran aktif seluruh KPA dan PPTK didalam mengawal pelaksanaan Program dan Kegiatan yang berjalan;
3. Peran aktif Kepala Dinas selaku PA didalam mengawasi, mengontrol dan membuat kebijakan serta keputusan;
4. Peran aktif Sub Bagian Perencanaan Program didalam berkoordinasi termasuk memberikan informasi, sosialisasi maupun kebijakan-kebijakan lainnya;
5. Perlunya tenaga SDM yang berkompeten didalam perencanaan;
6. Peningkatan kualitas SDM aparatur serta jumlah staf yang berkompeten;
7. Peningkatan sarana dan prasarana operasional sesuai dengan kebutuhan;
8. Perlunya melakukan penyusunan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan yang baik, diawali dengan orientasi dan melibatkan seluruh pejabat/staf;
9. Perlunya melakukan evaluasi dan monitoring secara terus menerus dan berkelanjutan yang diiringi dengan pengelolaan data yang baik;

10. Adanya Kesesuaian Renstra dan RPJMD dalam pelaksanaan kegiatan;
11. Dalam penyusunan dokumen perencanaan tahap berikutnya memiliki data dan informasi yang akurat, sehingga perencanaan dan penganggaran dapat dilakukan dengan baik, efektif, dan efisien.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan pada perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 mengacu pada RPD yang di dalamnya memuat Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 .

Adapun Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai tahun 2024 sebagai penjabaran Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan 2023-2026 dan disesuaikan dengan tupoksi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan dan menyesuaikan dengan kebijakan pembangunan nasional 2023-2026, dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel III.1
Tujuan, Sasaran Serta Target Kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar Tahun 2024

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Asumsi Capaian Tahun 2024
1.	Tujuan: Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sub sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan	Konstribusi sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan terhadap PDRB (%)	%	NA	
	Sasaran 1 : Meningkatnya Produktivitas Tanaman Pangan Utama	Produktivitas tanaman pangan utama padi	ton/Ha	5,18	**5,3 – 5,5**
		Produktivitas tanaman pangan utama Jagung	ton/Ha	6,83	**7,0 – 7,2**
	Sasaran 2 : Meningkatnya Produktivitas Tanaman Hortikultura utama	Produktivitas tanaman hortikultura utama cabe rawit	ton/Ha	11,92	**12 - 15**
	Sasaran 3 : Meningkatnya Produktivitas Tanaman Perkebunan utama	Produktivitas Tanaman perkebunan utama tebu	ton/Ha	2,45	**2,5 – 4,0**
2	Tujuan: Meningkatkan kemampuan pemenuhan kebutuhan pangan daerah baik kualitas maupun kuantitas	Skor Pola Pangan Harapan		78,2	**78,5**

	Sasaran 1: Meningkatnya Ketersediaan, Distribusi dan Keamanan Pangan	*Ketersediaan pangan utama beras*	Ton	91.173	**100.000**
		Jumlah temuan bahan berbahaya pada pangan segar	Temuan	0	**0**
3	Tujuan: Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan tugas-tugas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan		NA	**BB**

3.2 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Tahun 2024

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar disusun guna menjadi acuan dalam pelaksanaan sejumlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setelah adanya perubahan dalam rencana kerja, yang diharapkan target capaian kinerja masing-masing bidang tercapai sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Tahun 2023-2026 disusun suatu Rencana Kinerja Tahunan (*Yearly Performance Plan*). Rencana Kerja merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indicator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategik maupun tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar Tahun 2024 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Perubahan Rencana Kinerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan yang baru untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar adalah dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar.

Di dalam Perubahan Renja Tahun 2024 ini terdapat rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar, dimana di dalammya terdapat 6 Program, 15 Kegiatan serta 43 Sub Kegiatan, dimana untuk penyebaran kegiatannya adalah untuk kegiatan rutin berlokasi di Kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar, sedangkan yang sifatnya mempunyai sasaran kelompok masyarakat berlokasi pada Kecamatan ataupun Desa/Kelurahan, dan kegiatan yang sifatnya koordinasi selain berlokasi pada Daerah setempat yakni pada Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar serta ada juga yang berlokasi di luar daerah.

Jumlah dana program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan yang

dimaksud bersumber dari Dana Alakosi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik senilai Rp. 27.723.102.374.

Rumusan perubahan rencana program dan kegiatan tahun 2024 beserta pendanaan yang diharapkan dapat terlaksananya tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL III.2
RANCANGAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TAKALARTAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024			PAGU INDIKATIF 2024 (Rp.)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						RENJA 2024	APBD 2024	RENJA PERUBAHAN 2024	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA PERUBAHAN 2024			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	7	10		11	13	14	15	16	17	18	19	20
		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN									**27.723.102.374**							**31.567.605.492**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**177.400.000**	**9.997.100**	**87.497.500**							**658.160.000**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**177.400.000**	**9.997.100**	**87.497.500**							**658.160.000**	
1	**37661**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	Skor PPH konsumsi			87,9	87,9	87,9	**127.400.000**	**9.997.100**	**87.497.500**						88	**558.160.000**	

	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Panga	100%	100%	100%	100%	100%	127.400.000	9.997.100	9.997.100			-	-	-		127.400.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya																
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	4 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	57.400.000	4.998.500	4.998.500	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Lembaga pangan, Gapoktan, Petani	4	57.400.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota																
			Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	4 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	0	0	15.000.000	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pedagang bahan pangan, masyarakat	4	15.000.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN

	2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan																	
			Informasi Harga dan Pasokan Pangan	48 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	40.000.000	4.998.600	4.998.600	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-	12	40.000.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)																	
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	15.000.000		-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1	15.000.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota					5250040000%				52.500.400			-	-	-		160.760.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	15 ton	0	1 ton	13 Ton	0,13 Ton	160.360.000	52.500.400	52.500.400	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH	-	-	Masyarakat	13	160.760.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN

	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi					2500000000%				25.000.000			-	-	-		270.000.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																	
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	20	5 Laporan	9 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	270.000.000	25.000.000	25.000.000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), RETRIBUSI DAERAH	-	-	Kelompok Tani ?KWT	5	270.000.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	**38026**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase daerah rentan rawan pangan**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**		**50.000.000**	**-**	**-**							**100.000.000**	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Peta ketahanan dan kerentanan pangan (Dok)	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000	-	-			-	-	-	1	50.000.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan																	
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemadda, Masyarakat	1	50.000.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBU

			Dimutahirkan									Kel/Desa							NAN DAN KETAHAN AN PANGAN
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peesentase terlaksanaanya Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/ Kota	100%	100%	100	100%	100%			-			-	-		100	50.000.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHAN AN PANGAN
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota																	
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	48 laporan	12 Laporan	12 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	50.000.000	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Pemada, Masyarakat	1	50.000.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHAN AN PANGAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**									**27.635.604.874**							**30.909.445.492**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**									**27.635.604.874**							**30.909.445.492**	
1	**36977**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	Persentase pemenuhan urusan penunjang perangkat	100%		100%	**100%**		**19.199.027.692**	**87.497.500**	**12.078.857.074**							**19.526.305.492**	

		KABUPATEN/KOTA	daerah																
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	100%		100%	100%		161.900.000	71.615.300	77.815.400			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	100 %	161.900.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	94.200.000	3.400.000	6.500.100	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	2	94.200.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN

															6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000	3.006.600	6.106.600	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-	1	12.000.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000	1.499.900	1.499.900	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-	1	9.000.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.700.000	1.511.000	1.511.000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua	PAJAK DAERAH	-	-	-	1	10.700.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBU

			Penyusunan Dokumen DPA-SKPD								Kel/Desa							NAN DAN KETAHAN AN PANGAN
	3.27.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	9.500.000	2.129.800	2.129.800	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-	1	9.500.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	11.500.000	2.634.000	2.634.000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-	1	11.500.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																

			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	15.000.000	57.434.000	57.434.000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK FISIK-BIDANG PERTANIAN-PENUGASAN-PEMBANGUNAN/RENOVASI SARANA DAN PRASARANA FISIK DASAR PEMBANGUNAN PERTANIAN	-	-	-		15.000.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Keuangan yang disusun tepat waktu	98%		98%	98%		16.929.390.500	11.958.002.015	11.687.703.843			-	-	-	98	17.546.668.300	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	438 Orang/ bulan	109 Orang/ Bulan	109 Orang/ bulan	109 Orang/bulan	109 Orang/bulan	16.849.390.500	11.945.608.215	11.670.917.943	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN, LAIN-LAIN PAD YANG SAH, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	-	ASN Dinas TPHPKP	1000	17.466.668.300	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7200 Dokumen	1800 Dokumen	1800 Dokumen	1000 Dokumen	1000 Dokumen	40.000.000	2.408.400	2.408.400	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	ASN Dinas TPHPKP	1000	40.000.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																

			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	48 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	8.000.000	1.887.900	4.987.900	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	24	8.000.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	2.642.800	2.642.800	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-	1	10.000.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak	4 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	2.059.100	2.059.100	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua	PAJAK DAERAH	-	-	-	1	10.000.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBU

			Lanjut Pemeriksaan									Kel/Desa							NAN DAN KETAHAN AN PANGAN
	3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	71 Laporan		18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	12.000.000	3.395.600	4.687.700	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-	18	12.000.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%		20.000.000	5.498.400	5.498.400			-	-	-	100 %	20.000.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000	2.000.100	2.000.100	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-	1	4.000.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	

			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	9.000.000	1.499.800	1.499.800	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-	1	9.000.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	7.000.000	1.998.500	1.998.500	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-	1	7.000.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		90%	90%	90%	0%		2.071.340.000	-	-			-	-	-		271.340.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	436 Paket	0 Paket	109 Paket	0 Paket	109 Paket	71.340.000	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	109	71.340.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	

			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	95 Orang	5 Orang	30 Orang	0 Orang	30 Orang	2.000.000.000	-	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	30	200.000.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%		595.600.000	27.075.800	64.487.800			-	-	-	100 %	595.600.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	150.000.000	998.800	998.800	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-	1	150.000.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	800 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	50.000.000	1.350.000	1.350.000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-	200	50.000.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	

			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	45.600.000	2.475.000	2.475.000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-	1	45.600.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	350.000.000	22.252.000	59.664.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	4	350.000.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	631.797.192	272.009.631	241.451.631			-	-	-	100	631.797.192	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	7.000.000	1.252.200	1.252.200	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-	12	7.000.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	354.797.192	178.155.331	147.597.331	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	12	354.797.192	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	270.000.000	92.602.100	92.602.100	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	-	1	270.000.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		100%	100%	100%	100%	100%	299.000.000	1.900.000	1.900.000			-	-	-	100 %	299.000.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA,

		Pemerintahan Daerah																	PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	299.000.000	1.900.000	1.900.000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-	1	299.000.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
2	**37342**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**		5%		5%	**5%**	5%			**1.019.723.700**							**1.975.640.000**	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian							1.523.000.000	761.624.000	761.624.000			-	-	-		1.523.000.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi																	
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.523.000.000	761.624.000	761.624.000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), RETRIBUSI DAERAH	-	-	-	12	1.523.000.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN

	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		100%	100%	100%	100%	100%	325.340.000	254.999.700	258.099.700			-	-	-	100	452.640.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman																	
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	4.999.700	8.099.700	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-	1	200.000.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman																	
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	12 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	125.340.000	250.000.000	250.000.000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, RETRIBUSI DAERAH	-	-	-	3	252.640.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	**37707**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**		100%	100%	100%	100%	100%	**8.539.000.000**	**14.957.660.800**	**14.009.668.700**							**8.539.000.000**	

	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian		100%	100%	100%	100%	100%	439.000.000	374.116.800	374.116.800			-	-	-		439.000.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya																	
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	8 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	399.000.000	369.117.000	369.117.000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DAK FISIK-BIDANG PERTANIAN-PENUGASAN-PEMBANGUNAN/RENOVASI SARANA DAN PRASARANA FISIK DASAR PEMBANGUNAN PERTANIAN	-	-	-	2	399.000.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota																	
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000	4.999.800	4.999.800	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-	1	40.000.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN

			Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola																
	3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota																	
			Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	1 Dokumen	0 Dokumen	0.00 Dokumen	0 Dokumen	0.00 Dokumen	-	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	0	-	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian		100%	99,80%	100%	100%	100%	8.100.000.000	14.583.544.000	13.635.551.900			-	-	-		8.100.000.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani																	
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	252 Unit	63 Unit	63 Unit	63 Unit	63 Unit	4.150.000.000	9.665.000.000	9.640.907.900	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAK FISIK-BIDANG PERTANIAN-PENUGASAN-PEMBANGUNAN/RENOVASI SARANA	-	-	-	63	4.150.000.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN

													DAN PRASARANA FISIK DASAR PEMBANGUNAN PERTANIAN						
	3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit																	
			Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	16 Unit	0 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	600.000.000	600.000.000	480.000.000	Kab. Takalar, Mangarabombang, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PERTANIAN-PENUGASAN-PEMBANGUNAN/RENOVASI SARANA DAN PRASARANA FISIK DASAR PEMBANGUNAN PERTANIAN	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	-	4	600.000.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya																	

			Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	10 Unit	4 Unit	5 Unit	0 Unit	5 Unit	300.000.000	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PERTANIAN-PENUGASAN-PEMBANGUNAN/RENOVASI SARANA DAN PRASARANA FISIK DASAR PEMBANGUNAN PERTANIAN	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	-	5	300.000.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																

			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit	0 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1.000.000.000	548.168.000	548.168.000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PERTANIAN-PENUGASAN-PEMBANGUNAN/RENOVASI SARANA DAN PRASARANA FISIK DASAR PEMBANGUNAN PERTANIAN	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	-	1	1.000.000.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani																
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	116 Unit	42 Unit	42 Unit	42 Unit	42 Unit	2.050.000.000	3.770.376.000	2.966.476.000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-	-	42	2.050.000.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN

4	**38438**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**			100%	100%	**100%**	100%	**61.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**						100	**61.000.000**	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota			100%	100%	**100%**	100%	61.000.000	5.000.000	5.000.000			-	-	-	100	61.000.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																	
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	10 Ha	2 Ha	2 Ha	2 Ha	2 Ha	61.000.000	5.000.000	5.000.000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-	2	61.000.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
5	**39168**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**		100%	100%	100%	**100%**	100%	**745.000.000**	**510.259.400**	**522.355.400**						100	**807.500.000**	

	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		100%	100%	100%	**100%**	100%	745.000.000	510.259.400	522.355.400			-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	-	100	807.500.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa																

			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	305.500.000	152.760.000	155.206.000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NONFISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	-	9	305.500.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	52.000.000	4.999.600	4.999.600	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-	2	52.000.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian																

			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	10 Unit	0 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	234.500.000	247.500.000	257.150.000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PERTANIAN-PENUGASAN-PEMBANGUNAN/RENOVASI SARANA DAN PRASARANA FISIK DASAR PEMBANGUNAN PERTANIAN	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	-	10	300.000.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota																

			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	4 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	103.000.000	100.000.000	100.000.000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NONFISIK- DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	-	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	-	1	100.000.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani																
			Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	8 Unit	2 Unit	2 Unit	1 Unit	2 Unit	50.000.000	4.999.800	4.999.800	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	-	2	50.000.000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
	J U M L A H						**2772310237400%**				**27.723.102.374**						**31.567.605.492**	

TABEL III.3
RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) TAHUN 2024

KABUPATEN : TAKALAR
PERANGKAT DAERAH : DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		TARGET			PAGU			KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA PERUBAHAN 2024	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA PERUBAHAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8%	9	10	11	12	13
		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN							**29.631.427.692**	**27.219.018.446**	**27.723.102.374**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**177.400.000**	**9.997.100**	**87.497.500**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**177.400.000**	**9.997.100**	**87.497.500**	
1	**37661**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	Skor PPH konsumsi	Skor PPH konsumsi	87,9	87,9	87,9	**127.400.000**	**9.997.100**	**87.497.500**	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Panga	Persentase terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Panga	100%	100%	100%	127.400.000	9.997.100	9.997.100	

	2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya										
				Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	*Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya*	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	57.400.000	4.998.500	4.998.500	
	2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota										
				Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	*Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota*	4 Laporan	0	0	15.000.000	-	-	
	2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan										
				Informasi Harga dan Pasokan Pangan	*Informasi Harga dan Pasokan Pangan*	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	40.000.000	4.998.600	4.998.600	
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)										
				Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	*Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)*	1 Dokumen	0	0	15.000.000		-	
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota				5250040000%				52.500.400	
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota										
				Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota*	1 ton	13 Ton	0,13 Ton	160.360.000	52.500.400	52.500.400	
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi				2500000000%				25.000.000	
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal										
				Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	*Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal*	9 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	270.000.000	25.000.000	25.000.000	
2	**38026**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase daerah rentan rawan pangan**	**Persentase daerah rentan rawan pangan**	**0%**	**0%**		**50.000.000**	**-**	**-**	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Peta ketahanan dan kerentanan pangan (Dok)	Peta ketahanan dan kerentanan pangan (Dok)	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000	-	-	
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan										
				Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	*Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan*	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000	-	-	

	2.09.04.2.02	Penanganan Keraw anan Pangan Kew enangan Kabupaten/Kota	Penanganan Keraw anan Pangan Kew enangan Kabupaten/Kota	Peesentase terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Peesentase terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	100	100%	100%			-	
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Keraw anan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota										
				Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	*Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota*	12 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	50.000.000	-	-	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**29.454.027.692**	**27.209.021.346**	**27.635.604.874**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**29.454.027.692**	**27.209.021.346**	**27.635.604.874**	
1	**36977**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan urusan penunjang perangkat daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang perangkat daerah	100%	**100%**	**100%**	**20.709.027.692**	**12.336.101.146**	**12.078.857.074**	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%	161.900.000	71.615.300	77.815.400	
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	94.200.000	3.400.000	6.500.100	
	3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000	3.006.600	6.106.600	
	3.27.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000	1.499.900	1.499.900	

	3.27.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.700.000	1.511.000	1.511.000	
	3.27.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD										
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	9.500.000	2.129.800	2.129.800	
	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	11.500.000	2.634.000	2.634.000	
	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	15.000.000	57.434.000	57.434.000	
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Keuangan yang disusun tepat waktu	Persentase Dokumen Keuangan yang disusun tepat waktu	98%	98%		16.929.390.500	11.958.002.015	11.687.703.843	
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	109 Orang/bulan	109 Orang/bulan	109 Orang/bulan	16.849.390.500	11.945.608.215	11.670.917.943	
	3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	1800 Dokumen	1000 Dokumen	1000 Dokumen	40.000.000	2.408.400	2.408.400	
	3.27.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD										
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	8.000.000	1.887.900	4.987.900	

	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	2.642.800	2.642.800	
	3.27.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan										
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	2.059.100	2.059.100	
	3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triw ulanan/ Semesteran SKPD										
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	12.000.000	3.395.600	4.687.700	
	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			100%	100%		20.000.000	5.498.400	5.498.400	
	3.27.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD										
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000	2.000.100	2.000.100	
	3.27.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD										
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	9.000.000	1.499.800	1.499.800	
	3.27.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	7.000.000	1.998.500	1.998.500	
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegaw aian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegaw aian Perangkat Daerah			90%	0%		2.071.340.000	-	-	
	3.27.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	109 Paket	0 Paket	0 Paket	71.340.000	-	-	

	3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	30 Orang	0 Orang	0 Orang	2.000.000.000	-	-	
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	100%		595.600.000	27.075.800	64.487.800	
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	1 Paket	150.000.000	998.800	998.800	
	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	50.000.000	1.350.000	1.350.000	
	3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	45.600.000	2.475.000	2.475.000	
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	350.000.000	22.252.000	59.664.000	
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	100%	100%	631.797.192	272.009.631	241.451.631	
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	7.000.000	1.252.200	1.252.200	
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	354.797.192	178.155.331	147.597.331	
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	270.000.000	92.602.100	92.602.100	
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	100%	100%	299.000.000	1.900.000	1.900.000	

	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	1 Unit	1 Unit	1 Unit	299.000.000	1.900.000	1.900.000	
2	**37342**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**			5%	**5%**	5%			**1.019.723.700**	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian						1.523.000.000	761.624.000	761.624.000	
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi										
				Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	*Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.523.000.000	761.624.000	761.624.000	
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota			100%	100%	100%	325.340.000	254.999.700	258.099.700	
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman										
				Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	*Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	4.999.700	8.099.700	
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman										
				Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	*Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman*	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	125.340.000	250.000.000	250.000.000	
3	**37707**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**			100%	100%	100%	**7.939.000.000**	**14.357.660.800**	**14.009.668.700**	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian			100%	100%	100%	439.000.000	374.116.800	374.116.800	
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya										
				Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	*Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya*	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	399.000.000	369.117.000	369.117.000	

	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota										
				Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	*Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000	4.999.800	4.999.800	
	3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota										
				Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	*Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B*	0.00 Dokumen	0 Dokumen	0.00 Dokumen	-	-	-	
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian			100%	100%	100%	7.500.000.000	13.983.544.000	13.635.551.900	
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani										
				Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	*Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara*	42 Unit	63 Unit	63 Unit	4.150.000.000	9.665.000.000	9.640.907.900	
	3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit										
				Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	*Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara*	0 Unit	0 Unit	4 Unit			480.000.000	
	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya										
				Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	*Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara*	5 Unit	0 Unit	0 Unit	300.000.000	-	-	
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya										
				Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	*Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara*	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1.000.000.000	548.168.000	548.168.000	
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani										
				Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	*Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi*	42 Unit	42 Unit	36 Unit	2.050.000.000	3.770.376.000	2.966.476.000	
4	**38438**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**			100%	**100%**	100%	**61.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota			100%	**100%**	100%	61.000.000	5.000.000	5.000.000	

	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan										
				Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	*Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan*	2 Ha	2 Ha	2 Ha	61.000.000	5.000.000	5.000.000	
5	**39168**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**			100%	**100%**	100%	**745.000.000**	**510.259.400**	**522.355.400**	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			100%	**100%**	100%	745.000.000	510.259.400	522.355.400	
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa										
				Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	*Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	9 Unit	9 Unit	9 Unit	305.500.000	152.760.000	155.206.000	
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa										
				Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	*Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	2 Unit	2 Unit	2 Unit	52.000.000	4.999.600	4.999.600	
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian										
				Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	*Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian*	5 Unit	5 Unit	5 Unit	234.500.000	247.500.000	257.150.000	
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota										
				Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	*Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi*	1 Unit	1 Unit	1 Unit	103.000.000	100.000.000	100.000.000	
	3.27.07.2.01.0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani										
				Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	*Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk*	2 Unit	1 Unit	2 Unit	50.000.000	4.999.800	4.999.800	
								J U M L A H	**29.631.427.692**	**27.219.018.446**	**27.723.102.374**	

BAB IV
P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Pangan Tahun 2024 merupakan rangkuman kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pertanian dan pangan. Mengingat masalah pertanian dan pangan bersifat lintas sektor, maka semangat koordinasi, integrasi dan sinergitas akan tetap terjaga dan ditingkatkan baik antara instansi terkait dan lembaga non pemerintah.

Oleh sebab itu, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar harus melakukan langkah-langkah penyempurnaan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sehingga bermanfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kemajuan daerah, terkhusus bagi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan.

Dokumen ini sekaligus menjadi acuan dalam mensinergikan program dan kegiatan antara program prioritas Pemeritah Daerah dengan program dan kegiatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan.

Berdasarkan dengan cakupan kewenangan, maka Perubahan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar Tahun 2024 mempunyai fungsi pokok;

1. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan seluruh program/kegiatan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar;
2. Menciptakan kepastian arah kebijakan dan program kegitan prioritas yang merupakan komitmen Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan dengan pemangku kepentingan; dan
3. Menjadi acuan dalam menyusun Perubahan RKA Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan dengan pemangku kepentingan

Dalam pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar telah berpedoman pada kaidah - kaidah yang sudah ada yaitu RPJP dan RPJM Nasional serta RPJP dan RPJM Propinsi, visi dan misi kepala daerah Kabupaten Takalar, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, DPA Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan.

Dokumen Perubahan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar Tahun 2024 ini diharapkan akan menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program dan kegiatan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan sehingga seluruh program dan kegiatan akan dapat dicapai secara terukur, terarah, efektif dan efisien sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Takalar, Juli 2024

Kepala Dinas,

Drs. H. PARAWANGSA, M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19691216 199112 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar. Perubahan Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026, yang merupakan pedoman utama perencanaan kegiatan Sekretariat Daerah Kab. Takalar.

Perubahan Rencana Kerja ini disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, baik di lingkungan internal maupun lingkungan eksternal yang saling berpengaruh dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Selanjutnya Perubahan Renja SKPD menjadi landasan atau pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Tahun Anggaran 2024. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dan ikut berpartisipasi hingga tersusunnya Perubahan Rencana Kerja ini. Perlu disadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Rencana kerja Perubahan ini, oleh karena itu masukan serta saran sangat kami harapkan.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar ini disampaikan terima kasih.

Takalar, Juli 2024

Sekretaris Daerah,

Muhammad Hasbi, S.STP, M.A.P,M.I.Kom
Nip. 19810112 200012 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR I

DAFTAR ISI II

DAFTAR TABEL III

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang **1**

1.2. Landasan Hukum **2**

1.3. Maksud dan Tujuan **4**

1.4. Sistematika Penulisan **4**

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

……..... 6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah sampai Dengan Triwulan II ……..... **6**

2.1.1 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Renja Sekretariat Daerah 2024 yang terakomodir di APBD 2024 ……. **22**

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD **28**

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat…….. **39**

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH .....

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional **41**

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah **44**

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH 47

BAB V PENUTUP 56

DAFTAR TABEL

Tabel T-C. 29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah s.d. Tahun 2024	7
Tabel 2.1	Tabel Rekapitulasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan	21
Tabel T-C. 30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah	23
Tabel T-C. 31	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024	29
Tabel T-C.32	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024	40
Tabel 3.1	Kebijakan Nasional/Propinsi dalam RKP Tahun 2024	41
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran RKPD Kabupaten Takalar 2024	44
Tabel 3.3	Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah	45
Tabel 3.4	Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar	48
Tabel 3.5	Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar	53
Tabel T-C.33	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Sekretariat Daerah	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Mendukung terwujudnya *good governance*, dalam hal ini pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Mengingat arti strategis dokumen rencana kerja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahap penyusunan hingga penetapan dokumen rencana kerja harus mengikuti tatacara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dokumen RencanaKerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar ini disusun untuk dapat mewujudkan tujuan dan melaksanakan sasaran dan kebijakan strategis yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 selanjutnya menjadi landasan penyusunan Perubahan RKA Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2024.

Dalam menyempurnakan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah, maka Sekretariat Daerah berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam menyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
4 Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

9 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;

11 Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 30 tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;

12 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 7);

13 Peraturan Bupati Takalar Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 63);

14 Peraturan Bupati Takalar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 3).

15 Peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;

16 Peraturan Bupati Takalar No. …… Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2023 Nomor ……);

16.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Maksud

Adapun Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah adalah :

- Dihasilkannya dokumen perencanaan pembangunan Urusan Sekretariat Daerah Tahun 2024 yang karena adanya beberapa perubahan dari rencana kerja sebelumnya, sehingga dapat memberikan gambaran hubungan sinergitas antara kebijakan di tingkat nasional dengan kebijakan Pemerintah Daerah akibat terjadinya refocusing anggaran.
- Dirumuskannya pedoman perencanaan pembangunan urusan Sekretariat Daerah bagi para penyelenggara di lingkungan Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan.

b. Tujuan

Adapun Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar tidak lain adalah :

- Mengevaluasi kinerja pembangunan urusan Sekretariat Daerah sampai triwulan 2 dan dapat mencarikan solusi atas permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan tahun berjalan.
- Mengarahkan pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah kedalam suatu strategi program/kegiatan.
- Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan seluruh program/kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar.
- Menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan RKA Sekretariat Daerah.

16.3. SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini Menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum dan hubungan dengan dokumen perencanaan lain serta sistematika laporan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu berisikan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-Isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi serta reviu terhadap rancangan awal RKPD.

BABIII RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH

Pada bab ini diuraiakan Beberapa Program dan Kegiatan serta pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut penyusunan perubahan rencana kerja Tahun 2024.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Pada dasarnya penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar sampai dengan triwulan II. Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Evaluasi atas perencanaan bertujuan untuk mengetahui apa yang harus dicapai oleh Sekretariat Daerah dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dari Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar. Secara garis besar, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah tahun 2024 sampai pada Triwulan II telah dicapai dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari tingkat pencapaian target yang rata-rata mencapai untuk penyerapan dana dan rata-rata mencapai untuk kinerja *output* dan *outcome* kegiatan.

Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*)dan dampak (*impact*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana,sumber daya manusia,laporan, buku dan indikator lainnya.

Rumusan Evaluasi dapat di lihat dari program dan kegiatan yang sesuai target, di bawah target, melebihi target serta faktor yang menjadi penghambat dan faktor pendukung tercapainya 100% Program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar.

Kegiatan evaluasi Renja SKPD dan pencapaian realisasi kinerja sampai dengan triwulan II ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Berikut tabel evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 :

:

Renja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar

Periode Pelaksanaan: s/d Triwulan II Tahun 2024

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD:
S1.1 Indeks Reformasi Birokrasi
dengan target BB

S1.2 Nilai SAKIP Daerah
dengan Target BB
S1.3 Nilai Evaluasi LPPD
dengan Target 3,20
S1.4 Indeks Inovasi Daerah
dengan Target 40
S1-2.1 Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa
dengan Target Predikat "BAIK"
S1-2.2 Indeks Kepatuhan
terhadap SPM dengan target
60-70
S2-1.1 Indeks
Reformasi
Birokrasi dengan
Target BB
S2-1.2 Nilai SAKIP Sekretariat Daerah
dengan Target "B"

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun **2023-2026** (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu **(2023)**	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun **2024**) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Per Bulan			Realisasi Kinerja Pada Triwulan	Realisasi Kinerja Per Bulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun **2024**)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun **2024** (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun (5)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
								Januari	Februari	Maret	I	April	Mei	Juni	II	III	IV						

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

																															%	%						
Predikat Kinerja Kegiatan																															**ST**	**SR**						
		4	**1**	**1**	**2.12**		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Terpenuhinya Operasional Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**100%**	**Persen**	**2.775.000.000**	**25,000%**	**3.088.542.136**	**100%**	**2.711.887.460**	**0%**	**96.399.076**	**0%**	**123.836.309**	**0%**	**294.849.877**	**0%**	**515.085.262**	0%	194.752.130	50%	274.741.830	0%	49.985.370	**50,000%**	**519.479.330**	**0,000%**	**-**	**0,000%**	**-**	**50%**	**1.034.564.592**	**50,000%**	**38,15%**	**37,50%**	**4.123.106.728**	**37,50%**	**148,58%**		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Organisasi Perangkat Daerah		4	1	1	2.12	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	4	Paket	1.775.000.000	1	2.679.887.886	1	2.264.297.460	-	96.399.076	-	117.746.309	-	247.371.877	-	461.517.262	-	179.012.130	1	255.318.530	-	43.162.270	1	477.492.930	-	-	-	-	1	939.010.192	100%	41,47%	2	3.618.898.078	50%	204%		
		4	1	1	2.12	3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	4	Paket	1.000.000.000	1	408.654.250	1	447.590.000	-	-	-	6.090.000	-	47.478.000	-	53.568.000	-	15.740.000	-	19.423.300	-	6.823.100	-	41.986.400	-	-	-	-	-	95.554.400	0%	21,35%	1	504.208.650	25%	50%		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																															50,00%	31,41%						
Predikat Kinerja Kegiatan																															**SR**	**SR**						
		4	**1**	**1**	**2.13**		**Penataan Organisasi**	**persentase peningkatan kinerja dan terwujudnya kelembagaan efektif dan efisien**	**100%**	**Persen**	**1.250.000.000**	**25,000%**	**498.843.700**	**100%**	**65.000.000**	**23%**	**12.374.100**	**9%**	**13.445.600**	**0%**	**5.110.600**	**31,82%**	**30.930.300**	18,18%	18.181.300	18,18%	8.112.000	0,000%	870.000	**####**	**27.163.300**	**0,000%**	**-**	**0,000%**	**-**	**68,18%**	**58.093.600**	**68,18%**	**89,37%**	**78,57%**	**556.937.300**	**78,57%**	**44,55%**		
Meningkatnya akuntabili		4	1	1	2.13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis	Jumlah Dokumen Pengelolaan	16	Dokumen	325.000.000	4	175.762.500	10	12.067.000	2	4.611.400	1	1.584.000	-	-	3	6.195.400	1	3.872.500	2	1.500.000	-	-	3	5.372.500	-	-	-	-	6	11.567.900	60,00%	95,86%	10	187.330.400	63%	58%		

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

		4	**1**	**3**	**2.03**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Persentase terlaksananya pengadaan Barang dan Jasa**	**100%**	**Persen**	**400.000.000**	**12,96%**	**89.374.000**	**100%**	**65.000.000**	**3%**	**1.860.000**	**0%**	**610.000**	**3%**	**620.000**	**6%**	**3.090.000**	**19%**	21.906.509	**25%**	15.618.000	**25%**	6.625.631	**###**	**44.150.140**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**###**	**47.240.140**	**75,00%**	**72,68%**	**35,19%**	**136.614.140**	**35,19%**	**34,15%**		
	S1=Meningkatnya Kerjasama Daerah yang menunjang perbaikan perekonomian, S2=Meningkatnya kualitas Layanan dan Transparansi pengadaan barang/jasa, S3=Men	4	1	3	2.03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Paket Pengadaan yang diselesaikan	4	Paket	100.000.000	4	19.250.000	4	21.633.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.050.000	2	10.777.000	-	-	3	13.827.000	-	-	-	-	3	13.827.000	75%	64%	7	33.077.000	17,5%	33%		
		4	1	1	2.03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik	4	Paket	200.000.000	4	50.554.000	4	22.073.000	-	-	-	610.000	-	-	-	61.000	3	18.246.509	-	-	-	-	3	18.246.509	-	-	-	-	3	18.856.509	75%	85%	7	69.410.509	17,5%	35%		
		4	1	1	2.03	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	100	Orang	100.000.000	6	19.570.000	24	21.294.000	1	1.860.000	-	-	1	620.000	2	2.480.000	2	610.000	6	4.841.000	8	6.625.631	16	12.076.631	-	-	-	-	18	14.556.631	75%	68%	24	34.126.631	24%	34%		

| | | |

| | | |

	83%	**39%**						
Predikat Kinerja Kegiatan	**S**	**R**						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**69,67%**	**60,48%**						
Predikat Kinerja Program	**S**	**R**						
Faktor pendorong pencapaian kinerja: Tersedianya sarana dan prasarana kerja								
Faktor penghambat: : Adanya penggabungan fungsi perencanaan dan keuangan								
Faktor penghambat:								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):								

Total Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)	**59,05%**	**54,95%**	
Predikat Kinerja Program	**R**	**R**	
Faktor pendorong pencapaian kinerja:			
1. Adanya Regulasi yang jelas dalam pelaksanaan tugas			
2. Sinergitas hubungan yang cukup harmonis antara pimpinan dan bawahan			
3. Tersedianya sarana dan prasarana kerja			
4.			
5.			
Faktor penghambat:			
1. Terbatasnya jumlah personil SDM yang memiliki kemampuan teknis di bidang perencanaan, akuntansi, dan teknologi informasi			
2. Adanya penggabungan fungsi perencanaan dan keuangan			
3.			
4.			
5.			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):			
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):			

1.
2.
3.
4.
5.

2.1.1 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja Sekretariat Daerah 2022 yang Terakomodir di APBD 2024

Informasi tentang Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 yang terakomodir di APBD Tahun 2024 memberikan gambaran seberapa banyak jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar pada Tahun 2024. Adapun jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan dimaksud dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2

Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang ada dalam APBD 2024

APBD 2024							
No	**Perangkat Daerah**	**Jumlah Program**	**Jumlah Kegiatan**	**Jumlah Sub Kegiatan**	**Indikator**		
					Jumlah Program	**Jumlah Kegiatan**	**Jumlah Sub Kegiatan**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Sekretariat Daerah	3	21	69	3	21	97

Sumber: Renja Pokok 2024 dan SIPD 2024

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah program sebanyak 3, jumlah kegiatan 21, dan jumlah sub kegiatan 69, Sedangkan untuk jumlah indikator program sebanyak 3, jumlah indikator kegiatan sebanyak 21, dan jumlah indikator sub kegiatan sebanyak 97.

2.1.2 Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja APBD Triwulan II Tahun 2024

Informasi tentang realisasi anggaran kegiatan memberikan gambaran seberapa besar anggaran yang telah terserap pada Triwulan II untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam APBD 2024. Gambaran sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3

Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Pada APBD

Sekretariat Daerah Kab. Takalar Tahun 2024 Hingga Triwulan II

No	Program	Pagu APBD	Realisasi S/D Triwulan II	Persentase	
		(Rp)	(Rp)	Fisik	Keu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota	28.440.149.398	14.045.449.264	58,12	49,39
2	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	11.948.581.700	6.253.126.260	51,58	52,33
3	Perekonomian dan Pembangunan	820.000.000	520.784.558	69,84	63,51
	Total	**41.208.731.098**	**20.819.360.082**	**59,85 %**	**50,52 %**

Sumber : Laporan Realisasi Renja Setda Tahun 2024 Triwulan II

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa total jumlah anggaran yang terealisasi dalam APBD untuk pelaksanaan kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2024 sebesar Rp. 12.656.556.984,- anggaran tersebut dilaksanakan dalam 3 Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar, Realisasi serapan anggaran dari pelaksanaan kegiatan hingga triwulan II adalah sebesar 36,50 persen dengan capaian realisasi fisik sebesar 38,02 persen. Kondisi ini menunjukkan capaian masih kurang 6,44 persen dari target 50 persen yang diharapkan pada triwulan II. Dari 3 Program yang ada, terdapat 3 (Tiga) Program yang dapat dikategorikan memiliki kinerja baik atau kategori tinggi dari sisi penyerapan anggaran sebab persentase diperoleh telah melebihi nilai 43 persen yang ditetapkan pada triwulan II. Adapun Program yang dapat dikategorikan berkinerja baik dengan tingkat capaian realisasi diatas 43 persen (tinggi) adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota;
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
3. Program Perekonomian dan Pembangunan.

Sebagian besar penyerapan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan Sekretariat Daerah hingga triwulan II sudah dalam kategori baik yaitu >43 persen dengan jumlah sebanyak 3 (Tiga) Program atau 60 persen dari jumlah keseluruhan Program, selebihnya sebanyak 2 (Dua) Program atau 40 persen dari jumlah keseluruhan Program dengan realisasi anggaran yang tergolong sedang dengan serapan anggaran kurang dari >20 - <43 persen hingga triwulan II.

2.1.2.3 Evaluasi Capaian Pendanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024

Informasi tentang capaian pendanaan memberikan gambaran capaian berdasarkan realisasi anggaran pada Sekretariat Daerah dimulai dari program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terdapat pada Organisasi Sekretariat Daerah. Capaian kinerja pendanaan tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori

Rendah untuk realisasi 0 – 20%, Kategori **Sedang** Untuk realisasi anggaran lebih besar dari >20 – 43 persen dan kategori **Tinggi** untuk realisasi anggaran diatas 43 persen. Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 43 persen didasarkan atas tingkat capaian yang diharapkan untuk triwulan II adalah 43 persen, sehingga jika terdapat realisasi dengan capaian realisasi pendanaan lebih dari 43 persen dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi.

Evaluasi Hasil capaian pendanaan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II Sebagai berikut:

1. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Program

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pendanaan pada level program anggaran pada Sekretariat Daerah dengan menggunakan kategori tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa jumlah program yang dilaksanakan anggaran pada Sekretariat Daerah sebanyak 3 program dengan rincian capaian yang masuk pada kategori rendah tidak ada atau 0% (realisasinya 0-20 persen). Untuk capaian kinerja kategori sedang sebanyak 2 program atau 40 persen (realisasi>20-43 persen), dan untuk capaian kinerja kategori tinggi sebanyak 3 program atau 60 persen (realisasi diatas 43 persen).

2. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Kegiatan

Untuk evaluasi pelaksanaan Capaian kinerja pendanaan pada level kegiatan pada masing-masing perangkat daerah dapat dijelaskan bahwa terdapat 21 kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2024. Dari keseluruhan kegiatan tersebut terdapat 4 kegiatan atau 26,67 persen yang realisasi pendanaannya hingga triwuan II masih dalam kategori rendah yaitu 0 – 20 persen, sedang yang berada dalam kategori sedang juga sebanyak 4 kegiatan atau 26,67 persen, dan kategori tinggi dengan capaian realisasi diatas 43 persen sebanyak 7 kegiatan atau 46,66 persen.

3. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Sub Kegiatan

Adapun evaluasi capaian kinerja pendanaan pada Sekretariat Daerah pada level sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 69 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2024 terdapat 8 sub kegiatan atau 27,59 persen yang capaian kinerja pendanaanya masih rendah, sedangkan yang masuk dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan sedang terdapat 6 sub kegiatan atau 20,69 persen, dan 15 sub kegiatan dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan tinggi atau 51,72 persen sebab telah dapat mencapai realisasi pendanaan lebih dari 43 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan II.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas capaian kinerja pendanaan berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2.4

REKAPITULASI CAPAIAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR

No.	Jumlah Program	Jumlah Program Berdasarkan Tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan Berdasarkan Tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan Berdasarkan Tingkat Capaian Pendanaan		
		0-20%	> 20 - 43%	> 43 %		0-20%	> 20 - 43%	> 43 %		0-20%	> 20 - 43%	> 43 %
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1.	3	0	1	2	19	5	5	9	57	17	13	28

Sumber : Laporan Realisasi Renja Setda Tahun 2024 Triwulan II

Keterangan :

0-20	Rendah
>20-43	Sedang
>43	Tinggi

2.1.2.4 Evaluasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah

Informasi tentang capaian kinerja memberikan gambaran capaian kinerja realisasi target kinerja pada masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat di Sekretariat Daerah. Capaian kinerja tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori **Rendah** dengan realisasi 0 – 20 persen, Kategori **Sedang** untuk realisasi kinerja lebih besar dari 20 – 43 persen dan kategori **Tinggi** dengan realisasi kinerja diatas 43 persen. Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 43 persen didasarkan atas tingkat capaian yang diharapkan untuk triwulan II adalah 43 persen, sehingga jika terdapat capaian realisasi kinerja lebih dari 45 persen dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi.

Kegiatan evaluasi Renja Sekretariat Daerah Kab. Takalar serta pencapaian realisasi kinerja sampai dengan triwulan II ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Sekretariat Daerah Kab. Takalar dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja Program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

1. Evaluasi Capaian Kinerja Outcome pada Level Program

Untuk evaluasi pelaksanaan kinerja outcome pada level program dapat digambarkan sebagai berikut: untuk pencapaian target kinerja program pada Sekretariat Daerah dapat dijelaskan bahwa dari 3 Program yang dilaksanakan sampai dengan triwulan kedua tidak terdapat capaian kinerja atau 0% program yang masuk pada kategori rendah atau dibawah 20 persen, untuk pencapaian kinerja dengan kategori sedang (diatas 20-43 persen) terdapat 3 program atau 60%, selebihnya sebanyak 2 program atau 40% yang capaian kinerja masuk dalam kategori tinggi yang pencapaiannya lebih dari 43 persen pada triwulan II Tahun 2024.

2. Evaluasi Capaian Kinerja *Outcome* pada Level Kegiatan

Sebagai gambaran pencapaian target kinerja kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 21 kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan kedua terdapat 3 kegiatan (13,33 persen) yang capaian kinerjanya kategori masih rendah atau dibawah 20 persen, sedangkan yang capaian kinerja kategori sedang terdapat 4 kegiatan (20 persen), selebihnya terdapat 12 kegiatan (66,67 persen) yang capaian kinerja masuk dalam kategori pencapaian lebih dari 43 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan II Tahun 2024.

3. Evaluasi Capaian Kinerja *Outcome* pada Level Sub Kegiatan

Sebagai gambaran pencapaian target kinerja sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 69 sub kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan kedua dapat dijelaskan bahwa yang capaian kinerja masih rendah atau dibawah 20 persen terdapat 15 sub kegiatan (17,24 persen), sedangkan yang capaian kinerja sedang sebanyak 23 kegiatan (10,34 persen), selebihnya yang capaian kinerja masuk dalam kategori tinggi sebanyak 20 sub kegiatan (72,41 persen), yaitu pencapaian lebih dari 43 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan II Tahun 2024.

Evaluasi Hasil capaian kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2.5

REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR

No. Urut	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat capaian pendanaan			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat capaian pendanaan			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan berdasarkan tingkat capaian pendanaan		
		0-20%	>20-43%	>43%		0-20%	>20-43%	>43%		0-20%	>20-43%	>43%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1.	3	0	1	2	19	7	4	8	57	15	15	27

Sumber : Laporan Realisasi Renja Setda Tahun 2024 Triwulan II

Keterangan:

0-20 Rendah
>20-43 Sedang
>43 Tinggi

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi penyusunan kebijakan pemerintahan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga daerah serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah.

Pada analisis kinerja pelayanan SKPD pada Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar, salah satu indikator yang tidak mencapai target yaitu pada nilai SAKIP Perangkat Daerah yang memperoleh nilai BB dari target yang ditetapkan yaitu nilai B. Hasil Evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Takalar memperoleh nilai 70,60 atau predikat BB, penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas efisiensi penggunaan anggaran masih rendah jika dihubungkan dengan capaian kinerja. Hal ini disebabkan oleh kualitas pembangunan budaya kinerja dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Takalar belum berjalan dengan baik dan memerlukan perbaikan lebih lanjut.

2.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran Sekretariat Daerah oleh Sekretaris Daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran Organisasi. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program. Penetapan Target indikator kinerja utama selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini.

Indikator kinerja dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait target capaian keberhasilan dalam mewujudkan arah kebijakan RENSTRA Sekretariat Daerah yang digariskan pada tahun yang penetapannya dijadikan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Penetapan IKU daerah merupakan ukuran tingkat keberhasilan pencapaian indikator sasaran RENSTRA yang digariskan pada Tahun 2024. Penetapan IKU juga merupakan upaya pencapaian prioritas.

Pembangunan Kabupaten Takalar. Lebih lanjut Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut ini :

Tabel 2.6

Capaian Indikator Kinerja Utama 2022, Asumsi Capaian Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2023, dan Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024

NO.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022		Asumsi Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024
			Target	Capaian		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Nilai SAKIP Daerah	Nilai	3,3	167	70,60	N/A
2	Nilai Evaluasi LPPD	Nilai	3,07	3,20	3,20	3,30
3	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	33	40	40	45
4	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Predikat	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK
5	Indeks Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Minimal	Nilai	46,11	60-70	70-80	80-90
6	Nilai SAKIP Setda	Nilai	CC (59,38)	B (<60-70)	B (<60-70)	BB (71-80)

2.2.2. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:

a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. perumahan ralgrat dan kawasan permukiman;
e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
f. sosial.

Dengan demikian Sekretariat Daerah tidak secara langsung berhubungan dengan SPM, namun demikian tetap berkontribusi dalam mendorong pelayanan kepada masyarakat berdasarkan SPM tersebut.

2.3. Hambatan, Upaya Pencapaian dan Rekomendasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024

2.3.1. Hambatan Dalam Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah sampai dengan Triwulan II

Hambatan dan kendala dalam pelaksanakan kegiatan triwulan kedua dipengaruhi oleh:

1. Adanya peraturan pemerintah pusat yang menyebabkan harus dilakukan penyesuaian anggaran.
2. Terdapatnya beberapa kegiatan yang proses pengadaan barang dan jasanya belum dilaksanakan, baik dikarenakan masih dalam tahapan proses lelang ataupun belum masuk pada tahapan kegiatannya.
3. Terdapatnya beberapa belanja barang yang harga dan spesifikasinya tidak lagi sesuai dengan harga saat ini.
4. Perlunya Dukungan keterampilan tambahan bagi sumberdaya aparatur pengelola kegiatan untuk melakukan pengukuran atau estimasi perencanaan program terhadap alokasi anggaran yang dialokasikan baik yang dipengaruhi oleh fluktuasi aktifitas kedewanan maupun kalkulasi evaluasi pada program dan kegiatan.

2.3.2 Upaya Dalam Pencapaian Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah sampai dengan Triwulan II

Merujuk dari faktor penghambat Pelaksanaan rencana kerja Sekretariat Daerah sampai dengan triwulan ke II tentunya mengalami berbagai kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Berikut dapat disampaikan beberapa upaya yang dilakukan dalam pencapaian keberhasilan kinerja :

1. Adanya komitmen pimpinan dan Koordinasi yang baik untuk melaksanakan kegiatan secara maksimal;
2. Adanya koordinasi/konsultasi yang sinergi antar struktur jabatan internal dan eksternal serta adanya komunikasi yang terjalin antar pemimpin dan yang dipimpin dalam organisasi;

3. Tersedianya Sarana dan prasarana pendukung yang memadai;
4. Penyerapan program dan kegiatan masing-masing bidang dan kesekretariatan berjalan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan;
5. Adanya pedoman/dokumen Standar Pelayanan/SOP dan regulasi yang sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan;
6. Kualitas SDM yang mampu, terampil dan memadai serta memiliki komitmen dan motivasi untuk melakukan tugas dan fungsi secara maksimal dalam rangka memberikan pelayanan prima.

2.3.3. Rekomendasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 Sampai Dengan Triwulan Selanjutnya

Berdasarkan uraian di atas terkait faktor penghambat pencapaian kinerja, serta upaya dalam pencapaian pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah, maka Sekretariat Daerah menyampaikan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Meningkatkan komunikasi dan integrasi program dalam lingkungan Sekretariat Daerah serta pengendalian dan evaluasi internal yang dilakukan secara terus menerus;
2. Perlunya Peran aktif seluruh KPA dan PPTK didalam mengawal pelaksanaan Program dan Kegiatan yang berjalan;
3. Peran aktif Kepala Dinas selaku PA didalam mengawasi, mengontrol dan membuat kebijakan serta keputusan;
4. Peran aktif Sub Bagian Perencanaan Program didalam berkoordinasi termasuk memberikan informasi, sosialisasi maupun kebijakan-kebijakan lainnya;
5. Perlunya tenaga SDM yang berkompeten didalam perencanaan;
6. Peningkatan kualitas SDM aparatur serta jumlah staf yang berkompeten;
7. Peningkatan sarana dan prasarana operasional sesuai dengan kebutuhan;
8. Perlunya melakukan penyusunan Renstra Sekretariat Daerah yang baik, diawali dengan orientasi dan melibatkan seluruh pejabat/staf;

9. Perlunya melakukan evaluasi dan monitoring secara terus menerus dan berkelanjutan yang diiringi dengan pengelolaan data yang baik;
10. Adanya Kesesuaian Renstra dan RPJMD dalam pelaksanaan kegiatan;
11. Dalam penyusunan dokumen perencanaan tahap berikutnya memiliki data dan informasi yang akurat, sehingga perencanaan dan penganggaran dapat dilakukan dengan baik, efektif, dan efisien.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
SEKRETARIAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah pada perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 mengacu pada RPJMD yang di dalamnya memuat visi Kabupaten Takalar 2023-2026 yaitu "**Terwujudnya Kabupaten Takalar yang Unggul, Sejahtera dan Bermartabat".**

Keseluruhan penjelasan dari pernyataan visi dan pokok-pokok visi dapat dilihat pada Tabel 3.1

Tabel 3.1
Penjelasan Visi

Visi	Pokok Visi	Penjelasan Visi
Terwujudnya Kabupaten Takalar Yang unggul, Sejahtera Dan Bermartabat	Takalar Unggul	Kondisi dimana kualitas sumberdaya manusia dan produktivitas rakyat memiliki keunggulan dan daya saing dalam menghadapi dinamika perubahan.
	Takalar Sejahtera	Kondisi dimana sektor-sektor perekonomian memiliki produksi, produktivitas dan kualitas yang tinggi sehingga dapat mendorong perbaikan pendapatan dan kemampuan masyarakat dalam mengatasi beban hidup.
	Takalar Bermartabat	Kondisi dimana tatanan kehidupan masyarakat berlangsung secara tertib dan tenteram berlandaskan nilai-nilai agama dan demokrasi dalam kepemerintahan yang baik.

Sumber : RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2023- 2026

Untuk menjalankan Visi tersebut, maka upaya umum yang hendak dijalankan dinyatakan dalam rumusan misi. rumusan misi RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan produktifitas masyarakat yang berdaya saing tinggi.
2. Meningkatkan pendapatan dan meringankan beban hidup masyarakat.
3. Mewujudkan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.
4. Mewujudkan pembangunan yang komprehensif berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang berbasis pada desa.
5. Mewujudkan kehidupan agamis yang damai dan toleran.
6. Menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, akuntabel dan demokratis.

Adapun penjelasan dari masing-masing misi dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2
Penjelasan Misi

No	Pernyataan Visi	Misi	Penjelasan Misi
1.	Takalar Unggul	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan produktifitas masyarakat yang berdaya saing tinggi	Misi ini mencakup upaya dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat
2.	Takalar Sejahtera	Meningkatkan pendapatan dan meringankan beban hidup masyarakat	Misi ini mencakup upaya dalam meningkatkan produksi sektor-sektor perekonomian serta menurunkan beban hidup masyarakat miskin
		Mewujudkan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan	Misi ini mencakup upaya dalam perbaikan pelayanan dan iklim investasi
		Mewujudkan pembangunan yang komprehensif berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang berbasis pada desa.	Misi ini mencakup upaya dalam pemeliharaan kualitas lingkungan hidup, penguatan desa dan penataan ruang
3.	Takalar Bermartabat	Mewujudkan kehidupan agamis	Misi ini mencakup upaya dalam peningkatan

No	Pernyataan Visi	Misi	Penjelasan Misi
		yang damai dan toleran	kualitas kehidupan beragama, pemeliharaan ketertiban dan ketenteraman. serta perlindungan masyarakat
		Menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, akuntabel dan demokratis.	Misi ini mencakup upaya dalam reformasi birokrasi dan perbaikan pelayanan public

Sumber : RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2023 – 2026

Berdasarkan pada Visi dan Misi Kabupaten Takalar 2023-2026, maka Sekretariat Daerah akan mendukung pelaksanaan misi (6) "**Menerapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Bersih, Akuntabel dan Demokratis** " yang ditempuh dengan cara :

1. Memantapkan kualitas sistem dan tata kelola pelayanan publik

2. Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi

Pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Takalar dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Rencana Strategis Sekretariat Daerah selama 5 tahun kedepan.

Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan prioritas pembangunan daerah menjadi landasan perumusan sasaran, strategi, dan kebijakan Rencana Kerja (Renja) sebagai rencana tahunan. Rumusan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan - pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut: (1) diturunkan secara lebih operasional dari masing- masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi; (2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu- isu strategis pembangunan daerah; (4) dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan (5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; (2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu- isu strategis pembangunan daerah; dan memenuhi kriteria SMART-C Perubahan target dari tujuan dan sasaran tahun 2024 yang mengacu pada Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Kabupaten Takalar tahun 2023- 2026, menjadi landasan Perubahan Renja Tahun 2024 .

Adapun Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai tahun 2024 sebagai penjabaran Renstra Sekretariat Daerah 2023-2026 dan disesuaikan dengan tupoksi Sekretariat Daerah dan menyesuaikan dengan kebijakan pembangunan nasional 2023-2026, dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3

Tujuan, Sasaran Serta Target Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024

NO	Vis/Misi/Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Asumsi Capaian Tahun 2022
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
Visi : **Terwujudnya Kabupaten Takalar yang Unggul, Sejahtera dan Bermartabat".**						
M-6: Menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, akuntabel, demokratis dan terpercaya.						
1.	T1.1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Administrasi Pemerintahan	S1.1.1. Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan urusan pemerintahan Serta penataan batas wilayah	Persentase batas wilayah Administrasi pemerintahan Administrasi yang tertata	Persen	45	55
		S1.1.2. Meningkatnya penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum	Persentase produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat	Persen	70	90
		S1.1.3. Meningkatnya akuntabilitas layanan bantuan keagamaan dan social kepada masyarakat	Persentase pemberian insentif Pembina TK/TPA yang tepat sasaran	Persen	100	100
		S1.1.4. Meningkatnya kerjasama Daerah yang menunjang perbaikan perekonomian	Jumlah sektor ekonomi kreatif	Investasi	5	5
		S1.1.5. Meningkatnya kualitas layanan dan Transparansi Pengadaan barang/jasa	Persentase kegiatan pengadaan yang ditangani e-procurement	Persen	90	100

NO	Vis/Misi/Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Asumsi Capaian Tahun 2022
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
		S1.1.6. Meningkatnya Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian terhadap Program Pembangunan	Persen	90	100
		S1.1.7. Meningkatnya kualitas tata kelola kelembagaan dan pelayanan publik	Jumlah OPD yang kelembagaannya sesuai dengan peraturan dan kebutuhan	OPD	35	35
2.	T2.2.Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah	S2.2.4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Tepat Waktu (Lap.Keu, Lap. Kinerja dan SPJ)	Persen	100	100

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar dalam membuat rancangan perubahan rencana kerja didasarkan pada rancangan perubahan RKPD Kabupaten Takalar. Dalam proses tersebut ada catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD dan rancangan perubahan RKPD ,misalnya: terdapat program dan kegiatan yang besaran anggarannya berbeda ini di akibatkan adanya pengurangan anggaran. Tidak semua program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam RKPD dapat terealisasi. Keterbatasan anggaran mengakibatkan Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar tidak leluasa dalam melaksanakan semua program kerja yang telah direncanakan.

Dalam penyusunannya, RPJMD dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi berbagai pemangku kepentingan. Penyusunan RPJMD Kabupaten Takalar tahun 2023-2026 telah disusun melalui proses pendekatan perencanaan pembangunanya itu politik, teknokratik, partisipatif dan perencanaan yang disusun berdasarkan masukan-masukan dari atas – bawah serta bawah-atas (*topdown – bottom up*).

Namun demikian tentunya masih terdapat berbagai hal yang masih perlu ditindaklanjuti, disamping adanya hal-hal baru yang berkembang selama periode berikutnya, Tahun 2023-2026 untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah efektif, efisien sehingga mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Untuk mengetahui sejauh mana relevansi rancangan perubahan RKPD dengan rancangan perubahan Renja Sekretariat Daerah yang tertuang di dalam dokumen perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah maka diperlukan analisis sesuai dengan kebutuhan pada Sekretariat Daerah tabel 3.4 berikut akan disajikan review terhadap rancangan perubahan RKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar sebagai berikut :

Tabel 0I-2
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Takalar

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Kebutuhan Dana (Rp.)
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Capaian		
I.	**PROGRAM PENUNJANG ADMINSTRASI PEMERINTAHAN KAB./KOTA**		**Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Indeks RB baik (BB)**	**0**	**%**	**21.592.568.249**	**PROGRAM PENUNJANG ADMINSTRASI PEMERINTAHAN KAB./KOTA**		**Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Indeks RB baik (BB)**	**0**	**%**		**21.592.568.249**
			Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM di atas 80%	**62**	**%**				**Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM di atas 80%**	**62**	**%**		
			Persentase Pelayanan Kedinasan Pimpinan dan Pelayanan Tamu tepat Waktu	**100**	**%**				**Persentase Pelayanan Kedinasan Pimpinan dan Pelayanan Tamu tepat Waktu**	**100**	**%**		
			Nilai Sakip Sekretariat Daerah	**62**	**Nilai**				**Nilai Sakip Sekretariat Daerah**	**62**	**Nilai**		
			Persentase Perangkat Daerah yang nilai SAKIP-nya B	**0**	**%**				**Persentase Perangkat Daerah yang nilai SAKIP-nya B**	**0**	**%**		
1	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase rata-rata capaian output sub kegiatan perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**80.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase rata-rata capaian output sub kegiatan perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**%**		**80.000.000**
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Takalar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dok	30.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Takalar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dok		30.000.000
2)	Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD	Takalar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dok	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD	Takalar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dok		7.500.000
3)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Takalar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	Dok	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Takalar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	Dok		10.000.000

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
4)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Takalar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	Dok	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Takalar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	Dok	7.500.000
5)	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Takalar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	Dok	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Takalar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	Dok	7.500.000
6)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Takalar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Lap	17.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Takalar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Lap	17.500.000
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Laporan Keuangan tepat waktu dan akurat**	**100**	**%**	**15.277.745.040**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Laporan Keuangan tepat waktu dan akurat**	**100**	**%**	**15.277.745.040**
7)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Takalar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1708	Org/ bln	10.308.389.340	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Takalar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1708	Org/ bln	10.308.389.340
	Tunjangan tambahan Penghasilan	Takalar	Jumlah Orang yang Menerima Tunjangan Penghasilan ASN	1708	Org/ bln	3.529.705.700	Tunjangan tambahan Penghasilan	Takalar	Jumlah Orang yang Menerima Tunjangan Penghasilan ASN	1708	Org/ bln	3.529.705.700
	Tunjangan Obyektifitas Lainnya	Takalar	Jumlah Orang yang Menerima Tunjangan Obyektifitas Lainnya	1708	Org/ bln	1.242.150.000	Tunjangan Obyektifitas Lainnya	Takalar	Jumlah Orang yang Menerima Tunjangan Obyektifitas Lainnya	1708	Org/ bln	1.242.150.000
8)	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Takalar	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2	Dok	55.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Takalar	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2	Dok	55.000.000
9)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Takalar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dok	30.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Takalar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dok	30.000.000
10)	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Takalar	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6	Dok	7.500.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Takalar	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6	Dok	7.500.000
11)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Takalar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Lap	20.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Takalar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Lap	20.000.000

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
12)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Takalar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	Lap	70.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Takalar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	Lap	70.000.000
13)	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Takalar	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dok	15.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Takalar	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dok	15.000.000
3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Persentase rata-rata Capaian Output sub kegiatan Administrasi Umum Barang Milik Daerah**	**100**	**%**	**105.000.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Persentase rata-rata Capaian Output sub kegiatan Administrasi Umum Barang Milik Daerah**	**100**	**%**	**105.000.000**
14)	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Takalar	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Lap.	75.000.000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Takalar	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Lap.	75.000.000
15)	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Takalar	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Lap.	15.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Takalar	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Lap.	15.000.000
16)	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Takalar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Lap.	15.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Takalar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Lap.	15.000.000
4	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**		**Persentase rata-rata Capaian Output sub kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**2.500.000**	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**		**Persentase rata-rata Capaian Output sub kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**2.500.000**
17)	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Takalar	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4	Dok	2.500.000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Takalar	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4	Dok	2.500.000
5	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase rata-rata Capaian Output sub kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**92.500.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase rata-rata Capaian Output sub kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**92.500.000**

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
18)	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Takalar	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4	Unit	45.000.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Takalar	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4	Unit	45.000.000
19)	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Takalar	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	Dok	25.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Takalar	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	Dok	25.000.000
20)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Takalar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1	Orang	22.500.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Takalar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1	Orang	22.500.000
6	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase rata-rata Capaian Output sub kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**885.000.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase rata-rata Capaian Output sub kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**885.000.000**
21)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Takalar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15	Paket	75.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Takalar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15	Paket	75.000.000
22)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Takalar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	125.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Takalar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	125.000.000
23)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Takalar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	40.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Takalar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	40.000.000
25)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Takalar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	45.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Takalar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	45.000.000
26)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Takalar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Lap.	300.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Takalar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Lap.	300.000.000
27)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Takalar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Lap.	300.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Takalar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Lap.	300.000.000
7	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Nilai Aset Pemerintah Bertambah**	**100**	**%**	**210.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Nilai Aset Pemerintah Bertambah**	**100**	**%**	**210.000.000**

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
28)	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Takalar	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5	Unit	100.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Takalar	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5	Unit	100.000.000
29)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Takalar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	Unit	35.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Takalar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	Unit	35.000.000
30)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Takalar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	4	Unit	75.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Takalar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	4	Unit	75.000.000
8	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase rata-rata capaian output kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**1.652.323.209**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase rata-rata capaian output kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**1.652.323.209**
31)	Penyediaan Surat Menyurat	Takalar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Lap.	120.000.000	Penyediaan Surat Menyurat	Takalar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Lap.	120.000.000
32)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Listrik)	Takalar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Lap.	591.352.409	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Listrik)	Takalar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Lap.	591.352.409
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Air)	Takalar		12	Lap.	342.970.800	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Air)	Takalar		12	Lap.	342.970.800
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Internet)	Takalar		12	Lap.	128.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Internet)	Takalar		12	Lap.	128.000.000
33)	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Takalar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Lap.	220.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Takalar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Lap.	220.000.000
34)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Takalar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Lap.	250.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Takalar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Lap.	250.000.000
9	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Terpeliharanya Aset Milik Pemerintah**	**100**	**%**	**1.000.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Terpeliharanya Aset Milik Pemerintah**	**100**	**%**	**1.000.000.000**

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
35)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Takalar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20	Unit	500.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Takalar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20	Unit	500.000.000
36)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Takalar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	Unit	50.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Takalar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	Unit	50.000.000
37)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Takalar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	92	Unit	450.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Takalar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	92	Unit	450.000.000
10	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**		**Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**100**	**%**	**600.000.000**	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**		**Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**100**	**%**	**600.000.000**
38)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Takalar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1	Org/Bln	575.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Takalar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1	Org/Bln	575.000.000
39)	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Takalar	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1	Paket	12.500.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Takalar	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1	Paket	12.500.000
40)	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Takalar	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1	Orang	12.500.000	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Takalar	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1	Orang	12.500.000
11	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**		**Terpenuhinya Operasional Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**100**	**%**	**837.500.000**	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**		**Terpenuhinya Operasional Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**100**	**%**	**837.500.000**
41)	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Takalar	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1	Paket	487.500.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Takalar	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1	Paket	487.500.000
42)	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Takalar	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		Paket	-	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Takalar	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		Paket	-

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
43)	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Takalar	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1	Paket	350.000.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Takalar	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1	Paket	350.000.000
12	**Penataan Organisasi**		**Persentase peningkatan kinerja dan terwujudnya kelembagaan efektif dan efisien**	**100**	**%**	**350.000.000**	**Penataan Organisasi**		**Persentase peningkatan kinerja dan terwujudnya kelembagaan efektif dan efisien**	**100**	**%**	**350.000.000**
44)	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Takalar	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4	Dok	100.000.000	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Takalar	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4	Dok	100.000.000
45)	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Takalar	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1	Lap	100.000.000	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Takalar	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1	Lap	100.000.000
46)	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Takalar	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1	Dok	100.000.000	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Takalar	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1	Dok	100.000.000
47)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Takalar	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Dok	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Takalar	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Dok	50.000.000
13	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**		**persentase rata-rata capaian output sub kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**100**	**%**	**500.000.000**	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**		**persentase rata-rata capaian output sub kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**100**	**%**	**500.000.000**
48)	Fasilitasi Keprotokolan	Takalar	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokoleran	12	Lap	125.000.000	Fasilitasi Keprotokolan	Takalar	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokoleran	12	Lap	125.000.000
49)	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Takalar	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12	Lap	125.000.000	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Takalar	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12	Lap	125.000.000
50)	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Takalar	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12	Lap	250.000.000	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Takalar	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12	Lap	250.000.000
II.	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**		**Persentase Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin yang difasilitasi**	**100**	**%**	**6.000.000.000**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**		**Persentase Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin yang difasilitasi**	**100**	**%**	**6.000.000.000**
			Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	**100**	**%**				**Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**	**100**	**%**	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
			Persentase Penyelesaian Pengajuan Administrasi Kesejahteraan rakyat yang tetap dan akurat	**100**	**%**				**Persentase Penyelesaian Pengajuan Administrasi Kesejahteraan rakyat yang tetap dan akurat**	**100**	**%**	
14	**Administrasi Tata Pemerintahan**		**Persentase rata-rata capaian output sub kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan**	**100**	**%**	**300.000.000**	**Administrasi Tata Pemerintahan**		**Persentase rata-rata capaian output sub kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan**	**100**	**%**	**300.000.000**
51)	Penataan Administrasi Pemerintahan	Takalar	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3	Dok	100.000.000	Penataan Administrasi Pemerintahan	Takalar	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3	Dok	100.000.000
52)	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Takalar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	6	Dok	100.000.000	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Takalar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	6	Dok	100.000.000
53)	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Takalar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4	Dok	100.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Takalar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4	Dok	100.000.000
15	**Fasilitasi Kerjasama Daerah**		**Persentase terwujudnya Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**100**	**%**	**50.000.000**	**Fasilitasi Kerjasama Daerah**		**Persentase terwujudnya Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**100**	**%**	**50.000.000**
54)	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Takalar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	4	Dok	35.000.000	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Takalar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	4	Dok	35.000.000
55)	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Takalar	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah	2	Lap	15.000.000	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Takalar	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah	2	Lap	15.000.000
16	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**		**Tingkat Capaian Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**100**	**%**	**4.800.000.000**	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**		**Tingkat Capaian Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**100**	**%**	**4.800.000.000**
56)	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Tersebar di di 10 Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4	Dok	4.600.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Tersebar di di 10 Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4	Dok	4.600.000.000
57)	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Takalar	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan: Sosial	4	Dok	100.000.000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Takalar	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan: Sosial	4	Dok	100.000.000

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
		Takalar	- Transmigrasi	4 Dok			Takalar	- Transmigrasi	4 Dok	
		Takalar	- Kesehatan	4 Dok			Takalar	- Kesehatan	4 Dok	
		Takalar	- Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,	4 Dok			Takalar	- Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,	4 Dok	
		Takalar	- Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil,	4 Dok			Takalar	- Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil,	4 Dok	
		Takalar	- Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,	4 Dok			Takalar	- Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,	4 Dok	
		Takalar	- Pengendalian Penduduk dan KB	4 Dok			Takalar	- Pengendalian Penduduk dan KB	4 Dok	
58)	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Takalar	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan: Kepemudaan dan Olahraga	4 Dok	100.000.000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Takalar	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan: Kepemudaan dan Olahraga	4 Dok	100.000.000
		Takalar	- Pariwisata	4 Dok			Takalar	- Pariwisata	4 Dok	
		Takalar	- Pendidikan	4 Dok			Takalar	- Pendidikan	4 Dok	
		Takalar	- Kebudayaan	4 Dok			Takalar	- Kebudayaan	4 Dok	
		Takalar	- Perpustakaan	4 Dok			Takalar	- Perpustakaan	4 Dok	
		Takalar	- Kearsipan	4 Dok			Takalar	- Kearsipan	4 Dok	
		Takalar	- Trantibum Linmas	4 Dok			Takalar	- Trantibum Linmas	4 Dok	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
17	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**		**Persentase tersusunnya Kebijakan Daerah**	**100**	**%**	**850.000.000**	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**		**Persentase tersusunnya Kebijakan Daerah**	**100**	**%**	**850.000.000**
59)	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Takalar	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	650	Dok	350.000.000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Takalar	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	650	Dok	350.000.000
60)	Fasilitasi Bantuan Hukum	Takalar	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	2	Kasus	250.000.000	Fasilitasi Bantuan Hukum	Takalar	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	2	Kasus	250.000.000
61)	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Takalar	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	650	Dok	250.000.000	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Takalar	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	650	Dok	250.000.000
III.	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**		**Persentase Penggunaan E-procurement terhadap Belanja Pengadaan**	**100**	**%**	**1.090.000.000**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**		**Persentase Penggunaan E-procurement terhadap Belanja Pengadaan**	**100**	**%**	**1.090.000.000**
			Persentase Penayangan SIRUP	**100**	**%**				**Persentase Penayangan SIRUP**	**100**	**%**	
			Persentase Rumusan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Daerah yang dimanfaatkan menjadi Kebijakan	**100**	**%**				**Persentase Rumusan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Daerah yang dimanfaatkan menjadi Kebijakan**	**100**	**%**	
			Tingkat Inflasi	**2,05**	**%**				**Tingkat Inflasi**	**2,05**	**%**	
18	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**		**Tingkat Capaian Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**100**	**%**	**300.000.000**	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**		**Tingkat Capaian Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**100**	**%**	**300.000.000**
62)	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Takalar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4	Dok	90.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Takalar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4	Dok	90.000.000
63)	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Takalar	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	7	Lap	125.000.000	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Takalar	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	7	Lap	125.000.000

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
64)	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Takalar	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2	Dok	85.000.000	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Takalar	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2	Dok	85.000.000
19	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**		**Persentase rata - rata capaian output kegiatan Administrasi Pembangunan**	**100**	**%**	**300.000.000**	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**		**Persentase rata - rata capaian output kegiatan Administrasi Pembangunan**	**100**	**%**	**300.000.000**
65)	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Takalar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1	Dok	100.000.000	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Takalar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1	Dok	100.000.000
66)	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Takalar	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1	Lap.	100.000.000	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Takalar	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1	Lap.	100.000.000
67)	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Takalar	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1	Lap.	100.000.000	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Takalar	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1	Lap.	100.000.000
20	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**		**Persentase terlaksananya pengadaan Barang dan Jasa**	**100**	**%**	**400.000.000**	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**		**Persentase terlaksananya pengadaan Barang dan Jasa**	**100**	**%**	**400.000.000**
68)	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Takalar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4	Dok	100.000.000	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Takalar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4	Dok	100.000.000
69)	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Takalar	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	800	Dok	200.000.000	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Takalar	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	800	Dok	200.000.000
		Takalar	Pemanfaatan sistem pengadaan SiRUP	100	%			Takalar	Pemanfaatan sistem pengadaan SiRUP	100	%	
		Takalar	Pemanfaatan sistem pengadaan *E-Tendering*	100	%			Takalar	Pemanfaatan sistem pengadaan *E-Tendering*	100	%	
70)	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Takalar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	6	Orang	100.000.000	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Takalar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	6	Orang	100.000.000
		Takalar	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	100	%			Takalar	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	100	%	
		Takalar	Tingkat Kematangan UKPBJ	100	%			Takalar	Tingkat Kematangan UKPBJ	100	%	

No.	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
21	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**		**Tingkat Capaian Kebijakan terkait Sumber Daya Alam**	**100**	**%**	**90.000.000**	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**		**Tingkat Capaian Kebijakan terkait Sumber Daya Alam**	**100**	**%**	**90.000.000**
71)	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Takalar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian	2	Dok	40.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Takalar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian	2	Dok	40.000.000
		Takalar	- Pangan	2	Dok			Takalar	- Pangan	2	Dok	
		Takalar	- Kehutanan	2	Dok			Takalar	- Kehutanan	2	Dok	
		Takalar	- Kelautan dan Perikanan	2	Dok			Takalar	- Kelautan dan Perikanan	2	Dok	
		Takalar	- Perdagangan	2	Dok			Takalar	- Perdagangan	2	Dok	
		Takalar	- Perindustrian	2	Dok			Takalar	- Perindustrian	2	Dok	
		Takalar	- KUKM	2	Dok			Takalar	- KUKM	2	Dok	
72)	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan	Takalar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan: Pertambangan dan Sumber Daya Mineral	2	Dok	25.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan	Takalar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan: Pertambangan dan Sumber Daya Mineral	2	Dok	25.000.000
		Takalar	- Lingkungan Hidup	2	Dok			Takalar	- Lingkungan Hidup	2	Dok	
		Takalar	- Perhubungan	2	Dok			Takalar	- Perhubungan	2	Dok	
		Takalar	- Statistik	2	Dok			Takalar	- Statistik	2	Dok	
73)	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Takalar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan: Energi dan Air	2	Dok	25.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Takalar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan: Energi dan Air	2	Dok	25.000.000
		Takalar	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2	Dok			Takalar	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2	Dok	
		Takalar	- Perumahan Rakyat dan Pemukiman	2	Dok			Takalar	- Perumahan Rakyat dan Pemukiman	2	Dok	
		Takalar	- Pertanahan	2	Dok			Takalar	- Pertanahan	2	Dok	
	Jumlah					**28.682.568.249**	**Jumlah**					**28.682.568.249**

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah

Sebagaimana Tema Pembangunan Kabupaten Takalar Tahun 2024 adalah ”Optimalisasi Pengembangan Sumber Daya Alam untuk Pemulihan Ekonomi Menuju Takalar yang Unggul, Sejahtera dan Bermartabat” dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Takalar Tahun 2024 yang sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Administrasi Pemerintahan
   1.2 Meningkatnya Kualitas Perumusan dan Evaluasi Kebijakan
   2.2 Meningkatnya Koordinasi Administratif dan Pembinaan ASN
2. Meningkatkan Tata Kelola pada Sekretariat Daerah
   2.1. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Setda

Sedangkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 dan termuat dalam RKPD Kabupaten Takalar tahun 2024 adalah sebagaiberikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran RKPD Kabupaten Takalar Sesuai dengan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2024
1	*2*	*3*	*4*
Meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat	Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor–sektor perekenomian daerah	PDRB/kapita	40
		Pertumbuhan ekonomi	7,54
Meningkatkan kapasitas investasi dan kerjasama pembangunan	Meningkatnya realisasi investasi dan kerjasama pembangunan daerah	Nilai investasi PMDN	45.000.
		Nilai investasi PMDA	0
		Jumlah investor PMDN	38
		Jumlah investor PMA	0
Meningkatkan martabat tatanan sosial	Meningkatnya kualitas kehidupan keagamaan	Adanya regulasi terkait peningkatan kualitas kehidupan beragama	1

kemasyarakatan			
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik yang berkualitas	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, akuntabel dan demokratis.	Jumlah temuan BPK	20
		Nilai LAKIP/SAKIP	A
		Opini BPK atas laporan keuangan	WTP
	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan public	Indeks kepuasan masyarakat	80%
		Capaian SPM pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, PUPR, Perumahan dan Kawasan Permukiman)	85%

Dengan memperhatikan tema dan prioritas serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar sertatujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2023- 2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3

Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR/TUJUAN/SASARAN	Target 2024
1	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Administrasi Pemerintahan	Meningkatnya Koordinasi Administratif dan Pembinaan ASN	Nilai SAKIP Daerah	<60 -70
			Nilai evaluasi LPPD	30,30
			Indeks Inovasi Daerah	45
			Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	BAIK
			Indeks Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Minimal	70-80
2	Meningkatkan Tata Kelola pada Sekretariat Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Setda	Nilai SAKIP Setda	<60-70

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
SEKRETARIAT DAERAH KAB. TAKALAR
TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024			Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Renja	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	Renja 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH							42.019.243.748	41.208.731.098	40.888.409.770							28.802.053.309,00	
1	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-		-	31.717.210.848	28.440.149.398	28.119.828.070							21.912.053.309,00	
	4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		100%	100%	100%	80.300.300	**97.868.820**	**97.868.820**			-	-	-		80.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	25.298.800	21.500.000	21.500.000	Kab. Takalar	Pajak Daerah Retribusi Daerah	-	-			30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.200	21.000.000	21.000.000	Kab. Takalar	Pajak Daerah Retribusi Daerah	-	-			7.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.100	11.000.000	11.000.000	Kab. Takalar	Pajak Daerah	-	-			10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	8 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.001.000	23.368.820	23.368.820	Kab. Takalar	Pajak Daerah Retribusi Daerah	-	-			7.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	8 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.100	11.000.000	11.000.000	Kab. Takalar	Pajak Daerah	-	-			7.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan	4 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	10.000.100	10.000.000	10.000.000	Kab. Takalar	Pajak Daerah	-	-			17.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		100%	100%	100%	13.354.010.784	**13.248.188.036**	**12.927.866.708**			-	-	-		15.397.230.100,00	SEKRETARIAT DAERAH

	4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1708.00 Orang/bulan	1708.00 Orang/bulan	115 orang/bulan	115 orang/bulan	115 orang/bulan	9.458.394.104	8.624.465.716	8624465716,0	Kab. Takalar	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pajak Daerah Pendapatan Bagi Hasil	-	-			15.199.730.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
						Tunjangan Tambahan Penghasilan	Jumlah Orang yang Menerima Tunjangan Penghasilan ASN	1708 Orang/bulan	1708 Orang/bulan	115 orang/bulan	115 orang/bulan	115 orang/bulan	3.322.319.880	4.051.144.920	3.730.823.592								
						Tunjangan Obyektifitas Lainnya	Jumlah Orang yang Menerima Tunjangan Obyektifitas Lainnya	1708 Orang/bulan	1708 Orang/bulan	25 orang/bulan	25 orang/bulan	25 orang/bulan	248.160.000	-	-								
	4	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kab. Takalar	Pajak Daerah	-	-			55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48 Dokumen	12 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	164.936.700	358.577.400	358.577.400	Kab. Takalar	Pajak Daerah Retribusi Daerah	-	-			30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	24 Dokumen	6 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	120.000.000	171.000.000	171.000.000	Kab. Takalar	Pajak Daerah	-	-			7.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.00 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	10.200.100	11.000.000	11.000.000	Kab. Takalar	Pajak Daerah	-	-			20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	8.00 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	10.000.000	11.000.000	11.000.000	Kab. Takalar	Pajak Daerah	-	-			70.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0.00 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	11.000.000	11.000.000	Kab. Takalar	Pajak Daerah	-	-			15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

	4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	100%	100%	100%	100%	85.933.900	**153.000.000**	**153.000.000**			-	-	-		105.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	48.00 Laporan	12 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	10.000.000	31.000.000	31.000.000	Kab. Takalar	Pajak Daerah Retribusi Daerah	-	-			75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	16.00 Laporan	4 Laporan	20 laporan	20 laporan	20 laporan	9.999.900	11.000.000	11.000.000	Kab. Takalar	Pajak Daerah	-	-			15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.00 Laporan	2 Laporan	38 laporan	38 laporan	38 laporan	65.934.000	111.000.000	111.000.000	Kab. Takalar	Pajak Daerah Retribusi Daerah	-	-			15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-		100%	100%	100%	10.000.000	**60.500.000**	**60.500.000**			-	-	-		2.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	0 Dokumen	4 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	10.000.000	60.500.000	60.500.000	Kab. Takalar	Pajak Daerah	-	-			2.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		100%	100%	100%	186.962.200	**59.023.139**	**59.023.139**			-	-	-		92.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4 Unit	4 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	45.000.200	1.000.000	1.000.000	Kab. Takalar	Pajak Daerah	-	-			45.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.00 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	101.962.000	51.490.600	51.490.600	Kab. Takalar	Pajak Daerah Retribusi Daerah	-	-			25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1.00 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	40.000.000	6.532.539	6.532.539	Kab. Takalar	Pajak Daerah	-	-			22.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		100%	100%	100%	3.041.025.500	**2.264.860.440**	**2.264.860.440**			-	-	-		885.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	192.126.200	341.999.000	341.999.000	Kab. Takalar	Pajak Daerah Retribusi Daerah	-	-			75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	125.228.500	1.000.000	1.000.000	Kab. Takalar	Pajak Daerah	-	-			125.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	297.316.800	188.157.840	188.157.840	Kab. Takalar	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Retribusi	-	-			40.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

																Daerah						
	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	26.304.000	63.218.600	63.218.600	Kab. Takalar	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Retribusi Daerah	-	-			45.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.600.000.000	1.270.485.000	1.270.485.000	Kab. Takalar	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	800.050.000	400.000.000	400.000.000	Kab. Takalar	Pajak Daerah	-	-			300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		100%	100%	100%	4.630.511.780	**2.559.205.048**	**2.559.205.048**			-	-	-		210.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	3.531.300.000	-	-	Kab. Takalar	Pajak Daerah	-	-			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	813.202.300	56.777.000	56.777.000	Kab. Takalar	Retribusi Daerah	-	-			35.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	286.009.480	2.502.428.048	2.502.428.048	Kab. Takalar	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Retribusi Daerah Pendapatan Bagi Hasil	-	-			75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		100%	100%	100%	3.024.499.184	**3.340.066.916**	**3.340.066.916**			-	-	-		1.652.323.209,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	41.810.000	58.522.600	58.522.600	Kab. Takalar	Pajak Daerah Retribusi Daerah	-	-			120.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.062.322.112	150.005.100	150.005.100	Kab. Takalar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Retribusi Daerah	-	-			1.062.323.209,00	SEKRETARIAT DAERAH

						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Air)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Air)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	-	591.206.616	591.206.616								
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Internet)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Internet)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	-	67.971.000	67.971.000								
	4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	730.043.200	1.243.561.600	1.243.561.600	Kab. Takalar	Pajak DaerahDana Transfer Umum-Dana Alokasi UmumRetribusi DaerahPendapatan Bagi Hasil	-	-			220.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.190.323.872	1.228.800.000	1.228.800.000	Kab. Takalar	Pajak Daerah	-	-			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		100%	100%	100%	1.834.766.100	**2.590.761.539**	**2.590.761.539**			-	-	-		1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	20 Unit	70 Unit	70 Unit	70 Unit	842.802.000	948.830.000	948.830.000	Kab. Takalar	Pajak Daerah	-	-			500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit	40 Unit	40 Unit	40 Unit	157.480.000	40.370.000	40.370.000	Kab. Takalar	Pajak Daerah	-	-			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	92 Unit	92 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	834.484.100	1.601.561.539	1.601.561.539	Kab. Takalar	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Retribusi Daerah	-	-			450.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-		100%	100%	100%	1.080.312.000	**749.788.000**	**749.788.000**			-	-	-		850.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.00 Orang/Bulan	2.00 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	785.311.600	600.000.000	600.000.000	Kab. Takalar	Pendapatan Bagi Hasil	-	-			825.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2.00 Paket	2.00 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	245.000.400	149.788.000	149.788.000	Kab. Takalar	Pajak Daerah	-	-			12.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

	4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.00 Orang	2.00 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	50.000.000	-	-	Kab. Takalar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	-	-			12.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-		100%	100%	100%	3.188.890.800	**2.711.887.460**	**2.711.887.460**			-	-	-		837.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	2.176.316.200	2.264.297.460	2.264.297.460	Kab. Takalar	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	-	-			400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	604.969.000	-	-	Kab. Takalar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	-	-			287.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	407.605.600	447.590.000	447.590.000	Kab. Takalar	Pendapatan Bagi Hasil	-	-			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	-	-		100%	100%	100%	600.000.000	**65.000.000**	**65.000.000**			-	-	-		300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4 Dokumen	4 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	216.451.600	12.067.000	12.067.000	Kab. Takalar	Pajak Daerah	-	-			75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	171.220.400	22.733.000	22.733.000	Kab. Takalar	Pajak Daerah	-	-			75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	150.431.000	15.298.000	15.298.000	Kab. Takalar	Pajak Daerah	-	-			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	61.897.000	14.902.000	14.902.000	Kab. Takalar	Pajak Daerah	-	-			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-		100%	100%	100%	599.998.300	**540.000.000**	**540.000.000**			-	-	-		500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	169.702.700	300.302.000	300.302.000	Kab. Takalar	Pajak Daerah Retribusi Daerah	-	-			125.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	74.472.600	13.144.000	13.144.000	Kab. Takalar	Pajak Daerah	-	-			125.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	355.823.000	226.554.000	226.554.000	Kab. Takalar	Pajak Daerah	-	-			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN	-			100%	100%	100%	**8.102.035.400**	**11.948.581.700**	**11.948.581.700**							5.900.000.000,00	

						RAKYAT																
	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	-	-		100%	100%	100%	**438.766.000**	**462.748.000**	**462.748.000**			-	-	-		250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3 Dokumen	3 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	309.735.200	424.048.000	424.048.000	Kab. Takalar	Pajak Daerah Retribusi Daerah	-	-			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	68.075.400	29.401.000	29.401.000	Kab. Takalar	Pajak Daerah Pendapatan Bagi Hasil	-	-			75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	60.955.400	-	-	Kab. Takalar	Pajak Daerah	-	-			75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-		100%	100%	100%	**6.052.035.400**	10.894.671.000	10.894.671.000			-	-	-		4.750.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	5.640.873.200	10.869.671.000	10.869.671.000	Kab. Takalar Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Takalar	Pajak Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Retribusi Daerah Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	-			4.600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

	4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	205.581.100	15.000.000	15.000.000	Kab. Takalar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	-	-			75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
							- Transmigrasi	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen										
							- Kesehatan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen										
							- Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen										

							- Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil,	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen												
							- Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen											
							- Pengendalian Penduduk dan KB	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen											
	4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	205.581.100	10.000.000	10.000.000	Kab. Takalar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	-	-			75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
							- Pariwisata	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen											

							- Pendidikan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen											
							- Kebudayaan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen											
							- Perpustakaan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen											
							- Kearsipan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen											
							- Trantibum Linmas	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen											
	4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	-		100%	100%	100%	**1.450.000.000**	**571.880.700**	**571.880.700**			-	-	-		850.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	650 Dokumen	650 Dokumen	200 Dokumen	200 Dokumen	200 Dokumen	429.855.000	124.450.300	124.450.300	Kab. Takalar	Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin	-	-			350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	2 Kasus	2 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	592.727.000	265.000.000	265.000.000	Kab. Takalar	Pajak Daerah Retribusi Daerah	-	-			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

	4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	650 Dokumen	650 Dokumen	200 Dokumen	200 Dokumen	200 Dokumen	427.418.000	182.430.400	182.430.400	Kab. Takalar	Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin	-	-			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-	-		100%	100%	100%	**161.234.000**	**19.282.000**	**19.282.000**			-	-	-		50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	5 Dokumen	4 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	85.752.800	9.685.000	9.685.000	Kab. Takalar	Pajak Daerah	-	-			35.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.04	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	75.481.200	9.597.000	9.597.000	Kab. Takalar	Pajak Daerah	-	-			15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
3	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-		100%	100%	100%	2.199.997.500	**820.000.000**	**820.000.000**							990.000.000,00	
	4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-	-		100%	100%	100%	**749.998.000**	**657.626.000**	**657.626.000**			-	-	-		250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4 Dokumen	4 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	299.998.000	10.894.000	10.894.000	Kab. Takalar	Pajak Daerah	-	-			85.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	7 Laporan	7 Laporan	28 Laporan	28 Laporan	28 Laporan	300.000.000	135.948.000	135.948.000	Kab. Takalar	Pajak Daerah	-	-			95.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2 Dokumen	2 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	150.000.000	510.784.000	510.784.000	Kab. Takalar	Pajak Daerah Retribusi Daerah DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	-			70.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-	-		100%	100%	100%	**599.999.500**	**65.000.000**	**65.000.000**			-	-	-		300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	200.005.000	21.688.000	21.688.000	Kab. Takalar	Pajak Daerah	-	-			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	1 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	199.999.500	21.859.000	21.859.000	Kab. Takalar	Pajak Daerah	-	-			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	1 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	199.995.000	21.453.000	21.453.000	Kab. Takalar	Pajak Daerah	-	-			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-		100%	100%	100%	**600.000.000**	**65.000.000**	**65.000.000**			-	-	-		350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

	4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Paket	4 Paket	4 Paket	212.010.800	21.633.000	21.633.000	Kab. Takalar	Pajak Daerah	-	-			75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	800 Dokumen	800 Dokumen	4 Paket	4 Paket	4 Paket	199.534.200	22.073.000	22.073.000	Kab. Takalar	Pajak Daerah	-	-			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	6 Orang	6 Orang	24 Orang	24 Orang	24 Orang	188.455.000	21.294.000	21.294.000	Kab. Takalar	Pajak Daerah	-	-			75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-	-		-		-	**250.000.000**	**32.374.000**	**32.374.000**			-	-	-		90.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	2 Dokumen	2 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	150.000.000	10.776.000	10.776.000	Kab. Takalar	Pajak Daerah DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	-			40.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
							- Pangan	8 Dokumen	2 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen										
							- Kehutanan	8 Dokumen	2 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen										
							- Kelautan dan Perikanan	8 Dokumen	2 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen										
							- Perdagangan	8 Dokumen	2 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen										
							- Perindustrian	8 Dokumen	2 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen										
							- KUKM	8 Dokumen	2 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen										
	4	01	03	2.04	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	8 Dokumen	2 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	50.000.000	10.798.000	10.798.000	Kab. Takalar	Pajak Daerah	-	-			25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
							- Lingkungan Hidup	8 Dokumen	2 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen										
							- Perhubungan	8 Dokumen	2 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen										
							- Statistik	8 Dokumen	2 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen										

	4	01	03	2.04	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	8 Dokumen	2 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	50.000.000	10.800.000	10.800.000	Kab. Takalar	Pajak Daerah	-	-			25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
							- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8 Dokumen	2 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen											
							- Perumahan Rakyat dan Pemukiman	8 Dokumen	2 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen											
							- Pertanahan	8 Dokumen	2 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen											
	J U M L A H												**42.019.243.748,00**	**41.208.731.098,00**	**40.888.409.770,00**						**28.802.053.309,00**	

RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) TAHUN 2024

KABUPATEN : TAKALAR

PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target			Pagu			Keterangan
						Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**										
	4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**										
	4	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Persentase cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Persentase cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah**	100%	100%	100%	**31.717.210.848**	**28.440.149.398**	**28.119.828.070**	
	4	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase rata-rata capaian output sub kegiatan perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase rata-rata capaian output sub kegiatan perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	100%	100%	100%	80.300.300	**97.868.820**	**97.868.820**	
	4	1	1	2.01	1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	25.298.800	21.500.000	21.500.000	
	4	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.200	21.000.000	21.000.000	

								Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						
	4	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.100	11.000.000	11.000.000	
	4	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.001.000	23.368.820	23.368.820	
	4	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.100	11.000.000	11.000.000	
	4	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	10.000.100	10.000.000	10.000.000	
	4	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Laporan Keuangan tepat waktu dan akurat**	**Laporan Keuangan tepat waktu dan akurat**	100%	100%	100%	13.354.010.784	**13.248.188.036**	**12.927.866.708**	
	4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	115 orang/bulan	115 orang/bulan	115 orang/bulan	9.458.394.104	8.624.465.716	8.624.465.716	

								ASN							
						Tunjangan Tambahan Penghasilan	Tunjangan Tambahan Penghasilan	Jumlah Orang yang Menerima Tunjangan Penghasilan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Tunjangan Penghasilan ASN	115 orang/bulan	115 orang/bulan	115 orang/bulan	3.322.319.880	4.051.144.920	3.730.823.592	
						Tunjangan Obyektifitas Lainnya	Tunjangan Obyektifitas Lainnya	Jumlah Orang yang Menerima Tunjangan Obyektifitas Lainnya	Jumlah Orang yang Menerima Tunjangan Obyektifitas Lainnya	25 orang/bulan	25 orang/bulan	25 orang/bulan	248.160.000	-	-	
	4	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
	4	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	164.936.700	358.577.400	358.577.400	
	4	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	120.000.000	171.000.000	171.000.000	
	4	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	10.200.100	11.000.000	11.000.000	

								Akhir Tahun SKPD							
	4	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	10.000.000	11.000.000	11.000.000	
	4	1	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	11.000.000	11.000.000	
	4	**1**	**1**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase rata-rata Capaian Output sub kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase rata-rata Capaian Output sub kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	100%	100%	100%	85.933.900	**153.000.000**	**153.000.000**	
	4	1	1	2.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	10.000.000	31.000.000	31.000.000	

	4	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	20 laporan	20 laporan	20 laporan	9.999.900	11.000.000	11.000.000	
	4	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	38 laporan	38 laporan	38 laporan	65.934.000	111.000.000	111.000.000	
	4	**1**	**1**	**2.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persentase rata-rata Capaian Output sub kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persentase rata-rata Capaian Output sub kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	100%	100%	100%	10.000.000	**60.500.000**	**60.500.000**	
	4	1	1	02.04	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	10.000.000	60.500.000	60.500.000	
	4	**1**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase rata-rata Capaian Output Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase rata-rata Capaian Output Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	100%	100%	100%	186.962.200	**59.023.139**	**59.023.139**	
	4	1	1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	1 Unit	1 Unit	45.000.200	1.000.000	1.000.000	

	4	1	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	101.962.000	51.490.600	51.490.600	
	4	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	1 Orang	1 Orang	40.000.000	6.532.539	6.532.539	
	4	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase rata-rata Capaian Output sub kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase rata-rata Capaian Output sub kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	100%	100%	100%	3.041.025.500	**2.264.860.440**	**2.264.860.440**	
	4	1	1	2.06	1	penyediaan komponen isntalasi listrik/penerangan bangunan kantor	penyediaan komponen isntalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	192.126.200	341.999.000	341.999.000	
	4	1	1	2.06	2	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	125.228.500	1.000.000	1.000.000	
	4	1	1	2.06	4	penyediaan bahan logistik kantor	penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	297.316.800	188.157.840	188.157.840	
	4	1	1	2.06	5	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	26.304.000	63.218.600	63.218.600	

	4	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.600.000.000	1.270.485.000	1.270.485.000	
	4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	12 laporan	800.050.000	400.000.000	400.000.000	
	4	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik daerah penunjang Urusan pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik daerah penunjang Urusan pemerintah Daerah**	**Nilai Aset Pemerintah Bertambah**	**Nilai Aset Pemerintah Bertambah**	100%	100%	100%	4.630.511.780	**2.559.205.048**	**2.559.205.048**	
	4	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	9 Unit	9 Unit	9 Unit	3.531.300.000	-	-	
	4	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	12 Unit	12 Unit	813.202.300	56.777.000	56.777.000	
	4	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	286.009.480	2.502.428.048	2.502.428.048	
	4	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**persentase rata-rata capaian output kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**persentase rata-rata capaian output kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100%	100%	100%	3.024.499.184	**3.340.066.916**	**3.340.066.916**	
	4	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	Jumlah Laporan Penyediaan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	41.810.000	58.522.600	58.522.600	

								Menyurat	Jasa Surat Menyurat						
	4	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Listrik)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Listrik)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Tagihan Air, Listrik dan Wifi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Tagihan Air, Listrik dan Wifi	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.062.322.112	150.005.100	150.005.100	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Air)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Air)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	-	591.206.616	591.206.616	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Internet)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Internet)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Sumber Daya Air yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Sumber Daya Air yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	-	67.971.000	67.971.000	
	4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	730.043.200	1.243.561.600	1.243.561.600	
	4	1	1	2.08	4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.190.323.872	1.228.800.000	1.228.800.000	
	4	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Aset Milik Pemerintah**	**Terpeliharanya Aset Milik Pemerintah**	100%	100%	100%	1.834.766.100	**2.590.761.539**	**2.590.761.539**	
	4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	70 Unit	70 Unit	70 Unit	842.802.000	948.830.000	948.830.000	

							Jabatan	yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya						
	4	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	40 Unit	40 Unit	157.480.000	40.370.000	40.370.000	
	4	1	1	2.09	9	pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	834.484.100	1.601.561.539	1.601.561.539	
	4	**1**	**1**	**2.11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	100%	100%	100%	1.080.312.000	**749.788.000**	**749.788.000**	
	4	1	1	2.11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	785.311.600	600.000.000	600.000.000	
	4	1	1	2.11	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	245.000.400	149.788.000	149.788.000	
	4	1	1	2.11	3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan	2 Orang	2 Orang	2 Orang	50.000.000	-	-	

								Wakil Kepala Daerah	Wakil Kepala Daerah						
	4	**1**	**1**	**2.12**		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Terpenuhinya Operasional Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Terpenuhinya Operasional Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	100%	100%	100%	3.188.890.800	**2.711.887.460**	**2.711.887.460**	
	4	1	1	2.12	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	2.176.316.200	2.264.297.460	2.264.297.460	
	4	1	1	2.12	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	604.969.000	-	-	
	4	1	1	2.12	3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	407.605.600	447.590.000	447.590.000	
	4	**1**	**1**	**2.13**		**Penataan Organisasi**	**Penataan Organisasi**	**persentase peningkatan kinerja dan terwujudnya kelembagaan efektif dan efisien**	**persentase peningkatan kinerja dan terwujudnya kelembagaan efektif dan efisien**	100%	100%	100%	600.000.000	**65.000.000**	**65.000.000**	
	4	1	1	2.13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	216.451.600	12.067.000	12.067.000	

	4	1	1	2.13	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	171.220.400	22.733.000	22.733.000	
	4	1	1	2.13	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	150.431.000	15.298.000	15.298.000	
	4	1	1	2.13	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	61.897.000	14.902.000	14.902.000	
	4	**1**	**1**	**2.14**		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**persentase rata-rata capaian output sub kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**persentase rata-rata capaian output sub kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	100%	100%	100%	599.998.300	**540.000.000**	**540.000.000**	
	4	1	1	2.14	1	Fasilitasi Keprotokolan	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	169.702.700	300.302.000	300.302.000	
	4	1	1	2.14	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	74.472.600	13.144.000	13.144.000	
	4	1	1	2.14	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Informasi yang dapat diakses melalui media cetak, elektronik dan online	Jumlah Laporan Informasi yang dapat diakses melalui media cetak, elektronik dan online	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	355.823.000	226.554.000	226.554.000	

	4	**1**	**2**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase rata-rata capaian Kegiatan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase rata-rata capaian Kegiatan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	100%	100%	100%	**8.102.035.400**	**11.948.581.700**	**11.948.581.700**	
	4	**1**	**2**	**2.01**		**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Persentase rata-rata capaian output sub kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan**	**Persentase rata-rata capaian output sub kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan**	100%	100%	100%	**438.766.000**	**462.748.000**	**462.748.000**	
	4	1	2	2.01	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	309.735.200	424.048.000	424.048.000	
	4	1	2	2.01	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	68.075.400	29.401.000	29.401.000	
	4	1	2	2.01	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	60.955.400	-	-	
	4	**1**	**2**	**2.02**		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Tingkat Capaian Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Tingkat Capaian Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	100%	100%	100%	**6.052.035.400**	10.894.671.000	10.894.671.000	
	4	1	2	2.02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	5.640.873.200	10.869.671.000	10.869.671.000	

	4	1	2	2.02	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan: Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan: Sosial	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	205.581.100	15.000.000	15.000.000	
								- Transmigrasi	- Transmigrasi	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen			
								- Kesehatan	- Kesehatan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen			
								- Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,	- Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen			
								- Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil,	- Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil,	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen			
								- Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,	- Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen			
								- Pengendalian Penduduk dan KB	- Pengendalian Penduduk dan KB	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen			
	4	1	2	2.02	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan:	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	205.581.100	10.000.000	10.000.000	

								Kepemudaan dan Olahraga	Urusan: Kepemudaan dan Olahraga							
								- Pariwisata	- Pariwisata	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen				
								- Pendidikan	- Pendidikan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen				
								- Kebudayaan	- Kebudayaan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen				
								- Perpustakaan	- Perpustakaan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen				
								- Kearsipan	- Kearsipan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen				
								- Trantibum Linmas	- Trantibum Linmas	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen				
	4	**1**	**2**	**2.03**		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Persentase tersusunnya Kebijakan Daerah**	**Persentase tersusunnya Kebijakan Daerah**	100%	100%	100%	**1.450.000.000**	**571.880.700**	**571.880.700**	
	4	1	2	2.03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	200 Dokumen	200 Dokumen	200 Dokumen	429.855.000	124.450.300	124.450.300	
	4	1	2	2.03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	592.727.000	265.000.000	265.000.000	

	4	1	2	2.03	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	200 Dokumen	200 Dokumen	200 Dokumen	427.418.000	182.430.400	182.430.400	
	4	**1**	**2**	**2.04**		**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	**Persentase Terwujudnya Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**Persentase Terwujudnya Fasilitasi Kerjasama Daerah**	100%	100%	100%	**161.234.000**	**19.282.000**	**19.282.000**	
	4	1	2	2.04	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	85.752.800	9.685.000	9.685.000	
	4	1	2	2.04	3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	75.481.200	9.597.000	9.597.000	
	4	**1**	**3**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase rata-rata capaian Kegiatan Bidang Perekonomian dan Pembangunan**	**Persentase rata-rata capaian Kegiatan Bidang Perekonomian dan Pembangunan**	100%	100%	100%	2.199.997.500	**820.000.000**	**820.000.000**	
	4	**1**	**3**	**2.01**		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Tingkat Capaian Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Tingkat Capaian Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	100%	100%	100%	**749.998.000**	**657.626.000**	**657.626.000**	
	4	1	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan	16 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	299.998.000	10.894.000	10.894.000	

								BLUD							
	4	1	3	2.01	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	28 Laporan	28 Laporan	28 Laporan	300.000.000	135.948.000	135.948.000	
	4	1	3	2.01	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	150.000.000	510.784.000	510.784.000	
	4	**1**	**3**	**2.02**		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Persentase rata - rata capaian output kegiatan Administrasi Pembangunan**	**Persentase rata - rata capaian output kegiatan Administrasi Pembangunan**	100%	100%	100%	**599.999.500**	**65.000.000**	**65.000.000**	
	4	1	3	2.02	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	200.005.000	21.688.000	21.688.000	
	4	1	3	2.02	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	199.999.500	21.859.000	21.859.000	
	4	1	3	2.02	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	199.995.000	21.453.000	21.453.000	

	4	**1**	**3**	**2.03**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Persentase terlaksananya pengadaan Barang dan Jasa**	**Persentase terlaksananya pengadaan Barang dan Jasa**	100%	100%	100%	**600.000.000**	**65.000.000**	**65.000.000**	
	4	1	3	2.03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Paket Pengadaan yang di selesaikan	Jumlah Paket Pengadaan yang di selesaikan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	212.010.800	21.633.000	21.633.000	
	4	1	1	2.03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik	4 Paket	4 Paket	4 Paket	199.534.200	22.073.000	22.073.000	
	4	1	1	2.03	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	24 Orang	24 Orang	24 Orang	188.455.000	21.294.000	21.294.000	
	4	**1**	**3**	**2.04**		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**Tingkat Capaian Kebijakan terkait Sumber Daya Alam**	**Tingkat Capaian Kebijakan terkait Sumber Daya Alam**	100%	100%	100%	**250.000.000**	**32.374.000**	**32.374.000**	
	4	1	3	2.04	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	150.000.000	10.776.000	10.776.000	
								- Pangan	- Pangan	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen				
								- Kehutanan	- Kehutanan	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen				
								- Kelautan dan Perikanan	- Kelautan dan Perikanan	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen				
								- Perdagangan	- Perdagangan	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen				

								- Perindustrian	- Perindustrian	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen				
								- KUKM	- KUKM	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen				
	4	1	3	2.04	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan lingkungan hidup	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan lingkungan hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan: Pertambangan dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan: Pertambangan dan Sumber Daya Mineral	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	50.000.000	10.798.000	10.798.000	
								- Lingkungan Hidup	- Lingkungan Hidup	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen				
								- Perhubungan	- Perhubungan	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen				
								- Statistik	- Statistik	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen				
	4	1	3	2.04	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan energi dan air	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan energi dan air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan: Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan: Energi dan Air	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	50.000.000	10.800.000	10.800.000	
								- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen				
								- Perumahan Rakyat dan Pemukiman	- Perumahan Rakyat dan Pemukiman	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen				
								- Pertanahan	- Pertanahan	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen				
	J U M L A H												**42.019.243.748**	**41.208.731.098**	**40.888.409.770**	

Takalar, ... 2024

Mengetahui,
Kepala Bappelitbangda Kabupaten Takalar

Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar

(Drs. Achmad Rivai, M.Si)
NIP. 196810121989081001

MUHAMMAD HASBI,S.STP.,M.AP.,M.I.Kom
NIP: 19810112 200012 1 001

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH

Program Sekretariat Daerah merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Sekretariat Daerah kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Sekretariat Daerah. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Adapun jumlah Rencana kegiatan pada Sekretariat Daerah Tahun 2024 adalah sebanyak 21 Kegiatan dan 69 sub kegiatan dengan jumlah pagu sebesar **Rp. 41.208.731.098,- (Empat Puluh Satu Milyar Dua Ratus Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Puluh Delapan Rupiah).** Kegiatan ini tersebar merata di Kabupaten Takalar. Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel T-C.33 berikut :

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Renja Pokok Tahun 2024				Bertambah/Berkurang	Renja Perubahan Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4				5	6	
4,01	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Persentase cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah**		**100 %**	**28.440.149.398**		**- 320.321.328**	**100 %**	**28.119.828.070**
4,01	**01**	**2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase rata-rata capaian output sub kegiatan perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**100 %**	**97.868.820**		**-**	**100 %**	**97.868.820**
4,01	01	2	01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Takalar	2 Dok	21.500.000	Pajak Daerah Retribusi Daerah	-	2 Dok	21.500.000
4,01	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Takalar	1 Dok	21.000.000	Pajak Daerah Retribusi Daerah	-	1 Dok	21.000.000
4,01	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Takalar	1 Dok	11.000.000	Pajak Daerah	-	1 Dok	11.000.000
4,01	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Takalar	1 Dok	23.368.820	Pajak Daerah Retribusi Daerah	-	1 Dok	23.368.820

4,01	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Takalar	1	Dok	11.000.000	Pajak Daerah	-	1	Dok	11.000.000
4,01	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Takalar	2	Lap	10.000.000	Pajak Daerah	-	2	Lap	10.000.000
4,01	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Laporan Keuangan tepat waktu dan akurat**		**100**	**%**	**13.248.188.036**		**- 320.321.328**	**100**	**%**	**12.927.866.708**
4,01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Takalar	115	Org/ bln	8.624.465.716	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pajak Daerah Pendapatan Bagi Hasil	-	115	Org/ bln	8.624.465.716
						Jumlah Orang yang Menerima Tunjangan Penghasilan ASN	Kab. Takalar	115	Org/ bln	4.051.144.920		- 320.321.328	115	Org/ bln	3.730.823.592
						Jumlah Orang yang Menerima Tunjangan Obyektifitas Lainnya	Kab. Takalar	25	Org/ bln	-		-	25	Org/ bln	-
4,01	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Takalar	2	Dok	10.000.000	Pajak Daerah		2	Dok	10.000.000
4,01	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Takalar	60	Dok	358.577.400	Pajak Daerah Retribusi Daerah	-	60	Dok	358.577.400
4,01	01	2	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Takalar	24	Dok	171.000.000	Pajak Daerah	-	24	Dok	171.000.000
4,01	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Takalar	1	Lap	11.000.000	Pajak Daerah	-	1	Lap	11.000.000

4,01	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Takalar	2	Lap	11.000.000	Pajak Daerah	-	2	Lap	11.000.000
4,01	01	2	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Takalar	1	Lap	11.000.000	Pajak Daerah		1	Lap	11.000.000
4.01	01	02	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase rata-rata Capaian Output sub kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100	%	**153.000.000**		**-**	100	%	**153.000.000**
4.01	01	02	03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Takalar	18	Lap.	31.000.000	Pajak Daerah Retribusi Daerah	-	18	Lap.	31.000.000
4.01	01	02	03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Takalar	20	Lap.	11.000.000	Pajak Daerah	-	20	Lap.	11.000.000
4.01	01	02	03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Takalar	38	Lap.	111.000.000	Pajak Daerah Retribusi Daerah	-	38	Lap.	111.000.000
4	**1**	**1**	**2.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persentase rata-rata Capaian Output sub kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**		100	%	**60.500.000**		**-**	100	%	**60.500.000**
4	1	1	02.04	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Takalar	4	Lap	60.500.000	Pajak Daerah	-	4	Lap	60.500.000
4	**1**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase rata-rata Capaian Output Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		100	%	**59.023.139**		**-**	100	%	**59.023.139**

4	1	1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Takalar	1	Unit	1.000.000	Pajak Daerah	-	1	Unit	1.000.000
4	1	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Takalar	2	Dok	51.490.600	Pajak Daerah Retribusi Daerah	-	2	Dok	51.490.600
4	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Takalar	1	Orang	6.532.539	Pajak Daerah	-	1	Orang	6.532.539
4,01	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase rata-rata Capaian Output sub kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**100**	**%**	**2.264.860.440**	**DAU**	**-**	**100**	**%**	**2.264.860.440**
4	1	1	2.06	1	penyediaan komponen isntalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Takalar	1	Paket	341.999.000	Pajak Daerah Retribusi Daerah	-	1	Paket	341.999.000
4	1	1	2.06	2	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Takalar	4	Paket	1.000.000	Pajak Daerah	-	4	Paket	1.000.000
4	1	1	2.06	4	penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Takalar	4	Paket	188.157.840	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Retribusi Daerah	-	4	Paket	188.157.840
4	1	1	2.06	5	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Takalar	4	Paket	63.218.600	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Retribusi Daerah	-	4	Paket	63.218.600
4	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Takalar	12	Lap.	1.270.485.000	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	12	Lap.	1.270.485.000

4,01	01	2	06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Takalar	12	Lap.	400.000.000	Pajak Daerah	-	12	Lap.	400.000.000
4,01	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik daerah penunjang Urusan pemerintah Daerah**	**Nilai Aset Pemerintah Bertambah**		**100**	**%**	**2.559.205.048**		**-**	**100**	**%**	**2.559.205.048**
5,02	01	2	07	01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Takalar	9	Unit	-	Pajak Daerah	**-**	9	Unit	-
5,02	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional	Kab. Takalar	12	Unit	56.777.000	Retribusi Daerah	**-**	12	Unit	56.777.000
5,02	01	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kab. Takalar	2	Unit	2.502.428.048	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Retribusi Daerah Pendapatan Bagi Hasil	**-**	2	Unit	2.502.428.048
4	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**persentase rata-rata capaian output kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100**	**%**	**3.340.066.916**		**-**	**100**	**%**	**3.340.066.916**
4	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Takalar	12	Lap.	58.522.600	Pajak Daerah Retribusi Daerah	**-**	12	Lap.	58.522.600
4	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Listrik)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Tagihan Air, Listrik dan Wifi	Kab. Takalar	12	Lap.	150.005.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Retribusi Daerah	**-**	12	Lap.	150.005.100
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Air)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Listrik yang Disediakan	Kab. Takalar	12	Lap.	591.206.616		**-**	12	Lap.	591.206.616
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Internet)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Sumber Daya Air yang Disediakan	Kab. Takalar	12	Lap.	67.971.000		**-**	12	Lap.	67.971.000

4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Takalar	12	Lap.	1.243.561.600	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Retribusi Daerah Pendapatan Bagi Hasil	-	12	Lap.	1.243.561.600
4	1	1	2.08	4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Takalar	12	Lap.	1.228.800.000	Pajak Daerah	-	12	Lap.	1.228.800.000
4,01	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Aset Milik Pemerintah**		**100**	**%**	**2.590.761.539**		**-**	**100**	**%**	**2.590.761.539**
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kab. Takalar	70	Unit	948.830.000	Pajak Daerah	-	70	Unit	948.830.000
4	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Takalar	40	Unit	40.370.000	Pajak Daerah		40	Unit	40.370.000
4	1	1	2.09	9	pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Takalar	1	Unit	1.601.561.539	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Retribusi Daerah	-	1	Unit	1.601.561.539
4,01	**01**	**2**	**11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**		**100**	**%**	**749.788.000**		**-**	**100**	**%**	**749.788.000**
4	1	1	2.11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Takalar	2	Org/Bln	600.000.000	Pendapatan Bagi Hasil	-	2	Org/Bln	600.000.000
4	1	1	2.11	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kab. Takalar	2	Paket	149.788.000	Pajak Daerah	-	2	Paket	149.788.000

4	1	1	2.11	3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Takalar	2	Orang	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	-	2	Orang	-
4,01	**01**	**2**	**12**		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Terpenuhinya Operasional Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**		**100**	**%**	**2.711.887.460**		**-**	**100**	**%**	**2.711.887.460**
4	1	1	2.12	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Kab. Takalar	1	Paket	2.264.297.460	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	-	1	Paket	2.264.297.460
4	1	1	2.12	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kab. Takalar	1	Paket	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	-	1	Paket	-
4	1	1	2.12	3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Kab. Takalar	1	Paket	447.590.000	Pendapatan Bagi Hasil	-	1	Paket	447.590.000
4,01	**01**	**2**	**13**		**Penataan Organisasi**	**persentase peningkatan kinerja dan terwujudnya kelembagaan efektif dan efisien**		**100**	**%**	**65.000.000**		**-**	**100**	**%**	**65.000.000**
4	1	1	2.13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab. Takalar	10	Dok	12.067.000	Pajak Daerah	-	10	Dok	12.067.000
4	1	1	2.13	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Takalar	4	Lap	22.733.000	Pajak Daerah	-	4	Lap	22.733.000
4	1	1	2.13	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Takalar	4	Dok	15.298.000	Pajak Daerah	-	4	Dok	15.298.000
4	1	1	2.13	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Takalar	4	Dok	14.902.000	Pajak Daerah	-	4	Dok	14.902.000
4,01	**01**	**2**	**14**		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**persentase rata-rata capaian output sub kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**		**100**	**%**	**540.000.000**		**-**	**100**	**%**	**540.000.000**

4	1	1	2.14	1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Takalar	12	Lap	300.302.000	Pajak Daerah Retribusi Daerah	-	12	Lap	300.302.000
4	1	1	2.14	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab. Takalar	12	Lap	13.144.000	Pajak Daerah	-	12	Lap	13.144.000
4	1	1	2.14	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Informasi yang dapat diakses melalui media cetak, elektronik dan online	Kab. Takalar	12	Lap	226.554.000	Pajak Daerah	-	12	Lap	226.554.000
4,01	**02**				**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase rata-rata capaian Kegiatan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**		**100**	**%**	**11.948.581.700**		**-**	**100**	**%**	**11.948.581.700**
4,01	**02**	**2**	**01**		**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Persentase rata-rata capaian output sub kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan**		**100**	**%**	**462.748.000**		**-**	**100**	**%**	**462.748.000**
4	1	2	2.01	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Takalar	6	Dok	424.048.000	Pajak Daerah Retribusi Daerah	0	6	Dok	424.048.000
4	1	2	2.01	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Takalar	6	Dok	29.401.000	Pajak Daerah Pendapatan Bagi Hasil	0	6	Dok	29.401.000
4	1	2	2.01	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Takalar	6	Dok	9.299.000	Pajak Daerah	-	6	Dok	9.299.000
4,01	**02**	**2**	**02**		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Tingkat Capaian Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**		**100**	**%**	**10.894.671.000**		**-**	**100**	**%**	**10.894.671.000**

4	1	2	2.02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Takalar	4	Dok	10.869.671.000	Pajak Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Retribusi Daerah Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	4	Dok	10.869.671.000
4	1	2	2.02	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan: Sosial	Kab. Takalar	4	Dok	15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	-	4	Dok	15.000.000
						- Transmigrasi		4	Dok				4	Dok	
						- Kesehatan		4	Dok				4	Dok	
						- Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,		4	Dok				4	Dok	

						- Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil,		4	Dok				4	Dok	
						- Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,		4	Dok				4	Dok	
						- Pengendalian Penduduk dan KB		4	Dok				4	Dok	
4	1	2	2.02	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan: Kepemudaan dan Olahraga	Kab. Takalar	4	Dok	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	-	4	Dok	10.000.000
						- Pariwisata		4	Dok				4	Dok	
						- Pendidikan		4	Dok				4	Dok	
						- Kebudayaan		4	Dok				4	Dok	
						- Perpustakaan		4	Dok				4	Dok	
						- Kearsipan		4	Dok				4	Dok	
						- Trantibum Linmas		4	Dok				4	Dok	
4,01	**02**	**2**	**03**		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Persentase tersusunnya Kebijakan Daerah**		**100**	**%**	**571.880.700**		**-**	**100**	**%**	**571.880.700**
4	1	2	2.03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Kab. Takalar	200	Dok	124.450.300	Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin	-	200	Dok	124.450.300
4	1	2	2.03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Takalar	3	Kasus	265.000.000	Pajak Daerah Retribusi Daerah	-	3	Kasus	265.000.000

4	1	2	2.03	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Kab. Takalar	200	Dok	182.430.400	Lain-lain PAD Yang Sah Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Penegakan Disiplin	-	200	Dok	182.430.400
4,01	**02**	**2**	**04**		**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**Persentase terwujudnya Fasilitasi Kerjasama Daerah**		**100**	**%**	**19.282.000**		**-**	**100**	**%**	**19.282.000**
4	1	2	2.04	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Kab. Takalar	0	Dok	9.685.000	Pajak Daerah	-	0	Dok	9.685.000
4	1	2	2.04	3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Kab. Takalar	2	Lap	9.597.000	Pajak Daerah	-	2	Lap	9.597.000
4,01	**03**				**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase rata-rata capaian Kegiatan Bidang Perekonomian dan Pembangunan**		**100**	**%**	**820.000.000**			**100**	**%**	**820.000.000**
4,01	**03**	**2**	**01**		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Tingkat Capaian Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**		**100**	**%**	**657.626.000**		**-**	**100**	**%**	**657.626.000**
4	1	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Takalar	16	Dok	10.894.000	Pajak Daerah	-	16	Dok	10.894.000
4	1	3	2.01	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Takalar	28	Lap	135.948.000	Pajak Daerah	-	28	Lap	135.948.000
4	1	3	2.01	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kab. Takalar	8	Dok	510.784.000	Pajak Daerah Retribusi Daerah DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	8	Dok	510.784.000
4,01	**03**	**2**	**02**		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Persentase rata - rata capaian output kegiatan Administrasi Pembangunan**		**100**	**%**	**65.000.000**		**-**	**100**	**%**	**65.000.000**

4	1	3	2.02	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Kab. Takalar	2	Dok	21.688.000	Pajak Daerah	-	2	Dok	21.688.000
4	1	3	2.02	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Takalar	6	Lap.	21.859.000	Pajak Daerah	-	6	Lap.	21.859.000
4	1	3	2.02	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Takalar	6	Lap.	21.453.000	Pajak Daerah	-	6	Lap.	21.453.000
4,01	**03**	**2**	**03**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Persentase terlaksananya pengadaan Barang dan Jasa**		**100**	**%**	**65.000.000**		**-**	**100**	**%**	**65.000.000**
4	1	3	2.03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Paket Pengadaan yang di selesaikan	Kab. Takalar	4	Paket	21.633.000	Pajak Daerah	-	4	Paket	21.633.000
4	1	1	2.03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik	Kab. Takalar	4	Paket	22.073.000	Pajak Daerah	-	4	Paket	22.073.000
4	1	1	2.03	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Takalar	24	Orang	21.294.000	Pajak Daerah	-	24	Orang	21.294.000
4,01	**03**	**2**	**04**		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**Tingkat Capaian Kebijakan terkait Sumber Daya Alam**		**100**	**%**	**32.374.000**		**-**	**100**	**%**	**32.374.000**
4	1	3	2.04	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian	Kab. Takalar	8	Dok	10.776.000	Pajak Daerah DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	8	Dok	10.776.000
						- Pangan		8	Dok				8	Dok	
						- Kehutanan		8	Dok				8	Dok	
						- Kelautan dan Perikanan		8	Dok				8	Dok	
						- Perdagangan		8	Dok				8	Dok	
						- Perindustrian		8	Dok				8	Dok	
						- KUKM		8	Dok				8	Dok	
4	1	3	2.04	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan lingkungan hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan: Pertambangan dan	Kab. Takalar	8	Dok	10.798.000	PAJAK DAERAH	-	8	Dok	10.798.000

						Sumber Daya Mineral							
						- Lingkungan Hidup		8 Dok				8 Dok	
						- Perhubungan		8 Dok				8 Dok	
						- Statistik		8 Dok				8 Dok	
4	1	3	2.04	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan energi dan air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan: Energi dan Air	Kab. Takalar	8 Dok	10.800.000	PAJAK DAERAH	-	8 Dok	10.800.000
						- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		8 Dok				8 Dok	
						- Perumahan Rakyat dan Pemukiman		8 Dok				8 Dok	
						- Pertanahan		8 Dok				8 Dok	
JUMLAH									**41.208.731.098**		**320.321.328**		**40.888.409.770**

Takalar, Agustus 2022

Sekretaris Daerah,

MUHAMMAD HASBI,S.STP.,M.AP.,M.I.Kom

NIP: 19810112 200012 1 001

BAB V

PENUTUP

Dokumen Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 ini menjadi instrumen utama bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar dalam meningkatkan kinerja pembangunan melalui pembenahan administrasi Sekretariat Daerah, Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah tahun 2024 dibuat berdasarkan kebutuhan-kebutuhan prioritas dan merupakan kelanjutan dari beberapa Program dan Kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar tahun 2024 akan ditentukan oleh koordinasi dan sinergitas antara Sekretariat Daerah dengan Bappelitbangda dan Badan Pengelola Keuangan Daerah, serta adanya pengendalian dan evaluasi yang cermat dan akurat. Oleh sebab itu, Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar harus melakukan langkah-langkah penyempurnaan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sehingga bermanfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kemajuan daerah, terkhusus bagi Sekretariat Daerah.

Dokumen ini sekaligus menjadi acuan dalam mensinergikan program dan kegiatan antara program prioritas Pemeritah Daerah dengan program dan kegiatan Sekretariat Daerah.

Berdasarkan dengan cakupan kewenangan, maka Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 mempunyai fungsi pokok;

1. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan seluruh program/kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar;
2. Menciptakan kepastian arah kebijakan dan program kegitan prioritas yang merupakan komitmen Sekretariat Daerah dengan pemangku kepentingan; dan
3. Menjadi acuan dalam menyusun Perubahan RKA Sekretariat Daerah dengan

pemangku kepentingan Dalam pelaksanaan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar telah berpedoman pada kaidah - kaidah yang sudah

4. ada yaitu RPJP dan RPJM Nasional serta RPJP dan RPJM Propinsi, visi dan misi kepala daerah Kabupaten Takalar, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, DPA Sekretariat Daerah.

Dokumen Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 ini diharapkan akan menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah sehingga seluruh program dan kegiatan akan dapat dicapai secara terukur, terarah, efektif dan efisien sehingga dapat mendukung pencapaian Visi Kabupaten Takalar yaitu " **Terwujudnya Kabupaten Takalar yang Unggul, Sejahtera dan Bermartabat ".**

Takalar, Juli 2024

Sekretaris Daerah,

Muhammad Hasbi, S.STP, M.A.P,M.I.Kom
Nip. 19810112 200012 1 001

PERUBAHAN RENCANA KERJA
TAHUN 2024



INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala Rahmat dan HidayahNya, sehingga dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 ini dapat diselesaikan sesuai Kalender Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta Pengelolaann Data dan Informasi Pembangunan Daerah Tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar selama periode 1 (satu) tahun. Renja merupakan bagian dari dari Rencana Strategis (Renstra) untuk masa 4 (empat) tahun. Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar memuat tujuan, sasaran, kebijakan, uraian program dan kegiatan serta sub kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Kami menyadari akan kualitas dari dokumen ini mungkin jauh dari harapan, Oleh karena itu, segala kritikan dan masukan akan kami terima untuk perbaikan dokumen perencanaan ke depannya. Kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Perubahan Renja Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar ini.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamualaykum warahmatullahi wabarakatuh.

Takalar, Juli 2024

Inspektur,

H. YAHE, S.Sos. M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19641231 198603 1 217

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Bab l. Pendahuluan 1
1.1 Latar Belakang..... 1
1.2 Landasan Hukum..... 5
1.3 Maksud dan Tujuan..... 7
1.4 Sistematika Penulisan 7
Bab ll. Hasil Evaluasi Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2021 9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2021 Dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah Periode 2017-2022 9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah 16
Bab lll. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah 21
3.1. Tujuan Dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah 21
3.2. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja 2024 24
Bab IV. Penutup 39

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja (RENJA) SKPD mempunyai fungsi yang sangat penting dalam sistem perencanaan daerah karena Renja SKPD merupakan perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di Pemerintah Daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan diperingkat lebih atas seperti RKPD.

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 360 ayat (1) dan ayat (3) mengamanahkan bahwa Perangkat Daerah menyusun rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada :

a. Rancangan Perubahan RKPD; dan
b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 perlu dilakukan penyesuaian target indikator kinerja Tahun 2024 melalui perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daearah Kabupaten Takalar Tahun 2024. Sesuai amanah Permendagri 86 Tahun 2017 dalam Pasal 361 ayat (1), Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360 ayat (3), yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah daerah maupun yang ditempuh

dengan mendorong partisipasi masyarakat. penyusunan rancangan Perubahan Renja SKPD merupakan tahapan kedua yang harus dilakukan setelah disempurnakan menjadi dokumen Perubahan Renja SKPD yang definitive. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Perubahan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Perubahan RKPD, oleh karena itu penyusunan rancangan Perubahan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/parallel dengan penyusunan rancangan Perubahan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisiting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

Proses penyusunan Dokumen Perubahan Renja Inspektorat Tahun 2024 didasarkan pada Renstra 2023-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2024 merupakan tahun ke-2 perencanaan pembangunan Kabupaten Takalar yang berpedoman pada RPJMD 2023-2026 Sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat serta sejalan dengan tujuan pembangunan jangka menengah daerah Tahun 2023-2026.

Selanjutnya Perubahan Renja Perangkat Daerah (PD) dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan OPD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kab. Takalar sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik IndonesianTahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2020 Nomor 892);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2008 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Takalar Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2021 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Takalar Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 03);
17. Peraturan Bupati Takalar Nomor ……... Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 Nomor ……);

1.3. Maksud dan tujuan

1. Maksud

   Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) adalah sebagai berikut:

   a. Untuk menjabarkan program dan kegiatan Renstra OPD kedalam program/kegiatan tahunan
   b. Menyiapkan acuan bagi Rancangan Perubahan APBD
   c. Menyiapkan kerangka evaluasi perubahan kinerja program/kegiatan tahunan bagi OPDTujuan

2. Tujuan

   Adapun Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) adalah agar terbangun konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan OPD .

1.4. Sistematika penulisan

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, merupakan bab yang memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat sampai Triwulan II Tahun 2024, merupakan bab yang memuat tentang penjelasan terkait evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kab. Takalar sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Takalar, serta Hambatan, upaya pencapaian dan rekomendasi Renja Inspektorat Daerah Tahun 2024.

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat Daerah berisi tentang penjelasan dari Tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah, Review terhadap rancangan perubahan RKPD Tahun 2024, serta Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Inspektorat Tahun 2024.

Bab IV Penutup, bab ini berisikan uraian penutup, yang menjelaskan poin-poin yang menjad harapan berkenaan dengan pelaksanaan Perubahan Rencana Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH KAB. TAKALAR SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kab. Takalar sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

2.1.1. Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2024 yang terakomodir di APBD 2024

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan, maka Inspektorat Daerah Kab. Takalar menjalankan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kewenangannya pada bidang pengawasan. Pada tahun anggaran 2024 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024, Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar melaksanakan 3 program dan 12 Kegiatan dan 45 Sub Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II**Error! No text of specified style in document.**-1
Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar yang ada dalam APBD 2024

APBD 2024							
No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Indikator		
					Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Inspektorat	3	12	45	3	12	49

Berdasarkan tabel di atas, dapat digambarkan kondisi program, kegiatan dan sub kegiatan serta indikatornya yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota terdiri dari 8 kegiatan dan 32 Sub Kegiatan, merupakan

kegiatan rutin kantor yang menunjang pelaksanaan administrasi pada Inspektorat.

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan terdiri dari 2 kegiatan dan 8 Sub Kegiatan, merupakan kegiatan pengawasan internal sebagaimana peran Inspektorat Daerah dalam hal Penjaminan Kualitas/Mutu (*quality assurance*) seperti audit, evalusi, reviu dan monitoring/pemantauan.
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi terdiri dari 2 kegiatan dan 5 sub kegiatan, merupakan kegiatan sebagaimana peran Inspektorat Daerah dalam hal konsultasi dan pendampingan (*consulting*).

2.1.2. Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja APBD Triwulan II Tahun 2024

Evaluasi capaian pendanaan dapat dilihat dari seberapa besar realisasi anggaran pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang terserap sampai dengan triwulan II Tahun 2024. Pelaksanaan Rencana Kinerja Inspektorat Daerah sampai Triwulan II Tahun 2024 Realisasi program/kegiatan belum tercapai sesuai dengan target kinerja yang telah diencanakan. Hal tersebut dikarenakan masih ada beberapa program/kegiatan yang pencapaian kinerjanya belum terealisasi.

Dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan, Inspektorat menerima alokasi anggaran sebesar Rp15.097.518.714,00 yang terbagi sebagai berikut :

- Belanja Daerah :
  - Belanja Operasi = Rp14.733.013.314,00
  - Belanja Modal = Rp 364.505.400,00
  - Total = Rp15.097.518.714,00
- Realisasi = Rp 5.605.576.422,00

  Sisa Anggaran = Rp 9.491.942.292,00

Untuk lebih jelasnya uraian mengenai realisasi Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II-2
Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Daerah
Pada APBD Kabupaten Takalar Tahun 2024
Hingga Triwulan II

No. Urut	Perangkat Daerah	Pagu APBD	Realisasi s/d Triwulan II	Persentase	
		(Rp)	(Rp)	Fisik	Keu
1	*2*	*3*	*6*	*7*	*8*
1	Inspektorat	15.097.518.714,00	5.605.576.422,00	28%	37%
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.079.180.914,00	4.127.416.422,00	23%	37%
B	Program Penyelenggaraan Pengawasan	3.140.537.800,00	1.239.690.000,00	38%	39%
C	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	877.800.000,00	238.470.000,00	25%	27%

Sumber : Laporan Realisasi Renja Inspektorat Daerah Kab. Takalar Triwulan II Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa total jumlah anggaran yang terealisasi dalam APBD untuk pelaksanaan kegiatan di Inspektorat Daerah Kab. Takalar hingga triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp5.605.576.422,00. Anggaran tersebut dilaksanakan dalam 3 Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kab. Takalar. Realisasi serapan anggaran dari pelaksanaan kegiatan hingga triwulan II adalah sebesar 37% persen dengan capaian realisasi fisik sebesar 28%. Kondisi ini menunjukkan capaian masih kurang. Dari 3 Program yang ada, belum terdapat Program yang dapat dikategorikan memiliki kinerja baik atau

kategori tinggi dari sisi penyerapan anggaran sebab persentase diperoleh telah melebihi nilai 43 persen yang ditetapkan pada triwulan II.

2.1.2.1. Evaluasi Capaian Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024

Informasi tentang capaian pendanaan memberikan gambaran capaian berdasarkan realisasi anggaran pada Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar dimulai dari program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terdapat pada Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar. Capaian kinerja pendanaan tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori **Rendah** untuk realisasi 0 – 20%, Kategori **Sedang** Untuk realisasi anggaran lebih besar dari >20–43% dan kategori **Tinggi** untuk realisasi anggaran diatas 43%. Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 43% didasarkan atas tingkat capaian yang diharapkan untuk triwulan II adalah 43%, sehingga jika terdapat realisasi dengan capaian realisasi pendanaan lebih dari 43% dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi.

Evaluasi Hasil capaian pendanaan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II Sebagai berikut:

1. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Program

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pendanaan pada level program anggaran pada Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar dengan menggunakan kategori tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa jumlah program yang dilaksanakan anggaran pada Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar sebanyak 3 program dengan rincian capaian yang masuk pada kategori rendah tidak ada atau 0% (realisasinya 0-20 persen). Untuk capaian kinerja kategori sedang sebanyak 3 program atau 100% (realisasi >20-43 persen), dan untuk capaian kinerja kategori tinggi sebanyak 0 program atau 0% (realisasi diatas 43 persen).

2. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Kegiatan

Untuk evaluasi pelaksanaan Capaian kinerja pendanaan pada level kegiatan pada masing-masing perangkat daerah dapat dijelaskan bahwa

terdapat 12 kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2024. Dari keseluruhan kegiatan tersebut terdapat 6 kegiatan atau 50% yang realisasi pendanaannya hingga triwuan II masih dalam kategori rendah yaitu 0–20 persen, sedang yang berada dalam kategori sedang juga sebanyak 3 kegiatan atau 25%, dan kategori tinggi dengan capaian realisasi diatas 43 persen sebanyak 3 kegiatan atau 25%.

3. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Sub Kegiatan

Adapun evaluasi capaian kinerja pendanaan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar pada level sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 45 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2024 terdapat 20 sub kegiatan atau 45% yang capaian kinerja pendanaanya masih rendah, sedangkan yang masuk dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan sedang terdapat 7 sub kegiatan atau 15%, dan 18 sub kegiatan dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan tinggi atau 40% sebab telah dapat mencapai realisasi pendanaan lebih dari 43% yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan II.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas capaian kinerja pendanaan berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-3
Tabel Rekapitulasi Capaian Kinerja Pendanaan berdasarkan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Inspektorat Daerah Kabpaten Takalar Triwulan II Tahun 2024

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan		
			0 - 20%	>20 – 43%	> 43%		0 - 20%	>20 – 43%	> 43%		0 - 20%	>20 – 43%	> 43%
			(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	Inspektorat	3	3	0	0	12	6	3	3	45	20	7	18

Sumber : Laporan Realisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 Triwulan II

2.1.2.2. Evaluasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024

Pelaksanaan Rencana Kinerja Perubahan Pada Triwulan II Tahun 2024 Realisasi program/kegiatan belum tercapai sesuai dengan target kinerja yang telah Rencanakan Karena masih ada beberapa program/kegiatan yang pencapaian kinerjanya belum terealisasi. Untuk capaian kinerja pada Tahun berjalan yaitu Tahun 2024 kami perkirakan bahwa pelaksanaan program/kegiatannya akan sesuai dengan target rencana.

Untuk lebih jelasnya uraian mengenai evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan Inspektorat Daerah Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra Periode 2023-2026 akan disajikan dalam tabel berikut :

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota
Renja Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Takalar
Periode Pelaksanaan: s/d Triwulan II Tahun 2024

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD:

1. Persentase nilai SAKIP OPD Bersifat B : 55%
2. Opini BPK atas LKPD : WTP
3. Persentase rekomendasi temuan LHP BPK yang ditindaklanjuti : 79%
4. Persentase rekomendasi temuan LHP APIP Kabupaten yang ditindaklanjuti : 80%
5. Level Maturitas SPIP : Level 3
6. Level Kapabilitas APIP : Level 3
7. Nilai SAKIP Inspektorat : Predikat BB (70,01-80)

| No | Sasaran | Kode | | | | | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) | | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang direvisikan | | Realisasi Kinerja Per Bulan | | | | | | | | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan I | | Realisasi Kinerja Per Bulan | | | | | | | | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan II | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun (5) | | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Keterangan |
|---|---|---

| | | |

Informasi tentang capaian kinerja memberikan gambaran capaian kinerja realisasi target kinerja pada masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat. Capaian kinerja tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori **Rendah** dengan realisasi 0–20%, Kategori **Sedang** untuk realisasi kinerja lebih besar dari 20–43% dan kategori **Tinggi** dengan realisasi kinerja diatas 43%. Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 43% didasarkan atas tingkat capaian yang diharapkan untuk triwulan II adalah 43%, sehingga jika terdapat capaian realisasi kinerja lebih dari 43% dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi.

Kegiatan evaluasi Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar serta pencapaian realisasi kinerja sampai dengan triwulan II ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

1. Evaluasi Capaian Kinerja Outcome pada Level Program

Untuk evaluasi pelaksanaan kinerja outcome pada level program dapat digambarkan sebagai berikut: untuk pencapaian target kinerja program pada Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar dapat dijelaskan bahwa dari 3 Program yang dilaksanakan sampai dengan triwulan kedua terdapat 0 program atau 0% capaian kinerja di bawah 20%, untuk pencapaian kinerja dengan kategori sedang (diatas 20-43%) terdapat 3 program atau 100%, dan sebanyak 0 program atau 0% yang capaian kinerja masuk dalam kategori tinggi (>43%).

2. Evaluasi Capaian Kinerja *Outcome* pada Level Kegiatan

Sebagai gambaran pencapaian target kinerja kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 12 kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan kedua terdapat 5 kegiatan (42%) yang capaian kinerjanya kategori masih rendah atau dibawah 20%, sedangkan yang capaian kinerja kategori sedang terdapat 4 kegiatan (33%), selebihnya terdapat 3 kegiatan (25%)

yang capaian kinerja masuk dalam kategori pencapaian lebih dari 43% yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan II Tahun 2024.

3. Evaluasi Capaian Kinerja *Outcome* pada Level Sub Kegiatan

Sebagai gambaran pencapaian target kinerja sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 45 sub kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan kedua dapat dijelaskan bahwa yang capaian kinerja masih rendah atau dibawah 20% terdapat 28 sub kegiatan (62%), sedangkan yang capaian kinerja sedang sebanyak 4 sub kegiatan (9%), selebihnya yang capaian kinerja masuk dalam kategori tinggi sebanyak 13 sub kegiatan (29%), yaitu pencapaian lebih dari 43 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan II Tahun 2024.

Evaluasi Hasil capaian kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-5
Rekapitulasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
RKPD Kabupaten Takalar Triwulan II
Tahun 2024

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Kegiatan	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan		
			0 - 20%	>20 – 43%	> 43%		0 - 20%	>20 – 43%	> 43%		0 - 20%	>20 – 43%	> 43%
			(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	Inspektorat	3	3	0	0	12	5	4	3	45	28	4	13

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat

Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan dan pengawasan. Sesuai dengan tupoksinya, pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar didominasi oleh pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan dan pengawasan. Pelaksanaan tupoksi ini tentu harus dapat diukur kinerjanya. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Khusus untuk Inspektorat Daerah sampai saat ini belum ada Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM). Oleh karena itu, capaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah untuk tahun 2021 diukur dengan berpedoman pada peraturan perundangan yakni Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

2.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Inspektorat Daerah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II-6
Analisis Kinerja Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	
			2022 (n-2)	2023 (n-1)	2024 (n)	2025 (n+1)	2022 (n-2)	2023 (n-1)	2024 (n)	2025 (n+1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase nilai SAKIP OPD bernilai B	%	-	50%	50%	55%	-	100%	50%	55%
2	Opini BKP atas LKPD	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Persentase rekomendasi temuan LHP BPK RI yang ditindaklanjuti	%	90%	76%	78%	79%	75%	75%	78%	79%
4	Persentase rekomendasi temuan LHP APIP Kabupaten yang ditindaklanjuti	%	95%	70%	75%	80%	60%	60%	75%	80%
5	Level Maturitas SPIP	Level	3	3	3	3	1	-	3	3
6	Level Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	3	2	-	3	3
7	Nilai SAKIP Inspektorat	Predikat	B	B	B	B	B	BB	B	B

Sumber data: Data olahan Inspektorat Daerah

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja Kunci fungsi penunjang urusan pemerintahan indikator kinerja kunci yang telah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2023-2026 serta Rencana Kerja Tahun 2024 yaitu:

Tabel II-7
Analisis Kinerja Indikator Kinerja Kunci Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	
			2022 (n-2)	2023 (n-1)	2024 (n)	2025 (n+1)	2022 (n-2)	2023 (n-1)	2024 (n)	2025 (n+1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Level Maturitas SPIP	Level	3	3	3	3	1	-	3	3
6	Level Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	3	2	-	3	3

Sumber data: Inspektorat Daerah

2.2.3. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Seperti yang telah kami jelaskan pada BAB II bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar sampai saat ini belum ada Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM). Oleh karena itu, Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar tidak bisa memberikan informasi sejauh mana capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) tersebut.

2.2.4. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

Seperti halnya Capaian SPM Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar sampai saat ini belum ada data SDGs tersebut.

2.3 Hambatan, Upaya Pencapaian dan Rekomendasi Renja Inspektorat Daerah Tahun 2024

2.3.1. Hambatan Dalam Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II

Dari hasil evaluasi kinerja di Inspektorat Daerah Kab. Takalar maka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Inspektorat harus didukung dengan kelembagaan yang kuat dengan potensi SDM dan tingkat pendidikan tinggi. Namun Belum optimalnya penerapan tatakelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang bermutu sehingga terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi sampai dengan triwulan II Tahun 2024, yaitu :

1. Masih kurangnya APIP baik dari segi kualitas maupun kuantitas,
2. Belum memadainya sarana dan prasarana penunjang pengawasan,

2.3.2. Upaya Dalam Pencapaian Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II

Melihat hambatan-hambatan yang ada, Inspektorat Daerah tetap berupaya mencapai target pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2024. Upaya-upaya yang dilakukan Inspektorat sampai dengan triwulan II antara lain:

1. Memaksimalkan sumber daya yang ada pada Inspektorat, dengan tidak hanya melibatkan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Pengawas Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) dalam praktik pengawasan yakni melibatkan staf-staf lain di Inspektorat.
2. Melaksanakan kegiatan peningkatan sumber daya manusia seperti mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan bimtek, sosialisasi dan mengikutsertakan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan.
3. Melakukan pengadaan barang dan jasa terkait peningkatan sarana dan prasarana kegiatan pengawasan.
4. Melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.

2.3.3. Rekomendasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2024 Triwulan Selanjutnya

Dalam rangka pencapaian target pelaksanaan Rencana Kerja pada Inspektorat Daerah Tahun 2024, maka dibutuhkan perbaikan-perbaikan dan pengendalian apa yang menjadi hambatan dalam pencapaian pelaksanaan rencana kerja, sehingga diperlukan suatu rekomendasi yang tepat untuk pelaksanan rencana kerja pada triwulan berikutnya. Rekomendasi yang dapat kami tetapkan antara lain:

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas Aparat Pengawan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Takalar.
2. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pengawasan, antara lain laptop/computer, aplikasi pengolahan data pengawasan, serta peralatan pemeriksaan fisik.
3. Dibutuhkan komitmen pimpinan daerah dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan berdasarkan program kerja pengawasan tahunan yang telah ditetapkan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran

Inspektorat adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya melakukan koordinasi dengan perangkat daerah Kabupaten Takalar (Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas/Badan/Kantor, Lembaga Teknis Daerah) juga dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah maupun eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menetapkan Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Takalar Tahun 2024, Inspektorat Daerah mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 sebagaimana ditetapkan dalam RPD Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 dan termuat dalam RKPD Kabupaten Takalar tahun 2024 yakni sebagai berikut

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Takalar Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2024
1	***2***	***3***	***4***
TUJUAN 3: MEMPERBAIKI KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN	SASARAN 3.1.: MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN	Nilai SAKIP Daerah	B (>60-70)

Dengan memperhatikan tema dan prioritas nasional serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar serta tujuan dan sasaran Renstra Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 sebagaimana table berikut ini berikut:

Tujuan :

1. Tujuan-1: Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan.
2. Tujuan-2: Meningkatkan tata kelola Inspektorat Daerah

Sasaran :

1. S.1.1: Meningkatnya sistem akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan perangkat daerah yang akuntabel dan transparan.
2. S.2.1: Meningkatnya tata kelola kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar.

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2024

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Kondisi Awal	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				Kondisi Akhir
			2021	2023	2024	2025	2026	2026
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	Tujuan 1: Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan	NILAI SAKIP Daerah	CC	B	B	BB	BB	BB
	Sasaran 1.1: Meningkatnya sistem akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan perangkat daerah yang akuntabel dan transparan	Persentase nilai SAKIP OPD bernilai B	30%	50%	50%	55%	60%	60%
		Opini BKP atas LKPD	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Persentase rekomendasi temuan LHP BPK RI yang ditindaklanjuti	75%	76%	78%	79%	80%	80%
		Persentase rekomendasi temuan LHP APIP Kabupaten yang ditindaklanjuti	60%	70%	75%	80%	85%	85%
		Level Maturitas SPIP	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
		Level Kapabilitas APIP	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
2	Tujuan 2: Meningkatkan tata kelola Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat	C	B	BB	BB	BB	BB
	Sasaran 2.1: Meningkatnya tata kelola kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar	Nilai SAKIP Inspektorat	70	>60-70	70,01-80	70,01-80	70,01-80	70,01-80

3.2 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Inspektorat Tahun 2024

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar disusun guna menjadi acuan dalam pelaksanaan sejumlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setelah adanya perubahan dalam rencana kerja, yang diharapkan target capaian kinerja masing-masing bidang tercapai sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Tahun 2023-2026 disusun suatu Rencana Kinerja Tahunan. Rencana Kerja merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indicator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategik maupun tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Perubahan Rencana Kinerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan yang baruuntuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud pada tahun 2024 yang akan datang.

Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar adalah dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Takalar. Di dalam Perubahan Renja Tahun 2024 ini terdapat rumusan rencana program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar. Rumusan perubahan rencana program dan kegiatan tahun 2024 beserta pendanaan yang diharapkan dapat terlaksananya tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar dan prakiraan maju program dan kegiatan untuk tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR

TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Kinerja RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024			Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Renja 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	Renja 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Inspektorat							10.326.184.900,00	15.097.518.714,00	15.057.518.714,00							16.521.240.460,00	
	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							10.326.184.900,00	15.097.518.714,00	15.057.518.714,00							16.521.240.460,00	
	6	01				INSPEKTORAT DAERAH							10.326.184.900,00	15.097.518.714,00	15.057.518.714,00							16.521.240.460,00	
1	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEM	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	93%	100%	100%	100%	9.100.084.900,00	11.079.180.914,00	11.039.180.914,00					Inspektorat	100%	10.645.310.460,00	Inspektorat
	6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Ev	Persentase pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	21.000.000,00	52.960.000,00	52.960.000,00						100%	52.960.000,00	
	6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Takalar	PAD				2 Dokumen	7.500.000,00	
	6	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Takalar	PAD				1 Dokumen	7.500.000,00	
	6	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Takalar	PAD				1 Dokumen	7.500.000,00	
	6	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Takalar	PAD				1 Dokumen	7.500.000,00	
	6	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Takalar	PAD				1 Dokumen	7.500.000,00	
	6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	7.960.000,00	7.960.000,00	Takalar	PAD				1 Laporan	7.960.000,00	
	6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Takalar	PAD				1 Laporan	7.500.000,00	
	6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Da	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	8.781.289.700,00	7.561.518.714,00	7.521.518.714,00	Takalar	DAU				100%	6.436.240.460,00	
	6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan	58 Orang/bulan	58 Orang/bulan	58 Orang/bulan	58 Orang/bulan	8.772.289.700,00	7.546.518.714,00	7.506.518.714,00	Takalar	PAD				58 Orang/bulan	6.421.240.460,00	
	X	XX	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Takalar	PAD				12 Dokumen	5.000.000,00	
	6	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Takalar	PAD				1 Laporan	5.000.000,00	
	6	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Takalar	PAD				1 Laporan	5.000.000,00	
	6	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pa	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	6.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Takalar					100%	15.000.000,00	

	6	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD										PAD							
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Takalar	PAD				1 Dokumen	5.000.000,00	
	6	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Takalar	PAD				1 Laporan	5.000.000,00	
	6	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Takalar	PAD				1 Laporan	5.000.000,00	
	6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangka	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	28.000.000,00	1.441.851.400,00	1.441.851.400,00	Takalar	PAD				100%	1.441.821.400,00	
	6	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	70 Paket	70 Paket	70 Paket	70 Paket	70 Paket	750.000,00	95.304.000,00	95.304.000,00	Takalar	PAD				70 Paket	95.304.000,00	
	6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	23.250.000,00	826.607.000,00	826.607.000,00	Takalar	PAD				40 Orang	826.577.000,00	
	6	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	58 Orang	58 Orang	58 Orang	58 Orang	58 Orang	4.000.000,00	519.940.400,00	519.940.400,00	Takalar	PAD				58 Orang	519.940.400,00	
	6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daer	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	109.028.900,00	1.133.537.400,00	1.133.537.400,00	Takalar	PAD				100%	1.138.425.400,00	
	6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1.149.000,00	13.161.000,00	13.161.000,00	Takalar	PAD				1 Paket	13.161.000,00	
	6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1.000.000,00	5.764.500,00	5.764.500,00	Takalar	PAD				1 Paket	5.764.500,00	
	6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	3.549.900,00	62.039.900,00	62.039.900,00	Takalar	PAD				1 Paket	66.928.400,00	
	6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	3.270.000,00	22.499.000,00	22.499.000,00	Takalar	PAD				1 Paket	22.498.500,00	
	6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Takalar	PAD				12 Dokumen	30.000.000,00	
	6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	35 Laporan	35 Laporan	35 Laporan	35 Laporan	99.060.000,00	1.000.073.000,00	1.000.073.000,00	Takalar	PAD				35 Laporan	1.000.073.000,00	
	6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Pen	Persentase pelaksanaan kegiatan pengadaan BMD Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	21.686.100,00	364.505.400,00	364.505.400,00	Takalar	PAD				100%	1.049.695.200,00	
	6	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1.390.000,00			Takalar	PAD				1 Unit	586.696.000,00	
	6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	10.160.000,00	78.498.400,00	78.498.400,00	Takalar	PAD				1 Unit	78.063.200,00	
	6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10.136.100,00	286.007.000,00	286.007.000,00	Takalar	PAD				10 Unit	384.936.000,00	
	6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	117.995.200,00	276.418.000,00	276.418.000,00	Takalar	PAD				100%	277.778.000,00	
	6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	Takalar	PAD				12 Laporan	18.190.000,00	
	6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	103.895.200,00	118.528.000,00	118.528.000,00	Takalar	PAD				12 Laporan	118.528.000,00	
	6	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	2.600.000,00	40.090.000,00	40.090.000,00	Takalar	PAD				4 Laporan	40.260.000,00	
	6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	10.500.000,00	100.800.000,00	100.800.000,00	Takalar	PAD				12 Laporan	100.800.000,00	
	6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah P	Persentase pelaksanaan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%	100%	100%	100%	15.085.000,00	233.390.000,00	233.390.000,00	Takalar	PAD				100%	233.390.000,00	
	6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	

							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	14.040.000,00	144.780.000,00	144.780.000,00	Takalar	PAD				6 Unit	144.780.000,00	
	6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1.045.000,00	88.610.000,00	88.610.000,00	Takalar	PAD				1 Unit	88.610.000,00	
2	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEN	Persentase pertanggungjawaban keuangan Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	90%	100%	83%	83%	83%	1.001.420.000,00	3.140.537.800,00	3.140.537.800,00	Takalar	PAD			Inspektorat	83%	4.869.730.000,00	Inspektorat
	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Interi	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pengawasan yang Terencana	100%	100%	100%	100%	100%	669.720.000,00	2.752.417.800,00	2.752.417.800,00	Takalar	PAD				100%	4.107.430.000,00	
	6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	195.840.000,00	289.950.000,00	289.950.000,00	Takalar	PAD				36 Laporan	422.400.000,00	
	6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	49 Laporan	49 Laporan	49 Laporan	49 Laporan	49 Laporan	254.550.000,00	1.228.950.000,00	1.228.950.000,00	Takalar	PAD				49 Laporan	1.945.530.000,00	
	6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja																
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	18.270.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00	Takalar	PAD				6 Laporan	19.800.000,00	
	6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan																
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	9.360.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	Takalar	PAD				4 Laporan	284.400.000,00	
	6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa																
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	45.480.000,00	302.400.000,00	302.400.000,00	Takalar	PAD				12 Laporan	400.500.000,00	
	6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal																
							Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	5.820.000,00	230.917.800,00	230.917.800,00	Takalar	PAD				1 Kesepakatan	250.000.000,00	
	6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																
							Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	140.400.000,00	545.400.000,00	545.400.000,00	Takalar	PAD				24 Dokumen	784.800.000,00	
	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan deng	Persentase pelaksanaan kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu	100%	100%	100%	100%	100%	331.700.000,00	388.120.000,00	388.120.000,00	Takalar	PAD				100%	762.300.000,00	
	6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian	Negara/Daerah															
							Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	22 Laporan	22 Laporan	22 Laporan	22 Laporan	22 Laporan	2.000.000,00	16.320.000,00	16.320.000,00	Takalar	PAD				22 Laporan	217.800.000,00	
	6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	55 Laporan	55 Laporan	55 Laporan	55 Laporan	55 Laporan	329.700.000,00	371.800.000,00	371.800.000,00	Takalar	PAD				55 Laporan	544.500.000,00	
3	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,	Persentase penyelesaian temuan berulang kode 01, 02 dan 03	90%	80%	83%	83%	83%	224.680.000,00	877.800.000,00	877.800.000,00	Takalar	PAD			Inspektorat	83%	1.006.200.000,00	Inspektorat
	6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bida	Persentase pelaksanaan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi pengawasan	100%	0%	100%	100%	100%	1.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Takalar	PAD				100%	9.000.000,00	
	6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan																
							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Takalar	PAD				1 Rekomendasi	9.000.000,00	
	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Persentase pelaksanaan kegiatan pendampingan dan asistensi	100%	80%	100%	100%	100%	223.680.000,00	868.800.000,00	868.800.000,00	Takalar	PAD				100%	997.200.000,00	
	6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	34 perangkat daerah	34 perangkat daerah	34 perangkat daerah	34 perangkat daerah	34 perangkat daerah	6.660.000,00	212.040.000,00	212.040.000,00	Takalar	PAD				34 perangkat daerah	97.200.000,00	
	6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	35 perangkat daerah	35 perangkat daerah	35 perangkat daerah	35 perangkat daerah	35 perangkat daerah	6.660.000,00	39.600.000,00	39.600.000,00	Takalar	PAD				35 perangkat daerah	39.600.000,00	
	6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																
							Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	35 Kegiatan	35 Kegiatan	35 Kegiatan	35 Kegiatan	35 Kegiatan	201.480.000,00	609.660.000,00	609.660.000,00	Takalar	PAD				35 Kegiatan	830.700.000,00	
	6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	3 perangkat daerah	3 perangkat daerah	3 perangkat daerah	3 perangkat daerah	3 perangkat daerah	8.880.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Takalar	PAD				3 perangkat daerah	29.700.000,00	
						J U M L A H							10.326.184.900,00	15.097.518.714,00	15.057.518.714,00							16.521.240.460,00	

Tabel 3.3
RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) TAHUN 2024

KABUPATEN : TAKALAR

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target			Pagu			Ket.
						Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%	100%	9.100.084.900,00	11.079.180.914,00	11.039.180.914,00	
	6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	21.000.000,00	52.960.000,00	52.960.000,00	
	6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	

6	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	
6	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	
6	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	
6	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	

6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	7.960.000,00	7.960.000,00	
6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%	100%	8.781.289.700,00	7.561.518.714,00	7.521.518.714,00	
6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/ bulan	58 Orang/ bulan	58 Orang/ bulan	8.772.289.700,00	7.546.518.714,00	7.506.518.714,00	
6	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
6	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	

6	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
6	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi Barang Milik Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	6.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
6	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
6	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
6	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	

6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	100%	28.000.000,00	1.441.851.400,00	1.441.851.400,00	
6	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	70 Paket	70 Paket	70 Paket	750.000,00	95.304.000,00	95.304.000,00	
6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	40 Orang	40 Orang	23.250.000,00	826.607.000,00	826.607.000,00	
6	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	58 Orang	58 Orang	58 Orang	4.000.000,00	519.940.400,00	519.940.400,00	
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	100%	109.028.900,00	1.133.537.400,00	1.133.537.400,00	
6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1.149.000,00	13.161.000,00	13.161.000,00	

6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1.000.000,00	5.764.500,00	5.764.500,00	
6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	3.549.900,00	62.039.900,00	62.039.900,00	
6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	3.270.000,00	22.499.000,00	22.499.000,00	
6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	35 Laporan	35 Laporan	99.060.000,00	1.000.073.000,00	1.000.073.000,00	
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan pengadaan BMD Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan pengadaan BMD Perangkat Daerah	100%	100%	100%	21.686.100,00	364.505.400,00	364.505.400,00	
6	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1.390.000,00	0,00	0,00	

6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	10.160.000,00	78.498.400,00	78.498.400,00	
6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10.136.100,00	286.007.000,00	286.007.000,00	
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	117.995.200,00	276.418.000,00	276.418.000,00	
6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	
6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	103.895.200,00	118.528.000,00	118.528.000,00	
6	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	2.600.000,00	40.090.000,00	40.090.000,00	
6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	10.500.000,00	100.800.000,00	100.800.000,00	

	6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%	100%	15.085.000,00	233.390.000,00	233.390.000,00	
	6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit	6 Unit	14.040.000,00	144.780.000,00	144.780.000,00	
	6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1.045.000,00	88.610.000,00	88.610.000,00	
2	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase pertanggungjawaban keuangan Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Persentase pertanggungjawaban keuangan Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	83%	83%	83%	1.001.420.000,00	3.140.537.800,00	3.140.537.800,00	
	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pengawasan yang Terencana	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pengawasan yang Terencana	100%	100%	100%	669.720.000,00	2.752.417.800,00	2.752.417.800,00	
	6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	195.840.000,00	289.950.000,00	289.950.000,00	

6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	49 Laporan	49 Laporan	49 Laporan	254.550.000,00	1.228.950.000,00	1.228.950.000,00	
6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	18.270.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00	
6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	9.360.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	
6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	45.480.000,00	302.400.000,00	302.400.000,00	
6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	5.820.000,00	230.917.800,00	230.917.800,00	
6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	140.400.000,00	545.400.000,00	545.400.000,00	
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase pelaksanaan kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu	Persentase pelaksanaan kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu	100%	100%	100%	331.700.000,00	388.120.000,00	388.120.000,00	
6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	22 Laporan	22 Laporan	22 Laporan	2.000.000,00	16.320.000,00	16.320.000,00	

	6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	55 Laporan	55 Laporan	55 Laporan	329.700.000,00	371.800.000,00	371.800.000,00	
3	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase penyelesaian temuan berulang kode 01, 02 dan 03	Persentase penyelesaian temuan berulang kode 01, 02 dan 03	83%	83%	83%	224.680.000,00	877.800.000,00	877.800.000,00	
	6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase pelaksanaan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi pengawasan	Persentase pelaksanaan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi pengawasan	100%	100%	100%	1.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	
	6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	
	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi	Persentase pelaksanaan kegiatan pendampingan dan asistensi	Persentase pelaksanaan kegiatan pendampingan dan asistensi	100%	100%	100%	223.680.000,00	868.800.000,00	868.800.000,00	
	6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	34 perangkat daerah	34 perangkat daerah	34 perangkat daerah	6.660.000,00	212.040.000,00	212.040.000,00	

	6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	35 perangkat daerah	35 perangkat daerah	35 perangkat daerah	6.660.000,00	39.600.000,00	39.600.000,00	
	6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	35 Kegiatan	35 Kegiatan	35 Kegiatan	201.480.000,00	609.660.000,00	609.660.000,00	
	6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	3 perangkat daerah	3 perangkat daerah	3 perangkat daerah	8.880.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	
JUMLAH													**10.326.184.900,00**	**15.097.518.714,00**	**15.057.518.714,00**	

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja Perubahan) Inspektorat Daerah Takalar merupakan dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun yang mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah. Terwujudnya Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) merupakan prasyarat bagi setiap Satuan Kerja Pemerintahan Daerah untuk memudahkan pengimplementasian dari penyusunan rencana startegis pada kurun waktu tertentu. Renja Perubahan Inspektorat Tahun 2024 ini menjadi penting karena merupakan tindak lanjut dari kebijakan penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024.

Agar pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tercapai optimal maka perlu sistem perencanaan yang matang, jelas dan realistis, sehingga pelaksanaan program kerja dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, efektif dan efisien baik dari sisi penganggaran maupun sasaran tiap-tiap program kegiatan. Dalam Renja perubahan ini tentu masih terdapat beberapa kelemahan yang masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami sangat terbuka dalam menerima saran dan kritikan yang konstruktif dalam rangka lebih menyempurnakan Renja Perubahan ini. Semoga Rencana Kerja Perubahan tahun 2024 ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Takalar, 25 Juli 2024

Inspektur Daerah

H YAHE, S.Sos. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19641231 198603 1 217

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan Rasa Syukur Kehadirat Allah SWT, karena atas berkat Rahmat-Nya, sehingga Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Takalar Tahun 2024 sebagai evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan BPBD Kabupaten Takalar sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dapat diselesaikan. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja BPBD Kabupaten Takalar Tahun 2024 dilakukan untuk memberikan arahan yang lebih jelas sehingga penggunaan anggaran lebih efektif dan efesien dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, terlebih lagi dengan adanya refocusing anggaran yang mengharuskan penghematan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan. Rencana Kerja BPBD Kabupaten Takalar ini merupakan uraian tugas pokok dan fungsi Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Takalar dalam rangka pencapaian Tujuan serta Sarasaran Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026.

Perubahan Renja BPBD Kabupaten Takalar disusun dengan memperhatikan kebutuhan pengurangan anggaran yang harus dilakukan dengan sedapat mungkin tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pencapian target kinerja BPBD Kabupaten Takalar yang telah ditetapkan pada Renja Pokok Tahun 2024.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Takalar Tahun 2024 ini disusun dengan harapan dapat tetap bersinergi dengan program dan kegiatan Rencana Kerja

SKPD lainnya dalam rangka mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Takalat Tahun 2017-2022.

Takalar, Agustus 2024

Kepala Pelaksana
BPBD Kabupaten Takalar,

NURIKSAN NURDIN, SE., M.Si.
Pangkat : Pembina
NIP : 197001132005021002

DAFTAR TABEL

Tabel II-1 : Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja BPBD Kabupaten Takalar Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 ..... II.3

Tabel II-2 : Rekapitulasi Capaian Kinerja Program, Kegiataan dan Subkegiatan Hasil Evaluasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024 ..... II.14

Tabel II-3 : Pencapaian Kinerja Pelaynan BPBD Kabupaten Takalar sampai dengan Semester I Tahun 2024 ..... II.21

Tabel II-4 : Identifikasi Permasalahan dan Penentu Keberhasilan II.26

Tabel III-1 : Tujuan dan Sasaran Renja BPBD Kabupaten Takalar Tahun 2024 ..... III.2

Tabel III-2 : Rencana Kerja Perubahan BPBD Kabupaten Takalar Tahun 2024 ..... III.6

Lampiran

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR ISI iv

BAB I PENDAHULUAN I.1

1.1. Latar Belakang I.1

1.2. Landasan Hukum I.3

1.3. Maksud dan Tujuan I.4

1.3.1. Maksud I.4

1.3.1. Tujuan I.5

1.4. Sistematika Penulisan I.5

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCAN KERJA BPBD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 ..... II.1

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BPBD Kabupaten Takalar sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 ..... II.1

2.1.1. Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja BPBD Kabupaten Takalar yang Terakomodir pada APBD Tahun 2024 ..... II.1

2.1.2. Evaluasi Capaian Kinerja dan Pendanaan APBD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024..... II.15

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah II.17

2.2.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) II.17

2.2.2. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) II.18

2.2.3. Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) II.19

2.2.4. Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustanible Development Goals (TPB/SDGs) …… II.20
2.3. Hambatan, Upaya Pencapaian dan Rekomendasi Pelaksanaan Renja BPBD Kab. Takalar Tahun 2024 …… II.23
2.3.1. Hambatan dalam Pelaksanaan Renja BPBD Kabupaten Takalar Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II …... II.23
2.3.2. Upaya dalam Pencapaian Pelaksanaan Renja BPBD Kabupaten Takalar Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II …… II.23
2.3.3. Rekomendasi Pelaksanaan Renja BPBD Kabupaten Takalar Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II…….. II.24

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN …… III.1
3.1. Tujuan dan Sasaran ……. III.1
3.2. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja BPBD Kabupaten Takalar Tahun 2024 …….. III.5

BAB IV PENUTUP …… IV.1

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah Dokumen perencanaan Tahunan Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai perencanaan pembngunan yang disusun untuk jangka menengah, mengacu pada Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Takalar yang memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakanan oleh perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kenerja, serta bagaimana pelaksanaan program dan pelayanan perangkat daerah sesuai tupoksinya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Badan Penangguangan Bencana Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024.

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 360 ayat (1) dan ayat (3) mengamanahkan bahwa Perangkat Daerah menyusun rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada :

a. Rancangan Perubahan RKPD; dan
b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 perlu dilakukan penyesuaian target indikator kinerja Tahun 2024 melalui perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar Tahun 2024. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 dalam Pasal 361 ayat (1), Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360 ayat (3), terdiri atas:

a. Perumusan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan

b. Penyajian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Dokumen ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun 2024. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Takalar tahun 2024 dalam penyusunannya selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh BNPB RI dengan memperhatikan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Takalar Tahun 2024 selanjutnya menjadi landasan penyusunan Perubahan RKA Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2024.

Dalam menyempurnakan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil , maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Renja Rencana Kerja BPBD Kabupaten Takalar Semester I tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undangNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6178);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044;
6. Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Inonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Inonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;

13. Peraturan Bupati Takalar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembanguan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 03);
14. Peraturan Bupati Takalar Nomor 45 Tahun 2022 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 45);
15. Peraturan Bupati Takalar Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Takalar Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Menjamin bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program/kegiatan prioritas daerah, indikator kinerja, dan pagu indikatif dalam Renja BPBD Kabupaten Takalar Tahun 2024 telah dipedomani dalam penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2024.
b. Menilai daya serap capaian target kinerja program/kegiatan, mencakup masukan *(input)*, keluaran *(output)* dan hasil *(outcome)* yang telah ditetapkan dalam dokumen Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tahun 2024 dan Renstra Tahun 2023-2026.
c. Memastikan perkembangan hasil pelaksanaan Renja BPBD Kabupaten Takalar Tahun 2024 dan keselarasan antara Renja dengan APBD Tahun 2024.
d. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan Renja BPBD Kabupaten Takalar Tahun 2024.
e. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Renja BPBD Kabupaten Takalar Tahun 2024, yang merupakan tahun ke-2 dari pelaksanaan Renstra BPBD Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 adalah untuk menyusun rekomendasi dan tindak lanjut sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendaptandan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) serta peningkatan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Takalar.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja (Renja) BPBD Kabupaten Takalar Semester I Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan. Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) BPBD Kabupaten Takalar agar substansi pada bab- bab berikutnya dapat dipahami dengan baik dengan meliputi : Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistimatika Penulisan.

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sampai Triwulan II Tahun 2024. Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja BPBD Kabupaten Takalar sampai dengan Triwulan II, Analisis Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Takalar, Hambatan serta Upaya Pencapaian dan Rekomendasi Pelaksanaan Renja BPBD Kabupaten Takalar Tahun 2024

BAB III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah. Berisikan rumusan tujuan dan sasaran BPBD Kabupaten Takalar, Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja BPBD Kabupaten Takalar Tahun 2024.

BAB IV. Penutup. Berisikan uraian penutup, yang menjelaskan poin-poin yang menjadi harapan berkenaan dengan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja BPBD Kabupaten Takalar Takalar Tahun 2024.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BPBD KABUPATEN TAKALAR SEMESTER I TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BPBD Kabupaten Takalar sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

2.1.1. Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja BPBD Kabupaten Takalar yang Terakomodir pada APBD Tahun 2024

Pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Takalar sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja, namun terdapat beberapa kegiatan yang belum dapat dilaksanakan secara maksimal sampai dengan Triwulan II tahun anggaran 2024. Demikian pula dengan realisasi anggaraan yang sangat rendah pada smpai dengan taanggal 30 Juni 2024. Pada APBD Pokok Tahun 2024 BPBD Kabupaten Takalar melaksanakan 2 (dua) program yang didukung dengan 10 (sepuluh) kegiatan dan 18 (Delapan belas) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.016.969.351,- (Tiga milyar enam belas juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah). Uraian program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah
   - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
   - Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA SKPD
   - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
   - Koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   - Rekonsiliasi dan penyusunan barang milik daerah pada SKPD

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
   - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
   - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
5. Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahaan daerah
   - Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
   - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. Program Penanggulangan Bencana

1. Kegiatan Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
   - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
2. Kegiatan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
   - Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kab/kota
3. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
   - Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Rencana Kerja Tahun 2024 dan Pencapaian Rencana Strategis BPBD Kabupaten Takalar 2023-2026 sampai dengan Semester I Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel II.1 dibawah ini :

Tabel II-1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Palaksanaan Renja BPBD Tahun 2024 dan Renstra BPBD Tahun 2023-2026 sampai dengan Semester I Tahun 2024

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD:

1 **Indeks Pelayanan Penanggulangan Bencana**

2 **Indeks Reformasi Birokrasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

No	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun **2024**) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun **2024**)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun **2024**) yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun **2024** (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun **2026**)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun (5)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3					4	5	8		25		26 = 25/8 x 100%		27 = 7 + 25		28 = 27/6 x 100%		29	30
URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																				
		1	**5**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**		**3,016,969,351**		**1,203,363,754**	51,42%	26,60%		**3,229,889,192**				
		1	**5**	**1**			**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**2,496,969,351**	**50,18%**	**1,166,908,554**	**50,18%**	**46,19%**	**31,79%**	**3,094,517,055**	**32%**	**25%**	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**	
	Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran	**1**	**5**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan, program dan kegiatan yang disusun**	**100%**	**8,476,600**	**67%**	**1,365,300**	**67%**	**16%**	**38%**	**4,893,300**	**38%**	**4%**		
		1	5	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Renstra dan Renja perangkat Daerah yang disusun	2	2,840,100	1	699,900	50%	25%	3	3,330,100	33%	8%		
		1	5	1	2.01	2	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA perangkat daerah yang disusun	1	2,995,300	1	665,400	100%	22,21%	2	1,563,200	50%	4%		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)													**50,00%**	**15,62%**						
Predikat Kinerja Kegiatan													**SR**	**SR**						

	Meningkatkan kualitas pengelolaanadministrasi keuangan	**1**	**5**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pealaksanaan pengelolaan administrasi keuangan**	**100%**	**2,113,677,466**	**47,39%**	**1,036,347,227**	**47,39%**	**49,03%**	**43,65%**	**2,673,317,019**	**44%**	**29%**		
		1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangn ASN	266	1,411,941,486	144	784,972,911	54%	56%	396	1,963,133,037	47%	36%		
								Jumlah ASN yang menerima TPP	228	699,582,480	90	251,118,216	39%	36%	286	708,799,282	40%			
		1	5	1	2.02	7	Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/triwulanan / Semesteran	jumlah laporan keuangan triwulanan/ semesteran yang disusun	4	2,153,500	2	256,100	50%	12%	6	1,384,700	38%	3%		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)													**47,87%**	**34,46%**						
Predikat Kinerja Kegiatan													**SR**	**SR**						
	Meningkatkan kualitas kedisiplinan dan SDM Aparatur	**1**	**5**	**1**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah**	**100%**	**1,500,000**	**100%**	**652,100**	**100%**	**43%**	**100,00 %**	**653,072**	**100,00%**	**4,23%**		
		1	5	1	2.05	5	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	1	1,500,000	1	652,100	100%	43%	2	653,072	100%	4%		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)													**100%**	**43%**						
Predikat Kinerja Kegiatan													**ST**	**SR**						
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum perangkat daerah	**1**	**5**	**1**	**2.06**		**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perkantoran**	**100%**	**62,390,900**	**32,84%**	**11,960,100**	**32,84%**	**22,58%**	**25,47%**	**49,825,048**	**25,47%**	**6,04%**		
		1	5	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4	10,062,700	1	236,700	25%	2,35%	5	5,770,300	31%	0%		
		1	5	1	2.06	5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penggandaan dan barang cetakan yang disediakan	3	3,070,700	1	970,700	33%	32%	4	3,019,700	33%	0%		
		1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	60	49,257,500	20	10,752,700	33%	22%	100	41,035,048	25%	7%		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)													**30,56%**	**25,65%**						
Predikat Kinerja Kegiatan													**SR**	**SR**						

		1	**5**	**1**	**2.07**		**PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase jumlah barang milik daerah yang diadakan**	**100%**	**19,139,000**	**100%**	**19,120,000**	**100%**	**100%**	**25,00%**	**19,120,000**	**25,00%**	**23,90%**		
		1	5	1	2.07	6	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	3	19,139,000	3	19,120,000	100%	100%	3	19,120,000	25%	24%		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)													**100%**	**100%**						
Predikat Kinerja Kegiatan													**ST**	**ST**						
	Meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	**1**	**5**	**1**	**2.08**		**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan**	**100%**	**245,445,385**	**29%**	**93,888,827**	**29%**	**39,66%**	**28,13%**	**316,542,446**	**28,13**	**31,27%**		
		1	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlahrekening wi-fi yang dibayarkan	12	7,236,000	2	950,764	17%	13%	14	5,326,183	29%	0%		
								Jumlah rekening PDAM yang dibayarkan	12	3,009,000	2	23,200	17%	8%	7	1,053,400	15%	0%		
								Jumlah rekening listrik yang dibayarkaan	12	42,000,385	5	12,414,863	42%	37%	16	44,862,863	33%	0%		
		1	5	1	2.08	4	Penyediaan Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	193,200,000	5	80,500,000	42%	42%	17	265,300,000	35%	0%		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)													**29,17%**	**24,95%**						
Predikat Kinerja Kegiatan													**SR**	**SR**						
	Meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	**1**	**5**	**1**	**2.09**		**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik Daerah**	**100%**	**46,340,000**	**25%**	**3,575,000**	**25%**	**8%**	**23%**	**30,166,170**	**23%**	**5%**		
		1	5	1	2.09	1	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4	5,510,000	0	-	0%	0%	6	1,347,600	27%	2%		

		1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	6	36,770,000	4	3,575,000	67%	10%	8	26,838,570	33%	8%		
		1	5	1	2.09	#	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah saran dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	4,060,000	0	-	0%	0%	6	1,980,000	15%	0%		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)													**22,22%**	**3,24%**						
Predikat Kinerja Kegiatan													**SR**	**SR**						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)													**54,26%**	**24,57%**						
Predikat Kinerja Program													**R**	**SR**						
Faktor pendorong pencapaian kinerja: Ada SDM yang siap bekerja meskipun belum ada anggaran																				
Faktor penghambat: Anggaran belum cair karena sesuai anggaran kas, untuk anggaran yang bersumber dari PAD hanya 5% pada Triwulan I																				
Faktor penghambat: Peralatan kerja yang sangat tidak memadai																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):																				
		1	**5**	**3**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana**	**100%**	**520,000,000**	**52,67%**	**36,455,200**	**52,67%**	**7,01%**	**78,76%**	**135,372,137**	**78,76%**	**6,48%**	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**	
	Penguatan Kapasitas aparatur Pemerintah dan masyarakat dalam usaha mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	**1**	**5**	**3**	**2.02**		**PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA**	**Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana**	**100%**	**360,000,000**	**0,00%**	**16,490,000**	**0%**	**5%**	**50,00%**	**80,496,937**	**16,67%**	**13,42%**		
		1	5	3	2.02	#	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah warga negara dan Aparatur yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	315	360,000,000	0	16,490,000	0%	5%	100	80,496,937	25%	0%		SPM
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)													**0,00%**	**4,58%**						
Predikat Kinerja Kegiatan													**SR**	**SR**						

	Terwujudnya sistem penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang efektif dan efisien	**1**	**5**	**3**	**2.03**		**PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA**	**Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana**	**100%**	**150,000,000**	**58,00%**	**15,355,200**	**58%**	**10%**	**39,50%**	**34,495,200**	**13,17%**	**0,00%**		
		1	5	3	2.03	9	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	jumlah logistik dasar yang diberikan kepada korban bencana	100	150,000,000	58	15,355,200	58%	10%	158	34,495,200	40%	0%		SPM
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)													**58,00%**	**10,24%**						
Predikat Kinerja Kegiatan													**R**	**SR**						
	Terwujudnya sistem penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang efektif dan efisien	**1**	**5**	**3**	**2.04**		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Persentase jumlah dokumen yang disusun**	**100%**	**10,000,000**	**100,00%**	**4,610,000**	**100%**	**46%**	**3,69%**	**20,380,000**	**17,64%**	**1,05%**		
		1	5	3	2.04	6	Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang mendapatkan distribusi material dan layanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana sarana dan prasarana	60		0		0%	46%	7		3%	3%		
								Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	1		1		100%	46%	2		50%	0%		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)													**50,00%**	**23,05%**						
Predikat Kinerja Kegiatan													**SR**	**SR**						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)													**36,00%**	**12,62%**						
Predikat Kinerja Program													**SR**	**SR**						
Faktor pendorong pencapaian kinerja: Ada SDM yang siap bekerja meskipun belum ada anggaran																				
Faktor penghambat: : Anggaran belum cair karena sesuai anggaran kas, untuk anggaran yang bersumber dari PAD hanya 5% pada Triwulan I																				
Faktor penghambat: Peralatan kerja yang sangat tidak memadai																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):																				

Dari Tabel di atas, dapat dilihat realisasi capaiaan kinerja dan anggaran untuk program, kegiatan dan subkegiatan sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan capaian kinerja 50,18% (sangat tinggi) dan realisasi anggaran 46,18% (tinggi). Program ini didukung dengan 7 (tujuh) kegiatan dan 15 (lima belas) sub kegiatan. Adapun rincian kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah. Indikator kinerjanya adalah Persentase dokumen perencanaan, program dan kegiatan yang disusun dengan realisasi kinerja sampai semester I Tahun 2024 sebesar 67% (sangat tinggi) dan realisasi anggaran sebesar 16% (sangat rendah) sedangkan capaian target Renstra adalah sebesar 38%. Kegiatan ini didukung 2 (dua) sub kegiatan, sebagai berikut :
   - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah Renstra dan Renja perangkat daerah yang disusun dengan target capaian kinerja sebanyak 2 (dua) dokumen yaitu Renja BPBD Tahun 2025 dan Renja Perubahan Tahun 2024. Realisasi Kinerja sampai dengan semester I Tahun 2024 adalah 50% (tinggi) dan realisasi anggaran sebesar 25% (rendah) atau Rp. 699.900,- dari pagu anggaran sebesar pada DPA sebesar Rp. 2.840.100,-. Capaian target Renstra sampai dengan semester I tahun 2024 adalah 33% atau 3 Dokumen.
   - Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA SKPD. Indiktor kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun dengan target capaian kinerja sebanyak 1 (satu) dokumen yaitu RKA Pokok Tahun 2024. Realisasi Kinerja sampai dengan semester I Tahun 2024 adalah 100% (sangat tinggi) dan realisasi anggaran sebesar 22,21% (rendah) atau Rp. 665.400,- dari pagu anggaran sebesar pada DPA sebesar Rp. 2.995.300,-. Capaian target Renstra sampai dengan semester I tahun 2024 adalah 50 % atau 2 Dokumen.

- Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD. Indiktor kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun dengan target capaian kinerja sebanyak 1 (dua) dokumen yaitu RKA Perubahan Tahun 2024. Realisasi Kinerja sampai dengan semester I Tahun 2024 adalah 0% (sangat rendah) dan realisasi anggaran sebesar 0% (sangat rendah). Capaian target Renstra sampai dengan semester I tahun 2024 adalah 25 % atau 1 Dokumen.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Indikator kinerjanya adalah Persentase pengelolaan administrasi keuangan dengan dengan realisasi kinerja sampai semester I Tahun 2024 sebesar 43,79 % (tinggi) dan realisasi anggaran sebesar 49,03 % (tingggi) sedangkan capaian target Renstra adalah sebesar 43,65 %. Kegiatan ini didukung 2 (dua) sub kegiatan, sebagai berikut :
   - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN. Indiktor kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan sebanyak 266 orang/bulan dan jumlah ASN yang menerima TPP sebanyak 228 orang/bulan. Realisasi Kinerja sampai dengan semester I Tahun 2024 adalah 54% (sangat tinggi) untuk gaji dan 39% (sedang) untuk TPP. Realisasi anggaran sebesar 56% (sangat tinggi) atau Rp. 784.972.911,- dari pagu anggaran sebesar pada DPA sebesar Rp. 1.411.941.486,- untuk gaji dan 36% (sedang) atau Rp. 251.118.216,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 699.582.480,-. Capaian target Renstra sampai dengan semester I tahun 2024 adalah 43,5 %.
   - Koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran. Indiktor kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran yang disusun sebanyak 4 (empat) laporan keuangan triwulanan. Realisasi Kinerja sampai dengan semester I Tahun 2024 adalah 50% (tinggi) dan realisasi anggaran sebesar 12% (sangat rendah) atau Rp. 256.100,- dari pagu anggaran sebesar pada DPA sebesar Rp. 2.153.500,-. Capaian target Renstra sampai dengan semester I tahun 2024 adalah 38 % atau 6 Dokumen.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah. Indikator kinerjanya adalah Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah dengan capaian realisasi kinerja sampai

semester I Tahun 2024 sebesar 100 % (sangat tinggi) dan realisasi anggaran sebesar 43 % (tinggi) sedangkan capaian target Renstra adalah 50 %. Kegiatan ini didukung dengan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :

- Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD. Indiktor kinerja sub kegiatan ini Jumlah laporan Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD sebanyak 1 laporan. Realisasi Kinerja sampai dengan semester I Tahun 2024 adalah 100 % (sangat tinggi) dan realisasi anggaran sebesar 43 % (tinggi) atau Rp. 652.100,- dari pagu anggaran sebesar pada DPA sebesar Rp. 1.500.000,-. Capaian target Renstra sampai dengan semester I tahun 2024 adalah 50 % atau 2 Dokumen.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Indikator kinerjanya adalah Persentase pemenuhan administrasi umum perkantoran perangkat daerah dengan capaian realisasi kinerja sampai semester I Tahun 2024 sebesar 32,84 % (sedang) dan realisasi anggaran sebesar 22,58 % (rendah) sedangkan capaian target Renstra adalah sebesar 25,47 %. Kegiatan ini didukung dengan 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu :
   - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. Indiktor kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan sebanyak 4 (empat) jenis. Realisasi Kinerja sampai dengan semester I Tahun 2024 adalah 25 % (rendah) dan realisasi anggaran sebesar 2,35 % (sangat rendah) atau Rp. 326.700,- dari pagu anggaran sebesar pada DPA sebesar Rp. 10.062.700,-. Capaian target Renstra sampai dengan semester I tahun 2024 adalah 31 %.
   - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Indiktor kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan sebanyak 3 (tiga) jenis. Realisasi Kinerja sampai dengan semester I Tahun 2024 adalah 33 % (sedang) dan realisasi anggaran sebesar 32 % (sedang) atau Rp. 970.700,- dari pagu anggaran sebesar pada DPA sebesar Rp. 3.070.700,-. Capaian target Renstra sampai dengan semester I tahun 2024 adalah 33 %.
   - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah. Indiktor kinerja sub kegiatan ini adalah frekwensi rapat-

rapat yang dilaksanakan sebanyak 60 (enam puluh) kali rapat rutin kantor dan dan di luar kantor. Realisasi Kinerja sampai dengan semester I Tahun 2024 adalah 33 % (sedang) dan realisasi anggaran sebesar 22 % (rendah) atau Rp. 10.752.700,- dari pagu anggaran sebesar pada DPA sebesar Rp. 49.257.500,-. Capaian target Renstra sampai dengan semester I tahun 2024 adalah 25 % atau 100 perjalanan.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Indikator kinerjanya adalah Persentase jumlah barang milik daerah yang diadakan dengan capaian realisasi kinerja sampai semester I Tahun 2024 sebesar 100 % (sangat tinggi) dan realisasi anggaran sebesar 100 % sedangkan capaian target Renstra adalah 25% (rendah). Kegiatan ini didukung dengan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :
   - Pengadaan peralatan dan mesin lainnya. Indiktor kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan sebanyak 12 unit. Realisasi Kinerja sampai dengan semester I Tahun 2024 adalah 100 % (sangat tinggi) dan realisasi anggaran sebesar 100 % (sangat tinggi) atau dari pagu anggaran sebesar pada DPA sebesar Rp. 19.139.000,-. Capaian target Renstra sampai dengan semester I tahun 2024 adalah 25 % atau 3 unit.
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Indikator kinerjanya adalah Persentase jasa penunjang urusan pemmerintahan daerah yang disediakan dengan capaian realisasi kinerja sampai semester I Tahun 2024 sebesar 29% (rendah) dan realisasi anggaran sebesar 39,66 % (sedang) sedangkan capaian target Renstra adalah sebesar 28,13 % (rendah). Kegiatan ini didukung dengan 2 (dua) sub kegiatan, sebagai berikut :
   - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Indiktor kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah jasa komunikasi wi-fi yang disediakan sebanyak 12 (dua belas) rekening, jumlah jasa sumberdaya air sebanyak 12 (dua belas) rekening dan jumlah jasa listrik sebanyak 12 (dua belas) rekening. Realisasi Kinerja sampai dengan semester I Tahun 2024 adalah 25,33 % (rendah) dan realisasi anggaran sebesar 19,33 % (sangat rendah) atau Rp. 16.844.842,- dari pagu anggaran sebesar pada DPA sebesar Rp.

52.254.385,-. Capaian target Renstra sampai dengan semester I tahun 2024 adalah sebesar 25,67 %.

- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor. Indiktor kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan sebanyak 12 (dua belas) laporan. Realisasi Kinerja sampai dengan semester I Tahun 2024 adalah 42 % (tinggi) dan realisasi anggaran sebesar 42% (tinggi) atau Rp. 80.500.000,- dari pagu anggaran sebesar pada DPA sebesar Rp. 193.200.000,-. Capaian target Renstra sampai dengan semester I tahun 2024 adalah 35 %.

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Indikator kinerjanya adalah Persentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah dengan capaian realisasi kinerja sampai semester I Tahun 2024 sebesar 25 % (rendah) dan realisasi anggaran sebesar 8 % (sangat rendah) sedangkan capaian target Renstra adalah sebesar 23 %. Pada tahun 2024, kegiatan ini didukung 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu :
   - Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Indiktor kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya sebanyak 4 (empat) unit. Realisasi Kinerja sampai dengan semester I Tahun 2024 adalah 0 % dan realisasi anggaran sebesar 0 % dari pagu anggaran sebesar pada DPA sebesar Rp. 5.510.000,-. Capaian target Renstra sampai dengan semester I tahun 2024 adalah 27 % atau 6 unit kendaraan.
   - Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Indiktor kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya sebanyak 6 (enam) unit. Realisasi Kinerja sampai dengan semester I Tahun 2024 adalah 67 % (sangat tinggi) dan realisasi anggaran sebesar 10 % (sangat rendah) atau Rp. 3.575.000,- dari pagu anggaran sebesar pada DPA sebesar Rp. 36.770.000,-. Capaian target Renstra sampai dengan semester I tahun 2024 adalah 33,33 % atau 8 unit kendaraan.

- Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Indiktor kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah saran dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi sebanyak 6 (sepuluh) unit. Realisasi Kinerja sampai dengan semester I Tahun 2024 adalah 0 % dan realisasi anggaran sebesar 0 % dari pagu anggaran sebesar pada DPA sebesar Rp. 4.060.000,-. Capaian target Renstra sampai dengan semester I tahun 2024 adalah 15 % atau 6 unit.

II. Program Penanggulangan Bencana

Program Penanggulangan Bencana dengan indikator presentase penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah kabupaten/kota dengan capaian kinerja 52,67% (sangat tinggi), sementara tingkat capaian realisasi target Renstra BPBD Kabupaten Takalar sampai dengan Tahun 2022 mencapai 7,01% (sangat rendah). Program ini didukung dengan 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan. Adapun rincian kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Indikator kinerjanya adalah Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan capaian realisasi kinerja sampai semester I Tahun 2024 sebesar 0 % (sangat rendah) dan realisasi anggaran sebesar 5 % sedangkan capaian target Renstra adalah sebesar 16,67 % (sangat rendah). Pada tahun 2024, kegiatan ini didukung 1 (satu) sub kegiatan, sebagai berikut :
   - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana. Indiktor kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah warga negara dan Aparatur yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana dengan target capaian kinerja sebanyak 100 (seratus) orang. Realisasi Kinerja sampai dengan semester I Tahun 2024 adalah 0 % (sangat rendah) dan realisasi anggaran sebesar 5 % (sangat rendah) atau Rp. 16.490.000,- dari pagu anggaran sebesar pada DPA sebesar Rp. 360.000.000,-. Capaian target Renstra sampai dengan semester I tahun 2024 adalah 25 % atau 100 orang.
2. Kegiatan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Indikator kinerjanya adalah Persentase warga negara yang

memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan capaian realisasi kinerja sampai semester I Tahun 2024 sebesar 58 % (sangat tinggi) dan realisasi anggaran sebesar 10 % (sangat rendah) sedangkan capaian target Renstra adalah sebesar 13,17 %. Pada tahun 2024, kegiatan ini didukung 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :

- Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Indiktor kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah logistik dasar/darurat yang diberikan kepada korban bencana sebanyak 100 paket logistic darurat yang disalurkan. Realisasi Kinerja sampai dengan semester I Tahun 2024 adalah 58 % (sangat tinggi) dan realisasi anggaran sebesar 10 % (sangat rendah) atau Rp. 15.355.000,- dari pagu anggaran sebesar pada DPA sebesar Rp. 150.000.000,-. Capaian target Renstra sampai dengan semester I tahun 2024 adalah 40 % atau 158 paket.

3. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana. Indikator kinerjanya adalah Persentase Jumlah Dokumen untuk penataan sistem dasar penanggulangan bencana dengan capaian realisasi kinerja sampai semester I Tahun 2024 sebesar 100 % (sangat tinggi) dan realisasi anggaran sebesar 46 % (tinggi) sedangkan capaian target Renstra adalah sebesar 17,64 %. Pada tahun 2024, kegiatan ini didukung 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :
    - Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota. Indiktor kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana sebanyak 1 (satu) dokmen. Realisasi Kinerja sampai dengan semester I Tahun 2024 adalah 100 % (sangat tinggi) dan realisasi anggaran sebesar 46 % (tinggi) atau Rp. 4.610.000,- dari pagu anggaran sebesar pada DPA sebesar Rp. 10.000.000,-. Capaian target Renstra sampai dengan semester I tahun 2024 adalah 50 % atau 2 dokumen.

2.1.2. Evaluasi Capaian Kinerja dan Pendanaan APBD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Rata-rata Capaian kinerja program (output) pada APBD Kabupaten Takalar sampai dengan Triwulaan II Tahun 2024 adalah 43,15 % (tinggi) sedangkan rata-rata capaian realisasi anggaran program adalah 18,59 % (sangat rendah).

Rata-rata Capaian kinerja kegiatan (output) pada APBD Kabupaten Takalar sampai dengan Triwulaan II Tahun 2024 adalah 51,22 % (sangat tinggi) sedangkan rata-rata capaian realisasi anggaran kegiatan adalah 18,59 % (sangat rendah).

Rata-rata Capaian kinerja sub kegiatan (output) pada APBD Kabupaten Takalar sampai dengan Triwulaan II Tahun 2024 adalah 46,92 % (tinggi) sedangkan rata-rata capaian realisasi anggaran sub kegiatan adalah 33,92 % (sedang).

Rekapitulasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Hasil Evaluasi Kinerja Semester I Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-2

Rekapitulasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Hasil Evaluasi Kinerja Semester I Tahun 2024

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Takalar

NO	Uraian	Keterangan Kinerja (K)							Rata-rata Capaian Output (%) dan Predikat Kinerja			
		Jumlah Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Non APBD	Jumlah Indikator	Capaian 0%	Capaian < 100%	Capaian 100%	Capaian >100%	K	Rp.	K	Rp.
1.	Program	2		2	-	2	-	-	45,13 %	18,59 %	T	SR
2.	Kegiatan	10		10	1	8	1	-	51,22 %	18,59 %	ST	SR
3.	Sub Kegiatan	18		19	4	12	3	-	46,92 %	33,92 %	ST	S

SKALA PENILAIAN RATA-RATA KINERJA DAN PREDIKAT KINERJA HASIL EVALUASI RENJASAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

MENGGUNAKAN KRITERIA SEBAGAI BERIKUT :

1. ≥ 50	Sangat Tinggi
2. 41% ≤ 50%	Tinggi
3. 31% ≤ 40%	Sedang
4. 21% ≤ 30%	Rendah
5. ≤ 20%	Sangat Rendah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.1. Capaian IKU

1. Sasaran Strategis Meningkatnya Tata Kelola Kinerja BPBD dengan indikator Nilai Sakip Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan target kinrja Nilai sakip B. Sasaran ini didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas 7 (tujuh) kegiatan dan 15 subkegiatan.

   Rata-rata capaian kinerja kegiatan adalah 57,32 % dengan rata-rata realisasi anggaran kegiatan 40,17 %. Rata-rata capaian kinerja program adalah 54,26 % dengan realisasi anggaran sebesar 24,57 %.
2. Sasaran Strategis Meningkatnya kemampuan mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana dalam rangka pengurangan risiko bencana, target kinerja 10 %. Sasaran ini didukung oleh Program Penanggulangan bencana, kegiatan Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, Subkegiatan Pelatihan Pencegahan dan mitigasi bencana.

   Capaian kinerja kegiatan adalah 0 % dengan 5%. Kegiatan pelatihan sampai dengan saat ini belum dilaksanakan sedangkan anggaran yang terpakai untuk pelaksanaan administrasi, kegiatan assesmen dan pengambilan data.
3. Sasaran Strategis Meningkatnya pelayanan penanganan darurat bencana yang lebih responsive dengan indikator Persentase jumlah dokumen yang disusun, target kinerja 100 %. Sasaran ini didukung oleh Program Penanggulangan bencana, kegiatan Pelayanan penyelamatan daan evakuasi korban bencana, Subkegiatan penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

   Capaian kinerja kegiatan adalah 58 % dengan realisasi anggaran 10 %. Jumlah bantuan paket logistik dasar/darurat yang disalurkan sampai dengan akhir semester 1 adalah 58 paket dari target 100 paket logistic.
4. Sasaran Strategis Meningkatnya pelayanan pemulihan kondisi masyarakat serta sarana dan prasarana pasca bencana dengan indikator persentase jumlah dokumen yang disusun, target kinrja 100%. Capaian kinerj kegiatan 100 % dengan realisasi anggaran sebesar 46%.

2.2.2. Capaian IKK BPBD Kabupaten Takalar

1. Indikator jumlah masyarakat yang mendapatkan informasi rawan bencana untuk pengurangan resiko bencana. Target kinerja pada Tahun 2024 sebanyak 200 (dua ratus) orang dan realisasi sebanyak 616 (enam ratus enam belas) orang peserta sosialisasi tatap muka. Hal ini karena adanya partisipati aktif BPBD sebagai narasumber pada kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan lembaga lainnya seperti Pemerintah Desa dan KKN Tematik Unhas Makassar.
2. Indikator Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan. Target kinerja pada tahun 2024 sebanyak 100 (seratus) orang dan realisasi sebanyak 160 (seratus enam puluh)orang yang mengikuti pelatihan. Hal ini karena adanya partisipati aktif BPBD sebagai narasumber sekaligus sebagai fasilitator pelaksanaan simulasi pada kegiatan kegiatan pelatihan yang dilaksanakan lembaga lainnya seperti Pemerintah Desa dan KKN Tematik Unhas Makassar.
3. Indikator jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten melalui JITU PASNA dan R3P. Target kinerja pada tahun 2024 sebanyak 1 (satu) dokumen Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna) dan telah di Upload pada e-Proposal Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi PascaBencana (R3P), saat ini pada tahap verifikasi fisik oelh BNPB RI.
4. Indikator jumlah logistik dasar/darurat yang didistribusikan kepada korban bencana. Target kinerja sebanyak 100 (seratus) paket logistic dasar/darurat yang disalurkan bencana dan realisasi sampai dengan triwulaan II Tahun 2024 sebanyak 56 (lima puluh enam) paket. Paket logistic dasar/darurat yang disalurkan berasal dari bantuan BPBD Provinsi Sulawesi selatan dan BNPB RI.
5. Indikator Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi. Sampai dengan dengan triwulan II Tahun 2024, sebanyak 5 (lima) korban ynag harus dicari, ditolong dan dievakuasi. Dari jumlah tersebut hanya 4 (empat) orang yang berhasil ditemukan dan dievakuasi, 2 (dua) orang dalam keadaan hidup /selamat dan 2 (dua) orang lainnya dalam keadaan meninggal dunia.

2.2.3 Capaian SPM BPBD Kabupaten Takalar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), BPBD menyelenggarakan SPM urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan penanggulangan Bencana, sebagai berikut :

1. Pelayanan informasi rawan bencana, dengan indikator Persentase warga negara yang tinggal di kawasan rawan bencana yang mendapatkan informasi rawan bencana, target kinerja 10%. Sampai dengan saat ini belum ada kegiatan sosialisasi tatap muka yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Takalar, akan tetapi BPBD aktif memberikan sosialisasi tatap muka sebagai narasumber pada kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh instansi atau lembaga lain. Sampai dengan triwulan I Tahun 2024 BPBD telah menjadi narasumber sosialisasi pada 10 kegiatan dengan jumlah peserta 616 orang
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dengan indikator Persentase warga negara pada daerah rawan bencana yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, target kinerja 10 %. Sampai dengan semester I Tahun 2024 BPBD Kabupaten Takalar belum menlakanakan kegiatan mandiri dalam rangka pemenuhan SPM ini, akan tetapi Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana tetap dilaksanakan dengan menjadi Narasumber pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KKNT Unhas Makassar. Selama semester I Tahun 2024, BPBD Kabupaten Takalar telah menjadi Narasumber sebanyak 7 (tujuh) kali dengan total jumlah peserta 160 orang.
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan indikator Persentase warga negara korban bencana yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, target kinerja 100 % yaitu seluruh korban bencana yang harus dicari, ditolong dan dievakuasi dapat ditolong atau ditemukan. Selama semester I Tahun 2024 ada 5 (lima) orang korban bencana yang hilang sehinggamengharuskan dilakukan pencarian dan evakuasi bersama potensi SAR lainnya seperti Basarnas dan kepolisian. Dari lima korban tersebut dapat dirinci sebagai berikut :
    - Sebanyak 2 (dua) orang ditemukan dalam keadaan hidup; yaitu Muis Dg. Murni (nelayan hilang) pada tanggal 2 Januari 2024 dan ditemukan di perairan Puntuondo Dusun Laikang dan Dg. Nai

(warga Desa Moncongkomba terseret arus sungai) pada tanggal 20 Januari 2024 dan ditemukan/dievakuasi di Lingkungan Pangkaje'ne Kelurahan Pattene

- Sebanyak 2 (dua) orang ditemukan/dievakuasi dalam keadaan meninggl dunia, yaitu Ilham Dg Lau yang hilang pada tanggal 9 Januari 2024 dan ditemukan/dievakuasi di Sungai Batu Nipa dan Ramli (Nelayan hilang) ditemukan/dievakuasi di perairan Desa Boddia kecamatan galesong pada 21 Maret 2024.
- Sebanyak 1 (satu) orang yaitu Tallasa Dg. Nassa, nelayan di Dusun Lamangkia Desa Topejawa Kecamatan Marbo yang hilang pada saat melaut tanggal 3 Januari 2024.

2.2.4 Capaian TPB/SDGs BPBD Kabupaten Takalar

Kinerja pelayanan BPBD Kabupaten Takalar juga sangat berdampak terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) khususnya dalam upaya pengurangan resiko bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana serta penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) adalah 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan sebagai agenda dunia pembangunan untuk keselamatan dunia dan planet bumi. Salah satu urusan yang sangat pending dalam SDGs 2030 adalah urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan penanggulangan bencana.

Kinerja pelayanan BPBD berdampak untuk pemenuhan target SDGs dapat diuraaikaan sebagai beriikut :

- Jumlah orang terluka akibat bencana sebanyak 2 (dua) orang yaitu Muis Dg. Murni dan Dg. Nai
- Jumlah orang meninggal akibat bencana sebanyak 2 (dua) orang yaitu Ilham Dg Lau dan Ramli
- Jumlah orang hilang akibat bencana sebanyak 1 (satu) orang .

Capaian kinerja pelayanan BPBD Kabupaten Takalar pada Semester I Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Takalar

Sampai dengan semester I Tahun 2024

No	Indikator	IKU	IKK	SPM	TPB	Target Renstra				Realisasi		Proyeksi	
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*8*	*9*	*10*		*12*		*13*	*14*
1	Persentase warga negara yang tinggal di kawasan rawan bencana yang mendapatkan informasi rawan bencana			√		200	200	200	200	815 org	0,002 %	10%	200
2	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan			√		100	100	100	100	505 org	0,0005 %	10%	10%
3	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			√		100%	100%	100%	100%	40 org	80%	100%	100%
4	Jumlah masyarakat yang mendapatkan informasi rawan bencana untuk pengurangan resiko bencana		√			200	200	200	200	815	616	200	200
5	Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan		√			100	100	100	100	100	160	100	100
6	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten melalui JITU PASNA dan R3P		√			1	1	1	1	1	1	1	1
7	Jumlah logistik dasar/darurat yang didistribusikan kepada korban bencana		√			100	100	100	100	696	56	100	100
8	Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi		√			PM	PM	PM	PM	40	4	PM	PM

9	Persentase warga negara pada daerah rawan bencana yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	√				200	200	200	200	815	0	200	200
10	Persentase warga negara pada daerah rawan bencana yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	√				100	100	100	100	505	0	100	100
11	Persentase warga negara memperoleh layanan penyelamatan, pertolongan dan evakuasi korban bencana	√				PM	PM	PM	PM	100%	80%	PM	PM
12	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten melalui JITU PASNA dan R3P	√				1	1	1	2	1	1	1	1
13	Indeks Reformasi Birokrasi BPBD	√				B	B	BB	BB	B	B	B	BB
14	Jumlah korban meninggal akibat bencana per 100.000 orang.				√	PM	PM	PM	PM	3	2	PM	PM
15	Jumlah korban hilang akibat bencana per 100.000 orang				√	PM	PM	PM	PM	0	1	PM	PM
16	Jumlah korban terluka akibat bencana per 100.000 orang				√	PM	PM	PM	PM	0	2	PM	PM
17	Jumlah korban mengungsi akibat bencana per 100.000 orang				√	PM	PM	PM	PM	0	0	PM	PM
18	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah				√	4	4	4	4	0	0	4	4
19	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)				√	4	4	4	4	0	1	4	4
Sumber : Sekretariat BPBD Kabupaten Takalar													

2.3. Hambatan, Upaya Pencapaian dan Rekomendasi Pelaksanaan Renja BPBD Kab. Takalar Tahun 2024

2.3.1. Hambatan dalam Pelaksanaan Renja BPBD Kabupaten Takalar Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Takalar, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Takalar serta kajian terhadap pencapaian kinerja Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Takalar Semester I Tahun 2024, serta analisis terhadap tantangan dan peluang pengembangan pelayanan, maka dapat ditentukan isu-isu strategis dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang harus menjadi perhatian dalam penyusunan Renja dan diharapkan dapat diselesaikan dalam Renja BPBD Kabupaten Takalar Tahun 2024, yaitu :

1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan budaya sadar bencana;
2. Rendahnya Kemampuan mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana;
3. Rendahnya kemampuan dan minimnya peraatn untuk penyelamatan, pertolongan dan evakuasi korban bencana;
4. Jumlah dan kualitas peralatan untuk Pemulihan sosial ekonomi masyarakat serta rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana pasca bencana yang sangat terbatas,
5. Peralatn kerja yang kurang memadai dari segi jumlah dan kualitas;
6. Rendahnya kemampuan SDM Aparatur;
7. Anggaran yang kurang memadai.

2.3.2. Upaya dalam Pencapaian Pelaksanaan Renja BPBD Kabupaten Takalar Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II

Dengan adanya beberapa permasalahaan yang dihadapi berbagai upaya telah dilakukukan sebagai upaya dalam pencapaian pelaksanaan Renja BPBD Kabupaten Takalar Tahun 2024, diantaranya :

1. Mengoptimalkan penggunaan dana desa untuk pelaksanaan sosialisasi, sosialisasi pada penerimaan siswa baru di sekolah-sekolah serta sosialisasi dapat dilakukan lewat berbagai media termasuk media sosial dan papan informasi rawan bencana
2. Koordinasi dengan Pemerintah Desa untuk mengadakan pelatihan mitigasi bencana dengan menggunakan Dana Desa sehingga banyak relawan bencana pada tingkat desa/kelurahan yang sudah memahami dasar-dasar mitigasi untuk pencegahan dan kesiapsiagaan
3. Memaksimalkan peran anggota TRC-PB sebagai petugas bencana serta koordinasi yang baik dengan seluruh potensi SAR (Basarnas, SAR Unhas, SAR UNM, TNI, Polri, PMI, dll)
4. Koordinasi yang baik dengan BPBD Provinsi sehingga BPBD Kabupaten Takalar selalu mendapatkan bantuan logistik dasar/darurat
5. Koordinasi yang baik dengan instansi terkait (PU, BKAD) serta memaksimalkan SDM Aparatur yang ada untuk penyusunan Jitupasna dan R3P
6. Penganggaran untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
7. Memaksimalkan kinerja Aparatur yang tersedia

2.3.3. Rekomendasi Pelaksanaan Renja BPBD Kabupaten Takalar Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II

Berdasarkan uraian di atas terkait faktor penghambat pencapaian kinerja, serta upaya dalam pencapaian pelaksanaan Renja BPBD Kabupaten Takalar Tahun 2024, maka BPBD Kabupaten Takalar menyampaikan Rekomendasi untuk pelaksanaan Renja sebagai berikut:

Meningkatkan komunikasi dan integrasi program dalam lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta pengendalian dan evaluasi internal yang dilakukan secara terus menerus;

1. Perlunya Peran aktif seluruh PPTK didalam mengawal pelaksanaan Program dan Kegiatan yang berjalan;

2. Peran aktif Kepala pelaksana selaku PA didalam mengawasi, mengontrol dan membuat kebijakan serta keputusan dalam pelaksanaan program dan anggaran;
3. Peran aktif Sub Bagian Perencanaan Program didalam berkoordinasi termasuk memberikan informasi, sosialisasi maupun kebijakankebijakan lainnya;
4. Peningkatan kualitas SDM aparatur serta jumlah staf yang berkompeten;
5. Peningkatan sarana dan prasarana operasional sesuai dengan kebutuhan;
6. Perlunya melakukan penyusunan Renstra BPBD yang baik, diawali dengan orientasi dan melibatkan seluruh pejabat/staf;
7. Perlunya melakukan evaluasi dan monitoring secara terus menerus dan berkelanjutan yang diiringi dengan pengelolaan data yang baik;
8. Adanya Kesesuaian Renstra dan RPJMD dalam pelaksanaan kegiatan;
9. Dalam penyusunan dokumen perencanaan tahap berikutnya harus berbasis data dan informasi yang akurat, sehingga perencanaan dan penganggaran dapat dilakukan dengan baik, efektif, dan efisien.

Untuk melihat permasalahan dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai keberhasilan dalam mencapai target Renja BPBD Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel II-4

Identifikasi Permasalahan dan Penentu Keberhasilan

BPBD KABUPATEN TAKALAR

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggara Pemerintahan Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<), Sesuai (=), Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor Faktor Penentu Keberhasilan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
BIDANG URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIMAN UMUM SERTA PERLINDUNGANMASYARAKAT				
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				
1	Persentase warga negara pada daerah rawan bencana yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Belum tercapai (<)	Keterbatasan anggaran dan sumberdaya manusia aparatur untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana	Mengoptimalkan penggunaan dana desa untuk pelaksanaan sosialisasi, sosialisasi pada penerimaan siswa baru di sekolah-sekolah serta sosialisasi dapat dilakukan lewat berbagai media termasuk media sosial dan papan informasi rawan bencana
2	Persentase warga negara pada daerah rawan bencana yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Belum tercapai (<)	Rendahnya kemampuan daerah untuk melaksanakan pelatihan mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Koordinasi dengan Pemerintah Desa untuk mengadakan pelatihan mitigasi bencana dengan menggunakan Dana Desa sehingga banyak relawan bencana pada tingkat desa/kelurahan yang sudah memahami dasar-dasar mitigasi untuk pencegahan dan kesiapsiagaan
3	Persentase warga negara memperoleh layanan penyelamatan, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Sesuai (=)	Peralatan dan keterampilan untuk pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana yang kurang memadai	Ada anggota TRC-PB sebagai petugas bencana serta koordinasi yang baik dengan seluruh potensi SAR (Basarnas, SAR Unhas, SAR UNM, TNI, Polri, PMI, dll)
4	Jumlah warga negara memperoleh layanan pemulihan sarana dan prasarana pasca bencana	Melampaui (>)	Logistik yang sangat terbatas sehingga jumlah paket kurang mencukupi untuk kebutuhan korban	Koordinasi yang baik dengan BPBD Provinsi sehingga BPBD Kabupaten Takalar selalu mendapatkan bantuan logistik dasar/darurat
4	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten	Sesuai (=)	Jumlah dan Kualitas SDM serta peralatan yang kurang memadai	Koordinasi yang baik dengan instansi terkait (PU, BKAD) serta memaksimalkan SDM Aparatur yang
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
5	Nilai Sakip Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sesuai (=)	Peralatan kerja yang kurang memadai baik jumlah maupun	Penganggaran untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
			Jumlah dan kualitas SDM yang kurang	Memaksimalkan kinerja Aparatur yang tersedia

Sumber : Sekretariat BPBD Kabupaten Takalar

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran antau implementasi dari pernyataan misi sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurung waktu tertentu jangka waktu 1 (satu) tahun Renja BPBD Kabupaten Takalar. Perumusan tujuan dimaksudkan sebagai arah perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Dalam menetapkan tujuan, perlu memperhatikan rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Takalar. Berdasarkan uraian di atas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Takalar menetapkan tujuan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan Penanggulalangan Bencana;
2. Meningatkan Tata kelola pada Badan PenanggulanganBencana Daerah

Untuk mencapai tujuan diatas, ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatya kesadaran masyarakat terhadap bencana;
2. Meningkatnya kemampuan mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana dalam rangka pengurangan risiko bencana;
3. Meningkatnya pelayanan penanganan darurat bencana yang lebih responsif;
4. Meningkatnya layanan pemulihan kondisi masyarakat serta sarana dan prasarana pasca bencana; dan
5. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja BPBD.

Tujuan dan sasaran Renja BPBD Kabupaten Takalar beserta indikator dan target kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel III-1 berikut :

TABEL III-1
Tujuan dan Sasaran Renja BPBD Kabupaten Takalar Tahun 2024

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	**Tujuan-1 : Meningkatkan pelayanan Penanggulangan Bencana**	**Indeks Pelayanan Penanggulangan Bencana**	**25.00%**
	Sasaran-1.1 : Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bencana	Persentase warga negara pada daerah rawan bencana yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	10.00%
	Sasaran-1.2 : Meningkatnya kemampuan mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana dalam rangka pengurangan risiko	Persentase warga negara pada daerah rawan bencana yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	10.00%
	Sasaran-1.3 : Meningkatnya pelayanan penanganan darurat bencana yang lebih responsif	Persentase warga negara memperoleh layanan penyelamatan, pertolongan dan evakuasi korban bencana	100.00%
	Sasaran-1.4 : Meningkatnya pelayanan pemulihan kondisi masyarakat serta sarana dan prasarana pasca bencana	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	1
2.	**Tujuan-2 : Meningatkan Tata kelola pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**Indeks Reformasi Birokrasi pada Badan Penanaggulangan Bencana Daerah**	**B**
	Sasaran-2.1 : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja BPBD	Nilai Sakip Badan Penanggulangan Bencana Daerah	B

Sumber : Sekretariat BPBD Kabupaten Takalar

3.2. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja BPBD Kabupaten Takalar Tahun 2024

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan BPBD Kabupaten Takalar disusun guna menjadi acuan dalam pelaksanaan sejumlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setelah adanya perubahan dalam rencana kerja, yang diharapkan target capaian kinerja masing-masing bidang tercapai sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Tahun 2023-2026 disusun suatu Rencana Kinerja Tahunan (Yearly Performance Plan) sebagai penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kinerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan yang baru untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan BPBD Kabupaten Takalar adalah dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar.

Dalam Perubahan Renja Tahun 2024 ini terdapat rumusan rencana program dan kegiatan BPBD Kabupaten Takalar yang terdiri atas 2 (dua) program yang didukung dengan 10 (sepuluh) kegiatan dan 18 (Delapan belas) sub kegiatan. Lokasi pelaksanaan untuk kegiatan rutin berlokasi di Kantor BPBD Kabupaten Takalar, sedangkan yang sifatnya mempunyai sasaran kelompok masyarakat berlokasi pada Kecamatan ataupun Desa/Kelurahan, dan kegiatan yang sifatnya koordinasi selain berlokasi pada Kabupaten Takalar, terdapat pula kegiatan yang berlokasi di luar daerah. Jumlah anggaran untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan Renja BPBD Kabupaten Takalar yang dimaksud bersumber dari Dana Alakosi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.016.969.351,- (Tiga milyar enam belas juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah).

Rumusan perubahan Rencana Kerja BPBD Kabupaten Takalar dapat dilihat pada tabel III-2 berikut :

TABEL III-2

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. TAKALAR

TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target Kinerja 2024			Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	8	19	20
						Badan Penanggulangan Bencana Daerah							2,217,011,962	3,018,469,251	2,934,245,267							3.786.455.354,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2,217,011,962	3,018,469,251	2,934,245,267							3.786.455.354,00	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							2,217,011,962	3,018,469,251	2,934,245,267							3.786.455.354,00	
1	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100%	1,807,011,962	2,498,469,251	2,323,895,267						100%	2.464.455.354,00	
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	100%	100%	100%	100%	100%	11,500,000	8,476,500	8,476,500			-	-	-	100%	22.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	5,000,000	2,840,000	2,840,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-	Instansi BPBD	2 Dokumen	10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3,500,000	2,995,300	2,995,300	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-	Instansi BPBD	1 Dokumen	6.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2	003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	2,641,200	2,641,200	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-	Instansi BPBD	1 Dokumen	6.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	%	100%	100%	100%	1,582,870,352	2,116,677,466	1,942,103,482			-	-	-	100%	1.430.206.354,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1120 org/bln		196 Orang/bulan	196 Orang/bulan	196 Orang/bulan	1,577,870,352	2,111,523,966	1,936,949,982	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT] Pendapatan Bagi Hasil	-	-	ASN	196 Orang/bulan	1.419.206.354,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	16	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	2,000,000	2,153,500	2,153,500	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-	Instansi BPBD	4 Laporan	11.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah	-		-		-	1,500,000	1,500,000	1,500,000			-	-	-	-	19.200.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2	005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1,500,000	1,500,000	1,500,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-	Instansi BPBD	1 Laporan	19.200.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	60,000,000	62,390,900	62,390,900			-	-	-	100%	215.121.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.1	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	10,000,000	10,062,700	10,062,700	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-	Instansi BPBD	4 Paket	60.921.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.1	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3,000,000	3,070,700	3,070,700	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-	Instansi BPBD	3 Paket	6.200.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.1	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	80 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	47,000,000	49,257,500	49,257,500	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-	ASN dan Non ASN	100 Laporan	148.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	100%	100%	100%	100%	100%	20,000,000	19,139,000	19,139,000			-	-	-	100%	200,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.1	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	0	4 Unit	4 Unit	4 Unit	20,000,000	19,139,000	19,139,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-	Instansi BPBD	4 Unit	200,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	87,641,610	245,445,385	245,445,385			-	-	-	100%	468,268,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.1	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laoran	12 Laporan	12 Laoran	12 Laporan	45,641,610	52,245,385	52,245,385	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Otonomi Khusus [BLOCK GRANT]	-	-	Instansi BPBD	12 Laporan	255,868,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.1	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	42,000,000	193,200,000	193,200,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-	Non ASN	12 Laporan	212,400,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jumlah barang milik daerah yang dipelihara	100%	100%	100%	100%	100%	45,000,000	46,340,000	46,340,000			-	-	-	100%	109,660,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.1	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	4 Unlt	4 Unlt	4 Unlt	4 Unlt	5,000,000	5,510,000	5,510,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-	Instansi BPBD	4 Unlt	15,360,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.1	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	35,000,000	36,770,000	36,770,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-	Instansi BPBD	6 Unit	84,620,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.1	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 Unit	4 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	5,000,000	4,060,000	4,060,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-	Kantor BPBD	6 Unit	9,680,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Pelayanan Penanggulangan Bencana			-		-	410,000,000	520,000,000	610,350,000						-	1,922,000,000	
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga negara yang mendapatkkan layaan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	100%	100%	250,000,000	360,000,000	26,644,600			-	-	-	100%	950,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2	016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana			0.00 Kawasan	0.00 Kawasan	0.00 Kawasan	250,000,000	360,000,000	26,644,600	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah	-	-	Masyarakat dan Aparatur	0.00 Kawasan	950,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga negara korban bencana yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%	150,000,000	150,000,000	15,355,400			-	-	-	100%	186,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2	009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	400 Paket	100 Paket	50 Orang	50 Orang	50 Orang	150,000,000	150,000,000	15,355,400	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Daerah	-	-	Korban Bencana	50 Orang	186,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Jumlah dokumen penunjang penyelenggaraan penanggulangan bencana yang tersusun	100%	100%	100%	100%	100%	10,000,000	10,000,000	568,350,000			-	1 Dokumen	-	100%	786,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2	010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	568,350,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-	Korban Bencana	1 Dokumen	786,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
											JUMLAH	**2,217,011,962**	**3,018,469,251**	**2,934,245,267**							**4,405,655,354**	

PENUTUP

Dokumen Perubahan Renja BPBD Kabupaten Takalar Tahun 2024 ini menjadi instrumen utama bagi BPBD Kabupaten Takalar dalam meningkatkan kinerja. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja BPBD Kabupaten Takalar tahun 2024 akan ditentukan oleh koordinasi dan sinergitas antara BPBD dengan instansi lainnya serta adanya pengendalian dan evaluasi yang cermat dan akurat. Oleh sebab itu, BPBD Kabupaten Takalar harus melakukan langkah-langkah penyempurnaan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Berdasarkan tugas dan kewenangan, maka dengan Perubahan Renja BPBD Kabupaten Takalar Tahun 2024 diharapkan untuk :

1. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan seluruh program/kegiatan pada BPBD Kabupaten Takalar;
2. Menciptakan kepastian arah kebijakan program dan kegitan prioritas;
3. Menjadi acuan dalam menyusun Perubahan RKA BPBD Kabupaten Takalar

Dokumen Perubahan Renja BPBD Kabupaten Takalar Tahun 2024 ini diharapkan akan menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program dan kegiatan pada BPBD Kabupaten Takalar sehingga seluruh program dan kegiatan akan dapat dicapai secara terukur, terarah, efektif dan efisien sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Takalar, Agustus 2024

Kepala Pelaksana
BPBD Kabupaten Takalar,

NURIKSAN NURDIN, SE., M.Si.
Pangkat : Pembina
NIP : 197001132005021002

LAMPIRAN

RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) TAHUN 2024

KABUPATEN

PERANGKAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Kinerja 2024			Pagu Indikatif (Rp)			Keterangan
						Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan	Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	
1	2					3		4		8		9	10	11	12	20
						Badan Penanggulangan Bencana Daerah							2,217,011,962	3,018,469,251	2,375,895,267	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2,217,011,962	3,018,469,251	2,375,895,267	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							2,217,011,962	3,018,469,251	2,375,895,267	
1	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100%	100%	100%	1,807,011,962	2,498,469,251	2,323,895,267	
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	Persentase jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	100%	100%	100%	11,500,000	8,476,500	8,476,500	
	1	05	01	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	5,000,000	2,840,000	2,840,000	
	1	05	01	2.01	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3,500,000	2,995,300	2,995,300	
	1	05	01	2.01	003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	2,641,200	2,641,200	
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	1,582,870,352	2,116,677,466	1,942,103,482	
	1	05	01	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	196 Orang/bulan	196 Orang/bulan	196 Orang/bulan	1,577,870,352	2,111,523,966	1,936,949,982	
	1	05	01	2.02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	2,000,000	2,153,500	2,153,500	
	1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1,500,000	1,500,000	1,500,000	
	1	05	01	2.03	005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1,500,000	1,500,000	1,500,000	
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	60,000,000	62,390,900	62,390,900	
	1	05	01	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	10,000,000	10,062,700	10,062,700	
	1	05	01	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3,000,000	3,070,700	3,070,700	
	1	05	01	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	47,000,000	49,257,500	49,257,500	

	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	Persentase Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	100%	100%	100%	20,000,000	19,139,000	19,139,000	
	1	05	01	2.07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	4 Unit	20,000,000	19,139,000	19,139,000	
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	87,641,610	245,445,385	245,445,385	
	1	05	01	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laoran	12 Laporan	45,641,610	52,245,385	52,245,385	
	1	05	01	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	42,000,000	193,200,000	193,200,000	
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Persentase jumlah barang milik daerah yang dipelihara	100%	100%	100%	45,000,000	46,340,000	46,340,000	
	1	05	01	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unlt	4 Unlt	4 Unlt	5,000,000	5,510,000	5,510,000	
	1	05	01	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	6 Unit	35,000,000	36,770,000	36,770,000	
	1	05	01	2.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	6 Unit	5,000,000	4,060,000	4,060,000	
2	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Pelayanan Penanggulangan Bencana	Indeks Pelayanan Penanggulangan Bencana	-		-	410,000,000	520,000,000	52,000,000	
	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga negara yang mendapatkkan layaan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase warga negara yang mendapatkkan layaan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	250,000,000	360,000,000	26,644,600	
	1	05	03	2.02	016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	0.00 Kawasan	0.00 Kawasan	0.00 Kawasan	250,000,000	360,000,000	26,644,600	
	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga negara korban bencana yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase warga negara korban bencana yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	150,000,000	150,000,000	15,355,400	
	1	05	03	2.03	009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	50 Orang	50 Orang	50 Orang	150,000,000	150,000,000	15,355,400	
	1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Jumlah dokumen penunjang penyelenggaraan penanggulangan bencana yang	Persentase Jumlah dokumen penunjang penyelenggaraan penanggulangan bencana yang	100%	100%	100%	10,000,000	10,000,000	10,000,000	
	1	05	03	2.04	010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	Jumlah penyelesaian dokumen pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	10,000,000	
												JUMLAH	**2.215.511.962,00**	**3.016.969.351,00**	**2.374.395.367,00**	

PERUBAHAN RENJA

TAHUN 2024

DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN TAKALAR

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat Taufik dan hidayah-Nya, Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024 telah selesai kami susun. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Takalar Tahun 2024 ini merupakan Hasil Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Triwulan I dan II Tahun 2024 dan sebagai panduan pelaksanaan anggaran, program, dan kegiatan perubahan Tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Takalar Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 untuk antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis.

Akhirnya tak lupa Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung, sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Takalar Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Takalar,
Kepala Dinas

Ir. H. SUKWANSYAH, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP:19661231 19903 1 025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....

DAFTAR ISI ..... **I**

DAFTAR TABEL ..... **III**

BAB I PENDAHULUAN..... **I-1**

1.1 LATAR BELAKANG.....I-1
1.2 LANDASAN HUKUM.....I-2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....I-5
1.3.1 Maksud..... *I-5*
1.3.2 Tujuan..... *I-5*
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN I-5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN 2023 .....**II-1**

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TRIWULAN II TAHUN 2023 DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN..... II-1
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN II-16
2.3 ISU-ISU TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN..... **ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**

BAB III KONSISTENSI PELAKSANAAN PROGRAM RENSTRA DAN KINERJA KEUANGAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN ..... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

BAB IV CAPAIAN RENJA TAHUN 2023 ..ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

4.1 CAPAIAN IKU/IKK PERANGKAT DAERAH ..... **ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**
4.2 CAPAIAN SPM PERANGKAT DAERAH ..... **ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**
4.3 CAPAIAN SDG'S PERANGKAT DAERAH... **ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**
4.4 CAPAIAN NSPK PERANGKAT DAERAH... **ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**
4.5 DUKUNGAN IKU /IKK PERANGKAT DAERAH TERHADAP PEMBANGUNAN DAERAH ..... **ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**

4.6 KENDALA DALAM CAPAIAN KINERJA .... **ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**

BAB V PENUTUP .....ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

5.1 CATATAN PENTING..... **ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**
5.2 KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN..... **ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**
5.3 RENCANA TINDAK LANJUT ..... **ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**

DAFTAR TABEL

TABEL II-1 EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTARENJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN TAKALAR PERIODE PELAKSANAAN: S/D TRIWULAN II TAHUN 2023 II-3
TABEL II-2 CAPAIAN REALISASI KINERJA RENJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN TAKALAR TRIWULAN II TAHUN 2023..... II-1
TABEL II-3 REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2023.....II-15
TABEL II-4 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN TAKALAR..... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
TABEL II-5 IDENTIFIKASI ISU-ISU STRATEGIS DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.....**ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**
TABEL III-1 PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENSTRA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN .....**ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**
TABEL III-2 PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN .....**ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**
TABEL IV-1 CAPAIAN IKU/IKK DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN ...**ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**
TABEL IV-2 DUKUNGAN IKU/IKK DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TERHADAP PEMBANGUNAN DAERAH.....**ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, mewajibkan kepada setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan dalam Renstra PD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Dalam hal ini Perubahan Renja Perangkat Daerah (Renja PD) mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah dan merupakan dokumen secara substansial penerjemahan dari Visi, Misi dan Program perangkat daerah, sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Perubahan Renja merupakan dasar atau acuan memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun berikutnya. Selain itu, Renja merupakan alat untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi, untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Secara arti strategis dokumen Perubahan Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka dalam proses penyusunan hingga penetapan dokumen Perubahan Renja PD mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu, dalam penyusunan rancangan Perubahan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam penyusunan rancangan Perubahan RKPD. Sehingga penyusunan Perubahan Renja PD dapat dikerjakan secara paralel dengan penyusunan rancangan perubahan RKPD, dengan melihat kondisi terkini dari PD, evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD.

Penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Takalar pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu berkembang dan mengimplementasikan dalam program dan kegiatan Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Takalar.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Takalar Tahun 2024 didasarkan pada ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik IndonesianTahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42);

7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 10);

8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11 Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12 Peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Perangkat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 3);

13 Peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 5);

14 Peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2023 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 20);

15 Peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Takalar (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 32);

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Takalar memuat program dan kegiatan pembangunan daerah, sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2024, dan perencanaan program/ kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

1.3.2 Tujuan

1. Teridentifikasinya program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan selama Tahun 2024;
2. Tersusun dokumen perencanaan yang merupakan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan periode satu tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kab. Takalar Tahun Anggaran 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, mencakup Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan Perubahan Renja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Tahun Anggaran 2024;

BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai Triwulan II Tahun 2024, memuat tentang Evaluasi pelaksanaan renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II, analisis kinerja pelayanan

perngkat daerah serta hambatan,upaya pencapaian dan rekomendasi pelaksanaan renja Perangkat Daerah Tahun 2024

BAB III : Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah memuat Tujuan dan Sasaran, Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 serta Rencana Program dan kegiatan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

BAB IV : Penutup, mencakup tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2024

Pelaksanaan evaluasi ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Takalar dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan, serta mengetahui hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Berikut ini akan diuraikan mengenai kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Takalar sampai triwulan II Tahun Anggaran 2024 sehingga dapat di ketahui sampai sejauh mana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Takalar telah melaksanakan program dan kegiatannya

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan sampai dengan triwulan II Tahun 2024

Berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Takalar Tahun 2024 disusun 5 (Lima) Program , 12 (Dua Belas) Kegiatan dan 28 (Dua Puluh Delapan) Sub Kegiatan. Pagu Anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 7.627.665.744- (Tujuh Milyar Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh ratus Empat Puluh Empat Rupiah).

Adapun rincian Program, serta jumlah anggaran masing-masing adalah sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota dengan Anggaran sebesar Rp. 3.816.921.944,- untuk membiayai 5 Kegiatan yang terdiri dari 20 Sub Kegiatan
b. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan Anggaran sebesar Rp. 1.086.979.800,- untuk membiayai 3 Kegiatan yang terdiri dari 4 Sub Kegiatan

c. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan Anggaran sebesar Rp. 2.141.784.000,- untuk membiayai 1 Kegiatan yang terdiri dari 1 Sub Kegiatan
d. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan Anggaran sebesar Rp. 561.980.000,- untuk membiayai 2 Kegiatan yang terdiri dari 2 Sub Kegiatan
e. Program Perizinan Usaha Pertanian dengan Anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- untuk membiayai 2 Kegiatan yang terdiri dari 2 Sub Kegiatan

Evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah Triwulan II dapat dilihat pada tabel II.1 di bawah ini :

Tabel II-1

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/KotaRenja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Takalar Periode Pelaksanaan: s/d Triwulan II Tahun 2024

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD:

S1.1 Persentase Peningkatan populasi dan Produks 20%

S1.2 Persentase Penurunan kasus Penyakit Hewan 85%

S2.1 Nilai Sakip Dinas Peternakan Dan Kesehatan H BB

No	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Per Bulan			Realisasi Kinerja Pada Triwulan	Realisasi Kinerja Per Bulan						Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun (5)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
																Januari		Februari	Maret	I	April		Mei		Juni	II													
1	2	3					4	5	6			7		8		9		10	11	12	13		14		15	16		25		26 = 25/8 x 100%		27 = 7 + 25		28 = 27/6 x 100%		29	30
		03					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				31,649,992,070		7,226,070,497		7,627,665,744		148,856,540		201,862,554	370,195,121	720,914,215	477,961,888		287,457,323		526,784,263	1,292,203,474		2,013,117,689				9,200,188,186				
		03	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN				31,649,992,070		7,226,070,497		7,627,665,744		148,856,540		201,862,554	370,195,121	720,914,215	477,961,888		287,457,323		526,784,263	1,292,203,474		2,013,117,689	24.59%	26.39%		9,200,188,186				
1		03	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang perangkat daerah	100.00%	Persen	15,138,118,376	0.00%	3,077,762,965	100%	3,816,921,944	1%	148,856,540	1%	148,862,554	27% 328,579,221	28%	626,298,315	7%	433,908,988	6%	243,269,723	7%	433,193,063	26%	1,110,371,774	48%	1,736,670,089	47.93%	45.50%	34.53%	4,814,433,054	34.53%	31.80%	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEAWAN	
		3	27	01	2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	100%	Persen	67,366,800	25.00%	8,391,000	100%	37,666,400	0%	-	0%	-	71% 1,455,600	71.43%	1,455,600	0%	3,481,600	0%	736,000	0%	803,500	0.00%	5,021,100	71.43%	6,476,700	71.43%	17.19%	42.86%	14,867,700	42.86%	22.07%		
	Meningkatnya tata kelola kinerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	Dokumen	9,931,800	2	2,131,800	2	14,789,600	-	-	-	-	1 652,900	1	652,900	-	670,000	-	471,900	-	600,000	-	1,741,900	1	2,394,800	50%	16%	3	4,526,600	38%	46%		
		3	27	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	Dokumen	12,818,000	1	2,118,000	1	2,181,000	-	-	-	-	1 160,900	1	160,900	-	392,600	-	78,000	-	80,500	-	551,100	1	712,000	100%	33%	2	2,830,000	50%	22%		
		3	27	01	2.01	03	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	Dokumen	11,504,300	1	2,132,500	1	12,951,000	-	-	-	-	1 485,800	1	485,800	-	2,106,000	-	-	-	-	-	2,106,000	1	2,591,800	100%	20%	2	4,724,300	50%	41%		

| | | |

		3	27	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah	100%	Persen	22,524,200	25.00%	1,524,200	100.00%	9,338,600	0.00%	-	0.00%	-	33.33%	158,000	33.33%	158,000	0.00%	911,800	16.67%	1,311,700	0.00%	245,500	16.67%	2,469,000	50.00%	2,627,000	50.00%	28.13%	37.50%	4,151,200	37.50%	18.43%	SEKRETARIAT	
	Meningkatnya tata kelola kinerja Dinas Peternakan Dan	3	27	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4	Dokumen	5,611,800	1	701,800	1	5,019,500	-	-	-	-	-	-	-	-	250,000	1	1,240,000	-	-	1	1,490,000	1.00	1,490,000	100.00%	29.68%	2	2,191,800	50%	39%		
		3	27	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4	Dokumen	8,700,000	1	510,000	1	2,314,300	-	-	-	1	126,000	1	126,000	-	238,800	-	-	-	-	-	238,800	1.00	364,800	100.00%	15.76%	2	874,800	50%	10%		
		3	27	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	16	Dokumen	8,212,400	4	312,400	4	2,004,800	-	-	-	1	32,000	1	32,000	-	423,000	-	71,700	-	245,500	-	740,200	1.00	772,200	25.00%	38.52%	5	1,084,600	31%	13%		
								Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																									75.00%	27.99%							
								Predikat Kinerja																									C	SR							
		3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100%	Persen	602,071,000	22.20%	88,154,200	100%	138,127,400	0%	-	0%	-	3%	3,187,700	2.91%	3,187,700	3%	2,700,000	0%	-	8%	8,427,200	10.68%	11,127,200	13.59%	14,314,900	13.59%	10.36%	25.22%	102,469,100	25.22%	17.02%	SEKRETARIAT	
	Meningkatnya tata kelola kinerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	28	Jenis	20,024,600	4	650,800	4	1,025,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	4	650,800	14%	3%		
		3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48	Unit	237,955,300	5	52,913,600	5	78,980,400	-	-	-	1	937,700	1	937,700	-	-	-	-	-	544,000	-	544,000	1.00	1,481,700	20.00%	1.88%	6	54,395,300	13%	23%		
		3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16	Paket	21,071,100	1	3,705,800	1	343,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	343,200	-	343,200	-	343,200	0.00%	100.00%	1	4,049,000	6%	19%		
		3	27	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Eksemplar	29,600,000	3	300,000	3	2,700,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	3	300,000	25%	1%		
		27	01	2.06		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	360	Kali	293,420,000	90	30,584,000	90	55,078,000	-	-	-	2	2,250,000	2	2,250,000	3	2,700,000	-	-	8	7,540,000	11	10,240,000	13.00	12,490,000	14.44%	22.68%	103	43,074,000	29%	15%		
								Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																									6.89%	24.91%							
								Predikat Kinerja																									SR	SR							
		3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemeritah daerah	100.00%	Persen	396,460,800	23.73%	45,176,140	100.00%	114,840,200	0.00%	-	0.00%	-	18.64%	5,163,750	18.64%	5,163,750	13.56%	15,696,850	3.39%	4,297,450	15.25%	26,304,850	32.20%	46,299,150	50.85%	51,462,900	50.85%	44.81%	36.44%	96,639,040	36.44%	24.38%		
	Meningkatnya tata kelola kinerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah meteran/ rekening listrik yang dibayar (unit bulan)	48	Unit Bulan	116,830,000	12	22,766,800	12	29,207,500	-	-	-	3	2,509,000	3	2,509,000	-	-	-	2,508,500	-	6,005,500	-	8,514,000	3.00	11,023,000	25.00%	37.74%	15	33,789,800	31%	29%		
								jumlah meteran/ rekening air yang dibayar (unit bulan)	48	Unit Bulan	12,370,800	12	2,208,300	12	3,092,700	-	-	-	3	263,900	3	263,900	-	66,400	-	58,500	-	68,900	-	193,800	3.00	457,700	25.00%	14.80%	15	2,666,000	31%	22%		
								jumlah meteran/ rekening wifi yang dibayar (unit bulan)	48	Unit Bulan	17,760,000	12	3,801,040	12	4,440,000	-	-	-	3	990,850	3	990,850	-	330,450	-	330,450	-	330,450	-	991,350	3.00	1,982,200	25.00%	44.64%	15	5,783,240	31%	33%		
		3	27	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Jenis		-	-	3	1,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	-	-	0%	0%		
		3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	80	Orang	249,500,000.00	20	16,400,000	20	76,800,000	-	-	-	2	1,400,000	2	1,400,000	8	15,300,000	2	1,400,000	9	19,900,000	19	36,600,000	21.00	38,000,000	105.00%	49.48%	41	54,400,000	51%	22%		
								Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																									36.00%	29.33%							
								Predikat Kinerja																									SR	SR							
								Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)																									46.86%	24.16%							
								Predikat Kinerja Kegiatan																									SR	SR							

Faktor pendorong pencapaian kinerja: tepat waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran karena harus sesuai dengan kalender perencanaan

Faktor penghambat: realisasi anggaran sesuai dengan anggaran kas per bulan

Faktor penghambat:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):

| | | |

| | | |

Capaian realisasi kinerja Pelaksanaan Renja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Takalar sampai dengan triwulan II Tahun 2024 Sebagai berikut:

I. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** dengan indikator kinerja Persentase pemenuhan urusan penunjang perangkat daerah dengan target kinerja 100% dan anggaran RP. 3.816.921.944 untuk membiayai 5 Kegiatan dan 20 Sub Kegiatan . Capaian kinerja program sampai dengan Triwulan II adalah 48% dan capaian anggaran sebesar Rp 1.736.670.089 atau 45,50%. Rata-rata capaian kinerja program 46.86% predikat Sangat Rendah (SR)

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah indikator kinerja Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu dengan target kinerja 100% dan anggaran Rp. 37.666.400. Capaian realisasi kinerja kegiatan sampai dengan Triwulan II adalah 71,43% dan realisasi anggaran Rp. 6.476.700 atau 17,19%. Rata-rata Capaian kegiatan 75% predikat Sedang (S).

a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah indikator kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan target kinerja 2 Dokumen dan anggaran Rp.,- Capaian realisasi kinerja sub kegiatan sampai dengan Triwulan II adalah 100% dan realisasi anggaran Rp.2.131.800 atau 96%

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD indikator kinerja Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan target kinerja 1 Dokumen dan anggaran Rp. 2.181.000.

   Capaian realisasi kinerja sub kegiatan sampai dengan Triwulan II adalah 100% dan realisasi anggaran Rp. 712.000,- atau 33%.

c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD indikator kinerja Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan

Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan target kinerja 1 Dokumen dan anggaran Rp. 12.951.000. Capaian realisasi kinerja kegiatan sampai dengan Triwulan II adalah 100% dan realisasi anggaran Rp. 2.591.800 atau 20%.

d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD indikator kinerja Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dengan target kinerja 1 Dokumen dan anggaran Rp. 793.000. Capaian realisasi kinerja kegiatan sampai dengan Triwulan II adalah 100% dan realisasi anggaran Rp. 166.000,- atau 21%.
e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD indikator kinerja Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dengan target kinerja 1 Dokumen dan anggaran Rp. 506.200. Capaian realisasi kinerja sub kegiatan sampai dengan Triwulan II adalah 0% dan realisasi anggaran Rp. 0, dikarenakan kegiatan dilaksanakan pada semester berikutnya.
f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD indikator kinerja Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan target kinerja 1Dokumen dan anggaran Rp. 6.445.600. Capaian realisasi kinerja sub kegiatan sampai dengan Triwulan II adalah 100% dan realisasi anggaran Rp. 612.100, atau 9%.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah indikator kinerja Presentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan target kinerja 100% dan anggaran Rp. 3.516.949.344 . Capaian realisasi kinerja kegiatan sampai dengan Triwulan II adalah 53,77% dan realisasi anggaran Rp. 1.661.788.589 atau 47,25%. Rata-rata capaian kegiatan 41,43% predikat Sangat Rendah (SR) dikarenakan ada kegiatan yang belum dilaksanakan.

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN indikator kinerja Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan target kinerja 532 Orang dan anggaran Rp. 2.566.368.684 . Capaian realisasi kinerja sub kegiatan sampai dengan Triwulan II adalah 240% dan realisasi anggaran Rp. 1.276.280.111,- atau 50%

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD indikator kinerja Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan target kinerja 1 Dokumen dan anggaran Rp. 5.768.500 . Capaian realisasi kinerja kegiatan sampai dengan Triwulan II adalah 100% dan realisasi anggaran Rp. 1.127.400 atau 20%.

c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD indikator kinerja Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan target kinerja 2 Dokumen dan anggaran Rp. 1.805.000 . Capaian realisasi kinerja sub kegiatan sampai dengan Triwulan II adalah 0% dan realisasi anggaran Rp. 0.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah indikator kinerja Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah dengan target kinerja 100% dan anggaran Rp. 9.338.600 . Capaian realisasi kinerja kegiatan sampai dengan Triwulan II adalah 50% dan realisasi anggaran Rp. 2.627.000 atau 28,13%. Rata-rata capaian kinerja 75% predikat Sedang (S).

a. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD indikator kinerja Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan target kinerja 1 Laporan dan anggaran Rp. 5.019.500 . Capaian realisasi kinerja kegiatan sampai dengan Triwulan II adalah 100% dan realisasi anggaran Rp. 1.490.000 atau 29,68%

b. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD indikator kinerja Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan target kinerja 1 dokumen dan anggaran Rp. 2.314.300 . Capaian realisasi kinerja kegiatan sampai dengan Triwulan II adalah 100% dan realisasi anggaran Rp. 364.800 atau 15,76%.

c. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD indikator kinerja Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan target kinerja 4 dokumen dan anggaran Rp. 2.004.800,- . Capaian realisasi kinerja kegiatan sampai dengan Triwulan II adalah 100% dan realisasi anggaran Rp. 772,200 atau 38,52%

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah indikator Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah dengan target kinerja 100% dan anggaran Rp. 138.127.400,- . Capaian realisasi kinerja kegiatan sampai dengan Triwulan II adalah 13,59% dan realisasi anggaran Rp 14.314.900 atau 10,36% . Rata rata Capaian kegiatan 6,89% predikat Sangat Rendah (SR)

a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor indikator kinerja Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan dengan target kinerja 4 Jenis dan anggaran Rp. 1.025.800 . Capaian realisasi kinerja kegiatan sampai dengan Triwulan II adalah 0% dan realisasi anggaran Rp 0 atau 0%

b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor indikator kinerja Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dengan target kinerja 5 unit dan anggaran Rp. 78.980.400 . Capaian realisasi kinerja kegiatan sampai dengan Triwulan II adalah 100% dan realisasi anggaran Rp 1.481.700 atau 1,88%

c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan indikator kinerja Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

dengan target kinerja 1 paket dan anggaran Rp. 343.200 . Capaian realisasi kinerja kegiatan sampai dengan Triwulan II adalah 0% dan realisasi anggaran Rp 343.200, atau 100%

d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan indikator kinerja Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan dengan target kinerja 3 dokumen dan anggaran Rp. 2.700.000. Capaian realisasi kinerja kegiatan sampai dengan Triwulan II adalah 0% dan realisasi anggaran Rp. 0 atau 0%

e. Sub Kegiatan Penyediaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD indikator kinerja Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target kinerja 90 Laporan dan anggaran Rp. 55.078.000 . Capaian realisasi kinerja kegiatan sampai dengan Triwulan II adalah 13% dan realisasi anggaran Rp 12.490.000 atau 22,68%

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah indikator kinerja Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dengan target kinerja 100% dan anggaran Rp. 114.840.200. Capaian realisasi kinerja kegiatan sampai dengan Triwulan II adalah 50,85% dan realisasi anggaran Rp 51.462.900 atau 44,81%. Rata-rata capaian kegiatan 36% predikat Sangat Rendah (SR)

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik indikator kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dengan target kinerja 12 Laporan dan anggaran Rp. 29.207.500 . Capaian realisasi kinerja kegiatan sampai dengan Triwulan II adalah 3% dan realisasi anggaran Rp 1.982.200 atau 44,64%

b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor indikator kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dengan target kinerja 20 laporan dan anggaran Rp. 76.800.000 .

Capaian realisasi kinerja kegiatan sampai dengan Triwulan II adalah 21% dan realisasi anggaran Rp.38.000.000 atau 49,48%

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah indikator kinerja Persentase Pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah untuk Tahun 2024 tidak di anggarkan dikarenakan keterbatasan anggaran.

a. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya untuk Tahun 2024 tidak di anggarkan di karenakan keterbatasan anggaran.

II. **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** dengan indikator kinerja Persentase Sarana Pertanian/peternakan yang disediakan dan dikembangkan dengan target kinerja 100% dan anggaran Rp. 1.086.979.800 untuk membiayai 3 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan . Capaian kinerja program sampai dengan Triwulan II adalah 16,67% dan capaian anggaran sebesar Rp. 187.870.900, atau 17,28% . Rata-rata Capaian Program 22,22% predikat Sangat Rendah (SR)

1. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota indikator kinerja Persentase Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan Tumbuhan dan mikroorganisme yang di kelola dengan target kinerja 100% dan anggaran Rp. 105.000.000 . Capaian realisasi kinerja kegiatan sampai dengan Triwulan II adalah 50% dan capaian anggaran Rp 105.702.000 atau 100,67% . Rata-rata capaian kegiatan 66,67% predikat Sedang (S)

a. Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman indikator kinerja Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian dengan target kinerja 3 UVB dan anggaran Rp. 0 . Capaian realisasi kinerja kegiatan sampai dengan Triwulan II adalah 1% dan realisasi anggaran Rp. 1.134.000 atau 0%

2. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah

Kabupaten/Kota indikator kinerja Persentase Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan anggaran Rp. 4.999.900 . Capaian realisasi kinerja kegiatan sampai dengan Triwulan II adalah 0% dan realisasi anggaran Rp. 4.999.900 atau 100% . Rata-rata capaian kinerja 0% predikat Sangat Rendah (SR)

a. Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak indikator kinerja Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat dengan target kinerja 45.000 kartu dan anggaran Rp. 4.999.900 . Capaian realisasi kinerja kegiatan sampai dengan Triwulan II adalah 0% dan realisasi anggaran Rp. 4.999.900 atau 100%
b. Sub Kegiatan Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak indikator kinerja Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dengan target kinerja 1 Laporan dan anggaran Rp. 0 . Capaian realisasi kinerja kegiatan sampai dengan Triwulan II adalah 0% dan realisasi anggaran Rp. 0 atau 0%

3. Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain indikator kinerja Persentase Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain dengan target kinerja 100% dan anggaran Rp. 976.979.900 . Capaian realisasi kinerja kegiatan sampai dengan Triwulan II adalah 0% dan realisasi anggaran Rp 77.169.000 atau 7,90%. Rata-rata capaian kegiatan 0% karena pengadaan ternak diadakan pada triwulan IV.

a. Sub Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain indikator Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain dengan target kinerja 6.000 Ekor dan anggaran Rp. 773.179.900 . Capaian realisasi kinerja kegiatan sampai dengan Triwulan II adalah 0% dan realisasi anggaran Rp. 32.434.670 atau 5,95%

III. **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** dengan indikator kinerja Persentase prasarana Pertanian/peternakan yang disediakan dan dikembangkan dengan target kinerja 100% dan anggaran Rp. 2.141.784.000 . untuk membiayai 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan .Capaian kinerja program sampai dengan Triwulan II adalah 0% dan capaian anggaran sebesar Rp 17.733.200 atau 6,74% Rata-rata capaian kinerja program 0% karena pekerjaan baru dikerja kan pada triwulan III.

1. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian indikator kinerja Persentase prasarana pertanian/peternakan yang dibangun. dengan target kinerja 100% dan anggaran Rp. 2.141.784.000 . Capaian realisasi kinerja kegiatan sampai dengan Triwulan II adalah 0% dan realisasi anggaran Rp. 17.733.200 atau 6,74%. Predikat Sangat Rendah (SR). Rata-rata capaian kinerja kegiatan 0% karena pekerjaan baru dikerja kan pada triwulan III.

a. Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya indikator kinerja Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara dengan target kinerja 13 Unit dan anggaran Rp. 2.141.784.000 . Capaian realisasi kinerja kegiatan sampai dengan Triwulan II adalah 0% dan realisasi anggaran Rp 17.733.200 atau 6,74%.

IV. **PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** dengan indikator kinerja Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan target kinerja 100% dan anggaran Rp. 561.980.000 untuk membiayai 2 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan . Capaian kinerja program sampai dengan Triwulan II adalah 50% dan capaian anggaran sebesar Rp 40.575.600,- atau 7,22% . Rata-rata capaian Kinerja Program 50% predikat Sangat Rendah (SR)

1. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota

indikator kinerja Persentase Pengendalian ,pembebasan dan penanggulangan Kasus Penyakit Hewan Menular dengan target kinerja 100% dan anggaran Rp. 180.830.000 . Capaian realisasi kinerja kegiatan sampai dengan Triwulan II adalah 100% dan realisasi anggaran Rp. 40.575.600 atau 22,44%. Rata-rata capaian kinerja kegiatan 100% predikat Sangat Tinggi (ST)

a. Sub Kegiatan Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular indikator kinerja Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali dengan target kinerja 1 Laporan dan anggaran Rp. 180.830.000 . Capaian realisasi kinerja kegiatan sampai dengan Triwulan II adalah 100% dan realisasi anggaran Rp. 7.411.200 atau 74,11%

2. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota indikator kinerja Persentase Pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner yang di Kelola dengan target kinerja 100% dan anggaran Rp. 381.150.000 . Capaian realisasi kinerja kegiatan sampai dengan Triwulan II adalah 0% dan realisasi anggaran Rp.0 karena kegiatan DAK Non Fisik

a. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner indikator kinerja Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner dengan target kinerja 1 Laporan dan anggaran Rp. 381.150.000. Capaian realisasi kinerja kegiatan sampai dengan triwulan II adalah 0% dan realisasi anggaran Rp.0 karena kegiatan DAK Non Fisik

V. **PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN** dengan indikator kinerja Persentase perizinan usaha pertanian/peternakan yang di bina dengan target kinerja 100% dan anggaran Rp. 20.000.000. untuk membiayai 2 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan .Capaian kinerja program sampai dengan Triwulan II adalah 8,33% dan capaian anggaran sebesar Rp. 7.605.200 atau 38,03%. Rata-rata capaian kinerja program 4,17% predikat Sangat Rendah (SR)

1. Kegiatan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan indikator kinerja Persentase Persentase Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan yang diawasi dengan target kinerja 100% dan anggaran Rp. 20.000.000 . Capaian realisasi kinerja kegiatan sampai dengan Triwulan II 8,33% dan realisasi anggaran Rp. 7.605.200 atau 38,03%. Rata-rata capaian kinerja Kegiatan 4,17% predikat Sangat Rendah (SR)

a. Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan indikator kinerja Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi dengan target kinerja 12 Laporan dan anggaran Rp. 20.000.000. Capaian realisasi kinerja kegiatan sampai dengan Triwulan II 1% dan realisasi anggaran Rp. 7.605.200 atau 38,03%

Tabel II-2
Capaian Realisasi Kinerja Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Takalar Triwulan II Tahun 2024

Kode				Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Dan Anggaran Renja 2024		Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi (%)	
1				2	3	4	5		6		7	8
7				UURUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
7	07			Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan								
3.27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	3,816,921,944	60,13%	1,736,670,089	60,13	42,13
3.27	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	Persen	100	37,666,400	57,14%	6,476,700	57,14%	62,74%
3.27	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	14,789,600	2	2,394,800	50%	16%
3.27	01	201	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	2,181,000	1	712,000	100%	33%
3.27	01	201	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	12,951,000	1	2,591,800	100%	20%
3.27	01	201	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	793,000	1	166,000	100%	21%
3.27	01	201	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	506,200		-	-	-
3.27	01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	6,445,600		612,100	100%	9%
3.27	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	3,516,949,344	37,28	1,661,788,589	37,28	42,13
'3.27	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	420	2,566,368,684	240	1,276,280,111	57%	50%
					Jumlah Orang yang Menerima TPP berdasarkan beban kerja	Orang/bulan	360	943,007,160	180	384,381,078	50%	41%
					Jumlah Orang yang Menerima berdasarkan obyektif lainnya	Orang/bulan	0	-	-	-	-	-
'3.27	01	202	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	5,768,500	1	1,127,400	100%	20%
'3.27	01	202	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	2	1,805,000	-	-	-	-

3.27	01	203		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah	Persen	100	9,338,600	66,67	2,627,000	66,67	58,19%
'3.27	01	203	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	5,019,500	1	1,490,000	100%	29,68%
3.27	1	203	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	2,314,300	1	364,800	100%	15,76%
'3.27	01	203	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	2,004,800	1	772,200	25%	38,52%
3.27	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Persen	100	138,127,400	41,38	14,314,900	41,38	
'3.27	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	7	1,025,800	-	-	-	-
'3.27	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	78,980,400	1	1,481,700	20.00	1,88%
'3.27	01	206	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	343,200	-	343,200	-	100%
'3.27	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3	2,700,000	-	-	-	-
'3.27	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	90	55,078,000	13	12,490,000	14,44%	22,68%
3.27	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	114,840,200	58,33	51,462,900	58,33	54,46
'3.27	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Sumber Daya Air yang Disediakan	Laporan	12	29,207,500	3	457,700	25%	37,74%
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Listrik yang Disediakan	Laporan	12	3,092,700	3	11,023,000	25%	14,80%
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi jaringan internet/wifi	Laporan	12	4,440,000	3	1,982,200	25%	44,64%
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	3	1,300,000	-	-	0%	-
'3.27	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0rang	20	76,800,000	21	38,000,000	105%	49,48%
3.27	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	-	100%	-	100%	99,99%
'3.27	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	-	1	-	-	-

3.27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Sarana Pertanian/peternakan yang disediakan dan dikembangkan	Persen	100	1,086,979,800	21,48%	148,870,900	21,48%	21,94%
3.27	2	202		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan Tumbuhan dan mikroorganisme yang di kelola	Persen	100	105,000,000	20%	105,702,000	20%	39,42%
3.27	2	202	01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	jenis	3	-	1	1,134,000	33,33%	-
					jumlah bimtek dan sosialisasi yang dilaksanakan	kegiatan	1	105,000,000	1	104,568,000	100%	99,59%
3.27	2	205		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak	Persen	100	4,999,900	44,44%	4,999,900	44,44%	36,36%
3.27	2	205	03	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah kartu ternak besar yang diterbitkan (Kartu)	Kartu	45000	4,999,900	0	4,999,900	-	100%
3.27	2	205	05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	Jenis	1	-	0	-	-	-
					Jumlah Bimtek Yang Dilaksanakan	Kegiatan	1	-	1	-	-	-
3.27	2	206		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persen	100	976,979,900	0.00%	38,169,000	0.00%	5,94%
3.27	2	206	02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	ton	11	203,800,000	0	39,000,000	-	19,14%
3.27	2	206	03	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	ekor	6000	773,179,900	0	38,169,000	-	4,94%

3.27	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana Pertanian/peternakan yang disediakan dan dikembangkan	Persen	100	2,141,784,000	0.00%	40,395,900	0.00%	0,74%
3.27	3	201		Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian/peternakan yang dibangun.	Persen	100	2,141,784,000	0	40,395,900	0	0,74
3.27	3	202	9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	11	2,141,784,000	0	40,395,900	-	1,89%
3.27	4			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner .	Persen	100	381,150,000	50%	0	50%	4,62%
3.27	4	201		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian ,pembebasan dan penaggulangan Kasus Penyakit Hewan Menular	Persen	100	0	100%	0	100%	74,11%
3.27	4	201	2	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1	-	1	-	-	-
3.27	4	203		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner yang di kelola	Persen	100	381,150,000	100	0	-	0%
3.27	4	203	2	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	1	381,150,000	0	-	-	-
3.27	6			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase perizinan usaha pertanian/peternakan yang di bina	Persen	100	20,000,000	38,46%	7,605,200	38,46%	8,69%
3.27	6	202		Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Persentase Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan yang di bina dan diawasi pelaksanaannya.	Persen	100	0	38,46	0	38,46	9,99
3.27	6	202	1	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Dokumen	12	-	5	-	-	-
					Jumlah laporan Perjalanan Dinas dalam rangka studi tiru yang dilaksanakan	Laporan	1	-	-	-	-	-
3.27	6	203		Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Persentase Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan yang diawasi	Persen	100	20,000,000	38,46	7,605,200	38,46	5,52
3.27	6	203	2	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	Laporan	12	20,000,000	1	7,605,200	8,33%	38,03%
					Jumlah sosialisasi yang diadakan	kegiatan	0	-	0	-	-	-

Rekapitulasi Capaian Kinerja Program/Kegiatan Dan Sub Kegiatan S/D Triwulan II Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel II.3 di bawah ini :

Tabel II-3
Rekapitulasi Capaian Kinerja Program/Kegiatan Dan Sub Kegiatan S/D Triwulan II Tahun 2024

NO	Uraian	Keterangan Kinerja (K)							Rata-rata Capaian Output (%) dan Predikat Kinerja			
		Jumlah Kegiatan/Sub Kegiatan	Non APBD	Jumlah Indikator	Capaian 0%	Capaian <100%	Capaian 100%	Capaian >100%	K	RP	K	RP
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6 Kegiatan 20 Sub Kegiatan		24	4	13	7	-	46.86%	24.16%	SR	SR
2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	3 Kegiatan 4 Sub Kegiatan		6	5	1	-	-	22.22%	53.94%	SR	R
3	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1 Kegiatan 1 Sub Kegiatan		1	-	1	-	-	0.00%	1.89%	SR	SR
4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2 Kegiatan 2 Sub Kegiatan		2	1	1			50%	11.22%	SR	SR
5	Program Perizinan Usaha Pertanian	2 Kegiatan 2 Sub Kegiatan		4	-	4			4.17%	19.01%	SR	SR

SKALA PENILAIAN RATA-RATA KINERJA DAN PREDIKAT KINERJA HASIL EVALUASI RPJMD MENGGUNAKAN KRITERIA SEBAGAI BERIKUT :

1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Rendah

Adapun penjelasan dari tabel di atas adalah bahwa dari ke 5 (Lima) Program tersebut tidak ada yang memenuhi target kinerja yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/ Kota dengan capaian kinerja hanya 46.86 % disebabkan karena masih banyak kegiatan yang pelaksanaannya pada triwulan berikutnya.

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan capaian kinerja 22.22% disebabkan karena masih banyak kegiatan yang pelaksanaannya pada triwulan berikutnya.
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan capaian kinerja 1.89% disebabkan karena masih banyak kegiatan yang pelaksanaannya pada triwulan berikutnya.
4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan capaian kinerja 50% disebabkan karena masih banyak kegiatan yang pelaksanaannya pada triwulan berikutnya.
5. Program Perizinan Usaha Pertanian dengan capaian kinerja 4.17% disebabkan karena masih banyak kegiatan yang pelaksanaannya pada triwulan berikutnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang sesuai antara hasil dan harapan, yang dilakukan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dalam pelayanan untuk kepentingan masyarakat dan pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang efektif dan efisien.

Capaian kinerja pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat dilihat melalui realisasi capaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja lainnya yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis periode 2023-2026. Adapun realisasi capaian kinerja pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sampai triwulan II dapat dilihat pada tabel II-4 dibawah ini :

2.21 CAPAIAN IKU/IKK PERANGKAT DAERAH

Capaian IKU/IKK Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Sampai Dengan Triwulan II dapat dilihat pada Table II.4

Tabel II-4
Capaian IKU/IKK Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	
			TARGET	REALISASI s/d TRIWULAN II
S.1. Meningkatnya populasi dan Produksi ternak	Persentase peningkatan populasi Dan Produksi ternak	%	25%	9,8%
	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	85%	50%

Sasaran Strategis meningkatnya populasi dan Produksi ternak dengan indikator Persentase peningkatan populasi Dan Produksi ternak serta Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular terdiri dari 4 Program yaitu :

1. Program Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan 4 Kegiatan dan 4 sub kegiatan rata-rata capaian kinerja program 22.22% predikat Sangat Rendah (SR) realisasi anggaran sebesar53.94 % predikat Sangat Rendah (SR)
2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan 1 Kegiatan dan 1 sub kegiatan ,rata-rata capaian kinerja program 0% predikat Sangat Rendah (ST) realisasi anggaran sebesar 1.86% predikat Sangat Rendah (SR)
3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan 2 Kegiatan dan 2 sub kegiatan rata-rata capaian kinerja program 50% predikat Sangat Rendah (SR) realisasi anggaran sebesar 11.22% predikat Sangat Rendah (SR)

4. Program Perizinan Usaha Pertanian dengan 2 Kegiatan dan 2 sub kegiatan rata-rata capaian kinerja program 4.17% predikat Sangat Rendah (SR) realisasi anggaran sebesar 19.01% predikat Sangat Rendah (SR

2.22 CAPAIAN SPM PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standart Pelayanan Minimal yang mencakup 6 (enam) Bidang yaitu:

1. Bidang Pendidikan
2. Bidang Kesehatan
3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Bidang Sosial.

Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan bukan merupakan pengampu SPM, sehingga capaian SPM tidak disajikan pada sub bab ini.

2.23 CAPAIAN SDG's PERANGKAT DAERAH

Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan bukan merupakan pengampu SDG's, sehingga capaian SDG's tidak disajikan pada sub bab ini.

2.24 CAPAIAN NSPK PERANGKAT DAERAH

Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan belum memiliki NSPK, sehingga capaian NSPK tidak disajikan pada sub bab ini.

2.3 Hambatan, Upaya Pencapaian dan rekomendasi Pelaksanaan Renja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Tahun 2024

2.31 Hambatan, Dalam Pelaksanaan Renja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Tahun 2024 Sampai Dengan Triwulan II

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan sasaran yang telah diperjanjikan dengan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja digunakan sebagai

dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Takalar. Pencapaian keberhasilan kinerja juga dipengaruhi oleh upaya peningkatan kualitas pelayanan, terutama pada percepatan layanan.

Ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi capaian kinerja dan sekaligus dapat menjadi kendala dalam capaian kinerja, yaitu :

- SDM, dalam hal ini adalah Pegawai/ petugas teknis peternakan yang masih minim dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Kualitas pegawai yang ada pada Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Takalar masih perlu ditingkatkan, dilihat dari pencapaian kinerja beberapa pegawai yang masih kurang optimal, kemampuan dalam bidang IT masih terbatas.
- Anggaran, keterbatasan anggaran sangat mempengaruhi capaian kinerja, karena untuk meningkatkan kualitas pelayanan Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan memerlukan sarana dan prasarana seperti obat hewan, kendaraan operasional serta bahan -bahan untuk peningkatan produksi ternak yang memerlukan anggaran yang banyak.
- Adanya persentase per triwulan dalam Penentuan Anggaran Kas.

2.32 Upaya Dalam Pencapaian Pelaksanaan Renja Dinas Peternakan Tahun 2024 Sampai Dengan Triwulan II

Upaya untuk tercapainya pelaksanaan renja , yaitu :

- Perencanaan untuk program/kegiatan disusun berdasarkan program prioritas.
- Adanya komitmen dari semua jajaran pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan untuk menyelesaikan kegiatan dalam upaya pencapaian target kinerja.
- Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pedoman teknis dan SOP yang ada.

2.33 Rekomendasi Pelaksanaan Renja Dinas Peternakan Tahun 2024 Triwulan Selanjutnya

Rekomendasi untuk tercapainya pelaksanaan renja , yaitu :

- Membuat tim kerja yang tepat untuk melaksanakan rencana kegiatan.
- Memberikan tugas setiap anggota tim kerja sesuai dengan kemampuan dan tugas fungsinya
- Melakukan monev dan mencari solusi untuk pelaksanaanrencana yang mengalami hambatan.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

3.1 TUJUAN DAN SASARAN

3.1.1 TUJUAN

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan empat tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan . Adapun tujuannya yaitu :

1. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sub sektor peternakan;
2. Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan tugas-tugas Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan.

3.1.2 SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu pendek (tahunan, semesteran, bulanan).

Dari masing-masing tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Instansi Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan menetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya populasi dan produksi ternak ;
2. Meningkatnya tata kelola kinerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Adapun Tujuan dan Sasaran dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat dilihat pada Tabel III.1 di bawah ini :

Tabel III.1 Tujuan Dan Sasaran Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2022 (n-1)	Target Kinerja Pada Tahun Ke-				Kondisi Akhir
			2023	2024	2025	2026	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Tujuan 1 : Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Sub sektor Peternakan	Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub sektor Peternakan	5,05	5,3	5,8	6,1	6,5	6,5
Sasaran 1.1 : Meningkatnya populasi dan Produksi ternak	Persentase peningkatan populasi Dan Produksi	10%	15%	20%	25%	30%	30%
	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	50%	80%	85%	90%	95%	95%
Tujuan 2: Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan tugas-tugas Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	N/A	CC	B	B	BB	BB
Sasaran 2.1: Meningkatnya tata kelola kinerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Nilai SAKIP Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	N/A	B	BB	BB	BB	BB

3.2 REVIU TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024

Reviu terhadap rancangan RKPD TAhun 2024 dapat di lihat pada tabel III.2 di bawah ini :

Tabel III.2 RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA) PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN 2024

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			TARGET KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp)			KETERANGAN
			SEMULA	MENJADI		SEMULA	MENJADI	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA PERUBAHAN 2024	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA PERUBAHAN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN												
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									9,667,740,656.00	7,627,665,744.00	7,513,234,704.00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	100 %	*Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	4,292,740,656.00	3,816,922,044.00	3,752,491,104.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	*Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu*	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	13,600,000.00	37,666,400.00	37,666,400.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
			2 Dokumen	2 Dokumen	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2,100,000.00	14,789,600.00	14,789,600.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

	3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD												
			1 Dokumen	1 Dokumen	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2,500,000.00	2,181,000.00	2,181,000.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD												
			1 Dokumen	1 Dokumen	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2,500,000.00	12,951,000.00	12,951,000.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD												
			1 Dokumen	1 Dokumen	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2,500,000.00	793,000.00	793,000.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD												
			1 Dokumen	1 Dokumen	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2,000,000.00	506,200.00	506,200.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
			1 Laporan	1 Laporan	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2,000,000.00	6,445,600.00	6,445,600.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	*Presentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	3,972,358,906.00	3,516,949,444.00	3,452,519,569.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
			33 Orang/bulan	33 Orang/bulan	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	33 Orang/bulan	33 Orang/bulan	33 Orang/bulan	33 Orang/bulan	33 Orang/bulan	3,967,358,906.00	3,509,375,944.00	3,444,946,069.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD												
			1 Laporan	1 Laporan	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2,500,000.00	5,768,500.00	5,768,500.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD												
			2 Laporan	2 Laporan	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan a n/Semesteran SKPD*	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2,500,000.00	1,805,000.00	1,805,000.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	*Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah*	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	7,250,000.00	9,338,600.00	9,338,600.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD												
			1 Dokumen	1 Dokumen	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2,500,000.00	5,019,500.00	5,019,500.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD												
			1 Dokumen	1 Dokumen	*Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2,250,000.00	2,314,300.00	2,314,300.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD												
			4 Laporan	4 Laporan	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	2,500,000.00	2,004,800.00	2,004,800.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	*Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah*	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-	-	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai												
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			-	-		-	-	-	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya												
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			-	-		-	-	-	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

	3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi												
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			-	-		-	-	-	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	*Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah*	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	135,000,000.00	138,127,400.00	140,833,400.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
			3 Paket	3 Paket	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	2,000,000.00	1,025,800.00	1,025,800.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
			2 Paket	2 Paket	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	75,000,000.00	78,980,400.00	81,686,400.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			-	-		-			DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			-	-		-			DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
			2 Paket	2 Paket	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	3,000,000.00	343,200.00	343,200.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												
			2 Dokumen	2 Dokumen	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	5,000,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
			90 Laporan	90 Laporan	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	90 Laporan	90 Laporan	90 Laporan	90 Laporan	90 Laporan	50,000,000.00	55,078,000.00	55,078,000.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			*Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*			0 %	0 %		-			DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			0	0		-			DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel												
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			0	0		-			DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	*Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	84,490,000.00	114,840,200.00	112,133,135.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
			12 Laporan	12 Laporan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	40,000,000.00	36,740,200.00	34,033,135.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
			3 Laporan	3 Laporan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	690,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
			12 Laporan	12 Laporan	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	43,800,000.00	76,800,000.00	76,800,000.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	*Persentase Pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	80,041,750.00	-	-	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
			1 Unit	1 Unit	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	55,041,750.00			DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
			1 Unit	1 Unit	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	25,000,000.00			DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	100 %	100 %	*Persentase ketersediaan sarana pertanian/ peternakan*	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1,470,000,000.00	1,086,979,700.00	1,086,979,700.00	
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	100 %	*Persentase Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan Tumbuhan dan mikroorganisme yang di kelola*	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	350,000,000.00	105,000,000.00	105,000,000.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman												
					Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman			0	0		100,000,000.00			DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman												
					Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman			0	0		50,000,000.00			DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman												
			3 Varietas Unggul Baru (VUB)	3 Varietas Unggul Baru (VUB)	*Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian*	3 Varietas Unggul Baru (VUB)	3 Varietas Unggul Baru (VUB)	3 Varietas Unggul Baru (VUB)	3 Varietas Unggul Baru (VUB)	3 Varietas Unggul Baru (VUB)	200,000,000.00	105,000,000.00	105,000,000.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	*Persentase peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan ternak.*	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	20,000,000.00	-	-	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak												
					Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar			0	0	0	20,000,000.00		-	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer			*Persentase Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer yang dilaksanakan*			100 %	100 %	100 %	10,000,000.00			DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.04.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan												
					Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar			0	0		10,000,000.00			DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota			*Persentase Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota*	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	390,000,000.00	4,999,900.00	4,999,900.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.05.0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan												
					Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan			0	0		30,000,000.00			DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.05.0007	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak												
			1 Laporan	1 Laporan	*Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	150,000,000.00	4,999,900.00	4,999,900.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.05.0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak												
					Jumlah benih/bibit ternak yang beredar			0	0		10,000,000.00			DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.05.0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak												
					Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia			0	0	0	200,000,000.00			DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	100 %	100 %	*Persentase Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain*	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	700,000,000.00	976,979,800.00	976,979,800.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

	3.27.02.2.06.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain												
			20 Ton	20 Ton	*Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain*	20 Ton	20 Ton	20 Ton	20 Ton	20 Ton	100,000,000.00	206,349,900.00	206,349,900.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain												
			1000 Ekor	1000 Ekor	*Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain*	1000 Ekor	1000 Ekor	1000 Ekor	1000 Ekor	1000 Ekor	600,000,000.00	770,629,900.00	770,629,900.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	100 %	100 %	*Persentase ketersediaan prasarana pertanian/ peternakan*	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	3,210,000,000.00	2,141,784,000.00	2,091,783,900.00	
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	100 %	100 %	*Persentase prasarana pertanian/peternakan yang dibangun.*	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	3,200,000,000.00	2,141,784,000.00	2,091,783,900.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya												
			11	11	*Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara*	11	11	11	11	11	3,000,000,000.00	2,141,784,000.00	2,091,783,900.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.2.02.0014	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan												
					Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi			1 Unit	1 Unit		-			DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan												
					Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi			0	0		200,000,000.00			DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.2.04	Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum			*Persentase Lahan Pengembalaan umum yang di kembangkan*			0 %	0 %		10,000,000.00			DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.2.04.0001	Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum												
					Luas Lahan Pengembalaan Umum yang Diidentifikasi dan Ditetapkan			0	0		10,000,000.00			DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

4.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	100 %	100 %	*Persentase pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner*	100 %	100 %	100 %	100 %		275,000,000.00	561,980,000.00	561,980,000.00	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	*Persentase Pengendalian ,pembebasan dan penanggulangan Kasus Penyakit Hewan Menular*	100 %	100 %	100 %	100 %		45,000,000.00	180,830,000.00	180,830,000.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular												
			4 Laporan	4 Laporan	*Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali*	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan		25,000,000.00	180,830,000.00	180,830,000.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.2.01.0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan												
			2 Wilayah	2 Wilayah	*Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan*	2 Wilayah	2 Wilayah	2 Wilayah	2 Wilayah					DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota												
			1 Laporan	1 Laporan	*Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota*	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		20,000,000.00			DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	*Persentase Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota*	100 %	100 %	100 %	100 %		-		-	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.2.02.0006	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM												
					Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM			0	0					DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	*Persentase Pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner yang di kelola*	100 %	100 %	100 %	100 %		200,000,000.00	381,150,000.00	381,150,000.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner												
			3 Laporan	3 Laporan	*Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner*	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan		200,000,000.00	381,150,000.00	381,150,000.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner			*Persentase Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner*			0 %	0 %		30,000,000.00			DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan												
					Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan			0	0		30,000,000.00			DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

5.	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			*Persentase terlaksananya kegiatan*				100 %		175,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	
	3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	100 %	100 %	*Persentase Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan yang di bina dan diawasi pelaksanaannya.*	100 %	100 %	100 %	100 %		125,000,000.00	-	-	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.06.2.02.0001	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan												
			2 Dokumen	2 Dokumen	*Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan*	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		100,000,000.00			DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

	3.27.06.2.02.0005	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan												
					Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi			0	0		25,000,000.00			DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.06.2.03	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan			*Persentase Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan yang diawasi*			100 %	100 %		50,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.06.2.03.0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan												
					Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi			0	0		50,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
6.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			*Persentase peningkatan kelas pada kelompok tani/gapoktan*				100 %		245,000,000.00			
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	100 %	100 %	*Persentase terlaksananya kegiatan Penyuluhan Peternakan*	100 %	100 %	100 %	100 %		245,000,000.00			DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa												
			10 Unit	10 Unit	*Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit		45,000,000.00			DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota												
					Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi			0	0		200,000,000.00			DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	J U M L A H										9,667,740,656.00	7,627,665,744.00	7,513,234,704.00	

3.3 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Tabel III.3 RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN TAKALAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET KINERJA			PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						RENJA 2024	APBD 2024	RENJA PERUBAHAN 2024	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA PERUBAHAN 2024			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN																	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							9,667,740,656.00	7,627,665,744.00	7,513,234,704.00							9,299,318,906.00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	100 %		100 %	100 %	100 %	4,292,740,656.00	3,816,922,044.00	3,752,491,104.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 3. Pengem bangan dan Adopsi Inovasi dalam peni ngkatan Pr oduktivitas dan Penyerapa n Tenaga Kerja	ASN Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	100 %	4,419,318,906.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu*	100 %		100 %	100 %	100 %	13,600,000.00	37,666,400.00	37,666,400.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 3. Pengem bangan dan Adopsi Inovasi dalam peni ngkatan Pr oduktivitas dan Penyerapa n Tenaga Kerja	ASN Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	100 %	19,600,000.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	2	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2,100,000.00	14,789,600.00	14,789,600.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 3. Pengem bangan dan Adopsi Inovasi dalam peni ngkatan Pr oduktivitas dan Penyerapa n Tenaga Kerja	ASN Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	2 Dokumen	2,100,000.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	1	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2,500,000.00	2,181,000.00	2,181,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik	ASN Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	1 Dokumen	3,800,000.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	1	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2,500,000.00	12,951,000.00	12,951,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 3. Pengem bangan dan Adopsi Inovasi dalam peni ngkatan Pr oduktivitas dan Penyerapa n Tenaga Kerja	ASN Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	1 Dokumen	3,300,000.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4	1	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2,500,000.00	793,000.00	793,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 3. Pengem bangan dan Adopsi Inovasi dalam peni ngkatan Pr oduktivitas dan Penyerapa n Tenaga Kerja	ASN Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	1 Dokumen	3,800,000.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

	3.27.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4	1	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2,000,000.00	506,200.00	506,200.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 3. Pengem bangan dan Adopsi Inovasi dalam peni ngkatan Pr oduktivitas dan Penyerapa n Tenaga Kerja	ASN Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	1 Dokumen	3,300,000.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	1	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2,000,000.00	6,445,600.00	6,445,600.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 3. Pengem bangan dan Adopsi Inovasi dalam peni ngkatan Pr oduktivitas dan Penyerapa n Tenaga Kerja	ASN Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	1 Laporan	3,300,000.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Presentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	3,972,358,906.00	3,516,949,444.00	3,452,519,569.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 3. Pengem bangan dan Adopsi Inovasi dalam peni ngkatan Pr oduktivitas dan Penyerapa n Tenaga Kerja	ASN Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	100 %	3,974,158,906.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2128	532	33 Orang/bulan	33 Orang/bulan	33 Orang/bulan	3,967,358,906.00	3,509,375,944.00	3,444,946,069.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 3. Pengem bangan dan Adopsi Inovasi dalam peni ngkatan Pr oduktivitas dan Penyerapa n Tenaga Kerja	ASN Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	33 Orang/bulan	3,967,358,906.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	1	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2,500,000.00	5,768,500.00	5,768,500.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 3. Pengem bangan dan Adopsi Inovasi dalam peni ngkatan Pr oduktivitas dan Penyerapa n Tenaga Kerja	ASN Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	1 Laporan	3,500,000.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

	3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2,500,000.00	1,805,000.00	1,805,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	ASN Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	4 Laporan	3,300,000.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah*	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	7,250,000.00	9,338,600.00	9,338,600.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	ASN Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	100 %	7,450,000.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2,500,000.00	5,019,500.00	5,019,500.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	ASN Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	1 Dokumen	2,500,000.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2,250,000.00	2,314,300.00	2,314,300.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	ASN Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	1 Dokumen	2,250,000.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

	3.27.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	16 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	2,500,000.00	2,004,800.00	2,004,800.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	ASN Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	4 Laporan	2,700,000.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah*	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	-	-	-	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	100 %	85,000,000.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																	
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			-		-	-	-	-	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	2 Unit	15,000,000.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			-		-	-	-	-	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	33 Paket	35,000,000.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			-		-	-	-	-	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	1 orang	35,000,000.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah*	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	135,000,000.00	138,127,400.00	140,833,400.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan	ASN Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	100 %	186,478,250.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 pKet	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	2,000,000.00	1,025,800.00	1,025,800.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	3 Paket	3,847,300.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	75,000,000.00	78,980,400.00	81,686,400.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	2 Paket	56,445,950.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	-	-		-	-			Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	2 Paket	1,000,000.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	-		-	-			Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	2 Paket	2,500,000.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	3,000,000.00	343,200.00	343,200.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	2 Paket	6,415,000.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	5,000,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	2 Dokumen	11,700,000.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	360 Laporan	90 Laporan	90 Laporan	90 Laporan	90 Laporan	50,000,000.00	55,078,000.00	55,078,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	90 Laporan	104,570,000.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	-			Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	100 %		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			0		0	-			Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	0	50,000,000.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

	3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			0		0	-			Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	0	10,000,000.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	84,490,000.00	114,840,200.00	112,133,135.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	100 %	152,090,000.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	40,000,000.00	36,740,200.00	34,033,135.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	RETRIBUSI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	12 Laporan	40,000,000.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	690,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan		690,000.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	43,800,000.00	76,800,000.00	76,800,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	RETRIBUSI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	12 Laporan	111,400,000.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*	100 %		100 %	100 %	100 %	80,041,750.00	-	-	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	100 %	79,541,750.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			1 Unit	1 Unit	1 Unit	55,041,750.00			Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	1 Unit	54,541,750.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	1 Unit	1 Unit	25,000,000.00			Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	1 Unit	25,000,000.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	*Persentase ketersediaan sarana pertanian/ peternakan*	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1,470,000,000.00	1,086,979,700.00	1,086,979,700.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Masyarakat/Peternak Dan Ternak	100 %	1,460,000,000.00	
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan Tumbuhan dan mikroorganisme yang di kelola*	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	350,000,000.00	105,000,000.00	105,000,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Masyarakat/Peternak Dan Ternak	100 %	350,000,000.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman																	
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman			0		0	100,000,000.00			Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Masyarakat/Peternak Dan Ternak	0	100,000,000.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman																
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman			0		0	50,000,000.00			Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 3. Pengem bangan dan Adopsi Inovasi dalam peni ngkatan Pr oduktivitas dan Penyerapa n Tenaga Kerja	Masyarakat/Peternak Dan Ternak	0	50,000,000.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman																
			Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	3 Varietas Unggul Baru (VUB)	3 Varietas Unggul Baru (VUB)	3 Varietas Unggul Baru (VUB)	3 Varietas Unggul Baru (VUB)	3 Varietas Unggul Baru (VUB)	200,000,000.00	105,000,000.00	105,000,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 3. Pengem bangan dan Adopsi Inovasi dalam peni ngkatan Pr oduktivitas dan Penyerapa n Tenaga Kerja	Masyarakat/Peternak Dan Ternak	3 Varietas Unggul Baru (VUB)	200,000,000.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan ternak.*	100 %		100 %	100 %	100 %	20,000,000.00	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 3. Pengem bangan dan Adopsi Inovasi dalam peni ngkatan Pr oduktivitas dan Penyerapa n Tenaga Kerja	Masyarakat/Peternak Dan Ternak	100 %	20,000,000.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

	3.27.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak																
			Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar			0		0	20,000,000.00		-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 3. Pengem bangan dan Adopsi Inovasi dalam peni ngkatan Pr oduktivitas dan Penyerapa n Tenaga Kerja	Masyarakat/Peternak Dan Ternak	0	20,000,000.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	*Persentase Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer yang dilaksanakan*	100 %		100 %	100 %	100 %	10,000,000.00			Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 3. Pengem bangan dan Adopsi Inovasi dalam peni ngkatan Pr oduktivitas dan Penyerapa n Tenaga Kerja	Masyarakat/Peternak Dan Ternak	100 %		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.04.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan																
			Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar			0		0	10,000,000.00			Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 3. Pengem bangan dan Adopsi Inovasi dalam peni ngkatan Pr oduktivitas dan Penyerapa n Tenaga Kerja	Masyarakat/Peternak Dan Ternak	0	10,000,000.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota*	100 %		100 %	100 %	100 %	390,000,000.00	4,999,900.00	4,999,900.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 3. Pengem bangan dan Adopsi Inovasi dalam peni ngkatan Pr oduktivitas dan Penyerapa n Tenaga Kerja	Masyarakat/Peternak Dan Ternak	100 %	390,000,000.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.05.0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan																	
			Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan			0		0	30,000,000.00			Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 3. Pengem bangan dan Adopsi Inovasi dalam peni ngkatan Pr oduktivitas dan Penyerapa n Tenaga Kerja	Masyarakat/Peternak Dan Ternak	0	30,000,000.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.05.0007	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak																	
			Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	150,000,000.00	4,999,900.00	4,999,900.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 3. Pengem bangan dan Adopsi Inovasi dalam peni ngkatan Pr oduktivitas dan Penyerapa n Tenaga Kerja	Masyarakat/Peternak Dan Ternak	1 Laporan	150,000,000.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.05.0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak																	
			Jumlah benih/bibit ternak yang beredar			0		0	10,000,000.00			Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 3. Pengem bangan dan Adopsi Inovasi dalam peni ngkatan Pr oduktivitas dan Penyerapa n Tenaga Kerja	Masyarakat/Peternak Dan Ternak		10,000,000.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

	3.27.02.2.05.0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak																	
			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia			0		0	200,000,000.00			Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 3. Pengem bangan dan Adopsi Inovasi dalam peni ngkatan Pr oduktivitas dan Penyerapa n Tenaga Kerja	Masyarakat/Peternak Dan Ternak	0	200,000,000.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	*Persentase Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain*	100 %		100 %	100 %	100 %	700,000,000.00	976,979,800.00	976,979,800.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 3. Pengem bangan dan Adopsi Inovasi dalam peni ngkatan Pr oduktivitas dan Penyerapa n Tenaga Kerja	Masyarakat/Peternak Dan Ternak	100 %	700,000,000.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.06.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain																	
			Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain			20 Ton	20 Ton	20 Ton	100,000,000.00	206,349,900.00	206,349,900.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 3. Pengem bangan dan Adopsi Inovasi dalam peni ngkatan Pr oduktivitas dan Penyerapa n Tenaga Kerja	Masyarakat/Peternak Dan Ternak	20 Ton	100,000,000.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain																	
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	20000 ekor	7000 ekor	1000 Ekor	1000 Ekor	1000 Ekor	600,000,000.00	770,629,900.00	770,629,900.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 3. Pengem bangan dan Adopsi Inovasi dalam peni ngkatan Pr oduktivitas dan Penyerapa n Tenaga Kerja	Masyarakat/Peternak Dan Ternak	1000 Ekor	600,000,000.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	*Persentase ketersediaan prasarana pertanian/ peternakan*	100 %		100 %	100 %	100 %	3,210,000,000.00	2,141,784,000.00	2,091,783,900.00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Masyarakat/Peternak Dan Ternak	100 %	3,000,000,000.00	
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	*Persentase prasarana pertanian/peternakan yang dibangun.*	100 %		100 %	100 %	100 %	3,200,000,000.00	2,141,784,000.00	2,091,783,900.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Masyarakat/Peternak Dan Ternak	100 %	3,000,000,000.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																	
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	68	13	11	11	11	3,000,000,000.00	2,141,784,000.00	2,091,783,900.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Masyarakat/Peternak Dan Ternak	5 Unit	3,000,000,000.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

	3.27.03.2.02.0014	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan																
			Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi			1 Unit		0	-			Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Sialangrampai Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Kale Lantang	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 3. Pengem bangan dan Adopsi Inovasi dalam peni ngkatan Pr oduktivitas dan Penyerapa n Tenaga Kerja	Masyarakat/Peternak Dan Ternak		0.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan																
			Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi			0		0	200,000,000.00			Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 3. Pengem bangan dan Adopsi Inovasi dalam peni ngkatan Pr oduktivitas dan Penyerapa n Tenaga Kerja	Masyarakat/Peternak Dan Ternak	0	200,000,000.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.2.04	Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	*Persentase Lahan Pengembalaan umum yang di kembangkan*	100 %		0 %		0 %	10,000,000.00			Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 3. Pengem bangan dan Adopsi Inovasi dalam peni ngkatan Pr oduktivitas dan Penyerapa n Tenaga Kerja	Masyarakat/Peternak Dan Ternak	100 %		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

	3.27.03.2.04.0001	Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum																	
			Luas Lahan Pengembalaan Umum yang Diidentifikasi dan Ditetapkan			0		0	10,000,000.00			Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 3. Pengem bangan dan Adopsi Inovasi dalam peni ngkatan Pr oduktivitas dan Penyerapa n Tenaga Kerja	Masyarakat/Peternak Dan Ternak	0	10,000,000.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
4.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	*Persentase pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner*	100 %		100 %	100 %	100 %	275,000,000.00	561,980,000.00	561,980,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 3. Pengem bangan dan Adopsi Inovasi dalam peni ngkatan Pr oduktivitas dan Penyerapa n Tenaga Kerja	Masyarakat/Peternak Dan Ternak	100 %	245,000,000.00	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengendalian ,pembebasan dan penanggulangan Kasus Penyakit Hewan Menular*	100 %		100 %	100 %	100 %	45,000,000.00	180,830,000.00	180,830,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 3. Pengem bangan dan Adopsi Inovasi dalam peni ngkatan Pr oduktivitas dan Penyerapa n Tenaga Kerja	Masyarakat/Peternak Dan Ternak	100 %	45,000,000.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular																	
			Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali		4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	25,000,000.00	180,830,000.00	180,830,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 3. Pengem bangan dan Adopsi Inovasi dalam peni ngkatan Pr oduktivitas dan Penyerapa n Tenaga Kerja	Masyarakat/Peternak Dan Ternak	4 Laporan	25,000,000.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.2.01.0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan																	
			Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan			2 Wilayah	2 Wilayah	2 Wilayah				Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 3. Pengem bangan dan Adopsi Inovasi dalam peni ngkatan Pr oduktivitas dan Penyerapa n Tenaga Kerja	Masyarakat/Peternak Dan Ternak	2 Wilayah		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	20,000,000.00			Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 3. Pengem bangan dan Adopsi Inovasi dalam peni ngkatan Pr oduktivitas dan Penyerapa n Tenaga Kerja	Masyarakat/Peternak Dan Ternak	1 Laporan	20,000,000.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota*	100 %		100 %		100 %	-		-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 3. Pengem bangan dan Adopsi Inovasi dalam peni ngkatan Pr oduktivitas dan Penyerapa n Tenaga Kerja	Masyarakat/Peternak Dan Ternak	100 %	-	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.2.02.0006	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM																	
			Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM			0		0				Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 3. Pengem bangan dan Adopsi Inovasi dalam peni ngkatan Pr oduktivitas dan Penyerapa n Tenaga Kerja	Masyarakat/Peternak Dan Ternak	0		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner yang di kelola*	100 %		100 %	100 %	100 %	200,000,000.00	381,150,000.00	381,150,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 3. Pengem bangan dan Adopsi Inovasi dalam peni ngkatan Pr oduktivitas dan Penyerapa n Tenaga Kerja	Masyarakat/Peternak Dan Ternak	100 %	200,000,000.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner																	
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	4 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	200,000,000.00	381,150,000.00	381,150,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 3. Pengem bangan dan Adopsi Inovasi dalam peni ngkatan Pr oduktivitas dan Penyerapa n Tenaga Kerja	Masyarakat/Peternak Dan Ternak	3 Laporan	200,000,000.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	*Persentase Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner*	100 %		0 %		0 %	30,000,000.00			Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 3. Pengem bangan dan Adopsi Inovasi dalam peni ngkatan Pr oduktivitas dan Penyerapa n Tenaga Kerja	Masyarakat/Peternak	100 %		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan																
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan			0		0	30,000,000.00			Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Masyarakat/Peternak	30,000,000.00	30,000,000.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
5.	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	*Persentase terlaksananya kegiatan perizinan*	100 %				100 %	175,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik			100 %	175,000,000.00	
	3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	*Persentase Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan yang di bina dan diawasi pelaksanaannya.*	100 %		100 %	100 %	100 %	125,000,000.00	-	-	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Masyarakat	100 %	125,000,000.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.06.2.02.0001	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan																
			Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,000,000.00			Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Masyarakat	2 Dokumen	100,000,000.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

	3.27.06.2.02.0005	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan																
			Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi			0		0	25,000,000.00			Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 3. Pengem bangan dan Adopsi Inovasi dalam peni ngkatan Pr oduktivitas dan Penyerapa n Tenaga Kerja	Masyara kat	0	25,000,000.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.06.2.03	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	*Persentase Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan yang diawasi*	100 %		100 %	100 %	100 %	50,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 3. Pengem bangan dan Adopsi Inovasi dalam peni ngkatan Pr oduktivitas dan Penyerapa n Tenaga Kerja	Masyarakat	100 %	50,000,000.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.06.2.03.0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan																
			Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi			0		0	50,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 3. Pengem bangan dan Adopsi Inovasi dalam peni ngkatan Pr oduktivitas dan Penyerapa n Tenaga Kerja	Masyarakat	0	50,000,000.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

6.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	*Persentase peningkatan kelas pada kelompok tani/gapoktan*	100 %				100 %	245,000,000.00	-	-			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik			100 %	-	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	*Persentase terlaksananya kegiatan Penyuluhan Peternakan*	100 %		100 %	0 %	100 %	245,000,000.00			Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Masyarakat/Peternak	100 %		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																	
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya			10 Unit		0	45,000,000.00			Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 3. Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Masyarakat/Peternak	10 Unit	45,000,000.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi			0		0	200,000,000.00			Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	03.Peningk atan produk tivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah 3. Pengem bangan dan Adopsi Inovasi dalam peni ngkatan Pr oduktivitas dan Penyerapa n Tenaga Kerja	Masyarakat/Peternak	0	200,000,000.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	J U M L A H								9,667,740,656.00	7,627,665,744.00	7,513,234,704.00							9,299,318,906.00	

BAB IV PENUTUP

4.1 Catatan Penting

Apabila dalam pelaksanaan Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2024 terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2024, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada Perubahan Renja dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Takalar Tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPD dalam mendukung Tujuan dan Sasaran Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Kepala Bidang dan seluruh staf Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Takalar secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk :

a. Melaksanakan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2024, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon

Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Takalar Tahun 2024.

Takalar
Kepala Dinas

Ir. H. SUKWANSYAH, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19661231 199503 1 025

DINAS PERIKANAN
KABUPATEN TAKALAR



PERUBAHAN RENCANA KERJA
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, karena atas berkat RahmatNya, sehingga Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Takalar Tahun 2024 sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Takalar Tahun 2024 dilakukan untuk memberikan arahan yang rebih jelas sehingga penggunaan anggaran lebih efektif dan efesien dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan ini merupakan uraian tugas pokok dan fungsi Sekretariat, 3 (tiga) Bidang dan 1 (satu) UPT pada Dinas Perikanan Kabupaten Takalar dalam rangka pencapaian tujuan serta sasaran organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Takalar.

Demikian perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Takalar ini disusun dengan harapan dapat tetap meningkatkan kinerja dan bersinergi dengan program dan kegiatan Rencana Kerja SKPD lainnya dalam rangka mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026.

Takalar, Juli 2024
Kepala Dinas,

H. BASO, S.Pd., M.Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19661231 198903 1 109

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR iv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 4
1.3. Maksud danTujuan 6
1.4. Sistematika Penulisan 7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN TAKALAR SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Takalar Sampai Dengan Triwulan II 8
2.1.1. Rekapitulasi Jumlah Laporan, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Takalar yang terakomodir di APBD Tahun 2024 15
2.1.2. Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja APBD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 15
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Takalar 19
2.2.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Takalar 19
2.2.2. Capaian SPM Dinas Perikanan Kabupaten Takalar 21
2.2.3. Capaian SDGs Dinas Perikanan Kabupaten Takalar 21
2.2.4. Capaian NSPK Dinas Perikanan Kabupaten Takalar 21
2.2.5. Dukungan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perikanan Kabupaten Takalar terhadap Pembangunan Daerah 21
2.3. Kendala dan Solusi Penyelesaian Permasalahan Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Takalar Tahun 2024 23
2.3.1. Kendala Dalam Capaian Rencana Kerja 23
2.3.2. Solusi Penyelesaian Permasalahan Pelaksanaan Rencana Kerja 23

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN TAKALAR 25
3.1. Tujuan Dan Sasaran 25
3.1.1. Tujuan 25

3.1.2. Sasaran 25
3.2. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Takalar Tahun 2024
3.2.1. Program 27
3.2.2. Kegiatan 27
3.2.3. Sub Kegiatan 27
28

BAB IV PENUTUP 39

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel II.1	9
Tabel II.2	15
Tabel II.3	16
Tabel II.4	17
Tabel II.5	18
Tabel II.6	20
Tabel II.7	22
Tabel III.1	25
Tabel III.2	29
Tabel III.3	38

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1 1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, setiap OPD diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja OPD (Rencana Kerja SKPD) sebagai acuan perencanaan kegiatan OPD untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Rencana Kerja SKPD ini mengacu pada Rancangan Awal RKPD, Renstra SKPD, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.

Rancangan awal RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Rencana Kerja OPD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renstra OPD menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Rencana Kerja OPD, selaras dengan Renstra OPD.Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra SKPD berdasarkan pelaksanaan Rencana Kerja OPD tahun-tahun sebelumnya.Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Rencana Kerja OPD dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Rencana Kerja OPD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal OPD.

Rancangan Rencana Kerja OPD dibahas pada forum OPD yang dikoordinasikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, dimana pembahasan

tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD, penyelarasan program dan kegiatan antar OPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing OPD.

Gambar 1

Keterkaitan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Takalar Tahun 2024 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

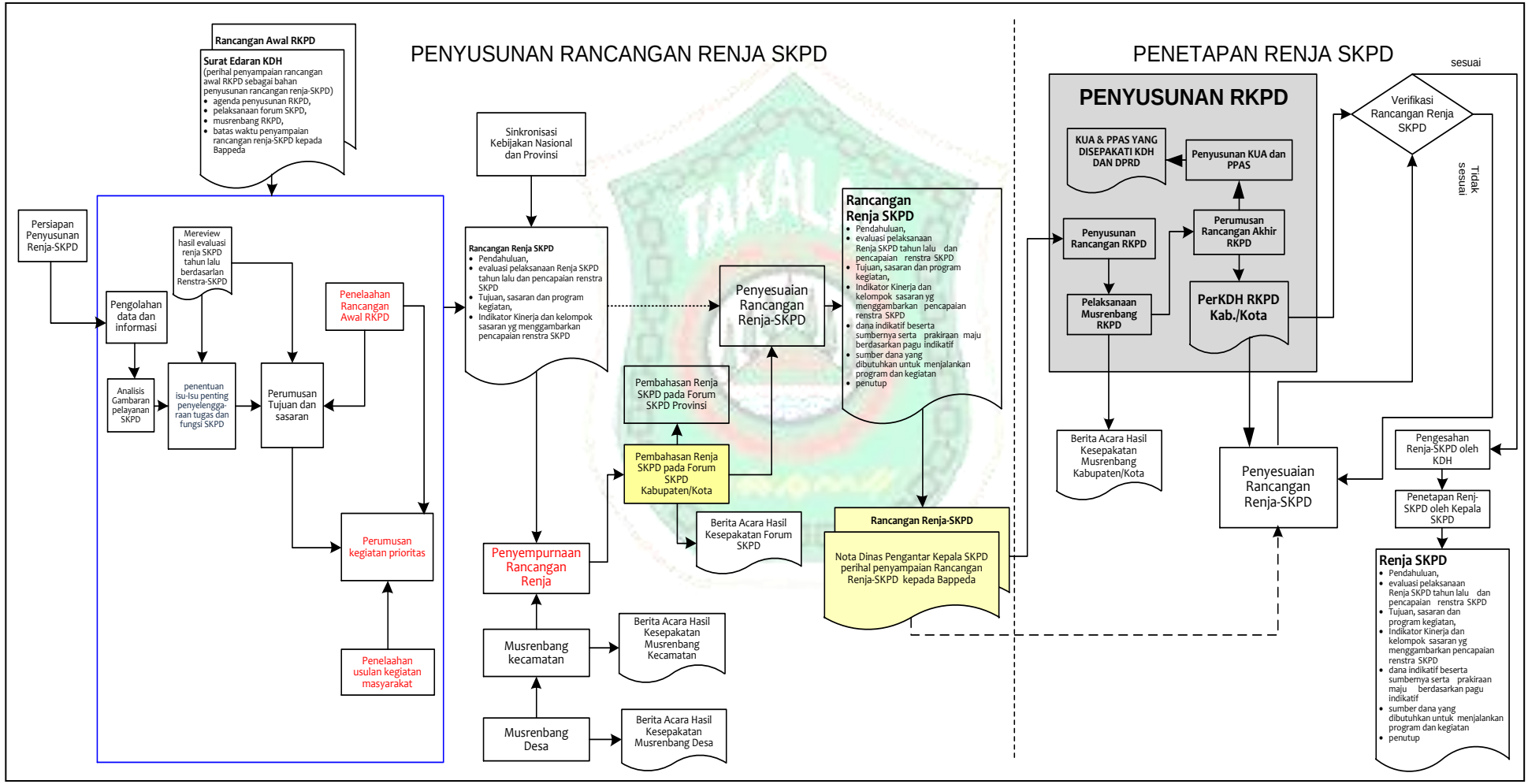

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Takalar Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik IndonesianTahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 - 2024 (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2020 Nomor 892);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2023 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 15);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2008 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Takalar Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2023 - 2026 (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 03);
17. Peraturan Bupati Takalar Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan;
18. Peraturan Bupati Takalar Nomor …… Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2023 Nomor ……).

1.3. Maksud Dan Tujuan

Adapun maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Takalar Tahun 2024 yaitu:

1. Untuk menjabarkan program serta kegiatan renstra OPD kedalam Program/ Kegiatan/ sub kegiatan Tahunan.
2. Menyiapkan acuan bagi RAPBD.
3. Menyiapkan kerangka evaluasi kinerja program/kegiatan tahunan bagi OPD.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Takalar Tahun 2024 yaitu agar terbangun konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Takalar Tahun 2024 meliputi:

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja (Rencana Kerja) Dinas Perikanan Kabupaten Takalar Tahun 2024.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Takalar Sampai Triwulan II Tahun 2024

Memuat tentang evaluasi pelaksanaan rencana kerja sampai dengan Triwulan II (Tahun 2024) sesuai dengan renstra dan tupoksi OPD, analisis kinerja pelayanan OPD, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas fungsi OPD, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perikanan Kabupaten Takalar

Memuat tentang Rencana Program Kegiatan Perubahan Rencana Kerja dan pendanaan OPD khusus untuk Tahun 2024.

BAB IV Penutup

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN TAKALAR SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Takalar Sampai Dengan Triwulan II

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dimaksudkan untuk mengevaluasi capaian pelaksanaan Rencana Kerja Sampai Triwulan II tahun 2024 dengan melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Takalar Tahun 2024 yaitu menghitung penilaian atas capaian keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Takalar. Adapun evaluasi pelaksaan Rencana Kerja OPD dan capaian Renstra berdasarkan hasil pemetaan dapat dilhat pada tabel sebagai berikut berikut:

Tabel II.1
Hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Takalar
Periode Semester I Tahun 2024

No	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun **2023-2026** (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu (**2023**)		Target Kinerja dan Anggaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun **2024**) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Per Bulan						Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Kinerja Per Bulan						Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun **2024**)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun **2024**) yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun **2024** (Akhir Tahun Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun **2026**)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun (5)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
															Januari		Februari		Maret		I		April		Mei		Juni		II		III		IV											
									K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3					4	5	6			7		8			9		10		11		12		13		14		15		16		20		24		25		26 = 25/8 x 100%		27 = 7 ÷ 25		28 = 27/6 x 100%		29	30
		3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																																					
		3	25				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**				**37.134.999.606**		**7.252.960.972**		**7.719.060.392**		**194.061.944**		**216.162.724**		**457.447.191**		**867.671.859**		**574.260.808**		**358.865.795**		**897.093.954**		**1.830.220.557**		-		-		**1.441.932.667**	22,08%	18,68%		**8.694.893.639**				
	S.2.1. Meningkatny a Tata Kelola Kinerja Dinas Perikanan	**3**	**25**	**01**			**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**Persen**	**24.166.963.606**	**18,82%**	**4.053.875.688**	**100%**	**6.192.354.565**	**0%**	**194.061.944**	**7%**	**210.050.524**	**3%**	**422.623.791**	**10%**	**826.736.259**	**6%**	**530.768.008**	**7%**	**334.176.050**	**2%**	**573.930.954**	**16%**	**1.438.875.012**	**0%**	-	**0%**	-	**17%**	**1.357.504.267**	**16,65%**	**21,92%**	**48%**	**5.411.379.955**	**47,54%**	**22,39%**	**DINAS PERIKANAN**	
		3	25	01	2.01		**PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**PERSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG DISUSUN TEPAT WAKTU**	100%	Persen	116.639.160	25,00%	56.190.000	100%	5.052.900	0%	-	25%	854.000	0%	-	25%	854.000	25%	1.500.000	25%	300.000	0%	-	50%	1.800.000	0%	-	0%	-	50%	2.354.000	50,00%	46,59%	21,43%	58.544.000	21,43%	50,19%		
		3	25	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun	8	Dokumen	46.159.320	-	-	2	2.052.900	-	-	1	854.000	-	-	1	854.000	-	-	1	300.000	-	-	1	300.000	-	-	-	-	1	854.000	50%	42%	1	854.000	13%	2%		
		3	25	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja yang Disusun	4	Dokumen	26.479.840	-	-	1	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.500.000	-	-	-	-	1	1.500.000	-	-	-	-	1	1.500.000	100%	100%	1	1.500.000	25%	6%		
		3	25	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	Laporan	44.000.000	4	56.190.000	1	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	4	56.190.000	25%	128%		
																																					50,00%	**47,20%**						
																																					SR	**SR**						
		3	25	01	2.02		**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**PERSENTASE LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH YANG DISUSUN TEPAT WAKTU**	100%	Persen	21.347.878.446	17,26%	3.772.229.457	100%	5.792.861.927	3%	194.061.944	3%	191.004.168	5%	417.919.391	11%	802.985.503	5%	520.484.173	5%	314.357.633	8%	520.150.241	19%	1.354.992.047	0%	-	0%	-	16%	1.323.469.676	16,21%	22,86%	21%	5.095.699.133	21,14%	23,87%		
		3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang menerima Gaji	2.880	Orang/Bulan	16.252.163.886	516	2.707.113.868	840	4.524.566.807	43	194.061.944	42	189.504.168	84	417.627.391	169	801.193.503	42	236.494.268	42	217.621.665	84	423.043.576	168	877.159.509	-	-	-	-	211	1.037.687.771	25%	23%	727	3.744.801.639	25%	23%		

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

2.1.1. Rekapitulasi Jumlah Laporan, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Takalar yang terakomodir di APBD Tahun 2024

Informasi tentang Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD 2024 yang terakomodir di APBD Tahun 2024 memberikan gambaran seberapa banyak jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Takalar pada Tahun 2024. Adapun jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan dimaksud dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel II.2
Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No.	URAIAN	KETERANGAN KINERJA (K) KEGIATAN	
		Jumlah	Jumlah Indikator
1.	Program	4	4
2.	Kegiatan	16	16
3.	Sub Kegiatan	28	29

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa di Dinas Perikanan Kabupaten Takalar, jumlah program sebanyak 4, jumlah kegiatan sebanyak 16 dan jumlah sub kegiatan 28. Untuk indikator program sebanyak 4, jumlah indikator kegiatan sebanyak 17 dan jumlah indikator sub kegiatan sebanyak 29.

2.1.2. Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja APBD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Informasi tentang realisasi anggaran kegiatan memberikan gambaran seberapa besar serapan anggaran pada periode Triwulan II untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam APBD Tahun 2024. Gambaran yang dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.3
Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Takalar sampai dengan Triwulan II

No.	Perangkat Daerah	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Realisasi	
				Fisik	Keu.
1.	Dinas Perikanan	6.456.905.272	2.380.311.616	28,46%	36,86%
Total		6.456.905.272	2.380.311.616	28,46%	36,86%

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa jumlah total anggaran Tahun 2024 pada Dinas Perikanan Kabupaten Takalar adalah sebesar Rp. 6.456.905.272, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II adalah sebesar Rp. 2.380.311.616. Untuk serapan realisasi pelaksanaan kegiatan adalah 28,46% dengan capaian realisasi keuangan 36,86%.

1. Evaluasi Capaian Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabuapaten Takalar Tahun 2024

Capaian pendanaan memberikan gambaran capaian berdasarkan realisasi anggaran pada masing-masing perangkat daerah yaitu program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terdapat pada Dinas Perikanan Kabupaten Takalar. Capaian kinerja pendanaan tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori Rendah dengan nilai realisasi 0% - 20%, kategori Sedang dengan nilai realisasi >20% - 43% sedangkan kategori Tinggi dengan nilai realisasi anggaran diatas 43%. Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 43%. Kategori dari hasil evaluasi capaian pendanaan berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.4
Kategori Capaian Pendanaan Program, Kegaiatan dan Sub Kegiatan

No.	Uraian	Rendah (0% - 20%)	Sedang (>20% - 43%)	Tinggi (>43%)
1.	Program	4	-	-
2.	Kegiatan	11	2	3
3.	Sub Kegiatan	17	6	5

a. Evaluasi Capaian Pendanaan pada Level Program

Hasil evaluasi capaian pendanaan pada level program sampai dengan Triwulan II pada Dinas Perikanan Kabupaten Takalar dengan menggunakan kategori tersebut di atas, menunjukkan bahwa dari keseluruhan 4 program masih dalam capaian kategori realisasi Rendah (realisasi 0% - 20%).

b. Evaluasi Capaian Pendanaan pada Level Kegiatan

Hasil evaluasi capaian pendanaan pada level kegiatan sampai dengan Triwulan II pada Dinas Perikanan Kabupaten Takalar, terdapat 11 kegiatan kategori Rendah, 2 kegiatan kategori Sedang dan 3 kegiatan kategori Tinggi.

c. Evaluasi Capaian Pendanaan pada Level Sub Kegiatan

Hasil evaluasi capaian pendanaan pada level sub kegiatan sampai dengan Triwulan II pada Dinas Perikanan Kabupaten Takalar, terdapat 17 sub kegiatan kategori Rendah, 6 sub kegiatan kategori Sedang dan 5 sub kegiatan kategori Tinggi.

2. Evaluasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dalam Rangka Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Takalar Tahun 2024

Capaian kinerja memberikan gambaran capaian realisasi target kinerja pada masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat pada Dinas Perikanan Kabupaten Takalar. Capaian kinerja tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori

Rendah untuk perangkat daerah dengan realisasi 0% – 20%, kategori Sedang untuk perangkat daerah dengan realisasi kinerja lebih besar dari 20% – 43% dan kategori Tinggi untuk perangkat daerah dengan realisasi kinerja diatas 43%. Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 43% didasarkan atas tingkat capaian yang diharapkan untuk triwulan II adalah 43%. Sehingga jika terdapat capaian realisasi kinerja lebih dari 45% dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi. Kategori dari hasil evaluasi capaian kinerja berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.5
Rekapitulasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Takalar sampai dengan Triwulan II

No.	Uraian	Rendah (0% - 20%)	Sedang (>20% - 43%)	Tinggi (>43%)
1.	Program	3	1	-
2.	Kegiatan	11	2	3
3.	Sub Kegiatan	18	4	6

a. Evaluasi Capaian Kinerja/Outcome pada Level Program

Evaluasi capaian kinerja/outcome pada level program, menunjukkan bahwa pada Dinas Perikanan Kabupaten Takalar sampai dengan Triwulan II terdapat 3 program dengan kategori Rendah dan 1 program dengan kategori Sedang.

b. Evaluasi Capaian Kinerja/Output Pada Level Kegiatan

Evaluasi capaian kinerja/outcome pada level kegiatan, menunjukkan bahwa pada Dinas Perikanan Kabupaten Takalar sampai dengan Triwulan II terdapat 11 kegiatan dengan kategori Rendah, 2 kegiatan kategori Sedang dan 3 kegiatan kategori Tinggi.

c. Evaluasi Capaian Kinerja/Output Pada Level sub Kegiatan

Evaluasi capaian kinerja/outcome pada level sub kegiatan, menunjukkan bahwa pada Dinas Perikanan Kabupaten Takalar sampai dengan Triwulan II terdapat 18 sub kegiatan dengan kategori Rendah, 4 sub kegiatan kategori Sedang dan 6 sub kegiatan kategori Tinggi.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Takalar

Dinas Perikanan Kabupaten Takalar merupakan OPD yang menangani bidang urusan Pemerintahan pilihan. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor 36 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Takalar. Dinas Perikanan mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam pelaksanaan tupoksinya, Dinas Perikanan Kabupaten Takalar tidak memiliki aturan mengenai SPM. Namun tolok ukur kinerjanya berdasarkan indikator kinerja yaitu produksi perikanan, jumlah kelompok binaan, serta tingkat konsumsi ikan. Peningkatan produksi perikanan tangkap ataupun budidaya menjadi sasaran Program/kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Takalar yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat baik nelayan ataupun pembudidaya perikanan.

2.2.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Takalar

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan:

1. Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sektor Perikanan yang terealisasi pada Semester I tahun 2024 adalah mencapai 8,81% dari target 12,80%.
2. Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap yang terealisasi

pada Semester I tahun 2024 mencapai 79,16% dari target 9,30%.

3. Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya yang terealisasi pada Semester I tahun 2024 mencapai 74,70% dari target 9,60%.
4. Persentase Peningkatan Produksi Pengolahan Hasil Perikanan yang terealisasi pada Semester I tahun 2024 mencapai 89,40% dari target 7,10%.
5. Nilai Indeks reformasi birokrasi Dinas Perikanan pada Semester I tahun 2024 belum medapat penilaian dari pihak yang berwenang.
6. Nilai SAKIP Dinas Perikanan Kabupaten Takalar memperoleh nilai B.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Kabupaten Takalar dapat juga dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.6
Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Kabupaten Takalar

Indikator	Target Tahun 2024	Realisasi Pada Semester I Tahun 2024	Perangkat Daerah/Penanggung jawab
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sektor Perikanan	12,80%	8,81%	Dinas Perikanan
Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	9,30%	79,16%	Dinas Perikanan/Bidang PUPPTPI
Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	9,60%	74,70%	Dinas Perikanan/Bidang Perikanan Budidaya
Persentase Peningkatan Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	7,10%	89,40%	Dinas Perikanan/Bidang Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak garam
Indeks reformasi birokrasi Dinas Perikanan	CC		Dinas Perikanan
Nilai SAKIP Dinas Perikanan	B	B	Dinas Perikanan

2.2.2. Capaian SPM Dinas Perikanan Kabupaten Takalar

Dinas Perikanan Kabupaten Takalar tidak memiliki target capaian SPM.

2.2.3. Capaian SDGs Dinas Perikanan Kabupaten Takalar

Untuk SDGs Dinas Perikanan Kabupaten Takalar tidak termasuk sebagai Perangkat Daerah yang memiliki target SDGs.

2.2.4. Capaian NSPK Dinas Perikanan Kabupaten Takalar

Dinas Perikanan Kabupaten Takalar belum pernah melakukan perhitungan NSPK atau Norma Standar Prosedur dan Kriteria.

2.2.5. Dukungan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perikanan Kabupaten Takalar terhadap Pembangunan Daerah

Realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perikanan pada Semester I tahun 2024 adalah:

1. Jumlah Rumah Tangga Nelayan yang melakukan diversifikasi Usaha (RTP) pada Semester I tahun 2024 mencapai realisasi sebesar 5.004 RTP dari target 4.269 RTP.
2. Persentase tempat Pelelangan ikan yang operasional pada Semester I tahun 2024 mencapai realisasi sebesar 3 TPI dari target 4 TPI.
3. Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di Bidang Pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (Satu) daerah Kab/Kota yang diterbitkan adalah bukan merupakan kewenangan Dinas Perikanan Kabupaten Takalar.
4. Jumlah Pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses Iptek dan Informasi/ dan Penguatan Kelembagaan pada Semester I tahun 2024 mencapai realisasi sebesar 79 Klp dari target 64 Klp.
5. Jumlah benih Budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi pada Semester I tahun 2024 mencapai realisasi sebesar 33.996.000 ekor benih

ikan dari target 67.272.684 ekor benih ikan.

6. Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten /Kota pada Semester I tahun 2024 mencapai realisasi sebesar 644.069 Ton dari target 604.130 Ton.

   Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perikanan Kabupaten Takalar sampai dengan Triwulan II tahun 2024 dapat juga dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.7
Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Kabupaten Takalar

Indikator	Target Tahun 2024	Realisasi Pada Semester I Tahun 2024	Perangkat Daerah/Penanggung jawab
Jumlah Rumah Tangga Nelayan yang melakukan diversifikasi Usaha (RTP)	4269 RTP	5004 RTP	Dinas Perikanan/Bidang PUPPTPI
Persentase tempat Pelelangan ikan yang operasional	4 TPI	3 TPI	Dinas Perikanan/Bidang PUPPTPI
Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di Bidang Pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (Satu) daerah Kab/Kota yang diterbitkan	(Tidak ada) Bukan Menjadi Kewenangan Dinas Perikana untuk menerbitkan SIUP	(Tidak ada) Bukan Menjadi Kewenangan Dinas Perikana untuk menerbitkan SIUP	Dinas PTSP
Jumlah Pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses Iptek dan Informasi/ dan Penguatan Kelembagaan	54 klp (100%)	79 klp (100%)	Dinas Perikanan/Bidang Perikanan Budidaya
Jumlah benih Budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi	67.272.684	33.996.000	Dinas Perikanan/Bidang Perikanan Budidaya
Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten /Kota	604.130 Ton	644.069 Ton	Dinas Perikanan/Bidang Perikanan Budidaya dan PUPPTPI

2.3. Kendala dan Solusi Penyelesaian Permasalahan Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Takalar Tahun 2024

2.3.1. Kendala Dalam Capaian Rencana Kerja

Dalam pelaksanaan program kegiatan Tahun Anggaran 2024, sampai dengan Triwulan II, pencapaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Takalar, mencapai 28,46%. Ada beberapa faktor penyebab pencapaian kinerja tersebut, diantaranya:

1. Serapan Anggaran yang tidak optimal karena terbatasnya penyediaan dana yang dapat dicairkan pada setiap permintaan dana, sehingga mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan;
2. SDM, dalam hal ini adalah Pegawai/Operator Layanan yang masih minim dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Kualitas pegawai yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar masih perlu ditingkatkan, dilihat dari pencapaian kinerja beberapa pegawai yang masih kurang optimal, kemampuan dalam bidang IT masih terbatas;
3. Sarana dan Prasarana, Dinas Perikanan Kabupaten Takalar memiliki sarana dan prasarana yang belum memadai. Selain jumlahnya yang terbatas, juga usia penggunaanya yang sudah lama, sehingga dapat memperlambat kinerja.

2.3.2. Solusi Penyelesaian Permasalahan Pelaksanaan Rencana Kerja

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Takalar, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Rencana Kerja dapat berasal dari beberapa unsur, maka dari itu sebagai pemenuhan pemecahan masalah dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaturan proyeksi penyediaan anggaran tepat waktu yang diberikan oleh pihak perangkat daerah terkait guna mengoptimalkan serapan anggaran;
2. Pemeberian bimbingan teknis, sosialisasi dan pelatihan kepada aparatur untuk meningkatkan SDM serta meningkatkan disiplin aparatur dalam

pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran dan keuangan sesuai standar operasional prosedur (SOP);

3. Penyediaan sarana dan prasarana aparatur yang lengkap dan memadai;
4. Melakukan Sosialisasi dan Bimbingan Tehnik secara intesif kepada masyarakat pesisir tentang pengolahan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan;
5. Memberikan bimbingan tentang informasi serta promosi mengenai produk unggulan hasil kelautan dan perikanan di daerah;
6. Menyediakan pemetaan kawasan budidaya laut, payau dan air tawar;
7. Memberikan sarana dan prasarana alat tangkap dan fasilitas budidaya yang berkualitas serta memadai;

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN TAKALAR

3.1. Tujuan Dan Sasaran

Mendasari hasil evaluasi kinerja Dinas Perikanan Tahun 2017 - 2022, tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2017 - 2022 mengalami perubahan setelah disesuaikan dengan dinamika isu-isu nasional dan lokal yang tertuang di dalam tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Takalar Tahun 2023 - 2026. Oleh karena itu perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Takalar Tahun 2024 didasarkan pada perumusan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026. Adapun perubahan rumusan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

3.1.1. Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu periode perencanaan. Tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Dinas Perikanan Kabupaten Takalar yang memiliki keterkaitan dengan visi misi yang ingin dicapai. Adapun tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan;
2. Meningkatkan tata kelola kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Takalar.

3.1.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif.

Sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Takalar adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pengelolaan perikanan tangkap
2. Meningkatnya pengelolaan perikanan budidaya
3. Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
4. Meningkatnya tata kelola Dinas Perikanan Kabupaten Takalar.

Tabel III.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan Takalar

No	Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Pada Tahun Ke-				Kondisi Akhir
						2023	2024	2025	2026	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tujuan 1.	Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perikanan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sektor Perikanan	%	12,51	12,8	13,3	13,5	13,8	13,76
	Sasaran 1.1.	Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	7,84	9,34	11,3	13,3	14,3	14,25
	Sasaran 1.2.	Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan produksi Perikanan Budidaya	%	8,56	9,65	10,8	12,3	13,3	13,25
	Sasaran 1.3.	Meningkatnya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	%	6,13	7,13	8,26	9,52	0,47	11,2
2	Tujuan 2.	Meningkatkan Tata Kelola Dinas Perikanan	Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Perikanan	Nilai	C	CC	B	B	BB	BB
	Sasaran 2.1.	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dinas Perikanan	Nilai SAKIP Dinas Perikanan	Nilai	CC	B	B	B	BB	BB

3.2. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Takalar Tahun 2024

Rencana Kerja awal Dinas Perikanan Kabupaten Takalar Tahun 2024 yang dievaluasi meliputi 4 (Empat) Program, 16 (Enam Belas) Kegiatan dan 28 (Dua Puluh Delapan) Sub Kegiatan. Uraian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

3.2.1. Program

1. Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
2. Pengelolaan perikanan tangkap
3. Pengelolaan perikanan budidaya
4. Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

3.2.2. Kegiatan

1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
2. Administrasi keuangan perangkat daerah
3. Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
4. Administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah
5. Administrasi kepegawaian perangkat daerah
6. Administrasi umum perangkat daerah
7. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
8. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
9. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
10. Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota
11. Pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (tpi)
12. Pemberdayaan pembudi daya ikan kecil
13. Pengelolaan pembudidaya ikan
14. Penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil

15. Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil
16. Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota

3.2.3. Sub kegiatan

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
7. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
8. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
9. Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
10. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
11. Fasilitasi Kunjungan Tamu
12. Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
13. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
14. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
15. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
16. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
17. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
18. Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan
19. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
20. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
21. Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

22. Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
23. Penyediaan Data dan Informasi Pembudidaya Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
24. Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (Satu) Dearah kabupaten/Kota
25. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten/Kota
26. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standart pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
27. Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
28. Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sesuai instruksi adanya perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2024, maka terdapat pengurangan pagu anggaran. Anggaran Rencana Kerja Awal sebesar Rp. 6.456.905.272 dan dari hasil evaluasi berkurang sebesar Rp. 115.924.176 sehingga anggaran menjadi Rp. 6.340.981.096. Perubahan Rencana Kerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.2
Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Takalar Tahun 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Kinerja RENCANA KERJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024			Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Rencana Kerja 2024	APBD 2024	Rencana Kerja Perubahan 2024	Rencana Kerja 2024	APBD 2024	Rencana Kerja Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							15.249.473.295	6.456.905.272	6.340.981.096	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar	DAU, Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD			Kabupaten Takalar		15.346.281.058	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		100%	100%	100%	100%	100%	15.249.473.295	6.456.905.272	6.340.981.096	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar	DAU dan Lain-Lain PAD			Dinas Perikanan Kabupaten Takalar	100%	15.346.281.058	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar
	3	25	01			PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	18,82%	100%	100%	100%	6.391.397.140	4.926.759.445	4.810.835.269	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar	DAU dan Lain-Lain PAD			Dinas Perikanan Kabupaten Takalar	100%	6.488.204.903	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar
	3	25	01	2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	PERSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG DISUSUN TEPAT WAKTU	100%	25%	100%	100%	100%	89.816.780	5.052.900	5.052.900	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar	DAU dan Lain-Lain PAD			Dinas Perikanan Kabupaten Takalar	100%	89.816.780	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar
	3	25	01	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun	8 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	11.539.830	2.052.900	2.052.900	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar	Lain-Lain PAD			Dinas Perikanan Kabupaten Takalar	2 Dokumen	11.539.830	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar
	3	25	01	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang Disusun	8 Dokumen	-	2 Dokumen	-	-	11.539.830	-	-	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar	Lain-Lain PAD			Dinas Perikanan Kabupaten Takalar	2 Dokumen	11.539.830	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar
	3	25	01	2.01	3	Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen RKA SKPD	4 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-	6.319.850	-	-	Dinas Perikanan	Lain-Lain PAD			Dinas Perikanan	1 Dokumen	6.319.850	Dinas Perikanan

						Perubahan RKA SKPD	Perubahan yang Disusun									Kabupaten Takalar				Kabupaten Takalar			Kabupaten Takalar
	3	25	01	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang Disusun	4 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-	6.619.960	-	-	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar	Lain-Lain PAD			Dinas Perikanan Kabupaten Takalar	1 Dokumen	6.619.960	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar
	3	25	01	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang Disusun	4 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-	6.319.850	-	-	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar	Lain-Lain PAD			Dinas Perikanan Kabupaten Takalar	1 Dokumen	6.319.850	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar
	3	25	01	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja yang Disusun	4 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6.619.960	1.500.000	1.500.000	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar	Lain-Lain PAD			Dinas Perikanan Kabupaten Takalar	1 Dokumen	6.619.960	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar
	3	25	01	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	40.857.500	1.500.000	1.500.000	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar	Lain-Lain PAD			Dinas Perikanan Kabupaten Takalar	12 Laporan	40.857.500	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar
	3	**25**	**01**	**2.02**		**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**PERSENTASE LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH YANG DISUSUN TEPAT WAKTU**	**100%**	**17,26%**	**100%**	**100%**	**100%**	**5.295.354.915**	**4.527.266.807**	**4.411.342.631**	**Dinas Perikanan Kabupaten Takalar**	**DAU dan Lain-Lain PAD**			**Dinas Perikanan Kabupaten Takalar**	**100%**	**5.092.162.678**	**Dinas Perikanan Kabupaten Takalar**
	3	25	01	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang menerima Gaji dan Tunjangan	560 Orang/Bulan	1085 Orang/ Bulan	140 Orang/Bulan	90 Orang/Bulan	90 Orang/Bulan	5.265.355.700	4.524.266.807	4.408.342.631	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar	DAU			Dinas Perikanan Kabupaten Takalar		5.062.163.463	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar
						Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang menerima Gaji dan Tunjangan	240 Orang/Bulan	516 Orang/ Bulan	60 Orang/Bulan	45 Orang/Bulan	45 Orang/Bulan	3.259.271.687	3.258.971.687	3.258.971.687	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar	DAU			Dinas Perikanan Kabupaten Takalar		3.259.271.687	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar
						Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)	Jumlah Pegawai yang menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)	240 Orang/Bulan	504 Orang/ Bulan	60 Orang/Bulan	45 Orang/Bulan	45 Orang/Bulan	1.265.295.120	1.265.295.120	1.149.370.944	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar	DAU			Dinas Perikanan Kabupaten Takalar		1.265.295.120	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar
						Belanja Tunjangan Objektifitas Lainnya	Jumlah Pegawai yang menerima Objektifitas lainnya	80 Orang/Bulan	65 Orang/ Bulan	20 Orang/Bulan	-	-	740.788.893	-	-	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar	DAU			Dinas Perikanan Kabupaten Takalar		537.596.656	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar
	3	25	01	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan yang Diverifikasi	48 Dokumen	-	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	9.999.695	1.500.000	1.500.000	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar	Lain-Lain PAD			Dinas Perikanan Kabupaten Takalar	12 Dokumen	9.999.695	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar
	3	25	01	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	4 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	9.999.780	1.500.000	1.500.000	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar	Lain-Lain PAD			Dinas Perikanan Kabupaten Takalar	1 Dokumen	9.999.780	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar

	3	25	01	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan keuangan Semsteran	16 Dokumen	-	4 Dokumen	-	-	9.999.740	-	-	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar	Lain-Lain PAD			Dinas Perikanan Kabupaten Takalar	4 Dokumen	9.999.740	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar
	3	**25**	**01**	**2.03**		**ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH**	**PERSENTASE KEGIATAN ADMINISTRASI BMD**	**100%**	**0%**	**100%**	**100%**	**100%**	**19.965.850**	**1.500.000**	**1.500.000**	**Dinas Perikanan Kabupaten Takalar**	**Lain-Lain PAD**			**Dinas Perikanan Kabupaten Takalar**	**100%**	**19.965.850**	**Dinas Perikanan Kabupaten Takalar**
	3	25	01	2.03	4	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan BMD	24 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	7.680.500	1.500.000	1.500.000	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar	Lain-Lain PAD			Dinas Perikanan Kabupaten Takalar	12 Laporan	7.680.500	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar
	3	25	01	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekon Barang Milik Daerah yang Disusun	8 Laporan	-	2 Laporan	-	-	7.423.100	-	-	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar	Lain-Lain PAD			Dinas Perikanan Kabupaten Takalar	2 Laporan	7.423.100	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar
	3	25	01	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan BMD	48 Dokumen	-	12 Dokumen	-	-	4.862.250	-	-	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar	Lain-Lain PAD			Dinas Perikanan Kabupaten Takalar	12 Dokumen	4.862.250	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar
	3	**25**	**01**	**2.04**		**ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH**	**PERSENTASE PENYUSUNAN LAPORAN PAD YANG DIKELOLA**	**100%**	**0%**	**100%**	**100%**	**100%**	**59.596.520**	**17.885.000**	**17.885.000**	**Dinas Perikanan Kabupaten Takalar**	**Lain-Lain PAD**			**Dinas Perikanan Kabupaten Takalar**	**100%**	**59.596.520**	**Dinas Perikanan Kabupaten Takalar**
	3	25	01	2.04	5	Pengelolaan Data Retribusi Daerah	Jumlah Pengelolaan Data Retribusi Daerah	48 Dokumen	-	12 Dokumen	-	-	29.798.260	-	-	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar	Lain-Lain PAD			Dinas Perikanan Kabupaten Takalar	12 Dokumen	29.798.260	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar
	3	25	01	2.04	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	48 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	29.798.260	17.885.000	17.885.000	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar	Lain-Lain PAD			Dinas Perikanan Kabupaten Takalar	12 Laporan	29.798.260	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar
	3	**25**	**01**	**2.05**		**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	**PERSENTASE PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	**100%**	**0%**	**100%**	**100%**	**100%**	**97.334.025**	**1.500.000**	**1.500.000**	**Dinas Perikanan Kabupaten Takalar**	**Lain-Lain PAD**			**Dinas Perikanan Kabupaten Takalar**	**100%**	**97.334.025**	**Dinas Perikanan Kabupaten Takalar**
	3	25	01	2.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Koordinasi dan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	48 Kali	-	12 Kali	-	-	20.724.025	-	-	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar	Lain-Lain PAD			Dinas Perikanan Kabupaten Takalar	12 Kali	20.724.025	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar
	3	25	01	2.05	7	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pendataan Administrasi Kepegawaian yang dikelola	240 Dokumen	-	60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	30.000.000	1.500.000	1.500.000	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar	Lain-Lain PAD			Dinas Perikanan Kabupaten Takalar	60 Dokumen	30.000.000	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar

	3	25	01	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang diberikan pendidikan dan pelatihan	8 Orang	-	2 Orang	-	-	46.610.000	-	-	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar	Lain-Lain PAD			Dinas Perikanan Kabupaten Takalar	2 Orang	46.610.000	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar
	3	**25**	**01**	**2.06**		**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**PERSENTASE PELAKSANAAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**100%**	**1,29%**	**100%**	**100%**	**100%**	**291.051.000**	**229.878.000**	**229.878.000**	**Dinas Perikanan Kabupaten Takalar**	**Lain-Lain PAD**			**Dinas Perikanan Kabupaten Takalar**	**100%**	**291.051.000**	**Dinas Perikanan Kabupaten Takalar**
	3	25	01	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik/Instalasi Yang disediakan	4 Paket	-	1 Paket	-	-	7.500.000	-	-	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar	Lain-Lain PAD			Dinas Perikanan Kabupaten Takalar	1 Paket	7.500.000	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar
	3	25	01	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung kantor Yang Disediakan	4 Unit	-	1 Unit	-	-	7.500.000	-	-	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar	Lain-Lain PAD			Dinas Perikanan Kabupaten Takalar	1 Unit	7.500.000	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar
	3	25	01	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	4 Paket	-	1 Paket	-	-	5.206.000	-	-	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar	Lain-Lain PAD			Dinas Perikanan Kabupaten Takalar	1 Paket	5.206.000	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar
	3	25	01	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan	5200 Lembar	-	1300 Lembar	1300 Lembar	1300 Lembar	10.500.000	1.506.000	1.506.000	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar	Lain-Lain PAD			Dinas Perikanan Kabupaten Takalar	1300 Lembar	10.500.000	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar
	3	25	01	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang Disediakan	48 Examplar	-	12 Examplar	-	-	15.000.000	-	-	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar	Lain-Lain PAD			Dinas Perikanan Kabupaten Takalar	12 Examplar	15.000.000	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar
	3	25	01	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	300 Orang	-	75 Orang	75 Orang	75 Orang	237.845.000	3.667.000	3.667.000	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar	Lain-Lain PAD			Dinas Perikanan Kabupaten Takalar	75 Orang	237.845.000	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar
	3	25	01	2.06	9	Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1200 Laporan	75 Laporan	300 Laporan	300 Laporan	300 Laporan	7.500.000	224.705.000	224.705.000	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar	Lain-Lain PAD			Dinas Perikanan Kabupaten Takalar	12 Laporan	7.500.000	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar
	3	**25**	**01**	**2.07**		**PERSENTASE PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**PERSENTASE PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**100%**	**0%**	**100%**	**-**	**-**	**93.666.050**	**-**	**-**	**Dinas Perikanan Kabupaten Takalar**	**Lain-Lain PAD**			**Dinas Perikanan Kabupaten Takalar**	**100%**	**93.666.050**	**Dinas Perikanan Kabupaten Takalar**
	3	25	01	2.07	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	-	3 Unit	-	-	93.666.050	-	-	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar	Lain-Lain PAD			Dinas Perikanan Kabupaten Takalar	3 Unit	93.666.050	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar
	3	**25**	**01**	**2.08**		**PENYEDIAAN JASA**	**PERSENTASE PENYEDIAAN**	**100%**	**25%**	**100%**	**100%**	**100%**	**240.000.000**	**120.944.438**	**120.944.438**	**Dinas Perikanan**	**Retribusi Daerah**			**Dinas Perikanan**	**100%**	**240.000.000**	**Dinas Perikanan**

						PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**									**Kabupaten Takalar**				**Kabupaten Takalar**			**Kabupaten Takalar**
	3	25	01	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	48.000.000	45.344.438	45.344.438	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar	Retribusi Daerah			Dinas Perikanan Kabupaten Takalar	12 Laporan	48.000.000	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar
	3	25	01	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	192.000.000	75.600.000	75.600.000	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar	Retribusi Daerah			Dinas Perikanan Kabupaten Takalar	12 Laporan	192.000.000	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar
	3	**25**	**01**	**2.09**		**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA APARATUR YANG LAYAK FUNGSI**	**100%**	**25,53%**	**100%**	**100%**	**100%**	**204.612.000**	**22.732.300**	**22.732.300**	**Dinas Perikanan Kabupaten Takalar**	**Lain-Lain PAD**			**Dinas Perikanan Kabupaten Takalar**	**100%**	**504.612.000**	**Dinas Perikanan Kabupaten Takalar**
	3	25	01	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	84 Unit	-	21 Unit	-	-	100.000.000	-	-	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar	Lain-Lain PAD			Dinas Perikanan Kabupaten Takalar	21 Unit	300.000.000	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar
							Jumlah Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM)	3.224 Liter	3.600 Liter	806 Liter	806 Liter	806 Liter	81.029.000	16.299.400	16.299.400	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar	Lain-Lain PAD			Dinas Perikanan Kabupaten Takalar	12.930 Liter	181.029.000	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar
	3	25	01	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	8 Unit	-		4 Unit	4 Unit		1.420.000	1.420.000	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar	Lain-Lain PAD			Dinas Perikanan Kabupaten Takalar	-	-	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar
	3	25	01	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	1 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	5.400.000	5.012.900	5.012.900	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar	Lain-Lain PAD			Dinas Perikanan Kabupaten Takalar	4 Unit	5.400.000	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar
	3	25	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpeliharah	4 Unit	-	1 Unit	-	-	18.183.000	-	-	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar	Lain-Lain PAD			Dinas Perikanan Kabupaten Takalar	1 Unit	18.183.000	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar
	3	**25**	**03**			**PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Persentase Pengelolaan Perikanan Tangkap**	**100%**	**22,94%**	**100%**	**100%**	**100%**	**7.108.077.000**	**714.851.300**	**714.851.300**	**Kabupaten Takalar/Semua Kecamatan, Desa dan**	**Lain-Lain PAD**			**Masyarakat Nelayan**	**100%**	**7.108.077.000**	**Dinas Perikanan Kabupaten Takalar**

																Keluarahan						
	3	**25**	**03**	**2.01**		**PENGELOLAAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM 1 (Satu) DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Cakupan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**100%**	**18,97%**	**100%**	**100%**	**100%**	**7.008.077.000**	**604.851.300**	**604.851.300**	**Kabupaten Takalar/Semua Kecamatan, Desa dan Keluarahan**	**Lain-Lain PAD**			**Masyarakat Nelayan**	**100%**	**7.008.077.000**	**Dinas Perikanan Kabupaten Takalar**
	3	25	03	2.01	1	Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	48 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000	5.000.000	5.000.000	Kabupaten Takalar/Semua Kecamatan, Desa dan Keluarahan	Lain-Lain PAD			Masyarakat Nelayan	12 Dokumen	50.000.000	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar
	3	25	03	2.01	2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Penyediaan Prasarana Perikanan Tangkap	68 Paket	10 Dokumen	17 Paket	17 Paket	17 Paket	352.050.000	599.851.300	599.851.300	Kabupaten Takalar/Semua Kecamatan, Desa dan Keluarahan	Lain-Lain PAD			Masyarakat Nelayan	17 Paket	352.050.000	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar
	3	25	03	2.01	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Ketersediaan Sarana Penangkapan Ikan	228 Paket	-	57 Paket	-	-	6.606.027.000	-	-	Kabupaten Takalar/Semua Kecamatan, Desa dan Keluarahan	Lain-Lain PAD			Masyarakat Nelayan	57 Paket	6.606.027.000	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar
	3	**25**	**03**	**2.02**		**PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Cakupan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**27%**	**100%**	**100%**	**100%**	**50.000.000**	**105.000.000**	**105.000.000**	**Kabupaten Takalar/Semua Kecamatan, Desa dan Keluarahan**	**Lain-Lain PAD**			**Masyarakat Nelayan**	**100%**	**50.000.000**	**Dinas Perikanan Kabupaten Takalar**
	3	25	03	2.02	1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	80 Orang Nelayan	70 Orang Nelayan	20 Orang Nelayan	20 Orang Nelayan	20 Orang Nelayan	50.000.000	105.000.000	105.000.000	Kabupaten Takalar/Semua Kecamatan, Desa dan Keluarahan	Lain-Lain PAD			Masyarakat Nelayan	20 Orang Nelayan	50.000.000	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar
	3	**25**	**03**	**2.03**		**PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPi)**	**Persentase Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	**100%**	**0%**	**100%**	**100%**	**100%**	**50.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**Kabupaten Takalar/Semua Kecamatan, Desa dan**	**Lain-Lain PAD**			**Masyarakat Nelayan**	**100%**	**50.000.000**	**Dinas Perikanan Kabupaten Takalar**

																Keluarahan						
	3	25	03	2.03	1	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	12 Kali	-	3 Kali	3 Kali	3 Kali	50.000.000	5.000.000	5.000.000	Kabupaten Takalar/Semua Kecamatan, Desa dan Keluarahan	Lain-Lain PAD			Masyarakat Nelayan	3 Kali	50.000.000	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar
	3	**25**	**04**			**PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Persentase Pengelolaan Perikanan Budidaya**	**100%**	**31,53%**	**100%**	**100%**	**100%**	**1.300.000.000**	**595.294.650**	**595.294.650**	**Kabupaten Takalar/Semua Kecamatan, Desa dan Keluarahan**	**Lain-Lain PAD**			**Masyarakat Pembudidaya**	**100%**	**1.300.000.000**	**Dinas Perikanan Kabupaten Takalar**
	3	**25**	**04**	**2.02**		**PEMBERDAYAAN PEMBUDI DAYA IKAN KECIL**	**Persentase Cakupan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**100%**	**41,18%**	**100%**	**100%**	**100%**	**200.000.000**	**85.294.700**	**85.294.700**	**Kabupaten Takalar/Semua Kecamatan, Desa dan Keluarahan**	**Lain-Lain PAD**			**Masyarakat Pembudidaya**	**100%**	**200.000.000**	**Dinas Perikanan Kabupaten Takalar**
	3	25	04	2.02	4	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	60 Kelompok	35 Kelompok	15 Kelompok	15 Kelompok	15 Kelompok	200.000.000	85.294.700	85.294.700	Kabupaten Takalar/Semua Kecamatan, Desa dan Keluarahan	Lain-Lain PAD			Masyarakat Pembudidaya	25 Kelompok	200.000.000	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar
	3	**25**	**04**	**2.04**		**PENGELOLAAN PEMBUDIDAYA IKAN**	**Persentase Cakupan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**100%**	**21,88%**	**100%**	**100%**	**100%**	**1.100.000.000**	**509.999.950**	**509.999.950**	**Kabupaten Takalar/Semua Kecamatan, Desa dan Keluarahan**	**Lain-Lain PAD**			**Masyarakat Pembudidaya**	**100%**	**1.100.000.000**	**Dinas Perikanan Kabupaten Takalar**
	3	25	04	2.04	1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidaya Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	16 Dokumen	9 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	37.258.000	5.000.000	5.000.000	Kabupaten Takalar/Semua Kecamatan, Desa dan Keluarahan	Lain-Lain PAD			Masyarakat Pembudidaya	12 Dokumen	37.258.000	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar
	3	25	04	2.04	2	Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (Satu) Dearah kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	16 Paket	5 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	562.742.000	504.999.950	504.999.950	Kabupaten Takalar/Semua Kecamatan, Desa dan Keluarahan	Lain-Lain PAD			Masyarakat Pembudidaya	4 Paket	562.742.000	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar
	3	25	04	2.04	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana	Jumlah Ketersediaan sarana	32 Paket	-	8 Paket	-	-	500.000.000	-	-	Kabupaten Takalar/Semua	Lain-Lain PAD			Masyarakat Pembudidaya	8 Paket	500.000.000	Dinas Perikanan

						Pembudidaya Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembudidaya ikan yang Tersedia									Kecamatan, Desa dan Keluarahan							Kabupaten Takalar
	3	**25**	**06**			**PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Persentase poklahsar yang meningkat kelasnya**	**100%**	**36,59%**	**100%**	**100%**	**100%**	**449.999.155**	**219.999.877**	**219.999.877**	**Kabupaten Takalar/Semua Kecamatan, Desa dan Keluarahan**	**Lain-Lain PAD**			**Masyarakat Nelayan, Pembudidaya dan Kelompok Usaha Perikanan**	**100%**	**449.999.155**	**Dinas Perikanan Kabupaten Takalar**
	3	**25**	**06**	**2.01**		**PENERBITAN TANDA DAFTAR USAHA PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA SKALA MIKRO DAN KECIL**	**Persentase Cakupan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	**100%**	**25%**	**100%**	**100%**	**100%**	**49.999.489**	**3.382.100**	**3.382.100**	**Kabupaten Takalar/Semua Kecamatan, Desa dan Keluarahan**	**Lain-Lain PAD**			**Masyarakat Nelayan, Pembudidaya dan Kelompok Usaha Perikanan**	**100%**	**49.999.489**	**Dinas Perikanan Kabupaten Takalar**
	3	25	06	2.01	1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	12 Dokumen	12 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	49.999.489	3.382.100	3.382.100	Kabupaten Takalar/Semua Kecamatan, Desa dan Keluarahan	Lain-Lain PAD			Masyarakat Nelayan, Pembudidaya dan Kelompok Usaha Perikanan	12 Dokumen	49.999.489	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar
	3	**25**	**06**	**2.02**		**PEMBINAAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SKALA MIKRO DAN KECIL**	**Persentase Cakupan Kegiatan Pembinaan mutu dan Kemanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**100%**	**37,31%**	**100%**	**100%**	**100%**	**249.999.926**	**116.087.300**	**116.087.300**	**Kabupaten Takalar/Semua Kecamatan, Desa dan Keluarahan**	**Lain-Lain PAD**			**Masyarakat Nelayan, Pembudidaya dan Kelompok Usaha Perikanan**	**100%**	**249.999.926**	**Dinas Perikanan Kabupaten Takalar**
	3	25	06	2.02	1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standart pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	40 Unit	25 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	249.999.926	116.087.300	116.087.300	Kabupaten Takalar/Semua Kecamatan, Desa dan Keluarahan	Lain-Lain PAD			Masyarakat Nelayan, Pembudidaya dan Kelompok Usaha Perikanan	10 Unit	249.999.926	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar

	3	**25**	**06**	**2.03**		**PENYEDIAAN DAN PENYALURAN BAHAN BAKU INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Cakupan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/kota**	**100%**	**17,14%**	**100%**	**100%**	**100%**	**149.999.740**	**100.530.477**	**100.530.477**	**Kabupaten Takalar/Semua Kecamatan, Desa dan Keluarahan**	**Lain-Lain PAD**			**Masyarakat Nelayan, Pembudidaya dan Kelompok Usaha Perikanan**	**100%**	**149.999.740**	**Dinas Perikanan Kabupaten Takalar**
	3	25	06	2.03	1	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	16 Kali	-	4 Kali	4 Kali	4 Kali	100.000.000	3.440.000	3.440.000	Kabupaten Takalar/Semua Kecamatan, Desa dan Keluarahan	Lain-Lain PAD			Masyarakat Nelayan, Pembudidaya dan Kelompok Usaha Perikanan	12 Kali	100.000.000	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar
	3	25	06	2.03	2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	8 Pelaku Usaha	12 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	49.999.740	97.090.477	97.090.477	Kabupaten Takalar/Semua Kecamatan, Desa dan Keluarahan	Lain-Lain PAD			Masyarakat Nelayan, Pembudidaya dan Kelompok Usaha Perikanan	20 Pelaku Usaha	49.999.740	Dinas Perikanan Kabupaten Takalar
	J U M L A H												**15.249.473.295**	**6.456.905.272**	**6.340.981.096**							**15.346.281.058**	

Tabel III.3
Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target Dan Pagu Pada Perubahan Rencana Kerja
Dinas Perikanan Kabupaten Takalar Tahun 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target			Pagu			Keterangan
						Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Rencana Kerja PD 2024	APBD 2024	Rencana Kerja Perubahan 2024	Rencana Kerja PD 2024	APBD 2024	Rencana Kerja Perubahan 2024	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						15.249.473.295	6.456.905.272	6.340.981.096	
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						15.249.473.295	6.456.905.272	6.340.981.096	
	3	25	1			PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	6.391.397.140	4.926.759.445	4.810.835.269	
	3	25	1	2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	PERSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG DISUSUN TEPAT WAKTU	PERSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG DISUSUN TEPAT WAKTU	100%	100%	100%	89.816.780	5.052.900	5.052.900	
	3	25	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	11.539.830	2.052.900	2.052.900	
	3	25	01	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang Disusun	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang Disusun	2 Dokumen	-	-	11.539.830	-	-	

							Dokumen RKA SKPD									
	3	25	01	2.01	3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD Perubahan yang Disusun	Jumlah Dokumen RKA SKPD Perubahan yang Disusun	1 Dokumen	-	-	6.319.850	-	-	
	3	25	01	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang Disusun	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang Disusun	1 Dokumen	-	-	6.619.960	-	-	
	3	25	01	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang Disusun	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang Disusun	1 Dokumen	-	-	6.319.850	-	-	
	3	25	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja yang Disusun	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6.619.960	1.500.000	1.500.000	
	3	25	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	40.857.500	1.500.000	1.500.000	
	3	**25**	**1**	**2.02**		**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**PERSENTASE LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH YANG DISUSUN TEPAT WAKTU**	**PERSENTASE LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH YANG DISUSUN TEPAT WAKTU**	**100%**	**100%**	**100%**	**5.295.354.915**	**4.527.266.807**	**4.411.342.631**	
	3	25	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang menerima Gaji dan Tunjangan	Jumlah Pegawai yang menerima Gaji dan Tunjangan	140 Orang/Bulan	90 Orang/Bulan	90 Orang/Bulan	5.265.355.700	4.524.266.807	4.408.342.631	
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Pegawai yang menerima Gaji dan Tunjangan	60 Orang/Bulan	45 Orang/Bulan	45 Orang/Bulan	3.259.271.687	3.258.971.687	3.258.971.687	
							Penyediaan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)		Jumlah Pegawai yang menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)	60 Orang/Bulan	45 Orang/Bulan	45 Orang/Bulan	1.265.295.120	1.265.295.120	1.149.370.944	

							Penyediaan Tunjangan Objektifitas Lainnya		Jumlah Pegawai yang menerima Objektifitas lainnya	20 Orang/Bulan	-	-	740.788.893	-	-	
	3	25	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan yang Diverifikasi	Jumlah Dokumen Keuangan yang Diverifikasi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	9.999.695	1.500.000	1.500.000	
	3	25	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	9.999.780	1.500.000	1.500.000	
	3	25	01	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan keuangan Semsteran	Jumlah Dokumen Laporan keuangan Semsteran	4 Dokumen	-	-	9.999.740	-	-	
	3	**25**	**1**	**2.03**		**ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH**	**ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH**	**PERSENTASE KEGIATAN ADMINISTRASI BMD**	**PERSENTASE KEGIATAN ADMINISTRASI BMD**	**100%**	**100%**	**100%**	**19.965.850**	**1.500.000**	**1.500.000**	
	3	25	1	2.03	4	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan BMD	Jumlah Laporan BMD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	7.680.500	1.500.000	1.500.000	
	3	25	01	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekon Barang Milik Daerah yang Disusun	Jumlah Laporan Rekon Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan	-	-	7.423.100	-	-	
	3	25	01	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan BMD	Jumlah Dokumen Penatausahaan BMD	12 Dokumen	-	-	4.862.250	-	-	
	3	**25**	**1**	**2.04**		**ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH**	**ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH**	**PERSENTASE PENYUSUNAN LAPORAN PAD YANG DIKELOLA**	**PERSENTASE PENYUSUNAN LAPORAN PAD YANG DIKELOLA**	**100%**	**100%**	**100%**	**59.596.520**	**17.885.000**	**17.885.000**	
	3	25	01	2.04	5	Pengelolaan Data Retribusi Daerah	Pengelolaan Data Retribusi Daerah	Jumlah Pengelolaan Data Retribusi Daerah	Jumlah Pengelolaan Data Retribusi Daerah	12 Dokumen	-	-	29.798.260	-	-	

	3	25	1	2.04	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	29.798.260	17.885.000	17.885.000	
	3	**25**	**1**	**2.05**		**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	**PERSENTASE PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	**PERSENTASE PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	**100%**	**100%**	**100%**	**97.334.025**	**1.500.000**	**1.500.000**	
	3	25	01	2.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Koordinasi dan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Koordinasi dan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Kali	-	-	20.724.025	-	-	
	3	25	1	2.05	7	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pendataan Administrasi Kepegawaian yang dikelola	Jumlah Pendataan Administrasi Kepegawaian yang dikelola	60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	30.000.000	1.500.000	1.500.000	
	3	25	01	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang diberikan pendidikan dan pelatihan	Jumlah pegawai yang diberikan pendidikan dan pelatihan	2 Orang	-	-	46.610.000	-	-	
	3	**25**	**1**	**2.06**		**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**PERSENTASE PELAKSANAAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**PERSENTASE PELAKSANAAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**100%**	**100%**	**100%**	**291.051.000**	**229.878.000**	**229.878.000**	
	3	25	01	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik/Instalasi Yang disediakan	Jumlah Komponen Listrik/Instalasi Yang disediakan	1 Paket	-	-	7.500.000	-	-	
	3	25	01	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung kantor Yang Disediakan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung kantor Yang Disediakan	1 Unit	-	-	7.500.000	-	-	
	3	25	01	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	1 Paket	-	-	5.206.000	-	-	
	3	25	01	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan	1300 Lembar	1300 Lembar	1300 Lembar	10.500.000	1.506.000	1.506.000	

	3	25	01	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang Disediakan	Jumlah Bahan Bacaan yang Disediakan	12 Examplar	-	-	15.000.000	-	-	
	3	25	01	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	75 Orang	75 Orang	75 Orang	237.845.000	3.667.000	3.667.000	
	3	25	01	2.06	9	Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	300 Laporan	300 Laporan	7.500.000	224.705.000	224.705.000	
	3	**25**	**01**	**2.07**		**PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**PERSENTASE PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**PERSENTASE PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**PERSENTASE PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**100%**	**-**	**-**	**93.666.050**	**-**	**-**	
	3	25	01	2.07	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	-	-	93.666.050	-	-	
	3	**25**	**1**	**2.08**		**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**PERSENTASE PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**PERSENTASE PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**100%**	**100%**	**100%**	**240.000.000**	**120.944.438**	**120.944.438**	
	3	25	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	48.000.000	45.344.438	45.344.438	
	3	25	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	192.000.000	75.600.000	75.600.000	
	3	**25**	**1**	**2.09**		**PEMELIHARAAN BARANG MILIK**	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK**	**PERSENTASE SARANA DAN**	**PERSENTASE SARANA DAN**	**100%**	**100%**	**100%**	**204.612.000**	**22.732.300**	**22.732.300**	

						DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**PRASARANA APARATUR YANG LAYAK FUNGSI**	**PRASARANA APARATUR YANG LAYAK FUNGSI**							
	3	25	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	-	-	100.000.000	-	-	
									Jumlah Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM)	806 Liter	806 Liter	806 Liter	81.029.000	16.299.400	16.299.400	
	3	25	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara		4 Unit	4 Unit		1.420.000	1.420.000	
	3	25	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	5.400.000	5.012.900	5.012.900	
	3	25	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpeliharah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpeliharah	1 Unit	-	-	18.183.000	-	-	
	3	**25**	**3**			**PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Persentase Pengelolaan Perikanan Tangkap**	**Persentase Pengelolaan Perikanan Tangkap**	**100%**	**100%**	**100%**	**7.108.077.000**	**714.851.300**	**714.851.300**	
	3	**25**	**3**	**2.01**		**PENGELOLAAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN**	**PENGELOLAAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN**	**Persentase Cakupan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat**	**Persentase Cakupan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang**	**100%**	**100%**	**100%**	**7.008.077.000**	**604.851.300**	**604.851.300**	

						DALAM 1 (Satu) DAERAH KABUPATEN/KOTA	**DALAM 1 (Satu) DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**							
	3	25	3	2.01	1	Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan	Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000	5.000.000	5.000.000	
	3	25	3	2.01	2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Penyediaan Prasarana Perikanan Tangkap	Jumlah Penyediaan Prasarana Perikanan Tangkap	17 Paket	17 Paket	17 Paket	352.050.000	599.851.300	599.851.300	
	3	25	3	2.01	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Ketersediaan Sarana Penangkapan Ikan	Jumlah Ketersediaan Sarana Penangkapan Ikan	57 Paket	-	-	6.606.027.000	-	-	
	3	25	3	2.02		PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	50.000.000	105.000.000	105.000.000	
	3	25	3	2.02	1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	20	20	20	50.000.000	105.000.000	105.000.000	
	3	**25**	**3**	**2.03**		**PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPi)**	**PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPi)**	**Persentase Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	**Persentase Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	**100%**	**100%**	**100%**	**50.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	
	3	25	3	2.03	1	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	3 Kali	3 Kali	3 Kali	50.000.000	5.000.000	5.000.000	
	3	**25**	**4**			**PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Persentase Pengelolaan Perikanan Budidaya**	**Persentase Pengelolaan Perikanan Budidaya**	**100%**	**100%**	**100%**	**1.300.000.000**	**595.294.650**	**595.294.650**	

	3	**25**	**4**	**2.02**		**PEMBERDAYAAN PEMBUDI DAYA IKAN KECIL**	**PEMBERDAYAAN PEMBUDI DAYA IKAN KECIL**	**Persentase Cakupan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**Persentase Cakupan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**100%**	**100%**	**100%**	**200.000.000**	**85.294.700**	**85.294.700**	
	3	25	4	2.02	4	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	15 Kelompok	15 Kelompok	15 Kelompok	200.000.000	85.294.700	85.294.700	
	3	**25**	**4**	**2.04**		**PENGELOLAAN PEMBUDIDAYA IKAN**	**PENGELOLAAN PEMBUDIDAYA IKAN**	**Persentase Cakupan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Persentase Cakupan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**100%**	**100%**	**100%**	**1.100.000.000**	**509.999.950**	**509.999.950**	
	3	25	4	2.04	1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidaya Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidaya Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	37.258.000	5.000.000	5.000.000	
	3	25	4	2.04	2	Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (Satu) Dearah kabupaten/Kota	Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (Satu) Dearah kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Paket	4 Paket	4 Paket	562.742.000	504.999.950	504.999.950	
	3	25	4	2.04	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ketersediaan sarana Pembudidaya ikan yang Tersedia	Jumlah Ketersediaan sarana Pembudidaya ikan yang Tersedia	8 Paket	-	-	500.000.000	-	-	

	3	**25**	**6**			**PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Persentase poklahsar yang meningkat kelasnya**	**Persentase poklahsar yang meningkat kelasnya**	**100%**	**100%**	**100%**	**449.999.155**	**219.999.877**	**219.999.877**	
	3	**25**	**6**	**2.01**		**PENERBITAN TANDA DAFTAR USAHA PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA SKALA MIKRO DAN KECIL**	**PENERBITAN TANDA DAFTAR USAHA PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA SKALA MIKRO DAN KECIL**	**Persentase Cakupan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	**Persentase Cakupan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	**100%**	**100%**	**100%**	**49.999.489**	**3.382.100**	**3.382.100**	
	3	25	6	2.01	1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	49.999.489	3.382.100	3.382.100	
	3	**25**	**6**	**2.02**		**PEMBINAAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SKALA MIKRO DAN KECIL**	**PEMBINAAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SKALA MIKRO DAN KECIL**	**Persentase Cakupan Kegiatan Pembinaan mutu dan Kemanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**Persentase Cakupan Kegiatan Pembinaan mutu dan Kemanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**100%**	**100%**	**100%**	**249.999.926**	**116.087.300**	**116.087.300**	
	3	25	6	2.02	1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standart pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standart pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai	10 Unit	10 Unit	10 Unit	249.999.926	116.087.300	116.087.300	

								Skala Usaha dan Risiko	Skala Usaha dan Risiko						
	3	**25**	**6**	**2.03**		**PENYEDIAAN DAN PENYALURAN BAHAN BAKU INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PENYEDIAAN DAN PENYALURAN BAHAN BAKU INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Cakupan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/kota**	**Persentase Cakupan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/kota**	**100%**	**100%**	**100%**	**149.999.740**	**100.530.477**	**100.530.477**	
	3	25	6	2.03	1	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Kali	4 Kali	4 Kali	100.000.000	3.440.000	3.440.000	
	3	25	6	2.03	2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	49.999.740	97.090.477	97.090.477	
	J U M L A H												**15.249.473.295**	**6.456.905.272**	**6.340.981.096**	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Takalar Tahun 2024 yang disusun, merupakan acuan yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Takalar adalah dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsinya.

Sebagai akhir dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Takalar Tahun 2024, berikut diuraikan kaidah pelaksanaannya:

1. Dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Takalar Tahun 2024, selanjutnya akan dijadikan bahan untuk menyusun RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2024 yang pembahasannya dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten;
2. Dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Takalar Tahun 2024, maka akan menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Perubahan Dinas Perikanan Kabupaten Takalar Tahun 2024, sebagai bahan Penyusunan APBD Kabupaten Takalar Tahun 2024 yang selanjutnya akan ditetapkan menjadi Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas Perikanan Kabupaten Takalar Tahun 2024;
3. Dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Takalar Tahun 2024, maka semua pihak dan kelompok

pemerhati (stake holders) yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah harus menjadikan Perubahan Rencana Kerja ini sebagai acuan dan arahan operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 pada Dinas Perikanan Kabupaten Takalar;

4. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Takalar Tahun 2024, akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja (SAKIP) Dinas Perikanan Kabupaten Takalar Tahun 2024 serta menjadi dasar laporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Tahun 2024;
5. Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Takalar Tahun 2024, kiranya dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi baik pada sekretariat dan bidang agar konsisten dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

Takalar, Juli 2024
Kepala Dinas,

H. BASO, S.Pd., M.Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19661231 198903 1 109

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PUTRPKP
TAHUN 2024







DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TAKALAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas ridha dan maghfirahnya sehingga Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUTRPKP) Kabupaten Takalar tahun 2024 dapat disusun. Salam dan taslim tak lupa kita kirimkan kepada Rasullullah Muhammad SAW, yang telah mengamanatkan ummatnya untuk senantiasa menuntut ilmu pengetahuan dari buaian sampai ke liang lahat.

Kami sadari bahwa Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUTRPKP) Kabupaten Takalar ini di susun sebagai dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman untuk pelaksanaan program kegiatan tahun yang akan datang. Perubahan Rencana Kerja (Renja) dinas PUTRPKP kabupaten Takalar ini disusun dari berdasarkan perpaduan lima (5) pendekatan perencanaan iaitu top down, bottom-up, teknokratik, politis dan pendekatan partisipatif. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat kami harapkan untuk penyusunan Perubahan Renja di masa-masa yang akan datang. Demikian pula ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua komponen yang terlibat dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUTRPKP) Kabupaten Takalar tahun 2024, sehingga dapat disusun dan semoga apa yang kita lakukan dapat menjadi pahala di sisiNya. Aamiin..

Dan akhirnya seluruh aktivitas kami serahkan kepada yang kuasa, mudah-mudahan dapat dinilai-Nya sebagai amal jariyah. Aamiin…

Takalar, Juli 2024

KEPALA DINAS,

BUDIAR ROSAL SALEH, S.STP.,M.Adm.Pemb.
Pangkat : Pembina Utama Muda / IV.c
Nip. 19800520 199810 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL..... i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN..... 1
1.1 Latar Belakang..... 1
1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PUTRPKP SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024..... 6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas PUTRPKP Kab. Takalar sampai dengan Triwulan II .....……..... 6

2.1.1. Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja Dinas PUTRPKP Kab. Takalar 2024 yang Terakomodir di APBD 2024..... 10

2.1.2. Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja APBD Triwulan II Tahun 2024 10

2.1.2.1. Evaluasi Capaian Pendanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Pelaksanaan Renja Dinas PUTRPKP Kab. Takalar 2024 11

2.1.2.2. Evaluasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Pelaksanaan Renja Dinas PUTRPKP Kab. Takalar 2024 11

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas PUTRPKP Kab. Takalar……... 12

2.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) 13

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) 14

2.2.3. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)..... 14

2.2.4. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan /Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) 15

2.3 Hambatan Upaya Pencapaian dan Rekomendasi Pelaksanaan Renja Dinas PUTRPKP Kab. Takalar Tahun 2024 ……...…… 17

2.3.1. Hambatan dalam Pelaksanaan Renja Dinas PUTRPKP Kab. Takalar 2024 ……..... 17

2.3.2. Upaya dalam Pencapaian Pelaksanaan Renja Dinas PUTRPKP Kab. Takalar 2024 sampai dengan Triwulan ke II ……..... 17

2.3.3. Rekomendasi Pelaksanaan Renja Dinas PUTRPKP Kab. Takalar 2024 Triwulan selanjutnya……..... 18

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PUTRPKP KAB. TAKALAR..... 20

3.1 Tujuan Dan Sasaran..... 20

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024……... 22

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Dinas PUTRPKP Kabupaten Takalar Tahun 2024……..... 23

BAB IV PENUTUP..... 33

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.

Perubahan Rencana kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUTRPKP) Kabupaten Takalar Tahun 2024 adalah sebuah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas PUTRPKP tahun 2023-2026. Tahun 2024 merupakan tahun kedua penjabaran Renstra Dinas PUTRPKP Kabupaten Takalar periode 2023-2026. Perencanaan tahun 2024 di lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas PUPRPKP Kabupaten Takalar memegang peranan yang cukup penting, terutama dalam rangka mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Takalar.

Dokumen ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun 2024.

Oleh karena itu, Perubahan Rencana Kerja Dinas PUTRPKP Kabupaten Takalar harus berkualitas dan mendukung pencapaian target indikator kinerja kunci lingkup bidang urusan pekerjaan umum dan perumahan yang telah di tetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas PUTRPKP Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026. Disamping itu, dalam rangka mendukung prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2024, substansi Perubahan Rencana Kerja tahun 2024 mengikuti tahapan dan proses perencanaan serta terbuka bagi usulan-usulan masyarakat yang diajukan melalui pendekatan partisipatif dan politis yang disinergikan dengan perencanaan teknokratik lingkup ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pada Pasal 343 ayat (1) mengamanahkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya

dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah RKPD berkenaan; dan/atau

b Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud diatas meliputi perubahan :

a Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;

b Target sasaran pembangunan Daerah;

c Prioritas pembangunan Daerah;

d Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah; dan Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas PUTRPKP Kabupaten Takalar, yaitu:

1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4) Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 3 indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
6) Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);

7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244); 13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
11) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
13) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 5 Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16) Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
17) Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar Tahun 2012-2031;

18) Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Takalar Tahun 2017-2022;
19) Peraturan Bupati Kabupaten Takalar No. 55 tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2017-2022

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman (PUTRPKP) Kabupaten Takalar Tahun 2024 ini adalah :

1) Untuk menjabarkan program dan kegiatan Renstra OPD kedalam program/kegiatan tahunan.
2) Untuk menyiapkan acuan bagi RAPBD.
3) Untuk menyiapkan kerangka evaluasi kinerja program/kegiatan tahunan bagi OPD).
4) Pedoman penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah
5) Pedoman penyelarasan prioritas pembangunan Provinsi dengan kabupaten/kota

Sedangkan Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas PUTRPKP Kabupaten Takalar adalah:

1) Agar terbangun konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan OPD.
2) Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah
3) Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam melakukan penyesuaian prioritas program dan kegiatan Tahun 2024
4) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan
5) Sebagai instrument dalam melakukan evaluasi kinerja penyelengaraan pemerintahan daerah

1.4 Sistematika Penulisan Rencana Kerja

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Takalar Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen rancangan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Pada Sub Bab Latar Belakang, mengemukakan pengertian ringkas

tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, kedudukan Renja OPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen Renja OPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja OPD serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. Pada Sub Bab Dasar Hukum Penyusunan memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja OPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Pada Sub Bab Hubungan Antar Dokumen menjelaskan hubungan Renja OPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Pada Sub Bab Maksud dan Tujuan menjelaskan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen Renja OPD bagi daerah dan sasaran penyusunan dokumen Renja OPD bagi daerah. Pada Sub Bab Sistematika mengemukakan penyusunan dokumen Renja OPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PUPRPKP SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Pada bab ini menjelaskan mengenai evaluasi pelaksanaan kegiatan Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (bidang bina marga, cipta karya, sumber daya air, perumahan dan kawasan permukiman, bina konstruksi dan tata ruang) yang meliputi : Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu dan Capaian Renstra OPD, Analisis Kinerja Pelayanan OPD, Isu – Isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PUTRPKP

Rencana program dan kegiatan prioritas Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Takalar berisi program dan kegiatan untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan Visi dan Misi pemerintah Kabupaen Takalar yang tertuang dalam RPJMD.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan uraian berupa: (i) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, (ii) Kaidah-kaidah pelaksanaan, dan (iii) Rencana tindak lanjut

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PUTRPKP SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas PUTRPKP Kab. Takalar sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Evaluasi kinerja dimaksudkan untuk memberikan nilai atas suatu capaian kegiatan. Evaluasi kinerja setidaknya menunjukkan penilaian atas keberhasilan/kegagalan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUTRPKP) Kabupaten Takalar dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategis.

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan lebih lanjut pengukuran kinerja, oleh karena itu evaluasi kinerja didasarkan pada ukuran ukuran dan indikator serta hasil pengukuran kinerja.

Evaluasi kinerja bertujuan agar dapat diketahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala pelaksanaan program/kegiatan dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan selanjutnya.

Adapun Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUTRPKP) Kabupaten Takalar sampai dengan Triwulan II dapat dilihat pada Laporan Evaluasi Hasil Renja Triwulan II Periode Pelaksanaan 2024 sebagai berikut :

.

Tabel II-1

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota

Renja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Takalar

Periode Pelaksanaan: s/d Triwulan II Tahun 2024

No	Sasaran	Kode				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun **2023-2026** (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu **(2023)**			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun **2024**) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Per Bulan									Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Kinerja Per Bulan									Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun **2024**)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun **2024**) yang		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun **2024** (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun **2024**)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
								K	Satuan	Rp	K	Rp		K	Rp	Januari		Februari		Maret		I		April		Mei		Juni		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3				4	5	6			7			8			9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21 = 25/24 x 100%		22 = 7 ÷ 20		23 = 27/26 x 100%		24	25
						DINAS PUPRPKP																																											
		1				**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				##########			##########			##########		**327.965.858**		**471.437.426**		**692.264.862**		**1.491.329.138**																##########				**########**							
		4	**03**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				##########			##########			##########		**327.965.858**		**468.547.226**		**674.272.862**		**1.470.364.038**																##########				**########**							
		1	**03**	**01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota**	**100%**	**Persen**	**38.174.963.119**	**61,96%**	**6.931.139.927**	**100%**	##########		**327.660.858**		**376.307.781**		**674.272.862**	**4,58%**	**1.378.224.493**																**34%**	##########	**0%**		**0%**		**39,01%**	##########	**39,46%**	**46,72%**	**55,77%**	**10.608.277.528**	**55,77%**	**27,79%**	**DINAS PUPRPKP**	
		1	03	01	2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	100%	Persen	863.395.528	31,71%	105.114.500	100%	50.133.400	0,00%		0,00%	2.400.000	4,33%		8,33%	2.400.000	14,67%	13.442.200	0,00%	4.462.100	8,33%			25%	17.944.300	0%		0%		33,33%	20.344.300	33,33%	40,58%	41,66%	125.498.800	41,66%	14,54%		
	Meningkatnya Pengel Layanan Administrasi Perkantoran Sarana dan Prasarana, Meningkatnya Sumber Daya Aparatur, Meweujudkan capaian kenerja yang baik dan laporan keuangan yang sqsar waktu, Menyediakan data informasi terkini OPD PUPRPKP Kabupaten Takalar	1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Renja Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen)	9	Dokumen	309.000.000	1	18.963.000	1	11.557.400	-	-	-	2.400.000	-	2.400.000	-	5.011.000	-	-	-	-		-		-		-		7.411.000	8%	64%	1	26.394.000	11%	9%		
		1	03	01	2.01	02	Koodinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD(Dok)	4	Dokumen	84.395.528	1	12.545.000	1	14.876.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.770.100	-	-	-	-		-		-		1.770.100	0%	12%	1	14.315.900	25%	17%		
		1	03	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA Feasik Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen)	4	Dokumen	100.000.000	1	10.189.000	1	4.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-	0%	0%	1	10.189.000	25%	9%		
		1	03	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPA Perubahan/Parsial Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen)	4	Dokumen	95.000.000	5	11.067.600	4	4.000.000	-	-	-	-	-	-	-	2.442.200	-	-	-	-		1	2.442.200	-		-		2.442.200	25%	61%	4	13.510.800	150%	14%		
		1	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Realisasi Kinerja dan Skbtmur Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja dan Skbtmur Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	Laporan	67.800.000	1	9.348.600	1	4.000.000	-	-	1	-	1	-	-	1.500.000	-	492.000	-	-		1	4.000.000	-		-		1	4.000.000	100%	100%	1	13.348.600	50%	20%		
		1	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Monev Triwulanan Yang disusun (Laporan)	16	Laporan	200.000.000	4	43.019.500	4	11.700.000	-	-	-	-	-	-	-	2.500.000	-	2.200.000	-	1		2	4.700.000	-		-		2	4.700.000	50%	40%	4	47.719.500	38%	24%		

| | | |

| | | |

2.1.1. Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja Dinas PUTRKP Kab. Takalar 2024 yang terakomodir di APBD 2024.

Informasi tentang Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD 2024 yang terakomodir di APBD Tahun 2024 memberikan gambaran seberapa banyak jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas PUTRPKP Kabupaten Takalar pada Tahun 2024. Adapun jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan dimaksud dapat digambarkan pada table berikut

Tabel II-2
Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
yang ada dalam APBD 2024

PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN	INDIKATOR		
				JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN
DINAS PUTRPKP	12	20	45	12	20	49

Sumber : RKPD Pokok 2024, dan SIPD 2024

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah program sebanyak 12, jumlah kegiatan 20, dan jumlah sub kegiatan 49, Sedangkan jumlah indikator program sebanyak 12, jumlah indikator kegiatan sebanyak 20, dan jumlah indikator sub kegiatan sebanyak 49.

2.1.2. Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja APBD Triwulan II Tahun 2024

Informasi tentang realisasi anggaran kegiatan memberikan gambaran seberapa besar anggaran yang telah terserap pada Triwulan II untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam APBD 2024. Gambaran sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada table berikut

Tabel II-3
Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Pada APBD
Kabupaten Takalar Tahun 2024 hingga Triwulan II

PERANGKAT DAERAH	PAGU APBD (Rp)	REAL S.D. TRIWULAN II (Rp)	PERSENTASE	
			FIISK	KEUANGAN
DINAS PUTRPKP	92.174.218.960	23.275.280.365	28,16%	26,73%

Sumber : Laporan Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Triwulan II, diolahKecamatan Pattallassang

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa total jumlah anggaran yang terealisasi dalam APBD untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di Dinas PUTRPKP Kabupaten Takalar Tahun 2024 sebesar Rp. 23.275.280.365,-. Realisasi serapan anggaran

dari pelaksanaan kegiatan hingga triwulan II adalah sebesar 26.73 persen dengan capaian realisasi fisik sebesar 28.16 persen.

2.1.2.1. Evaluasi Capaian Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Pelaksanaan Renja Dinas PUTRPKP Kab. Takalar 2024

Informasi tentang realisasi anggaran kegiatan memberikan gambaran seberapa besar anggaran yang telah terserap pada Triwulan II untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam APBD 2024. Gambaran sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel 2.3

Capaian kinerja pendanaan tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori **Rendah** untuk perangkat daerah dengan realisasi 0 – 20%, Kategori **Sedang** Untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran lebih besar dari >20 – 43 persen dan kategori **Tinggi** untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran diatas 43 persen. Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 43 persen didasarkan atas tingkat capaian yang diharapkan untuk triwulan II adalah 43 persen, sehingga jika terdapat capaian realisasi pendanaan lebih dari 43 persen dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi

2.1.2.2. Evaluasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Pelaksanaan Renja Dinas PUTRPKP Kab. Takalar 2024

Informasi tentang capaian pendanaan memberikan gambaran capaian berdasarkan realisasi anggaran pada masing-masing perangkat daerah dimulai dari program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terdapat pada Organisasi Perangkat Daerah. Capaian kinerja pendanaan tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori **Rendah** untuk perangkat daerah dengan realisasi 0 – 20%, Kategori **Sedang** Untuk Organisasi perangkat daerah dengan realisasi anggaran lebih besar dari >20 – 43 persen dan kategori **Tinggi** untuk Organisasi perangkat daerah dengan realisasi anggaran diatas 43 persen. Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 43 persen didasarkan atas tingkat capaian yang diharap untuk triwulan II adalah 43 persen, sehingga jika terdapat OPD dengan capaian realisasi pendanaan lebih dari 43 persen dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi.

1. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Program

   Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pendanaan pada level program untuk Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Takalar (PUTRPKP) dengan menggunakan kategori tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa jumlah program yang dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Takalar (PUTRPKP) sebanyak 12 program dengan rincian capaian yang masuk pada kategori rendah ada

sebanyak 4 program atau 6,55 persen (realisasinya 0-20 persen). Untuk capaian kinerja kategori sedang sebanyak 5 program atau 26,48 persen (realisasi >20-43 persen), dan untuk capaian kinerja kategori tinggi sebanyak 3 program atau 47,08 persen (realisasi diatas 43 persen).

2. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Kegiatan

   Untuk evaluasi pelaksanaan Capaian kinerja pendanaan pada level kegiatan pada masing-masing perangkat daerah dapat dijelaskan bahwa terdapat 20 kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada Tahun 2024. Dari keseluruhan kegiatan tersebut terdapat 5 kegiatan atau 0,16 persen yang realisasi pendanaannya hingga triwuan II masih dalam kategori rendah yaitu 0 – 20 persen, sedang yang berada dalam kategori sedang sebanyak 2 kegiatan atau 40,8 persen, dan kategori tinggi dengan capaian realisasi diatas 43 persen sebanyak 1 kegiatan atau masih 91,63 persen.

3. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level sub Kegiatan

   Adapun evaluasi capaian kinerja pendanaan pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Takalar (PUTRPKP) pada level sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 45 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2024 terdapat 15 sub kegiatan atau 0,31 persen yang capaian kinerja pendanaanya masih rendah, sedangkan yang masuk dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan sedang terdapat 10 sub kegiatan, dan 20 sub kegiatan dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan tinggi sebab telah dapat mencapai realisasi pendanaan lebih dari 59 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan II.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas PUTRPKP Kabupaten Takalar

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas PUTRPKP Kabupaten Takalar.

Penetapan indikator kinerja Organisasi Perangkat daerah dilakukan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil. Penetapan indikator kinerja Organisasi Perangkat daerah dituangkan dalam bentuk target kinerja yang akan dicapai pada waktu tertentu yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran target dalam pencapaian visi dan misi kepala Organisasi Perangkat daerah yang ditetapkan berupa indikator makro pembangunan, Indikator Kinerja Utama (IKU), indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK), indikator Suistanable Development Goals (SDGs), dan Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM).

2.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program

Tabel II-4
Pencapaian Kinerja Pelayanan – **IKU** Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Takalar

No	Indikator	IKU	IKK	SPM	TPB	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Catatan Analisis
						Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Index Daya Saing Infrastruktur Jalan dan Perumahan	v				67,56%	70,89%	73,46%	76,03%	65,31%	69,18%	
2	Indeks Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum	v				25,00%	30,00%	35,00%	40,00%	97,22%	93,34%	
3	Persentase Peningkatan kondisi kemantapan jalan kabupaten	v				63,90%	70,20%	71,20%	72,20%	89,70%	96,64%	
4	Persentase Luas Persawahan yang terlayani Irigasi tersier Kewenangan Kabupaten	v				77,00%	81,00%	83,00%	85,00%	88,25%	71,49%	
5	Persentase Peningkatan tingkat Keandalan Bangunan Gedung Pemerintah	v				70,00%	75,00%	80,00%	85,00%	86,97%	58,92%	
6	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	v				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	92,19%	83,23%	
7	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	v				37,00%	40,00%	45,00%	50,00%	97,63%	99,91%	
8	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	v				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
9	Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan smart living	v				41,07%	49,28%	60,61%	65,32%	0,00%	0,00%	
10	Indeks kepatuhan terhadap standar pelayanan Perumahan	v				25,00%	30,00%	35,00%	40,00%	87,28%	99,29%	
11	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/ kota	v				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
12	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	v				0,00%	50,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	
13	Persentase Rumah Layak Huni Kabupaten	v				91,48%	92,17%	92,86%	93,56%	97,44%	99,15%	
14	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	v				0,00%	16,95%	33,91%	50,85%	0,00%	0,00%	
15	Tingkat Genangan Air Kawasan Permukiman / Persentase kondisi Drainase berfungsi dengan baik	v				80,00%	85,00%	90,00%	95,00%	97,19%	69,61%	
16	Persentase ketersediaan Sarana Persampahan menunjang hunian yang layak	v				72,13%	80,13%	88,13%	93,13%	0,00%	0,00%	
17	Persentase Kepemilikan Rumah	v				94,74%	95,34%	96,54%	97,74%	92,16%	94,12%	
18	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten/kota yang ditangani	v				0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	97,26%	99,56%	
19	Indeks Reformasi Birokrasi Pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	v				0,00%	B (60-70)	B (60-70)	B (60-70)	B (60-70)	B (60-70)	
20	Nilai SAKIP Dinas PUTRPKP	v				CC	B	B	BB	B	B	

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indkator kinerja penyelenggaraan organisasi perangkat daerah merupakan indikator yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada masa tertentu. Indikator Kinerja Kunci disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan organisasi perangkat daerah (OPD) dan kewenangan organisasi perangkat daerah (OPD). Penetapan target indikator kinerja kunci selanjutnya disajikan sebagai berikut:

Tabel II-5
Pencapaian Kinerja Pelayanan – **IKK** Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Takalar

No	Indikator	IKU	IKK	SPM	TPB	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Catatan Analisis
						Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten		v			29,2%	32,2%	35,2%	38,2%	0	13%	
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kabupaten/kota		v			13,7%	14,5%	15,3%	16,1%	2178,0%	23..22%	
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi		v			81,00%	83,00%	85,00%	87,00%	74.08%	74.09%	
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadapa air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten/kota		v			91,00%	94,00%	97,00%	100,00%	97,85%	97.86%	
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		v			60,00%	65,00%	70,00%	75,00%	9142,00%	93.92%	
6	Rasio kepatuhan IMB kab/kota		v			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		12.95%	
7	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota		v			70,20%	71,20%	72,20%	73,20%	62,77%	61.71%	
8	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi		v			40,00%	45,00%	50,00%	55,00%	2,36%	0.10%	
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi		v			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	
10	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota		v			50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	153,00%	
11	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah kabupaten/kota		v			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
12	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten/kota yang ditangani		v			0,00%	5,00%	10,00%	15,00%	0,00%	0,00%	
13	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)		v			7,83%	7,14%	6,45%	5,75%	0,00%	7.81%	
14	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)		v			16,95%	33,91%	50,85%	67,80%	0,00%	0,00%	

2.2.3. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2

Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal kemudian lebih teknis dijelaskan dalam Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial

Tabel II-6
Pencapaian Kinerja Pelayanan – **SPM** Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Takalar

No	Indikator	IKU	IKK	SPM	TPB	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Catatan Analisis
						Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari			v		2,00%	1,11%	2,00%	3,00%	97,85%	97,20%	
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic			v		5,00%	6,43%	5,00%	5,00%	91,43%	97,96%	
3	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota			v		5,00%	50,00%	50,00%	100,00%	5,00%	0,00%	
4	Fasilitasi penyediaan rumah yang layakhuni bagi masyarakat yang terkenarelokasiProgram Pemerintah Daerah kabupaten/kota			v		5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

2.2.4. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGS)

Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistainable Development Goals (TPB/SDGs) kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global. TPB/SDGs bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi

berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan. Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Tabel II-7
Pencapaian Kinerja Pelayanan – TPB/SDGs Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Takalar

No	Indikator	IKU	IKK	SPM	TPB	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Catatan Analisis
						Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.				v	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	
2	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.				v	53,57%	65,59%	65,60%	65,61%	126,00%	126,06%	
3	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.				v	88,72%	100,00%	100,00%	100,00%	63,97%	63,97%	
4	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.				v		65,59%	65,60%	65,61%	56,48%	56,48%	
5	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.				v	6.000	6.150,00	6.400,00	6.650,00	6.150,00	6.150,00	
6	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.				v	75,00%	76,45%	76,95%	77,45%	76,45%	76,45%	
7	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.				v	20,00%	25,00%	27,00%	29,00%	0,03%	0,03%	
8	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.				v	0,00%	5,00%	5,50%	6,00%	0,00%	0,00%	
9	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.				v	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
10	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).				v	1 RPDAST	1 RPDAST	1 RPDAST	1 RPDAST	1 RPDAST	1 RPDAST	
11	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.				v	-	-	-	-	69,01%	69,01%	
12	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.				v	-	-	-	-	-	-	
13	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota				v	50,00%	50,00%	100,00%	100,00%	0,00%		

2.3. Hambatan Upaya Pencapaian dan Rekomendasi Pelaksanaan Renja Dinas PUTRPKP Kab. Takalar Tahun 2024

2.3.1. Hambatan dalam pelaksanaan Renja Dinas PUTRPKP Kab. Takalar 2024

Hambatan dan kendala dalam pelaksanakan kegiatan triwulan kedua dipengaruhi oleh:

1. Adanya peraturan pemerintah pusat yang menyebabkan harus dilakukan penyesuaian anggaran.
2. Belum meratanya kemampuan, pemahaman, pemanfaatan, pengelolaan dan penerapan teknologi informasi dan manajemen yang berbasis kinerja.
3. Masih terkendalanya pelaksanaan kegiatan yang ditimbulkan oleh penggabungan program dan kegiatan yang mengalami peleburan.
4. Terdapatnya beberapa kegiatan yang proses pengadaan barang dan jasanya belum dilaksanakan, baik dikarenakan masih dalam tahapan proses lelang ataupun belum masuk pada tahapan kegiatannya.
5. Perlunya Dukungan keterampilan tambahan bagi sumberdaya aparatur pengelola kegiatan untuk melakukan pengukuran atau estimasi perencanaan program terhadap alokasi anggaran yang dialokasikan baik yang dipengaruhi oleh fluktuasi aktifitas kedewanan maupun kalkulasi evaluasi pada program dan kegiatan.
6. Beberapa komponen kegiatan pada sistem aplikasi perencanaan terkait kodefikasi program/kegiatan dan penganggaran mengalami perubahan sehingga kegiatan belum dapat dilaksanakan ini berdampak pada kode rekening belanja.

2.3.2. Upaya dalam pencapaian pelaksanaan Renja Dinas PUTRPKP Kab. Takalar 2024 sampai denga Triwulan ke II

Merujuk dari faktor penghambat Pelaksanaan rencana kerja Dinas PUTRPKP sampai dengan triwulan ke II tentunya mengalami berbagai kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Secara normatif dapat disampaikan beberapa upaya yang dilakukan dalam pencapaian keberhasilan kinerja sebagai berikut:

1. Komitmen pimpinan dan Koordinasi lingkup Dinas PUTRPKP yang baik untuk melaksanakan kegiatan secara maksimal;
2. Adanya koordinasi/konsultasi yang sinergi antar struktur jabatan internal dan eksternal serta adanya komunikasi yang terjalin antar pemimpin dan yang dipimpin dalam organisasi;
3. Tersedianya Sarana dan prasarana pendukung yang memadai;
4. Penyerapan program dan kegiatan masing-masing bidang dan kesekretariatan berjalan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan;

5. Adanya pedoman/dokumen Standar Pelayanan/SOP dan regulasi yang sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan;
6. Kualitas SDM yang mampu, terampil dan memadai serta memiliki komitmen dan motivasi untuk melakukan tugas dan fungsi secara maksimal dalam rangka memberikan pelayanan prima;
7. Adanya komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.3.3. Rekomendasi pelaksanaan Renja Dinas PUTRPKP Kab. Takalar 2024 Triwulan selanjutnya.

Berdasarkan uraian atas faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian kinerja OPD, menyampaikan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Meningkatkan komunikasi dan integrasi program di lingkungan Dinas PUTRPKP serta pengendalian dan evaluasi dilakukan terus menerus.
2. Peran aktif seluruh KPA dan PPTK didalam mengawal pelaksanaan Program dan Kegiatan yang berjalan.
3. Peran aktif Kepala Dinas selaku PA didalam mengawasi, mengontrol dan membuat kebijakan serta keputusan;
4. Peran aktif Sub Bagian Program didalam berkoordinasi termasuk memberikan informasi, sosialisasi maupun kebijakan-kebijakan lainnya;
5. Perlunya tenaga SDM yang berkompeten didalam perencanaan;
6. Peningkatan kualitas SDM aparatur serta jumlah staf yang berkompeten;
7. Peningkatan sarana dan prasarana operasional sesuai dengan kebutuhan;
8. Perlunya melakukan penyusunan Renstra SKPD yang baik, diawali dengan orientasi dan melibatkan seluruh pejabat/staf;
9. Meningkatkan komunikasi dan integrasi Program dan Kegiatan antar instansi, baik pada tataran perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan;
10. Perlunya melakukan evaluasi dan monitoring secara terus menerus dan berkelanjutan yang diiringi dengan pengelolaan data yang baik;
11. Pelaksanaan kegiatan sesuai Renstra dan RPJMD.
12. Dalam penyusunan dokumen perencanaan tahap berikutnya memiliki data dan informasi yang akurat, sehingga perencanaan dan penganggaran dapat dilakukan dengan baik, efektif, dan efisien.

Mengingat adanya Pinjaman Dana PEN yang mengakibatkan rendahnya aktifitas ekonomi dan kegiatan pembangunan infrastruktur yang tertunda selama kurun waktu semester pertama tahun 2024. Kegiatan pembangunan yang tertunda tetap akan dilaksanakan di tahun 2024 dengan memperhatikan skala prioritas didalam masyarakat, termasuk didalamnya mengalokasikan anggaran untuk mendukung penanganan Pinjaman Dana PEN

Oleh karena itu, langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam solusi penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan hasil Renja Dinas PUTRPKP Kabupaten Takalar Tahun 2024 adalah antara lain:

1. Mengefektifkan anggaran pembanguan infrastruktur yang ada dengan melakukan pergeseran sesuai dengan kondisi penaganan Dana PEN yang diperkirakan terus terjadi hingga akhir tahun 2024 seperti belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi.
2. Tetap mempertahankan program dan kegiatan prioritas yang mendukung kegiatan ekonomi
3. Mensinergikan seluruh kegiatan dalam Dinas PUTRPKP kabupaten Takalar dengan tujuan efisiensi dan efektititas kegiatan dengan tetap pada sasaran pencapaian kinerja atau indikator kinerja utama.
4. Menyiapkan dan mendukung kegiatan aktifitas perkantoran dalam lingkup Dinas PUTRPKP Kabupaten Takalar baik secara fisik maupun non fisik.
5. Lebih mengedepankan koordinasi dengan instansi lain baik pusat dan provinsi yang berhubungan dengan tugas, pokok dan fungsi di lingkup Dinas PUTRPKP Kabupaten Takalar baik secara daring (dalam jaringan) maupun melalui kunjungan langsung ke instansi yang bersangkutan.
6. Mengintensifkan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan yang telah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran 2024.
7. Seluruh program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam semester kedua tahun 2024, tetap menjalankan arahan pemerintah pusat dan daerah, sehingga diharapkan kita dapat melakukan pemulihan ekonomi dengan adanya aktifitas fisik atau projek yang dilaksanakan oleh penyedia jasa (kontraktor).

.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PUTRPKP KAB. TAKALAR

3.1. TUJUAN DAN SASARAN

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUTRPKP) Kabupaten Takalar Tahun 2024 adalah untuk memberikan arahan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan pembangunan sarana, prasarana dan ultilitas publik di Kabupaten Takalar, sehingga akan didapat kejelasan, tujuan, sasaran, kebijakan program dan kegiatan dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan di Kabupaten Takalar yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan rakyat, mendorong swadaya dan peran aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan bertanggungjawab.

Tujuan

Tujuan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUTRPKP) Kabupaten Takalar secara rinci adalah :

a) Meningkatkan presentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi.
b) Memperbaiki drainase dan irigasi desa menjadi lebih baik sehingga dapat digunakan lebih baik pula.
c) Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari.
d) Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya
e) Dapat menurukan frekwensi kejadian banjir
f) Persentase penurunan jumlah kawasan kumuh
g) Mengurangi jumlah rumah tidak layak huni
h) Ketersediaan rumah layak huni
i) Ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau
j) Menciptakan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana sarana dan utilitas (PSU)
k) Meningkatkan rumah tangga ber sanitasi
l) Meningkatkan rumah tangga pengguna air bersih
m) Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman
n) Meningkatkan pelayanan penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai
o) Persentase tersedianya informasi mmengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital.
p) Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai
q) Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kabupaten

r) Persentase kesesuaian pemanfaatan kawasan dengan perda tata ruang
s) Rumah tangga ber IMB developer yang telah menyerahkan fasos/fasum
t) Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi tingkat kabupaten pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)
u) Persentase tersedianya layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan waktu penerbitan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap.
v) Meningkatkan layanan administrasi umum, kepegawaian dan perencanaan program/kegiatan yang tepat waktu.
w) Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah
x) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan
y) Sebagai instrument dalam melakukan evaluasi kinerja penyelengaraan pemerintahan daerah

Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUTRPKP) Kabupaten Takalar tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a) Meningkatnya fungsi dan layanan jalan dan jembatan
b) Meningkatnya ketaatan penataan ruang dan wilayah
c) Meningkatnya fungsi dan layanan air baku bagi masyarakat
d) Meningkatnya derajat kesehatan lingkungan permukiman
e) Meningkatnya kemudahan akses air bersih bagi masyarakat
f) Meningkatnya kualitas bangunan gedung pemerintah dan fasilitas umum
g) Meningkatnya kualitas penyedia jasa dan konstruksi

Adapaun program prioritas Dinas PUTRPKP Kab. Takalar Tahun 2024 ialah:

1. Infrastruktur jalan dan jembatan (diimplementasikan melalui program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Program Pembangunan Drainase Lingkungan, Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong, Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Program Pengelolaan Jasa Konstruksi).
2. Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi Strategis (Diimplementasikan melalui program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya dan Program Pengendalian Banjir, Program Pembangunan Infrastruktur Air Minum, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan dan Air Limbah).

3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang (Diimplementasikan melalui Program Perencanaan Tata Ruang, Program Pemanfaatan Ruang, Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang)
4. Meningkatkan ekonomi pertanian, dengan dukungan infrastruktur (Jalan, Jembatan dan irigasi) di sentra produksi pangan (Diimplementasikan melalui program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Program Pembangunan Drainase Lingkungan, Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong, Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Program Pengelolaan Jasa Konstruksi, Program Pembangunan Infrastruktur Air Minum, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan dan Air Limbah)
5. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan a. Penanganan bencana longsor dan banjir (melalui Program Pengendalian Banjir, Program Pembangunan Drainase Lingkungan).

3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Kabupaten Takalar Tahun 2024 berpedoman pada prioritas pembangunan nasional, prioritas pembangunan provinsi Sulawesi Selatan dan program unggulan pemerintah daerah Kabupaten Takalar dengan berpedoman pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktifitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana program dan kegiatan prioritas Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUTRPKP) Kabupaten Takalar berisi program dan kegiatan untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan Visi dan Misi pemerintah Kabupaen Takalar yang tertuang dalam RPJMD. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk menyusun program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (Pagu Indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Dinas PUTRPKP Kabupaten Takalar Tahun 2024

Program dan kegiatan Dinas PUTRPKP Kabupaten Takalar tahun 2024 adalah untuk menunjang pencapaian Visi, Misi, Sararan dan Kebijakan pemerintah Kabupaten Takalar yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini dilaksanakan dengan kegiatan pokok a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, e) Administrasi Umum Perangkat Daerah, f) Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, g) Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, h) Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air. Program ini dilaksanakan dengan kegiatan pokok a) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, b) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Program ini dilaksanakan dengan kegiatan pokok a) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase. Program ini dilaksanakan dengan kegiatan pokok a) Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

5. Program Penataan Bangunan Gedung. Program ini dilaksanakan dengan kegiatan pokok a) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.

6. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya. Program ini dilaksanakan dengan kegiatan pokok a) Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota

7. Program Penyelenggaraan Jalan. Program ini dilaksanakan dengan kegiatan pokok a) Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

8. Program Pengembangan Jasa Konstruksi. Program ini dilaksanakan dengan kegiatan pokok a) Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi, b) Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, c) Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) d) Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang. Program ini dilaksanakan dengan kegiatan pokok a) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota, b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota, c) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.

10. Program Pengembangan Perumahan. Program ini dilaksanakan dengan kegiatan pokok a) Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, b) Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus

11. Program Kawasan Permukiman. Program ini dilaksanakan dengan kegiatan pokok a) Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman, b) Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha, c) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

12. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU). Program ini dilaksanakan dengan kegiatan pokok a) Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

Tabel III-1

RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. TAKALAR

TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Kinerja RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024			Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Renja 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	Renja 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	01					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
	01	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																	
	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota			100%	100%	100%	7.044.114.560	7.736.403.780	7.561.829.796							7.887.824.332	
	1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100%	100%	100%	30.000.000	50.133.400	50.133.400							30.000.000	
	1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Renja Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen)	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	5.000.000	11.557.400	11.557.400	Kec. Pattalassang, Kab. Takalar	APBD		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	PEGAWAI	2 Dokumen	6.000.000	DPUTRPKP
	1	03	01	2.01	02	Koodinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD(Dok)	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3.000.000	13.226.000	13.226.000	Kec. Pattalassang, Kab. Takalar	APBD		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	PEGAWAI	1 Dokumen	5.000.000	DPUTRPKP
	1	03	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD(Dok)	1,00		1,00			3.000.000	-	-	Kec. Pattalassang, Kab. Takalar	APBD		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	PEGAWAI	0	-	DPUTRPKP
	1	03	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA Pokok Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen)	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3.000.000	4.000.000	4.000.000	Kec. Pattalassang, Kab. Takalar	APBD		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	PEGAWAI	1 Dokumen	2.000.000	DPUTRPKP
	1	03	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPA Perubahan/Parsial Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen)	4,00	5,00	1,00	4,00	4,00	3.000.000	4.000.000	4.000.000	Kec. Pattalassang, Kab. Takalar	APBD		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	PEGAWAI	1 Dokumen	3.000.000	DPUTRPKP
	1	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2.000.000	4.000.000	4.000.000	Kec. Pattalassang, Kab. Takalar	APBD		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	PEGAWAI	1 Laporan	4.000.000	DPUTRPKP
	1	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Monev Triwulanan Yang disusun (Laporan)	16,00	4,00	4,00	4,00	4,00	11.000.000	13.350.000	13.350.000	Kec. Pattalassang, Kab. Takalar	APBD		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	PEGAWAI	4 Laporan	10.000.000	DPUTRPKP
	1	03	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%			6.627.464.560	7.044.867.788	6.870.293.804							6.307.045.340	
	1	03	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan (77 Orang selama 12 bulan)	3.234,00		85,00			6.603.964.560	7.014.891.788	6.840.317.804	Kec. Pattalassang, Kab. Takalar	APBD		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	PEGAWAI	85 Orang/bulan	6.277.045.340	DPUTRPKP
	1	03	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dan Jenis Penatausahaan dam Verifikasi Keuangan (Bulan)	12,00		12,00			10.000.000	12.006.000,0	12.006.000,0	Kec. Pattalassang, Kab. Takalar	APBD		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	PEGAWAI	1 Dokumen	10.000.000	DPUTRPKP
	1	03	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun/Neraca Perangkat Daerah yang disusun (Laporan)	1,00		1,00			5.000.000	4.990.000	4.990.000	Kec. Pattalassang, Kab. Takalar	APBD		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	PEGAWAI	1 Laporan	5.000.000	DPUTRPKP
	1	03	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran Perangkat Daerah yang disusun (Laporan)	12,00		1,00			5.000.000	7.990.000	7.990.000	Kec. Pattalassang, Kab. Takalar	APBD		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	PEGAWAI	1 Laporan	10.000.000	DPUTRPKP
	1	03	01	2,02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis realisasi anggaran Perangkat Daerah yang disusun (Laporan)	4,00		1,00			3.500.000	4.990.000	4.990.000	Kec. Pattalassang, Kab. Takalar	APBD		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	PEGAWAI	1 Dokumen	5.000.000	DPUTRPKP
	1	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			100%			9.000.000	15.000.000	15.000.000							10.000.000	
	01	03	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan RKBMD yang disusun (Laporan)	8,00		2,00			3.000.000	6.000.000	6.000.000	Kec. Pattalassang, Kab. Takalar	APBD		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	PEGAWAI	2 Dokumen	2.000.000	DPUTRPKP
	01	03	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun (Laporan)	4,00		1,00			3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kec. Pattalassang, Kab. Takalar	APBD		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	PEGAWAI	1 Laporan	1.000.000	DPUTRPKP
	01	03	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dan Jenis Penatausahaan Barang Milik Daerah yang disusun (Bulan)	3,00		1,00			3.000.000	6.000.000	6.000.000	Kec. Pattalassang, Kab. Takalar	APBD		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	PEGAWAI	1 Laporan	7.000.000	DPUTRPKP
	01	03	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100%			3.000.000	3.000.000	3.000.000							1.000.000	
	01	03	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian yang terselesaikan (Laporan)	4,00		1,00			3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kec. Pattalassang, Kab. Takalar	APBD		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	PEGAWAI	1 Dokumen	1.000.000	DPUTRPKP
	01	03	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%			12.250.000	101.843.600	101.843.600							5.000.000	
	01	03	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1,00		2,00			1.000.000	954.600	954.600	Kec. Pattalassang, Kab. Takalar	APBD		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	PEGAWAI	2 Paket	1.000.000	DPUTRPKP
	01	03	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	5,00		2,00			1.000.000	1.400.000	1.400.000	Kec. Pattalassang, Kab. Takalar	APBD		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	PEGAWAI	2 Dokumen	1.000.000	DPUTRPKP
	01	03	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitas Yang Disisapkan Untuk Tamu Kantor	36,00		4,00			500.000	1.215.000	1.215.000	Kec. Pattalassang, Kab. Takalar	APBD		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	PEGAWAI	4 Laporan	1.000.000	DPUTRPKP
	01	03	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah yang dilaksanakan	983,00		12,00			5.000.000	95.274.000	95.274.000	Kec. Pattalassang, Kab. Takalar	APBD		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	PEGAWAI	12 Laporan	1.000.000	DPUTRPKP
	1	03	01	2,06	11	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah pengelolaan website SKPD (Laporan)	1,00		1,00			4.750.000	3.000.000	3.000.000	Kec. Pattalassang, Kab. Takalar	APBD		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	PEGAWAI	1 Dokumen	1.000.000	DPUTRPKP
	01	03	01	2,08		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			100%	100%	100%	345.400.000	474.878.992	474.878.992							490.778.992	
	01	03	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rek. yang dibayarkan	18,00	6,00	12,00	6,00	6,00	295.000.000	265.678.992	265.678.992	Kec. Pattalassang, Kab. Takalar	APBD		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	PEGAWAI	12 Laporan	265.678.992	DPUTRPKP
	01	03	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Paket)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	50.400.000	209.200.000	209.200.000	Kec. Pattalassang, Kab. Takalar	APBD		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	PEGAWAI	1 Laporan	225.100.000	DPUTRPKP

	01	03	01	2,09		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah			100%	100%	100%	17.000.000	46.680.000	46.680.000							1.044.000.000	
	01	03	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5,00		31,00			10.000.000	46.680.000	46.680.000	Kec. Pattalassang, Kab. Takalar	APBD		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	PEGAWAI	31 Unit	4.000.000	DPUTRPKP
	01	03	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)			4,00			2.000.000			Kec. Pattalassang, Kab. Takalar	APBD		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	PEGAWAI	4 Unit	1.039.000.000	DPUTRPKP
	01	03	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)			2,00			5.000.000			Kec. Pattalassang, Kab. Takalar	APBD		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	PEGAWAI	2 Unit	1.000.000	DPUTRPKP
	01	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi			50%	50%	50%	3.810.188.000	4.870.378.900	4.870.378.900							7.920.379.000	
	1	3	2	2,01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																135.000.000	
	1	3	2	2,01	93	Normalisasi/Restorasi Sungai														MASYARAKAT	5 KM	35.000.000	DPUTRPKP
	1	3	2	2,01	101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing														MASYARAKAT	5 KM	50.000.000	DPUTRPKP
	1	3	2	2,01	117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya														MASYARAKAT	5 KM	50.000.000	DPUTRPKP
	01	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			100%	100%	100%	3.810.188.000	4.870.378.900	4.870.378.900							7.785.379.000	
	01	03	02	2.02	2	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun													MASYARAKAT	1 KM	50.000.000	DPUTRPKP
	01	03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	800,00	1.000,00	200,00	1.783,00	1.783,00	3.110.188.000	4.870.378.900	4.870.378.900	Dusun Pattinoang, Kec. Galesong	APBD/APBN		Meningkatnya Daya saing Infrastruktur Daerah	MASYARAKAT	1 KM	7.720.379.000	DPUTRPKP
	01	03	02	2.02	15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang direhabilitasi (Bendung)			1,00			200.000.000			Kab. Takalar	APBD		Meningkatnya Daya saing Infrastruktur Daerah	MASYARAKAT	0	-	DPUTRPKP
	01	03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara			1.000,00			300.000.000			Kab. Takalar	APBD		Meningkatnya Daya saing Infrastruktur Daerah	MASYARAKAT	1 KM	5.000.000	DPUTRPKP
	01	03	02	2.02	22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang dioperasikan dan dipelihara (Unit)			1,00			200.000.000			Kab. Takalar	APBD		Meningkatnya Daya saing Infrastruktur Daerah	MASYARAKAT	0	-	DPUTRPKP
	01	03	02	2.02	30	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya													MASYARAKAT	1 Lembaga	5.000.000	DPUTRPKP
	01	03	02	2.02	34	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi													MASYARAKAT	1 Lembaga	5.000.000	DPUTRPKP
	01	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	PERSENTASE PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			91%	91%	91%	3.625.000.000	2.209.985.200	2.209.985.200							455.000.000	
	01	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			95%	95%	95%	3.625.000.000	2.209.985.200	2.209.985.200							455.000.000	
	01	03	03	2.01	22	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun													MASYARAKAT	350 Unit	45.000.000	DPUTRPKP
	01	03	03	2.01	23	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya													MASYARAKAT	1 Lembaga	5.000.000	DPUTRPKP
	01	03	03	2.01	25	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun													MASYARAKAT	1 Dokumen	5.000.000	DPUTRPKP
	01	03	03	2.01	26	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan													MASYARAKAT	1 Liter/Detik	5.000.000	DPUTRPKP
	01	03	03	2.01	27	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)													MASYARAKAT	1 Desa	5.000.000	DPUTRPKP
	01	03	03	2.01	28	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Yang Dibangun Dalam Kondisi Baik (SR)	365,00	56,00	350,00	3,00	3,00	1.625.000.000	209.995.200	209.995.200	Timbuseng/ Panaikang Lompo/Kel. Parangluara-Kec. Polongbangkeng Utara, Surulangi, Bontokadatto, Bulukunyi, Lantang, Towata, Desa Balangtanayya, Kel. Palleko, Desa Komara	APBD		Meningkatnya Daya saing Infrastruktur Daerah	MASYARAKAT	1 Liter/Detik	345.000.000	DPUTRPKP
	1	03	03	2.01	32	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Yang diperluas Dalam Kondisi Baik (SR)	3.066,00		50,00	135,00	135,00	2.000.000.000	1.999.990.000	1.999.990.000	Mattiro baji/Balangdatu/Rewataya-Kep. Tanakeke, Ujung Baji, Sawakung,Barammamase,Kalenna Bontongape, Campagaya	APBD		Meningkatnya Daya saing Infrastruktur Daerah	MASYARAKAT	50 SR	45.000.000	DPUTRPKP
	1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL																515.000.000	
	1	03	04	2,01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota																515.000.000	
	1	03	04	2,02	10	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun							-	-					MASYARAKAT	1 Ton/hari	505.000.000	DPUTRPKP
	1	03	04	2,02	13	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan							-	-					MASYARAKAT	1 Ton/hari	5.000.000	DPUTRPKP
	1	03	04	2,02	16	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi							-	-					MASYARAKAT	1 Unit	5.000.000	DPUTRPKP
	01	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.			60%			600.000.000									1.295.000.000	
	01	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			60%			600.000.000									1.295.000.000	
	01	03	05	2,01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab/Kota yang disusun (Dok)			1,00			300.000.000	-	-	Kec. Pattalassang, Kab. Takalar	APBD		Meningkatnya Daya saing Infrastruktur Daerah	MASYARAKAT	0	-	DPUTRPKP
	01	03	05	2,01	03	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah tangga yang memiliki tangki septik-RT (Unit)			100,00			100.000.000	-	-	Laikang, bulukunyi, Towata, Ujung Baji, Banggae, Sawakong	APBD		Meningkatnya Daya saing Infrastruktur Daerah	MASYARAKAT	0	-	DPUTRPKP

	01	03	05	2,01	09	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah peserta yang mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik (Orang)			50,00			50.000.000	-	-	Parangmata-Kec. Galesong, Kec. Pattalassang	APBD		Meningkatnya Daya saing Infrastruktur Daerah	MASYARAKAT	0	-	DPUTRPKP
	01	03	05	2,01	16	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT yang dioptimalisasi (Paket)			1,00			150.000.000	-	-	Bulukunyi	APBD		Meningkatnya Daya saing Infrastruktur Daerah	MASYARAKAT	0	-	DPUTRPKP
	01	03	05	2,01	19	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi							-	-					MASYARAKAT	1 Unit	100.000.000	DPUTRPKP
	01	03	05	2,01	20	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Pemukiman Berbasis Masyarakat	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Pemukiman Berbasis Masyarakat yang Dioptimalisasi							-	-					MASYARAKAT	1 M³/Hari	5.000.000	DPUTRPKP
	01	03	05	2,01	21	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)yang ditingkatkan							-	-					MASYARAKAT	1 M³/Hari	5.000.000	DPUTRPKP
	01	03	05	2,01	23	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Pemukiman Berbasis Masyarakat	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Pemukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun							-	-					MASYARAKAT	1 M³/Hari	5.000.000	DPUTRPKP
	01	03	05	2,01	33	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja							-	-					MASYARAKAT	1 Rumah Tangga	5.000.000	DPUTRPKP
	01	03	05	2,01	34	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)							-	-					MASYARAKAT	1 Desa	5.000.000	DPUTRPKP
	01	03	05	2,01	35	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya							-	-					MASYARAKAT	1 Penyelenggara	5.000.000	DPUTRPKP
	01	03	05	2,01	37	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan							-	-						1 Unit	5.000.000	DPUTRPKP
	01	03	05	2,01	38	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara							-	-					MASYARAKAT	1 Unit	5.000.000	DPUTRPKP
	01	03	05	2,01	39	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar							-	-					MASYARAKAT	2 Rumah Tangga	1.000.000.000	DPUTRPKP
	01	03	05	2,01	40	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)							-	-					MASYARAKAT	30 Orang	5.000.000	DPUTRPKP
	01	03	05	2,01	41	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun							-	-					MASYARAKAT	1 Dokumen	150.000.000	DPUTRPKP
	01	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat			100%	100%	100%	1.260.000.000	4.193.100.100	4.193.100.100							585.000.000	
	01	03	06	2.01		Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			100%	100%	100%	1.260.000.000	4.193.100.100	4.193.100.100							585.000.000	
	01	03	06	2.01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	5.800	1.960	5.000,00	2.810	2.810	1.160.000.000	3.073.920.100	3.073.920.100	Galesong Baru-Kec. Galesong, Maccini Baji/Bontopanno/ Paddinging/Tonasa-Kec. Sanrobone, Kel. Takalar-Kec. Mappakasunggu, Kel. Bontolebang/Desa	APBD		Meningkatnya Daya saing Infrastruktur Daerah	MASYARAKAT	50454 M	555.000.000	DPUTRPKP
	01	03	06	2.01	19	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara													MASYARAKAT	3000 Meter	5.000.000	DPUTRPKP
	01	03	06	2.01	21	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang saluran drainase yang ditingkatkan dalam kondisi baik (m)	1.500	500	3.000,00	1.934	1.934	100.000.000	1.119.180.000	1.119.180.000	Kel. Paddinging-Kec. Sanrobone, Kel. Takalar-Kec. Mappakasunggu	APBD		Meningkatnya Daya saing Infrastruktur Daerah	MASYARAKAT	1 Sistem Drainase Lingkungan	5.000.000	DPUTRPKP
	01	03	06	2.01	23	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun													MASYARAKAT	1 Dokumen	5.000.000	DPUTRPKP
	01	03	06	2.01	28	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi													MASYARAKAT	1 Sistem Drainase Perkotaan	5.000.000	DPUTRPKP
	01	03	06	2.01	29	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun													MASYARAKAT	1 Sistem Drainase Perkotaan	5.000.000	DPUTRPKP
	01	03	06	2.01	30	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun													MASYARAKAT	1 Dokumen	5.000.000	DPUTRPKP
	01	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Presentase Rekomendasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)			50%	50%	50%	7.000.000	204.000.000,00	204.000.000,00							155.000.000	
	01	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			100%	100%	100%	7.000.000	204.000.000,00	204.000.000,00							155.000.000	
	01	03	08	2.01	22	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	2.800	10	700,00	1	1	3.000.000	10.000.000	10.000.000	Kec. Pattalassang, Kab. Takalar	APBD		Meningkatnya Daya saing Infrastruktur Daerah	MASYARAKAT	15 Orang	15.000.000	DPUTRPKP
	01	03	08	2.01	23	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1.714	100	700,00	100	100	4.000.000	194.000.000,0	194.000.000,0	Kec. Pattalassang, Kab. Takalar	APBD		Meningkatnya Daya saing Infrastruktur Daerah	MASYARAKAT	1 Dokumen	140.000.000	DPUTRPKP
	01	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	PERSENTASE PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			100%	100%	100%	850.000.000	29.330.001.134	27.360.001.134							12.250.000.000	
	01	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota			100%	100%	100%	850.000.000	29.330.001.134	27.360.001.134							12.250.000.000	
	01	03	09	2,01	08	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	592,607	4.344	164,25	5.600	5.224	850.000.000	29.330.001.134	27.360.001.134	Bonto Kanang-Kec. Galesong Selatan, Kec. Galesong Utara, Kec. Tanakeke, Kec. Polongbangkeng Utara, Kec. Pattalassang	APBD		Meningkatnya Daya saing Infrastruktur Daerah	MASYARAKAT	1 Kawasan	12.250.000.000	DPUTRPKP
	01	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/ Kota (%)			70%	70%	70%	49.078.804.000	41.400.507.826	40.212.507.826							37.090.857.000	
	01	03	10	2,01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			70%	70%	70%	49.078.804.000	41.400.507.826	40.212.507.826							37.090.857.000	

	01	03	10	2,01	29	Penyusunan rencana, kebijakan, dan strategi pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	12	1	1,00	1,00	1,00	30.000.000	10.000.000	10.000.000	Kec. Pattalassang, Kab. Takalar	APBD		Meningkatnya Daya saing Infrastruktur Daerah	MASYARAKAT	1 Dokumen	20.000.000	DPUTRPKP
	01	03	10	2,01	32	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun dalam kondisi baik (km)	499,12	15	0,00	10,00	9,70	47.948.804.000	39.978.500.826	38.790.500.826	Mattirobaji/Balangdatu/Tompotana/ Cambaya/Dande Dandere/Maccini Baji-Kep. Tanakeke, Desa Cikoang/Desa Banggae/Desa Topejawa/Desa Lengkese/Desa Laikang-Kec. Mangarabombang, Kel. Bajeng/Kel. Kalabbirang-Kec. Pattalassang, Maccini Baji/Salekowa/Paddinging/Kel. Sanrobone/Kel. Tonasa/Kel. Lagaruda/Kel. Banyuanyara/Desa Laguruda-Kec. Sanrobone, Desa Aeng BatuBatu/Desa Bontokaddopepe/Desa Aengtowa/Desa Sampulungan/Desa Bontosunggu/Desa Bontolanra/Kel. Bontolebang/Desa Pakkabba/Borongcalla/Bontoa Utara-Kec. Galesong Utara, Kel. Kampung Beru/Kel. Malewang/Kel.Pa'rappunganta/Kel. Kale Ko'mara/Kel. Towata/Kel. Bontoloe/Timbuseng/Mattompodalle/Parangbaddo/Kel. Paranghuara/Desa Lassang -Kec. Polongbangkeng Utara, Kel. Rajayya/Bontokadatto/Bulukunyi/Cakura/Pabundukang-Kec. Polongbangkeng Selatan, Desa Bontoloe/Galesong Baru/Mappakalompo/Desa Parambambe/DesaParangmata/Desa	APBD/APBN		Meningkatnya Daya saing Infrastruktur Daerah	MASYARAKAT	8,05 KM	34.694.161.000	DPUTRPKP
	01	03	10	2,01	34	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang dilakukan Pemeliharaan secara berkala(KM)	8,00		2,00			300.000.000	1.262.007.000	1.262.007.000	Kampung Tangnga-Kec. Galesong Utara, Kel. Bontokassi/Desa Popo-Galesong Selatan, Kel. Ujung Baji/Kel. Sanrobone-Kec. Sanrobone, Kel. Pa'batangang-Kec. Sanrobone, Desa Cakura-Kec. Polongbangkeng Selatan	APBD		Meningkatnya Daya saing Infrastruktur Daerah	MASYARAKAT	2 KM	500.000.000	DPUTRPKP
	01	03	10	2,01	40	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun dalam kondisi baik (Paket)	5,00	3,00	15,00	1,00	1,00	600.000.000	150.000.000	150.000.000	Kel. Palleko/Kel. Kampung Beru/Pannanuka/Bontorita/Balangasana/Massamaturu-Kec. Polonbangkeng Utara, Cikoang/Bontomanai/Bontoparang-Kec. Mangarabombang, Aeng Towa-Kec. Galesong Utara, Desa Kalukuang-Kec. Galesong	APBD		Meningkatnya Daya saing Infrastruktur Daerah	MASYARAKAT	4 Jembatan	1.376.696.000	DPUTRPKP
	01	03	10	2,01	46	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang dilakukan Pemeliharaan secara Rutin(Km)			1,00			200.000.000			Kel. Parangbaddo-Kec. Polonbangkeng Utara, Desa Punaga-kec. Mangarabombang	APBD		Meningkatnya Daya saing Infrastruktur Daerah	MASYARAKAT	1 KM	500.000.000	DPUTRPKP
	01	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio Tenaga Operator/ Teknis/ Analisis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi			40%	40%	40%	10.000.000	17.640.000	17.640.000								100.000.000	
	01	03	11	2,01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			100%	100%	100%	5.000.000	5.000.000	5.000.000								73.000.000	
	01	03	11	2.01	15	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3.000.000	2.500.000	2.500.000	Kec. Pattalassang, Kab. Takalar	APBD		Meningkatnya Daya saing Infrastruktur Daerah	MASYARAKAT	1 Dokumen	23.000.000	DPUTRPKP
	01	03	11	2.01	16	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	700,00	30,00	50,00	1,00	1,00	2.000.000	2.500.000	2.500.000	Kab. Takalar	APBD		Meningkatnya Daya saing Infrastruktur Daerah	MASYARAKAT	50 Orang	50.000.000	DPUTRPKP
	01	03	11	2,04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			100%			5.000.000	12.640.000	12.640.000								27.000.000	
	01	03	11	2,04	04	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	32,00	1,00	8,00	1,00	1,00	5.000.000	12.640.000	12.640.000	Kec. Pattalassang, Kab. Takalar	APBD		Meningkatnya Daya saing Infrastruktur Daerah	MASYARAKAT	8 Paket Pekerjaan	27.000.000	DPUTRPKP
	01	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase wilayah yang telah tersusun rencana tata ruang Persentase wilayah yang telah ditetapkan rencana tata ruangnya			40%	40%	40%	3.000.000	367.990.000,00	367.990.000,00								145.000.000	
	01	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			100%			3.000.000	367.990.000,00	367.990.000,00								145.000.000	
	01	03	12	2,03	07	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3.000.000	367.990.000,00	367.990.000,00	Kec. Pattalassang, Kab. Takalar	APBD		Meningkatnya Daya saing Infrastruktur Daerah	MASYARAKAT	1 Sistem Informasi	145.000.000	DPUTRPKP
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																		
	01	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase perumahan yang mendapatkan iiin			60%	60%	60%	500.000.000	196.850.000	196.850.000								250.750.000	
	01	04	02	2,01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			100%	100%	100%	77.000.000	63.683.100	63.683.100								105.000.000	
	01	04	02	2,01	02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan yang potensial sebagai lokasi relokasi Perumahan(Dok)	1,00		1,00	1,00	1,00	13.500.000	13.475.000	13.475.000	Kec. Pattalassang, Kab. Takalar	APBD		Meningkatnya Daya saing Infrastruktur Daerah	MASYARAKAT	1 Dokumen	15.000.000	DPUTRPKP
	01	04	02	2,01	03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban bencana Kejadian sebelumnya yang belum tertangani(Dok)	1,00		1,00	1,00	1,00	18.000.000	17.997.500	17.997.500	Kec. Pattalassang, Kab. Takalar	APBD		Meningkatnya Daya saing Infrastruktur Daerah	MASYARAKAT	1 Dokumen	40.000.000	DPUTRPKP
	01	04	02	2,01	04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen Data Rumah yang terkena Bencana Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah(Dok)	1,00		1,00	1,00	1,00	36.500.000	29.155.600	29.155.600	Kec. Pattalassang, Kab. Takalar	APBD		Meningkatnya Daya saing Infrastruktur Daerah	MASYARAKAT	1 Dokumen	40.000.000	DPUTRPKP
	01	04	02	2,01	10	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban BencanaKab/Kota yang terverifikasi(Dok)	-		1,00	1,00	1,00	9.000.000	3.055.000	3.055.000	Kec. Pattalassang, Kab. Takalar	APBD		Meningkatnya Daya saing Infrastruktur Daerah	MASYARAKAT	1 Dokumen	10.000.000	DPUTRPKP
	01	04	02	2,03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			100%	100%	100%	423.000.000	133.166.900	133.166.900								140.750.000	
	01	04	02	2,03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban bencana Kab/Kota yang terhabilitasi (Unit Rumah)	33,00		8,00	8,00	8,00	140.500.000	20.616.900	20.616.900	Kab. Takalar	APBD		Meningkatnya Daya saing Infrastruktur Daerah	MASYARAKAT	8 Unit Rumah	95.750.000	DPUTRPKP

	01	04	02	2,03	04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi korban bencana kab/kota yang terbangun(Unit)	37,00		7,00	1,00	1,00	282.500.000	112.550.000	112.550.000	Kab. Takalar	APBD		Meningkatnya Daya saing Infrastruktur Daerah	MASYARAKAT	7 Unit Rumah	45.000.000	DPUTRPKP
	01	04	02	2,05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus																5.000.000	
	01	04	02	2,05	02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus							-	-					MASYARAKAT	1 Dokumen	5.000.000	DPUTRPKP
	01	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase keetrsediaan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota			50%	50%	50%	250.000.000	249.980.000	249.980.000							224.000.000	
	01	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			100%	100%	100%	250.000.000	249.980.000	249.980.000							10.000.000	
	01	04	03	2.02	08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/T ereview/Terlegalisasi	-	-	1,00	1,00	1,00	250.000.000	249.980.000	249.980.000	Kec. Pattalassang, Kab. Takalar	APBD		Meningkatnya Daya saing Infrastruktur Daerah	MASYARAKAT	1 Dokumen	5.000.000	DPUTRPKP
	01	04	03	2.02	14	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh													MASYARAKAT	1 Dokumen	5.000.000	DPUTRPKP
	01	04	03	2,03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																214.000.000	
	01	04	03	2,03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki							-	-					MASYARAKAT	5 Unit Rumah	214.000.000	DPUTRPKP
	01	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH																1.273.000	
	01	04	04	2,01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota																1.273.000	
	01	04	04	2,01	04	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh							-	-					MASYARAKAT	2 Unit	1.273.000	DPUTRPKP
	01	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase ketersediaan Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)			50%	50%	50%	1.500.000.000	1.648.165.700	1.648.165.700							3.100.000.000,00	
	01	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			50%	50%	50%	1.500.000.000	1.648.165.700	1.648.165.700							3.100.000.000,00	
	01	04	05	2.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dok)			2,00			1.400.000.000			Kec. Pattalassang, Kab. Takalar	APBD		Meningkatnya Daya saing Infrastruktur Daerah	MASYARAKAT	0	-	DPUTRPKP
	01	04	04	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	81,00	27,00	20,00	18,00	18,00	100.000.000	1.648.165.700	1.648.165.700	Kel. Pa'lalakkang-Kec. Galesong, Kel. Patani/Kel. Takalar-Kec. Mappakasunggu, Kel. Bulukunyi-Kec. Polombangkeng Selatan, Kel. Pappa/Kel. Pattalassang-Kec. Pattalassang, Kel. Pa'rappunganta-Kec. Polongbangkeng Utara, Desa Aeng Batu Batu-Kec. Galesong Utara, Topejawa-Kec. Mangarabombang	APBD		Meningkatnya Daya saing Infrastruktur Daerah	MASYARAKAT	20 Lokasi	3.100.000.000	DPUTRPKP
												J U M L A H	**68.538.106.560**	**92.425.002.640,00**	**89.092.428.656,00**						**71.975.083.332**	

Takalar, 26 Juli 2024,

Mengetauhi,
Kepala Bappelitbangda Kabupaten Takalar

Kepala Dinas PUTRPKP Kab. Takalar,

Drs. Achmad Rivai, M.Si
NIP. 196810121989081001

BUDIAR ROSAL SALEH, S.STP.,M.Adm.Pemb
.Nip. 19800520 199810 1 001

Tabel III-2

RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. TAKALAR TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target			Pagu Indikatif (Rp)			Keterangan
						Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	Renja 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	01					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	01	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	7.041.114.560	7.736.403.780	7.561.829.796	
	1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	27.000.000	50.133.400	50.133.400	
	1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Renja Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen)	Jumlah Renja Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen)	2,00	1,00	1,00	5.000.000	11.557.400	11.557.400	Kec. Pattalassang, Kab. Takalar
	1	03	01	2.01	02	Koodinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koodinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD(Dok)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD(Dok)	1,00	1,00	1,00	3.000.000	13.226.000	13.226.000	Kec. Pattalassang, Kab. Takalar
	1	03	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA Pokok Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen)	Jumlah DPA Pokok Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen)	1,00	1,00	1,00	3.000.000	4.000.000	4.000.000	Kec. Pattalassang, Kab. Takalar
	1	03	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPA Perubahan/Parsial Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen)	Jumlah DPA Perubahan/Parsial Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen)	1,00	4,00	4,00	3.000.000	4.000.000	4.000.000	Kec. Pattalassang, Kab. Takalar
	1	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1,00	1,00	1,00	2.000.000	4.000.000	4.000.000	Kec. Pattalassang, Kab. Takalar
	1	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Monev Triwulanan Yang disusun (Laporan)	Jumlah Laporan Monev Triwulanan Yang disusun (Laporan)	4,00	4,00	4,00	11.000.000	13.350.000	13.350.000	Kec. Pattalassang, Kab. Takalar
	1	03	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	6.627.464.560	7.044.867.788	6.870.293.804	
	1	03	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan (77 Orang selama 12 bulan)	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan (77 Orang selama 12 bulan)	85,00	85,00	85,00	6.603.964.560	7.014.891.788	6.840.317.804	Kec. Pattalassang, Kab. Takalar
	1	03	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dan Jenis Penatausahaan dam Verifikasi Keuangan (Bulan)	Jumlah dan Jenis Penatausahaan dam Verifikasi Keuangan (Bulan)	12,00	12,00	12,00	10.000.000	12.006.000,0	12.006.000,0	Kec. Pattalassang, Kab. Takalar
	1	03	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun/Neraca Perangkat Daerah yang disusun (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun/Neraca Perangkat Daerah yang disusun (Laporan)	1,00	1,00	1,00	5.000.000	4.990.000	4.990.000	Kec. Pattalassang, Kab. Takalar
	1	03	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran Perangkat Daerah yang disusun (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran Perangkat Daerah yang disusun (Laporan)	1,00	1,00	1,00	5.000.000	7.990.000	7.990.000	Kec. Pattalassang, Kab. Takalar
	1	03	01	2,02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis realisasi anggaran Perangkat Daerah yang disusun (Laporan)	Jumlah Laporan Prognosis realisasi anggaran Perangkat Daerah yang disusun (Laporan)	1,00	1,00	1,00	3.500.000	4.990.000	4.990.000	Kec. Pattalassang, Kab. Takalar
	1	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%	9.000.000	15.000.000	15.000.000	
	01	03	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan RKBMD yang disusun (Laporan)	Jumlah Laporan RKBMD yang disusun (Laporan)	2,00	2,00	2,00	3.000.000	6.000.000	6.000.000	Kec. Pattalassang, Kab. Takalar
	01	03	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun (Laporan)	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun (Laporan)	1,00	1,00	1,00	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kec. Pattalassang, Kab. Takalar
	01	03	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dan Jenis Penatausahaan Barang Milik Daerah yang disusun (Bulan)	Jumlah dan Jenis Penatausahaan Barang Milik Daerah yang disusun (Bulan)	1,00	1,00	1,00	3.000.000	6.000.000	6.000.000	Kec. Pattalassang, Kab. Takalar
	01	03	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
	01	03	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian yang terselesaikan (Laporan)	Jumlah laporan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian yang terselesaikan (Laporan)	1,00	1,00	1,00	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kec. Pattalassang, Kab. Takalar
	01	03	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	12.250.000	101.843.600	101.843.600	
	01	03	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2,00	2,00	2,00	1.000.000	954.600	954.600	Kec. Pattalassang, Kab. Takalar
	01	03	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	2,00	2,00	2,00	1.000.000	1.400.000	1.400.000	Kec. Pattalassang, Kab. Takalar
	01	03	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitas Yang Disisapkan Untuk Tamu Kantor	Jumlah Fasilitas Yang Disisapkan Untuk Tamu Kantor	4,00	4,00	4,00	500.000	1.215.000	1.215.000	Kec. Pattalassang, Kab. Takalar
	01	03	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah yang dilaksanakan	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah yang dilaksanakan	12,00	12,00	12,00	5.000.000	95.274.000	95.274.000	Kec. Pattalassang, Kab. Takalar
	1	03	01	2,06	11	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah pengelolaan website SKPD (Laporan)	Jumlah pengelolaan website SKPD (Laporan)	1,00	1,00	1,00	4.750.000	3.000.000	3.000.000	Kec. Pattalassang, Kab. Takalar
	01	03	01	2,08		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	345.400.000	474.878.992	474.878.992	
	01	03	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rek. yang dibayarkan	Jumlah rek. yang dibayarkan	12,00	12,00	12,00	295.000.000	265.678.992	265.678.992	Kec. Pattalassang, Kab. Takalar
	01	03	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Paket)	Jumlah Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Paket)	1,00	1,00	1,00	50.400.000	209.200.000	209.200.000	Kec. Pattalassang, Kab. Takalar

	01	03	01	2,09		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	17.000.000	46.680.000	46.680.000	
	01	03	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	31,00	31,00	31,00	10.000.000	46.680.000	46.680.000	Kec. Pattalassang, Kab. Takalar
	01	03	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4,00	4,00	4,00	2.000.000			Kec. Pattalassang, Kab. Takalar
	01	03	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung Kantor atau bangunan lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2,00	2,00	2,00	5.000.000			Kec. Pattalassang, Kab. Takalar
	01	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	100%	100%	100%	3.810.188.000	4.870.378.900	4.870.378.900	
	01	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	3.810.188.000	4.870.378.900	4.870.378.900	
	01	03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	200,00	1.783,00	1.783,00	3.110.188.000	4.870.378.900	4.870.378.900	Dusun Pattinoang, Kec. Galesong
	01	03	02	2.02	15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang direhabilitasi (Bendung)	Jumlah Bendung Irigasi yang direhabilitasi (Bendung)	1,00			200.000.000			Kab. Takalar
	01	03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1.000,00			300.000.000			Kab. Takalar
	01	03	02	2.02	22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang dioperasikan dan dipelihara (Unit)	Jumlah Bendung Irigasi yang dioperasikan dan dipelihara (Unit)	1,00			200.000.000			Kab. Takalar
	01	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	PERSENTASE PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	PERSENTASE PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	91%	91%	91%	3.625.000.000	2.209.985.200	2.209.985.200	
	01	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	95%	95%	95%	3.625.000.000	2.209.985.200	2.209.985.200	
	01	03	03	2.01	28	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Yang Dibangun Dalam Kondisi Baik (SR)	Jumlah Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Yang Dibangun Dalam Kondisi Baik (SR)	350,00	3,00	3,00	1.625.000.000	209.995.200	209.995.200	Timbuseng/ Panaikang Lompo/Kel. Parangluara-Kec. Polongbangkeng Utara, Surulangi, Bontokadatto, Bulukunyi, Lantang, Towata, Desa Balangtanayya, Kel. Palleko, Desa Komara
	1	03	03	2.01	32	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Yang diperluas Dalam Kondisi Baik (SR)	Jumlah Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Yang diperluas Dalam Kondisi Baik (SR)	50,00	135,00	135,00	2.000.000.000	1.999.990.000	1.999.990.000	Mattiro baji/Balangdatu/Rewataya-Kep. Tanakeke, Ujung Baji, Sawakung,Barammamase,Kalenna Bontongape, Campagaya
	01	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	60%			600.000.000			
	01	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	60%			600.000.000			
	01	03	05	2,01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab/Kota yang disusun (Dok)	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab/Kota yang disusun (Dok)	1,00			300.000.000	-	-	Kec. Pattalassang, Kab. Takalar
	01	03	05	2,01	03	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah tangga yang memiliki tangki septik-RT (Unit)	Jumlah Rumah tangga yang memiliki tangki septik-RT (Unit)	100,00			100.000.000	-	-	Laikang, bulukunyi, Towata, Ujung Baji, Banggae, Sawakong
	01	03	05	2,01	09	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah peserta yang mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik (Orang)	Jumlah peserta yang mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik (Orang)	50,00			50.000.000	-	-	Parangmata-Kec. Galesong, Kec. Pattalassang
	01	03	05	2,01	16	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT yang dioptimalisasi (Paket)	Kapasitas IPLT yang dioptimalisasi (Paket)	1,00			150.000.000	-	-	Bulukunyi
	01	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	100%	100%	100%	1.260.000.000	4.193.100.100	4.193.100.100	
	01	03	06	2.01		Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	1.260.000.000	4.193.100.100	4.193.100.100	
	01	03	06	2.01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	5.000,00	2.810	2.810	1.160.000.000	3.073.920.100	3.073.920.100	Galesong Baru-Kec. Galesong, Maccini Baji/Bontopanno/ Paddinging/Tonasa-Kec. Sanrobone, Kel. Takalar-Kec. Mappakasunggu, Kel. Bontolebang/Desa
	01	03	06	2.01	21	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang saluran drainase yang ditingkatkan dalam kondisi baik (m)	Panjang saluran drainase yang ditingkatkan dalam kondisi baik (m)	3.000,00	1.934	1.934	100.000.000	1.119.180.000	1.119.180.000	Kel. Paddinging-Kec. Sanrobone, Kel. Takalar-Kec. Mappakasunggu
	01	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Presentase Rekomendasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	Presentase Rekomendasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	50%	50%	50%	7.000.000	204.000.000,00	204.000.000,00	
	01	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	100%	100%	100%	7.000.000	204.000.000,00	204.000.000,00	

	01	03	08	2.01	22	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	700,00	1	1	3.000.000	10.000.000	10.000.000	Kec. Pattalassang, Kab. Takalar
	01	03	08	2.01	23	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	700,00	100	100	4.000.000	194.000.000,0	194.000.000,0	Kec. Pattalassang, Kab. Takalar
	01	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	PERSENTASE PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	PERSENTASE PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	100%	100%	100%	850.000.000	29.330.001.134	27.360.001.134	
	01	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	850.000.000	29.330.001.134	27.360.001.134	
	01	03	09	2,01	08	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	164,25	5.600	5.224	850.000.000	29.330.001.134	27.360.001.134	Bonto Kanang-Kec. Galesong Selatan, Kec. Galesong Utara, Kec. Tanakeke, Kec. Polongbangkeng Utara, Kec. Pattalassang
	01	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/ Kota (%)	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/ Kota (%)	70%	70%	70%	49.078.804.000	41.400.507.826	40.212.507.826	
	01	03	10	2,01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	70%	70%	70%	49.078.804.000	41.400.507.826	40.212.507.826	
	01	03	10	2,01	29	Penyusunan rencana, kebijakan, dan strategi pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan	Penyusunan rencana, kebijakan, dan strategi pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	1,00	1,00	1,00	30.000.000	10.000.000	10.000.000	Kec. Pattalassang, Kab. Takalar
	01	03	10	2,01	32	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun dalam kondisi baik (km)	Panjang jalan yang dibangun dalam kondisi baik (km)	0,00	10,00	9,70	47.948.804.000	39.978.500.826	38.790.500.826	Mattirobaji/Balangdatu/Tompotana/ Cambaya/Dande Dandere/Maccini Baji-Kep. Tanakeke, Desa Cikoang/Desa Banggae/Desa Topejawa/Desa Lengkese/Desa Laikang-Kec. Mangarabombang, Kel. Bajeng/Kel. Kalabbirang-Kec. Pattalassang, Maccini Baji/Salekowa/Paddinging/Kel. Sanrobone/Kel. Tonasa/Kel. Laguruda/Kel. Banyuanyara/Desa Laguruda-Kec. Sanrobone, Desa Aeng BatuBatu/Desa Bontokaddopepe/Desa Aengtowa/Desa Sampulungan/Desa Bontosunggu/Desa Bontolanra/Kel. Bontolebang/Desa Pakkabba/Borongcalla/Bontoa Utara-Kec. Galesong Utara, Kel. Kampung Beru/Kel. Malewang/Kel.Pa'rappunganta/Kel. Kale Ko'mara/Kel. Towata/Kel. Bontoloe/Timbuseng/Mattompodalli e/Parangbaddo/Kel. Parangluara/Desa Lassang -Kec. Polongbangkeng Utara, Kel. Rajayya/Bontokadatto/Bulukunyi/C akura/Pabundukang-Kec. Polongbangkeng Selatan, Desa Bontoloe/Galesong Baru/Mappakalompo/Desa Pannyoshe/DesaParangmata/Desa
	01	03	10	2,01	34	Pemeliharaan Berkala Jalan	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang dilakukan Pemeliharaan secara berkala(KM)	Panjang Jalan yang dilakukan Pemeliharaan secara berkala(KM)	2,00			300.000.000	1.262.007.000	1.262.007.000	Kampung Tangnga-Kec. Galesong Utara, Kel. Bontokassi/Desa Popo-Galesong Selatan, Kel. Ujung Baji/Kel. Sanrobone-Kec. Sanrobone, Kel. Pa'batangang-Kec. Sanrobone, Desa Cakura-Kec. Polongbangkeng Selatan
	01	03	10	2,01	40	Pembangunan Jembatan	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun dalam kondisi baik (Paket)	Jumlah jembatan yang dibangun dalam kondisi baik (Paket)	15,00	1,00	1,00	600.000.000	150.000.000	150.000.000	Kel. Palleko/Kel. Kampung Beru/Pannaraka/Bontorita/Balangsa ana/Massamaturu-Kec. Polonbangkeng Utara, Cikoang/Bontomanai/Bontoparang-Kec. Mangarabombang, Aeng Towa-Kec. Galesong Utara, Desa Kalukuang-Kec. Galesong
	01	03	10	2,01	46	Pemeliharaan Rutin Jalan	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang dilakukan Pemeliharaan secara Rutin(Km)	Panjang Jalan yang dilakukan Pemeliharaan secara Rutin(Km)	1,00			200.000.000			Kel. Parangbaddo-Kec. Polonbangkeng Utara, Desa Punaga-kec. Mangarabombang
	01	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio Tenaga Operator/ Teknis/ Analisis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	Rasio Tenaga Operator/ Teknis/ Analisis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	40%	40%	40%	10.000.000	17.640.000	17.640.000	
	01	03	11	2,01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	100%	100%	100%	5.000.000	5.000.000	5.000.000	

	01	03	11	2.01	15	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan	1,00	1,00	1,00	3.000.000	2.500.000	2.500.000	Kec. Pattalassang, Kab. Takalar
	01	03	11	2.01	16	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	50,00	1,00	1,00	2.000.000	2.500.000	2.500.000	Kab. Takalar
	01	03	11	2,04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	100%	100%	100%	5.000.000	12.640.000	12.640.000	
	01	03	11	2,04	04	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	8,00	1,00	1,00	5.000.000	12.640.000	12.640.000	Kec. Pattalassang, Kab. Takalar
	01	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase wilayah yang telah tersusun rencana tata ruang Persentase wilayah yang telah ditetapkan rencana tata ruangnya	Persentase wilayah yang telah tersusun rencana tata ruang Persentase wilayah yang telah ditetapkan rencana tata ruangnya	40%	40%	40%	3.000.000	367.990.000,00	367.990.000,00	
	01	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	3.000.000	367.990.000,00	367.990.000,00	
	01	03	12	2,03	07	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1,00	1,00	1,00	3.000.000	367.990.000,00	367.990.000,00	Kec. Pattalassang, Kab. Takalar
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
	01	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase perumahan yang mendapatkan ijin	Persentase perumahan yang mendapatkan ijin	60%	60%	60%	500.000.000	196.850.000	196.850.000	
	01	04	02	2,01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	77.000.000	63.683.100	63.683.100	
	01	04	02	2,01	02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan yang potensial sebagai lokasi relokasi Perumahan(Dok)	Jumlah Dokumen Data Lahan yang potensial sebagai lokasi relokasi Perumahan(Dok)	1,00	1,00	1,00	13.500.000	13.475.000	13.475.000	Kec. Pattalassang, Kab. Takalar
	01	04	02	2,01	03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban bencana Kejadian sebelumnya yang belum tertangani(Dok)	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban bencana Kejadian sebelumnya yang belum tertangani(Dok)	1,00	1,00	1,00	18.000.000	17.997.500	17.997.500	Kec. Pattalassang, Kab. Takalar
	01	04	02	2,01	04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen Data Rumah yang terkena Bencana Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah(Dok)	Jumlah Dokumen Data Rumah yang terkena Bencana Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah(Dok)	1,00	1,00	1,00	36.500.000	29.155.600	29.155.600	Kec. Pattalassang, Kab. Takalar
	01	04	02	2,01	10	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban BencanaKab/Kota yang terverifikasi(Dok)	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban BencanaKab/Kota yang terverifikasi(Dok)	1,00	1,00	1,00	9.000.000	3.055.000	3.055.000	Kec. Pattalassang, Kab. Takalar
	01	04	02	2,03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	423.000.000	133.166.900	133.166.900	
	01	04	02	2,03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban bencana Kab/Kota yang terehabilitasi (Unit Rumah)	Jumlah Rumah Korban bencana Kab/Kota yang terehabilitasi (Unit Rumah)	8,00	8,00	8,00	140.500.000	20.616.900	20.616.900	Kab. Takalar
	01	04	02	2,03	04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi korban bencana kab/kota yang terbangun(Unit)	Jumlah Rumah bagi korban bencana kab/kota yang terbangun(Unit)	7,00	1,00	1,00	282.500.000	112.550.000	112.550.000	Kab. Takalar
	01	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase keetrsediaan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase keetrsediaan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	50%	50%	50%	250.000.000	249.980.000	249.980.000	
	01	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	100%	100%	100%	250.000.000	249.980.000	249.980.000	
	01	04	03	2,02	08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/T ereview/Terlegalisasi	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/T ereview/Terlegalisasi	1,00	1,00	1,00	250.000.000	249.980.000	249.980.000	Kec. Pattalassang, Kab. Takalar
	01	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase ketersediaan Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persentase ketersediaan Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	50%	50%	50%	1.500.000.000	1.648.165.700	1.648.165.700	
	01	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	50%	50%	50%	1.500.000.000	1.648.165.700	1.648.165.700	
	01	04	05	2.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dok)	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dok)	2,00			1.400.000.000			Kec. Pattalassang, Kab. Takalar
	01	04	04	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	20,00	18,00	18,00	100.000.000	1.648.165.700	1.648.165.700	Kel. Pa'lalakkang-Kec. Galesong, Kel. Patani/Kel. Takalar-Kec. Mappakasunggu, Kel. Bulukunyi-Kec. Polombangkeng Selatan, Kel. Pappa/Kel. Pattalassang-Kec. Pattalassang, Kel. Pa'rappunganta-Kec. Polongbangkeng Utara, Desa Aeng Batu Batu-Kec. Galesong Utara, Topejawa-Kec. Mangarabombang
												J U M L A H	68.535.106.560	92.425.002.640,00	89.092.428.656,00	

Takalar, 26 Juli 2024,

Mengetauhi,
Kepala Bappelitbangda Kabupaten Takalar

Kepala Dinas PUTRPKP Kab. Takalar,

Drs. Achmad Rivai, M.Si
NIP. 196810121989081001

BUDIAR ROSAL SALEH, S.STP.,M.Adm.Pemb
.Nip. 19800520 199810 1 001

BAB V
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUTRPKP) Kabupaten Takalar Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun 2024. Dalam upaya menyelesaikan target tahun 2024, seluruh perubahan yang terjadi dalam program dan kegiatan tahun 2024 telah mempertimbangkan kemampuan realisasi pelaksanaan hingga akhir tahun 2024. Dengan demikian diharapkan seluruh unsur di lingkup Dinas PUTRPKP dapat mempedomani isi dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024 ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Rencana Kerja Dinas PUTRPKP tahun 2024 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Takalar tahun 2024. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.



PERUBAHAN RENJA

TAHUN 2024

BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK

[Date]

[Course title]

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar tahun 2024.

Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar tahun 2023 memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada rencana strategis (RENSTRA) tahun 2023 – 2026 dan bersifat indikatif. Selanjutnya Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar tahun 2024 menjadi landasan atau pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Tahun Anggaran 2024.

Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dan ikut berpartisipasi hingga tersusunnya Perubahan Renja ini. Perlu disadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Renja Perubahan ini, oleh karena itu masukan serta saran sangat kami harapkan.

Akhirnya semoga Perubahan Rencana Kerja ini dapat dilaksanakan dengan baik dan menjadi acuan dalam pelaksanaan sejumlah program dan kegiatan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar agar kegiatan dapat berjalan lancar, tertib dan mencapai sasaran yang ditetapkan.

Takalar, Agustus 2024

Kepala Badan,

ZUBAIR, S.Sos. MM.

Nip. 19730621 199206 1 005

DAFTAR TABEL

TABEL II.1 Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 11

TABEL II.2 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang ada dalam APBD 2024 14

TABEL II.3 Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Pada APBD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar Tahun 2024 Hingga Triwulan II… 15

TABEL II.4 Rekapitulasi Capaian Anggaran Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan 18

TABEL II.5 Rekapitulasi Capaian Kinerja Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan 21

TABEL II.6 Capaian Indikator Kinerja Utama 2023, Asumsi Capaian Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2024, dan Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar Kabupaten Takalar Tahun 2025..... 24

TABEL II.7 Asumsi Capaian Tahun 2024 dan Target Tahun 2025 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar Kabupaten Takalar 27

TABEL III.1 Tujuan, Sasaran Serta Target Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar Tahun 2024 38

TABEL III.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar..... 47

TABEL III.3 Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu Pada Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Tahun 2024 60

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR TABEL 2

DAFTAR ISI 3

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 4
1.2 Landasan Hukum 6
1.3 Maksud dan Tujuan 8
1.4 Sistematika Penulisan 9

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TAKALAR SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar Sampai dengan Triwulan II 10
2.1.1 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar yang terakomodir di APBD 2024 11
2.1.2 Evaluasi program kinerja kegiatan dan sub kegiatan dalam pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar 2024 13
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar 19
2.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) 20
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) 23
2.2.3 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) 25
2.3 Hambatan, upaya pencapaian dan rekomendasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar Tahun 2024
2.3.1 Hambatan dalam pelaksanaan kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar tahun 2024 sampai dengan triwulan II 28
2.3.2 ..... Upaya dalam pencapaian pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar tahun 2024 sampai dengan triwulan II 28
2.3.3 Rekomendasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar tahun 2024 sampai dengan triwulan selanjutnya ,,,

BAB IV PENUTUP..... 4

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan bersasaran, maka diperlukan perencanaan pembangunan nasional.

Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka melakukan perubahan yang mengandung makna adanya kemajuan dan/atau perbaikan, pertumbuhan mencapai kondisi yang lebih baik dibanding keadaan sebelumnya. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi, dan politik sampai pada perkembangan adanya penyelarasan dengan konservasi lingkungan. Nilai dalam pembangunan adalah optimalisasi sumberdaya dengan tetap menjaga kesinambungan serta kualitas lingkungan yang baik. Perencanaan Pembangunan Daerah secara umum merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Lebih lanjut lagi, pembangunan yang dilakukan di daerah, diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang di hadapi dan mengembangkan potensi yang dimiliki guna meningkatkan daya saing daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta harus mendukung pelaksanaan pembangunan di tingkat nasional untuk mencapai cita-cita bersama sebagai suatu bangsa

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka setiap PD diharuskan untuk Menyusun Rencana Kerja PD (Renja PD) sebagai acuan perencanaan kegiatan PD untuk kurung waktu satu tahun. Penyusunan Renja PD ini mengacu pada Rancangan Awal RKPD, Renstra PD, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 360 ayat (1) dan ayat (3) mengamanahkan bahwa Perangkat Daerah menyusun rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada :

a. Rancangan Perubahan RKPD; dan
b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 perlu dilakukan penyesuaian target indikator kinerja Tahun 2024 melalui perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar Tahun 2024. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 dalam Pasal 361 ayat (1), Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360 ayat (3), terdiri atas:

a Perumusan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
b Penyajian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun I (Pertama) pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar Kabupaten Takalar Tahun 2023 – 2026.

Dokumen ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar tahun 2024 dalam penyusunannya selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan memperhatikan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar Tahun 2024 selanjutnya menjadi landasan penyusunan Perubahan RKA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2024. Dalam menyempurnakan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar, maka

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara 2018 Nomor 184);
8. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 119);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah (Berita Negara 2019 Nomor 1789;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah, dan RencanaKerjaPemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2008 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor 223 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2023- 2026 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 223);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan berdasarkan Peraturan Bupati Takalar Nomor 17 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 17),
17. Peraturan Bupati Takalar Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Kalender Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah serta Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah Tahun 2024;

18. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar Nomor 140 Tahun 2024 tentang Pengesahan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Maksud

Adapun Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar adalah :

- Dihasilkannya dokumen perencanaan pembangunan Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2024 yang karena adanya beberapa perubahan dari rencana kerja sebelumnya, sehingga dapat memberikan gambaran hubungan sinergitas antara kebijakan di tingkat nasional dengan kebijakan pemerintah daerah akibat terjadinya refocusing anggaran.
- Dirumuskannya pedoman perencanaan pembangunan urusan Pemerintahan Umum bagi para penyelenggara di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

b. Tujuan

Adapun Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar tidak lain adalah:

- Mengevaluasi kinerja pembangunan urusan Pemerintahan Umum sampai triwulan II dan dapat mencarikan solusi atas permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan tahun berjalan.
- Mengarahkan pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar kedalam suatu strategi program/kegiatan.
- Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan seluruh program/kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar.

- Menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan RKA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Berisi mengenai Latar Belakang Penyusunan Renja, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan yang dipergunakan.

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar Sampai Triwulan II Tahun 2024

Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar sampai dengan Triwulan II, Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar, Hambatan serta Upaya Pencapaian dan Rekomendasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar Tahun 2024

BAB III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisikan rumusan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar, Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar Tahun 2024.

BAB IV. Penutup

Bab ini berisikan uraian penutup, yang menjelaskan poin-poin yang menjadi harapan berkenaan dengan pelaksanaa Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar Tahun 2024.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar Sampai dengan Triwulan II

Pada dasarnya penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar sampai dengan triwulan II. Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Evaluasi atas perencanaan bertujuan untuk mengetahui apa yang harus dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar. Secara garis besar, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar tahun 2024 sampai pada Triwulan II telah dicapai dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari tingkat pencapaian target yang rata-rata mencapai untuk penyerapan dana dan rata-rata mencapai untuk kinerja *output* dan *outcome* kegiatan.

Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*)dan dampak (*impact*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana,sumber daya manusia,laporan, buku dan indikator lainnya.

Rumusan Evaluasi dapat di lihat dari program dan kegiatan yang sesuai target, di bawah target, melebihi target serta faktor yang menjadi penghambat dan faktor pendukung tercapainya 100% Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar

Kegiatan evaluasi Renja SKPD dan pencapaian realisasi kinerja sampai dengan triwulan II ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Berikut tabel evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar sampai dengan Triwulan II Tahun 2024:

Tabel 2.1.1
Capaian Realisasi Kinerja Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Takalar Sampai Pada Triwulan II Tahun 2024

No	Sasaran	Kode				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Per Bulan						Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Kinerja Per Bulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
															Januari		Februari		Maret		I		April		Mei		Juni		II		III		IV									
1	2	3				A	5	6			7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		20		24		25		26 = 25/9 x 100%		27 = 7 + 25		28 = 27/6 x 100%		29	30
		B				UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					37.463.905.572		16.927.491.403		28.074.078.747						519.773.366														3.657.765.781		13,98%	14,88%		21.195.030.550				
		B	01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																																					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		B	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan penunjang urusan pemerintahan	100%	Persen	11.975.945.572	21%	2.351.456.859	100%	3.093.985.447	1%	106.522.324	1%	125.009.017	9%	283.055.375	11.57%	514.586.716	15%	337.771.863	6%	143.247.189	9%	350.142.729	29,99%	831.161.781	0,00%	-	0%	-	41,56%	1.345.748.497	41,56%	43,50%	30,41%	3.697.205.356	30%	31%		
		B	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase cakupan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	Persen	94.770.000	21%	9.689.376	100%	19.015.000	0%	-	0%	-	25%	5.218.000	25,00%	5.218.000	20%	3.093.700	10%	4.347.500	10%	1.710.100	40,00%	9.151.300	0,00%	-	0,00%	-	65,00%	14.369.300	65,00%	75,57%	39,71%	24.058.676	40%	25%		
		B	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	Dokumen	13.580.000	2	1.168.076	3	2.646.700	-	-	-	-	1	500.000	1	500.000	1	620.700	-	476.500	-	434.500	1	1.531.700	-	-	-	-	2	2.031.700	67%	77%	4	3.199.776	50%	24%		
		B	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	4	Dokumen	10.580.000	1	2.006.900	5	2.865.600	-	-	-	-	1	533.000	1	533.000	-	-	1	300.000	1	435.700	2	735.700	-	-	-	-	3	1.268.700	60%	44%	4	3.275.600	100%	31%		
		B	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	Dokumen	10.580.000	1	1.384.200	1	1.555.000	-	-	-	-	1	1.555.000	1	1.555.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.555.000	100%	100%	2	2.939.200	50%	28%		
		B	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	4	Dokumen	9.580.000	1	4.150.600	1	1.240.000	-	-	-	-	1	1.240.000	1	1.240.000	-	-	-	441.000	-	-	-	441.000	-	-	-	-	1	1.681.000	100%	76%	2	3.831.400	50%	40%		
		B	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	4	Dokumen	14.450.000	-	1.050.000	1	2.520.000	-	-	-	-	1	1.390.000	1	1.390.000	-	-	-	500.000	-	-	-	500.000	-	-	-	-	1	1.890.000	100%	75%	1	2.940.000	25%	20%		
		B	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan	32	Kali	24.000.000	6	1.627.400	3	4.324.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163.000	1	2.630.000	1	770.000	2	3.563.000	-	-	-	-	2	3.563.000	67%	82%	8	5.190.400	25%	22%		
		B	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	12	Laporan	12.000.000	3	302.400	6	2.895.400	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2.310.000	-	-	-	69.900	3	2.379.900	-	-	-	-	3	2.379.900	50%	82%	6	2.682.300	50%	22%		
																																					Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)									
																																					Predikat Kinerja Kegiatan									
		B	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Persen	10.531.592.696	24%	2.131.620.105	100%	2.798.465.228	4%	105.245.524	4%	105.182.352	8%	263.662.909	15%	474.090.785	7,64%	315.865.703	3,82%	130.034.137	7,64%	323.614.865	19%	769.514.705	0%	-	0%	-	35%	1.243.605.490	35%	44%	32%	3.375.225.595	32%	32%		
		B	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Keahanggol yang menerima gaji	1400	Orang	10.495.592.696	336	1.517.137.090	336	1.827.766.108	24	105.245.524	24	105.090.352	48	261.357.309	96	471.693.185	24	143.331.906	24	129.719.137	24	260.392.604	72	533.443.647	-	-	-	-	168	1.005.136.832	50%	55%	504	2.522.273.922	36%	24%		
							Jumlah jenis tunjangan ASN	1.200	Orang		288	551.776.215	288	964.024.920	-	-	-	-	-	-	24	172.533.797	-	-	-	24	63.222.261	48	235.756.058	-	-	-	-	48	235.756.058	17%	24%	336	787.532.273	28%	0%		
		B	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun akpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	4	Laporan	12.000.000	1	62.021.600	2	3.182.600	-	-	-	92.000	1	2.305.600	1	2.397.600	-	-	-	315.000	-	-	-	315.000	-	-	-	-	1	2.712.600	50%	85%	2	64.734.200	50%	539%		
		B	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	72	Laporan	24.000.000	18	685.200	2	3.491.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	18	685.200	25%	3%		
																																					Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)									
																																					Predikat Kinerja Kegiatan									
		B	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase cakupan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100%	Persen	38.400.000	7%	4.115.900	100%	10.472.100	0%	-	0%	-	0%	86.100	0%	86.100	18,18%	3.661.000	9,09%	1.268.000	9,09%	620.000	36%	5.549.000	0%	-	0%	-	36%	5.635.100	36%	54%	10%	9.751.000	10%	25%		
		B	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan barang milik daerah SKPD	20	Dokumen	8.000.000	1	915.000	3	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	989.000	-	-	1	989.000	-	-	-	-	1	989.000	33%	40%	2	1.904.000	10%	24%		
		B	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	48	Laporan	7.440.000	4	1.723.800	3	1.860.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	4	1.723.800	8%	23%		
		B	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD	4	Laporan	10.880.000	-	237.100	4	3.200.000	-	-	-	-	1	1.240.000	-	279.000	1	620.000	2	2.139.000	-	-	-	-	2	2.139.000	50%	67%	2	2.376.100	50%	22%		
		B	01	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik)	Jumlah dokumen hasil pemanfatan barang milik daerah SKPD	48	Dokumen	12.000.000	3	1.240.000	1	2.912.100	0	86.100	-	86.100	1	2.421.000	-	-	-	-	1	2.421.000	-	-	-	-	1	2.507.100	100%	86%	4	3.747.100	8%	31%		
																																				Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)									
																																				Predikat Kinerja Kegiatan									
																																				45,83%	40,12%						
																																					Sedang	Kurang						
		B	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Persen	55.000.000	25%	11.222.988	100%	11.149.800	0,00%	-	0,00%	-	14,29%	547.600	14,29%	547.600	21%	3.400.000	14%	620.000	0%	-	35,71%	4.020.000	0,00%	-	0,00%	-	50,00%	4.567.600	50%	41%	36%	15.790.588	36%	29%		
		B	01	01	2.05	03	Penalaran dan pengelolaan administrasi kegerwaian	Jumlah dokumen penalaran dan pengelolaan administrasi kegerwaian	48	Dokumen	35.000.000	12	10.972.388	12	7.429.800	-	-	-	-	2	547.600	2	547.600	2	2.160.000	2	620.000	-	-	4	2.780.000	-	-	-	-	6	3.327.600	50%	45%	18	14.299.988	38%	41%		
		B	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	16	Orang	20.000.000	4	250.600	2	3.720.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.240.000	-	-	-	-	1	1.240.000	-	-	-	-	1	1.240.000	50%	33%	5	1.490.600	31%	7%		
																																				Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)									
																																				Predikat Kinerja Kegiatan									
																																				50,00%	39,06%						
																																					Sedang	Kurang						
		B	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan administrasi umum perangkat daerah	100%	Persen	447.830.000	22%	122.131.926	100%	145.414.100	0%	-	0%	17.132.695	8%	3.531.700	8%	20.664.395	13%	2.873.900	3%	5.020.000	5%	13.869.908	20%	21.763.808	0%	-	0%	-	28%	42.428.203	28%	29%	28%	164.560.129	28%	37%		
		B	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4	Jenis	25.000.000	1	443.000	1	3.366.100	-	-	-	-	-	500.000	-	500.000	1	750.000	-	-	-	-	1	1.250.000	-	-	-	-	1	1.250.000	100%	37%	2	1.693.000	50%	7%		
		B	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapi kantor yang disediakan	20	Jenis	30.000.000	-	-	5	749.500	-	-	-	-	-	-	-	-	2	300.000	-	-	-	-	2	300.000	-	-	-	-	3	300.000	40%	40%	3	300.000	10%	1%		
		B	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan RT yang disediakan	4	Jenis	20.000.000	1	883.400	1	861.700	-	-	1	861.700	1	861.700	-	-	-	-	-	-	-	-	1	861.700	100%	100%	2	1.745.100	50%	9%		
		B	01	01	2.06	04	Penyedia bahan logistik kantor	Jumlah paket barang logistik kantor	4	Unit	8.000.000	1	912.000	1	3.648.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.000	-	-	-	750.000	-	-	-	-	1	750.000	0%	21%	1	1.662.000	25%	21%		
		B	01	01	2.06	05	Penyedia barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8	Jenis	20.000.000	2	1.778.600	2	1.858.800	-	-	-	-	-	-	-	-	1	453.900	-	-	-	-	1	453.900	-	-	-	-	1	453.900	50%	25%	3	2.232.500	38%	11%		
		B	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	48	Eksemplar	24.000.000	12	6.000.000	12	3.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	12	6.000.000	25%	25%		
		B	01	01	2.06	08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	30	Laporan	29.500.000	7	2.000.000	6	3.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	7	2.000.000	23%	7%		
		B	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	48	Laporan	291.330.000	12	110.114.926	12	128.250.000	-	-	-	17.132.695	2	2.170.000	2	19.302.695	1	620.000	1	5.020.000	2	13.869.908	4	19.509.908	-	-	-	-	6	38.812.603	50%	30%	18	148.927.529	38%	51%		Pokok - pokok pikiran Rp. 120.000.000,-
																																				Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)									
																																				Predikat Kinerja Kegiatan									
																																				42,50%	31,58%						
																																					Sedang	Kurang						
		B	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Persen	539.352.876	22%	57.137.964	100%	78.579.719	2%	1.276.800	6%	2.693.970	10%	10.009.066	19%	13.979.836	6,25%	5.627.560	4,17%	1.957.552	8,33%	9.159.796	19%	16.744.908	0%	-	0%	-	38%	30.724.744	38%	39%	32%	97.862.708	32%	16%		
		B	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening WIR/Telepon yang Dibayarkan	48	Rekening	143.352.876	12	4.884.700	12	24.841.719	-	-	2	1.275.138	1	649.350	3	1.924.488	1	678.600	1	678.600	1	681.600	3	2.038.800	-	-	-	-	6	3.963.288	50%	16%	18	8.847.908	38%	6%		
							Jumlah Rekening Listrik yang Dibayarkan	48	Rekening		12	13.011.464	12	8.448.000	1	1.276.800	1	1.418.832	1	1.384.716	3	4.080.348	1	1.448.960	1	1.278.952	1	1.478.196	3	4.206.108	-	-	-	-	6	8.286.456	50%	98%	18	21.297.920	38%	6%		
		B	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	48	Laporan	60.000.000	7	1.095.000	12	3.290.000	-	-	-	-	1	975.000	1	975.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	975.000	8%	30%	8	2.070.000	17%	3%		
		B	01	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	48	Jenis	336.000.000	12	38.146.800	12	42.000.000	-	-	-	-	2	7.000.000	2	7.000.000	1	3.500.000	-	-	-	-	3	10.500.000	-	-	-	-	5	17.500.000	42%	42%	17	55.646.800	35%	17%		
																																				Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)									
																																				Predikat Kinerja Kegiatan									
																																				37,50%	46,34%						
																																					Sedang	Kurang						
		B	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase cakupan pemiharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Persen	269.000.000	25%	15.538.600	100%	30.689.500	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	20%	3.250.000	0%	-	20%	1.168.060	40,00%	4.418.060	0,00%	-	0,00%	-	40,00%	4.418.060	40%	14%	35%	19.956.660	35%	7%		
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Keshanggol	B	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	20	Unit	269.000.000	5	15.538.600	5	30.689.500	-	-	-	-	-	-	1	3.250.000	-	-	-	1.168.060	2	4.418.060	-	-	-	-	2	4.418.060	40%	14%	7	19.956.660	35%	7%		
																																				Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)									
																																				Predikat Kinerja Kegiatan									
																																				40,00%	14,40%						
																																					Sedang	Kurang						
																																				Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)									
																																				Predikat Kinerja Kegiatan									
																																				40,00%	42,48%						
																																				Predikat Kinerja Program									
Faktor pendorong pencapaian kinerja: Sub Kegiatan yang terelasasi dan mencapai target																																												
Faktor penghambat : kurang lancarnya pendanaan atau pencairan dana jadi sebagian kegiatan terhambat																																											
Faktor penghambat: kurang maksimal jadi tidak tidak tercapainya target kinerja dikarenakan masih ada Sub Kegiatan yang belum sepenuhnya berjalan, hal itu disebabkan karena lambatnya proses penyerapan																																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya"):																																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya"):																																											
		B	01	02		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan	100%	Persen	430.000.000	15%	558.694.806	100%	615.621.600	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	15,04%	5.420.000	0,00%	-	15,04%	5.420.000	0,00%	-	0,00%	-	15,04%	5.420.000	15%	1%	0,22313	564.114.806	22%	131%	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		B	01	02	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Cakupan Pemahaman empat pilar kenegaraan (Pancasila, Undang-Undang Dasar1945, BhSBI, Bineka Tunggal Ika)	100%	Persen	430.000.000	15%	558.694.806	100%	615.621.600	0%	-	0%	-	0%	-	0,00%	-	15,04%	5.420.000	0,00%	-	15%	5.420.000	0%	-	0%	-	15%	5.420.000	15%	1%	0,22313	564.114.806	22%	131%		
		B	01	01	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan , bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	364	Orang	145.000.000	48	529.583.006	220	5.428.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	2.030.000	-	-	25	2.030.000	11%	37%	73	531.613.006	20%	367%		
		B	01	01	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	192	Orang	135.000.000	48	28.290.000	48	3.597.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	1.480.000	-	-	15	1.480.000	31%	41%	63	29.770.000	33%	22%		
		B	01	01	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, , bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	300	Laporan	150.000.000	35	821.800	60	6.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	1.910.000	-	-	20	1.910.000	33%	31%	55	2.731.800	18%	2%		
		B	01	01	2.01	08	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Anggota Paskibraka	-	-	-	-	-	71	600.395.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
																																				Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)									
																																				Predikat Kinerja Kegiatan									
																																				25,32%	36,45%						
																																				Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)									
																																				Predikat Kinerja Program									
Faktor pendorong pencapaian kinerja: Sub Kegiatan yang terelasasi dan mencapai target																																												
Faktor penghambat : kurang lancarnya pendanaan atau pencairan dana jadi sebagian kegiatan terhambat																																											
Faktor penghambat: kurang maksimal jadi tidak tidak tercapainya target kinerja dikarenakan masih ada Sub Kegiatan yang belum sepenuhnya berjalan, hal itu disebabkan karena lambatnya proses penyerapan																																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya"):																																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya"):																																											

| | | |

2.1.1 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2024 yang terakomodir di APBD 2024

Informasi tentang Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar Tahun 2024 yang terakomodir di APBD Tahun 2024 memberikan gambaran seberapa banyak jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar pada Tahun 2024. Adapun jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan dimaksud dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel II.2

Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang ada dalam APBD 2024

APBD 2024							
No	**Perangkat Daerah**	**Jumlah Program**	**Jumlah Kegiatan**	**Jumlah Sub Kegiatan**	**Indikator**		
					Jumlah Program	**Jumlah Kegiatan**	**Jumlah Sub Kegiatan**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	12	43	6	12	43

Sumber: Renja Pokok 2024 dan SIPD 2024

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah program sebanyak 6, jumlah kegiatan 12, dan jumlah sub kegiatan 43, Sedangkan untuk jumlah indikator program sebanyak 6, jumlah indikator kegiatan sebanyak 12, dan jumlah indikator sub kegiatan sebanyak 43.

2.1.2 Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja APBD Triwulan II Tahun 2024

Informasi tentang realisasi anggaran kegiatan memberikan gambaran seberapa besar anggaran yang telah terserap pada Triwulan II untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam APBD 2024. Gambaran sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.3

Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Pada APBD
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar Tahun 2024
Hingga Triwulan II

No	Program	Pagu APBD	Realisasi S/D Triwulan II	Persentase	
		(Rp)	(Rp)	Fisik	Keu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota	3.093.985.447	1.345.748.497	41.56	43,50
2	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	615.621.600	5.420.000	15	1
3	Peningkatn Peran Partai Politik melalui Pendidikan dan Pengembanga n Etika serta Budaya Politik	23.673.697.000	15.893.718	2	11
4	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	7.556.400	0	0	0
5	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	13.020.000	0	0	0
6	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	580.000.000	325.914.000	38	49
	Total	**28.074.070.747**	**4.177.539.147**	**15.98%**	**14.88%**

Sumber : Laporan Realisasi Renja Bakesbangpol Tahun 2024 Triwulan II

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa total jumlah anggaran yang terealisasi dalam APBD untuk pelaksanaan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar Semester I Tahun 2024 sebesar Rp. 4.177.539.147,- anggaran tersebut dilaksanakan dalam 6 Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Takalar Realisasi serapan anggaran dari pelaksanaan kegiatan hingga triwulan II adalah sebesar 15.98 % dengan capaian realisasi fisik sebesar 14.88 %. Kondisi ini menunjukkan capaian realisasi fisik Masih Kurang baik karena masih kurang dari target 50 persen yang diharapkan pada triwulan II.

Sebagian besar penyerapan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar hingga triwulan II dalam kategori sedang yaitu >20 - <43 persen dengan jumlah sebanyak 6 (enam) Program atau 100 persen dari jumlah keseluruhan Program, Evaluasi Capaian Pendanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar Tahun 2024

Informasi tentang capaian pendanaan memberikan gambaran capaian berdasarkan realisasi anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar dimulai dari program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terdapat pada Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar. Capaian kinerja pendanaan tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori **Rendah** untuk realisasi 0 – 20%, Kategori **Sedang** Untuk realisasi anggaran lebih besar dari >20 – 43 persen dan kategori **Tinggi** untuk realisasi anggaran diatas 43 persen. Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 43 persen didasarkan atas tingkat capaian yang diharapkan untuk triwulan II adalah 43 persen, sehingga jika terdapat realisasi dengan capaian realisasi pendanaan lebih dari 43 persen dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi.

Evaluasi Hasil capaian pendanaan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar Kabupaten Takalar Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II Sebagai berikut:

1. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Program

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pendanaan pada level program anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar dengan menggunakan kategori tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa jumlah program yang dilaksanakan anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebanyak 2 program dengan rincian capaian yang masuk pada kategori rendah tidak ada atau 0% (realisasinya 0-20 persen). Untuk capaian kinerja kategori sedang sebanyak 3 program atau 40 persen (realisasi >20-43 persen), dan untuk capaian kinerja kategori tinggi sebanyak 1 program atau 60 persen (realisasi diatas 43 persen).

2. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Kegiatan

Untuk evaluasi pelaksanaan Capaian kinerja pendanaan pada level kegiatan pada masing-masing perangkat daerah dapat dijelaskan bahwa terdapat 12 kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2024. Dari keseluruhan kegiatan tersebut terdapat 2 kegiatan atau 13,33 persen yang realisasi pendanaannya hingga triwuan II masih dalam kategori rendah yaitu 0 – 20 persen, sedang yang berada dalam kategori sedang sebanyak 3 kegiatan atau 26,67 persen, dan kategori tinggi dengan capaian realisasi diatas 43 persen sebanyak 1 kegiatan atau 60 persen.

3. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Sub Kegiatan

Adapun evaluasi capaian kinerja pendanaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar pada level sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 42 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2024 terdapat 9 sub kegiatan atau 29,04 persen yang capaian kinerja pendanaanya masih rendah, sedangkan yang masuk dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan sedang terdapat 6 sub kegiatan atau 19,35 persen, dan 16 sub kegiatan dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan tinggi atau 51,61 persen sebab telah dapat mencapai realisasi pendanaan lebih dari 43 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan II.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas capaian kinerja pendanaan berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL II.4
REKAPITULASI CAPAIAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No. Urut	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat capaian pendanaan			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat capaian pendanaan			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan berdasarkan tingkat capaian pendanaan		
		0-20%	>20-43%	>43%		0-20%	>20-43%	>43%		0-20%	>20-43%	>43%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1.	6	2	3	1	12	5	3	4	43	13	13	17

Sumber : Laporan Realisasi Renja Bakesbangpol Tahun 2024 Triwulan II

Keterangan:

0-20 Rendah
>20-43 Sedang
>43 Tinggi

2.1.2.1 Evaluasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar 2024

Informasi tentang capaian kinerja memberikan gambaran capaian kinerja realisasi target kinerja pada masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar. Capaian kinerja tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori **Rendah** dengan realisasi 0 – 20 persen, Kategori **Sedang** untuk realisasi kinerja lebih besar dari 20 – 43 persen dan kategori **Tinggi** dengan realisasi kinerja diatas 43 persen. Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 43 persen didasarkan atas tingkat capaian yang diharapkan untuk triwulan II adalah 43 persen, sehingga jika terdapat capaian realisasi kinerja lebih dari 45 persen dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi.

Kegiatan evaluasi Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar serta pencapaian realisasi kinerja sampai dengan triwulan II ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

1. Evaluasi Capaian Kinerja Outcome pada Level Program

Untuk evaluasi pelaksanaan kinerja outcome pada level program dapat digambarkan sebagai berikut: untuk pencapaian target kinerja program pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar dapat dijelaskan bahwa dari 2 Program yang dilaksanakan sampai dengan triwulan II terdapat capaian kinerja atau 0% program yang masuk pada kategori rendah atau dibawah 20 persen, begitupun pencapaian kinerja dengan kategori sedang (diatas 20-43 persen) 3 program atau 30 % program yang msuk kategori sedang, 1 program atau 43 % yang capaian kinerja masuk dalam kategori tinggi yang pencapaiannya lebih dari 43 persen pada triwulan II Tahun 2024.

2. Evaluasi Capaian Kinerja *Outcome* pada Level Kegiatan

Sebagai gambaran pencapaian target kinerja kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 12 kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan kedua terdapat 5 kegiatan (0 persen) yang capaian kinerjanya kategori masih rendah atau dibawah 20 persen, sedangkan yang capaian kinerja kategori sedang terdapat 3 kegiatan (20 persen), selebihnya terdapat 5 kegiatan (80 persen)

yang capaian kinerja masuk dalam kategori pencapaian lebih dari 43 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan II Tahun 2024.

3. Evaluasi Capaian Kinerja *Outcome* pada Level Sub Kegiatan

Sebagai gambaran pencapaian target kinerja sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 43 sub kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan II dapat dijelaskan bahwa yang capaian kinerja masih rendah atau dibawah 20 persen terdapat 13 sub kegiatan (16,13 persen), sedangkan yang capaian kinerja sedang sebanyak 13 kegiatan (9,68 persen), selebihnya yang capaian kinerja masuk dalam kategori tinggi sebanyak 17 sub kegiatan (74,19 persen), yaitu pencapaian lebih dari 43 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan II Tahun 2024.

Evaluasi Hasil capaian kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar Kabupaten Takalar Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL II.5
REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No. Urut	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat capaian kinerja outcome			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat capaian kinerja outcome			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan berdasarkan tingkat capaian kinerja outcome		
		0-20%	>20-43%	>43%		0-20%	>20-43%	>43%		0-20%	>20-43%	>43%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1.	6	2	3	1	12	5	3	4	43	13	13	17

Sumber : Laporan Realisasi Renja Bakesbangpol Tahun 2024 Triwulan II

Keterangan:

0-20	Rendah
>20-43	Sedang
>43	Tinggi

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar

Analisis kinerja pelayanan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja OPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai target indikator sasaran dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan. Untuk menganalisis kinerja pelayanan atau tingkat capaian kinerja sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar tahun 2024 sampai dengan Triwulan II dan pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksud untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan sasaran. Pencapaian setiap indikator kinerja dilakukan dengan metedologi perbandingan capaian kinerja dengan target kinerja tahun 2024 sampai dengan triwulan II sebagai tolak ukur dari keberhasilan suatu kegiatan.

Dalam Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip, yakni 1) Sederhana, 2) Partisipatif, 3). Akuntabel, 4) Berkelanjutan, 5) Transparansi dan 6) Keadilan.

Agar sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar dapat tercapai , maka diperlukan poin-poin yang menjadi indikator kinerja sebagai tolak ukur penilaian dalam menentukan keberhasilan dari suatu kegiatan. Ada beberapa indikator kinerja yang dapat diukur untuk melihat capaian pelayanan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar, seperti Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci, dan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB/SDGs).

2.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar oleh Kepala Badan. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran Organisasi. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program. Penetapan Target indikator kinerja utama selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini.

Indikator kinerja dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait target capaian keberhasilan dalam mewujudkan arah kebijakan RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar yang digariskan pada tahun yang penetapannya dijadikan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Penetapan IKU daerah merupakan ukuran tingkat keberhasilan pencapaian indikator sasaran RENSTRA yang digariskan pada Tahun 2024. Penetapan IKU juga merupakan upaya pencapaian prioritas pembangunan Kabupaten Takalar. Lebih lanjut Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini :

Tabel II.6
Capaian Indikator Kinerja Utama 2023, Asumsi Capaian Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2024, dan Penetapan Target Indikator Kinerja Utama
Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Takalar Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023		Asumsi Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2024
			Target	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Cakupan Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Persen	100	98	92	93
2	Persentase Tingkat Keaktifan FKUB	Persen	100	92	98	98
3	Persentase Kewaspadaan Dini Masyarakat	Persen	80	40	97	98
4	Persentase Bela Negara	Persen	80	93	50	55
5	Cakupan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persen	100	100	100	100

6	Tingkat Partisispasi Masyarakat Pada Seluruh Jenjang Pemilihan (Pilpres, Legislatif, Pilgub dan Pilkada	Persen	100	0	0	100
9	Nilai SAKIP Bakesbangpol	Nilai	C	B	B	BB

Sumber: Data Agregat Kependudukan

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Indikator Kinerja Kunci disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintah kabupaten. Penetapan target indikator kinerja kunci selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel II.7

Asumsi Capaian Tahun 2024 dan Target Tahun 2025 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar

No.	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Realisasi Capaian Tahun 2023	Asumsi Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025
1	Cakupan Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Persen	98	92	93
2	Persentase Tingkat Keaktifan FKUB	Persen	92	98	98
3	Persentase Kewaspadaan Dini Masyarakat	Persen	40	97	98
4	Persentase Bela Negara	Persen	93	50	55
5	Cakupan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persen	100	100	100
6	Tingkat Partisispasi Masyarakat Pada Seluruh Jenjang Pemilihan (Pilpres, Legislatif, Pilgub dan Pilkada	Persen	0	0	100
7	Nilai SAKIP Bakesbangpol	Nilai	C	B	B

Sumber: Data Agregat Bakesbangpol

2.2.3 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan /Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistainable Development Goals (TPB/SDGs) kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global. TPB/SDGs bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan. Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penetapan target tahun 2024 indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistainable Development Goals (TPB/SDGs) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

2.3 Hambatan, Upaya Pencapaian dan Rekomendasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar Tahun 2024

2.3.1 Hambatan Dalam Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar sampai dengan Triwulan II

Hambatan dan kendala dalam pelaksanakan kegiatan triwulan kedua dipengaruhi oleh:

1. Adanya peraturan pemerintah pusat yang menyebabkan harus dilakukan penyesuaian anggaran.
2. Terdapatnya beberapa kegiatan yang proses pengadaan barang dan jasanya belum dilaksanakan, baik dikarenakan masih dalam tahapan proses lelang ataupun belum masuk pada tahapan kegiatannya.
3. Terdapatnya beberapa belanja barang yang harga dan spesifikasinya tidak lagi sesuai dengan harga saat ini.
4. Perlunya Dukungan keterampilan tambahan bagi sumberdaya aparatur pengelola kegiatan untuk melakukan pengukuran atau estimasi perencanaan program terhadap alokasi anggaran yang dialokasikan baik yang dipengaruhi oleh fluktuasi aktifitas kedewanan maupun kalkulasi evaluasi pada program dan kegiatan.

2.3.2 Upaya Dalam Pencapaian Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar sampai dengan Triwulan II

Merujuk dari faktor penghambat Pelaksanaan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar sampai dengan triwulan ke II tentunya mengalami berbagai kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Berikut dapat disampaikan beberapa upaya yang dilakukan dalam pencapaian keberhasilan kinerja :

1. Adanya komitmen pimpinan dan Koordinasi yang baik untuk melaksanakan kegiatan secara maksimal;
2. Adanya koordinasi/konsultasi yang sinergi antar struktur jabatan internal dan eksternal serta adanya komunikasi yang terjalin antar pemimpin dan yang dipimpin dalam organisasi;
3. Tersedianya Sarana dan prasarana pendukung yang memadai;
4. Penyerapan program dan kegiatan masing-masing bidang dan kesekretariatan berjalan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan;
5. Adanya pedoman/dokumen Standar Pelayanan/SOP dan regulasi yang sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan;

6. Kualitas SDM yang mampu, terampil dan memadai serta memiliki komitmen dan motivasi untuk melakukan tugas dan fungsi secara maksimal dalam rangka memberikan pelayanan prima.

2.3.3. Rekomendasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar tahun 2024 sampai dengan Triwulan Selanjutnya

Berdasarkan uraian di atas terkait faktor penghambat pencapaian kinerja, serta upaya dalam pencapaian pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar menyampaikan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Meningkatkan komunikasi dan integrasi program dalam lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar serta pengendalian dan evaluasi internal yang dilakukan secara terus menerus;
2. Perlunya Peran aktif seluruh KPA dan PPTK didalam mengawal pelaksanaan Program dan Kegiatan yang berjalan;
3. Peran aktif Kepala Dinas selaku PA didalam mengawasi, mengontrol dan membuat kebijakan serta keputusan;
4. Peran aktif Sub Bagian Perencanaan Program didalam berkoordinasi termasuk memberikan informasi, sosialisasi maupun kebijakan-kebijakan lainnya;
5. Perlunya tenaga SDM yang berkompeten didalam perencanaan;
6. Peningkatan kualitas SDM aparatur serta jumlah staf yang berkompeten;
7. Peningkatan sarana dan prasarana operasional sesuai dengan kebutuhan;
8. Menyediakan informasi kependudukan dalam rangka perencanaan pembangunan dan kepentingan publik;
9. Perlunya melakukan penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar yang baik, diawali dengan orientasi dan melibatkan seluruh pejabat/staf;
10. Perlunya melakukan evaluasi dan monitoring secara terus menerus dan berkelanjutan yang diiringi dengan pengelolaan data yang baik;
11. Adanya Kesesuaian Renstra dan RPJMD dalam pelaksanaan kegiatan;
12. Dalam penyusunan dokumen perencanaan tahap berikutnya memiliki data dan informasi yang akurat, sehingga perencanaan dan penganggaran dapat dilakukan dengan baik, efektif, dan efisien.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar pada perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 mengacu pada RPD yang di dalamnya memuat Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 .

Adapun Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai tahun 2024 sebagai penjabaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar 2023-2026 dan disesuaikan dengan tupoksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar dan menyesuaikan dengan kebijakan pembangunan nasional 2023-2026, dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel III.1

Tujuan, Sasaran Serta Target Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar

Tahun 2024

NO	Tujuan/ Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Asumsi Capaian Tahun 2024
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
1.	Tujuan 1. Meningkatkan Kesatuan Bangsa dan Kwalitas Demokrasi		Indeks Demokrasi	Persen	69,30 %	68,70 %
		Sasaran 1.1 Meningkatnya Kesadaran Kebangsaan	Cakupan Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Persen	100 %	100 %
			Presnase Tingat Keaktifan FKUB	Persen	100 %	100 %
			Presentase Kewaspadaan Dini Masyarakat	Persen	80 %	80 %
			Presentase Bela Negara	Persen	80 %	80 %
			Cakupan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya	Persen	100 %	100 %

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Asumsi Capaian Tahun 2024

1	2		3	4	5	6
		Sasaran 1.2 Meningkatnya Kesadaran Politik	Tingkat Pastisipasi Masyarakat pada seluruh jenjang pemilihan	Persen	-	85,34 %
			Pemilihan Presiden	Persen	-	85,25 %
			Pemilihan Gubernur	Persen	-	85 %
			Pemilihan Bupati	Persen	-	85,85 %
			Pemilihan Legislatif	Persen	-	85,25 %
2.	Tujuan 2 Meningkatkan Tata Kelola Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.		Indeks Reformasi Birokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	N/A	N/A
		Sasaran 2.1 Meningkatnya Tata kelola Kinerjapada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai SAKIP	Nilai/Predikat	C	B

3.2 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar Tahun 2024

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar disusun guna menjadi acuan dalam pelaksanaan sejumlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setelah adanya perubahan dalam rencana kerja, yang diharapkan target capaian kinerja masing-masing bidang tercapai sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Tahun 2023-2026 disusun suatu Rencana Kinerja Tahunan (*Yearly Performance Plan*). Rencana Kerja merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indicator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategik maupun tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar Tahun 2024 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Perubahan Rencana Kinerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan yang baru untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar adalah dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar.

Di dalam Perubahan Renja Tahun 2024 ini terdapat rumusan rencana program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar, dimana di dalammya terdapat 6 Program, 12 Kegiatan serta 43 Sub Kegiatan, dimana untuk penyebaran kegiatannya adalah untuk kegiatan rutin berlokasi di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar, sedangkan yang sifatnya mempunyai sasaran kelompok masyarakat berlokasi pada Kecamatan ataupun Desa/Kelurahan, dan kegiatan yang sifatnya koordinasi selain berlokasi pada Daerah setempat yakni pada Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar serta ada juga yang berlokasi di luar daerah. Jumlah dana yang program , kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar yang dimaksud bersumber dari Dana Alakosi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp. 28.074.070.747,-.

Rumusan perubahan rencana program dan kegiatan tahun 2024 beserta pendanaan yang diharapkan dapat terlaksananya tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL III.2
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TAKALARTAHUN 2024

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target			Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
											Renja 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	Renja 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik							28.074.070.747,00	28.449.070.747,00	375.000.000,00			375.000.000,00				28.074.070.747,00	
	8						UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							28.074.070.747,00	28.449.070.747,00	375.000.000,00			375.000.000,00				28.074.070.747,00	
	8	01					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							28.074.070.747,00	28.449.070.747,00	375.000.000,00		0	375.000.000,00				28.074.070.747,00	
1	8	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-			3.002.813.447,00	3.108.985.447,00	106.172.000,00			106.172.000,00			-	3.093.985.447,00	
	8	01	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		-			19.015.000,00	19.015.000,00	0			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	19.015.000,00	
	8	01	01	2.01	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	2	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2.646.700,00	2.646.700,00	0	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	2 Dokumen	2.646.700,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.01	0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
								Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	1	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2.865.600,00	2.865.600,00	0	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	2 Dokumen	2.865.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.01	0003		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
								Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1.555.000,00	1.555.000,00	0	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	2 Dokumen	1.555.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.01	0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
								Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.208.300,00	2.208.300,00	0	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	1 Dokumen	2.208.300,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.01	0005		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
								Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.520.000,00	2.520.000,00	0	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	1 Dokumen	2.520.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.01	0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	6	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4.324.000,00	4.324.000,00	0	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	1 Laporan	4.324.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.01	0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	3	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.895.400,00	2.895.400,00	0	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	1 Laporan	2.895.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-			2.798.465.228,00	2.798.465.228,00	0			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	2.798.465.228,00	
	8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	336	336	30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	2.791.791.028,00	2.791.791.028,00	0	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	30 Orang/bulan	2.791.791.028,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	1	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.182.600,00	3.182.600,00	0	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	1 Laporan	3.182.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	18	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.491.600,00	3.491.600,00	0	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	1 Laporan	3.491.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-		-	-		10.472.100,00	10.472.100,00	0			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	10.472.100,00	
	8	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																			
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3	1	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	0	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	1 Dokumen	2.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	4	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.860.000,00	1.860.000,00	0	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	1 Laporan	1.860.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.200.000,00	3.200.000,00	0	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	1 Laporan	3.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.03	0006	Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
							Jumlah Laporan Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	3	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.912.100,00	2.912.100,00	0									

	8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-	-		11.149.800,00	11.149.800,00	0			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	11.149.800,00	
	8	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			1 Paket	1 Paket	1 Paket	-	-	0	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	1 Paket	-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	12	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	7.429.800,00	7.429.800,00	0	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	1 Dokumen	7.429.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2	4	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.720.000,00	3.720.000,00	0	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	1 Dokumen	3.720.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			30 Orang	30 Orang	30 Orang	-	-	0	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	30 Orang	-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-		54.442.100,00	160.614.100,00	106.172.000,00				01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	145.614.100,00	
	8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	1 Paket	1 Paket	1 Paket	3.366.100,00	3.366.100,00	0	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	1 Paket	3.366.100,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5		2 Paket	2 Paket	2 Paket	749.500,00	15.749.500,00	15.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	15.000.000,00	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	2 Paket	749.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	1 Paket	1 Paket	1 Paket	861.700,00	861.700,00	0	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	1 Paket	861.700,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	1 Paket	1 Paket	1 Paket	3.648.000,00	3.648.000,00	0	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	1 Paket	3.648.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1.838.800,00	1.838.800,00	0	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	1 Paket	1.838.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.300.000,00	3.300.000,00	0	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	1 Dokumen	3.300.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6	7	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	3.600.000,00	3.600.000,00	0	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	2 Laporan	3.600.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	37.078.000,00	128.250.000,00	91.172.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	91.172.000	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	2 Laporan	128.250.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	-		-	-	0			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	78.579.719,00	
	8	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			7 Unit	7 Unit	7 Unit	-	-	0	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	7 Unit	-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			10 Unit	10 Unit	10 Unit	-	-	0	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	10 Unit	-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			10 Unit	10 Unit	10 Unit	-	-	0	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	10 Unit	-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-		78.579.719,00	78.579.719,00	0			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	78.579.719,00	
	8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	33.289.719,00	33.289.719,00	0	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	33.289.719,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	7	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	3.290.000,00	3.290.000,00	0	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	2 Laporan	3.290.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	42.000.000,00	42.000.000,00	0	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	12 Laporan	42.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

5	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	-	-		-	-		13.020.000,00	13.020.000,00	0						-	13.020.000,00	
	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	-		-	-		13.020.000,00	13.020.000,00	0			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	13.020.000,00	
	8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	30	17	12 Orang	12 Orang	12 Orang	4.960.000,00	4.960.000,00	0	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	12 Orang	4.960.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	40	7	12 Orang	12 Orang	12 Orang	3.720.000,00	3.720.000,00	0	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	12 Orang	3.720.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	05	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	48	38	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	4.340.000,00	4.340.000,00	0	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	2 Laporan	4.340.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-	-		-	-		670.190.300,00	1.030.190.300,00	360.000.000,00			360.000.000,00			-	670.190.300,00	
	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	-		-	-		670.190.300,00	1.030.190.300,00	360.000.000,00			360.000.000,00	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor	-	-	670.190.300,00	
	8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
							Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	50	15	15 Orang	15 Orang	15 Orang	156.734.900,00	156.734.900,00	0	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor	-	15 Orang	156.734.900,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	40	35	12 Orang	12 Orang	12 Orang	5.936.200,00	365.936.200,00	360.000.000,00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	360.000.000,00	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor	-	12 Orang	5.936.200,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	42	15	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	5.723.600,00	5.723.600,00	0	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor	-	2 Laporan	5.723.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12	12	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	501.795.600,00	501.795.600,00	0	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 7. Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor	-	4 Dokumen	501.795.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
											J U M L A H	28.074.070.747,00	28.449.070.747,00	375.000.000,00						J U M L A H	28.074.070.747,00	

TABEL III.3

RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) TAHUN 2024

KABUPATEN : TAKALAR

PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target			Pagu			Keterangan
						Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik							28.074.070.747,00	28.449.070.747,00	375.000.000,00	
	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							28.074.070.747,00	28.449.070.747,00	375.000.000,00	
	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							28.074.070.747,00	28.449.070.747,00	375.000.000,00	
1	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	-	-	3.002.813.447,00	3.108.985.447,00	106.172.000,00	
	8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	19.015.000,00	19.015.000,00	-	
	8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	2 Dokumen		2.646.700,00	2.646.700,00	-	
	8	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
								Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokumen	2 Dokumen		2.865.600,00	2.865.600,00	-	
	8	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
								Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		2 Dokumen	2 Dokumen		1.555.000,00	1.555.000,00	-	
	8	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										
								Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	2 Dokumen		2.208.300,00	2.208.300,00	-	
	8	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD										
								Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen		2.520.000,00	2.520.000,00	-	
	8	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan	1 Laporan		4.324.000,00	4.324.000,00	-	
	8	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan	1 Laporan		2.895.400,00	2.895.400,00	-	

	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	2.798.465.228,00	2.798.465.228,00	-	
	8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		30 Orang/bulan	30 Orang/bulan		2.791.791.028,00	2.791.791.028,00	-	
	8	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
								Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	1 Laporan		3.182.600,00	3.182.600,00	-	
	8	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
								Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		1 Laporan	1 Laporan		3.491.600,00	3.491.600,00	-	
	8	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	10.472.100,00	10.472.100,00	-	
	8	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD										
								Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen		2.500.000,00	2.500.000,00	-	
	8	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD										
								Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	1 Laporan		1.860.000,00	1.860.000,00	-	
	8	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
								Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	1 Laporan		3.200.000,00	3.200.000,00	-	
	8	01	01	2.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD										
								Jumlah Laporan Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	1 Laporan		2.912.100,00	2.912.100,00	-	

	8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	11.149.800,00	11.149.800,00	-	
	8	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
								Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	1 Paket		-	-	-	
	8	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian										
								Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		1 Dokumen	1 Dokumen		7.429.800,00	7.429.800,00	-	
	8	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai										
								Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 Dokumen	1 Dokumen		3.720.000,00	3.720.000,00	-	
	8	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan										
								Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		30 Orang	30 Orang		-	-	-	
	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	54.442.100,00	160.614.100,00	106.172.000,00	
	8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	1 Paket		3.366.100,00	3.366.100,00	-	
	8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2 Paket	2 Paket		749.500,00	15.749.500,00	15.000.000,00	
	8	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket	1 Paket		861.700,00	861.700,00	-	
	8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	1 Paket		3.648.000,00	3.648.000,00	-	
	8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	1 Paket		1.838.800,00	1.838.800,00	-	
	8	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 Dokumen	1 Dokumen		3.300.000,00	3.300.000,00	-	
	8	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										
								Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		2 Laporan	2 Laporan		3.600.000,00	3.600.000,00	-	
	8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		2 Laporan	2 Laporan		37.078.000,00	128.250.000,00	91.172.000,00	

	8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	8	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
								Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		7 Unit	7 Unit		-	-	-	
	8	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel										
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		10 Unit	10 Unit		-	-	-	
	8	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		10 Unit	10 Unit		-	-	-	
	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-	78.579.719,00	78.579.719,00	-	
	8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan		33.289.719,00	33.289.719,00	-	
	8	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2 Laporan	2 Laporan		3.290.000,00	3.290.000,00	-	
	8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan		42.000.000,00	42.000.000,00	-	
	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-	30.689.500,00	30.689.500,00	-	
	8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		3 Unit	3 Unit		30.689.500,00	30.689.500,00	-	
	8	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	1 Unit		-	-	-	

2	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	-	-	-	-	-	-	615.621.600,00	615.621.600,00	-	
	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-	-	-	-	-	615.621.600,00	615.621.600,00	-	
	8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan										
								Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		15 Orang	15 Orang		5.428.600,00	5.428.600,00	-	
	8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan										
								Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		15 Orang	15 Orang		3.597.400,00	3.597.400,00	-	
	8	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan										
								Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		2 Laporan	2 Laporan		6.200.000,00	6.200.000,00	-	
	8	01	02	2.01	0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka										
								Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka		2 Dokumen	2 Dokumen		-	-	-	
	8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka										
								Jumlah Paskibraka		85 Orang	85 Orang		600.395.600,00	600.395.600,00	-	

3	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	-	-	-	-	-	-	23.764.869.000,00	23.673.697.000,00	(91.172.000,00)	
	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-	-	-	-	-	-	23.764.869.000,00	23.673.697.000,00	(91.172.000,00)	
	8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah										
								Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		12 Orang	12 Orang		23.658.439.000,00	23.658.439.000,00	-	
	8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah										
								Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		2 Laporan	2 Laporan		106.430.000,00	15.258.000,00	(91.172.000,00)	

4	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	-	-	-	-	-	-	7.556.400,00	7.556.400,00	-	
	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	-	-	-	-	-	7.556.400,00	7.556.400,00	-	
	8	01	04	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah										
								Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		12 Orang	12 Orang		3.720.000,00	3.720.000,00	-	
	8	01	04	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah										
								Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		2 Laporan	2 Laporan		3.836.400,00	3.836.400,00	-	

5	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	-	-	-	-	-	-	13.020.000,00	13.020.000,00	-	
	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	-	-	-	-	-	13.020.000,00	13.020.000,00	-	
	8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah										
								Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		12 Orang	12 Orang		4.960.000,00	4.960.000,00	-	
	8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah										
								Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		12 Orang	12 Orang		3.720.000,00	3.720.000,00	-	
	8	01	05	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah										
								Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		2 Laporan	2 Laporan		4.340.000,00	4.340.000,00	-	

6	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-	-	-	-	-	-	670.190.300,00	1.030.190.300,00	360.000.000,00	
	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	-	-	-	-	-	670.190.300,00	1.030.190.300,00	360.000.000,00	
	8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah										
								Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		15 Orang	15 Orang		156.734.900,00	156.734.900,00	-	
	8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah										
								Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		12 Orang	12 Orang		5.936.200,00	365.936.200,00	360.000.000,00	
	8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah										
								Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		2 Laporan	2 Laporan		5.723.600,00	5.723.600,00	-	

	8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota										
								Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		4 Dokumen	4 Dokumen		501.795.600,00	501.795.600,00	-	
													28.074.070.747,00	28.449.070.747,00	375.000.000,00	
	J U M L A H															

Takalar, ... 2024

Mengetahui,

Kepala Perangkat Daerah
Kepala Bappelitbangda Kabupaten Takalar

(Drs. Achmad Rivai, M.Si)
NIP. 196810121989081001

Kepala Perangkat Daerah

(ZUBAIR. S.Sos. MM).
NIP. 19730621 199203 1 005

BAB IV
P E N U T U P

Dokumen Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar Tahun 2024 ini menjadi instrumen utama bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar dalam meningkatkan kinerja pembangunan melalui pembenahan administrasi kependudukan, peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan kepada Masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar tahun 2024 akan ditentukan oleh koordinasi dan sinergitas antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar dengan Bappelitbangda dan Badan Pengelola Keuangan Daerah, serta adanya pengendalian dan evaluasi yang cermat dan akurat. Oleh sebab itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar harus melakukan langkah-langkah penyempurnaan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sehingga bermanfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kemajuan daerah, terkhusus bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar

Dokumen ini sekaligus menjadi acuan dalam mensinergikan program dan kegiatan antara program prioritas Pemeritah Daerah dengan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar

Berdasarkan dengan cakupan kewenangan, maka Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar Tahun 2024 mempunyai fungsi pokok;

1. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan seluruh program/kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar.
2. Menciptakan kepastian arah kebijakan dan program kegitan prioritas yang merupakan komitmen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar dengan pemangku kepentingan; dan
3. Menjadi acuan dalam menyusun Perubahan RKA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar dengan pemangku kepentingan

Dalam pelaksanaan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar Kabupaten Takalar telah berpedoman pada kaidah - kaidah yang sudah ada yaitu RPJP dan RPJM Nasional serta RPJP dan RPJM

Propinsi, visi dan misi kepala daerah Kabupaten Takalar, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar.

Dokumen Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar Tahun 2024 ini diharapkan akan menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil sehingga seluruh program dan kegiatan akan dapat dicapai secara terukur, terarah, efektif dan efisien sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai**.**

Takalar, Juli 2024

Kepala Badan,

ZUBAIR. S.Sos. MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19730621 199203 1 005

RENCANA KERJA
(RENJA) PERUBAHAN 2024

NAMA INSTANSI RSUD H. PADJONGA DAENG NGALLE
KABUPATEN TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
RSUD H. PADJONGA DAENG NGALLE
KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT dengan telah tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Perubahan Program dan Kegiatan RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Tahun 2024 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan pembangunan kesehatan di RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Tahun 2024. Renja Perubahan ini disusun sebagai arah dan acuan awal sekaligus kesepakatan bagi seluruh komponen RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan pembangunan kesehatan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disepakati bersama berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2023-2026. Renja Perubahan ini memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Kami telah berusaha sebaik-baiknya untuk menyusun Renja Perubahan ini sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dengan didasarkan pada data dan informasi yang ada, dengan tujuan agar dapat menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2024. Renja Perubahan ini juga telah disesuaikan dengan Rancangan awal RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2024. Namun kami juga menyadari bahwa Renja Perubahan ini masih belum sempurna, oleh karena itu kritik ataupun saran yang bersifat membangun kami butuhkan untuk bahan perbaikan dimasa mendatang.

Besar harapan kami atas terealisasinya usulan awal program dan kegiatan sekaligus anggaran yang tertuang dalam renja perubahan ini, karena tanpanya akan menyebabkan pelayanan kesehatan di RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle kurang efektif dan efesien, tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh berbagai pihak dan seluruh lapisan masyarakat. Ucapan terima kasih tidak lupa disampaikan kepad semua pihak yang terkait dan ikut mendukung dalam penyusunan renja perubahan ini. Semoga Allah SWT menggantikannya dengan pahala yang berlipat.

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul i

Kata pengantar ii

Daftar Isi iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 6
1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II 9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 17
2.3 Solusi dan Penyelesaian Permasalahan dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024 23

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran 25
3.2 Review Terhadap rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 25
3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024 39

BAB IV PENUTUP 48

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hal tersebut sejalan dengan amanat Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Berbagai jenis tenaga kesehatan dengan perangkat keilmuannya masing-masing berinteraksi satu sama lain.

Pada hakikatnya rumah sakit merupakan fasilitas kesehatan rujukan bagi masyarakat yang ingin memperoleh pelayanan, baik untuk pengobatan maupun untuk pemulihan kesehatannya. Sebagai pusat rujukan kesehatan, Rumah Sakit dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang komprehensif bagi setiap pasiennya.

Dalam pelaksanaan kegiatannya, rumah sakit memerlukan biaya operasional dan investasi yang besar, untuk itu diperlukan suatu perencanaan yang berkesinambungan.

Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan setiap SKPD untuk menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD).

Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka disusun Rencana Kerja (Renja) RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar Tahun 2024 dengan mengacu pada Renstra RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Tahun 2023-2026 dengan memperhatikan program-program yang belum tertangani secara maksimal sampai saat ini.

Renja RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten takalar Tahun 2024 mempunyai hubungan dengan beberapa dokumen

perencanaan lainnya. Hubungan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Takalar Tahun 2024 sebagai dokumen perencanaan tahunan Kabupaten Takalar menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja RSUD RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar Tahun 2024. Sebaliknya Renja RSUD RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle juga menjadi bahan penyusunan RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2024.
2. Rencana Strategis RSUD RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar Tahun 2023 - 2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renja RSUD RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar.

I.2. Landasan Hukum

Penyesuaian struktur organisasi RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle dari kelas D menjadi kelas C ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Takalar.

Dalam menyusun Renja perubahan Tahun 2024, RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle berpedoman pada ketentuan perudang-perundangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan DaerahTentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah DanRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

TataCara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan RencanaKerja Pemerintah Daerah

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah Pada RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Takalar Tahun 2017-2022;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017-2024
19. Peraturan Bupati Takalar No. 33 Tahun 2020 tentang Kalender Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Serta Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah Tahun 2020
20. Peraturan Bupati Takalar No.16 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Takalar Tahun 2022.

1.3 Maksud danTujuan

Rencana Kerja Perubahan RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar Tahun 2024 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan tahunan RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle yang merupakan penjabaran Renstra RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Tahun 2023-2026, disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi rumah sakit . Adapun Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Tahun 2024 adalah:

a. Maksud :
    1. Sebagai penjabaran program/kegiatan renstra perangkat daerah kedalam perencanaan tahunan perangkat daerah.
    2. Menyiapkan acuan bagi rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah

3. Menyiapkan kerangka evaluasi kinerja program/kegiatan tahunan bagi organisasi perangkat daerah.

b. Tujuan : agar terbangun konfirmasi perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan Organisasi Perangkat Daerah.

I.4. Sistematika Penulisan

Substansi materi Renja Perubahan RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar Tahun 2024, dapat diuraikan sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

Bab II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2024

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2024 triwulan II, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas, serta review terhadap rancangan awal renja.

Bab III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai tujuan dan sasaran, faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan serta uraian garis besar mengenai

rekapitulasi program kegiatan RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar Tahun 2024.

Bab IV : PENUTUP

Uraian penutup berupa hal-hal yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2024

II. 1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dan pencapaian Renstra RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle adalah sebagaimana tabel berikut:

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup kabupaten/Kota Renja Perangkat Daerah RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah kabupaten/Kota yang mengacu sasaran RKPD :

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun **2023-2026** (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu **(2023)**		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun **2024**)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun **2024**) yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun **2024** (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun **2024**)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun (5)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
					K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6			7		25		26 = 25/8 x 100%		27 = 7 + 25		28 = 27/6 x 100%		29	30
			RSUD H. PADJONGA DG. NGALLE																
			URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				**370.478.299.952**		**90.829.220.299**		**48.372.218.518**	25,69 %	42,37 %		**139.201.438.817**				
		1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase terpenuhinya pelayanan Administrasi Rumah Sakit**	**100 %**	**Persen**	**133.998.299.952**	**74,87%**	**27.080.523.544**	**36,88 %**	**16.405.910.781**	**36,88 %**	**50,67 %**	**86,12 %**	**43.486.434.325**	**86,12 %**	**32,45 %**	**RSUD Padjonga Dg. Ngalle**	

		1	02	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan**	100 %	Persen	126.494.199.712	24,61%	25.822.301.274	60,64 %	15.583.182.613	60,64 %	50%	39,62 %	41.405.483.887	39,62%	32,73 %		
	Meningkatnya kualitas laporan Keuangan dan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yag menerima Gaji (334 Orang)	18760	Orang	119.524.798.432	4.678	24.106.631.582	2.981	14.897.825.435	64%	51%	7.659	39.004.457.017	41%	33%		
								Jumlah ASN yag menerima Tunjangan TPP	3600	Orang	6.969.401.280	825	1.715.669.692	375	685.357.178	42%	33%	1.200	2.401.026.870	33%	34%		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																**53,00 %**	**41,93 %**						
Predikat Kinerja Kegiatan																**R**	**SR**						
		1	02	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah**	100 %	Persen	200.000.000	100,00 %	32.850.000	0%	-	0,00%	0,00%	100%	32.850.000	100,00 %	16,43 %		
		1	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeuler Rumah Sakit	1	Paket	200.000.000	1	32.850.000	-	-	0%	0%	1	32.850.000	100%	16%		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																**0,00%**	**0,00%**						
Predikat Kinerja Kegiatan																**SR**	**SR**						
		1	02	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Jasa Penunjang**	**100 %**	Persen	7.304.100.240	**100,00 %**	1.225.372.270	50%	822.728.168	50%	67%	119%	2.048.100.438	118,75 %	28,04 %		
		1	02	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Jumlah rekening telpon, air dan Listrik	96	Rekening	7.304.100.240	96	1.225.372.270	18	822.728.168	50%	67%	114	2.048.100.438	119%	28%		

		1	02	02			**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan uapaya kesehatan masyarakat**	**Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**100 %**	Persen	**236.480.000.000**	**100,00 %**	**63.748.696.755**	**14,50 %**	**31.966.307.737**	**14,50 %**	**39,08 %**	**114,50 %**	**95.715.004.492**	**114,50 %**	**40,47%**	**RSUD Padjonga Dg. Ngalle**	

	Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana rumah sakit	1	02	02	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota**	**Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan**	100%	Persen	80.000.000	100,00%	161.513.200	0,00%	-	0%	0%	100,00%	161.513.200	100,00%	201,89%		
		1	02	02	2.01	14	Pengadaan alat-alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Alat-alat kesehatan/alat penunjang medik	1	Paket	80.000.000	1	161.513.200	-	-	0%	0%	1	161.513.200	100%	202%		
																0,00%	**0,00%**						
																SR	**SR**						
		1	02	02	2.02		**Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Persediaan Layanan Kesehatan di Rumah Sakit**	100%	Persen	236.400.000.000	100,00%	63.587.183.555	29,00%	31.966.307.737	29%	41%	129%	95.553.491.292	129,00%	40,42%		
		1	02	02	2.02	26	Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	Pelayanan Kesehatan berkualitas bagi pasien BPJS	100	Persen	220.400.000.000	100	60.624.234.661	41	31.331.286.944	41%	42%	141	91.955.521.605	141%	42%		
		1	02	02	2.02	34	Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	Pelayanan Kesehatan Berkualitas bagi pasien umum	100	Persen	16.000.000.000	100	2.962.948.894	17	635.020.793	17%	16%	117	3.597.969.687	117%	22%		

Takalar, Juli 2024

Disusun,
Direktur RSUD H.Padjonga Dg.Ngalle

Dievaluasi,
Kepala Bappelitbangda

dr. Ruslan Ramli, M.Adm.Kes

Drs. Achmad Rivai, M.Si

Berdasarkan tabel diatas terdapat beberapa analisis pelaksanaan hasil renja sebagai berikut :

1. Ada kegiatan yang belum bisa dilaksanakan di tahun 2024 pada subkegiatan Pengelolaan upaya kesehatan khusus dari dana APBD karena menunggu pengklaiman pembayaran hutang Tahun 2022.
2. Terdapat kegiatan yang belum terlaksana yaitu pada subkegiatan Pengadaan alat-alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan pada pengadaan Penunjang Rekam Medis Elektronik sementara dalam proses penawaran harga pada E-Katalog.
3. Terdapat kegiatan yang belum terlaksana yaitu pada subkegiatan Pengadaan alat-alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan pada pengadaan Alat Kesehatan NICU/PICU karena Perubahan Anggaran dihilangkan.

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar

Indikator kinerja pelayanan rumah sakit dapat dipakai untuk mengetahui tingkat pemanfaatan, mutu dan efisiensi pelayanan rumah sakit. Kinerja pelayanan rumah sakit pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle
Kabupaten Takalar

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra SKPD			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024(Jan-Juni)	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Jumlah Kunjungan			-	-	-	94.114	51.064	-	-	
2	Rata-rata pemakaian tempat tidur (BOR))			60-85%	60-85%	60-85%	61%	73%	60-85%	60-85%	
3	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)			B	B	B	B	B	B	B	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	
5	Akreditasi Rumah Sakit			Akreditasi	Akreditasi	Akreditasi	Akreditasi	Akreditasi	Akreditasi	Akreditasi	

6	Pemenuhan self assessment rumah sakit klasifikasi C Pendidikan Satelit			Klasifikasi C Pendidikan Satelit	Klasifikasi C Pendidikan Satelit	Klasifikasi C Pendidikan Satelit	Klasifikasi C Pendidikan Satelit	Klasifikasi C Pendidikan Satelit	Klasifikasi C Pendidikan Satelit	Klasifikasi C Pendidikan Satelit	

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilakukan analisis terhadap kinerja pelayanan RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar :

1. **Jumlah kunjungan di RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle**

   Jumlah kunjungan di RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle, baik pasien rawat jalan, rawat inap maupun IGD menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan rumah sakit, yang juga dapat menjadi indikasi kepuasan pasien terhadap kualitas pelayanann yang diberikan.

2. ***Bed Occupancy Ratio (BOR)***

   Bed Occupancy Ratio (BOR) menurut Depkes RI (2005) adalah prosentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit, nilai parameter BOR yang ideal adalah antara 60-85%.

   Semakin tinggi nilai BOR berarti semakin tinggi pula penggunaan tempat tidur yang ada untuk perawatan pasien. Namun perlu diperhatikan bahwa semakin banyak pasien yang dilayani berarti semakin berat pula beban kerja petugas. Akibatnya pasien kurang mendapat perhatian yang dibutuhkan (kepuasan pasien menurun) dan kemungkinan infeksi nosokomial meningkat. Disisi lain. Semakin rendah BOR berarti semakin sedikit tempat tidur yang digunakan dari tempat tidur yang tersedia.

Rumus BOR = jumlah hari perawatan rumah sakit x 100%

(Σ tempat tidur x Σ hari dalam satu periode)

Pencapaian BOR RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle per bulan Juni tahun 2024 sebesar 73 %, nilai tersebut di bawah standar yang ditetapkan oleh Depkes (2005). Nilai BOR dapat digunakan sebagai tolak ukur adanya peningkatan kepuasan pasien.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle disusun berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan pada beberapa unit/instalasi, yaitu instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap, instalasi Gawat Darurat, instalasi laboratorium, instalasi farmasi, instalasi radiologi, fisioterapi, serta perinatologi, kamar bersalin, dan nifas.

Survei kepuasan masyarakat tahun 2024 masih mengacu pada Keputusan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instalasi Pemerintah, yang mana ada 14 (empat belas) unsur yang dinilai dalam survei tersebut, yaitu:

a. Prosedur pelayanan
b. Persyaratan pelayanan
c. Kejelasan petugas pelayanan
d. Kedisiplinan petugas pelayanan
e. Tanggung jawab petugas pelayanan
f. Kemampuan petugas pelayanan
g. Kecepatan pelayanan
h. Keadilan mendapatkan pelayanan
i. Kesopanan dan keramahan petugas
j. Kewajaran biaya pelayanan
k. Kepastian biaya pelayanan
l. Kepastian jadwal pelayanan
m. Kenyamanan lingkungan
n. Keamanan pelayanan

Berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat, IKM RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle per bulan Juni tahun 2024 adalah 86,8%. Indeks Kepuasan Masyarakat yang dicapai menunjukkan bahwa RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle memiliki mutu pelayanan dengan nilai "B" dan kinerja pelayanan "Baik".

4. Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instalasi Pemerintah (AKIP)

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instalasi Pemerintah (AKIP) bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah (SAKIP) agar kedepannya bisa lebih baik.

5. Akreditasi Rumah Sakit

Akreditasi rumah sakit merupakan upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit yang dilakukan dengan membangun sistem

dan budaya mutu. Melalui akreditasi rumah sakit diharapkan ada perbaikan sistem rumah sakit yang meliputi input, proses, output dan outcome.

6. **Pemenuhan self assessment rumah sakit klasifikasi C Pendidikan Satelit**

   Rumah sakit pendidikan satelit merupakan rumah sakit umum Tipe C yang digunakan Institusi pendidikan guna mencapai kompetensi tenaga kesehatan dibidang Kedokteran dan/atau kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi. Namun dalam hal ini masih dalam proses pengusulan ke kemenkes.

II.3. Solusi dan Penyelesaian Permasalahan dalam Pelaksanaan hasil Renja Perangkat daerah Tahun 2023

RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle adalah Perangkat Daerah (PD) yang melaksanakan 2 fungsi yaitu sebagai BLUD dan UPT. Melaksanakan fungsinya sebagai BLUD sehingga mempunyai fleksibilitas terkait anggaran yang dilaksanakan, sehingga terdapat indikator kegiatan yang mencapai karena terkait output tetapi terdapat indikator program yang tidak tercapai karena terkait outcome. Jika dilihat dari realisasi anggaran sampai dengan triwulan II bisa dilihat ada program dan kegiatan yang capaian realisasinya tidak mencapai target. Permasalahan yang terjadi diantaranya adalah :

1. Kegiatan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin yang bersumber dari Dana APBD belum terserap untuk tahun 2024 dikarenakan masih ada klaim hutang tahun 2023.
2. Terdapat kegiatan yang belum terlaksana yaitu pada subkegiatan Pengadaan alat-alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan pada pengadaan Penunjang Rekam Medis Elektronik sementara dalam proses penawaran harga pada E-Katalog.
3. Terdapat kegiatan yang belum terlaksana yaitu pada subkegiatan Pengadaan alat-alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan pada pengadaan Alat Kesehatan NICU/PICU karena Perubahan Anggaran dihilangkan.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

1. Menyusun rencana perubahan renja yang disesuaikan dengan hasil pelaksanaan renja
2. Mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi dengan penataan kembali tugas pokok dan fungsi RS
3. Melakukan pelayanan terintegrasi
4. Upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian target pendapatan rumah sakit diantaranya adalah :
    a. Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan
    b. Melakukan efisiensi dan efektifitas belanja operasional
    c. Optimalisasi rekam medik dalam upaya percepatan dan

ketepatan klaim BPJS

5. Koordinasi secara intens dengan BPJS Kesehatan untuk mencari jalan keluar terhadap masalah yang sedang dihadapi.
6. Perbaruan Tarif dan Penyusunan Unit Cost.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

III.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle adalah mewujudkan kualitas kinerja manajemen dan pelayanan kesehatan rujukan yang bermutu dan profesional

Adapun sasaran RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar adalah pelaksanaan pengendalian capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

III.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Rancangan awal rencana kerja tahun 2024 RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar, setelah dilakukan review sesuai dengan hasil analisis kebutuhan, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Takalar

Nama SKPD : RSUD H.

Padjonga Daeng Ngalle

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan					**Program Penunjang Urusan Pemerintahan**					
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle	Jumlah Dokumen Renstra dan renja	2 dokumen	Rp. 4.000.000,	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle	Jumlah Dokumen Renstra dan renja	2 dokumen	Rp. 4.000.240	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle	Jumlah Dokumen RKA Pokok SKPD	1 dokumen	Rp. 4.000.000,	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle	Jumlah Dokumen RKA Pokok SKPD	1 dokumen	Rp. 4.000.020	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle	Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD	1 dokumen	Rp. 4.000.000,	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle	Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD	1 dokumen	Rp. 4.000.235	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	0	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	Rp. 3.500.020	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle	Jumlah Dokumen DPA Pokok SKPD	1 dokumen	Rp. 4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle	Jumlah Dokumen DPA Pokok SKPD	1 dokumen	Rp 4.000.000	

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle	Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD	1 dokumen	Rp. 4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle	Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD	1 dokumen	Rp 4.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	1 dokumen	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	1 dokumen	Rp 4.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle	Jumlah ASN Yang menerima gaji	4690 Orang	Rp. 29.025.231.702	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle	Jumlah ASN Yang menerima gaji	4690 Orang	Rp. 29.025.231.702	
		RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle	Jumlah ASN Yang menerima TPP dan obyektifitas lainnya	75 Orang	Rp. 1.877.467.836		RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle	Jumlah ASN Yang menerima TPP	73 Orang	Rp. 2.106.789.420	
		RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle	Jumlah ASN yang menerima Tunjangan Obyektifitas Lainnya	18 Orang	Rp. 0		RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle	Jumlah ASN yang menerima Tunjangan Obyektifitas Lainnya	18 Orang	Rp. 162.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle	Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	Rp. 4.999.770,	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle	Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	Rp. 3.500.090	
	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/s	RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan	1 dokumen	Rp. 5.008.320,	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/s	RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	1 dokumen	Rp. 3.000.820	

	emesteran SKPD		/semesteran SKPD			emesteran SKPD		SKPD			
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle	Jumlah Dokumen Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Rp. 3.000.220	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle	Jumlah Dokumen Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Rp. 3.000.220	
	Adminstrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah					**Adminstrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**					
	PenataUsahan barang Milik daerah pada SKPD	RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle	PenataUsahan barang Milik daerah pada SKPD	1 dokumen	Rp. 4.000.040	PenataUsahan barang Milik daerah pada SKPD	RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle	PenataUsahan barang Milik daerah pada SKPD	1 dokumen	Rp 4.000.040	
	Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle				**Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle				
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	120 orang	Rp. 254.358.900	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	120 orang	Rp 545.636.000	
	Administrasi Umum Perangkat daerah	RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle				**Administrasi Umum Perangkat daerah**	RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle				
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Ke luar daerah	32 kali	Rp. 55.200.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Ke luar daerah	32 kali	Rp 100.000.000	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle		100 %		
	Pengadaan Mebel	RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle	Jumlah Mebeuler Rumah Sakit	10 Jenis	0	Pengadaan Mebel	RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle	Jumlah Mebeuler Rumah Sakit	10 Jenis	Rp 100.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	10 jenis	Rp. 0	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	10 jenis	Rp 100.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle				
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle	Jumlah rekening telpon, air dan Listrik	36 Rekening	Rp. 1.826.025.060	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle	Jumlah rekening telpon, air dan Listrik	36 Rekening	Rp. 1.826.025.060	
	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah	RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle				**Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah**	RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas	RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle	Jumlah Kendaraan roda 2 dan roda 4 yang terpelihara, terbayar pajak dan perizinannya	4 unit	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas	RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle	Jumlah Kendaraan roda 2 dan roda 4 yang terpelihara, terbayar pajak	4 Paket	Rp 20.000.000	

	jabatan					jabatan		dan perizinannya			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas atau lapangan	RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle	Jumlah Ambulance yang terpelihara, terbayar pajak dan perizinannya	7 unit	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas atau lapangan	RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle	Jumlah Ambulance yang terpelihara, terbayar pajak dan perizinannya	7 unit	Rp 150.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya		Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	1 paket	0	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya		Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	1 paket	Rp 50.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle	Jumlah gedung kantor yang direhab	4 paket	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle	Jumlah gedung kantor yang direhab	4 paket	Rp 100.000.000	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan uapaya kesehatan masyarakat	RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle				**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan uapaya kesehatan masyarakat**	RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle				
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle				**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota**	RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle				

	Pembangunan rumah sakit beserta sarana dan parasarana pendukungnya	RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle	Jumlah Pembangunan Gedung RS dan Pemenuhan Alat-Alat Kesehatan	Bangunan 1 paket Alkes 3 Paket	Rp. 3.782.500.000	Pembangunan rumah sakit beserta sarana dan parasarana pendukungnya	RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle	Jumlah Pembangunan Gedung RS dan Pemenuhan Alat-Alat Kesehatan	Bangunan 1 paket Alkes 3 Paket	Rp 3.782.500.000	
	Pengembangan rumah sakit	RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle	Jumlah Pembangunan Gedung RS dan Pemenuhan Alat-Alat Kesehatan	Bangunan 1 paket Alkes 1 Paket	Rp. 3.299.455.168	Pengembangan rumah sakit	RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle	Jumlah Pembangunan Gedung RS dan Pemenuhan Alat-Alat Kesehatan	Bangunan 1 paket Alkes 1 Paket	Rp 3.299.455.168	
	Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas kesehatan	RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle	Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana air bersih RS	1 paket	0	Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas kesehatan	RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle	Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana air bersih RS	1 paket	Rp. 100.000.000	
	Pengadaan alat-alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle	Jumlah Alat-alat kesehatan/alat penunjak medik	1 paket	0	Pengadaan alat-alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle	Jumlah Alat-alat kesehatan/alat penunjak medik	1 paket	Rp 250.000.000	
	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitaspelayanan kesehatan	RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas yang terpelihara	1 paket	0	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas yang terpelihara	1 paket	Rp 100.000.000	

	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten/Kota	RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle				**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten/Kota**	RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle				
	Pengelolaan upaya kesehatan khusus	RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle	Pelayanan kesehatan berkualitas bagi penduduk miskin	100%	Rp. 784.000.000	Pengelolaan upaya kesehatan khusus	RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle	Pelayanan kesehatan berkualitas bagi penduduk miskin	100%	Rp 1.000.000.000	
	Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle	Pelayanan Kesehatan berkualitas bagi pasien BPJS	100%	Rp. 75.000.000.000	Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle	Pelayanan Kesehatan berkualitas bagi pasien BPJS	100%	Rp 75.000.000.000	
	Operasional pelayanan rumah sakit	RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle	Persentase terpenuhinya Insentif Tenaga Kesehatan	100%	Rp. 216.000.000	Operasional pelayanan rumah sakit	RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle	Persentase terpenuhinya Insentif Tenaga Kesehatan	100%	Rp 216.000.000	
	Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle	Pelayanan Kesehatan Berkualitas bagi pasien umum	100%	Rp. 4.400.000.000	Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle	Pelayanan Kesehatan Berkualitas bagi pasien umum	100%	Rp 4.400.000.000	
	Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di kabupaten/kota	RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle	Akreditasi RS	Terakreditasi	0	Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di kabupaten/kota	RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle	Akreditasi RS	Terakreditasi	Rp 250.000.000	

Berdasarkan review terhadap rancangan awal rencana kerja tahun anggaran 2024 RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar terdapat beberapa perubahan, perubahan tersebut diperoleh berdasarkan hasil analisis kebutuhan RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle.

Beberapa kegiatan yang anggarannya berubah (bertambah/berkurang) dari rancangan awal dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kebutuhan rumah sakit, jumlah persediaan *(stock)* yang dimiliki rumah sakit, naik/turunnya harga satuan barang/jasa serta kondisi keuangan.

Kegiatan yang kebutuhan anggarannya berubah dari rancangan awal rencana kerja (renja) tahun anggaran 2024 adalah :

1. Penyusunan dokumen perencana perangkat daerah: pagu indikatif pada rancangan awal yaitu Rp. 4.000.240 setelah dilakukan analisis kebutuhan, anggarannya tetap Rp. 4.000.240
2. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD: pagu indikatif pada rancangan awal yaitu Rp. 4.000.020 setelah dilakukan analisis kebutuhan, anggarannya tetap Rp. 4.000.020
3. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD: pagu indikatif pada rancangan awal yaitu Rp. 4.000.235 setelah dilakukan analisis kebutuhan, anggarannya tetap Rp. 4.000.235
4. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD: pagu indikatif pada rancangan awal yaitu

Rp. 3.500.020 setelah dilakukan analisis kebutuhan, anggarannya tetap Rp. 3.500.020

5. Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD: pagu indikatif pada rancangan awal yaitu Rp. 0 setelah dilakukan analisis kebutuhan, anggarannya bertambah Rp. 4.000.000 menjadi Rp. 4.000.000
6. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD: pagu indikatif pada rancangan awal yaitu Rp. 0 setelah dilakukan analisis kebutuhan, anggarannya bertambah Rp. 4.000.000 menjadi Rp. 4.000.000
7. Evaluasi kinerja perangkat daerah: pagu indikatif pada rancangan awal yaitu Rp. 0 setelah dilakukan analisis kebutuhan, anggarannya bertambah Rp. 4.000.000 menjadi Rp. 4.000.000
8. Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN : pagu indikatif pada rancangan awal yaitu Rp. 30.902.699.538 Setelah dilakukan analisis kebutuhan, kebutuhan anggaran bertambah Rp.229.323.784 menjadi Rp.31.132.023.322
9. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD : pagu indikatif pada rancangan awal yaitu Rp. 3.500.090 setelah dilakukan analisis kebutuhan, anggarannya tetap Rp. 3.500.090
10. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD : pagu indikatif pada rancangan awal yaitu Rp. 3.000.820 setelah dilakukan analisis

kebutuhan, anggarannya tetap Rp. 3.000.820

11. Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran: pagu indikatif pada rancangan awal yaitu Rp. 3.000.220 setelah dilakukan analisis kebutuhan, anggarannya tetap Rp. 3.000.220
12. Penata Usahaan barang milik daerah SKPD : pagu indikatif pada rancangan awal yaitu Rp.4.000.040 setelah dilakukan analisis kebutuhan, anggarannya tetap Rp. 4.000.040
13. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi : pagu indikatif pada rancangan awal yaitu Rp. 254.358.900 setelah dilakukan analisis kebutuhan, anggarannya bertambah Rp. 291.277.100 menjadi Rp. 545.636.000
14. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD : pagu indikatif pada rancangan awal yaitu Rp.55.200.000 setelah dilakukan analisis kebutuhan, anggarannya bertambah Rp. 44.800.000 menjadi Rp.100.000.000
15. Pengadaan mebel : pagu indikatif pada rancangan awal yaitu Rp.0 setelah dilakukan analisis kebutuhan, anggarannya bertambah Rp. 100.000.000 menjadi Rp. 100.000.000
16. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya: pagu indikatif pada rancangan awal yaitu Rp.0 setelah dilakukan analisis kebutuhan, anggarannya bertambah Rp. 100.000.000 menjadi Rp. 100.000.000

17. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik: pagu indikatif pada rancangan awal yaitu Rp. 1.826.025.060 setelah dilakukan analisis kebutuhan, anggarannya tetap Rp. 1.826.025.060
18. Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas jabatan : pagu indikatif pada rancangan awal yaitu Rp. 0 setelah dilakukan analisis kebutuhan, anggarannya bertambah Rp.20.000.000 menjadi Rp. 20.000.000
19. Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas atau lapangan : pagu indikatif pada rancangan awal yaitu Rp.0 setelah dilakukan analisis kebutuhan, anggarannya bertambah Rp. 150.000.000 menjadi Rp.150.000.000
20. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya : pagu indikatif pada rancangan awal yaitu Rp.0 setelah dilakukan analisis kebutuhan, anggarannya bertambah Rp. 50.000.000 menjadi Rp.50.000.000
21. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya : pagu indikatif pada rancangan awal yaitu Rp.0 setelah dilakukan analisis kebutuhan, anggarannya bertambah Rp. 100.000.000 menjadi Rp. 100.000.000
22. Pembangunan rumah sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya : pagu indikatif pada rancangan awal yaitu Rp.

3.782.500.000 setelah dilakukan analisis kebutuhan, anggarannya tetap Rp. Rp. 3.782.500.000

23. Pengembangan rumah sakit : pagu indikatif pada rancangan awal yaitu Rp. 3.299.455.168 setelah dilakukan analisis kebutuhan, anggarannya bertambah Rp. 3.299.455.168
24. Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas kesehatan : pagu indikatif pada rancangan awal yaitu Rp. 0 setelah dilakukan analisis kebutuhan, anggarannya bertambah Rp. 100.000.000 menjadi Rp. 100.000.000
25. Pengadaan alat-alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan : pagu indikatif pada rancangan awal yaitu Rp. 8.452.019.497 setelah dilakukan analisis kebutuhan, anggarannya bertambah Rp. 5.551.263.797 menjadi Rp. 2.900.755.700
26. Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan : pagu indikatif pada rancangan awal yaitu Rp. 0 setelah dilakukan analisis kebutuhan, anggarannya bertambah Rp.100.000.000 menjadi Rp. 100.000.000
27. Pengelolaan upaya kesehatan khusus : pagu indikatif pada rancangan awal yaitu Rp.1.000.000.000 setelah dilakukan analisis kebutuhan, anggarannya tetap Rp.1.000.000.000

28. Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat : pagu indikatif pada rancangan awal yaitu Rp.75.000.000.000 setelah dilakukan analisis kebutuhan, anggarannya tetap Rp. 75.000.000.000
29. Operasional pelayanan rumah sakit : pagu indikatif pada rancangan awal yaitu Rp.216.000.000 setelah dilakukan analisis kebutuhan, anggarannya tetap Rp. 216.000.000
30. Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya : pagu indikatif pada rancangan awal yaitu Rp.4.400.000.000 setelah dilakukan analisis kebutuhan, anggarannya tetap Rp.4.400.000.000
31. Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di kabupaten/kota : pagu indikatif pada rancangan awal yaitu Rp. 0 setelah dilakukan analisis kebutuhan, anggarannya tetap Rp.250.000.000

III.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024			Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Renja 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	Renja 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Rumah Sakit Umum Daerah H. Padjonga Daeng Ngalle																	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
1	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	94,62 %	100%	100%	100%	32.728.724.598	32.378.505.442	32.189.623.150						100%	30.804.257.210	
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi berjalan lancar	2 Dokumen	0	100%	100%	100%	20.000.000			Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Rumah Sakit	100%	0	
	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000	0	0	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Rumah Sakit	2 Dokumen	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE

	1	0 2	0 1	2. 01	00 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	25 Persen	0	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000	0	0	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Rumah Sakit	1 Dokumen	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1	0 2	0 1	2. 01	00 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Sub domain	0	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000	0	0	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Rumah Sakit	1 Dokumen	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1	0 2	0 1	2. 01	00 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100 Persen	0	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000	0	0	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Rumah Sakit	1 Dokumen	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1	0 2	0 1	2. 01	00 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	35 OPD	0	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000	0	0	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Rumah Sakit	1 Dokumen	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE

	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan	100 Persen	100'29%	5.590	5.576	5.510	30.902.699.538	31.132.023.322	30.943.141.030			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Rumah Sakit	100%	30.804.257.210	
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4690 Orang	4678 Orang	4.690	4.676	4.634	29.025.231.702	29.025.233.902	29.025.231.702	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Rumah Sakit	4.634 orang	30.804.257.210	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	0	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0	0	0	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Rumah Sakit	1 dokumen	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Dokuman	0	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	0	0	0	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Rumah Sakit	1 dokumen	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE

	1	0 2	0 1	2. 02	00 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	0	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	0	0	0	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Rumah Sakit	1 dokumen	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1	0 2	0 1	2. 03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah	100Persen	100%	100%	100%	100%						Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Rumah Sakit	100%	0	
	1	0 2	0 1	2. 03	00 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Dokumen	0	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	0	0		Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Rumah Sakit	2 dokumen	-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1	0 2	0 1	2. 05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	100Persen	0	100%	100%	100%				Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Rumah Sakit	100%	0	
	1	0 2	0 1	2. 05	00 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																

							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	500 Orang	0	120 Orang			0	0	0	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Rumah Sakit	500 orang	-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	32 Kali	0	100%	100%	100%	0	0	0			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Rumah Sakit	100%	0	
	1	02	01	2.06	00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32 Kali	0	32 Laporan	32 Laporan	32 Laporan	0	0	0	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Rumah Sakit	32 kali	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	100%	100%	100%	100%	0	-	9.979.500			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Rumah Sakit	100%	0	
	1	02	01	2.07	00 05	Pengadaan Mebel																	

							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Jenis	1	2 Paket	2 Paket	2 Paket	0	9.979.500	9.979.500	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Rumah Sakit	10 Jenis	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0	1 Paket	0	0	0	0	0	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Rumah Sakit	10 Jenis	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	1 Paket	0	0	0	0	0	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Rumah Sakit	0	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PersentaseTersedianya Jasa Penunjang	100 Persen	100%	100%	100%	100%	1.826.025.060	1.236.502.620	1.236.502.620			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Rumah Sakit	100%	0	
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Rekening	96	96 Rekening	36 Rekening	36 Rekening	1.826.025.060	1.236.502.620	1.236.502.620	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Rumah Sakit	36 Rekening	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100Persen	0	100%	100%	100%	0	0	0			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Rumah Sakit	100%	0	
	1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Umit	0	3 Unit	0	0	0	0	0	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Rumah Sakit	11 unit	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	0	7 Unit	0	0	0	0	0	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Rumah Sakit	5 unit	0	
	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	

							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Paket	0	1 Paket	0	0	0	0	0	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Rumah Sakit	1 paket	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Paket	0	4 Paket	0	0	0	0	0	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Rumah Sakit	4 paket	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
2	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk	100 Persen	83,27%	100%	100%	100%	87.852.019.497	81.800.755.700	65.901.484.036	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Rumah Sakit	100%	70.665.580.119	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terbangunnya Gedung Perawatan sesuai standar	0.11 Persen	100,00%	100%	100%	100%	8.452.019.497	2.900.755.700	1.900.755.700			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Rumah Sakit	100%	1.500.000.000	
	1	02	02	2.01	0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya																

							Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Paket	0	1 Paket	0	0	0	0	0	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Rumah Sakit	1 Paket	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1	02	02	2.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit																	
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 Paket	1	1 Paket	0	0	0	0	0	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Rumah Sakit	1 Paket	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																	
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Paket	1	1 Paket	2 Paket	1 Paket	8.452.019.497	1.500.000.000 1.005.058.000 395.697.700	1.500.000.000 400.755.700	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Rumah Sakit	1 Paket	1.500.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																	

							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1 Paket	1	1 Paket	0	0	0	0	0	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Rumah Sakit		0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit																	
							Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Paket	0	1 Paket	0	0	0	0	0	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Rumah Sakit		0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Persediaan Layanan Kesehatan di Rumah Sakit	0.11 Persen	66,54 %	100%	100%	100%	79.400.000.000	78.900.000.000	64.000.728.336	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Rumah Sakit		69.165.580.119	
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																	

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	100 Persen	100	100%	100%	100%	75.000.000.000	75.000.000.000	60.100.728.336	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Rumah Sakit	100%	64.765.580.119	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	100 Persen	0	100%	100%	100%	0	0	0	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Rumah Sakit		0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100 Persen	100	100%	100%	100%	3.400.000.000 1.000.000.000	3.400.000.000 500.000.000	3.400.000.000 500.000.000	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Rumah Sakit	100%	3.400.000.000 1.000.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
	1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	100 Persen	0	Terakreditasi	Terakreditasi	Terakreditasi	0	0	0	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Rumah Sakit		0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE

	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Terpenuhinya Sistem Informasi Kesehatan di Rumah Sakit	100 Persen	0	100%	0%	0%	0%	0%	0%			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Rumah Sakit		0	
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	100 Persen	0	100%	0%	0%	0	0	0	Kab. Takalar, Pattallassang, Kalabbirang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Rumah Sakit		0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. PADJONGA DAENG NGALLE
JUMLAH																					**101.469.837.329,00**	

Takalar, Juli 2024
Diektur

dr.H. Ruslan Ramli, M.Adm.Kes
Nip. 19700528 200212 1 002

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan disesuaikan dengan fungsi RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle. Adapun program dan kegiatan indikatif RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      - Koodinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
      - Koodinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
      - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

- Penyusunan Pelaporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran

c. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
   - Penata Usahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Pengadaan Mebel
   - Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau lapangan
   - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan mayarakat
    a. Penyediaan fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan daerah Kabupaten Kota
        - Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
        - Pengembangan Rumah Sakit
        - Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Kesehatan
        - Pengadaan alat-alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan
        - Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan
    b. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
        - Pengelolaan upaya kesehatan khusus
        - Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat
        - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
        - Operasional Pelayanan Rumah Sakit
        - Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle ini merupakan rencana kerja berdasarkan Renstra RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle tahun 2023-2026. RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle telah melaksanakan 2 program dan 5 kegiatan 6 sub kegiatan selama Triwulan II dengan capaian kinerja 26 % dan realisasi anggaran mencapai 42,37 % namun upaya-upaya tetap dilakukan khususnya terkait dengan dokumen administrasi proses pengadaan barang dan jasa maupun belanja modal.

Upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan tetap dilakukan sebagai salah satu organisasi pelayanan yang tetap mementingkan keselamatan pasien. Harapan kami beberapa usulan penambahan anggaran khususnya dalam upaya optimalisasi pelayanan dapat terealisasi.

Dengan ditetapkannya Renja Perubahan Tahun 2024 diharapkan agar RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara terarah, bertahap dan berkesinambungan.

Demikian Rencana Kerja Perubahan ini dibuat sebagai gambaran kebutuhan program dan kegiatan yang dirancangkan akan dilaksanakan RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Tahun 2024. Disadari bahwa dalam penyusunan rancangan Renja ini masih memiliki beberapa keterbatasan

yang memungkinkan dilakukannya perbaikan, sebagaimana dokumen pembangunan lainnya.

Takalar, Juli 2024
Direktur RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle

dr.H. Ruslan Ramli, M.Adm.Kes
NIP. 19700528 200212 1 002

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **I**

DAFTAR TABEL ..... **IV**

DAFTAR GAMBAR v

BAB I PENDAHULUAN **I-2**

1.1 LATAR BELAKANG I-2
1.2 LANDASAN HUKUM I-8
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN I-11
1.3.1 Maksud *I-11*
1.3.2 Tujuan *I-11*
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN I-11

BAB II HASIL EVALUASI PERUBAHAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN TAHUN 2024 ..... **II-1**

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN PERUBAHAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN TAHUN 2024 DAN CAPAIAN RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN II-1
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN II-21
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN II-27
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD II-28
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT II-47

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN III-1

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL III-1

3.1.1 Telaahan Kebijakan Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan..... III-1

3.2 TUJUAN DAN SASARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN..... III-1

1.1.1 Tujuan III-2

1.1.2 Sasaran III-2

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN..... V-1

4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN TAHUN 2024 ..... IV-1

BAB V PENUTUP V-1

1.2 CATATAN PENTING V-1

1.3 KAIDAH PELAKSANAAN V-1

1.4 RENCANA TINDAK LANJUT V-1

DAFTAR TABEL

Tabel II-1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan Pencapaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan s/d Tahun 2021 Kabupaten Takalar.....I-2

Tabel II-2 Rekapitulasi Capaian Kinerja Program/Kegiatan dan sub Kegiatan II-20

Tabel II-3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan.....II-22

Tabel II-4 Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program PrioritasII-23

Tabel II-5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 .....II-29

Tabel III-1 Tujuan dan Sasaran Bappelitbangda Kabupaten Takalar Tahun 2023 ..... III-3

DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1 Keterkaitan Renja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya……I-4

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan acuan perencanaan kegiatan OPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD. Adapun penyusunan Perubahan Renja OPD merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 tidak terlepas dari Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar 2023-2026. Terdapat beberapa kegiatan prioritas yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar antaranya adalah percepatan pencapaian target indikator RPD Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026. Serta peningkatan perencanaan pembangunan dalam mencapai peningkatan daya saing daerah.

Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar ini diharapkan dapat benar-benar dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 mendatang.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar,



Sirajuddin Saraba, S.Sos., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19750625 199311 1 001

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar yang selanjutnya disingkat Renja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar adalah dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 memperhatikan :

1. Penyelarasan target indikator utama (IKU) dan target indikator kunci (IKK) serta target indikator lainnya dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026;
2. Kesesuian tujuan dan sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026;
3. Kesesuaian prioritas pembangunan daerah dan program prioritas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
4. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026;
5. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022;
6. Perubahan Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023;
7. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023;
8. Isu-isu strategis yang berkembang;
9. Kebijakan Nasional;
10. Regulasi yang berlaku.

Gambar I-1
Keterkaitan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2024 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

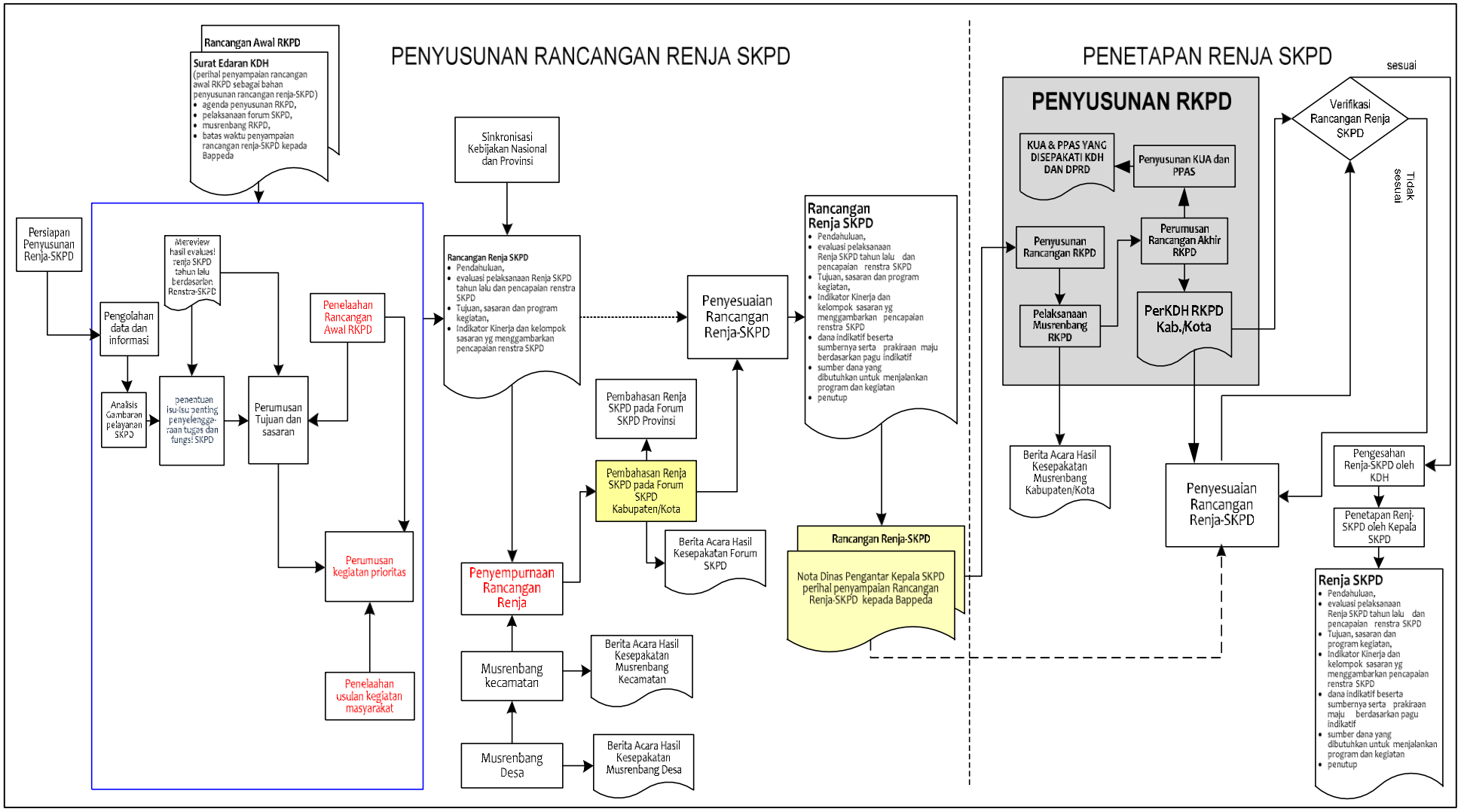

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar Tahun 2024 merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah dan nasional, yang dalam perencanaannya telah dilakukan bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Selain itu Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar yang disusun ini juga telah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar. Kedudukan Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar Tahun 2024 dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar abupaten Takalar Tahun 2023-2026 merupakan regulasi turunan yang harus mengacu pada Renstra.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar Tahun 2024 dilaksanakan melalui tahapan dan tata cara sebagai berikut :

1. Melakukan persiapan penyusunan pada Bulan Januari yang meliputi penetapan Tim Penyusun dan pengumpulan data teknis;
2. Menyusun Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar Tahun 2024 pada Bulan Januari dengan memperhatikan Rancangan RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2024;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Takalar melakukan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026;
4. Melakukan penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar Tahun 2024 dengan memperhatikan Surat Rekomendasi Hasil Verifikasi;
5. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar Tahun 2024 yang telah disempurnakan diajukan oleh Kepala Bappelitbangda Kabupaten Takalar Kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan;
6. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar Tahun

2024 yang telah disempurnakan menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2024;

7. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar Tahun 2024 yang telah disempurnakan sesuai hasil verifikasi, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar yang selanjutnya disingkat Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar adalah dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar untuk periode 1 (satu) tahun.

Untuk mewujudkan keterkaitan program pembangunan daerah Kabupaten, Provinsi, maupun Pusat, maka Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar disusun dengan mengacu dan berpedoman pada RPD Tahun 2023–2026 yang telah ditetapkan lebih dahulu. Disamping itu, penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar Tahun 2024 juga memperhatikan sumber daya dan potensi daerah yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi Renja tahun yang lalu serta isu-isu strategis yang berkembang. Mengingat Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar sangat penting bagi pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar secara khusus dan pemerintah daerah secara umum, maka proses penyusunannya dilakukan secara sistematis, akurat dan terpadu dengan melibatkan seoptimal mungkin peran para pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan forum Rancangan Perubahan Rencana Kerja. Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar dilakukan secara

transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif, holistik dan berkesinambungan yang disusun berdasarkan beberapa pendekatan berikut :

1. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut.
2. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
3. Pendekatan Politis, pendekatan ini mengkaji administrasi negara yang menekankan fungsi-fungsi politik dalam bernegara.
4. Pendekatan top-down, pendekatan ini dilaksanakan dengan mempedomani RPD dan Renstra PD sebagai arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah.
5. Pendekatan bottom-up, pendekatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan tahapan yang telah dilakukan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar Tahun 2024 tersebut serta merujuk pada ketentuan tentang perencanaan pembangunan daerah, secara jelas menunjukkan bahwa renja memiliki nilai-nilai strategis, yaitu :

1. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar Tahun 2024 merupakan pedoman penyelenggaraan tugas dan fungsi selama 1 (satu) tahun;
2. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar Tahun 2024 merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar Tahun 2024;
3. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar Tahun 2024 merupakan alat atau instrumen pengendalian dalam pelaksanaan pengendalian rencana kerja tahunan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar;
4. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar Tahun 2024 merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja tahunan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar;

5. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar Tahun 2024 merupakan pedoman penilaian keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar melakukan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar Tahun 2026;
6. Melakukan penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar Tahun 2024 dengan memperhatikan Surat Rekomendasi Hasil Verifikasi;
7. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar Tahun 2024 yang telah disempurnakan diajukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar Kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan;
8. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar Tahun 2024 yang telah disempurnakan menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2024;
9. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar Tahun 2024 yang telah disempurnakan sesuai hasil verifikasi, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar Tahun 2024 merupakan pedoman penilaian keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6205);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 7);
19. Peraturan Bupati Takalar Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 63);
20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2016 Nomor 7);

21. Peraturan Bupati Takalar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 3).
22. Peraturan Bupati Takalar No. Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Takalar tahun 2023-2026;
23. Peraturan Bupati Takalar No. …… Tahun 2022 tentang RKPD Kab. Takalar tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar adalah sebagai berikut:

a. Untuk menjabarkan program dan kegiatan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar kedalam program/kegiatan tahunan.
b. Menyiapkan acuan bagi RAPBD
c. Menyiapkan kerangka evaluasi kinerja program/kegiatan tahunan bagi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

1.3.2 Tujuan

Adapun Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar (Renja PD) adalah agar terbangun konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 terdiri atas 5 (lima) bab sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan. Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar Tahun 2024 agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami.

BAB II Hasil Evaluasi Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar Tahun 2024. Pada Bab ini berisi empat hal pokok yaitu Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja

Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar Tahun 2024 dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar Tahun 2024, Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar Tahun 2024, serta Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024.

BAB III Tujuan Dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar. Pada bab ini berisi dua hal pokok yaitu Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar.

BAB IV Perubahan Rencana Kerja Dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar Tahun 2024. Pada bab ini berisikan penjelasan mengenai Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan dan uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan serta penyajian Tabel rencana program dan kegiatan beserta pagu indikatif Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar Tahun 2024 dan prakiraan maju Tahun 2024.

BAB V Penutup. Pada bab ini berisikan uraian penutup berupa Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; Kaidah-kaidah pelaksanaan; serta Rencana tindak lanjut Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar Tahun 2024.

BAB II
HASIL EVALUASI PERUBAHAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar Tahun 2024 dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan

Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun berjalan Tahun 2024, mengacu pada APBD tahun berjalan yang telah disahkan pada waktu penyusunan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar tahun lalu, dan realisasi Renstra yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan realisasi APBD Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Perubahan Renja dan pencapaian renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar sampai dengan tahun berjalan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II-1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar dan Pencapaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar s/d Tahun 2024 Kabupaten Takalar

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD:

S.1.1 Indeks Reformasi Birokrasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (target 97 %)

S.1.2 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemn Kebakaran (WMK) (Menit) (Target 15 Menit)

S.2.1 Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (target B)

No	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun **2023-2026** (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu **(2023)**		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun **2024**) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Per Bulan						Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Kinerja Per Bulan						Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun **2024**)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun **2024**) yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun **2024** (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun **2024**)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun (5)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
																Januari		Februari		Maret		I		April		Mei		Juni		II		III		IV													
									K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3					4	5	6			7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		20		24		25		26 = 25/8 x 100%		27 = 7 + 25		28 = 27/6 x 100%		29	30
							SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN																																							
		1					**URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																																							
		1	**5**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**40.391.197.300**		**10.984.449.068**		**12.133.3**		**48.8**		**451.814**		**2.243.925.761**								**2.754.264**										**25,75%**	**40,87%**		**15.943.481.453**				
		1	**5**	**1**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Persentase terpenuhinya pelayanan**	**100,00%**	**Persen**	**36.518.**	**23,11%**	**8.796.043.490**	**100%**	**9.651.873.293**	**10.399.497**		**7.101.907**		**416.440.376**		**3,72%**	**1.689.977.861**							**35,05%**	**2.579.851.024**	**0,00%**	-	**0,00%**	-	**38,77%**	**4.269.828.885**	**38,77%**	**44,24%**	**34,49%**	**13.065.872.375**	**34,49%**	**35,78%**	**SATUAN POLISI PAMONG**	
	Meningkatnya kualitas laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	1	5	1	2.01		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Berjalan Lancar**	100,00%	Persen	168.000.000	22,22%	18.882.300	100%	42.420.500							0,00%	13.161.000							40,00%	6.940.500	0,00%	-	0,00%	-	40,00%	20.101.500	40,00%	47,39%	33,33%	38.983.800	33,33%	23,20%		
		1	5	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja yang disusun	12	Dokumen	48.000.000	2		4	6.637.400	-	3.909.400	-	-	-	-	-	3.909.400	-	-	1	1.480.000	1	-	2	-	-	-	-	2	3.909.400	50%	59%	4	6.577.000	33%	14%		
		1	5	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen RKA	4	Kegiatan	20.000.000	1		1	7.480.100	-	-	-	4.572.100	-	-	-	4.572.100	-	-	1	1.880.000	-	-	1	-	-	-	-	1	4.572.100	100%	61%	2	7.502.900	50%	38%		
		1	5	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang disusun	4	Dokumen	20.000.000	1		1	7.728.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	1	2.859.200	25%	14%		
		1	5	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen DPA-SKPD yang disusun	4	Dokumen	20.000.000	1		1	5.575.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.070.000	-	-	-	-	-	-	-	2.070.000	-	-	-	2.070.000	0%	37%	1	6.749.900	25%	34%		
		1	5	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusuna Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen DPA-SKPD yang disusun	4	Dokumen	20.000.000	1	684	1	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	1	684	25%	3%		
		1	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LPPD SKPD yang disusun	4	Laporan	20.000.000	1		1	5.000.000	-	1008.000	-	1292.000	-	-	-	2.300.000	-	675	-	-	1	2.025.000	1	2.700.000	-	-	-	-	1	5.000.000	100%	100%	2	7.158.200	50%	36%		
		1	5	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	20.000.000	1	2.902.600	1	5.000.000	-	1479.500	-	900	-	-	-	2.379.500	-	1495.500	-	-	-	675	-	2.170.500	-	-	-	-	-	4.550.000	0%	91%	1	7.452.600	25%	37%		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																																						**35,71%**	**49,74%**						
Predikat Kinerja Kegiatan																																						**SR**	**SR**						

| | | |

| | | |

Faktor pendorong pencapaian kinerja:

Faktor penghambat: : anggaran pelaksanaan kegiatan masih sangat terbatas

Faktor penghambat: Proses permintaan Dana dan pencairan Dana di BPKAD Lambat

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*): Mengoptimalkan kegiatan yang belum dilaksanakan di triwulan berikutnya

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*): Adanya Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan serta kualitas pelayanan perangkat daerah

| | | |

Faktor pendorong pencapaian kinerja:

Faktor penghambat : Terlambatnya Penerbitan SPD yang mempengaruhi pencairan dan realisasi

Faktor penghambat: Perlunya tambahan personil yang kompoten sehingga pekerjaan dapat terdistribusi dengan baik dan tidak lagi terjadi penumpukan beban kerja

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*): Perlunya tambahan anggaran kegiatan terutama Kegiatan utama sehingga capaian kinerjanya semakin optimal

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupatenKota berikutnya*): Mengupayakan penataan dan penempatan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang ada

| | | |

| | | |

Adapun penjelasan dari tabel di atas adalah:

A. Realisasi Program yang tidak Memenuhi Target Kinerja:

Ada 3 program yang tidak memenuhi target kinerja yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota. Indikator program ini adalah Persentase cakupan penunjang urusan pemerintahan dengan capaian kinerja 70,56%, hal ini disebabkan karena ada 8 kegiatan yang belum bisa terealisasi 100 % yaitu:
   a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Capain 80,30 %
   b. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan capaian 80%
   c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan capaian 96%
   d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan capaian 27%
   e. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan capaian 91 %
   f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan capaian 31 %
   g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan capaian 80 %
   h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan capaian 80 %
2. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum. Indikator program ini adalah Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban umum dengan capaian kinerja 51,36%, hal ini disebabkan karena ada 3 kegiatan yang belum terealisasi 100% yaitu:
   a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan Capaian 66,57 %
   b. Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali kota dengan Capaian 68%
   c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota dengan Capaian 20%
3. Program Penanggulangan Kebakaran. Indikator rogram ini adalah Persentase Penanggulangan bencana kebakaran dengan capaian 70,31%, hal ini disebabkan karena ada 4 kegiatan yang belum bisa terealisasi yaitu:
   a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan Capaian 62,34%
   b. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran dengan Capaian 80%
   c. Investigasi Kejadian Kebakaran dengan Capaian 79%

d. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran dengan Capaian 60 %

Adapun rekapitulasi capaian kinerja Program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dapat dilihat pada tabel 1. Tabel rekapitulasi capaian kinerja program/kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel II-2
Rekapitulasi Capaian Kinerja Program/Kegiatan dan sub Kegiatan

NO	Uraian	Keterangan Kinerja (K)							Rata-rata Capaian Output (%) dan Predikat Kinerja			
		Jumlah Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Non APBD	Jumlah Indikator	Capaian 0%	Capaian < 100%	Capaian 100%	Capaian >100%	K	Rp	K	Rp
1.	Program	3		3	-	3	-	-	94,27%	73,68%	ST	S
2.	Kegiatan	15		15		15	-	-	95,41%	82.06%	ST	T
3.	Sub Kegiatan	56		81		56	-	-	94,55%	80,81%	ST	T

Sumber : Laporan Monitoring dan Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun 2021

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa skala penilaian rata-rata kinerja dan predikat kinerja hasil evaluasi Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dapat dikatakan tinggi. Dari 3 program kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kab. Takalar Tidak ada program yang memiliki capaian kinerja 100%, dari 15 kegiatan ada 2 sub kegiatan yang memiliki capaian kinerja dan 2 kegiatan melampaui target kinerja.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Adapun kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam periode 5 tahun yang lalu, tergambar pada tabel II-3 dan II-4

Tabel II-3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar

No	Indikator Kinerja	Target			Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-					Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
		IKU	IKK	Indikator lainnya	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)		√		85%	90%	95%	98%	85%	98%	95%	97.51%	98%	98%	98%	95%	97.51%	98%	98%
2	Persentase Penegakan Perda		√		85%	90%	95%	98%	85%	98%	93,26%	100%	98%	98%	98%	93,26%	100%	98%	98%
3	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)		√		75%	85%	95%	100%	75%	95%	95%	95%	98%	98%	95%	95%	95%	98%	98%
4	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten		√		100%	100%	100%	100%	100%	75%	75%	95%	98%	98%	75%	75%	95%	98%	98%
5	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)		√		100%	100%	100%	100%	100%	75%	75%	97%	98%	98%	75%	75%	97%	98%	98%
6	Persentase kecamatan yang dilengkapi unit Pemadam Kebakaran Siaga		√		20%	50%	75%	100%	100%	75%	75%	95%	98%	98%	75%	75%	95%	98%	98%

Tabel II-4
Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat permasalahan dan faktor-faktor yang menjadi penentu keberhasilan dari tiap-tiap bidang urusan dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah.

Pelaksanaan Tugas Administrasi pemerintahan belum dilaksanakan secara optimal melalui peningkatan kapasitas paratur, penyediaan sarana kerja dan perencanaan yang berorientasi kepada hasil kinerja Sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan bahan laporan masih kurang efektif serta Anggaran masih Minim SDM Personil Satuan Polisi Pamong Praja yang masih rendah terkait proses penanganan Pelanggaran Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelanggaran Peraturan Daerah Tidak berjalannya proses penyidikan dan penindakan dalam hal pelanggaran Perda/Perbub serta peraturan lainnya Permasalahan dalam penyelesaian ketentraman dan ketertiban umum tidak dapat dengan maksimal di tegakkan Kuantitas dan kualitas petugas Linmas yang belum memadai. Terbatasnya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran di semua wilayah kecamatan, sehingga jangkauan layanan bencana kebakaran belum maksimal Keterbatasan Armada Kebakaran yang ada saat ini dalam memenuhi waktu tanggap respon ketika terjadi bencana kebakaran.

Persentase data aset yang akurat belum mencapai target. Pada tahun 2021 realisasi capaian untuk indikator ini sebesar 98% dengan target 100%. Adapun faktor tidak tercapainya target capaian untuk indikator ini adalah belum tersusunnya Action Plan Tindak lanjut temuan dan rekomendasi BPK secara keseluruhan, Belum terlaksananya kegiatan sesusai Standar Operasional Prosedur, masih rendahnya integritas dan tanggung jawab pengurus barang OPD, Inventarisasi Aset belum menyeluruh, belum optimalnya Pemanfaatan, penilaian dan pemindahtanganan Aset berupa Lelang dan Penghapusan.

Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar belum mencapai target. Pada tahun 2022 nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar berdasarkan hasil review inspektorat memperoleh nilai B. tdak tercapainya target pada indikator ini disebabkan masih adanya ketidak sesuaian antar dokumen SAKIP.

Serapan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah belum mencapai target. Pada tahun 2022 Serapan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar sebesar 44,50%. Tidak tercapaianya indikator ini disebabkan adanya kebijakan pemerintah terkait pembatasan kegiatan karena adanya pandemi covid 19 sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak terealisasi.

Persentase PNS memperoleh nilai SKP “baik”, indikator ini telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2022 Persentase PNS memperoleh nilai SKP “baik” sebesar 100%. Adapun faktor penentu keberhasilan indikator ini yaitu adanya kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja ASN sehingga para ASN termotivasi untuk memperoleh nilai SKP “baik”.

Persentase pelaporan tepat waktu (LK,LKj,SPJ), indikator ini telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Adapun faktor penentu keberhasilan inkator ini yaitu adanya kesempatan yang luas bagi ASN Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar untuk meningkatkan kemampuannya melalui pelatihan/bimbingan teknis.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar.

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan dan kajian hasil evaluasi pelaksanaan pelayanan, serta kajian terhadap pencapaian kinerja renstra Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, maka dapat dirumuskan isu – isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembangunan daerah membutuhkan pendanaan yang cukup besar, oleh karena itu sangat dibutuhkan adanya Peningkatan realisasi PAD setiap tahunnya.
2. Efektifitas APBD akan meningkat apabila adanya pengalokasian anggaran yang tepat, dan menyentuh kebutuhan masyarakat banyak, sehingga perlu adanya Peningkatan porsi belanja publik dari total belanja APBD.
3. Pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam proses penganggaran sampai pada proses penatausahaan (SIPD) yang terintegrasi.
4. Peningkatan kualitas SDM utamanya bidang akuntansi dan Teknologi Informasi
5. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar. Adapun tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kabupaten Takalar adalah:

Tantangan:

1. Adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan prinsip tata kelola yang baik;
2. Perubahan regulasi yang cepat dan sering berubah-ubah;
3. Kurangnya jumlah SDM pengelola keuangan dan aset daerah;
4. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
5. Kurangnya regulasi yang memaksa masyarakat untuk menyelesaikan kewajibannya
6. Masih rendahnya NJOP sebagai dasar perhitungan PBB dan BPHTB

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar Tahun 2024, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel II-5
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kabupaten Takalar

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (*bottom up planning*) berdasarkan asas demokrasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, assosiasi-assosiasi maupun perguruan tinggi berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Kabupaten dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan keseuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program / kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar Tahun 2024.

Berdasarkan uraian di atas, tidak ada usulan pemangku kepentingan yang ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar Tahun 2024.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN TAKALAR

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026, juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi Sulawesi Selatan.

3.1.1 Telaahan Kebijakan Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan

Memperhatikan arah kebijakan nasional dan provinsi Tahun 2024, Renja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar Tahun 2024 tidak mendukung secara langsung priorits nasional maupun provinsi, namun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar adalah perangkat pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Takalar nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar.

3.2 Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar

Mendasari hasil evaluasi kinerja Badan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar Tahun 2017 – 2022, tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2017 – 2022 mengalami perubahan setelah disesuikan dengan dinamika isu – isu nasional dan lokal yang tertuang di dalam tujuan dan sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar Tahun 2023 – 2026. Olehnya itu Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar Kabupaten Takalar Tahun 2024 didasarkan pada perumusan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis

Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026. Adapun perubahan rumusan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

3.2.1 Tujuan

Rumusan tujuan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar Kabupaten Takalar Tahun 2024 adalah:

1. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
2. Meningkatkan Tata Kelola pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

3.2.2 Sasaran

Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang formulasikan secara terukur, spesifik mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka 4 (Empat) Tahun. Adapun sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026.Sebagai berikut :

1. Persentase warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan.
2. Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Persentase penyelesaian pelanggaran K3
4. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (Menit)
5. Indeks Reformasi Birokrasi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
6. Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Tabel III-1

Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026

TUJUAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET TAHUNAN				PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	
Tujuan: 1 Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	98%	97%	97%	98%	100%	Perda
Sasaran 1.1 : Meningkatnya Pelayanan Dalam Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketentraman	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	98%	90%	95%	95%	100%	Trantibum
	Persentase penyelesaian pelanggaran K3	98%	95%	98%	98%	100%	
Sasaran 1.2 : Meningkatnya kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana kebakaran di Wilayah Manajemen	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (Menit)	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	Damkar

TUJUAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET TAHUNAN				PENANGGUNG JAWAB
			2023	2024	2025	2026	
Kebakaran (WMK)							
Tujuan: 2 Meningkatkan Tata Kelola pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Indeks Reformasi Birokrasi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	CC	B	B	BB	BB	Sekretaris
Sasaran 2.1 : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	CC	B	B	BB	BB	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN TAKALAR

4.1 Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2024

Program dan kegiatan merupakan program prioritas pada Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar Tahun 2024 yang mengacu kepada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar Daerah Tahun 2023-2026. Pemilihan kegiatan dan program tersebut berdasarkan strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar Tahun 2024.

Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakaan secara sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencaapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Indikator kinerja program (*outcome*/hasil) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Indikator kinerja kegiatan (hasil antara / *intermediate outcome*) adalah sebuah hasil akumulasi dari output sub kegiatan yang dapat diidentifikasi dan diukur dalam waktu dekat, dan merupakan indikator hasil jangka panjang (outcome) dari program. Sedangkan sub kegiatan (*output* / keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu sub kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu sub kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator

keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) pada untuk setiap indikator kinerja merupakan data capaian awal tahun perencanaan dan menjadi titik tolak perumusan target kinerja pada periode perencanaan.

Adapun Rencana Program Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar yaitu sebanyak 3 (Tiga) program yang dijabarkan melalui 15 (empat belas kegiatan) dan 56 (lima puluh enam) sub kegiatan, dengan pagu pada tahun 2024 sebesar **Rp. 9.693.271.750,00** ***(Sembilan Milliar Enam Ratus Sembialan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah)***. adapun uraiaan prgram, kegiatan dan sub kegiatannya adalah sebagai berikut:

A. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan program ini Kegiatan 3 (tiga) dan 13 (tiga belas) Sub Kegiatan berikut penjelasannya:

1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang mana sub kegiatannya terdiri dari ;
    - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan.
    - Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.
    - Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
    - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum.
    - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia.
    - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
    - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum.

- Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada.

2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota yang mana sub kegiatannya terdiri dari ;
   - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota.
   - Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota.
   - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota.
3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang mana sub kegiatannya terdiri dari ;
   - Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

B. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatannon Kebakaran

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan program ini memiliki 5 (lima) Kegiatan dan 20 (dua puluh) Sub Kegiatan berikut penjelasannya:

1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota yang mana sub kegiatannya terdiri dari ;
   - Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.
   - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran.
   - Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.
   - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri.
   - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri.
   - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran.
   - Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK).
   - Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan,

Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.
- Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga.

2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran yang mana sub kegiatannya terdiri dari ;
   - Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran.
   - Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran.
3. Investigasi Kejadian Kebakaran yang mana sub kegiatannya terdiri dari ;
   - Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran.
4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran yang mana sub kegiatannya terdiri dari ;
   - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat.
   - Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran.
   - Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana.
5. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia yang mana sub kegiatannya terdiri dari ;
   - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia.
   - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi.
   - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi.
   - Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi.

Adapun Program kegiatan non teknis yang merupakan program kegiatan rutin yang mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut :

C. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan program ini adalah Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Memiliki Kegiatan 8 (delapan) dan Sub Kegiatan 60 (enam puluh) berikut penjelasannya:

1. Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang mana sub kegiatannya terdiri dari ;
    - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
    - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD.
    - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
    - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
    - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD.
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
    - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang mana sub kegiatannya terdiri dari ;
    - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
    - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
    - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
    - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
    - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan.
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD.
    - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang mana sub kegiatannya terdiri dari ;
    - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD.
    - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.
    - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD.
    - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD.
    - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.

- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD.

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang mana sub kegiatannya terdiri dari ;
   - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai.
   - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.
   - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.
   - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian.
   - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai.
   - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
   - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.
   - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah yang mana sub kegiatannya terdiri dari ;
   - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
   - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
   - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
   - Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
   - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
   - Penyediaan Bahan/Material.
   - Fasilitasi Kunjungan Tamu.
   - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
   - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
   - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mana sub kegiatannya terdiri dari ;
   - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
   - Pengadaan Mebel.
   - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
   - Pengadaan Aset Tetap Lainnya.
   - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
   - Pengadaan Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah yang mana sub kegiatannya terdiri dari ;
   - Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
   - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang yang mana sub kegiatannya terdiri dari ;
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
   - Pemeliharaan Mebel.
   - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
   - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Adapun Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagaimana tabel VI-1 berikut:

Tabel IV-1

***Rumusan Rencana Program dan Kegiatan* Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar**

Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Takalar

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN TAKALAR

TAHUN 2024

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target Kinerja 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN																
	1	**URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
	1 05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**		40,806,197,300	11,100,870,068		##########	11,710,315,699	12,105,891,899	12,274,891,899							11,442,570,330	
	1 05 01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pemenuhan urusan penunjang perankat daerah**	36,518,797,300	8,796,043,490	10,543,878,630	10,792,570,330	9,229,041,549	9,624,617,749	9,624,617,749	Takalar					10,543,878,630	10,792,570,330	
	1 05 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	168,000,000	18,882,300	37,000,000	37,000,000	42,420,500	42,420,500	42,420,500	Takalar					37,000,000	37,000,000	
	1 05 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja yang disusun	48,000,000	2,667,600	7,000,000	7,000,000	6,637,400	6,637,400	6,637,400	Takalar	PAD (Pendapatan Bagi hasil)				7,000,000	7,000,000	
	1 05 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen RKA	20,000,000	2,930,800	5,000,000	5,000,000	7,480,100	7,480,100	7,480,100	Takalar	PAD (Pendapatan Bagi hasil)				5,000,000	5,000,000	
	1 05 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang disusun	20,000,000	2,859,200	5,000,000	5,000,000	7,728,000	7,728,000	7,728,000	Takalar	PAD (Pendapatan Bagi hasil)				5,000,000	5,000,000	
	1 05 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen DPA-SKPD yang disusun	20,000,000	4,679,900	5,000,000	5,000,000	5,575,000	5,575,000	5,575,000	Takalar	PAD (Pendapatan Bagi hasil)				5,000,000	5,000,000	
	1 05 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusuna Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen DPA-SKPD yang disusun	20,000,000	684,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Takalar	PAD (Pendapatan Bagi hasil)				5,000,000	5,000,000	
	1 05 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LPPD SKPD yang disusun	20,000,000	2,158,200	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Takalar	PAD (Pendapatan Bagi hasil)				5,000,000	5,000,000	
	1 05 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20,000,000	2,902,600	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Takalar	PAD (Pendapatan Bagi hasil)				5,000,000	5,000,000	

1	05	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	28,466,270,900	5,811,517,863	8,620,047,030	8,868,738,730	7,101,797,205	7,101,797,205	7,101,797,205	Takalar					8,620,047,030	8,868,738,730	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji (70 orang)	20,103,059,344	4,389,682,516	6,710,940,150	6,959,631,850	7,066,677,405	7,066,677,405	7,066,677,405	Takalar					6,710,940,150	6,959,631,850	
						Jumlah ASN yang menerima Tunjangan (TPP)	7,734,571,556	1,360,063,147	1879106880	1879106880				Takalar					1879106880	1879106880	
						Jumlah ASN yang menerima objektifitas Lainnya (12 orang)	548,640,000	57,150,000						Takalar							
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun	20,000,000	1,974,200	15,000,000	15,000,000	14,983,000	14,983,000	14,983,000	Takalar					15,000,000	15,000,000	
1	05	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	20,000,000	-	5,000,000	5,000,000	3,878,000	3,878,000	3,878,000	Takalar					5,000,000	5,000,000	
1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	Jumlah dokumen Laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD yang disusun	40,000,000	2,648,000	10,000,000	10,000,000	16,258,800	16,258,800	16,258,800	Takalar					10,000,000	10,000,000	
1	05	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	70000000	0	15,000,000	15,000,000	15,016,000	15,016,000	15,016,000	Takalar					15,000,000	15,000,000	
1	05	01	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Mi	5,000,000		2,500,000	2,500,000	3,448,000	3,448,000	3,448,000	Takalar	PAD (Pendapatan Bagi hasil)				2,500,000	2,500,000	
1	05	01	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5,000,000		2,500,000	2,500,000	4,200,000	4,200,000	4,200,000	Takalar	PAD (Pendapatan Bagi hasil)				2,500,000	2,500,000	
1	05	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	20,000,000		5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Takalar	PAD (Pendapatan Bagi hasil)				5,000,000	5,000,000	
1	05	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	40,000,000		5,000,000	5,000,000	2,368,000	2,368,000	2,368,000	Takalar	PAD (Pendapatan Bagi hasil)				5,000,000	5,000,000	
1	05	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	220,000,000	868,893,000	52,500,000	52,500,000	13,440,000	13,440,000	13,440,000	Takalar					52,500,000	52,500,000	
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas PDL Beserta Atribut Kelengkapannya	-	770,483,000	37,500,000	37,500,000				Takalar	PAD (Pendapatan Bagi hasil)				37,500,000	37,500,000	
1	05	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	20,000,000	4,570,000	5,000,000	5,000,000	4,720,000	4,720,000	4,720,000	Takalar	PAD (Pendapatan Bagi hasil)				5,000,000	5,000,000	
1	05	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian			5,000,000	5,000,000	3,720,000	3,720,000	3,720,000	Takalar	PAD (Pendapatan Bagi hasil)				5,000,000	5,000,000	
1	05	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan monev kinerja pegawai yang disusun	200,000,000	93,840,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Takalar	PAD (Pendapatan Bagi hasil)				5,000,000	5,000,000	

1	05	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	271,100,000	80,131,046	41,600,000	41,600,000	73,770,800	121,791,800	121,791,800	Takalar					41,600,000	41,600,000	
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8,100,000		4,600,000	4,600,000	8,095,900	8,095,900	8,095,900	Takalar	PAD (Pendapatan Bagi hasil)				4,600,000	4,600,000	
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10,000,000		10,000,000	10,000,000	20,154,800	20,154,800	20,154,800	Takalar	PAD (Pendapatan Bagi hasil)				10,000,000	10,000,000	
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	40,000,000	9,800,000	10,000,000	10,000,000	7,995,000	7,995,000	7,995,000	Takalar	PAD (Pendapatan Bagi hasil)				10,000,000	10,000,000	
1	05	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			5,000,000	5,000,000	4,992,100	4,992,100	4,992,100	Takalar	PAD (Pendapatan Bagi hasil)				5,000,000	5,000,000	
1	05	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	8,000,000	170,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Takalar	PAD (Pendapatan Bagi hasil)				2,000,000	2,000,000	
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	200,000,000	70,161,046	5,000,000	5,000,000	25,533,000	73,554,000	73,554,000	Takalar	PAD (Pendapatan Bagi hasil)				5,000,000	5,000,000	
1	05	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5,000,000		2,500,000	2,500,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Takalar	PAD (Pendapatan Bagi hasil)				2,500,000	2,500,000	
1	05	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		-	2,500,000	2,500,000				Takalar	PAD (Pendapatan Bagi hasil)				2,500,000	2,500,000	
1	05	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	200,000,000	95,139,000	2,500,000	2,500,000	0			Takalar					2,500,000	2,500,000	
1	05	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200,000,000	95,139,000	2,500,000	2,500,000				Takalar	PAD (Pendapatan Bagi hasil)				2,500,000	2,500,000	
1	05	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	6,953,426,400	1,758,290,131	1,740,231,600	1,740,231,600	1,818,788,544	1,818,788,544	1,818,788,544	Takalar					1,740,231,600	1,740,231,600	
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,500,000		2,500,000	2,500,000	124,000	124,000	124,000	Takalar	PAD (Pendapatan Bagi hasil)				2,500,000	2,500,000	
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik yang dibayarkan	130,126,400	31,042,500	32,531,600	32,531,600	38,154,144	38,154,144	38,154,144	Takalar	PAD (Pendapatan Bagi hasil)				32,531,600	32,531,600	
						Jumlah rekening air yang dibayarkan		-						Takalar	PAD (Pendapatan Bagi hasil)						
						Jumlah rekening wifi/komunukasi yang dibayarkan		6,498,631						Takalar	PAD (Pendapatan Bagi hasil)						
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan tenaga pendukung non ASN (tenaga administrasi,	6,820,800,000	1,720,749,000	1,705,200,000	1,705,200,000	1,780,510,400	1,780,510,400	1,780,510,400	Takalar	PAD (Pendapatan Bagi hasil)				1,705,200,000	1,705,200,000	
1	05	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	170,000,000	163,190,150	35,000,000	35,000,000	163,808,500	511,363,700	511,363,700	Takalar					35,000,000	35,000,000	
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat dan Dua atau Lapangan (Kendaraan dinas Operasional dan	100,000,000	147,195,050	25,000,000	25,000,000	59,430,000	210,640,000	210,640,000	Takalar	PAD (Pendapatan Bagi hasil)				25,000,000	25,000,000	
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya y	10,000,000		5,000,000	5,000,000	4,380,000			Takalar	PAD (Pendapatan Bagi hasil)				5,000,000	5,000,000	
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharan bangunan pos penjagaan satpol PP dan Damkar	60,000,000	15,995,100	5,000,000	5,000,000	99,998,500	300,723,700	300,723,700	Takalar	PAD (Pendapatan Bagi hasil)				5,000,000	5,000,000	

1	**05**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban umum**	2,812,400,000	1,813,979,180	580,000,000	580,000,000	806,839,000	806,839,000	806,839,000	Takalar					580,000,000	580,000,000	
1	05	02	2.01		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentasi Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten yang ditangani**	2,012,400,000	1,219,665,300	430,000,000	430,000,000	651,455,000	651,455,000	651,455,000	Takalar					430,000,000	430,000,000	
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan pengawalan	Jumlah Patroli Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan pengawalan	800,000,000	113,340,000	100,000,000	100,000,000	177,097,000	177,097,000	177,097,000	Takalar	PAD (Pendapatan Bagi hasil)				100,000,000	100,000,000	
1	05	02	2.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada	Jumlah Patroli Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	200,000,000	67,920,000	25,000,000	25,000,000				Takalar	PAD (Pendapatan Bagi hasil)				25,000,000	25,000,000	
1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	92,400,000	10,980,000	25,000,000	25,000,000				Takalar	PAD (Pendapatan Bagi hasil)				25,000,000	25,000,000	
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pos kamling serta Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	800,000,000	89,479,800	100,000,000	100,000,000	474,358,000	474,358,000	474,358,000	Takalar	PAD (Pendapatan Bagi hasil)				100,000,000	100,000,000	
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia		187,680,000	50,000,000	50,000,000				Takalar	PAD (Pendapatan Bagi hasil)				50,000,000	50,000,000	
1	05	02	2.01	06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang		682,233,700	50,000,000	50,000,000				Takalar	PAD (Pendapatan Bagi hasil)				50,000,000	50,000,000	
1	05	02	2.01	07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum (pengadaan dan perawatan Pakaian anti huru hara,ht dan alat pendukung operasional lapangan)	120,000,000	62,521,800	50,000,000	50,000,000				Takalar	PAD (Pendapatan Bagi hasil)				50,000,000	50,000,000	
1	05	02	2.01	08	PenyusunanSOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan		400,000	5,000,000	5,000,000				Takalar	PAD (Pendapatan Bagi hasil)				5,000,000	5,000,000	
1	05	02	2.01	09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada (Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani		5,110,000	25,000,000	25,000,000				Takalar	PAD (Pendapatan Bagi hasil)				25,000,000	25,000,000	
1	05	02	2.02		**Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota**	**Persentase Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota**	800,000,000	594,313,880	150,000,000	150,000,000	155,384,000	155,384,000	155,384,000	Takalar					150,000,000	150,000,000	
1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota (Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/		39,920,000	25,000,000	25,000,000				Takalar	PAD (Pendapatan Bagi hasil)				25,000,000	25,000,000	
1	05	02	2.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	800,000,000	427,073,880	100,000,000	100,000,000	155,384,000	155,384,000	155,384,000	Takalar	PAD (Pendapatan Bagi hasil)				100,000,000	100,000,000	
1	05	02	2.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota		127,320,000	25,000,000	25,000,000				Takalar	PAD (Pendapatan Bagi hasil)				25,000,000	25,000,000	

1	**05**	**04**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Persentase Penanggulangan bencana kebakaran**	1,475,000,000	490,847,398	70,000,000	**70,000,000**	1,674,435,150	1,674,435,150	1,843,435,150	Takalar					70,000,000	**70,000,000**	
1	05	04	2.01		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	1,020,000,000	274,431,398	35,000,000	35,000,000	1,487,295,150	1,487,295,150	1,541,295,150	Takalar					35,000,000	35,000,000	
1	05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	240,000,000	134,194,558	15,000,000	15,000,000	1,457,295,350	1,457,295,350	1,457,295,350	Takalar	PAD (Pendapatan Bagi hasil)				15,000,000	15,000,000	
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah	500,000,000	73,847,640	5,000,000	5,000,000			4,000,000	Takalar	PAD (Pendapatan Bagi hasil)				5,000,000	5,000,000	
1	05	04	2.01	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	100,000,000	27,229,200	5,000,000	5,000,000			50,000,000	Takalar	PAD (Pendapatan Bagi hasil)				5,000,000	5,000,000	
1	05	04	2.01	04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan K	30,000,000		5,000,000	5,000,000	29,999,800	29,999,800	29,999,800	Takalar	PAD (Pendapatan Bagi hasil)				5,000,000	5,000,000	
1	05	04	2.01	06	Pengadaan Sarana dan rasarana Pencegahan, penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	150,000,000	39,160,000	5,000,000	5,000,000				Takalar	PAD (Pendapatan Bagi hasil)				5,000,000	5,000,000	
1	05	04	2.03		**Investigasi Kejadian Kebakaran**	**Persentase Investigasi Kejadian Kebakaran**	40,000,000	-	5,000,000	5,000,000	56,930,000	56,930,000	56,930,000	Takalar					5,000,000	5,000,000	
1	05	04	2.03	01	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	40,000,000		5,000,000	5,000,000	56,930,000	56,930,000	56,930,000	Takalar	PAD (Pendapatan Bagi hasil)				5,000,000	5,000,000	
1	05	04	2.04		**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	-	99,995,000	5,000,000	5,000,000	0	0	100000000	Takalar					5,000,000	5,000,000	
1	05	04	2.04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah sosialisasi Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap cara-cara pencegahan dini dan pengendalian bahaya kebakaran		99,995,000	5,000,000	5,000,000			100,000,000	Takalar	PAD (Pendapatan Bagi hasil)				5,000,000	5,000,000	
1	05	04	2.05		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	415,000,000	116,421,000	25,000,000	25,000,000	130,210,000	130,210,000	145,210,000	Takalar					25,000,000	25,000,000	
1	05	04	2.05	01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia (Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	200,000,000	116,421,000	10,000,000	10,000,000	115,210,000	115,210,000	115,210,000	Takalar	PAD (Pendapatan Bagi hasil)				10,000,000	10,000,000	
1	05	04	2.05	03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi (Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	200,000,000	-	5,000,000	5,000,000				Takalar	PAD (Pendapatan Bagi hasil)				5,000,000	5,000,000	
1	05	04	2.05	04	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	15,000,000	-	10,000,000	10,000,000	15,000,000	15,000,000	30,000,000	Takalar	PAD (Pendapatan Bagi hasil)				10,000,000	10,000,000	

RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA
PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) TAHUN 2024

KABUPATEN : TAKALAR
PERANGKAT DAERAH : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target			Pagu			Keterangan
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN										
	1	**URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										
	1 05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**					**11,442,570,330**			**12,133,147,443**		
	1 05 01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase pemenuhan urusan penunjang perankat daerah**		10,543,878,630	10,792,570,330			**9,651,873,293**		
	1 05 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		37,000,000	37,000,000			42,420,500		
	1 05 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Renja yang disusun		7,000,000	7,000,000			6,637,400		
	1 05 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Penyusunan Dokumen RKA		5,000,000	5,000,000			7,480,100		
	1 05 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang disusun		5,000,000	5,000,000			7,728,000		
	1 05 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Penyusunan Dokumen DPA-SKPD yang disusun		5,000,000	5,000,000			5,575,000		
	1 05 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusuna Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Penyusunan Dokumen DPA-SKPD yang disusun		5,000,000	5,000,000			5,000,000		
	1 05 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen LPPD SKPD yang disusun		5,000,000	5,000,000			5,000,000		
	1 05 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5,000,000	5,000,000			5,000,000		
	1 05 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		8,620,047,030	8,868,738,730			7,101,811,549		
	1 05 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang menerima gaji (70 orang)		6,710,940,150	6,959,631,850			5,187,584,869		
				Jumlah ASN yang menerima Tunjangan (TPP)		1879106880	1879106880			1,879,106,880		
				Jumlah ASN yang menerima objektifitas Lainnya (12 orang)						-		
	1 05 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun		15,000,000	15,000,000			14,983,000		
	1 05 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		5,000,000	5,000,000			3,878,000		
	1 05 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)		Jumlah dokumen Laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun		10,000,000	10,000,000			16,258,800		

	1	05	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		15,000,000	15,000,000			15,016,000		
	1	05	01	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		2,500,000	2,500,000			3,448,000		
	1	05	01	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		2,500,000	2,500,000			4,200,000		
	1	05	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		5,000,000	5,000,000			5,000,000		
	1	05	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		5,000,000	5,000,000			2,368,000		
	1	05	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		52,500,000	52,500,000			13,440,000		
	1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Pakaian Dinas PDL Beserta Atribut Kelengkapannya		37,500,000	37,500,000			-		
	1	05	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		5,000,000	5,000,000			4,720,000		
	1	05	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian		5,000,000	5,000,000			3,720,000		
	1	05	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah laporan monev kinerja pegawai yang disusun		5,000,000	5,000,000			5,000,000		
	1	05	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**		41,600,000	41,600,000			121,791,800		
	1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4,600,000	4,600,000			8,095,900		
	1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		10,000,000	10,000,000			20,154,800		
	1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		10,000,000	10,000,000			7,995,000		
	1	05	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		5,000,000	5,000,000			4,992,100		
	1	05	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		2,000,000	2,000,000			2,000,000		
	1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD		5,000,000	5,000,000			73,554,000		
	1	05	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		2,500,000	2,500,000			5,000,000		
	1	05	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		2,500,000	2,500,000			-		
	1	05	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**		2,500,000	2,500,000			-		
	1	05	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		2,500,000	2,500,000			-		
	1	05	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		1,740,231,600	1,740,231,600			1,841,649,744		
	1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2,500,000	2,500,000			124,000		
	1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah rekening listrik yang dibayarkan		32,531,600	32,531,600			38,223,744		
								Jumlah rekening air yang dibayarkan						4,743,600		
								Jumlah rekening wifi/komunukasi yang dibayarkan						18,048,000		
	1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan tenaga pendukung non ASN (tenaga administrasi,		1,705,200,000	1,705,200,000			1,780,510,400		
	1	05	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		35,000,000	35,000,000			515,743,700		
	1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)		Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat dan Dua atau Lapangan (Kendaraan dinas Operasional dan Damkar)		25,000,000	25,000,000			210,640,000		
	1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		5,000,000	5,000,000			4,380,000		
	1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah pemeliharan bangunan pos penjagaan satpol PP dan Damkar		5,000,000	5,000,000			300,723,700		

	1	**05**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban umum**		580,000,000	580,000,000			**806,839,000**		
	1	05	02	2.01		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**Presentasi Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten yang ditangani**		430,000,000	430,000,000			651,455,000		
	1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan pengawalan		Jumlah Patoli Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan pengawalan		100,000,000	100,000,000			177,097,000		
	1	05	02	2.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada		Jumlah Patroli Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		25,000,000	25,000,000			-		
	1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		25,000,000	25,000,000			-		
	1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumlah pos kamling serta Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum		100,000,000	100,000,000			474,358,000		
	1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia		Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia		50,000,000	50,000,000			-		
	1	05	02	2.01	06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan		50,000,000	50,000,000			-		
	1	05	02	2.01	07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumlah sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum (pengadaan dan perawatan Pakaian anti huru hara,ht dan alat pendukung operasional lapangan)		50,000,000	50,000,000			-		
	1	05	02	2.01	08	P e n y u s u n a n S O P Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat		Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan		5,000,000	5,000,000			-		
	1	05	02	2.01	09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada (Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)		Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani		25,000,000	25,000,000			-		
	1	05	02	2.02		**Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota**		**Persentase Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota**		150,000,000	150,000,000			155,384,000		
	1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota (Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/		25,000,000	25,000,000			-		
	1	05	02	2.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota		Jumlah Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota		100,000,000	100,000,000			155,384,000		
	1	05	02	2.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota		Jumlah Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota		25,000,000	25,000,000			-		

	1	**05**	**04**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**		**Persentase Penanggulangan bencana kebakaran**		70,000,000	**70,000,000**			**1,674,435,150**		
	1	05	04	2.01		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**		35,000,000	35,000,000			1,487,295,150		
	1	05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya		15,000,000	15,000,000			1,457,295,350		
	1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		5,000,000	5,000,000			-		
	1	05	04	2.01	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran		5,000,000	5,000,000			-		
	1	05	04	2.01	04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota		5,000,000	5,000,000			29,999,800		
	1	05	04	2.01	06	Pengadaan Sarana dan rasarana Pencegahan, penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait		5,000,000	5,000,000			-		
	1	05	04	2.03		**Investigasi Kejadian Kebakaran**		**Persentase Investigasi Kejadian Kebakaran**		5,000,000	5,000,000			56,930,000		
	1	05	04	2.03	01	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran		Jumlah Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran		5,000,000	5,000,000			56,930,000		
	1	05	04	2.04		**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**		**Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**		5,000,000	5,000,000			-		
	1	05	04	2.04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat		Jumlah sosialisasi Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap cara-cara pencegahan dini dan pengendalian bahaya kebakaran		5,000,000	5,000,000			-		
	1	05	04	2.05		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**		25,000,000	25,000,000			130,210,000		
	1	05	04	2.05	01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia (Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia		10,000,000	10,000,000			115,210,000		
	1	05	04	2.05	03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi (Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis		5,000,000	5,000,000			-		
	1	05	04	2.05	04	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal		10,000,000	10,000,000			15,000,000		
													JUMLAH			

Takalar, ... 2024

Mengetahui,
Kepala Bappelitbangda Kabupaten Takalar

(Drs. Achmad Rivai, M.Si)
NIP. 196810121989081001

Kasatpol-PP, Damkar & Penyelamatan

(Sirajuddin Saraba, S.Sos.,M.Si)
NIP. 19750625 199311 1 001

BAB V
PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Apabila dalam pelaksanaan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar Tahun 2024 terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2024, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada Perubahan Renja dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar Tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPD dalam mendukung Tujuan dan Sasaran Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk:
   a. Melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2024, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Belana Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024.

Takalar, 2024

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Takalar,

Sirajuddin Saruba, S.Sos., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19730626 199311 1 001

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, Atas Rahmat dan Karunia-Nya, Sekretariat DPRD Kabupaten Takalar dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA-SKPD) tahun Anggaran 2024.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Petangkat Daerah (RENJA- SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2024 ini merupakan tahapan proses perencanaan kegiatan tahunan yang mangacu pada kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan sebalumnya dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah kegiatan (RENSTR-SKPD) yang berisi Evaluasi Pelaksanaan Rencan Kerja Sekretariat DPRD dan capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Sekreatiat DPRD, Reviuw terhadap Rencana Awal RKPD, Penelaahan Program dan Usulan Kegiatan Masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Petangkat Daerah (RENJA-SKPD) Tahun Anggaran 2024 Sekretariat DPRD Kabupaten Takalar ini, tentunya masih terdapat kekurangan-kekurangan, untuk itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan, guna penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Takalar, Juli 2024
Sekretaris DPRD Kabupaten Takalar

JAMALUDDIN HASAN, SE.MM.
Pangkat : Pembina Tingkat I.
NIP. : 19691012 199803 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **1**
DAFTAR ISI **2**
DAFTAR TABEL **3**
BAB I PENDAHULUAN **4**

1.1 Latar Belakang 4
1.2 Landasan Hukum 5
1.3 Maksud dan Tujuan 7
1.3.1 Maksud 7
1.3.2 Tujuan 7

1.4 Sistematika Penulisan 7
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2024 ..... **9**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Triwulan II Tahun 2024 9
2.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 16
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TAKALAR **21**
BAB IV PENUTUP **43**

2.3. Catatan Penting 43
2.4. Kaidah Pelaksanaan 43
2.5. Rencana Tindak Lanjut 44

DAFTAR TABEL

Tabel II-1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD dan Pencapaian Renstra Sekretariat DPRD s/d Tahun 2024 Kabupaten Takalar..... 14

Tabel II-2 Capaian Program dan Kegiatan Tahuin 2024 Triwulan II……28

Tabel II-3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Takalar 28

Tabel III-1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Takalar Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025……28

Tabel III-2 Rencana Program Dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dprd Kab. Takalar Tahun Anggaran 2024……50

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2024 ini mengacu pada Rancangan Awal RKPD, Renstra OPD, serta Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta berdasarkan kegiatan pada usulan masyarakat dan memuat perubahan seluruh kegiatan, target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran baik yang mengalami perubahan maupun tidak mengalami perubahan. Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 360 ayat (1) dan ayat (3) mengamanahkan bahwa Perangkat Daerah menyusun rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. berpedoman pada:

a. Rancangan Perubahan RKPD; dan
b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 perlu dilakukan penyesuaian target indikator kinerja Tahun 2024 melalui Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024. Sesuai amanah Permendagri 86 Tahun 2017 dalam Pasal 361 ayat (1), Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360 ayat (3), terdiri atas:

a. Perumusan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
b. Penyajian rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar Kabupaten Takalar Tahun 2024 selanjutnya menjadi landasan penyusunan Perubahan RKA Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2024. Dalam menyempurnakan Perubahan Rencana Kerja tersebut, maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Takalar Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
18. Peraturan Bupati Takalar Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Takalar tahun 2021 Nomor 31);
19. Peraturan Bupati Takalar Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Takalar tahun 2022 Nomor 3);
20. Peraturan Bupati Takalar Nomor 223 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 223).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 disusun dengan maksud:

1. Untuk menjabarkan program dan kegiatan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar kedalam program/kegiatan tahunan;
2. Menyiapkan acuan bagi RAPBD;
3. Menyiapkan kerangka evaluasi kinerja program/kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 adalah agar terbangun konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 terdiri atas 5 (lima) bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perubahan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2024

Pada Bab ini berisi tiga hal pokok yaitu Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Hambatan, Upaya Pencapaian dan Rekomendasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini berisi tiga hal pokok yaitu Tujuan dan Sasaran, Review terhadap Rancangan Perubahan Renja Tahun 2024, Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisikan uraian penutup berupa Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; Kaidah-kaidah pelaksanaan; serta Rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Triwulan II Tahun 2024

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Takalar Tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun berjalan Tahun 2024, mengacu pada APBD tahun berjalan yang telah disahkan pada waktu penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Sekretariat DPRD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun sebelumnya.

Dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Takalar Tahun 2024 terdapat 2 (dua) program yang dijabarkan melalui 16 (Enam belas kegiatan) dan 70 (tujuh puluh) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Perencanaan, melaksanakan Sub Kegiatan diantaranya :
   1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   - Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   - Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
   - Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA-SKPD,-
   - Koordinasi dan penyusunan Perubahan Dokumen DPPA-SKPD,-
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD,-
   - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,-

2.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

1.1. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ,-

- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD,-

1.2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ,-

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan,-
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah,-

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kanto,-
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor,-
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga,-
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan,-
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan,-
- Fasilitas Kunjungan Tamu,-
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD,-
- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD,-
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD,-

1.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,-

- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan,-
- Pengadaan Mebel,-
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya,-
- Pengadaan Aset Tetap Lainnya,-
- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya,-

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya,-

1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,-
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat,-
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor,-
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor,-

1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,-
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan,-
- Pemeliharaan Mebel,-
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya,-
- Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya,-
- Pemeliharaan Aset Tak Berwujud,-
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya,-
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya,-
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya,-

1.7. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD,-
- Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD,-
- Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD,-
- Pelaksanaan Medical Check Up DPRD,-

1.8. Layanan Administrasi DPRD (Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya Digunakan oleh Sekretariat DPRD,-
- Penyelenggaraan Administrasi Keanggotan DPRD,-
- Fasilitasi Fraksi DPRD,-
- Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD,-
- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD,-

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan FungsiDPRD,-

2.1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD,-
- Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah,-
- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah,-
- Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan,-

- Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik,-
- Penyusunan Tata Tertib DPRD,-

2.2. Pembahasan Kebijakan Anggaran,-

- Pembahasan KUA dan PPAS,-
- Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- Pembahasan APBD,-
- Pembahasan APBD Perubahan,-
- Pembahasan Laporan Semester,-
- Pembahasan Pertanggungjawaban APBD,-

2.3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan,-

- Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum,-
- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur,-
- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat,-
- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian,-
- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam,-
- Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan,-
- Pengawasan Penggunaan Anggaran,-
- Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah,-

2.4. Peningkatan Kapasitas DPRD,-

- Orientasi DPRD,-
- Pendalaman Tugas DPRD,-
- Publikasi dan Dokumentasi Dewan,-
- Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli,-
- Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi,-
- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat,-
- Penyusunan Program Kerja DPRD,-

2.5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat,-

- Kunjungan kerja dalam daerah,-
- Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD,-
- Pelaksanaan Reses,-

2.6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD,-

- Penyusunan Kode Etik DPRD,-
- Pengawasan Kode Etik DPRD,-

2.7. Pembahasan Kerja Sama Daerah

- Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah
- Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi

2.8. Fasilitasi Tugas DPRD,-

- Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD,-
- Penyusunan Laporan Kinerja DPRD,-
- Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah,-
- Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

Tabel III-1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD dan Pencapaian Renstra Sekretariat DPRD s/d Tahun 2024 Kabupaten Takalar

No	Sasaran	Kode				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun **2023-2026** (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (**2023**)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun **2024**) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Per Bulan										Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Kinerja Per Bulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun **2024**)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun **2024**) yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun **2024** (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun **2024**)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun (5)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
																Januari			Februari			Maret			I			April			Mei			Juni			II			III			IV										
								K	Satuan	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		
1	2	3				4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			20			24			25		26 = 25/6 x 100%		27 = 7 + 25		28 = 27/x 100%		29	30
						DINAS PENDIDIKAN																																														
		4	**02**			**SEKRETARIAT DPRD**				**112,025,213,856**		**25,589,622,372**			**33,077,444,247**		**1,250,937,573**			**1,879,402,062**			**1,759,767,655**			**4,890,107,290**												**6,147,546,604**			-			-			**11,037,653,894**	27.93%	33.37%		**36,630,112,266**				
	Meningkatnya Kualitas Kinerja dan keuangan	**4**	**02**	**01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah (%)**	**100%**	**Persen**	**89,580,605,856**	**24.61%**	**16,959,547,770**	**100%**	**22,272,982,827**			**1,007,778,257**			**1,352,446,184**			**1,462,886,455**	**9.22%**	**3,823,110,896**											**25.84%**	**4,540,877,044**	**0.00%**	-	**0.00%**	-	**35.05%**	**8,363,987,940**	**35.05%**	**37.55%**	**34.30%**	**25,326,371,710**	**34.30%**	**28.27%**	**Sekretariat DPRD**	
		4	02	01	2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang terlaksana**	100%	Persen	275,000,000	18.18%	81,591,500	100%	178,205,340			-			26,888,800			-	0.00%	26,888,800											9.09%	26,479,900	0.00%	-	0.00%	-	9.09%	53,368,700	9.09%	29.95%	20.45%	134,960,200	20.45%	49.08%		
	Terpenuhinya Dukungan Administrasi, sarana dan prasarana, Pelaporan Capaian Kinerja, Kedisiplinan serta Peningkatan SDM Sekretariat DPRD	4	02	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	– Jumlah Renja yang disusun	8	Dokumen	35,000,000	2	35,040,300	2	27,591,940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25,965,900	1	25,965,900	-	-	-	-	1	25,965,900	50%	94.11%	3	41,006,200	38%	117%		
		4	02	01	2.01	02 Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	4	Dokumen	40,000,000	1	14,008,200	1	29,619,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	1	14,008,200	25%	35%		
		4	02	01	2.01	03 Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi Penyusunan Perubahan PERA-SKPD	4	Dokumen	40,000,000	1	13,043,000	1	29,394,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	1	13,043,000	25%	33%		
		4	02	01	2.01	04 Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4	Dokumen	40,000,000	1	14,768,000	1	28,985,900	-	-	-	2,459,300	-	-	-	-	2,459,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	8%	1	17,227,300	25%	43%		
		4	02	01	2.01	05 Koordinasi dan penyusunan Perubahan Dokumen DPPA-SKPD	Jumlah Koordinasi penyusunan Dokumen Perubahan DPPA-SKPD	4	Dokumen	40,000,000	1	11,287,000	1	28,092,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	1	11,287,000	25%	28%		
		4	02	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah koordinasi penyusunan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang	4	Laporan	40,000,000	2	13,445,000	1	29,005,500	-	-	-	24,429,500	-	-	-	-	24,429,500	-	514,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	514,000	-	-	-	-	0%	86%	2	38,388,500	50%	96%		
		4	02	01	2.01	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK), dan Evaluasi Jabatan	16	Laporan	40,000,000	-	-	4	5,515,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%		

| | | |

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Tugas :menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan menyediakan serta membantu mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Fungsi :

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar;
2. Pelaksanaan dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar dalam bidang Legislasi;
3. Pelaksanaan dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar dalam bidang penganggaran dan pengawasan.

Berdasarkan uraian tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur Pelayanan dan fasilitasi kedewanan merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif untuk mencapai suatu tujuan dalam upaya meningkatkan pelayanan dan fasilitasi DPRD dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, keberhasilan dankegagalan suatu perencanaan pelayanan dan fasilitasi kedewanan sangat bergantung dari proses penyusunan perencanaan yang dilaksanakan baik dari tingkat bawah (bottom-up) maupun dari tingkat atas (top-down), sehingga peran serta masyarakat (stakeholders) sangat mendukung bagi tercapainya pelayanan dan fasilitasi yang lebih baik. Untuk itu dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Takalar tahun 2024, maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan

dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan partisipatif serta untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan tabel berikut dapat dilihat bahwa realisasi tahun 2024 terdapat target Indikator Kinerja Kunci (IKK) sudah dapat dicapai dengan baik (memenuhi target yang ditetapkan).

Tabel III-2
Capaian Program dan Kegiatan Tahuin 2024 Triwulan II

NO	Uraian	Keterangan Kinerja (K)							Rata-rata Capaian Output (% dan Predikat Kinerja			
		Jumlah Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Non APBD	Jumlah Indikator	Capaian 0%	Capaian <100%	Capaian 100%	Capaian >100%	K	Rp	K	
1.	Program	2 Program	APBD	2 Indikator	0	2	0	0	37,93%	33,37%	SR	S
2.	Kegiatan	16 Kegiatan	APBD	16 Indikator	4	12	0	0	35.05%	37.55%	SR	S
3.	Sub Kegiatan	70 Sub Kegiatan	APBD	71 Indikator	38	32	1	0	42,95%	43,14%	SR	S

SKALA PENILAIAN RATA-RATA KINERJA DAN PREDIKAT KINERJA HASIL EVALUASI RPJMD MENGGUNAKAN KRITERIA SEBAGAI BERIKUT:

1. 91% ≤ 100% Sangat Tinggi
2. 76% ≤ 90% Tinggi
3. 66% ≤ 75% Sedang
4. 51% ≤ 65% Rendah
5. ≤ 50% Sangat Rendah

Tabel III-3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Takalar

NO.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal (n-2)	Target Kinerja Pada Tahun Ke _				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	2026
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1	Tujuan 1: Meningkatkan kualitas dukungan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD	Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Dukungan Sekretariat DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Sasaran 1 : Meningkatnya efektifitas fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan DPRD	1 Presentase Ranperda yang ditetapkan menjadi Perda.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2 Presentase Aspirasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		3 Presentase kesesuaian KUA PPAS dengan RKPD dalam APBD yang ditetapkan secara tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		4 Persentase rekomendasi hasil pengawasan DPRD yang ditindaklanjuti oleh OPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Tujuan 2 : Memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi pada Sekretariat DPRD	CC	BB	A	A	A	A
	Sasaran 2.1 : Meningkatnya Kualitas Kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP pada Sekretariat DPRD	60	71	90	90	90	90

Berdasarkan uraian Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Takalar 2023-2026 tersebut di atas dapat menunjukan gambaran hasil yang ingin dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Takalar sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pernyatan Tujuan dan sasaran ditunjukan dengan target capaian kinerja terukur (kuantitatif maupun kualitatif) yang direncanakan pencapaiannya melalui target kinerja sasaran tahunan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun.

Sekretariat DPRD telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada tugas, fungsi dan kewenangan yang dimikili Sekretariat DPRD. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2023-2026, sedangkan yang fokus pada indikator pendukung internal organisasi tidak dijadikan sebagai IKU Sekretariat DPRD namun diuraikan pada perjanjian kinerja.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TAKALAR

Program dan kegiatan merupakan program prioritas pada Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Takalar Tahun 2024 yang mengacu kepada Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2023-2026. Pemilihan kegiatan dan program tersebut berdasarkan strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Takalar Tahun 2024.

Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakaan secara sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencaapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Indikator kinerja program (*outcome*/hasil) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Indikator kinerja kegiatan (hasil antara / *intermediate outcome*) adalah sebuah hasil akumulasi dari output sub kegiatan yang dapat diidentifikasi dan diukur dalam waktu dekat, dan merupakan indikator hasil jangka panjang (outcome) dari program. Sedangkan sub kegiatan (*output* / keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu sub kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu sub kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) pada untuk setiap indikator kinerja merupakan data capaian awal tahun perencanaan dan menjadi titik tolak perumusan target kinerja pada periode perencanaan.

Rumusan rencana program/kegiatan serta pendanaan dari Sekretariat DPRD Kab. Takalar untuk periode 2024 dengan jumlah kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat

DPRD Kabupaten Takalar tahun 2024 adalah sebesar **Rp.30.625.237.239,- (Tiga Puluh Milyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

2.2.1.1.1.1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp23.745.235.239,-

2.9. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp70.000.000,-

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp10.000.000,-
- Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp10.000.000,-
- Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp10.000.000,-
- Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp10.000.000,-
- Koordinasi dan penyusunan Perubahan Dokumen DPPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp10.000.000,-
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp10.000.000,-
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp10.000.000,-

2.10. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp4.827.069.000,-

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan anggaran sebesar Rp 4.737.069.000,-
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan anggaran sebesar Rp10.000.000,-
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran sebesar Rp25.000.000,-
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dengan anggaran sebesar Rp25.000.000,-
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan anggaran sebesar Rp10.000.000,-
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan anggaran sebesar Rp10.000.000,-

2.11. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp55.000.000,-

- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran sebesar Rp15.000.000,-
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran sebesar Rp15.000.000,-
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran sebesar Rp25.000.000,-

2.12. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp838.100.000,-

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan anggaran sebesar Rp 44.100.000,-
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan anggaran sebesar Rp15.000.000,-
- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan anggaran sebesar Rp15.000.000,-
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan anggaran sebesar Rp375.000.000,-
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dengan anggaran sebesar Rp 354.000.000,-
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan anggaran sebesar Rp 35.000.000,-

2.13. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp635.000.000,-

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kanto dengan anggaran sebesar Rp50.000.000,-
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp75.000.000,-
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran sebesar Rp150.000.000,-
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp85.000.000,-
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp70.000.000,-
- Fasilitas Kunjungan Tamu dengan anggaran sebesar Rp115.000.000,-
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp15.000.000,-

- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan anggaran sebesar Rp25.000.000,-
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dengan anggaran sebesar Rp50.000.000,-

2.14. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp440.000.000,-

- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp35.000.000,-
- Pengadaan Mebel dengan anggaran sebesar Rp50.000.000,-
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp15.000.000,-
- Pengadaan Aset Tetap Lainnya dengan anggaran sebesar Rp75.000.000,-
- Pengadaan Aset Tak Berwujud dengan anggaran sebesar Rp65.000.000,-
- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp50.000.000,-
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp150.000.000,-

2.15. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp1.090.967.200,-

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar Rp15.000.000,-
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp451.652.200
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp55.000.000,-
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp569.315.000,-

2.16. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp1.259.230.000,-

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp714.230.000,-
- Pemeliharaan Mebel dengan anggaran sebesar Rp15.000.000,-
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp15.000.000,-
- Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya dengan anggaran sebesar Rp50.000.000,-

- Pemeliharaan Aset Tak Berwujud dengan anggaran sebesar Rp15.000.000,-
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp350.000.000,-
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp55.000.000,-
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp50.000.000,-

2.17. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD dengan anggaran sebesar Rp13.956.756.039,-
- Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD dengan anggaran sebesar Rp13.436.516.039,-
- Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD dengan anggaran sebesar Rp460.240.000,-
- Pelaksanaan Medical Check Up DPRD dengan anggaran sebesar Rp60.000.000,-

2.18. Layanan Administrasi DPRD (Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya Digunakan oleh Sekretariat DPRD dengan anggaran sebesar Rp573.113.000,-
- Penyelenggaraan Administrasi Keanggotan DPRD dengan anggaran sebesar Rp25.000.000,-
- Fasilitasi Fraksi DPRD dengan anggaran sebesar Rp88.840.000,-
- Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD dengan anggaran sebesar Rp159.273.000,-
- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD dengan anggaran sebesar Rp300.000.000,-

3. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD dengan anggaran sebesar Rp6.880.002.000,-

3.1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD dengan anggaran sebesar Rp1.464.526.000,-
- Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah dengan anggaran sebesar Rp137.400.000,-
- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dengan anggaran sebesar Rp791.078.000,-
- Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan dengan anggaran sebesar Rp131.048.000,-

- Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik dengan anggaran sebesar Rp400.000.000,-
- Penyusunan Tata Tertib DPRD dengan anggaran sebesar Rp5.000.000,-

3.2. Pembahasan Kebijakan Anggaran dengan anggaran sebesar Rp1.563.577.000,-

- Pembahasan KUA dan PPAS dengan anggaran sebesar Rp72.800.000,-
- Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dengan anggaran sebesar Rp68.800.000,-
- Pembahasan APBD dengan anggaran sebesar Rp437.978.000,-
- Pembahasan APBD Perubahan dengan anggaran sebesar Rp319.949.000,-
- Pembahasan Laporan Semester dengan anggaran sebesar Rp35.987.000,-
- Pembahasan Pertanggungjawaban APBD dengan anggaran sebesar Rp628.963.000,-

3.3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp240.000.000,-

- Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum dengan anggaran sebesar Rp30.000.000,-
- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur dengan anggaran sebesar Rp30.000.000,-
- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan anggaran sebesar Rp30.000.000,-
- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian dengan anggaran sebesar Rp30.000.000,-
- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam dengan anggaran sebesar Rp30.000.000,-
- Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dengan anggaran sebesar Rp30.000.000,-
- Pengawasan Penggunaan Anggaran dengan anggaran sebesar Rp30.000.000,-
- Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dengan anggaran sebesar Rp30.000.000,-

3.4. Peningkatan Kapasitas DPRD dengan anggaran sebesar Rp1.294.000.000,-

- Orientasi DPRD dengan anggaran sebesar Rp10.000.000,-

- Pendalaman Tugas DPRD dengan anggaran sebesar Rp978.000.000,-
- Publikasi dan Dokumentasi Dewan dengan anggaran sebesar Rp150.000.000,-
- Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli dengan anggaran sebesar Rp90.000.000,-
- Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi dengan anggaran sebesar Rp25.200.000,-
- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp25.000.000,-
- Penyusunan Program Kerja DPRD dengan anggaran sebesar Rp15.000.000,-

3.5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp1.492.175.000,-
- Kunjungan kerja dalam daerah dengan anggaran sebesar Rp50.000.000,-
- Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dengan anggaran sebesar Rp12.000.000,-
- Pelaksanaan Reses dengan anggaran sebesar Rp1.430.175.000,-

3.6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD dengan anggaran sebesar Rp39.000.000,-
- Penyusunan Kode Etik DPRD dengan anggaran sebesar Rp29.000.000,-
- Pengawasan Kode Etik DPRD dengan anggaran sebesar Rp10.000.000,-

3.7. Pembahasan Kerja Sama Daerah dengan anggaran sebesar Rp0
- Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah dengan anggaran sebesar Rp0
- Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi dengan anggaran sebesar Rp0

3.8. Fasilitasi Tugas DPRD dengan anggaran sebesar Rp786.724.000,-
- Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD dengan anggaran sebesar Rp701.724.000,-
- Penyusunan Laporan Kinerja DPRD dengan anggaran sebesar Rp15.000.000,-
- Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah dengan anggaran sebesar Rp35.000.000,-
- Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD dengan anggaran sebesar Rp35.000.000,-

Tabel III-1
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target Kinerja 2024			Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Renja PD 2024	Sebelum	Sesudah	Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
															113,456,400							
	4	4.02				SEKRETARIAT DPRD							25,194,940,983	33,077,444,247	32,963,987,847							30,737,830,239	
	4	4.02	01			PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA		100%	83.24%	100%	100%	100%	20,024,060,883	22,272,982,827	22,159,526,427						100%	23,922,109,839	
	4	4.02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian output sub kegiatan perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	57.14%	100%	100%	100%	41,358,100.00	178,205,340	178,205,340				Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	pegawai	100%	70,000,000	
	4	4.02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	6,052,400	27,591,940	27,591,940	Takalar	Pajak Daerah		Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	pegawai	2 Dokumen	10,000,000	
	4	4.02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6,079,800	29,619,700	29,619,700	Takalar	Pajak Daerah		Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	pegawai	1 Dokumen	10,000,000	
	4	4.02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5,964,400	29,394,200	29,394,200	Takalar	Pajak Daerah		Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	pegawai	1 Dokumen	10,000,000	
	4	4.02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6,455,900	28,985,900	28,985,900	Takalar	Pajak Daerah		Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	pegawai	1 Dokumen	10,000,000	
	4	4.02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6,235,700	28,092,500	28,092,500	Takalar	Pajak Daerah		Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	pegawai	1 Dokumen	10,000,000	
	4	4.02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	2 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	5,054,300	29,005,500	29,005,500	Takalar	Pajak Daerah		Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	pegawai	4 Laporan	10,000,000	
	4	4.02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	5,515,600	5,515,600	5,515,600	Takalar	Pajak Daerah		Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	pegawai	4 Laporan	10,000,000	
	4	4.02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Laporan Keuangan tepat waktu dan akurat	100%	99.91%	100%	100%	100%	3,961,790,134	4,588,210,508	4,474,754,108				Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	pegawai	100%	5,003,943,600	
	4	4.02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48/12 Orang/bulan	48/12 Orang/bulan	48/12 Orang/bulan	48/12 Orang/bulan	48/12 Orang/bulan	3,932,990,134	4,487,264,408	4,373,808,008	Takalar	DAU		Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	pegawai	12 Orang/bulan	4,913,943,600	
	4	4.02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-	Takalar					2 Dokumen	10,000,000	
	4	4.02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	48 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	6,935,400	33,512,700	33,512,700	Takalar	Pajak Daerah		Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	pegawai	12 Dokumen	25,000,000	
	4	4.02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	6,554,300	30,446,300	30,446,300	Takalar	Pajak Daerah		Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	pegawai	1 Laporan	25,000,000	
	4	4.02	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	8 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	4,874,500	5,324,500	5,324,500	Takalar	Pajak Daerah		Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	pegawai	2 Dokumen	10,000,000	

	4	4.02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	5,873,500	27,100,300	27,100,300	Takalar	Pajak Daerah		Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	pegawai	4 Laporan	10,000,000	
	4	4.02	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4,562,300	4,562,300	4,562,300	Takalar	Pajak Daerah		Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	pegawai	1 Dokumen	10,000,000	
	4	**4.02**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase rata-rata Capaian Output sub kegiatan Administrasi Umum Barang Milik Daerah**	**100%**	**66.67%**	**100%**	**100%**	**100%**	**10,568,100**	**13,042,500**	**13,042,500**				**Terwujudnya tata**	**pegawai**	**100%**	**55,000,000**	
	4	4.02	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				2 Dokumen	15,000,000	
	4	4.02	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	5,456,300	6,806,300	6,806,300	Takalar	Pajak Daerah		Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Pegawai / Anggota DPRD	2 Laporan	15,000,000	
	4	4.02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5,111,800	6,236,200	6,236,200	Takalar	Pajak Daerah		Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Pegawai / Anggota DPRD	1 Laporan	25,000,000	
	4	**4.02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase rata-rata Capaian Output sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	100%	40%	100%	100%	100%	**43,316,300**	**56,704,300**	**56,704,300**				Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	pegawai	100%	838,100,000	
	4	4.02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	98 Paket	98 Paket	98 Paket	-	-	-	Takalar	-				98 Paket	44,100,000	
	4	4.02	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	-	-	-	Takalar	-				5 Dokumen	15,000,000	
	4	4.02	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	16 Dokumen	2 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	5,260,600	7,764,300	7,764,300	Takalar	Lain-lain PAD yang Sah		Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Pegawai	4 Dokumen	15,000,000	
	4	4.02	01	2.05	06	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	45 Orang	45 Orang	45 Orang	10,970,000	10,950,000	10,950,000	Takalar	Lain-lain PAD yang Sah		Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Pegawai	45 Orang	375,000,000	
	4	4.02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	120 Orang	120 Orang	120 Orang	1,180,100	1,146,400	1,146,400	Takalar	Lain-lain PAD yang Sah		Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Pegawai dan Masyarakat	## Orang	354,000,000	
	4	4.02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	45 Orang	45 Orang	45 Orang	25,905,600	36,843,600	36,843,600	Takalar	Lain-lain PAD yang Sah		Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Pegawai	45 Orang	35,000,000	
	4	**4.02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase rata-rata Capaian Output sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**84.40%**	**100%**	**100%**	**100%**	**214,596,700**	**953,609,440**	**953,609,440**				**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**	**pegawai**	**100%**	**635,000,000**	
	4	4.02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	11,258,000	22,549,500	22,549,500	Takalar	Lain-lain PAD yang Sah		Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Pegawai	3 Paket	50,000,000	
	4	4.02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	3 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	36,074,000	628,804,840	628,804,840	Takalar	Lain-lain PAD yang Sah		Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Pegawai	4 Paket	75,000,000	
	4	4.02	01	2.06	03	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	48 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	2,508,000	26,478,900	26,478,900	Takalar	Pajak daerah		Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Pimpinan DPRD	12 Paket	150,000,000	
	4	4.02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket		5 Paket	5 Paket	5 Paket	21,517,900	48,260,000	48,260,000	Takalar	Lain-lain PAD yang Sah		Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Pegawai	5 Paket	85,000,000	
	4	4.02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	220 Dokumen	55 Dokumen	55 Dokumen	55 Dokumen	55 Dokumen	60,264,000	106,800,000	106,800,000	Takalar	Lain-lain PAD yang Sah		Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Pegawai	55 Dokumen	70,000,000	
	4	4.02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	200 Laporan	46 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	67,500,000	105,600,000	105,600,000	Takalar	Lain-lain PAD yang Sah		Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Pegawai	50 Laporan	115,000,000	

	4	4.02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 kali	-	6 Kali	6 Kali	20 Laporan	15,474,800	15,116,200	15,116,200	Takalar	Lain-lain PAD yang Sah		Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Pegawai	20 Laporan	15,000,000	
	4	4.02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	30 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen	-	-	-	-	-				30 Dokumen	25,000,000	
	4	4.02	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	-				1 Dokumen	50,000,000	
	4	**4.02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase rata-rata capaian Nilai Aset Pemerintah Bertambah**	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-				Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	pegawai	100%	440,000,000	
	4	4.02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	-	-	-	-				1 Unit	35,000,000	
	4	4.02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	5 Unit	5 Unit	5 Unit	-	-	-	-	-				5 Unit	50,000,000	
	4	4.02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	3 Unit	3 Unit	3 Unit	-	-	-	-	-				3 Unit	15,000,000	
	4	4.02	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	-	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	-	-	-	-				1 Unit	75,000,000	
	4	4.02	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	-	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	-	-	-	-				1 Unit	65,000,000	
	4	4.02	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	4 Unit	4 Unit	4 Unit	-	-	-	-	-				4 Unit	50,000,000	
	4	4.02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	4 Unit	4 Unit	4 Unit	-	-	-	-	-				4 Unit	150,000,000	
	4	**4.02**	**01**	**2.08**	**01 2**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase rata-rata capaian output kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**631,871,210**	**1,083,546,200**	**1,083,546,200**				**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**	**pegawai**	**100%**	**1,090,967,200**	
	4	4.02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6,436,400	6,452,600	6,452,600	Takalar	Lain-lain PAD yang Sah		Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Pegawai	12 Laporan	15,000,000	
	4	4.02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Rekening	36 Rekening	36 Rekening	36 Rekening	36 Rekening	474,234,810	463,893,600	463,893,600	Takalar	DAU		Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Pegawai	36 Laporan	451,652,200	
	4	4.02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-	Takalar					12 Laporan	55,000,000	
	4	4.02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	151,200,000	613,200,000	613,200,000	Takalar	Pajak Daerah		Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Pegawai	12 Laporan	569,315,000	
	4	**4.02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Aset Milik Pemerintah**	**100%**	**96.36%**	**100%**	**100%**	**100%**	**304,074,000**	**445,826,000**	**445,826,000**				**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**	**Pegawai dan Pimpinan DPRD**	**100%**	**1,259,230,000**	
	4	4.02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	120 Unit	29 Unit	30 Unit	30 Unit	30 Unit	270,374,000	299,610,000	299,610,000	Takalar	Pajak Daerah		Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Pegawai dan Pimpinan DPRD	30 Unit	714,230,000	
	4	4.02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	-	5 Unit	5 Unit	5 Unit	-	-	-	-	-				5 Unit	15,000,000	
	4	4.02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	7 Unit	7 Unit	7 Unit	-	-	-	-	-				7 Unit	15,000,000	
	4	4.02	01	2.09	07			-	-				-	-	-	-	-						
	4	4.02	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	-	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	-	-	-	-				1 Unit	50,000,000	
	4	4.02	01	2.09	09			-	-				-	-	-	-	-						
	4	4.02	01	2.09	10	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	-	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	-	-	-	-				1 Unit	10,000,000	
	4	4.02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	52 unit	13 unit	13	13	13	20,500,000	123,866,000	123,866,000	Takalar	Lain-lain PAD yang Sah		Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Pegawai	13 Unit	350,000,000	
	4	4.02	01	2.09	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	4	4	4	13,200,000	-	-	-	-				4 Unit	55,000,000	
	4	4.02	01	2.09	13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 unit	11 unit	4	4	4	-	22,350,000	22,350,000	Takalar	Lain-lain PAD yang Sah		Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Pegawai	4 Unit	50,000,000	

	4	**4.02**	**01**	**2.15**		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD**	**100%**	**92.42%**	**100%**	**100%**	**100%**	**14,438,703,539**	**14,505,473,539**	**14,505,473,539**				**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**	**Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD**	**100%**	**13,956,756,039**	
	4	4.02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	30 / 12 Org / Bulan	30 / 12 Org / Bulan	30 / 12 Org / Bulan	30 / 12 Org / Bulan	35 / 12 Org / Bulan	13,436,516,039	13,436,516,039	13,436,516,039	Takalar	Pajak Daerah		Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Pimpinan dan Anggota DPRD	35 / 12 Org / Bulan Orang/Bulan	13,436,516,039	
	4	4.02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	24 Paket	6 Paket	6 Paket	6 Paket	6 Paket	942,187,500	965,357,500	965,357,500	Takalar	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Pimpinan dan Anggota DPRD	6 Paket	460,240,000	
	4	4.02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	120 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	35 Orang	60,000,000	103,600,000	103,600,000	Takalar	Lain-lain PAD yang Sah		Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik		30 Orang	60,000,000	
	4	**4.02**	**01**	**2.16**		**Layanan Administrasi DPRD**	**Terpenuhinya Operasional Rumah Tangga Pimpinan DPRD**	**100%**	**95.65%**	**100%**	**100%**	**100%**	**377,782,800**	**448,365,000**	**448,365,000**				**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**	**Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD**	**100%**	**573,113,000**	
	4	4.02	01	2.16	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				30 Dokumen	25,000,000	
	4	4.02	01	2.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	28 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	15,165,400	40,990,400	40,990,400	Takalar	Lain-lain PAD yang Sah		Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Pimpinan dan Anggota Fraksi	7 Laporan	88,840,000	
	4	4.02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	16 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	62,617,400	107,367,400	107,367,400	Takalar	Lain-lain PAD yang Sah		Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Pimpinan dan Anggota Fraksi	Laporan	159,273,000	
	4	4.02	01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	48 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	300,000,000	300,007,200	300,007,200	Takalar	Lain-lain PAD yang Sah		Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Pimpinan DPRD	12 Paket	300,000,000	
	4	**4.02**	**02**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**		100%	81.51%	100%	100%	100%	**5,170,880,100**	**10,804,461,420**	**10,804,461,420**	**-**					100%	**6,815,720,400**	
	4	**4.02**	**02**	**2.01**		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang ditetapkan**	**100%**	**94.00%**	**100%**	**100%**	**100%**	**333,826,300**	**1,678,245,560**	**1,678,245,560**				**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**	**Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD**	**100%**	**1,464,526,000**	
	4	4.02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	80 Dokumen	19 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	9,449,900	561,757,900	561,757,900	Takalar	Pajak Daerah		Terwujudnya Kinerja Lembaga Legislatif yang Optimal	Anggota DPRD dan Instansi terkait	20 Dokumen	137,400,000	
	4	4.02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	80 Dokumen	19 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	274,786,500	925,638,500	925,638,500	Takalar	Pajak Daerah		Terwujudnya Kinerja Lembaga Legislatif yang Optimal	Anggota DPRD dan Instansi terkait	20 Dokumen	791,078,000	
	4	4.02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	20 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	3,865,600	3,866,560	3,866,560	Takalar	Lain-lain PAD yang Sah		Terwujudnya Kinerja Lembaga Legislatif yang Optimal	Anggota DPRD dan Instansi terkait	5 Dokumen	131,048,000	
	4	4.02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	24 Dokumen	4 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	40,672,700	181,931,000	181,931,000	Takalar	Pajak Daerah		Terwujudnya Kinerja Lembaga Legislatif yang Optimal	Anggota DPRD dan tenaga ahli DPRD	6 Dokumen	400,000,000	
	4	4.02	02	2.01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5,051,600	5,051,600	5,051,600	Takalar	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		Terwujudnya Kinerja Lembaga Legislatif yang Optimal	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Dokumen	5,000,000	

	4	**4.02**	**02**	**2.02**		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Persentase Dokumen Kebijakan Anggaran yang dibahas**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**873,715,000**	**296,203,900**	**296,203,900**				**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**	**Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD**	**100%**	**1,563,577,000**	
	4	4.02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	55,558,800	55,558,800	55,558,800	Takalar	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		Terwujudnya Kinerja Lembaga Legislatif yang Optimal	Anggota DPRD dan Instansi terkait	1 Dokumen	72,800,000	
	4	4.02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	51,036,800	51,036,800	51,036,800	Takalar	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		Terwujudnya Kinerja Lembaga Legislatif yang Optimal	Anggota DPRD dan Instansi terkait	1 Dokumen	68,800,000	
	4	4.02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	575,672,600	56,173,500	56,173,500	Takalar	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		Terwujudnya Kinerja Lembaga Legislatif yang Optimal	Anggota DPRD dan Instansi terkait	1 Dokumen	437,978,000	
	4	4.02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	45,174,200	45,174,200	45,174,200	Takalar	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		Terwujudnya Kinerja Lembaga Legislatif yang Optimal	Anggota DPRD dan Instansi terkait	1 Dokumen	319,949,000	
	4	4.02	02	2.02	05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	8 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	45,609,800	45,609,800	45,609,800	Takalar	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		Terwujudnya Kinerja Lembaga Legislatif yang Optimal	Anggota DPRD dan Instansi terkait	2 Dokumen	35,087,000	
	4	4.02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,662,800	42,650,800	42,650,800	Takalar	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		Terwujudnya Kinerja Lembaga Legislatif yang Optimal	Anggota DPRD dan Instansi terkait	1 Dokumen	628,963,000	
	4	**4.02**	**02**	**2.03**		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan yang diawasi**	**100%**	**78.79%**	**100%**	**100%**	**100%**	**425,664,200**	**1,488,550,560**	**1,488,550,560**				**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**	**Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD**	**100%**	**240,000,000**	
	4	4.02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	20 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	1,140,600	5,675,760	5,675,760	Takalar	Pajak Daerah		Terwujudnya Kinerja Lembaga Legislatif yang Optimal	Instansi yg terkait	5 Laporan	30,000,000	
	4	4.02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	20 Laporan	4 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	1,140,600	5,649,800	5,649,800	Takalar	Pajak Daerah		Terwujudnya Kinerja Lembaga Legislatif yang Optimal	Instansi yg terkait	5 Laporan	30,000,000	
	4	4.02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	20 Laporan	4 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	1,140,600	5,649,800	5,649,800	Takalar	Pajak Daerah		Terwujudnya Kinerja Lembaga Legislatif yang Optimal	Instansi yg terkait dan masyarakat	5 Laporan	30,000,000	
	4	4.02	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	20 Laporan	4 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	1,140,600	5,649,800	5,649,800	Takalar	Pajak Daerah		Terwujudnya Kinerja Lembaga Legislatif yang Optimal	Instansi yg terkait	5 Laporan	30,000,000	
	4	4.02	02	2.03	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	20 Laporan	4 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	1,140,600	5,649,800	5,649,800	Takalar	Pajak Daerah		Terwujudnya Kinerja Lembaga Legislatif yang Optimal	Instansi yg terkait	5 Laporan	30,000,000	
	4	4.02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	20 Laporan	3 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	1,140,600	5,649,800	5,649,800	Takalar	Pajak Daerah		Terwujudnya Kinerja Lembaga Legislatif yang Optimal	Instansi yg terkait	5 Dokumen	30,000,000	
	4	4.02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	20 Laporan	4 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	417,680,000	1,448,976,000	1,448,976,000	Takalar	Pajak Daerah		Terwujudnya Kinerja Lembaga Legislatif yang Optimal	Instansi yg terkait	5 Dokumen	30,000,000	
	4	4.02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	20 Laporan	1 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	1,140,600	5,649,800	5,649,800	Takalar	Pajak Daerah		Terwujudnya Kinerja Lembaga Legislatif yang Optimal	Instansi yg terkait	5 Dokumen	30,000,000	

	4	**4.02**	**02**	**2.04**		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Persentase Anggota DPRD yang melaksanakan Bimbingan Teknis**	**100%**	**99.57%**	**100%**	**100%**	**100%**	**1,623,126,400**	**2,207,985,900**	**2,207,985,900**				**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**	**Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD**	**100%**	**1,160,800,000**	
	4	4.02	02	2.04	01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	538,288,800	336,383,300	336,383,300	Takalar	Pajak Daerah		Terwujudnya Kinerja Lembaga Legislatif yang Optimal	Anggota DPRD	1 Dokumen	10,000,000	
	4	4.02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	12 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	506,900,000	1,145,715,000	1,145,715,000	Takalar	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		Terwujudnya Kinerja Lembaga Legislatif yang Optimal	Pimpinan dan Anggota DPRD	6 Dokumen	845,600,000	
	4	4.02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1740 Dokumen	433 Dokumen	435 Dokumen	435 Dokumen	435 Dokumen	200,900,000	348,850,000	348,850,000	Takalar	Lain-lain PAD yang Sah		Terwujudnya Kinerja Lembaga Legislatif yang Optimal	Anggota DPRD dan masyarat	## Dokumen	150,000,000	
	4	4.02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	12 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	90,000,000	90,000,000	90,000,000	Takalar	Pajak Daerah		Terwujudnya Kinerja Lembaga Legislatif yang Optimal	Tim tenaga ahli DPRD	3 Orang	90,000,000	
	4	4.02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	28 Orang	7 Orang	7 Orang	7 Orang	7 Orang	252,000,000	252,000,000	252,000,000	Takalar	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		Terwujudnya Kinerja Lembaga Legislatif yang Optimal	Tim tenaga ahli Fraksi	7 Orang	25,200,000	
	4	4.02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	48 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	15,015,000	15,015,000	15,015,000	Takalar	Lain-lain PAD yang Sah		Terwujudnya Kinerja Lembaga Legislatif yang Optimal	Masyarakat	12 Dokumen	25,000,000	
	4	4.02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	20,022,600	20,022,600	20,022,600	Takalar	Lain-lain PAD yang Sah		Terwujudnya Kinerja Lembaga Legislatif yang Optimal	Anggota DPRD	1 Dokumen	15,000,000	
	4	**4.02**	**02**	**2.05**		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang terlaksana**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**1,379,211,200**	**1,379,211,200**	**1,379,211,200**				**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**	**Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD**	**100%**	**1,492,175,000**	
	4	4.02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	-	-	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	36,843,200	36,843,200	36,843,200	Takalar	Lain-lain PAD yang Sah		Terwujudnya Kinerja Lembaga Legislatif yang Optimal	Anggota DPRD dan masyarakat	12 Laporan	50,000,000	
	4	4.02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10,010,000	10,010,000	10,010,000	Takalar	Lain-lain PAD yang Sah		Terwujudnya Kinerja Lembaga Legislatif yang Optimal	Anggota DPRD dan masyarakat	1 Dokumen	12,000,000	
	4	4.02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	12 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1,332,358,000	1,332,358,000	1,332,358,000	Takalar	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		Terwujudnya Kinerja Lembaga Legislatif yang Optimal	Anggota DPRD dan masyarakat	3 Dokumen	1,430,175,000	
	4	**4.02**	**02**	**2.06**		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Persentase Kode Etik DPRD yang terlaksana dan diawasi**	**100%**	**0**	**100%**	**100%**	**100%**	**9,955,000**	**7,856,300**	**7,856,300**				**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**	**Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD**	**100%**	**39,000,000**	
	4	4.02	02	2.06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5,051,600	5,051,600	5,051,600	Takalar	Lain-lain PAD yang Sah		Terwujudnya Kinerja Lembaga Legislatif yang Optimal	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Dokumen	29,000,000	
	4	4.02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	8 Laporan	-	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	4,903,400	2,804,700	2,804,700	Takalar	Lain-lain PAD yang Sah		Terwujudnya Kinerja Lembaga Legislatif yang Optimal	Pimpinan dan Anggota DPRD	2 Laporan	10,000,000	
	4	**4.02**	**02**	**2.08**		**Fasilitasi Tugas DPRD**		**100%**	**98.18%**	**100%**	**100%**	**100%**	**525,382,000**	**3,746,408,000**	**3,746,408,000**				**Terwujudnya tata kelola pemerintahan**	**Pimpinan DPRD dan Anggota**	**100%**	**855,642,400**	
	4	4.02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	80 Dokumen	54 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	525,382,000	3,746,408,000	3,746,408,000	Takalar	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		Terwujudnya Kinerja Lembaga Legislatif yang Optimal	Pimpinan dan Anggota DPRD	20 Dokumen	770,642,400	
	4	4.02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	-	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-	-	-				1 Laporan	15,000,000	
	4	4.02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	-	-	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-	-	-				12 Dokumen	35,000,000	
	4	4.02	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	-	-	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-	-	-				12 Dokumen	35,000,000	

Tabel III-2
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KAB. TAKALAR
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target			Pagu			Keterangan
						Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4	**4.02**				**SEKRETARIAT DPRD**							**25,194,940,983**	**33,077,444,247**	**32,963,987,847**	**113,456,400**
	4	**4.02**	**01**			**PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA**							**20,024,060,883**	**22,272,982,827**	**22,159,526,427**	
	4	**4.02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase rata-rata capaian output sub kegiatan perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase rata-rata capaian output sub kegiatan perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**41,358,100.00**	**178,205,340**	**178,205,340**	
	4	4.02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	6,052,400	27,591,940	27,591,940	
	4	4.02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6,079,800	29,619,700	29,619,700	
	4	4.02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5,964,400	29,394,200	29,394,200	
	4	4.02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6,455,900	28,985,900	28,985,900	
	4	4.02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6,235,700	28,092,500	28,092,500	
	4	4.02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	5,054,300	29,005,500	29,005,500	
	4	4.02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	5,515,600	5,515,600	5,515,600	

	4	**4.02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentase Laporan Keuangan tepat waktu dan akurat**	**Presentase Laporan Keuangan tepat waktu dan akurat**				**3,961,790,134**	**4,588,210,508**	**4,474,754,108**	
	4	4.02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48/12 Orang/bulan	48/12 Orang/bulan	48/12 Orang/bulan	3,932,990,134	4,487,264,408	4,373,808,008	
	4	4.02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen				
	4	4.02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	6,935,400	33,512,700	33,512,700	
	4	4.02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	6,554,300	30,446,300	30,446,300	
	4	4.02	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	4,874,500	5,324,500	5,324,500	
	4	4.02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	5,873,500	27,100,300	27,100,300	
	4	4.02	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4,562,300	4,562,300	4,562,300	
	4	**4.02**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase rata-rata Capaian Output sub kegiatan Administrasi Umum Barang Milik Daerah**	**Persentase rata-rata Capaian Output sub kegiatan Administrasi Umum Barang Milik Daerah**				**10,568,100**	**13,042,500**	**13,042,500**	
	4	4.02	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen				
	4	4.02	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	5,456,300	6,806,300	6,806,300	
	4	4.02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5,111,800	6,236,200	6,236,200	

	4	**4.02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase rata-rata Capaian Output sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase rata-rata Capaian Output sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**43,316,300**	**56,704,300**	**56,704,300**	
	4	4.02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	98 Paket	98 Paket	98 Paket	-	-	-	
	4	4.02	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	-	-	-	
	4	4.02	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	5,260,600	7,764,300	7,764,300	
	4	4.02	01	2.05	06	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	45 Orang	45 Orang	10,970,000	10,950,000	10,950,000	
	4	4.02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	120 Orang	120 Orang	120 Orang	1,180,100	1,146,400	1,146,400	
	4	4.02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	45 Orang	45 Orang	45 Orang	25,905,600	36,843,600	36,843,600	
	4	**4.02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase rata-rata Capaian Output sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase rata-rata Capaian Output sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**214,596,700**	**953,609,440**	**953,609,440**	
	4	4.02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	11,258,000	22,549,500	22,549,500	
	4	4.02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	36,074,000	628,804,840	628,804,840	
	4	4.02	01	2.06	03	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	2,508,000	26,478,900	26,478,900	
	4	4.02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	21,517,900	48,260,000	48,260,000	
	4	4.02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	55 Dokumen	55 Dokumen	55 Dokumen	60,264,000	106,800,000	106,800,000	

	4	4.02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	67,500,000	105,600,000	105,600,000	
	4	4.02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	15,474,800	15,116,200	15,116,200	
	4	4.02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	30 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen				
	4	4.02	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				
	4	**4.02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase rata-rata capaian Nilai Aset Pemerintah Bertambah**	**Persentase rata-rata capaian Nilai Aset Pemerintah Bertambah**				-	-	-	
	4	4.02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit				
	4	4.02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	5 Unit				
	4	4.02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	3 Unit				
	4	4.02	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit				
	4	4.02	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit				
	4	4.02	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	4 Unit				
	4	4.02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	4 Unit				
	4	**4.02**	**01**	**2.08**	**01**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase rata-rata capaian output kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase rata-rata capaian output kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**631,871,210**	**1,083,546,200**	**1,083,546,200**	
	4	4.02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6,436,400	6,452,600	6,452,600	
	4	4.02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	474,234,810	463,893,600	463,893,600	

	4	4.02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				
	4	4.02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	151,200,000	613,200,000	613,200,000	
	4	**4.02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Aset Milik Pemerintah**	**Terpeliharanya Aset Milik Pemerintah**				**304,074,000**	**445,826,000**	**445,826,000**	
	4	4.02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	30 Unit	30 Unit	270,374,000	299,610,000	299,610,000	
	4	4.02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	5 Unit				
	4	4.02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	7 Unit	7 Unit				
	4	4.02	01	2.09	07											
	4	4.02	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit				
	4	4.02	01	2.09	09											
	4	4.02	01	2.09	10	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit				
	4	4.02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13	13	13	20,500,000	123,866,000	123,866,000	
	4	4.02	01	2.09	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	4	4	13,200,000			
	4	4.02	01	2.09	13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	4	4		22,350,000	22,350,000	

	4	**4.02**	**01**	**2.15**		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD**	**Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD**				**14,438,703,539**	**14,505,473,539**	**14,505,473,539**	
	4	4.02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	30	30 / 12 Org / Bulan	30 / 12 Org / Bulan	13,436,516,039	13,436,516,039	13,436,516,039	
	4	4.02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	942,187,500	965,357,500	965,357,500	
	4	4.02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	30 Orang	30 Orang	30 Orang	60,000,000	103,600,000	103,600,000	
	4	**4.02**	**01**	**2.16**		**Layanan Administrasi DPRD (Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya Digunakan oleh Sekretariat DPRD**	**Layanan Administrasi DPRD (Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya Digunakan oleh Sekretariat DPRD**	**Terpenuhinya Operasional Rumah Tangga Pimpinan DPRD**	**Terpenuhinya Operasional Rumah Tangga Pimpinan DPRD**				**377,782,800**	**448,365,000**	**448,365,000**	
	4	4.02	01	2.16	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	30 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen				
	4	4.02	01	2.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	15,165,400	40,990,400	40,990,400	
	4	4.02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				62,617,400	107,367,400	107,367,400	
	4	4.02	01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	300,000,000	300,007,200	300,007,200	
	4	**4.02**	**02**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**						**5,170,880,100**	**10,804,461,420**	**10,804,461,420**	
	4	**4.02**	**02**	**2.01**		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang ditetapkan**	**Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang ditetapkan**	**100**	**100**	**100**	**333,826,300**	**1,678,245,560**	**1,678,245,560**	
	4	4.02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	9,449,900	561,757,900	561,757,900	
	4	4.02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Perda	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	274,786,500	925,638,500	925,638,500	
	4	4.02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	3,865,600	3,866,560	3,866,560	
	4	4.02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	40,672,700	181,931,000	181,931,000	
	4	4.02	02	2.01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5,051,600	5,051,600	5,051,600	

	4	**4.02**	**02**	**2.02**		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Persentase Dokumen Kebijakan Anggaran yang dibahas**	**Persentase Dokumen Kebijakan Anggaran yang dibahas**	**100**	**100**	**100**	**873,715,000**	**296,203,900**	**296,203,900**	
	4	4.02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	55,558,800	55,558,800	55,558,800	
	4	4.02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	51,036,800	51,036,800	51,036,800	
	4	4.02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	575,672,600	56,173,500	56,173,500	
	4	4.02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	45,174,200	45,174,200	45,174,200	
	4	4.02	02	2.02	05	Pembahasan Laporan Semester	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	45,609,800	45,609,800	45,609,800	
	4	4.02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,662,800	42,650,800	42,650,800	
	4	**4.02**	**02**	**2.03**		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan yang diawasi**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan yang diawasi**	**100**	**100**	**100**	**425,664,200**	**1,488,550,560**	**1,488,550,560**	
	4	4.02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	1,140,600	5,675,760	5,675,760	
	4	4.02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	1,140,600	5,649,800	5,649,800	
	4	4.02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	1,140,600	5,649,800	5,649,800	
	4	4.02	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	1,140,600	5,649,800	5,649,800	
	4	4.02	02	2.03	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	1,140,600	5,649,800	5,649,800	
	4	4.02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	1,140,600	5,649,800	5,649,800	

	4	4.02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	417,680,000	1,448,976,000	1,448,976,000	
	4	4.02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	1,140,600	5,649,800	5,649,800	
	4	**4.02**	**02**	**2.04**		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Persentase Anggota DPRD yang melaksanakan Bimbingan Teknis**	**Persentase Anggota DPRD yang melaksanakan Bimbingan Teknis**	**100**	**100**	**100**	**1,623,126,400**	**2,207,985,900**	**2,207,985,900**	
	4	4.02	02	2.04	01	Orientasi DPRD	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	538,288,800	336,383,300	336,383,300	
	4	4.02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	506,900,000	1,145,715,000	1,145,715,000	
	4	4.02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	435 Dokumen	435 Dokumen	435 Dokumen	200,900,000	348,850,000	348,850,000	
	4	4.02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3 Orang	3 Orang	3 Orang	90,000,000	90,000,000	90,000,000	
	4	4.02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang	7 Orang	7 Orang	252,000,000	252,000,000	252,000,000	
	4	4.02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	15,015,000	15,015,000	15,015,000	
	4	4.02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	20,022,600	20,022,600	20,022,600	
	4	**4.02**	**02**	**2.05**		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang terlaksana**	**Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang terlaksana**	**100**	**100**	**100**	**1,379,211,200**	**1,379,211,200**	**1,379,211,200**	
	4	4.02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	36,843,200	36,843,200	36,843,200	
	4	4.02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10,010,000	10,010,000	10,010,000	
	4	4.02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1,332,358,000	1,332,358,000	1,332,358,000	
	4	**4.02**	**02**	**2.06**		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Persentase Kode Etik DPRD yang terlaksana dan diawasi**	**Persentase Kode Etik DPRD yang terlaksana dan diawasi**	**100**	**100**	**100**	**9,955,000**	**7,856,300**	**7,856,300**	
	4	4.02	02	2.06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5,051,600	5,051,600	5,051,600	
	4	4.02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	4,903,400	2,804,700	2,804,700	

	4	**4.02**	**02**	**2.07**		**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**Persentase Fasilitasi Tugas DPRD yang terlaksana**	**Persentase Fasilitasi Tugas DPRD yang terlaksana**					-	-	
	4	4.02	02	2.07	01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Terlaksananya Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Terlaksananya Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah							
	4	4.02	02	2.07	02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Tersusunnya Bahan Komunikasi dan Publikasi	Tersusunnya Bahan Komunikasi dan Publikasi							
	4	**4.02**	**02**	**2.08**		**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Fasilitasi Tugas DPRD**			**100**	**100**	**100**	**525,382,000**	**3,746,408,000**	**3,746,408,000**	
	4	4.02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	525,382,000	3,746,408,000	3,746,408,000	
	4	4.02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan				
	4	4.02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen				
	4	4.02	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen				
	J U M L A H												**25,194,940,983**	**33,077,444,247**	**32,963,987,847**	**113,456,400**

BAB IV
PENUTUP

2.3. Catatan Penting

Dengan adanya pelaksanaan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 terdapat ketidak sesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2024, maka dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada Perubahan Renja dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Takalar Tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPD dalam mendukung Tujuan dan Sasaran Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Sekretariat DPRD Kabupaten Takalar secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk :
   a. Melaksnakan Perubahan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024.

2.5. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2024, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (PRKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Belana Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024.

Takalar, Juli 2024
Sekretaris DPRD Kabupaten Takalar

JAMALUDDIN HASAN, SE.MM.
Pangkat : Pembina Tingkat I.
NIP. : 19691012 199803 1 010

RENJA PERUBAHAN 2024

DINAS

KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TAKALAR

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2024.

Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar tahun 2023 memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada rencana strategis (RENSTRA) tahun 2023 – 2026 dan bersifat indikatif. Selanjutnya Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2024 menjadi landasan atau pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Tahun Anggaran 2024.

Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dan ikut berpartisipasi hingga tersusunnya Perubahan Renja ini. Perlu disadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Renja Perubahan ini, oleh karena itu masukan serta saran sangat kami harapkan.

Akhirnya semoga Perubahan Rencana Kerja ini dapat dilaksanakan dengan baik dan menjadi acuan dalam pelaksanaan sejumlah program dan kegiatan bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar agar kegiatan dapat berjalan lancar, tertib dan mencapai sasaran yang ditetapkan.

Takalar, Agustus 2024

SITTI NI'MAH KASIM, S.E
Nip.19650831 199203 2 007

DAFTAR TABEL

TABEL II.1 Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 10

TABEL II.2 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang ada dalam APBD 2024..... 21

TABEL II.6 Capaian Indikator Kinerja Utama 2023, Asumsi Capaian Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2024, dan Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar Tahun 2025..... 29

TABEL II.7 Asumsi Capaian Tahun 2024 dan Target Tahun 2025 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar .....

TABEL II.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar.....38

TABEL III.1 Tujuan, Sasaran Serta Target Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar Tahun 2024 47

TABEL III.1 Reviu Terhadap Rancangan Renja Tahun 2024.....51

TABEL III.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar.....63

TABEL III.3 Rincian Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu Pada Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Tahun 2024 73

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR TABEL 2

DAFTAR ISI 3

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 5
1.2 Landasan Hukum 6
1.3 Maksud dan Tujuan 7
1.4 Sistematika Penulisan 8

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sampai dengan Triwulan II 9
2.1.1 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2024 yang terakomodir di APBD 2024 21
2.1.2 Evaluasi program kinerja kegiatan dan sub kegiatan dalam pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2024 22
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi UKM Tenaga Kereja dan Transmigrasi 29
2.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) 29
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) 31
2.2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi 38
2.3 Hambatan, upaya pencapaian dan rekomendasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Tahun 2024
2.3.1 Hambatan dalam pelaksanaan kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2024 sampai dengan triwulan II 45
2.3.2 Upaya dalam pencapaian pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2024 sampai dengan triwulan II 45
2.3.3 Rekomendasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024 sampai dengan triwulan selanjutnya 45

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

3.1 Tujuan dan Sasaran…… 46
3.2 Reviu terhadap program dan anggaran Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2024…… 50
3.3 Rencana Program dan Anggaran Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi
BAB IV PENUTUP…… 79

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perubahan Renja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar merupakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar yang disusun sebagai derivasi Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Renja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisifasi masyarakat

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, maka perlu dilakukan Perubahan Renja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2024.

Kegiatan penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2024 dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kemampuan manajemen Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menghasilkan produk perencanaan dan penganggaran yang tepat (waktu, prosedur serta aturan), sinkron (lintas program, lintas sektor, lintas kabupaten/kota dan pusat) dan selaras dengan arah kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi

Selatan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum pada penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahahn Deerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2022 tentang Hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2008 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2019 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Takalar Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 45);
19. Peraturan Bupati Takalar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 3);
20. Peraturan Bupati Takalar Nomor 223 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 223)

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar Tahun 2024 adalah selaras dengan maksud dan tujuan Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023-2026 yaitu penyediaan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi program/kegiatan yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026, Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten

Takalar Tahun 2024.

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan:

a) Menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024;
b) Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LAKIP) Tahun 2024;
c) Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
d) Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
e) Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Takalar.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Solusi dan Penyelesaian Permasalahan dalam Pelaksanaan Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
- 3.1. Tujuan dan Sasaran
- 3.2. Reviuw terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024
- 3.3. Rencana Program dan dan Kegiatan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

BAB IV Penutup

BAB II

EVALUASI RENJA DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II

Pada dasarnya penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar sampai dengan triwulan II. Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Evaluasi atas perencanaan bertujuan untuk mengetahui apa yang harus dicapai oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil, menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar. Secara garis besar, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2024 sampai pada Triwulan II telah dicapai dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari tingkat pencapaian target yang rata-rata mencapai untuk penyerapan dana dan rata-rata mencapai untuk kinerja *output* dan *outcome* kegiatan.

Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*)dan dampak (*impact*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana,sumber daya manusia,laporan, buku dan indikator lainnya.

Rumusan Evaluasi dapat di lihat dari program dan kegiatan yang sesuai target, di bawah target, melebihi target serta faktor yang menjadi penghambat dan faktor pendukung tercapainya 100% Program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar.

Kegiatan evaluasi Renja SKPD dan pencapaian realisasi kinerja sampai dengan triwulan II ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Berikut tabel evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024:

Capaian Realisasi Kinerja Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil,Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar Sampai Pada Triwulan II Tahun 2024

No	Sasaran	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun **2023-2026** (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu **(2023)**		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun **2024**) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Per Bulan						Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Kinerja Per Bulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun **2024**)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun **2024**) yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun **2024** (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun **2024**)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun (5)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
															Januari		Februari		Maret		I		April		Mei		Juni		II		III		IV											
									K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3					4	5	6			7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		20		24		25		26 = 25/8 x 100%		27 = 7 + 25		28 = 27/6 x 100%		29	30
							DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN																																					
							URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR				**41.230.573.600**		**7.145.908.015**		**8.006.554.745**		**280.909.253**		**302.143.485**		**602.099.088**		**1.185.151.826**		**775.246.650**		**304.565.380**		**890.725.584**		**2.039.978.620**		-		-		**3.225.130.446**		22,88%	40,28%		**10.678.610.466**				
		02	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**				**41.230.573.600**		**7.145.908.015**		**7.969.054.745**		**280.909.253**		**302.143.485**		**602.099.088**		**1.185.151.826**		**775.246.650**		**304.565.380**		**890.725.584**		**2.031.940.820**		-		-		**3.217.092.646**					**10.463.000.661**				
		02	**17**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan**	**100 %**	**Persen**	**40.640.573.600**	**22,18 %**	**6.841.272.170**	**100 %**	**7.273.465.345**	**1%**	**280.909.253**	**1%**	**301.054.885**	**2%**	**602.099.088**	**5%**	**1.184.063.226**		**775.246.650**		**304.565.380**		**890.725.584**	**26 %**	**2.001.854.220**	**0%**	-	**0%**	-	**31 %**	**3.185.917.446**	**30,63%**	**43,80 %**	**25,16 %**	**10.027.189.616**	**25,16 %**	**24,67%**	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan**	

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):

| | | |

Dari Tabel di atas digambarkan bahwa jumlah Program sebanyak 7 Program, jumlah kegiatan 21 kegiatan serta jumlah sub kegiatan sebanyak 27 sub kegiatan. Pada umumnya program, kegiatan dan sub kegiatan rutin pada Bagian Sekretariat dapat dilakasanakan sesuai dengan target yang ditentukan, kecuali 2 (DUA) sub kegiatan yang tidak dapat dilakasanakan sesuai rencana target Renstra. Sub kegiatan yang dimkasud adalah sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya dan sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, Penyebab utamanya adalah selain keterbatasan anggaran juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah untuk menghindari mobilitas penduduk, sehingga kegiatan pelatihan dan pendidikan baik untuk pelatihan dan pendidikan tingkat kepemimpinan (Latpim) maupun pendidikan teknis (fungsional) tidak dilaksanakan. Hal lain yang menjadi penyebab tidak terlaksananya kegiatan sesuai dengan target adalah adanya kurangnya anggaran diberikan untuk kegiatan pada dinas Koperasi UKM tenaga kerja dan transmigrasi.

2.1.1 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2024 yang terakomodir di APBD 2024

Informasi tentang Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar Tahun 2024 yang terakomodir di APBD Tahun 2024 memberikan gambaran seberapa banyak jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar pada Tahun 2024. Adapun jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan dimaksud dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel II.2

Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang ada dalam APBD 2024

APBD 2024							
No	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Indikator		
					Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja dan	7	14	27	7	14	27

	Transmigrasi						

Sumber: Renja Pokok 2024 dan SIPD 2024

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah program sebanyak 7, jumlah kegiatan 14, dan jumlah sub kegiatan 27, Sedangkan untuk jumlah indikator program sebanyak 5, jumlah indikator kegiatan sebanyak 15, dan jumlah indikator sub kegiatan sebanyak 31.

2.1.2 Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja APBD Triwulan II

2.1.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II dan Capaian Renstra Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2024.

I.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indicator Persentase Pemenuhan Perencanaaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja dengan capaian kinerja 26,32% dengan pagu sebesar Rp.7.273.465.345,- dengan realisasi sebesar Rp.3.185.917.446,-atau 43,80%,Program ini ditunjang 6 Kegiatan dan 19 Sub Kegiatan,Adapun rincian kegiatan dan subkegiatan adalah sebagai berikut :

1.Kegiatan : Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kinerjanya adalah pemenuhan dokumen perencanaan dan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Capaian kinerja sebesar 12,50% dan realisasi anggaran sebesar Rp.5.416.000,- atau 12,75% yang didukung total pagu sebesar Rp.42.468.400,-,Pencapaian target didukung 7 Sub Kegiatan,dengan rincian sebagai berikut :

Sub Kegiatan

1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah,alokasi anggaran sebesar Rp.11.505.400,- Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sub kegiatan ini adalah jumlah Renstra dan Renja serta perubahannya dengan target capaian sebanyak 2 dokumen ,Realisasi kinerja dan anggaran yang dicapai sampai akhir Triwulan II Tahun Anggaran 2024 masih nihil dengan serapan anggaran sebesar Rp.0,-

1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD,alokasi anggaran sebesar Rp.5.791.000,- Indikator yang Digunakan untuk mengukur keberhasilan sub kegiatan ini adalah jumlah Dokumen RKA yang disusun dengan target capaian sebanyak 1 Dokumen,Realisasi kinerja dan anggaran yang dicapai sampai akhir Triwulan II Tahun 2024 masih nihil dengan serapan anggaran Rp.0,-

1.3 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD,alokasi anggaran sebesar Rp.5.705.800,-Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sub kegiatan ini adalah jumlah Dokumen Perubahan RKA yang disusun dengan target capaian sebanyak 1 Dokumen,Realisasi kinerja dan anggaran yang dicapai sampai akhir Triwulan II Tahun 2024

masih nihil dengan serapan anggaran Rp.0,-

1.4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD,alokasi anggaran sebesar Rp.4.532.000,- Indikator yang Digunakan untuk mengukur keberhasilan sub kegiatan ini adalah jumlah Dokumen RKA yang disusun dengan target capaian sebanyak 1 Dokumen,Realisasi kinerja dan anggaran yang dicapai sampai akhir Triwulan II Tahun 2024 masih nihil dengan serapan anggaran Rp.0,-

1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKPD,alokasi anggaran sebesar Rp.4.176.900,-Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sub kegiatan ini adalah jumlah Dokumen Perubahan DPA yang disusun dengan target capaian sebanyak 1 Dokumen,Realisasi kinerja dan anggaran yang dicapai sampai akhir Triwulan II Tahun 2024 masih nihil dengan serapan anggaran Rp.0,-

1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD alokasi anggaran sebesar Rp.5.049.300,- Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sub kegiatan ini adalah jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun,seperti LPJ,LPPD dengan target capaian 1 DokumenRealisasi kinerja dan anggaran yang dicapai sampai akhir Triwulan II Tahun 2024 masih nihil dengan serapan anggaran sebesar Rp.1.866.000,- atau 36,96%

1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp.5.708.000,- Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sub kegiatan ini adalah jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun dengan target capaian 4 Dokumen Realisasi kinerja dan anggaran yang dicapai sampai akhir Triwulan II Tahun 2024 sebanyak 2 Dokumen atau 50% dengan serapan anggaran sebesar Rp.3.550.000,- atau 62,19%

2.Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator kinerjanya adalah Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Capaian kinerja sebesar 44,02% dan realisasi anggaran sebesar Rp.3.117.882.950,00 atau 44,62% yang didukung total pagu sebesar Rp.6.987.997.200,00-,Pencapaian target didukung 4 Sub Kegiatan,dengan rincian sebagai berikut :

Sub Kegiatan

2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN,alokasi anggaran sebesar Rp.6.958.278.100,- Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sub kegiatan ini adalah jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan dengan target capaian 57 ASN Realisasi kinerja dan anggaran yang dicapai sampai akhir Triwulan II Tahun 2024 sebanyak 6 bulan Gaji dan Tunjangan,5 bulan tunjangan penambahan penghasilan ditambah Gaji 14 (THR) kepada 57 ASN serta Gaji 13 atau 48% dengan serapan anggaran sebesar Rp.3.101.294.650,- atau 44,57%

2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Ujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.21.159.000,- Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sub kegiatan ini adalah Laporan Pelaksanaan Verifikasi dengan target capaian 12 Dokumen Realisasi kinerja dan anggaran yang dicapai sampai akhir Triwulan II Tahun 2024 sebanyak

6 Dokumen atau 50% dengan serapan anggaran sebesar Rp.11.090.000,- atau 52,41%

2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.500.300,- Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sub kegiatan ini adalah Laporan Pelaksanaan Verifikasi dengan target capaian 1 Dokumen Realisasi kinerja dan anggaran yang dicapai sampai akhir Triwulan II Tahun 2024 sebanyak 1 Dokumen atau 100% dengan serapan anggaran sebesar Rp.5.498.300,- atau 99,94%

2.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.059.800,- Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sub kegiatan ini adalah Laporan Pelaksanaan Verifikasi dengan target capaian 1 Dokumen Realisasi kinerja dan anggaran yang dicapai sampai akhir Triwulan II Tahun 2024 masih nihil dengan serapan anggaran nihil

3. Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

3.1 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan alokasi anggaran

Rp.6.965.520,- Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Sub Kegiatan ini adalah

Jumlah Barang Milik Daerah pada SKPD dengan target capaian 2 dokumen,realisasi kinerja pada akhir Triwulan II sebanyak 1 dokumen atau 50%,realisasi anggaran Rp.4.725.500,- atau 67,84%

4. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator kinerjanya adalah Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target Capaian kinerja sebesar 100% dan anggaran Rp.54.878.080,- realisasi kinerja akhir Triwulan II sebesar 31,43% realisasi anggaran sebesar Rp.12.190.200,00 atau 22,22% ,Pencapaian target didukung 2 Sub Kegiatan,dengan rincian sebagai berikut :

Sub Kegiatan

4.1 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.31.540.000,- Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sub kegiatan ini adalah frekwensi rapat yang terlaksana dengan target capaian 32 kali Realisasi kinerja dan anggaran yang dicapai sampai akhir Triwulan II Tahun 2024 sebanyak 10 kali atau 31% dengan serapan anggaran sebesar Rp.6.900.000,- atau 21,88%

4.2 penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sub kegiatan ini adalah jumlah ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan target capaian 3 unit Realisasi kinerja dan anggaran Rp.23.330.080,-yang dicapai sampai akhir Triwulan II Tahun 2024 sebanyak 1 unit atau 33% dengan serapan anggaran sebesar Rp.5.290.200,- atau 22,68%

5. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator kinerjanya adalah Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target Capaian kinerja sebesar 100%,sampai dengan akhir triwulan II tercapai sebesar 33,33% dan realisasi anggaran Rp.45.702.796,- atau 28% yang didukung total pagu Rp.163.219.895,- Pencapaian target didukung 2 Sub Kegiatan,dengan rincian sebagai berikut :

Sub Kegiatan

5.1 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp.112.819.895,- Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sub kegiatan ini adalah rekening tagihan yang terbayarkan dengan target capaian 36 rekening tagihan, Realisasi kinerja dan anggaran yang dicapai sampai akhir Triwulan II Tahun 2024 sebanyak 18 rekening tagihan atau 50% dengan serapan anggaran sebesar Rp.37.302.796,- atau 33,06%

5.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.400.000,- Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sub kegiatan ini adalah Jasa Kebersihan yang terbayarkan dengan target capaian 6 org x 12 bulan Realisasi kinerja dan anggaran yang dicapai sampai akhir Triwulan II tahun 2024 sebanyak 6 org x 2 bulan atau 20% dengan serapan anggaran sebesar Rp.8.400.000,- atau 17%

6. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator kinerjanya adalah Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan target 100%, pada akhir triwulan II Capaian kinerja masih nihil dan realisasi anggaran nihil yang didukung total pagu sebesar Rp.17.944.250,- Pencapaian target didukung 2 Sub Kegiatan,dengan rincian sebagai berikut :

Sub Kegiatan

6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Bermotor Dinas dengan alokasi anggaran sebesar Rp.11.734.250,- Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sub kegiatan ini adalah Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dengan target capaian 12 kendaraan Realisasi kinerja dan anggaran yang dicapai sampai akhir Triwulan II tahun 2024 nihil dengan serapan anggaran nihil

6.2 Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.210.000,- Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sub kegiatan ini adalah Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara dengan target capaian 3 unit Realisasi kinerja dan anggaran yang dicapai sampai akhir Triwulan II tahun 2024 nihil dengan serapan anggaran nihil

II.Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dengan indicator Persentase Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Regulasi yang berlaku dengan target capaian kinerja 65 KSP/USP atau 100% dengan pagu sebesar Rp.56.532.400,- sampai akhir Triwulan II tercapai sebanyak 20 Koperasi atau 40% dengan realisasi sebesar Rp.19.244.000,- atau 34,04%,Program ini ditunjang 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan,Adapun rincian kegiatan dan subkegiatan adalah sebagai berikut :

1.Kegiatan : Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotannnya Dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator kinerjanya Persentase Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi KSP/USP yang wilayah keanggotaannya dalam Kabupaten/Kota dengan Capaian kinerja sampai akhir Triwulan II tercapai sebanyak 20 Koperasi atau 40% dengan realisasi sebesar Rp.19.244.000,- atau 34,04% yang didukung total pagu sebesar Rp.56.532.400,-,Pencapaian target didukung 1 Sub Kegiatan,dengan rincian sebagai berikut

Sub Kegiatan

1.1 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp.56.532.000,- Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sub kegiatan ini adalah frekwensi Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilakukan dengan target capaian 65 unit Koperasi Realisasi kinerja dan anggaran yang dicapai sampai akhir Triwulan II Tahun 2024 seanyak 20 unit Koperasi atau 40% dengan serapan anggaran sebesar Rp.19.244.000,- atau 34,04%

III. Program Pemberdayaan Usaha Menengah,Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

Program Pemberdayaan Usaha Menengah,Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)dengan indicator Persentase Pelaksanaan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro dengan target capaian kinerja 100% dengan pagu sebesar Rp.22.500.000,- dengan realisasi pada akhir triwulan II nihil dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.931.200,- atau 8,58%,Program ini ditunjang 1 Kegiatan dan 2 SubKegiatan,Adapun rincian kegiatan dan subkegiatan adalah sebagai berikut :

1.Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukam Melalui Pendataan,Kemitraan,Kemudahan

Perizinan,Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan Indikator kinerjanya adalah Persentase Pelaksanaan Pendataan Potensi UMKM,Peserta Pelatihan UMKM dan Frekwensi Pertemuan Dengan Para Pemangku Kepentingan dengan Capaian kinerja nihil dan realisasi anggaran sebesar Rp.1.931.200,- atau 8,58% yang didukung total pagu sebesar Rp.22.500.000,- Pencapaian target didukung 2 Sub Kegiatan,dengan rincian sebagai berikut :

Sub Kegiatan

1.1 Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.7.500.000,- Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sub kegiatan ini adalah Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target capaian 50 UKM Realisasi kinerja dan anggaran yang dicapai sampai akhir Triwulan II Tahun 2024 pencapaian nihil dengan serapan anggaran sebesar Rp.931.200.,- atau 12,42%

1.2 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro dengan alokasi anggaran sebesar Rp.15.000.000,- Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sub kegiatan ini adalah Jumlah Peserta Pelatihan Pemberdayaan,Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro dengan target capaian 300 orang Peserta dari UKM, Realisasi kinerja dan anggaran yang dicapai sampai akhir Triwulan II Tahun 2024 pencapaian nihil dengan serapan anggaran sebesar Rp.1.000.0000,- atau 6,67%

IV. Program Pengembangan UMKM

Program Pengembangan Usaha Menengah,Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)dengan indicator Persentase Pelaksanaan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro dengan target capaian kinerja 100% dengan pagu sebesar Rp.616.557.000,- dengan realisasi pada akhir triwulan II nihil dengan realisasi anggaran sebesar Rp.10.000.000,- atau 1,62%,Program ini ditunjang 1 Kegiatan dan 3 SubKegiatan,Adapun rincian kegiatan dan subkegiatan adalah sebagai berikut :

1.Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil Indikator kinerjanya adalah Persentase Pelaksanaan Pendataan Potensi UMKM,Peserta Pelatihan UMKM dan Frekwensi Pertemuan Dengan Para Pemangku Kepentingan,target capaian kinerja 100%, dengan Capaian kinerja pada akhir Triwulan II nihil dan realisasi anggaran sebesar Rp.1.931.200,- atau 8,58% yang didukung total pagu sebesar Rp.22.500.000,- Pencapaian target didukung 2 Sub Kegiatan,dengan rincian sebagai berikut :

<u>Sub Kegiatan</u>

1.1 Pengembangan Usaha Mikro,dengan alokasi anggaran Rp.213.278.800,- dengan indicator Jumlah Usaha Mikro yang Meningkat Skala Usahanya dengan target capaian kinerja 100 UKM atau 100% sampai dengan akhir Triwulan II capaian kinerja masih nihil,realisasi anggaran nihil

1.2 Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan dengan alokasi anggaran Rp.190.000.000,- dengan indicator Jumlah Usaha Mikro yang Meningkat Skala Usahanya dengan target capaian kinerja 50 UKM atau 100% pada akhir Triwulan II realisasi capaian kinerja nihil,realisasi anggaran Rp.10.000.000,- atau 5,26%

1.3 Produksi dan Pengolahan,Pemasaran,Sumber Daya Manusia,serta Desain dan Teknologi dengan alokasi anggaran Rp.213.278.200,- dengan indicator Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan,Pemasaran,Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi,target capaian kinerja 50 UKM atau 100%,pada akhir Triwulan II capaian kinerja masih nihil,realisasi anggaran nihil

V. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan indicator Persentase Tenaga Kerja yang Berkualitas dan Terampil dengan target capaian kinerja 100% dengan pagu sebesar Rp.7.500.000,- dengan realisasi sebanyak 6 Paket Pelatihan atau 100% dan serapan anggaran sebesar Rp.923.800,- ,Program ini ditunjang 1 Kegiatan dan 1 SubKegiatan,Adapun rincian kegiatan dan subkegiatan adalah sebagai berikut :

1.Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Indikator kinerjanya adalah Persentase Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi dengan target Capaian kinerja sebanyak 6 Paket Pelatihan atau 100% pada akhir triwulan II tereaisir 1 paket atau 17% dan realisasi anggaran sebesar Rp.923.800,- atau 12% yang didukung total pagu sebesar Rp.7.500.000,- Pencapaian target didukung Sub Kegiatan,dengan rincian sebagai berikut :

Sub Kegiatan

1.1 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.500.000,- Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sub kegiatan ini adalah Jumlah Sarana Pelatihan Berdasarkan Klaster Kompetensi dengan target capaian 6 Paket Pendidikan dan Pelatihan Realisasi kinerja dan anggaran yang dicapai sampai akhir Triwulan II Tahun 2024 tercapai sebanyak 1 Paket Pelatihan atau 17% dengan serapan anggaran sebesar Rp.923.800,- atau 12%

VI. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program Penempatan Tenaga Kerja dengan indicator Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan,dengan target capaian kinerja sebanyak 4 dokumen atau 100% dengan pagu sebesar Rp.15.000.000,- sampai akhir Triwulan II realisasi capaian kinerja sebanyak 2 dokumen atau 50% ,realisasi anggaran sebesar Rp.6.384.000,- atau 42,56%,Program ini ditunjang 1 Kegiatan dan 1 SubKegiatan,Adapun rincian kegiatan dan subkegiatan adalah sebagai berikut :

1.Kegiatan : Pelayanan antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota Indikator kinerjanya adalah Persentase Tenaga Kerja yang Dilayani dengan target Capaian kinerja 4 dokumen atau 100% dan realisasi sampai akhir Triwulan II capaian kinerja sebanyak 2 dokumen atau 50% yang didukung total pagu sebesar Rp.15.000.000,- Pencapaian target didukung Sub Kegiatan,dengan rincian sebagai berikut :

Sub Kegiatan

1.1 Pelayanan Antar Kerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp.15.000.000,- Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sub kegiatan ini adalah Jumlah Perusahaan yang dilayani dengan target capaian 4 Dokumen, sampai akhir Triwulan II Tahun 2024 capaian kinerja sebanyak 2 dokumen atau 50% dengan serapan anggaran sebesar Rp.6.384.000,- atau 42,56%

VII. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan indicator Jumlah Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan target capaian kinerja sebanyak 1 Paket atau 100% dengan pagu sebesar Rp.15.000.000,- dengan realisasi sampai akhir Triwulan II capaian kinerja nihil dengan serapan anggaran Rp.730.000,- atau 4,87% Program ini ditunjang 1 Kegiatan dan 1 SubKegiatan,Adapun rincian kegiatan dan subkegiatan adalah sebagai berikut :

1.Kegiatan : Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian Indikator kinerjanya adalah Persentase Pengembangan Satuan pemukiman Pada Tahap Kemandirian dengan target capaian kinerja sebanyak 1 Paket atau 100% dengan pagu sebesar Rp.15.000.000,- dengan realisasi sampai akhir Triwulan II capaian kinerja nihil dengan serapan anggaran Rp.730.000,- atau 4,87% Pencapaian target didukung Sub Kegiatan,dengan rincian sebagai berikut :

Sub Kegiatan

2.2. Penguatan Infrastruktur Sosial,Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman dengan alokasi anggaran sebesar Rp.15.000.000,- Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sub kegiatan ini adalah Jumlah Satuan Permukiman yang

Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaandengan target capaian kinerja sebanyak 1 Paket atau 100% dengan realisasi sampai akhir Triwulan II capaian kinerja nihil dengan serapan anggaran Rp.730.000,- atau 4,87%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi

2.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat dilihat pada table berikut ini :

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) 10 Indikator Kinerja Utama .

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI / PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB

1	Meningkatnya Keaktifan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	%	Jumlah koperasi yang aktif berdasarkan RAT ---------- ---------- X 100% Jumlah keseluruhan koperasi	Laporan penilaian KSP/USP sehat dan data keragaman koperasi	Bidang Koperasi
2	Meningkatnya Volume Usaha dan Asset Usaha Mikro	Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru yang Berskala Mikro	Persen	Jumlah Pertumbuhan Wirausaha Baru ---------- **X 100%** Jumlah Wirausaha yang ada	Laporan Hasil Pendataan	Bidang UKM
3	Berkurangnya Masyarakat Pengangguran	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi ---------- ---------- X 100% Jumlah tenaga kerja keseluruhan	Laporan hasil Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Kerja	Bidang Tenaga Kerja dan UPT BLK
		Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	%	Jumlah Pencari Kerja (Pencaker) yang ditempatkan ---------- ---------- X 100% Jumlah Pencari Kerja Yang Terdaftar	Laporan Data Pencari Kerja	Bidang Tenaga Kerja
4		Persentase Transmigran Yang Mencapai Peningkatan		Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Keterampilan dan Kelembagaan		

	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Transmigrasi	Keterampilan Hidup dan Kelembagaan Untuk Hidup Mandiri	%	untuk hidup mandiri ---------- ---------- ----- x 100% Jumlah Transmigran yang ditempatkan	Laporan Hasil Pendataan	Bidang Transmigrasi
5	Meningkatnya tata kelola Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Nilai SAKIP Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Predikat	Nilai Evaluasi SAKIP oleh APIP	Hasil Penilaian APIP Inspektorat	Sekretariat

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Kunci Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Perencanaan	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
			2023	2024	2025	2026	2026
IKK. OUTPUT							
URUSAN KOPERASI DAN UKM							
1	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	*5%*	*7%*	*9%*	*10%*	*11%*	*11%*
2	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*
3	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	*5.3%*	*5.5%*	*5.7%*	*5.9%*	*6.1%*	*6.1%*
4	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang	*3.4%*	*3.5%*	*3.6%*	*3.7%*	*3.8%*	*3.8%*

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Perencanaan	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
			2023	2024	2025	2026	2026
	dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabuapten/kota						
5	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabuapten/kota	*0%*	*5%*	*10%*	*15%*	*20%*	*20%*
6	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabuapten/kota	*0%*	*5%*	*10%*	*15%*	*20%*	*20%*
7	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabuapten/kota	*0%*	*5%*	*10%*	*15%*	*20%*	*20%*
8	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat nomor induk koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabuapten/kota	*10.2%*	*11%*	*11.5%*	*12%*	*12.5%*	*12.5%*
9	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabuapten/kota	*0%*	*5%*	*10%*	*15%*	*20%*	*20%*
10	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabuapten/kota	*0%*	*5%*	*10%*	*15%*	*20%*	*20%*
11	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabuapten/kota	*89%*	*92%*	*95%*	*98%*	*100%*	*100%*
12	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabuapten/kota	*0%*	*5%*	*10%*	*15%*	*20%*	*20%*
13	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	*9%*	*11%*	*13%*	*15%*	*17%*	*17%*
14	Persentase jumlah usaha mikro yang dinput kedalam sistem *online data sistem*(ODS)	*35%*	*45%*	*60%*	*80%*	*100%*	*100%*

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Perencanaan	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
			2023	2024	2025	2026	2026
15	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	*29%*	*30%*	*35%*	*50%*	*70%*	*70%*
16	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas standardisasi dan sertifikasi produk usaha	*0.01%*	*0.05%*	*0.1%*	*0.15%*	*0.2%*	*0.2%*
17	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran	*0.08%*	*0.09%*	*0.1%*	*0.15%*	*0.2%*	*0.2%*
18	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan	*0.87%*	*1%*	*2%*	*3%*	*5%*	*5%*
19	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	*0.08%*	*0.09%*	*0.1%*	*0.15%*	*0.2%*	*0.2%*
URUSAN TENAGA KERJA							
20	Dokumen Perencanaan tenaga kerja kab/kota	*0%*	*c*	*10%*	*15%*	*20%*	*20%*
21	Persentase akurasi proyeksi indicator dalam rencana tenaga kerja	*0%*	*5%*	*10%*	*15%*	*20%*	*20%*
22	Jumlah perusahaan yang penyusunan rencana tenaga kerja di kab/kota	*0%*	*5%*	*10%*	*15%*	*20%*	*20%*
23	Persentase penerapan program PBK dengan kualifikasi klaster	*0%*	*5%*	*10%*	*15%*	*20%*	*20%*
24	Persentase instruktur bersertifikat kompotensi	*0%*	*5%*	*10%*	*15%*	*20%*	*20%*
25	Rasio jumlahinstruktur terhadap peserta pelatihan	16 Orang	16	17	18	19	19
26	Persentase LPKy ang terakreditasi						
27	Persentase LPK yang memiliki jumlah Pengangguran yang di latih	4 LPK	5	6	7	8	8
28	Jumlah pengangguran yang dilatih	48 Orang	64	80	96	112	112
29	Persentase lulusan bersetrifikat pelatihan	48 Orang	64	80	96	112	112
30	Persentase						

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Perencanaan	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
			2023	2024	2025	2026	2026
	Penyerapan lulusan	50 %	50	55	60	65	65
31	Lulusan bersertifikatkonpetensi	192 orang	192	222	222	244	244
32	Jumlahcalon pekerja migrant Indonesia (CPMI)/calon tenagakerja Indonesia (CTKI)yang diberikan pelatihan						
33	Jumlah pelatihan calonpekerjamigrant Indonesia(CPMI)/calon tenaga kerjaIndonesia (CTKI)						
34	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktifitas	15 Perusahaan	15	17	17	17	17
35	Data tingkat Prodiktifitas total						
36	Persentase perusahaan yang telahmemiliki peraturan perusahaan (PP)	8 Perusahaan	8	9	10	11	11
	Persentase perusahaan yang telahmemiliki perjanjian kerja bersama (PKB)	9 Perusahaan	10	12	14	16	16
37	Rekapitulasi tahunan jumlah konpederansi SP/SB yangtercatat, pederasi SP/SB yang tercatat SP/SB diperusahaan yang tercatat SP/SB diluar	4 SP	4	4	4	4	4
38	Persentase						

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Perencanaan	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
			2023	2024	2025	2026	2026
	perusahaan yang sudahmenyusun struktur skala upah	16 Perusahaan	16	16	16	16	16
39	Persentase perusahaan yang sudahmenyusun struktur skala upah	16 Perusahaan	16	16	16	16	16
40	Persentase perusahaan yang telahterdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	21 Perusahaan	21	21	21	21	21
41	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	4 Perusahaan	4	4	4	4	4
42	Jumlah mogok kerja						
43	Jumlah penutupan perusahaan	1 Perusahaan	1	1	1	1	1
44	Jumlah perselisihan kepentingan	2 Perusahaan	2	2	2	2	2
45	Jumlah Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) dalam 1(satu) perusahaan						
46	Jumlah persilisihanPHK	3 Perselisihan	3	4	3	4	4
47	Jumlah pekerja/buruh yang ter PHK	48 Orang	10	15	20	25	25
48	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	3 Perusahaan	3	3	3	3	3
49	Lembaga kerjasama (LKS)bripartit						

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Perencanaan	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
			2023	2024	2025	2026	2026
	Kabupaten/ko ta yang diberdayakan						
50	Persentase perselisihan hubungan industrial yang Diselesaikan melalui perjanjian bersama oleh mediator hubungan industrial	3 Perusahaan	3	3	3	3	3
51	Jumlah lowongan kerja yangtersedia diwilayah kabupaten/kota	3500 Orang	3500	3500	3500	3500	3500
52	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kabupaten/kota	754 orang	800	800	800	900	900
53	Jumlah bursa kerja khusus (BKK) wilayah kabupaten/kota						
54	Jumlah tenagakerja khusus terdaftar dalam 1 kabupaten/kota						
55	Jumlah pejabat fungsional pengantar kerja		1	1	1	1	1
56	Jumlah lembaga penempatan tenaga kerjaswasta (LPTKS) antarkerja local dalam1wilayah kabupaten/kota	3 Lembaga	3	3	3	3	3
57	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh Dinas/bidang tenaga kerja kabupaten/kota	4 Dokumen	4	4	4	4	4
58	Jumlah penetapan tenaga kerjamelalui informasi pasar kerja (IPK) online (sisnaker)	418 Orang	450	500	550	600	600

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Perencanaan	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
			2023	2024	2025	2026	2026
59	Jumlah calon pekerja migrant Indonesia(CPMI)/calon tenaga kerja Indonesia (CTKI)yang mendapat kansosialisasi	32 Orang	40	45	50	55	55
60	Jumlah calon pekerja migrant Indonesia (CPMI)/calon tenaga kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pasilitasi kepulangan						
61	Jumlah calon pekerja migrant Indonesia (CPMI)/calon tenaga kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan Pelatihan kerja						
62	Data pemberdayaan pekerja migrant Indonesia (PMI)/tenaga kerja Indonesia(TKI) purna dan keluarganya						
63	Jumlah layanan terpadu satu atap(LTSA) yang dibentuk						
URUSAN TRANSMIGRASI							
64	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapanya	3 Lokasi	3	3	3	3	3
65	Jumlah satu Pemukimanan transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	3 Lokasi	3	3	3	3	3
66	Jumlah satuan pemukiman	3 Lokasi	3	3	3	3	3

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Perencanaan	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
			2023	2024	2025	2026	2026
	yang dibina						
IKK OUTCOME							
URUSAN BIDANG TENAGA KERJA							
67	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu kerencana tenaga kerja	100 %	100	100	100	100	100
68	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	23 %	23%	25 %	25%	30 %	30 %
69	Tingkat produktifitas tenaga kerja	100	100	100	100	100	100
70	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS bripartite,Struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	100	100	100	100	100	100
71	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar Negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/Kota	77	77	79	81	83	83

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar

NO	Indikator	IKU	IKK	SPM	TPB	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi	
						Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
-1	-2	3	-4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	Persentase koperasi aktif	√				*73%*	*75%*	*76%*	*78%*	69%		*76%*	*78%*
2	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota		√			*7%*	*9%*	*10%*	*11%*	1.18%		*10%*	*11%*
3	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota		√			*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	100%		*100%*	*100%*
4	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam darah kab/kota		√			*5.5%*	*5.7%*	*5.9%*	*6.1%*	7.1%		*5.9%*	*6.1%*
5	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota		√			*3.5%*	*3.6%*	*3.7%*	*3.8%*	6.7%		*3.7%*	*3.8%*
6	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota		√			*5%*	*10%*	*15%*	*20%*	1.6%		*15%*	*20%*
7	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota		√			*5%*	*10%*	*15%*	*20%*	0.02%		*15%*	*20%*
8	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasianuntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		√			*5%*	*10%*	*15%*	*20%*	0%		*15%*	*20%*
9	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota		√			*11%*	*11.5%*	*12%*	*12.5%*	5.9%		*12%*	*12.5%*
10	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi		√			*5%*	*10%*	*15%*	*20%*	0.8%		*15%*	*20%*

	dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota												
11	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota		√			*5%*	*10%*	*15%*	*20%*	0%		*15%*	*20%*
12	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota		√			*92%*	*95%*	*98%*	*100%*	52.5%		*98%*	*100%*
13	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota		√			*5%*	*10%*	*15%*	*20%*	0.8%		*15%*	*20%*
14	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mkro	√				*11%*	*13%*	*15%*	*17%*	9.97%		*15%*	*17%*
15	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam system online Data system (ODS)		√			*45%*	*60%*	*80%*	*100%*	14.3%%		*80%*	*100%*
16	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra		√			*30%*	*35%*	*50%*	*70%*	9.007%		*50%*	*70%*
17	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha		√			*0.05%*	*0.1%*	*0.15%*	*0.2%*	0.085%		*0.15%*	*0.2%*
18	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran		√			*0.09%*	*0.1%*	*0.15%*	*0.2%*	0.085%		*0.15%*	*0.2%*
19	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan		√			*1%*	*2%*	*3%*	*5%*	0.51%		*3%*	*5%*
20	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan		√			*0.09%*	*0.1%*	*0.15%*	*0.2%*	0.079%		*0.15%*	*0.2%*
21	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	√				*100 %*	*100 %*	*100 %*	*100 %*			*100 %*	*100 %*
22	Persentase Tenaga Kerja yang di tempatkan	√				*80 %*	*80%*	*85%*	*85 %*			*85%*	*85 %*
23	Dokumen perencanaan tenaga kerja kab/kota					*5%*	*10%*	*15%*	*20%*	0		*15%*	*20%*

24	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja					*5%*	*10%*	*15%*	*20%*	0		*15%*	*20%*
25	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota					*5%*	*10%*	*15%*	*20%*	0		*15%*	*20%*
26	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster					*5%*	*10%*	*15%*	*20%*	0		*15%*	*20%*
27	Persentase infrastruktur bersertifikat kompetensi					*5%*	*10%*	*15%*	*20%*	0		*15%*	*20%*
28	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan					16	17	18	19	8		18	19
29	Persentase LPK yang terakreditasi									5			
30	Persentase LPK yang memiliki jumlah penganggur yang dilatih					5	6	7	8	5		7	8
31	Jumlah penganggur yang dilatih					64	80	96	112	192		96	112
32	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan					64	80	96	112	192		96	112
33	Persentase penyerapan lulusan					50	55	60	65	70%		60	65
34	Lulusan bersertifikat kompetensi					192	222	222	244	122		222	244
35	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan									7			
36	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)									1			
37	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas					15	17	17	17	0		17	17
38	Data tingkat produktivitas total												

39	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)					8	9	10	11	3		10	11
40	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)					10	12	14	16	3		14	16
41	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat,federasi SP/SB yang tercatat SP/SB di perusahaan yang tercatat SP/ SB diluar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan					4	4	4	4	2		4	4
42	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah					16	16	16	16	3		16	16
43	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan					21	21	21	21	74		21	21
44	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih					4	4	4	4	0		4	4
45	Jumlah mogok kerja									0			
46	Jumlah penutupan perusahaan					1	1	1	1	0		1	1
47	Jumlah perselisihan kepentingan					2	2	2	2	0		2	2
48	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan									0			
49	Jumlah perselisihan PHK					3	4	3	4	0		3	4
50	Jumlah pekerja/buruh yang ter PHK					10	15	20	25	0		20	25
51	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite									0			

						3	3	3	3			3	3
52	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kabupaten/kota yang diberdayakan									0			
53	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial					3	3	3	3	0		3	3
54	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah Kabupaten.kota					3500	3500	3500	3500	2480		3500	3500
55	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota					800	800	800	900	606		800	900
56	Jumlah bursa kerja khusus (BKK) wilayah kab/kota									2			
57	Jumlah tenaga kerja khusus terdaftar dalam satu kab/kota									0			
58	Jumlah pejabat Fungsional Pengantar Kerja					1	1	1	1	1		1	1
59	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja local dalam satu wilayah kabupaten/kota					3	3	3	3	0		3	3
60	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh Dinas bidang ketenagakerjaan kab/kota					4	4	4	4	5		4	4
61	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)					450	500	550	600	45		550	600
62	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)yang mendapatkan sosialisasi					40	45	50	55	7		50	55
63	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata									7			
64	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan									7			
65	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja									7			

66	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya									7			
67	Persentase Transmigran Yang Mencapai Peningkatan Keterampilan Hidup dan Kelembagaan Untuk Hidup Mandiri					48,2%	48,2%	48,2%	48,2%	65		48,2%	48,2%
68	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya					3	3	3	3	3		3	3
69	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya					3	3	3	3	1		3	3
70	Jumlah satuan permukiman yang bina					3	3	3	3	1		3	3

Berdasarkan tabel T-C.30 di atas dapat digambarkan bahwa realisasi capaian kinerja pada renja SKPD belum dapat dicapai secara maksimal, hal disebabkan akibat kurangnya pos anggaran yang menyebabkan kondisi ekonomi melemah yang berdampak pada semua sektor perekonomian.Hal lain yang menjadi penyebabnya rendahnya capaian realisasi koperasi yang melakukan RAT adalah kurangnya kapasitas dan kesadaran pengelola koperasi untuk melaksanakan RAT sebagai salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan setiap tahunnya. Dari data yang diperoleh dari Bidang Koperasi pada tahun buku 2023 hanya 37 koperasi yang melakukan RAT dari 361 koperasi. Ini berarti hanya 10,25 % yang melakukan RAT, begitu pula halnya pada Tahun 2024 ini sampai bulan Juli baru 25 koperasi yang melakukan RAT atau 6.83 %, sedangkan salah satu persyaratan untuk dikategorikan koperasi sehat adalah melaksanakan RAT setiap tahun dan tepat waktu. Apabila RAT tidak dilaksanakan berarti ada permasalahan yang besar dalam pengelolaan koperasinya.

Untuk kategori koperasi aktif pada tahun 2023 sebanyak 266 koperasi dari 361 koperasi di Kabupaten Takalar atau sekitar 67%, sementara untuk Tahun 2024 ini koperasi aktif sebanyak 266 dari 366 koperasi yang ada di Kabupaten Takala atau sekitar 69,95. Dan diharapkan untuk tahun-tahun mendatang akan lebih banyak koperasi aktif.

Permasalahan yang masih sering muncul dalam pelaksanaan kegiatan adalah belum ada data yang valid tentang jumlah koperasi aktif, koperasi kurang aktif, koperasi sehat, cukup sehat, kurang sehat dan dalam pengawasan khusus. Demikian pula dengan data jumlah UKM, jumlah IKM, jumlah UKM dan IKM yang sudah dibina oleh Pemerintah Daerah.

Secara umum dapat digambarkan bahwa penyebab utama kurangnya pencapaian realisasi dari target yang ditentukan dalam renstra SKPD adalah keterbatasan anggaran.

2.3. Hambatan, Upaya Pencapaian dan Rekomendasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2024

2.3.1. Hambatan Dalam Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sampai dengan Triwulan II

Adapun hambatan dalam pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2024 adalah terdapat beberapa kegiatan yang anggaran kasnya berada pada triwulan III dan IV disebabkan karna pengaturan persentase anggaran kas.

2.3.2. Upaya Dalam Pencapaian Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II

Upaya dalam pencapaian pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II yaitu dengan memaksimalkan sisa anggaran yang ada dan melakukan penyesuaian terhadap target pencapaian outcome.

2.3.3. Rekomendasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2024 Triwulan selanjutnya

Dari beberapa permasalahan yang muncul di atas, maka solusi atau penyelesaian yang dapat ditawarkan adalah:

a. Melakukan pendataan terhadap koperasi, baik menyangkut tingkat kesehatan maupun tingkat keaktifan koperasi
b. Melakukan pendataan jumlah IKM, UKM dimasing-masing kelurahan dan desa
c. Melakukan kegiatan pelatihan terhadap pelaku usaha yang dapat meningkatkan skill dan pengetahuannya tentang berwirausaha
d. Perlunya dukungan dana yang cukup demi untuk mencapai output atau keluaran yang maksimal.
e. Pencipataan iklim usaha yang sehat dan kondusif sangat diperlukan untuk membangun kestabilan ekonomi kerakyatan melalui kemudahan regulasi perizinan, penataan struktur usaha.
f. Peningkatan sarana/prasarana publik disektor Tenaga Kerja

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran

Sebagaimana Tema Pembangunan Kabupaten Takalar Tahun 2024 adalah ”Optimalisasi Pengembangan Sumber Daya Alam untuk Pemulihan Ekonomi Menuju Takalar yang Unggul, Sejahtera dan Bermartabat” dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Takalar Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan kompetensi teknis dan kewirausahaan tenaga kerja, pencari kerja dan wirausahawan
2. Penajaman target penerima manfaat dalam gerakan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan secara terpadu.
3. Pengembangan sektor koperasi guna menunjang iklim investasi yang sehat dan berkualitas
4. Pengintegrasian perencanaan pembangunan infrastruktur kabupaten ke tingkat desa yang berkelanjutan.
5. Peningkatan kualitas kehidupan keagamaan dan kualitas ketertiban, ketentraman dan perlindungan masyarakat.
6. Penegakan kedisiplinan dan meningkatkan kinerja aparatur serta penata kelolaan pemerintahan daerah dan desa.

Sedangkan tujuan dan sasaran Renacana Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 sebagaimana ditetapkan dalam RPD Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 dan termuat dalam RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2024 yang sesuai dengan kewenangan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Takalar 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2024
1	2	3	4
Mewujudkan perekonomian		Pertumbuhan Ekonomi	4.62-5.98

yang inklusif dan ramah lingkunga	Meningkatnya produktivitas dan penyerapan tenaga kerja sektor-sektor perekonomian daerah	Tingkat Pengangguran Terbuka	3
	Berkurangnya Penduduk Miskin	Angka Kemiskinan	7.09

Dengan memperhatikan tema dan prioritas serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta tujuan dan sasaran Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	KONDISI AWAL 2022	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				KONDISI AKHIR
			2024	2024	2025	2026	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
TUJUAN : 1 Meningkatkan Kualitas Koperasi dan Produktifitas UMK	**Persentase Koperasi yang Berkualitas**	*11%*	*13%*	*15%*	*17%*	*19%*	*19%*
	Persentase Usaha Mikro yang Meningkat menjadi Usaha Kecil	*0.001%*	*0.001%*	*0.01%*	*0.015%*	*0.02%*	*0.02%*
Sasaran :1 Meningkatnya Keaktifan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	*54,17%*	*73%*	*75%*	*76%*	*78%*	*80%*
Sasaran : 2 Meningkatnya Volume Usaha dan Asset Usaha Mikro	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	*9*	*11*	*131*	*13*	*15*	*200*

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	KONDISI AWAL 2022	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE- -				KONDISI AKHIR
			2024	2024	2025	2026	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
Tujuan 2 : Peningkatan Kesempatan Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	17,15 %	20 %	22 %	23 %	25 %	25 %
Sasaran 1 : Berkurangnya Masyarakat Pengangguran	Persentase Tenaga Kerja bersertifikat Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase TenagaKerja yang ditempatkan	75,51 %	80 %	80%	85%	85 %	85 %
Tujuan 3 : Peningkatan Masyarakat Transmigrasi Yang Mandiri	Persentase Masyarakat Transmigrasn yangmampu hidup mandiri	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pembinaan Transmigran	Persentase Transmigran Yang Mencapai Peningkatan Keterampilan Hidup dan Kelembagaan Untuk Hidup Mandiri	48,2%	48,2%	48,2%	48,2%	48,2%	48,2%
TUJUAN : 4 Meningkatkan tata kelola pada Dinas Koperasi, UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	**Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi**	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*
Sasaran : 1 Meningkatnya tata kelola Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Nilai sakip Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	*CC*	*B*	*BB*	*BB*	*BB*	*BB*

Untuk mencapai tujuan yang akan dicapai maka telah ditetapkan sasaran strategis yang diukur melalui tujuh indikator sasaran. Indikator tersebut digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi:

a. Sasaran : Meningkatnya Keaktifan Koperasi.

Salah satu faktor misi kepala daerah Kabupaten Takalar adalah "Meningkatkan pendapatan dan meringankan beban hidup masyarakat". Untuk mewujudkan misi tersebut, maka salah satu hal yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Ukm Dan Perdagangan adalah dengan membina kelompok koperasi. Dalam mengukur pencapaian tugas tersebut maka diukur dengan beberapa indikator yaitu persentase koperasi aktif, koperasi yang melakukan RAT

b. Sasaran : Meningkatnya Volume Usaha dan Asset Usaha Mikro

Salah satu faktor misi kepala daerah Kabupaten Takalar adalah "Meningkatnya Volume Usaha dan Asset Usaha Mikro ". Untuk mewujudkan misi tersebut, maka salah satu hal yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Ukm Dan Perdagangan adalah dengan membina kelompok Usaha mikro dan kecil. Dalam mengukur pencapaian tugas tersebut maka diukur dengan beberapa indikator yaitu Rasio Pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro.

c. Sasaran : Berkurangnya Masyarakat Pengangguran

Salah satu misi kepala daerah Kabupaten Takalar adalah "Berkurangnya Masyarakat Pengangguran". Untuk mewujudkan misi tersebut, maka salah satu hal yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Ukm Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah dengan melakukan pelatihan pelatihan terhadap calon tenaga kerja, Dalam mengukur pencapaian tugas tersebut maka diukur dengan beberapa indikator yaitu Persentase TenagaKerja bersertifikat Kompetensi, Persentase TenagaKerja yang ditempatkan.

d. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pembinaan Transmigran

Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dikabupaten Takalar adalah Meningkatnya Kualitas Pembinaan Transmigran. Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan pembinaan kelompok transmigran agar lebih mampu hidup mandiri. Dalam mengukur pencapaian tugas tersebut maka diukur dengan indikator yaitu Persentase Transmigran YangMencapai Peningkatan Keterampilan Hidup dan Kelembagaan Untuk Hidup Mandiri

e. Sasaran : Meningkatnya tata kelola Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Salah satu faktor yang mempengaruhi pemerintahan yang baik dikabupaten Takalar adalah Meningkatnya tata kelola Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Dalam mengukur pencapaian tugas tersebut maka diukur indikator yaitu Nilai sakip Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

3.2. Reviuw terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Hasil review terhadap rancangan awal Perubahan RKPD Tahun 2024 sesuai dengan Tabel T-C.31 adalah sebagai berikut:

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Kabupaten Takalar

Nama Perangkat Daerah : Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				**7,969,054,745**					**7,969,054,745**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA		**PERSENTASE PEMENUHAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	100 %	**7,273,465,345**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Persentase Pemenuhan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	**7,273,465,345**	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	**42,468,400**	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Persentase Pelaksanaan Dokumen Perencanaan**	100 %	**42,468,400**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Pattallassang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	11,505,400	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Pattallassang	Jumlah Renstra dan Renja serta perubahannya yang disusun	2 Dok	11,505,400	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Pattallassang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	5,791,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Pattallassang	Dokumen RKA Perangkat Daerah yang disusun	1 Dok	5,791,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Pattallassang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	5,705,800	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Pattallassang	Dokumen Perubahan RKA Perangkat Daerah yang disusun	1 Dok	5,705,800	

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kec. Pattallassang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dok	4,532,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kec. Pattallassang	Dokumen DPA Perangkat Daerah yang disusun	1	Dok	4,532,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kec. Pattallassang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dok	4,176,900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kec. Pattallassang	Dokumen Perubahan DPA Perangkat Daerah yang disusun	1	Dok	4,176,900	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Pattallassang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Dok	5,049,300	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Pattallassang	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun (Sakip : LPJ, LPPD)	1	Dok	5,049,300	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Pattallassang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Dok	5,708,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Pattallassang	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Triwulanan)	4	Dok	5,708,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Daerah**	100	%	**6,987,997,200**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Daerah**	100	%	**6,987,997,200**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Pattallassang	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan ASN	65	Peg	6,958,278,100	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Pattallassang	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan ASN	65	Peg	6,958,278,100	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Pattallassang	Laporan pelaksanaan verifikasi	12	Dok	21,159,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Pattallassang	Laporan pelaksanaan verifikasi	12	Dok	21,159,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Pattallassang	Laporan Keuangan akhir tahun yang disusun	1	Dok	5,500,300	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Pattallassang	Laporan Keuangan akhir tahun yang disusun	1	Dok	5,500,300	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Pattallassang	Laporan Keuangan Bulanan/Semsteran	1	Dok	3,059,800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Pattallassang	Laporan Keuangan Bulanan/Semsteran	1	Dok	3,059,800	

	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang tersedia**	100	%	**6,965,520**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang tersedia**	100	%	**6,965,520**	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Pattallassang	Laporan Barang Milik Daerah	4	Dok	6,965,520	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Pattallassang	Laporan Barang Milik Daerah	4	Dok	6,965,520	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Persentase ASN yang mendapatkan pakaian dinas dan ikut pelatihan**	100	%	**-**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase ASN yang mendapatkan pakaian dinas dan ikut pelatihan**	100	%	**-**	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	Kec. Pattallassang	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapan yang diadakan	65	ASN	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	Kec. Pattallassang	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapan yang diadakan	65	ASN	-	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kec. Pattallassang	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	5	ASN	-	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kec. Pattallassang	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	5	ASN	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	100	%	**54,870,080**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	100	%	**54,870,080**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Pattallassang	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3	Unit	23,330,080	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Pattallassang	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3	Unit	23,330,080	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Pattallassang	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	4	Exp.	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Pattallassang	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	4	Exp.	-	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Pattallassang	Frekwensi rapat - rapat koordinasi yang dilaksanakan	40	Kali	31,540,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Pattallassang	Frekwensi rapat - rapat koordinasi yang dilaksanakan	40	Kali	31,540,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100	%	**-**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100	%	**-**	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Pattallassang	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	3	Unit	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Pattallassang	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	3	Unit	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100	%	**163,219,895**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100	%	**163,219,895**	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Pattallassang	Jumlah jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Listrik)	36	Rek	112,819,895	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Pattallassang	Jumlah jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Listrik)	36	Rek	112,819,895	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Pattallassang	Jumlah jasa kebersihan kantor	60	Org	50,400,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Pattallassang	Jumlah jasa kebersihan kantor	60	Org	50,400,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100	%	**17,944,250**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100	%	**17,944,250**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Pattallassang	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara secara rutin/berkala	12	Unit	11,734,250	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Pattallassang	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara secara rutin/berkala	12	Unit	11,734,250	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Pattallassang	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	3	Unit	6,210,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Pattallassang	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	3	Unit	6,210,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Pattallassang	Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	3	Unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Pattallassang	Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	3	Unit	-	
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		**Persentase Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Regulasi yang Berlaku**	**100**	**%**	**56,532,400**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**		**Persentase Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Regulasi yang Berlaku**	**100**	**%**	**56,532,400**	
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		**Persentase Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	100	%	**56,532,400**	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	100	%	**56,532,400**	

	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Pattallassang	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	70	Kop	56,532,400	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Pattallassang	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	70	Kop	56,532,400	
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		**Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**	**100**	**%**	**-**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**		**Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**	**100**	**%**	**-**	
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	100	%	**-**	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	100	%	**-**	
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kec. Pattallassang	Jumlah Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang di laksanakan	60	Kop	-	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kec. Pattallassang	Jumlah Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang di laksanakan	60	Kop	-	
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		**Persentase Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Bagi Anggota Koperasi,UMKM**	**100**	**%**	**-**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**		**Persentase Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Bagi Anggota Koperasi,UMKM**	**100**	**%**	**-**	
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Bagi Anggota Koperasi,UMKM**	100	%	**-**	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Bagi Anggota Koperasi,UMKM**	100	%	**-**	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kec. Pattallassang	Jumalah peserta (pelatihan)	50	Org	-	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kec. Pattallassang	Jumalah peserta (pelatihan)	50	Org	-	

	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		**Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan dn Perlindungan Koperasi**	**100**	**%**	**-**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**		**Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan dn Perlindungan Koperasi**	**100**	**%**	**-**	
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase Pelaksaan Pelatihan Anggota Koperasi dan Pelaku UMKM**	100	%	**-**	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Pelaksaan Pelatihan Anggota Koperasi dan Pelaku UMKM**	100	%	**-**	
	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas , Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kec. Pattallassang	Jumlah peserta pelatihan anggota koperasi dan pelaku UMKM	50	Kop	-	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas , Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kec. Pattallassang	Jumlah peserta pelatihan anggota koperasi dan pelaku UMKM	50	Kop	-	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		**Persentase Pelaksanaan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro**	100	%	**22,500,000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**		**Persentase Pelaksanaan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro**	100	%	**22,500,000**	
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		**Persentase Pelaksanaan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro**	100	%	**22,500,000**	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**		**Persentase Pelaksanaan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro**	100	%	**22,500,000**	
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kec. Pattallassang	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	100	UKM	7,500,000	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kec. Pattallassang	Database potensi dan pengembangan usaha mikro	100	UKM	7,500,000	

	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kec. Pattallassang	Jumlah peserta (tentukan apakah pelatihan, bimtek, lokakarya, workshop, dsb) tentang Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	100	Org	15,000,000	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kec. Pattallassang	Jumlah peserta (tentukan apakah pelatihan, bimtek, lokakarya, workshop, dsb) tentang Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	100	Org	15,000,000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		**Persentase UKM yang diundang dalam pertemuan peningkatan kapasitas UMKM**	100	**%**	**616,557,000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**		**Persentase UKM yang diundang dalam pertemuan peningkatan kapasitas UMKM**	100	**%**	**616,557,000**	
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		**Persentase UKM yang diundang dalam pertemuan peningakatan kapasitas UMKM**	100	**%**	**616,557,000**	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**		**Persentase UKM yang diundang dalam pertemuan peningakatan kapasitas UMKM**	100	**%**	**616,557,000**	
	Pengembangan Usaha Mikro	Kec. Pattallassang	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	100	UKM	213,278,500	Pengembangan Usaha Mikro	Kec. Pattallassang	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	100	UKM	213,278,500	
	Penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan	Kec. Pattallassang	Jumlah usaha mikro yang meningkat skala usahanya	100	Org	190,000,000	Penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan	Kec. Pattallassang	Jumlah usaha mikro yang meningkat skala usahanya	100	Org	190,000,000	
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi		Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	570	Org	213,278,500	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi		Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	570	Org	213,278,500	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					**22,500,000**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**					**22,500,000**	

	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		**Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja**	100	**%**	**-**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**		**Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja**	100	**%**	**-**	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		**Persentase Dokumen Rencana dan Tenaga Kerja Yang Disusun**	100	**%**	**-**	**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**		**Persentase Dokumen Rencana dan Tenaga Kerja Yang Disusun**	100	**%**	**-**	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro (RTK)	Kec. Pattallassang	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1	Unit	-	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro (RTK)	Kec. Pattallassang	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1	Unit	-	
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		**Persentase Tenaga Kerja Bersertifikasi Kompetensi**	100	**%**	**7,500,000**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**		**Persentase Tenaga Kerja Bersertifikasi Kompetensi**	100	**%**	**7,500,000**	
	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Kec. Pattallassang	Persentase Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	15	Org	7,500,000	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Kec. Pattallassang	Persentase Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	15	Org	7,500,000	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	16	Org	7,500,000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	16	Org	7,500,000	
	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan Sektor Swasta untuk penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja		Jumlah kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	3	Kali	-	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan Sektor Swasta untuk penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja		Jumlah kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	3	Kali	-	

	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		**Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah**	111	**%**	**15,000,000**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**		**Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah**	111	**%**	**15,000,000**	
	Pelayanan Antar Kerja Daerah Kabupaten/Kota		**Cakupan Pelayanan antar kerja daerah**	100	**%**	**15,000,000**	**Pelayanan Antar Kerja Daerah Kabupaten/Kota**		**Cakupan Pelayanan antar kerja daerah**	100	**%**	**15,000,000**	
	Pelayanan Antar Kerja	Kec. Pattallassang	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	25	Laporan	15,000,000	Pelayanan Antar Kerja	Kec. Pattallassang	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	25	Laporan	15,000,000	Kec. Pattallassang
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		**Persentase Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	100	**%**	**-**	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**		**Persentase Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	100	**%**	**-**	
	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online		Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1	dok	-	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online		Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1	dok	-	
	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) Didaerah Kabupaten Kota		**Persentase Pekerja Migran yang ditempatkan di Daerah Kabupaten Kota**	10	**Kali**	**-**	**Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) Didaerah Kabupaten Kota**		**Persentase Pekerja Migran yang ditempatkan di Daerah Kabupaten Kota**	10	**Kali**	**-**	
	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Pekerja Migran Indonesia	Kec. Pattallassang	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan	4	Kali	-	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Pekerja Migran Indonesia	Kec. Pattallassang	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan	4	Kali	-	
	Penyediaan Layanan Terpadu Pada Calon Pekerja Migran	Kec. Pattallassang	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	10	Kali	-	Penyediaan Layanan Terpadu Pada Calon Pekerja Migran	Kec. Pattallassang	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	10	Kali	-	

	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		**Persentase Perusahaan Yang menerapkan tata kelola kerja yang layak(PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah**	**100**	**%**	**-**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**		**Persentase Perusahaan Yang menerapkan tata kelola kerja yang layak(PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah**	**100**	**%**	**-**	
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten Kota**	**100**	**%**	**-**	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten Kota**	**100**	**%**	**-**	
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kec. Pattallassang	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	50	Org	-	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kec. Pattallassang	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	50	Org	-	Kec. Pattallassang
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					**15,000,000**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**					**15,000,000**	
	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI		**Persentase perencanaan kawasan transmigrasi yang dilaksanakan sesuai rencana**	100	**%**	**-**	**PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI**		**Persentase perencanaan kawasan transmigrasi yang dilaksanakan sesuai rencana**	100	**%**	**-**	
	Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi		**Persentase pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi**	100	**%**	**-**	**Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi**		**Persentase pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi**	100	**%**	**-**	
	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Kec. Pattallassang	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	4	Kali	-	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Kec. Pattallassang	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	4	Kali	-	

	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		**Persentase Bangunan penduduk Yang Berasal Dari daerah Kabupaten/Kota**	100	**%**	**-**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**		**Persentase Bangunan penduduk Yang Berasal Dari daerah Kabupaten/Kota**	100	**%**	**-**	
	Penataan Persebaran Penduduk Yang Berasal Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase Penataan Persebaran penduduk Yang Berasal Dari daerah Kabupaten/Kota**	100	**%**	**-**	**Penataan Persebaran Penduduk Yang Berasal Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Penataan Persebaran penduduk Yang Berasal Dari daerah Kabupaten/Kota**	100	**%**	**-**	
	Penyuluhan Transmigrasi	Kec. Pattallassang	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	2	Kali	-	Penyuluhan Transmigrasi	Kec. Pattallassang	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	2	Kali	-	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI		**Persentase kawasan transmigrasi yang naik kelas**	100	**%**	**15,000,000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**		**Persentase kawasan transmigrasi yang naik kelas**	100	**%**	**15,000,000**	
	Pengembangan Satuan Pemukiman Pada Tahap Kemandirian		**Persentase Pengembangan Satuan pemukiman Pada Tahap Kemandirian**	100	**%**	**15,000,000**	**Pengembangan Satuan Pemukiman Pada Tahap Kemandirian**		**Persentase Pengembangan Satuan pemukiman Pada Tahap Kemandirian**	100	**%**	**15,000,000**	
	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan Dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Kec. Pattallassang	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	4	Kali	15,000,000	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan Dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Kec. Pattallassang	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	4	Kali	15,000,000	
			Jumlah			**8,006,554,745**						**8,006,554,745**	

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar melaksanakan tiga urusan yaitu urusan Koperasi dan UKM (urusan wajib) serta Tenaga Kerja dan Transmigrasi (urusan pilihan). Untuk melaksanakan urusan tersebut maka disusun program, kegiatan dan sub kegiatan yang berpedoman pada Renstra Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2023-2026. Pada Renstra tersebut terdapat sasaran strategis yang diukur dengan indikator yang mewadahi tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan pemerintah pusat dan pencapaian visi, misi kepala daerah serta kebutuhan daerah.

Pemerintah pusat melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan pengembangan sektor Koperasi UKM serta Tenaga Kerja dan Transmigrasi di daerah dengan fokus pada pembinaan koperasi UKM dan pengrajin serta peningkatan sektor Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Untuk menyelenggarakan pembinaan tersebut maka perlu dilakukan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan agar pembinaan tersebut berjalan dengan lancar.

Dalam Perubahan Renja Tahun 2024 ini, Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi rencananya akan melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan diusulkan dalam perubahan rencana keja meliputi 3 (tiga) urusan pemerintahan, yaitu urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM), urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi. Sementara jumlah program yang diusulkan sebanyak 8 Program, 12 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar **Rp.7.841.539.913** ***(Tujuh milyar delapan ratus empat puluh satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga belas rupiah),--.*** Dengan demikian ada penurunan sebesar **Rp.165.014.832,00** dari anggaran pokok sebesar **Rp. 8.006.554.745,00** atau turun sekitar 2 persen. Penurunan disebabkan adanya Pengurangan anggaran yang bersumber dari transfer dana alokasi umum (DAU). Sebagai gambaran dapat dilihat pada tabel T-C 33 di bawah ini:

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. TAKALAR

TAHUN 2024

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target Kinerja 2024			Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	02 17 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**6,406,591,005**	**7,273,465,345**	**7,108,450,513**						**100 %**	**7,273,465,345**	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	02 17 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**33,000,000**	**42,468,400**	**39,279,700**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik**	**6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Diskopnakertrans Kab. Takalar**	**100%**	**42,468,400**	**Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi**
	02 17 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	2	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	5,000,000	11,505,400	11,505,400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) / LAIN LAIN PAD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Diskopnakertrans Kab. Takalar	2 Dokumen	11,505,400	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	02 17 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	1	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	5,791,000	4,787,500	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) / LAIN LAIN PAD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Diskopnakertrans Kab. Takalar	1 Dokumen	5,791,000	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

	02	17	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	1	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	5,705,800	5,201,800	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) / LAIN LAIN PAD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Diskopnakertrans Kab. Takalar	1 Dokumen	5,705,800	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	02	17	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4	1	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4,000,000	4,532,000	3,869,100	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) / LAIN LAIN PAD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Diskopnakertrans Kab. Takalar	1 Dokumen	4,532,000	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	02	17	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4	1	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4,000,000	4,176,900	3,158,600	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) / LAIN LAIN PAD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Diskopnakertrans Kab. Takalar	1 Dokumen	4,176,900	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	02	17	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	1	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	5,049,300	5,049,300	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) / LAIN LAIN PAD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Diskopnakertrans Kab. Takalar	1 Laporan	5,049,300	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	02	17	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daewrah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	4	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	5,000,000	5,708,000	5,708,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) / LAIN LAIN PAD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Diskopnakertrans Kab. Takalar	4 Laporan	5,708,000	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2	**17**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah**	**100%**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**6,149,426,860**	**6,987,997,200**	**6,820,942,368**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik**	**6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Diskopnakertrans Kab. Takalar**	**100%**	**6,987,997,200**	**Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

	2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6768	1600	1600	1600	1600	6,119,726,860	6,958,278,100	6,793,263,268	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Diskopnakertrans Kab. Takalar	1600	6,958,278,100	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2	17	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48	12	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	21,700,000	21,159,000	21,159,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) / LAIN LAIN PAD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Diskopnakertrans Kab. Takalar	12 Dokumen	21,159,000	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2	17	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	1	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	5,500,300	5,500,300	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) / LAIN LAIN PAD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Diskopnakertrans Kab. Takalar	1 Laporan	5,500,300	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2	17	01	2.02	04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	0	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3,000,000	3,059,800	1,019,800	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) / LAIN LAIN PAD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Diskopnakertrans Kab. Takalar	1 Laporan	3,059,800	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2	**17**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah**	**100%**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**5,000,000**	**6,965,520**	**6,965,520**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik**	**6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Diskopnakertrans Kab. Takalar**	**100%**	**6,965,520**	**Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi**
	2	17	01	2.03	01	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	1	4	4	4	5,000,000	6,965,520	6,965,520	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) / LAIN LAIN PAD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bappelitbangda Kab. Takalar	4	6,965,520	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

	2	**17**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100%**	**0%**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**-**	**-**				**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik**	**6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Diskopnakertrans Kab. Takalar**	**100%**	**-**	**Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi**
	2	17	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapan yang diadakan	400	0	0	0	0	-	-		Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) / LAIN LAIN PAD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Diskopnakertrans Kab. Takalar	60 Pasang	-	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2	17	01	2.05	09	Pelatihan dan Pendidikan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	50	0	0	0	0		-		Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					10 ASN	-	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2	**17**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah**	**100%**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**38,000,000**	**54,870,080**	**51,422,080**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik**	**6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Diskopnakertrans Kab. Takalar**	**100%**	**54,870,080**	**Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi**
	2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25	0	1 Paket	1 Paket	1 Paket	5,000,000	23,330,080	19,882,080	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) / LAIN LAIN PAD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Diskopnakertrans Kab. Takalar	1 Paket	23,330,080	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2	17	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20	0	0	0	0	-	-		Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) / LAIN LAIN PAD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Diskopnakertrans Kab. Takalar	40 Dokumen	-	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

	2	17	01	2.02	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300	32	32	32	32	33,000,000	31,540,000	31,540,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) / LAIN LAIN PAD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Diskopnakertrans Kab. Takalar	120 Laporan	31,540,000	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2	17	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah**	**100%**	**0%**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	-	-				**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik**	**6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Diskopnakertrans Kab. Takalar**	**100%**	-	
	2	17	01	2.02	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	0	2 unit	2 unit	2 unit	-	-		Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) / LAIN LAIN PAD				2 unit	-	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	17	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**163,219,895**	**163,219,895**	**163,219,895**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik**	**6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Diskopnakertrans Kab. Takalar**	**100%**	**163,219,895**	
	2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	300	60	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	112,819,895	112,819,895	112,819,895	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Diskopnakertrans Kab. Takalar	36 Laporan	112,819,895	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	300	60	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	50,400,000	50,400,000	50,400,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Diskopnakertrans Kab. Takalar	6 Laporan	50,400,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	17	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**17,944,250**	**17,944,250**	**26,620,950**			**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik**	**6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Diskopnakertrans Kab. Takalar**	**100%**	**17,944,250**	

	2	17	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	48	12	4 Unit	4 Unit	4 Unit	11,734,250	11,734,250	20,410,950	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) / LAIN LAIN PAD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Diskopnakertrans Kab. Takalar	4 Unit	11,734,250	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48	0	4 unit	4 unit	4 unit	6,210,000	6,210,000	6,210,000						4 unit	6,210,000	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2	17	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15	0	0	0	0	-	-		Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) / LAIN LAIN PAD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Diskopnakertrans Kab. Takalar	1 Unit	-	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	**2**	**17**	**03**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**PERSENTASE KOPERASI AKTIF**	**100% 100%**	**0%**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**15,000,000**	**56,532,400**	**56,532,400**						**100% 100%**	**56,532,400**	**Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi**
	2	**17**	**03**	**2.01**		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pelaksaan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**	**100%**	**0%**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**15,000,000**	**56,532,400**	**56,532,400**			**1. Terwujudnya koperasi generasi baru yang maju dan modern**	**1. Terwujudnya koperasi generasi baru yang maju dan modern**		**100 %**	**56,532,400**	**Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi**
	2	17	03	2.01	02	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	200	0	65	65	65	15,000,000	56,532,400	56,532,400	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) / LAIN LAIN PAD			Lembaga Koperasi dan Masyarakat	200 orang	56,532,400	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

3	**2**	**17**	**07**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase Pelaksanaan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**22,500,000**	**22,500,000**	**22,500,000**			**Terwujudnya UMKM yang mampu bersaing di pasar domestik dan global**	**Peningkatan Perekonomian Daerah**		**100%**	**22,500,000**	**Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi**
	2	**17**	**07**	**2.01**		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**Persentase Pelaksanaan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**22,500,000**	**22,500,000**	**22,500,000**			**Terwujudnya UMKM yang mampu bersaing di pasar domestik dan global**	**Peningkatan Perekonomian Daerah**		**100%**	**22,500,000**	**Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi**
	2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	300 unit usaha	50	50 unit usaha	50 unit usaha	50 unit usaha	7,500,000	7,500,000	7,500,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) / LAIN LAIN PAD	Terwujudnya UMKM yang mampu bersaing di pasar domestik dan global	Peningkatan Perekonomian Daerah	Kelompok Usaha dan Masyarakat	50 unit usaha	7,500,000	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2	17	06	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	300 unit usaha	300 unit usaha	100 unit usaha	100 unit usaha	100 unit usaha	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) / LAIN LAIN PAD	Terwujudnya UMKM yang mampu bersaing di pasar domestik dan global	Peningkatan Perekonomian Daerah	Kelompok Usaha dan Masyarakat	100 unit usaha	15,000,000	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4	**2**	**17**	**08**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase usaha mikro naik kelas**	**49%**	**50%**	**100%**	**100%**	**100%**	**616,557,000**	**616,557,000**	**616,557,000**			**Terwujudnya UMKM yang mampu bersaing di pasar domestik dan global**			**100%**	**616,557,000**	**Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

	2	**17**	**08**	**2.01**		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**Persentase Usaha Mikro Yang meningkat menjadi Usaha kecil**	**0.5%**	**50%**	**100%**	**100%**	**100%**	**616,557,000**	**616,557,000**	**616,557,000**			**Terwujudnya UMKM yang mampu bersaing di pasar domestik dan global**			**100%**	**616,557,000**	**Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi**
	2	17	08	2.01	0002	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	100 unit usaha	300	100 unit usaha	100 unit usaha	100 unit usaha	215,378,600	213,278,500	213,278,500	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK	Terwujudnya UMKM yang mampu bersaing di pasar domestik dan global	Peningkatan Perekonomian Daerah	Kelompok Usaha dan Masyarakat	100 unit usaha	213,278,500	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2	17	8	2.01	0003	Penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan	Jumlah usaha mikro yang meningkat skala usahanya	50 unit usaha	0	50 unit usaha	50 unit usaha	50 unit usaha	190,000,000	190,000,000	190,000,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) / LAIN LAIN PAD	Terwujudnya UMKM yang mampu bersaing di pasar domestik dan global	Peningkatan Perekonomian Daerah	Kelompok Usaha dan Masyarakat	50 unit usaha	190,000,000	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2	17	8	2.01	0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi		0	50 unit usaha	50 unit usaha	50 unit usaha	211,178,400	213,278,500	213,278,500	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK	Terwujudnya UMKM yang mampu bersaing di pasar domestik dan global	Peningkatan Perekonomian Daerah	Kelompok Usaha dan Masyarakat	50 unit usaha	213,278,500	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5	**2**	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota**	**100%**	**0%**	**100%**	**100%**	**100%**	**15,000,000**	**15,000,000**	**15,000,000**			**3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing**			**100%**	**15,000,000**	**Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi**
	2	**07**	**04**	**2.01**		**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Tenaga kerja yang dilayani**		**0%**	**100%**	**100%**	**100%**	**15,000,000**	**15,000,000**	**15,000,000**						**100%**	**15,000,000**	**Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

	2	**07**	**04**	**2.01**	02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL		0	1000 orang	1000 orang	1000 orang	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) / LAIN LAIN PAD	3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian Daerah	Masyarakat dan Perusahaan	1000 orang	15,000,000	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
6	**2**	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase Tenaga kerja yang berkualitas dan terampil**		**83.30%**	**100%**	**100%**	**100%**	**7,500,000**	**7,500,000**	**7,500,000**						**100%**	**7,500,000**	**Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi**
	2	**07**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**Persentase tenaga kerja bersertifikasi kompetensi**		**83.30%**	**100%**	**100%**	**100%**	**7,500,000**	**7,500,000**	**7,500,000**						**100%**	**7,500,000**	**Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi**
	2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n		20 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	7,500,000	7,500,000	7,500,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) / LAIN LAIN PAD	3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian Daerah	Masyarakat dan Perusahaan	5 Paket	7,500,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
7	**3**	**32**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Persentase kawasan transmigrasi yang naik kelas**	**100%**	**25%**	**100%**	**100%**	**100%**	**15,000,000**	**15,000,000**	**15,000,000**						**100%**	**15,000,000**	**Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi**
	3	**32**	**04**	**2.01**		**Pengembangan Satuan pemukiman Pada Tahap Kemandirian**	**Persentase Pengembangan Satuan pemukiman Pada Tahap Kemandirian**	**100%**	**25%**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**15,000,000**	**15,000,000**	**15,000,000**			**4. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan**	**Peningkatan Perekonomian Daerah**		**100 %**	**15,000,000**	**Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi**
	3	32	04	2.01	02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	1 satuan permukiman	1 sp	1 SP	1 SP	1 SP	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) / LAIN LAIN PAD	4. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Perekonomian Daerah	Masyarakat Transmigran	1 SP	15,000,000	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
JUMLAH													**7,098,148,005**	**8,006,554,745**	**7,841,539,913**							**8,006,554,745**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. TAKALAR

TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Kinerja			Pagu			Keterangan
						Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	
1	2					3			4	7	8			9		10
1	**5**	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**6,406,591,005**	**7,273,465,345**	**7,108,450,513**	
	5	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Persentase pemenuhan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**33,000,000**	**42,468,400**	**39,279,700**	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2 Dokumen	2 Dokumen	5,000,000	11,505,400	11,505,400	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	5,791,000	4,787,500	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	5,705,800	5,201,800	
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1 Dokumen	1 Dokumen	4,000,000	4,532,000	3,869,100	

						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1 Dokumen	1 Dokumen	4,000,000	4,176,900	3,158,600	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1 Laporan	1	5,000,000	5,049,300	5,049,300	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daewrah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daewrah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4 Laporan	4 Laporan	5,000,000	5,708,000	5,708,000	
	5	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**6,149,426,860**	**6,987,997,200**	**6,820,942,368**	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1600	1600	1600	6,119,726,860	6,958,278,100	6,793,263,268	
						Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12 Dokumen	12 Dokumen	21,700,000	21,159,000	21,159,000	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1 Laporan	1	5,000,000	5,500,300	5,500,300	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	1 Laporan	1 Laporan	3,000,000	3,059,800	1,019,800	

	5	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**5,000,000**	**6,965,520**	**6,965,520**	
						Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	4	2	5,000,000	6,965,520	6,965,520	
	5	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**0%**	**100 %**	**100 %**	**-**	**-**		
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapan yang diadakan	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapan yang diadakan	0	0	0	-	-		
						Pelatihan dan Pendidikan Formal	Pelatihan dan Pendidikan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	0	0	0		-		
	5	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah**		**100 %**	**100 %**	**38,000,000**	**54,870,080**	**51,422,080**	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	1 Paket	1 Paket	5,000,000	23,330,080	19,882,080	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	0	0	-	-		
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32	32	32	33,000,000	31,540,000	31,540,000	
	5	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah**	**Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah**	**0%**	**100 %**	**100 %**	**-**	**-**		
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	2 unit	2 unit	-	-		

	5	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**163,219,895**	**163,219,895**	**163,219,895**	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	36 Laporan	36 Laporan	112,819,895	112,819,895	112,819,895	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	6 Laporan	6 Laporan	50,400,000	50,400,000	50,400,000	
	5	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**Persentase Pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**17,944,250**	**17,944,250**	**26,620,950**	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	4 Unit	4 Unit	11,734,250	11,734,250	20,410,950	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4	4 unit	4 unit	6,210,000	6,210,000	6,210,000	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	0	-	-		
2	**5**	**01**	**02**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**PERSENTASE KOPERASI AKTIF**	**PERSENTASE KOPERASI AKTIF**	**0%**	**100 %**	**100 %**	**15,000,000**	**56,532,400**	**56,532,400**	
	5	**01**	**02**	**2.01**		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pelaksaan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**	**Persentase Pelaksaan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**	**0%**	**100 %**	**100 %**	**15,000,000**	**56,532,400**	**56,532,400**	

						Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	0	65	65 orang	15,000,000	56,532,400	56,532,400	
						PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase Pelaksanaan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro**	**Persentase Pelaksanaan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro**	**100%**	**100%**	**100%**	**22,500,000**	**22,500,000**	**22,500,000**	
						Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**Persentase Pelaksanaan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro**	**Persentase Pelaksanaan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro**	**100%**	**100%**	**100%**	**22,500,000**	**22,500,000**	**22,500,000**	
						Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	50	50 unit usaha	50 unit usaha	7,500,000	7,500,000	7,500,000	
						Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	300 Unit usaha	100 unit usaha	100 unit usaha	15,000,000	15,000,000	15,000,000	
						PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase usaha mikro naik kelas**	**Persentase usaha mikro naik kelas**	**100%**	**100%**	**100%**	**616,557,000**	**616,557,000**	**616,557,000**	
						Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**Persentase Usaha Mikro Yang meningkat menjadi Usaha kecil**	**Persentase Usaha Mikro Yang meningkat menjadi Usaha kecil**	**100%**	**100%**	**100%**	**616,557,000**	**616,557,000**	**616,557,000**	
						Pengembangan Usaha Mikro	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	300	100 unit usaha	100 unit usaha	215,378,600	213,278,500	213,278,500	
						Penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan	Penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan	Jumlah usaha mikro yang meningkat skala usahanya	Jumlah usaha mikro yang meningkat skala usahanya	50	50 unit usaha	50 unit usaha	190,000,000	190,000,000	190,000,000	

						Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	50	50 unit usaha	50 unit usaha	211,178,400	213,278,500	213,278,500	
						PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota**	**Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota**	**100%**	**100%**	**100%**	**15,000,000**	**15,000,000**	**15,000,000**	
						Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Tenaga kerja yang dilayani**	**Persentase Tenaga kerja yang dilayani**	**100%**	**100%**	**100%**	**15,000,000**	**15,000,000**	**15,000,000**	
						Pelayanan antar Kerja	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	3000	1000 orang	1000 orang	15,000,000	15,000,000	15,000,000	
						PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase Tenaga kerja yang berkualitas dan terampil**	**Persentase Tenaga kerja yang berkualitas dan terampil**	**100%**	**100%**	**100%**	**7,500,000**	**7,500,000**	**7,500,000**	
						Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**Persentase tenaga kerja bersertifikasi kompetensi**	**Persentase tenaga kerja bersertifikasi kompetensi**	**100%**	**100%**	**100%**	**7,500,000**	**7,500,000**	**7,500,000**	
						Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	20 Paket	5 Paket	5 Paket	7,500,000	7,500,000	7,500,000	
						PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Persentase kawasan transmigrasi yang naik kelas**	**Persentase kawasan transmigrasi yang naik kelas**	**100%**	**100%**	**100%**	**15,000,000**	**15,000,000**	**15,000,000**	
	5	**01**	**02**	**2.02**		**Pengembangan Satuan pemukiman Pada Tahap Kemandirian**	**Pengembangan Satuan pemukiman Pada Tahap Kemandirian**	**Persentase Pengembangan Satuan pemukiman Pada Tahap Kemandirian**	**Persentase Pengembangan Satuan pemukiman Pada Tahap Kemandirian**	**100%**	**100 %**	**100 %**	**15,000,000**	**15,000,000**	**15,000,000**	

						Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	1 sp	1 SP	1 SP	15,000,000	15,000,000	15,000,000	
JUMLAH													**7,098,148,005**	**8,006,554,745**	**7,841,539,913**	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah periode Tahun 2024 yang disusun dalam rangka penyesuaikan program/kegiatan/sub kegiatan dan target kinerja, juga merupakan penyesuaian aggaran yang mengalami pengurangan akibat *refocusing* anggaran. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Takalar Nomor .....Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Dengan demikian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 ini akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2024. Selain itu Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2024. Evaluasi terhadap hasil Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan.

Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah akan melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.

Takalar, Juli 2024

Kepala Dinas Koperasi UKM
Tenaga Kerja dan Transmigrasi

SITTI NI'MAH, SE
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19650831 199203 2 007

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Renja SKPD (satuan kerja perangkat daerah) tahun 2024.

Renja Perubahan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar tahun 2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Revisi rencana strategis (RENSTRA) tahun 2023 – 2026 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar tahun 2023 dan bersifat indikatif. Selanjutnya Perubahan Renja SKPD menjadi landasan atau pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Tahun Anggaran 2024.

Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dan ikut berpartisipasi hingga tersusunnya Perubahan Renja ini. Perlu disadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Renja Perubahan ini, oleh karena itu masukan serta saran sangat kami harapkan.

Akhirnya semoga Perubahan Rencana Kerja ini dapat dilaksanakan dengan baik dan menjadi acuan dalam pelaksanaan sejumlah program dan kegiatan bagi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar agar kegiatan dapat berjalan lancar, tertib dan mencapai sasaran yang ditetapkan.

Takalar, Juli 2024
Kepala Dinas,

HADRIANI HANAFIE, S.Sos.,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19761128 200701 2 012

DAFTAR TABEL

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....
DAFTAR TABEL .....
DAFTAR ISI .....
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang .....
1.2 Landasan Hukum .....
1.3 Maksud dan Tujuan .....
1.4 Sistematika Penulisan .....

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sampai dengan Triwulan II.....
2.1.1 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 2024 yang terakomodir di APBD 2024
2.1.2 Evaluasi program kinerja kegiatan dan sub kegiatan dalam pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 2024
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.....
2.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)
2.2.3 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)
2.2.4 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)
2.3 Hambatan, upaya pencapaian dan rekomendasi pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun 2024
2.3.1 Hambatan dalam pelaksanaan kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga tahun 2024 sampai dengan triwulan II
2.3.2 Upaya dalam pencapaian pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga tahun 2024 sampai dengan triwulan II

2.3.3 Rekomendasi pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga tahun 2024 sampai dengan triwulan selanjutnya

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

3.1 Tujuan dan Sasaran……..

3.2 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun 2024

BAB IV PENUTUP……..

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menjadi dasar Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, maka setiap SKPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) sebagai acuan perencanaan kegiatan SKPD untuk kurun waktu satu tahun. Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD. Penyusunan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Penyusunan Renja SKPD ini mengacu pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), renstra SKPD, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.

Rancangan awal RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja SKPD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renstra SKPD menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja SKPD, selaras dengan Renstra SKPD. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra SKPD berdasarkan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja SKPD dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat menjadi acan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja SKPD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.

Rancangan renja SKPD dibahas pada forum SKPD yang dikoordinasikan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar, dimana pembahasan

tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD. Renja Perubahan SKPD ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang dikoordinir oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar. Kemudian **Renja Perubahan** tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada Anggaran Perubahan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja Perubahan) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 848);

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Akhir tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Akhir tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
18. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 15 Akhir tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan gubernur Nomor 30 tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun 2018-2023;
19. Peraturan Bupati Takalar Nomor 44 Akhir tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar (Berita Daerah Kabupaten Takalar Akhir tahun 2021 Nomor 44);
20. Peraturan Bupati Takalar Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 3);
21. Peraturan Bupati Takalar Nomor 223 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis PerangkatDaerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 223).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Perubahan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut:

A. Maksud penyusunan Renja Perubahan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjabarkan program dan kegiatan Renstra Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga kedalam program/kegiatan/ sub kegiatan tahunan;
2. Menyiapkan acuan bagi RAPBD;
3. Menyiapkan kerangka evaluasi kinerja program/kegiatan tahunan bagi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

B. Tujuan penyusunan Renja Perubahan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga adalah:

1. Agar terbangun konsistensi Perencanaan Tahunan dengan Perencanaan Lima Tahunan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Perubahan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 terdiri atas 4 (empat) bab sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan.
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Renja Perubahan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar Tahun 2024 agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sampai Triwulan II Tahun 2024.
Bab ini berisi tiga hal pokok yaitu Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar sampai dengan Triwulan II, Analisis kinerja pelayanan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar dan hambatan, upaya pencapaian dan rekomendasi pelaksanan renja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar tahun 2024.

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar.
Pada bab ini berisikan penjelasan mengenai tujuan dan sasaran, review terhadap rencangan perubahan RKPD tahun 2024 dan rencana program dan kegiatan perubahan Renja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 Triwulan selanjutnya.

BAB IV Penutup.
Pada Bab ini berisikan uraian penutup, yang menjelaskan poin-poin yang menjadi harapan berkenaan dengan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwiwsata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar Tahun 2024.
.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Evaluasi merupakan penilaian dari suatu perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga secara prinsip evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 merupakan proses penilaian realisasi yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan II tahun 2024. Proses ini sangat penting dan strategis dalam pencapaian pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar. Oleh karena itu, evaluasi ini harus dilakukan secara sistematis, profesional, terukur dan terstruktur agar hasil evaluasi ini benar-benar akuntabel dan berkualitas. Hasil dari evaluasi akan dijadikan masukan dalam proses pelaksanaan kegiatan pada Triwulan selanjutanya.

Pada dasarnya penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar sampai dengan triwulan II.

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Evaluasi atas perencanaan bertujuan untuk mengetahui apa yang harus dicapai oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar dalam mewujudkan Visi dan Misi dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar. Secara garis besar, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar tahun 2024 sampai pada Triwulan II telah dicapai dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari tingkat pencapaian target yang rata-rata mencapai untuk penyerapan dana dan rata-rata mencapai untuk kinerja *output* dan *outcome* kegiatan.

Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing- masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Rumusan Evaluasi dapat dilihat dari program dan kegiatan yang sesuai target, dibawah target, melebihi target serta faktor yang menjadi penghambat dan faktor pendukung tercapainya 100% Program dan kegiatan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar.

Kegiatan evaluasi Renja SKPD dan pencapaian realisasi kinerja sampai dengan triwulan II ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

2.1.1 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun 2024

Gambaran seberapa banyak jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar yang terakomodir di APBD pada Tahun 2024. dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-1
Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang ada dalam Renja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun 2024

APBD 2024							
No. Urut	Perangkat Daerah	Jmlh Prog.	Jmlh Keg	Jmlh Sub Keg.	Jumlah Indikator		
					Prog.	Keg.	Sub Keg.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun	7	17	43	8	27	83

Sumber: Renja Pokok 2024 dan SIPD 2024

Tabel diatas menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar pada tahun 2024 melaksakan sebanyak 7 program, 17 kegiatan dan 43 sub kegiatan. Sedangkan jumlah indikator program sebanyak 8, jumlah indikator kegiatan sebanyak 27, dan jumlah indikator sub kegiatan sebanyak 83 dengan total anggaran pada tahun 2024 berjumlah **Rp 8.655.779.214,-. (Delapan Milyard Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Empat Belas Rupiah).**

2.1.2 Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja APBD Triwulan II Tahun 2024

Informasi tentang realisasi anggaran kegiatan memberikan gambaran seberapa besar anggaran yang telah terserap pada Triwulan II untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam APBD 2024. Gambaran sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-2
Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Pada APBD
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar
Tahun 2024 hingga Triwulan II

No	Program	Pagu APBD	Realisasi S/D Triwulan II	Persentase	
		(Rp)	(Rp)	Fisik	Keu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	5.480.062.074	2.606.280.398	45	47,56
2	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	400.671.500	202.971.500	49	50,66
3	Pemasaran Pariwisata	600.000.000	395.000.000	60	65,83
4	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	270.000.000	90.202.000	30	33,41
5	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	500.000.000	454.420.000	89	90,88
6	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepramukaan	499.999.800	173.455.800	32	34,69
7	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahrgaan	905.045.840	238.105.600	23	26,31
	Total	**8.655.779.214**	**4.160.435.298**	**44**	**48,07**

Sumber : Laporan Realisasi Renja Disparpora Tahun 2024 Triwulan II

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa total jum lah anggaran yang terealisasi dalam APBD untuk pelaksanaan kegiatan di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 sebesar Rp. **4.160.435.298 (Empat Milyar Seratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus**

Sembilan Puluh Delapan Rupiah) anggaran tersebut dilaksanakan dalam 7 Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar. Realisasi serapan anggaran dari pelaksanaan kegiatan hingga triwulan II adalah sebesar **48,07** persen dengan capaian realisasi fisik sebesar **44** persen. Kondisi ini menunjukkan capaian masih kurang 6 persen dari target 50 persen yang diharapkan pada triwulan II. Dari 7 Program yang ada, Semua Program dikategorikan memiliki kinerja baik atau kategori tinggi dari sisi penyerapan anggaran sebab persentase diperoleh telah melebihi nilai 44 persen yang ditetapkan pada triwulan II yakni **Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota, Program Pengembangan Kapasitas Daya saing Kepemudaan, Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing keolahragaan,Program Pengembangan Kapasitas KePramukaan, Program Peningkatan Daya Terik Destinasi Pariwisata, Program Pemasaran Pariwisata, Program Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif** .

Sebagian besar penyerapan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga hingga triwulan II masih tergolong dalam kategori baik yaitu lebih dari <20 - >43 persen dengan jumlah sebanyak 7 (Tujuh) Program atau 44 persen dari jumlah keseluruhan Program, sebanyak 2 (Dua) Program atau 62 persen dari jumlah keseluruhan Program dengan realisasi anggaran yang tergolong rendah dengan serapan anggaran realisasi 0 – 20 persen hingga triwulan II dan hanya terdapat 1 (satu) Program yang dapat dikategorikan memiliki kinerja baik atau kategori tinggi dari sisi penyerapan anggaran sebab persentase diperoleh telah melebihi nilai 43 persen yang ditetapkan pada triwulan II

2.1.2.1 Evaluasi Capaian Pendanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun 2024

Informasi tentang capaian pendanaan memberikan gambaran capaian berdasarkan realisasi anggaran pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dimulai dari program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terdapat pada Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Capaian kinerja pendanaan tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori **Rendah** untuk realisasi 0 – 20%, Kategori **Sedang** Untuk realisasi anggaran lebih besar dari >20 – 43 persen dan kategori **Tinggi** untuk realisasi anggaran diatas 43 persen. Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 43 persen didasarkan atas tingkat capaian yang

diharapkan untuk triwulan II adalah 43 persen, sehingga jika terdapat realisasi dengan capaian realisasi pendanaan lebih dari 43 persen dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi.

Evaluasi Hasil capaian pendanaan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II Sebagai berikut:

1. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Program

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pendanaan pada level program anggaran pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan menggunakan kategori tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa jumlah program yang dilaksanakan anggaran pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebanyak 7 program dengan rincian capaian yang masuk pada kategori rendah sebanyak 0 program atau 0% (realisasinya 0-20 persen). Untuk capaian kinerja kategori sedang sebanyak 3 program atau 25 persen (realisasi >20-43 persen), dan untuk capaian kinerja kategori tinggi sebanyak 4 program atau 90 % (realisasi diatas 43 persen).

2. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Kegiatan

Untuk evaluasi pelaksanaan Capaian kinerja pendanaan pada level kegiatan pada masing-masing perangkat daerah dapat dijelaskan bahwa terdapat 17 kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2024. Dari keseluruhan kegiatan tersebut terdapat 17 kegiatan atau 44 persen yang realisasi pendanaannya hingga triwuan II tidak dalam kategori rendah yaitu 0 – 20 persen, sedang yang berada dalam kategori sedang sebanyak 3 kegiatan atau 25 persen, dan kategori tinggi dengan capaian realisasi diatas 43 persen sebanyak 4 kegiatan atau 90 persen.

3. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Sub Kegiatan

Adapun evaluasi capaian kinerja pendanaan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga pada level sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 43 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2024 terdapat 43 sub kegiatan atau 14 persen yang capaian kinerja pendanaanya masih rendah, sedangkan yang masuk dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan sedang terdapat 4 sub kegiatan atau 25 persen, dan 27 sub kegiatan dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan tinggi atau 35 persen sebab telah dapat mencapai realisasi pendanaan lebih dari 43 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan II.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas capaian kinerja pendanaan berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-3
Rekapitulasi Capaian Anggaran berdasarkan Program, Kegiatan,
Sub Kegiatan Renja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar Triwulan II Tahun 2024

Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan		
		0 - 20%	>20 –43%	> 43%		0 - 20%	>20 – 43%	> 43%		0 - 20%	>20 –43%	> 43%
		(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)
2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	7	0	3	4	17	3	4	10	43	11	4	28

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Disparpora Tahun 2024 Triwulan II

Keterangan:

0-20	Rendah
>20-43	Sedang
>43	Tinggi

2.1.2.2 Evaluasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 2024

Informasi tentang capaian kinerja memberikan gambaran capaian kinerja realisasi target kinerja pada masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Capaian kinerja tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori **Rendah** dengan realisasi 0 – 20 persen, Kategori **Sedang** untuk realisasi kinerja lebih besar dari 20 – 43 persen dan kategori **Tinggi** dengan realisasi kinerja diatas 43 persen. Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 43 persen didasarkan atas tingkat capaian yang diharapkan untuk triwulan II adalah 43 persen, sehingga jika terdapat capaian realisasi kinerja lebih dari 45 persen dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi.

Kegiatan evaluasi Renja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga serta pencapaian realisasi kinerja sampai dengan triwulan II ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

1. Evaluasi Capaian Kinerja Outcome pada Level Program

Untuk evaluasi pelaksanaan kinerja outcome pada level program dapat digambarkan sebagai berikut: untuk pencapaian target kinerja program pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dapat dijelaskan bahwa jumlah program yang dilaksanakan anggaran pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebanyak 7 program dengan rincian capaian yang masuk pada kategori rendah sebanyak 0 program atau 0% (realisasinya 0-20 persen). Untuk capaian kinerja kategori sedang sebanyak 3 program atau 25 persen (realisasi >20-43 persen), dan untuk capaian kinerja kategori tinggi sebanyak 4 program atau 90 persen (realisasi diatas 43 persen) pada triwulan II Tahun 2024.

.

2. Evaluasi Capaian Kinerja *Outcome* pada Level Kegiatan

Sebagai gambaran pencapaian target kinerja kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 17 kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan kedua terdapat 43 subkegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2024. Dari keseluruhan kegiatan tersebut terdapat 43 kegiatan atau 44 persen yang realisasi pendanaannya hingga triwuan II masih dalam kategori rendah yaitu 0 – 20 persen, sedang yang berada dalam kategori sedang sebanyak 3 kegiatan atau 25 persen, dan kategori tinggi dengan capaian realisasi diatas

43 persen sebanyak 4 kegiatan atau 90 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan II Tahun 2024.

3. Evaluasi Capaian Kinerja *Outcome* pada Level Sub Kegiatan

Sebagai gambaran pencapaian target kinerja kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 17 kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan kedua terdapat 43 subkegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2024. Dari keseluruhan kegiatan tersebut terdapat 43 kegiatan atau 44 persen yang realisasi pendanaannya hingga triwuan II masih dalam kategori rendah yaitu 0 – 20 persen, sedang yang berada dalam kategori sedang sebanyak 3 kegiatan atau 25 persen, dan kategori tinggi dengan capaian realisasi diatas 43 persen sebanyak 4 kegiatan atau 90 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan II Tahun 2024.

Evaluasi Hasil capaian kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-4
Rekapitulasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renja
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar Triwulan II Tahun 2024

Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan		
		0 - 20%	>20 –43%	> 43%		0 - 20%	>20 – 43%	> 43%		0 - 20%	>20 –43%	> 43%
		(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)
2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	7	0	3	4	17	3	4	10	43	11	4	28

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Disparpora Tahun 2024 Triwulan II

Keterangan:

0-20	Rendah
>20-43	Sedang
>43	Tinggi

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Analisis kinerja pelayanan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja OPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai target indikator sasaran dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan. Untuk menganalisis kinerja pelayanan atau tingkat capaian kinerja sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar tahun 2024 sampai dengan Triwulan II dan pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksud untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan sasaran. Pencapaian setiap indikator kinerja dilakukan dengan metodologi perbandingan capaian kinerja dengan target kinerja tahun 2024 sampai dengan triwulan II sebagai tolak ukur dari keberhasilan suatu kegiatan.

Agar sasaran strategis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar dapat tercapai , maka diperlukan poin-poin yang menjadi indikator kinerja sebagai tolak ukur penilaian dalam menentukan keberhasilan dari suatu kegiatan. Ada beberapa indikator kinerja yang dapat diukur untuk melihat capaian pelayanan kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar, seperti Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci, dan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB/SDGs).

2.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga oleh Kepala Dinas. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran Organisasi. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program.

Indikator kinerja dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait target capaian keberhasilan dalam mewujudkan arah kebijakan RENSTRA Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang digariskan pada tahun yang

penetapannya dijadikan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Penetapan IKU daerah merupakan ukuran tingkat keberhasilan pencapaian indikator sasaran RENSTRA yang digariskan pada Tahun 2024. Penetapan IKU juga merupakan upaya pencapaian prioritas pembangunan Kabupaten Takalar. Lebih lanjut Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel II-5 berikut ini :

Tabel II-5
Capaian Indikator Kinerja Utama 2022, Asumsi Capaian Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2023, dan Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022		Asumsi Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024
			Target	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase Peningkatan Jumlah Pengunjung wisata	Persen	100%	113%	100%	100%
2	Persentase Peningkatan PAD Sektor Pariwisata	Persen	100%	4,5%	50%	100%
3	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Pelaku Ekonomi Kreatif (%)	Persen	100%	65%	80%	95%
4	Jumlah Pemuda yang mendapat prestasi level Propinsi dan Nasional	P = 28	0	0	100	70
		N= 0	18	18	20	20
5	Persentase Anggota Organisasi Pemuda yang berprestasi sebagai Pemuda Wirausaha (Orang)	Persen	100%	71%	488%	70%
6	Persentase Anggota Organisasi Pemuda yang berprestasi sebagai Pemuda Pelopor (Orang)	Persen	100%	70%	80%	85%

7	Persentase Anggota Pramuka yang berprestasi dalam kegiatan kepramukaan (Orang)	Persen	100%	100%	100%	100%
8	Jumlah Cabang Olahraga yang mendapatkan Medali pada Event/ Kejuaraan Nasional dan Internasional (Cabor)	Jumlah	24	12	24	24
9	Persentase Atlet yang mendapatkan Medali (Orang)	Persen	100%	60%	75%	70%
10	Indeks reformasi birokrasi dinas pariwisata, pemuda dan olahraga	Nilai	BB (71-72)	BB (71-72)	BB (71-72)	BB (71-72)
11	Persentase Ketepatan waktu dalam menyusun perencanaan program/kegiatan dan laporannya	Persen	100%	100%	100%	100%
12	Penyerapan anggaran dan laporan tepat waktu	Persen	100%	100%	100%	100%
13	Nilai SAKIP pada Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	Nilai	BB	BB	BB	BB

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun 2024; diolah

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Indikator Kinerja Kunci disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintah kabupaten. Penetapan target indikator kinerja kunci selanjutnya disajikan pada tabel II-6 berikut:

Tabel II-6
Asumsi Capaian Tahun 2023 dan Target Tahun 2024 Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar

No.	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Asumsi Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024
1	Jumlah Entitas Pengelolaan Destinasi	Nilai	9	12
2	Jumlah kelengkapan Infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	Persen	70%	71%
3	Jumlah Tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kab/ kota	Nilai	135	200
4	Jumlah Wisatawan Mancanegara perkebangasaan	Nilai	147	150
5	Jumlah Promosi Event Daerah yang terlaksana di dalam Negeri	Nilai	1	1
6	Jumlah Event Luar Negeri yang di ikuti Provinsi	Nilai	0	0
7	Jumlah Industri Pariwisata Daerah	Nilai	275	350
8	Persentase Tenaga Kerja disektor Pariwisata yang disertifikasi	Persen	5%	5%
9	Persentase SDM Peserta Pembekalan Sektor Kepariwisataan	Persen	90%	100%
10	Jumlah Lokasi yang memperoleh pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemitraan Usaha Masyarakat	Nilai	12	14
11	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	47%	25%

No.	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Asumsi Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024
12	Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang datang ke Kab/Kota	Persen	327%	200%
13	Tingkat Hunian Akomodasi	Persen	2327%	2500%
14	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Nilai (Rp)	40.960.000.000	50.500.000.000
15	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	Nilai (Rp)	1.004.145.331	1.150.000.000

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun 2024; diolah

2.2.3 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar bukan merupakan pengampuh indikator SPM.

2.2.4 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan /Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistainable Development Goals (TPB/SDGs) kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global. TPB/SDGs bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan. Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penetapan target tahun 2024 indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistainable Development Goals (TPB/SDGs) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga disajikan pada tabel II-7 berikut:

Tabel II-7
Penetapan Target Indikator TPB/SDGs Kabupaten Takalar Tahun 2024

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target 2024	OPD PenanggungJawab
Tujuan 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua					
8.9.Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.					
8.9.1*	Proporsi Kontribusi Pariwisata terhadap PBD	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Nilai (Rp)	0	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Nilai	10	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Nilai	250.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Nilai (Rp)	241,135,191	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Nilai	250	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun 2024; diolah

2.3 Hambatan, Upaya Pencapaian dan Rekomendasi Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun 2024

2.3.1 Hambatan dalam Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sampai dengan Triwulan II

Hambatan dan kendala dalam pelaksanakan kegiatan triwulan kedua dipengaruhi oleh:

1. Adanya peraturan pemerintah pusat yang menyebabkan harus dilakukan penyesuaian anggaran.
2. Terdapatnya beberapa kegiatan yang proses pengadaan barang dan jasanya belum dilaksanakan, baik dikarenakan masih dalam tahapan proses lelang ataupun belum masuk pada tahapan kegiatannya.
3. Terdapatnya beberapa belanja barang yang harga dan spesifikasinya tidak lagi sesuai dengan harga saat ini.
4. Perlunya Dukungan keterampilan tambahan bagi sumberdaya aparatur pengelola kegiatan untuk melakukan pengukuran atau estimasi perencanaan program terhadap alokasi anggaran yang dialokasikan baik yang dipengaruhi oleh fluktuasi aktifitas kedewanan maupun kalkulasi evaluasi pada program dan kegiatan.
5. Beberapa kegiatan belum dapat terlaksana disebabkan karena diperlukan dokumen pelaksanaan kontrak yang melalui proses tender dalam pelaksanaannya dan kurangnya SPD.
6. Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sampai dengan Triwulan II pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga masih rendah karena beberapa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan jadwal pelaksanaannya akan terlaksana pada triwulan III dan IV seperti kegiatan Paskibraka dan pelaksanaan DAK Non Fisik.

2.3.2 Upaya dalam Pencapaian Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sampai dengan Triwulan II

Merujuk dari faktor penghambat Pelaksanaan rencana kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sampai dengan triwulan ke II tentunya mengalami berbagai kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Berikut dapat disampaikan beberapa upaya yang dilakukan dalam pencapaian keberhasilan kinerja, antara lain:

1. Adanya komitmen pimpinan dan Koordinasi yang baik untuk melaksanakan kegiatan secara maksimal;
2. Adanya koordinasi/konsultasi yang sinergi antar struktur jabatan internal dan eksternal serta adanya komunikasi yang terjalin antar pemimpin dan yang dipimpin dalam organisasi;

3. Tersedianya Sarana dan prasarana pendukung yang memadai;
4. Penyerapan program dan kegiatan masing-masing bidang dan kesekretariatan berjalan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan;
5. Adanya pedoman/dokumen Standar Pelayanan/SOP dan regulasi yang sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan;
6. Kualitas SDM yang mampu, terampil dan memadai serta memiliki komitmen dan motivasi untuk melakukan tugas dan fungsi secara maksimal dalam rangka memberikan pelayanan prima.

2.3.3. Rekomendasi pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga tahun 2024 Sampai Dengan Triwulan Selanjutnya

Berdasarkan uraian di atas terkait faktor penghambat pencapaian kinerja, serta upaya dalam pencapaian pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, maka Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga menyampaikan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Meningkatkan komunikasi dan integrasi program dalam lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga serta pengendalian dan evaluasi internal yang dilakukan secara terus menerus;
2. Perlunya Peran aktif seluruh KPA dan PPTK didalam mengawal pelaksanaan Program dan Kegiatan yang berjalan;
3. Peran aktif Kepala Dinas selaku PA didalam mengawasi, mengontrol dan membuat kebijakan serta keputusan;
4. Peran aktif Sub Bagian Perencanaan Program didalam berkoordinasi termasuk memberikan informasi, sosialisasi maupun kebijakan-kebijakan lainnya;
5. Perlunya tenaga SDM yang berkompeten didalam perencanaan;
6. Peningkatan kualitas SDM aparatur serta jumlah staf yang berkompeten;
7. Peningkatan sarana dan prasarana operasional sesuai dengan kebutuhan;
8. Perlunya melakukan penyusunan Renstra Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang baik, diawali dengan orientasi dan melibatkan seluruh pejabat/staf;
9. Perlunya melakukan evaluasi dan monitoring secara terus menerus dan berkelanjutan yang diiringi dengan pengelolaan data yang baik;
10. Adanya Kesesuaian Renstra dan RPJMD dalam pelaksanaan kegiatan;
11. Dalam penyusunan dokumen perencanaan tahap berikutnya memiliki data dan informasi yang akurat, sehingga perencanaan dan penganggaran dapat dilakukan dengan baik, efektif, dan efisien.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

3.1 Tujuan dan Sasaran

3.1.1 Tujuan

Adapun tujuan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berhubungan dengan Tujuan-2 pada RPD Kabupaten Takalar yakni Mewujudkan Perekonomian yang Inklusif dan Ramah Lingkungan
2. Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga Tujuan-1 pada RPD Kabupaten Takalar yakni Memperkuat Daya Saing Daerah
3. Meningkatkan Tata Kelola pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tujuan-3 pada RPD Kabupaten Takalar yakni Memperbaiki Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

3.1.2. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan dan merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari tujuan yang diformulasikan spesifik, mudah dicapai, rasional memperhatikan isu strategis daerah, disertakan pula indikator kinerja sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan dicapai selama empat tahun dan secara bertahap dapat diurai pencapaiannya setiap tahun.

Adapun sasaran yang akan capai oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar secara berkelanjutan selama kurun waktu 4 (empat) tahun kedepan, sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Takalar
2. Meningkatnya Nilai Produksi Pelaku Ekonomi Kreatif
3. Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan
4. Meningkatnya Daya Saing Keolahragaan
5. Meningkatnya Tata kelola Kinerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar beserta indikator kinerjanya disajikan pada tabel IV-1 dibawah ini:

Tabel III-1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar
Tahun 2023-2026

No.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL (n-2)	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				KONDISI AKHIR
			2021	2023	2024	2025	2026	2026
1	**Tujuan 1: MENINGKATKAN DAYA SAING PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH PENGUNJUNG WISATA**	45%	70%	90%	90%	100%	100%
	Sasaran 1.1 : Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Takalar	Persentase Peningkatan PAD Sektor Pariwisata	36%	40%	45%	50%	60%	60%
	Sasaran 1.2 : Meningkatnya Nilai Produksi Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Pelaku Ekonomi Kreatif (%)	30%	35%	40%	50%	60%	65%
2	**Tujuan 2 : MENINGKATKAN PRESTASI PEMUDA DAN OLAHRAGA**	**JUMLAH PEMUDA YANG MENDAPAT PRESTASI LEVEL PROVINSI DAN NASIONAL (Orang)**	P=28	30	35	40	45	50
			N=0	10	15	20	25	30
	Sasaran 2.1 : Meningkatnya Daya Saing kepemudaan	Persentase Anggota Organisasi Pemuda yang berprestasi sebagai Pemuda Wirausaha (Orang)	50%	50%	55%	65%	70%	75%

		Persentase Anggota Organisasi Pemuda yang berprestasi sebagai Pemuda Pelopor (Orang)	75%	75%	75%	75%	75%	75%
		Persentase Anggota Pramuka yang berprestasi dalam kegiatan kepramukaan (Orang)	25%	30%	35%	40%	45%	50%
	Sasaran 2.2 : Meningkatnya Daya Saing Keolahragaan	Jumlah Cabang Olahraga yang mendapatkan Medali pada Event/ Kejuaraan Nasional dan Internasional (Cabor)	55%	60%	65%	70%	75%	80%
		Persentase Atlet yang mendapatkan Medali (Orang)	60%	65%	70%	75%	80%	85%
3	**Tujuan 3 : MENINGKATKAN TATA KELOLA PADA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA**	**INDEKS REFORMASI BIROKRASI DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA**	N/A	BB (71-72)	BB (73-75)	BB (76-78)	BB (79-80)	BB (79-80)
	Sasaran 3.1 : Meningkatnya Tata kelola Kinerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Persentase Ketepatan waktu dalam menyusun perencanaan program/kegiatan dan laporannya	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Penyerapan anggaran dan laporan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Nilai SAKIP pada Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	B	BB	BB	BB	BB	BB

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun 2024; diolah

3.2 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun 2024

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar disusun guna menjadi acuan dalam pelaksanaan sejumlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setelah adanya perubahan dalam rencana kerja, yang diharapkan target capaian kinerja masing-masing bidang tercapai sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Revisi Rencana Strategis Tahun 2023-2025 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar disusun suatu Rencana Kinerja Tahunan (*Yearly Performance Plan*). Rencana Kerja merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategik maupun tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar Tahun 2024 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Perubahan Rencana Kinerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan yang baru untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud pada tahun 2024 yang akan datang.

Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan visi Pemerintah Kabupaten Takalar.

Di dalam Perubahan Renja Tahun 2024 ini terdapat rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar, dimana di dalammya terdapat 7 Program, 17 Kegiatan serta 43 Sub Kegiatan, dimana untuk penyebaran kegiatannya adalah untuk kegiatan rutin berlokasi di Kantor Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar dan kegiatan yang sifatnya koordinasi selain berlokasi pada Daerah setempat yakni pada Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar serta ada juga yang berlokasi di luar daerah.

Jumlah dana yang program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan Renja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar yang

dimaksud bersumber dari Dana Alakosi Umum (DAU) senilai **Rp. 8.655.779.214**. Rumusan perubahan rencana program dan kegiatan tahun 2022 beserta pendanaan yang diharapkan dapat terlaksananya tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar dan prakiraan maju program dan kegiatan untuk tahun 2024 dapat dilihat pada tabel III-5 berikut:

Tabel III-5
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
TAHUN 2024

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Kinerja RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024			Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Renja 2024	APBD 2024	Hasil Perubahan 2024	Renja 2024	APBD 2024	Hasil Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	7	19	20
					Persentase Peningkatan Jumlah Pengunjung Wisata																##########	DISPARPORA
					Persentase Peningkatan PAD Sektor Pariwisata																##########	DISPARPORA
	3	26	2		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Lama kunjungan Wisata	2 Hari	2 Hari	2 Hari	2 Hari	2 Hari	904,435,000	904,435,000	904,435,000	Kab.Takalar	Dana Alokasi Umum (DAU)/ Dan Alokasi Khusus (DAK)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Pemerintah, pengelolah industri wisata dan Masyarakat	2 Hari	999.435.000	DISPARPORA
	3	26	2	1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	80%	80%	80%	80%	80%	8,500,000	8,500,000	8,500,000	Kab.Takalar	Dana Alokasi Umum (DAU)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Pemerintah, pengelolah industri wisata dan Masyarakat	80%	8.500.000	DISPARPORA
	3	26	2	2.01	2 Perencanaan Pengembangan daya tarik wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik wisata kabupaten/kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4,500,000	4,500,000	4,500,000	Kec. Mangarabombang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Pemerintah, pengelolah industri wisata dan Masyarakat	1 Dokumen	4.500.000	DISPARPORA
	3	26	2	2.01	3 Pengembangan Daya Tarik wisata kabupaten/kota	Jumlah lokasi daya tarik wisata Kabupaten/kota sesuai dengan tahapan pengembangan (Rintisan, berkembang,pemantapan, revitalisasi)	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Kec. Polonghangkong Utara (wisata kuliner)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Pemerintah, pengelolah industri wisata dan Masyarakat	1 Lokasi	1.000.000	DISPARPORA
							1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Galesong Utara (wisata kuliner)	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Lokasi	1.000.000	DISPARPORA
							1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Tersebar di 7 Kecamatan: Galesong, Galut, Polut, Polsel, Marbo,	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Lokasi	1.000.000	DISPARPORA
	3	26	2	2.01	4 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	6 Kecamatan ((Galesong, Galut, Polut, polsel, Pattallassang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Pemerintah, pengelolah industri wisata dan Masyarakat	12 Dokumen	1.000.000	DISPARPORA
	3	26	2	2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	50%	50%	50%	50%	50%	50.000.000	50.000.000	50.000.000	4 Kecamatan (Polut, Galesong, Pattallassang, Marbo)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Pemerintah, pengelolah industri wisata dan Masyarakat	50%	985.935.000	DISPARPORA
	3	26	2	2.02	3 Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten /Kota	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kec. Marbo, Kec. Galut	Dana Alokasi Umum (DAU)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Pemerintah, pengelolah industri wisata dan Masyarakat	1 Lokasi	5.000.000	DISPARPORA
	3	26	2	2.02	4 Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Kec. Marbo	Dana Alokasi Umum (DAU)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Pemerintah, pengelolah industri wisata dan Masyarakat	1 Unit	1.000.000	DISPARPORA
	3	26	2	2.02	5 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Startegis Pariwisata Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	200.000.000	200.000.000	200.000.000	6 Kecamatan (Galesong, Galut, Polut, polsel, Pattallassang, Marbo)	PAD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Pemerintah, pengelolah industri wisata dan Masyarakat	12 Dokumen	300.000.000	DISPARPORA
	3	26	2	2.02	6 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	679.935.000	679.935.000	679.935.000	10 Kecamatan (peserta)	DAK NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Pemerintah, pengelolah industri wisata dan Masyarakat	6 Laporan	679.935.000	DISPARPORA

	3	26	2	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	50%	50%	50%	50%	50%	5,000,000	5,000,000	5,000,000		Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemda dan Para Pelaku usaha wisata/industri pariwisata	50%	5.000.000	DISPARPORA
	3	26	2	2.04	1	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000	2.000.000	2.000.000	4 Kecamatan (Polut, Galesong, Pattallassang, Marbo)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemda dan Para Pelaku usaha wisata/industri pariwisata	1 Dokumen	2.000.000	DISPARPORA
	3	26	2	2.04	4	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3,000,000	3,000,000	3,000,000		Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemda dan Para Pelaku usaha wisata/industri pariwisata	1 Laporan	3.000.000	DISPARPORA
	3	26	3			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan Mancanegara	100%	100%	100%	100%	100%	2.000.000	2.000.000	2.000.000	7 Kecamatan (Galesong, Galut, Polut, Polsel, marbo, Mapsu, Sanrobone) dan Makassar	Dana Alokasi Umum (DAU)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Pemerintah, pengelolah industri wisata dan Masyarakat	100%	4.000.000	DISPARPORA
							Persentase Peningkatan perjalan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100%	2.000.000	2.000.000	2.000.000		Dana Alokasi Umum (DAU)				100%	4.000.000	DISPARPORA
	3	26	3	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	4.000.000	4.000.000	4.000.000	7 Kecamatan (Galesong, Galut, Polut, Polsel, marbo, Mapsu, Sanrobone) dan Makassar	Dana Alokasi Umum (DAU)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Pemerintah, pengelolah industri wisata dan Masyarakat	100%	8.000.000	DISPARPORA
	3	26	3	2.01	1	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak,Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	7 Kecamatan (Galesong, Galut, Polut, Polsel, marbo, Mapsu, Sanrobone) dan Makassar	Dana Alokasi Umum (DAU)	Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga	Pemerintah, pengelolah industri wisata dan Masyarakat	2 Dokumen	2.000.000	DISPARPORA
	3	26	3	2.01	2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota (Gol)	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000	1.000.000	1.000.000		Dana Alokasi Umum (DAU)	Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga	Pemerintah, pengelolah industri wisata dan Masyarakat	1 Laporan	2.000.000	DISPARPORA
	3	26	3	2.01	3	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000	1.000.000	1.000.000		Dana Alokasi Umum (DAU)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Pemerintah, pengelolah industri wisata dan Masyarakat	2 Dokumen	2.000.000	DISPARPORA
	3	26	3	2.03	5	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	1.000.000	1.000.000		Dana Alokasi Umum (DAU)	Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan	Pemerintah, pengelolah industri wisata dan Masyarakat	1 Dokumen	2.000.000	DISPARPORA
							Persentase Peningkatan Nilai Produksi Pelaku Ekonomi Kreatif	35%	35%	35%	35%	35%	90.000.000	90.000.000	90.000.000		Dana Alokasi Umum (DAU)				35%	71.000.000	DISPARPORA
	2	26	4			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMAMFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase cakupan pengembangan ekonomi kreatif	50%	50%	50%	50%	50%	5.000.000	5.000.000	5.000.000	10 Kecamatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Pemerintah Daerah, Pelaku Ekonomi Kreatif	50%	10.000.000	DISPARPORA
	3	26	4	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	50%	50%	50%	50%	50%	5.000.000	5.000.000	5.000.000	10 Kecamatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang	Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Pemerintah Daerah, Pelaku Ekonomi Kreatif	50%	10.000.000	DISPARPORA
	3	26	4	2.02	5	Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	10 Kecamatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk	Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan	Pemerintah Daerah, Pelaku Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	10.000.000	DISPARPORA
	3	26	5			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku pariwisata dan ekraf yang bersertifikat kompetensi	80%	80%	80%	80%	80%	85.000.000	85.000.000	85.000.000	Kab. Takalar dan Makassar	Dana Alokasi Umum (DAU)	Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan	Pemerintah Daerah, Pelaku Ekonomi Kreatif	80%	61.000.000	DISPARPORA
	3	26	5	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi	80%	80%	80%	80%	80%	60.000.000	60.000.000	60.000.000	Kab. Takalar dan Makassar	Dana Alokasi Umum (DAU)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan	Pemerintah Daerah, Pelaku Ekonomi Kreatif	80%	41.000.000	DISPARPORA
	3	26	5	2.01	1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan	40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	40.000.000	40.000.000	40.000.000	Makassar	Dana Alokasi Umum (DAU)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan	Pemerintah Daerah, Pelaku Ekonomi Kreatif	40 Orang	21.000.000	DISPARPORA

	3	26	5	2.01	6	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kab.Takalar	Dana Alokasi Umum (DAU)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Pemerintah Daerah, Pelaku Ekonomi Kreatif	20 Orang	10.000.000	DISPARPORA
	3	26	5	2.01	7	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10 Kecamatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Pemerintah Daerah, Pelaku Ekonomi Kreatif	12 Dokumen	10.000.000	DISPARPORA
	3	26	5	2.02		**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	**Persentase Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	80%	80%	80%	80%	80%	25.000.000	25.000.000	25.000.000	**Makassar**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**	**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing**	**Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja**	**Pemerintah Daerah, Pelaku Ekonomi Kreatif**	80%	20.000.000	DISPARPORA
	3	26	5	2.02	1	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	40%	40%	40%	40%	40%	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Makassar	Dana Alokasi Umum (DAU)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Pemerintah Daerah, Pelaku Ekonomi Kreatif	40%	20.000.000	DISPARPORA
	Provinsi						**Jumlah Pemuda yang mendapat Prestasi Level Provinsi dan Nasional**	30	30	30	30	30	379.500.000	379.500.000	379.500.000			**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing**	**Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja**	**Pemerintah dan Organisasi Kepemudaan/Pemuda**	30	327.000.000	DISPARPORA
	Nasional							10	10	10	10	10								10		
							Persentase Anggota Organisasi Pemuda yang berprestasi sebagai Pemuda Wirausaha	50%	50%	50%	50%	50%	2.000.000	2.000.000	2.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan	Pemerintah dan Organisasi Kepemudaan/Pemuda	50%	7.000.000	DISPARPORA
							Persentase Anggota Organisasi Pemuda yang berprestasi sebagai Pemuda Pelopor	70%	70%	70%	70%	70%	232.000.000	232.000.000	232.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan	Pemerintah dan Organisasi Kepemudaan/Pemuda	70%	214.000.000	DISPARPORA
	2	19	2			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Persentase Pengembangan kapasitas daya Saing Kepemudaan**	100%	100%	100%	100%	100%	234.000.000	234.000.000	234.000.000	**10 Kecamatan dan Makassar**	**DAU/HIBAH**	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan	Pemerintah dan Organisasi Kepemudaan/Pemuda	100%	221.000.000	DISPARPORA
	2	19	2	2.01		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula,**	**Persentase Pelaksanaan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor**	100%	100%	100%	100%	100%	233.000.000	233.000.000	233.000.000	**10 Kecamatan dan Makassar**	**Dana Alokasi Umum (DAU)/HIBAH**	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Pemerintah dan Organisasi Kepemudaan/Pemuda	100%	219.000.000	DISPARPORA
	2	19	2	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dariSeluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10 Kecamatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan	Pemerintah dan Organisasi Kepemudaan/Pemuda	40 Orang	10.000.000	DISPARPORA
	2	19	2	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Jumlah Wirausaha Pemula Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Kab.Takalar	Dana Alokasi Umum (DAU)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan	Pemerintah dan Organisasi Kepemudaan/Pemuda	20 Orang	5.000.000	DISPARPORA
	2	19	2	2.01	4	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri,Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif,	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100.000.000	100.000.000	100.000.000	10 Kecamatan	HIBAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Pemerintah dan Organisasi Kepemudaan/Pemuda	100 Orang	100.000.000	DISPARPORA
	2	19	2	2.01	5	Fasilitasi Kebijakan Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Makassar	Dana Alokasi Umum (DAU)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga	Pemerintah dan Organisasi Kepemudaan/Pemuda	2 Dokumen	2.000.000	DISPARPORA
	2	19	2	2.01	6	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan,Pemeliharaan , dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Kec.Pattallassang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan	Pemerintah dan Organisasi Kepemudaan/Pemuda	1 Unit	2.000.000	DISPARPORA
	2	19	2	2.01	9	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Pelatihan Baris-Ba	71 Orang	71 Orang	71 Orang	71 Orang	71 Orang	120.000.000	120.000.000	120.000.000	Kec.Pattallassang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan	Pemerintah dan Organisasi Kepemudaan/Pemuda	71 Orang	100.000.000	DISPARPORA
	2	19	2	2.02		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah**	**Persentase Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan**	30%	30%	30%	30%	30%	1.000.000	1.000.000	1.000.000	**Kab. Takalar**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan	Pemerintah dan Organisasi Kepemudaan/Pemuda	30%	2.000.000	DISPARPORA
	2	19	2	2.02	2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Kab.Takalar	Dana Alokasi Umum (DAU)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan	Pemerintah dan Organisasi Kepemudaan/Pemuda	2 Dokumen	2.000.000	DISPARPORA

						Persentase Anggota Pramuka yang berprestasi dalam kegiatan kepramukaan	30%	30%	30%	30%	30%	50,000,000	50,000,000	50,000,000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan	Pemerintah dan Organisasi Kepemudaan/Pemuda	30%	50.000.000	DISPARPORA
	2	19	4			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase peningkatan kapasitas kepramukaan	100%	100%	100%	100%	100%	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Takalar (Kec. Pattallassang)	HIBAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan	Pemerintah dan Organisasi Kepramukaan	100%	50.000.000	DISPARPORA
	2	19	4	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	100%	100%	100%	100%	100%	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Takalar (Kec. Pattallassang)	HIBAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan	Pemerintah dan Organisasi Kepemudaan/Pemuda	100%	50.000.000	DISPARPORA
	2	19	4	2.01	2	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	10 Organisasi	10 Organisasi	10 Organisasi	10 Organisasi	10 Organisasi	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Kab.Takalar	HIBAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan	Pemerintah dan Organisasi Kepemudaan/Pemuda	10 Organisasi	25.000.000	DISPARPORA
	2	19	4	2.01	7	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Kec. Pattallassang	HIBAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan	Pemerintah dan Organisasi Kepemudaan/Pemuda	20 Unit	25.000.000	DISPARPORA
							Jumlah Cabang Olahraga yang mendapatkan Medali pada Event/ Kejuaraan Nasional dan Internasional	60%	60%	60%	60%	60%	74,000,000	74,000,000	74,000,000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan	Pemerintah dan Organisasi Olahraga / Atlet	60%	39.000.000	DISPARPORA
							Persentase Atlet yang mendapatkan Medali	65%	65%	65%	65%	65%	21,500,000	21,500,000	21,500,000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan	Pemerintah dan Organisasi Olahraga / Atlet	65%	17.000.000	DISPARPORA
	2	19	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Cakupan Pembinaan Olahraga	100%	100%	100%	100%	100%	95,500,000	95,500,000	95,500,000		Dana Alokasi Umum (DAU)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan	Pemerintah dan Organisasi Olahraga / Atlet	100%	56.000.000	DISPARPORA
	2	19	3	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi	100%	100%	100%	100%	100%	5,000,000	5,000,000	5,000,000	10 Kecamatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga	Pemerintah dan Organisasi Olahraga / Atlet	100%	10.000.000	DISPARPORA
	2	19	3	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	2,000,000	2,000,000	2,000,000	10 Kecamatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan	Pemerintah dan Organisasi Olahraga / Atlet	10 Dokumen	5.000.000	DISPARPORA
	2	19	3	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	3.000.000	3.000.000	3.000.000	10 Kecamatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan	Pemerintah dan Organisasi Olahraga / Atlet	10 Unit	5.000.000	DISPARPORA
	2	19	3	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah	50%	50%	50%	50%	50%	22.000.000	22.000.000	22.000.000	Kec. Pattallassang dan Makassar	Dana Alokasi Umum (DAU)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan	Pemerintah dan Organisasi Olahraga / Atlet	50%	17.000.000	DISPARPORA
	2	19	3	2.02	1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kec. Pattallassang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan	Pemerintah dan Organisasi Olahraga / Atlet	2 Dokumen	10.000.000	DISPARPORA
	2	19	3	2.02	2	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Kec. Pattallassang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan	Pemerintah dan Organisasi Olahraga / Atlet	1 Dokumen	2.000.000	DISPARPORA
	2	19	3	2.02	3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Makassar	Dana Alokasi Umum (DAU)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan	Pemerintah dan Organisasi Olahraga / Atlet	20 Orang	5.000.000	DISPARPORA
	2	19	3	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	51,000,000	51,000,000	51,000,000	Makassar dan 10 Kecamatan	Dana Alokasi Umum (DAU)/HIBAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan	Pemerintah dan Organisasi Olahraga / Atlet	100%	17.000.000	DISPARPORA
	2	19	3	2.03	2	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan	40 Pelatda	40 Pelatda	40 Pelatda	40 Pelatda	40 Pelatda	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Makassar	Dana Alokasi Umum (DAU)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan	Pemerintah dan Organisasi Olahraga / Atlet	40 Pelatda	5.000.000	DISPARPORA
	2	19	3	2.03	3	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	45,000,000	45,000,000	45,000,000	Makassar	HIBAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan	Pemerintah dan Organisasi Olahraga / Atlet	40 Orang	10.000.000	DISPARPORA
	2	19	3	2.03	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	10 Kecamatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan	Pemerintah dan Organisasi Olahraga / Atlet	1 Dokumen	2.000.000	DISPARPORA
	2	19	3	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	50%	50%	50%	50%	50%	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Makassar	Dana Alokasi Umum (DAU)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Pemerintah dan Organisasi Olahraga / Atlet	50%	5.000.000	DISPARPORA

	2	19	3	2.04	2	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Organisasi Keolahragaan	13 Organisasi	13 Organisasi	13 Organisasi	13 Organisasi	13 Organisasi	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Makassar	Dana Alokasi Umum (DAU)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Pemerintah dan Organisasi Olahraga / Atlet	13 Organisasi	5.000.000	DISPARPORA
	2	19	3	2.05		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**50%**	**50%**	**50%**	**50%**	**50%**	**16,500,000**	**16,500,000**	**16,500,000**	**Kec. Pattallassang dan Makassar**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**	**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing**	**Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja**	**Pemerintah dan Organisasi Olahraga / Atlet**	**50%**	**7.000.000**	**DISPARPORA**
	2	19	3	2.05	1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Kec. Pattallassang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja	Pemerintah dan Organisasi Olahraga / Atlet	1 Dokumen	2.000.000	DISPARPORA
	2	19	3	2.05	2	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	14.500.000	14.500.000	14.500.000	Kab.Takalar	Dana Alokasi Umum (DAU)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan	Pemerintah dan Organisasi Olahraga / Atlet	1 Laporan	5.000.000	DISPARPORA
							Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	**BB (71-72)**	**BB (71-72)**	**BB (71-72)**	**BB (71-72)**	**BB (71-72)**	**5.751.186.571**	**5.751.186.571**	**5.751.186.571**						**BB (71-72)**	**5.756.012.472**	**DISPARPORA**
							Persentase Ketepatan waktu dalam menyusun perencanaan program/kegiatan dan	100%	100%	100%	100%	100%	82.000.000	82.000.000	82.000.000						100%	66.000.000	DISPARPORA
							Penyerapan anggaran dinas	100%	100%	100%	100%	100%	5.628.946.571	5.628.946.571	5.628.946.571						100%	5.678.212.472	DISPARPORA
							Nilai SAKIP pada Dinas Pariwisata, Pemuda Dan	BB	BB	BB	BB	BB	40.240.000	40.240.000	40.240.000						BB	11.800.000	DISPARPORA
	X	X	1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan urusan penunjang perangkat daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**5.751.186.571**	**5.751.186.571**	**5.751.186.571**	**Kantor Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**		**Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**ASN/Pegawai**	**100%**	**5.756.012.472**	**DISPARPORA**
	X	X	1	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja**	**100%**	**1 Dokumen**	**100%**	**100%**	**100%**	**66.000.000**	**66.000.000**	**66.000.000**	**Kantor Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**		**Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**ASN/Pegawai**	**100%**	**55.000.000**	**DISPARPORA**
	X	X	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000	12.000.000	12.000.000		Dana Alokasi Umum (DAU)		Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan	ASN/Pegawai	1 Dokumen	12.000.000	DISPARPORA
	X	X	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000	9.000.000	9.000.000		Dana Alokasi Umum (DAU)		Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN/Pegawai	1 Dokumen	8.000.000	DISPARPORA
	X	X	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	1.000.000	1.000.000		Dana Alokasi Umum (DAU)		Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN/Pegawai	1 Dokumen	1.000.000	DISPARPORA
	X	X	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000	12.000.000	12.000.000		Dana Alokasi Umum (DAU)		Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN/Pegawai	1 Dokumen	10.000.000	DISPARPORA
	X	X	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kantor Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Dana Alokasi Umum (DAU)		Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN/Pegawai	1 Dokumen	4.000.000	DISPARPORA
	X	X	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	17.000.000	17.000.000	17.000.000		Dana Alokasi Umum (DAU)		Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN/Pegawai	1 Laporan	10.000.000	DISPARPORA
	X	X	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	12.000.000	12.000.000	12.000.000		Dana Alokasi Umum (DAU)		Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN/Pegawai	4 Laporan	10.000.000	DISPARPORA
	X	X	1	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**5.277.529.099**	**5.277.529.099**	**5.277.529.099**	**Kantor Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**		**Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**ASN/Pegawai**	**100%**	**5.443.855.000**	**DISPARPORA**
	X	X	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	3.646.516.599	3.646.516.599	3.646.516.599		Dana Alokasi Umum (DAU)		Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN/Pegawai	50 Orang	3.828.842.500	DISPARPORA
							Jumlah ASN yang mendapatkan TPP	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	1.320.875.000	1.320.875.000	1.320.875.000		Dana Alokasi Umum (DAU)		Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN/Pegawai	50 Orang	1.320.875.000	DISPARPORA
							Jumlah ASN yang mendapatkan obyektifitas lain	17 Orang	17 Orang	17 Orang	17 Orang	17 Orang	216.137.500	216.137.500	216.137.500		Dana Alokasi Umum (DAU)		Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN/Pegawai	17 Orang	216.137.500	DISPARPORA
	X	X	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	11.000.000	11.000.000	11.000.000		Dana Alokasi Umum (DAU)		Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan	ASN/Pegawai	12 Dokumen	10.000.000	DISPARPORA

	X	X	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengelolaan/Verifikasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengelolaan/Verifikasi	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Kantor Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Dana Alokasi Umum (DAU)		Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN/Pegawai	20 Dokumen	15.000.000	DISPARPORA
	X	X	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	16.000.000	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000	15.000.000	15.000.000		Dana Alokasi Umum (DAU)		Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN/Pegawai	12 Dokumen	12.000.000	DISPARPORA
	X	X	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	20.000.000	20.000.000		Dana Alokasi Umum (DAU)		Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN/Pegawai	1 Dokumen	10.000.000	DISPARPORA
	X	X	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000		Dana Alokasi Umum (DAU)		Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN/Pegawai	10 dokumen	10.000.000	DISPARPORA
	X	X	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	15.000.000	15.000.000	15.000.000		Dana Alokasi Umum (DAU)		Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN/Pegawai	12 Laporan	15.000.000	DISPARPORA
	X	X	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	8.000.000	8.000.000	8.000.000		Dana Alokasi Umum (DAU)		Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan	ASN/Pegawai	12 Dokumen	6.000.000	DISPARPORA
	X	**X**	**1**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Daerah pada Perangkat**	100%	100%	100%	100%	100%	16.000.000	16.000.000	16.000.000	**Kantor Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga**	Dana Alokasi Umum (DAU)		Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN/Pegawai	100%	11.000.000	DISPARPORA
	X	X	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	6.000.000	6.000.000	6.000.000	Kantor Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Dana Alokasi Umum (DAU)		Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN/Pegawai	12 Dokumen	6.000.000	DISPARPORA
	X	X	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	5.000.000	5.000.000	5.000.000		Dana Alokasi Umum (DAU)		Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN/Pegawai	2 Laporan	1.000.000	DISPARPORA
	X	X	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	5.000.000	5.000.000	5.000.000		Dana Alokasi Umum (DAU)		Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN/Pegawai	4 Laporan	4.000.000	DISPARPORA
	X	**X**	**1**	**2.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	50%	50%	50%	50%	50%	7.000.000	7.000.000	7.000.000	**Kantor Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga**	Dana Alokasi Umum (DAU)		Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN/Pegawai	50%	7.000.000	DISPARPORA
	X	X	1	2.04	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Kantor Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Dana Alokasi Umum (DAU)		Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN/Pegawai	4 Laporan	1.000.000	DISPARPORA
	X	X	1	2.04	4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	1.000.000	1.000.000	1.000.000		Dana Alokasi Umum (DAU)		Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN/Pegawai	24 Dokumen	1.000.000	DISPARPORA
	X	X	1	2.04	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	5.000.000	5.000.000	5.000.000		Dana Alokasi Umum (DAU)		Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN/Pegawai	24 Dokumen	500	DISPARPORA
	X	**X**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	100%	100%	100%	100%	100%	40.240.000	40.240.000	40.240.000	**Kantor Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga**	Dana Alokasi Umum (DAU)		Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN/Pegawai	100%	11.800.000	DISPARPORA
	X	X	1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Kantor Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Dana Alokasi Umum (DAU)		Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN/Pegawai	6 Unit	8.000.000	DISPARPORA
	X	X	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	50 Paket	50 Paket	50 Paket	50 Paket	15.240.000	15.240.000	15.240.000		Dana Alokasi Umum (DAU)		Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN/Pegawai	50 Paket	3.000.000	DISPARPORA
	X	X	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000	20.000.000	20.000.000		Dana Alokasi Umum (DAU)		Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN/Pegawai	12 Dokumen	6.000.000	DISPARPORA
	X	X	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	3.000.000	3.000.000	3.000.000		Dana Alokasi Umum (DAU)		Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan	ASN/Pegawai	4 Dokumen	500	DISPARPORA
	X	X	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	500	500	500		Dana Alokasi Umum (DAU)		Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN/Pegawai	3 Orang	500	DISPARPORA
	X	X	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	500	500	500		Dana Alokasi Umum (DAU)		Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN/Pegawai	50 Orang	1.000.000	DISPARPORA
	X	**X**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	100%	100%	100%	100%	100%	182.090.608	182.090.608	182.090.608	**Kantor Dinas Pariwisata, Pemuda dan**	Dana Alokasi Umum (DAU)		Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN/Pegawai	100%	109.700.000	DISPARPORA

	X	X	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	10 Paket	10 Paket	10 Paket	10 Paket	10 Paket	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Kantor Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Dana Alokasi Umum (DAU)		Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN/Pegawai	10 Paket	500	DISPARPORA
	X	X	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Paket	10 Paket	10 Paket	10 Paket	10 Paket	9.000.000	9.000.000	9.000.000		Dana Alokasi Umum (DAU)		Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan	ASN/Pegawai	10 Paket	4.000.000	DISPARPORA
	X	X	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	6 Paket	6 Paket	5.090.608	5.090.608	5.090.608		Dana Alokasi Umum (DAU)		Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN/Pegawai	6 Paket	500	DISPARPORA
	X	X	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket	40 Paket	40 Paket	40 Paket	40 Paket	4.000.000	4.000.000	4.000.000		Dana Alokasi Umum (DAU)		Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN/Pegawai	40 Paket	2.000.000	DISPARPORA
	X	X	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	50 Paket	50 Paket	50 Paket	50 Paket	50 Paket	6.000.000	6.000.000	6.000.000		Dana Alokasi Umum (DAU)		Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan	ASN/Pegawai	50 Paket	1.000.000	DISPARPORA
	X	X	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	66.000.000	66.000.000	66.000.000		Dana Alokasi Umum (DAU)		Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN/Pegawai	60 Dokumen	6.600.000	DISPARPORA
	X	X	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30 Laporan	30 Laporan	30 Laporan	30 Laporan	30 Laporan	10.400.000	10.400.000	10.400.000		Dana Alokasi Umum (DAU)		Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN/Pegawai	30 Laporan	5.000.000	DISPARPORA
	X	X	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	150 Laporan	150 Laporan	150 Laporan	150 Laporan	150 Laporan	140.000.000	140.000.000	140.000.000		Dana Alokasi Umum (DAU)		Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN/Pegawai	150 Laporan	90.100.000	DISPARPORA
	X	**X**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah**	30%	30%	30%	30%	30%	3.000.000	3.000.000	3.000.000	**Kantor Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**		Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN/Pegawai	30%	3.000.000	DISPARPORA
	X	X	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	-	-	Kantor Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Dana Alokasi Umum (DAU)		Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN/Pegawai	1 Unit	-	DISPARPORA
	X	X	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Meubel yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	3.000.000	3.000.000	3.000.000		Dana Alokasi Umum (DAU)		Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN/Pegawai	6 Unit	3.000.000	DISPARPORA
	X	**X**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100%	100%	100%	100%	100%	85.657.472	85.657.472	85.657.472	**Kantor Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**		Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN/Pegawai	100%	85.657.472	DISPARPORA
	X	X	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	75.657.472	75.657.472	75.657.472	Kantor Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Dana Alokasi Umum (DAU)		Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN/Pegawai	12 Laporan	75.657.472	DISPARPORA
	X	X	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	58.800.000	58.800.000	58.800.000		Dana Alokasi Umum (DAU)		Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN/Pegawai	12 Laporan	10.000.000	DISPARPORA
	X	**X**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	100%	100%	100%	100%	100%	29.000.000	29.000.000	29.000.000	**Kantor Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**		Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN/Pegawai	100%	29.000.000	DISPARPORA
	X	X	1	2.09	1	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perorangan Kendaraan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	8.000.000	8.000.000	8.000.000		Dana Alokasi Umum (DAU)		Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN/Pegawai	4 Unit	8.000.000	DISPARPORA
	X	X	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit	15 unit	15 unit	15 unit	15 unit	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Kantor Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Dana Alokasi Umum (DAU)		Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN/Pegawai	15 unit	1.000.000	DISPARPORA
	X	X	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	12.000.000	12.000.000	12.000.000		Dana Alokasi Umum (DAU)		Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN/Pegawai	1 Unit	20.000.000	DISPARPORA
												JUMLAH	8.530.860.000								6.987.589.672	

RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM , KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU
PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						KETERANGAN
										Target 2024			Pagu Indikatif (Rp)			
						Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	Renja 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	
1	2					3	4		4	7	8	9	10	11	12	
						Persentase Peningkatan Jumlah Pengunjung Wisata	Persentase Peningkatan Jumlah Pengunjung Wisata									
						Persentase Peningkatan PAD Sektor Pariwisata	Persentase Peningkatan PAD Sektor Pariwisata									
	3	26	2			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Lama kunjungan Wisata	Lama kunjungan wisata	0 hari	2 Hari	2 Hari	11.600.000	305.668.600	400.671.500	
	3	26	2	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				5.600.000	205.999.000	206.001.900	
	3	26	2	2.02	4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1.000.000	5.999.000	5.999.000	
	3	26	2	2.02	8		Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	40 Orang	100 Orang	100 Orang	2.000.000	200.000.000	200.002.900	
	3	26	2	2.02	3	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten /Kota		Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan								
	3	26	2	2.02	5	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Startegis Pariwisata Kabupaten/Kota								
	3	26	2	2.02	6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota								
							Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Persentase Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0	0	0	4.000.000	99.669.600	194.669.600	
	3	26	2	2.03	3		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	6 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	2.000.000	-	95.000.000	
	3	26	2	2.03	4		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1.000.000	99.669.600	99.669.600	
	3	26	2	1.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Persentase Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota								
	3	26	2	2.01	2	Perencanaan Pengembangan daya tarik wisata Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik wisata kabupaten/kota								
	3	26	2	2.01	3	Pengembangan Daya Tarik wisata kabupaten/kota		Jumlah lokasi daya tarik wisata Kabupaten/kota sesuai dengan tahapan pengembangan (Rintisan, berkembang,pemantapan, revitalisasi)								
	3	26	2	2.01	4	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota								
	3	26	2	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota								
	3	26	2	2.04	1	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota								
	3	26	2	2.04	4	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata								

Activat

	3	26	3			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan Mancanegara perkebangsaan	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan Mancanegara perkebangsaan	100%	100%	100%	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
								Persentase Peningkatan perjalan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	Persentase Peningkatan perjalan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	100%	100%	100%	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
	3	26	3	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	0%	0%	0%	2.000.000	400.000.000	600.000.000	
	3	26	3	2.01	1	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak,Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri								
	3	26	3	2.01	2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota (Kali)	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1.000.000	400.000.000	600.000.000	
	3	26	3	2.01	3	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri								
	3	26	3	2.03	5	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata								
								Persentase Peningkatan Nilai Produksi Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Pelaku Ekonomi Kreatif	35%	35%	35%	90.000.000	90.000.000	90.000.000	
	2	26	4			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMAMFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		Persentase cakupan pengembangan ekonomi kreatif								
	3	26	4	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar								
	3	26	4	2.02	5	Pengembangan Sistem Pemasaran		Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif								
	3	26	5			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku pariwisata dan ekraf yang bersertifikat kompetensi	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	0%	0%	0%	3.000.000	270.000.000	195.000.000	
	3	26	5	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	0%	0%	0%	3.000.000	270.000.000	195.000.000	
	3	26	5	2.01	1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya								
	3	26	5	2.01	6	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	20 Orang	135 Orang	135 Orang	2.000.000	195.000.000	195.000.000	
	3	26	5	2.01	7	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	12 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000	75.000.000	75.000.000	
	3	26	5	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	80%	80%	80%	25.000.000	25.000.000	25.000.000	
	3	26	5	2.02	1	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	40%	40%	40%	25.000.000	25.000.000	25.000.000	
	Provinsi							Jumlah Pemuda yang mendapat Prestasi Level Provinsi dan Nasional	Jumlah Pemuda yang mendapat Prestasi Level Provinsi dan Nasional	30	30	30	379.500.000	379.500.000	379.500.000	
	Nasional									10	10	10				
								Persentase Anggota Organisasi Pemuda yang berprestasi sebagai Pemuda Wirausaha	Persentase Anggota Organisasi Pemuda yang berprestasi sebagai Pemuda Wirausaha	50%	50%	50%	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
								Persentase Anggota Organisasi Pemuda yang berprestasi sebagai Pemuda Pelopor	Persentase Anggota Organisasi Pemuda yang berprestasi sebagai Pemuda Pelopor	70%	70%	70%	232.000.000	232.000.000	232.000.000	

	3	26	3			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan Mancanegara perkebangsaan	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan Mancanegara perkebangsaan	100%	100%	100%	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
								Persentase Peningkatan perjalan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	Persentase Peningkatan perjalan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	100%	100%	100%	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
	3	26	3	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	0%	0%	0%	2.000.000	400.000.000	600.000.000	
	3	26	3	2.01	1	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak,Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri								
	3	26	3	2.01	2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota (Kali)	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1.000.000	400.000.000	600.000.000	
	3	26	3	2.01	3	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri								
	3	26	3	2.03	5	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata								
								Persentase Peningkatan Nilai Produksi Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Pelaku Ekonomi Kreatif	35%	35%	35%	90.000.000	90.000.000	90.000.000	
	2	26	4			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMAMFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		Persentase cakupan pengembangan ekonomi kreatif								
	3	26	4	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar								
	3	26	4	2.02	5	Pengembangan Sistem Pemasaran		Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif								
	3	26	5			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku pariwisata dan ekraf yang bersertifikat kompetensi	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	0%	0%	0%	3.000.000	270.000.000	195.000.000	
	3	26	5	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	0%	0%	0%	3.000.000	270.000.000	195.000.000	
	3	26	5	2.01	1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya								
	3	26	5	2.01	6	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	20 Orang	135 Orang	135 Orang	2.000.000	195.000.000	195.000.000	
	3	26	5	2.01	7	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	12 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000	75.000.000	75.000.000	
	3	26	5	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	80%	80%	80%	25.000.000	25.000.000	25.000.000	
	3	26	5	2.02	1	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	40%	40%	40%	25.000.000	25.000.000	25.000.000	
	Provinsi							Jumlah Pemuda yang mendapat Prestasi Level Provinsi dan Nasional	Jumlah Pemuda yang mendapat Prestasi Level Provinsi dan Nasional	30	30	30	379.500.000	379.500.000	379.500.000	
	Nasional									10	10	10				
								Persentase Anggota Organisasi Pemuda yang berprestasi sebagai Pemuda Wirausaha	Persentase Anggota Organisasi Pemuda yang berprestasi sebagai Pemuda Wirausaha	50%	50%	50%	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
								Persentase Anggota Organisasi Pemuda yang berprestasi sebagai Pemuda Pelopor	Persentase Anggota Organisasi Pemuda yang berprestasi sebagai Pemuda Pelopor	70%	70%	70%	232.000.000	232.000.000	232.000.000	

	2	19	3	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	30 Unit	2 Unit	2 Unit	1.000.000	52.182.040	52.182.040	
							Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha		Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	10 Unit	35 Unit	35 Unit	1.000.000	150.000.000	150.000.000	
	2	**19**	**3**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	0%	70%	70%	3.000.000	72.863.800	127.863.800	
	2	19	3	2.02	1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	2 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.000.000	30.000.000	85.000.000	
	2	19	3	2.02	2	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota								
	2	19	3	2.02	3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	0 Orang	50 Orang	50 Orang	1.000.000	42.863.800	42.863.800	
	2	**19**	**3**	**2.03**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**0%**	**70%**	**70%**	**2.000.000**	**500.000.000**	**500.000.000**	
	2	19	3	2.03	2	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)		Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)								
	2	19	3	2.03	3	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota		Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan								
	2	19	3	2.03	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga		Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan								
	2	**19**	**3**	**2.04**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**		**Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**								
	2	19	3	2.04	2	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	13 Organisasi	31 Organisasi	31 Organisasi	2.000.000	500.000.000	500.000.000	
	2	**19**	**3**	**2.05**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**		**Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**								
	2	19	3	2.05	1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi								
	2	19	3	2.05	2	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi								
								Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	**Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga**	BB (71-72)	BB (71-72)	BB (71-72)	5.751.186.571	5.751.186.571	5.751.186.571	
								Persentase Ketepatan waktu dalam menyusun perencanaan pregram/kegiatan dan laporannya	**Persentase Ketepatan waktu dalam menyusun perencanaan pregram/kegiatan dan laporannya**	100%	100%	100%	82.000.000	82.000.000	82.000.000	
								Penyerapan anggaran dan laporan tepat waktu	**Penyerapan anggaran dan laporan tepat waktu**	100%	100%	100%	5.628.946.571	5.628.946.571	5.628.946.571	
								Nilai SAKIP pada Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	**Nilai SAKIP pada Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga**	BB	BB	BB	40.240.000	40.240.000	40.240.000	
	X	**X**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan urusan penunjang perangkat daerah**	**Persentase pemenuhan urusan penunjang perangkat daerah**	100%	100%	100%	3.944.219.780	5.480.064.974	5.751.186.571	
	X	**X**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	100%	100%	100%	5.000.000	50.557.300	50.557.300	
	X	X	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	14 Dokumen	1.000.000	20.000.000	20.000.000	
	X	X	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	557.300	557.300	
	X	X	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	2.000.000	20.000.000	20.000.000	

	X	X	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	1.000.000	10.000.000	10.000.000	
	X	X	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
	X	X	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	17.000.000	17.000.000	17.000.000	
	X	X	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	
	X	**X**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	100%	100%	100%	5.277.529.099	5.277.529.099	5.277.529.099	
	X	X	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	50 Orang	50 Orang	50 Orang	3.820.345.746	4.974.743.474	4.974.743.474	
								Jumlah ASN yang mendapatkan TPP								
								Jumlah ASN yang mendapatkan obyektifitas lain								
	X	X	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.000.000	108.000.000	108.000.000	
	X	X	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.000.000	24.999.600	24.999.600	
	X	X	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	1.000.000	20.000.100	20.000.100	
	X	X	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
	X	X	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	2.000.000	8.999.900	8.999.900	
	X	X	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	4 Laporan	30 Laporan	30 Laporan	5.000.000	55.999.900	55.999.900	
	X	X	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	1.000.000	2.000.000	2.000.000	
	X	**X**	**1**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Daerah pada Perangkat Daerah**	100%	100%	100%	1.427.295	2.587.700	2.587.700	
	X	X	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.427.295	2.587.700	2.587.700	
	X	X	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD								
	X	X	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
	X	**X**	**1**	**2.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**		**Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**								
	X	X	1	2.04	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah		Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan								
	X	X	1	2.04	4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah		Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah								
	X	X	1	2.04	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah								
	X	**X**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pengelolaan Administrasikepegawaian Perangkat Daerah**	0%	100%	100%	3.884.975	24.999.900	24.999.900	
	X	X	1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai								
	X	X	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan								

	X	X	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
	X	X	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai								
	X	X	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan								
	X	X	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
	X	**X**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	100%	100%	100%	182.090.608	182.090.608	182.090.608	
	X	X	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	7 Paket	7 Paket	486.800	5.007.000	5.007.000	
	X	X	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	1 Paket	1.859.000	2.445.000	2.445.000	
	X	X	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	2 Paket	2 Paket	1.070.900	5.005.900	5.005.900	
	X	X	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.000.000	3.000.000	3.000.000	
	X	X	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	4.000.000	20.005.000	20.005.000	
	X	X	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.000.000	59.031.000	59.031.000	
	X	X	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu								
	X	X	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
	X	**X**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah**	0%	50%	50%	1.500.000	969.400	969.400	
	X	X	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	1 Unit	1 Unit	500.000	154.000	154.000	
	X	X	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Meubel yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	1 Unit	1 Unit	1.000.000	815.400	815.400	
	X	**X**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	0%	100%	100%	82.645.064	78.189.400	78.189.400	
	X	X	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	82.645.064	78.189.400	78.189.400	
	X	X	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan								
	X	**X**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	0%	100%	100%	8.000.000	33.524.400	33.524.400	
	X	X	1	2.09	1	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perorangan Kendaraan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	11 Unit	11 Unit	6.000.000	20.910.000	20.910.000	
	X	X	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	15 Unit	15 Unit	1.000.000	10.070.000	10.070.000	
	X	X	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1.000.000	2.544.400	2.544.400	
												JUMLAH	**3.979.819.780**	**8.655.779.214**	**8.530.860.006**	

BAB IV
P E N U T U P

Dokumen Perubahan Renja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar Tahun 2024 ini menjadi instrumen utama bagi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar dalam meningkatkan kinerja pembangunan dan menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan sebagai dasar penyusunan Rencana kegiatan dan Anggaran Perubahan Tahun 2024 yang dapat dimanfaatkan oleh yang berkepentingan serta dapat menjadi pedoman sebagai alat kendali mulai perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan sampai dengan evaluasi kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar tahun 2024 akan ditentukan oleh koordinasi dan sinergitas antara Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan Bappelitbangda dan Badan Pengelola Keuangan Daerah, serta adanya pengendalian dan evaluasi yang cermat dan akurat. Oleh sebab itu, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar harus melakukan langkah-langkah penyempurnaan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sehingga bermanfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kemajuan daerah, terkhusus bagi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

Dokumen ini sekaligus menjadi acuan dalam mensinergikan program dan kegiatan antara program prioritas Pemeritah Daerah dengan program dan kegiatan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

Berdasarkan dengan cakupan kewenangan, maka Perubahan Renja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar Tahun 2024 mempunyai fungsi pokok;

1. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan seluruh program/kegiatan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar;
2. Menciptakan kepastian arah kebijakan dan program kegitan prioritas yang merupakan komitmen Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan pemangku kepentingan; dan
3. Menjadi acuan dalam menyusun Perubahan RKA Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan pemangku kepentingan Kebijakan umum anggaran dan Perubahan Prioritas plafon anggaran sementara.

Dalam pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar telah berpedoman pada kaidah - kaidah yang sudah ada yaitu

RPJP dan RPJM Nasional serta RPJP dan RPJM Propinsi, visi dan misi kepala daerah Kabupaten Takalar, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, DPA Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar Tahun 2024 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud pada tahun 2024 yang akan datang.

Dokumen Perubahan Renja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar Tahun 2024 ini diharapkan akan menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program dan kegiatan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sehingga seluruh program dan kegiatan akan dapat dicapai secara terukur, terarah, efektif dan efisien sehingga dapat mendukung pencapaian Visi Kabupaten Takalar yaitu Terwujudnya Kabupaten Takalar yang Unggul, Sejahtera dan Bermartabat**.**

Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan visi Pemerintah Kabupaten Takalar.

Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi setiap langkah kita. Aamiin.

Takalar, Juli 2024
Kepala Dinas,

HADRIANI HANAFIE, S.Sos.,M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19761128 200701 2 012

RENCANA KERJA PERUBAHAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan acuan perencanaan kegiatan OPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD. Adapun penyusunan Renja OPD merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar Tahun 2024 tidak terlepas dari Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar 2023-2026. Terdapat beberapa kegiatan prioritas yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar antaranya adalah percepatan pencapaian target indikator RPD Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026. Serta peningkatan perencanaan pembangunan dalam mencapai peningkatan daya saing daerah.

Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar ini diharapkan dapat benar-benar dapat menjadi acuan dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar Tahun 2024 mendatang.

Takalar, 2024

KEPALA DISPERINDAG KAB.TAKALAR

NASRUDDIN A., ST,M.Si
Pangkat :Pembina Tk.I
NIP. 19710724 200212 1 001

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Dalam penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar Tahun 2024 memperhatikan:

1. Penyelarasan target indikator utama (IKU) dan target indikator kunci (IKK) serta target indikator lainnya dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023-2026;
2. Kesesuian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026;
3. Kesesuaian prioritas pembangunan daerah dan program prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
4. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026;
5. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar dengan Triwulan I Tahun 2023;
6. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024;
7. Isu-isu strategis yang berkembang;
8. Kebijakan Nasional;
9. Regulasi yang berlaku.

Gambar 1-1

Keterkaitan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

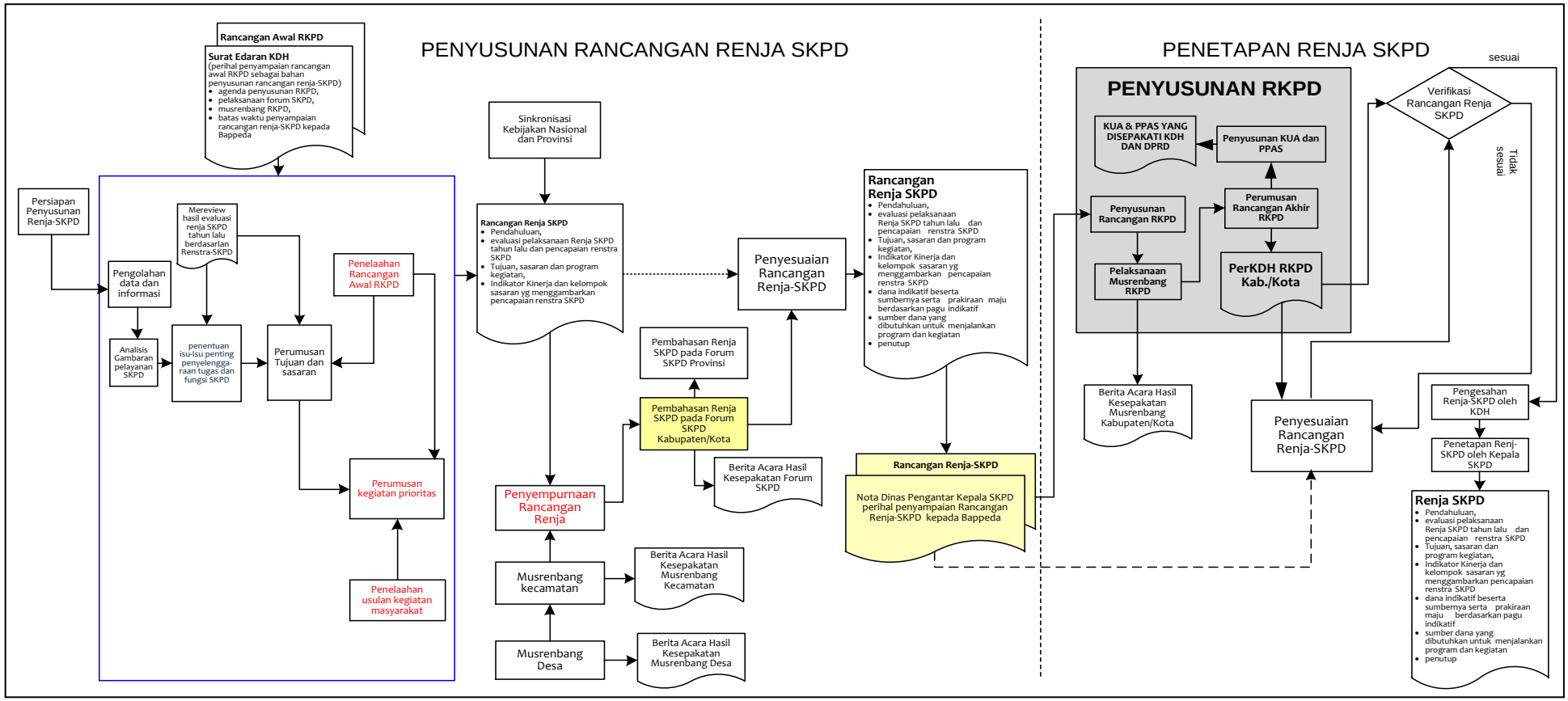

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, data diolah

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar Tahun 2024 merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah dan nasional, yang dalam perencanaannya telah dilakukan bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Selain itu Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang disusun ini juga telah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki perangkat daerah. Kedudukan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar Tahun 2024 dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 merupakan regulasi turunan yang harus mengacu pada Renstra.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar Tahun 2024 dilaksanakan melalui tahapan dan tata cara sebagai berikut :

1. Melakukan persiapan penyusunan pada Bulan Januari yang meliputi penetapan Tim Penyusun dan pengumpulan data teknis;
2. Menyusun Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar Tahun 2024 pada Bulan Januari dengan memperhatikan Rancangan RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2024;
3. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Takalar melakukan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar Tahun 2024;
4. Melakukan penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar Tahun 2024 dengan memperhatikan Surat Rekomendasi Hasil Verifikasi;
5. Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Perindustian dan Perdagangan Kabupaten Takalar Tahun 2024 yang telah disempurnakan diajukan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar Kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan;
6. Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar Tahun 2024 yang telah disempurnakan menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2024;
7. Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar Tahun 2024 yang telah disempurnakan sesuai hasil verifikasi, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Untuk mewujudkan keterkaitan program pembangunan daerah Kabupaten, Provinsi, maupun Pusat, maka Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar disusun dengan mengacu dan berpedoman pada RPD Tahun 2023–2026 yang telah ditetapkan

lebih dahulu. Disamping itu, penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar Tahun 2024 juga memperhatikan sumber daya dan potensi daerah yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi Renja tahun yang lalu serta isu-isu strategis yang berkembang. Mengingat Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan sangat penting bagi pencapaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan secara khusus dan pemerintah daerah secara umum, maka proses penyusunannya dilakukan secara sistematis, akurat dan terpadu dengan melibatkan seoptimal mungkin peran para pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan forum Perangkat Daerah Rancangan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar. Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif, holistik dan berkesinambungan yang disusun berdasarkan beberapa pendekatan berikut:

1. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut.
2. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
3. Pendekatan Politis, pendekatan ini mengkaji administrasi negara yang menekankan fungsi-fungsi politik dalam bernegara.
4. Pendekatan top-down, pendekatan ini dilaksanakan dengan mempedomani RPD dan Renstra PD sebagai arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah.
5. Pendekatan bottom-up, pendekatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan tahapan yang telah dilakukan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar Tahun 2024 tersebut serta merujuk pada ketentuan tentang perencanaan pembangunan daerah, secara jelas menunjukkan bahwa renja memiliki nilai-nilai strategis, yaitu:

1. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar Tahun 2024 merupakan pedoman penyelenggaraan tugas dan fungsi selama 1 (satu) tahun;
2. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar Tahun 2024 merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024;
3. Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Takalar Tahun 2024 merupakan alat atau instrumen pengendalian dalam pelaksanaan pengendalian rencana pembangunan tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

4. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar Tahun 2024 merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja tahunan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
5. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar Tahun 2024 merupakan pedoman penilaian keberhasilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahahn Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

7. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 05 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 05);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar;
14. Peraturan Bupati Takalar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Takalar Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 223)
16. Peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 Nomor)

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar Tahun 2024 disusun dengan maksud:

1. Untuk menjabarkan program dan kegiatan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar Tahun 2023 – 2026 kedalam program/kegiatan tahunan;
2. Menyiapkan acuan bagi RAPBD;
3. Menyiapkan kerangka evaluasi kinerja program/kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar Tahun 2024.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar Tahun 2024 adalah agar terbangun konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 terdiri atas 5 (lima) bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar Tahun 2024 agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami.

BAB II Hasil Evaluasi Renja Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan sampai Triwulan II Tahun 2024. Pada Bab ini berisi empat hal pokok yaitu Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar Tahun 2024, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar Tahun 2024, serta Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024.

BAB III Rencana Kerja Dan Pendanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar Tahun 2024. Pada bab ini berisikan memuat tentang Rencana Program Kegiatan Perubahan Renja dan pendanaan OPD khusus untuk Tahun 2024.

BAB V Penutup. Pada bab ini berisikan uraian penutup berupa Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; Kaidah-kaidah pelaksanaan; serta Rencana tindak lanjut Renja PerubahanDinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sampai Triwulan II Tahun 2024

Bab ini memuat Evaluasi kinerja dimaksudkan untuk memberikan nilai atas suatu capaian kegiatan. Evaluasi kinerja setidaknya menunjukkan penilaian atas keberhasilan/kegagalan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategis.

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan lebih lanjut pengukuran kinerja, oleh karena itu evaluasi kinerja didasarkan pada ukuran ukuran dan indikator serta hasil pengukuran kinerja.

Evaluasi kinerja bertujuan agar dapat diketahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala pelaksanaan program/kegiatan dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan selanjutnya.

Adapun Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan sampai dengan Triwulan II dapat dilihat pada Laporan Evaluasi Hasil Renja Triwulan II Periode Pelaksanaan 2024.

TABEL II-I
FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA KABUPATEN TAKALAR
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024

No	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Per Bulan						Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Kinerja Per Bulan						Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun (5)		Unit OPD	Keterangan
															Januari		Februari		Maret		I		April		Mei		Juni		II													
									K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3					4	5	6			7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		25		26 = 25/8 x 100%		27 = 7 + 25		28 = 27/6 x 100%			
							DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																																			
							URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				15.845.616.160		3.347.904.841		4.492.682.694		147.349.777		158.769.285		352.262.544		663.113.106								1.180.968.291		1.844.140.797	24,90%	41,05%		5.211.032.038				
		3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				15.795.553.160		3.347.904.841		4.442.619.694		147.349.777		158.769.285		352.262.544		658.381.606								1.179.145.291		1.837.586.297				5.204.477.538				
	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pemenuhan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Persen	15.510.493.760	59,68%	3.305.880.541	100%	4.092.560.294		147.349.777		152.182.285		346.486.744	6,58%	646.018.806							26,37%	1.149.994.491	32,94%	1.796.013.297	32,94%	43,88%	78,43%	5.101.893.838	78%	33%		
		3	30	01	2,01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Dokumen Perencanaan	100,00%	Persen	152.596.700	73%	41.531.100	100%	35.348.900	0%	-	0%	-	13%	-	13%	-							25%	9.231.700	38%	9.231.700	38%	26%	85%	50.762.800	85%	33%		
	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3	30	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Renstra dan Renja serta perubahannya yang disusun	8	Dokumen	30.800.000	2	26.560.400	2	7.510.000	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1.719.900	-	2.362.800	-	-	1	4.082.700	2	4.082.700	100%	54%	4	30.643.100	50,00%	99,49%		
		3	30	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	8.943.700	-	-	1	8.943.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	710.000	-	-	-	710.000	-	710.000	0%	8%	-	710.000	0,00%	7,94%		
		3	30	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	Dokumen	37.085.600	1	4.255.200	1	5.362.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.240.000	-	1.860.000	-	-	-	3.100.000	-	3.100.000	0%	58%	1	7.355.200	25,00%	19,83%		
		3	30	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4	Dokumen	23.496.800	1	2.825.600	1	1.550.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210.900	-	200.000	-	-	-	410.900	-	410.900	0%	27%	1	3.236.500	25,00%	13,77%		
		3	30	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	1.089.000	-	-	1	1.089.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0,00%	0,00%		

No	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Per Bulan						Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Kinerja Per Bulan						Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun (5)		Unit OPD	Keterangan
															Januari		Februari		Maret		I		April		Mei		Juni		II													
									K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3					4	5	6			7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		25		26 = 25/8 x 100%		27 = 7 + 25		28 = 27/6 x 100%			
		3	30	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun (Sakip : LPj, LPPD)	4	Laporan	12.936.000	4	2.159.600	1	3.809.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	428.100	-	-	1	428.100	1	428.100	100%	11%	5	2.587.700	125,00%	20,00%		
		3	30	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Triwulanan)	4	Laporan	38.245.600	11	5.730.300	1	7.084.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000	-	-	-	-	-	500.000	-	500.000	0%	7%	11	6.230.300	275,00%	16,29%		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																																	28,57%	23,56%						
Predikat Kinerja Kegiatan																																	SR	SR						
		3	30	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Daerah	100,00%	Persen	14.273.296.944	44,25%	2.984.423.660	100,00%	3.706.643.590	6,17%	147.349.777	6,17%	146.650.582	12,52%	321.808.029	24,86%	615.808.388							56,07%	1.051.003.925	80,92%	1.666.812.313	81%	45%	65%	4.651.235.973	65%	33%		
	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3	30	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan ASN	1.792	Orang	10.073.439.104	487	2.108.226.372	448	2.588.622.630	32	147.349.777	32	146.495.782	64	321.808.029	128	615.653.588	32	180.725.295	32	160.657.998	64	321.648.039	128	663.031.332	256	1.278.684.920	57%	49%	743	3.386.911.292	41%	34%		
								Jumlah ASN yang mendapatkan Prestasi Kerja dan Beban Kerja (TPP)	128	Orang	3.693.402.240	355	824.239.488	32	1.115.408.160	-	-	-	-	-	-	-	-	96	227.501.021	32	79.742.437	32	80.238.735	160	387.482.193	160	387.482.193	500%	35%	515	1.211.721.681	402%	33%		
								Jumlah ASN yang mendapatkan Objektifitas Lainnya	128	Orang	495.840.000	65	51.650.000	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0%	0%	65	51.650.000	51%	10%		
		3	30	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan akhir tahun yang disusun	4	Laporan	9.615.600	1	307.800	1	1.612.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0%	0%	1	307.800	25%	3%		
		3	30	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6	Laporan	1.000.000	-	-	6	1.000.000	-	-	-	154.800	1	-	1	154.800	1	340.400	1	150.000	1	-	3	490.400	4	645.200	67%	65%	4	645.200	67%	65%		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																																	###	29,73%						
Predikat Kinerja Kegiatan																																	ST	SR						
		3	30	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang tersedia	100%	Persen	7.200.000	162,50%	1.050.000	100%	1.182.600	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-							0,00%	-	0%	-	0%	0%	163%	1.050.000	163%	15%		
	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3	30	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian	4	Laporan	3.600.000	12	600.000	1	682.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0%	0%	12	600.000	300%	17%		

No	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Per Bulan						Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Kinerja Per Bulan						Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun (5)		Unit OPD	Keterangan
															Januari		Februari		Maret		I		April		Mei		Juni		II											
									K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3					4	5	6			7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		25		26 = 25/8 x 100%		27 = 7 + 25		28 = 27/6 x 100%			
							Barang Milik Daerah SKPD																																	
		3	30	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Laporan	3.600.000	1	450.000	1	500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0%	0%	1	450.000	25%	13%		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																																	0,00%	0,00%						
Predikat Kinerja Kegiatan																																	SR	SR						
		3	30	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan pakaian dinas dan ikut pelatihan	100,00%	Persen	19.960.800	75,00%	2.388.800	100,00%	2.421.800	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-							25,00%	199.900	25%	199.900	25%	8%	81%	2.588.700	81%	13%		
	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3	30	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	16	Dokumen	19.960.800	12	2.388.800	4	2.421.800	-	-	-	-	-	-	-	-	1	199.900	-	-	-	-	1	199.900	1	199.900	25%	8%	13	2.588.700	81,25%	12,97%		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																																	25,00%	8,25%						
Predikat Kinerja Kegiatan																																	SR	SR						
		3	30	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00%	Persen	315.089.700	39,39%	106.518.401	100,00%	78.710.700	0,00%	-	0,00%	-	11,11%	8.439.000	11,11%	8.439.000							22,22%	22.020.214	33%	30.459.214	33%	39%	48%	136.977.615	48%	43%		
	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3	30	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4	Paket	75.204.000	1	17.400.000	1	18.582.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0%	0%	1	17.400.000	25%	23%		
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	1.189.700	-	-	1	1.189.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310.400	-	-	-	310.400	-	310.400	0%	26%	-	310.400	0%	26%		
		3	30	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	4	Dokumen	18.800.000	11	1.900.000	1	1.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	11	1.900.000	275%	10%		
		3	30	01	2.02	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	Laporan	219.896.000	1	87.218.401	6	57.739.000	-	-	-	-	1	8.439.000	1	8.439.000	-	-	1	8.798.982	1	12.910.832	2	21.709.814	3	30.148.814	50%	52%	4	117.367.215	17%	53%		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																																	12,50%	19,58%						
Predikat Kinerja Kegiatan																																	SR	SR						
		3	30	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Persen	183.321.600	25%	45.575.000	100%	40.800	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-							0%	-	0%	-	0%	0%	25%	45.575.000	25%	25%		
	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3	30	01	2.02	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	Paket	183.321.600	1	45.575.000	1	40.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0%	0%	1	45.575.000	25%	25%		

No	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Per Bulan						Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Kinerja Per Bulan						Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun (5)		Unit OPD	Keterangan
															Januari		Februari		Maret		I		April		Mei		Juni		II											
									K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3					4	5	6			7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		25		26 = 25/8 x 100%		27 = 7 + 25		28 = 27/6 x 100%			
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																																	0,00%	0,00%						
Predikat Kinerja Kegiatan																																	SK	SK						
		3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Persen	370.007.616	24,87%	73.535.580	100,00%	209.651.904	0,00%	-	0,62%	2.534.703	3,53%	11.744.215	4,16%	14.278.918							32,64%	65.128.252	36,80%	79.407.170	37%	38%	11%	152.942.750	117%	41%		
	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3	30	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Listrik)	48	Laporan	96.002.816	12	6.296.969	12	20.313.404	-	-	1	1.087.702	1	853.164	2	1.940.866	1	591.838	1	675.115	1	743.096	3	2.010.049	5	3.950.915	42%	19%	17	10.247.884	35%	11%		
								Jumlah jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Air)	48	Laporan	24.004.800	12	3.331.500	12	9.490.500	-	-	1	530.900	1	619.900	2	1.150.800	1	234.700	1	222.500	1	108.000	3	565.200	5	1.716.000	42%	18%	17	5.047.500	35%	21%		
								Jumlah jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (WIFI)	48	Laporan	33.000.000	12	5.107.111	12	8.448.000	-	-	1	916.101	1	471.151	2	1.387.252	1	451.501	1	451.501	1	450.001	3	1.353.003	5	2.740.255	42%	32%	17	7.847.366	35%	24%		
		3	30	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	1.000.000	-	-	1	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0	-	0%	0%		
		3	30	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	48	Laporan	216.000.000	12	58.800.000	444	170.400.000	-	-	-	-	14	9.800.000	14	9.800.000	60	32.800.000	44	14.200.000	44	14.200.000	148	61.200.000	162	71.000.000	36%	42%	174	129.800.000	363%	60%		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																																	32,30%	22,33%						
Predikat Kinerja Kegiatan																																	SK	SK						
		3	30	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	Persen	189.020.400	33,33%	50.858.000	100,00%	58.560.000	0,00%	-	0,00%	2.997.000	0,00%	4.495.500	0,00%	7.492.500							50,00%	2.410.500	50,00%	9.903.000	50%	17%	44%	60.761.000	44%	32%		
	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3	30	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara secara rutin/berkala	8	Unit	159.710.400	3	50.858.000	2	29.250.000	-	-	-	2.997.000	-	4.495.500	-	7.492.500	-	(2.997.000)	-	2.497.500	1	2.910.000	1	2.410.500	1	9.903.000	50%	34%	4	60.761.000	50%	38%		
		3	30	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	29.310.000	-	-	1	29.310.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0%	0%	-	-	0%	0%		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																																	25,00%	16,93%						
Predikat Kinerja Kegiatan																																	SK	SK						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)																																	31,02%	15,05%						
Predikat Kinerja Program																																	SK	SK						
Faktor pendorong pencapaian kinerja:																																								
Faktor penghambat: : Terbatasnya anggaran kas per sub kegiatan																																								

No	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Per Bulan						Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Kinerja Per Bulan						Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun (5)		Unit OPD	Keterangan
															Januari		Februari		Maret		I		April		Mei		Juni		II											
									K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3					4	5	6			7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		25		26 = 25/8 x 100%		27 = 7 + 25		28 = 27/6 x 100%			
Faktor penghambat:																																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*): Perlunya peningkatan nilai anggaran kas per sub kegiatan, sehingga pelaksanaannya dapat optimal																																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*): Sumber Dana per Sub Kegiatan harus akurat, sehingga pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan ketersediaan dananya																																							
		3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	PERSENTASE PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	100%	Persen	59.400	0%	-	100%	59.400,00	0%	-	0%	-	0%	-	0,00%	-							100%	59.400	100%	59.400	50%	50%	50%	59.400	50%	50%		
		3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	100%	Persen	59.400	0%	-	100%	59.400,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-							100%	59.400	100%	59.400	100%	100%	100%	59.400	100%	100%		
		3	30	2	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	Dokumen	59.400	-	-	1	59.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	59.400	-	-	1	59.400	1	59.400	100%	100%	1	59.400	100%	100%		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																																	########	########						
Predikat Kinerja Kegiatan																																	ST	ST						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)																																	########	########						
Predikat Kinerja Program																																	ST	ST						
		3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	100%	Persen	230.000.000	0%	-	100%	230.000.000	0%	-	0%	3.400.000.000	0%	3.300.000.000	0,00%	6.700.000.000								33%	6.459.500	33%	13.159.500	17%	3%	33%	13.159.500	33%	6%		
		3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pelaksanaan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	100%	Persen	230.000.000	0%	-	100%	230.000.000	0,00%	-	0,00%	3.400.000.000	0,00%	3.300.000.000	0,00%	6.700.000.000								33%	6.459.500	33%	13.159.500	33%	6%	33%	13.159.500	33%	6%		
		3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3	Unit	230.000.000	-	-	3	230.000.000	-	-	-	3.400.000.000	-	3.300.000.000	-	6.700.000.000	1	3.903.300	-	696.200	-	1.860.000	1	6.459.500	1	13.159.500	33%	6%	1	13.159.500	33%	6%		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																																	33,33%	5,72%						
Predikat Kinerja Kegiatan																																	SR	SR						
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)																																	33,33%	5,72%						
Predikat Kinerja Program																																	SR	SR						
Faktor pendorong pencapaian kinerja:																																							
Faktor penghambat: : Proses LPSE dan mengenai perencanaan																																							
Faktor penghambat:																																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																																							

No	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Per Bulan						Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Kinerja Per Bulan						Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun (5)		Unit OPD	Keterangan
															Januari		Februari		Maret		I		April		Mei		Juni		II											
									K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3					4	5	6			7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		25		26 = 25/8 x 100%		27 = 7 + 25		28 = 27/6 x 100%			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):																																							
	Terjaminnya Ketersediaan Barang Pokok dan Barang Penting	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Pelaksanaan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100 %	Persen	40.000.000	13 %	27.104.300	100 %	100.000.000	0 %	-	50 %	3.187.000	0%	1.670.000	50,00 %	4.857.000							0%	19.371.300	50 %	24.228.300	50 %	24 %	25 %	51.332.600	25 %	12 8%		
		3	30	04	2.01		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten /Kota	Persentase Pelaksanaan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok	100 %	Persen	40.000.000	13 %	27.104.300	100 %	100.000.000	0,00 %	-	50,00 %	3.187.000	0,00%	1.670.000	50,00 %	4.857.000							0%	19.371.300	50 %	24.228.300	50 %	24 %	25 %	51.332.600	25 %	12 8%		
	Terjaminnya Ketersediaan Barang Pokok dan Barang Penting	3	30	04	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten /Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	8	Laporan	40.000.000	1	27.104.300	2	100.000.000	-	-	1	3.187.000	-	1.670.000	1	4.857.000	-	10.930.000	-	5.240.000	-	3.201.300	-	19.371.300	1	24.228.300	50 %	24 %	2	51.332.600	25 %	12 8%		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																																	50,00 %	24,23 %						
Predikat Kinerja Kegiatan																																	SR	SR						
Faktor pendorong pencapaian kinerja: SDM Melakukan Pendataan Pengawasan Bapok di 4 Pasar																																							
Faktor penghambat: :																																							
Faktor penghambat: Tidak adanya Anggaran untuk peruntukan Pembuatan Aplikasi terkait Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting agar Data-data Bapetting mudah di akses oleh smua pihak																																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):																																							
	Terjaminnya Ketersediaan Barang Pokok dan Barang Penting	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang	100 %	Persen	15.000.000	75 %	14.920.000	100 %	20.000.000	0 %	-	0%	-	100 %	805.800	##########	805.800							0%	3.320.000	10 0%	4.125.800	100 %	21 %		38.091.600	100 %	12 7%		
		3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Frekwensi Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang	100 %	Persen	15.000.000	75 %	14.920.000	100 %	20.000.000	0,00 %	-	0,00%	-	100,00 %	805.800	100,00 %	805.800							0%	3.320.000	10 0%	4.125.800	100 %	21 %	10 0%	19.045.800	100 %	12 7%		
	Terjaminnya Ketersediaan Barang Pokok dan Barang Penting	3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	4	Dokumen	15.000.000	3	14.920.000	1	20.000.000	-	-	-	-	1	805.800	1	805.800	-	-	-	3.320.000	-	-	-	3.320.000	1	4.125.800	100 %	21 %	4	19.045.800	100 %	12 7%		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																																	##########	20,63 %						
Predikat Kinerja Kegiatan																																	ST	SR						
Faktor pendorong pencapaian kinerja:																																							
Faktor penghambat: :																																							
Faktor penghambat:																																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):																																							
							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				50.063.000		-		50.063.000						4.731.500								1.823.000		6.554.500				6.554.500				

No	Sasaran	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Per Bulan						Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Kinerja Per Bulan						Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun (5)		Unit OPD	Keterangan
															Januari		Februari		Maret		I		April		Mei		Juni		II											
									K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3					4	5	6			7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		25		26 = 25/8 x 100%		27 = 7 + 25		28 = 27/6 x 100%			
	#REF!	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PERSENTASE PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	100%	Persen	10.063.000	0%	-	100%	10.063.000	0%	-	0%	250.000	0%	245.000	0,00%	432.000							0,00%	1.823.000	0,00%	2.255.000	0,00%	22,41%	0,00%	2.255.000	0%	100%		
		3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten /Kota	Persentase Pelaksanaan rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	100%	Persen	10.063.000	0%	-	100%	10.063.000	0%	-	0%	250.000	0%	245.000	0%	432.000							0%	1.823.000	0%	2.255.000	0%	22%	0%	2.255.000	0%	100%		
		3	31	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1	Dokumen	63.000	-	-	1	63.000	-	-	-	63.000	-	-	-	-	-	63.000	-	-	-	-	-	63.000	-	63.000	0%	100%	-	63.000	0%	100%		
		3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1	Dokumen	10.000.000	-	-	1	10.000.000	-	-	-	187.000	-	245.000	-	432.000	-	1.430.000	-	330.000	-	-	-	1.760.000	-	2.192.000	0%	22%	-	2.192.000	0%	22%		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																																0,00%	60,96%							
Predikat Kinerja Kegiatan																																	SR	R						
Faktor pendorong pencapaian kinerja:																																								
Faktor penghambat: :																																								
Faktor penghambat:																																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*): Penambahan personal untuk perekrutan di Alokasi industri di bidang sarana dan prasarana industri																																								
	#REF!	3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Pelaksanaan Pertemuan/rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri	100%	Persen	40.000.000	0%	-	100%	40.000.000	0%	-	0%	4.299.500	0%	-	0,00%	4.299.500							0%	-	0%	4.299.500	0,00%	10,75%	0,00%	4.299.500	0%	11%		
		3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten /Kota	Persentase Pelaksanaan Pertemuan/rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri	100%	Persen	40.000.000	0%	-	100%	40.000.000	0,00%	-	0,00%	4.299.500	0,00%	-	0,00%	4.299.500							0%	-	0%	4.299.500	0%	11%	0%	4.299.500	0%	11%		
	Meningkatnya Jumlah Industri Pengolahan dan Manufaktur	3	31	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Singkornisasi Pengawasan Perizinan	1	Dokumen	40.000.000			1	40.000.000	-	-	-	4.299.500	-	-	-	4.299.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.299.500	0%	11%	-	4.299.500	0%	11%		

No	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Per Bulan						Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Kinerja Per Bulan						Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun (5)		Unit OPD	Keterangan
												Januari		Februari		Maret		I		April		Mei		Juni		II											
					K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3						7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		25		26 = 25/8 x 100%		27 = 7 + 25		28 = 27/6 x 100%			
				sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten /Kota																																	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																													0,00%	10,75%					
Predikat Kinerja Kegiatan																													SK	SK					
Faktor pendorong pencapaian kinerja:																																			
Faktor penghambat: :																																			
Faktor penghambat: Ketersediaan prasarana serta aparat dinas yang masih terbatas																																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*): Ketersediaan anggaran bidang untuk meningkatkan kinerja, inovasi serta kreatifitas																																			
Total Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)																													35,72%	22,89%					
Predikat Kinerja Program																													SK	SK					
Faktor pendorong pencapaian kinerja:																																			
1. SDM Melakukan Pendataan Pengawasan Bapok di 4 Pasar																																			
2.																																			
3.																																			
4																																			
5																																			
Faktor penghambat:																																			
1. Terbatasnya anggaran kas per sub kegiatan																																			
2. Proses LPSE dan mengenai perencanaan																																			
3. Tidak adanya Anggaran untuk peruntukan Pembuatan Aplikasi terkait Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting agar Data-data Bapetting mudah di akses oleh smua pihak																																			
4 Tidak adanya alat penateraan di kantor																																			
5 Ketersediaan prasarana serta ajarat dinas yang masih terbatas																																			
6																																			
7																																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																																			
1. Perlunya peningkatan nilai anggaran kas per sub kegiatan, sehingga pelaksanaannya dapat optimal																																			
2.																																			
3.																																			
4																																			
5																																			
6																																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):																																			
1. Penambahan personal untuk perekrutan di Alokasi industri di bidang sarana dan prasarana industri																																			
2. Ketersediaan anggaran bidang untuk meningkatkan kinerja, inovasi serta kreatifitas																																			
3. Sumber Dana per Sub Kegiatan harus akurat, sehingga pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan ketersediaan dananya																																			
4.																																			
5.																																			

Takalar, 2024
KEPALA DISPERINDAG KAB.TAKALAR

NASRUDDIN A., ST,M.Si
Pangkat :Pembina Tk.I
NIP. 19710724 200212 1 001

2.1.1 Rekapitulasi Jumlah Laporan, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Kerja Dinas Perindustrian danPerdagangan 2024 yang Terakomodir di APBD 2024

Informasi tentang Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD 2024 yang terakomodir di APBD Tahun 2024 memberikan gambaran seberapa banyak jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar pada Tahun 2024. Adapun jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kegiatan dimaksud dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel II-2
Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang ada dalam APBD 2024

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Prrogram	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Indikator		
					Jumlah Prrogram	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7	14	33	7	14	37
Total		**7**	**14**	**33**	**7**	**14**	**37**

Sumber: RKPD Pokok 2024, dan SIPD 2024

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah program sebanyak 7, jumlah kegiatan 14, dan jumlah sub kegiatan 33, Sedangkan jumlah indikator program sebanyak 7, jumlah indikator kegiatan sebanyak 14, dan jumlah indikator sub kegiatan sebanyak 37.

2.1.2 Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja APBD Triwulan II Tahun 2024

Informasi tentang realisasi anggaran kegiatan memberikan gambaran seberapa besar anggaran yang telah terserap pada Triwulan II untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkandalam APBD 2024. Gambaran sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-3
Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Pada APBD Kabupaten Takalar Tahun 2024 Hingga Triwulan II

No. Urut	Perangkat Daerah	Pagu APBD	Realisasi S/D Triwulan II	Persentase	
		(Rp)	(Rp)	Fisik	Keu
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.492.682.694	2.028.604.454,00	45,15	43,88
Total		**4.492.682.694**	**2.028.604.454**	**45,15**	**43,88**

Sumber: Laporan Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Triwulan II, diolah Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa total jumlah anggaran yang terealisasi dalam APBD untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Takalar Tahun 2024 sebesar Rp4.492.682.694,00 Realisasi serapan anggaran dari pelaksanaan kegiatan hingga triwulan II adalah sebesar 45,15 persen dengan capaian realisasi fisik sebesar 43,88 persen.

2.1.2.1 Evaluasi Capaian Pendanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dalam Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2024

Informasi tentang capaian pendanaan memberikan gambaran capaian berdasarkan realisasi anggaran pada masing-masing perangkat daerah dimulai dari program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terdapat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Capaian kinerja pendanaan tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori **Rendah** untuk perangkat daerah dengan realisasi 0 – 20%, Kategori **Sedang** Untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran lebih besar dari >20 – 43 persen dan kategori **Tinggi** untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran diatas 43 persen. Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 43 persen didasarkan atas tingkat capaian yang diharapkan untuk triwulan II adalah 43 persen, sehingga jika terdapat capaian realisasi pendanaan lebih dari 43 persen dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi.

1. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Program

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pendanaan pada level program untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan menggunakan kategori tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa jumlah program yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebanyak 7 program dengan rincian capaian yang masuk pada kategori rendah ada sebanyak 2 program (realisasinya 0-20 persen). Untuk capaian kinerja kategori sedang sebanyak 3 program (realisasi >20-43 persen), dan untuk capaian kinerja kategori tinggi sebanyak 2 program (realisasi diatas 43 persen).

2. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Kegiatan

Untuk evaluasi pelaksanaan Capaian kinerja pendanaan pada level kegiatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat dijelaskan bahwa terdapat 14 kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada Tahun 2024. Dari keseluruhan kegiatan tersebut terdapat 6 kegiatan yang realisasi pendanaannya hingga triwuan II masih dalam kategori rendah yaitu 0 – 20 persen, sedang yang berada dalam kategori sedang sebanyak 5 kegiatan, dan kategori tinggi dengan capaian realisasi diatas 43 persen sebanyak 3 kegiatan.

3. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Sub Kegiatan

Adapun evaluasi capaian kinerja pendanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada level sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 33 sub kegiatan

yang dilaksanakan pada Tahun 2024 terdapat 16 sub kegiatan yang capaian kinerja pendanaanya masih rendah, sedangkan yang masuk dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan sedang terdapat 7 sub kegiatan, dan 10 sub kegiatan dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan tinggi sebab telah dapat mencapai realisasi pendanaan lebih dari 43 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan II.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas capaian kinerja pendanaan berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-4
Rekapitulasi Capaian Kinerja Pendanaan berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Kabupaten Takalar Triwulan II Tahun 2024

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Kegiatan	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Pendanaan		
			0 - 20%	>20 – 43%	> 43%		0 - 20 %	>20 – 43%	> 43 %		0 - 20 %	>20 – 43%	> 43%
			(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7	2	3	2	14	6	5	3	33	16	7	10
Total		**7**	**2**	**3**	**2**	**14**	**6**	**5**	**3**	**33**	**16**	**7**	**10**

2.1.2.2 Evaluasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dalam Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan2024

Informasi tentang capaian kinerja memberikan gambaran capaian kinerja realisasi target kinerja pada masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Capaian kinerja tersebut dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori Rendah untuk perangkat daerah dengan realisasi 0 – 20 persen, Kategori Sedang untuk perangkat daerah dengan realisasi kinerja lebih besar dari 20 – 43 persen dan kategori Tinggi untuk perangkat daerah dengan realisasi kinerja diatas 43 persen. Penetapan batas tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 43 persen didasarkan atas tingkat capaian yang diharapkan untuk triwulan II adalah 43 persen, sehingga jika terdapat capaian realisasi kinerja lebih dari 45 persen dianggap melampaui target dan berada pada kategori tinggi

1. Evaluasi Capaian Kinerja Outcome pada Level Program

Untuk evaluasi pelaksanaan kinerja outcome pada level program dapat digambarkan sebagai berikut: untuk pencapaian target kinerja program pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat dijelaskan bahwa dari 7 Program yang dilaksanakan sampai dengan triwulan kedua capaian kinerja program yang masih

masuk pada kategori rendah atau dibawah 20 persen terdapat 2 program, untuk pencapaian kinerja dengan kategori sedang (diatas 20-43 persen) terdapat 2 program, selebihnya sebanyak 3 program yang capaian kinerja masuk dalam kategori tinggi yang pencapaiannya lebih dari 43 persen pada triwulan II Tahun 2024.

2. Evaluasi Capaian Kinerja Output Pada Level Kegiatan

Sebagai gambaran pencapaian target kinerja kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 9 kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan kedua terdapat 6 kegiatan yang capaian kinerjanya kategori masih rendah atau dibawah 20 persen, sedangkan yang capaian kinerja kategori sedang terdapat 4 kegiatan, selebihnya terdapat 4 kegiatan yang capaian kinerja masuk dalam kategori pencapaian lebih dari 43 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan II Tahun 2024.

3. Evaluasi Capaian Kinerja Output Pada Level sub Kegiatan

Sebagai gambaran pencapaian target kinerja sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 33 sub kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan kedua dapat dijelaskan bahwa yang capaian kinerja masih rendah atau dibawah 20 persen terdapat 15 sub kegiatan, sedangkan yang capaian kinerja sedang sebanyak 8 kegiatan, selebihnya yang capaian kinerja masuk dalam kategori tinggi sebanyak 10 sub kegiatan, yaitu pencapaian lebih dari 43 persen yang merupakan batas realisasi yang diharapkan pada triwulan II Tahun 2024.

Adapun gambaran pencapaian target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan dapat digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel II-5
Rekapitulasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
RKPD Kabupaten Takalar Triwulan II Tahun 2024

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Kinerja			Jumlah Kegiatan	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Kinerja			Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Program berdasarkan tingkat Capaian Kinerja		
			0 - 20%	>20 – 43%	> 43%		0 - 20 %	>20 – 43%	> 43 %		0 - 20 %	>20 – 43%	> 43%
			(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)		(R)	(T)	(ST)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7	2	2	3	14	6	4	4	33	15	8	10
Total		**7**	**7**	**2**	**2**	**3**	**14**	**6**	**4**	**4**	**33**	**15**	**8**

Sumber: Laporan Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Triwulan II, diolah Dinas Perindustrian dan Perdagangan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Capaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan indikator kinerja utama, indikator kinerja kunci yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 86 Tahun 2017 berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta ketentuan peraturan perundang – undangan. Adapun tabel analisis kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut:

Tabel II-6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Tahun 2023-2026 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Takalar

NO	INDIKATOR	IKU	IKK	SPM	TPB	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PERANGKAT DAERAH
						2023 (n-2)	2024 (n-1)	2025 (n)	2026 (n+1)	2023 (n-1)	2024 (n)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ketepatan waktu penyampaian Laporan	√				100%	100%	100%	100%	100%		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	Penyerapan Anggaran dan Laporannnya	√				100%	100%	100%	100%	95%		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	Peningkatan PDRB Sektor Perdagangan	√				100%	100%	100%	100%	N/A		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4	Persentase Usaha yang Memiliki Izin	√				100%	100%	100%	100%	0,80%		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
5	Persentase Alat UTTP yang berTera sah yang masih berlaku	√				100%	100%	100%	100%	50%		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
6	Pertumbuhan IKM	√				100%	100%	100%	100%	7,63%		Dinas Perindustrian dan Perdagangan

2.2.1 Indikator IKU/IKK Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4, Dinas Perindustrian dan Perdagangan perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Takalar. Indikator Kinerja Utama merupakan acuan kinerja yang digunakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

untuk menetapkan Rencana Kerja, menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis. Berikut tabel capaian kinerja IKU/IKK Dinas Perindustrian dan Perdagangan sampai pada Semester I Tahun 2024.

Tabel II.2

Capaian IKU/IKK Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Capaian Kinerja Tahun 2024				
Sasaran	**Indikator Kinerja Utama**	**Satuan**	**Target**	**Realisasi s/d Semester I1**
INDIKATOR KINERJA UTAMA				
Sasaran : 1 Meningkatnya Jumlah industri Pengolahan dan manufaktur	Persentase Pertumbuhan Jumlah industri pengolahan dan manufaktur	Persen	*3.7*	*0.18*
Sasaran: 1 Terjaminnya ketersediaan barang pokok dan barang penting	Persentase koefisien variasi harga barang pokok dan penting antar waktu	Persen	*2*	*0.25*
	Persentase peningkatan volume perdagangan dalam daerah	Persen	*7.3*	*4.8*
Sasaran : 1 Meningkatnya tata kelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Nilai sakip Dinas Perindustrian dan Perdagangan		B	B
Indikator Kinerja Kunci				
	Pertumbuhan jumlah industri kecil dan menengah	Jumlah	*3500*	*3131*
	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RIPIP	Persen	*100*	50

Capaian Kinerja Tahun 2024				
Sasaran	**Indikator Kinerja Utama**	**Satuan**	**Target**	**Realisasi s/d Semester I1**
INDIKATOR KINERJA UTAMA				
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan izin usaha industri (IUI) kecil dan menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	*100*	*100*
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin perluasan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	*25*	*0*
	Persentase data IKM yang masuk dalam SII Nas	Persen	*10,00%*	*7,63%*
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP pusat perbelanjaan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	*0,002*	*0,00027*
	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	*1,25*	*0,25*
	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UPPP) yang ditera sah yang berlaku	Persen	*75*	*45*

Capaian sasaran urusan Meningkatnya kualitas Perindustrian dan Perdagangan pada indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan indikator Nilai Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan sampai pada Semester I tahun 2024.

2.2.2 Indikator SPM Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

Seperti yang telah kami jelaskan pada BAB I bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar sampai saat ini belum ada Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM). Oleh karena itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar tidak bisa memberikan informasi sejauh mana capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) tersebut.

Tabel II.3

Indikator SDGs Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Capaian Kinerja Tahun 2024				
Sasaran	**Indikator SPM**	**Satuan**	**Target**	**Realisasi s/d Semester I1**
-	-	-	-	-

2.2.3 Indikator SDGs Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak memiliki (TPB)/SDGs (Sustainable Development Goals), Oleh karena itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar tidak bisa memberikan informasi sejauh mana capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) tersebut.

Tabel II.4

Indikator SDGs Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Capaian Kinerja Tahun 2024				
Sasaran	**Indikator SDGs**	**Satuan**	**Target**	**Realisasi s/d Semester I1**
-	-	-	-	-

2.2.4 Indikator NSPK Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah

Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak memiliki data terkait Capaian Norma Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK).

Tabel II.5

Indikator SDGs Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Capaian Kinerja Tahun 2024				
Sasaran	**Indikator NSPK**	**Satuan**	**Target**	**Realisasi s/d Semester I1**
-	-	-	-	-

2.3 Hambatan, Upaya Pencapaian, dan Rekomendasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan PerdaganganTahun 2024

2.3.1 Hambatan Dalam Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan PerdaganganTahun 2024

Sampai dengan Triwulan ke II Hambatan dan kendala dalam pelaksanakan kegiatan triwulan kedua dipengaruhi oleh:

1. Adanya peraturan pemerintah pusat yang menyebabkan harus dilakukan penyesuaian anggaran.
2. Belum meratanya kemampuan, pemahaman, pemanfaatan, pengelolaan dan penerapan teknologi informasi dan manajemen yang berbasis kinerja.
3. Masih terkendalanya pelaksanaan kegiatan yang ditimbulkan oleh penggabungan program dan kegiatan yang mengalami peleburan.
4. Terdapatnya beberapa kegiatan yang proses pengadaan barang dan jasanya belum dilaksanakan, baik dikarenakan masih dalam tahapan proses lelang ataupun belum masuk pada tahapan kegiatannya.
5. Perlunya Dukungan keterampilan tambahan bagi sumberdaya aparatur pengelola kegiatan untuk melakukan pengukuran atau estimasi perencanaan program terhadap alokasi anggaran yang dialokasikan baik yang dipengaruhi oleh fluktuasi aktifitas kedewanan maupun kalkulasi evaluasi pada program dan kegiatan.
6. Beberapa komponen kegiatan pada sistem aplikasi perencanaan terkait kodefikasi program/kegiatan dan penganggaran mengalami perubahan sehingga kegiatan belum dapat dilaksanakan ini berdampak pada kode rekening belanja.

2.3.2 Upaya Dalam Pencapaian Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024 sampai dengan Triwulan ke II

Merujuk dari faktor penghambat Pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah sampai dengan triwulan ke II tentunya mengalami berbagai kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Secara normatif dapat disampaikan beberapa upaya yang dilakukan dalam pencapaian keberhasilan kinerja disampaikan sebagai berikut:

1. Komitmen pimpinan dan Koordinasi OPD yang baik untuk melaksanakan kegiatan secara maksimal;
2. Adanya koordinasi/konsultasi yang sinergi antar struktur jabatan internal dan eksternal serta adanya komunikasi yang terjalin antar pemimpin dan yang dipimpin dalam organisasi;
3. Tersedianya Sarana dan prasarana pendukung yang memadai;

4. Penyerapan program dan kegiatan masing-masing bidang dan kesekretariatan berjalan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan;
5. Adanya pedoman/dokumen Standar Pelayanan/SOP dan regulasi yang sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan;
6. Kualitas SDM yang mampu, terampil dan memadai serta memiliki komitmen dan motivasi untuk melakukan tugas dan fungsi secara maksimal dalam rangka memberikan pelayanan prima;
7. Adanya komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.3.3 Rekomendasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024 Triwulan selanjutnya

Berdasarkan uraian atas faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian kinerja, SKPD menyampaikan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Meningkatkan komunikasi dan integrasi program di lingkungan Bappelitbangda serta pengendalian dan evaluasi dilakukan terus menerus.
2. Peran aktif seluruh KPA dan PPTK didalam mengawal pelaksanaan Program dan Kegiatan yang berjalan.
3. Peran aktif Kepala Kecamatan selaku PA didalam mengawasi, mengontrol dan membuat kebijakan serta keputusan;
4. Peran aktif Sub Bagian Perencanaan Program didalam berkoordinasi termasuk memberikan informasi, sosialisasi maupun kebijakankebijakan lainnya;
5. Perlunya tenaga SDM yang berkompeten didalam perencanaan;
6. Peningkatan kualitas SDM aparatur serta jumlah staf yang berkompeten;
7. Peningkatan sarana dan prasarana operasional sesuai dengan kebutuhan;
8. Perlunya melakukan penyusunan Renstra SKPD yang baik, diawali dengan orientasi dan melibatkan seluruh pejabat/staf;
9. Meningkatkan komunikasi dan integrasi Program dan Kegiatan antar instansi, baik pada tataran perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan;
10. Perlunya melakukan evaluasi dan monitoring secara terus menerus dan berkelanjutan yang diiringi dengan pengelolaan data yang baik;
11. Pelaksanaan kegiatan sesuai Renstra dan RPJMD.
12. Dalam penyusunan dokumen perencanaan tahap berikutnya memiliki data dan informasi yang akurat, sehingga perencanaan dan penganggaran dapat dilakukan dengan baik, efektif, dan efisien.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

Mendasari hasil evaluasi kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023 – 2026, tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2023 – 2026 mengalami perubahan setelah disesuikan dengan dinamika isu – isu nasional dan lokal yang tertuang di dalam tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar Tahun 2023 – 2026. Olehnya itu Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar Tahun 2024 didasarkan pada perumusan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026. Adapun perubahan rumusan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

3.1.1 Tujuan

Rumusan tujuan Renja Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar Tahun 2024 adalah:

a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sektor perindustrian.
b. Meningkatkan Volume dan Nilai Perdagangan Daerah.
c. Meningkatkan tata kelola pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

3.1.2 Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya Jumlah industri pengolahan dan manufaktur.
b. Terjaminnya ketersediaan barang pokok dan barang penting.
c. Meningkatnya tata kelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tabel III-1
Tujuan dan Sasaran RKPD
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Takalar Tahun 2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	TARGET 2024
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
TUJUA : 1 Meningkatkan Laju pertumbuhan nilai ekonomi dari sektor perindustrian		**Nilai PDRB Sektor Industri laju pertumbuhan ekonomi sub sektor industri pengolahan**	*560.000 Juta*
	Sasaran: 1 Meningkatnya Jumlah industri	Persentase Pertumbuhan Jumlah	*3.3 %*

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	TARGET 2024
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
	Pengolahan dan manufaktur	industri pengolahan dan manufaktur	
TUJUAN. 2 Meningkatkan Volume dan Nilai Perdagangan Daerah		**Nilai PDRB Sub Sektor Jasa**	*1,615 trilliun*
	Sasaran: 1 Terjaminnya ketersediaan barang pokok dan barang penting	Persentase koefisien variasi harga barang pokok dan penting antar waktu	*1%*
		Persentase peningkatan volume perdagangan dalam daerah	*5.8%*
TUJUAN : 3 Meningkatkan tata kelola pada Dinas Perindustria dan Perdagangan		**Indeks Reformasi Birokrasi Dinas perindustrian dan Perdagangan**	B
	Sasaran: 1 Meningkatnya tata kelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Nilai sakip Dinas Perindustrian dan Perdagangan	B

Dengan memperhatikan tema dan prioritas serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut:

Tabel III-2
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	KONDISI AWAL 2022	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				KONDISI AKHIR
			2023	2024	2025	2026	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
TUJUAN: 1 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sektor perindustrian	**Nilai PDRB Sektor Industri**	*518.240 Juta*	*540.000 Juta*	*560.000 Juta*	*580.000 Juta*	*600.000 Juta*	*600.000 Juta*
Sasaran: 1 Meningkatnya Jumlah industri Pengolahan dan manufaktur	Persentase Pertumbuhan Jumlah industri pengolahan dan manufaktur	*0.18 %*	*3.1 %*	*3.3 %*	*3.5 %*	*3.7 %*	*3.7 %*

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	KONDISI AWAL 2022	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				KONDISI AKHIR
			2023	2024	2025	2026	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
TUJUAN : 2 Meningkatkan Kualitas Koperasi dan Produktifitas UMK	**Persentase Koperasi yang Berkualitas**	*11%*	*13%*	*15%*	*17%*	*19%*	*19%*
	Persentase Usaha Mikro yang Meningkat menjadi Usaha Kecil	*0.001%*	*0.005%*	*0.01%*	*0.015%*	*0.02%*	*0.02%*
Sasaran :1 Meningkatnya Keaktifan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	*54,17%*	*73%*	*75%*	*76%*	*78%*	*80%*
Sasaran : 2 Meningkatnya Volume Usaha dan Asset Usaha Mikro	Jumalah Usaha Mikro yang mencapai peningkatan volume dan asset usaha	*N/A*	*50*	*100*	*150*	*200*	*200*
	Jumlah Usaha Mikro Baru	*32.313*	*32.363*	*32.413*	*32.463*	*32.513*	*32.513*
TUJUAN. 3 Meningkatkan Volume dan Nilai Perdagangan Daerah	**Nilai PDRB Sektor Jasa**	*1,5 trilliun*	*1,54 trilliun*	*1,615 trilliun*	*1,695 trilliun*	*1,780 trilliun*	*1,780 trilliun*
Sasaran: 1 Terjaminnya ketersediaan barang pokok dan barang penting	Persentase koefisien variasi harga barang pokok dan penting antar waktu	*0.25 %*	*0.50 %*	*1 %*	*1.5 %*	*2 %*	*2 %*
	Persentase peningkatan volume perdagangan dalam daerah	*4.8%*	*5.3%*	*5.8%*	*6.3%*	*6.8%*	*7.3%*
TUJUAN : 4 Meningkatkan tata kelola pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	**Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi UKM, dan Perdagangan**	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*
Sasaran : 1 Meningkatnya tata kelola Dinas	Nilai sakip Dinas Koperasi	*CC*	*B*	*BB*	*BB*	*BB*	*BB*

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	KONDISI AWAL 2022	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				KONDISI AKHIR
			2023	2024	2025	2026	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
Koperasi, UKM dan Perdagangan	UKM, dan Perdagangan						

Sumber: Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023-2026; diolah

3.2 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

Berdasarkan Kebijakan yang telah ditetapkan pada Tahun 2020 dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Adapun Jumlah Program, Kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar Tahun 2024 terdiri dari 7 (Tujuh) Program, 14 (Empat Belas) kegiatan dan 30 (Tiga Puluh) sub kegiatan dengan total pagu sebesar **Rp4.492.682.694,00 (Empat Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam ratus Delapan Puluh Dua Ribu Enam ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah)**. Berikut ini uraian program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar Tahun 2024.

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   (a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   (b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   (c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
   (d) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
   (e) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
   (f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   (g) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   (a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   (b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   (c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   (a) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
   (b) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

(a) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
   (a) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   (b) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   (c) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   (d) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   (a) Pengadaan Mebel
7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   (a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   (b) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   (c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   (a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   (b) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

1) Penerbitan izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Pembelanjaan, dan Izin usaha Toko swalayan
   (a) Fasilitasi Pemenuhana Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui SIstem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektroni

3. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

1) Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
   (a) Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

4. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

1) Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
   (a) Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

5. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

1) Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
   (a) Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera dan Tera Ulang

6. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

1) Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
   (a) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
   (b) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

7. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA

1) Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
   (a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota.

TABEL III-3
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
(RENJA OPD) DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGNGAN
KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2024

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Kinerja RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024			Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Renja 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	Renja 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		**5.399.395.280**					**5.374.395.280**	**4.492.682.694**	**4.391.650.062**							**4.578.564.880**	
	3.30.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.299.395.280**	**%**	**%**	**%**	**%**	**4.299.395.280**	**4.092.560.294**	**3.991.527.662**	**Takalar**					**%**	**4.238.564.880**	
	3.30.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**48.146.400**	**%**	**%**	**%**	**%**	**48.146.400**	**35.348.900**	**35.348.900**	**Takalar**					**%**	**48.146.400**	
	3.30.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.700.000	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	7.700.000	7.510.000	7.510.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pajak Daerah				2 Dokumen	7.700.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.271.400	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	9.271.400	8.943.700	8.943.700	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pajak Daerah				1 Dokumen	9.271.400	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.2.01.03	Koodinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-RKPD	9.271.400		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	9.271.400	5.362.500	5.362.500	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pajak Daerah				1 Dokumen	9.271.400	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Kinerja RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024			Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Renja 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	Renja 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3.30.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5.874.200	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.874.200	1.550.000	1.550.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pajak Daerah				1 Dokumen	5.874.200	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3.234.000		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.234.000	1.089.000	1.089.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pajak Daerah				1 Dokumen	3.234.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.234.000	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	3.234.000	3.809.000	3.809.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pajak Daerah				4 Laporan	3.234.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Peragkat Daerah	9.561.400	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	9.561.400	7.084.700	7.084.700	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pajak Daerah				12 Laporan	9.561.400	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.666.975.080**	**%**	**%**	**%**	**%**	**3.666.975.080**	**3.706.643.590**	**3.605.610.958**	**Takalar**					**%**	**3.661.975.080**	
	3.30.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3.658.359.480	456 rang/Bulan	456 rang/Bulan	456 rang/Bulan	456 rang/Bulan	3.658.359.480	3.704.030.790	3.602.998.158	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PAJAK DAERAH, LAIN-LAIN PAD YANG SAH, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-				456 rang/Bulan	3.658.359.480	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Kinerja RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024			Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Renja 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	Renja 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
													DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN BAGI HASIL						
	3.30.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.000.000					5.000.000	-	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan						-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000	1.612.800	1.612.800	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pajak Daerah				1 Laporan	3.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	615.600		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	615.600	1.000.000	1.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pajak Daerah				1 Laporan	615.600	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**1.800.000**	**%**	**%**	**%**	**%**	**1.800.000**	**1.182.600**	**1.182.600**	**Takalar**					**%**	**1.800.000**	
	3.30.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	900.000	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	900.000	682.600	682.600	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pajak Daerah				12 Dokumen	900.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	900.000	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	900.000	500.000	500.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pajak Daerah				1 Laporan	900.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.2.05	**Admistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Admistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**89.990.200**	%	%	%	%	**89.990.200**	**2.421.800**	**2.421.800**	**Takalar**					%	**89.990.200**	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Kinerja RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024			Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Renja 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	Renja 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3.30.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4.990.200	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.990.200	2.421.800	2.421.800	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pajak Daerah				12 Dokumen	4.990.200	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	85.000.000					85.000.000	-	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pajak Daerah					85.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**83.475.000**	**%**	**%**	**%**	**%**	**83.475.000**	**78.710.700**	**78.710.700**	**Takalar**					**%**	**83.475.000**	
	3.30.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18.801.000	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	18.801.000	18.582.000	18.582.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pajak Daerah				1 Paket	18.801.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5.000.000		1 Paket	1 Paket	1 Paket	5.000.000	1.189.700	1.189.700	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pajak Daerah				1 Paket	5.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4.700.000	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	4.700.000	1.200.000	1.200.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pajak Daerah				12 Dokumen	4.700.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54.974.000	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	54.974.000	57.739.000	57.739.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PAJAK DAERAH, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				1 Laporan	54.974.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**91.660.800**	%	%	%	%	**91.660.800**	**40.800**	**40.800**	**Takalar**					%	**45.830.400**	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Kinerja RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024			Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Renja 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	Renja 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3.30.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	45.830.400	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	45.830.400	40.800	40.800	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pajak Daerah				1 Paket	45.830.400	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	45.830.400					45.830.400	-	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan						-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.2.08	**Penyediaann Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Penyediaann Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**117.420.200**	**%**	**%**	**%**	**%**	**117.420.200**	**209.651.904**	**209.651.904**	**Takalar**					**%**	**117.420.200**	
	3.30.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	53.420.200	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	53.420.200	38.251.904	38.251.904	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				12 Laporan	53.420.200	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	8.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10.000.000	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	10.000.000	1.000.000	1.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pajak Daerah				12 Laporan	10.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	54.000.000	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	54.000.000	170.400.000	170.400.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH				8 Laporan	54.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	8.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**199.927.600**	**%**	**%**	**%**	**%**	**199.927.600**	**58.560.000**	**58.560.000**	**Takalar**					**%**	**189.927.600**	
	8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	39.927.600	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	39.927.600	29.250.000	29.250.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pajak Daerah				3 Unit	39.927.600	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Kinerja RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024			Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Renja 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	Renja 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Operasional atau Lapangan																	
	8.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	10.000.000					10.000.000	-	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan						-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	8.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	150.000.000	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	150.000.000	29.310.000	29.310.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pajak Daerah				1 Unit	150.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.03	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**PERSENTASE PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**50.000.000**	**%**	**%**	**%**	**%**	**50.000.000**	**59.400**	**59.400**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**					**%**	**50.000.000**	
	3.30.03.2.01	**Penerbitan izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Pembelanjaan, dan Izin usaha Toko swalayan**	**Cakupan Penerbitan izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Pembelanjaan, dan Izin usaha Toko swalayan**	**50.000.000**	**%**	**%**	**%**	**%**	**50.000.000**	**59.400**	**59.400**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**					**%**	**50.000.000**	
	3.30.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhana Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui SIstem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	50.000.000		5 Unit	5 Unit	5 Unit	50.000.000	59.400	59.400	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pajak Daerah				5 Unit	50.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SRANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN YANG MENGALAMI PENINGKATAN STANDAR SNI**	**305.000.000**	**%**	**%**	**%**	**%**	**305.000.000**	**230.000.000**	**230.000.000**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**					**%**	**85.000.000**	
	3.30.03.2.01	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Cakupan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**135.000.000**	**%**	**%**	**%**	**%**	**135.000.000**	**230.000.000**	**230.000.000**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**					**%**	**85.000.000**	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Kinerja RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024			Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Renja 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	Renja 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	50.000.000					50.000.000	-	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan						-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	85.000.000	5 Unit	48 Unit	48 Unit	48 Unit	85.000.000	230.000.000	230.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pajak Daerah				48 Unit	85.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.03.2.02	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	**Cakupan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	**170.000.000**	**Orang**	**Orang**	**Orang**	**Orang**	**170.000.000**	-	-	**10 Kecamatan**					**Orang**	-	
	3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	85.000.000					85.000.000	-	-	10 Kecamatan						-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	85.000.000					85.000.000	-	-	10 Kecamatan						-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**PERSENTASE KOEFISIEN VARIASI HARGA ANTAR WAKTU PER KOMODITAS BAHAN POKOK**	**100.000.000**	**%**	**%**	**%**	**%**	**100.000.000**	**100.000.000**	**100.000.000**	**10 Kecamatan**					**%**	**25.000.000**	
	3.30.04.2.02	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**Cakupan Perumusan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**50.000.000**	**%**	**%**	**%**	**%**	**50.000.000**	**100.000.000**	**100.000.000**	**10 Kecamatan**					**%**	**25.000.000**	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Kinerja RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024			Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Renja 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	Renja 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	25.000.000	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000	100.000.000	100.000.000	10 Kecamatan	Pajak Daerah				1 Laporan	25.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	25.000.000					25.000.000	-	-	10 Kecamatan						-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.04.2.03	**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**50.000.000**					**50.000.000**	-	-	**10 Kecamatan**						-	
	3.30.04.2.03.02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	50.000.000					50.000.000	-	-	10 Kecamatan						-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**PERSENTASE ALAT-ALAT, UKUR, TAKAR, TIMBANGANG, DAN PERLENGKAPANNYA (UPPP) YANG DITERA SAH YANG BERLAKU**	**150.000.000**	**%**	**%**	**%**	**%**	**150.000.000**	-	-	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**					**%**	-	
	3.30.05.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**150.000.000**	**%**	**%**	**%**	**%**	**150.000.000**	-	-	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**					**%**	-	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Kinerja RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024			Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Renja 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	Renja 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3.30.05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	50.000.000					50.000.000	-	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan						-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.05.2.01.03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	50.000.000					50.000.000	-	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan						-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.05.2.01.06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	50.000.000					50.000.000	-	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan						-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**PERSENTASE ALAT-ALAT, UKUR, TAKAR, TIMBANGANG, DAN PERLENGKAPANNYA (UPPP) YANG DITERA SAH YANG BERLAKU**	**100.000.000**	**%**	**%**	**%**	**%**	**100.000.000**	**20.000.000**	**20.000.000**	**10 Kecamatan**					**%**	**50.000.000**	
	3.30.06.2.01	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**Cakupan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**100.000.000**	**%**	**%**	**%**	**%**	**100.000.000**	**20.000.000**	**20.000.000**	**10 Kecamatan**					**%**	**50.000.000**	
	3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	50.000.000	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000	20.000.000	20.000.000	10 Kecamatan	Pajak Daerah				3 Dokumen	50.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	50.000.000					50.000.000	-	-	Kab. Takalar						-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**PERSENTASE PENINGKATAN PEALKU USAHA YANG DIFASILITASI PEMASARAN**	**25.000.000**	**%**	**%**	**%**	**%**	-	-	-	**Kab. Takalar**					**%**	-	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Kinerja RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024			Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Renja 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	Renja 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3.30.07.2.01	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Cakupan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**25.000.000**	**%**	**%**	**%**	**%**	**-**	**-**	**-**	**Kab. Takalar**					**%**	**-**	
	3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	25.000.000					-	-	-	Kab. Takalar						-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**PERSENTASE PERTUMBUHAN NILAI PRODUKSI INDUSTRI KECIL MENENGAH**	**195.000.000**	**%**	**%**	**%**	**%**	**195.000.000**	**10.063.000**	**10.063.000**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**					**%**	**30.000.000**	
			PERSENTASE PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI TERMASUK TURUNAN INDIKATOR PEMBANGUNAN INDUSTRI DALAM RIPIN YANG DITETAPKAN DALAM RPIP																
			PERSENTASE CAKUPAN PENGEMBANGAN SENTRA INDUSTRI																
	3.31.02.2.01	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Cakupan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**195.000.000**	**%**	**%**	**%**	**%**	**195.000.000**	**10.063.000**	**10.063.000**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**					**%**	**30.000.000**	
	3.31.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	15.000.000	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	15.000.000	63.000	63.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pajak Daerah				4 Dokumen	15.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Kinerja RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024			Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Renja 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	Renja 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	15.000.000					15.000.000	-	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan						-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	15.000.000	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	15.000.000	10.000.000	10.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pajak Daerah				4 Dokumen	15.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	150.000.000					150.000.000	-	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan						-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.31.03	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE JUMLAH HASIL PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN DENGAN JUMLAH IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH YANG DIKELUARKAN OLEH INSTANSI TERKAIT**	**150.000.000**	**%**	**%**	**%**	**%**	**150.000.000**	**40.000.000**	**40.000.000**	**Kab. Takalar**					**%**	**100.000.000**	
			PERSENTASE JUMLAH HASIL PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN DENGAN JUMLAH IZIN PERLUASAN INDUSTRI (IPUI) KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH YANG DIKELUARKAN OLEH INSTANSI TERKAIT		**%**	**%**	**%**	**%**									**%**		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Kinerja RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024			Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Renja 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	Renja 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			PERSENTASE JUMLAH HASIL PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN DENGAN JUMLAH IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI (IUKI) DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI (IPKI) YANG LOKASINYA DI DAERAH KABUPATEN/ KOTA		**%**	**%**	**%**	**%**									**%**		
	3.31.03.2.01	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Cakupan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	**150.000.000**	**%**	**%**	**%**	**%**	**150.000.000**	**40.000.000**	**40.000.000**	**Kab. Takalar**					**%**	**100.000.000**	
	3.31.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah[1]Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	50.000.000					50.000.000	-	-	Kab. Takalar						-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Kinerja RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024			Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Renja 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	Renja 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3.31.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000					100.000.000	-	-	Kab. Takalar						-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.31.03.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Singkornisasi Pengawasan Perizinan	-						40.000.000	40.000.000		Pajak Daerah					100.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.31.04	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**PERSENTASE INFORMASI INDUSTRI DALAM SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL (SIIN)**	**25.000.000**	**%**	**%**	**%**	**%**	**25.000.000**	**-**	**-**	**Kec. Galesong, Polut, dan mapsu**					**%**	**-**	
	3.31.04.2.01	**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Cakupan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	**25.000.000**	**%**	**%**	**%**	**%**	**25.000.000**	**-**	**-**	**Kec. Galesong, Polut, dan mapsu**					**%**	**-**	
	3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem	25.000.000					25.000.000	-	-	Kec. Galesong, Polut, dan mapsu						-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Kinerja RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024			Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Renja 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	Renja 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Industri Nasional (SIINas)	Informasi Industri Nasional (SIINas)																
								JUMLAH	**5.374.395.280,00**	**4.492.682.694,00**	**4.391.650.062,00**							**4.578.564.880,00**	

Takalar, 2024

KEPALA DISPERINDAG KAB.TAKALAR

NASRUDDIN A., ST,M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19710724 200212 1 001

BAB IV

PENUTUP

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Renja Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar Tahun 2024 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renja Perubahan dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

1. Dengan ditetapkannya Renja Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar Tahun 2024 ini selanjutnya akan dijadikan bahan untuk menyusun RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2024 yang pembahasannya dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten;
2. Dengan ditetapkannya Renja Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar Tahun 2024 ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar Tahun 2024 sebagai bahan Penyusunan APBD Kabupaten Takalar Tahun 2024 sehingga nantinya bisa ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar Tahun 2024;
3. Dengan ditetapkannya Renja Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar Tahun 2024 ini, maka semua pihak dan kelompok pemerhati (stake holders) yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah harus menjadikan Renja Perubahan ini sebagai acuan dan arahan operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar;
4. Renja Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar Tahun 2024 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja (LAKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar Tahun 2024 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Tahun 2024.

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TAKALAR

KATA PENGANTAR

Perubahan Penyusunan Rencana Kerja (Renja-OPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar Tahun 2024, dirancang sebagai dokumen perencanaan yang mampu memberikan arahan, dan memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur. Perubahan Rencana Kerja (Renja-SKPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar dimaksudkan menjadi pegangan perencanaan dalam rangka menyusun Program dan Kegiatan Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun tersebut dengan biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar.

Untuk dapat menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja-OPD) yang baik diperlukan data dan informasi yang lengkap, karena itu dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja-OPD) ini melibatkan seluruh Pejabat dan Staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar dengan diskusi yang mendalam dan terjadi komunikasi timbal balik antara pimpinan dan staf. Sehingga, tersusun keputusan-keputusan sistematis yang akhirnya menjadi dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja-OPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar Tahun 2024.

Semoga Perubahan Rencana Kerja (Renja-OPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar Tahun 2022 dapat diimplementasikan secara nyata dalam bentuk program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar. Atas jasa, bantuan dan kerjasama yang baik dari semua pihak dalam penyusunan laporan ini, kami ucapkan terimakasih. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Takalar, Juli 2024
KEPALA BADAN

Drs. IRWAN
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640910 199001 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **iii**
DAFTAR GAMBAR ..... **iv**

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2024
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024 6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 18
2.3 Hambatan, Upaya Pencapaian dan Rekomendasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 24

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Tujuan dan Sasaran 27
3.2 Review terhadap Rancangan Perubahan Renja Tahun 2024 31
3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 45

BAB IV PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
II-1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II	11
II-2	Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	17
II-3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar Tahun 2024	18
II-4	Capaian Indikator Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar Tahun 2024	22
III-1	Konsistensi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 terhadap Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026	29
III-2	Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 Kabupaten Takalar	32
III-3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024	46

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Perubahan Renja Perangkat Daerah bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD dan RKPD Perubahan, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada Pasal 360 Ayat (1) disebutkan bahwa setiap OPD dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja OPD (Perubahan Renja OPD) sebagai acuan perencanaan kegiatan OPD untuk kurun waktu satu tahun.

Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2024 ini mengacu pada Rancangan Awal RKPD, Renstra OPD, serta Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta berdasarkan kegiatan pada usulan masyarakat dan memuat perubahan seluruh kegiatan, target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran baik yang mengalami perubahan maupun tidak mengalami perubahan. Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 360 ayat (1) dan ayat (3) mengamanahkan bahwa Perangkat Daerah menyusun rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada:

a. Rancangan Perubahan RKPD; dan
b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 perlu dilakukan penyesuaian target indikator kinerja Tahun 2024 melalui Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar Tahun 2024. Sesuai amanah Permendagri 86 Tahun 2017 dalam Pasal 361 ayat (1), Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360 ayat (3), terdiri atas:

a. Perumusan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
b. Penyajian rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar Tahun 2024 selanjutnya menjadi landasan penyusunan Perubahan RKA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2024. Dalam menyempurnakan Perubahan Rencana Kerja tersebut, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Takalar Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahahn Deerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2019 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Takalar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 3);
18. Peraturan Bupati Takalar Nomor 223 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 223)

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar Tahun 2024 disusun dengan maksud:

1. Untuk menjabarkan program dan kegiatan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar kedalam program/kegiatan tahunan;
2. Menyiapkan acuan bagi RAPBD;
3. Menyiapkan kerangka evaluasi kinerja program/kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar Tahun 2024.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar Tahun 2024 adalah agar terbangun konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 terdiri atas 5 (lima) bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar

Tahun 2024 agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2024

Pada Bab ini berisi tiga hal pokok yaitu Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Hambatan, Upaya Pencapaian dan Rekomendasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini berisi tiga hal pokok yaitu Tujuan dan Sasaran, Review terhadap Rancangan Perubahan Renja Tahun 2024, Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisikan uraian penutup berupa Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; Kaidah-kaidah pelaksanaan; serta Rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TRIWULAN II 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai Triwulan II Tahun 2024

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Rencana Kerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Pada tahun 2024, rumusan program dan kegiatan pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah.

Dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar Tahun 2024 terdapat 2 (dua) program yang dijabarkan melalui 9 (sembilan kegiatan) dan 20 (dua puluh) sub kegiatan, baik program dan kegiatan utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pemenuhan visi dan misi kepala daerah, maupun program dan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang kemudian dilanjutkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yaitu:

I. Program Kepegawaian Daerah; dalam rangka terwujudnya kualitas kepegawaian daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar melaksanakan 4 (empat) kegiatan, yaitu sebagai berikut:
    1. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN melaksanakan 3 sub kegiatan diantaranya:
        1.1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
        1.2. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
        1.3. Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian
    2. Kegiatan Mutasi dan Promosi melaksanakan 3 sub kegiatan diantaranya:
        2.1 Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN
        2.2 Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

2.3 Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN

3. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN melaksanakan 1 sub kegiatan diantaranya:
   3.1 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
4. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur melaksanakan 1 sub kegiatan diantaranya:
   4.1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

II. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; dalam rangka terwujudnya penunjang urusan pemerintahan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar melaksanakan 5 (lima) kegiatan yaitu sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah melaksanakan 3 sub kegiatan diantaranya:
   1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   1.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah melaksanakan 1 sub kegiatan diantaranya:
   2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah melaksanakan 4 sub kegiatan diantaranya:
   3.1 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   3.2 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dan Fasilitasi Pegawai
   3.3 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
   3.4 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah melaksanakan 2 sub kegiatan diantaranya:
   4.1 Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
   4.2 Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah melaksanakan 1 sub kegiatan diantaranya:
   2.1 Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan

Tabel II-1
Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024

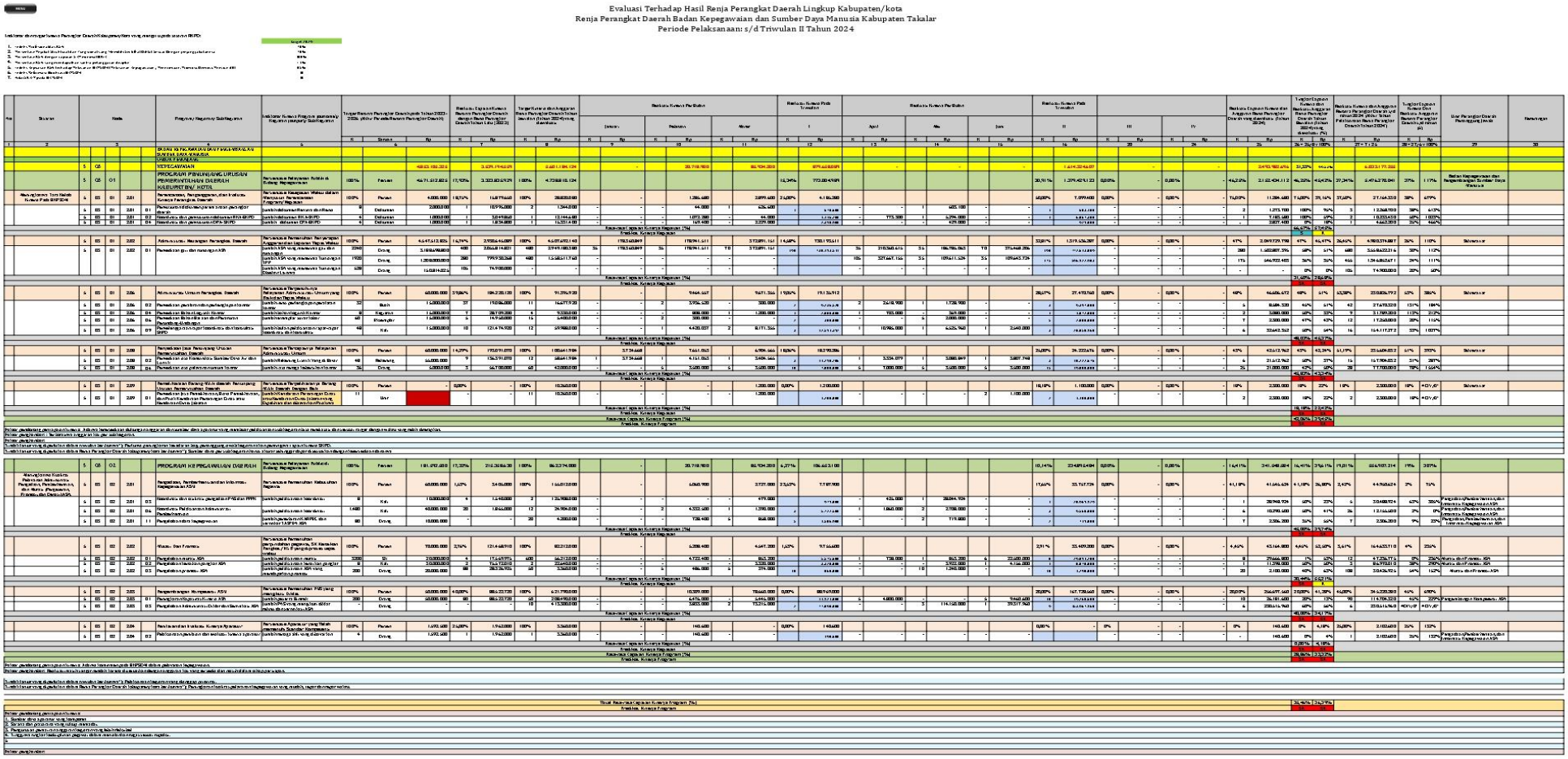

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota
Renja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar
Periode Pelaksanaan: s/d Triwulan II Tahun 2024

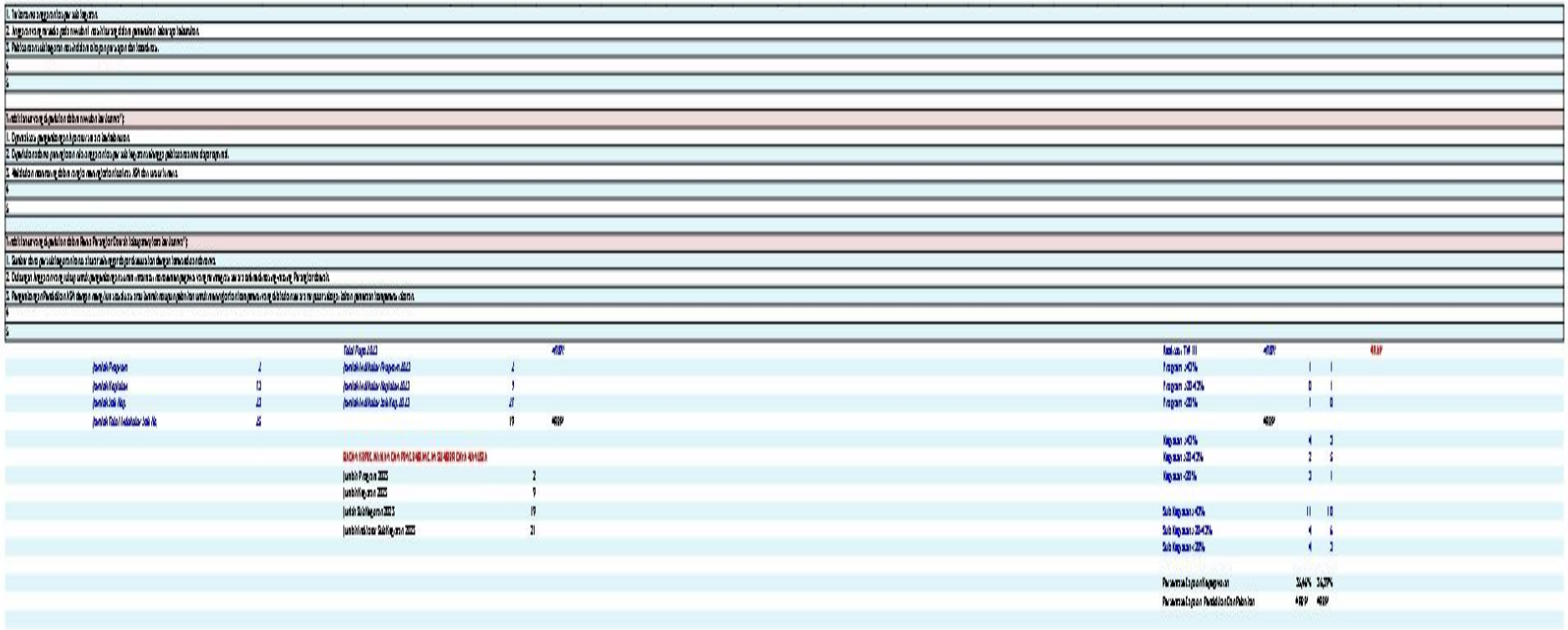

Pada tahun 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar melaksanakan 1 Unsur Penunjang yaitu Kepegawaian. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 5 kegiatan dan 11 sub kegiatan. Pada Program Kepegawaian Daerah terdiri dari 4 kegiatan dan 9 sub kegiatan dengan alokasi anggaran Rp 5.601.184.124 (Lima Milyar Enam Ratus Satu Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Seratus Dua Puluh Empat Rupiah). Adapun uraian program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut:

I. Program Kepegawaian Daerah Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator persentase pemenuhan kebutuhan pegawai dengan capaian kinerja 16,41%. Pagu sebesar Rp 867.374.000 (Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah). Program ini ditunjang 4 kegiatan dan 9 sub kegiatan. Adapun rincian kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut:
    1. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN dengan didukung total pagu sebesar Rp 155.012.000 (Seratus Lima Puluh Lima Juta Dua Belas Ribu Rupiah) dan realisasi anggaran kinerja sebesar Rp 41.545.624 (Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Enam Ratus Dua Puluh Empat Rupiah). Pencapaian target kinerja didukung 3 sub kegiatan diantaranya:
        1.1 Sub kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK sebesar Rp 125.908.000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Rupiah). Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sub kegiatan ini adalah jumlah pelaksanaan koordinasi dengan target capaian sebanyak 2 kali. Realisasi kinerja dan anggaran yang dicapai sampai dengan Triwulan II tahun 2024 sebesar Rp 28.948.924 (Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah).
        1.2 Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian sebesar Rp 24.904.000 (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Rupiah). Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sub kegiatan ini adalah jumlah pelaksanaan koordinasi dengan target capaian sebanyak 12 kali. Realisasi kinerja dan anggaran yang dicapai sampai dengan Triwulan II tahun 2024 sebesar Rp 10.290.500 (Sepuluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah).
        1.3 Sub kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian sebesar Rp 4.200.000 (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sub kegiatan ini adalah jumlah penerbitan KARPEG dan sertifikat TASPEN ASN

dengan target capaian sebanyak 20 orang. Realisasi kinerja dan anggaran yang dicapai sampai dengan Triwulan II tahun 2024 sebesar Rp 2.306.200 (Dua Juta Tiga Ratus Enam Ribu Dua Ratus Rupiah).

2. Kegiatan Mutasi dan Promosi didukung total pagu sebesar Rp 82.212.000 (Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) dan realisasi anggaran kinerja sebesar 4,45% atau Rp 43.164.800 (Empat Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah). Pencapaian target kinerja didukung 3 sub kegiatan diantaranya:
   2.1 Sub kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN sebesar Rp 56.212.000 (Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Rupiah). Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sub kegiatan ini adalah jumlah pelaksanaan mutasi dengan target capaian sebanyak 600 SK. Realisasi kinerja dan yang dicapai sampai dengan Triwulan II tahun 2024 sebesar Rp 29.666.800 (Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
   2.2 Sub kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN sebesar Rp 22.640.000 (Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah). Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sub kegiatan ini adalah jumlah pelaksanaan kenaikan pangkat dengan target capaian sebanyak 2 kali. Realisasi kinerja yang dicapai sampai pada Triwulan II tahun 2024 sebesar Rp 11.398.000 (Sebelas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah).
   2.3 Sub kegiatan Pengelolaan Promosi ASN sebesar Rp 3.360.000 (Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah). Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sub kegiatan ini adalah jumlah pelaksanaan ASN yang mendapatkan promosi. Realisasi kinerja yang dicapai sampai pada Triwulan II tahun 2024 sebesar Rp 2.100.000 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah).
3. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN didukung total pagu sebesar Rp 621.790.000 (Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah). Pencapaian target kinerja didukung 1 sub kegiatan diantaranya:
   3.1 Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN sebesar Rp 208.490.000 (Dua Ratus Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah). Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sub kegiatan ini adalah jumlah peserta BIMTEK dengan target capaian sebanyak 50 orang. Realisasi kinerja yang dicapai sampai pada Triwulan II tahun 2024 sebesar Rp

26.181.600 (Dua Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah).

3.2 Sub kegiatan Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN sebesar Rp 413.300.000 (Empat Ratus Tiga Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah). Indikator yang diigunakan untuk mengukur keberhasilan sub kegiatan ini adalah jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis dan sertifikasi ASN dengan target capai sebanyak 10 orang. Realisasi anggaran yang tercapai pada Triwulan II 2024 sebesar Rp 230.515.960 (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah).

4. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur didukung total pagu sebesar Rp 3.360.000 (Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah). Pencapaian target kinerja didukung 1 sub kegiatan diantaranya:

4.1 Sub kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur sebesar Rp 3.360.000 (Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah). Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sub kegiatan ini adalah jumlah tenaga ahli yang dibayarkan dengan target capaian sebanyak 1 orang. Realisasi kinerja yang dicapai sampai dengan Triwulan II tahun 2024 sebesar Rp 140.600 (Seratus Empat Puluh Riibu Enam Ratus Rupiah).

II. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator persentase pelayanan publik di bidang kepegawaian dengan capaian kinerja 46,25%. Pagu sebesar Rp 4.738.810.124 (Empat Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Seratus Dua Puluh Empat Rupiah). Program ini ditunjang 5 kegiatan dan 11 sub kegiatan. Adapun rincian kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah didukung total pagu sebesar Rp 28.820.080 (Sepuluh Juta Empat Ratus Ribu Dua Ratus Rupiah) dan dengan capaian realisasi anggaran sebesar 50%. Pencapaian target kinerja didukung 3 sub kegiatan diantaranya:

1.1. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebesar Rp 1.344.000 (Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah). Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen Renstra dan Renja yang di selesaikan dengan target capaian sebanyak 2 dokumen. Realisasi kinerja dan anggaran

yang dicapai sampai dengan Triwulan II tahun 2024 sebesar Rp 1.273.700 (Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

1.2. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD sebesar Rp 12.144.680 (Dua Belas Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah). Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen RKA-SKPD dengan target capaian sebanyak 1 dokumen. Realisasi kinerja yang dicapai sampai dengan Triwulan II tahun 2024 sebesar Rp 7.183.580 (Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah).

1.3. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD sebesar Rp 15.331.400 (Lima Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah). Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen DPA-SKPD yang di selesaikan dengan target capaian sebanyak 1 dokumen. Realisasi kinerja dan anggaran yang dicapai sampai dengan Triwulan II tahun 2024 sebesar Rp 2.827.400 (Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah).

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah didukung total pagu sebesar Rp 4.507.692.140 (Empat Milyar Lima Ratus Tujuh Juta Enam Ratus Sembialn Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah) dan dengan capaian realisasi anggaran sebesar 47% atau Rp 2.049.729.798 (Dua Milyar Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah). Pencapaian target kinerja didukung 1 sub kegiatan diantaranya:

2.1. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp 4.507.692.140 (Empat Milyar Lima Ratus Tujuh Juta Enam Ratus Sembialn Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah). Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sub kegiatan ini adalah jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan, jumlah ASN yang menerima tunjangan TPP dan jumlah ASN yang menerima tunjangan Objektif Lainnya. Adapun target capaian pada indikator jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan sebanyak 480 orang dan indikator jumlah ASN yang menerima tunjangan TPP sebanyak 480 orang. Realisasi kinerja dan anggaran yang dicapai sampai dengan Triwulan II tahun 2024 sebesar Rp 1.502.807.395 (Satu Milyar Lima Ratus

Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) untuk ASN yang menerima gaji dan tunjangan. Sedangkan realisasi anggaran yang dicapai sampai dengan Triwulan II tahun 2024 untuk ASN yang menerima tunjangan TPP sebesar Rp 546.922.403 (Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tiga Rupiah).

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan capaian realisasi anggaran kinerja sebesar 48% dan didukung total pagu sebesar Rp 91.395.920 (Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah). Pencapaian target kinerja didukung 4 sub kegiatan diantaranya:
   3.1. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp 16.677.920 (Enam Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah). Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sub kegiatan ini adalah jumlah jenis perlengkapan peralatan kantor dengan target capaian sebanyak 11 buah. Realisasi kinerja dan anggaran yang dicapai sampai dengan Triwulan II tahun 2024 sebesar Rp 8.584.320 (Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah).
   3.2. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebesar Rp 9.330.000 (Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah). Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sub kegiatan ini adalah jumlah bahan logistik kantor sebanyak 4 kegiatan. Realisasi kinerja dan anggaran yang dicapai sampai dengan Triwulan II tahun 2024 sebesar Rp 3.080.000 (Tiga Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah).
   3.3. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp 5.400.000 (Lima Juta Empat Raratus Ribu Rupiah). Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sub kegiatan ini adalah jumlah exemplar surat kabar dengar target capaian sebesar 15 exemplar. Realisasi kinerja dan anggaran yang dicapai sampai dengan Triwulan II tahun 2024 sebesar Rp 2.300.000 (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
   3.4. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp 59.988.000 (Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah). Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sub kegiatan ini adalah jumlah bulan pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi dengan target capaian sebesar 12 kali. Realisasi kinerja dan anggaran yang dicapai pada Triwulan II tahun 2024 sebesar Rp 32.642.352 (Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah didukung total pagu sebesar Rp 100.641.984 (Seratus Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) dan dengan capaian realisasi kinerja 43% atau Rp 42.512.962 (Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah). Pencapaian target kinerja didukung melaksanakan 2 sub kegiatan diantaranya:
    4.1. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp 58.641.984 (Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah). Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sub kegiatan ini adalah jumlah rekening listrik yang dibayar dengan target capaian sebanyak 12 kali. Realisasi kinerja dan anggaran yang dicapai sampai dengan Triwulan II tahun 2024 sebesar Rp 21.512.962 (Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah).
    4.2. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp 42.000.000 (Empat Puluh Dua Juta Rupiah). Realisasi kinerja dan anggaran yang dicapai sampai dengan Triwulan II tahun 2024 sebesar Rp 21.000.000 (Dua Puluh Satu Juta Rupiah).
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah didukung total pagu sebesar Rp 10.260.000 (Sepuluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah). Pencapian target kinerja didukung 1 sub kegiatan diantaranya:
    5.1. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebesar Rp 10.260.000 (Sepuluh Juta Dua Ratus enam Puluh Ribu Rupiah). Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sub kegiatan ini adalah jumlah kendaraan perorangan dinas atau dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dengan target capaian sebanyak 11 unit. Realisasi kinerja dan anggaran yang dicapai sampai dengan Triwulan II tahun 2024 sebesar Rp 2.300.000 (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Tabel II-2
Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024
Triwulan II

Nama OPD: Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia

NO	Uraian	Keterangan Kinerja (K)							Rata-rata Capaian Output (%) dan Predikat Kinerja			
		Jumlah Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Non APBD	Jumlah Indikator	Capaian 0%	Capaian <100%	Capaian 100%	Capaian >100%	K	Rp	K	Rp
1.	Program	2 Program	APBD	2 Indikator	0	2	0	0	31,33%	42,51%	SR	SR
2.	Kegiatan	9 Kegiatan	APBD	9 Indikator	0	9	0	0	32,95%	36,07%	SR	SR
3.	Sub Kegiatan	20 Sub Kegiatan	APBD	21 Indikator	2	17	2	0	42,95%	43,14%	SR	SR

SKALA PENILAIAN RATA-RATA KINERJA DAN PREDIKAT KINERJA HASIL EVALUASI RPJMD MENGGUNAKAN KRITERIA SEBAGAI BERIKUT:

1. 91% ≤ 100% Sangat Tinggi
2. 76% ≤ 90% Tinggi
3. 66% ≤ 75% Sedang
4. 51% ≤ 65% Rendah
5. ≤ 50% Sangat Rendah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel II-3
Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM Kabupaten Takalar Tahun 2024

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal Periode RPD	Capaian Kinerja Program											
			2023			2024			2025			2026		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Indeks Profesionalitas ASN	34.87%	70%	46.37%	65,85%	70%	20%	28,57%	70%	-	-	70%	-	-
2	Persentase Pejabat Struktural dan Fungsional yang Memiliki Sertifkat Diklat Sesuai Dengan Jenjang Jabatannya	50%	70%	45%	64,28%	70%	25%	35,71%	75%	-	-	75%	-	-
3	Persentase ASN dengan capaian SKP minimal BAIK	100%	100%	92%	92%	100%	45%	45%	100%	-	-	100%	-	-

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal Periode RPD	Capaian Kinerja Program											
			2023			2024			2025			2026		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Persentase ASN yang mendapatkan sanksi pelanggaran disiplin	<1%	<1%	<1%	1<%	<1%	0.25%	25%	<1%	-	-	<1%	-	-
5	Indeks Kepuasan ASN terhadap Pelayanan BKPSDM (Pelayanan Kepagawaian ; Penerimaan, Promosi, Demosi, Pensiun dll)	83%	85%	85%	100%	85%	25%	29,41%	85%	-	-	85%	-	-
6	Indeks Reformasi Birokrasi BKPSDM	C	B	B	-	B	B	-	B	-	-	BB	-	-
7	Nilai SAKIP pada BKPSDM	CC	B	BB	-	B	BB	-	B	-	-	BB	-	-

Secara umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah di Kabupaten Takalar untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proporsional telah berjalan dengan baik. Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah adanya komitmen kerja yang baik antara pimpinan beserta bawahannya dan penguasaan dibidang tugas masing-masing pegawai dengan baik. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2023, maka dapat kami uraikan analisis kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar tahun 2024 dimana pengukuran ini dapat digunakan untuk mengukur/memperkirakan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis.

Adapun capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indeks Profesionalitas ASN dengan target 70% dan telah terealisasi sebesar 20%.
2. Persentase Pejabat Struktural dan Fungsional yang Memiliki Sertifkat Diklat sesuai dengan Jenjang Jabatannya dengan target 70% dan telah terealisasi sebesar 25%.
3. Persentase ASN dengan capaian SKP minimal BAIK dengan target 100% dan telah terealisasi sebesar 45%.
4. Persentase ASN yang mendapatkan sanksi pelanggaran disiplin dengan target <1% dan terealisasi sebesar 0,25%.
5. Indeks Kepuasan ASN terhadap Pelayanan BKPSDM (Pelayanan Kepagawaian ; Penerimaan, Promosi, Demosi, Pensiun dll) dengan target 85% dan terealisasi sebesar 25%.
6. Indeks Reformasi Birokrasi BKPSDM dengan target predikat B dan telah mencapai target predikat B.
7. Nilai SAKIP pada BKPSDM dengan target predikat B dan telah mencapai target predikat BB.

2.2.1 Capaian IKU/IKK Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar Tahun 2024

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Indikator Kinerja Penunjang bidang Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yaitu:

Tabel II-4
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Takalar Tahun 2024

FUNGSI PENUNJANG	NO IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI	RUMUS			CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)
Kepegawaian	1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	*Jumlah pegawai menurut pendidikan (perguruan tinggi) PT ke atas*	**1314**	**x 100%**	**273,18%**	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Takalar	
			Seluruh jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah	**481**				
	2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	*Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)*	**296**	**x 100%**	**16,49%**	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Takalar	
			Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	**1795**				

FUNGSI PENUNJANG	NO IKK	INDIKATOR KINERJA KUNCI	RUMUS			CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)
	3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	*Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi*	**110**	**x 100%**	**37,16%**	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Takalar	
			Seluruh Jumlah Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	**296**				

Catatan:

1. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) sebanyak 273,18%
2. Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) sebanyak 16,49%
3. Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) sebanyak 37,16%

2.2.2 Capaian SPM Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar Tahun 2024

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar sampai saat ini belum ada Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM). Oleh karena itu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar tidak bisa memberikan informasi sejauh mana capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) tersebut.

2.2.3 Capaian SDG's Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar Tahun 2024

Seperti halnya Capaian *Sustainable Deveopment Goals* (SDGs), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar sampai saat ini belum ada data SDGs tersebut.

2.2.3 Capaian NPSK Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar Tahun 2024

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar tidak memiliki data terkait Capaian Norma Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK).

2.3 Hambatan, Upaya Pencapaian, dan Rekomendasi Pelaksanaan Recana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024

2.3.1 Hambatan Dalam Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 sampai dengan Triwulan ke II

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai Rencana Kerja tahun 2024 diharapkan bisa berjalan dengan baik sehingga target capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan bisa tercapai. Namun dalam perjalanannya, hal tersebut terkadang menemui kendala. Capaian kinerja terhadap Rencana Kerja tahun 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar hingga triwulan II tergolong masih rendah berdasarkan hasil evaluasi yang telah dideskripsikan dalam laporan ini. Hal tersebut dikarenakan ada bebarapa hambatan dan kendala yang mempengaruhi, namun pada dasarnya kendala yang terjadi bisa kami pastikan tidak akan berpengaruh secara

signifikan hingga akhir periode tahun 2024. Beberapa hambatan dan kendala yang terjadi hingga triwulan II tahun 2024 ini antara lain:

1. Belum optimalnya dalam penataan dan penempatan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang ada;
2. Belum optimalnya fasilitasi kesejahteraan ASN dan data/informasi serta pengembangan informasi dan teknologi bidang kepegawaian.
3. Adanya indikator kinerja pada sub kegiatan yang dipastikan tidak bisa dilaksanakan sehingga mempengaruhi capaian kinerja sub kegiatan.
4. Adanya sub kegiatan yang belum bisa dilaksanakan karena waktu pelaksanaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Hal tersebut berpengaruh pada capaian kinerja disetiap capaian program dan kegiatan.

2.3.2 Upaya Dalam Pencapaian Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 sampai dengan Triwulan ke II

Merujuk dari faktor penghambat Pelaksanaan rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sampai dengan triwulan ke II tentunya mengalami berbagai kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Adapun beberapa upaya yang dilakukan dalam pencapaian keberhasilan kinerja disampaikan sebagai berikut:

1. Adanya komitmen pimpinan dan Koordinasi yang baik untuk melaksanakan kegiatan secara maksimal;
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas administrasi perkantoran dan sarana dan prasarana;
3. Adanya koordinasi/konsultasi yang sinergi antar struktur jabatan internal dan eksternal serta adanya komunikasi yang terjalin antar pemimpin danyang dipimpin dalam organisasi;
4. Adanya pedoman/dokumen Standar Pelayanan/SOP dan regulasi yang sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan;
5. Adanya pemberdayaan sistem informasi manajeman kepegawaian berbasis teknologi informasi agar dapat diakses dengan mudah;
6. Peningkatan sumber daya aparatur dan disiplin ASN di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar;
7. Adanya upaya untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan perangkat daerah.

2.3.3 Rekomendasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 Triwulan Selanjutnya

Adapun rekomendasi yang dilakukan dalam pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Triwulan Selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan sarana dan prasarana operasional sesuai dengan kebutuhan;
2. Diperlukan perhatian khusus pada penyediaan data dukung dan analisis kebijakan sebagai bagian dalam peningkatan kualitas kelembagaan. Data dukung menjadi penilaian utama pemerintah dalam memberikan bantuan anggaran, sehingga perencanaan dan penganggarandapat dilakukan dengan baik, efektif, dan efisien.
3. Diperlukan perhatian khusus pada peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), mengingat pentingnya kualitas SDM dalam pelaksanaan tupoksi Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar. Pemenuhan SDM yang kompeten dalam penyelenggaraan kepegawaian telah menjadi syarat utama dan merupakan unsur penting yang diwajibkan pemerintah;
4. Diperlukan perhatian khusus agar Kepala Bidang lebih serius dalam menyusun, menganalisa dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan setiap triwulan.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 mengacu pada RPJPD yang di dalamnya memuat visi Kabupaten Takalar 2005-2025 yaitu

"Masyarakat Mandiri, Demokratis, Berkeadilan Sosial dan Sejahtera Lahir Batin"

Visi RPJPD Kabupaten Takalar memiliki filosofi bahwa kemajuan yang dicapai melalui pembangunan idealnya mengantar daerah tersebut pada kondisi kemandirian dalam mengelola sumberdaya tanpa mengabaikan interaksi dengan daerah lain. Dalam rangka ini, daya saing daerah menjadi sangat penting, baik untuk kemandirian maupun untuk interaksi dengan daerah lain.

Visi RPJPD Kabupaten Takalar juga menekankan kondisi demokratis dan berkeadilan sosial sebagai satu kesatuan cita-cita ideal yang penekanannya pada pemerataan atas kesejahteraan yang dicapai secara bersama. Kesejahteraan tersebut idelanya mencakup dimensi lahir dan bathin, karena itu ketenteraman dan ketertiban yang terpelihara menjadi keniscayaan dari pencapaian pembangunan.

Untuk menjalankan Visi tersebut, maka upaya umum yang hendak dijalankan dinyatakan dalam rumusan misi. rumusan misi RPJPD Kabupaten Takalar Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas SDM dalam berbagai aspek untuk mendukung kemandirian daerah.
2. Peningkatan tata penyelenggaraan kehidupan sosial, politik dan pemerintahan yang demokratis.
3. Peningkatan pemerataan hasil-hasil pembangunan dalam berbagai aspek.
4. Peningkatan produktivitas daerah yang mendukung perwujudan kesejahteraan masyarakat secara material.
5. Peningkatan pengamalan ajaran agama serta penghayatan nilai-nilai budaya dalam mendukung perwujudan kesejahteraan masyarakat secara bathiniah.

Sasaran pokok dalam RPJPD Kabupaten Takalar Tahap Keempat secara garis besar mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas hidup manusia
2. Meningkatnya kapasitas infrastruktur daerah

3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
5. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tenteram lahir-bathin
6. Terpeliharanya kondisi lingkungan hidup daerah

Berdasarkan pada Visi dan Misi Kabupaten Takalar 2005-2025, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia akan mendukung pelaksanaan sasaran pokok (4) *"terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik"*. Pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Takalar dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selama 5 tahun kedepan.

Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan prioritas pembangunan daerah menjadi landasan perumusan sasaran, strategi, dan kebijakan Rencana Kerja (Renja) sebagai rencana tahunan. Rumusan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan - pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut:

1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing- masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi;
2. Untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan;
3. Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu- isu strategis pembangunan daerah;
4. Dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dirumuskan untuk mencapai ataumenjelaskan tujuan;
2. Untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
3. Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu- isu strategis pembangunan daerah; dan memenuhi kriteria SMART-C Perubahan target dari tujuan dan sasaran tahun 2024 yang mengacu pada Peraturan Bupati Takalar Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembanguna Daerah Tahun 2023- 2026, menjadi landasan Perubahan Renja Tahun 2024.

Adapun Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai tahun 2024 sebagai penjabaran Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2023-2026 dan disesuaikan dengan tupoksi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III-1
Konsistensi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 terhadap Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026

TUJUAN-3 : MEMPERBAIKI KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN			
SASARAN-3.1: MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN			
NO	**TUJUAN/SASARAN**	**INDIKATOR TUJUAN/SASARAN**	**TARGET KINERJA 2024**
1	**2**	**3**	**4**
	T.1 : Terwujudnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	70%
	S.1.1 : Meningkatnya Kompetensi dan kinerja ASN	Persentase Pejabat Struktural dan Fungsional yang Memiliki Sertifkat Diklat Sesuai Dengan Jenjang Jabatannya	70%
		Persentase ASN dengan capaian SKP minimal BAIK	100%
		Persentase ASN yang mendapatkan sanksi pelanggaran disiplin	<1%

TUJUAN-3 : MEMPERBAIKI KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN			
SASARAN-3.1: MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN			
NO	**TUJUAN/SASARAN**	**INDIKATOR TUJUAN/SASARAN**	**TARGET KINERJA 2024**
1	**2**	**3**	**4**
	S.1.2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Pengadaan, Pemberhentian, dan Mutasi (Pergeseran, Promosi dan Demosi) ASN	Indeks Kepuasan ASN terhadap Pelayanan BKPSDM (Pelayanan Kepagawaian ; Penerimaan, Promosi, Demosi, Pensiun dll)	85%
	T.1 : Meningkatkan Tata Kelola pada BKPSDM	Persentase Pejabat Struktural dan Fungsional yang Memiliki Sertifkat Diklat Sesuai Dengan Jenjang Jabatannya	B
	S.2.1 : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja pada BKPSDM	Nilai SAKIP pada BKPSDM	B

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024

Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Tahun 2024 Badan Kepegawaiain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar terdiri atas 2 Program, 9 kegiatan dan 20 sub kegiatan dengan jumlah dana pagu indikatif adalah sebesar *Rp* 5.4*66.966.332 (Lima Milyar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah)* dengan sumber dana berasal dari APBD. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel III-3 berikut:

Tabel III-3
Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar Tahun 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target Kinerja 2024			Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																	
						UNSUR PENUNJANG																	
	5	**03**				**KEPEGAWAIAN**																	
	5	**03**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**	**Persentase Pelayanan Publik di Bidang Kepegawaian**	**100%**	**96,84%**	**100%**	**100%**	**100%**	**4,789,512,825**	**4,738,810,124**	**4,604,592,332**	**Kab. Takalar**					**100%**	**4,824,779,800**	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
	5	**03**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Ketepatan Waktu dalam Menyusun Perencanaan Program / Kegiatan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**8,000,000**	**28,820,080**	**28,820,080**	**Kab. Takalar**	**PAD**		**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**	**Pegawai**	**100%**	**12,500,000**	**Sekretariat**
	5	03	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja	8 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	4,000,000	1,344,000	1,344,000	Kab. Takalar	PAD	-	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Pegawai	2 Dokumen	7,000,000	Sekretariat
	5	03	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2,000,000	12,144,680	12,144,680	Kab. Takalar	PAD	-	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Pegawai	1 Dokumen	3,000,000	Sekretariat
	5	03	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2,000,000	15,331,400	15,331,400	Kab. Takalar	PAD	-	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Pegawai	1 Dokumen	2,500,000	Sekretariat
	5	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum yang Baik dan Tepat Waktu**	**100%**	**84%**	**100%**	**100%**	**100%**	**4,557,512,825**	**4,507,692,140**	**4,373,474,348**	**Kab. Takalar**	**DAU**		**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**	**Pegawai**	**100%**	**4,674,512,825**	**Sekretariat**
	5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	2.240 Orang	510 Orang	480 Orang	480 Orang	480 Orang	3,198,698,800	2,949,180,380	2,949,180,380	Kab. Takalar	DAU	-	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Pegawai	510 Orang	3,248,698,800	Sekretariat
							Jumlah ASN yang menerima Tunjangan TPP	1.920 Orang	399 Orang	480 Orang	480 Orang	480 Orang	1,208,000,000	1,558,511,760	1,424,293,968	Kab. Takalar	DAU	-	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Pegawai	399 Orang	1,275,000,000	Sekretariat
							Jumlah ASN yang menerima Tunjangan Objektif Lainnya	528 Orang	78 Orang	-	-	-	150,814,025	-	-	Kab. Takalar	DAU	-	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Pegawai	78 Orang	150,814,025	Sekretariat

	5	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum yang Baik dan Tepat Waktu**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100,000,000**	**91,395,920**	**91,395,920**	**Kab. Takalar**	**PAD**		**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**	**Pegawai**	**100%**	**84,998,000**	**Sekretariat**
	5	03	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis perlengkapan peralatan kantor	40 Buah	8 Buah	11 Buah	11 Buah	11 Buah	25,000,000	16,677,920	16,677,920	Kab. Takalar	PAD	-	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Pegawai	9 Buah	20,000,000	Sekretariat
	5	03	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor	16 Kegiatan	2 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	25,000,000	9,330,000	9,330,000	Kab. Takalar	PAD		Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Pegawai	4 Kegiatan	25,000,000	Sekretariat
	5	03	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah exemplar surat kabar	60 Eksemplar	10 Eksemplar	15 Eksemplar	15 Eksemplar	15 Eksemplar	15,000,000	5,400,000	5,400,000	Kab. Takalar	PAD	-	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Pegawai	15 Eksemplar	15,000,000	Sekretariat
	5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah bulan pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	48 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	35,000,000	59,988,000	59,988,000	Kab. Takalar	PAD	-	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Pegawai	12 Kali	24,998,000	Sekretariat
	5	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang di sediakan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100,000,000**	**100,641,984**	**100,641,984**	**Kab. Takalar**	**PAD**		**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**	**Pegawai**	**100%**	**35,000,000**	**Sekretariat**
	5	03	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening listrik yang di bayar	48 Rekening	12 Rekening	12 Rekening	12 Rekening	12 Rekening	95,000,000	58,641,984	58,641,984	Kab. Takalar	PAD	-	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Pegawai	12 Rekening	30,000,000	Sekretariat
	5	03	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jasa tenaga kebersihan kantor	24 Orang	72 Orang	72 Orang	72 Orang	72 Orang	5,000,000	42,000,000	42,000,000	Kab. Takalar	PAD	-	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Pegawai	72 Orang	5,000,000	Sekretariat
	5	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Dengan Baik**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**24,000,000**	**10,260,000**	**10,260,000**	**Kab. Takalar**	**PAD**		**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**	**Pegawai**	**100%**	**17,768,975**	**Sekretariat**
	5	03	01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	44 Unit	6 Unit	11 Unit	11 Unit	11 Unit	24,000,000	10,260,000	10,260,000	Kab. Takalar	PAD	-	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Pegawai	11 Unit	17,768,975	Sekretariat

	5	**03**	**02**			**Program Kepegawaian Daerah**	**Persentase Pelayanan Public di Bidang Kepegawaian**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**151,592,500**	**862,374,000**	**862,374,000**	**Kab. Takalar**	**PAD**		**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**	**Pegawai**	**100%**	**131,592,500**	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**
	5	**03**	**02**	**2.01**		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**30,000,000**	**155,012,000**	**155,012,000**	**Kab. Takalar**	**PAD**		**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**	**Pegawai**	**100%**	**10,000,000**	**Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN**
	5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah pelaksanaan koordinasi	8 Kali	1 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	10,000,000	125,908,000	125,908,000	Kab. Takalar	PAD	-	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Pegawai	2 Kali	10,000,000	Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN
	5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah pelaksanaan koordinasi	1.480 Kali	10 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	10,000,000	24,904,000	24,904,000	Kab. Takalar	PAD		Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Pegawai	370 Kali	10,000,000	Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN
	5	03	02	2.01	11	Pengelolaan data kepegawaian	Jumlah penerbitan KARPEG dan sertifikat TASPEN ASN	80 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	10,000,000	4,200,000	4,200,000	Kab. Takalar	PAD		Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Pegawai	20 Orang	10,000,000	Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN
	5	**03**	**02**	**2.02**		**Mutasi dan Promosi**	**Persentase Pemenuhan perpindahan pegawai, SK Kenaikan Pangkat/ KGB yang diproses tepat waktu**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**70,000,000**	**82,212,000**	**82,212,000**	**Kab. Takalar**	**PAD**		**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**	**Pegawai**	**100%**	**70,000,000**	**Mutasi dan Promosi ASN**
	5	03	02	2.02	01	Pengelolaan mutasi ASN	Jumlah pelaksanaan mutasi	2.000 SK	1 SK	600 SK	600 SK	600 SK	18,000,000	56,212,000	56,212,000	Kab. Takalar	PAD	-	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Pegawai	400 SK	16,000,000	Mutasi dan Promosi ASN
	5	03	02	2.02	02	Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Jumlah pelaksanaan kenaikan pangkat	8 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	32,000,000	22,640,000	22,640,000	Kab. Takalar	PAD	-	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Pegawai	2 Kali	34,000,000	Mutasi dan Promosi ASN
	5	03	02	2.02	03	Pengelolaan promosi ASN	Jumlah pelaksanaan ASN yang mendapatkan promosi	200 Orang	1 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	20,000,000	3,360,000	3,360,000	Kab. Takalar	PAD	-	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Pegawai	50 Orang	20,000,000	Mutasi dan Promosi ASN
	5	**03**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Persentase Pemenuhan PNS yang mengikuti Diklat**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**50,000,000**	**621,790,000**	**621,790,000**	**Kab. Takalar**	**PAD**		**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**	**Pegawai**	**100%**	**50,000,000**	**Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur**
	5	03	02	2.03	01	Peningkatan kapasitas kinerja ASN	Jumlah peserta Bimtek	200 Orang	40 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50,000,000	208,490,000	208,490,000	Kab. Takalar	PAD		Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Pegawai	50 Orang	50,000,000	Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur
	5	03	02	2.03	03	Pengelolaan administrasi diklat dan sertifikasi ASN	Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis dan sertifikasi ASN	-	-	10 Orang	10 Orang	10 Orang	-	413,300,000	413,300,000	Kab. Takalar	PAD		Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Pegawai	-	-	Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur

	5	**03**	**02**	**2.04**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Persentase Aparatur yang Telah memenuhi Standar Kompetensi**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**1,592,500**	**3,360,000**	**3,360,000**	**Kab. Takalar**	**PAD**		**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**	**Pegawai**	**100%**	**1,592,500**	**Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur**
	5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Jumlah tenaga ahli yang dibayarkan	4 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1,592,500	3,360,000	3,360,000	Kab. Takalar	PAD	-	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Pegawai	1 Orang	1,592,500	Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur
												JUMLAH	**4,941,105,325**	**5,601,184,124**	**5,466,966,332**							**4,956,372,300**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Keterangan
										Target Kinerja 2024			Pagu Indikatif (Rp)			
						Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA										
						UNSUR PENUNJANG										
	5	**03**				**KEPEGAWAIAN**										
	5	**03**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**	**Persentase Pelayanan Publik di Bidang Kepegawaian**	**Persentase Pelayanan Publik di Bidang Kepegawaian**	**100%**	**100%**	**100%**	**4.925.279.750**	**4.738.810.124**	**4.604.592.332**	
	5	**03**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Ketepatan Waktu dalam Menyusun Perencanaan Program / Kegiatan**	**Persentase Ketepatan Waktu dalam Menyusun Perencanaan Program / Kegiatan**	**100%**	**100%**	**100%**	**10.000.000**	**28.820.080**	**28.820.080**	
	5	03	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja	Jumlah dokumen Renstra dan Renja	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000	1.344.000	1.344.000	
	5	03	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000	12.144.680	12.144.680	
	5	03	01	2.01	03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah koordinasi dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah koordinasi dokumen perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	-	-	2.000.000	-	-	
	5	03	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000	15.331.400	15.331.400	
	5	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum yang Baik dan Tepat Waktu**	**Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum yang Baik dan Tepat Waktu**	**100%**	**100%**	**100%**	**4.587.512.825**	**4.507.692.140**	**4.373.474.348**	
	5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	480 Orang	480 Orang	480 Orang	3.198.698.800	2.949.180.380	2.949.180.380	
								Jumlah ASN yang menerima Tunjangan TPP	Jumlah ASN yang menerima Tunjangan TPP	480 Orang	480 Orang	480 Orang	1.208.000.000	1.558.511.760	1.424.293.968	
								Jumlah ASN yang menerima Tunjangan Objektif Lainnya	Jumlah ASN yang menerima Tunjangan Objektif Lainnya	132 Orang	-	-	150.814.025	-	-	
	5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	-	-	10.000.000	-	-	

	5	03	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKPD	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKPD	4 Laporan	-	-	10.000.000	-	-	
	5	03	01	2.02	08	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1 Laporan	-	-	10.000.000	-	-	
	5	**03**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Terpenuhinya Penyusunan Administrasi Barang milik Daerah Dengan Baik dan Tepat Waktu**	**Persentase Terpenuhinya Penyusunan Administrasi Barang milik Daerah Dengan Baik dan Tepat Waktu**	**100%**	-	-	**17.768.925**	-	-	
	5	03	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah penyusunan laporan barang milik daerah	2 Laporan	-	-	17.768.925	-	-	
	5	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum yang Baik dan Tepat Waktu**	**Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum yang Baik dan Tepat Waktu**	**100%**	**100%**	**100%**	**100.000.000**	**91.395.920**	**91.395.920**	
	5	03	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis perlengkapan peralatan kantor	Jumlah jenis perlengkapan peralatan kantor	11 Buah	11 Buah	11 Buah	25.000.000	16.677.920	16.677.920	
	5	03	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	25.000.000	9.330.000	9.330.000	
	5	03	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah exemplar surat kabar	Jumlah exemplar surat kabar	15 Eksemplar	15 Eksemplar	15 Eksemplar	15.000.000	5.400.000	5.400.000	
	5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah bulan pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah bulan pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12 Kali	12 Kali	12 Kali	35.000.000	59.988.000	59.988.000	
	5	**03**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pegawai dalam Menunjang Kinerja**	**Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pegawai dalam Menunjang Kinerja**	**100%**	-	-	**79.998.000**	-	-	
	5	03	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	1 Unit	-	-	79.998.000	-	-	
	5	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang di sediakan**	**Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang di sediakan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100.000.000**	**100.641.984**	**100.641.984**	
	5	03	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening listrik yang di bayar	Jumlah rekening listrik yang di bayar	12 Rekening	12 Rekening	12 Rekening	95.000.000	58.641.984	58.641.984	
	5	03	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jasa tenaga kebersihan kantor	Jumlah jasa tenaga kebersihan kantor	72 Orang	72 Orang	72 Orang	5.000.000	42.000.000	42.000.000	

	5	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Dengan Baik**	**Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Dengan Baik**	**100%**	**100%**	**100%**	**30.000.000**	**10.260.000**	**10.260.000**	
	5	03	01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	11 Unit	11 Unit	11 Unit	24.000.000	10.260.000	10.260.000	
	5	03	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin gedung kantor dan perlengkapan yang dipelihara	Jumlah pemeliharaan rutin gedung kantor dan perlengkapan yang dipelihara	3 Unit	-	-	6.000.000	-	-	
	5	**03**	**02**			**Program Kepegawaian Daerah**	**Program Kepegawaian Daerah**	**Persentase Pelayanan Public di Bidang Kepegawaian**	**Persentase Pelayanan Public di Bidang Kepegawaian**	**100%**	**100%**	**100%**	**300.000.000**	**862.374.000**	**862.374.000**	
	5	**03**	**02**	**2.01**		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai**	**100%**	**100%**	**100%**	**100.000.000**	**155.012.000**	**155.012.000**	
	5	03	02	2.01	01	Perumusan bahan kebijakan pengadaan ASN	Perumusan bahan kebijakan pengadaan ASN	Jumlah kebijakan pengadaan ASN	Jumlah kebijakan pengadaan ASN	55 Orang	-	-	46.500.000	-	-	
	5	03	02	2.01	02	Penyusunan rencana kebutuhan, jenis, dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	Penyusunan rencana kebutuhan, jenis, dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	Jumlah laporan rencana pelaksanaan pengadaan ASN	Jumlah laporan rencana pelaksanaan pengadaan ASN	4 Laporan	-	-	5.000.000	-	-	
	5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah pelaksanaan koordinasi	Jumlah pelaksanaan koordinasi	2 Kali	2 Kali	2 Kali	10.000.000	125.908.000	125.908.000	
	5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah pelaksanaan koordinasi	Jumlah pelaksanaan koordinasi	12 Kali	12 Kali	12 Kali	10.000.000	24.904.000	24.904.000	
	5	03	02	2.01	10	Pengelolaan system informasi kepegawaian	Pengelolaan system informasi kepegawaian	Jumlah pelaksanaan pengolahan data kepegawain dengan system aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK)	Jumlah pelaksanaan pengolahan data kepegawain dengan system aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK)	1 Kali	-	-	1.000.000	-	-	
	5	03	02	2.01	11	Pengelolaan data kepegawaian	Pengelolaan data kepegawaian	Jumlah penerbitan KARPEG dan sertifikat TASPEN ASN	Jumlah penerbitan KARPEG dan sertifikat TASPEN ASN	20 Orang	20 Orang	20 Orang	10.000.000	4.200.000	4.200.000	
								Jumlah arsip dokumen tata naskah kepegawaian	Jumlah arsip dokumen tata naskah kepegawaian	4.330 Dokumen	-	-	13.500.000	-	-	
	5	03	02	2.01	12	Evaluasi data, informasi dan sistem informasi kepegawaian	Evaluasi data, informasi dan sistem informasi kepegawaian	Jumlah perbaikan data kepegawaian	Jumlah perbaikan data kepegawaian	5 Data	-	-	4.000.000	-	-	

	5	**03**	**02**	**2.02**		**Mutasi dan Promosi**	**Mutasi dan Promosi**	**Persentase Pemenuhan perpindahan pegawai, SK Kenaikan Pangkat/ KGB yang diproses tepat waktu**	**Persentase Pemenuhan perpindahan pegawai, SK Kenaikan Pangkat/ KGB yang diproses tepat waktu**	**100%**	**100%**	**100%**	**100.000.000**	**82.212.000**	**82.212.000**	
	5	03	02	2.02	01	Pengelolaan mutasi ASN	Pengelolaan mutasi ASN	Jumlah pelaksanaan mutasi	Jumlah pelaksanaan mutasi	600 SK	600 SK	600 SK	18.000.000	56.212.000	56.212.000	
	5	03	02	2.02	02	Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Jumlah pelaksanaan kenaikan pangkat	Jumlah pelaksanaan kenaikan pangkat	2 Kali	2 Kali	2 Kali	32.000.000	22.640.000	22.640.000	
								Jumlah pelaksanaan penyelesaian Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	Jumlah pelaksanaan penyelesaian Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	500 SK	-	-	30.000.000	-	-	
	5	03	02	2.02	03	Pengelolaan promosi ASN	Pengelolaan promosi ASN	Jumlah pelaksanaan ASN yang mendapatkan promosi	Jumlah pelaksanaan ASN yang mendapatkan promosi	50 Orang	50 Orang	50 Orang	20.000.000	3.360.000	3.360.000	
	5	**03**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Persentase Pemenuhan PNS yang mengikuti Diklat**	**Persentase Pemenuhan PNS yang mengikuti Diklat**	**100%**	**100%**	**100%**	**90.000.000**	**621.790.000**	**621.790.000**	
	5	03	02	2.03	01	Peningkatan kapasitas kinerja ASN	Peningkatan kapasitas kinerja ASN	Jumlah peserta Bimtek	Jumlah peserta Bimtek	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50.000.000	208.490.000	208.490.000	
	5	03	02	2.03	02	Pengelolaan assessment center	Pengelolaan assessment center	Jumlah peserta Bimtek	Jumlah peserta Bimtek	9 Orang	-	-	10.000.000	-	-	
	5	03	02	2.03	03	Pengelolaan administrasi diklat dan sertifikasi ASN	Pengelolaan administrasi diklat dan sertifikasi ASN	Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis dan sertifikasi ASN	Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis dan sertifikasi ASN	10 Orang	10 Orang	10 Orang	-	413.300.000	413.300.000	
	5	03	02	2.03	04	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN	Jumlah PNS yang menyesuaikan ijazah	Jumlah PNS yang menyesuaikan ijazah	10 Orang	-	-	10.000.000	-	-	
	5	03	02	2.03	05	Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat jabatan fungsional	Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat jabatan fungsional	Jumlah pelaksanaan koordinasi	Jumlah pelaksanaan koordinasi	12 Kali	-	-	12.000.000	-	-	
	5	03	02	2.03	13	Pembinaan jabatan fungsional ASN	Pembinaan jabatan fungsional ASN	Jumlah pelaksanaan kegiatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan	6 Orang	-	-	8.000.000	-	-	
	5	**03**	**02**	**2.04**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Persentase Aparatur yang Telah memenuhi Standar Kompetensi**	**Persentase Aparatur yang Telah memenuhi Standar Kompetensi**	**100%**	**100%**	**100%**	**10.000.000**	**3.360.000**	**3.360.000**	
	5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Jumlah tenaga ahli yang dibayarkan	Jumlah tenaga ahli yang dibayarkan	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1.592.500	3.360.000	3.360.000	
	5	03	02	2.04	04	Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai	Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai	Jumlah PNS yang dapat piagam Satya Lencana	Jumlah PNS yang dapat piagam Satya Lencana	100 Orang	-	-	4.043.000	-	-	

	5	03	02	2.04	10	Evaluasi disiplin ASN	Evaluasi disiplin ASN	Jumlah kasus pelanggaran disiplin ASN yang diselesaikan	Jumlah kasus pelanggaran disiplin ASN yang diselesaikan	5 Orang	-	-	4.364.500	-	-	
	5	**04**	**02**			**Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**Persentase Pelayanan Public di Bidang Kepegawaian**	**Persentase Pelayanan Public di Bidang Kepegawaian**	**100%**	-	-	**400.000.000**	-	-	
	5	**04**	**02**	**2.01**		**Pengembangan Kompetensi**	**Pengembangan Kompetensi**	**Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan**	**Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan**	**100%**	-	-	**200.000.000**	-	-	
	5	04	02	2.01	03	Penyelenggaraan Pengembanagn Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Pengembanagn Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan	21 Orang	-	-	200.000.000	-	-	
	5	**04**	**02**	**2.02**		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional**	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional**	**Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan**	**Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan**	**100%**	-	-	**200.000.000**	-	-	
	5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinana daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinana daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan	21 Orang	-	-	200.000.000	-	-	
	JUMLAH												**5.625.279.750**	**5.601.184.124**	**5.466.966.332**	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar Tahun 2024 merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Perubahan RKPD sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Adapun penyusunan Perubahan Renja OPD merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar Tahun 2024 tidak terlepas dari Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar 2023-2026. Dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar Tahun 2024 yang tertuang dalam Rancangan Awal Rencana Kerja ini didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Takalar yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

Perubahan Renja bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya perencanaan tahun 2024, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir Renstra. Secara umum, nampak bahwa kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar pada tahun sebelumnya adalah sangat baik.

Dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar merencanakan 2 program, 9 kegiatan dan dijabarkan menjadi 20 sub kegiatan. Sebagai penutup, Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar Tahun 2024 ini diharapkan dapat benar-benar dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif dan kegiatan Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar Tahun 2024.

Selain itu, apabila ada hal-hal yang kurang sesuai dengan harapan, maka kami bersedia menerima kritik dan saran agar untuk tahun mendatang akan diadakan evaluasi dan pembenahan dengan tetap memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kami sebagai lembaga/OPD pengelola kepegawaian Kabupaten Takalar.

Takalar, Juli 2024
KEPALA BADAN

Drs. IRWAN
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19640910 199001 1 003

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Rangka melaksanakan ketentuan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu melakukam Perubahan Atas Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah untuk menyesuaikan dengan target kinerja perangkat daerah berdasarkan ketersediaan anggaran pada tahun anggaran 2024. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat darah untuk periode satu (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam prosesnya, penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah dilaksanakan beriringan dengan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Takalar Tahun 2024. Oleh karena itu, Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan perubahan RKPD dengan fokus melakukan evaluasi capaian kinerja dan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar sampai dengan triwulan II Tahun 2024.

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan rencana kerja perangkat daerah adalah penyusunan perubahan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Kepala Organisasi Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah Tahun berikutnya. Hasil Pembahasan Rencana kerja dan Anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD perubahan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rancangan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar adalah:

1) Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Pendidikan Nasional;
2) Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3) Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
4) Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
6) Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
8) Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
9) Kemendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan daerah
10) Peraturan Bupati No. 3 Tahun 2023 tentang RPD Tahun 2023 - 2026
11) Peraturan Bupati Takalar No. 33 Tahun 2020 tentang Kelender Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah tahun 2024
12) Peraturan Bupati Takalar tentang RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2024

13) Surat Edaran Bupati Takalar Nomor 050/1248/Umum tangga 28 Juni 2024 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) Kabupaten Takalar tahun 2024

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah :

1. Untuk menjabarkan program dan kegiata Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kedala program/kegiatan tahunan.
2. Menyiapkan acuan bagi RAPBD.
3. Menyiapkan kerangka evaluasi kinerja program/kegiatan tahunan bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Agar terbangun konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan Pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan II Tahun 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai Dengan Triwulan II

Bagian ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II tahun anggaran 2024.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK

2.3. Solusi dan Penyelesaian Permasalahan dalam Pelaksanaan Hasil Kerja PD Tahun 2024

Bagian ini diuraikan mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/Propinsi, seperti IKK dan SPM;

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Takalar

3.1. Tujuan dan Sasaran

Bagian ini berisikan program kegiatan serta sub kegiatan untuk tahun berikutnya.

3.2. Review terhadap Rencanagan Perubahan RKPD Tahun 2024

3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024

Bab IV Penutup

Pada bagian ini diuraikan :

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TAKALAR SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar tahun 2024 telah melaksanakan 11 (sebelas) Program utama yang terdiri dari:

- Satu program yang bersifat pendukung terhadap program utama;
- Sepuluh program yang menjadi urusan wajib bidang pendidikan dan kebudayaan;

Terhadap masing-masing program utama diatas telah dianalisis pelaksanaannya sebagai berikut :

Untuk anggaran pokok Tahun Anggaran 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar menerima anggaran sebesar Rp. 354.007.936.491,- yang digunakan untuk membiayai 6 (Enam) program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 72 (tujuh puluh dua) Sub Kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten sebesar Rp. 5.010.113.507,- dan DAK Fisik dengan nilai Rp. 28.972.919.000 dan Non Fisik Rp. 139.036.295.200,-, dan Gaji dan Tunjangan Rp. 180.988.608.784,- ,-, dengan jumlah realisasi sampai dengan semester I Rp. 98.321.621.378,- atau persentase realisasi sebesar 27,98%, realisasi anggaran ini rendah di karenakan masih adanya dana DAK yang belum tersalurkan, untuk program kegiatan yang terealisasi sebesar Rp. 623.828.503,- atau 12,45 %. Penjelasan pencapaian realisasi pelaksanaan program kegiatan sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah

Pencapaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 8 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan :

Dalam menunjang pencapaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2024 dengan total anggaran sebesar Rp. 270.607.019.067,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 122.246.490.350,- atau 45,17% kegiatan diantaranya adalah :

1. Pencapaian Kinerja Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 178.953.550,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 178.953.550,- atau 100 % sub Kegiatan diantaranya :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 159.250.500 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 159.250.500, atau 100 % diwujudkan dengan terpenuhinya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah,-
b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.313.945,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.313.945,- atau 100% Persen diwujudkan dengan terpenuhinya Dokumen RKA SKPD ,-
c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.304.800,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.304.800,- atau 100% Persen diwujudkan dengan terpenuhinya Dokumen DPA SKPD ,-
d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.653.400,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.653.400,- atau 100% Persen diwujudkan dengan terpenuhinya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja,-

2. Pencapaian Kinerja Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 269.355.484.284,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 121.706.622.297,- atau 45,18 % Sub Kegiatan diantaranya :
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan pagu anggaran sebesar sebesar Rp. 269.304.183.284,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 121.706.622.297,- atau 45,19 % diwujudkan dengan terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN,-
   b. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 15.446.950,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- atau 0% Persen diwujudkan dengan terpenuhinya Dokumen RKA SKPD ,-
   c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun dengan pagu anggaran sebesar Rp. 11.244.600,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- atau 0% Persen diwujudkan dengan terpenuhinya Dokumen Laporan Keuangan ,-
   d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran dengan pagu anggaran sebesar Rp. 24.609.450,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,- atau 0% Persen diwujudkan dengan terpenuhinya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan,-
3. Pencapaian Kinerja Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 179.206.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 93.489.000,- atau 47,83 % Sub Kegiatan diantaranya :
   a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.347.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.347.000,- atau 100% Persen diwujudkan dengan terpenuhinya Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah,-
   b. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 85.717.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 85.717.000,- atau 100% Persen diwujudkan dengan

terpenuhinya Kegiatan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah,-

c. Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 92.141.900,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- atau 0% Persen diwujudkan dengan terpenuhinya Kegiatan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah,-

a.

4. Pencapaian Kinerja Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 79.372.610,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 44.771.000,- atau 56,41 % Sub Kegiatan diantaranya :
   a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 29.365.510,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.195.000,- atau 41.53% Persen diwujudkan dengan terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
   b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.358.100,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.026.000,- atau 41,53% Persen diwujudkan dengan terpenuhinya Kegiatan peralatan rumah tangga.
   c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 11.880.900,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.950.000,- atau 41,67% Persen diwujudkan dengan terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan.
5. Pencapaian Kinerja Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 442.685.530,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 203.276.503,- atau 45,92% Sub Kegiatan diantaranya :

   a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan pagu anggaran sebesar Rp. 80.392.630,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 22.830.503,- atau 28,40% Persen diwujudkan dengan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
   b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 361.200.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 179.900.000,- atau 49,81% Persen diwujudkan dengan terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor.
6. Pencapaian Kinerja Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 371.317.093,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 27.150.000,- atau 7,31% Sub Kegiatan diantaranya :
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 42.796.300,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 17.350.000,- atau 40.54% diwujudkan dengan terpenuhinya Jasa Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional.
   b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 25.210.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.800.000,- atau 38.87% diwujudkan dengan terpenuhinya Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
   c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 303.310.793,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- atau 0% diwujudkan dengan terpenuhinya Jasa Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

II. Pencapaian Kinerja Program Pengelolaan Pendidikan dilaksanakan 4 (empat) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan)Sub Kegiatan n pada tahun 2024 dengan total anggaran sebesar Rp. 80.692.833.075,- dengan realisasi anggaran sebsar Rp. 80.564.413.575,- atau 0,16% dengan kegiatan diantaranya adalah :

1. Pencapaian Kinerja Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dengan pagu anggaran sebesar Rp. 45.503.218.220,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 72.619.500,- atau 0,16 % sub Kegiatan diantaranya :
   a. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar dengan pagu anggaran sebesar Rp. 154.655.900,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 17.850.000,- atau 11,54 % diwujudkan dengan terpenuhinya Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi satuan Pendidikan Dasar.
   b. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan pagu anggaran sebesar Rp. 156.100.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 54.769.500,- atau 35,09 % diwujudkan dengan terpenuhinya Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

   Untuk realisasi anggaran Sub kegiatan pada kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar masih sangat minim realisasi di karenakan masih berprosesnya dana DAK dan dana BOS untuk SD.

2. Pencapaian Kinerja Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan pagu anggaran sebesar Rp. 25.396.134.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 40.800.000,- atau 0,16 % sub Kegiatan diantaranya :
   a. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan pagu anggaran sebesar Rp. 186.483.232,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 40.800.000,- atau 21,88 % diwujudkan dengan terpenuhinya Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

   Untuk realisasi anggaran Sub kegiatan pada kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama masih sangat minim realisasi di karenakan masih berprosesnya dana DAK dan dana BOS untuk SMP.

3. Pencapaian Kinerja Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.327.525.355,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- atau 0,24 % sub Kegiatan diantaranya :
   a. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- atau 100 % diwujudkan dengan terpenuhinya Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

   Untuk realisasi anggaran Sub kegiatan pada kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD masih sangat minim realisasi di karenakan masih ada 6 sub kegiatan yang belum terlaksana.

4. Pencapaian Kinerja Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.465.955.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- atau 0 % sub Kegiatan diantaranya :

Untuk realisasi anggaran Sub kegiatan pada kegiatan Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan/Non Formal belum realisasi di karenakan masih ada 3 sub kegiatan yang belum terlaksana.

III. Pencapaian Kinerja Program Pengembangan Kebudayaan

Dalam menunjang pencapaian kinerja Program Pengembangan Kebudayaan dilaksanakan 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan pada tahun 2024 dengan total anggaran sebesar Rp. 6.427.500,- dengan realisasi anggaran sebsar Rp. 0 atau 0% diantaranya adalah :

1. Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.427.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0, atau 0 Persen dengan sub kegiatan :
   a. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.427.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0, atau 0 Persen

   Pada Program ini masih ada kegiatan yang belum terlaksana dikarenakan persoalan anggaran kas yang belum sampai pada bulan yang di laksanakan

IV. Pencapaian Kinerja Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Dalam menunjang pencapaian kinerja Program Pengembangan Kesenian Tradisional dilaksanakan 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan pada tahun 2024 dengan total anggaran sebesar Rp. 2.894.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- atau 0% kegiatan diantaranya adalah :

1. Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.894.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- atau 0% dengan sub kegiatan .
   a. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.894.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- atau 0 %.

V. Pencapaian Kinerja Program Pembinaan Sejarah

Dalam menunjang pencapaian kinerja Program Pembinaan Sejarah dilaksanakan 1 (satu) kegiatan dan 2 (satu) sub kegiatan pada tahun 2024 dengan total anggaran sebesar Rp. 13.514.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.344.000,- atau 39,54% kegiatan diantaranya adalah :

1. Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran Rp. 13.514.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.344.000,- atau 39,54% dengan sub kegiatan .
    a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 8.170.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- atau 0 %.
    b. Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.344.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.344.000,- atau 100 %.

VI. Pencapaian Kinerja Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Dalam menunjang pencapaian kinerja Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dilaksanakan 1 (satu) kegiatan dan 2 (satu) sub kegiatan pada tahun 2024 dengan total anggaran sebesar Rp. 16.802.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- atau 0% kegiatan diantaranya adalah :

1. Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 16.802.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- atau 0% dengan sub kegiatan .
    a. Perlindungan Cagar Budaya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.600.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- atau 0 %.
    b. Pengembangan Cagar Budaya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 13.202.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- atau 0 %, diwujudkan dengan terpenuhinya akses masayarakat terhadap data dan nformasi sejarah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Takalar

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode 2021	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Akhir Periode
			2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(6)
	Indikator Kinerja Utama						
1	Indeks Pendidikan (58,37) 2020	58.37	60.01	65	70	75	75
2	**APK Pendidikan**						
	- PAUD		84.20%	86%	88%	90%	90%
	- SD	106.60%	102.82%	106.00%	108.82%	110.00%	110.00%
	- SMP	104.45%	113.67%	116.00%	118.00%	119.00%	119.00%
	- Kesetaraan/PKBM	0	25%	30%	45%	50%	50%
3	**Angka Harapan Lama Sekolah**	12.42	12.50	12.56	12.58	12.60	12.60
4	**Angka Rata-Rata Lama Sekolah**	7.49	7.52	7.56	7.58	7.60	7.60
5	**Rata Rata Capaian SPM Pendidikan**						
	- PAUD	61.01%	61.01%	65%	70%	75%	75%
	- SD	88.54%	91.7%	93%	94%	95%	95%
	- SMP		72.30%	76%	80%	85%	85%
	- Kesetaraan/PKBM	4.50%	4.50%	6%	8%	9%	10%
6	**Penduduk Usia >15 Tahun Melek Huruf**	87.30%	88%	92%	96%	98%	98%

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode 2021	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Akhir Periode
			2023	2024	2025	2026	
7	Presentase Guru Bersertifikasi di semua jenjang pendidikan						
	- PAUD	24.10%	30%	40%	50%	60%	60%
	- SD	46.20%	50.50%	60.50%	70.50%	80.50%	80.50%
	- SMP	57.20%	65.50%	75.50%	85.50%	95.50%	95.50%
	- Kesetaraan/PKBM	0%	1.50%	2.50%	4.50%	5.50%	5.50%
8	Presentase Benda, Situs, Kesenian Daerah dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	15%	47%	55%	77%	100%	100%
9	Presentase Objek Pemajuan Budaya dan Kesenian Lokal yang dilaksanakan/ditingkatkan	22%	40%	60%	80%	100%	100%
10	Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	C	C	CC	BB	BB	B
11	Nilai Sakip Dinas Pendidikan dan Kebudayaaan	59 (CC)	59 (CC)	65 (B)	75 (BB)	90 (A)	90 (A)

Hasil analisis pencapaian kinerja program yang dilaksanakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar pada tahun 2024 sampai dengan bulan juli 2024 diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan sebagian besar belum terpenuhi ini disebabkan karena adanya situasi kondisi untuk tahun 2024 berdasarkan PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 35/PMK.07/2024 TANGGAL 16 APRIL 2024, sehingga ada beberapa kegiatan yang di alihkan atau di potong (refocusing).

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar sebagai lembaga teknis pelaksana, dituntut untuk mampu berperan sebagai pelaksana urusan pemerintah daerah dibidang pendidikan berdasarkan azaz otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar menyelenggarakan fungsi:

a. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan pelaksanaan tugas sebagian urusan pemerintahan dibidang pendidikan dan kebudayaan;
b. Koordinasi, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang Pendidikan dan kebudayaan;
c. Perumusan kebijakan teknis sebagian urusan pemerintahan dibidang pendidikan dan kebudayaan.

Sejalan dengan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang dibidang pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar sebagai lembaga teknis pelaksana menyediakan pelayanan sebagai berikut:

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan
2. Gerakan Kembali Bersekolah
3. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4. Peningkatan Kualitas Siswa
5. Pengelolaan Kekayaan seni dan budaya lokal

Capaian indikator program pada Tabel 2 dapat dijelaskan bahwa secara garis besar angka yang ditarget hingga tahun 2024 optimis tercapai meskipun adanya situasi dan kondisi sekarang ini dengan adanya covic-19 sehingga program kegiatan tidak

berjalan maksimal di karenakan adanya beberapa anggaran yang mendapat pemotongan kemudian untuk dana DAK di tingkat SD, SMP dan Non Formal masih dalam Proses, namun dari beberapa indikator tersebut, 2 indikator program yang perlu mendapat perhatian lebih, seperti : (1) Peningkatan SPM, (2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan.

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar
Periode Pelaksanaan : Januari s.d Juni 2024

No	Kode					Sasaran	Prog/Keg	Indikator Kinerja Program (Outcame)/Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun …….. (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun ….. (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun…..		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggran Renstra SKPD		SKPD Penanggungjawab
															I		II		III		IV								
1	2					3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 6 + 12		15		16
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	X	XX	01				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	Jumlah program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang dilaksanakan		280,812,756,784		280,812,756,784																	
	X	XX	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun		560,000,000		560,000,000				100	178,953,553					100	178,953,553	100	178,953,553	100	178,953,553	
	X	XX	1	2.01	1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan perangkat Daerah yang disusun	5 lap	500,000,000	5 lap	500,000,000	5 lap	159,250,500	20,41 %	32,500,500	100	159,250,500					20,41 %	32,500,500	5 lap	532,500,500	20,41 %	32,500,500	

	X	XX	01	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen program dan kegiatan yang disusun	1 lap	10,000,000	1 lap	10,000,000	1 lap				100	7,313,945							1 lap	10,000,000			
	X	XX	01	2.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen program dan kegiatan yang disusun	1 lap	10,000,000	1 lap	10,000,000	1 lap		20,41%	32,500,500	100	3,126,235					20,41%	32,500,500	1 lap	42,500,500	20,41%	32,500,500	
	X	XX	01	2.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen program dan kegiatan yang disusun	1 lap	10,000,000	1 lap	10,000,000	1 lap		0	-	100	1,304,800					0	-	1 lap	10,000,000	0	-	
	X	XX	01	2.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen program dan kegiatan yang disusun	1 lap	10,000,000	1 lap	10,000,000	1 lap		0	-	100	1,304,670					0	-	1 lap	10,000,000	0	-	
	X	XX	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen program dan kegiatan yang disusun	2 lap	10,000,000	2 lap	10,000,000	2 lap		0	-	100	6,653,400					0	-	2 lap	10,000,000	0	-	
	X	XX	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen program dan kegiatan yang disusun	2 lap	10,000,000	2 lap	10,000,000	2 lap		0	-	0	-					0	-	2 lap	10,000,000	0	-	
	X	XX	1	2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan		270,756,756,784		270,756,756,784		270,712,327,764	0	-	0	-					0	-		270,756,756,784	0	-	
	X	XX	1	2	1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Yang mendapatkan gaji dan tunjangan	1 Keg.	270,656,756,784	1 Keg.	270,656,756,784	1 Keg.	270,656,756,784	0	-	0	-					0	-	1 Keg.	270,656,756,784	0	-	

	X	X X	1	2	2		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase Pemenuhan administrasi pelaksanaan Tugas ASN	1 Keg.	10,000,000	1 Keg.	10,000,000	1 Keg.		12,78 %	34,606,124,531	0	-					12,78 %	34,606,124,531	1 Keg.	34,616,124,531	12,78 %	34,606,124,531	
	X	X X	1	2	3		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Presentase Pemenuhan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	1 Lap.	25,000,000	1 Lap.	25,000,000	1 Lap.		12,78 %	34,606,124,531	0	-					12,78 %	34,606,124,531	1 Lap.	34,631,124,531	12,78 %	34,606,124,531	
	X	X X	1	2	4		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun	1 Lap.	10,000,000	1 Lap.	10,000,000	1 Lap.		0	-	0	-					0	-	1 Lap.	10,000,000	0	-	
	X	X X	1	2	5		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Presentase dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	1 lap.	25,000,000	1 lap.	25,000,000	1 lap.		0	-	0	-					0	-	1 lap.	25,000,000	0	-	
	X	X X	0 1	2	0 6		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen Capaian kinerja yang disusun	1 Lap	15,000,000	1 Lap	15,000,000	1 Lap		0	-	0	-					0	-	1 Lap	15,000,000	0	-	
	X	X X	0 1	2	0 7		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Semesteran	2 Lap	10,000,000	2 Lap	10,000,000	2 Lap		0	-	0	-					0	-	2 Lap	10,000,000	0	-	
	X	X X	0 1	2	0 8		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Pragnosis Realisasi	1 Lap.	5,000,000	1 Lap.	5,000,000	1 Lap.		0	-	0	-					0	-	1 Lap.	5,000,000	0	-	
	X	X X	1	2			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan		505,000,000		505,000,000			0	-	0	-					0	-		505,000,000	0	-	

	X	XX	1	2	1		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah barang yang disusun	1 Lap.	5,000,000	1 Lap.	5,000,000	1 Lap.		0	-	0	-					0	-	1 Lap.	5,000,000	0	-	
	X	XX	01	2	02		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Aasset yang diamankan	1 Lap.	85,000,000	1 Lap.	85,000,000	1 Lap.		47,83%	85,717,000	0	-					47,83%	85,717,000	1 Lap.	170,717,000	47,83%	85,717,000	
	X	XX	01	2	03		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Kegiatan yang dikoordinasikan	1 Lap.	55,000,000	1 Lap.	55,000,000	1 Lap.		0	-	0	-					0	-	1 Lap.	55,000,000	0	-	
	X	XX	01	2	04		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pembinaan dan pengawasan	1 Lap.	55,000,000	1 Lap.	55,000,000	1 Lap.		0	-	0	-					0	-	1 Lap.	55,000,000	0	-	
	X	XX	01	2	5		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah rekonsiliasi yang dilaksanakan	50 Orang	150,000,000	50 Orang	150,000,000	50 Orang		0	-	0	-					0	-	50 Orang	150,000,000	0	-	
	X	XX	01	2	6		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah barang yang tatausahakan	50 Orang	150,000,000	50 Orang	150,000,000	50 Orang		0	-	0	-					0	-	50 Orang	150,000,000	0	-	
	X	XX	01	2	7		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	jumlah barang yang di manfaatkan	1 Lap.	5,000,000	1 Lap.	5,000,000	1 Lap.		100%	85,717,000	0	-					100%	85,717,000	1 Lap.	90,717,000	100%	85,717,000	
	X	XX	01	2			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan		485,000,000		485,000,000			0	-	0	-					0	-		485,000,000	0	-	

	X	XX	01	2	01		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana dan prasarana disiplin yanng ditingkatkan	1 Keg	45,000,000	1 Keg	45,000,000	1 Keg		0	-	0	-					0	-	1 Keg	45,000,000	0	-	
	X	XX	01	2	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	36 PNS	45,000,000	36 PNS	45,000,000	36 PNS		0	-	0	-					0	-	36 PNS	45,000,000	0	-	
	X	XX	01	2	03		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Kegiatan Pendataan yang dilaksanakan	1 Keg	25,000,000	1 Keg	25,000,000	1 Keg		0	-	0	-					0	-	1 Keg	25,000,000	0	-	
	X	XX	01	2	04		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	1 Keg	25,000,000	1 Keg	25,000,000	1 Keg		0	-	0	-					0	-	1 Keg	25,000,000	0	-	
	X	XX	01	2	05		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumllah Monev yang diadakan	1 Lap.	55,000,000	1 Lap.	55,000,000	1 Lap.		0	-	0	-					0	-	1 Lap.	55,000,000	0	-	
	X	XX	01	2	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan Yang diikuti	1 Keg	235,000,000	1 Keg	235,000,000	1 Keg		0	-	0	-					0	-	1 Keg	235,000,000	0	-	
	X	XX	01	2	10		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Undang-Undang yang disosialisasikan	45 Orang	55,000,000	45 Orang	55,000,000	45 Orang				0	-							45 Orang	55,000,000			
	X	XX	01	2			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan		1,081,000,000		1,081,000,000		213,259,610	11.86	25,296,000	0	-					11.86	25,296,000		1,106,296,000	11.86	25,296,000	
	X	XX	01	2	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen listrik yang diadakan	12 Unit	12,000,000	12 Unit	12,000,000	12 Unit		0	-	0	-					0	-	12 Unit	12,000,000	0	-	

	X	X X	0 1	2	0 2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	22 Buah	175,000,000	22 Buah	175,000,000	22 Buah		0	-	0	-					0	-	22 Buah	175,000,000	0	-	
	X	X X	0 1	2	0 3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan rumah tangga yang dilaksanakan	12 Buah	25,000,000	12 Buah	25,000,000	12 Buah		0	-	0	-					0	-	12 Buah	25,000,000	0	-	
	X	X X	0 1	2	0 4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Logistik yang disediakan	12 Bulan	175,000,000	12 Bulan	175,000,000	12 Bulan		0	-	0	-					0	-	12 Bulan	175,000,000	0	-	
	X	X X	0 1	2	0 5		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan yang disediakan	12 Bulan	45,000,000	12 Bulan	45,000,000	12 Bulan	11,880,000	25	8,910,000	0	-					25	8,910,000	12 Bulan	53,910,000	25	8,910,000	
	X	X X	0 1	2	0 6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan	12 Bulan	55,000,000	12 Bulan	55,000,000	12 Bulan	50,400,000	25	37,800,000	0	-					25	37,800,000	12 Bulan	92,800,000	25	37,800,000	
	X	X X	0 1	2	0 7		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan Material yang disediakan	12 Bulan	45,000,000	12 Bulan	45,000,000	12 Bulan		0	-	0	-					0	-	12 Bulan	45,000,000	0	-	
	X	X X	0 1	2	0 8		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan tamu yang difasilitasi	24 kali	45,000,000	24 kali	45,000,000	24 kali		0	-	0	-					0	-	24 kali	45,000,000	0	-	
	X	X X	0 1	2	0 9		Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlag Rapat Kooordinasi dan Konsultasi yang diikuti	120 Kali	215,000,000	120 Kali	215,000,000	120 Kali		0	-	0	-					0	-	120 Kali	215,000,000	0	-	

	X	X X	0 1	2	1 0		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip yang ditata	12 Bulan	24,000,000	12 Bulan	24,000,000	12 Bulan		0	-	0	-					0	-	12 Bulan	24,000,000	0	-	
	X	X X	0 1	2	1 1		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Pelaksanaan sistem pemerintahaan berbasis elektronik yang didukung	1 Unit	265,000,000	1 Unit	265,000,000	1 Unit		0	-	0	-					0	-	1 Unit	265,000,000	0	-	
	X	X X	0 1	2			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang diadakan		2,775,000,000		2,775,000,000			0	-	0	-					0	-		2,775,000,000	0	-	
	X	X X	0 1	2	0 2		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan	5 Unit	120,000,000	5 Unit	120,000,000	5 Unit		0	-	0	-					0	-	5 Unit	120,000,000	0	-	
	X	X X	0 1	2	0 5		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	2 Unit	25,000,000	2 Unit	25,000,000	2 Unit		0	-	0	-					0	-	2 Unit	25,000,000	0	-	
	X	X X	0 1	2	0 6		Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah Peralatan mesin yang diadakan	35 Unit	255,000,000	35 Unit	255,000,000	35 Unit		0	-	0	-					0	-	35 Unit	255,000,000	0	-	
	X	X X	0 1	2	0 8		Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset berwujud yang diadakan	1 Paket	275,000,000	1 Paket	275,000,000	1 Paket		0	-	0	-					0	-	1 Paket	275,000,000	0	-	
	X	X X	0 1	2	0 9		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang diadakan	1 Unit	900,000,000	1 Unit	900,000,000	1 Unit		0	-	0	-					0	-	1 Unit	900,000,000	0	-	

	X	XX	01	2	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasaran yang diadakan	45 Unit	750,000,000	45 Unit	750,000,000	45 Unit		0	-	0	-					0	-	45 Unit	750,000,000	0	-	
	X	XX	01	2	11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung yang diadakan	25 Unit	450,000,000	25 Unit	450,000,000	25 Unit		0	-	0	-					0	-	25 Unit	450,000,000	0	-	
	X	XX	01	2				Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		820,000,000		820,000,000			0	-	0	-					0	-		820,000,000	0	-	
	X	XX	01	2	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dilaksanakan	100 %	25,000,000	100 %	25,000,000	100 %	1,092,900	49.96	546,900	0	-					49.96	546,900	100 %	25,546,900	49.96	546,900	
	X	XX	01	2	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang diadakan	12 Bulan	95,000,000	12 Bulan	95,000,000	12 Bulan	80,392,630	16.37	13,160,767	28.40	22,830,503					16.37	13,160,767	12 Bulan	108,160,767	16.37	13,160,767	
	X	XX	01	2	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan yang disediakan	45 Paket	250,000,000	45 Paket	250,000,000	45 Paket												45 Paket	250,000,000			
	X	XX	01	2	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa Umum Yang disediakan	45 Orang	450,000,000	45 Orang	450,000,000	45 Orang	361,200,000	24.42	88,200,000	49.81	179,900,000					24.42	88,200,000	45 Orang	538,200,000	24.42	88,200,000	
	X	XX	1	2			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		3,830,000,000		3,830,000,000		488,719,306	2.31	11,290,000	7.31	271,500,000					2.31	11,290,000		3,841,290,000	2.31	11,290,000	

								Daerah yang dipelihara																						
	X	XX	01	2	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	6 Kendaraan Dinas	35,000,000	6 Kendaraan Dinas	35,000,000	6 Kendaraan Dinas	86,421,750	4.92	4,250,000	40.54	25,446,300					4.92	4,250,000	6 Kendaraan Dinas	39,250,000	4.92	4,250,000	
	X	XX	1	2	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	45 Unit	45,000,000	45 Unit	45,000,000	45 Unit	39,040,000	18.03	7,040,000	35.13	6,850,000					18.03	7,040,000	45 Unit	52,040,000	18.03	7,040,000	
	X	XX	1	2	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhab	282 Sekolah	1,500,000,000	282 Sekolah	1,500,000,000	282 Sekolah		0	-	0	-					0	-	282 Sekolah	1,500,000,000	0	-	
	X	XX	1	2	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana/Prasarana gedung kantir dan bangunan lainnya yang diPelihara/direhab	282 Sekolah	1,500,000,000	282 Sekolah	1,500,000,000	282 Sekolah		0	-	0	-					0	-	282 Sekolah	1,500,000,000	0	-	
	X	XX	1	2	11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana/Prasarana Pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang diPelihara/direhab	282 Sekolah	750,000,000	282 Sekolah	750,000,000	282 Sekolah		0	-	0	-					0	-	282 Sekolah	750,000,000	0	-	
	1	1	2				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Jumlah Program Pengelolaan Pendidikan yang dilaksanakan		219,358,897,043		219,358,897,043		806928330735	0		0.16	128,419,500					0	-		219,358,897,043	0	-	

	1	1	2	2				Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola		80,835,366,793		80,835,366,793		45,695,504,390	0.12	54,769,500	0	-					0.12	54,769,500		80,890,136,293	0.12	54,769,500	
	1	1	2	2	1		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah USB yang dibangun	1 Paket	1,500,000,000	1 Paket	1,500,000,000	1 Paket		0	-	0	-					0	-	1 Paket	1,500,000,000	0	-	
	1	1	2	2	2		Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang ditambahkan	35 paket	1,560,000,000	35 paket	1,560,000,000	35 paket		0	-	0	-					0	-	35 paket	1,560,000,000	0	-	
	1	1	2	2	3		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang dibangun	10 paket	1,750,000,000	10 paket	1,750,000,000	10 paket		0	-	0	-					0	-	10 paket	1,750,000,000	0	-	
	1	1	2	2	4		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan sekolah yang dibangun	10 Paket	750,000,000	10 Paket	750,000,000	10 Paket		0	-	0	-					0	-	10 Paket	750,000,000	0	-	
	1	1	2	2	5		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan sekolah yang dibangun	5 Paket	1,500,000,000	5 Paket	1,500,000,000	5 Paket		0	-	0	-					0	-	5 Paket	1,500,000,000	0	-	
	1	01	02	2.01	07		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang dibangun	5 Paket	1,137,500,000	5 Paket	1,137,500,000	5 Paket		0	-	0	-					0	-	5 Paket	1,137,500,000	0	-	
	1	1	2	2	8		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang direhab	35 Paket	11,750,000,000	35 Paket	11,750,000,000	35 Paket		0	-	0	-					0	-	35 Paket	11,750,000,000	0	-	
	1	01	02	2.01	09		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	10 Paket	1,750,000,000	10 Paket	1,750,000,000	10 Paket		0	-	0	-					0	-	10 Paket	1,750,000,000	0	-	

								Rehabilitasi																					
	1	01	02	2.01	10		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang direhab	10 Paket	1,250,000,000	10 Paket	1,250,000,000	10 Paket		0	-	0	-					0	-	10 Paket	1,250,000,000	0	-	
	1	1	2	2	11		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah yang direhab	10 Paket	1,750,000,000	10 Paket	1,750,000,000	10 Paket		0	-	0	-					0	-	10 Paket	1,750,000,000	0	-	
	1	01	02	2.01	12		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang direhab	10 Paket	1,150,000,000	10 Paket	1,150,000,000	10 Paket		0	-	0	-					0	-	10 Paket	1,150,000,000	0	-	
	1	01	02	2.01	13		Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang direhab	10 Paket	1,150,000,000	10 Paket	1,150,000,000	10 Paket		0	-	0	-					0	-	10 Paket	1,150,000,000	0	-	
	1	1	2	2	14		Pengadaan Mebeluer Sekolah	Jumlah pengadaan mebeluer sd yang diadakan	10 Paket	2,750,000,000	10 Paket	2,750,000,000	10 Paket		0	-	0	-					0	-	10 Paket	2,750,000,000	0	-	
	1	1	2	2	15		Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah pengadaanalat rumah tangga sd yang diadakan	10 Paket	750,000,000	10 Paket	750,000,000	10 Paket		0	-	0	-					0	-	10 Paket	750,000,000	0	-	
	1	1	2	2	16		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang diadakan	10 Paket	2,750,000,000	10 Paket	2,750,000,000	10 Paket		0	-	0	-					0	-	10 Paket	2,750,000,000	0	-	

	1	1	2	2	17		Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang diadakan	10 Paket	1,750,000,000	10 Paket	1,750,000,000	10 Paket		0	-	0	-					0	-	10 Paket	1,750,000,000	0	-	
	1	01	02	2.01	18		Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Jumlah bangunan gedung dan ruangan yang dipelihara	10 Paket	1,750,000,000	10 Paket	1,750,000,000	10 Paket		0	-	0	-					0	-	10 Paket	1,750,000,000	0	-	
	1	01	02	2.01	19		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang di pelihara	10 Paket	750,000,000	10 Paket	750,000,000	10 Paket		0	-	0	-					0	-	10 Paket	750,000,000	0	-	
	1	01	02	2.01	20		Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah sd yang di pelihara	10 Paket	750,000,000	10 Paket	750,000,000	10 Paket		0	-	0	-					0	-	10 Paket	750,000,000	0	-	
	1	01	02	2.01	21		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah sekolah yang menerima bantuan dana BOS, Beasiswa dan pendidikan gratis	3 Keg.	2,979,775,000	3 Keg.	2,979,775,000	3 Keg.		0	-	0	-					0	-	3 Keg.	2,979,775,000	0	-	
	1	1	2	2	22		Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang diadakan	10 Paket	750,000,000	10 Paket	750,000,000	10 Paket		0	-	0	-					0	-	10 Paket	750,000,000	0	-	
	1	01	02	2.01	23		Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah sekolah penyelenggara ujian	2 Keg.	155,000,000	2 Keg.	155,000,000	2 Keg.		0	-	0	-					0	-	2 Keg.	155,000,000	0	-	
	1	01	02	2.01	24		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Persentase tindak lanjut	2 Keg.	175,000,000	2 Keg.	175,000,000	2 Keg.	154655900	0	-	11.54	17,850,000					0	-	2 Keg.	175,000,000	0	-	

	1	1	2	2	25		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa yang diselenggarakan	7 Keg.	575,000,000	7 Keg.	575,000,000	7 Keg.		0	-	0	-					0	-	7 Keg.	575,000,000	0	-	
	1	01	02	2.01	26		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah pendidikan dan tenaga kependidikan yang disediakan	1 Keg.	150,000,000	1 Keg.	150,000,000	1 Keg.		0	-	0	-					0	-	1 Keg.	150,000,000	0	-	
	1	01	02	2.01	27		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah pendidikan dan tenaga kependidikan yang mengikuti pengembangan karir	9 Keg.	2,450,000,000	9 Keg.	2,450,000,000	9 Keg.	297,608,000	18.40	54,769,500	35.09	54,769,500					18.40	54,769,500	9 Keg.	2,504,769,500	18.40	54,769,500	
	1	01	02	2.01	28		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah sekolah yang dibina	11 Keg.	11,495,000,000	11 Keg.	11,495,000,000	11 Keg.		0	-	0	-					0	-	11 Keg.	11,495,000,000	0	-	
	1	01	02	2.01	29		Pengelolaan dana Bos Sekolah dasar	Jumlah sekolah yang menerima Dana BOS	246 Sekolah	23,843,091,793	246 Sekolah	23,843,091,793	246 Sekolah		0	-	0	-					0	-	246 Sekolah	23,843,091,793	0	-	
	1	01	02	2.01	30		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Pengelolaan Dana BOS	1 Keg	15,000,000	1 Keg	15,000,000	1 Keg		0	-	0	-					0	-	1 Keg	15,000,000	0	-	
	1	01	02	2.02				Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah yang dikelola		98,878,830,250		98,878,830,250			0	-	0	-					0	-		98,878,830,250	0	-	
	1	1	2	2	1		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah USB SMP yang dibangun	1 Paket	1,500,000,000	1 Paket	1,500,000,000	1 Paket		0	-	0	-					0	-	1 Paket	1,500,000,000	0	-	

	1	1	2	2	2		Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah RKB SMP yang dibangun	15 Paket	4,725,000,000	15 Paket	4,725,000,000	15 Paket		0	-	0	-					0	-	15 Paket	4,725,000,000	0	-	
	1	1	2	2	3		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SMP yang dibangun	10 Paket	1,750,000,000	10 Paket	1,750,000,000	10 Paket		0	-	0	-					0	-	10 Paket	1,750,000,000	0	-	
	1	1	2	2	4		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan sekolah yang dibangun	10 Paket	1,750,000,000	10 Paket	1,750,000,000	10 Paket		0	-	0	-					0	-	10 Paket	1,750,000,000	0	-	
	1	1	2	2	5		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan sekolah yang dibangun	10 Paket	2,750,000,000	10 Paket	2,750,000,000	10 Paket		0	-	0	-					0	-	10 Paket	2,750,000,000	0	-	
	1	1	2	2	6		Pembangunan Laboratorium	Jumlah Pembangunan Laboratorium yang dibangun	10 Paket	2,750,000,000	10 Paket	2,750,000,000	10 Paket		0	-	0	-					0	-	10 Paket	2,750,000,000	0	-	
	1	1	2	2	7		Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah ruang serba guna yang dibangun	10 Paket	1,750,000,000	10 Paket	1,750,000,000	10 Paket		0	-	0	-					0	-	10 Paket	1,750,000,000	0	-	
	1	1	2	2	8		Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah asrama sekolah yang dibangun	10 Paket	750,000,000	10 Paket	750,000,000	10 Paket		0	-	0	-					0	-	10 Paket	750,000,000	0	-	
	1	01	02	2.02	09		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah dinas/kepala sekolah/guru/penjaga sekolah yang dibangun	10 Paket	750,000,000	10 Paket	750,000,000	10 Paket		0	-	0	-					0	-	10 Paket	750,000,000	0	-	
	1	1	2	2	10		Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Pembangunan Fasilitas Parkir yang dibangun	10 Paket	750,000,000	10 Paket	750,000,000	10 Paket		0	-	0	-					0	-	10 Paket	750,000,000	0	-	

	1	1	2	2	11		Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Pembangunan Fasilitas Parkir yang dibangun	10 Paket	750,000,000	10 Paket	750,000,000	10 Paket		0	-	0	-					0	-	10 Paket	750,000,000	0	-	
	1	01	02	2.02	12		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang dibangun	10 Paket	750,000,000	10 Paket	750,000,000	10 Paket		0	-	0	-					0	-	10 Paket	750,000,000	0	-	
	1	1	2	2	13		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang direhab	10 Paket	9,750,000,000	10 Paket	9,750,000,000	10 Paket		0	-	0	-					0	-	10 Paket	9,750,000,000	0	-	
	1	1	2	2	14		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas yang direhab	10 Paket	8,750,000,000	10 Paket	8,750,000,000	10 Paket		0	-	0	-					0	-	10 Paket	8,750,000,000	0	-	
	1	1	2	2	15		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang guru yang direhab	10 Paket	1,750,000,000	10 Paket	1,750,000,000	10 Paket		0	-	0	-					0	-	10 Paket	1,750,000,000	0	-	
	1	01	02	2.02	16		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang UKS yang direhab	10 Paket	1,150,000,000	10 Paket	1,150,000,000	10 Paket		0	-	0	-					0	-	10 Paket	1,150,000,000	0	-	
	1	1	2	2	17		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan yang direhab	10 Paket	1,250,000,000	10 Paket	1,250,000,000	10 Paket		0	-	0	-					0	-	10 Paket	1,250,000,000	0	-	
	1	1	2	2	18		Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang direhab	10 Paket	1,750,000,000	10 Paket	1,750,000,000	10 Paket		0	-	0	-					0	-	10 Paket	1,750,000,000	0	-	
	1	01	02	2.02	19		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah ruang serba guna/aula yang direhab	10 Paket	750,000,000	10 Paket	750,000,000	10 Paket		0	-	0	-					0	-	10 Paket	750,000,000	0	-	

	1	1	2	2	20		Rehabilitasi Sedang/Berat Sedang/Berat Asrama	Jumlah asrama sekolah yang direhab	10 Paket	750,000,000	10 Paket	750,000,000	10 Paket		0	-	0	-					0	-	10 Paket	750,000,000	0	-	
	1	01	02	2.02	21		Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlag Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala yang direhab	10 Paket	750,000,000	10 Paket	750,000,000	10 Paket		0	-	0	-					0	-	10 Paket	750,000,000	0	-	
	1	1	2	2	22		Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Jumlah fasilitas parkir yang direhab	10 Paket	750,000,000	10 Paket	750,000,000	10 Paket		0	-	0	-					0	-	10 Paket	750,000,000	0	-	
	1	1	2	2	23		Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	jumlah kantin SMP yang direhab	10 Paket	750,000,000	10 Paket	750,000,000	10 Paket		0	-	0	-					0	-	10 Paket	750,000,000	0	-	
	1	01	02	2.02	24		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah saran, prasaran dan utilitas sekolah yang direhab	10 Paket	750,000,000	10 Paket	750,000,000	10 Paket		0	-	0	-					0	-	10 Paket	750,000,000	0	-	
	1	1	2	2	25		Pengadaan Mebeluer Sekolah	Jumlah Mebeluer sekolah yang diadakan	4 Paket	1,750,000,000	4 Paket	1,750,000,000	4 Paket		0	-	0	-					0	-	4 Paket	1,750,000,000	0	-	
	1	1	2	2	26		Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah sekolah yang menerima alat rumah tangga sekolah	10 Paket	750,000,000	10 Paket	750,000,000	10 Paket		0	-	0	-					0	-	10 Paket	750,000,000	0	-	
	1	1	2	2	27		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang diadakan	10 Paket	3,750,000,000	10 Paket	3,750,000,000	10 Paket		0	-	0	-					0	-	10 Paket	3,750,000,000	0	-	
	1	1	2	2	28		Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang diadakan	10 Paket	750,000,000	10 Paket	750,000,000	10 Paket		0	-	0	-					0	-	10 Paket	750,000,000	0	-	

	1	01	02	2.02	29		Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Jumlah bangunan gedung dan ruangan yang dipelihara	10 Paket	750,000,000	10 Paket	750,000,000	10 Paket		0	-	0	-					0	-	10 Paket	750,000,000	0	-	
	1	01	02	2.02	30		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang dipelihara	10 Paket	750,000,000	10 Paket	750,000,000	10 Paket		0	-	0	-					0	-	10 Paket	750,000,000	0	-	
	1	01	02	2.02	31		Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang dipelihara	10 Paket	750,000,000	10 Paket	750,000,000	10 Paket		0	-	0	-					0	-	10 Paket	750,000,000	0	-	
	1	01	02	2.02	32		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah yang menerima Dana BOS, beasiswa dan pendidikan gratis	3 Keg.	1,766,484,000	3 Keg.	1,766,484,000	3 Keg.	25,396,134,500	0	-	0.16	40,800,000					0	-	3 Keg.	1,766,484,000	0	-	
	1	1	2	2	33		Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Jumlah sekolah yang menerima dasar buku teks peserta didik	10 Paket	4,750,000,000	10 Paket	4,750,000,000	10 Paket		0	-	0	-					0	-	10 Paket	4,750,000,000	0	-	
	1	1	2	2	34		Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumleh Perlengkapan belajar yang diadakan	10 Paket	2,750,000,000	10 Paket	2,750,000,000	10 Paket		0	-	0	-					0	-	10 Paket	2,750,000,000	0	-	
	1	1	2	2	35		Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah alat praktik yang diadakan	5 Paket	2,450,000,000	5 Paket	2,450,000,000	5 Paket		0	-	0	-					0	-	5 Paket	2,450,000,000	0	-	
	1	01	02	2.02	36		Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Presentase proses belajar dan ujian peserta didik	2 Keg.	145,000,000	2 Keg.	145,000,000	2 Keg.		0	-	0	-					0	-	2 Keg.	145,000,000	0	-	

	1	01	02	2.02	37		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Presentase satuan pendidikan yang dievaluasi	2 Keg.	445,000,000	2 Keg.	445,000,000	2 Keg.	186,483,232	0	-	21.88	40,800,000					0	-	2 Keg.	445,000,000	0	-	
	1	1	2	2	38		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa yang diselenggarakan	9 Keg.	475,000,000	9 Keg.	475,000,000	9 Keg.		0	-	0	-					0	-	9 Keg.	475,000,000	0	-	
	1	01	02	2.02	39		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah pendidikan dan tenaga kependidikan yang disediakan	1 Keg.	150,000,000	1 Keg.	150,000,000	1 Keg.		0	-	0	-					0	-	1 Keg.	150,000,000	0	-	
	1	01	02	2.02	40		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah peserta yang ikut pengembangan karir PTK	11 Keg.	2,450,000,000	11 Keg.	2,450,000,000	11 Keg.		0	-	0	-					0	-	11 Keg.	2,450,000,000	0	-	
	1	01	02	2.02	41		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Presentase kelembagaan yang dibina	12 Keg.	13,588,673,250	12 Keg.	13,588,673,250	12 Keg.		0	-	0	-					0	-	12 Keg.	13,588,673,250	0	-	
	1	01	02	2.02	42		Pengelolaan dana Bos Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah yang menerima Dana BOS	46 Sekolah	11,018,673,000	46 Sekolah	11,018,673,000	46 Sekolah		0	-	0	-					0	-	46 Sekolah	11,018,673,000	0	-	
	1	01	02	2.02	43		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pengelolaan Dana BOS	1 Keg	15,000,000	1 Keg	15,000,000	1 Keg		0	-	0	-					0	-	1 Keg	15,000,000	0	-	
	1	1	2	2			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikelola	Jumlah Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		23,111,000,000		23,111,000,000		6,327,525,355	0	-	0.24	15,000,000					0	-		23,111,000,000	0	-	

								yang dikelola																						
	1	01	02	2.03	01		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung PAUD yang dibangun		2,750,000,000		2,750,000,000			0	-	-	-					0	-		2,750,000,000	0	-	
	1	01	02	2.03	02		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana dan prasarana PAUD yang diadakan	10 Paket	450,000,000	10 Paket	450,000,000	10 Paket		0	-	-	-					0	-	10 Paket	450,000,000	0	-	
	1	1	2	2	3		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang direhap	10 Paket	3,450,000,000	10 Paket	3,450,000,000	10 Paket		0	-	-	-					0	-	10 Paket	3,450,000,000	0	-	
	1	01	02	2.03	04		Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang direhap	10 Paket	450,000,000	10 Paket	450,000,000	10 Paket		0	-	-	-					0	-	10 Paket	450,000,000	0	-	
	1	01	02	2.03	05		Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang dipelihara	10 Paket	950,000,000	10 Paket	950,000,000	10 Paket		0	-	-	-					0	-	10 Paket	950,000,000	0	-	
	1	01	02	2.03	06		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang dipelihara	10 Paket	450,000,000	10 Paket	450,000,000	10 Paket		0	-	-	-					0	-	10 Paket	450,000,000	0	-	
	1	1	2	2	7		Pengadaan Mebeluer PAUD	Jumlah Mebeluer PAUD yang diadakan	10 Paket	750,000,000	10 Paket	750,000,000	10 Paket		0	-	-	-					0	-	10 Paket	750,000,000	0	-	
	1	1	2	2	8		Pengadaaan Alat Rumah Tangga PAUD	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang	10 Paket	450,000,000	10 Paket	450,000,000	10 Paket		0	-	-	-					0	-	10 Paket	450,000,000	0	-	

								diadakan																					
	1	1	2	2	9		Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah Perlengkapan PAUD yang diadakan	10 Paket	1,450,000,000	10 Paket	1,450,000,000	10 Paket		0	-	-	-					0	-	10 Paket	1,450,000,000	0	-	
	1	1	2	2	10		Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Siswa PAUD yang diadakan	10 Paket	1,450,000,000	10 Paket	1,450,000,000	10 Paket		0	-	-	-					0	-	10 Paket	1,450,000,000	0	-	
	1	1	2	2	11		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	JUmlah Biaya Personil Peserta Didik PAUD yang disediakan	10 Paket	650,000,000	10 Paket	650,000,000	10 Paket		0	-	-	-					0	-	10 Paket	650,000,000	0	-	
	1	1	2	2	12		Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumah alat praktik dan peraga PAUD yang diadakan	10 Paket	2,450,000,000	10 Paket	2,450,000,000	10 Paket		0	-	-	-					0	-	10 Paket	2,450,000,000	0	-	
	1	1	2	2	13		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah kegiatan proses belajar PAUD yang diselenggarakan	1 Keg.	75,000,000	1 Keg.	75,000,000	1 Keg.		0	-	-	-					0	-	1 Keg.	75,000,000	0	-	
	1	01	02	2.03	14		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Presentase satuan pendidikan yang dievaluasi	1 Keg.	45,000,000	1 Keg.	45,000,000	1 Keg.		0	-	-	-					0	-	1 Keg.	45,000,000	0	-	
	1	01	02	2.03	15		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang disediakan	1 Keg.	150,000,000	1 Keg.	150,000,000	1 Keg.		0	-	-	-					0	-	1 Keg.	150,000,000	0	-	
	1	01	02	2.03	16		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan	Jumlah Peserta Pengembangan Karir PTK	7 Keg.	850,000,000	7 Keg.	850,000,000	7 Keg.		0	-	-	-					0	-	7 Keg.	850,000,000	0	-	

							PAUD																						
	1	1	2	2	17		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Presentase kelembagan yang dibina	4 Keg.	750,000,000	4 Keg.	750,000,000	4 Keg.		0	-	-	-					0	-	4 Keg.	750,000,000	0	-	
	1	1	2	2	18		Pengelolaan Dana BOP	Jumlah Dokumen dapodik PAUD	215 Sekolah	5,541,000,000	215 Sekolah	5,541,000,000	215 Sekolah		0	-	-	-					0	-	215 Sekolah	5,541,000,000	0	-	
	1	1	2	2				Jumlah Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan yang dikelola		16,533,700,000		16,533,700,000			0	-	-	-					0	-		16,533,700,000	0	-	
	1	01	02	2.04	01		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru yang dibangun	15 Paket	3,750,000,000	15 Paket	3,750,000,000	15 Paket		0	-	-	-					0	-	15 Paket	3,750,000,000	0	-	
	1	01	02	2.04	02		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang dibangun	10 paket	450,000,000	10 paket	450,000,000	10 paket		0	-	-	-					0	-	10 paket	450,000,000	0	-	
	1	01	02	2.04	03		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru yang direhab	10 paket	450,000,000	10 paket	450,000,000	10 paket		0	-	-	-					0	-	10 paket	450,000,000	0	-	
	1	01	02	2.04	04		Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhab	10 paket	1,450,000,000	10 paket	1,450,000,000	10 paket		0	-	-	-					0	-	10 paket	1,450,000,000	0	-	

							Sekolah Nonformal/Kesetaraan																								
	1	01	02	2.03	05		Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD/Non Formal	JUmlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang dipelihara	10 paket	2,450,000,000	10 paket	2,450,000,000	10 paket		0	-	-	-					0	-	10 paket	2,450,000,000	0	-	
	1	01	02	2.03	06		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD/Non Formal	JUmlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang dipelihara	10 paket	450,000,000	10 paket	450,000,000	10 paket		0	-	-	-					0	-	10 paket	450,000,000	0	-	
	1	1	2	2	7		Pengadaan Mebeluer PAUD/Non Formal	JUmlah Mebeluer PAUD yang diadakan	10 paket	450,000,000	10 paket	450,000,000	10 paket		0	-	-	-					0	-	10 paket	450,000,000	0	-	
	1	1	2	2	8		Pengadaaan Alat Rumah Tangga PAUD/Non Formal	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang diadakan	10 paket	450,000,000	10 paket	450,000,000	10 paket		0	-	-	-					0	-	10 paket	450,000,000	0	-	
	1	01	02	2.04	09		Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan pendidikan yang diadakan	1 Keg.	1,150,000,000	1 Keg.	1,150,000,000	1 Keg.		0	-	-	-					0	-	1 Keg.	1,150,000,000	0	-	
	1	01	02	2.04	10		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta didik yang dibiayai	1 Keg.	250,000,000	1 Keg.	250,000,000	1 Keg.		0	-	-	-					0	-	1 Keg.	250,000,000	0	-	
	1	01	02	2.04	11		Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Jumlah alat praktik yang diadakan	1 Paket	75,000,000	1 Paket	75,000,000	1 Paket		0	-	-	-					0	-	1 Paket	75,000,000	0	-	
	1	01	02	2.04	12		Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumah Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan yang diselenggarakan	1 Keg.	45,000,000	1 Keg.	45,000,000	1 Keg.		0	-	-	-					0	-	1 Keg.	45,000,000	0	-	

	1	01	02	2.04	13		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Presentase satuan pendidikan yang dievaluasi	5 Keg.	250,000,000	5 Keg.	250,000,000	5 Keg.		0	-	-	-					0	-	5 Keg.	250,000,000	0	-	
	1	01	02	2.04	14		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan yang disediakan	1 Keg.	75,000,000	1 Keg.	75,000,000	1 Keg.		0	-	-	-					0	-	1 Keg.	75,000,000	0	-	
	1	01	02	2.04	15		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta pengembangan karir	9 Keg.	750,000,000	9 Keg.	750,000,000	9 Keg.		0	-	-	-					0	-	9 Keg.	750,000,000	0	-	
	1	01	02	2.04	16		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta pembinaan kelembagaan	6 Keg.	1,300,000,000	6 Keg.	1,300,000,000	6 Keg.		0	-	-	-					0	-	6 Keg.	1,300,000,000	0	-	
	1	01	02	2.04	17		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Penerima Dana BOP kesetaraan	14 Lembaga	2,738,700,000	14 Lembaga	2,738,700,000	14 Lembaga		0	-	-	-					0	-	14 Lembaga	2,738,700,000	0	-	
	1	1	3				PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah Program Pengembangan Kurikulum yang dilaksanakan		1,635,000,000		1,635,000,000			0	-	-	-					0	-		1,635,000,000	0	-	
	1	01	03	2.01				Jumlah Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang dilaksanakan		1,410,000,000		1,410,000,000			0	-	-	-					0	-		1,410,000,000	0	-	

	1	01	03	2.01	01		Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Peserta Penyusunan Kompetensi dasar Mulok	1 Dok	745,000,000	1 Dok	745,000,000	1 Dok		0	-	-	-					0	-	1 Dok	745,000,000	0	-	
	1	01	03	2.01	02		Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah peserta yang mengikuti Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1 Dok	75,000,000	1 Dok	75,000,000	1 Dok		0	-	-	-					0	-	1 Dok	75,000,000	0	-	
	1	01	03	2.01	03		Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	JUmlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang disediakan	1 Dok	445,000,000	1 Dok	445,000,000	1 Dok		0	-	-	-					0	-	1 Dok	445,000,000	0	-	
	1	01	03	2.01	04		Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Peserta Pelatihan Penyusunan Kurikulum Mulok	1 Keg.	145,000,000	1 Keg.	145,000,000	1 Keg.		0	-	-	-					0	-	1 Keg.	145,000,000	0	-	
	1	01	03	2.02				Jumlah Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan yang dilaksanakan		225,000,000		225,000,000			0	-	-	-					0	-		225,000,000	0	-	
	1	01	03	2.02	01		Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Peserta Penyusunan Kompetensi dasar Mulok PAUD	1 Keg.	75,000,000	1 Keg.	75,000,000	1 Keg.		0	-	-	-					0	-	1 Keg.	75,000,000	0	-	
	1	01	03	2.02	02		Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah peserta yang mengikuti Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan	1 Dok	75,000,000	1 Dok	75,000,000	1 Dok		0	-	-	-					0	-	1 Dok	75,000,000	0	-	

								Pendidikan Nonformal																							
	1	01	03	2.02	03		Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	PenyediaanJumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang disediakan	1 Keg.	75,000,000	1 Keg.	75,000,000	1 Keg.		0	-	-	-					0	-	1 Keg.	75,000,000	0	-	
	1	01	04				PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Jumlah program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan yang dilaksanakan		90,000,000		90,000,000			0	-	-	-					0	-		90,000,000	0	-	
	1	01	04	2.01				Jumlah Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan yang dilaksanak		90,000,000		90,000,000			0	-	-	-					0	-		90,000,000	0	-	

								an																					
	1	01	04	2.01	01		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Perhitungan dan Pemetaan PTK	1 Keg.	45,000,000	1 Keg.	45,000,000	1 Keg.		0	-	-	-					0	-	1 Keg.	45,000,000	0	-	
	1	01	04	2.01	02		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Distribusi tenaga pendidik	1 Keg.	45,000,000	1 Keg.	45,000,000	1 Keg.		0	-	-	-					0	-	1 Keg.	45,000,000	0	-	
	1	01	05				PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Jumlah Program Pengendalian Perizinan Pendidikan		625,000,000		625,000,000			0	-	-	-					0	-		625,000,000	0	-	
	1	01	05	2.01				Jumlah Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		625,000,000		625,000,000			0	-	-	-					0	-		625,000,000	0	-	
	1	01	05	2.01	01		Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Presentase usul perizinan pendidikan dasar	1 Keg.	45,000,000	1 Keg.	45,000,000	1 Keg.		0	-	-	-					0	-	1 Keg.	45,000,000	0	-	

	1	01	05	2.01	02		Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Presentase Pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan dasar	1 Keg.	55,000,000	1 Keg.	55,000,000	1 Keg.		0	-	-	-					0	-	1 Keg.	55,000,000	0	-	
	1	01	05	2.02			Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Presenatse izin PAUD yang diterbitkan	1 Keg.	55,000,000	1 Keg.	55,000,000	1 Keg.		0	-	-	-					0	-	1 Keg.	55,000,000	0	-	
	1	01	05	2.02	01		Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Presentase Kelayakan usul perizinan PAUD	1 Keg.	45,000,000	1 Keg.	45,000,000	1 Keg.		0	-	-	-					0	-	1 Keg.	45,000,000	0	-	
	1	01	05	2.02	02		Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Presentase Pengendalian dan pengawasan perizinan PAUD dan Pedidikan Non formal	1 Keg.	75,000,000	1 Keg.	75,000,000	1 Keg.		0	-	-	-					0	-	1 Keg.	75,000,000	0	-	
	1	01	05	2.02	03		Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal	1 Keg.	350,000,000	1 Keg.	350,000,000	1 Keg.		0	-	-	-					0	-	1 Keg.	350,000,000	0	-	
	1	01	06				PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Jumlah Program Pengembangan Bahasa dan sastra		475,000,000		475,000,000			0	-	-	-					0	-		475,000,000	0	-	
	1	01	06	2.01				Jumlah Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang		475,000,000		475,000,000			0	-	-	-					0	-		475,000,000	0	-	

								Penuturannya dalam Daerah Kabupaten /Kota yang dibinas dan dikembangkan																							
	1	01	06	2.01	01		Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten /Kota	1 Dok	125,000,000	1 Dok	125,000,000	1 Dok		0	-	-	-					0	-	1 Dok	125,000,000	0	-	
	1	01	06	2.01	02		Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten /Kota	1 Keg.	25,000,000	1 Keg.	25,000,000	1 Keg.		0	-	-	-					0	-	1 Keg.	25,000,000	0	-	
	1	01	06	2.01	03		Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	Presentase publikasi bahasa dan sastra	1 Keg.	45,000,000	1 Keg.	45,000,000	1 Keg.		0	-	-	-					0	-	1 Keg.	45,000,000	0	-	
	1	01	06	2.01	04		Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten /Kota yang menerima penghargaan	1 Keg.	45,000,000	1 Keg.	45,000,000	1 Keg.		0	-	-	-					0	-	1 Keg.	45,000,000	0	-	
	1	01	06	2.01	05		Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten /Kota yang disediakan dan distribusikan	1 Keg.	55,000,000	1 Keg.	55,000,000	1 Keg.		0	-	-	-					0	-	1 Keg.	55,000,000	0	-	

	1	01	06	2.01	06		Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase publikasi bahasa dan sastra	1 Keg.	55,000,000	1 Keg.	55,000,000	1 Keg.		0	-	-	-					0	-	1 Keg.	55,000,000	0	-	
	1	01	06	2.01	07		Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Modul yang disusun	1 Keg.	125,000,000	1 Keg.	125,000,000	1 Keg.		0	-	-	-					0	-	1 Keg.	125,000,000	0	-	
	2	22	2				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Program Pengembangan Kebudayaan yang dilaksanakan		1,315,000,000		1,315,000,000			0	-	-	-					0	-		1,315,000,000	0	-	
	2	22	02	2.01				Jumlah Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola		495,000,000		495,000,000			0	-	-	-					0	-		495,000,000	0	-	
	2	22	02	2.01	01		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Presentase Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	1 Keg.	450,000,000	1 Keg.	450,000,000	1 Keg.		0	-	-	-					0	-	1 Keg.	450,000,000	0	-	

	2	22	02	2.01	02		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	1 Keg.	45,000,000	1 Keg.	45,000,000	1 Keg.		0	-	-	-					0	-	1 Keg.	45,000,000	0	-	
	2	22	02	2.02				Jumlah Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang dilestarikan		555,000,000		555,000,000			0	-	-	-					0	-		555,000,000	0	-	
	2	22	02	2.02	01		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah objek tradisi budaya yang dilindungi	13 Keg.	455,000,000	13 Keg.	455,000,000	13 Keg.		0	-	-	-					0	-	13 Keg.	455,000,000	0	-	
	2	22	02	2.01	02		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	1 Keg.	45,000,000	1 Keg.	45,000,000	1 Keg.		0	-	-	-					0	-	1 Keg.	45,000,000	0	-	
	2	22	02	2.02	03		Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Prsentase Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam	1 Keg.	55,000,000	1 Keg.	55,000,000	1 Keg.		0	-	-	-					0	-	1 Keg.	55,000,000	0	-	

								Pemajuan Kebudayaan																								
	2	22	02	2.03				Jumlah Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang dibina		265,000,000		265,000,000			0	-	-	-					0	-		265,000,000	0	-	
	2	22	02	2.03	01		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Prsentase Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	1 Keg.	45,000,000	1 Keg.	45,000,000	1 Keg.		0	-	-	-					0	-	1 Keg.	45,000,000	0	-	
	2	22	02	2.03	02		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Presentase Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	1 Keg.	45,000,000	1 Keg.	45,000,000	1 Keg.		0	-	-	-					0	-	1 Keg.	45,000,000	0	-	
	2	22	02	2.03	03		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Lembaga adat yang dibina	1 Keg.	175,000,000	1 Keg.	175,000,000	1 Keg.		0	-	-	-					0	-	1 Keg.	175,000,000	0	-	
	2	22	03				PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah Program Pengembangan Kesenian Tradisional yang dilaksanakan		1,495,000,000		1,495,000,000			0	-	-	-					0	-		1,495,000,000	0	-	
	2	22	03	2.01				Jumlah Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya yang		1,495,000,000		1,495,000,000			0	-	-	-					0	-		1,495,000,000	0	-	

								dibina																								
	2	22	03	2.01	01		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah SDM yang dilatih	5 Keg.	475,000,000	5 Keg.	475,000,000	5 Keg.		0	-	-	-					0	-	5 Keg.	475,000,000	0	-	
	2	22	04	2.01	02		Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah peserta Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	1 Keg.	25,000,000	1 Keg.	25,000,000	1 Keg.		0	-	-	-					0	-	1 Keg.	25,000,000	0	-	
	2	22	03	2.01	03		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah lembaga kesenian	9 Keg.	405,000,000	9 Keg.	405,000,000	9 Keg.		0	-	-	-					0	-	9 Keg.	405,000,000	0	-	
							Bantuan Sarana dan Prasarana Sanggar	Jumlah Bantuan yang diberikan	1 Keg.	555,000,000	1 Keg.	555,000,000	1 Keg.		0	-	-	-					0	-	1 Keg.	555,000,000	0	-	
							Monitoring dan Evaluasi Sanggar Seni Kab. Takalar	Jumlah Sanggar yang Didata	1 Keg.	35,000,000	1 Keg.	35,000,000	1 Keg.		0	-	-	-					0	-	1 Keg.	35,000,000	0	-	
	2	22	4				PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah Program Pembinaan Sejarah yang dilaksanakan		185,000,000		185,000,000		13,514,000	39.54	5,344,000	-	-					39.54	5,344,000		190,344,000	39.54	5,344,000	
	2	22	04	2.01				Jumlah Pembinaan Sejarah Lokal yang dibina		185,000,000		185,000,000			0	-	-	-					0	-		185,000,000	0	-	

	2	22	04	2.01	01		Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang diberdayakan	1 Keg.	25,000,000	1 Keg.	25,000,000	1 Keg.		0	-	-	-					0	-	1 Keg.	25,000,000	0	-	
	2	22	04	2.01	02		penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang dibina	3 Keg.	85,000,000	3 Keg.	85,000,000	3 Keg.		0	-	-	-					0	-	3 Keg.	85,000,000	0	-	
	2	22	04	2.01	03		Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Data dan informasi	1 Keg.	75,000,000	1 Keg.	75,000,000	1 Keg.	5,344,000	100	5,344,000	-	-					100	5,344,000	1 Keg.	80,344,000	100	5,344,000	
	2	22	05				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Program Pelestarian dan pengelolaan cagar Budaya yang dilaksanakan		2,220,000,000		2,220,000,000			0	-	-	-					0	-		2,220,000,000	0	-	
	2	22	05	2.01				Jumlah Cagar Budaya yang Ditetapkan		775,000,000		775,000,000			0	-	-	-					0	-		775,000,000	0	-	
	2	22	5	2	1		Register Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang diregister	1 Keg.	25,000,000	1 Keg.	25,000,000	1 Keg.		0	-	-	-					0	-	1 Keg.	25,000,000	0	-	
	2	22	05	2.01	02		Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang dicegah	1 Keg.	445,000,000	1 Keg.	445,000,000	1 Keg.		0	-	-	-					0	-	1 Keg.	445,000,000	0	-	

	2	22	05	2.01	03		Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya	Jumlah Cagar budaya yang di informasikan	1 Keg.	55,000,000	1 Keg.	55,000,000	1 Keg.		0	-	-	-					0	-	1 Keg.	55,000,000	0	-	
	2	22	5	2	4		Pendayaguna an Cagar Budaya	Jumlah pengelola cagara budaya	1 Keg.	25,000,000	1 Keg.	25,000,000	1 Keg.		0	-	-	-					0	-	1 Keg.	25,000,000	0	-	
	2	22	05	2.01	05		Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar Budaya	Jumlah Tenaga yang dilatih	5 Keg.	225,000,000	5 Keg.	225,000,000	5 Keg.		0	-	-	-					0	-	5 Keg.	225,000,000	0	-	
	2	22	05	2.02				Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola		695,000,000		695,000,000			0	-	-	-					0	-		695,000,000	0	-	
	2	22	5	2	1		Register Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang diregister	1 Keg.	25,000,000	1 Keg.	25,000,000	1 Keg.		0	-	-	-					0	-	1 Keg.	25,000,000	0	-	
	2	22	05	2.02	02		Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang dicegah	1 Keg.	445,000,000	1 Keg.	445,000,000	1 Keg.		0	-	-	-					0	-	1 Keg.	445,000,000	0	-	
	2	22	05	2.02	03		Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya	Jumlah Cagar budaya yang di informasikan	1 Keg.	125,000,000	1 Keg.	125,000,000	1 Keg.		0	-	-	-					0	-	1 Keg.	125,000,000	0	-	
	2	22	5	2	4		Pendayaguna an Cagar Budaya	Prsesentase Pendayagunaan Cagar Budaya	1 Keg.	75,000,000	1 Keg.	75,000,000	1 Keg.		0	-	-	-					0	-	1 Keg.	75,000,000	0	-	

	2	22	05	2.02	05		Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar Budaya	Jumlah peserta Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar Budaya	1 Keg.	25,000,000	1 Keg.	25,000,000	1 Keg.		0	-	-	-					0	-	1 Keg.	25,000,000	0	-	
	2	22	05	2.03				Jumlah Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten /Kota yang di terbitkan		750,000,000		750,000,000			0	-	-	-					0	-		750,000,000	0	-	
	2	22	5	2	1		Register Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang diregister	1 Keg.	25,000,000	1 Keg.	25,000,000	1 Keg.		0	-	-	-					0	-	1 Keg.	25,000,000	0	-	
	2	22	05	2.03	02		Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang dicegah	4 Keg.	550,000,000	4 Keg.	550,000,000	4 Keg.		0	-	-	-					0	-	4 Keg.	550,000,000	0	-	
	2	22	05	2.03	03		Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya	Jumlah Cagar budaya yang di informasikan	1 Keg.	125,000,000	1 Keg.	125,000,000	1 Keg.		0	-	-	-					0	-	1 Keg.	125,000,000	0	-	
	2	22	5	2	4		Pendayaguna an Cagar Budaya	Prsesentase Pendayag unaan Cagar Budaya	1 Keg.	25,000,000	1 Keg.	25,000,000	1 Keg.		0	-	-	-					0	-	1 Keg.	25,000,000	0	-	
	2	22	05	2.02	05		Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar Budaya	Jumlah peserta Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar Budaya	1 Keg.	25,000,000	1 Keg.	25,000,000	1 Keg.		0	-	-	-					0	-	1 Keg.	25,000,000	0	-	

	2	22	6				PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah Pengelolaan Permuseuman yang dilaksanakan		415,000,000		415,000,000			0	-	-	-					0	-		415,000,000	0	-	
	2	22	6	2				Jumlah Museum yang dikelola		415,000,000		415,000,000			0	-	-	-					0	-		415,000,000	0	-	
	2	22	06	2.01	01		Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah koleksi yang dilindungi	1 Keg.	35,000,000	1 Keg.	35,000,000	1 Keg.		0	-	-	-					0	-	1 Keg.	35,000,000	0	-	
	2	22	06	2.01	02		Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah peserta Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	1 Keg.	45,000,000	1 Keg.	45,000,000	1 Keg.		0	-	-	-					0	-	1 Keg.	45,000,000	0	-	
	2	22	06	2.01	03		Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Prsesentase Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Museum	1 Keg.	55,000,000	1 Keg.	55,000,000	1 Keg.		0	-	-	-					0	-	1 Keg.	55,000,000	0	-	
	2	22	06	2.01	04		Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang dipelihara	1 Keg.	125,000,000	1 Keg.	125,000,000	1 Keg.		0	-	-	-					0	-	1 Keg.	125,000,000	0	-	
	2	22	6	2	5		Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	JUmlah Sarana dan Prasarana Museum yang di Revatilasasi	1 Keg.	155,000,000	1 Keg.	155,000,000	1 Keg.		0	-	-	-					0	-	1 Keg.	155,000,000	0	-	

Faktor pendorong pencapaian kinerja : Adanya Kerja Sama yang baik dari semua pihak dan Terbuka Kesempatan untuk meningkatkan Kapsitas Sumber Daya Aparatur Melalui pelatihan dan diklat

Faktor penghambat : Keterbatasan anggaran sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana, belum memadainya sumber daya aparatur dan saran dan prasarana kurang memadai

Usulan tindak lanjut pada Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya : Melakukan Pemetaan dan evaluasi kegiatan yang betul betul merupakan kegiatan urgen dan kegiatan yang sesuai kebutuhan dan Peningkatan sumber da

Usulan tindak lanjut pada Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya : Mengupayakan penyempurnaan substansi penyusunan Renja SKPD Tahun 2019, sehingga dapat menjadi dokumen perencanaan sebagai dasar dan ped

Hasil analisis pencapaian kinerja program yang dilaksanakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar pada tahun 2024 sampai dengan bulan juli 2024 diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan sebagian besar belum terpenuhi ini disebabkan karena adanya situasi kondisi untuk tahun 2024 berdasarkan PERATURAN MENTERI KEUANGAN, sehingga ada beberapa kegiatan yang di alihkan atau di potong.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar sebagai lembaga teknis pelaksana, dituntut untuk mampu berperan sebagai pelaksana urusan pemerintah daerah dibidang pendidikan berdasarkan azaz otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar menyelenggarakan fungsi:

a. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan pelaksanaan tugas sebagian urusan pemerintahan dibidang pendidikan;
b. Koordinasi, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang Pendidikan;
c. Perumusan kebijakan teknis sebagian urusan pemerintahan dibidang pendidikan.

Sejalan dengan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang dibidang pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar sebagai lembaga teknis pelaksana menyediakan pelayanan sebagai berikut:

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan
2. Gerakan Kembali Bersekolah
3. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4. Peningkatan Kualitas Siswa
5. Pengelolaan Kekayaan seni dan budaya lokal

Capaian indikator program pada Tabel 2 dapat dijelaskan bahwa secara garis besar angka yang ditarget hingga tahun 2020 optimis tercapai meskipun adanya situasi dan kondisi sekarang ini dengan adanya covic-19

sehingga program kegiatan tidak berjalan maksimal di karenakan adanya beberapa anggaran yang mendapat pemotongan, namun dari beberapa indikator tersebut, 4 indikator program yang perlu mendapat perhatian lebih, seperti : (1) Peningkagan SPM, (2) Akreditasi, (3) Jumlah Jumlah tenaga kependidikan (Tendik) (4) Penurunan Angka Putus Sekolah.

Tabel. 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Takalar

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2024	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar			150	151	152	153			152	153	
		% Bangunan Sekolah dalam kondisi Baik SD		25,79	50%	60%	70%	25,79	72%	60%	70%	
		% Bangunan Sekolah dalam kondisi Baik SMP		25,59	35%	40%	45%	25,59	55%	40%	45%	
		% Sekolah terpenuhi sarana standar (Lab IPA; R Kepsek; R Guru; R Staf + Meja&Kursi)		28,39%	35%	40%	45%	25,59	35%	40%	45%	
		Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak		96%	100%	96%	100%	95%	96%	96%	100%	

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2024	Tahun 2024	
		melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis.										
				95%	100%	100%	100%	95%	100%	100%	100%	
		Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 siswa dan minimal 1 (satu) set peralatan praltek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik.		15%	20%	25%	30%		25%	25%	30%	
		Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP dan MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.		95%	97%	100%	100%		100%	100%	100%	
				85%	87%	89%	93%		89%	89%	93%	
		Di setiap SD dan MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4		96%	97%	98%	99%	96%	98%	98%	99%	

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2024	Tahun 2024	
		(empat) orang guru setiap satuan pendidikan.										
		Di setiap SMP dan MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran		75%	c	80%	85%		100%	80%	85%	
		Di setiap SD dan MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.		93%	95%	97%	100%		25%	97%	100%	
		Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%.		93%	95%	97%	100%		100%	97%	100%	
		Di setiap SMP dan MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa		83%	85%	90%	95%		89%	90%	95%	

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2024	Tahun 2024	
		Indonesia dan Bahasa Inggris.										
		Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD dan MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.		100%	100%	100%	100%		98%	100%	100%	
		Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SMP dan MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	
		Di setiap Kabupaten/Kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	
		Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	
		Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2024	Tahun 2024	
		pembinaan.										
				100%	100%	100%	100%			100%	100%	
		Setiap SD dan MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bhs. Indonesia, IPA, IPS dan Pkn dengan perbandingan 1 (satu) set untuk setiap perserta didik.		93%	95%	97%	100%		97%	97%	100%	
		Setiap SMP dan MTS menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan 1 (satu) set untuk setiap peserta didik.		95%	97%	100%	100%		100%	100%	100%	
		Setiap SD dan MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, KIT IPA untuk eksperimen dasar dan poster/carta IPA		30%	35%	40%	45%		25%	40%	45%	
		Setiap SD dan MI memiliki 100 judul buku pengayaan		50%	55%	60%	65%		60%	60%	65%	

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2024	Tahun 2024	
		dan 10 buku referensi, dan setiap SMP dan MTs memiliki 200 jud ul buku pengayaan dan 20 buku referensi.		25%	30%	35%	40%			35%	40%	
		Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik dan melaksanakan tugas tambahan.		77%	80%	85%	90%		85%	85%	90%	
				90%	93%	95%	97%		95%	95%	97%	
		Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut : Kelas 1-2 : 18 Jam per minggu Kelas 3 : 24 Jam per minggu Kelas 4-6 : 27 Jam per minggu Kelas 7-9 : 27 Jam per minggu		100%	100%	100%	100%			100%	100%	
				100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	
		Satuan pendidikan menerapkan Kurikulum sesuai dengan peraturan yang berlaku		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	
				100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	
		Setiap guru menerapkan Rencana Pelaksanaan							100%			

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2024	Tahun 2024	
		Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya		100%	100%	100%	100%			100%	100%	
				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali setiap semester		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil belajar		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Kepala Sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil UAS, UKK serta Ujian Akhir (US/UN).		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2024	Tahun 2024	
			Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	55%	60%	70%	80%	55%	45,8%	70%	80%	
			Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	50%	65%	75%	85%	84,2%		75%	85%	
			Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	55%	60%	70%	80%	55%	45,8%	70%	80%	
			Angka Pendidikan Yang Ditamatkan	50%	65%	75%	85%	50%		75%	85%	
			Rasio Guru : Siswa	48	50	52	55	50	52	52	55	
			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	98,85 %	99%	100%	100%	92,4%	91,66%	100%	100%	
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	70,56 %	85%	90%	95%	73,2%	72,34%	90%	95%	
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	93,28 %	95%	100%	100%	109,6%	106,6%	100%	100%	
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	79,45 %	85%	90%	95%	104,6%	104,4%	90%	95%	
			Angka Partisipasi	935,	937,80%	940,80%	942,80%	935,80	937,80%	940,80%	942,80%	

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2024	Tahun 2024	
			Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	80%				%				
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/ Paket B	835,91%	840,91%	845,91%	850,91%	835,91%	840,91%	845,91%	850,91%	
			Angka Putus Sekolah :									
			Angka Putus Sekolah SD/MI	0,50 %	0,25 %	0,05%	0%	0,25%	0,3%	0,05%	0%	
			Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,05 %	0,03%	0%	0%	0,04 %	0,4%	0%	0%	
			Angka Kelulusan :									
			Angka Kelulusan SD/MI	100	100	100	100	100	100	100	100	
			Angka Kelulusan SMP/MTs	100	100	100	100	100	100	100	100	
			Angka Melanjutkan :									
			Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	100	100	100	100	100	100	100	100	
			Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Meningkatkan kualitas Mutu Layanan pendidikan		Guru memenuhi kualifikasi S1/D-IV	80%	85%	90%	100%	95%	90%	90%	100%	

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2024	Tahun 2024	
			Guru bersertifikasi pendidik	80%	85%	90%	100%	88%	90%	90%	100%	
			Fasilitas Pendidikan :									
			Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	50%	60%	70%	80%	50%	71,91%	70%	80%	
			Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik	35%	40%	45%	50%	50%	74,57%	45%	50%	
			Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	150	151	152	153	150	151	152	153	
			Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	20	20	20	20	20	13	20	20	
			Rasio guru/murid perkelas rata-rata sekolah dasar	28	28	28	28	28	13	28	28	
			Proporsi murid kelas 6 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	96%	97%	98%	99%	100%	97%	98%	99%	
			Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	
			Penduduk yang berusia > 15 tahun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2024	Tahun 2024	
			melek huruf (tidak buta aksara)									
			Angka Rata-Rata Lama Sekolah	15%	25%	35%	45%	15%	7,2%	35%	45%	
			Proporsi anak-anak dan Remaja : (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/Kelas 6, (C) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimun dalam : (i) membaca, (ii) matematika	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	
			Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	175	185	190	200	175	185	190	200	
			Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	15	27	30	35	25	27	30	35	
			Persentase SMA/MTs berakreditasi minimal B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat	95%	100%	100%	100%	95 %	106,6%	100%	100%	
			Angka Partisipasi Kasar (APK)	85%	90%	95%	100%	85%	104,4%	95%	100%	

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2024	Tahun 2024	
			SMP/MTs/Sederajat									
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/Sederajat	85%	90%	95%	100%	85 %	95,4%	95%	100%	
			Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	50%	65%	75%	85%	50%	45,82%	75%	85%	
			Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan tinggi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	
			Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	
			Proporsi remaja dan dewasa dengn keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	
			Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat: dan rasio angka partisispasi kasar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2024	Tahun 2024	
			(APK) perempuan/laki-laki di (4) perguruan tinggi									
			Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	
			Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	
			Proporsi sekolah dengan akses ke : (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan meteri memadai bagi siswa disibilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri dari air, sanitasi dan higienis bagi semua (WASH)	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	
			Jumlah bantuan resmi pemerintah kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negera berkembang									

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2024	Tahun 2024	
	Meningkatkan akuntabilitas OPD		Nilai SAKIP OPD	59 (CC)	60 (B)	70 (BB)	80,1 (A)		70	70 (BB)	80,1 (A)	
			% Temuan BPK dan APIP ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%		85%	100%	100%	
			Serapan Anggaran OPD	95%	95%	95%	95%		97%	95%	95%	
			% Pelaporan tepat waktu (LK, LKJ, SPJ)	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	

2.3 Solusi dan Penyelesaian Permasalahan dalam Pelaksanaan Hasil Kerja PD Tahun 2024

Berangkat dari hasil analisis capaian pelayanan serta kajian atas pencapaian kinerja sasaran dalam 4 Tahun terakhir, maka Solusi dan penyelesaian permasalahan terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sektor pendidikan dan kebudayaan, adalah sebagai berikut:

Upaya perluasan dan pemerataan pendidikan masih belum sepenuhnya dapat menjangkau semua lapisan masyarakat usia sekolah. Di berbagai titik wilayah disetiap kecamatan masih terdapat penduduk usia sekolah (PUS) yang tidak atau belum terlayani sistem persekolahan yang ada. Meski APK pendidikan sudah mencapai 95% lebih, fakta di lapangan menunjukkan masih banyaknya anak usia 7-15 Tahun yang memilih bekerja atau melakukan kegiatan lain di luar sekolah atau setidaknya tidak tercatat sebagai pelajar di wilayah Kabupaten Takalar.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab belum meratanya pendidikan di Kabupaten Takalar antara lain adalah (1) keterbatasan sarana dan prasarana, khususnya di wilayah yang jauh dari perkotaan. (2) Sikap budaya sebagian masyarakat yang tidak memandang pendidikan sebagai faktor penting dalam membangun kehidupan anaknya apalagi di tingkat TK. (3)

Upaya peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan masih dihadapkan pada persoalan: (1) Terbatasnya fasilitas penunjang untuk KBM yang efektif (2) Tingkat profesionalitas PTK yang belum merata antar jenis dan satuan pendidikan terutama di tingkat TK, (3) Terbatasnya kapasitas manajemen penyelenggaraan pendidikan kesetaraan dan keaksaraan fungsional yang menyebabkan sering munculnya tindakan tidak taat asas dan lemahnya hasil proses pembelajaran yang dialami warga belajar.

Dalam rangka peningkatan capaian kinerja di masa mendatang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar menerapkan strategi-strategi sebagai berikut:

a. Meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan dengan lebih mengacu pada Renstra, Repetada, RPJMD dan 8 delapan stándar pendidikan
b. Peningkatan Gerakan Kembali bersekolah baik pendidikan formal maupun non formal (PKBM)
c. Untuk PAUD di galakkan satu desa satu paud
d. Meningkatkan profesionalisme pengelola kegiatan agar capaian kinerja dapat meningkat
e. Menyempurnakan implementasi anggaran berbasis kinerja secara terprogram, agar seluruh kegiatan dapat dinilai kinerjanya secara tepat.

f. Memperluas cakupan pengawasan pihak yang terkait.
g. Mengembangkan sistem informasi pengumpulan data kinerja dalam rangka penyempurnaan penetapan indikator kinerja.
h. Perlu dorongan kepada GTK untuk melakukansosilisasi kepada peserta didik atau anak usia sekolah yang rentang dan putus sekolah berdasarkan program 1 guru 1 siswa.
i. Perlu pengelolaan kebudayaan dan sejarah yang berbasis ekonomi sehingga masyarakat mampu menjaga dan melestarikan adat budaya dan sejarah daerah.
j. Pembinaan kesenian daerah perlu di tingkatkan dengan cara melakukan pageleran baik di daerah maupun tingkat nasional

Faktor Berpengaruh Terhadap Kinerja

- **Faktor Kekuatan (Strenghts)**

  Adapun faktor kekuatan yang didentifikasi sebagai berikut :

  - ✓ Adanya kelembagaan / organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar.

    Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar yang merupakan suatu unit organisasi strategis dari lembaga eksekutif dan menjadi partner legislative didaerah ini, dituntut agar lebih meningkatkan kemampuan manajemen organisasi (manajerial Skill) dan mutu kinerja aparaturnya didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban.

  - ✓ Komitmen dukungan pimpinan yang tinggi.

    Adanya komitmen dukungan pimpinan Dinas Pendidikan dan Kebudayaana Kabupaten Takalar yang ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan ingin menjadikan pendidikan nomor satu di segala Bidang.

  - ✓ Motivasi kerja staf tinggi (SDM).

    Adanya keinginan untuk meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada masyarakat dengan organisasi terkait merupakan salah satu faktor pendorong utama dalam meningkatkan motivasi kerja staf.
  - ✓ Sarana dan Prasarana
  - ✓ Kebijakan
  - ✓ Dukungan dana
  - ✓ Koordinasi dengan Pihak yang terka

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar Tahun 2024 didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaran tugas pokok dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar.

Tabel 3

TUJUAN DAN SASARAN

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET			
				2018	2019	2024	2024
	Meningkatkan akses pendidikan dasar bagi seluruh lapisan masyarakat	Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana layanan Pendidikan	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	150	151	152	153
			% Bangunan Sekolah dalam kondisi Baik SD	50%	60%	70%	80%
			% Bangunan Sekolah dalam kondisi Baik SMP	35%	40%	45%	50%
			% Sekolah terpenuhi sarana standar (Lab IPA; R Kepsek; R Guru; R Staf + Meja&Kursi)	35%	40%	45%	50%
			Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil	100%	100%	100%	100%
				100%	100%	100%	100%
			Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan	96%	100%	96%	100%

			belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis.	95%	100%	100%	100%
			Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 siswa dan minimal 1 (satu) set peralatan praltek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik.	15%	20%	25%	30%
			Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP dan MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.	95%	97%	100%	100%
				85%	87%	89%	93%
			Di setiap SD dan MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan.	96%	97%	98%	99%
			Di setiap SMP dan MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran.	75%	77%	80%	85%
			Di setiap SD dan MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.	93%	95%	97%	100%
			Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan	93%	95%	97%	100%

			separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%.				
			Di setiap SMP dan MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.	83%	85%	90%	95%
			Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD dan MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.	100%	100%	100%	100%
			Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SMP dan MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.	100%	100%	100%	100%
			Di setiap Kabupaten/Kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.	100%	100%	100%	100%
			Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.	100%	100%	100%	100%
			Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.	100%	100%	100%	100%
				100%	100%	100%	100%
			Setiap SD dan MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bhs. Indonesia, IPA, IPS dan Pkn dengan perbandingan 1 (satu) set untuk setiap perserta didik.	93%	95%	97%	100%

			Setiap SMP dan MTS menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan 1 (satu) set untuk setiap peserta didik.	95%	97%	100%	100%
			Setiap SD dan MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, KIT IPA untuk eksperimen dasar dan poster/carta IPA	30%	35%	40%	45%
			Setiap SD dan MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP dan MTs	50%	55%	60%	65%
			memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi.	25%	30%	35%	40%
			Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik dan melaksanakan tugas tambahan.	77%	80%	85%	90%
				90%	93%	95%	97%
			Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut : Kelas 1-2 : 18 Jam per minggu Kelas 3 : 24 Jam per minggu Kelas 4-6 : 27 Jam per minggu Kelas 7-9 : 27 Jam per minggu	100%	100%	100%	100%
				100%	100%	100%	100%
			Satuan pendidikan menerapkan Kurikulum sesuai dengan peraturan yang berlaku	100%	100%	100%	100%
			Setiap guru menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)	100%	100%	100%	100%

			yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya.	100%	100%	100%	100%
			Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik	100%	100%	100%	100%
				100%	100%	100%	100%

			Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali setiap semester	100%	100%	100%	100%
				100%	100%	100%	100%
			Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil belajar	100%	100%	100%	100%
				100%	100%	100%	100%
			Kepala Sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil UAS, UKK serta Ujian Akhir (US/UN).	100%	100%	100%	100%
				100%	100%	100%	100%
			Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).	100%	100%	100%	100%
				100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya akses pendidikan anak usia dini formal maupun non formal	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	55%	60%	70%	80%
			Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	50%	65%	75%	85%
			Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	55%	60%	70%	80%
			Angka Pendidikan Yang Ditamatkan	50%	65%	75%	85%

		Meningkatnya akses pendidikan dasar	Rasio Guru : Siswa	48	50	52	55	
			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	98,85 %	99%	100%	100%	
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	70,56 %	85%	90%	95%	
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	93,28 %	95%	100%	100%	
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	79,45 %	85%	90%	95%	
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	935, 80%	937,80%	940,80%	942,80%	9
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/ Paket B	835,91%	840,91%	845,91%	850,91%	8
			Angka Putus Sekolah :					
			Angka Putus Sekolah SD/MI	0,50 %	0,25 %	0,05%	0%	
			Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,05 %	0,03%	0%	0%	
			Angka Kelulusan :					
			Angka Kelulusan SD/MI	100	100	100	100	
			Angka Kelulusan SMP/MTs Angka Melanjutkan :	100	100	100	100	
			Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	100	100	100	100	
			Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA	100	100	100	100	
	Meningkatkan kualitas Mutu Layanan pendidikan	Meningkatnya kualitas Layanan Pendidikan	Guru memenuhi kualifikasi S1/D-IV	80%	85%	90%	100%	
		Meningkatnya Mutu Pendidikan dasar	Guru bersertifikasi pendidik	80%	85%	90%	100%	
			Fasilitas Pendidikan :					
			Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	50%	60%	70%	80%	
			Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik	35%	40%	45%	50%	

			Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	150	151	152	153
			Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	20	20	20	20
			Rasio guru/murid perkelas rata-rata sekolah dasar	28	28	28	28
			Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	96%	97%	98%	99%
			Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	N/A	N/A	N/A	N/A
			Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	N/A	N/A	N/A	N/A
			Angka Rata-Rata Lama Sekolah	15%	25%	35%	45%
			Proporsi anak-anak dan Remaja : (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/Kelas 6, (C) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimun dalam : (i) membaca, (ii) matematika	N/A	N/A	N/A	N/A
			Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	175	185	190	195
			Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	25	27	30	35
			Persentase SMA/MTs berakreditasi minimal B	N/A	N/A	N/A	N/A
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat	95%	100%	100%	100%
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat	85%	90%	95%	100%

		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/Sederajat	81,10	85%	90%	95%	100%
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	30,49%	50%	65%	75%	85%

		Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan tinggi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Proporsi remaja dan dewasa dengn keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat: dan rasio angka partisispasi kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) perguruan tinggi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Proporsi sekolah dengan akses ke : (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan meteri memadai bagi siswa disibilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri dari air, sanitasi dan higienis bagi semua (WASH)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Jumlah bantuan resmi pemerintah kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negera berkembang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
T4: Meningkatkan akuntabilitas OPD	S4.1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan OPD	Nilai SAKIP OPD	59 (CC)	59 (CC)	60 (B)	70 (BB)	80,1 (A)
		% Temuan BPK dan APIP ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
		Serapan Anggaran OPD	95%	95%	95%	95%	95%

		Pelaporan tepat waktu (LK, LKJ, SPJ)	100%	100%	100%	100%	100%

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2024

Perubahan Rencana kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar tahun 2024 mencakup 6 program terdiri 217 sub kegiatan yaitu: Rumusan rencana program dan kegiatan Perubahan tahun 2024 secara detail dapat dilihat pada lampiran Tabel VII, Tabel VIII, dan Tabel IX.

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TAKALAR

TAHUN 2024

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Kinerja RENJA OPD Tahun 20	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024			Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Renja 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	Renja 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024			Nasional	Daerah				

					23														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	13	14	15	16	17	18	19	20
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				**390,896,017,031.00**	**390,896,017,031.00**	**390,896,017,031.00**	**390,896,017,031.00**	**390,896,017,031.00**	**390,896,017,031.00**							**369,874,589,095**	
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**388,917,941,531.00**	**388,917,941,531.00**	**388,917,941,531.00**	**388,917,941,531.00**	**388,917,941,531.00**	**388,917,941,531.00**							**368,789,589,095**	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				**388,917,941,531.00**	**388,917,941,531.00**	**388,917,941,531.00**	**388,917,941,531.00**	**388,917,941,531.00**	**388,917,941,531.00**							**368,789,589,095**	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**271,068,962,593.00**	**271,068,962,593.00**	**271,068,962,593.00**	**271,068,962,593.00**	**271,068,962,593.00**	**271,068,962,593.00**							**272,928,127,815**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**13,500,000.00**	**13,500,000.00**	**13,500,000.00**	**13,500,000.00**	**13,500,000.00**	**13,500,000.00**			**-**	**01.Peningkatan Tata Kelola peny**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**		**4,500,000.00**	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAA**

																			elenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				**N**
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*			2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerinta	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2 Dokumen	500,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																				hanyang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*			4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	1,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan*			3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan	PAJAK DAERAH	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebu	1 Dokumen	500,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBU

						SKPD	*Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*									, Kalabbirang				daya an			DAYA AN
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*			2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	500,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*			2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Kalabbirang	PAJAK DAERAH	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	500,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Kalabirang	PAJAK DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	500,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Kalabirang	PAJAK DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Laporan	1,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**270,425,703,231.00**	**270,425,703,231.00**	**269,366,934,079.00**	**270,425,703,231.00**	**270,425,703,231.00**	**269,366,934,079.00**								**272,091,129,300.00**	

						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*			270,422,203,231.00	270,422,203,231.00	269,363,434,079.00	270,422,203,231.00	270,422,203,231.00	269,363,434,079.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA, DANA TRANSFER	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2386.00 Orang/bulan	272,088,329,300.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN						
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*			700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	700,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*			700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00						1 Dokumen		

						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*			700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Kalabirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Laporan	700,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*			700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Kalabirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2 Laporan	700,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Penyusunan Pelaporan dan Analisis	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan*			700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	Kab. Takalar, Semua	PENDAPATAN ASLI DAER	-	-	Dinas Pendidikan	2 Laporan	700,000.00	DINAS PENDIDIKAN

						Prognosis Realisasi Anggaran	*Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*									Kecamatan, Kalabirang	AH (PAD), PAJAK DAERAH			dan Kebudayaan			DAN KEBUDAYAAN
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				**2,800,000.00**	**2,800,000.00**	**2,800,000.00**	**2,800,000.00**	**2,800,000.00**	**2,800,000.00**							**2,800,000.00**	
						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*			700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Kalabirang	PAJAK DAERAH	-	-	-	1 Dokumen	700,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD*			700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Kalabirang	PAJAK DAERAH	-	-	-	1 Laporan	700,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang*			700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan,	PAJAK DAERAH	-	-	-	2 Laporan	700,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYA

						pada SKPD	*Milik Daerah pada SKPD*										Kalabirang						AN
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*			700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Kalabirang	PAJAK DAERAH	-	-	-	2 Laporan	700,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**			**-**	**01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerin**	**-**		**19,000,000.00**	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

																			tah an dan Pela yan an Pub lik				
						Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Kalabirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publ	-	36 Paket	5,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																			ik			
						Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*			1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Kalabbirang	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	1 Dokumen	1,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	2 Orang	13,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

						Administrasi Umum Perangkat Daerah				**145,414,000.00**	**145,414,000.00**	**145,414,000.00**	**145,414,000.00**	**145,414,000.00**	**145,414,000.00**			**-**	**01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**		**11,000,000.00**	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pe*			1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Kab. Takalar, Semua Keca	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelo	Dinas Pendidikan dan	1 Paket	1,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN

						Bangunan Kantor	*neranga n Banguna n Kantor yang Disediak an*										matan , Kalab birang			la pen y elen ggar aa n pem erint a han yan g aku ntab el dan inov atif 6. Perb aika n Tata kelol a Pem erint ah an dan Pela yan an Publ ik	Kebu daya an			KEBU DAYA AN
						Penyedia an Peralatan dan Perlengka pan Kantor	*Jumlah Paket Peralata n dan Perlengk apan Kantor yang Disediak an*			81,536, 900.00	81,536, 900.00	81,536, 900.00	81,536, 900.00	81,536, 900.00	81,536, 900.00	Kab. Takal ar, Semu a Keca matan , Kalab birang	PAJA K DAER AH	-	01.P enin gkat an Tata Kelo la pen y elen ggar aa n pem	Dina s Pend idika n dan Kebu daya an	3 Pak et	1,000,00 0.00	DINA S PEND IDIKA N DAN KEBU DAYA AN

																				erintahanyang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*			1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Kalabbirang	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahanyang akuntab	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Paket	1,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																				el dan inovatif 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*			37,877,100.00	37,877,100.00	37,877,100.00	37,877,100.00	37,877,100.00	37,877,100.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Kalabirang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaika	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2 Paket	1,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																			n Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*			18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Kalabirang	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10 Dokumen	1,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																				an dan Pelayanan Publik				
						Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*			1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Kalabirang	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Paket	1,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

						Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*			1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Kalabirang	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Laporan	1,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan*			4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola	Dinas Pendidikan dan Kebu	1 Laporan	4,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBU

							Konsultasi SKPD										, Kalabirang			penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	dayaan			DAYAAN
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**48,972,000.00**	**48,972,000.00**	**48,972,000.00**	**48,972,000.00**	**48,972,000.00**	**48,972,000.00**			**-**	**01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pem**	**-**		**45,200,000.00**	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

																									erintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
						Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntab	-	1 Unit	1,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																			el dan inovatif 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*			48,972,000.00	48,972,000.00	48,972,000.00	48,972,000.00	48,972,000.00	48,972,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaika	-	2 Unit	1,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																			n Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
						Pengadaan Aset Tak Berwujud	*Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan*			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintah	-	1 Unit	5,000,000.00	

																				an dan Pelayanan Publik				
						Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	1 Unit	22,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	45 Unit	16,200,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				423,273,362.00	423,273,362.00	423,273,362.00	423,273,362.00	423,273,362.00	423,273,362.00			-	01.Peningkatan Tata Kelola	Dinas Pendidikan dan Kebu		146,798,515.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBU

																					penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	daya an			DAYA AN
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*			91,073,362.00	91,073,362.00	91,073,362.00	91,073,362.00	91,073,362.00	91,073,362.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Kalabirang	PAJAK DAERAH, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerint	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3 Laporan	95,398,515.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																				a hanyang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*			1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Kalabbirang	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahanyang akuntabel	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Laporan	1,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																				dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*			331,200,000.00	331,200,000.00	331,200,000.00	331,200,000.00	331,200,000.00	331,200,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Kalabbirang	PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Laporan	50,400,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																			Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				8,300,000.00	8,300,000.00	8,300,000.00	8,300,000.00	8,300,000.00	8,300,000.00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		**607,000,000.00**	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																				dan Pelayanan Publik						
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*			1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 Unit	45,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*			7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10 Unit	1,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola	Dinas Pendidikan dan Kebu	1 Unit	6,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBU

						Lainnya	*yang Dipelihara/Direhabilitasi*									a Kel/Desa			penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	dayaan			DAYAAN
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha*			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerint	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2 Unit	555,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

							bilitasi													a hanyang akuntabel dan inovatif 6. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
						PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				**117,823,978,938.00**	**117,823,978,938.00**	**117,823,978,938.00**	**117,823,978,938.00**	**117,823,978,938.00**	**117,823,978,938.00**							95,208,461,280.00	
						Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					66,635,127,801.00	66,635,127,801.00		66,635,127,801.00	66,635,127,801.00			-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berk	Warga Usia 7 - 15 Tahun		49,928,651,788.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																									ualitas dan merata 1. Pembangunan Manusia				
						Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	*Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun*			404,224,846.00	404,224,846.00	404,224,846.00	404,224,846.00	404,224,846.00	404,224,846.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	02.Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata 1. Pembangunan Manusia	Warga Usia 7 - 15 Tahun	2 Ruang	2,038,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

						Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	*Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun*			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	04.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata 1. Pembangunan Manusia	Warga Usia 7 - 15 Tahun	10.00 Ruang	364,395,225.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Pembangunan Perpustakaan Sekolah	*Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun*			826,765,000.00	826,765,000.00	826,765,000.00	826,765,000.00	826,765,000.00	826,765,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRAN	-	-	Warga Usia 7 - 15 Tahun	1 Ruang	540,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																SFER KHUS US-DANA ALOK ASI KHUS US FISIK, DAU YAN G DITE NTUK AN P ENG GUN AANN YA BIDA NG PEND IDIKA N						
						Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun*			3,985,102,400.00	3,985,102,400.00	3,985,102,400.00	3,985,102,400.00	3,985,102,400.00	3,985,102,400.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG	-	-	Warga Usia 7 - 15 Tahun	11 Unit	1,039,861,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																	DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN						
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	*Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*			226,102,010.00	226,102,010.00	226,102,010.00	226,102,010.00	226,102,010.00	226,102,010.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Warga Usia 7 - 15 Tahun	2 Ruang	225,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	*Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat*			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Warga Usia 7 - 15 Tahun	10.00 Ruang	125,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	*Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat*			250,300,210.00	250,300,210.00	250,300,210.00	250,300,210.00	250,300,210.00	250,300,210.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRAN	-	-	Warga Usia 7 - 15 Tahun	2 Ruang	125,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																	SFER KHUS US-DANA ALOK ASI KHUS US FISIK, DAU YAN G DITE NTUK AN P ENG GUN AANN YA BIDA NG PEND IDIKA N						
						Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/Penjaga Sekolah	*Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/ Berat*			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG	-	-	Warga Usia 7 - 15 Tahun	10.00 Unit	125,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																	DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN						
						Pengadaan Mebel Sekolah	*Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia*			1,862,397,600.00	1,862,397,600.00	1,862,397,600.00	1,862,397,600.00	1,862,397,600.00	1,862,397,600.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Warga Usia 7 - 15 Tahun	2 Paket	125,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

						Pengadaan Perlengkapan Sekolah	*Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia*			7,407,483,000.00	7,407,483,000.00	7,407,483,000.00	7,407,483,000.00	7,407,483,000.00	7,407,483,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Warga Usia 7 - 15 Tahun	4 Paket	125,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	*Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*			2,769,579,000.00	2,769,579,000.00	2,769,579,000.00	2,769,579,000.00	2,769,579,000.00	2,769,579,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG	-	-	Warga Usia 7 - 15 Tahun	31546.00 Peserta Didik	81,079,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																PENDIDIKAN					
						Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	*Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia*			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Warga Usia 7 - 15 Tahun	10.00 Paket	125,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	*Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik*			343,320,000.00	343,320,000.00	343,320,000.00	343,320,000.00	343,320,000.00	343,320,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENG	-	-	Warga Usia 7 - 15 Tahun	75.00 Peserta Didik	115,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																GUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN							
						Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar*			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Warga Usia 7 - 15 Tahun	125.00 Orang	35,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/ Golongan,*			2,458,451,900.00	2,458,451,900.00	2,458,451,900.00	2,458,451,900.00	2,458,451,900.00	2,458,451,900.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Warga Usia 7 - 15 Tahun	1679 Orang	620,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

							Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi																
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	*Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah*			1,932,005,278.00	1,932,005,278.00	1,932,005,278.00	1,932,005,278.00	1,932,005,278.00	1,932,005,278.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Warga Usia 7 - 15 Tahun	239 Satuan Pendidikan	176,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*			28,756,416,563.00	28,756,416,563.00	28,756,416,563.00	28,756,416,563.00	28,756,416,563.00	28,756,416,563.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	-	Warga Usia 7 - 15 Tahun	236.00 Satuan Pendidikan	29,616,916,563.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																	Berdaya Saing						
						Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar*			195,015,500.00	195,015,500.00	195,015,500.00	195,015,500.00	195,015,500.00	195,015,500.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Warga Usia 7 - 15 Tahun	239 Orang	95,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	*Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun*			1,085,282,315.00	1,085,282,315.00	1,085,282,315.00	1,085,282,315.00	1,085,282,315.00	1,085,282,315.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN P	-	-	Warga Usia 7 - 15 Tahun	6 Ruang	250,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																	ENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN						
						Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	*Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat*			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Warga Usia 7 - 15 Tahun	5.00 Ruang	250,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

						Pembangunan Ruang Kelas Baru	*Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah*			2,505,605,700.00	2,505,605,700.00	2,505,605,700.00	2,505,605,700.00	2,505,605,700.00	2,505,605,700.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Warga Usia 7 - 15 Tahun	4 Ruang	4,725,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat*			398,457,539.00	398,457,539.00	398,457,539.00	398,457,539.00	398,457,539.00	398,457,539.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRAN	-	-	Warga Usia 7 - 15 Tahun	4 Unit	454,400,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																SFER KHUS US-DANA ALOK ASI KHUS US FISIK, DAU YAN G DITE NTUK AN P ENG GUN AANN YA BIDA NG PEND IDIKA N						
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	*Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat*			11,228,618,940.00	11,228,618,940.00	11,228,618,940.00	11,228,618,940.00	11,228,618,940.00	11,228,618,940.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOK ASI UMUM, DANA TRANSFER KHUS US-DANA ALOK ASI KHUS US FISIK, DAU YAN G	-	-	Warga Usia 7 - 15 Tahun	72 Ruang	8,553,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																	DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN									
						Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				**31,571,924,937.00**	**31,571,924,937.00**	**31,571,924,937.00**	**31,571,924,937.00**	**31,571,924,937.00**	**31,571,924,937.00**			**-**	**-**	**Warga Usia 7 - 15 Tahun**		**26,971,474,287.00**	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
						Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	*Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun*			226,515,665.00	226,515,665.00	226,515,665.00	226,515,665.00	226,515,665.00	226,515,665.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-	Warga Usia 7 - 15 Tahun	1 Ruang	250,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	*Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun*			226,140,110.00	226,140,110.00	226,140,110.00	226,140,110.00	226,140,110.00	226,140,110.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-	Warga Usia 7 - 15 Tahun	2 Ruang	261,368,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

						Pembangunan Perpustakaan Sekolah	*Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun*			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Warga Usia 7 - 15 Tahun	10.00 Ruang	250,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Pembangunan Laboratorium	*Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun*			1,178,333,800.00	1,178,333,800.00	1,178,333,800.00	1,178,333,800.00	1,178,333,800.00	1,178,333,800.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDA	-	-	Warga Usia 7 - 15 Tahun	2 Ruang	739,022,850.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																NG PENDIDIKAN							
						Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	*Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun*			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Warga Usia 7 - 15 Tahun	10.00 Ruang	125,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun*			1,311,372,400.00	1,311,372,400.00	1,311,372,400.00	1,311,372,400.00	1,311,372,400.00	1,311,372,400.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITE	-	-	Warga Usia 7 - 15 Tahun	10.00 Unit	872,400,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																NTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN							
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	*Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat*			2,073,749,880.00	2,073,749,880.00	2,073,749,880.00	2,073,749,880.00	2,073,749,880.00	2,073,749,880.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Warga Usia 7 - 15 Tahun	5.00 Ruang	2,370,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	*Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/*			147,339,950.00	147,339,950.00	147,339,950.00	147,339,950.00	147,339,950.00	147,339,950.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/D	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA	-	-	Warga Usia 7 - 15 Tahun	10.00 Ruang	175,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

							Berat									esa	TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN						
						Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	*Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat*			292,793,883.00	292,793,883.00	292,793,883.00	292,793,883.00	292,793,883.00	292,793,883.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG	-	-	Warga Usia 7 - 15 Tahun	10.00 Ruang	175,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																PENDIDIKAN							
						Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	*Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat*			271,206,900.00	271,206,900.00	271,206,900.00	271,206,900.00	271,206,900.00	271,206,900.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Warga Usia 7 - 15 Tahun	10.00 Ruang	325,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	*Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat*			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITE	-	-	Warga Usia 7 - 15 Tahun	10.00 Ruang	175,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																NTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN						
						Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat*			362,182,920.00	362,182,920.00	362,182,920.00	362,182,920.00	362,182,920.00	362,182,920.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Warga Usia 7 - 15 Tahun	10.00 Unit	325,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Pengadaan Mebel Sekolah	*Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia*			1,272,682,800.00	1,272,682,800.00	1,272,682,800.00	1,272,682,800.00	1,272,682,800.00	1,272,682,800.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/D	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK,	-	-	Warga Usia 7 - 15 Tahun	10.00 Paket	225,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																esa	DAU YANG DITE NTUK AN P ENG GUN AANN YA BIDA NG PEND IDIKA N						
						Pengadaan Perlengkapan Sekolah	*Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia*			1,960,101,000.00	1,960,101,000.00	1,960,101,000.00	1,960,101,000.00	1,960,101,000.00	1,960,101,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITE NTUK AN P ENG GUN AANN YA BIDA NG PEND IDIKA N	-	-	Warga Usia 7 - 15 Tahun	10.00 Paket	150,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menenga	*Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama*			2,811,159,800.00	2,811,159,800.00	2,811,159,800.00	2,811,159,800.00	2,811,159,800.00	2,811,159,800.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOK	-	-	Warga Usia 7 - 15 Tahun	450 Peserta Didik	325,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBU

						h Pertama	*yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*									, Semua Kel/Desa	ASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN						DAYAAN
						Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	*Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia*			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Warga Usia 7 - 15 Tahun	5.00 Paket	125,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

						Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	*Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik*			65,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Warga Usia 7 - 15 Tahun	75.00 Peserta Didik	65,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEND	-	-	Warga Usia 7 - 15 Tahun	125.00 Orang	25,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																IDIKAN						
						Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi*			894,004,800.00	894,004,800.00	894,004,800.00	894,004,800.00	894,004,800.00	894,004,800.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Warga Usia 7 - 15 Tahun	550.00 Orang	575,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	*Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan*			1,734,631,900.00	1,734,631,900.00	1,734,631,900.00	1,734,631,900.00	1,734,631,900.00	1,734,631,900.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUN	-	-	Warga Usia 7 - 15 Tahun	45.00 Satuan Pendidikan	65,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																AANNYA BIDANG PENDIDIKAN								
						Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS*			15,787,683,437.00	15,787,683,437.00	15,787,683,437.00	15,787,683,437.00	15,787,683,437.00	15,787,683,437.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Warga Usia 7 - 15 Tahun	45.00 Satuan Pendidikan	15,787,683,437.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama*			91,481,000.00	91,481,000.00	91,481,000.00	91,481,000.00	91,481,000.00	91,481,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKA	-	-	Warga Usia 7 - 15 Tahun	90.00 Orang	75,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																N						
						Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	*Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar*			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Warga Usia 7 - 15 Tahun	45.00 Satuan Pendidikan	216,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Pembangunan Ruang Kelas Baru	*Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah*			516,579,650.00	516,579,650.00	516,579,650.00	516,579,650.00	516,579,650.00	516,579,650.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN P	-	-	Warga Usia 7 - 15 Tahun	5.00 Ruang	2,510,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																	ENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN						
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	*Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/ TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat*			348,965,042.00	348,965,042.00	348,965,042.00	348,965,042.00	348,965,042.00	348,965,042.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Warga Usia 7 - 15 Tahun	3.00 Ruang	775,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				12,561,631,000.00	12,561,631,000.00	12,561,631,000.00	12,561,631,000.00	12,561,631,000.00	12,561,631,000.00			-	-	Warga Usia 5 - 6 tahun		**9,474,735,205.00**	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

						Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun*			795,419,700.00	795,419,700.00	795,419,700.00	795,419,700.00	795,419,700.00	795,419,700.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Warga Usia 5 - 6 tahun	10.00 Unit	450,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	*Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*			699,981,050.00	699,981,050.00	699,981,050.00	699,981,050.00	699,981,050.00	699,981,050.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDA	-	-	Warga Usia 5 - 6 tahun	10.00 Unit	785,368,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																NG PENDIDIKAN							
						Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat*			70,702,000.00	70,702,000.00	70,702,000.00	70,702,000.00	70,702,000.00	70,702,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Warga Usia 5 - 6 tahun	10.00 Unit	350,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Pengadaan Mebel PAUD	*Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia*			101,000,000.00	101,000,000.00	101,000,000.00	101,000,000.00	101,000,000.00	101,000,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITE	-	-	Warga Usia 5 - 6 tahun	1 Paket	75,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																NTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN						
						Pengadaan Perlengkapan PAUD	*Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia*			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Warga Usia 5 - 6 tahun	10.00 Paket	165,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	*Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/D	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU	-	-	Warga Usia 5 - 6 tahun	12100.00 Peserta Didik	65,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																	esa	YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN						
						Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	*Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia*			2,250,514,500.00	2,250,514,500.00	2,250,514,500.00	2,250,514,500.00	2,250,514,500.00	2,250,514,500.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEND	-	-	Warga Usia 5 - 6 tahun	1 Paket	125,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																IDIKAN							
						Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	*Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar*			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Warga Usia 5 - 6 tahun	12100.00 Peserta Didik	93,567,205.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD*			891,439,000.00	891,439,000.00	891,439,000.00	891,439,000.00	891,439,000.00	891,439,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITE	-	-	Warga Usia 5 - 6 tahun	150.00 Orang	15,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																NTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN							
						Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi*			481,712,300.00	481,712,300.00	481,712,300.00	481,712,300.00	481,712,300.00	481,712,300.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Warga Usia 5 - 6 tahun	215.00 Orang	185,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	*Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen*			764,103,500.00	764,103,500.00	764,103,500.00	764,103,500.00	764,103,500.00	764,103,500.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG	-	-	Warga Usia 5 - 6 tahun	215.00 Satuan Pendidikan	1,240,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																	DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN					
						Pengelolaan Dana BOP PAUD	*Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP*			4,563,600,000.00	4,563,600,000.00	4,563,600,000.00	4,563,600,000.00	4,563,600,000.00	4,563,600,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Warga Usia 5 - 6 tahun	210 Satuan Pendidikan	4,915,800,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	*Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD*			135,657,000.00	135,657,000.00	135,657,000.00	135,657,000.00	135,657,000.00	135,657,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN	-	-	Warga Usia 5 - 6 tahun	250.00 Orang	35,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																YA BIDANG PENDIDIKAN							
						Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	*Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun*			884,854,600.00	884,854,600.00	884,854,600.00	884,854,600.00	884,854,600.00	884,854,600.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Warga Usia 5 - 6 tahun	5.00 Ruang	325,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

						Pembangunan Ruang Kelas Baru	*Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah*			922,647,350.00	922,647,350.00	922,647,350.00	922,647,350.00	922,647,350.00	922,647,350.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Warga Usia 5 - 6 tahun	5.00 Ruang	650,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				**7,055,295,200.00**	**7,055,295,200.00**	**7,055,295,200.00**	**7,055,295,200.00**	**7,055,295,200.00**	**7,055,295,200.00**			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	-	Warga Usia 7 - 18 Tahun		**8,833,600,000.00**	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																	Dan Berdaya Saing				
						Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Gedung/ Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun*			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Warga Usia 7 - 18 Tahun	15.00 Unit	2,274,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*			546,829,400.00	546,829,400.00	546,829,400.00	546,829,400.00	546,829,400.00	546,829,400.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Warga Usia 7 - 18 Tahun	550.00 Peserta Didik	850,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

						Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*			435,600,000.00	435,600,000.00	435,600,000.00	435,600,000.00	435,600,000.00	435,600,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Warga Usia 7 - 18 Tahun	150.00 Orang	450,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifika*			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEND	-	-	Warga Usia 7 - 18 Tahun	250 Orang	460,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

							si										IDIKAN					
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Sekolah Nonformal/Keseteraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen*			1,594,989,800.00	1,594,989,800.00	1,594,989,800.00	1,594,989,800.00	1,594,989,800.00	1,594,989,800.00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Warga Usia 7 - 18 Tahun	45 Satuan Pendidikan	625,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Sekolah Nonformal/Keseteraan yang Mengelola Dana BOP*			4,334,400,000.00	4,334,400,000.00	4,334,400,000.00	4,334,400,000.00	4,334,400,000.00	4,334,400,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, DAU YANG DITENTUK	-	-	Warga Usia 7 - 18 Tahun	45 Satuan Pendidikan	3,474,600,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																AN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN							
						Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan*			143,476,000.00	143,476,000.00	143,476,000.00	143,476,000.00	143,476,000.00	143,476,000.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Warga Usia 7 - 18 Tahun	84.00 Orang	125,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Pembangunan Ruang Kelas Baru	*Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah*			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	-	Warga Usia 7 - 18 Tahun	3.00 Ruang	325,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																	Berdaya Saing				
						Pengadaan Perlengkapan Sekolah	*Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia*			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Warga Usia 7 - 18 Tahun	2.00 Paket	125,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	*Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/*			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semu	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANN	-	-	Warga Usia 7 - 18 Tahun	5.00 Unit	125,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

							Berat									a Kel/Desa	YA BIDANG PENDIDIKAN							
						PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**							**321,500,000.00**	
						Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			**-**	**-**	**Pendidik**		**193,000,000.00**	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
						Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	*Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun*			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Pendidik	100.00 Dokumen	193,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

						Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Pendidik Paud dan Non Formal		**128,500,000.00**	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	*Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun*			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Pendidik Paud dan Non Formal	120.00 Dokumen	128,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				**25,000,000.00**	**25,000,000.00**	**25,000,000.00**	**25,000,000.00**	**25,000,000.00**	**25,000,000.00**							**50,000,000.00**	

						Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Pendidik dan Tenaga Kependiidkan		**50,000,000.00**	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Pendidik dan Tenaga Kependiidkan	1.00 Dokumen	25,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

						Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*			25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Pendidik dan Tenaga Kependiidkan	1.00 Laporan	25,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**								**5,000,000.00**	
						Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			-	-	Lembaga Pendidikan Dasar Oleh Masyarakat		**0,000,000.00**	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

						Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat*			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Lembaga Pendidikan Dasar Oleh Masyarakat	1.00 Dokumen	0,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat*			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Lembaga Pendidikan Dasar Oleh Masyarakat	1.00 Dokumen	0,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Penerbitan Izin PAUD dan				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**			-	-	Lembaga Paud dan		**5,000,000.00**	DINAS PENDIDIKA

						Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat													Non Formal			N DAN KEBUDAYAAN
						Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat*			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Lembaga Paud dan Non Formal	1.00 Dokumen	0,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh*			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berd	-	Lembaga Paud dan Non Formal	20.00 Dokumen	15,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

							Masyarakat										ALOKASI UMUM	aya Saing					
						PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**							**206,500,000.00**	
						Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			-	-	Pendidik		206,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten / Kota	*Jumlah Publikasi Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota*			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUN	-	-	Pendidik	100.00 Publikasi	85,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																AANNYA BIDANG PENDIDIKAN						
						Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota*			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Pendidik	100.00 Peserta Didik	121,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**1,978,075,500.00**	**1,978,075,500.00**	**1,978,075,500.00**	**1,978,075,500.00**	**1,978,075,500.00**	**1,978,075,500.00**							**1,085,000,000.00**	
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG				**1,978,075,500.00**	**1,978,075,500.00**	**1,978,075,500.00**	**1,978,075,500.00**	**1,978,075,500.00**	**1,978,075,500.00**							**1,085,000,000.00**	

						KEBUDAYAAN															
						PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				**649,240,500.00**	**649,240,500.00**	**649,240,500.00**	**649,240,500.00**	**649,240,500.00**	**649,240,500.00**						**526,500,000.00**	
						Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				207,875,000.00	207,875,000.00	207,875,000.00	207,875,000.00	207,875,000.00	207,875,000.00			-	-	Masyarakat		129,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	*Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan*			207,875,000.00	207,875,000.00	207,875,000.00	207,875,000.00	207,875,000.00	207,875,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Masyarakat	29.00 Objek	94,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

						Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	*Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan*			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Pattallassang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Masyarakat	45.00 Orang	35,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				441,365,500.00	441,365,500.00	441,365,500.00	441,365,500.00	441,365,500.00	441,365,500.00			-	-	Masyarakat Pemerhati Seni		272,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	*Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengem*			405,022,000.00	405,022,000.00	405,022,000.00	405,022,000.00	405,022,000.00	405,022,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/D	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU	-	-	Masyarakat Pemerhati Seni	13.00 Objek	195,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

							bangan dan Pemanfaatan									esa	YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN						
						Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	*Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional*			36,343,500.00	36,343,500.00	36,343,500.00	36,343,500.00	36,343,500.00	36,343,500.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Masyarakat Pemerhati Seni	1.00 Laporan	77,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupate				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Revolusi Mental dan Pembangunan	-	Lembaga Adat		125,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

						n/Kota												Kebudayaan						
						Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	*Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina*			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-	Lembaga Adat	50.00 Orang	83,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	*Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi*			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Lembaga Adat	5.00 Unit	42,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN				**152,743,000.00**	**152,743,000.00**	**152,743,000.00**	**152,743,000.00**	**152,743,000.00**	**152,743,000.00**							**115,000,000.00**	

						TRADISIONAL															
						Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				152,743,000.00	152,743,000.00	152,743,000.00	152,743,000.00	152,743,000.00	152,743,000.00			-	-	Masyarakat Pemerhati Seni		115,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)*			152,743,000.00	152,743,000.00	152,743,000.00	152,743,000.00	152,743,000.00	152,743,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Masyarakat Pemerhati Seni	50.00 Orang	75,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses*			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebu	-	Masyarakat Pemerhati Seni	50.00 Sertifikat	25,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

						Kebutuhan dan Tuntutan	*Standarisasi*									Kel/Desa		dayaan					
						Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	*Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya*			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-	Masyarakat Pemerhati Seni	9.00 Lembaga	15,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				**276,730,700.00**	**276,730,700.00**	**276,730,700.00**	**276,730,700.00**	**276,730,700.00**	**276,730,700.00**							**135,500,000.00**	
						Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				276,730,700.00	276,730,700.00	276,730,700.00	276,730,700.00	276,730,700.00	276,730,700.00					Daerah Sejarah		135,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	*Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan*			276,730,700.00	276,730,700.00	276,730,700.00	276,730,700.00	276,730,700.00	276,730,700.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Daerah Sejarah	50.00 Orang	40,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

						Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah*			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Polombangkeng Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-	Daerah Sejarah	1.00 Unit	72,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	*Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat*			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-	Daerah Sejarah	50.00 Dokumen	23,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				**437,921,500.00**	**437,921,500.00**	**437,921,500.00**	**437,921,500.00**	**437,921,500.00**	**437,921,500.00**							**181,500,000.00**	
						Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				284,770,000.00	284,770,000.00	284,770,000.00	284,770,000.00	284,770,000.00	284,770,000.00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-	Cagar Budaya		30,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

						Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	*Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan*			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-	Cagar Budaya	13.00 Objek	15,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Penetapan Cagar Budaya	*Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan*			284,770,000.00	284,770,000.00	284,770,000.00	284,770,000.00	284,770,000.00	284,770,000.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Cagar Budaya	13.00 Objek	15,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				153,151,500.00	153,151,500.00	153,151,500.00	153,151,500.00	153,151,500.00	153,151,500.00			-	-	Cagar Budaya		136,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Pelindungan Cagar Budaya	*Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi*			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/D	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU	-	-	Cagar Budaya	13.00 Objek	58,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																esa	YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN						
						Pengembangan Cagar Budaya	*Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan*			153,151,500.00	153,151,500.00	153,151,500.00	153,151,500.00	153,151,500.00	153,151,500.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Cagar Budaya	13.00 Objek	78,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			-	-	Cagar Budaya		15,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

						Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi*			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Cagar Budaya	13.00 Objek	15,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				**461,439,800.00**	**461,439,800.00**	**461,439,800.00**	**461,439,800.00**	**461,439,800.00**	**461,439,800.00**							**126,500,000.00**	
						Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota				461,439,800.00	461,439,800.00	461,439,800.00	461,439,800.00	461,439,800.00	461,439,800.00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-	Museum		126,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Pelindungan, Pengembangan,	*Jumlah Koleksi Museum yang*			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Semu	DANA TRANSFER UMU	Revolusi Mental	-	Museum	1.00 Unit	17,000,000.00	DINAS PENDIDIKA

						dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	*Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu*										a Kecamatan, Semua Kel/Desa	M-DANA ALOKASI UMUM	dan Pembangunan Kebudayaan				N DAN KEBUDAYAAN
						Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	*Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum*			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Museum	1.00 Unit	94,500,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	*Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara*			461,439,800.00	461,439,800.00	461,439,800.00	461,439,800.00	461,439,800.00	461,439,800.00	Kab. Takalar, Semua Kecamatan, Pattallassang	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDA	-	-	Museum	1.00 Unit	15,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

																	NG PENDIDIKAN								
										390,896,017,031.00	**390,896,017,031.00**	**390,896,017,031.00**	**390,896,017,031.00**	**390,896,017,031.00**	**390,896,017,031.00**								**369,874,589,095**	

RINCIAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, TARGET DAN PAGU PADA

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) TAHUN 2024

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target			Pagu			Keterangan
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	Renja PD 2024	APBD 2024	Renja Perubahan 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**			**390,896,017,031.00**	**390,896,017,031.00**	**389,837,247,879.00**	**390,896,017,031.00**	**390,896,017,031.00**	**389,837,247,879.00**	
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**388,917,941,531.00**	**388,917,941,531.00**	**387,859,172,379.00**	**388,917,941,531.00**	**388,917,941,531.00**	**387,859,172,379.00**	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**388,917,941,531.00**	**388,917,941,531.00**	**270,010,193,441.00**	**388,917,941,531.00**	**388,917,941,531.00**	**270,010,193,441.00**	

	X	**X X**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**			**271,068,962,593.00**	**271,068,962,593.00**	**270,010,193,441.00**	**271,068,962,593.00**	**271,068,962,593.00**	**270,010,193,441.00**	
	X	X X	01	2. 0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			13,500,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00	
	X	X X	1	1. 0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	
	X	X X	01	1. 0 1	0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	
	X	X X	01	1. 0 1	0 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	

	X	XX	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	
	X	XX	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	
	X	XX	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	X	XX	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat	Evaluasi Kinerja Perangkat	*Jumlah Laporan Evaluasi*	*Jumlah Laporan Evaluasi*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

						Daerah	Daerah	*Kinerja Perangkat Daerah*	*Kinerja Perangkat Daerah*						
	X	X X	1	1. 0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			270,425,703,231.00	270,425,703,231.00	269,366,934,079.00	270,425,703,231.00	270,425,703,231.00	269,366,934,079.00	
	X	X X	1	1. 0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	270,422,203,231.00	270,422,203,231.00	269,363,434,079.00	270,422,203,231.00	270,422,203,231.00	269,363,434,079.00	
	X	X X	1	1. 0 2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	
	X	X X	1	1. 0 2	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	
	X	X X	1	1. 0 2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun*	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun*	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	

								SKPD	*SKPD*						
	X	XX	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	
	X	XX	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	
	X	XX	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	
	X	XX	1	1.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	

	X	XX	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD*	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD*	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	
	X	XX	01	1.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	
	X	XX	01	1.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	
	X	XX	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1000000.00	1000000.00	1000000.00	1000000.00	1000000.00	1000000.00	
	X	XX	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	X	XX	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi,*	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi,*	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	

						Pegawai	Pegawai	*dan Penilaian Kinerja Pegawai*	*dan Penilaian Kinerja Pegawai*						
	X	X X	01	1. 0 5	0 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	X	X X	01	1. 0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah			145,414,000.00	145,414,000.00	145,414,000.00	145,414,000.00	145,414,000.00	145,414,000.00	
	X	X X	01	1. 0 6	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
	X	X X	01	1. 0 6	0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	81,536,900.00	81,536,900.00	81,536,900.00	81,536,900.00	81,536,900.00	81,536,900.00	
	X	X X	01	1. 0 6	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	

	X	XX	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	37,877,100.00	37,877,100.00	37,877,100.00	37,877,100.00	37,877,100.00	37,877,100.00	
	X	XX	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	
		XX	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
		XX	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
		XX	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	
	X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah			48,972,000.00	48,972,000.00	48,972,000.00	48,972,000.00	48,972,000.00	48,972,000.00	

						Daerah	Daerah									
	X	XX	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	X	XX	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	48,972,000.00	48,972,000.00	48,972,000.00	48,972,000.00	48,972,000.00	48,972,000.00	
	X	XX	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Pengadaan Aset Tak Berwujud	*Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan*	*Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	X	XX	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	X	XX	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	X	XX	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			423,273,362.00	423,273,362.00	423,273,362.00	423,273,362.00	423,273,362.00	423,273,362.00	

	X	XX	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	91,073,362.00	91,073,362.00	91,073,362.00	91,073,362.00	91,073,362.00	91,073,362.00	
	X	XX	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
	X	XX	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	331,200,000.00	331,200,000.00	331,200,000.00	331,200,000.00	331,200,000.00	331,200,000.00	
	X	XX	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			8,300,000.00	8,300,000.00	8,300,000.00	8,300,000.00	8,300,000.00	8,300,000.00	
	X	XX	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas*	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas*	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	

						Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	*Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*						
	X	X X	1	1. 0 9	0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	7,300,000. 00	7,300,000. 00	7,300,000. 00	7,300,000. 00	7,300,000. 00	7,300,000. 00	
	X	X X	1	1. 0 9	0 9	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	X	X X	1	1. 0 9	1 0	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			**117,823,978,938.00**	**117,823,978,938.00**	**117,823,978,938.00**	**117,823,978,938.00**	**117,823,978,938.00**	**117,823,978,938.00**	
	1	1	2	2. 0 1		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			66,635,127,801.00	66,635,127,801.00	66,635,127,801.00	66,635,127,801.00	66,635,127,801.00	66,635,127,801.00	

	1	1	2	2.01	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	*Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun*	*Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun*	404,224,846.00	404,224,846.00	404,224,846.00	404,224,846.00	404,224,846.00	404,224,846.00	
	1	1	2	2.01	4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	*Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun*	*Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1	1	2	2.01	5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	*Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun*	*Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun*	826,765,000.00	826,765,000.00	826,765,000.00	826,765,000.00	826,765,000.00	826,765,000.00	
	1	1	2	2.01	6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun*	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun*	3,985,102,400.00	3,985,102,400.00	3,985,102,400.00	3,985,102,400.00	3,985,102,400.00	3,985,102,400.00	
	1	1	2	2.01	9	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	*Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	*Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	226,102,010.00	226,102,010.00	226,102,010.00	226,102,010.00	226,102,010.00	226,102,010.00	
	1	1	2	2.01	10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	*Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi*	*Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

							Sedang/Berat	*Sedang/Berat*							
	1	01	02	2.01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	*Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	*Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	250,300,210.00	250,300,210.00	250,300,210.00	250,300,210.00	250,300,210.00	250,300,210.00	
	1	01	02	2.01	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	*Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat*	*Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1	1	2	2.01	13	Pengadaan Mebel Sekolah	Pengadaan Mebel Sekolah	*Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia*	*Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia*	1,862,397,600.00	1,862,397,600.00	1,862,397,600.00	1,862,397,600.00	1,862,397,600.00	1,862,397,600.00	
	1	01	02	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	*Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia*	*Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia*	7,407,483,000.00	7,407,483,000.00	7,407,483,000.00	7,407,483,000.00	7,407,483,000.00	7,407,483,000.00	
	1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	*Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima*	*Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima*	2,769,579,000.00	2,769,579,000.00	2,769,579,000.00	2,769,579,000.00	2,769,579,000.00	2,769,579,000.00	

							Biaya Personil Peserta Didik	*Biaya Personil Peserta Didik*							
	1	1	2	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	*Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia*	*Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1	1	2	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	*Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik*	*Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik*	343,320,000.00	343,320,000.00	343,320,000.00	343,320,000.00	343,320,000.00	343,320,000.00	
	1	1	2	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar*	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,*	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,*	2,458,451,900.00	2,458,451,900.00	2,458,451,900.00	2,458,451,900.00	2,458,451,900.00	2,458,451,900.00	

							Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	*Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi*							
	1	1	2	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	*Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah*	*Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah*	1,932,005,278.00	1,932,005,278.00	1,932,005,278.00	1,932,005,278.00	1,932,005,278.00	1,932,005,278.00	
	1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	28,756,416,563.00	28,756,416,563.00	28,756,416,563.00	28,756,416,563.00	28,756,416,563.00	28,756,416,563.00	
	1	01	02	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar*	*Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar*	195,015,500.00	195,015,500.00	195,015,500.00	195,015,500.00	195,015,500.00	195,015,500.00	
	1	1	2	2.01	31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	*Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang*	*Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang*	1,085,282,315.00	1,085,282,315.00	1,085,282,315.00	1,085,282,315.00	1,085,282,315.00	1,085,282,315.00	

								Telah Dibangun	*Telah Dibangun*						
	1	01	02	2.01	32	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	*Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	*Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1	01	02	2.01	47	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Pembangunan Ruang Kelas Baru	*Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah*	*Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah*	2,505,605,700.00	2,505,605,700.00	2,505,605,700.00	2,505,605,700.00	2,505,605,700.00	2,505,605,700.00	
	1	01	02	2.01	48	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	398,457,539.00	398,457,539.00	398,457,539.00	398,457,539.00	398,457,539.00	398,457,539.00	
	1	01	02	2.01	51	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	*Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	*Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	11,228,618,940.00	11,228,618,940.00	11,228,618,940.00	11,228,618,940.00	11,228,618,940.00	11,228,618,940.00	
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			31,571,924,937.00	31,571,924,937.00	31,571,924,937.00	31,571,924,937.00	31,571,924,937.00	31,571,924,937.00	

	1	1	2	2.02	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	*Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun*	*Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun*	226,515,665.00	226,515,665.00	226,515,665.00	226,515,665.00	226,515,665.00	226,515,665.00	
	1	1	2	2.02	4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	*Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun*	*Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun*	226,140,110.00	226,140,110.00	226,140,110.00	226,140,110.00	226,140,110.00	226,140,110.00	
	1	1	2	2.02	5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	*Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun*	*Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1	1	2	2.02	6	Pembangunan Laboratorium	Pembangunan Laboratorium	*Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun*	*Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun*	1,178,333,800.00	1,178,333,800.00	1,178,333,800.00	1,178,333,800.00	1,178,333,800.00	1,178,333,800.00	
	1	1	2	2.02	7	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	*Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun*	*Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1	1	2	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun*	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun*	1,311,372,400.00	1,311,372,400.00	1,311,372,400.00	1,311,372,400.00	1,311,372,400.00	1,311,372,400.00	
	1	01	02	2.02	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	*Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitas*	*Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitas*	2,073,749,880.00	2,073,749,880.00	2,073,749,880.00	2,073,749,880.00	2,073,749,880.00	2,073,749,880.00	

							i Sedang/Berat	*i Sedang/Berat*							
	1	1	2	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	*Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	*Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	147,339,950.00	147,339,950.00	147,339,950.00	147,339,950.00	147,339,950.00	147,339,950.00	
	1	1	2	2.02	16	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	*Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	*Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	292,793,883.00	292,793,883.00	292,793,883.00	292,793,883.00	292,793,883.00	292,793,883.00	
	1	1	2	2.02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	*Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	*Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	271,206,900.00	271,206,900.00	271,206,900.00	271,206,900.00	271,206,900.00	271,206,900.00	
	1	01	02	2.02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	*Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat*	*Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1	1	2	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas*	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas*	362,182,920.00	362,182,920.00	362,182,920.00	362,182,920.00	362,182,920.00	362,182,920.00	

						dan Utilitas Sekolah	dan Utilitas Sekolah	*Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	*Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*						
	1	1	2	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Pengadaan Mebel Sekolah	*Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia*	*Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia*	1,272,682,800.00	1,272,682,800.00	1,272,682,800.00	1,272,682,800.00	1,272,682,800.00	1,272,682,800.00	
	1	01	02	2.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	*Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia*	*Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia*	1,960,101,000.00	1,960,101,000.00	1,960,101,000.00	1,960,101,000.00	1,960,101,000.00	1,960,101,000.00	
	1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	*Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	2,811,159,800.00	2,811,159,800.00	2,811,159,800.00	2,811,159,800.00	2,811,159,800.00	2,811,159,800.00	
	1	1	2	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	*Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia*	*Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1	1	2	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	*Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non*	*Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non*	65,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00	

							Akademik	*Akademik*							
	1	1	2	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1	01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi*	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi*	894,004,800.00	894,004,800.00	894,004,800.00	894,004,800.00	894,004,800.00	894,004,800.00	
	1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	*Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan*	*Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan*	1,734,631,900.00	1,734,631,900.00	1,734,631,900.00	1,734,631,900.00	1,734,631,900.00	1,734,631,900.00	

	1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS*	*Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS*	15,787,683,437.00	15,787,683,437.00	15,787,683,437.00	15,787,683,437.00	15,787,683,437.00	15,787,683,437.00	
	1	01	02	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama*	*Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama*	91,481,000.00	91,481,000.00	91,481,000.00	91,481,000.00	91,481,000.00	91,481,000.00	
	1	01	02	2.02	58	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	*Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar*	*Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	e	1	2	2.02	59	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Pembangunan Ruang Kelas Baru	*Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah*	*Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah*	516,579,650.00	516,579,650.00	516,579,650.00	516,579,650.00	516,579,650.00	516,579,650.00	
	1	01	02	2.02	64	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	*Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	*Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	348,965,042.00	348,965,042.00	348,965,042.00	348,965,042.00	348,965,042.00	348,965,042.00	
	1	1	2	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			12,561,631,000.00	12,561,631,000.00	12,561,631,000.00	12,561,631,000.00	12,561,631,000.00	12,561,631,000.00	

	1	01	02	2.03	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun*	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun*	795,419,700.00	795,419,700.00	795,419,700.00	795,419,700.00	795,419,700.00	795,419,700.00	
	1	01	02	2.03	3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	*Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	*Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	699,981,050.00	699,981,050.00	699,981,050.00	699,981,050.00	699,981,050.00	699,981,050.00	
	1	1	2	2.03	4	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	70,702,000.00	70,702,000.00	70,702,000.00	70,702,000.00	70,702,000.00	70,702,000.00	
	1	01	02	2.03	5	Pengadaan Mebel PAUD	Pengadaan Mebel PAUD	*Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia*	*Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia*	101,000,000.00	101,000,000.00	101,000,000.00	101,000,000.00	101,000,000.00	101,000,000.00	
	1	1	2	2.03	9	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Pengadaan Perlengkapan PAUD	*Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia*	*Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1	1	2	2.03	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	*Jumlah Peserta Didik PAUD yang*	*Jumlah Peserta Didik PAUD yang*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

							Menerima Biaya Personil Peserta Didik	*Menerima Biaya Personil Peserta Didik*							
	1	1	2	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	*Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia*	*Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia*	2,250,514,500.00	2,250,514,500.00	2,250,514,500.00	2,250,514,500.00	2,250,514,500.00	2,250,514,500.00	
	1	1	2	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	*Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar*	*Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1	1	2	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD*	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD*	891,439,000.00	891,439,000.00	891,439,000.00	891,439,000.00	891,439,000.00	891,439,000.00	
	1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi*	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi*	481,712,300.00	481,712,300.00	481,712,300.00	481,712,300.00	481,712,300.00	481,712,300.00	

	1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	*Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen*	*Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen*	764,103,500.00	764,103,500.00	764,103,500.00	764,103,500.00	764,103,500.00	764,103,500.00	
	1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Pengelolaan Dana BOP PAUD	*Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP*	*Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP*	4,563,600,000.00	4,563,600,000.00	4,563,600,000.00	4,563,600,000.00	4,563,600,000.00	4,563,600,000.00	
	1	1	2	2.03	19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	*Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD*	*Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD*	135,657,000.00	135,657,000.00	135,657,000.00	135,657,000.00	135,657,000.00	135,657,000.00	
	1	1	2	2.03	28	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	*Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun*	*Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun*	884,854,600.00	884,854,600.00	884,854,600.00	884,854,600.00	884,854,600.00	884,854,600.00	
	1	1	2	2.03	30	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Pembangunan Ruang Kelas Baru	*Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah*	*Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah*	922,647,350.00	922,647,350.00	922,647,350.00	922,647,350.00	922,647,350.00	922,647,350.00	
	1	1	2	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			7,055,295,200.00	7,055,295,200.00	7,055,295,200.00	7,055,295,200.00	7,055,295,200.00	7,055,295,200.00	
	1	01	02	2.04	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru	*Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/K*	*Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/K*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

						Nonformal/Kesetaraan	Nonformal/Kesetaraan	*esetaraan yang Telah Dibangun*	*esetaraan yang Telah Dibangun*						
	1	01	02	2.04	10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	*Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	546,829,400.00	546,829,400.00	546,829,400.00	546,829,400.00	546,829,400.00	546,829,400.00	
	1	01	02	2.04	14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*	435,600,000.00	435,600,000.00	435,600,000.00	435,600,000.00	435,600,000.00	435,600,000.00	
	1	01	02	2.04	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan*	*Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

								Kualifikasi	*Kualifikasi*						
	1	1	2	2.03	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen*	*Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen*	1,594,989,800.00	1,594,989,800.00	1,594,989,800.00	1,594,989,800.00	1,594,989,800.00	1,594,989,800.00	
	1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP*	*Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP*	4,334,400,000.00	4,334,400,000.00	4,334,400,000.00	4,334,400,000.00	4,334,400,000.00	4,334,400,000.00	
	1	01	02	2.04	18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan*	*Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan*	143,476,000.00	143,476,000.00	143,476,000.00	143,476,000.00	143,476,000.00	143,476,000.00	
	1	01	02	2.04	39	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Pembangunan Ruang Kelas Baru	*Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah*	*Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	1	01	02	2.04	40	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	*Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia*	*Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1	01	02	2.04	50	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	*Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	*Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1	1	3			**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
	1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1	01	03	2.01	01	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	*Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun*	*Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1	01	03	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal									

	1	01	03	2.02	01	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	*Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun*	*Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1	01	04			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**			**25,000,000.00**	**25,000,000.00**	**25,000,000.00**	**25,000,000.00**	**25,000,000.00**	**25,000,000.00**	
	1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	
	1	01	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan	*Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga*	*Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

						Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*	*Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*						
	1	01	04	2.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	
	1	01	05			**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
	1	01	05	2.01		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	1	01	05	2.01	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat*	*Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1	01	05	2.01	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat*	*Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat								
	1	01	05	2.02	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan	*Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul*	*Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

						Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	*Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat*	*Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat*						
	1	01	05	2.02	03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat*	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1	**01**	**06**			**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**	**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
	1	01	06	2.01		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1	01	06	2.01	03	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten / Kota	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten / Kota	*Jumlah Publikasi Kebahasaan dan Kesastraan Daerah*	*Jumlah Publikasi Kebahasaan dan Kesastraan Daerah*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

								Kewenangan Kabupaten/ Kota	*Kewenangan Kabupaten/ Kota*						
	1	01	06	2.01	06	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/ Kota*	*Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/ Kota*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**1,978,075,500.00**	**1,978,075,500.00**	**1,978,075,500.00**	**1,978,075,500.00**	**1,978,075,500.00**	**1,978,075,500.00**	
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**			**1,978,075,500.00**	**1,978,075,500.00**	**1,978,075,500.00**	**1,978,075,500.00**	**1,978,075,500.00**	**1,978,075,500.00**	
	2	**22**	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**			**649,240,500.00**	**649,240,500.00**	**649,240,500.00**	**649,240,500.00**	**649,240,500.00**	**649,240,500.00**	
	2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			207,875,000.00	207,875,000.00	207,875,000.00	207,875,000.00	207,875,000.00	207,875,000.00	

	2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	*Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan*	*Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan*	207,875,000.00	207,875,000.00	207,875,000.00	207,875,000.00	207,875,000.00	207,875,000.00	
	2	22	02	2.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	*Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan*	*Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			441,365,500.00	441,365,500.00	441,365,500.00	441,365,500.00	441,365,500.00	441,365,500.00	
	2	22	02	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	*Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan*	*Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan*	405,022,000.00	405,022,000.00	405,022,000.00	405,022,000.00	405,022,000.00	405,022,000.00	

								Pemanfaatan	*Pemanfaatan*						
	2	22	02	2.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	*Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional*	*Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional*	36,343,500.00	36,343,500.00	36,343,500.00	36,343,500.00	36,343,500.00	36,343,500.00	
	2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2	22	02	2.03	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	*Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina*	*Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina*							
	2	22	02	2.03	03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	*Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/ Difasilitasi*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/ Difasilitasi*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2	**22**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**			**152,743,000.00**	**152,743,000.00**	**152,743,000.00**	**152,743,000.00**	**152,743,000.00**	**152,743,000.00**	

	2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			152,743,000.00	152,743,000.00	152,743,000.00	152,743,000.00	152,743,000.00	152,743,000.00	
	2	22	03	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)*	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)*	152,743,000.00	152,743,000.00	152,743,000.00	152,743,000.00	152,743,000.00	152,743,000.00	
	2	22	04	2.01	02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi*	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2	22	03	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	*Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan*	*Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

							Kapasitasnya	*Kapasitasnya*							
	2	**22**	**4**			**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**			**276,730,700.00**	**276,730,700.00**	**276,730,700.00**	**276,730,700.00**	**276,730,700.00**	**276,730,700.00**	
	2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			276,730,700.00	276,730,700.00	276,730,700.00	276,730,700.00	276,730,700.00	276,730,700.00	
	2	22	04	2.01	01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	*Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan*	*Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan*	276,730,700.00	276,730,700.00	276,730,700.00	276,730,700.00	276,730,700.00	276,730,700.00	
	2	22	04	2.01	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2	22	04	2.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	*Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat*	*Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	2	**22**	**05**			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**			**437,921,500.00**	**437,921,500.00**	**437,921,500.00**	**437,921,500.00**	**437,921,500.00**	**437,921,500.00**	
	2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			284,770,000.00	284,770,000.00	284,770,000.00	284,770,000.00	284,770,000.00	284,770,000.00	
	2	22	05	2.01	1	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	*Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan*	*Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2	22	05	2.01	2	Penetapan Cagar Budaya	Penetapan Cagar Budaya	*Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan*	*Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan*	284,770,000.00	284,770,000.00	284,770,000.00	284,770,000.00	284,770,000.00	284,770,000.00	
	2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			153,151,500.00	153,151,500.00	153,151,500.00	153,151,500.00	153,151,500.00	153,151,500.00	
	2	22	05	2.02	01	Pelindungan Cagar Budaya	Pelindungan Cagar Budaya	*Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi*	*Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2	22	05	2.02	02	Pengembangan Cagar Budaya	Pengembangan Cagar Budaya	*Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan*	*Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan*	153,151,500.00	153,151,500.00	153,151,500.00	153,151,500.00	153,151,500.00	153,151,500.00	
	2	22	05	2.03		Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar									

						Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										
	2	22	05	2.03	01	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi*	*Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2	**22**	**6**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**			**461,439,800.00**	**461,439,800.00**	**461,439,800.00**	**461,439,800.00**	**461,439,800.00**	**461,439,800.00**	
	2	22	6	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota			461,439,800.00	461,439,800.00	461,439,800.00	461,439,800.00	461,439,800.00	461,439,800.00	
	2	22	06	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	*Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu*	*Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	2	22	06	2.01	03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	*Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum*	*Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2	22	06	2.01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	*Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara*	461,439,800.00	461,439,800.00	461,439,800.00	461,439,800.00	461,439,800.00	461,439,800.00	
	JUMLAH									**390,896,017,031.00**	**390,896,017,031.00**	**389,837,247,879.00**	**390,896,017,031.00**	**390,896,017,031.00**	**389,837,247,879.00**	

Takalar, Juli 2024

Mengetauhi,
Kepala Bappelitbangda
Kabupaten Takalar

(Drs. Achmad Rivai, M.Si)
NIP. 196810121989081001

Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan

(Darwis, S.Pd., MM.)
NIP. 19701201 199802 1 005

BAB IV
PENUTUP

Renja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan perubahan tahun 2024 di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2024 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024. Renja perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2024 masih mengacu kepada Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018-2024, yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan program dan kegiatan, serta telah mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja perubahan merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayan.

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini

Takalar, Juli 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Takalar,

Darwis, S.Pd., MM.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP.197012011998021005